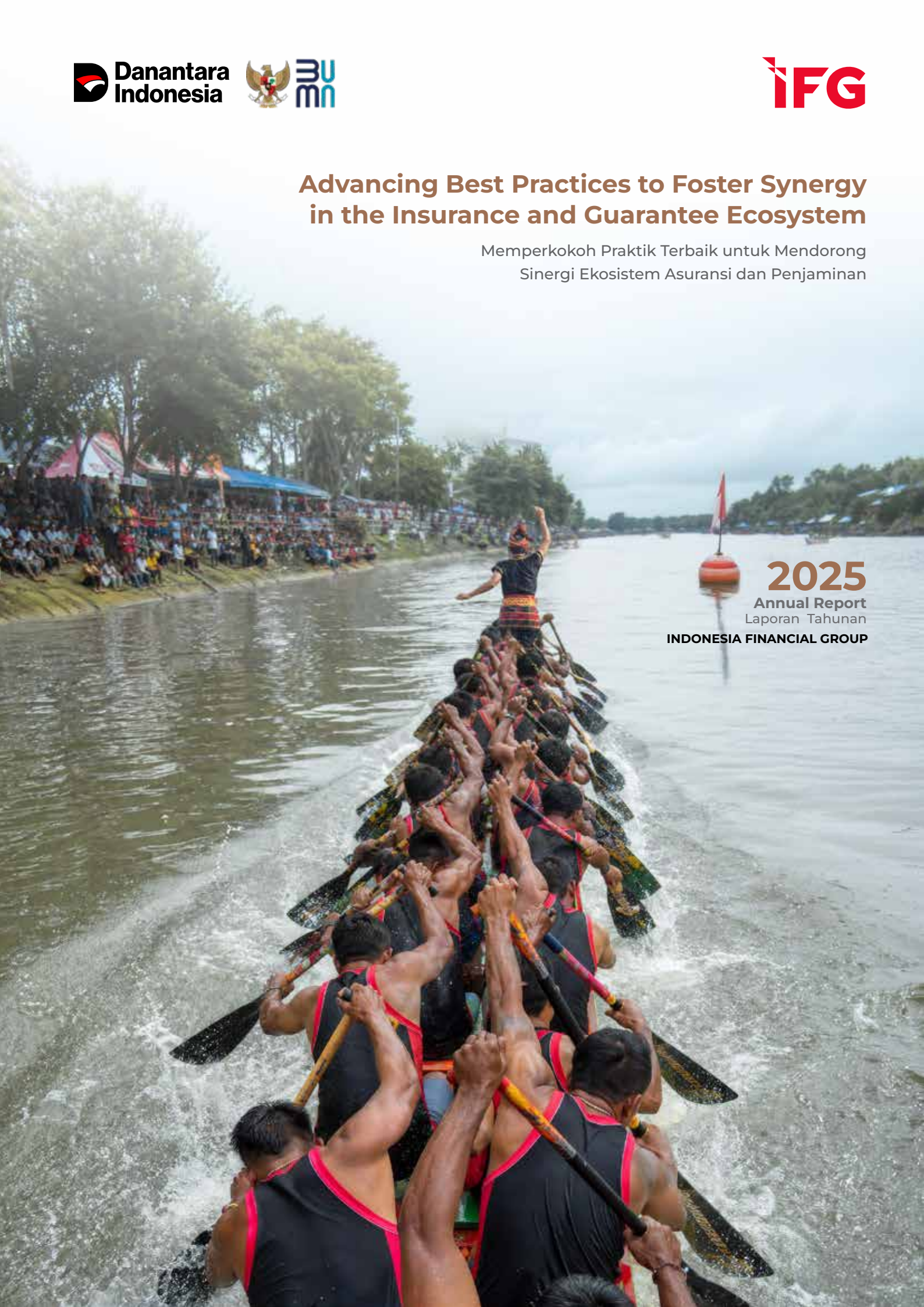
Advancing Best Practices to Foster Synergy in the Insurance and Guarantee Ecosystem

Memperkokoh Praktik Terbaik untuk Mendorong Sinergi Ekosistem Asuransi dan Penjaminan



2025

Annual Report

Laporan Tahunan

INDONESIA FINANCIAL GROUP

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2025
ABOUT THE 2025 ANNUAL REPORT

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) tahun buku 2025 dengan tema **"Memperkokoh Praktik Terbaik Untuk Mendorong Sinergi Ekosistem Asuransi Dan Penjaminan/Advancing Best Practices to Foster Synergy in the Insurance and Guarantee Ecosystem"**. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis IFG sepanjang 2025 serta masa depan keberlanjutan usaha.

Laporan Tahunan IFG 2025 diterbitkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dalam lingkup internal kepada pemegang saham serta para pemangku kepentingan dan otoritas terkait. Laporan Tahunan ini menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar AS" atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai IFG yang menjalankan usaha di bidang keuangan khususnya asuransi, penjaminan, dan investasi. Adakalanya kata "kami" dan "IFG" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut Indonesia Financial Group secara umum.

Welcome to the 2025 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), or Indonesia Financial Group (IFG), titled **"Advancing Best Practices to Foster Synergy in the Insurance and Guarantee Ecosystem"**. The theme was selected based on a comprehensive analysis of IFG's business performance and developments throughout 2025, as well as the Company's long-term business sustainability outlook.

The 2025 IFG Annual Report is published to enhance information transparency for shareholders, stakeholders, and relevant authorities. This Annual Report serves as a comprehensive source of information documenting the Company's performance throughout the year.

Mention of the currency unit "Rupiah" or "IDR" in this Annual Report refer to the official currency of the Republic of Indonesia, while "U.S. Dollar" or "USD" refer to the official currency of the United States of America. Unless otherwise stated, all financial information presented in this Annual Report is expressed in Indonesian Rupiah and has been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Throughout this Annual Report, the term "Company" refers to IFG, which operates in the financial services sector, particularly in insurance, guarantee, and investment businesses. Occasionally, the terms "we," "us," "our," and "IFG" are also used interchangeably to refer to Indonesia Financial Group.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Indonesia Financial Group, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Indonesia Financial Group serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Indonesia Financial Group.

This annual report contains statements regarding the financial position, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of Indonesia Financial Group, which are classified as forward-looking statements in accordance with applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements involve risks and uncertainties and may cause actual results to differ materially from those reported.

The forward-looking statements in this Annual Report are based on various assumptions regarding the current and future conditions of Indonesia Financial Group and the business environment in which the Company operates. The statements contained in this Annual Report are not guarantees of future performance, as actual results in the future may differ due to factors beyond the control of Indonesia Financial Group

SEKAPUR SIRIH
FOREWORD

Memperkokoh Praktik Terbaik untuk Mendorong Sinergi Ekosistem Asuransi dan Penjaminan

Advancing Best Practices to Foster Synergy in the Insurance and Guarantee Ecosystem



Memasuki tahun 2025, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG semakin memantapkan arah transformasi melalui penguatan kapabilitas organisasi dan penyelarasan strategi jangka panjang guna mewujudkan visi sebagai *National Champion* pada tahun 2030. Berlandaskan kerangka S.T.A.R.S. (*Solidified, Turbocharged, Acknowledged, Recognized, Shine*), Perseroan terus membangun organisasi yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing melalui implementasi *Strategy House* RJPP Konsolidasi 2025–2029 sebagai pedoman dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi tersebut diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu *Strengthen Foundation*, *Accelerate Growth*, dan *Drive Excellence*, yang saling terintegrasi dalam memperkuat daya saing Perseroan. Penguatan fondasi organisasi menjadi prioritas melalui penerapan praktik terbaik (*best practices*) pada aspek tata kelola perusahaan, manajemen risiko, transformasi digital, serta pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan inovasi. Langkah tersebut menjadi landasan penting untuk meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat ketahanan organisasi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan arah strategis tersebut, tema **"Memperkokoh Praktik Terbaik untuk Mendorong Sinergi Ekosistem Asuransi dan Penjaminan"** merepresentasikan komitmen IFG dalam membangun ekosistem asuransi dan penjaminan yang semakin terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan. Melalui standardisasi praktik terbaik di seluruh entitas grup, optimalisasi sinergi, serta penguatan kapabilitas kelembagaan, Perseroan berupaya menghadirkan solusi perlindungan yang semakin komprehensif, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dengan fondasi yang semakin kokoh dan sinergi yang semakin kuat, IFG optimistis mampu mempercepat pencapaian visi jangka panjang sekaligus memperkuat perannya sebagai pilar utama ekosistem asuransi dan penjaminan Indonesia.

As it entered 2025, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), or IFG, further strengthened its transformation agenda by enhancing organizational capabilities and aligning its long-term strategy to realize its vision of becoming a National Champion by 2030. Guided by the S.T.A.R.S. framework (Solidified, Turbocharged, Acknowledged, Recognized, and Shine), the Company continued to build a resilient, agile, and competitive organization through the implementation of the 2025–2029 Consolidated Long-Term Corporate Plan (RJPP) Strategy House, which serves as the strategic framework for achieving sustainable growth.

This strategy is implemented through three integrated strategic pillars namely Strengthen Foundation, Accelerate Growth, and Drive Excellence that collectively reinforce the Company's competitiveness. Strengthening the organizational foundation remains a key priority through the adoption of best practices in corporate governance, risk management, digital transformation, and the cultivation of a performance-driven and innovation-driven corporate culture. These initiatives provide a solid foundation for enhancing operational effectiveness, strengthening organizational resilience, and creating sustainable value for all stakeholders.

In line with this strategic direction, the theme **"Advancing Best Practices to Foster Synergy in the Insurance and Guarantee Ecosystem"** reflects IFG's commitment to building a more integrated, collaborative, and sustainable insurance and guarantee ecosystem. Through the standardization of best practices across the Group, the optimization of synergies, and the enhancement of institutional capabilities, the Company seeks to deliver more comprehensive protection solutions, strengthen stakeholder confidence, and make meaningful contributions to Indonesia's economic resilience. With a stronger foundation and more comprehensive collaboration across the Group, IFG is confident in its ability to accelerate the achievement of its long-term vision while reinforcing its role as a leading pillar of Indonesia's insurance and guarantee ecosystem.



KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2024





Advancing through Challenges for the Future
Melangkah Maju di Tengah Tantangan untuk Masa Depan

IFG senantiasa menunjukkan performa yang adaptif dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis secara konsisten di seluruh lini bisnis. Kinerja keuangan tahun 2024 tetap terjaga melalui langkah-langkah perbaikan fundamental, pengembangan kapabilitas di luar mandat Pemerintah, serta penciptaan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat luas. Selain itu, penguatan sinergi antar anggota *holding* serta kolaborasi dalam ekosistem BUMN terus didorong untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Komitmen terhadap tata kelola yang baik, manajemen risiko yang andal, serta peningkatan kapabilitas operasional menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi jangka panjang IFG. Dengan fondasi yang kuat, IFG optimistis dapat terus melangkah maju melewati tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

IFG continues to demonstrate adaptive performance in consistently implementing various strategic initiatives across all business lines. Financial performance in 2024 was maintained through fundamental improvements, the development of capabilities beyond the Government's mandate, and the creation of added value for customers and the wider community. In addition, the strengthening of synergies between holding company members and collaboration within the SOE ecosystem will continue to be encouraged to support sustainable growth. Commitment to good governance, reliable risk management, and operational capability enhancement remain the cornerstones in realizing IFG's long-term vision. With a strong foundation, IFG is optimistic about continuing to move forward through challenges and creating a better future for all stakeholders.



2023



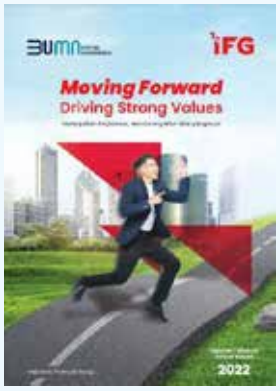
Strengthening Foundation to Drive Performance

Penguatan Fundamental Menggerakkan Kinerja

Tahun 2023 menandai tiga tahun perjalanan IFG sebagai *holding* asuransi, penjaminan, dan investasi. Sejak penetapan tersebut, IFG sebagai *strategic investment holding (non-operating)* telah melakukan berbagai upaya penguatan fungsi *holding* secara fundamental, yang di dalamnya mencakup restrukturisasi portofolio, restrukturisasi model bisnis, penguatan fokus bisnis (*sharpen our focus of business*), serta peningkatan daya saing bisnis (*enhance our competitiveness*). IFG juga terus berkomitmen memperkuat fondasi *holding* melalui peningkatan tata kelola, manajemen risiko, sumber daya manusia serta kapabilitas bisnis dan operasional, memastikan keberlanjutan dan ketangguhan perusahaan untuk masa depan.

The year 2023 marked three years of IFG's journey as an insurance, guarantee, and investment holding company. Since its establishment, IFG as a strategic investment holding (non-operating) company has made various efforts to strengthen its fundamental holding functions, including portfolio restructuring, business model restructuring, sharpen our focus of business, and enhancing business competitiveness. IFG remains committed to strengthening the holding company's foundation through improved governance, risk management, human capital, and business and operational capabilities, ensuring the sustainability and resilience of the company for the future.

2022



Moving Forward, Driving Strong Values

Melanjutkan Perjalanan, Mendorong Nilai-Nilai yang Kuat

Sebagai *Holding* BUMN yang bergerak di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, pada tahun 2022 ini Indonesia Financial Group (IFG) melanjutkan perjalanannya bersama-sama dengan 10 (sepuluh) anak perusahaan dalam mendorong nilai-nilai bisnis yang lebih kuat melalui penguatan dan penyelamatan industri asuransi, penjaminan, dan investasi, perbaikan dan membangun *best practice* industri asuransi, penjaminan, dan investasi di Indonesia, serta pengembangan industri asuransi, penjaminan, dan investasi di Indonesia. Dengan ini, IFG berkomitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

As an SOE Holding engaged in insurance, guarantee and investment, in 2022 Indonesia Financial Group (IFG) continues its journey together with 10 (ten) subsidiaries in encouraging stronger business values through strengthening and saving the insurance, guarantee and investment industry, improving and building best practices in the insurance, guarantee and investment industry in Indonesia, as well as developing the insurance, guarantee and investment industry in Indonesia. Therefore, IFG is strongly committed in realizing healthier and more sustainable business management.



PENCAPAIAN 2025
2025 ACHIEVEMENT

KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE

Aset
Assets

Rp 131,14 Triliun
IDR 131.14 Trillion

Ekuitas
Equity

Rp 42,04 Triliun
IDR 42.04 Trillion

Hasil Jasa Asuransi
Insurance Service Result

Rp 2,86 Triliun
IDR 2.86 Trillion

Hasil Kegiatan Penjaminan
Results of Guarantee Activities

Rp 5,15 Triliun
IDR 5.15 Trillion

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year

Rp 5,51 Triliun
IDR 5.51 Trillion

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Total Comprehensive Income for the Year

Rp 6,22 Triliun
IDR 6.22 Trillion



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Pilar Sosial
Social Pillar

Rp 8,32 Miliar
IDR 8.32 Billion

Pilar Ekonomi
Economic Pillar

Rp 24,93 Miliar
IDR 24.93 Billion

Pilar Lingkungan
Environmental Pillar

Rp 4,31 Miliar
IDR 4.31 Billion

Pilar Hukum dan Tata Kelola
Law and Governance Pillar

Rp 1,41 Miliar
IDR 1.41 Billion

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL



Pelatihan *Softskill*
Softskill Training

7.724,5 Jam
7,724.5 Hours

Pelatihan Teknikal
Technical Training

17.164 Jam
17,164 Hours

Seiring dengan dinamika bisnis yang terus berkembang, Perusahaan berkomitmen memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas.

As business dynamics continue to evolve, the Company is committed to ensuring the availability of competent and qualified human capital.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

2	TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2025 ABOUT THE 2025 ANNUAL REPORT
3	SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMERS AND LIMITATION OF LIABILITY
4	SEKAPUR SIRIH FOREWORD
6	KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY
8	PENCAPAIAN 2025 2025 ACHIEVEMENT
10	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENT
12	**IKHTISAR KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHTS**
14	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING HIGHLIGHTS OF IMPORTANT FINANCIAL DATA
20	IKHTISAR SAHAM SHARE HIGHLIGHTS
21	INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI INFORMATION ON BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS
21	INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA INFORMATION ON OTHER SOURCES OF FUNDING
22	PERISTIWA PENTING EVENT HIGHLIGHTS
26	**LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT**
28	LAPORAN DEWAN KOMISARIS REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
42	LAPORAN DIREKSI REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
56	PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN RESPONSIBILITY STATEMENT OF ANNUAL REPORT
58	**PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE**
60	INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY
62	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY
66	JEJAK LANGKAH MILESTONES
68	MAKNA LOGO PERUSAHAAN MEANING OF COMPANY'S LOGO
69	BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA LINE OF BUSINESS AS WELL AS PRODUCTS AND SERVICES
72	JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI BUSINESS NETWORK AND OPERATIONAL AREA
74	VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE
76	STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE
80	PROFIL DEWAN KOMISARIS PROFILES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
87	PROFIL DIREKSI PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS
93	PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICERS
96	DEMOGRAFI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT
104	STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDER STRUCTURE AND COMPOSITION
106	DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN KERJA SAMA OPERASI LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND JOINT OPERATIONS
130	ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, JARINGAN KAWASAN, SERTA INFORMASI TENTANG KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES, REGIONAL NETWORKS, AND INFORMATION ABOUT BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES
131	STRUKTUR GROUP IFG GROUP STRUCTURE OF IFG
132	KEANGGOTAAN ASOSIASI MEMBERSHIP IN ASSOCIATION
133	KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING OF SHARES
133	KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND REGISTRATION OF OTHER SECURITIES
134	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
135	INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE
137	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS
138	**FUNGSI PENUNJANG BISNIS BUSINESS SUPPORTING FUNCTION**
140	SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN CAPITAL
158	**ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS**
160	TINJAUAN MAKROEKONOMI MACROECONOMIC OVERVIEW
177	TINJAUAN SEGMEN INDUSTRI INDUSTRY SEGMENT OVERVIEW
191	RENCANA STRATEGIS 2025 2025 STRATEGIC PLAN
195	ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT
208	TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT
236	TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW
244	KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG ABILITY TO PAY PAYABLES AND COLLECTABILITY LEVEL OF RECEIVABLES
245	LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA TAHUN 2025 REPORT ON THE USE OF STATE EQUITY PARTICIPATION FUNDS FOR THE YEAR 2025
254	STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE
255	REALISASI INVESTASI BARANG MODAL CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION

256 INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
INFORMATION AND MATERIAL FACTS THAT OCCURRED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

258 PERNYATAAN TENTANG PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN SECARA TERINTEGRASI
STATEMENT ON THE ISSUANCE OF INTEGRATED ANNUAL REPORT

259 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

260 PROYEKSI TAHUN 2026
2026 PROJECTIONS

261 ASPEK PERPAJAKAN
TAXATION ASPECTS

261 INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)
INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

262 INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
INFORMATION REGARDING THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

262 INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL
MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

263 INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

266 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN
CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

291 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
CHANGES IN ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

295 TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

296 INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

298 PROSPEK USAHA TAHUN 2026
BUSINESS PROSPECT IN 2026

302 TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

304 PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

313 PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

316 STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
STRUCTURE AND MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

319 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

326 DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

352 KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

354 DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

388 PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

399 RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

422 ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

469 ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

508 AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK
EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANTS

511 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

514 MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

537 PERKARA PENTING
IMPORTANT CASES

561 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

564 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

580 KODE ETIK PERUSAHAAN
COMPANY'S CODE OF CONDUCT

587 KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

588 KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL POLICY

590 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
POLICY ON THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

591 KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK
POLICY ON FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

592 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

594 WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

599 TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE
TRANSPARENCY IN BAD GOVERNANCE PRACTICES

600 PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED GOVERNANCE

616 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

617 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

620 PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM TJSL DI PERUSAHAAN
PRINCIPLES AND LEGAL BASIS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE COMPANY

621 STRUKTUR ORGANISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

622 LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
THE SCOPE OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

624 REALISASI DANA DAN KEGIATAN TJSL 2025
FUND REALIZATION AND TJSL ACTIVITY OF 2025

628 PROGRAM UNGGULAN
FLAGSHIP PROGRAM

642 LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT

IKHTISAR KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

01



Total aset IFG konsolidasian pada 31 Desember 2025 sebesar Rp131,14 triliun, terjadi peningkatan sebesar Rp1,03 triliun atau 1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IFG's consolidated total assets as of December 31, 2025, amounted to Rp131.14 trillion, an increase of Rp1.03 trillion, or 1%, compared to the previous year.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
HIGHLIGHTS OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

IKHTISAR LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

HIGHLIGHTS OF CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (In billion Rupiah, unless stated otherwise)

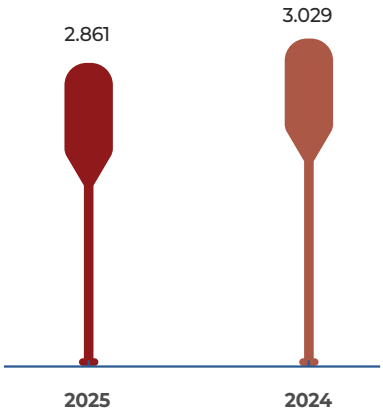
Uraian Description	**2025**	**2024***	**YoY 2025-2024 (%)**
Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Result	**2.861**	3.029	-5,55%
Hasil Kegiatan Penjaminan Guarantee Service Result	**5.150**	3.354	53,55%
Hasil Investasi Investment Result	**6.836**	5.736	19,18%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**6.184**	3.649	69,46%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	**5.507**	3.609	52,61%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak Other Comprehensive Income (Loss) for the Year, Net of Tax	**712**	(668)	-206,66%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**6.220**	2.941	111,51%
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit Attributable To:			
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	**5.361**	3.522	52,23%
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	**146**	87	68,23%
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	**6.076**	2.902	109,36%
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	**144**	2.941	-95,12%

*) Disajikan kembali
*) Restated

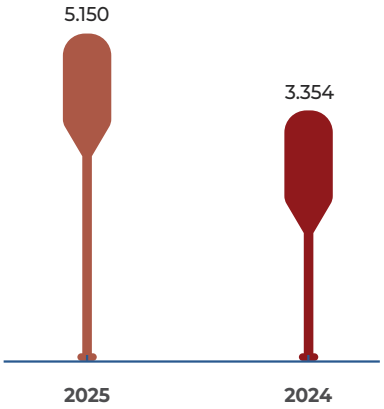
Grafik Ikhtisar Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Charts of Highlights of Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

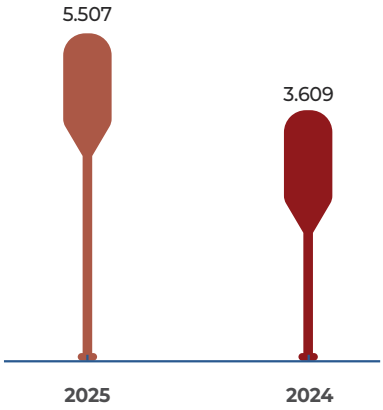
Hasil Jasa Asuransi (Rp miliar)
Insurance Service Result (IDR Billion)



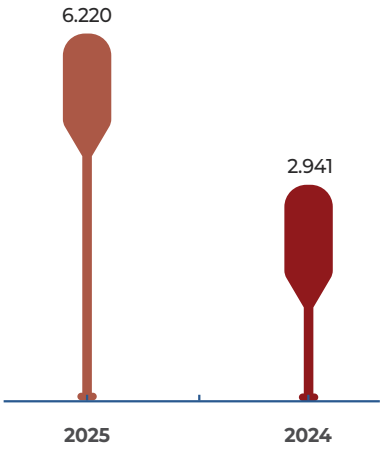
Hasil Kegiatan Penjaminan (Rp miliar)
Guarantee Service Result (IDR Billion)



Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp miliar)
Net Profit for the Year (IDR Billion)



Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Rp miliar)
Comprehensive Income for the Year (IDR Billion)



Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2022-2024 (Periode Sebelum Penerapan PSAK 117)

Consolidated Statements of Income and Other Comprehensive Income for 2022–2024 (Period Prior to the Adoption of PSAK 117)

Uraian Description	**2024**	**2023***	**2022***
Pendapatan *Underwriting* Underwriting income	28.297	28.088	27.461
Beban *Underwriting* Underwriting expenses	26.529	21.873	19.726
Hasil *Underwriting* Underwriting results	1.768	6.215	7.735
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) For The Year	(387)	2.339	4.119
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: Income (Loss) for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas *Holding* Owner of Holding entity	(445)	2.239	4.049
Kepentingan Nonpengendali Non-controlling interest	57	100	71
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Income (Loss)	(1.144)	2.578	3.095
Laba (Rugi) Komprehensif yang Diatribusikan kepada: Comprehensive Income (Loss) Attributable to:			
Pemilik Entitas *Holding* Owner of Holding entity	(1.201)	2.478	3.027
Kepentingan Nonpengendali Non-controlling interest	57	100	68
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Loss) for the Year	(1.144)	2.578	3.095

*) Disajikan kembali
*) Restated

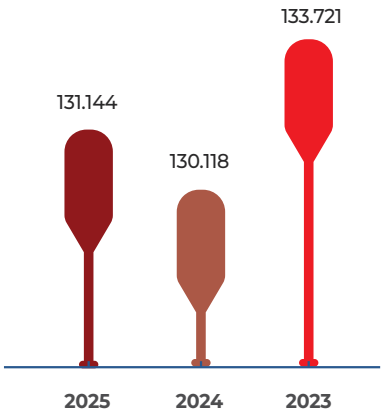
IKHTISAR POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

HIGHLIGHTS OF CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

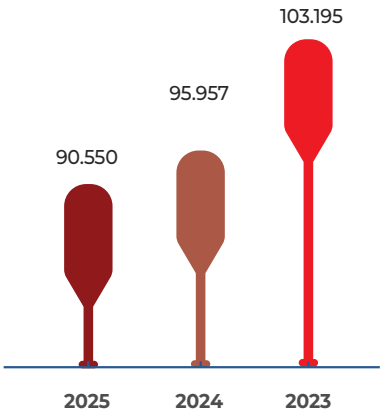
Uraian Description	**2025**	**2024***	**2023***	**YoY 2025-2024 (%)**
Jumlah Aset Total Asset	**131.144**	130.118	133.721	0,79%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**90.550**	95.957	103.195	-5,64%
Dana *Tabarru* Tabarru Funds	**(1.448)**	(1.762)	(1.787)	-17,82%
Ekuitas yang Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:				
Pemilik Entitas *Holding* Owner of Holding	**40.808**	34.779	31.135	17,34%
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interest	**1.233**	1.144	1.178	7,79%
Jumlah Ekuitas Total Equity	**42.042**	**35.923**	**32.313**	**17,03%**
Jumlah Liabilitas, Dana *Tabarru* dan Ekuitas Total Liabilities, Tabarru Funds and Equity	**131.144**	**130.118**	**133.721**	**0,79%**

*) Disajikan kembali
*) Restated

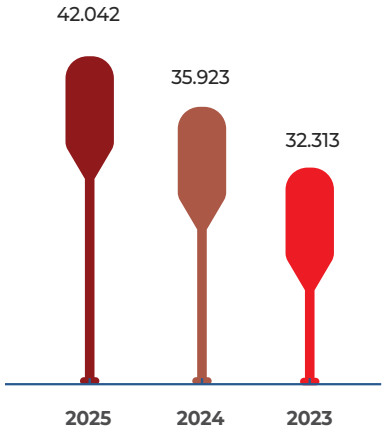
Jumlah Aset (Rp miliar)
Total Asset (IDR Billion)



Jumlah Liabilitas (Rp miliar)
Total Liabilities (IDR Billion)



Jumlah Ekuitas
(Rp miliar)
Total Equity
(IDR Billion)



Ikhtisar Arus Kas Konsolidasian

Highlights of Consolidated Cash Flow

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (In billion Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	**2025**	**2024***	**2023***	**YoY 2025-2024 (%)**
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (for) Operating Activities	**(5.078)**	(6.931)	(58)	-26,73%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (for) Investment Activities	**4.427**	6.296	(1.139)	-29,69%
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (for) Financing Activities	**(1.576)**	1.341	1.214	-217,52%
Kas dan Setara Kas di Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**15.229**	14.523	15.042	4,86%
Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at The End of the Year	**13.0165**	15.229	14.523	754,72%

*) Disajikan Kembali
*) Restated

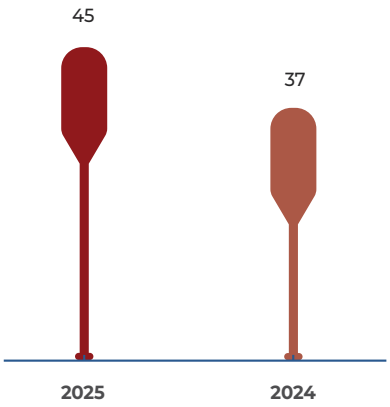
Ikhtisar Rasio-Rasio Keuangan

Highlights of Financial Ratios

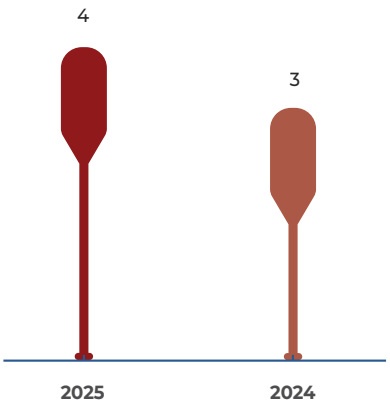
Uraian Description	**2025**	**2024**
Net Income Margin (NIM)	**45**	37
Return on Asset (ROA)	**4**	3
Return on Equity (ROE)	**13**	10
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	**215**	267
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Liability to Total Assets Ratio	**69**	74
Rasio Lancar Current Ratio	**228**	224

Grafik Ikhtisar Rasio-Rasio Keuangan
Chart of Highlights of Financial Ratios

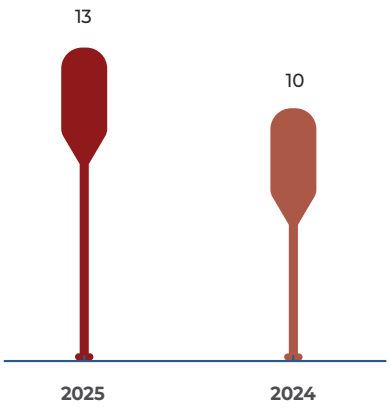
NIM (%)



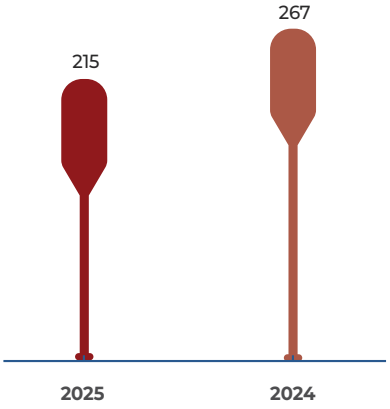
ROA (%)



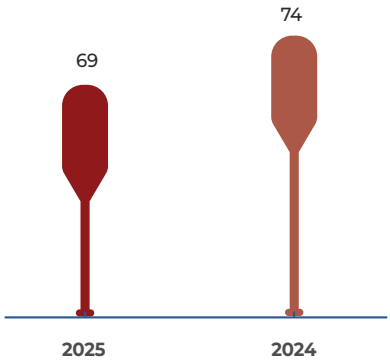
ROE (%)



Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas
Liability to Equity Ratio
(%)



Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset
Liability to Total Assets Ratio
(%)



IKHTISAR SAHAM
SHARE HIGHLIGHTS

JUMLAH SAHAM

Jumlah saham PT Indonesia Financial Group (IFG) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 93.719.537 lembar saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Danantara Indonesia (Persero). Sehubungan dengan struktur kepemilikan tersebut, Perusahaan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh publik, manajemen, maupun karyawan.

INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan tidak memiliki saham yang diperdagangkan kepada publik di sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, informasi perdagangan saham, termasuk kapitalisasi pasar, pergerakan harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan di bursa saham tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Selaras dengan hal tersebut, data grafik harga penutupan dan volume perdagangan saham per triwulan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, termasuk informasi penghentian sementara perdagangan saham, juga tidak dapat disajikan.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

Sepanjang tahun 2025, IFG telah melaksanakan sejumlah aksi korporasi sebagai bagian dari strategi penguatan struktur permodalan, peningkatan kapasitas usaha, serta optimalisasi portofolio investasi Perusahaan. Pelaksanaan aksi korporasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta prinsip kehati-hatian guna menjaga kesehatan keuangan Perusahaan.

Dalam rangka memperkuat permodalan, IFG telah merealisasikan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk meningkatkan kapasitas usaha, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh entitas anak, yaitu Askrindo dan Jamkrindo. Selain itu, IFG juga telah melaksanakan kegiatan melakukan aktivitas *fundraising* melalui penambahan utang dalam bentuk penerbitan obligasi dan/atau pinjaman lainnya, yang ditujukan untuk optimalisasi struktur keuangan Perusahaan, termasuk *refinancing* pinjaman serta pemenuhan kebutuhan pendanaan operasional.

NUMBER OF SHARES

As of December 31, 2025, PT Indonesia Financial Group (IFG) had 93,719,537 shares with full ownership by the Government of the Republic of Indonesia through PT Danantara Indonesia (Persero). Accordingly, the Company had no shares owned by the public, management, or employees.

INFORMATION ON SHARE TRADING AND PUBLIC SHARE OWNERSHIP

The Company has not conducted an Initial Public Offering (IPO) and had no publicly traded shares throughout 2025. Accordingly, information on share trading, including market capitalization, highest, lowest, and closing share prices, as well as stock exchange trading volume, is not presented in this Annual Report. Accordingly, quarterly closing share price and trading volume data for the past two fiscal years, including information on any trading suspensions, are not presented in this Annual Report.

INFORMATION ON CORPORATE ACTIONS

Throughout 2025, IFG conducted several corporate actions as part of its strategy to strengthen its capital structure, enhance business capacity, and optimize the Company's investment portfolio. These corporate actions were implemented in accordance with the prevailing laws and regulations, the principles of good corporate governance, and prudent business practices to maintain the Company's financial soundness.

To strengthen its capital base, IFG realized a capital injection through a State Equity Participation (PMN) to enhance its business capacity, particularly in supporting the MSME empowerment programs implemented by its subsidiaries, Askrindo and Jamkrindo. In addition, IFG organized fundraising activities through additional borrowings in the form of bond issuances and/or other financing facilities to optimize the Company's capital structure, including loan refinancing and the fulfillment of operational funding requirements.

Pada sisi investasi strategis, IFG telah menyelesaikan akuisisi sebagian saham PT TWC pada PT BTIM sebagai upaya optimalisasi potensi kepemilikan. IFG juga telah melakukan investasi kepemilikan aset melalui pengalihan kepemilikan Aset Citos, yang menjadikan IFG sebagai pemilik tunggal atas aset tersebut. Seluruh aksi korporasi yang telah dilaksanakan tersebut memberikan kontribusi dalam memperkuat struktur keuangan, meningkatkan fleksibilitas pendanaan, serta mendukung penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

As for strategic investment aspect, IFG completed the acquisition of a portion of PT TWC's shares in PT BTIM as part of its efforts to optimize its ownership interest. IFG also completed an asset ownership investment through the transfer of ownership of the Citos Asset, making IFG the sole owner of the asset. These corporate actions contributed to strengthening the Company's financial structure, enhancing funding flexibility, and supporting the creation of sustainable value for shareholders.

DIVIDEN SAHAM

IFG tidak menetapkan pembagian dividen atas hasil usaha tahun buku 2024 pada tahun 2025. Keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Perusahaan untuk memperkuat struktur keuangan serta mengoptimalkan kinerja operasional, guna mendukung penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

SHARE DIVIDENDS

IFG did not declare or distribute dividends from its 2024 fiscal year earnings during 2025. This decision was part of the Company's policy to strengthen its financial structure and optimize operational performance in support of creating sustainable long-term value for shareholders.

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMATION ON BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS

IFG tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya sepanjang tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan tidak memiliki informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar *(outstanding)*, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk, untuk disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

IFG did not list any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities during 2025. Accordingly, the Company has no information regarding outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds, including their interest or profit-sharing rates, maturity dates, or credit ratings, to present in this Annual Report.

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON OTHER SOURCES OF FUNDING

IFG akan menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun guna memenuhi kecukupan permodalan dalam rangka menjaga tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya untuk mendukung pelaksanaan program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh entitas anak, yaitu Askrindo dan Jamkrindo. Aksi korporasi ini didasarkan pada hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang diselenggarakan pada 10 Juli 2024.

IFG will receive a State Equity Participation (PMN) amounting to IDR 3 trillion to strengthen its capital adequacy and maintain the Company's financial soundness in accordance with applicable regulations, particularly to support the implementation of the People's Business Credit (KUR) guarantee program through its subsidiaries, Askrindo and Jamkrindo. This corporate action is based on the outcome of the hearing of Commission VI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) with PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, held on July 10, 2024.

PERISTIWA PENTING
EVENT HIGHLIGHTS

Januari | January



ODP IFG 2025 22 Januari 2025
ODP IFG 2025 on January 22, 2025

Februari | February



IFG Research Day 2025

Februari | February



Rakor TI dan *Affiliated Company* Tahun 2025
IT and Affiliated Companies Coordination Meeting in 2025

Maret | March



Mudik Bersama BUMN IFG Group 28 Maret 2025
Joint Homecoming with IFG Group State-Owned Enterprises, March 28, 2025

Mei | May



JOB FAIR 2025 IFG 22 Mei 2025
IFG's JOB FAIR 2025 on May 22, 2025

Mei | May



SKAI TALK IFG 22 Mei 2025
IFG's SKAI TALK on May 22, 2025

Juni | June



IAMI CONFERENCE 21-22 Juni 2025
IAMI CONFERENCE on June 21-22 2025

Juni | June



Penandatanganan Nota Kesepahaman IFG & Injourney 18 Juni 2025
Signing of the Memorandum of Understanding Between IFG and Injourney on June 18, 2025

Juli | July



31 Juli 2025
July 31, 2025

Penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Tanda Minat antar PT BPUI dengan PT Wijaya Karya (WIKA) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahaan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada 31 Juli 2025

Signing of the Letter of Intent Settlement Agreement between PT BPUI and PT Wijaya Karya (WIKA) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and PT Waskita Karya (Persero) Tbk on July 31, 2025

Agustus | August



Relawan Bakti BUMN Batch VIII IFG Group Acc
IFG Group Acc BUMN Volunteer Service Program, Batch VIII

September | September



11-13 September 2025
11-13 September 2025

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Dana PMN *on Site* di Kota Batu 11-13 September 2025

On-Site Monitoring and Evaluation of State Equity Participation (PMN) Fund Disbursement in Batu City, September 11–13, 2025

September | September



FORTUNE Indonesia 100 Gala 2025 12 September 2025
FORTUNE Indonesia 100 Gala 2025, September 12, 2025

September | September



TJSL Hari Kesehatan Gigi Nasional Senyum Inspiratif Anak Indonesia
CSR: National Dental Health Day—Inspiring Smiles of Indonesian Children

Oktober | October



IFG Bike for Charity

Oktober | October



Forum Strategi *Affiliated Company* 29 Oktober 2025
Affiliated Company Strategy Forum, October 29, 2025

Oktober | October



IGTC IPB

Oktober | October



Oktober 2025
October 2025

Signing Ceremony Strategic Partnership antara Jasindo dengan PT Bahana Sekuritas
Signing Ceremony for the Strategic Partnership Between Jasindo and PT Bahana Sekuritas

November | November



IFG Santunan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026
IFG National Heroes' Day Donation, November 10, 2026

November | November



27 November 2025
November 27, 2025

IFG *Goes to Campus* 2025 - Finplay Summit Kampus Binus
27 November 2025
IFG Goes to Campus 2025 - Finplay Summit at Binus University, November 27, 2025

November | November



IFG Synergy Day 2025

Desember | December



22 Desember 2025
22 Desember 2025

Executive Meeting Sosialisasi Konsep Baru Hukum Pidana Indonesia 22 Desember 2025
Executive Meeting to Present the New Concept of Indonesian Criminal Law, December 22, 2025

Desember | December



IFG *Strategic Vendor Gathering* 2025
IFG Strategic Vendor Gathering 2025

Desember | December



Desember 2025
December 2025

Penandatanganan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat antara PT Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dengan PT Asuransi Jasa Indonesia dalam rangka pengalihan Saham PT Asuransi Jasindo Syariah
Signing of a Conditional Share Purchase Agreement between PT Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and PT Asuransi Jasa Indonesia in connection with the transfer of shares in PT Asuransi Jasindo Syariah

Desember | December



Desember 2025
December 2025

Perjanjian Penggabungan Bersyarat oleh dan antara PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
Conditional Merger Agreement between PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, and PT Penjaminan Jamkrindo Syariah



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

02



Selain penguatan dari sisi keuangan dan akuntansi, perkembangan Perusahaan juga ditopang oleh langkah efisiensi internal dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang signifikan.
In addition to financial and accounting improvements, the Company's growth has also been supported by internal efficiency measures and significant increases in human resource productivity.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



NASRUDIN
Komisaris
Commissioner

SUMIYATI
Komisaris
Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun buku 2025 merupakan periode yang diwarnai oleh berbagai dinamika bisnis dan tantangan industri yang menuntut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) untuk terus memperkuat daya saing, meningkatkan ketahanan organisasi, serta menjaga konsistensi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan independen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang diambil Direksi selaras dengan kepentingan Perusahaan, arahan Pemegang Saham, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun pelaporan, Dewan Komisaris terus memberikan arahan dan masukan strategis kepada Direksi guna mendukung terciptanya pengelolaan perusahaan yang *prudent*, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan Perusahaan secara profesional dengan tetap menjaga keseimbangan antara pencapaian target usaha, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sejalan dengan itu, laporan keuangan Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) dan memperoleh opini Wajar Dalam Semua Hal yang Material, yang mencerminkan kualitas penyajian informasi keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun buku 2025, yang mencakup penilaian terhadap kinerja dan efektivitas kepemimpinan Direksi, pengawasan atas implementasi strategi korporasi, evaluasi terhadap prospek usaha Perusahaan, serta pandangan mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai fondasi dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERKAIT PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DI TAHUN 2025

Dewan Komisaris memandang bahwa perkembangan IFG sepanjang Tahun Buku 2025 menunjukkan arah yang positif dan mencerminkan meningkatnya ketahanan serta kapasitas Perusahaan dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan nasional. Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian akibat tingginya suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, tekanan geopolitik, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang relatif baik. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi, penjaminan, dan investasi, untuk tetap tumbuh, meskipun dihadapkan pada

Dear Honorable Shareholders and Stakeholders,

The Board of Commissioners believes that fiscal year 2025 was marked by various business dynamics and industry challenges that required PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), or Indonesia Financial Group (IFG), to continuously strengthen its competitiveness, enhance organizational resilience, and maintain consistency in implementing Good Corporate Governance (GCG). In this context, the Board of Commissioners actively and independently conducted its supervisory function to ensure that every strategic policy adopted by the Board of Directors was aligned with the interests of the Company, the directives of the Shareholder, and the prevailing laws and regulations.

Throughout the reporting year, the Board of Commissioners continued to provide strategic guidance and recommendations to the Board of Directors in support of prudent, accountable, and value-driven corporate management focused on creating long-term value. Based on the supervisory activities performed, the Board of Commissioners concluded that the Board of Directors managed the Company professionally while maintaining an appropriate balance between achieving business targets, managing risks, and adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG). In line with this, the Company's financial statements were audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accounting Firm (RSM) and received an opinion of Fair in All Material Respects, reflecting that the financial information was presented in accordance with the prevailing accounting standards.

Through this Annual Report, the Board of Commissioners presents its accountability for the execution of its supervisory responsibilities during fiscal year 2025. This includes its assessment of the performance and leadership effectiveness of the Board of Directors, supervisory of the implementation of the Company's corporate strategy, evaluation of the Company's business prospects, and views on the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as the foundation for sustainable growth and long-term value creation for all stakeholders.

BOARD OF COMMISSIONERS' OPINION ON THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2025

The Board of Commissioners believes that IFG's performance throughout fiscal year 2025 demonstrated positive momentum and reflected the Company's growing resilience and capacity to navigate the evolving dynamics of Indonesia's financial services industry. Amid continued uncertainty in the global economy driven by elevated interest rates, financial market volatility, geopolitical tensions, and slowing economic growth across various countries, Indonesia's economy continued to demonstrate relatively strong resilience. These conditions provided room for the financial services sector, including the insurance, guarantee, and investment industries, to continue growing despite heightened market risks, evolving regulatory

peningkatan risiko pasar, perubahan regulasi, serta tuntutan penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Dalam konteks tersebut, Perusahaan mampu menjaga stabilitas operasional dan mencatatkan peningkatan kinerja keuangan melalui penguatan fundamental bisnis, optimalisasi pengelolaan investasi, serta implementasi berbagai program transformasi strategis yang dijalankan secara berkelanjutan.

Dari sisi internal, Dewan Komisaris menilai bahwa capaian Perusahaan pada tahun 2025 merupakan hasil dari komitmen Direksi dan seluruh entitas IFG dalam melaksanakan transformasi bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efektivitas operasional, serta implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 mengenai kontrak asuransi. Implementasi PSAK 117 tidak hanya menjadi perubahan pada aspek pelaporan keuangan, namun juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas data, harmonisasi proses bisnis, penguatan sistem informasi, serta koordinasi antar entitas dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Dewan Komisaris juga memandang bahwa peningkatan laba bersih, pertumbuhan aset, penguatan struktur permodalan, serta pencapaian berbagai indikator kinerja utama menunjukkan bahwa strategi Perusahaan mulai menghasilkan nilai tambah yang nyata. Meskipun demikian, Dewan Komisaris mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut perlu dipandang secara komprehensif dan tidak hanya diukur dari besarnya laba yang dihasilkan. Perusahaan perlu terus meningkatkan *quality of earnings* melalui pertumbuhan bisnis yang sehat, peningkatan arus kas operasional, kualitas *underwriting* yang semakin baik, serta pengelolaan investasi yang *prudent* agar kinerja yang dicapai benar-benar mencerminkan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, peningkatan profitabilitas dapat didukung oleh fundamental bisnis yang semakin kuat dan tidak bergantung pada faktor-faktor yang bersifat nonberulang.

Di sisi lain, Dewan Komisaris menilai masih terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu menjadi perhatian Direksi. Beberapa entitas anak masih menghadapi tekanan terhadap profitabilitas, kecukupan permodalan, kualitas arus kas, maupun penyelesaian berbagai program restrukturisasi yang menjadi bagian dari transformasi IFG. Selain itu, peningkatan kompleksitas bisnis, perkembangan regulasi, digitalisasi industri jasa keuangan, serta meningkatnya ekspektasi regulator dan pemegang saham menuntut Perusahaan untuk terus memperkuat *Enterprise Risk Management*, *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR), tata kelola data (*data governance*), serta kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi yang berkelanjutan. Dewan Komisaris juga memandang bahwa percepatan pengisian jabatan strategis yang masih kosong di lingkungan Perusahaan dan entitas anak menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas pengambilan keputusan, kesinambungan kepemimpinan, dan percepatan pelaksanaan program transformasi.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa perkembangan Perusahaan sepanjang tahun 2025 berada pada jalur yang positif dan memberikan fondasi yang semakin

requirements, and increasing demands for stronger corporate governance and risk management. Given this context, the Company successfully maintained operational stability and delivered improved financial performance through stronger business fundamentals, optimized investment management, and the continuous implementation of various strategic transformation initiatives.

From an internal perspective, the Board of Commissioners believes that the Company's achievements in 2025 were attributable to the commitment of the Board of Directors and all IFG entities in executing business transformation initiatives, strengthening corporate governance, enhancing operational effectiveness, and implementing Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 117 on Insurance Contracts. The implementation of PSAK 117 represented not only a significant change in financial reporting but also an important milestone in improving data quality, harmonizing business processes, strengthening information systems, as well as enhancing coordination among entities in the preparation of the consolidated financial statements.

The Board of Commissioners also believes that the increase in net profit, asset growth, stronger capital structure, and the achievement of various key performance indicators demonstrate that the Company's transformation strategy has begun to deliver tangible value. Nevertheless, the Board of Commissioners emphasizes that these achievements should be viewed comprehensively and not measured solely by the level of profit generated. The Company should continue to enhance the quality of earnings through sustainable business growth, stronger operating cash flows, improved underwriting quality, and prudent investment management to ensure that its performance genuinely reflects long-term business sustainability. Accordingly, improvements in profitability should be supported by increasingly robust business fundamentals rather than by non-recurring factors.

On the other hand, the Board of Commissioners acknowledges that several strategic challenges continue to require the attention of the Board of Directors. Several subsidiaries continue to face challenges relating to profitability, capital adequacy, cash flow quality, and the completion of various restructuring programs that form part of IFG's transformation agenda. In addition, increasing business complexity, evolving regulations, the digitalization of the financial services industry, and rising expectations from regulators and shareholders require the Company to further strengthen its Enterprise Risk Management (ERM), Internal Control over Financial Reporting (ICOFR), data governance, and human capital readiness to support sustainable transformation. The Board of Commissioners also believes that accelerating the appointment of personnel to vacant strategic positions across the Company and its subsidiaries is essential to maintaining effective decision-making, leadership continuity, and the timely execution of transformation initiatives.

Overall, the Board of Commissioners believes that the Company's performance throughout 2025 remained on a positive trajectory and established an increasingly solid

kuat bagi pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang. Berbagai pencapaian yang telah diraih menunjukkan bahwa strategi transformasi yang dijalankan mulai memberikan hasil yang nyata, namun tetap memerlukan konsistensi pelaksanaan, disiplin tata kelola, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan inovasi, serta mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategis, Perusahaan akan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat posisinya sebagai *holding* BUMN sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menilai bahwa secara umum Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai kebijakan strategis yang diambil Direksi mampu menjaga keberlangsungan operasional Perusahaan, mendukung pelaksanaan agenda transformasi, serta mempertahankan kinerja Perusahaan di tengah dinamika industri jasa keuangan. Meskipun demikian, Dewan Komisaris berpandangan bahwa masih terdapat beberapa aspek pengelolaan yang perlu memperoleh perhatian lebih serius agar kualitas tata kelola dan efektivitas pengelolaan Perusahaan semakin meningkat.

Penilaian Dewan Komisaris didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, rapat komite di bawah Dewan Komisaris, evaluasi terhadap laporan manajemen, laporan keuangan, pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), hasil audit, implementasi program strategis, serta berbagai pembahasan mengenai pengelolaan risiko dan tata kelola Perusahaan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa kualitas proses pengambilan keputusan Direksi telah berjalan dengan baik, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan pada beberapa area prioritas.

Salah satu perhatian Dewan Komisaris adalah belum optimalnya pemenuhan data dan informasi yang diminta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam beberapa kesempatan, data pendukung yang diminta Dewan Komisaris belum dapat disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, sehingga memengaruhi efektivitas proses evaluasi terhadap berbagai kebijakan strategis Perusahaan. Dewan Komisaris memandang bahwa kualitas data, sistem pelaporan manajemen, dan koordinasi antar-unit perlu terus diperkuat agar proses pengambilan keputusan maupun fungsi pengawasan dapat didukung oleh informasi yang memadai dan andal.

foundation for its future growth. The achievements attained demonstrate that the Company's transformation strategy has begun to produce tangible results. However, its success will continue to depend on consistent execution, disciplined corporate governance, stronger risk management, and enhanced data-driven decision-making. The Board of Commissioners is confident that by maintaining prudent business practices, strengthening business fundamentals, fostering innovation, and accelerating the implementation of strategic initiatives, the Company will be able to enhance its competitiveness, reinforce its role as the State-Owned Enterprises holding company for the insurance, guarantee, and investment sectors, and create sustainable value for its Shareholder and all stakeholders.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' OPINION ON THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners assessed that, overall, the Board of Directors has fulfilled its responsibility for managing the Company in accordance with the authority granted under the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The strategic policies adopted by the Board of Directors have enabled the Company to maintain operational continuity, support the implementation of its transformation agenda, and sustain its performance amid the dynamic landscape of the financial services industry. Nevertheless, the Board of Commissioners concludes that several aspects of the Company's management require greater attention to further enhance the quality of corporate governance and the effectiveness of the Company's management.

The Board of Commissioners' assessment is based on the results of its ongoing supervisory activities, including joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, meetings of committees under the Board of Commissioners, evaluations of management reports, financial statements, the implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), audit results, the execution of strategic initiatives, and various discussions concerning the Company's risk management and corporate governance. Based on the results of these supervisory activities, the Board of Commissioners believes that the quality of the Board of Directors' decision-making process has been satisfactory. However, the effectiveness of its implementation should continue to be strengthened in several priority areas.

One of the Board of Commissioners' primary concerns is that the provision of data and information requested to support its supervisory function has not yet been fully optimized. On several occasions, the supporting data requested by the Board of Commissioners was not provided in a complete, accurate, and timely manner, thereby affecting the effectiveness of the evaluation process for various strategic policies of the Company. The Board of Commissioners considers that the quality of data, management reporting systems, and inter-unit coordination should continue to be strengthened to ensure that both decision-making and supervisory activities are supported by adequate and reliable information.

Selain itu, Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan fungsi audit internal masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi Perusahaan. Audit internal diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan rencana audit tahunan, tetapi juga semakin proaktif dalam mengidentifikasi risiko-risiko strategis, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. Penguatan fungsi audit internal menjadi semakin penting mengingat kompleksitas kegiatan usaha dan agenda transformasi yang sedang dijalankan Perusahaan.

Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap proses penyelesaian Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2025 yang masih belum sepenuhnya memenuhi target waktu yang telah direncanakan. Keterlambatan penyelesaiannya menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam koordinasi proses konsolidasi, kesiapan data, kualitas dokumentasi pendukung, serta pengelolaan penyelesaian audit di tingkat Perusahaan maupun entitas anak. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akar penyebab keterlambatan tersebut agar proses penyusunan laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat waktu.

Selanjutnya, Dewan Komisaris berpandangan bahwa koordinasi dan pengawasan Direksi terhadap entitas anak masih perlu diperkuat, khususnya dalam memastikan keselarasan implementasi strategi, percepatan penyelesaian isu-isu strategis, konsistensi penerapan tata kelola, serta peningkatan kualitas pelaporan di seluruh IFG. Mengingat Perusahaan berperan sebagai *holding*, efektivitas koordinasi dengan entitas anak merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian target grup secara keseluruhan. Oleh karena itu, Direksi diharapkan semakin meningkatkan intensitas monitoring, pembinaan, dan evaluasi terhadap kinerja entitas anak, terutama atas perusahaan yang masih menghadapi tantangan pada aspek profitabilitas, permodalan, maupun implementasi program transformasi.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan selama Tahun Buku 2025. Namun demikian, Dewan Komisaris mengharapkan agar berbagai catatan perbaikan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, efektivitas fungsi pengendalian, serta penguatan peran Perusahaan sebagai *holding* BUMN sektor asuransi, penjaminan, dan investasi. Dengan penyempurnaan pada aspek-aspek tersebut, Dewan Komisaris meyakini bahwa kualitas pengelolaan Perusahaan akan semakin meningkat dan mampu mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing.

In addition, the Board of Commissioners believes that the internal audit function should be further strengthened to provide greater value to the Company. The internal audit function is expected not only to focus on the completion of the annual audit plan but also to take a more proactive role in identifying strategic risks, evaluating the effectiveness of internal controls, and ensuring that corrective actions arising from audit findings are implemented in a timely manner. Strengthening the internal audit function has become increasingly important in light of the growing complexity of the Company's business activities and the transformation initiatives currently underway.

The Board of Commissioners also notes that the completion of the Company's audited financial statements for fiscal year 2025 did not fully meet the planned timeline. The delay indicates that there remains room for improvement in the coordination of the consolidation process, data readiness, the quality of supporting documentation, and the management of the audit completion process at both the Company and subsidiary levels. Accordingly, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to conduct a comprehensive evaluation of the root causes of the delay to ensure that the preparation of future financial statements can be completed more effectively and in a timely manner.

Furthermore, the Board of Commissioners acknowledges that the Board of Directors' coordination and supervisory of subsidiaries should be further strengthened, particularly in ensuring the consistent implementation of strategic initiatives, the timely resolution of strategic issues, the consistent implementation of corporate governance practices, and the enhancement of reporting quality across the IFG Group Given the Company's role as a holding company, effective coordination with its subsidiaries is a critical factor in achieving the Group's overall objectives. Accordingly, the Board of Directors is expected to further intensify its monitoring, guidance, and evaluation of subsidiary performance, particularly with respect to companies that continue to address challenges related to profitability, capital adequacy, or the implementation of transformation initiatives.

Overall, the Board of Commissioners is convinced that the Board of Directors has demonstrated a strong commitment to managing the Company throughout fiscal year 2025. Nevertheless, the Board of Commissioners expects that the areas identified for improvement will be addressed promptly as part of the Company's ongoing efforts to strengthen corporate governance, enhance the effectiveness of its control functions, and reinforce its role as the State-Owned Enterprises holding company for the insurance, guarantee, and investment sectors. By strengthening these aspects, the Board of Commissioners is confident that the quality of the Company's management will continue to improve and effectively support healthy, sustainable, and competitive business growth.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi Perusahaan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis yang disusun Direksi selaras dengan visi Perusahaan, arahan Pemegang Saham, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam proses penyusunan RKAP Tahun 2025, Dewan Komisaris terlibat secara aktif melalui pembahasan bersama Direksi dengan memberikan masukan, pandangan strategis, dan rekomendasi terhadap prioritas program kerja, target kinerja, pengelolaan risiko, kebutuhan penguatan permodalan, serta berbagai inisiatif transformasi yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan dan IFG. Melalui proses tersebut, Dewan Komisaris memastikan bahwa strategi yang ditetapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Sepanjang tahun 2025, pengawasan atas implementasi strategi dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, rapat komite di bawah Dewan Komisaris, penelaahan laporan manajemen secara berkala, pembahasan capaian RKAP, evaluasi atas pelaksanaan proyek-proyek strategis, serta monitoring terhadap perkembangan kondisi bisnis di tingkat *holding* maupun entitas anak. Dewan Komisaris secara konsisten mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan strategi dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan arahan apabila terdapat perkembangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan atau langkah mitigasi risiko.

Dalam rangka mendorong terwujudnya sinergi ekosistem asuransi dan penjaminan, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap berbagai inisiatif strategis yang bertujuan memperkuat integrasi bisnis di lingkungan IFG. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk meningkatkan kolaborasi antar entitas melalui pengembangan produk dan layanan yang saling melengkapi, optimalisasi pemanfaatan kapabilitas masing-masing perusahaan, penguatan sinergi investasi dan reasuransi, serta integrasi proses bisnis dan pemanfaatan data secara lebih efektif. Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya penyelarasan strategi bisnis antar entitas agar setiap perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target individual, tetapi juga memberikan kontribusi optimal terhadap penciptaan nilai bagi grup secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengawasan selama Tahun Buku 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi strategi Perusahaan telah menunjukkan kemajuan yang positif, khususnya dalam pelaksanaan program transformasi,

BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISION OF THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S STRATEGY

The Board of Commissioners continuously oversees the formulation and implementation of the Company's strategy to ensure that all strategic policies established by the Board of Directors are aligned with the Company's vision, the Shareholder's directives, and the principles of Good Corporate Governance (GCG). During the preparation of the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners actively participated in discussions with the Board of Directors by providing input, strategic perspectives, and recommendations on key work program priorities, performance targets, risk management, capital strengthening requirements, and various transformation initiatives to be implemented by the Company and the IFG Group. Through this process, the Board of Commissioners ensured that the Company's strategy was not only focused on achieving short-term objectives but also capable of strengthening its competitiveness and long-term business sustainability.

Throughout 2025, supervision of the implementation of the Company's strategy was carried out through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, meetings of committees under the Board of Commissioners, periodic reviews of management reports, discussions of RKAP implementation, evaluations of strategic projects, as well as ongoing monitoring of business developments at both the holding company and subsidiary levels. The Board of Commissioners consistently evaluated the alignment between strategy execution and the established targets while providing guidance whenever developments required policy adjustments or additional risk mitigation measures.

To support the realization of an integrated insurance and guarantee ecosystem, the Board of Commissioners paid particular attention to strategic initiatives aimed at strengthening business integration across the IFG Group. The Board of Commissioners, encouraged the Board of Directors to enhance collaboration among entities through the development of complementary products and services, optimization of each entity's capabilities, stronger investment and reinsurance synergies, and more effective integration of business processes and data utilization. The Board of Commissioners also emphasized the importance of aligning business strategies across entities to ensure that each company contributes not only to the achievement of its individual targets but also to maximizing value creation for the Group as a whole.

Based on the results of its supervisory throughout fiscal year 2025, the Board of Commissioners considers that the implementation of the Company's strategy has shown positive progress, particularly in executing transformation initiatives,

penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta pengembangan sinergi antarentitas di lingkungan IFG. Namun demikian, Dewan Komisaris juga mengidentifikasi beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan agar implementasi strategi dapat berjalan lebih efektif. Beberapa di antaranya adalah perlunya peningkatan kualitas koordinasi antara *holding* dan entitas anak dalam pelaksanaan program strategis, percepatan penyediaan data dan informasi manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan, penguatan fungsi audit internal dalam memberikan *early warning* terhadap risiko implementasi strategi, serta peningkatan disiplin pelaksanaan proyek-proyek strategis agar seluruh target dapat dicapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan peran Perusahaan sebagai *holding*, Dewan Komisaris juga terus mendorong Direksi untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap entitas anak melalui peningkatan kualitas monitoring kinerja, penyelarasan indikator keberhasilan grup, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi. Dewan Komisaris berpandangan bahwa keberhasilan membangun sinergi ekosistem asuransi dan penjaminan tidak hanya ditentukan oleh kualitas strategi yang dirumuskan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi, konsistensi implementasi, serta kemampuan seluruh entitas dalam menjalankan strategi secara terpadu.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa proses perumusan dan implementasi strategi Perusahaan sepanjang Tahun Buku 2025 telah berjalan sesuai dengan arah strategis yang ditetapkan. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif untuk memastikan setiap strategi Perusahaan diimplementasikan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat optimal bagi Perusahaan, Grup IFG, Pemegang Saham, serta seluruh pemangku kepentingan.

FREKUENSI DAN MEKANISME PEMBERIAN NASIHAT OLEH DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten memberikan nasihat kepada Direksi sebagai bagian dari penerapan prinsip *check and balance* dalam tata kelola Perusahaan. Pemberian nasihat dilakukan secara independen, objektif, dan konstruktif dengan tujuan memastikan bahwa setiap kebijakan strategis, keputusan bisnis, serta langkah operasional Direksi tetap sejalan dengan kepentingan Perusahaan, arahan Pemegang Saham, ketentuan regulator, dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Mekanisme pemberian nasihat dilaksanakan melalui berbagai forum formal maupun komunikasi yang bersifat strategis. Forum utama dilakukan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan secara berkala untuk membahas perkembangan kinerja Perusahaan, realisasi RKAP, implementasi strategi korporasi, pengelolaan risiko,

strengthening corporate governance, improving the quality of financial reporting, and enhancing collaboration among IFG entities. Nevertheless, the Board of Commissioners has identified several areas that require further improvement to ensure more effective strategy execution. These include improving coordination between the holding company and its subsidiaries in implementing strategic initiatives, accelerating the availability of management data and information to support decision-making, strengthening the internal audit function in providing early warning of risks associated with strategy implementation, and enhancing execution discipline for strategic projects to ensure that all objectives are achieved according to the established timeline.

In regards to the Company's role as a holding company, the Board of Commissioners also continues to encourage the Board of Directors to strengthen its supervision of subsidiaries by enhancing performance monitoring, aligning Group-wide performance indicators, and reinforcing integrated corporate governance and risk management. The Board of Commissioners is convinced that the successful development of an integrated insurance and guarantee ecosystem depends not only on the quality of the strategies formulated but also on effective coordination, consistent execution, and the ability of all entities to implement those strategies in an integrated manner.

Overall, the Board of Commissioners considers that the formulation and implementation of the Company's strategy throughout fiscal year 2025 have been carried out in line with the established strategic direction. Going forward, the Board of Commissioners will continue to actively perform its supervisory function to ensure that every corporate strategy is implemented effectively, measurably, and in a manner that delivers optimal value to the Company, the IFG Group, the Shareholder, and all stakeholders.

FREQUENCY AND MECHANISM OF ADVICE PROVIDED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its supervisory function, the Board of Commissioners consistently provides advice to the Board of Directors as part of the implementation of the checks and balances principle in the Company's governance framework. Advisory is provided independently, objectively, and constructively to ensure that every strategic policy, business decision, and operational action undertaken by the Board of Directors remains aligned with the interests of the Company, the Shareholder's directives, regulatory requirements, and the principles of Good Corporate Governance (GCG).

The advisory process is conducted through various formal forums and strategic communication channels. The primary forum is the periodic joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, during which discussions about the Company's performance, RKAP realization, implementation of corporate strategies, risk

penyelesaian laporan keuangan, serta berbagai isu strategis lainnya. Selain itu, nasihat juga disampaikan melalui rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing komite. Atas setiap pembahasan tersebut, Dewan Komisaris memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan Direksi dalam menetapkan maupun menyempurnakan kebijakan Perusahaan.

Di luar mekanisme rapat, Dewan Komisaris juga menyampaikan nasihat melalui surat resmi, memorandum, maupun komunikasi koordinatif apabila terdapat isu strategis yang memerlukan perhatian atau tindak lanjut segera. Mekanisme tersebut memungkinkan Dewan Komisaris memberikan respons secara tepat waktu terhadap perkembangan yang terjadi, sekaligus memastikan proses pengambilan keputusan tetap berjalan secara efektif tanpa mengurangi independensi fungsi pengurusan yang menjadi kewenangan Direksi. Seluruh arahan dan rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris selanjutnya dimonitor pelaksanaannya secara berkala melalui pembahasan dalam rapat maupun penyampaian laporan tindak lanjut oleh Direksi.

Sepanjang Tahun Buku 2025, Dewan Komisaris secara aktif memberikan nasihat kepada Direksi terkait berbagai aspek strategis, antara lain penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, percepatan penyelesaian audit laporan keuangan, penguatan fungsi audit internal, peningkatan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, penguatan pengelolaan risiko, percepatan implementasi program transformasi, serta peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap entitas anak. Melalui mekanisme tersebut, Dewan Komisaris tidak hanya memberikan rekomendasi atas isu-isu strategis, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi tersebut sebagai bagian dari proses pengawasan yang berkelanjutan.

Selama Tahun Buku 2025, pemberian nasihat dilaksanakan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan secara berkala, rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris sesuai kebutuhan pengawasan, serta penyampaian surat dan rekomendasi tertulis terhadap isu-isu tertentu yang memerlukan perhatian Direksi. Dengan mekanisme tersebut, Dewan Komisaris memastikan bahwa fungsi pemberian nasihat berlangsung secara berkesinambungan, terdokumentasi dengan baik, dan menjadi bagian integral dari proses peningkatan kualitas pengelolaan Perusahaan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha Perusahaan pada tahun 2026 tetap berada pada arah yang positif dengan didukung oleh fundamental bisnis yang semakin kuat, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan asuransi dan penjaminan, serta berlanjutnya

management, completion of the financial statements, and various strategic matters. Advisory is also provided through meetings of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Integrated Governance Committee, in accordance with the respective responsibilities of each committee. Through these forums, the Board of Commissioners provides guidance, input, and recommendations for consideration by the Board of Directors in formulating and refining corporate policies.

Outside formal meetings, the Board of Commissioners also conveys its advice through official correspondence, memoranda, and coordination meetings whenever strategic issues require immediate attention or follow-up. These mechanisms enable the Board of Commissioners to respond promptly to emerging developments while ensuring that the decision-making process remains effective without compromising the independence of the Board of Directors in conducting its management responsibilities. All guidance and recommendations issued by the Board of Commissioners are subsequently monitored through periodic meetings and follow-up reports submitted by the Board of Directors.

Throughout fiscal year 2025, the Board of Commissioners actively advised the Board of Directors on various strategic matters, including strengthening corporate governance, improving the quality of financial reporting, expediting the completion of the financial statement audit, enhancing the internal audit function, improving the quality of data and information supporting decision-making, strengthening risk management, accelerating the implementation of transformation initiatives, and enhancing coordination with and supervisory of subsidiaries. Through these mechanisms, the Board of Commissioners not only provides recommendations on strategic matters but also monitors their implementation as part of its ongoing supervisory process.

During fiscal year 2025, such advice was delivered through periodic joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, meetings of committees under the Board of Commissioners as required, as well as written correspondence and recommendations concerning matters requiring the Board of Directors' attention. Through these mechanisms, the Board of Commissioners ensures that its advisory function is implemented continuously, properly documented, and serves as an integral part of the Company's efforts to enhance the quality of its management.

OPINIONS ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners is of the view that the Company's business prospects for 2026 remain positive, supported by increasingly robust business fundamentals, growing public demand for insurance and guarantee services, and the continuation of various Government strategic programs

berbagai program strategis Pemerintah yang melibatkan sektor jasa keuangan. Sebagai *holding* BUMN sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk mengoptimalkan sinergi antarentitas, memperluas ekosistem layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui penguatan tata kelola dan transformasi bisnis secara berkelanjutan. Dewan Komisaris meyakini bahwa peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing Perusahaan sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Pandangan tersebut didasarkan pada evaluasi Dewan Komisaris terhadap RKAP Tahun 2026, berbagai proyeksi bisnis yang disampaikan Direksi, perkembangan industri jasa keuangan, kondisi makroekonomi, serta arah kebijakan Pemerintah dan regulator terhadap penguatan industri asuransi dan penjaminan nasional. Dewan Komisaris menilai bahwa strategi yang disusun Direksi telah mengakomodasi berbagai peluang pertumbuhan sekaligus mempertimbangkan faktor risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target Perusahaan. Namun demikian, Dewan Komisaris menekankan bahwa keberhasilan pencapaian target tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan strategi, efektivitas koordinasi di lingkungan Grup IFG, serta kemampuan Direksi dalam mengelola perubahan yang terjadi selama proses transformasi.

Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian Dewan Komisaris adalah pelaksanaan program *streamlining* di lingkungan IFG. Dewan Komisaris memandang bahwa inisiatif tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan, meningkatkan fokus bisnis masing-masing entitas, menyederhanakan proses organisasi, serta menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam pengelolaan grup. Apabila dilaksanakan secara terencana dan konsisten, program *streamlining* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperjelas peran dan fungsi setiap entitas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat daya saing Perusahaan dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan dukungan terhadap agenda transformasi tersebut dengan tetap menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik, manajemen perubahan (*change management*) yang efektif, serta mitigasi risiko pada setiap tahapan implementasinya.

Di sisi lain, Dewan Komisaris berpandangan bahwa pelaksanaan program *streamlining* juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu dikelola secara cermat. Tantangan tersebut antara lain meliputi proses penyesuaian struktur organisasi, harmonisasi kebijakan dan proses bisnis antar entitas, pengelolaan sumber daya manusia, penyelarasan sistem informasi dan pelaporan, serta menjaga kesinambungan operasional selama masa transisi. Selain itu, Perusahaan juga perlu mengantisipasi dinamika eksternal seperti ketidakpastian kondisi ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, perubahan regulasi, perkembangan

involving the financial services sector. As the State-Owned Enterprises holding company for the insurance, guarantee, and investment sectors, the Company is strategically positioned to optimize synergies among its entities, expand its service ecosystem, and enhance operational efficiency through strengthened corporate governance and the continuous implementation of business transformation initiatives. The Board of Commissioners is confident that these opportunities can be leveraged to enhance the Company's competitiveness while creating greater value for the Shareholder and all stakeholders.

This opinion is based on the Board of Commissioners' evaluation of the 2026 Company Work Plan and Budget (RKAP), the business projections presented by the Board of Directors, developments in the financial services industry, macroeconomic conditions, and the policy direction of the Government and regulators regarding the strengthening of the national insurance and guarantee industries. The Board of Commissioners considers that the strategy formulated by the Board of Directors has adequately captured growth opportunities while taking into account the risks that may affect the achievement of the Company's objectives. Nevertheless, the Board of Commissioners emphasizes that the successful achievement of these objectives will depend significantly on the consistent execution of the strategy, effective coordination across the IFG Group, and the Board of Directors' ability to manage change throughout the transformation process.

One of the strategic initiatives receiving particular attention from the Board of Commissioners is the implementation of the streamlining program across the IFG Group. The Board of Commissioners considers this initiative to be a strategic step toward strengthening the organizational structure, enhancing the business focus of each entity, simplifying organizational processes, and creating more effective synergies in Group management. If implemented in a well-planned and consistent manner, the streamlining program is expected to improve operational efficiency, clarify the roles and responsibilities of each entity, optimize resource utilization, and strengthen the Company's competitiveness in responding to the evolving dynamics of the financial services industry. Accordingly, the Board of Commissioners supports this transformation initiative while emphasizing the importance of sound corporate governance, effective change management, and comprehensive risk mitigation throughout every stage of its implementation.

At the same time, the Board of Commissioners recognizes that the implementation of the streamlining program also presents several challenges that must be managed carefully. These challenges include organizational restructuring, harmonization of policies and business processes across entities, human capital management, alignment of information systems and reporting, and maintaining operational continuity throughout the transition period. Furthermore, the Company must anticipate external challenges, including uncertainty in the global economic environment, financial market volatility, regulatory developments, digital technology advancements,

teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi regulator dan masyarakat terhadap kualitas layanan dan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa keberhasilan Direksi dalam mengelola tantangan tersebut akan menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi dan pencapaian target jangka panjang Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh entitas anak, menyusun *roadmap* implementasi *streamlining* yang terukur, memastikan kesiapan organisasi dan sumber daya manusia, serta memperkuat fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal selama proses transformasi berlangsung.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk menyusun strategi diversifikasi pendapatan melalui peningkatan kontribusi bisnis *non-government*, termasuk dengan menetapkan target kontribusi pendapatan yang lebih terukur, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, serta mengidentifikasi segmen pasar potensial guna mengurangi ketergantungan Perusahaan terhadap program dan kebijakan Pemerintah. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan model bisnis Perusahaan, menciptakan sumber pertumbuhan baru, serta meningkatkan keberlanjutan kinerja dalam jangka panjang. Di samping itu, Direksi diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara pelaksanaan transformasi dan pencapaian target kinerja operasional sehingga proses perubahan tidak mengganggu keberlangsungan bisnis maupun kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan sepanjang Tahun Buku 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin mendukung efektivitas pengelolaan Perusahaan. Sejalan dengan pelaksanaan berbagai agenda transformasi di lingkungan IFG, Perusahaan terus memperkuat implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (TARIF) melalui penyempurnaan kebijakan internal, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas manajemen risiko, serta penyempurnaan mekanisme pelaporan dan pengambilan keputusan. Dewan Komisaris menilai bahwa penguatan tata kelola tersebut telah menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham maupun para pemangku kepentingan.

Di samping berbagai kemajuan tersebut, Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi kompleksitas bisnis Perusahaan sebagai *holding* sektor asuransi, penjaminan, dan investasi. Perhatian Dewan Komisaris diarahkan pada penguatan kualitas data dan informasi manajemen,

and rising expectations from regulators and the public regarding service quality and corporate governance. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors' ability to manage these challenges will be a key determinant of the success of the Company's transformation and the achievement of its long-term objectives/targets.

Accordingly, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to further strengthen coordination with all subsidiaries, establish a measurable roadmap for implementing the streamlining program, ensure organizational and human capital readiness, and reinforce the Company's risk management and internal control functions throughout the transformation process.

In addition, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to formulate a revenue diversification strategy by increasing the contribution of non-government business, including through the establishment of measurable revenue contribution targets, the development of innovative products and services, and the identification of potential market segments to reduce the Company's reliance on Government programs and policies. This strategy is expected to strengthen the resilience of the Company's business model, create new growth sources, and enhance the long-term sustainability of its performance. The Board of Directors is also expected to maintain an appropriate balance between implementing transformation initiatives and achieving operational performance targets to ensure that the transformation process does not disrupt business continuity or the quality of services provided to stakeholders.

BOARD OF COMMISSIONERS' OPINIONS ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners is of the view that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) throughout fiscal year 2025 continued to improve and further strengthened the effectiveness of the Company's management. In line with the implementation of various transformation initiatives across the IFG Group, the Company continued to strengthen the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness (TARIF) through enhancements to internal policies, stronger internal control systems, improved risk management, and the refinement of reporting and decision-making mechanisms. The Board of Commissioners considers that these governance enhancements have provided a solid foundation for maintaining business sustainability and strengthening the confidence of the Shareholder and other stakeholders.

Despite these achievements, the Board of Commissioners considers that the implementation of GCG should continue to be strengthened to keep pace with the increasing complexity of the Company's role as the holding company for the insurance, guarantee, and investment sectors. The Board of Commissioners' attention has focused on improving the

peningkatan efektivitas fungsi audit internal, percepatan penyelesaian proses audit laporan keuangan, serta penguatan penerapan tata kelola yang konsisten di seluruh entitas anak. Dewan Komisaris juga menekankan bahwa agenda transformasi dan rencana *streamlining* Grup IFG harus tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG, sehingga seluruh proses perubahan organisasi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan terukur.

quality of management data and information, enhancing the effectiveness of the internal audit function, expediting the completion of the financial statement audit process, and promoting the consistent implementation of corporate governance practices across all subsidiaries. The Board of Commissioners also emphasizes that the transformation agenda and the IFG Group's streamlining program should continue to be implemented in accordance with GCG principles to ensure that all organizational changes are carried out in a transparent, accountable, and measurable manner.

Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen Direksi dalam menjaga efektivitas berbagai perangkat *Good Corporate Governance* yang dimiliki Perusahaan, termasuk penguatan fungsi Dewan Komisaris beserta komite-komite di bawahnya, audit internal, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, pengendalian internal, sistem pelaporan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan dan pedoman tata kelola. Dewan Komisaris menilai bahwa perangkat-perangkat tersebut telah mendukung terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih akuntabel, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' commitment to maintaining the effectiveness of the Company's GCG framework, including strengthening the role of the Board of Commissioners and its supporting committees, the internal audit function, risk management, the compliance function, internal controls, reporting systems, and various governance policies and guidelines. The Board of Commissioners considers that these governance mechanisms have supported more accountable decision-making, improved risk management, and stronger compliance with regulatory requirements and prevailing laws and regulations.

Dalam implementasi prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris terlibat secara aktif melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, pembahasan pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Melalui forum-forum tersebut, Dewan Komisaris memberikan arahan dan rekomendasi terkait penguatan tata kelola, peningkatan efektivitas pengendalian internal, penyempurnaan pengelolaan risiko, peningkatan kualitas pelaporan, serta penguatan koordinasi dan pengawasan terhadap entitas anak. Dewan Komisaris juga secara berkala memonitor tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip GCG berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh lingkungan Perusahaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan transformasi dan program *streamlining* IFG.

In implementing GCG principles, the Board of Commissioners actively performs its supervisory and advisory functions. It is conducted through Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors, and discussions within the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Integrated Governance Committee. Through these forums, the Board of Commissioners provides guidance and recommendations regarding governance enhancement, stronger internal controls, improvements in risk management, enhanced reporting quality, and strengthened coordination with and supervisory of subsidiaries. The Board of Commissioners also periodically monitors the implementation of its recommendations to ensure the consistent and sustainable application of GCG principles throughout the Company, particularly in supporting the implementation of the IFG transformation and streamlining programs.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Melalui pelaksanaan tugas sesuai dengan piagam (*charter*) masing-masing komite, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan kajian, analisis, dan rekomendasi yang konstruktif terhadap berbagai isu strategis, sehingga mendukung Dewan

The Board of Commissioners considers that the committees under its supervision have effectively conducted their duties and responsibilities as supporting organs in assisting the Board of Commissioners in performing its supervisory and advisory functions. In carrying out their responsibilities in accordance with their respective charters, the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Integrated Governance Committee have provided constructive reviews, analyses, and recommendations on various strategic matters, thereby enabling the Board of

Komisaris dalam menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang objektif, independen, dan berbasis pada kajian yang memadai.

Penilaian tersebut didasarkan pada evaluasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan program kerja masing-masing komite, tingkat kehadiran dan partisipasi anggota komite dalam rapat, kualitas pembahasan atas isu-isu strategis, ketepatan waktu penyampaian rekomendasi, serta kontribusi komite dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris juga mempertimbangkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan komite, serta kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan piagam masing-masing komite.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme seluruh komite dalam mengawal berbagai agenda strategis Perusahaan selama Tahun Buku 2025, termasuk pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan, penguatan manajemen risiko, implementasi tata kelola perusahaan, proses nominasi dan remunerasi, serta pelaksanaan berbagai program transformasi Perusahaan. Kontribusi tersebut telah memberikan nilai tambah bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Meskipun demikian, Dewan Komisaris berpandangan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas komite masih dapat terus ditingkatkan. Dewan Komisaris mendorong masing-masing komite untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan divisi-divisi di lingkungan Perusahaan yang menjadi *counterpart* atau mitra kerja sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembahasan, mempercepat penyampaian informasi, serta memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan didukung oleh data dan analisis yang lebih komprehensif.

Selain itu, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dokumentasi pelaksanaan tugas komite melalui penyusunan kertas kerja, memorandum, laporan hasil kajian, maupun dokumen pendukung lainnya secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi tersebut tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas pelaksanaan fungsi komite, tetapi juga menjadi dasar pertanggungjawaban, referensi dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris, serta sarana untuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025 telah berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Perusahaan. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendorong peningkatan kapasitas, kualitas koordinasi, dan penguatan dokumentasi kerja komite agar keberadaan komite sebagai organ

Commissioners to make objective, independent, and well-informed decisions and recommendations.

This assessment is based on the Board of Commissioners' evaluation of each committee's work program implementation, attendance and participation in committee meetings, the quality of deliberations on strategic issues, the timeliness of recommendations, and each committee's contribution to supporting the Board of Commissioners' supervisory function. The Board of Commissioners also considers the effectiveness of follow-up actions taken in response to committee recommendations, as well as each committee's compliance with prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, and its respective charter.

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the dedication and professionalism demonstrated by all committees in supervising the Company's strategic initiatives throughout fiscal year 2025, including oversight of financial reporting quality, risk management enhancement, the implementation of corporate governance, nomination and remuneration processes, and the execution of various transformation initiatives. These contributions have provided significant added value to the Board of Commissioners in effectively performing its supervisory responsibilities and supporting more comprehensive decision-making.

Nevertheless, the Board of Commissioners believes that the effectiveness of the committees' performance can be further enhanced. Accordingly, the Board of Commissioners encourages each committee to strengthen coordination and communication with the relevant divisions within the Company that serve as their respective counterparts, in accordance with the scope of their responsibilities. Strengthened coordination is expected to improve the quality of deliberations, accelerate the flow of information, and ensure that every recommendation is supported by more comprehensive data and analysis.

The Board of Commissioners also emphasizes the importance of enhancing the quality of committee documentation through the more systematic preparation of working papers, memoranda, review reports, and other supporting documents. Such documentation serves not only as evidence of accountability in carrying out committee responsibilities but also as a basis for the Board of Commissioners' decision-making process and as a means of monitoring the implementation of recommendations.

Overall, the Board of Commissioners considers that the committees under its supervision performed effectively throughout fiscal year 2025 in supporting the Company's supervisory function. Going forward, the Board of Commissioners will continue to promote capacity building, stronger coordination, and enhanced documentation practices to ensure that the committees further strengthen

pendukung Dewan Komisaris semakin mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penguatan fungsi pengawasan, serta pencapaian tujuan strategis Perusahaan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS 2025

Sepanjang tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dimana Wahyu Setiawan mengundurkan diri sebagai Komisaris pada 8 Juli 2025. Lalu, terdapat 3 (tiga) anggota Komisaris telah berakhir masa jabatannya yaitu Hotbonar Sinaga sebagai Komisaris Independen pada 20 Oktober 2025, serta Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Utama/Independen, dan Masyita Crystallin sebagai Komisaris pada 30 Desember 2025. Seluruh perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris tersebut dikukuhkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 27 tanggal 27 April 2026 yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0250570 tanggal 30 April 2026. Adapun kronologi perubahan komposisi Dewan Komisaris disajikan pada tabel sebagai berikut:

their role as supporting organs of the Board of Commissioners in advancing Good Corporate Governance, reinforcing the supervisory function, and contributing to the achievement of the Company's strategic objectives.

CHANGE IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS 2025

Throughout 2025, there were changes in the composition of the Board of Commissioners, with Wahyu Setiawan resigning from his position as Commissioner on July 8, 2025. Subsequently, the terms of office of 3 (three) members of the Board of Commissioners ended, namely Hotbonar Sinaga as Independent Commissioner on October 20, 2025, as well as Fauzi Ichsan as President Commissioner/Independent Commissioner and Masyita Crystallin as Commissioner on December 30, 2025. All changes in the composition of the Board of Commissioners were formalized pursuant to Deed of Statement of Resolutions of the Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 27 dated April 27, 2026, for which notification of the change in the Company's data was acknowledged pursuant to Letter of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.09-0250570 dated April 30, 2026. The chronology of changes in the composition of the Board of Commissioners is presented in the following table:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komisaris
Table of Composition and Basis for the Appointment of Commissioners

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Berakhir menjabat per 30 Desember 2025 dikarenakan berakhir masa jabatan No longer serving as of December 30, 2025, due to the end of the term of office
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	Berhenti menjabat per 30 Desember 2025 dikarenakan berakhir masa jabatan No longer serving as of December 30, 2025, due to the end of the term of office
Hotbonar Sinaga	Komisaris Commissioner	Berhenti menjabat per 20 Oktober 2025 dikarenakan berakhir masa jabatan No longer serving as of October 20, 2025, due to the end of the term of office
Wahyu Setiawan	Komisaris Commissioner	Berhenti menjabat per 8 Juli 2025 dikarenakan mengundurkan diri No longer serving as of July 8, 2025, due to resignation
Sumiyati	Komisaris Commissioner	Masih menjabat selama tahun buku (hingga RUPS Tahunan Tahun Buku 2025) Still serving during the fiscal year (until the Annual GMS for the 2025 Fiscal Year)
Nasrudin	Komisaris Commissioner	Masih menjabat selama tahun buku (hingga RUPS Tahunan Tahun Buku 2025) Still serving during the fiscal year (until the Annual GMS for the 2025 Fiscal Year)

Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan Lainnya.

The Board of Commissioners is committed to fulfilling this mandate by consistently upholding the principles of good corporate governance in the best interests of shareholders and other stakeholders.

APRESIASI

Keberhasilan Perusahaan dalam menjaga kinerja dan memperkuat fondasi bisnis sepanjang tahun pelaporan merupakan hasil dari sinergi yang erat antara Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris meyakini bahwa kolaborasi yang solid, disertai komitmen terhadap profesionalisme, integritas, dan tata kelola perusahaan yang baik, menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan di tengah dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang.

Atas dasar tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen, dan seluruh insan Perusahaan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan dalam menjalankan strategi bisnis secara konsisten. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemegang Saham, pelanggan, mitra usaha, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan kemitraan yang terus terjalin, sehingga Perusahaan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan serta memperkuat keberlanjutan usahanya.

APPRECIATION

The Company's success in maintaining its performance and strengthening its business foundation throughout the reporting year is the result of strong synergy among the Board of Directors, the Board of Commissioners, shareholders, and all stakeholders. The Board of Commissioners firmly believes that solid collaboration, accompanied by a commitment to professionalism, integrity, and good corporate governance, is a key factor in supporting the achievement of the Company's strategic objectives amid the dynamics of an constantly evolving business environment.

Therefore, the Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors, management, and all Company personnel for their dedication and hard work in consistently executing the business strategy. We also extend our appreciation to shareholders, customers, business partners, regulators, and all stakeholders for their continued trust, support, and partnership, which have enabled the Company to maintain its growth momentum and strengthen the sustainability of its business.

Jakarta, 29 Juni 2026
Jakarta, June 29, 2026

Atas nama Dewan Komisaris
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
On behalf of the Board of Commissioners
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)



SUMIYATI
Komisaris
Commissioner



NASRUDIN
Komisaris
Commissioner

LAPORAN DIREKSI
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS



HEXANA TRI SASONGKO
Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2025 menjadi fase penting bagi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) dalam memperkuat kapasitasnya sebagai *holding* BUMN sektor asuransi, penjaminan, dan investasi. Berbagai inisiatif yang dijalankan sepanjang tahun diarahkan untuk membangun sinergi yang semakin solid di tingkat grup, memperkuat ketahanan bisnis, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui pengelolaan portofolio yang lebih terintegrasi, penguatan tata kelola, dan optimalisasi kapabilitas perusahaan anggota *holding*, IFG terus mendorong terciptanya ekosistem jasa keuangan yang lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan nasional.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai media komunikasi yang menggambarkan perjalanan transformasi, capaian kinerja, serta berbagai langkah strategis yang telah ditempuh Perusahaan sepanjang tahun 2025. Selain menyajikan pencapaian operasional dan keuangan, laporan ini juga memuat arah pengembangan usaha serta komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan untuk menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Atas nama Direksi, saya menyampaikan apresiasi kepada para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada IFG sepanjang tahun 2025. Laporan Direksi ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan sekaligus gambaran mengenai berbagai langkah strategis yang telah diimplementasikan dalam memperkuat kinerja, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusi Perusahaan terhadap pengembangan industri jasa keuangan nasional. Di dalamnya turut disampaikan evaluasi atas pencapaian kinerja, perkembangan implementasi tata kelola perusahaan, prospek usaha, serta berbagai inisiatif strategis yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan IFG pada masa mendatang.

ANALISIS MAKROEKONOMI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DI TAHUN 2025

Memasuki tahun kelima sejak ditetapkannya sebagai *holding* BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020, IFG terus menunjukkan komitmen kuat terhadap pertumbuhan yang solid, transformasi berkelanjutan, serta penciptaan nilai bagi masyarakat Indonesia. Di sepanjang tahun 2025, fokus utama Perusahaan diarahkan pada fase penguatan fondasi sebagai bekal utama untuk mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan pada periode-periode berikutnya. Fase transisi dan penataan ini berhasil dilalui dengan sangat baik, yang tercermin dari pencapaian kinerja keuangan yang sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Dear Honorable Shareholders and Stakeholders,

The year 2025 marked an important milestone for PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), or Indonesia Financial Group (IFG), in strengthening its capacity as the State-Owned Enterprises holding company for the insurance, guarantee, and investment sectors. Throughout the year, the Company pursued various initiatives aimed at fostering stronger Group-wide synergies, enhancing business resilience, and creating sustainable value for all stakeholders. Through a more integrated portfolio management approach, strengthened corporate governance, and the optimization of the capabilities of its holding members, IFG continued to promote the development of a more resilient, adaptive, and competitive financial services ecosystem in support of Indonesia's national development.

This Annual Report has been prepared as a communication medium to present the Company's transformation journey, business performance, and the strategic initiatives executed throughout 2025. In addition to presenting the Company's operational and financial performance, this report outlines the Company's business development direction and its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) as the foundation for achieving healthy and sustainable growth.

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my sincere appreciation to our Shareholder and all stakeholders for the trust and support extended to IFG throughout 2025. This Report of the Board of Directors serves as an accountability report on the execution of the Board's management responsibilities and provides an overview of the strategic initiatives implemented to strengthen the Company's performance, enhance its competitiveness, and expand its contribution to the development of Indonesia's financial services industry. It also presents an evaluation of the Company's performance, developments in the implementation of corporate governance, business prospects, and the strategic initiatives that will serve as the foundation for IFG's future growth.

MACROECONOMIC ANALYSIS AND THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2025

Entering its fifth year since being designated as the State-Owned Enterprises holding company for the insurance, guarantee, and investment sectors pursuant to Government Regulation No. 20 of 2020, IFG continued to demonstrate a strong commitment to sustainable growth, continuous transformation, and value creation for the people of Indonesia. Throughout 2025, the Company focused on strengthening its fundamental capabilities as the foundation for healthy and sustainable growth in the years ahead. The Company successfully navigated this transition and consolidation phase, as reflected in its strong financial performance, which exceeded the targets established by the Shareholder.

Perkembangan Perusahaan di tahun 2025 tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal, baik di tingkat makroekonomi maupun industri sektoral. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi nasional yang kumulatif mencapai 5,11% memberikan pijakan yang relatif stabil bagi aktivitas bisnis. Namun di sisi lain, Perusahaan dihadapkan pada fenomena makroekonomi berupa penurunan daya beli populasi konsumen kelas menengah yang berlanjut sepanjang tahun 2025. Kondisi ini memicu peningkatan rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loans* (NPL) di sektor UMKM. Menghadapi tantangan eksternal tersebut, Direksi secara proaktif mengarahkan seluruh anggota *holding* untuk memperkuat manajemen risiko, menyesuaikan strategi produk ritel, serta meningkatkan responsivitas terhadap dinamika profil risiko UMKM dan perubahan pola belanja Pemerintah Daerah.

Dari sisi internal, tahun 2025 menandai momentum penting dalam perjalanan pelaporan keuangan Perusahaan melalui implementasi perdana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang Kontrak Asuransi. Penerapan standar tersebut membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi. Selain itu, sejumlah produk, termasuk penjaminan KUR dan klausul *stop loss*, direklasifikasi ke dalam ruang lingkup PSAK 109 tentang Instrumen Keuangan guna meningkatkan konsistensi penerapan standar serta keterbandingan laporan keuangan konsolidasian. Di tengah proses transisi tersebut, Perusahaan mampu mempertahankan kinerja yang solid dengan membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp5,50 triliun, meningkat 52,63% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp3,60 triliun yang telah disajikan kembali (*restated*) sesuai ketentuan PSAK 117. Capaian tersebut juga melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 dengan tingkat pencapaian mencapai 419,74%, mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam menjaga kinerja sekaligus beradaptasi terhadap perubahan standar akuntansi yang berlaku.

Selain penguatan dari sisi keuangan dan akuntansi, perkembangan Perusahaan juga ditopang oleh langkah efisiensi internal dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang signifikan. Dengan pertumbuhan pendapatan konsolidasi menjadi Rp42,20 triliun dan pertumbuhan jumlah karyawan yang terkendali, indikator produktivitas pendapatan per karyawan meningkat menjadi Rp5,18 miliar, sementara indikator laba bersih per karyawan mengalami lompatan besar dari Rp445,84 juta pada tahun 2024 menjadi Rp676,58 juta pada tahun 2025.

IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Selaras dengan Arahan Pemegang Saham serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, IFG menjadikan tahun 2025 sebagai fase penting dalam pengembangan dan penguatan kompetensi inti perusahaan untuk menjadi fondasi utama pada tahun-tahun selanjutnya. Oleh sebab itu, IFG menentukan tema 2025 yakni "*Solidify Best Practices*", di mana IFG fokus pada penguatan fundamental bisnis

The Company's performance in 2025 was influenced by developments in both the macroeconomic environment and the industries in which it operates. On the one hand, Indonesia's economy recorded cumulative growth of 5.11%, providing a relatively stable foundation for business activities. On the other hand, the Company faced continued macroeconomic challenges arising from the declining purchasing power of middle-income consumers throughout 2025. This condition contributed to an increase in Non-Performing Loans (NPLs) within the MSME financing sector. In response to these external challenges, the Board of Directors proactively directed all holding members to strengthen risk management practices, refine their retail product strategies, and enhance responsiveness to changes in the risk profile of MSMEs and evolving regional government spending patterns.

Internally, 2025 marked a significant milestone in the Company's financial reporting with the first-time implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 117 on Insurance Contracts. The adoption of this standard introduced fundamental changes to the recognition, measurement, presentation, and disclosure of insurance transactions. In addition, several products, including KUR guarantees and stop-loss arrangements, were reclassified under PSAK 109 on Financial Instruments to enhance consistency in the application of accounting standards and improve the comparability of the consolidated financial statements. Despite this transition, the Company maintained solid performance by recording consolidated net profit of IDR 5.50 trillion, representing an increase of 52.63% compared with the restated net profit of IDR 3.60 trillion in 2024 following the implementation of PSAK 117. The Company also exceeded the net profit target set out in its 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP), achieving 419.74% of the annual target. This reflects the Company's ability to sustain strong performance while successfully adapting to the implementation of the new accounting standards.

In addition to improvements in financial performance and financial reporting, the Company's progress was supported by internal efficiency initiatives and significant improvements in human capital productivity. With consolidated revenue increasing to IDR 42.20 trillion and workforce growth remaining well managed, revenue per employee increased to IDR 5.18 billion, while net profit per employee rose significantly from IDR 445.84 million in 2024 to IDR 676.58 million in 2025.

IMPLEMENTATION OF STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

In line with the Shareholder's directives and the Company's 2025–2029 Long-Term Plan (RJPP), IFG designated 2025 as a pivotal year for strengthening its core competencies to establish a solid foundation for future growth. Accordingly, IFG adopted "Solidify Best Practices" as its 2025 corporate theme, reflecting its focus on strengthening business fundamentals through the adoption of best practices,

dengan mengadopsi *best practices*, meningkatkan kapabilitas perusahaan, serta melakukan transformasi organisasi dan budaya untuk menciptakan organisasi dengan kinerja unggul *(high-performing organization)*.

Mengacu pada arah strategis dan 23 *strategic levers* pada RJPP 2025-2029 IFG, perusahaan menyusun berbagai inisiatif strategis yang akan dijalankan pada tahun 2025, di mana setiap inisiatif telah melalui analisis biaya dan manfaat *(cost-benefit analysis)* guna memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dari 23 *strategic levers*, IFG kemudian menyusun 19 Proyek Korporasi yang dibagi ke beberapa kategori sebagai berikut:

Proyek Korporasi terkait Optimasi Bisnis dan Operasional:

1. Pengoptimalan Program Penugasan Pemerintah;
2. *Key Account Management* (KAM) dan Penguatan Kapasitas Bisnis Asuransi (*Joint Underwriting*, Reasuransi, dan *Risk Management Partnership*);
3. Peningkatan dan Penguatan *Distribution Channel* (Digital, B2B2C, G2G);
4. Persiapan untuk Masuk ke dalam Pasar MTPL;
5. Digitalisasi Proses Bisnis;
6. Perbaikan layanan Asuransi Kesehatan untuk meningkatkan *customer experience* dan menurunkan rasio klaim (seperti melalui *telemedicine*);
7. Optimalisasi/Konsolidasi Bisnis Asuransi dan Penjaminan di Ekosistem IFG;
8. Restrukturisasi dan Penyehatan Bisnis Reasuransi; dan
9. Optimalisasi Bisnis CMI.

Proyek Korporasi terkait Kepatuhan :

1. Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Keuangan;
2. Implementasi dan Optimalisasi Penerapan PSAK 117;
3. Pengembangan dan Implementasi ERP; dan
4. Program *Environment, Social, and Governance* (ESG).

Proyek Korporasi terkait Transformasi Organisasi:

1. *Purpose Activation and Culture Transformation*;
2. *Talent Management and Development*;
3. Tindak Lanjut Kajian *Brand Architecture*; dan
4. Implementasi *Parenting Governance*.

Proyek Korporasi terkait Sinergi antar anggota *Holding*:

1. Implementasi *Shared Services*; dan
2. Optimalisasi Aset dan Investasi secara terintegrasi.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Direksi memiliki tanggung jawab untuk menetapkan arah strategis Perusahaan sebagai landasan dalam mencapai sasaran bisnis yang berkelanjutan. Perumusan strategi dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Perusahaan

enhancing organizational capabilities, and advancing organizational and cultural transformation to build a high-performing organization.

Guided by the strategic direction and the 23 strategic levers outlined in the 2025–2029 RJPP, the Company developed a range of strategic initiatives to be implemented throughout 2025. Each initiative was subject to a cost-benefit analysis to ensure that the expected benefits outweighed the associated costs. Based on these 23 strategic levers, IFG subsequently established 19 Corporate Projects, which are categorized as follows:

Corporate Projects Related to Business and Operational Optimization:

1. Optimization of Government Assignment Programs;
2. Key Account Management (KAM) and Strengthening of Insurance Business Capabilities (Joint Underwriting, Reinsurance, and Risk Management Partnerships);
3. Improvement and Strengthening of Distribution Channels (Digital, B2B2C, G2G);
4. Preparation for Entry into the MTPL Market;
5. Digitalization of Business Processes;
6. Improvement of Health Insurance Services to enhance the customer experience and reduce the claims ratio (e.g., through telemedicine);
7. Optimization/Consolidation of Insurance and Guarantee Businesses within the IFG Ecosystem;
8. Restructuring and Revitalization of Reinsurance Business; and
9. CMI Business Optimization.

Corporate Projects Related to Compliance:

1. Improvement of Corporate Governance and Financial Management;
2. Implementation and Optimization of PSAK 117;
3. Development and Implementation of ERP; and
4. Environment, Social, and Governance (ESG) Program.

Corporate Projects Related to Organizational Transformation:

1. Purpose Activation and Culture Transformation;
2. Talent Management and Development;
3. Follow-up on the Brand Architecture Study; and
4. Implementation of Parenting Governance.

Corporate Projects Related to Synergy among Holding Company members:

1. Implementation of Shared Services; and
2. Integrated Optimization of Assets and Investments.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

The Board of Directors is responsible for establishing the Company's strategic direction as the foundation for achieving sustainable business objectives. The Company's strategy is formulated with reference to its vision and mission while

serta mempertimbangkan aspirasi Pemegang Saham, perkembangan industri, dinamika perekonomian, dan berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kegiatan usaha.

Sebagai implementasi dari tanggung jawab tersebut, Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai pedoman pelaksanaan strategi jangka pendek sekaligus menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagai arah pengembangan usaha dalam jangka panjang. Penyusunan RJPP mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Strategi dan sasaran yang ditetapkan dalam RKAP menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan program dan kegiatan secara terintegrasi, terukur, dan selaras dengan prioritas strategis Perusahaan. Untuk memastikan efektivitas implementasinya, Direksi bersama jajaran eksekutif secara berkala melakukan evaluasi terhadap pencapaian strategi, menilai relevansinya terhadap perkembangan lingkungan usaha, serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan agar Perusahaan tetap responsif terhadap perubahan.

Direksi juga memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dipahami dan dijalankan secara konsisten di seluruh jenjang organisasi. Pengawasan atas pelaksanaan strategi dilakukan secara berkesinambungan dengan dukungan komite-komite di bawah Direksi dan organ pendukung lainnya, sehingga setiap inisiatif strategis dapat terlaksana secara efektif serta mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi secara berkesinambungan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi serta program kerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja tahunan di tingkat *Holding* maupun Anggota *Holding*, mencakup aspek keuangan, bisnis, operasional, teknologi informasi, sumber daya manusia, serta berbagai aspek strategis lainnya guna memastikan seluruh inisiatif berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Pemantauan tersebut dilaksanakan melalui rapat monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan secara berkala. Melalui forum tersebut, setiap unit kerja menyampaikan perkembangan realisasi program kerja, implementasi berbagai inisiatif strategis, serta tantangan yang dihadapi

taking into consideration the aspirations of the Shareholder, industry developments, economic conditions, and various internal and external factors affecting the Company's business activities.

In executing this responsibility, the Board of Directors prepares the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as a guideline for implementing its short-term strategy and establishes the Company's Long-Term Plan (RJPP) to provide strategic direction for the Company's long-term business development. The preparation of the RJPP is carried out in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

The strategies and objectives set forth in the RKAP serve as the basis for all organizational units in implementing their programs and activities in an integrated, measurable, and coordinated manner, while remaining aligned with the Company's strategic priorities. To ensure effective implementation, the Board of Directors, together with the executive management team, periodically evaluates the achievement of the Company's strategic objectives, assesses their relevance to changes in the business environment, and makes adjustments where necessary to ensure that the Company remains responsive to evolving conditions.

The Board of Directors also ensures that the established strategy is clearly understood and consistently implemented throughout all levels of the organization. Supervision of strategy implementation is organized on an ongoing basis with the support of committees under the Board of Directors and other supporting organs, ensuring that every strategic initiative is implemented effectively and contributes to the achievement of both the Company's short-term and long-term objectives.

PROCESS CONDUCTED BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

In carrying out its management responsibilities, the Board of Directors continuously monitors and evaluates the implementation of the Company's strategies and work programs established at the beginning of the year. The supervisory is conducted comprehensively across the implementation of the annual work program at both the Holding company and Holding Member levels, covering financial, business, operational, information technology, human capital, and other strategic aspects to ensure that all initiatives are implemented in accordance with the Company's strategic direction.

Such monitoring is implemented through periodic monitoring and evaluation meetings. Through these forums, each organizational unit reports on the progress of its work program implementation, the execution of strategic initiatives, the challenges encountered, and the corresponding mitigation

beserta langkah mitigasinya. Di tingkat grup, Direksi juga secara rutin mengevaluasi kinerja Anggota *Holding* melalui penelaahan terhadap pencapaian target, analisis atas hasil yang diperoleh, serta identifikasi peluang perbaikan untuk mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Untuk menjaga keselarasan implementasi strategi di seluruh organisasi, Direksi memastikan terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara *Holding* dengan Anggota *Holding*, unit bisnis, unit kerja, maupun jaringan operasional. Direksi juga melakukan peninjauan berkala terhadap indikator kinerja utama serta memberikan arahan strategis yang mencakup pengembangan bisnis, penguatan manajemen risiko, peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan, percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan keamanan data dan informasi.

Melalui proses pengawasan yang berkesinambungan, Direksi tidak hanya mengevaluasi pencapaian kinerja, tetapi juga mengambil langkah antisipatif apabila terdapat potensi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Berbagai rekomendasi perbaikan dan penyesuaian strategi diberikan secara tepat waktu agar implementasi program tetap berjalan efektif, adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan secara optimal.

Selain memastikan efektivitas pelaksanaan strategi, Direksi juga terus memperkuat internalisasi budaya dan nilai-nilai Perusahaan di seluruh jenjang organisasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi, peningkatan koordinasi lintas fungsi, serta pembangunan sinergi yang solid di lingkungan *Holding* maupun Anggota *Holding*, sehingga seluruh insan Perusahaan memiliki arah dan komitmen yang sama dalam mewujudkan target kinerja dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG DITARGETKAN

Di sepanjang tahun 2025, Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang sangat solid di tengah berbagai dinamika makroekonomi dan penyesuaian regulasi industri. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih konsolidasi yang mencapai Rp5,50 triliun. Hasil tersebut mencerminkan peningkatan yang signifikan sebesar 52,63% jika dibandingkan dengan realisasi laba bersih tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp3,60 triliun (berdasarkan perhitungan komparatif *restated* PSAK 117). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2025, pencapaian laba bersih ini mencapai 419,74% dari target tahunan perusahaan.

Dari aspek pelaksanaan program Pemerintah, Perusahaan berfokus pada penguatan keberlanjutan program melalui peningkatan kualitas portofolio penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Askrindo dan Jamkrindo, yang tercermin dari penurunan *combined ratio* menjadi 65–75% pada tahun

measures. At the Group level, the Board of Directors also regularly evaluates the performance of Holding Members by reviewing the achievement of performance targets, analyzing operating results, and identifying opportunities for continuous improvement.

To ensure consistent strategy execution across the organization, the Board of Directors fosters effective coordination and communication among the holding company, holding members, business units, functional units, and operational networks. The Board of Directors also periodically reviews key performance indicators and provides strategic direction covering business development, risk management enhancement, stakeholder engagement, acceleration of digital transformation, service quality improvement, and the strengthening of data and information security.

Through this continuous oversight process, the Board of Directors not only evaluates the Company's performance but also takes proactive measures whenever there is a potential deviation from the established plans. Recommendations for improvement and strategic adjustments are issued in a timely manner to ensure that program implementation remains effective, adaptive to changes in the business environment, and capable of optimally supporting the achievement of the Company's strategic objectives.

In addition to ensuring effective strategy execution, the Board of Directors continues to strengthen the internalization of the Company's culture and core values throughout all levels of the organization. These efforts are embodied by fostering stronger collaboration, enhancing cross-functional coordination, and building solid synergies across both the holding company and its members, thereby ensuring that all employees share a common direction and commitment toward achieving the Company's performance targets and strategic objectives.

COMPARISON OF ACTUAL PERFORMANCE WITH TARGETS

Throughout 2025, the Company delivered strong financial performance despite macroeconomic uncertainties and changes in industry regulations. This achievement was reflected in consolidated net profit of IDR 5.50 trillion. This represented a significant increase of 52.63% compared with the 2024 consolidated net profit of IDR 3.60 trillion (based on comparative figures restated following the implementation of PSAK 117). Compared with the target set out in the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP), the Company's net profit achievement reached 419.74% of its annual target.

With respect to the implementation of Government programs, the Company focused on strengthening program sustainability by improving the quality of the People's Business Credit (KUR) guarantee portfolio at Askrindo and Jamkrindo, as reflected in the reduction of the combined ratio to 65%–

2025 dibandingkan periode 2024 yang berada pada kisaran 85–95%. Pada Jasa Raharja, penguatan tata kelola program asuransi wajib dilakukan melalui penguatan landasan hukum, pengelolaan risiko portofolio yang lebih *prudent*, serta peningkatan efektivitas layanan santunan kepada masyarakat. Selain itu Jasindo melakukan peningkatan kualitas layanan program Pemerintah khususnya pada jaminan kesehatan pejabat negara (Jamkesmen, Jamkestama, JamkesPimpRI, dan JamkesPurna). Guna memastikan keberlanjutan program dengan portofolio yang sehat, Jasindo telah memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan atas penyesuaian premi Jamkesmen dan Jamkestama dari Rp4,81 juta menjadi Rp6,84 juta per peserta yang disertai dengan peningkatan manfaat bagi peserta.

Kinerja keuangan Perusahaan yang mengesankan sepanjang tahun 2025 juga didukung kuat oleh efektivitas pengelolaan investasi yang *prudent* dan responsif terhadap dinamika pasar modal. Perusahaan berhasil mencatatkan *Yield of Investment* (YoI) konsolidasi sebesar 7,75%, atau berada 145 bps di atas target RKAP Investasi 2025 yang ditetapkan sebesar 6,30%. Peningkatan YoI yang tinggi ini didukung oleh berlanjutnya strategi *rebalancing* alokasi aset investasi dari deposito ke Surat Berharga Negara (SBN) maupun obligasi korporasi. Strategi ini semakin optimal berkat kondisi makroekonomi di mana *yield* SBN tenor 10 tahun sepanjang tahun 2025 mengalami tren penurunan hingga 60 bps, sehingga mendorong kenaikan nilai wajar (*mark-to-market*) pada portofolio SBN dan obligasi korporasi. Selain itu, penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 22,13% di tahun 2025 turut memberikan kontribusi keuntungan pada investasi saham di anggota *holding*, dengan kontributor peningkatan hasil investasi terbesar berasal dari aset reksa dana (Rp691 miliar), obligasi (Rp433 miliar), dan saham (Rp365 miliar).

Pencapaian target profitabilitas dan kinerja investasi di tahun 2025 turut didukung oleh efisiensi biaya operasional dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Melalui program sentralisasi anggaran dan pengadaan bersama di bidang teknologi informasi, Perusahaan mencatatkan efisiensi biaya pengadaan sebesar 20,60% (Rp74,21 miliar) serta penghematan biaya operasional fasilitas kantor sebesar 35%, yang melampaui target awal sebesar 15%. Pengendalian biaya yang disiplin tersebut, dikombinasikan dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terukur, berdampak pada peningkatan indikator produktivitas karyawan. Indikator pendapatan per karyawan mencatatkan kenaikan dari Rp5,17 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp5,18 miliar pada tahun 2025, sementara indikator laba bersih per karyawan meningkat dari Rp445,84 juta menjadi Rp676,58 juta per karyawan. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 mencerminkan hasil dari pelaksanaan strategi Direksi dalam menjaga efisiensi operasional dan pertumbuhan usaha yang stabil bagi grup.

75% in 2025 from approximately 85%–95% in 2024. At Jasa Raharja, improvements to the governance of the compulsory insurance program were achieved through strengthening the legal framework, adopting more prudent portfolio risk management practices, and enhancing the effectiveness of compensation services provided to the public. Meanwhile, Jasindo enhanced the quality of services under Government programs, particularly those relating to health insurance for state officials (Jamkesmen, Jamkestama, JamkesPimpRI, and JamkesPurna). To ensure the sustainability of these programs while maintaining a healthy portfolio, Jasindo obtained approval from the Ministry of Finance to adjust the premiums for Jamkesmen and Jamkestama from IDR 4.81 million to IDR 6.84 million per participant, accompanied by enhanced participant benefits.

The Company's strong financial performance in 2025 was also supported by prudent and responsive investment management toward capital market. The Company achieved a consolidated Yield on Investment (YoI) of 7.75%, exceeding the 2025 RKAP investment target of 6.30% by 145 basis points. This strong investment performance was driven by the continued rebalancing of investment assets from time deposits to Government Securities (SBN) and corporate bonds. The strategy benefited from favorable macroeconomic conditions, particularly the 60-basis-point decline in the yield on 10-year Government Securities during 2025, which resulted in mark-to-market gains on the Government Securities and corporate bond portfolios. Furthermore, the Indonesia Stock Exchange (IDX) Composite, which increased by 22.13% during 2025, also contributed to investment gains from the holding members' equity investments, with the largest contributors being mutual funds (IDR 691 billion), bonds (IDR 433 billion), and shares (IDR 365 billion).

The achievement of the Company's profitability and investment performance targets was further supported by operating cost efficiencies and effective human capital management. Through centralized budgeting and joint procurement initiatives in the information technology area, the Company achieved procurement cost savings of 20.60% (IDR 74.21 billion) and reduced office facility operating costs by 35%, significantly exceeding the initial target of 15%. These disciplined cost control measures, combined with measured workforce growth, contributed to improved employee productivity indicators. Revenue per employee increased from IDR 5.17 billion in 2024 to IDR 5.18 billion in 2025, while net profit per employee increased from IDR 445.84 million to IDR 676.58 million. Overall, the Company's 2025 performance reflects the successful execution of the Board of Directors' strategy to maintain operational efficiency while delivering sustainable business growth across the Group.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIANNYA

Sepanjang tahun 2025, IFG menghadapi dinamika industri, kondisi geopolitikal, global dan juga tantangan makroekonomi yang mengharuskan IFG terus berusaha untuk mencapai kinerja tahunan yang positif. Penurunan jumlah populasi masyarakat kelas menengah yang berlanjut memicu peningkatan rasio *Non-Performing Loans* (NPL) pada sektor pembiayaan ritel dan UMKM, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan profil risiko di lini usaha asuransi dan penjaminan.

Di sisi lain, penghentian penerbitan kontrak baru untuk produk penjaminan Kupra dan Kupedes pada Askrindo dan Jamkrindo sejak Januari 2025 mengakibatkan tidak adanya penerimaan kas Iuran Jasa Penjaminan (IJP) baru. Mengingat IJP untuk kontrak-kontrak yang masih berjalan telah diterima sekaligus pada saat penerbitan sebelum tahun 2025, sementara pembayaran klaim masih terus berlangsung sepanjang masa pertanggungan (sesuai *stop loss limit*), arus kas operasional perusahaan pada tahun berjalan mengalami tekanan dan mencatatkan saldo negatif. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat klaim polis restrukturisasi eks-Jiwasraya oleh IFG Life sebesar Rp5,2 triliun.

Secara menyeluruh, kondisi arus kas operasional tersebut terutama mencerminkan perbedaan waktu antara penerimaan kas dan pembayaran klaim (*cash flow timing difference*), bukan penurunan kinerja maupun profitabilitas atas portofolio bisnis perusahaan. Selain itu, implementasi perdana PSAK 117 yang dibarengi dengan reklasifikasi beberapa produk ke PSAK 109 menuntut penyesuaian akuntansi yang kompleks serta penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun sebelumnya.

Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, Direksi menjalankan serangkaian langkah mitigasi dan perbaikan strategis. Terkait risiko klaim penjaminan yang masih berjalan, pembayaran klaim tetap dilakukan sesuai ketentuan penjaminan di mana risiko atas kewajiban tersebut telah diantisipasi melalui pembentukan cadangan teknis pada periode sebelumnya oleh Askrindo dan Jamkrindo. Selain itu, kedua produk tersebut dilengkapi dengan mekanisme *stop loss* yang berfungsi membatasi eksposur risiko dan menjaga profitabilitas portofolio penjaminan. Pada segmen program Pemerintah, Direksi melakukan penyesuaian tarif premi Jamkesmen dan Jamkestama pada Jasindo dari Rp4,81 juta menjadi Rp6,84 juta per peserta yang disertai peningkatan manfaat.

CHALLENGES ENCOUNTERED AND MITIGATION MEASURES

Throughout 2025, IFG faced industry developments, geopolitical uncertainty, global economic conditions, and macroeconomic challenges that required the Group to continuously strive to achieve positive annual performance. The continued decline in Indonesia's middle-class population led to an increase in Non-Performing Loans (NPLs) within the retail and MSME financing sectors, which in turn increased the risk profile of the insurance and guarantee businesses.

In addition, the discontinuation of new guarantee contracts for the Kupra (Rural Business Credit) and Kupedes (Rural General Credit) guarantee products by Askrindo and Jamkrindo since January 2025 resulted in the absence of new Guarantee Service Fee (IJP) cash receipts. As guarantee service fees for existing contracts had been fully collected upon issuance prior to 2025, while claim payments continued throughout the guarantee period in accordance with the applicable stop-loss limit, the Company's operating cash flow came under pressure and recorded a negative balance during the year. This condition was further affected by IFG Life's payment of IDR 5.2 trillion in claim benefits under the restructured former Jiwasraya policies.

Overall, the operating cash flow position primarily reflected differences in the timing of cash flow and claim payments rather than any deterioration in the Company's business performance or portfolio profitability. Furthermore, the first-time implementation of PSAK 117, together with the reclassification of certain products under PSAK 109, required complex accounting adjustments and the restatement of the previous year's financial statements.

To address these challenges, the Board of Directors implemented a series of mitigation measures and strategic improvement initiatives. With respect to the risks arising from existing guarantee claims, claim payments continued to be made in accordance with the prevailing guarantee provisions, while the associated liabilities had already been anticipated through technical reserves established by Askrindo and Jamkrindo in prior periods. In addition, both guarantee products incorporate stop-loss mechanisms designed to limit risk exposure and preserve the profitability of the guarantee portfolio. For Government program business, the Board of Directors approved an adjustment to the premiums for Jasindo's Jamkesmen and Jamkestama programs from IDR 4.81 million to IDR 6.84 million per participant, accompanied by enhanced participant benefits.

Sementara itu, Perusahaan terus mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan melalui penguatan lini bisnis komersial dan perluasan penetrasi pasar. Secara agregat, porsi bisnis *non-program* pemerintah mencapai sekitar 52,99% dari total portofolio bisnis, yang menunjukkan penguatan kontribusi bisnis komersial terhadap kinerja *holding*. Pencapaian ini didorong oleh optimalisasi portofolio penjaminan dan asuransi, pengembangan berbagai kemitraan bisnis untuk memperluas basis nasabah dan distribusi produk, serta penguatan sinergi antar entitas melalui berbagai inisiatif strategis seperti *ecosystem play*, perluasan kemitraan distribusi B2B2C, dan penguatan digitalisasi layanan melalui platform *One by IFG*. Selain itu, Perusahaan mendorong kolaborasi bisnis melalui skema *joint underwriting/joint capacity* pada tender asuransi di ekosistem BUMN yang hingga tahun 2025 telah membukukan premi sebesar Rp433,71 miliar.

Meanwhile, the Company continued to diversify its sources of growth by strengthening its commercial business lines and expanding market penetration. On an aggregate basis, non-Government business accounted for approximately 52.99% of the Company's total business portfolio, reflecting the growing contribution of its commercial business to the holding company's overall performance. This achievement was supported by portfolio optimization across the guarantee and insurance businesses, the development of strategic partnerships to expand the customer base and distribution channels, and enhanced synergies among Group entities through various strategic initiatives, including ecosystem play, the expansion of B2B2C distribution partnerships, and the digitalization of services through the One by IFG platform. The Company also promoted business collaboration through joint underwriting and joint capacity arrangements for insurance tenders within the State-Owned Enterprises ecosystem, generating premiums totaling IDR 433.71 billion by the end of 2025.

Melalui eksekusi langkah mitigasi dan penataan portofolio yang disiplin tersebut, Direksi berhasil menjaga stabilitas operasional serta ketahanan finansial perusahaan, sehingga kendala-kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2025 dapat terkelola dengan baik tanpa mengganggu keberlanjutan bisnis grup ke depan.

Through the disciplined execution of these mitigation measures and portfolio optimization initiatives, the Board of Directors successfully maintained the Company's operational stability and financial resilience, ensuring that the challenges encountered throughout 2025 were effectively managed without compromising the long-term sustainability of the Group's business.

GAMBARAN TENTANG PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam fase ekspansi, namun dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan asumsi awal penyusunan RKAP 2026. Dalam Buku RKAP 2026, asumsi dasar yang digunakan relatif konstruktif, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90%, inflasi 2,42%, nilai tukar Rp16.100 per dolar AS, *yield* SBN 10 tahun sebesar 6,00%, dan BI *Rate* sebesar 4,25%. Asumsi tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa stabilitas harga, tren pelonggaran suku bunga, serta normalisasi tekanan eksternal akan mendukung pemulihan konsumsi, investasi, dan pasar keuangan domestik sepanjang tahun 2026.

Menutup tahun 2025 dengan fondasi keuangan dan tata kelola yang semakin solid, Direksi memandang prospek usaha Perusahaan di tahun 2026 dengan optimisme yang terukur. Keberhasilan Perusahaan melampaui target laba bersih RKAP 2025, penguatan pencadangan teknis, serta implementasi perdana PSAK 117 yang transparan telah menempatkan IFG pada posisi transisi yang sangat strategis, yakni bergerak menuju tahap penguatan dan akselerasi kinerja. Direksi meyakini bahwa pemulihan ekonomi nasional dan kelanjutan program-program strategis pemerintah akan terus menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan kebutuhan perlindungan asuransi, penjaminan, dan pengelolaan investasi di Indonesia sepanjang tahun 2026.

OVERVIEW OF BUSINESS PROSPECTS

Indonesia's economy is expected to remain in an expansionary phase in 2026, although with a higher degree of uncertainty than initially assumed in the preparation of the 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The 2026 RKAP was prepared based on relatively constructive macroeconomic assumptions, including GDP growth of 4.90%, inflation of 2.42%, an exchange rate of IDR 16,100 per USD, a 10-year Indonesian Government Bond (SBN) yield of 6.00%, and a BI Rate of 4.25%. These assumptions reflected expectations that price stability, an easing interest rate environment, and the normalization of external pressures would support the recovery of domestic consumption, investment, and financial markets throughout 2026.

Closing the year 2025 with an increasingly solid financial position and stronger corporate governance, the Board of Directors views the Company's business prospects for 2026 with measured optimism. The Company's achievement in significantly exceeding its 2025 RKAP net profit target, strengthening technical reserves, and successfully implementing PSAK 117 for the first time in a transparent manner has positioned IFG at a highly strategic transitional stage, moving toward a phase of strengthening and accelerating performance. The Board of Directors is confident that Indonesia's economic recovery and the continuation of the Government's strategic programs will continue to provide positive momentum for the growing demand for insurance, guarantee, and investment management services throughout 2026.

Prospek positif Perusahaan di tahun 2026 ditopang oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling memperkuat. Dari faktor eksternal, dukungan Pemerintah terhadap keberlanjutan program penugasan, seperti penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang semakin *prudent*, jaminan kesehatan pimpinan dan purnatugas pejabat negara (Jamkesmen, Jamkestama, JamkesPimpRI, JamkesPurna), serta optimalisasi penerimaan Sumbangan Wajib Jasa Raharja yang memberikan kepastian arus pendapatan bisnis program. Dari faktor internal, keberhasilan perusahaan meningkatkan porsi portofolio *non-program* pemerintah hingga mencapai 52,99% membuktikan bahwa lini komersial telah menjadi motor pertumbuhan baru yang mandiri. Selain itu, kebijakan pengadaan bersama IT dan sentralisasi anggaran yang berlanjut akan terus menjaga daya saing efisiensi operasional grup.

The Company's positive outlook for 2026 is supported by a combination of mutually reinforcing internal and external factors. From an external perspective, continued Government support for strategic assignment programs—including the increasingly prudent People's Business Credit (KUR) guarantee program, health insurance programs for state officials and retirees (Jamkesmen, Jamkestama, JamkesPimpRI, and JamkesPurna), as well as the optimization of compulsory contributions administered by Jasa Raharja—provides greater certainty in the revenue stream generated from Government programs. Internally, the Company's success in increasing the proportion of its non-Government business portfolio to 52.99% demonstrates that its commercial business has emerged as an independent engine of growth. Furthermore, the continued implementation of joint IT procurement and budget centralization initiatives will further enhance the Group's operational efficiency and competitiveness.

Untuk merealisasikan potensi pertumbuhan dan mencapai target proyeksi tahun 2026, Direksi merumuskan serangkaian langkah strategis utama dengan berpatokan pada arahan dan transformasi dari Pemegang Saham. Pertama, dalam kapasitasnya sebagai *lead* rencana konsolidasi (*streamlining*) perusahaan asuransi dan penjaminan berdasarkan arahan tertulis dari PT Danantara Asset Management (DAM), Perusahaan menindaklanjuti kajian komprehensif bersama konsultan independen untuk penataan anak usaha dan afiliasi. Langkah ini diwujudkan melalui kelanjutan proses penandatanganan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (PPJB) pengambilalihan Jasindo Syariah, persiapan transfer portofolio JRP, serta pemenuhan kondisi prasyarat atas Perjanjian Penggabungan Bersyarat konsolidasi penjaminan syariah guna memperoleh persetujuan regulator (OJK) dan pemangku kepentingan terkait. Kedua, perusahaan melanjutkan akselerasi pembentukan entitas *Integrated Distribution Channel* (IDC) dan *Shared Service Center* (SSC) berdasarkan persetujuan prinsip dan kajian tim *taskforce* guna meminimalkan tumpang tindih proses bisnis serta mengoptimalkan efisiensi operasional grup. Ketiga, Direksi memperluas skema *Ecosystem Play* dan penetrasi pasar B2B2C, termasuk optimalisasi platform digital *One by IFG* serta penguatan kerja sama *joint underwriting* di lingkungan BUMN.

To realize its growth potential and achieve its 2026 targets, the Board of Directors has formulated a series of key strategic initiatives in line with the Shareholder's strategic direction and transformation agenda. Firstly, in its role as the lead entity for the insurance and guarantee sector consolidation (streamlining) initiative under the written directive of PT Danantara Asset Management (DAM), the Company has followed up on a comprehensive study conducted jointly with an independent consultant regarding the restructuring of its subsidiaries and affiliated entities. This initiative includes the continuation of the signing process for the Conditional Share Purchase Agreement (PPJB) for the acquisition of Jasindo Syariah, preparations for the transfer of the JRP portfolio, and the fulfillment of conditions precedent under the Conditional Merger Agreement for the consolidation of the Sharia guarantee business to obtain the necessary approvals from the Financial Services Authority (OJK) and other relevant stakeholders. Secondly, the Company continues to accelerate the establishment of the Integrated Distribution Channel (IDC) and Shared Service Center (SSC) entities based on the task force's feasibility assessment and principle approval, with the objective of minimizing overlapping business processes and improving the Group's operational efficiency. Thirdly, the Board of Directors continues to expand the Ecosystem Play strategy and B2B2C market penetration, including optimizing the One by IFG digital platform and strengthening joint underwriting collaboration within the State-Owned Enterprises ecosystem.

Di samping akselerasi bisnis dan restrukturisasi, Direksi menaruh perhatian besar pada disiplin pengelolaan risiko, likuiditas, dan permodalan sebagai pilar utama keberlanjutan usaha di tahun 2026. Perusahaan akan terus melanjutkan penguatan tata kelola investasi terintegrasi melalui peningkatan efektivitas *Asset & Liability Management* (ALM) dan pengembangan sistem *One1nvest*, guna mempertahankan imbal hasil investasi (*Yield of Investment*) yang optimal di tengah dinamika pasar keuangan. Melalui eksekusi strategi yang disiplin dan penyelesaian inisiatif-inisiatif penataan tersebut, Direksi optimistis bahwa perusahaan siap memitigasi setiap tantangan industri dan mencatatkan penciptaan nilai (*value creation*) yang lebih tinggi bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan di tahun 2026.

Alongside business acceleration and restructuring initiatives, the Board of Directors places strong emphasis on disciplined risk, liquidity, and capital management as the key pillars supporting the Company's long-term sustainability. The Company will continue strengthening its integrated investment governance framework by enhancing the effectiveness of Asset and Liability Management (ALM) and further developing the One1nvest system to maintain an optimal Yield on Investment (YoI) amid the dynamic financial market environment. Through disciplined execution of these strategies and the completion of its strategic restructuring initiatives, the Board of Directors is confident that the Company is well positioned to mitigate industry challenges while creating greater value for the Shareholder and all stakeholders in 2026.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi secara konsisten memperkuat komitmen terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan bisnis *holding* maupun seluruh entitas anak. Seiring dengan dinamika bisnis dan penataan ulang struktur grup, Direksi berfokus pada harmonisasi praktik tata kelola konglomerasi melalui penerbitan pedoman strategis serta kebijakan pengelolaan terintegrasi. Pedoman ini menjadi acuan utama agar seluruh perusahaan anggota *holding* dapat dikelola secara lebih terarah, efektif, serta selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Upaya ini ditindaklanjuti dengan sosialisasi secara menyeluruh di lingkup IFG Grup guna memastikan pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan, peran masing-masing entitas, serta konsistensi penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis grup.

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan *solidify best practices*, Perusahaan menyelaraskan standar operasional dan kebijakan manajemen di seluruh lingkup grup. Langkah ini diwujudkan melalui harmonisasi kebijakan *Asset & Liability Management* (ALM), pembaruan Pedoman Strategis Investasi melalui Keputusan Direksi No. 18 Tahun 2025, serta penerbitan tata kelola pengadaan barang dan jasa bersama. Selain itu, pelaksanaan aksi korporasi seperti konsolidasi (*streamlining*) entitas syariah dan persiapan entitas *Shared Service Center* (SSC) dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, analisis kewajaran (*benchmark* harga), dan proses uji tuntas (*due diligence*).

Di bidang pengendalian internal dan manajemen risiko, Perusahaan memfokuskan perhatian pada pengawasan kualitas portofolio serta keandalan pelaporan keuangan pasca-implementasi perdana PSAK 117. Penerapan manajemen risiko terintegrasi dilakukan melalui penetapan mekanisme batas risiko (*stop loss*) pada portofolio penjaminan tertentu dan penguatan sistem investasi terintegrasi (*One1nvest*). Fungsi audit internal dan komite terkait secara berkala melakukan pengujian dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian operasional, pemenuhan rekomendasi auditor, serta kepatuhan terhadap regulasi di tingkat *holding* maupun anak perusahaan.

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas, Perusahaan terus mengoptimalkan pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) atau Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pengelolaan WBS dilakukan secara independen, transparan, dan terakses dengan mudah, sehingga mampu menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran secara objektif sekaligus menjadi sarana deteksi dini risiko tata kelola di lingkup grup.

DEVELOPMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2025

Throughout 2025, the Board of Directors consistently strengthened its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) as the cornerstone of accountability, transparency, and sustainable business practices across both the holding company and its subsidiaries. In response to evolving business dynamics and the ongoing restructuring of the Group, the Board of Directors focused on harmonizing governance practices across the conglomerate through the issuance of strategic guidelines and integrated management policies. These guidelines serve as the primary reference for ensuring that all holding members' companies are managed in a more focused, effective, and consistent manner in accordance with GCG principles. This initiative was followed by comprehensive socialization throughout the IFG Group to ensure a common understanding of strategic policies, the respective roles of each entity, and the consistent implementation of integrated risk management in support of the Group's strategic objectives.

As part of its commitment to solidifying best practices, the Company aligned its operational standards and management policies across the Group. This was achieved through the harmonization of Asset and Liability Management (ALM) policies, updates to the Strategic Investment Guidelines pursuant to Board of Directors Decree No. 18 of 2025, and the issuance of governance policies for joint procurement of goods and services. In addition, corporate actions, including the streamlining of Sharia business entities and preparations for the establishment of the Shared Service Center (SSC), were carried out in accordance with the principles of prudence, supported by fairness assessments (price benchmarking) and comprehensive due diligence processes.

With respect to internal control and risk management, the Company focused on overseeing portfolio quality and ensuring the reliability of financial reporting following the first-time implementation of PSAK 117. Integrated risk management was strengthened through the implementation of risk limit mechanisms (stop-loss) for selected guarantee portfolios and the enhancement of the integrated investment management system (One1nvest). The internal audit function and the relevant committees periodically reviewed and evaluated the effectiveness of operational controls, the implementation of auditors' recommendations, and compliance with applicable regulations at both the holding company and subsidiary levels.

To foster an ethical and high-integrity working environment, the Company continued to enhance the management of its Whistleblowing System (WBS). The WBS is managed independently, transparently, and through easily accessible reporting channels, enabling objective follow-up of reported violations while serving as an effective early warning mechanism for governance risks across the Group.

Secara keseluruhan, hasil *assessment* penerapan GCG tahun 2025 menunjukkan tren perkembangan yang positif dan mengindikasikan peningkatan kualitas tata kelola dibandingkan tahun sebelumnya. Skor maupun predikat GCG yang berhasil diraih mencerminkan keberhasilan Direksi dalam mentransformasi tata kelola dari sekadar pemenuhan kewajiban (*compliance*) menjadi nilai tambah strategis (*value creation*). Keberhasilan ini dibuktikan oleh capaian kinerja keuangan yang signifikan, penurunan rasio risiko portofolio, serta efisiensi operasional yang tercipta di sepanjang tahun 2025, yang sekaligus menegaskan bahwa fondasi GCG IFG semakin solid untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Overall, the results of the Company's 2025 GCG assessment indicate a positive trend and demonstrate continued improvement in governance quality compared with the previous year. The GCG score and rating achieved reflect the Board of Directors' success in transforming corporate governance from a compliance-driven obligation into a source of strategic value creation. This achievement is evidenced by the Company's strong financial performance, lower portfolio risk ratios, and improved operational efficiency throughout 2025, further reinforcing IFG's increasingly robust governance foundation in support of healthy and sustainable business growth in the years ahead.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI 2025

Sepanjang tahun 2025, komposisi anggota Direksi Perusahaan tidak mengalami perubahan. Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Direksi Perusahaan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur SDM, 1 (satu) orang Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis, dan 1 (satu) orang Direktur Keuangan. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, the composition of the Company's Board of Directors' Members remains unchanged. As of the publication of this annual report, the Company's Board of Directors consists of 5 (five) members, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 1 (one) Director of Human Capital, 1 (one) Technical Director concurrently serving as Acting Business Director, and 1 (one) Director of Finance. The composition and basis for the appointment of the Company's Board of Directors is shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Table of Composition and Basis for the Appointment of Board of Directors

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No.SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Haru Koesmahargyo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No.SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Table of Composition and Basis for the Appointment of Board of Directors

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Director of Human Capital	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No.SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.
Rianto Ahmadi	Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis Technical Director concurrently as Acting Business Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.SK-313/MBU/09/2021 tanggal 20 September 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No.SK-313/MBU/09/2021 dated: September 20, 2021
Heru Handayanto	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No.SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

Segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

The entire Board of Directors is committed to fulfilling this mandate by consistently upholding the principles of good corporate governance in the best interests of shareholders and other stakeholders.

PENUTUP

Pencapaian kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2025 mencerminkan kekuatan kolaborasi dan sinergi yang terbangun di antara seluruh pemangku kepentingan. Berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun dapat dilalui melalui komitmen bersama dalam menjaga tata kelola yang baik, memperkuat daya saing, serta mengakselerasi berbagai inisiatif strategis yang mendukung pertumbuhan Perusahaan secara berkelanjutan.

Kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham, dukungan konstruktif dari Dewan Komisaris, serta kerja sama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam setiap langkah Perusahaan. Di sisi lain, dedikasi, profesionalisme, dan semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan merupakan faktor utama yang mendorong tercapainya berbagai target dan kinerja positif sepanjang tahun.

Memasuki periode berikutnya, Direksi meyakini bahwa fondasi yang telah dibangun akan semakin memperkuat kemampuan Perusahaan dalam menangkap peluang, menjawab tantangan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Atas dasar itu, Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, seluruh manajemen, karyawan, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung perjalanan dan pertumbuhan Perusahaan.

CLOSING

The Company's performance achievements throughout 2025 reflect the strength of the collaboration and synergy built among all stakeholders. The various challenges faced throughout the year were overcome through a shared commitment to maintaining good corporate governance, strengthening competitiveness, and accelerating strategic initiatives that support the Company's sustainable growth.

The trust placed in us by our shareholders, the constructive support from the Board of Commissioners, and close cooperation with all stakeholders serve as a vital foundation for every step the Company takes. Furthermore, the dedication, professionalism, and spirit of collaboration demonstrated by the entire management team and employees were key factors driving the achievement of various targets and positive performance throughout the year.

Entering the next period, the Board of Directors is confident that the foundation that has been built will further strengthen the Company's ability to seize opportunities, address challenges, and create sustainable value for all stakeholders. Therefore, the Board of Directors extends its highest appreciation to the Shareholders, the Board of Commissioners, the entire management team, employees, and all stakeholders for the trust, support, and contributions they have provided in supporting the Company's journey and growth.

Jakarta, 29 Juni 2026
Jakarta, June 29, 2026

Atas nama Direksi
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
on behalf of the Board of Directors
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)



HEXANA TRI SASONGKO
Direktur Utama
President Director

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN
RESPONSIBILITY STATEMENT OF ANNUAL REPORT

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Buku 2025. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the Accuracy of the Contents of the 2025 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) has been presented in its entirety, and we accept full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report. This statement is made truthfully and in good faith.

Jakarta, 29 Juni 2026
Jakarta, June 29, 2026

Hexana Tri Sasongko
Direktur Utama
President Director

Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Rizal Ariansyah
Direktur SDM
Director of Human Capital

Rianto Ahmadi
Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis
Technical Director concurrently as Acting Business Director

Heru Handayanto
Direktur Keuangan
Director of Finance

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN
RESPONSIBILITY STATEMENT OF ANNUAL REPORT

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun Buku 2025. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the Accuracy of the Contents of the 2025 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) has been presented in its entirety, and we accept full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report. This statement is made truthfully and in good faith.

Jakarta, 29 Juni 2026
Jakarta, June 29, 2026



Sumiyati
Komisaris
Commissioner



Nasrudin
Komisaris
Commissioner

IFG

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



03



Setiap produk dan jasa IFG beserta entitas anak dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas yang konsisten dan optimal.

Every product and service offered by IFG and its subsidiaries is designed to meet customer needs with consistent and optimal quality.

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY

Nama Perusahaan
Company Name

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)



Nama *Holding*
Holding Name

Indonesia Financial Group (IFG)

Bentuk *Holding*
Type of Holding

BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi
Holding Company for Insurance, Guarantee and Investment SOE

Bentuk dan Status Badan Usaha
Type and Status of Business Entity

Perseroan Terbatas (PT); Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Holding Company for Insurance, Guarantee and Investment SOE

Tanggal dan Tahun Pendirian
Date and Year of Establishment

17 April 1973
April 17, 1973



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

1. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 tahun 1973, tanggal 13 April 1973, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional.
2. Akta No. 11 tanggal 17 April 1973, yang dibuat dihadapan Mohamad Ali, S.H., Notaris, di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1973 No. YA.5/191/20 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508.

1. Government Regulation of Republic of Indonesia No. 18 of 1973, dated April 13, 1973, concerning the Investment of State Equity of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the National Private Business Development.
2. Deed No. 11 dated April 17, 1973 drawn up before Mohamad Ali, S.H., Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated May 22, 1973 No. YA.5/191/20 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973 Supplement No. 508.

Bidang Usaha
Line of Business

Aktivitas perusahaan *holding* termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain, aktivitas kantor pusat, investasi langsung maupun tidak langsung, aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset, dan aktivitas konsultasi manajemen.
The holding company's activities include establishing or participating in other entities, headquarters operations, direct and indirect investments, corporate and asset restructuring, and management consulting.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (Akta Nomor 4 tanggal 4 November 2021)
100% Owned by the Republic of Indonesia (Deed Number 4 dated November 4, 2021)

Jumlah Karyawan
Total Employees

275 (orang) per 31 Desember 2025
275 (people) as of December 31, 2025

Kelompok Usaha
Business Group

1. **Anggota *Holding* Bidang Asuransi dan Penjaminan:**
   Member of Insurance and Guarantee Holding:
   a. **PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)**
   b. **PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)**
   c. **PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)**
   d. **PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)**
   e. **PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)**
2. **Anggota *Holding* Bidang Keuangan dan Pasar Modal:**
   Members of the Holding Company's Finance and Capital Markets Division:
   a. **PT Bahana Sekuritas (BS)**
   b. **PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)**
   c. **PT Bahana Artha Ventura (BAV)**
   d. **PT Bahana Kapital Investa (BKI)**
   e. **PT Bahana Mitra Investa (BMI)**
3. **Anggota *Holding* Bidang Non Keuangan**
   Member of Non-Financial Holding Company
   a. **PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)**

Dasar Hukum Pembentukan *Holding*
Legal Basis for the Establishment of Holding

1. PP No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional maksud dan tujuan dari IFG adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *Holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk UMKM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Indonesia Financial Group, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) Askrindo, Perusahaan Perseroan (Persero) Jasindo, Perusahaan Perseroan (Persero) Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) Jamkrindo.

1. Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development, the purpose and objective of IFG is to carry out activities as a Holding company in the field of finance and investment as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including micro, small and medium enterprises (UMKM), and optimizing the utilization of the Company's (Persero) resources based on the principles of good corporate governance.
2. Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of Indonesia Financial Group, derived from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia in Askrindo (Persero), Jasindo (Persero), Jasa Raharja (Persero), and Jamkrindo (Persero).

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp93.719.537.000.000
IDR 93.719.537.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully-Paid Capital

Rp90,163 triliun
IDR 90.163 trillion

Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
Business Network and Operation Area

Seluruh wilayah di Indonesia
All regions in Indonesia

Alamat
Address

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3,
Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3,
Senayan, Kebayoran Baru
South Jakarta City, DKI Jakarta 12190

(+62 21) 50890929
info@ifg.id
www.ifg.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY



SEJARAH PENDIRIAN DAN SEKILAS PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) pertama kali didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan modal kerja. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis, BPUI melebarkan bisnis layanan keuangannya di bidang investasi pasar modal, *investment banking*, dan *securities trading* melalui PT Bahana Sekuritas (BS), melakukan *joint venture* dengan Trust Company of the West dengan membentuk perusahaan manajemen investasi PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), layanan pendampingan dan pembiayaan UMKM melalui PT Bahana Artha Ventura (BAV), layanan *property management* melalui PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), serta layanan penasihat investasi dan keuangan melalui BKI.

Memasuki tahun 2020, untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya di bidang keuangan dan investasi, diperlukan

HISTORY OF ESTABLISHMENT AND OVERVIEW OF COMPANY DEVELOPMENT

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) was first established in 1973 with the aim of fostering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia by providing assistance and working capital. Along with business development and needs, BPUI expanded its financial services business in the fields of capital market investment, investment banking, and securities trading through PT Bahana Sekuritas (BS). It conducted a joint venture with Trust Company of the West by forming an investment management company PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), mentoring and financing services for MSMEs through PT Bahana Artha Ventura (BAV), property management services through PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), and investment and financial advisory services through BKI.

As we enter 2020, to support the Government's policy in national economic development, especially in the field of finance and investment, it is necessary to change the purpose

perubahan maksud dan tujuan dari pendirian BPUI. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, maksud dan tujuan dari BPUI adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *Holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk UMKM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPUI melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu:

1. Aktivitas perusahaan *Holding* termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain;
2. Aktivitas kantor pusat;
3. Investasi langsung maupun tidak langsung;
4. Aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; dan
5. Aktivitas konsultasi manajemen.

Selain kegiatan usaha utama, BPUI dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Selanjutnya, di tahun 2020, Pemerintah melalui PP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, menetapkan BPUI sebagai BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN melalui surat nomor S-203/MBU/03/2020 perihal Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian dituangkan dalam akta notarial berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Menteri BUMN selaku RUPS BPUI. Dengan penetapan tersebut, maka BPUI resmi menjadi *Holding* dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), di samping Anggota *Holding* yang telah ada sebelumnya.

Pada tahun yang sama dengan ditetapkannya BPUI sebagai *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, BPUI melakukan transformasi *brand* dan logo menjadi Indonesia Financial Group (IFG). Perubahan *brand* dan logo tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri BUMN sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2020, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Pendirian IFG Life sebagai bagian dari Anggota *Holding* IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan

and objectives of the establishment of BPUI. In this regard, based on Article 2 of Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 1973 concerning the Investment of State Equity of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development, the purpose and objective of BPUI is to conduct activities as a Holding company in finance and investment as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including MSMEs, and optimizing the utilization of resources based on the principles of good corporate governance. In order to achieve these aims and objectives, BPUI carries out the main business activities, namely:

1. Activities in Holding companies include establishing or participating in other entities;
2. Activities in head office;
3. Direct and indirect investment;
4. Corporate/asset restructuring activities; and
5. Management consulting activities.

In addition to the main business activities, BPUI may conduct other business activities in order to optimize the utilization of its resources.

Furthermore, in 2020, through Government Regulation Number 20 of 2020 concerning the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, the Government established BPUI as a SOE Holding Insurance, Guarantee, and Investment. After the issuance of the Government Regulation, the Ministry of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company, followed up by issuing a Decree of the Minister of SOEs. It is stated in letter number S-203/MBU/03/2020 concerning Approval of Acceptance of Share Transfers dated March 31, 2020, which was then stated in a notarial deed based on the Deed of Statement of the Meeting Decision of the Minister of SOEs as the GMS of BPUI. With this determination, BPUI officially became a Holding of PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), in addition to the existing Holding Members.

In the same year as the establishment of BPUI as an Insurance, Guarantee and Investment Holding, BPUI transformed its brand and logo into Indonesia Financial Group (IFG). The brand and logo changes have received approval from the Minister of SOEs as stated in letter number S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020.

Furthermore, in December 2020, the Government together with the House of Representatives of the Republic of Indonesia approved the State Equity Participation (PMN) to IFG to establish PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). The establishment of IFG Life as part of IFG Holding Members is IFG's business map for its business portfolio in the life insurance, health

dan dana pensiun. IFG mendukung prioritas BUMN dalam mempercepat pembangunan nasional dan berkomitmen untuk memenuhi mandatnya dengan kepatuhan penuh pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar terciptanya pengelolaan perusahaan yang *prudent* dan *accountable*.

Integrasi ke dalam Ekosistem Danantara

Sejalan dengan langkah pemerintah dalam mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset strategis negara, pada tahun 2025 terjadi restrukturisasi material yang memengaruhi struktur kepemilikan dan posisi strategis IFG. Pada bulan Maret 2025, pemerintah menyerahkan mayoritas saham IFG kepada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai bagian dari inisiatif untuk membentuk *holding* operasional di internal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Selanjutnya, pada bulan Juli 2025, IFG mengalihkan kepemilikan mayoritas saham PT Bahana Mitra Investa kepada Danantara dalam rangka pembentukan *holding* investasi, yang mana perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi Danantara Investment Management. Melalui serangkaian aksi korporasi tersebut, IFG kini memperkuat kedudukannya sebagai *holding* BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi yang terintegrasi penuh di dalam ekosistem Danantara Indonesia.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sejak awal didirikan pada tahun 1973 hingga saat ini, Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian nama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI. Namun, seiring dengan ditetapkannya PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, *Holding* ditunjuk oleh Pemerintah sebagai *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi sehingga Perusahaan melakukan transformasi *brand* sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

and pension fund sectors. IFG supports the priorities of SOEs in accelerating national development and is committed to fulfilling its mandate in full compliance with the principles of good corporate governance in order to create prudent and accountable corporate management.

Integration into the Danantara Ecosystem

In line with the Government's efforts to consolidate and optimize the State's strategic assets, a material restructuring took place in 2025 that affected IFG's ownership structure and strategic position. In March 2025, the Government transferred the majority of IFG's shares to Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) as part of an initiative to establish an operational holding company within Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Subsequently, in July 2025, IFG transferred its majority ownership in PT Bahana Mitra Investa to Danantara as part of the establishment of an investment holding company. The Company was later renamed Danantara Investment Management. Through this series of corporate actions, IFG has further strengthened its position as a State-Owned Enterprise (SOE) holding company in the insurance, guarantee, and investment sectors, fully integrated into the Danantara Indonesia ecosystem.

NAME CHANGE INFORMATION

Since its establishment in 1973 until the present, the Company has never changed its name from PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or BPUI. However, along with the enactment of Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020, the Holding Company was appointed by the Government as an Insurance, Guarantee, and Investment Holding so that the Company carried out a brand transformation as stated in the Ministry of SOEs Letter No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Brand and Logo Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to Indonesia Financial Group (IFG).



JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2018

Pada bulan Juni 2018, BPUI melakukan aktivasi PT Bahana Kapital Investa (BKI) sebagai salah satu anggota *Holding* yang bergerak di bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*).
In June 2018, BPUI activated PT Bahana Kapital Investa (BKI) as one of the Holding members engaged in investment and advisory services.

2004

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2004, *Holding* mengakuisisi PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan Gedung (*building management*).
Furthermore, on December 23, 2004, the Holding Company acquired PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), a company engaged in building management.

1993

Pada tahun 1993 *Holding* melakukan pengembangan usaha di bidang pasar modal, di mana kemudian *Holding* membentuk anggota *Holding* di bidang modal ventura dan pembinaan usaha kecil dan menengah BAV, di bidang pasar modal dan pasar uang (PT Bahana Securities), dan di bidang manajemen investasi BTIM.
In 1993, the Holding expanded its business in the capital market sector, where it formed members of the Holding in the venture capital and small and medium enterprise development sector BAV, in the capital and money market sector (PT Bahana Securities), and in the investment management sector BTIM.

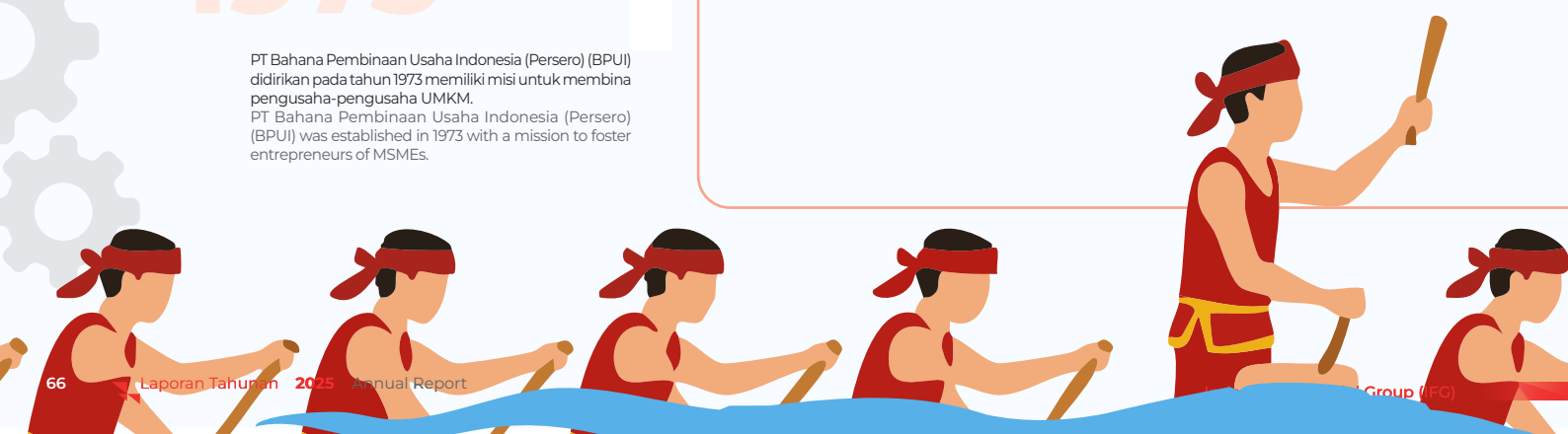
1973

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) didirikan pada tahun 1973 memiliki misi untuk membina pengusaha-pengusaha UMKM.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) was established in 1973 with a mission to foster entrepreneurs of MSMEs.

2020

1. PP No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional merupakan landasan hukum penunjukan *Holding* sebagai *Holding* di bidang Keuangan dan investasi di mana kemudian dengan PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Indonesia Financial Group sebagai landasan hukum penunjukan *Holding* sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan sebagai tambahan dari peran *Holding* selaku *Holding* di bidang Keuangan dan Investasi.
2. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN melalui surat No. S-203/MBU/03/2020 perihal Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian dituangkan dalam akta notaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Menteri BUMN selaku RUPS Indonesia Financial Group maka *Holding* resmi menjadi *Holding* dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) disamping anak-anak Perusahaan yang sudah ada yaitu Bahana Sekuritas, BTIM, BAV, GNTU dan BKI.
3. Sehubungan dengan pembentukan *Holding* tersebut dan sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).
4. Di bulan Desember 2020, Pemerintah bersama Komisi VI DPR RI menyetujui penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan IFG Life. Pendirian IFG Life sebagai bagian dari IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun.

1. Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning the Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development is the legal basis for the appointment of Holding as a Holding in Finance and investment where later with Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Capital of Indonesia Financial Group as a legal basis for the appointment of Holding as a Holding of SOEs in Insurance and Guarantee as an addition to the role of Holding as a Holding in the field of Finance and Investment.
2. After the issuance of the Government Regulation (PP) the Ministry of SOEs as the General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company followed up by issuing a Decree of the Minister of SOEs through letter No. S-203/MBU/03/2020 regarding Approval of Acceptance of Share Transfer dated March 31, 2020, which was then stated in a notarial deed based on the Deed of Meeting Resolution of the Minister of SOEs as the GMS of Indonesia Financial Group, the Holding officially became the Holding of PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) in addition to the existing subsidiaries, namely Bahana Sekuritas, BTIM, BAV, GNTU and BKI.
3. In connection with the establishment of the Holding Company and in accordance with the Ministry of SOEs Letter No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Brand and Logo Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to Indonesia Financial Group (IFG).
4. In December 2020, the government and Commission VI of the House of Representatives approved the State Equity Participation (PMN) to IFG to establish IFG Life. The establishment of IFG Life as part of IFG becomes IFG's business map for its business portfolio in the life insurance, health and pension fund sectors.



2023

1. Pada 30 November Fundraising internal IFG sebesar Rp1,46 triliun yang telah disetorkan kepada IFG Life.
2. Pada tanggal 29 Desember Program Penyelamatan Pemegang Polis Jiwasraya Berakhir, IFG Life Menerima Pengalihan Polis Hasil Restrukturisasi.
3. Pada 31 Desember Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3,00 triliun yang telah disetorkan kepada IFG Life.

1. On November 30, IFG's internal fundraising amounted to IDR 1.46 trillion which has been deposited to IFG Life.
2. On 29 December Jiwasraya Policyholder Rescue Program Ends, IFG Life Receives Transfer of Restructured Policy Results.
3. On December 31, State Equity Participation amounting to IDR 3.00 trillion which has been deposited to IFG Life.

2022

1. Terbit POJK Nomor 13/ POJK.05/2022 tentang Pengawasan Indonesia Financial Group.
2. Sebagai Ketua *Project Management Office* (PMO) Percepatan Integrasi Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, IFG melakukan penandatangan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) rencana kerja sama pengelolaan aset investasi dana pensiun antara IFG dan 8 BUMN pendiri dana pensiun.

1. POJK Number 13/POJK.05/2022 was issued concerning the Supervision of Indonesia Financial Group.
2. As the Chairperson of the Project Management Office (PMO) for the Acceleration of the Integration of BUMN Pension Fund Management, IFG signed a Memorandum of Understanding (MoU) on the cooperation plan for the management of pension fund investment assets between IFG and 8 SOEs pension fund founders.

2021

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-387/ NB.2/2021, Indonesia Financial Group (IFG) melalui entitas anggota *Holding*, IFG Life, secara resmi menerima pengalihan polis eks Jiwasraya. IFG menerima penugasan dari Pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dalam rangka penyelamatan Jiwasraya, dan penerimaan pengalihan polis ini merupakan salah satu langkah strategis dalam melaksanakan penugasan tersebut. Sejalan dengan itu, IFG Life telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemegang polis eks Jiwasraya guna memastikan proses transisi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Based on a letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-387/NB.2/2021, Indonesia Financial Group (IFG), through its holding company, IFG Life, has officially received the transfer of former Jiwasraya policies. IFG was assigned by the government to restructure Jiwasraya as part of its rescue effort, and the transfer of these policies is one of the strategic steps in fulfilling this assignment. In line with its mandate, IFG Life has conducted outreach to all former Jiwasraya policyholders to assure them that the transition process is being handled in a transparent and accountable manner.

2024

Pada tanggal 26 Juni 2024 IFG melalui IFG Life melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) penyelesaian akuisisi 80% saham Mandiri Inhealth. Kepemilikan saham yang dibeli oleh IFG Life terdiri dari 60% saham milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 10% saham milik PT Kimia Farma Tbk, dan 10% saham milik IFG.

On June 26, 2024, IFG, through IFG Life, signed the Deed of Sale and Purchase (AJB) finalizing the acquisition of an 80% stake in Mandiri Inhealth. The shares acquired by IFG Life consist of 60% owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 10% owned by PT Kimia Farma Tbk, and 10% owned by IFG.

2025

1. Penerapan Standar Akuntansi Baru (PSAK 117): Pada tahun 2025, IFG secara penuh mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang Kontrak Asuransi bagi seluruh anggota *holding* di bidang asuransi. Implementasi standar baru ini mengharuskan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun 2024 untuk memastikan keterbandingan dan keandalan informasi keuangan konsolidasian.
2. Divestasi Bahana Mitra Investa: Pada April 2025, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyampaikan arahan untuk menunjuk anak perusahaan IFG, yaitu PT Bahana Mitra Investa, sebagai calon perusahaan *holding* investasi. IFG memberikan asistensi hukum dan mempersiapkan aksi korporasi divestasi untuk mengalihkan kepemilikan saham perusahaan tersebut.

1. Implementation of a New Accounting Standard (PSAK 117): In 2025, IFG fully implemented Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 117 on Insurance Contracts across all insurance holding members. The implementation of this new standard required the restatement of the 2024 financial statements to ensure the comparability and reliability of consolidated financial information.
2. Divestment of Bahana Mitra Investa: In April 2025, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara issued a directive to designate IFG's subsidiary, PT Bahana Mitra Investa, as the prospective investment holding company. IFG provided legal assistance and prepared the necessary corporate actions for the divestment to transfer its share ownership in the company.



MAKNA LOGO PERUSAHAAN
MEANING OF COMPANY'S LOGO

Logo perusahaan telah diatur berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG). Berdasarkan ketentuan tersebut, logo Perusahaan memiliki pengertian sebagai berikut:

The company's logo has been regulated based on the Ministry of State-owned Enterprises' Letter No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Brand and Logo Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to Indonesia Financial Group (IFG). Based on these provisions, the Company's logo has the following meaning:



Tipografi | Typography:

Logo IFG telah didesain untuk membangkitkan kehadiran yang bermakna. Garis-garis sudut logo memberikan kesan kontemporer dari sebuah organisasi yang berorientasi ke depan.
The IFG logo has been designed to evoke a meaningful presence. The angular lines of the logo give a contemporary impression of a forward-looking organization.

Ikonografi | Iconography:

Perangkat yang saling berhubungan dengan huruf "I" melambangkan gerak dan aspirasi ke depan.
The interconnected device with the letter "I" symbolizes forward motion and aspiration.

Warna | Color:

Merah mewakili dinamika, kekuatan, dan semangat. Warna merah yang kami gunakan sama persis dengan warna merah bendera Indonesia yang mewujudkan kebanggaan kami akan warisan nasional.
Red represents dynamism, strength, and passion. The red color we use is exactly the same as the red color of the Indonesian flag which embodies our pride in our national heritage.

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA
LINE OF BUSINESS AS WELL AS PRODUCTS AND SERVICES

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum dalam Akta No. 25 Tanggal 4 April 2024 , disebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *Holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk UMKM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on the Company's Articles of Association as stated in Deed No. 25 Dated April 4, 2024, states that the purpose and objective of the company is to perform activities as a Holding company in the field of finance and investment as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including MSMEs, and optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sebagai BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi saat ini memiliki 11 (sebelas) Anggota *Holding*, yang terdiri dari 5 (lima) Anggota *Holding* yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan dan 5 (lima) Anggota *Holding* yang bergerak di bidang keuangan dan pasar modal, serta 1 (satu) Anggota *Holding* di bidang non keuangan. Melalui 11 (sebelas) Anggota *Holding*, IFG melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasehat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran.

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan melalui 11 (sebelas) Anggota *Holding*nya, adalah sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES

As an SOE Holding Insurance, Guarantee and Investment which currently has 11 (eleven) Holding Members, consisting of 5 (five) Holding Members engaged in insurance and guarantee and 5 (five) Holding Members engaged in finance and capital markets, as well as 1 (one) Holding Member in the non-financial sector. Through its 11 (eleven) Holding Members, IFG conducts business activities in insurance, guarantees, venture capital, securities, investment managers, investment advisors, financial consultants and management consultants, as well as other financial services businesses including office building management.

The business activities carried out by the Company through its 11 (eleven)Holding Members are as follows:

Kegiatan Usaha Business Activities	**Telah/Belum Dijalankan** Implemented/Not Implemented	**Keterangan** Description
Jasa Keuangan dan Pasar Modal Financial Services and Capital Markets	√	Telah dijalankan melalui Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), dan PT Bahana Mitra Investa (BMI). It has been implemented through Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), and PT Bahana Mitra Investa (BMI).
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reassurance	√	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). It has been implemented through PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
Penjaminan Guarantee	√	Telah dijalankan melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). It has been implemented through PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Asuransi Jiwa dan Kesehatan Life and Health Insurance	√	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). It has been implemented through PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).
Jasa Keuangan Non Keuangan Non-Financial Services	√	PT Grahaniaga Tatautama (GNTU).

√ = telah dijalankan / x = belum dijalankan
√ = has been implemented / x = has not been implemented

PRODUK DAN LAYANAN

IFG menawarkan jenis-jenis produk dan jasa yang dimiliki melalui 11 (sebelas) anggota *holding*, sebagai berikut:

PRODUCTS AND SERVICES

IFG offers its products and services through 11 (eleven) holding members, as follows:

Jenis Produk dan Layanan Type of Products and Services	**Keterangan** Description
Produk Product(s)	
Reksa Dana Mutual Fund	IFG melalui PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), IFG memiliki beragam produk Reksadana baik Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Ekuitas, Reksadana Campuran, Reksadana Index, Reksadana Terproteksi, Reksadana Penyertaan Terbatas/Investasi Alternatif, dan KPD. IFG through PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), IFG has a variety of Mutual Fund products including Money Market Mutual Funds, Fixed Income Mutual Funds, Equity Mutual Funds, Balanced Mutual Funds, Index Mutual Funds, Protected Mutual Funds, Limited Participation/ Alternative Investment Funds, and Fund Management Contract (KPD).
Pendanaan UMI Ultra Micro Financing	BAV sebagai *agent of Development* UMKM menyalurkan program UMi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada Koperasi untuk mendukung pengusaha mikro. BAV as an agent of Development MSME channels the UMi program of the Government Investment Center (PIP) to Cooperatives to support micro entrepreneurs.
Pendanaan PMVD Short-term Venture Capital Company (PMVD) Fund	Melalui anggota *Holding* Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia, maka BAV memperkuat jaringan kerja dan memperluas basis UMKM yang ada di setiap daerah. Through its Regional Venture Capital Company (PMVD) Holding member that spread across 25 provinces in Indonesia, BAV can strengthen its network and expand the base of MSMEs in each region.
Pendanaan PMVJP Short-term Venture Capital Company (PMVJP) Fund	PMVJP merupakan pembiayaan Anjak Piutang/*Invoice Financing* yaitu jasa pengalihan piutang (hak tagih) jangka pendek yang dimiliki oleh Nasabah kepada BAV. Short-term Venture Capital Company (PMVJP) is Factoring/Invoice Financing, which is short-term receivables transfer service owned by the Customer to BAV.
Layanan Services	
Asuransi dan Penjaminan Insurance and Guarantee	• **Jamkrindo**: Penjaminan Konsumtif, Penjaminan Produktif, KUR, PEN dan Suretyship • **Askrindo**: KUR, AKK, AKM, Askredag, Surety, KBG, Asuransi Umum, LC/SKBDN dan PEN • **Jasindo**: *Cargo, Aviation, M.Hull, Offshore, Onshore, Fire, Engineering, Motor, Satellite, Public Liability, Accidental & Health, Credit, Suretyship* dan *Miscellaneous* • **Jasa Raharja**: IW dan SW • **Jamkrindo:** Consumptive Guarantee, Productive Guarantee, People's Business Credit (KUR), PEN and Suretyship • **Askrindo**: People's Business Credit (KUR), AKK, AKM, Trade Credit Insurance (Askredag), Surety, KBG, General Insurance, LC/SKBDN and PEN • **Jasindo**: Cargo, Aviation, Marine Hull, Offshore, Onshore, Fire, Engineering, Motor, Satellite, Public Liability, Accidental & Health, Credit, Suretyship and Miscellaneous • Jasa **Raharja**: Compulsory Premiums (IW) and Compulsory Contribution (SW)
Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat ekuitas (saham) Brokerage Services for trading equity securities (shares)	Bahana Sekuritas (BS) memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek dengan strategi meningkatkan volume transaksi untuk memperbesar *market shares* dan untuk meningkatkan pendapatan usaha. Bahana Sekuritas (BS) is licensed as a Broker-Dealer with a strategy to increase transaction volume to enlarge market shares and to increase business income.
Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Debt and Sukuk Securities (EBUS) Trading Brokerage Services	Bahana Sekuritas (BS) memiliki layanan Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS). Hal ini selaras dengan penetapan POJK No. 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk. Bahana Sekuritas (BS) has Debt and Sukuk Securities Brokerage Services (EBUS). This is in line with the stipulation of POJK No. 9/POJK.04/2019 concerning Broker-Dealers for Debt Securities and Sukuk.
Penjamin Emisi Efek Underwriter	Bahana Sekuritas (BS) melakukan penjaminan emisi efek untuk saham dan utang. Bahana Sekuritas (BS) underwrites securities for shares and debt.
Penasihat Keuangan Financial Advisor	PT Bahana Kapital Investa (BKI) merupakan anggota *Holding* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang bergerak di bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*financial advisory*) dan sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan nama PT Bahana Mitra Usaha. Seiring perkembangannya, BKI memiliki layanan jasa konsultasi meliputi *Feasibility Study, Merger and Acquisition, Divestment, Capital Raising, Debt Restructuring, Alliance & Joint Venture, Risk Management*, dan *Leverage Buyout*. PT Bahana Kapital Investa (BKI) is a member of the PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia holding company, which operates in the fields of investment and financial advisory services. It was established in 1993 under the name PT Bahana Mitra Usaha. Along with its development, BKI has consulting services including Feasibility Study, Merger and Acquisition, Divestment, Capital Raising, Debt Restructuring, Alliance & Joint Venture, Risk Management, and Leverage Buyout.

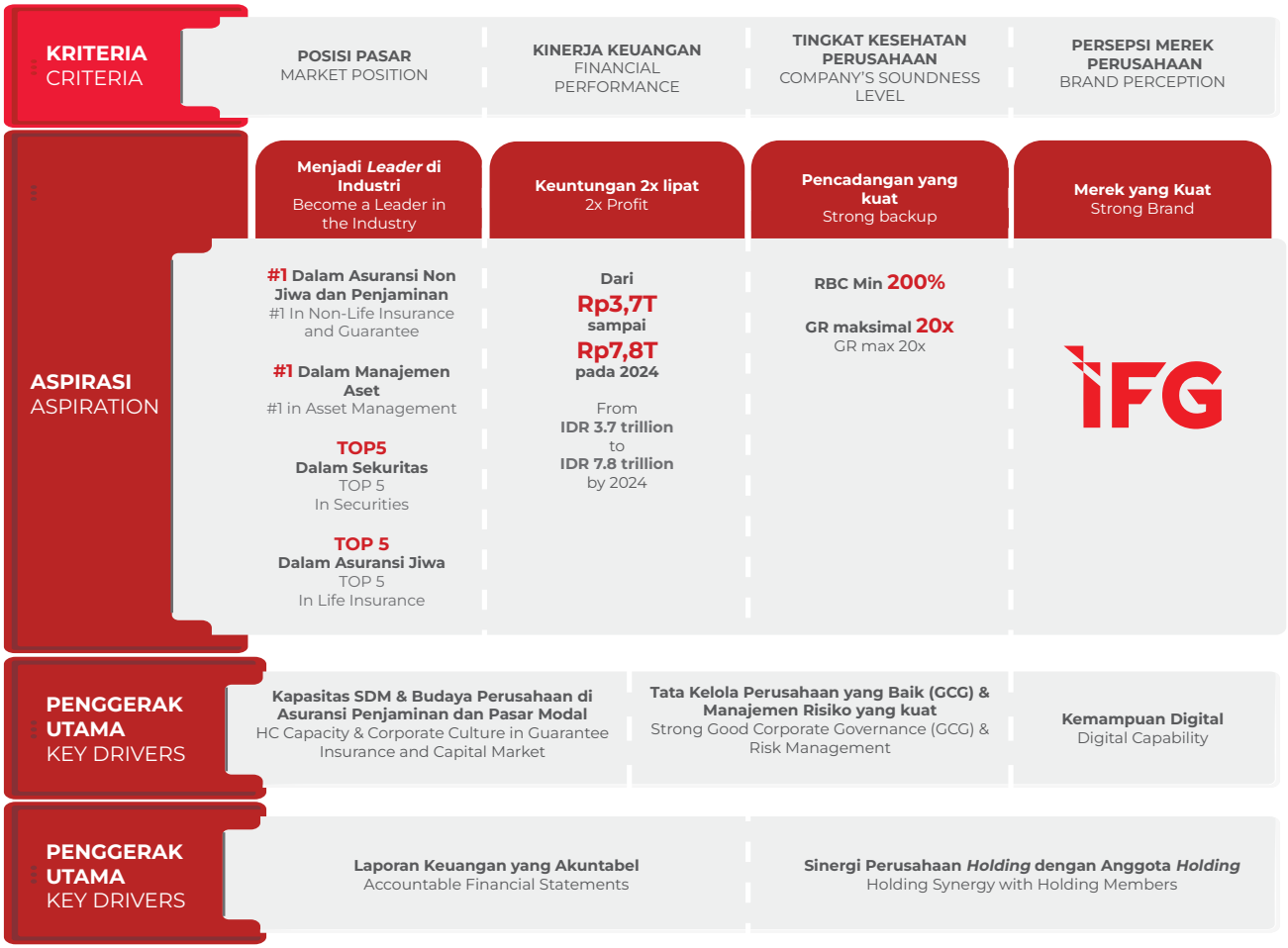
Jenis Produk dan Layanan Type of Products and Services	**Keterangan** Description
Manajemen Aset Asset Management	BTIM mendapatkan pendapatan usaha yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan adalah pendapatan usaha yang dihasilkan dari jasa pengelolaan produk investasi yang dikelola perusahaan. Prinsip pengelolaan risiko yang berhati-hati (*prudent*) dan ketaatan terhadap peraturan telah melekat dan dijalankan oleh seluruh insan BTIM dalam praktik pengelolaan perusahaan dan portofolio secara berkesinambungan. BTIM derives its operating income from its main business activities, namely income generated from investment management services provided by the company. The principles of prudent risk management and regulatory compliance have been embedded and implemented by all BTIM people in the practice of managing the company and portfolio on an ongoing basis.
Investasi dan Manajemen Properti Property Investment and Management	PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) merupakan pemilik dan pengelola Gedung Graha CIMB yang merupakan *landmark* Jalan Sudirman dan telah memperoleh Sertifikasi *Green Building* sejak tahun 2015. PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) is the owner and manager of Graha CIMB Building which is a landmark of Jalan Sudirman and has obtained Green Building Certification since 2015.
Jasa Keuangan Non Bank dan Investasi Non-Bank Financial Services and Investment	BMI bergerak di bidang jasa keuangan non bank dan investasi, BMI pada tahun buku 2022 tidak melakukan kegiatan usaha atau dalam kondisi *dormant*. PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) is the owner and manager of Graha CIMB Building which is a landmark of Jalan Sudirman and has obtained Green Building Certification since 2015.

KOMPETENSI INTI

Perusahaan memiliki kompetensi inti sebagai penyedia solusi yang berkualitas bagi pelanggannya. Setiap produk dan jasa yang dibuat oleh Perusahaan adalah solusi terhadap kebutuhan pelanggan dan diberikan dalam kualitas yang tinggi secara konsisten.

CORE COMPETENCIES

The Company has a core competency as a provider of quality solutions to its customers. Every product and service made by the Company is a solution to customer needs and is delivered in consistently high quality.



JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI
BUSINESS NETWORK AND OPERATIONAL AREA



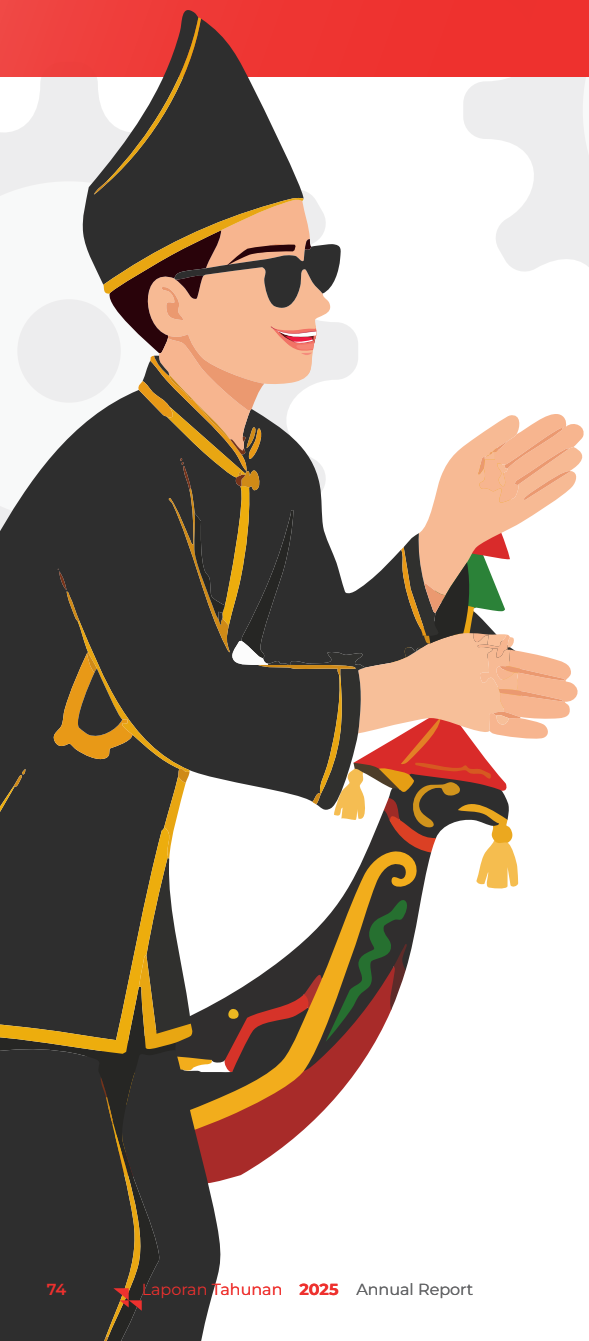
Seluruh Wilayah Indonesia
All Regions in Indonesia



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE

VISI | VISION

"Untuk Menjadi Salah Satu Mitra Bidang Keuangan yang Paling Bernilai dan Disegani"
"To Become One of the Most Valuable & Respected Financial Partner"



MISI | MISSION

1. **Memberikan jaminan perlindungan dasar dan kemudahan usaha kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup bangsa di seluruh wilayah dalam kerangka negara kesatuan.**
2. **Memberikan pelayanan berkualitas, solusi inovatif dan terintegrasi melalui SDM yang kompeten dan produk yang accessible dalam menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan nilai pemegang saham.**
3. **Menjalankan usaha yang *sustainable* dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan sinergi dan prinsip *Utmost Good Faith*.**

1. Providing fundamental protection and business accessibility to support social welfare and improve quality of life across all regions within the framework of a unified nation.
2. Delivering high-quality, innovative, and integrated solutions through competent human capital and accessible products to meet customer needs and enhance shareholder value.
3. Conducting sustainable business practices by upholding good corporate governance, synergy, and the principle of utmost good faith.

REVIU VISI DAN MISI PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI

Visi dan Misi Perusahaan senantiasa ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Visi dan Misi Perusahaan saat ini yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam RKAP 2026 yang telah disahkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS melalui surat nomor 98 tahun 2026 dan Nomor SK.014/PS.DAM/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

REVIEW OF COMPANY VISION AND MISSION BY KEY MANAGEMENT

The Company's vision and mission are regularly reviewed with the involvement of the Board of Directors, Board of Commissioners, and other management to ensure their relevance to the Company's business development. The Company's current Vision and Mission, which have been approved and signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners as set forth in the 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), have been ratified by the Minister of State-Owned Enterprises in his capacity as the General Meeting of Shareholders (RUPS) via Letter No. 98 of 2026 and Decree No. SK.014/PS. DAM/I/2026 dated January 30, 2026, regarding the Approval of the 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

TUJUAN PERUSAHAAN

Adapun 3 (tiga) objektif utama sebagai Perusahaan BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi,adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Bisnis non Asuransi Jiwa
   Saat ini, perusahaan non asuransi jiwa terbesar yang memberikan pengaruh terhadap keseimbangan kondisi di industri, praktik terbaik dan potensi sinergi dengan perusahaan BUMN lainnya.
   a. Menjaga keseimbangan industri dengan mitra-mitra bisnis (mis. bank, *dealers,* penyedia layanan kesehatan) untuk memastikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan;
   b. Menyediakan arahan yang strategis termasuk fokus pada bisnis, *cross-selling, shared-services*, dan infrastruktur; dan
   c. Manajemen risiko yang kuat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Transformasi Bisnis Asuransi Jiwa
   Menciptakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia dengan memetamorfosiskan perusahaan asuransi tertua di Indonesia.
   a. Konsep "*Bridge Bank*": Perusahaan asuransi jiwa yang baru untuk mengambil alih portofolio yang direstrukturisasi;
   b. Restrukturisasi yang masif untuk membuat portofolio yang sehat;
   c. Didorong oleh dukungan signifikan dari pemerintah termasuk PMN, konsesi ke pasar *captive*, dan lain-lain; dan
   d. Bisnis baru termasuk kerja sama dengan BUMN, membuat *platform* kesehatan yang baru, dan institusi pemerintahan.
3. Agen Pengembangan
   Menciptakan sebuah model yang berkelanjutan sebagai agen pengembangan untuk mendukung program pemerintah.
   a. Mengembangkan sebuah model yang berkelanjutan untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang melibatkan Jamkrindo dan Askrindo;
   b. Menyediakan penjaminan kredit untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMKM (bisnis mikro dan kecil); dan
   c. Memastikan Jamkrindo dan Askrindo tidak terekspos risiko kredit yang berlebihan.

COMPANY'S OBJECTIVES

The 3 (three) main objectives as an Insurance, Guarantee, and Investment Holding Company are as follows:

1. Increase Non-Life Insurance Business
   Currently, the Company is the largest non-life insurance company that has an influence on the balance of conditions in the industry, best practices and potential synergies with other state-owned enterprises.
   a. Maintain a balance of Industry with business partners (e.g. banks, dealers, healthcare providers) to ensure more sustainable business practices;
   b. Provide strategic direction including focus on business, cross-selling, shared-services, and infrastructure; and
   c. Strong and prudent risk management.
2. Life Insurance Business Transformation
   Creating one of the largest life insurance companies in Indonesia by metamorphosing the oldest insurance company in Indonesia.
   a. "Bridge Bank" concept: A new life insurance company to take over the restructured portfolio;
   b. Massive restructuring to create a healthy portfolio;
   c. Driven by significant support from the government including State Equity Participation (PMN), concessions to captive markets, etc; and
   d. New business including cooperation with SOEs, creating new healthcare platforms, and government institutions.
3. Development Agent
   Create a sustainable model as a development agent to support government programs.
   a. Develop a sustainable model to support the National Economic Recovery (PEN) Program involving Jamkrindo and Askrindo;
   b. Provide credit guarantees for KUR (People's Business Credit) and MSMEs (micro, small, and medium enterprises);
   c. Ensure Jamkrindo and Askrindo are not exposed to excessive credit risk.

SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Sementara itu, IFG sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah menerapkan nilai budaya AKHLAK sebagai penyempurnaan dari budaya perusahaan, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagaimana arahan Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Keputusan Direksi Indonesia Financial Group No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Indonesia Financial Group tanggal 29 September 2020.

BASIC ATTITUDE AND CORPORATE CULTURE

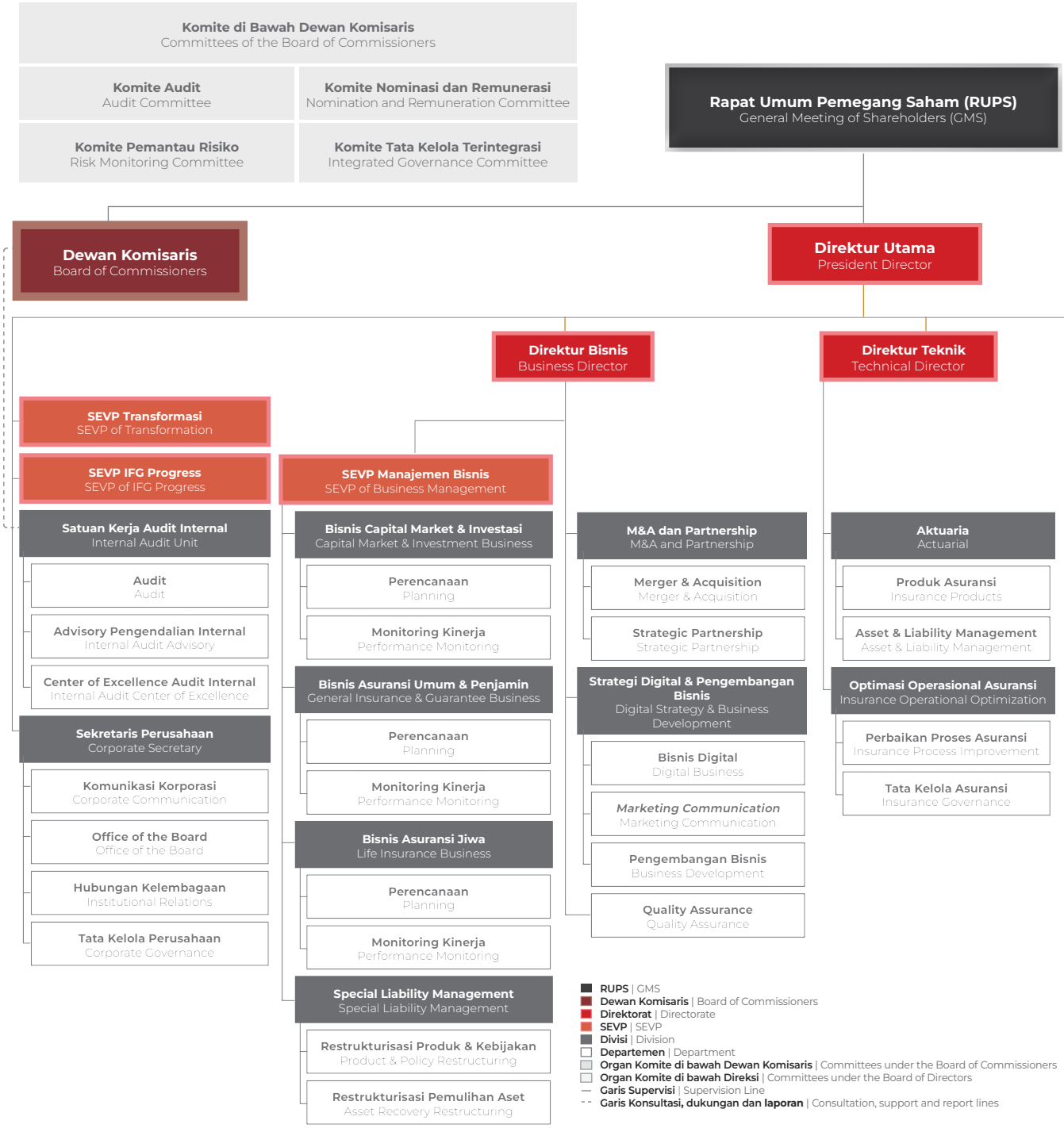
Meanwhile, IFG, as part of the State-Owned Enterprises (SOE) entity, has implemented the AKHLAK cultural values as an enhancement of its corporate culture, Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative) in accordance with the Ministry of SOEs' directive through Ministerial Circular No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises dated July 1, 2020 and Decree of the Board of Directors of Indonesia Financial Group No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 concerning the Determination of Core Values of Indonesia Financial Group dated September 29, 2020.



Amanah Trustworthy	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. The Company upholds the trust given by fulfilling promises and commitments, being responsible for the tasks, decisions and actions taken and adhering to moral and ethical values
Kompeten Competent	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. The Company continues to learn and develop its capabilities by improving competence to respond to ever-changing challenges, helping others learn and completing assignments with the best quality
Harmonis Harmonious	Kami terus meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada apapun latar belakangnya serta selalu berkeinginan untuk menolong sesama dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. The Company continues to increase mutual care and respect for differences regardless of background and always want to support others and also build a conducive work environment.
Loyal Loyal	Kami akan terus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara menjaga nama baik karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga menjunjung tinggi rasa patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika. The Company will continue to be dedicated and prioritize the interests of the nation and state by maintaining the good name of employees, leaders, BUMN and the State. The Company is willing to sacrifice to achieve a bigger goal and also uphold a sense of obedience to the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics.
Adaptif Adaptive	Kami akan terus berinovasi dan juga dengan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif. The Company will continue to innovate and also enthusiastically drive or face changes that occur by adapting to be better, to continuously make improvements by following technological developments and acting proactively.
Kolaboratif Collaborative	Kami terus membangun kerja sama yang sinergis dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. The Company continues to build synergistic cooperation by providing opportunities for parties to contribute, being open to working together to generate added value and also mobilizing the use of various resources for common goals.

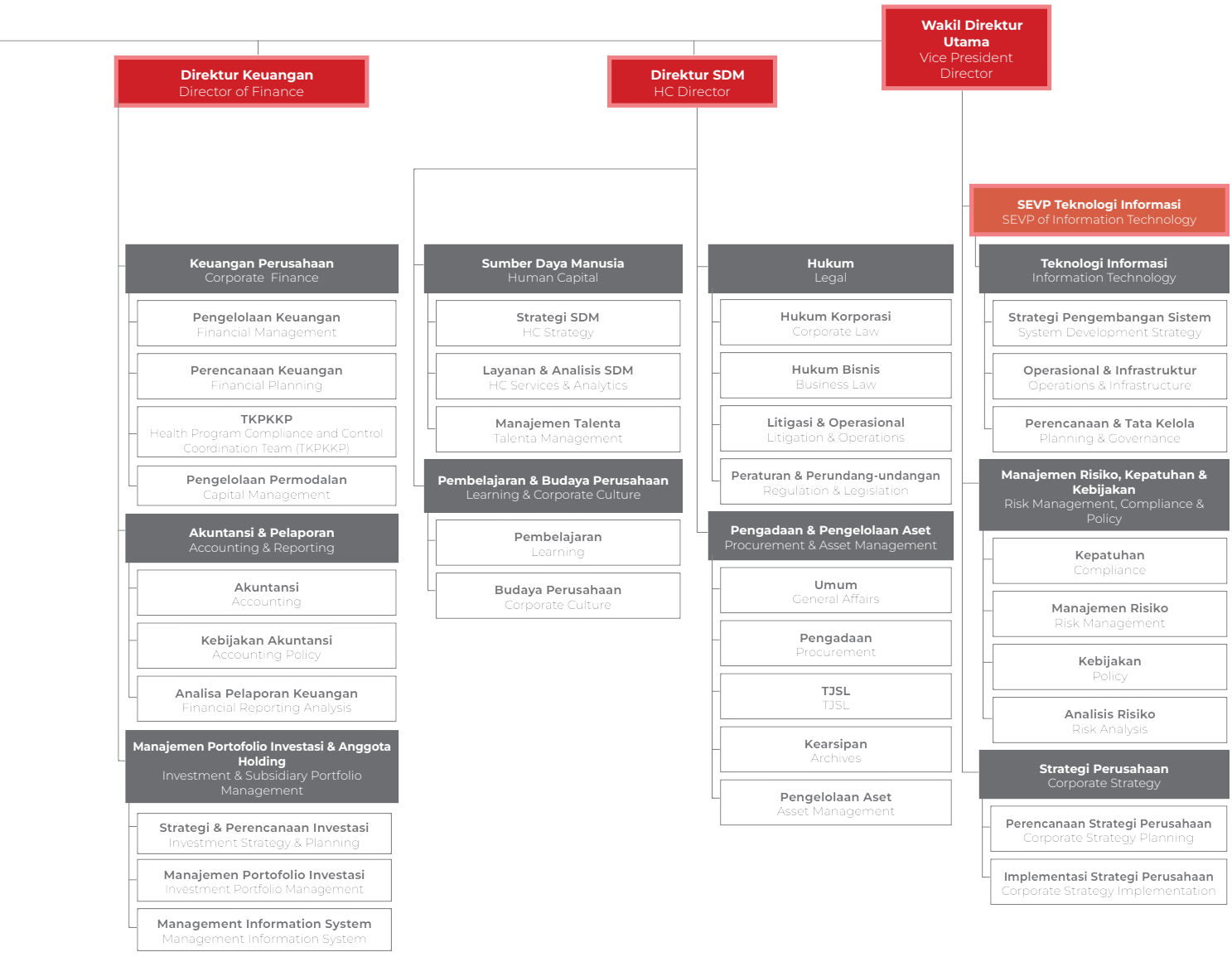
STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perusahaan disusun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan arah dan tujuan pengembangan korporasi, efektivitas pengelolaan korporasi, alur kerja yang efektif serta proses kontrol yang seimbang sehingga memberikan dukungan optimal kepada arah tujuan Perusahaan. Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi IFG No. 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi. Adapun struktur organisasi Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:



The Company's organizational structure is prepared and determined based on consideration of the direction and objectives of corporate development, effectiveness of corporate management, effective workflow and balanced control processes so as to provide optimal support to the direction of the Company's goals. The Company's organizational structure has been approved by IFG Board of Directors' Decree No. 15 of 2024 concerning Organizational Structure Policy. The Company's organizational structure is as follows:

Komite di Bawah Direksi Committees under the Board of Commissioners		
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	**Komite Manajemen Risiko Terintegrasi** Integrated Risk Management Committee	**Komite Pengarah Teknologi Informasi** Information Technology Steering Committee
Komite SDM HC Committee	**Komite Talenta** Talent Committee	**Komite TJSL** TJSL Committee
Komite BDHC CMI BDHC CMI Committee	**Product Committee Holding**	**Komite Investasi** Investment Committee



DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

HOTBONAR SINAGA**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

NASRUDIN
Komisaris
Commissioner

MASYITA CRYSTALLIN*
Komisaris
Commissioner

FAUZI ICHSAN*
Komisaris Utama/ Independen
President/ Independent Commissioner

WAHYU SETYAWAN***
Komisaris
Commissioner



SUMIYATI
Komisaris
Commissioner

*) Berhenti menjabat per 30 Desember 2025
**) Berhenti menjabat per 20 Oktober 2025
***) Berhenti menjabat per 8 Juli 2025
*) No longer serving as of December 30, 2025
**) No longer serving as of October 20, 2025
***) No longer serving as of July 8, 2025

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS



RIZAL ARIANSYAH
Direktur SDM
Human Capital Director

HEXANA TRI SASONGKO
Direktur Utama
President Director

RIANTO AHMADI
Direktur Teknik
Technical Director

HARU KOESMAHARGYO
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

HERU HANDAYANTO
Direktur Keuangan
Finance Director

PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



SUMIYATI

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 31 Juli 2021 – RUPS tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office: July 31, 2021 – 2026 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 64 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Sragen, 6 Juli 1961

Domisili
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Sumiyati diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021.

Riwayat Pendidikan
- S2 *Master of Financial Management* dari Central Queensland University, Australia, 1994.
- Diploma IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 1989.
- Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 1983.

Sertifikasi yang dimiliki
- *Chartered Accountant*
- *Qualified Internal Auditor*
- *Certified Government Internal Auditor*
- *Government Chief Audit Executive*

Pengalaman Kerja
Sumiyati menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dari tahun 2017 sampai 2021. Sebelumnya Sumiyati pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal dan Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Keuangan.

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Audit Lembaga Pengelola Investasi / Indonesia Investment Authority (INA)
- Komisaris Independen PT Asia Pacific Fibers Tbk
- Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
- Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 64 years old as of December 31, 2025
Born in Sragen, July 6, 1961

Domicile
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Sumiyati was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 dated July 31, 2021.

Educational Background
- Master of Financial Management from Central Queensland University, Australia, 1994.
- Diploma IV from the State College of Accountancy (STAN) (1989)
- Diploma III from the State College of Accountancy (STAN) (1983)

Certifications
- Chartered Accountant
- Qualified Internal Auditor
- Certified Government Internal Auditor
- Government Chief Audit Executive

Work Experience
Sumiyati served as Inspector General of the Ministry of Finance from 2017 to 2021. Previously, Sumiyati served as Head of the Financial Education and Training Agency, Head of the Planning and Finance Bureau of the Secretariat General and Head of the Accounting and Financial Reporting Section at the Ministry of Finance.

Concurrent Position
- Member of the Audit Committee of the Investment Management Agency/ Indonesia Investment Authority (INA)
- Independent Commissioner of PT Asia Pacific Fibers Tbk
- Chairperson of the Government Accounting Standards Working Committee
- Supervisory Board of the Kemayoran Complex Management Center

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.



NASRUDIN

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 29 April 2021 – RUPS Tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office: April 29, 2021 – 2026 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 69 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jakarta, 20 Oktober 1956

Domisili
Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Nasrudin diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021.

Riwayat Pendidikan
- Doktor (S3) bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.
- Master (S2) Manajemen dari STIE-IPWI, 1998.
- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Muhammadiyah, 1986.

Sertifikasi yang dimiliki
- *Executive Secretary Conventional on Biological Diversity*
- EDP - *Financial Statement*
- *Risk Governance Professional*
- Advokat - PERADI

Pengalaman Kerja
Karir Nasrudin antara lain pernah menjabat berbagai posisi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan Widyaiswara Utama.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 69 years old as of December 31, 2025
Born in Jakarta, October 20, 1956

Domicile
Tangerang, Banten, Indonesia

Appointment History
Nasrudin was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 dated April 29, 2021.

Educational Background
- Doctorate Degree (S3) in Law from Padjadjaran University, Bandung, 2013.
- Master of Management from STIE-IPWI, 1998.
- Bachelor's Degree in Law from Muhammadiyah University, 1986.

Certifications
- Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity
- EDP - Financial Statement
- Risk Governance Professional
- Advocate - PERADI

Work Experience
Nasrudin's career includes holding various positions at the Ministry of Law and Human Rights (HAM) as Director of Legislation Harmonization, Director of Legislation Litigation and Trainer Specialist.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.



FAUZI ICHSAN*

Komisaris Utama/Independen | President Commissioner/Independent Commissioner

Periode Jabatan: 30 Desember 2020 – RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: December 30, 2020 – 2025 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jakarta, 27 Januari 1970

Domisili
DKI Jakarta Indonesia

Riwayat Penunjukan
Fauzi Ichsan diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Riwayat Pendidikan
- Magister (S2) Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1995.
- Sarjana (S1) London School of Economics, 1991.

Sertifikasi yang dimiliki
- *Advanced Corporate Finance*
- *Corporate Mergers and Acquisitions*
- *Policies, operations and coordination among economic and financial policymakers and regulators in the US*
- *FDIC 101: Structure, Policies, Transactions and Operations of Federal Deposit Insurance Corporation*

Pengalaman Kerja
Karir Fauzi Ichsan antara lain Treasury Economist dan Head of Fixed Income Sales di Citibank Jakarta (1995-1997), Senior Economic Advisor Dubes Inggris untuk Indonesia (1998-2001), Managing Director, Senior Economist and Head of Government Standard Chartered Bank Jakarta (2001-2014), dan Kepala Eksekutif LPS(2015- 2020).

Rangkap Jabatan
- PT Unilever Indonesia - Komisaris Independen (Apr 2021 - Sekarang)
- PT Manulife Investment Management Indonesia – Komisaris Independen (Juli 2020 – Sekarang)
- PT AKR Corporindo – Komisaris Independen (April 2020 – Sekarang)
- Komisaris Independen PT Minamas Gemilang

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 55 years old as of December 31, 2025
Born in Jakarta, January 27, 1970

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Fauzi Ichsan was appointed as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.

Educational Background
- Master degree from Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1995.
- Bachelor degree (S1) London School of Economics, 1991.

Certifications
- Advanced Corporate Finance
- Corporate Mergers and Acquisitions
- Policies, operations and coordination among economic and financial policymakers and regulators in the US
- FDIC 101: Structure, Policies, Transactions and Operations of the Federal Deposit Insurance Corporation

Work Experience
Fauzi Ichsan's career includes Treasury Economist and Head of Fixed Income Sales at Citibank Jakarta (1995-1997), Senior Economic Advisor to the British Ambassador to Indonesia (1998-2001), Managing Director, Senior Economist and Head of Government Standard Chartered Bank Jakarta (2001-2014), and Chief Executive of the Deposit Insurance Corporation (LPS) (2015-2020).

Concurrent Position
- PT Unilever Indonesia - Independent Commissioner (Apr 2021 - Present)
- PT Manulife Investment Management Indonesia - Independent Commissioner (July 2020 - Present)
- PT AKR Corporindo - Independent Commissioner (April 2020 - Present)
- Independent commissioner of PT Minamas Gemilang

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

*) Berhenti menjabat per 30 Desember 2025
*) No longer serving as of December 30, 2025



MASYITA CRYSTALLIN*

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 30 Desember 2020 – RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: December 30, 2020 - 2025 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 44 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Surabaya, 13 Juli 1981

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Masyita Crystallin diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No.SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Riwayat Pendidikan
- Doktor (S3) Ekonomi bidang *International Monetary and Finance*, Claremont Graduate University, 2015.
- Magister (S2) Ekonomi Pembangunan Internasional, The Australian National University, 2007.
- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005.

Sertifikasi yang dimiliki
- *Certified Risk Professional* (CRP)
- *Certificate on Climate Change and Energy*, Harvard Kennedy School
- *Certificate on Management Development*, Wharton Executive Education
- *Certificate on Analysis to Action: An Executive Education Program on Disaster Risk Financing in Asia*, Lee Kuan Yew School of Public Policy Executive Education.

Pengalaman Kerja
Masyita Crystallin saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi. Sebelum bergabung dengan Kementerian Keuangan, Masyita merupakan Kepala Ekonom Bank DBS Indonesia, bertanggung jawab untuk melakukan analisis makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan. Beliau juga pernah bergabung dengan World Bank sebagai Ekonom Makro pada Tim Manajemen Makro-Fiskal (Januari 2014 – Desember 2017).

Rangkap Jabatan
- Partner dan Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq
- Co-chair Sherpa (Deputi) bersama Belanda
- Dewan Pembina World Resource Institute
- Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 44 years old as of December 31, 2025
Born in Surabaya, July 13, 1981

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Masyita Crystallin was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.

Educational Background
- Doctorate Degree (S3) in Economics in International Monetary and Finance, Claremont Graduate University, 2015.
- Master Degree in International Development Economics, The Australian National University, 2007.
- Bachelor of Economics, University of Indonesia, 2005.

Certifications
- Certified Risk Professional (CRP)
- Certificate on Climate Change and Energy, Harvard Kennedy School
- Certificate on Management Development, Wharton Executive Education
- Certificate on Analysis to Action: An Executive Education Program on Disaster Risk Financing in Asia, Lee Kuan Yew School of Public Policy Executive Education

Work Experience
Masyita Crystallin currently serves as Special Staff to the Minister of Finance for Fiscal and Macroeconomic Policy Formulation. Prior to joining the Ministry of Finance, Masyita was the Chief Economist of DBS Bank Indonesia, responsible for macroeconomic, fiscal and financial market analysis. She also joined the World Bank as a Macro Economist in the Macro-Fiscal Management Team (January 2014 - December 2017).

Concurrent Position
- Partner and Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq
- Co-chair Sherpa (Deputy) with the Netherlands
- Board of Trustees, World Resource Institute
- Board of Experts, Indonesian Employers Association

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

*) Berhenti menjabat per 30 Desember 2025
*) No longer serving as of December 30, 2025



HOTBONAR SINAGA*

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode Jabatan: 26 November 2020 – RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: November 26, 2020 – 2025 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 76 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Cipanas, 20 Mei 1949

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Hotbonar Sinaga diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Indonesia Financial Group No. SK-87/MBU/11/2020 tanggal 26 November 2020.

Riwayat Pendidikan
Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Indonesia, 1980

Sertifikasi yang dimiliki
- CERG (*Certified in Enterprise Risk Governance*), ERMA (*Enterprise Risk Management Academy*)
- QRGP (*Qualified Risk Governance Professional*) BNSP - LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera)
- QCRO (*Qualified Chief Risk Officer*) BNSP - LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera)
- Asesor berlisensi BNSP No. REG MET.000.001021 2017

Pengalaman Kerja
Karir Hotbonar Sinaga antara lain Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Program Sarjana Strata 1 dan Magister Management tahun 1973- 2016, kemudian menjabat sebagai Managing Director Johnson & Higgins (Pialang Asuransi Patungan dengan Amerika) 1986-1991, Direktur Pemasaran Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 1991-1997, Direktur Metlife Sejahtera 1997-2000, Konsultan E & Y Kanada 1999-2000, Direktur Utama PT Asuransi Berdikari 2000-2005, Komisaris dan Komite Audit kelompok Sinarmas 2004-2007, Direktur Utama PT Jamsostek 2007-2012 dan Dewan Audit OJK 2013-2014, lalu menjabat Komisaris Independen di beberapa perusahaan di antaranya PT Asia Pratama General Insurance, PT Sarana Proteksi Broker Asuransi, PT Sinar Mas Multi Artha Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Eka Life, dan PT Asuransi Mega Life.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 76 years old as of December 31, 2025
Born in Cipanas, May 20, 1949

Domicile
.DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Hotbonar Sinaga was appointed as Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-87/MBU/11/2020 dated November 26, 2020.

Educational Background
Bachelor of Economics, University of Indonesia, 1980.

Certifications
- CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy)
- QRGP (Qualified Risk Governance Professional) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera)
- QCRO (Qualified Chief Risk Officer) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera)
- BNSP licensed assessor No. REG MET.000.001021 2017

Work Experience
Hotbonar Sinaga's career includes working as a permanent Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia, Undergraduate and Masters in Management Programs from 1973-2016, then served as Managing Director of Johnson & Higgins (Joint Insurance Broker with America) in 1986-1991, Marketing Director of Asuransi Jiwa Tugu Mandiri in 1991-1997, Director of Metlife Sejahtera in 1997-2000, Canada E & Y Consultant in 1999-2000, President Director of PT Asuransi Berdikari in 2000-2005, Commissioner and Audit Committee of the Sinarmas Group in 2004-2007, President Director of PT Jamsostek in 2007-2012 and OJK Audit Board in 2013-2014. He also served as Independent Commissioner in several companies including PT Asia Pratama General Insurance, PT Sarana Proteksi Broker Asuransi, PT Sinar Mas Multi Artha Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Eka Life, and PT Asuransi Mega Life.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

*) Berhenti menjabat per 20 Oktober 2025
*) No longer serving as of October 20, 2025



WAHYU SETYAWAN*

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 3 Januari 2024 – RUPS tahun 2029, Periode Pertama
Term of Office: January 03, 2024 – 2029 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 51 Tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jakarta, 9 September 1974

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Wahyu Setyawan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-3/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024.

Riwayat Pendidikan
- S1 Hukum, Universitas Brawijaya, Surabaya, 1998
- S2 Hukum, Niigata University, Niigata – Jepang, 2008
- S2 Manajemen, PPM Manajemen, Jakarta, 2023

Sertifikasi yang dimiliki
- *Certification on Audit Committee Practices*
- *Qualified Risk Governance Professional*

Pengalaman Kerja
Wahyu Setyawan adalah Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan di Kementerian BUMN.

Rangkap Jabatan
Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan di Kementerian BUMN.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 51 years old as of December 31, 2025
Born in Jakarta, September 09, 1974

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Wahyu Setyawan was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-3/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.

Educational Background
- Bachelor of Law, Brawijaya University, Surabaya, 1998
- Master of Law, Niigata University, Niigata - Japan, 2008
- Master of Management, PPM Management, Jakarta, 2023

Certifications
- Certification on Audit Committee Practices
- Qualified Risk Governance Professional

Work Experience
Wahyu Setyawan is an Expert Staff for Strategic Policy Implementation at the Ministry of SOEs. Previously, he served as Assistant Deputy for Legislation and Regulations at the Ministry of SOEs.

Concurrent Position
Assistant Deputy for Legislation at the Ministry of SOEs.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.

*) Berhenti menjabat per 8 Juli 2025
*) No longer serving as of July 8, 2025

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS 2025

Sepanjang tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dimana Wahyu Setiawan mengundurkan diri sebagai Komisaris pada 8 Juli 2025. Lalu, terdapat 3 (tiga) anggota Komisaris telah berakhir masa jabatannya yaitu Hotbonar Sinaga sebagai Komisaris Independen pada 20 Oktober 2025, serta Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Utama/Independen, dan Masyita Crystallin sebagai Komisaris pada 30 Desember 2025. Seluruh perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris tersebut dikukuhkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 27 tanggal 27 April 2026 yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0250570 tanggal 30 April 2026.

Hingga 31 Desember 2025, komposisi Dewan Komisaris berjumlah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGE IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS 2025

Throughout 2025, there were changes in the composition of the Board of Commissioners, with Wahyu Setiawan resigning from his position as Commissioner on July 8, 2025. Subsequently, the terms of office of 3 (three) members of the Board of Commissioners ended, namely Hotbonar Sinaga as Independent Commissioner on October 20, 2025, as well as Fauzi Ichsan as President Commissioner/Independent Commissioner and Masyita Crystallin as Commissioner on December 30, 2025. All changes in the composition of the Board of Commissioners were formalized pursuant to Deed of Statement of Resolutions of the Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 27 dated April 27, 2026, for which notification of the change in the Company's data was acknowledged pursuant to Letter of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.09-0250570 dated April 30, 2026.

As of December 31, 2025, the Board of Commissioners consisted of 2 (two) members, both serving as Commissioners. The composition and basis for the appointment of Commissioners are summarized in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komisaris
Table of Composition and Basis for the Appointment of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Sumiyati	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 dated July 31, 2021
Nasrudin	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 dated April 29, 2021.

PROFIL DIREKSI
PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS



HEXANA TRI SASONGKO

Direktur Utama | President Director

Periode Jabatan: 4 Juni 2021 – RUPS tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office: June 04, 2021 – 2026 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Klaten, 23 Maret 1964

Domisili
Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Hexana Tri Sasongko diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Riwayat Pendidikan
- S2 *Master in Business Administration*, dari Monash Mt. Eliza Business School Monash University, Melbourne, Australia, 1996.
- S1 Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.

Sertifikasi yang dimiliki
Certified Wealth Manager

Pengalaman Kerja
Sebelum bergabung dengan IFG, Hexana Tri Sasongko adalah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di mana sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Investasi dan Teknologi Informasi. Hexana Tri Sasongko juga pernah menjabat sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Treasury & Global Services dan Senior Executive Vice President Direktorat IT Strategy & Satellite di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Rangkap Jabatan
Komisaris PT Bahana Artha Ventura

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 61 years old as of December 31, 2025
Born in Klaten, March 23, 1964

Domicile
Tangerang, Banten, Indonesia

Appointment History
Hexana Tri Sasongko was appointed as President Director based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.

Educational Background
- Master Degree in Business Administration, from Monash Mt. Eliza Business School Monash University, Melbourne, Australia, 1996.
- Bachelor of Law from Airlangga University, Surabaya, 1986.

Certifications
Certified Wealth Manager

Work Experience
Prior to joining IFG, Hexana Tri Sasongko was President Director of PT Asuransi Jiwasraya (Persero), where she previously served as Director of Investment and Information Technology. Hexana Tri Sasongko has also served as Senior Executive Vice President of Treasury & Global Services Directorate and Senior Executive Vice President of IT Strategy & Satellite Directorate at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Prior to serving as President Director, he served as Deputy President Director at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Concurrent Position
Commissioner of PT Bahana Artha Ventura

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.



HARU KOESMAHARGYO

Wakil Direktur Utama | Vice President Director

Periode Jabatan: 21 Maret 2023 – RUPS 2028, Periode Pertama
Term of Office: March 21, 2023 – 2028 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jakarta, 16 April 1966

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Haru Koesmahargyo diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Riwayat Pendidikan
- Magister (S2) MBA *in Investment Banking* dari Emory University, Atlanta, 2000.
- Sarjana (S1) bidang Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya, Malang, 1989.

Sertifikasi yang dimiliki
- *Behavioral Science in Business*, 2022
- Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko, SMR Level:V (LSPP), 2021
- ERM *Risk Management Program, Refreshing Level* 5, 2017

Pengalaman Kerja
Sebelum bergabung dengan IFG, Haru Koesmahargyo adalah Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi Eksekutif di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di antaranya adalah Direktur Keuangan, Direktur Keuangan dan (Treasury), Kepala Divisi Treasury, General Manager dan Head of Investor Relation. Beliau memperoleh sarjana dalam bidang Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, serta magister dalam bidang Investment Banking dari Emory University.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 59 years old as of December 31, 2025
Born in Jakarta, April 16, 1966

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Haru Koesmahargyo was appointed as Deputy President Director based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.

Educational Background
- MBA in Investment Banking from Emory University, Atlanta, 2000.
- Bachelor's degree in Agricultural Technology from Brawijaya University, Malang, 1989.

Certifications
- Behavioral Science in Business, 2022
- Risk Management Certification Maintenance Program, SMR Level:V (LSPP), 2021
- ERM Risk Management Program, Refreshing Level 5, 2017

Work Experience
Prior to joining IFG, Haru Koesmahargyo was the President Director of Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. He has also held various Executive positions at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk including Finance Director, Finance and (Treasury) Director, Head of Treasury Division, General Manager and Head of Investor Relations. He holds a bachelor's degree in Agricultural Technology from Brawijaya University and a master's degree in Investment Banking from Emory University.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.



RIZAL ARIANSYAH

Direktur SDM | Director of Human Capital

Periode Jabatan: 11 Februari 2020 – RUPS 2025, Periode Pertama
Term of Office: July 31, 2021 – 2026 GMS, First Period

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Surabaya, 24 Juni 1974

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Rizal Ariansyah diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022.

Riwayat Pendidikan
- Magister (S2) Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sarjana (S1) Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

Sertifikasi yang dimiliki
- Izin Konsultan Hukum Pasar Modal/Kelas Terapan III/2001 Nomor 098/KH/T-III/2001, 2001
- Izin Advokat/Pengacara (AA.00.10597), 2006
- Pelatihan Hukum Persaingan Usaha, 2007
- Pelatihan Valuasi Aset Saham dan Kredit, 2015

Pengalaman Kerja
Selain menjabat sebagai Direktur SDM, beliau juga menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris pada Anggota *Holding*, di antaranya sebagai Komisaris Utama PT Grahaniaga Tatautama sejak Juni 2020 sampai sekarang, dan Komisaris PT Bahana Kapital Investa sejak April 2020 sampai sekarang. Sebelum bergabung dengan IFG, Rizal Ariansyah pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2019-2020), Wakil Komisaris Utama PT Jakarta International Container Terminal (2018-2020), Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia (2018-2020), Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Koordinator Sekretaris Tetap Pelindo I, II, III dan IV PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Sekretaris Perusahaan/Executive Vice President PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016-2017), Sekretaris Perusahaan/ Executive Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012-2016), Partner Law Firm Radjiman Bilitea & Partners (2009-2012), Kepala Bagian Hukum-2/ Kepala Group/Senior Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2005- 2009), Kepala Sub Bagian Hukum/Senior Manager PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2005), dan Kepala Group Hukum/Vice President (1999-2004).

Rangkap Jabatan
- Komisaris Utama PT Grahaniaga Tatautama (Juni 2020-Sekarang).
- Komisaris PT Bahana Kapital Investa (April 2020-Sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 51 years old as of December 31, 2025
Born in Surabaya, June 24, 1974

Domicile
Bekasi, West Java, Indonesia

Appointment History
Rizal Ariansyah was appointed as Director of Human Capital based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

Educational Background
- Master's Degree in Law, University of Indonesia, Jakarta, 2006.
- Bachelor's Degree in Law, University of Indonesia, Jakarta, 1996

Certifications
- Capital Market Law Consultant License/ Applied Course III/2001 Number 098/ KH/T-III/2001, 2001
- Advocate/Lawyer License (AA.00.10597), 2006
- Competition Law Training, 2007
- Stock and Credit Asset Valuation Training, 2015

Work Experience
In addition to serving as Director of Human Capital, he also holds positions on the Boards of Commissioners of various holding company affiliates, including as President Commissioner of PT Grahaniaga Tatautama from June 2020 to the present, and as Commissioner of PT Bahana Kapital Investa from April 2020 to the present. Before joining IFG, Rizal Ariansyah served as President Commissioner of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2019-2020), Deputy President Commissioner of PT Jakarta International Container Terminal (2018-2020), President Commissioner of PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia (2018-2020), Human Resources Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Permanent Secretary Coordinator for Pelindo I, II, III, and IV at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Corporate Secretary/Executive Vice President at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016-2017), Corporate Secretary/Executive Vice President of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012-2016), Partner at Radjiman Bilitea & Partners Law Firm (2009-2012), Head of Legal Department-2/Head of Group/Senior Vice President of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2005-2009), Head of Legal Sub-Department/Senior Manager of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2005), and Head of Legal Group/Vice President (1999-2004).

Concurrent Position
- President Commissioner of PT Grahaniaga Tatautama (June 2020-Present).
- Commissioner of PT Bahana Kapital Investa (April 2020-Present).

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.



RIANTO AHMADI

Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis | Technical Director concurrently as Acting Business Director

Periode Jabatan: 20 September 2024 – RUPS 2026, Periode Pertama
Term of Office: September 20, 2024 – 2026 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 66 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran California, 19 Desember 1959

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Rianto Ahmadi diangkat menjadi Direktur Teknik berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No SK- 313/MBU/09/2021 tanggal 20 September 2021 dan ditetapkan merangkap sebagai Plt. Direktur Bisnis oleh Dewan Komisaris sejak tanggal 26 Desember 2024.

Riwayat Pendidikan
- Doktor (S3) Statistika dari University of Missouri, 1992.
- Magister (S2) Statistika dari University of Texas, 1987.
- Sarjana (S1) Matematika, Institut Teknologi Bandung, 1984.

Sertifikasi yang dimiliki
- *Fellow Society of Actuaries of Indonesia* (FSAI), 1999
- *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG), 2017
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), 2019

Pengalaman Kerja
Sebelum bergabung dengan IFG, Rianto Ahmadi menjabat sebagai Director, Chief Risk and Compliance Officer, di Prudential Life Assurance Indonesia. Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur, Komisaris Independen, atau Penasihat, di beberapa perusahaan di industri asuransi, baik multinasional maupun domestik. Rianto sebelumnya juga menjabat untuk beberapa periode sebagai Ketua dari organisasi Persatuan Aktuaris Indonesia, dimana saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Majelis Aktuaris.

Rangkap Jabatan
Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa IFG

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 66 years old as of December 31, 2025
Born in California, December 19, 1959

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Rianto Ahmadi was appointed as Technical Director in accordance with a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, acting as the General Meeting of Shareholders of the state-owned limited liability company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, No. SK-313/MBU/09/2021, dated September 20, 2021, and was designated to concurrently serve as Acting Business Director, appointed by the Board of Commissioners on December 26, 2024.

Educational Background
- Fellow Society of Actuaries of Indonesia (FSAI), 1999
- Certified Enterprise Risk Governance (CERG), 2017
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP), 2019

Certifications
- Fellow Society of Actuaries of Indonesia (FSAI), 1999
- Certified Enterprise Risk Governance (CERG), 2017
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP), 2019

Work Experience
Prior to joining IFG, Rianto Ahmadi served as Director, Chief Risk and Compliance Officer, at Prudential Life Assurance Indonesia. He has served as President Director, Deputy President Director, Director, Independent Commissioner, or Advisor, in several companies in the insurance industry, both multinational and domestic. Rianto previously also served for several terms/periods as Chairman of the Indonesian Actuary Association, where he currently serves as Chairman of the Actuary Council.

Concurrent Position
President Commissioner of PT Asuransi Jiwa IFG

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.



HERU HANDAYANTO

Direktur Keuangan | Director of Finance

Periode Jabatan: 26 September 2022 – RUPS 2027, Periode Pertama
Term of Office: September 26, 2022 – 2027 GMS, First Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jakarta, 23 Februari 1971

Domisili
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Heru Handayanto diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022.

Riwayat Pendidikan
Sarjana (S1) bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia, 1995.

Sertifikasi yang dimiliki
- Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
- Wakil Manajer Investasi (WMI)
- Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Pengalaman Kerja
Sebelum bergabung dengan IFG, Heru Handayanto menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional di Mandiri Sekuritas, dan juga pernah menduduki posisi sebagai Chief Financial Officer dan Chief Operating Officer di PT MNC Securities Indonesia dan Chief Operating Officer di PT CIMB Securities Indonesia.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Personal Data
Indonesian citizens
Age 54 years old as of December 31, 2025
Born in Jakarta, February 23, 1971

Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History
Heru Handayanto was appointed as Director of Finance based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022 SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

Educational Background
Bachelor's Degree (S1) in Accounting, University of Indonesia, 1995

Certifications
- Representative of Securities Trading Broker (WPPE)
- Investment Manager Representative (WMI)
- Representative of Securities Underwriter (WPEE)

Work Experience
Prior to joining IFG, Heru Handayanto served as Director of Finance and Operations at Mandiri Sekuritas, and has also held positions as Chief Financial Officer and Chief Operating Officer at PT MNC Securities Indonesia and Chief Operating Officer at PT CIMB Securities Indonesia.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other agencies or companies.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors and Board of Commissioners, nor with the major and controlling shareholders, either directly or indirectly.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI 2025

Sepanjang tahun 2025, komposisi anggota Direksi Perusahaan tidak mengalami perubahan. Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Direksi Perusahaan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur SDM, 1 (satu) orang Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis, dan 1 (satu) orang Direktur Keuangan. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, the composition of the Company's Board of Directors' Members remains unchanged. As of the publication of this annual report, the Company's Board of Directors consists of 5 (five) members, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 1 (one) Director of Human Capital, 1 (one) Technical Director concurrently serving as Acting Business Director, and 1 (one) Director of Finance. The composition and basis for the appointment of the Company's Board of Directors is shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Table of Composition and Basis for the Appointment of Board of Directors

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Haru Koesmahargyo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Director of Human Capital	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.
Rianto Ahmadi	Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Bisnis Technical Director concurrently as Acting Business Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-313/MBU/09/2021 tanggal 20 September 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-313/MBU/09/2021 dated: September 20, 2021.
Heru Handayanto	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS



Joseph Georgino Godong

SEVP Teknologi Informasi | SEVP of Information Technology

Menjabat sejak 11 Oktober 2021 | Started serving since October 11, 2021

Kewarganegaraan Nationality	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia Age	:	64 tahun per 31 Desember 2025 64 years old as of December 31, 2025
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia
Bergabung di IFG Joining IFG	:	11 Oktober 2021 October 11, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Teknik Elektro Universitas Trisakti Electrical Engineering, Trisakti University
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Direktur Teknologi Informasi dan Operasi (Bank Mega) (April 2013 – April 2014) • Direktur Teknologi Informasi, Operasi, dan Finance (Bank Mega) (April 2010 – April 2013) • Direktur Kepatuhan (Permata Bank) (Agustus 2008 – Agustus 2009) • Direktur (Permata Bank) (April 2008 – Agustus 2008) • Direktur Teknologi Informasi dan Operational (Permata Bank) (Februari 2006 – April 2008) • Direktur Finance & Information Serv (Permata Bank) (Oktober 2002 – Februari 2006) • Direktur Financial Serv (Bank Bali) (Desember 2000 – Oktober 2002) • Tim Pengelola (Bank Bali) (November 2000 – Desember 2000) • Director of Information Technology and Operations (Bank Mega) (April 2013 – April 2014) • Director of Information Technology, Operations, and Finance (Bank Mega) (April 2010 – April 2013) • Director of Compliance (Permata Bank) (August 2008 – August 2009) • Director (Permata Bank) (April 2008 – August 2008) • Director of Information Technology and Operations (Permata Bank) (February 2006 – April 2008) • Director of Finance & Information Services (Permata Bank) (October 2002 – February 2006) • Director of Financial Services (Bank Bali) (December 2000 – October 2002) • Management Team (Bank Bali) (November 2000 – December 2000)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 113/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 tentang Pengangkatan selaku SEVP Teknologi Informasi tanggal 11 Oktober 2021 Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 113/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 concerning the Appointment as SEVP of Information Technology on October 11, 2021



Dr. Ir. Meiditomo Sutyarjoko, MSEE

SEVP Transformasi | SEVP of Transformation

Menjabat sejak 17 Maret 2025 | Appointed since March 17, 2025

Kewarganegaraan Nationality	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia Age	:	61 tahun per 31 Desember 2025 61 years old as of December 31, 2025
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta
Bergabung di IFG Joining IFG	:	17 Maret 2025 March 17, 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• *Doctorate Degree, Manajemen Strategic*, Universitas Indonesia (2006-2010) • Sarjana S-2, *Electrical and Computer Engineering*, Univ of Southern California (1990-1994) • Sarjana S-1, Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1984-1988) • Doctorate, Strategic Management, University of Indonesia (2006–2010) • Master's Degree, Electrical and Computer Engineering, University of Southern California (1990–1994) • Bachelor's Degree, Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1984–1988)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Founder-Komisaris, PT KSI Indonesia (Agustus 2020 – Maret 2025) • Kepala Divisi IT Strategy & Governance, PT Bank BRI Tbk (Januari 2016 - Januari 2020) • Senior VP, Engineering & Ops, Asia Broadcasting Satellite, HK (Januari 2010 - Januari 2010) • Presiden Direktur, PT Broadband Broadcast Indonesia (Januari 2010 - Januari 2016) • Chief Technology Officer, S2M Arabsat (Januari 2009 - Januari 2010) • Presiden Direktur, Asia Cellular Satellite (Januari 1998 - Januari 2008) • Founder-Commissioner, PT KSI Indonesia (August 2020 – March 2025) • Head of IT Strategy & Governance Division, PT Bank BRI Tbk (January 2016 - January 2020) • Senior VP, Engineering & Ops, Asia Broadcasting Satellite, HK (January 2010 - January 2010) • President Director, PT Broadband Broadcast Indonesia (January 2010 - January 2016) • Chief Technology Officer, S2M Arabsat (January 2009 - January 2010) • President Director, Asia Cellular Satellite (January 1998 - January 2008)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 35/SK-DIR/BPUI/SDM/III/2025 tentang Pengangkatan selaku SEVP Transformasi tanggal 17 Maret 2025 Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 35/SK-DIR/BPUI/SDM/III/2025 concerning the Appointment as SEVP of Transformation dated March 17, 2025



Denny Soelistyo Adji

Executive Advisor Direktur Utama merangkap Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan | Executive Advisor to the President Director, who also serves as Head of the Corporate Secretary Division

Menjabat sejak 16 Desember 2024 | Appointed since December 16, 2024

Kewarganegaraan Nationality	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia Age	:	64 tahun per 31 Desember 2025 64 years old as of December 31, 2025
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta
Bergabung di IFG Joining IFG	:	18 Juli 2023 July 18, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• Sarjana S-2, *Business Administration*, Saint Louis University, Missouri, USA (1994-1996) • Sarjana S-1, Antropologi Sosial dan Budaya, Universitas Indonesia (1981-1986) • Master's Degree, Business Administration, Saint Louis University, Missouri, USA (1994–1996) • Bachelor's Degree, Social and Cultural Anthropology, University of Indonesia (1981–1986)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Staff – Inspektur, BRI (Januari 1987-Desember 2017 • Sekretaris Perusahaan, Askrindo (Januari 2018-Juli 2023) • Staff – Inspector, BRI (January 1987–December 2017) • Corporate Secretary, Askrindo (January 2018–July 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 311/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2024 tentang Pengangkatan selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan di Direktorat Utama tanggal 16 Desember 2024 Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 311/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2024 concerning the Appointment as Acting Head of the Corporate Secretary Division in the Executive Directorate on December 16, 2024



Yullyan, CIA

Kepala Divisi SKAI | Head of Internal Audit Unit Division

Menjabat sejak 4 Oktober 2021 | Start Serving since October 4, 2021

Kewarganegaraan Nationality	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizens
Usia Age	:	48 tahun per 31 Desember 2025 48 years old as of December 31, 2025
Domisili Domicile	:	Tangerang, Indonesia
Bergabung di IFG Joining IFG	:	4 Oktober 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	• Master (Akuntansi) Universitas Indonesia (2006) • Sarjana (Akuntansi) Universitas Brawijaya (2001) • Diploma (Akuntansi) STAN (1998) • Master's Degree (Accounting) University of Indonesia (2006) • Bachelor's Degree (Accounting) Brawijaya University (2001) • Diploma (Accounting) STAN (1998)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Kepala Divisi SKAI, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (5 Oktober 2021 - sekarang) • Chief Audit Executive, Meratus Group (2019 - 2021) • Audit Lead | Financial Controller, BP Indonesia (2013 – 2019) • Tax Section Head, Premier Oil (2012 – 2013) • Head of Audit, CNOOC (2010 – 2012) • Auditor | Investigator | Section Head, BPK - RI (1998 – 2010) • Head of Internal Audit Unit Division, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (October 5, 2021 - present) • Chief Audit Executive, Meratus Group (2019 - 2021) • Audit Lead | Financial Controller, BP Indonesia (2013 – 2019) • Tax Section Head, Premier Oil (2012 – 2013) • Head of Audit, CNOOC (2010 – 2012) • Auditor | Investigator | Section Head, BPK - RI (1998 – 2010)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 152/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 tentang Pengangkatan selaku Kepala SKAI tanggal 5 Oktober 2021. Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 152/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 regarding the Appointment as Head of Internal Audit Unit on October 5, 2021.

Selain Pejabat Eksekutif senior, berikut disampaikan *list* pejabat di level menengah Perusahaan:

In addition to the senior Executive Officers, the following is a list of mid-level officers of the Company:

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Yusman Dedy Kusuma	Kepala Divisi Strategi Perusahaan Head of Corporate Strategy Division
2	Raden Sihar M. Sinambela	Kepala Divisi Special Liability Management Head of Special Liability Management Division
3	Rimhalsyah	Kepala Divisi Hukum Head of Legal Division
4	Gita Indriati	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Capital Division
5	Ronald	Kepala Divisi Aktuaria Head of Actuarial Division
6	Jovita Josephine Sadrach	Kepala Divisi Bisnis Asuransi Jiwa Head of Life Insurance Business Division
7	Yustinus Rinaldo Arianto	Kepala Divisi Optimasi Operasional Asuransi Head of Insurance Operational Optimization Division
8	Dhinda Arisyiya	Kepala Divisi Strategi Digital & Pengembangan Bisnis Head of Digital Strategy & Business Development Division
9	Dini Asima D.J Manurung	Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan Head of Accounting and Reporting Division
10	Sariniatun	Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, Kebijakan Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division
11	Erwandy Susanto	Kepala Divisi Manajemen Portofolio Investasi & Anak Perusahaan Head of Investment Portfolio Management & Subsidiaries Division
12	Mora Sani Rivai Nasution	Kepala Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan Head of Learning and Corporate Culture Division
13	Hadi Setiawan	Kepala Divisi Keuangan Perusahaan Head of Corporate Finance Division
14	Raden Gerald S Grisanto	Kepala Divisi M&A dan Partnership Head of M&A and Partnership Division
15	Firman Anindra	Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset Head of the Procurement and Asset Management Division
16	A. Syafrie Zen	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division
17	R. Rachmadi Gustrian	Project Leader
18	Ibrahim Kholilul Rohman	Chief Senior Research Analyst
19	Hasan Gorawa	Plt Kepala Divisi Bisnis Asuransi Umum dan Penjaminan Acting Head of the General Insurance and Guarantee Business Division
20	Anastasia Dara P. Dirani*	Kepala Divisi Bisnis Capital Market dan Investasi Head of Capital Market and Investment Business Division
21	Ibnu Fajar Sudibyo**	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division
22	Muhamad Yusuf Nur Sumarno Putro***	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division

*) Menjabat s.d. 16 September 2025
**) Menjabat 16 Juni 2025 s.d. 31 Juli 2025
***) Menjabat s.d. 15 Juni 2025
*) Served until September 16, 2025.
**) Served from June 16, 2025 until July 31, 2025
***) Served until June 15, 2025

DEMOGRAFI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT



DEMOGRAFI KARYAWAN

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah karyawan Perusahaan tercatat sebanyak 275 orang, mengalami penurunan sebesar 10,71% dibandingkan jumlah karyawan pada tahun 2024 yang sebanyak 308 orang.

Sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, pemetaan tingkat pendidikan karyawan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung perencanaan pengembangan kompetensi dan pengelolaan karier. Komposisi jenjang pendidikan karyawan juga mencerminkan arah kebijakan rekrutmen serta kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan. Adapun rincian demografi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

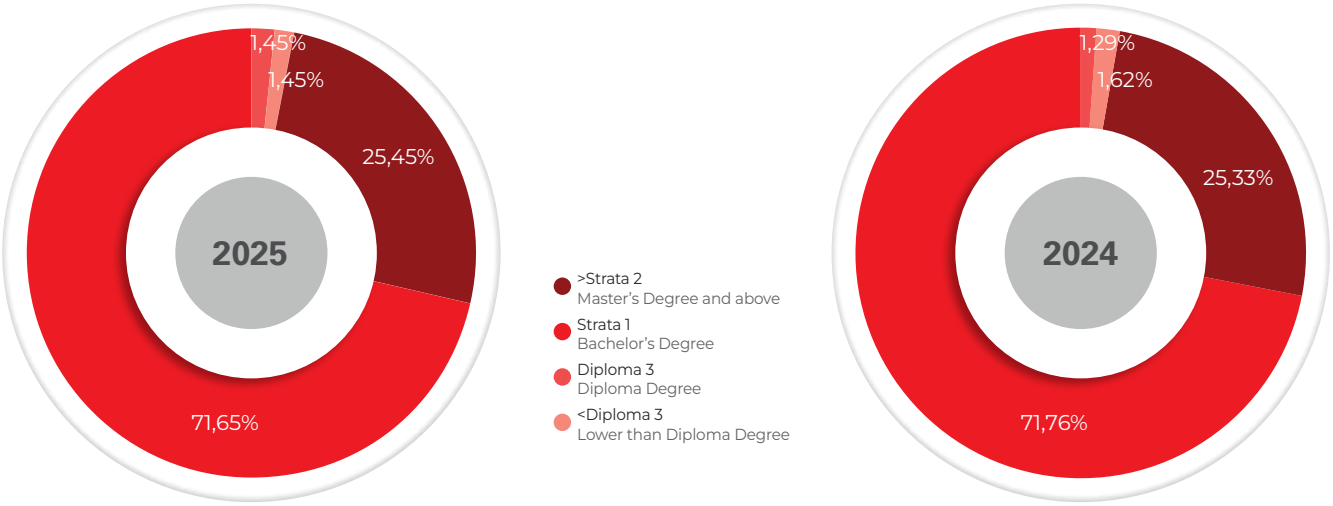
As of December 31, 2025, the Company has 275 employees, a decrease of 10.71% compared to 308 employees in 2024.

As part of the company's efforts to build a high-quality human capital base, mapping employees' educational levels serves as a key indicator in supporting competency development planning and career management. The composition of employees' educational levels also reflects the direction of recruitment policies and the organization's readiness to address future business challenges. The demographic details of employees by educational level over the past two years are as follows:

Demografi Karyawan berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)
Employee Demographics based on Education Level (people)

Jenjang Pendidikan	2025				2024			
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
> Strata 2 > Master's Degree	46	24	70	25,45	52	27	79	25,32
Strata 1 Bachelor's Degree	105	92	197	71,64	116	105	221	71,75
Diploma 3	0	4	4	1,45	0	3	3	1,29
< Diploma 3	3	1	4	1,45	4	1	5	1,62
Jumlah Total	154	121	275	100,00	172	136	308	100,00

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan data demografi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan hingga akhir tahun 2025, mayoritas karyawan perusahaan memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1), yakni sebanyak 197 orang atau 71,65% dari total 275 karyawan. Proporsi ini relatif stabil dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 71,75%. Karyawan dengan pendidikan ≥Strata 2 (S2 ke atas) tercatat sebanyak 70 orang atau 25,45% dari total karyawan tahun berjalan, hal jumlah tersebut juga relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 79 orang atau 25,32% dari total karyawan. Sementara itu, karyawan dengan jenjang pendidikan Diploma 3 dan di bawahnya masih tergolong sangat sedikit, masing-masing hanya 4 orang (1,45%) dan 4 orang (1,45%) di tahun 2025, serta tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun 2024.

Data ini menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan kandidat dengan latar belakang pendidikan minimal Strata 1. Peningkatan proporsi karyawan dengan pendidikan tinggi (≥Strata 2) juga mengindikasikan upaya penguatan kapasitas SDM, terutama untuk posisi yang memerlukan kompetensi lanjutan dan spesialisasi. Stabilnya jumlah karyawan dengan latar belakang pendidikan di bawah Diploma 3 mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peran teknis atau operasional dasar tidak menjadi fokus utama dalam struktur SDM perusahaan saat ini. Hal ini juga selaras dengan orientasi perusahaan yang kemungkinan semakin mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Komposisi usia karyawan merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, karena mencerminkan keseimbangan antara potensi, pengalaman, serta kebutuhan pengembangan organisasi ke depan. Distribusi usia yang sehat mendukung kesinambungan organisasi, baik dalam konteks regenerasi maupun perencanaan suksesi. Berikut ini disajikan data demografi karyawan perusahaan berdasarkan rentang usia selama dua tahun terakhir:

Based on employee demographic data by educational level through the end of 2025, the majority of the company's employees hold a Bachelor's degree (S1), with 197 employees—or 71.65% of the total 275 employees. This proportion is relatively stable compared to 2024, when it reached 71.75%. Employees with a Master's degree (S2) or higher are recorded at 70 people, or 25.45% of the total employees in the current year; this figure is also relatively stable compared to the previous year, which stood at 79 people, or 25.32% of the total employees. Meanwhile, employees with a Diploma 3 or lower educational level remain very few in number, at only 4 people (1.45%) and 4 people (1.45%) in 2025, respectively, and have not changed significantly from 2024.

These data indicate that the company maintains a recruitment policy that prioritizes candidates with a minimum educational background of a Bachelor's degree. The increase in the proportion of employees with higher education (≥Master's degree) also signals efforts to strengthen human capital, particularly for positions requiring advanced competencies and specialization. The stable number of employees with an educational background below a Diploma 3 reflects that the need for basic technical or operational roles is not a primary focus in the company's current human capital structure. This is also in line with the company's orientation, which is likely increasingly focused on improving the quality of human resources and professionalism to support the achievement of the company's strategic goals.

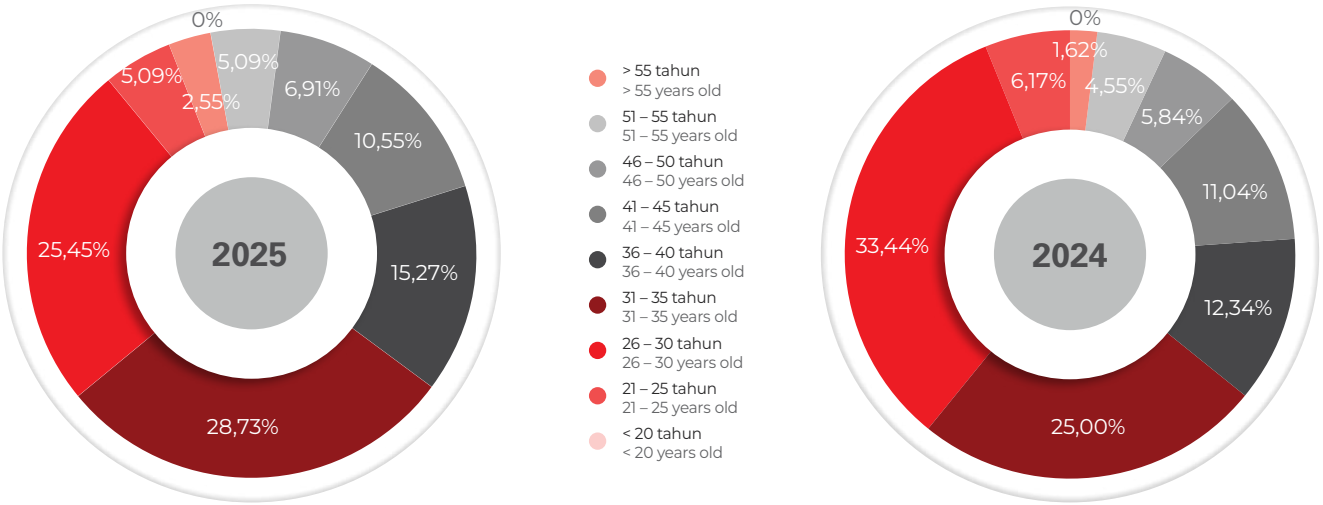
The age composition of employees is a key indicator in human resource management, as it reflects the balance between potential, experience, and the organization's future development needs. A healthy age distribution supports organizational continuity, both in terms of workforce renewal and succession planning. The following presents the company's employee demographic data by age range over the past two years:

Demografi Karyawan berdasarkan Rentang Usia (orang)

Employee Demographics based on Age Group (people)

Rentang Usia Age Group	2025				2024			
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
> 55 tahun > 55 years old	5	2	7	2,55	3	2	5	1,62
51 - 55 tahun 51 - 55 years old	10	4	14	5,09	12	3	14	4,55
46 - 50 tahun 46 - 50 years old	14	5	19	6,91	13	4	18	5,84
41 - 45 tahun 41 - 45 years old	16	13	29	10,55	20	15	34	11,04
36 - 40 tahun 36 - 40 years old	28	14	42	15,27	23	15	38	12,34
31 - 35 tahun 31 - 35 years old	50	29	79	28,73	50	27	77	25,00
26 - 30 tahun 26 - 30 years old	25	46	70	25,45	42	60	103	33,44
21 - 25 tahun 21 - 25 years old	6	8	14	5,09	9	10	19	6,17
< 20 tahun < 20 years old	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Jumlah Total	154	121	275	100,00	172	136	308	100,00

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan data demografi karyawan berdasarkan rentang usia per 31 Desember 2025, komposisi terbesar berada pada kelompok usia 31-35 tahun dengan total 79 orang atau 28,73 % dari seluruh karyawan. Jumlah ini mengalami peningkatan sedikit dari tahun 2024 yang sebanyak 77 orang atau 25,00% dari total

Based on employee demographic data as of December 31, 2025, the largest proportion of employees are in the range of 31–35 age group, totaling 79 employees or 28.73% of the total employees. This represents a slight increase from 2024, when the group comprised 77 employees or 25.00% of the total employees. This trend indicates the Company's continued

karyawan, menandakan bahwa perusahaan masih konsisten merekrut karyawan di usia produktif awal yang umumnya memiliki fleksibilitas dan potensi pengembangan karier jangka panjang. Kelompok usia 26 –30 tahun mengalami penurunan dari 103 orang (33,44%) menjadi 70 orang (25,45%). Di sisi lain, jumlah karyawan berusia di atas 55 tahun tercatat hanya 7 orang (2,55%), menunjukkan porsi karyawan senior yang relatif kecil.

commitment to recruiting employees in their early productive years, who generally possess strong potential for long-term career growth and development. Meanwhile, the number of employees in the 26–30 age group declined from 103 employees (33.44%) in 2024 to 70 employees (25.45%) in 2025. On the other hand, employees aged over 55 accounted for only 7 employees, or 2.55% of the total employees, reflecting a relatively small proportion of senior employees.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa struktur usia karyawan perusahaan saat ini didominasi oleh generasi muda, dengan sekitar 28,73% karyawan berada pada rentang usia 31-35 tahun. Hal ini mencerminkan strategi perusahaan dalam membangun *workforce* yang energik dan adaptif terhadap perubahan. Penurunan jumlah karyawan pada kelompok usia 26–30 tahun tahun kemungkinan disebabkan oleh rotasi alami, pengunduran diri, serta belum adanya penguatan signifikan dari kelompok usia di bawahnya yang masuk ke tahap menengah. Komposisi ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan suksesi dan pengembangan kompetensi, agar keseimbangan antara pengalaman dan inovasi dapat terjaga secara berkelanjutan.

Further analysis shows that the company's current employee age structure is dominated by younger generations, with approximately 28.73% of employees in the 31–35 age range. This reflects the company's strategy to build an energetic workforce that is adaptable to change. The decline in the number of employees in the 26–30 age group is likely due to natural turnover, resignations, as well as the lack of significant reinforcement from the younger age group moving into the middle age bracket. This composition is important to consider in succession planning and competency development to maintain a sustainable balance between experience and innovation.

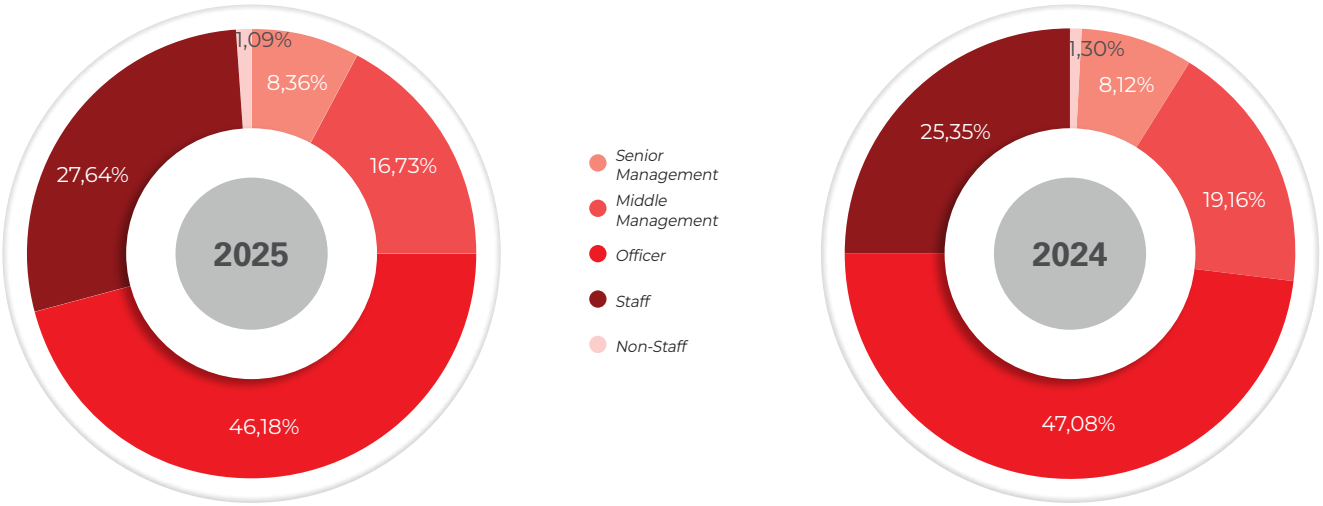
Struktur jenjang jabatan mencerminkan distribusi peran dan tanggung jawab karyawan di dalam organisasi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan karier dan pengembangan kompetensi. Pemantauan komposisi ini penting untuk memastikan keselarasan antara struktur organisasi dan kebutuhan strategis perusahaan. Berikut ini disajikan data demografi karyawan berdasarkan jenjang jabatan dalam dua tahun terakhir:

The job-level structure reflects the distribution of roles and responsibilities among employees within the organization and serves as a reference for career management and competency development. Monitoring this composition is essential to ensure alignment between the organizational structure and the company's strategic needs. The following presents employee demographic data by job level over the past two years:

Demografi Karyawan berdasarkan Jenjang Jabatan (orang)
Employee Demographics based on Position Level (people)

Jenjang Jabatan Position Level	**2025**				**2024**			
	L M	**P** F	**Jumlah** Total	**Persentase** Percentage **(%)**	**L** M	**P** F	**Jumlah** Total	**Persentase** Percentage **(%)**
Senior Management	**17**	**6**	**23**	**8,36**	17	8	25	8,12
Middle Management	**29**	**17**	**46**	**16,73**	39	20	59	19,16
Officer	**76**	**51**	**127**	**46,18**	82	63	145	47,08
Staff	**29**	**47**	**76**	**27,64**	30	45	75	24,35
Non-Staff	**3**	**0**	**3**	**1,09**	4	0	4	1,30
Jumlah Total	**154**	**121**	**275**	**100,00**	**172**	**136**	**308**	**100,00**

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan data demografi karyawan berdasarkan jenjang jabatan tahun 2025, distribusi karyawan terbesar masih berada pada Officer dengan jumlah 127 orang atau 46,18% dari total karyawan. Jumlah ini relatif menurun jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 145%. Sementara itu, jumlah karyawan di jenjang *Middle Management* juga mengalami penurunan dari 59 orang (19,16%) di tahun 2024, menjadi 46 orang (16,73%) di tahun 2025.

Based on employee demographic data by job level for 2025, the largest employee group remains Officers, with 127 employees, or 46.18% of the total employees. This figure has decreased slightly compared to 2024, which was 145%. Meanwhile, the number of employees in the Middle Management tier also decreased from 59 people (19.16%) in 2024 to 46 people (16.73%) in 2025.

Perubahan komposisi ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mendorong penguatan kapasitas manajerial dan peran profesional, dengan meningkatkan proporsi karyawan di yang lebih efisien dan lincah. Hal ini selaras dengan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks, di mana pengambilan keputusan, inovasi, dan koordinasi lintas fungsi menjadi semakin penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

This shift in composition reflects the company's efforts to strengthen managerial capacity and professional roles by increasing the proportion of employees who are more efficient and agile. This aligns with the organization's increasingly complex needs, where decision-making, innovation, and cross-functional coordination are becoming increasingly important in supporting the achievement of the company's strategic goals.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)
Employee Demographics Based on Employment Status (people)

Status Kepegawaian Employment Status	**2025**				**2024**			
	L M	**P** F	**Jumlah** Total	**Persentase** Percentage **(%)**	**L** M	**P** F	**Jumlah** Total	**Persentase** Percentage **(%)**
Karyawan Tetap Permanent Employee	**146**	**115**	**261**	**94,91**	163	128	291	94,48
Karyawan Kontrak Contract Employee	**8**	**6**	**14**	**5,09**	10	7	17	5,52
Jumlah Total	**154**	**121**	**275**	**100,00**	**173**	**135**	**308**	**100,00**

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perusahaan secara berkala mendukung program pengembangan karyawannya, salah satu upayanya adalah dengan mengalokasikan biaya untuk program pengembangan kompetensi. Perusahaan telah menganggarkan biaya pelatihan karyawan sebesar Rp29.744.899.083 dengan realisasi di tahun 2025 sebesar Rp28.699.075.876 jumlah tersebut meningkat 118,7% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp13.062.493.386.

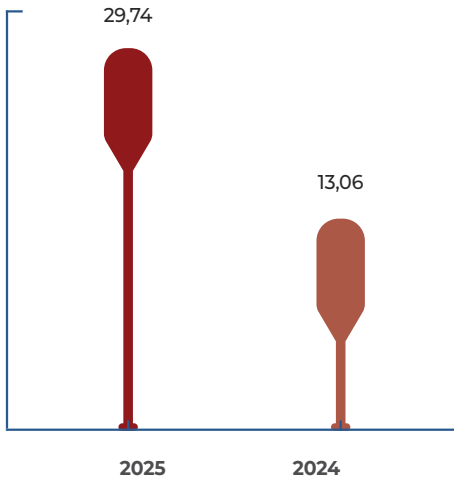
EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

The Company regularly supports employee development programs, one of which is by allocating funds for competency development programs. The Company has budgeted employee training expenses of IDR 29,744,899,083, with realized expenses in 2025 amounting to IDR 28,699,075,876, this amount represents an increase/decrease of 118.7% compared to 2024, which amounted to IDR 13,062,493,386.

Biaya Pengembangan Kompetensi (Rp-miliar)
Comparison of Competency Development Costs (IDR-Billion)

	2025	2024	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	29,74	13,06	16,68	56,09%	▲

Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi (Rp-miliar)
Comparison of Competency Development Costs (IDR-Billion)



Uraian lengkap terkait kebijakan pengelolaan dan pengembangan kompetensi bagi Karyawan yang dilakukan oleh IFG dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

A complete description of the competency management and development policies for Employees conducted by IFG is available in the discussion of Human Capital in the Business Support Functions chapter in this Annual Report.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDER STRUCTURE AND COMPOSITION

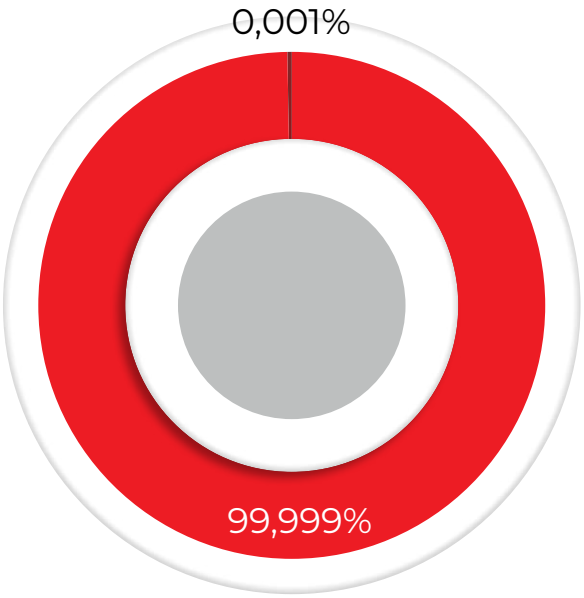
STRUKTUR DAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHARE OWNERSHIP OF THE COMPANY

Struktur Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2025
Structure of The Company's Shareholders As of December 31, 2025

Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (share)	**Jenis** Type	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage **(%)**
Pemerintah Republik Indonesia	1	Saham Dwiwarna Seri A Series A Dwiwarna Share	0,001
PT Danantara Asset Management	93.719.536	Saham Seri B Series B Dwiwarna Share	99,999%

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2025
Composition of the Company's Shareholders As of December 31, 2025



INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASING-MASING DI BAWAH 5 (LIMA) PERSEN

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham Manajemen, atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Selain itu, Perusahaan juga tidak melakukan

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP BY MANAGEMENT AND GROUP OF SHAREHOLDERS EACH BELOW 5 (FIVE) PERCENT

Throughout 2025, the Company did not have any policies related to Employee Stock Ownership Program (ESOP) and Management Stock Ownership Program (MSOP). Furthermore, The Company also did not conduct an Initial Public Offering which would have enabled public ownership of

Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Penjelasan mengenai seluruh kepemilikan saham telah sesuai dengan yang disampaikan di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

the Company's shares. The explanation of all shareholdings is in accordance with the above. Therefore, there are no Company officers or employees who own shares of the Company.

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Hingga akhir tahun 2025, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari Perusahaan melalui PT Danantara Asset Management (Danantara) sebagai bagian dari inisiatif strategis konsolidasi BUMN sektor asuransi dan penjaminan. Danantara bertindak sebagai pemegang saham untuk mendorong transformasi dan perampingan BUMN keuangan menjadi lebih kokoh.

INFORMATION ON MAJOR/ CONTROLLING SHAREHOLDERS

Through the end of 2025, the Government of the Republic of Indonesia will act as the major shareholder, controlling shareholder, and ultimate owner of the Company through PT Danantara Asset Management (Danantara) as part of a strategic initiative to consolidate state-owned enterprises in the insurance and guarantee sectors. Danantara will act as the shareholder to promote the transformation and streamlining of financial state-owned enterprises, making them more robust.

Pemerintah Republik Indonesia/ Kepresidenan Government/Presidency of Republic of Indonesia	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No. 3 RT.2/RW.3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia State Palace Jl. Medan Merdeka Utara No. 3 RT.2/RW.3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Central Jakarta DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 3845627 www.setneg.go.id Office of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Central Jakarta, 10110 DKI Jakarta, Indonesia Phone +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ministry of State-Owned Enterprises	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id Office of Ministry of SOEs Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta, 10110 DKI Jakarta, Indonesia Phone +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id
Danantara Indonesia	Wisma Danantara Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, Indonesia 12190 www.danantaraindonesia.co.id Wisma Danantara Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, South Jakarta, Indonesia 12190 www.danantaraindonesia.co.id

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN KERJA SAMA OPERASI

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND JOINT OPERATIONS



Nama Name	**Bidang Usaha** Line of Business	**Domisili** Domicile	**Tahun Berdiri** Year of Establishment	**Tahun Beroperasi Komersial** Year of Commercial Operation	**Kepemilikan oleh IFG** Ownership by IFG **(%)**		**Jumlah Aset (Rp-juta)** Total Asset (IDR- Million)		**Status Operasi** Operational Status
					2025	**2024**	**2025**	**2024**	
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)	Asuransi Insurance	Jakarta	1960	1961	**99,99%**	99,99%	**20.625.830**	18.374.228	Beroperasi In operation
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)	Penjaminan Guarantee	Jakarta	1970	1970	**99,99%**	99,99%	**30.857.443**	32.358.328	Beroperasi In operation
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	Asuransi Insurance	Jakarta	1971	1971	**99,99%**	99,99%	**31.448.626**	37.178.049	Beroperasi In operation
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)	Asuransi Insurance	Jakarta	1973	1973	**99,99%**	99,99%	**14.590.585**	15.616.613	Beroperasi In operation
PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)	*Mutual Fund, Discretionary Fund, Alternative Investment*	Jakarta	1991	1991	**60,00%**	60,00%	**591.264**	502.509	Beroperasi In operation
PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)	*Building Management, Hospitality Management*	Jakarta	1989	1993	**52,88%**	52,88%	**818.218**	285.922	Beroperasi In operation
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	Pembiayaan Produktif, Penyertaan Saham, Obligasi, Konversi Productive Financing, Equity Investments, Bonds, Conversion	Jakarta	1991	1991	**84,75%**	85,24%	**1.227.223**	1.281.497	Beroperasi In operation
PT Bahana Sekuritas (BS)	Perantara Perdagangan Efek, Penjamin Emisi Efek, Penasehat Keuangan Securities Brokerage, Underwriter, Financial Advisor	Jakarta	1993	1993	**99,20%**	99,20%	**783.864**	856.326	Beroperasi In operation
PT Bahana Kapital Investa (BKI)	*Investment*, Penasihat Keuangan Investment, Financial Advisor	Jakarta	1993	1993	**99,97%**	99,97%	**20.619**	43.2101	Beroperasi In operation
PT Bahana Mitra Investa (BMI)	*Dormant Company*	Jakarta	1997	1997	**0,00%**	99,10%	**-**	933	*Dormant*
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	Asuransi Insurance	Jakarta	2020	2021	**99,99%**	99,99%	**32.857.981**	34.967.966	Beroperasi In operation

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

1. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)

- **Riwayat Singkat**

  PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), selanjutnya disebut "Jasa Raharja" atau "Perusahaan", berdiri pada tanggal 1 Januari 1960. Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Di bidang asuransi kerugian, penerbitan Undang-undang tersebut dijelaskan melalui PP No. 3 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

  Seiring dengan terbitnya PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), Jasa Raharja bergabung ke dalam BUMN *holding* asuransi, penjaminan, dan investasi. IFG bertindak sebagai *Holding* asuransi, penjaminan, dan investasi BUMN dengan anggota PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

- **Keunggulan**

  Jasa Raharja turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi, jaminan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi kerugian dengan menyelenggarakan program asuransi sosial, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- **Brief History**

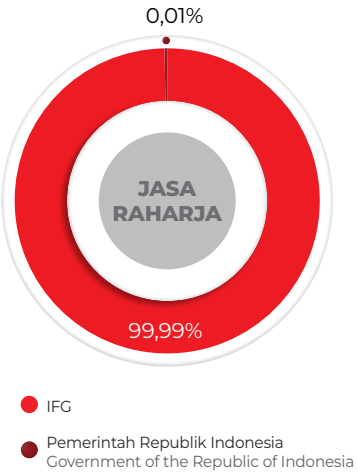
  PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), hereinafter referred to as "Jasa Raharja" or the "Company", was established on January 1, 1960. The history of Jasa Raharja's establishment is closely linked to the government's policy of nationalizing Dutch-owned companies with the enactment of Law No. 86 of 1958 concerning the Nationalization of Dutch Companies. In the insurance sector, the issuance of the Law is explained through Government Regulation No. 3 of 1960 concerning the Determination of Dutch Loss Insurance Companies subject to Nationalization.

  With the issuance of Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of State Equity Participation in the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), Jasa Raharja has joined the state-owned holding company for insurance, guarantee, and investment. IFG acts as the SOE Holding company for insurance, guarantee, and investment, with members including PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), and PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

- **Excellence**

  Jasa Raharja participates in implementing and supporting Government policies and programs in the fields of economy, social security and national development in general, especially in the field of loss insurance by organizing social insurance programs, and optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and competitive services to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Kepemilikan Saham Jasa Raharja per 31 Desember 2025
Share Ownership of Jasa Raharja
As of December 31, 2025



Manajemen Kunci Jasa Raharja per 31 Desember 2025
Key Management of Jasa Raharja
As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Commissioner	Hendro Sugiatno
Komisaris Independen Independent Commissioner	Muhammad Khoerur
Komisaris Independen Independent Commissioner	Roziqin
Komisaris Independen Independent Commissioner	Eko Suwardi
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iwan Faidi
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Muhammad Awaluddin
Direktur Keuangan Director of Finance	Bayu Rafisukmawan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Harwan Muldidarmawan
Direktur SDM dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	Rubi Handojo
Direktur Operasional Director of Operations	Ariyandi
Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Dewi Aryani Suzana

Kinerja Keuangan Jasa Raharja 2025-2024
Financial Performance of Jasa Raharja 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	2024 (Rp-miliar) (IDR-billion)
Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Result	1.947	1.059
Hasil Investasi Investment Income	1.399	807
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	2.573	1.133
Laba Bersih Tahun Berjalan Net profit for the year	2.299	964

2. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

- **Riwayat Singkat**

  Jamkrindo berdiri pada 1980 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu, perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui PP No. 51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

  Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan PP No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, peraturan ini diterbitkan guna meningkatkan peran Jamkrindo dalam industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk menyukseskan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah memandang Jamkrindo perlu melakukan pengembangan usaha

- **Brief History**

  Jamkrindo was established in 1980 as a Cooperative Credit Guarantee Agency (LJKK). At that time, the development of cooperatives was still lagging behind that of state-owned enterprises and private companies. In its development, LJKK was later changed to the Public Company for Cooperative Financial Development (Perum PKK) through Government Regulation No. 51 of 1981 dated December 23, 1981 which was enhanced by Government Regulation No. 51 of 1981. 27 of 1985 dated May 31, 1985 on the General Company for Cooperative Financial Development.

  In 2018, the Government issued Government Regulation (PP) No. 35/2018 on Public Company (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, this regulation was issued to increase Jamkrindo's role in the national guarantee industry as an effort to succeed the Government's policies and programs in the field of economy and national development. The Government views that Jamkrindo needs to develop its business by adding to the Company's business activities

dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

in accordance with current developments and needs, to support the Government's policies and programs in the economic sector and national development.

Pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui PP No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484. AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian perusahaan perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

In 2020, President of the Republic of Indonesia Joko Widodo officially changed the legal entity of Jaminan Kredit Indonesia Corporation from a Public Company to become a Limited Liability Company through Government Regulation No. 11/2020 which was promulgated on February 17, 2020. This decision was confirmed by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AH.01.01 of 2020 concerning Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of establishment of the company PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed at the Ministry of SOEs building, Jakarta on February 24, 2020.

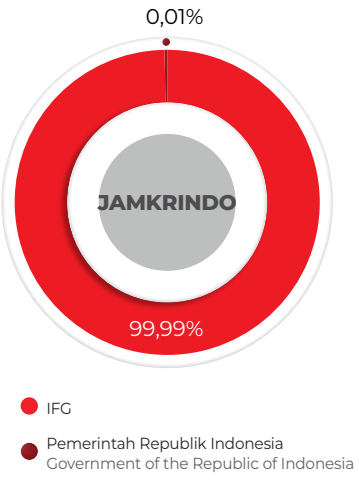
Kemudian pada 9 April 2020, Akta Pendirian PT Jamkrindo (Persero) No. 25 tanggal 24 Februari 2020 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 9 April 2020 yang menjadikan bergantinya status dan nama Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo.

Then on April 9, 2020, the Deed of Establishment of PT Jamkrindo (Persero) No. 25 dated February 24, 2020 was amended by the issuance of the Deed of Resolution of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia regarding the Amendment to the Articles of Association No. 2 dated April 9, 2020 which resulted in the change of Jamkrindo's status and name to PT Jamkrindo.

- **Keunggulan**
  Perseroan memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha UMKM, serta Koperasi, Penjaminan bagi BUMN Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan.

- **Excellence**
  The Company aims to conduct business activities in the form of guarantees for MSMEs and cooperatives, guarantees for state-owned enterprises, warehouse receipt system guarantees, and other guarantees, as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on corporate governance principles.

Kepemilikan Saham Jamkrindo per 31 Desember 2025
Share ownership of Jamkrindo As of December 31, 2025



Manajemen Kunci Jamkrindo per 31 Desember 2025
Key Management of Jamkrindo As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Krisna Wijaya
Komisaris Independen Independent Commissioner	Muh. Aras
Komisaris Independen Independent Commissioner	Dian Milani Hakim
Komisaris Commissioner	Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Commissioner	Ari Wahyuni
Komisaris Commissioner	Muslim Saleh
Direksi Board of Directors	
Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Suwarsito
Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services	Abdul Bari
Direktur Manajemen SDM, Umum dan Manajemen Risiko Director of Human Capital Management, General Affairs, and Risk Management	Achmad Ivan Sutrisna Soeparno
Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Alia Nur Fitri

Kinerja Keuangan Jamkrindo 2025-2024
Financial Performance of Jamkrindo 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	**2024 (Rp-miliar)** (IDR-billion)
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	**1.674**	1.903
Beban Penjaminan Bersih Net Guarantee Expenses	**1.543**	1.459
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	**1.280**	1.287
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	**1.052**	1.161

3. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

ASKRINDO Insurance
A member of IFG

- **Riwayat Singkat**

  PT Asuransi Kredit Indonesia, selanjutnya disebut"Askrindo" didirikan pada tanggal 6 April 1971, sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP No. 1 Tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit dengan Pemegang Saham Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Maksud dan tujuan didirikannya Askrindo adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam memperoleh akses ke sistem perkreditan perbankan, agar UMKM dapat lebih memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

  Seiring perkembangan bisnis Perusahaan, Askrindo telah mengalami beberapa kali perubahan status kepemilikan saham, di mana pada awal pendiriannya pemegang saham Askrindo adalah Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kemudian, sejak tahun 2010, Bank Indonesia telah melepaskan seluruh sahamnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Pemegang Saham menjadi hanya Departemen Keuangan RI. Pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Askrindo bergabung dengan *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi atau Indonesia Financial Group (IFG). Hal ini seiring dengan terbitnya PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.

- **Keunggulan**

  Askrindo memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Selain itu, Perusahaan juga berupaya mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- **Brief History**

  PT Asuransi Kredit Indonesia, hereinafter referred to as "Askrindo," was established on April 6, 1971, as a follow-up to the issuance of Government Regulation No. 1 of 1971 dated January 11, 1971 concerning the Investment of State Equity of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in Credit Insurance with Shareholders of Bank Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The purpose and objective of establishing Askrindo is to provide solutions to problems faced by MSME players in gaining access to the banking credit system, allowing MSMEs to play a greater role in supporting national economic growth.

  Along with the development of the Company's business, Askrindo has undergone several changes in share ownership status, where at the beginning of its establishment Askrindo's shareholders were Bank Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Moreover, since 2010, Bank Indonesia has transferred all of its shares to the Government of the Republic of Indonesia, so that the sole shareholder is now the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. On March 31, 2020, pursuant to a decision by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), PT Askrindo joined the Insurance, Guarantee, and Investment Holding Company, or the Indonesia Financial Group (IFG). This is in line with the issuance of Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, derived from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia in PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) , PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Company (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero).

- **Excellence**

  Askrindo has the purpose and objective to conduct business in the field of insurance by conducting a loss insurance business, including with sharia principles and optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality services and strong competitiveness. In addition, the Company also seeks to obtain or pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Kepemilikan Saham Askrindo per 31 Desember 2025
Share Ownership of Askrindo
As of December 31, 2025



Manajemen Kunci Askrindo per 31 Desember 2025
Key Management of Askrindo
As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Commissioner	Encep Sudarwan
Komisaris Independen Independent Commissioner	Renny Octavianus Rorong
Komisaris Independen Independent Commissioner	Viviet Savitri Prapita S
Komisaris Independen Independent Commissioner	Heru Kreshna Reza
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	M. Fankar Umran
Direktur Keuangan Director of Finance	Leonardo Henry Gavaza
Direktur Bisnis Director of Business	Budhi Novianto
Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Director of Compliance, Human Resources, and Risk Management	R. Mahelan Prabantarikso

Kinerja Keuangan Askrindo 2025-2024
Financial Performance of Askrindo
2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	**2024 (Rp-miliar)** (IDR-billion)
Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Result	**361**	11
Hasil Kegiatan Penjaminan Guarantee Service Result	**2.233**	1.842

Kinerja Keuangan Askrindo 2025-2024
Financial Performance of Askrindo 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	2024 (Rp-miliar) (IDR-billion)
Hasil Investasi Investment Income	**1.196**	1.158
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**1.975**	1.616
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit Before Income Tax	**1.695**	1.749

4. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

asuransi jasindo
A member of IFG

- **Riwayat Singkat**

PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo yang bergerak di bidang jasa asuransi umum, merupakan Anggota *Holding* dari IFG yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan status baru yang berlaku sejak tahun 2020 tersebut, walau masih merupakan bagian dari BUMN dan masih terdapat kepemilikan negara, Asuransi Jasindo tidak lagi menggunakan kata "Persero" sebagai nama resmi perusahaan.

Asuransi Jasindo merupakan hasil nasionalisasi terhadap dua perusahaan asuransi, yaitu NV Assurantie Maatschappij de Nederlander dan Bloom Vander. Kebijakan nasionalisasi terhadap kedua perusahaan asuransi tersebut diikuti dengan perubahan nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing. Kehadiran PT Asuransi Bendasraya bertujuan untuk memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat dan memperkokoh keamanan serta perekonomian negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972 tanggal 9 Desember 1972, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan *merger* antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters

- **Brief History**

PT Asuransi Jasa Indonesia or Asuransi Jasindo, which is engaged in general insurance services, is a Holding Member of IFG, which is a State-Owned Enterprise (SOE). With the new status that has been in effect since 2020, although it is still part of a state-owned enterprise and still has state ownership, Asuransi Jasindo no longer uses the word "Persero" as the company's official name.

Asuransi Jasindo is the result of the nationalization of two insurance companies, namely NV Assurantie Maatschappij de Nederlander and Bloom Vander. The nationalization policy of the two insurance companies was followed by a change in their names to PT Asuransi Bendasraya engaged in General Insurance in Rupiah and PT Umum Internasional Underwriters (UIU) engaged in General Insurance in foreign currency. The presence of PT Asuransi Bendasraya aims to provide maximum benefits to the community and strengthen the security and economy of the country.

Based on the Decree of the Minister of Finance No. 764/MK/IV/12/1972 dated December 9, 1972, the Indonesian Government decided to merge PT Asuransi Bendasraya and PT Umum Internasional Underwriters (UIU) into

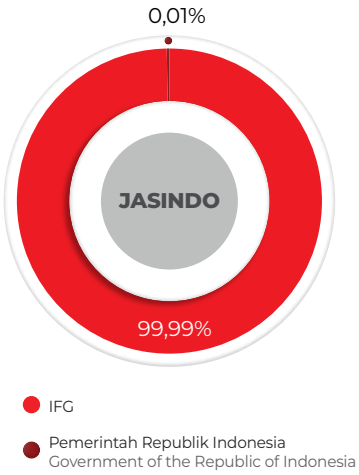
(UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Penggabungan tersebut disahkan pada tanggal 2 Juni 1973 melalui Akta Notaris Mohamad Ali No. 1.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the General Insurance business. The merger was legalized on June 2, 1973 through Notarial Deed by Mohamad Ali No. 1.

- **Keunggulan**
  Asuransi Jasindo melakukan usaha di bidang asuransi kerugian dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- **Excellence**
  Asuransi Jasindo conducts business in the field of loss insurance and other similar businesses in accordance with the applicable laws and regulations as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality services and strong competitiveness to obtain / pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Kepemilikan Saham Jasindo per 31 Desember 2025
Share Ownership of Jasindo As of December 31, 2025



Manajemen Kunci Jasindo per 31 Desember 2025
Key Management of Jasindo As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Commissioner	Dwi Pudjiastuti Handajani
Komisaris Commissioner	Indah Anggoro Putri
Komisaris Commissioner	Amir Tohar
Komisaris Independen Independent Commissioner	M. Aditya Mufti Ariffin
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Andy Samuel
Direktur Operasional Director of Operations	Ocke Kurniandy
Direktur SDM dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	Dewi Utari

Kinerja Keuangan Jasindo 2025-2024
Financial Performance of Jasindo 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	2024 (Rp-miliar) (IDR-billion)
Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Result	362	456
Hasil Investasi Investment Income	286	245
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	335	323
Laba Bersih Tahun Berjalan Net profit for the year	460	441

5. PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)

- **Riwayat Singkat**

  BTIM bergerak dibidang manajemen investasi dan tanggal 21 Juni 1994, Perusahaan memperoleh izin operasi sebagai perusahaan manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK). Sejak tanggal 31 Desember 2012, seluruh fungsi, tugas, dan wewenang Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

  BTIM merupakan Perusahaan patungan antara IFG (dengan kepemilikan saham 60%) dengan TCW Capital Investment Company LLC (dengan kepemilikan saham 40%), salah satu lembaga keuangan manajer investasi terkemuka di Amerika Serikat. Pasca terjadinya *massive redemption* pada industri Reksa Dana di tahun 2005, sejak saat itu sampai dengan akhir tahun 2020, industri Reksa Dana semakin bergairah dengan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sehingga dana kelolaan BTIM mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp51,40 triliun.

  Hingga saat ini, BTIM telah dipercaya sebagai Manajer Investasi untuk mengelola Asian Bond Fund yang dihimpun oleh Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), yang merupakan lembaga kerjasama bank-bank sentral di negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

- **Brief History**

  BTIM operates in investment management sector and on June 21, 1994 the Company obtained an operating license as an investment management company from the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK). Since December 31, 2012, all functions, duties and authority of Bapepam and LK have been transferred to the Financial Services Authority (OJK) based on Law no. 21 of 2011 concerning OJK.

  BTIM is a joint venture between IFG (with 60% share ownership) and TCW Capital Investment Company LLC (with 40% share ownership), one of the leading investment management financial institutions in United States. After the massive redemption occurred in the Mutual Fund industry in 2005, from then until the end of 2020, the Mutual Fund industry became increasingly enthusiastic with the recovery of public confidence in the capital market so that BTIM's managed funds increased to IDR 51.40 trillion.

  Until now, BTIM has been trusted as the Investment Manager to manage the Asian Bond Fund which was collected by the Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), which is a cooperative institution for central banks in East Asia and Pacific countries.

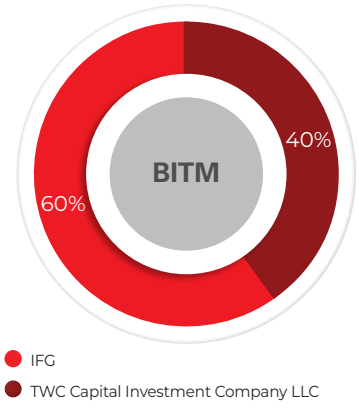
- **Keunggulan**
  BTIM dipercaya dalam pengelolaan investasi dari beberapa institusi besar multinasional, yang mana hal ini menunjukkan pengakuan pasar dan investor atas reputasi dan kinerja BTIM sebagai Manajer Investasi dalam mengelola investasi jangka panjang. Kepercayaan internasional yang diemban BTIM direfleksikan oleh mandat dari Executives Meeting for East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) untuk mengelola sebagian dana bank-bank sentral Asia Pasifik.

  Sejak 2005, BTIM adalah satu-satunya Manajer Investasi yang dipercaya untuk mengelola Reksa Dana Asian Bond Fund - Indonesia Bond Index Fund (ABF - IBI Fund), serta menjadi pelopor dalam industri Reksa Dana sebagai Manajer Investasi pertama yang mampu menciptakan inovasi produk *Exchange Traded Fund* (ETF) berbasis portofolio Obligasi Pemerintah RI. Ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode efek R-ABFII (Unit Penyertaan Reksa Dana ABF yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia). Pada tahun 2008, BTIM sebagai Manajer Investasi pertama yang mampu menerbitkan produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis portofolio efek bersifat ekuitas pada Perseroan Tertutup sektor infrastruktur yang bergerak di bidang Pelabuhan Umum, dan sebagai Manajer Investasi pertama di Indonesia yang memiliki fitur produk investasi berbasis *endowment fund*.

- **Excellence**
  BTIM is trusted in managing investments from several large multinational institutions, which shows market and investor recognition of BTIM's reputation and performance as an Investment Manager in managing long-term investments. The international trust that BTIM carries is reflected in the mandate from the Executives Meeting for East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) to manage part of the funds of Asia Pacific central banks.

  Since 2005, BTIM has been the only Investment Manager trusted to manage the Asian Bond Fund - Indonesia Bond Index Fund (ABF - IBI Fund), as well as being a pioneer in the Mutual Fund industry as the first Investment Manager capable of creating innovative Exchange Traded Fund (ETF) products based on the Indonesian Government Bond portfolio. It is listed on the Indonesian Stock Exchange with the effect code R-ABFII (ABF Mutual Fund Participation Units which can be traded on the Indonesian Stock Exchange). In 2008, BTIM was the first Investment Manager capable of issuing a Limited Participation Mutual Fund (RDPT) product based on an equity portfolio of securities in a Closed Company in the infrastructure sector operating in the Public Port sector, and as the first Investment Manager in Indonesia which have a feature-based investment product of endowment funds.

Kepemilikan Saham BTIM per 31 Desember 2024
Share ownership in BTIM
As of December 31, 2024



Manajemen Kunci BTIM per 31 Desember 2025
Share Ownership Structure of BTIM
As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Hario Soeprobo
Komisaris Commissioner	Marc Irwin Stern

Manajemen Kunci BTIM per 31 Desember 2025
Share Ownership Structure of BTIM As of December 31, 2025

Direksi Board of Directors	
Direktur Pemasaran merangkap Plt. Presiden Direktur Director of Marketing, concurrently as Acting President Director	Danica Adhitama
Direktur Investasi Director of Investment	Doni Firdaus
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Director of Risk Management and Compliance	Novi Imelda

Kinerja Keuangan BTIM 2025-2024
Financial Performance of BTIM 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	**2024 (Rp-miliar)** (IDR-billion)
Pendapatan Usaha Operating Income	284	235
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	100	60
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	78	42

6. PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)

- **Riwayat Singkat**

  GNTU merupakan salah satu Anggota *Holding* dari IFG yang bergerak di bidang pemilikan, pengelolaan dan penyewaan gedung-gedung atau bagian gedung-gedung untuk dipergunakan sebagai ruangan kantor, tempat usaha dan keperluan lainnya.

  Usaha komersial GNTU dimulai sejak 1 Juni 1993 dengan didirikannya gedung Graha CIMB Niaga, sebuah gedung perkantoran yang terletak di kawasan perkantoran terkemuka, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman ("SCBD"), di Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, dengan luas lantai 65.119 m^2 yang terdiri dari 28 lantai dan 3 *basement* serta area yang disewakan (*rentable area*) seluas kurang lebih 32.247,24 m^2.

- **Brief History**

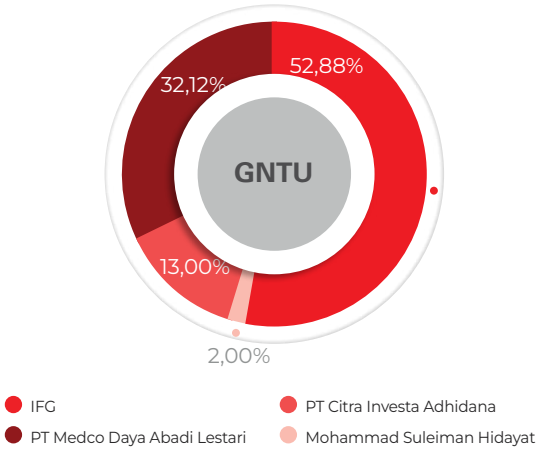
  GNTU is one of the subsidiaries of IFG that is engaged in the ownership, management, and leasing of buildings or portions of buildings for use as office space, business premises, and other purposes.

  GNTU's commercial business began on June 1, 1993 with the establishment of the Graha CIMB Niaga building, an office building located in a leading office area, Sudirman Integrated Commercial Area ("SCBD"), on Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, with a total floor area of 65,119 m^2 comprising 28 floors and 3 basement levels, as well as a rentable area of approximately 32,247.24 m^2.

- **Keunggulan**
  Manajemen GNTU berpedoman pada Sistem Manajemen Mutu (*The Quality Management System*) ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan (*The Environment Management System*) 14001:2015 dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). GNTU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti pertama di kawasan Jakarta Selatan yang menyandang sertifikat ISO 14001:2015 tersebut. GNTU memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 tersebut dari lembaga sertifikasi internasional *Lloyd's Register Quality Assurance Limited*, serta mendapat akreditasi dari UKAS Quality Management dan KAN (Komite Akreditasi Nasional) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu. GNTU juga memperoleh Sertifikasi dengan predikat Platinum pada tanggal 13 Maret 2019 dan *Green Office* dengan predikat Gold pada tanggal 21 April 2016 dari *Building and Construction Authority International Singapore* (BCAI).

- **Excellence**
  In conducting daily operational activities, GNTU Management is guided by the Quality Management System of ISO 9001: 2015, Environmental Management System of 14001:2015, as well as the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS). GNTU is the first property company in the South Jakarta area that holds the ISO 14001: 2015 certificate. GNTU obtained ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certifications from the international certification body Lloyd's Register Quality Assurance Limited, and received accreditation from UKAS Quality Management and KAN (National Accreditation Committee) Quality System Certification Body. GNTU also obtained a Platinum Certificate on March 13, 2019 and Green Office with a Gold title on April 21, 2016 from the Building and Construction Authority International (BCAI) Singapore.

Kepemilikan Saham GNTU per 31 Desember 2025
Share Ownership of GNTU As of December 31, 2025



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah (Rp) Total (in IDR)		Jumlah (Lembar Saham) Total (Shares)		%
	Seri A Series A	Seri B Series B	Seri A Series A	Seri B Series B	
IFG	23.014.062.500	183.750.000.000	4.468.750	8.750.000	52,88
Mohammad Suleiman Hidayat	2.575.000.000		500.000		2,00
PT Citra Investa Adhidana	16.737.500.000		3.250.000		13,00
PT Medco Daya Abadi Lestari	41.360.937.500		8.031.250		32,12
Total		**267.437.500.000**	**16.250.000**	**8.750.000**	**100,00**

Manajemen Kunci GNTU per 31 Desember 2025
Key Management of GNTU As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Dedi Sjahrir Panigoro
Komisaris Commissioner	Ariqul Yaqin
Komisaris Commissioner	Indira Purwita Djohan
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Chairul Tri Handinarno
Direktur Director	Dewa Agung Rudy P.H.

Kinerja Keuangan GNTU 2025-2024
Financial Performance of GNTU 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	2024 (Rp-miliar) (IDR-billion)
Pendapatan usaha Operating Income	190	184
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	83	76
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	80	74

7. PT Bahana Artha Ventura (BAV)

- **Riwayat Singkat**
  PT Bahana Artha Ventura (BAV) didirikan atas keterkaitan dengan penugasan awal Pemerintah kepada IFG untuk membina dan menggerakkan sektor UMKM. Sejalan dengan perkembangan bisnis IFG, penugasan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada BAV untuk mencapai tujuan IFG dalam pembiayaan dan pembinaan sektor UMKM di Indonesia.

- **Brief History**
  PT Bahana Artha Ventura (BAV) was founded in connection with the government's initial assignment to IFG to develop and mobilize the MSME sector. In line with IFG's business development, this assignment was completely handed over to BAV to achieve IFG's goals in financing and developing the MSME sector in Indonesia

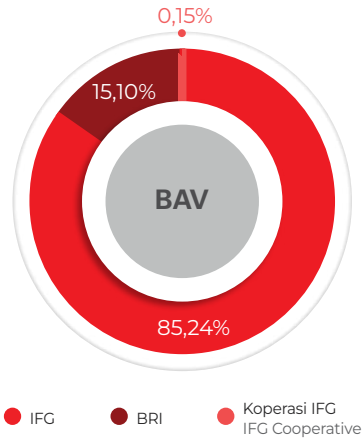
BAV senantiasa mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas sebaran pergerakan sektor riil secara nasional. Hingga saat ini, BAV telah mendirikan 27 Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengajak mitra lokal dan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia sebagai pemegang saham di masing-masing daerah untuk memperkuat jaringan kerja dan memperluas basis UMKM yang dibinanya. Bermula dari hanya 7 (tujuh) PMVD pada tahun 1994, BAV menargetkan untuk memiliki PMVD di setiap provinsi. Target tersebut tercapai dengan status kepemilikan PMVD di 27 propinsi. Hingga kini, BAV telah memiliki 25 PMVD di 24 provinsi khususnya sejak ditutupnya kantor PMVD di Timor Timur pada tahun 1999 dan pelepasan PMVD NTT serta likuidasi PMVD Sumatera Selatan.

BAV continues to support government policies in encouraging regional economic growth and expanding the distribution of real sector movements nationally. Until now, BAV has established 27 Regional Venture Capital Companies (PMVD) spread across 26 provinces in Indonesia. This is done by inviting local partners and several leading companies in Indonesia as shareholders in each region to strengthen the network and expand the MSME basis which is fostered. Starting from only 7 (seven) Regional Venture Capital Companies (PMVD) in 1994, BAV targets to have PMVD in each province. The target was achieved with PMVD ownership status in 27 provinces. To date, BAV has had 25 PMVDs in 24 provinces particularly since the closing of the PMVD office in East Timor in 1999 and the liquidation of the South Sumatran PMVD.

- **Keunggulan**
  BAV merupakan perusahaan modal ventura yang memiliki jaringan terluas di Indonesia. Oleh karena itu, BAV mampu menjangkau dan terbukti efektif untuk mengembangkan UMKM di hampir seluruh daerah di Indonesia, dengan produk pembiayaan pola bagi hasil, penyertaan saham dan obligasi konversi.

- **Excellence**
  BAV is a venture capital company that has the widest network in Indonesia. Therefore, BAV is able to reach and prove effective in developing MSMEs in almost all regions in Indonesia, with profit-sharing financing products, investment in shares and convertible bonds.

Kepemilikan Saham BAV per 31 Desember 2025
Share Ownership of BAV As of December 31, 2025



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah (Rp) Total (in IDR)	Jumlah (Lembar Saham) Total (Shares)	%
IFG	399.538.000.000	399.538	85,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	71.207.000.000	71.207	15,10
Koperasi IFG IFG Cooperative	721.000.000	721	0,15
Total	**471.466.000.000**	**471.466**	**100**

Manajemen Kunci BAV per 31 Desember 2025
Key Management of BAV As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Independen merangkap Komisaris Utama Independent Commissioner concurrently as President Commissioner	Hafiz Arief
Komisaris Commissioner	Rianto Ahmadi
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Agus Wicaksono
Direktur Keuangan & Operasional Director of Finance & Operations	Rukita
Direktur Pembinaan Usaha Director of Business Development	Noersari Handayani

Kinerja Keuangan BAV 2025-2024
Financial Performance of BAV 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	**2024 (Rp-miliar)** (IDR-billion)
Pendapatan usaha Operating Income	**115**	128
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Loss Before Income Tax	**(22)**	(21)
Rugi Tahun Berjalan Loss for the Year	**(23)**	(21)

8. PT Bahana Sekuritas (BS)

- **Riwayat Singkat**
  Sejak tanggal 12 November 1993, PT Bahana Sekuritas (BS) memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek. Setelah adanya persetujuan tersebut, Perusahaan secara konsisten memberikan komitmen dan kontribusi nyata dalam mendorong upaya Pemerintah untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia.

- **Brief History**
  On November 12, 1993, PT Bahana Sekuritas (BS) obtained approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia to conduct activities as an underwriter and securities trading broker Following this approval, the Company has consistently demonstrated its commitment and made tangible contributions to supporting the government's efforts to develop the capital market in Indonesia.

Selain itu, Perusahaan juga secara aktif mengembangkan perdagangan saham dan obligasi di pasar sekunder dan menjadi penjamin emisi saham (IPO) maupun obligasi berbagai perusahaan di Indonesia. Perusahaan juga berperan aktif dalam menangani proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta nasional guna membantu perusahaan tersebut menjadi lebih sehat dan kuat, serta mampu berdaya saing di era globalisasi.

The Company actively develops stocks and bonds trading in the secondary market and becomes an underwriter (IPO) and bonds of various companies in Indonesia. The Company also plays an active role in handling the restructuring process of state-owned and national private companies to help the company become healthier and stronger, and able to compete in the era of globalization.

Dalam rangka menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan jasa Pasar Modal dan Penasihat Keuangan Nasional yang Terkemuka di Indonesia melalui inovasi, keahlian, kepemimpinan, dan komitmen terhadap harapan pemangku kepentingan dan perkembangan berkesinambungan pasar modal di Indonesia. Visi ini diaktualisasikan melalui misi perusahaan yaitu untuk Menyediakan Solusi Jasa Pasar Modal dan Penasihat Keuangan yang Inovatif, Berkualitas, Aman dan Terpercaya untuk mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Di pasar saham, Perusahaan telah menangani berbagai transaksi yang menjadi *landmark* di pasar modal Indonesia.

In conducting its business activities, the Company has a vision to become a Leading Capital Market and National Financial Advisory service company in Indonesia through innovation, expertise, leadership, and commitment to stakeholder expectations and sustainable development of the capital market in Indonesia. This vision is actualized through the Company's mission, which is to Provide Innovative, Quality, Safe and Reliable Capital Market and Financial Advisory Services Solutions to support Indonesia's Economic Growth. In the stock market, the Company has handled various transactions that have become landmarks in the Indonesian capital market.

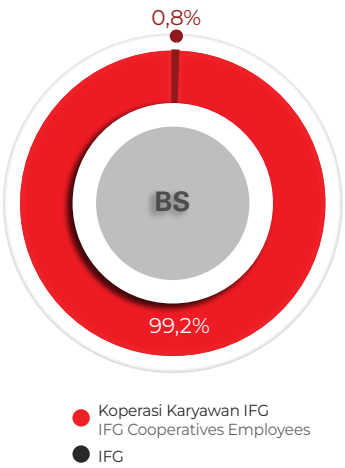
- **Keunggulan**

  Perusahaan telah berhasil menunjukkan eksistensinya di pasar modal dan keuangan Indonesia, dengan menjadi salah satu perusahaan sekuritas terkemuka dan disegani di Indonesia. Eksistensi dan peran BS diakui oleh pelaku bisnis di dalam negeri serta pelaku bisnis di dunia keuangan internasional. Berbagai penghargaan telah diterima dari sejumlah media maupun lembaga terkemuka baik nasional maupun internasional yang mana menegaskan posisi BS di sektor industri keuangan Indonesia.

- **Excellence**

  The Company has successfully demonstrated its existence in the Indonesian capital and financial markets, by becoming one of the leading and respected securities companies in Indonesia. The existence and role of BS are recognized by business people in the country and business people in the world of international finance. Various awards have been received from a number of leading media and institutions both nationally and internationally which confirm BS's position in the Indonesian financial industry sector.

Kepemilikan Saham BS per 31 Desember 2025
Share Ownership of BS As of December 31, 2025



Kepemilikan Saham BS per 31 Desember 2025
Key Management of BS As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Plt. Komisaris Utama merangkap Plt. Komisaris Independen Acting President Commissioner concurrently as Acting Independent Commissioner	Hari Gursida
Komisaris Commissioner	Heru Handayanto
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Reza Benito Zahar
Direktur Operasional Director of Operations	Suryadi Adipranata
Direktur Perbankan Investasi Director of Investment Banking	Tulus Nababan

Kinerja Keuangan BS 2025-2024
Financial Performance of BS 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	**2024 (Rp-miliar)** (IDR-billion)
Pendapatan usaha Operating Income	**117**	138
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**(41)**	(34)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	**(41)**	(33)

9. PT Bahana Kapital Investa (BKI)

- **Riwayat Singkat**
  BKI merupakan Anggota *Holding* IFG yang bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*), serta direaktivasi sejak Juni 2018. BKI melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal baik secara langsung maupun melalui instrumen keuangan lainnya pada perusahaan dan menyediakan layanan jasa konsultasi kepada perusahaan-perusahaan seperti penggabungan usaha dan peleburan usaha (*merger and*

- **Brief History**
  BKI is a member of the IFG Holding Group that operates in investment and financial advisory services, and was reactivated in June 2018. BKI invests in the form of equity participation either directly or through other financial instruments in the companies and provides consulting services to companies such as on business mergers and acquisitions, feasibility studies, corporate strategy,

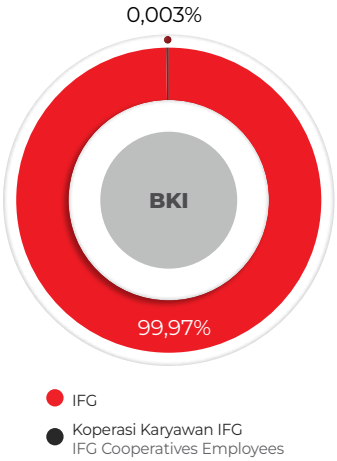
acquisition), studi kelayakan (*feasibility study*), strategi perusahaan (*corporate strategy*), maupun perencanaan pengembangan bisnis (*corporate planning*).

- **Keunggulan**
  Pada tahun 2025, BKI mencatatkan kinerja pendapatan usaha sebesar Rp13 miliar. Seluruh *project advisory* yang didapatkan oleh BKI berasal dari ekosistem *Holding* IFG ataupun BUMN. Adapun ruang lingkup *advisory* BKI antara lain *merger* dan akuisisi, *restructuring*, divestasi, dan lainnya.

as well as business development planning (corporate planning).

- **Excellence**
  In 2025, BKI reported operating revenue of IDR 13 billion. All of the advisory projects secured by BKI originated from the IFG Holding ecosystem or state-owned enterprises (SOEs). The scope of BKI's advisory services includes mergers and acquisitions, restructuring, divestitures, and others.

Kepemilikan Saham BKI per 31 Desember 2025
Share Ownership of BKI As of December 31, 2025



Manajemen Kunci BKI per 31 Desember 2025
Key Management of BKI As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Achmad Hafiz
Direksi Board of Directors	
Direktur Director	Syahruddin Ikhsan Dongoran

Kinerja Keuangan BKI 2025-2024
Financial Performance of BKI 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	**2024 (Rp-miliar)** (IDR-billion)
Pendapatan usaha Operating Income	**13**	16
Rugi Sebelum Pajak Loss Before Tax	**(23)**	(18)

Kinerja Keuangan BKI 2025-2024
Financial Performance of BKI 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	2024 (Rp-miliar) (IDR-billion)
Rugi Tahun Berjalan Loss for the Year	(23)	(17)

10. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)

- **Riwayat Singkat**

  PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) didirikan pada tanggal 22 Oktober 2020 melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Hadijah, S.H., IFG Life bergerak dalam bidang asuransi jiwa untuk memperluas cakupan bisnis dalam memenuhi target seluruh kebutuhan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Sebagai Anggota *Holding* dari IFG, Perusahaan diharapkan dapat menjadi perusahaan yang lebih besar dan sustain terutama di sektor asuransi jiwa.

  IFG Life mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 April 2021. Hingga kini, Perusahaan senantiasa melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan komprehensif. Berlandaskan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, IFG Life memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah.

- **Keunggulan**

  IFG Life senantiasa melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG sebagai Perusahaan asuransi perlindungan (jiwa dan kesehatan), penjaminan, dan investasi yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan

- **Brief History**

  PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) was established on October 22, 2020 through a Deed of Establishment of a Limited Liability Company by Notary Hadijah, S.H., IFG Life operates in the life insurance sector to expand its business scope to meet the target of all insurance and underwriting needs in Indonesia. As a holding Member of IFG, the Company is expected to become a larger and more sustainable company, especially in the life insurance sector.

  IFG Life obtained an operational license from the Financial Services Authority (OJK) on April 7, 2021. To date, the Company has consistently expanded and strengthened the IFG ecosystem as a state-owned holding company in the insurance, guarantee, and investment sectors, occupying a strategic position in the development of insurance products and services that offer maximum, sound, and comprehensive protection. which are based on governance and strong and prudent risk management, as well as optimizing the use of technology to expand service access so that maximum protection services can be provided to customers.

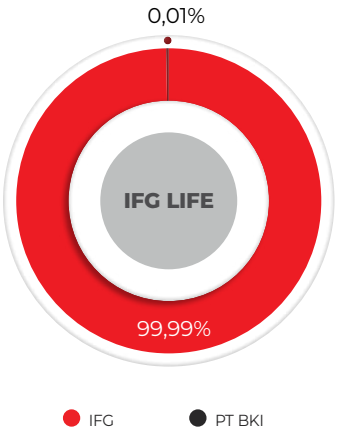
- **Excellence**

  IFG Life consistently complements and strengthens the IFG ecosystem as an insurance company specializing in protection (life and health), surety, and investment, holding a strategic position in the development of optimal, sound, and comprehensive protection insurance products and

komprehensif. Berlandaskan pada tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, IFG Life berkomitmen secara penuh untuk memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah.

services. With a basis on good governance, strong and careful risk management, as well as optimizing the use of technology, IFG Life is fully committed to expanding service access so that protection services can be provided optimally to customers.

Kepemilikan Saham IFG Life per 31 Desember 2025
Share Ownership of IFG Life As of December 31, 2025



- IFG: 20.509.999 lembar saham. masing-masing per lembar saham senilai Rp1.000.000
- PT Bahana Kapital Investa: 1 (satu) lembar saham
- IFG: 20,509,999 shares, each with a par value of IDR 1,000,000
- PT Bahana Kapital Investa: 1 (one) share

Manajemen Kunci IFG Life per 31 Desember 2025
Key Management of IFG Life As of December 31, 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Dasuki Amsir
Komisaris Independen Independent Commissioner	Akhmad Gojali Harahap
Komisaris Commissioner	Maliki Heru Santosa
Komisaris Commissioner	Rianto Ahmadi
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Budi Tua Arifin Tampubolon
Direktur Bisnis Korporasi Director of Corporate Business	Bugi Riagandhy
Direktur Keuangan Director of Finance	Ryan Diastana Firman
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Eli Wijanti

Kinerja Keuangan IFG Life 2025-2024
Financial Performance of IFG Life 2025-2024

	2025 (Rp-miliar) (IDR-billion)	2024 (Rp-miliar) (IDR-billion)
Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Result	350	609
Hasil Investasi Investment Income	2.327	1.902
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	466	141
Laba Bersih Tahun Berjalan Net profit for the year	482	183



ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, JARINGAN KAWASAN, SERTA INFORMASI TENTANG KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES, REGIONAL NETWORKS, AND INFORMATION ABOUT BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920
Telp | Phone: +6281210500500
Fax: +62 21 522084
Surel/E-mail: pusat@jasaraharja.co.id
Web: www.jasaraharja.co.id

PT Jaminan Kredit Indonesia
Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia | Central Jakarta 10610, Indonesia
Telp: +62 21 6540335
Surel/E-mail: contact@jamkrindo.co.id
Web: www.jamkrindo.co.id

PT Asuransi Kredit Indonesia
Graha Askrindo
Jl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta 10610 - Indonesia.
Telp | Phone: +62 21 6546471-72
Fax: +62 21 6546483-84
Surel/E-mail: askrindo@askrindo.co.id
Web: www.askrindo.co.id

PT Asuransi Jasa Indonesia
Graha Jasindo
Jalan Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat 10340 | Jalan Menteng Raya No. 21, Central Jakarta 10340
Telp | Phone: +62 21 3924737
contact center : 1500-073
Surel/E-mail: contactcenter@asuransijasindo.co.id
Web: www.jasindo.co.id

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, Lantai 21 | Graha CIMB Niaga, 21st Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp | Phone: +62 21 250 5585
Surel/E-mail: support.bahanatcw@bahana.co.id
Web: www.link.bahanatcw.com

PT Grahaniaga Tatautama
Graha CIMB Niaga Lantai B1 | Graha CIMB Niaga Floor B1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia
Telp | Phone: +62 21 2505250
Fax: +62 21 2505150
Web: www.grahaniaga.co.id

PT Bahana Artha Ventura
KMO Building
Suite 701, Lt.7 | Suite 701, 7th floor
Jl. Kyai Maja No.1
Gunung, Kebayoran - Jakarta Selatan 12120
Telp | Phone: +62 21 7918 2688
Web: www.bahanaventura.com

PT Bahana Sekuritas
Graha CIMB Niaga, lantai 19 | Graha CIMB Niaga, 19th Floor
Jl Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia
Telp | Phone: +62 21 250 5678
Fax: +62 21 250 5087
Surel: cs@bahana.co.id
Web: www.bahanasekuritas.id

PT Bahana Kapital Investa
Graha CIMB Niaga, Lantai 23 | Graha CIMB Niaga, 23rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp | Phone: +62 21 2505080
Surel/E-mail: adminbki@bahana.co.id
Web: www.bahanakapitalinvesta.id

PT Asuransi Jiwa IFG
Graha CIMB Niaga Lt. 5 dan 6 | Graha CIMB Niaga 5th and 6th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta - 12190
Telp | Phone: 1500 176
Web: www.ifg-life.id

PT Bahana Mitra Investa
Graha CIMB Niaga Lantai 18 | Graha CIMB Niaga 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia
Telp | Phone: +62 21 2505250
Fax: +62 21 5225909
Web: www.bahana.co.id

STRUKTUR GROUP IFG
GROUP STRUCTURE OF IFG



KEANGGOTAAN ASOSIASI
MEMBERSHIP IN ASSOCIATION

Sebagai langkah upaya dalam memperkuat bisnisnya, IFG aktif dalam berbagai asosiasi, sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

As part of its efforts to strengthen its business, IFG is active in various associations, as listed in the following table:

No.	Nama Asosiasi Name of Association
1.	Forum Hukum BUMN SOE Legal Forum
2.	Forum Human Capital Indonesia BUMN Indonesian SOE Human Capital Forum
3.	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal Internal Audit Communication Forum
4.	Forum Manajemen Risiko BUMN Internal Audit Communication Forum
5.	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal Internal Audit Communication Forum
6.	Srikandi BUMN Srikandi BUMN



KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING OF SHARES

Per 31 Desember 2025, Perusahaan tidak melakukan perdagangan saham kepada publik dan pencatatan saham di bursa efek, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham mencakup tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan nama bursa di mana saham dicatatkan.

As of December 31, 2025, the Company does not trade shares with the public or list shares on stock exchanges, whether in Indonesia or abroad. Therefore, there is no information regarding share trading including the year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, and share offering price for each corporate action; number of registered shares after each corporate action; and the name of the stock exchange where the shares are listed.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND REGISTRATION OF OTHER SECURITIES

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menerbitkan efek seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di bursa efek, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of the end of 2025, the Company has not issued securities such as bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities on the stock exchange, either in Indonesia or abroad. Thus, there is no information related to the name of the other securities, the year of issuance of the other securities, the interest/reward rate of the other securities, and the maturity date of the other securities; the offering value of the other securities; the name of the exchange where the other securities are listed; and the rating of the securities.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

KANTOR AKUNTAN PUBLIK — PUBLIC ACCOUNTANT OFFICE

Nama Lembaga/ Profesi Institution/Profession	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
Alamat Address	Plaza Asia, 10th & 11th Floor Jl. Jend. Sudirman kav. 59 Jakarta 12190 Plaza Asia, 10th & 11th Floor Jl. Jend. Sudirman kav. 59 Jakarta 12190
Periode Penugasan Assignment Period	7 Januari 2025 – 30 September 2025 January 7, 2025 - September 30, 2025
Jenis dan Bentuk Jasa Assignment Period	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2025 General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2025
Jasa Lainnya Other Services	• Audit *Opening Balance* atas Implementasi PSAK 117 • Pengujian dan pelaporan atas kepatuhan IFG terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan PSA No. 62 Audit umum atas Laporan Keuangan TJSL untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 • Audit of the Opening Balance upon the Implementation of PSAK 117 • Testing and reporting on IFG's compliance with applicable laws and regulations pursuant to PSA No. 62 General audit of the TJSL Financial Statements for the year ended December 31, 2025
Biaya Fee	• Audit Umum 2025: 6.930.000.000 • Audit *Opening Balance* PSAK 117: 23.281.509.261 Biaya di atas termasuk jasa profesi penunjang, *out-of-pocket expenses* tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% serta akan dipotong PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2% dan pajak-pajak lainnya (bila ada) sesuai ketentuan yang berlaku. • 2025 General Audit: IDR 6,930,000,000 • PSAK 117 Opening Balance Audit: IDR 23,281,509,261 The above fees include fees for supporting professional services and out-of-pocket expenses, but exclude 11% Value Added Tax (VAT). The fees are subject to a 2% withholding tax under Article 23 of the Income Tax Law (PPh Article 23) on services and other taxes (if any), in accordance with applicable regulations.

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

Sebagai bentuk keterbukaan informasi Perusahaan kepada public, IFG senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Untuk itu, IFG senantiasa memberikan informasi yang komunikatif dan terkini mengenai Perusahaan kepada semua pihak melalui laman resmi www.ifg.id. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengedepankan prinsip transparansi kepada seluruh pihak dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan, meliputi:

1. Informasi Umum Perusahaan;
2. Informasi Produk dan Layanan;
3. Informasi Publik; dan
4. Informasi Lainnya.

As part of the Company's commitment to transparency toward the public, IFG consistently upholds the principles of corporate governance. Therefore, IFG consistently provides clear and up-to-date information about the Company to all stakeholders through its official website, www.ifg.id. The Company is also committed to prioritizing the principle of transparency toward all stakeholders by doing its best to provide the necessary information, including:

1. General Information on the Company;
2. Product and Service Information;
3. Public Information; and
4. Other Information.

Situs web Perusahaan terdiri dari 9 (sembilan) kanal dengan konten sebagai berikut:

The Company's website consists of 9 (nine) channels with the following content:

Nama Kanal Channel Name	**Konten** Content
Tentang Kami About Us	• Sekilas Perusahaan • Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan • Sejarah Kami • Profil Manajemen • Struktur *Holding* • Struktur Organisasi • Penghargaan dan Sertifikat • Company at a Glance • Vision, Mission, and Corporate Culture • Our History • Management Profile • Holding Structure • Organizational Structure • Awards and Certifications
Produk dan Layanan Products and Services	• One by IFG • Asuransi Jiwa dan Kesehatan • Asuransi Umum dan Penjaminan • Penasihat Investasi dan Modal Usaha • Manajemen Aset • Manajemen Properti • Sekuritas dan Investasi • Asuransi dan Penjaminan Syariah • Reasuransi • One by IFG • Life and Health Insurance • General Insurance and Guarantee • Investment Advisor and Venture Capital • Asset Management • Property Management • Securities and Investment • Sharia Insurance and Guarantee • Reinsurance
Publikasi Publication	• Siaran Pers • Galeri • Laporan Tahunan • *Insight/Stories* • *Press Release* • *Gallery* • *Annual Report* • *Insight/Stories*

Nama Kanal Channel Name	Konten Content
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	· Pedoman Tata Kelola Perusahaan · Keterbukaan Informasi Publik · *Whistleblowing System* (WBS) Terintegrasi – IFG Integritas · Corporate Governance Guidelines · Public Information Disclosure · Integrated Whistleblowing System (WBS) – IFG Integritas
Karir Career	· Life at IFG · Rekrutmen · Life at IFG · Recruitment
IFG Corporate University	-
IFG Progress	-
Hubungi Kami Contact Us	-
Pengadaan Procurement	· Tentang Pengadaan · Informasi Pengadaan · About Procurement · Procurement Information

Perusahaan senantiasa memperbarui informasi yang disajikan dalam situs secara berkala untuk memberikan informasi terkini bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Selain itu, Perusahaan juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Instagram, Facebook, X, LinkedIn, dan Youtube.

The Company regularly updates the information presented on its website to provide the latest information to all stakeholders and the general public. The Company also has social media accounts as part of its information disclosure and communication with all stakeholders, including Instagram, Facebook, X, LinkedIn, and YouTube.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2025
Awards Obtained in 2025

Tanggal Date	**Nama Penghargaan** Awards Name	**Diberikan Oleh** Awarded by
November 2025	ESG Appreciation 2025	B Universe
Februari 2025 February 2025	Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2025	PR Indonesia Group
September 2025	Fortune Indonesia Award	Fortune Indonesia
Desember 2025 December 2025	Disway Award 2025 – Anugerah Brand Populer Indonesia	Disway National Network
Agustus 2025 August 2025	Industry Award 2025 – Indonesia Best Insurance Industry for Enhancing Operational Governance and Supporting Industrial Group	Warta Ekonomi Group
Desember 2025 December 2025	Anugerah Pikiran Rakyat Media Network 2025 (Innovative Brand Category) –	Pikiran Rakyat Media Network
April 2025	Anugerah Pewarta Foto Indonesia Anugerah Pewarta Foto Indonesia (Indonesian Photojournalists Awards)	Pewarta Foto Indonesia (PFI) Indonesian Photojournalists Association (PFI)
Mei 2025 May 2025	Anugerah Digital Media Award (IDMA) 2025 – Bronze Winner	Serikat Perusahaan Pers (SPS) Press Companies Association (SPS)
Desember 2025 December 2025	Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) – Tempo Data Science Indeks Integritas Bisnis Lestari (Sustainable Business Integrity Index/INSTAR) – Tempo Data Science	Media Tempo
September 2025	Nusantara International Choir Folk Festival – Gold Medal	Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara Capital Authority (IKN)

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2025
Certifications that still valid in 2025

Tanggal Date	**Nama Sertifikasi** Certification Name	**Berlaku Hingga** Valid Until	**Diberikan oleh** Given by
18 Agustus 2022 August 18, 2022	IT Capability Level 3.32 - COBIT 2019 IT Capability Level 3.32 - COBIT 2019	-	PT Mitratex Konsultan - COBIT 2019
26 Desember 2024 December 26, 2024	Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2024 ISO 27001 Information Security Management System Certificate: 2024	25 Desember 2027 December 25, 2027	PT TUV SUD Indonesia
23 Desember 2024 December 23, 2024	Certificate of Registration Anti-Bribery Management System - ISO 37001:2016	11 November 2027 November 11, 2027	BSI

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

BUSINESS SUPPORTING FUNCTION



04



Pengembangan SDM di lingkungan IFG dilaksanakan melalui sistem berbasis kompetensi yang disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi jabatan maupun individu.

Human resource development at IFG is carried out through a competency-based system designed according to the competency requirements of both positions and individuals.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL



PENGELOLA SDM PERUSAHAAN

Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan IFG dikelola oleh Divisi Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi. Divisi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi SDM.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia membawahi tiga departemen utama yang masing-masing memegang peran strategis dalam pengelolaan SDM secara terintegrasi, yaitu:

1. **Departemen Strategi SDM,** yang bertugas menyusun kebijakan, inisiatif strategis, dan perencanaan SDM, termasuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan struktur organisasi, serta penyusunan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan strategi perusahaan.
2. **Departemen Manajemen Talenta,** yang berperan dalam pengelolaan siklus karyawan, meliputi rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, pengelolaan suksesi dan *talent pool*, hingga program-program peningkatan keterlibatan dan retensi talenta.

COMPANY'S HUMAN CAPITAL MANAGER

Organizational Structure of Human Capital Division

The of Human Capital (HC) within IFG is managed by the Human Capital Division as regulated in the Decree of the Board of Directors Number 15 of 2024 concerning Organizational Structure Policy. This division is led by the Head of Human Capital Division who reports directly to the Director in charge of the Human Capital function.

In completing his/her duties, the Head of Human Capital Division oversees three main departments, each of which has a strategic role in integrated human resources management, namely:

1. **Human Capital Strategy Department,** which is responsible for developing policies, strategic initiatives, and human resource planning, including workforce needs planning, organizational structure development, and the development of Human Capital policies and procedures that are aligned with the company's strategy.
2. **Talent Management Department,** which plays a role in managing the employee life cycle, including recruitment and selection, competency development, performance management, succession and talent pool management, as well as talent engagement and retention programs.

3. **Departemen Layanan & Analisis SDM,** yang mengelola layanan administrasi SDM, penggajian, manajemen data karyawan, serta menyajikan analisis dan pelaporan SDM berbasis data (HR analytics) untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

Pembentukan struktur organisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi SDM berjalan secara terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi. Dengan susunan tersebut, setiap proses pengelolaan SDM diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam mendorong pencapaian tujuan strategis Perusahaan.

Jumlah Karyawan Divisi Sumber Daya Manusia

Guna mendukung pelaksanaan fungsi SDM secara menyeluruh dan terintegrasi, Divisi Sumber Daya Manusia diperkuat oleh 16 (enam belas) karyawan yang tersebar pada tiga departemen utama. Jumlah dan distribusi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik dalam perumusan kebijakan strategis, penyelenggaraan layanan operasional SDM, maupun pengelolaan serta pengembangan talenta.

Komposisi karyawan pada Divisi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

3. **Human Capital Services & Analytics Department,** which manages Human Capital administration services, payroll, employee data management, and provides data-driven HR analytics and reporting to support more accurate and data-driven decision-making.

The establishment of this organizational structure aims to ensure that all Human Capital functions operate in an integrated, adaptive, and responsive manner to the organization's evolving needs. With this structure in place, each Human Capital management process is expected to provide optimal support in driving the achievement of the Company's strategic objectives.

Total Employees of Human Capital Division

To support the comprehensive and integrated execution of Human Capital functions, the Human Capital Division is supported by 16 (sixteen) employees spread across three main departments. This number and distribution are tailored to the organization's needs, whether in formulating strategic policies, delivering operational Human Capital services, or managing and developing talent.

The composition of the Human Resources Division's employees is as follows:

Nama Jabatan Position	**Jumlah (2025)** Total (2025)
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Capital Division	1
Kepala Departemen Layanan SDM Head of Human Capital Services Department	0
Kepala Departemen Strategi SDM Head of Human Capital Services Department	0
Kepala Departemen Manajemen Talenta Head of Talent Management Department	1
Officer Layanan dan Analisis SDM Human Capital Service and Analysis Officer	4
Officer Strategi SDM Human Capital Strategy Officer	4
Officer Manajemen Talenta Talent Management Officer	3
Staf Layanan SDM Staff of Human Capital Services	2
Staf Strategi SDM Staff of Human Capital Strategy	0
Staf Manajemen Talenta Staff of Talent Management	1
Jumlah Total	**16**

Komposisi tersebut menunjukkan komitmen Perusahaan dalam membangun Divisi Sumber Daya Manusia yang tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga memiliki kapasitas dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi SDM yang proaktif serta adaptif terhadap kebutuhan organisasi di masa mendatang.

MANAJEMEN SDM PERUSAHAAN

Sistem Pengembangan Organisasi

Perkembangan industri keuangan dan asuransi yang semakin dinamis menuntut Perusahaan untuk terus memperkuat kualitas dan kapasitas SDM sebagai fondasi keberlanjutan dan daya saing. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga pada pembentukan organisasi yang adaptif serta responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui penyesuaian struktur organisasi secara berkala agar tetap selaras dengan visi, misi, dan arah bisnis Perusahaan. Evaluasi terhadap efektivitas unit kerja juga dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan proses bisnis berjalan optimal, efisien, dan relevan dengan tantangan industri. Sejalan dengan peran IFG sebagai BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, transformasi organisasi terus diperkuat guna mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang semakin akuntabel dan transparan.

Penguatan struktur dan tata kelola tersebut kemudian diiringi dengan pengelolaan SDM yang terarah dan berkelanjutan. Perusahaan berkomitmen membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta mendorong inovasi di berbagai lini usaha, mulai dari asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasihat investasi, konsultan keuangan, konsultan manajemen, hingga jasa keuangan lainnya termasuk pengelolaan gedung perkantoran. Melalui sinergi antara transformasi organisasi dan pengembangan SDM, Perusahaan menempatkan SDM sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan nasional.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen Karyawan

Seiring dengan dinamika bisnis yang terus berkembang, Perusahaan berkomitmen memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui proses rekrutmen yang dirancang secara terencana dan strategis guna menjaga keberlanjutan operasional sekaligus mendukung pencapaian target bisnis.

This structure demonstrates the Company's commitment to building a Human Capital Division that is not only reliable in its operations but also capable of formulating and implementing proactive Human Capital strategies that are adaptable to the organization's future needs.

COMPANY'S HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Organizational Development System

The increasingly dynamic development of the financial and insurance industries requires the Company to continuously strengthen the quality and capacity of its human capital as the foundation for sustainability and competitiveness. Therefore, the human capital development strategy is not only focused on improving individual competencies but also on building an organization that is adaptive and responsive to changes in the business environment.

These efforts are implemented through periodic adjustments to the organizational structure to keep it aligned with the Company's vision, mission, and business direction. Evaluations of the effectiveness of work units are also conducted on an ongoing basis. This ensures that business processes operate optimally, efficiently, and remain relevant to industry challenges. In line with IFG's role as a state-owned insurance and guarantee holding company, organizational transformation is continuously reinforced to support the creation of a financial ecosystem that is increasingly accountable and transparent.

This strengthening of structure and governance is accompanied by targeted and sustainable human capital management. The Company is committed to building a professional work culture rooted in integrity and fostering innovation across various business lines, ranging from insurance, guarantees, venture capital, securities, investment management, investment advisory, financial consulting, management consulting, to other financial services, including office building management. Through the synergy between organizational transformation and human capital development, the Company positions its human capital as the primary force in achieving sustainable growth while enhancing trust in the national financial industry.

Employee Recruitment Policy and Implementation

Along with the dynamic growth of the business, the Company is committed to providing competent and high-quality human capital. This commitment is achieved through a carefully planned and strategic recruitment process designed to maintain operational sustainability while supporting the achievement of business goals.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan merekrut 9 karyawan baru, mengalami penurunan 50 orang jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 59 orang. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian struktur organisasi yang tengah dilakukan Perusahaan sehingga pemenuhan karyawan difokuskan secara selektif hanya untuk menggantikan posisi yang kosong akibat karyawan yang pensiun atau mengundurkan diri.

Throughout 2025, the Company recruited 9 new employees, a decrease of 50 people, compared to previous year which amounted to 59 people. This is due to the organizational restructuring currently being implemented by the Company, resulting in a selective hiring approach focused solely on filling vacancies caused by employees who retired or resigned.

Adapun pelaksanaan rekrutmen karyawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

The implementation of employee recruitment in the last 3 (three) years is summarized as follows:

Uraian Description	**2025**	**2024**	**2023**
Jumlah Karyawan Total Employees	275	308	300
Karyawan Masuk Employee Joining the Company	9	59	106

Tingkat *Turn Over* Karyawan

Pemantauan terhadap penyebab karyawan keluar serta tingkat *turnover* setiap tahun menjadi bagian penting dalam evaluasi efektivitas strategi retensi dan pengelolaan SDM secara menyeluruh. Informasi ini memberikan gambaran mengenai stabilitas tenaga kerja sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan program pengembangan karyawan.

Employee Turn Over Rate

Monitoring the reasons for employee turnover and the annual turnover rate is a crucial part of evaluating the effectiveness of retention strategies and overall human capital management. This information provides insight into workforce stability and serves as the basis for improving policies and employee development programs.

Adapun data jumlah dan penyebab karyawan yang keluar dari Perusahaan selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

The data on the number of employees who have left the Company and the reasons for their departure over the past three years are presented as follows:

Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari Perusahaan Tahun 2023-2025
Number and Causes of Employees Leaving the Company in 2023-2025

Penyebab Causes	**2025**	**2024**	**2023**
Pensiun Retired	1	0	2
Meninggal dunia Passed away	0	0	0
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Resigned at their own request	35	37	32
Diberhentikan Laid off	0	1	0
Jumlah karyawan masuk Total Employee Joining the Company	9	59	106
Jumlah Karyawan yang keluar Total Employees Leaving the Company	36	38	34
Jumlah karyawan di awal tahun Number of employees at the beginning of the year	308	300	242
Jumlah karyawan di akhir tahun Number of employees at the end of the year	275	308	300
Tingkat *turnover* Turnover Rate	12,7%	12,2%	12,5%

Penelaahan atas data pergerakan karyawan periode 2023–2025 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah karyawan yang keluar tercatat sebanyak 36 orang. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 38 orang. Mayoritas dari jumlah tersebut merupakan karyawan yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri

An analysis of employee turnover data for the 2023–2025 period shows that in 2025, there were 36 employees who left the company. This figure is lower than the 38 employees who left in 2024. The majority of these employees resigned voluntarily.

Pergerakan karyawan tersebut berdampak langsung pada tingkat *turnover* Perusahaan. Pada tahun 2025, tingkat *turnover* tercatat sebesar 12,7% yaitu mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 12,2% dan lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika pergerakan SDM masih relatif tinggi, tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan penyesuaian organisasi, mobilitas karyawan antar entitas dalam grup, serta adanya karyawan yang memasuki masa pensiun dan mengundurkan diri. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan strategi retensi, pengelolaan talenta, serta perencanaan kebutuhan SDM secara lebih terintegrasi guna menjaga stabilitas organisasi dan kesinambungan kinerja Perusahaan.

These employee movements have a direct impact on the Company's turnover rate. In 2025, the turnover rate was recorded at 12.7%, representing an increase from 12.2% in 2024 and exceeding the 12.5% recorded in 2023. This indicates that human capital mobility remained relatively high during the year, driven by organizational restructuring needs, employee mobility across entities within the Group, as well as employees reaching retirement age and resigning. This trend highlights the importance of strengthening retention strategies, talent management, and more integrated workforce planning to maintain organizational stability and support the continuity of the Company's performance.

Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Pengembangan SDM di lingkungan IFG dilaksanakan melalui sistem berbasis kompetensi yang disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi jabatan maupun individu. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap program pengembangan mampu mendukung pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan Perusahaan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi bagi seluruh Insan Perusahaan, mencakup peningkatan *soft skill* maupun *hard skill*. Kegiatan tersebut mengacu pada Kalender Pembelajaran Tahun 2025 serta dikelola berdasarkan *Learning Value Chain (LVC) Corporate University*, baik yang diselenggarakan secara internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal.

Sejalan dengan komitmen tersebut, pada tahun 2025 Perusahaan menganggarkan biaya pelatihan karyawan sebesar Rp29,74 miliar, meningkat Rp16,15 miliar atau 118,7% bila dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp13,59 miliar. Dari anggaran tersebut, realisasi biaya pelatihan karyawan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp28,83 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Competency Development Programs and Policies

Human Capital development within IFG is executed through a competency-based system designed according to both job-specific and individual competency needs. This system is designed to guarantee that every development program supports the achievement of the performance standards established by the Company.

Competency development is achieved through various training and certification programs for all Company employees, including the improvement of both soft skills and hard skills. These activities are based on the 2025 Learning Calendar and managed in accordance with the Corporate University's Learning Value Chain (LVC), whether conducted internally or in collaboration with external partners.

In line with this commitment, in 2025 the Company allocated an employee training budget of IDR 29.74 billion, an increase of IDR 16.15 billion, or 118.7%, compared to 2024's budget of IDR 13.59 billion. Of this budget, the realization of training costs for employees in 2025 totaled IDR 28.83 billion, with the following details:

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	5	18-19 Februari 2025 February 18-19, 2025	PMLI	Rp29.800.000
Mediator Hukum Legal Mediator	2	24 Februari - 1 Maret 2025 February 24 - March 01, 2025	Hukumonline	Rp21.978.000
Strategi Komunikasi kepada *Stakeholder* ESG ESG Stakeholder Communication Strategy	3	25-26 November 2025 November 25-26, 2025	Kompas Institute	Rp4.500.000
Brevet Pajak A & B Tax Certificates A & B	7	27 Februari - 17 Juli 2025 February 27 - July 17, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia The Institute of Indonesia Chartered Accountants	Rp24.500.000
Dasar Bisnis *Capital Market* & Investasi Fundamentals of Capital Market & Investment Business	17	3-4 November 2025 November 3-4, 2025	TICMI	Rp89.000.000
Penerapan Akuntansi Instrumen Keuangan sesuai PSAK 109 Implementation of Financial Instrument Accounting in Accordance with PSAK 109	6	11-13 Maret 2025 March 11-13, 2025	Ikatan Akuntansi Indonesia The Institute of Indonesia Chartered Accountants	Rp10.500.000
Actuary for Non-Actuary	38	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corporate University	Rp5.000.000
Scrum Master	13	17-19 Maret 2025 March 17-19, 2025	Rakamin	Rp91.575.000
Advanced Writing Policy And Procedure	2	4-5 Maret 2025 March 4-5, 2025	BUMN School of Excellence BUMN School of Excellence (SOE School of Excellence)	Rp11.300.000
Analytical Thinking Skills	22	4-5 Juni 2025 June 4-5, 2025	Daily Meaning	Rp108.000.000
Dasar Asuransi Syariah Fundamentals of Sharia Insurance	5	16-17 Juni 2025 June 16-17, 2025	LSPPS	Rp23.200.000
Problem Solving and Decision Making	17	14-15 April 2025 April 14-15, 2025	FreshMinds Indonesia	Rp74.600.000
Memahami Hubungan Industrial dengan Benar Understanding Proper Industrial Relations	2	15 April 2025 April 15, 2025	A Kemalsjah Siregar, S.H. – Founder & Managing Partner Kemalsjah & Associates	Rp4.950.000
Effective Audit Interview Techniques	4	16-17 April 2025 April 16-17, 2025	The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia)	Rp24.500.000
Communication Skills For Auditors: Interviewing And Negotiating	4	16-17 April 2025 April 16-17, 2025	The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia)	Rp24.500.000
Data Analytics with Tableau	19	21-23 April 2025 April 21-23, 2025	Rakamin	Rp97.635.600
Strategic Thinking Skills	27	14-15 Mei 2025 May 14-15, 2025	Danny Kosasih - DDK Intelligent	Rp102.150.000
Manajemen Protokoler Profesional Professional Protocol Management	4	14-15 Mei 2025 May 14-15, 2025	Mahaka Institute	Rp32.000.000
Audit Kinerja Performance Audit	2	14-19 Mei 2025 May 14-19, 2025	Pusdiklatwas BPKP	Rp4.680.000
Business Writing Skills	22	22-23 Mei 2025 May 22-23, 2025	Narabahasa	Rp107.460.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
8 *Test Organization Structure Effectiveness*	3	6-7 Mei 2025 May 6-7, 2025	OneGML	Rp9.990.000
Pengolahan Data Sakernas menggunakan STATA Sakernas Data Processing Using STATA	4	16-17 Mei 2025 May 16-17, 2025	Demografi FEB UI Demography – Faculty of Economics and Business, University of Indonesia	Rp4.440.000
Legal Drafting	25	18-19 Juni 2025 June 18-19, 2025	Jentera	Rp230.000.000
Impactful Presentation Design	20	22-23 Juni 2025 June 22-23, 2025	Andy Sukma Lubis - Melukis Slide	Rp48.979.592
Praktik *Underwriting*/Analisis Bisnis untuk *Frontliner - Intermediate Level Batch* 1 Underwriting/Business Analysis for Frontline Staff - Intermediate Level, Batch 1	20	25-26 Juni 2025 June 25-26, 2025	IFG Corporate University	Rp17.500.000
Praktik *Underwriting*/Analisis Bisnis Untuk Frontliner – *Intermediate Level – Batch* 2 Underwriting/Business Analysis for Frontline– Intermediate Level, Batch 2	25	24-25 Juli 2025 July 24-25, 2025	IFG Corporate University	Rp17.500.000
Finance for Non-Finance Batch 1	17	10 Juli 2025 July 10, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)	Rp75.550.000
Intermediate Financial Modelling	6	12-26 Juli 2025 July 12-26, 2025	Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Center for Accounting Development, Faculty of Economics, University of Indonesia	Rp30.000.000
Finance for Non-Finance Batch 2	22	17 Juli 2025 July 17, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)	Rp75.550.000
Stress Testing and Scenario Analysis	6	8-11 Agustus 2025 August 8-11, 2025	GRC Training	Rp23.310.000
Business Acumen	17	19-20 Agustus 2025 August 19-20, 2025	Momenta	Rp35.520.000
DevSecOps Foundation	2	20-21 Agustus 2025 August 20-21, 2025	Narada Code	Rp28.860.000
Praktik *Underwriting*/Analisis Bisnis untuk Frontliner - Intermediate Level Batch 3 Underwriting/Business Analysis for Frontline Staff - Intermediate Level, Batch 3	18	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	IFG Corporate University	Rp17.500.000
Tactical Account Planning	12	26-27 Agustus 2025 August 26-27, 2025	IFG Corporate University	Rp40.848.000
Corporate Valuation	7	26-27 Agustus 2025 August 26-27, 2025	Prasmul-Eli	Rp54.390.000
GCG *Implementation*	1	1-8 Agustus 2025 August 1-8, 2025	Udemy	-
Professional Executive Secretary	2	17-23 September 2025 September 17-23, 2025	Udemy	-

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contract	26	22-23 September 2025 September 22-23, 2025	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Certified Public Accountants	Rp17.360.000
Bisnis Asuransi Digital (Insurtech) Digital Insurance Business (Insurtech)	8	23 September 2025 September 23, 2025	NobelProg (PT Nobel Program Solusi)	Rp32.989.065
Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	20	29-30 September 2025 September 29-30, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia The Institute of Indonesia Chartered Accountants	Rp90.700.000
Dasar Bisnis Asuransi dan Penjaminan Fundamentals of the Insurance and Guarantee Business	18	2-3 Oktober 2025 October 2-3, 2025	IFG Corporate University	Rp18.000.000
Presentation Skills	19	8-9 Oktober 2025 October 8-9, 2025	Thinkplus	Rp48.979.592
Customer Relationship Management	9	10-11 November 2025 November 10-11, 2025	IFG Corporate University	Rp34.200.000
Digital Marketing Fundamental	541	6 November 2025 November 6, 2025	Markplus	Rp111.000.000
Digital Innovation & Collaboration Fundamental	550	3 November 2025 November 3, 2025	IFG Corporate University	Rp99.900.000
Audit for non Auditor	19	13-14 Oktober 2025 October 13-14, 2025	Pusdiklatwas BPKP	Rp62.750.000
Asset Liability Management (ALM) *Insurance*	3	13-16 Oktober 2025 October 13-16, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)	Rp2.500.000
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Domestic Component Level (TKDN)		16-17 Oktober 2025 October 16-17, 2025	Value Consult	Rp53.350.000
Advance Microsoft Excel	31	20-22 Oktober 2025 October 20-22, 2025	Rakamin	Rp66.600.000
Digital Innovation Practitioner	21	20-21 Oktober 2025 October 20-21, 2025	Business Wisdom Institute	Rp55.500.000
Perlindungan Data Pribadi Protection of Personal Data	1	21-23 Oktober 2025 October 21-23, 2025	Asosiasi Profesional Privasi Data Pribadi Association of Personal Data Privacy Professionals	-
Agile Practice Fundamental	10	23-24 Oktober 2025 October 23-24, 2025	Athar Januar	Rp60.000.000
ESG *Implementation Batch* 1	4	27-31 Oktober 2025 October 27-31, 2025	Udemy Business	Rp4.500.000
Customer Centricity Practitioner	28	23 Oktober 2025 October 23, 2025	Business Wisdom Institute	Rp55.500.000
Digital Marketing Practitioner	18	29 Oktober 2025 October 29, 2025	Markplus & Co	Rp26.640.000
Strategi dan Implementasi B2B2C B2B2C Strategy and Implementation	6	29-30 Oktober 2025 October 29-30, 2025	IFG Corporate University	Rp6.750.000
PSAK 117 Kontrak Asuransi: Level Menengah PSAK 117 Insurance Contracts: Intermediate Level	4	29-30 Oktober 2025 October 29-30, 2025	Tim Implementasi Audit PSAK 117 IAPI IAPI PSAK 117 Audit Implementation Team	Rp29.560.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Digital Business Practitioner	19	30-31 Oktober 2025 October 30-31, 2025	DDK Dharma Intelligence	Rp30.000.000
ESG *Implementation Batch* 2	4	3-7 November 2025 November 3-7, 2025	Udemy Business	-
Strategi dan Implementasi Subrogasi - Lv. *Intermediate* Subrogation Strategy and Implementation - Lv. Intermediate	6	5 November 2025 November 5, 2025	PT Jaminan Kredit Indonesia	Rp10.000.000
Credit Analysis di Perbankan Credit Analysis in Banking	30	11-12 Agustus 2025 August 11-12, 2025	Erry Septianto - Bank Mandiri	Rp7.500.000
Digital Business Mastery	26	13 November 2025 November 13, 2025	DDK Dharma Intelligence	Rp30.000.000
Customer Centricity Fundamental	520	3 November 2025 November 3, 2025	IFG Corporate University	Rp55.500.000
Digital Business Fundamental	513	6 November 2025 November 6, 2025	IFG Corporate University	Rp30.000.000
Digital Marketing Mastery	26	11 November 2025 November 11, 2025	Marplus	Rp26.640.000
Change Management Mindset	9	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	KPI Consultancy	Rp77.700.000
Communication and Negotiation Skills	15	13-14 November 2025 November 13-14, 2025	TalkInc	Rp54.850.000
PSAK 117 Kontrak Asuransi : Level Lanjutan PSAK 117 Insurance Contracts: Advanced Level	2	14 November 2025 November 14, 2025	Tim Implementasi Audit PSAK 117 IAPI IAPI PSAK 117 Audit Implementation Team	Rp5.000.000
Sales Training	29	17-19 November 2025 November 17-19, 2025	Ari H. Handojo – Founders & CEO of INTRAS	Rp136.752.000
Customer Centricity Mastery	36	18 November 2025 November 18, 2025	Business Wisdom Institute	Rp49.950.000
Digital Innovation & Collaboration Mastery	35	19 November 2025 November 19, 2025	BWI & Direktur Digital BCA BWI & BCA's Digital Director	Rp49.950.000
Excellent Execution	11	19-20 November 2025 November 19-20, 2025	BWI	-
Creative Thinking Skills	10	24-25 November 2025 November 24-25, 2025	Ambiz	Rp55.500.000
Pengolahan Data SUSENAS SUSENAS Data Processing	2	24-25 November 2025 November 24-25, 2025	Lembaga Demografi FEB UI Institution of Demography – Faculty of Economics and Business, University of Indonesia	Rp4.440.000
Service Excellence Service Excellence	3	8-12 Desember 2025 December 8-12, 2025	IFG Corporate University	-
People Analytics	2	9-15 Desember 2025 December 9-15, 2025	IFG Corporate University	-
Audit SDM Human Capital Audit	1	16-19 Desember 2025 December 16-19, 2025	Serena Huang	-
Penyusunan Peraturan Drafting of Regulations	9	30 Desember 2025 December 30, 2025	Mahaka Institute Mahaka Institute	Rp48.840.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Legal Training	2	5-7 Februari February 5-7	BUMN School of Excellence BUMN School of Excellence (SOE School of Excellence)	Rp30.000.000
Penguatan *Leadership Competency* Leadership Competency Enhancement	10	17 Februari 2025 February 17, 2025	Inong Hunain – Leadership & Wellbeing Coach	Rp7.500.000
Integritas Bisnis Business Integrity	143	26 Februari 2025 February 26, 2025	Ranu Mihardja	Rp10.000.000
PPH Badan Corporate Income Tax	41	26 Februari 2025 February 26, 2025	Dr. Prianto Budi S, Ak., CA., M.B.A	33.300.000
BSE *Masterclass* X	5	22 April 2025 April 22, 2025	Direktur SDM dan Transformasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Director of Human Resources and Transformation at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Rp105.000.000
Legal for Non-Legal	22	24-25 April 2025 April 24-25, 2025	STH Jentera	Rp115.000.000
Masterclass Workshop IFRS 17 Masterclass Workshop for IFRS 17	1	25-26 April 2025 April 25-26, 2025	Partner EY PLT Malaysia Partner, EY PLT, Malaysia	Rp3.571.429
Implikasi Akuntansi, Aktuaria & Pajak atas Penerapan Imbalan Kerja sesuai PSAK 219 Accounting, Actuarial, and Tax Implications of Implementing Employee Benefits in Accordance with PSAK 219	2	20-21 Mei 2025 May 20-21, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) The Institute of Indonesia Chartered Accountants	-
Building Image Profesional	23	27 Mei 2025 May 27, 2025	Innergy	Rp17.000.000
Program Workshop Komunikasi BUMN – Komunikasi Media Sosial melalui Optimasi AI SOE Communication Workshop Program – Social Media Communication through AI Optimization	1	27-28 Mei 2025 May 27-28, 2025	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Rp5.550.000
AI *Powered Business Intelligence for Smarter Decision Making and Growth*	2	25-26 Juni 2025 June 25-26, 2025	CRMS Indonesia	Rp7.992.000
Economy Business Leadership Executive Program	1	29 Juni - 5 Juli 2025 June 29 - July 5, 2025	KEMENDIKTISAINTEK Ministry of Higher Education, Science, and Technology	-
The Dynamic of Enforcement of Arbitration Awards In Indonesia The Dynamic of Enforcement of Arbitration Awards In Indonesia	1	24 Juli 2025 July 24, 2025	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) BANI Arbitration Center	Rp2.200.000
Program Top Gun (Top Talent BOD-1) Top Gun Program (Top Talent BOD-1)	3	Agustus - Desember 2025 August - December 2025	BUMN School of Excellence BUMN School of Excellence (SOE School of Excellence)	-
New Internal Auditor	1	25-26 Agustus 205 August 25-26, 205	YPIA Internal Audit Education Foundation	Rp5.000.000
Perpajakan AAUI Taxation Training – Indonesian General Insurance Association (AAUI)	4	12 September 2025 September 12, 2025	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Indonesian General Insurance Association (AAUI)	Rp7.000.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Kartini Danantara *Leadership Development Program* Kartini Danantara Leadership Development Program	2	September - November 2025	Danantara	-
Implementasi *Business Continuity Management System* Implementation of Business Continuity Management System	22	10 Oktober 2025 October 27, 2025	BCM Indonesia	Rp12.000.000
Creating Shared Value (CSV) & *Sustainability Roadmap based on* ISO 26000	12	27-29 Oktober 2025 October 27-29, 2025	CECT Sustainability Universitas Trisakti CECT Sustainability of Universitas Trisakti	Rp91.836.735
Manajemen Isu Hukum Ketenagakerjaan: Memahami Regulasi, PHK, dan Penyelesaian Sengketa Industrial Labor Law Issue Management: Understanding Regulations, Layoffs, and Industrial Dispute Resolution	1	28-29 Oktober 2025 October 28-29, 2025	Hukumonline	Rp4.773.000
Workshop Strategic Communications Planning Strategic Communications Planning Workshop	1	17-18 November 2025 November 17-18, 2025	Forum Humas BUMN	Rp4.750.000
Merancang Narasi di Tengah Krisis Crafting a Narrative in the Midst of a Crisis	2	19 November 2025 November 19, 2025	Kompas Institute	-
Leading in an AI-Augmented World	2	Desember 2025 - Februari 2026 December 2025 - February 2026	Emeritus & Kellogg Executive Education	-
Mini Prompt-A-Thon	1	4 Desember 2025 December 04, 2025	Microsoft	-
SAK *for Executive*	1	11-12 Desember 2025 December 11-12, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) the Institute of Indonesia Chartered Accountants	Rp16.000.000
Master of Ceremony	2	20-21 Desember 2025 December 20-21, 2025	TYPSS Public Speaking School	-
Business Continuity Management System	19	29 Desember 2025 December 29, 2025	BCM Indonesia	Rp12.000.000
Persaingan Usaha Business Competition	241	6-17 Oktober 2025 October 6-17, 2025	Digital Learning	-
APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	225	20-31 Oktober 2025 October 20-31, 2025	IFG Corporate University	-
Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	253	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 - October 03, 2025	Digital Learning	-
Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	225	19-20 November 2025 November 19-20, 2025	IFG Corporate University	-
Workshop Brain Camp I	1	26 April 2025 April 26, 2025	NLP Trainer	Rp8.650.000
8th *Actuary Summit*	11	24-25 Meil 2025 May 24-25, 2025	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Society Of Actuaries Of Indonesia (PAI)	Rp111.455.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Fundamental of Risk Management	1	14-16 Juli 2025 July 14-16, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)	Rp4.000.000
Chief Business Development Executive Program (CBDO)	1	Agustus - Desember 2025 August - December 2025	BUMN School of Excellence BUMN School of Excellence (SOE School of Excellence)	-
Star Track	1	Agustus - Desember 2025 August - December 2025	Danantara	-
Meta-Master NLP *Practitioner*	1	6 Desember 2025 December 06, 2025	Metamind	Rp25.900.000
Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management	5	20-21 November 2025 November 20-21, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)	Rp125.985.000
Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)	1	November	ERMA	Rp3.500.000
Sertifikasi COBIT 2019 COBIT 2019 Certification	6	19-21 Maret 2025 March 19-21, 2025	Brainmatics	Rp15.318.000
Sertifikasi Ajun Ahli dan Ahli Asuransi Syariah (AIIS dan FIIS) Certification for Associate and Expert in Sharia Insurance (AIIS and FIIS)	2	21-22 April 2025 April 21-22, 2025	Islamic Insurance Society	Rp40.800.000
Sertifikasi ITIL V4 ITIL V4 Certification	2	28-29 April 2025 April 28-29, 2025	Inixindo	Rp36.630.000
Certified Legal Auditor (CLA)	2	19-23 Mei 2025 May 19-23, 2025	LSP Hukum Indonesia	Rp23.183.673
Certified Anti Fraud Officer (CAFO)	1	26-28 Mei 2025 May 26-28, 2025	LSP GRC Tangguh Management	Rp37.200.000
Sertifikasi ISO SMAP 37001 Lead Auditor ISO SMAP 37001 Lead Auditor Certification	1	2-5 Juni 2025 June 2-5, 2025	SustaIN dan PECB SustaIN and PECB	Rp12.500.000
Certified Compliance Professional (CCP)	1	16 - 19 Juni 2025 June 16 - 19, 2025	LSP GRC Tangguh Management	Rp10.267.500
Project Management	10	2 - 4 Desember 2025 December 2 - 4, 2025	Executrain	Rp104.340.000
Climate Finance	2	September - November	CFA	Rp55.500.000
Certified General Insurance (CGI)	25	6 - 7 November 2025 November 6- 7, 2025	LSP AAMAI	Rp85.000.000
Certified Life Insurance (CLI)	20	10 - 11 November 2025 November 10- 11, 2025	LSP AAMAI	Rp69.156.000
Sertifikasi ASAI dan FSAI ASAI and FSAI Certifications	5	8 Juli 2025 July 08, 2025	Persatuan Aktuaris Indonesia Society Of Actuaries Of Indonesia	Rp3.508.616
Certified Management Accountant (CMA)	2	22 April - 12 Juni 2025 April 22, June 12, 2025	RAD Indonesia	Rp48.000.000
Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	1	3 - 4 Oktober 2025 October 3 - 4, 2025	YPIA Internal Audit Education Foundation	Rp12.500.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)	5	November - Desember November- December	CFI	Rp25.057.165
Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Certification	2	7 Juli 2025 July 07, 2025	IIA IIA	Rp31.700.000
Sertifikasi IT *Architecture* (TOGAF) IT Architecture (TOGAF) Certification	2	14 Juli 2025 July 14, 2025	Brainmatics	Rp39.960.000
Certified Fraud Examiner (CFE)	1	3 - 7 November 2025 November 3- 7, 2025	ACFE	Rpx36.150.000
Certified Professional Management Accountant (CPMA)	2	16 Agustus - 1 November 2025 August 16 - November 1, 2025	FEB UI Faculty of Economics and Business, University of Indonesia	Rp36.696.000
Sertifikasi Ajun Ahli dan Ahli Asuransi Syariah (AIIS dan FIIS) Certification for Associate and Expert in Sharia Insurance (AIIS and FIIS)	2	9 - 10 Juni 2025 & 21 - 22 April 2025 June 9–10, 2025 & April 21–22, 2025	Islamic Insurance Society	Rp37.500.000
Sertifikasi Public Relations Public Relations Certification	3	9 Oktober 2025 October 09, 2025	LSP Public Relation Indonesia	Rp3.870.000
Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi (CILC) Certification as an Insurance Legal Consultant (CILC)	2	17 - 20 September 2025 September 17 - 20, 2025	LSP AHI	Rp16.000.000
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Tax Consultant Certification Exam (USKP)	1	18 Agustus 2025 August 18, 2025	Kemenkeu Ministry of Finance	-
Sertifikasi Wakil Manajer Investasi Investment Deputy Manager Certification (WMI)	6	24 - 25 November 2025 November 24- 25, 2025	LSP PMI	Rp47.500.000
Strategic Human Capital Director Certificate Program 2025	2	1 - 19 Desember 2025 December 1 - 19, 2025	Danantara	-
Fraud Risk Management Professional (FRMP)	1	3 Oktober 2025 October 03, 2025	Pusdiklatwas BPKP Pusdiklatwas BPKP	Rp15.300.000
Certified Anti Fraud Governance (CAFG)	2	2 - 3 Juli 2025 July 2 -3, 2025	GRC Management	Rp10.500.000
Certified Sustainability Development Specialist	1	2 - 3 Oktober 2025 October 2-3, 2025	Olahkarsa	Rp8.700.000
Legislative Drafting	1	3 - 6 November 2025 November 3- 6, 2025	LSP Hukum Indonesia	Rp24.000.000
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	28	7 Januari 2025 January 07, 2025	LSP Perbankan LSP Banking	Rp100.000.000
Komprehensive Legal Drafting Comprehensive Legal Drafting	25	5 - 10 Mei 2025 May 5 -10, 2025	Indonesian Center for Legislative Drafting	Rp115.000.000
Sertifikasi Contract Drafter Contract Drafter Certification	2	14 - 17 Mei 2025 May 14 -17, 2025	Hukumonline	Rp13.320.000
Certified Ethical Hacker	2	23 - 26 Juni 2025 June 23 -26, 2025	Multimatics	Rp39.960.000
Sertifikasi Mediator Mediator Certification	2	24 Februari - 1 Maret 2025 February 24 - March 01, 2025	Hukumonline Hukumonline	Rp21.978.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	**Jumlah Peserta (Orang)** Total Participant (People)	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
Webinar LAPS LAPS Webinar	2	30 Januari 2025 January 30, 2025	LAPS/SJK	-
BUMN Forum	1	3 Oktober 2025 October 03, 2025	FH UGM Faculty of Law, UGM	Rp3.000.000
National Anti Fraud-Conference	3	25 - 26 Juni 2025 June 25 -26, 2025	ACFE	Rp17.000.000
Konferensi Audit Internal Internal Audit Conference	2	2 - 3 Juli 2025 July 2 -3, 2025	YPIA Internal Audit Education Foundation	Rp14.000.000
Masterclass XXIV: Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital Masterclass XXIV: Risk Mitigation in Digital Transformation	10	3 - 4 Juli 2025 July 3 - 4, 2025	IMA	Rp29.400.000
Cyber Defender Enhancement Network Security Fundamentals and Defense-in-Depth	1	1 Juli 2025 July 01, 2025	Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	-
Risk Beyond 2025	10	4 - 5 Agustus 22025 August 4-5, 2025	ERMA	Rp103.785.000
Konferensi GRC Summit 2025 GRC Summit Conference 2025	4	21 - 22 Agustus 2025 August 21 - 22, 2025	ERMA	Rp16.482.499
Konferensi IIA Indonesia 2025 IIA Indonesia Conference 2025	4	27 - 28 Agustus 2025 August 27 - 28, 2025	ERMA	Rp45.000.000
Perlindungan Konsumen, Risiko Digital, dan Strategi Penyelesaian Sengketa Consumer Protection, Digital Risks, and Dispute Resolution Strategies	1	18 September 2025 September 18, 2025	Hukum Online	Rp2.775.000
Sharing Session "*Navigating Corporate Actions: Strategic Insights on M&A and Integration*" "Navigating Corporate Actions: Strategic Insights on M&A and Integration" Sharing Session	70	13 November 2025 November 13, 2025	KPMG	Rp27.750.000
Seminar VI HKHSK Seminar VI – Financial Sector Legal Consultants Association (HKHSK)	1	27 November 2025 November 27, 2025	Forum BUMN	Rp2.200.000
Reinsurance Market Outlook 2025 – *Navigating Risk & Building Resilience*	1	1 Desember 2025 December 01, 2025	Marguerita Silitonga	Rp1.500.000
Financial Strategy Behind Reinsurance	2	3 Desember 2025 December 03, 2025	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Society Of Actuaries Of Indonesia (PAI)	Rp1.500.000
Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025 2025 National Internal Audit Seminar (SNIA)	2	3 - 4 Desember 2025 December 3 - 4, 2025	YPIA Internal Audit Education Foundation	Rp13.500.000
Workshop PSAK 117 Workshop on PSAK 117:	15	16 Desember 2025 December 16, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia The Institute of Indonesia Chartered Accountants	Rp17.360.000

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2025
Implementation of Employee Education and Training in 2025

Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta (Orang) Total Participant (People)	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Fee (IDR)
Women Leaders Summit: Peringatan Hari Ibu dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Women Leaders Summit: Celebration of Mother's Day and Anti-Violence Against Women Day	5	16 Desember 2025 December 16, 2025	Danantara	-

Realisasi Pelatihan Karyawan berdasarkan Jam Pelatihan
Realization of Employee Training by Training Hours

Uraian Description	2025	2024	2023
Jumlah Jam Pelatihan *Soft Skill* Total Soft Skill Training Hour	**7.724**	622	5.684
Jumlah Jam Pelatihan Teknikal Total Technical Skill Training Hour	**17.164**	15.045	34.451
Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hour	**24.888**	15.667	40.135

Tabel Pelatihan berdasarkan Gender dan Level Jabatan tahun 2025
Table of Training by Gender and Position Level In 2025

Uraian Description	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Employees Receive Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Training Hours per Employee
Berdasarkan Gender By Gender			
Laki-laki Male	2.886	17.854	6,18
Perempuan Male	1.838	11.094	6,03
Total	**4.724**	**28.948**	**6,13**
Berdasarkan Level Jabatan By Position Level			
Non Staff	5	27	5,4
Staff	1277	6516	5,1
Senior Staff	623	3887	6,24
Assistant Manager	391	2558	6,54
Manager	706	4656	6,59
Senior Manager	681	4268	6,27
Assistant Vice President	748	4635	6,20
Vice President	257	1489	5,79
Senior Vice President	36	912	25,33
Total	**4.724**	**28.948**	**6,13**

Penilaian Kinerja dan Upah Karyawan

Tingginya tingkat persaingan bisnis mendorong Perusahaan untuk menerapkan penilaian kinerja secara sistematis guna memastikan penempatan karyawan selaras dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Proses ini dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi serta talenta karyawan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan maupun pengisian posisi strategis.

Implementasi penilaian kinerja dilakukan melalui program manajemen kinerja yang berlaku secara internal. Program ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja karyawan dalam periode tertentu berdasarkan standar dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen kinerja mencakup tahapan perencanaan serta evaluasi kinerja. Melalui mekanisme tersebut, seluruh jenjang jabatan, mulai dari pimpinan hingga karyawan, memperoleh umpan balik atas hasil kinerja selama satu periode penilaian. Umpan balik ini diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mendorong pencapaian yang lebih optimal pada periode berikutnya.

Employee Performance Assessment and Wages

The high level of business competition has prompted the Company to implement a systematic performance appraisal process to ensure that employee placements align with their competencies and the organization's needs. This process is conducted periodically and continuously to identify employees' potential and talents, which then serve as the basis for development planning and filling strategic positions.

Performance appraisals are conducted through the Company's internal performance management program. This program is designed to measure employee performance achievements over a specific period based on pre-established standards and targets.

Performance management encompasses both the planning and evaluation stages. Through this mechanism, all levels of the organization, from leadership to employees, receive feedback on their performance results for one evaluation period. This feedback is intended to serve as a foundation for improving performance quality and driving even better results in the next period.

No.	Wilayah Operasional Operational Area	Provinsi/ Daerah Province/ Region	Imbal Jasa Karyawan Tetap Level Terendah Compensation For the Lowest Level Employee	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum Wage	Persentase/ Rasio Percentage/ Ratio
	1	2	3	4	3:4
1.	Kantor Pusat/Holding Head Office/ Holding	DKI Jakarta	Rp7.560.022	Rp5.396.761	140%

Mengacu pada tabel perbandingan upah tahun 2025, imbal jasa karyawan tetap pada level terendah di Kantor Pusat/ *Holding* yang berlokasi di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp7.560.022. Nilai tersebut 40% lebih tinggi dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau setara dengan 140% dari UMP.

Hal ini mencerminkan bahwa Perusahaan telah menerapkan kebijakan pengupahan yang kompetitif dan berada di atas ketentuan minimum yang berlaku secara regional. Tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, namun hal ini juga menggambarkan komitmen perusahaan dalam memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan, bahkan karyawan di level terbawah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya saing organisasi dalam menarik dan mempertahankan talenta.

According to the 2025 wage comparison table, the lowest salary for permanent employees at the Head Office/Holding Company located in DKI Jakarta is IDR 7,560,022. This figure is 40% higher than the 2025 DKI Jakarta Provincial Minimum Wage (UMP) of IDR 5,396,761, or equivalent to 140% of the UMP.

This reflects that the Company has implemented a competitive wage policy that exceeds the applicable regional minimum requirements. Not only does this demonstrate compliance with labor regulations, but it also illustrates the company's commitment to providing fair compensation to employees—even those at the lowest levels—which ultimately contributes to improving the organization's well-being and competitiveness in attracting and retaining talent.

Program Pengembangan Karier dan Promosi

Sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan organisasi, IFG menyelenggarakan program pengembangan karier dan promosi guna memberikan pemahaman menyeluruh kepada karyawan mengenai operasional dan lini bisnis Perusahaan. Pelaksanaan tersebut diselaraskan dengan kebutuhan bisnis serta pencapaian target kinerja, sehingga mampu mendorong peningkatan kompetensi sekaligus memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Lebih lanjut, program ini diarahkan untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan serta memastikan penempatan karyawan pada level jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, proses regenerasi pada setiap jenjang organisasi dapat berlangsung secara terstruktur dan berkesinambungan. Sepanjang tahun 2025, IFG telah merealisasikan program pengembangan karier dalam bentuk rotasi 43 karyawan atau setara dengan 15,63% dari total karyawan Perusahaan dan *talent* mobility kepada 6 karyawan atau setara dengan 2,18% dari total karyawan Perusahaan.

Career Development and Promotion Program

As part of its efforts to strengthen the organization's sustainability, IFG conducts career development and promotion programs to provide employees with a comprehensive understanding of the Company's operations and lines of business. These programs are aligned with business needs and performance targets, thereby driving competency improvement while motivating employees to achieve optimal results.

Furthermore, these programs are designed to prepare future leaders and ensure employees are placed in positions that match their competencies and expertise. Consequently, the succession planning process at every level of the organization can proceed in a structured and sustainable manner. Throughout 2025, IFG has implemented career development programs in the form of job rotations for 43 employees, equivalent to 15.63% of the Company's total employees, and talent mobility for 6 employees, equivalent to 2.18% of the Company's total employees.

Program Pensiun

IFG menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi karyawan yang mendekati masa pensiun, ditujukan bagi mereka yang berusia 55 tahun atau berada dalam 6 bulan menjelang usia pensiun, yaitu 56 tahun. Pada tahun 2025, terdapat 1 (satu) karyawan yang mencapai usia pensiun.

Retirement Program

IFG conducts a special education and training program for employees approaching retirement, intended for those who are 55 years old or within 6 months of reaching retirement age, which is 56 years old. In 2025, there was 1 (one) employee who reached retirement age.

Program Kesejahteraan

IFG menjamin hak dan kesejahteraan karyawan melalui Peraturan Perusahaan (PP), yang mencakup berbagai manfaat kerja seperti upah lembur, dana pensiun, tunjangan kesehatan, serta akses pendidikan yang setara bagi seluruh karyawan. Perusahaan juga memastikan bahwa penghasilan yang diberikan berada di atas standar upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Berikut ini disajikan data remunerasi karyawan Perusahaan selama tiga tahun terakhir:

Welfare Program

IFG guarantees the rights and welfare of its employees through Company Regulations (PP), which include various employment benefits such as overtime pay, pension funds, health benefits, and equal access to education for all employees. The Company also ensures that the compensation provided exceeds the minimum wage standard set by the government. The following data shows the Company's employee compensation over the past three years:

Uraian Description	**2025 (Rp miliar)** (Billion IDR)	**2024 (Rp miliar)** (Billion IDR)	**2023 (Rp miliar)** (Billion IDR)
Remunerasi Karyawan Employee Remuneration	243,050	282,841	248,980

Total remunerasi karyawan di tahun 2025 tercatat sebesar Rp243,050 miliar, yaitu turun 14% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp282,841 miliar. Terdapat penurunan remunerasi di tahun 2025 dikarenakan adanya penurunan pencapaian kinerja dibandingkan tahun 2024.

Total employee compensation in 2025 was recorded at IDR 243.050 billion, a 14% decrease compared to 2024, which reached IDR 282.841 billion. The decrease in compensation in 2025 was due to lower performance compared to 2024.

Rencana Pengembangan SDM ke Depan

Kualitas SDM menjadi elemen kunci dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing Perusahaan. Dengan memahami hal ini, pengembangan SDM ditempatkan sebagai prioritas utama yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika industri.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan strategi pengembangan SDM yang mencakup langkah-langkah berikut:

1. Akreditasi
   Memastikan kompetensi SDM melalui penerapan standar akreditasi yang diakui guna meningkatkan kualitas profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Organ Pengelola Risiko
   Memperkuat kapabilitas pengelolaan risiko melalui pembentukan dan pengembangan organ pengelola risiko yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi.
3. Kalender (Pelatihan, Sertifikasi, Jam Belajar)
   Menyusun kalender pembelajaran secara terstruktur sebagai panduan pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, dan pemenuhan target jam belajar guna mendukung pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
4. Program Pembelajaran ODP
   Mengembangkan program pembelajaran bagi *Officer Development Program* (ODP) untuk mempersiapkan talenta unggul yang memiliki kompetensi kepemimpinan, bisnis, dan budaya perusahaan.
5. Kurikulum (*Digital Capability, Customer Centricity*)
   Menyusun kurikulum pembelajaran yang berfokus pada penguatan kapabilitas digital dan orientasi kepada nasabah guna mendukung transformasi bisnis dan peningkatan kualitas layanan.

Future Human Capital Development Plan

The quality of human capital is a key element in supporting the Company's sustainability and competitiveness. Therefore, human capital development is treated as a top priority, tailored to the organization's needs while adapting to industry dynamics.

To achieve these objectives, the Company implements a human capital development strategy that includes the following steps:

1. Accreditation
   Ensuring the competence of human capital through the implementation of recognized accreditation standards to enhance professional quality and compliance with applicable regulations.
2. Risk Management Organ
   Strengthening risk management capabilities through the establishment and development of a risk management organ with competencies aligned with business needs and regulations.
3. Calendar (Training, Certification, Learning Hours)
   Developing a structured learning calendar to guide the implementation of training, certification, and the fulfillment of learning hour targets to support continuous competency development.
4. ODP Learning Program
   Developing a learning program for the Officer Development Program (ODP) to prepare high-potential talent with leadership, business, and corporate culture competencies.
5. Curriculum (Digital Capability, Customer Centricity)
   Develop a learning curriculum focused on strengthening digital capabilities and customer-centricity to support business transformation and improve service quality.





ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

05



Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang sangat solid di tengah berbagai dinamika makroekonomi dan penyesuaian regulasi industri. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih konsolidasi yang mencapai Rp5,50 triliun.

The company managed to post very solid financial performance amid various macroeconomic dynamics and industry regulatory adjustments. This success is reflected in the company's consolidated net income, which reached Rp5.50 trillion.

TINJAUAN MAKROEKONOMI
MACROECONOMIC OVERVIEW

TINJAUAN MAKROEKONOMI SECARA UMUM

Secara umum, makroekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dari ekspektasi pelaku pasar, di mana PDB tumbuh lebih tinggi, inflasi terjaga rendah, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) lebih rendah. Namun, demikian, nilai tukar rupiah cenderung melemah lebih dalam daripada proyeksi pasar. Tinjauan makroekonomi dilihat dari perbandingan angka aktual dan proyeksi beberapa indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

GENERAL MACROECONOMIC OVERVIEW

In general, Indonesia's macroeconomic performance has exceeded market participants' expectations, with higher GDP growth, low inflation, and lower yields on Government Securities (SBN). However, the rupiah has tended to weaken more than market projections. A macroeconomic overview based on a comparison of actual figures and projections for several indicators is presented in the following table:

Perbandingan Angka Proyeksi dan Angka Aktual Indikator Makroekonomi Indonesia, 2025
Comparison of Projected and Actual Figures for Indonesia's Macroeconomic Indicators, 2025

Indikator Makroekonomi, 2025 Macroeconomic Indicators, 2025	**Aktual** Actual	**APBN 2025** 2025 State Budget		**Konsensus Bloomberg**		**Proyeksi IFG Progress 2025*** ** 2025 IFG Progress' Projection***	
		Proyeksi Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual	**Proyeksi** Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual	**Proyeksi** Projection	**Selisih dengan Aktual** Difference with Actual
Produk Domestik Bruto (YoY, %) Gross Domestic Product (YoY, %)	**5,10**	**5,20**	**-0,10**	4,90	0,20	**4,90**	**0,20**
Inflasi IHK (rata-rata YoY, %)* Consumer Price Index Inflation (EoP, yoy, %)* (YoY Average, %)*	**1,90**	**2,50**	**-0,60**	1,90	0,00	**2,00**	**0,10**
Nilai Tukar (EoP, USD/IDR)* Exchange Rate (EoP, USD/IDR)*	**16.680**	**16.100**	**580 Rupiah**	16.425	255 Rupiah	**16.300**	**380 Rupiah**
Imbal Hasil SBN 10 Tahun (rata-rata, %)** 10-Year Government Securities Yield (average, %)**	**6,07**	**7,10**	**-103 bps**	6,21	-14 bps	**6,25**	**-18 bps**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Bloomberg, APBN 2025, Analisis IFG Progress
Source: Statistics Indonesia (BPS), Bloomberg, 2025 State Budget, IFG Progress Analysis
Catatan:
Note:
* Angka proyeksi inflasi dan nilai tukar akan dibandingkan dengan angka aktual end of period tahun 2025.
* The projected inflation and exchange rate figures will be compared with the actual end-of-period figures for 2025.
** Angka proyeksi imbal hasil SBN 10 tahun akan dibandingkan dengan angka aktual tahun 2025 secara rata-rata.
** The projected 10-Year Government Securities Yield figures will be compared with the average actual figures for 2025.
*** Proyeksi IFG Progress untuk akhir tahun 2025 yang direvisi pada September 2025.
*** IFG Progress projections for the end of 2025, revised in September 2025

1. Produk Domestik Bruto

Pada tahun 2025, PDB Indonesia tumbuh 5,11% (YoY), lebih tinggi dari tahun 2024 yang tumbuh 5,04%. Pertumbuhan ini juga berada di atas proyeksi IFG Progress, seperti tampak pada Tabel 1.1.

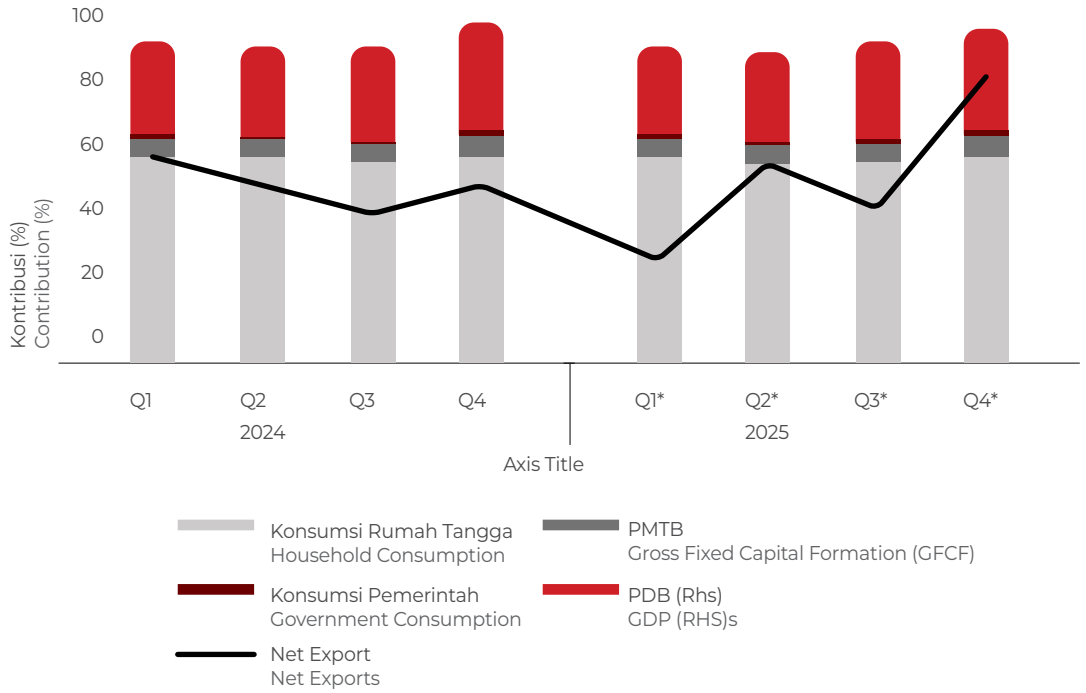
1. Gross Domestic Product

In 2025, Indonesia's GDP is projected to grow by 5.11% (year-over-year), higher than the 5.04% growth recorded in 2024. This growth rate also exceeds the IFG Progress projection, as shown in Table 1.1.

Kinerja perekonomian dari sisi pengeluaran terbentuk dari beberapa faktor, yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (selisih nilai ekspor dan impor). Berikut detailnya:

Economic performance from the expenditure side is driven by several factors, namely growth in household consumption, investment or gross fixed capital formation (GFCF), government spending, and net exports (the difference between the value of exports and imports). The details are as follow:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Pengeluaran
Indonesia's Economic Growth by Expenditure



Sumber: CEIC, BPS, Analisis IFG Progress
Source: CEIC, Statistics Indonesia, IFG Progress Analysis

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama *output* perekonomian Indonesia di tahun 2025, dengan kontribusi 53,6%. Namun, konsumsi rumah tangga ini hanya tumbuh tipis, yaitu dari 4,94% menjadi 4,98%. Investasi menjadi kontributor kedua terbesar PDB dengan pertumbuhan rata-rata di tahun 2025 sebesar 6,12% (YoY), meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 (5,04%). Pertumbuhan belanja investasi ini di luar ekspektasi dan menjadi faktor penentu realisasi pertumbuhan PDB lebih tinggi dari perkiraan pasar dan IFG Progress. Namun, apabila dilihat lebih jauh, pertumbuhan investasi yang signifikan terjadi selama triwulan II dan IV 2025 pada komponen investasi mesin dan perlengkapan yang tumbuh masing-masing 24,58% dan 22,16% (YoY). Pertumbuhan investasi yang ditopang pembelian *one-off* seperti ini biasanya bersifat sementara akibat besaran nilai di awal pembelian dan mengalami depresiasi seiring dengan berjalannya waktu.

Household consumption remains the primary contributor to Indonesia's economic output in 2025, accounting for 53.6%. However, household consumption grew only marginally, from 4.94% to 4.98%. Investment is the second-largest contributor to GDP, with an average growth rate of 6.12% (YoY) in 2025—a significant increase compared to 2024 (5.04%). This growth in investment spending exceeded expectations and was a key factor in GDP growth exceeding both market forecasts and IFG Progress projections. However, upon closer examination, the significant investment growth occurred during the second and fourth quarters of 2025 in the machinery and equipment investment components, which grew by 24.58% and 22.16% (YoY), respectively. Investment growth driven by such one-off purchases is typically temporary due to the large initial value of the purchase and tends to depreciate over time.

Pertumbuhan PDB Indonesia yang terjadi di tahun 2025 masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam (8,02%) dan Malaysia (5,20%), namun sedikit mengungguli pertumbuhan PDB Filipina (4,40%). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di tahun 2025 adalah perlambatan realisasi anggaran pemerintah. Pada tahun 2024, realisasi anggaran pemerintah tumbuh 7,93% (YoY) namun pada 2025 hanya tumbuh 2,17% (YoY). Transisi pemerintahan

Indonesia's GDP growth in 2025 still lags behind that of several other ASEAN countries, such as Vietnam (8.02%) and Malaysia (5.20%), but slightly exceeds the Philippines' GDP growth (4.40%). One of the challenges Indonesia faces in 2025 is a slowdown in government budget execution. In 2024, government budget execution increased by 7.93% (year-over-year), but in 2025 it has only achieved 2.17% growth (year-over-year).

menyebabkan adanya penyesuaian program pemerintah dan perlambatan anggaran, terutama pada triwulan I dan II 2025 sehingga sempat terjadi kontraksi masing-masing 1,22% dan 0,32% (YoY).

Tidak hanya itu, terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja antarsektor ekonomi. Beberapa sektor mampu tumbuh lebih cepat dan berperan sebagai penggerak utama perekonomian sementara sektor lain mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang lebih lambat. Selengkapnya, kinerja perekonomian secara sektoral dapat dilihat pada Gambar berikut:

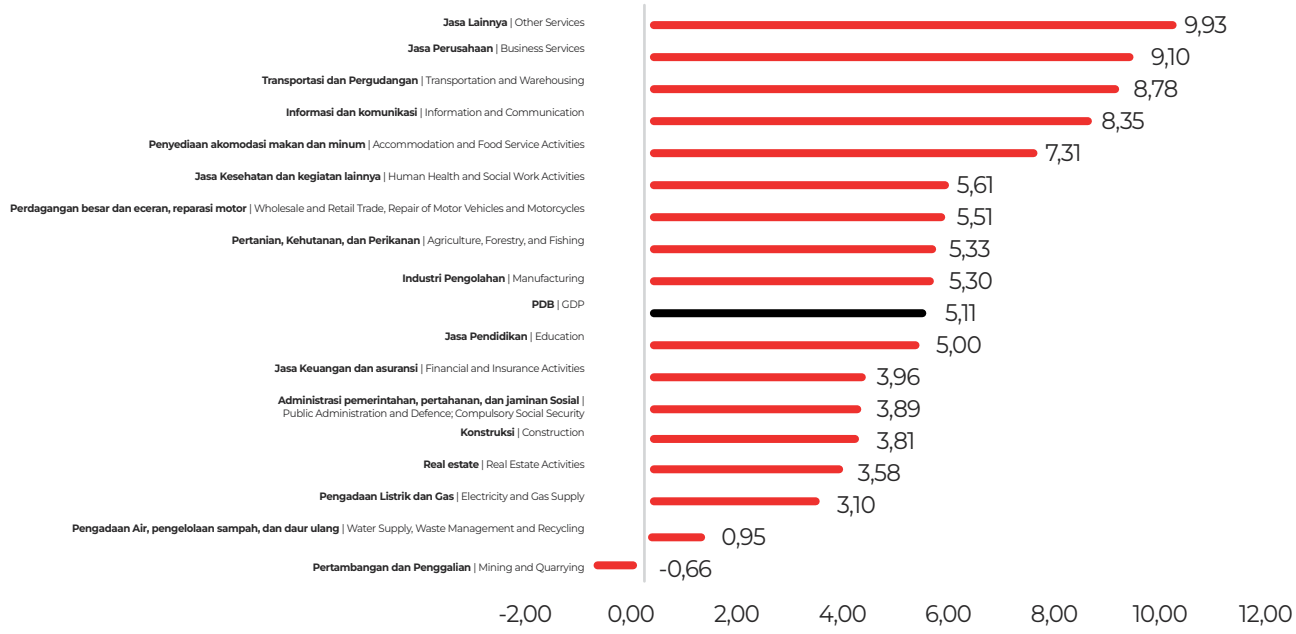
The transition of government led to adjustments in the government's programs and a slowdown in budget execution, particularly in the first and second quarters of 2025, resulting in contractions of 1.22% and 0.32% (YoY), respectively.

Furthermore, there are significant differences in performance across economic sectors. Some sectors are able to grow faster and serve as the main drivers of the economy, while others experience contraction or slower growth. For more details, the economic performance by sector is illustrated in Figure below:

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2025
Sectoral Economic Growth in 2025

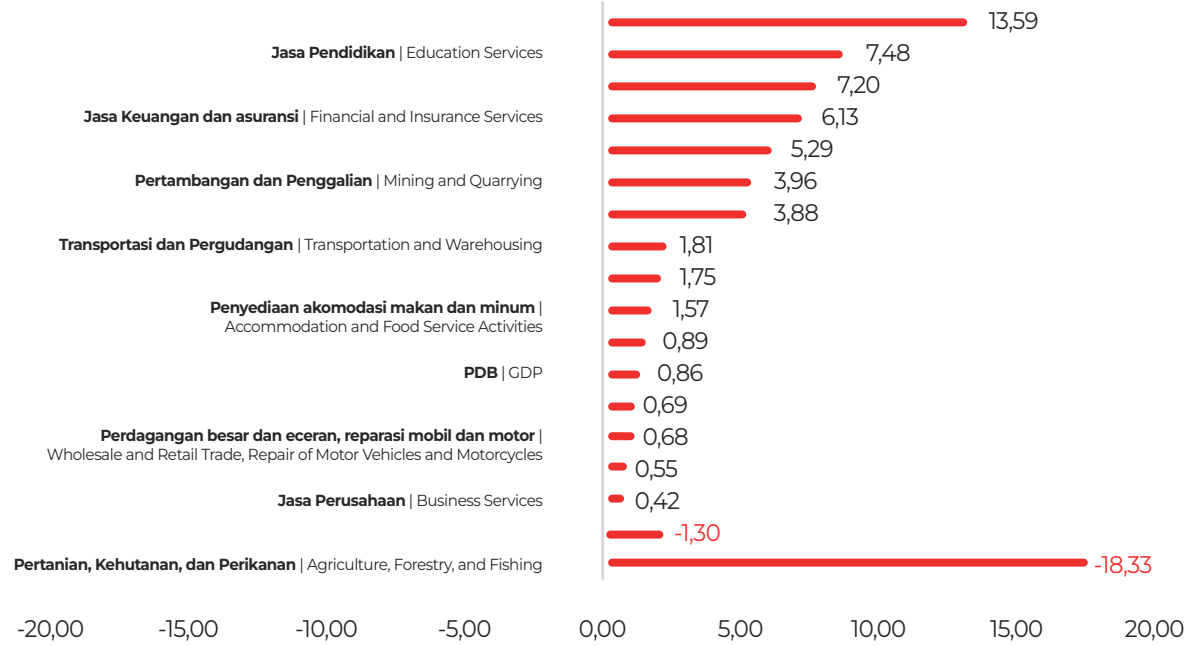
Secara Tahunan
Year-on-Year

Pertumbuhan Tahunan berdasarkan Lapangan Usaha 2025
Annual Growth by Industry in 2025



Secara Triwulanan
Quarter-on-Quarter

Pertumbuhan Triwulanan (TW-IV 2025) berdasarkan Lapangan Usaha
Quarterly Growth (Q4 2025) by Economic Sector



Sumber: CEIC, BPS, Analisis IFG Progress
Source: CEIC, Statistics Indonesia, IFG Progress Analysis

Secara tahunan, jasa lainnya menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, sebesar 9,33%, didorong oleh peningkatan aktivitas rekreasi. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara. Adapun, secara triwulanan, sektor administrasi pemerintahan tumbuh paling signifikan di triwulan IV, sebesar 13,59%, seiring dengan akselerasi realisasi anggaran pemerintah. Hal ini juga didukung dengan kenaikan konsumsi pemerintah dari sisi PDB pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 37,68% (QoQ).

Sedangkan, sektor pertambangan dan penggalian mengalami tekanan sehingga mencatat penurunan, yaitu 0,23% (QoQ) dan 0,66% (YoY). Apabila dilihat per triwulan secara YoY, sektor ini mengalami kontraksi, kecuali pada triwulan II. Penurunan ini terutama dipicu oleh penurunan produksi bijih tembaga dan emas di wilayah Papua serta penurunan permintaan di pasar global. Namun demikian, pemulihan terlihat menjelang akhir tahun 2025, di mana data triwulan III dan IV membaik, yaitu dari -1,98% menjadi -1,31% (YoY) dan dari 1,47% menjadi 3,96% (QoQ). Pemulihan ini terjadi seiring dengan mulai beroperasinya tambang emas bawah tanah yang tidak terdampak oleh insiden Grasberg Block Cave sejak Oktober 2025 lalu.

Lebih spesifik di sektor jasa keuangan, industri asuransi dan dana pensiun mengalami perkembangan dibandingkan performa tahun sebelumnya, baik secara tahunan maupun triwulanan.

On a year-on-year basis, other services recorded the highest growth among all sectors at 9.33%, driven by increased recreational activities. This was in line with the rise in both domestic and international tourist arrivals. On a quarter-on-quarter basis, the public administration sector recorded the strongest growth in the fourth quarter, expanding by 13.59% as government budget disbursement accelerated. This performance was further supported by increased government consumption on the expenditure side of GDP, which recorded the highest growth at 37.68% (QoQ).

Meanwhile, the mining and quarrying sector experienced a decline, contracting by 0.23% (QoQ) and 0.66% (YoY). On a year-on-year basis by quarter, the sector recorded contractions in all quarters except the second quarter. The decline was primarily driven by lower copper ore and gold production in Papua, as well as weaker demand in the global market. Nevertheless, the sector showed signs of recovery toward the end of 2025, with improved performance in the third and fourth quarters. Year-on-year growth improved from -1.98% to -1.31%, while quarter-on-quarter growth increased from 1.47% to 3.96%. The recovery was supported by the commencement of operations at an underground gold mine that was unaffected by the Grasberg Block Cave incident, beginning in October 2025.

More specifically, within the financial services sector, the insurance and pension fund industry delivered stronger performance than in the previous year, both on a year-on-year and quarter-on-quarter basis.

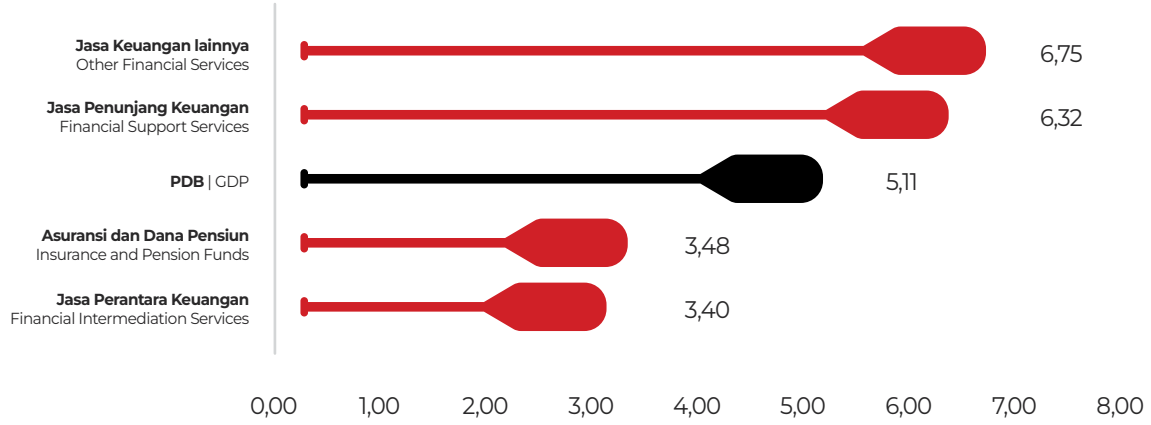
Industri asuransi dan dana pensiun tumbuh 3,48% (YoY) dibandingkan tahun 2024 yang terkontraksi 0,43% (YoY). Adapun, secara triwulanan (QoQ), industri asuransi dan dana pensiun tumbuh 0,24%, membaik dibanding triwulan III yang terkontraksi 2,10%. Kinerja terbaik secara tahunan diperlihatkan oleh jasa keuangan lainnya sementara, secara triwulanan, kinerja terbaik ditunjukkan oleh sektor jasa perantara keuangan.

The insurance and pension fund industry increased by 3.48% (YoY), compared with a 0.43% (YoY) contraction in 2024. On a quarter-on-quarter basis, the industry expanded by 0.24%, improving from the 2.10% contraction recorded in the third quarter. On a year-on-year basis, other financial services recorded the strongest performance, while on a quarter-on-quarter basis, financial intermediary services delivered the best performance.

Perbandingan Kinerja Ekonomi Asuransi dan Sektor Lain
Perbandingan Kinerja Ekonomi Asuransi dan Sektor Lain

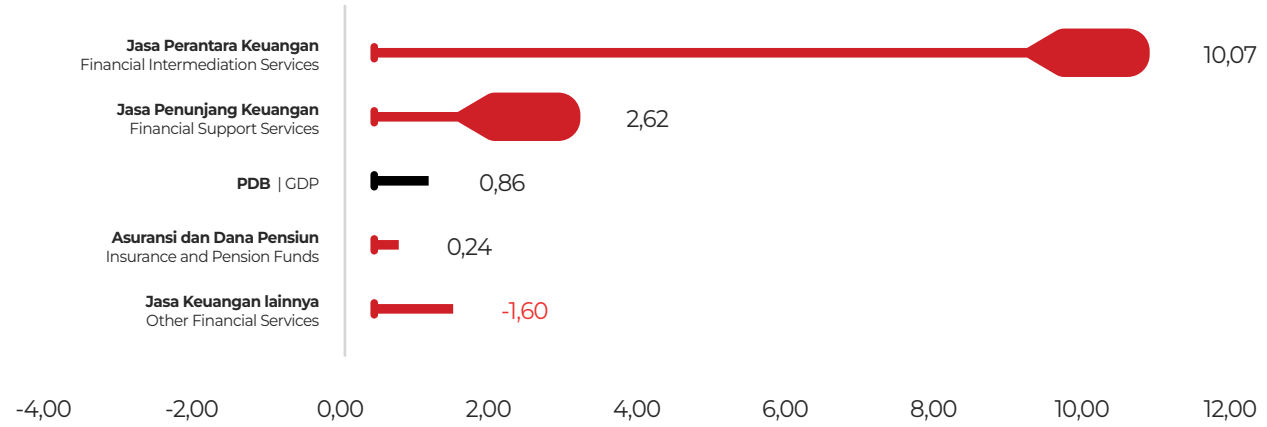
Secara Tahunan
Year-on-Year

Pertumbuhan tahunan industri keuangan dan asuransi 2025
Annual Growth of the Financial and Insurance Industry in 2025



Secara Triwulanan
Quarter-on-Quarter

Pertumbuhan triwulanan industri keuangan dan asuransi di TW-IV tahun 2025
Quarterly Growth of the Financial and Insurance Sectors in Q4 2025



1. Inflasi

Jika dilihat secara tahunan, inflasi Indonesia meningkat dari 1,57% (YoY) pada tahun 2024 menjadi 2,92% (YoY) pada tahun 2025. Kenaikan ini masih dalam kisaran target Bank Indonesia (2,5% ± 1%), dengan seluruh komponen inflasi yang tetap terkendali. Adapun, jika dilihat dari secara rata-rata bulanan, angkanya terlihat menurun dari 2,30% pada tahun 2024 menjadi 1,91% pada tahun 2025. Penyesuaian target dan tingkat inflasi mencerminkan konsistensi

1. Inflation

On a year-on-year basis, Indonesia's inflation rate increased from 1.57% (YoY) in 2024 to 2.92% (YoY) in 2025. Despite the increase, inflation remained within Bank Indonesia's target range of 2.5% ± 1%, with all inflation components remaining under control. On an average monthly basis, however, inflation declined from 2.30% in 2024 to 1.91% in 2025. The adjustment in the inflation target and the realized inflation rate reflects the

kebijakan moneter dan fiskal serta efektivitas koordinasi pengendalian harga oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Namun demikian, dinamika risiko global seperti fluktuasi harga komoditas pangan dan energi tetap perlu diantisipasi. Salah satu faktor utama yang turut memengaruhi tekanan inflasi pada tahun 2025 adalah pergerakan harga komoditas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Harga Minyak Mentah Indonesia

Sepanjang tahun 2025, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ICP) berfluktuasi mengikuti dinamika global. Pada awal tahun 2025, ICP ditetapkan sebesar USD76,81 per barel atau meningkat dari USD71,61 pada Desember 2024 karena optimisme pasar setelah Tiongkok mengumumkan rencana stimulus fiskal dan penurunan suku bunga. Namun, sejak Februari 2025, tren ICP terus turun hingga mencapai USD62,75 per barel pada Mei 2025, dipicu oleh keputusan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menambah suplai sebesar 410.000 barel per hari serta kenaikan stok minyak AS yang bertambah 2,8 juta barel. Selanjutnya, pada Juni ICP melonjak kembali ke USD69,33 karena faktor ketegangan geopolitik Timur Tengah (serangan AS-Iran-Israel) dan ancaman penutupan Selat Hormuz yang berpengaruh terhadap lalu lintas pelayaran.

Memasuki triwulan III, tren ICP relatif terus melemah hingga berada di level USD61,10 per barel pada Desember, yang merupakan harga terendah sepanjang 2025. Penurunan ini diakibatkan oleh kekhawatiran pasar akan narasi "*super glut*" atau kelebihan pasokan minyak dunia di pasar karena peningkatan produksi OPEC+ serta keringanan sanksi terhadap Rusia dalam geopolitik Rusia-Ukraina. Kendati membantu meredakan tekanan inflasi dari sisi energi, volatilitas ICP sepanjang tahun 2025 yang dipicu oleh faktor pasokan dan geopolitik ini tetap menjadi risiko terhadap stabilitas inflasi yang perlu diwaspadai.

b. Harga Minyak Sawit Mentah

Harga minyak sawit mentah *crude palm oil* (CPO) pada awal tahun berada pada kisaran MYR4.300-MYR4.600 per ton dan mencapai puncak sekitar MYR4.672 per ton pada Februari 2025, didorong oleh pasokan Indonesia yang tertahan. Memasuki triwulan II, harga terkoreksi ke kisaran MYR3.800-MYR4.100 per ton, seiring dengan normalisasi produksi dan stabilitas arus ekspor. Penguatan harga kembali terjadi pada Juli sampai dengan Agustus 2025 sehingga harga kembali mendekati MYR4.500 per ton. Penguatan ini didorong oleh sentimen permintaan yang solid dan antisipasi kebutuhan impor musiman dari Asia serta potensi gangguan pasokan. Pada triwulan IV, peningkatan stok dan perubahan strategi ekspor berhasil menekan harga sehingga pada 24 Desember 2025, perdagangan

consistency of monetary and fiscal policies, as well as the effectiveness of price stabilization measures coordinated by the Central Inflation Control Team (TPIP) and the Regional Inflation Control Teams (TPID). Nevertheless, global risk factors, including fluctuations in food and energy commodity prices, continued to warrant close monitoring. One of the key factors influencing inflationary pressures in 2025 was commodity price movements, as described below.

a. Indonesian Crude Oil Prices

Throughout 2025, the Indonesian Crude Price (ICP) fluctuated in response to global market developments. At the beginning of the year, the ICP was set at USD76.81 per barrel, up from USD71.61 per barrel in December 2024, reflecting improved market sentiment following China's announcement of fiscal stimulus measures and interest rate cuts. However, beginning in February 2025, the ICP trended downward, reaching USD 62.75 per barrel in May. The decline was driven by the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) decision to increase production by 410,000 barrels per day, coupled with a 2.8-million-barrel increase in U.S. crude oil inventories. In June, the ICP rebounded to USD69.33 per barrel, supported by heightened geopolitical tensions in the Middle East, including the U.S.–Iran–Israel conflict, and concerns over potential disruptions to shipping through the Strait of Hormuz.

Entering the third quarter, the ICP resumed its downward trend, reaching USD 61.10 per barrel in December, the lowest level recorded during 2025. The decline reflected market concerns over a potential global oil "super glut" resulting from increased OPEC+ production and the easing of sanctions on Russia amid geopolitical developments related to the Russia–Ukraine conflict. Although lower oil prices helped ease energy-related inflationary pressures, the volatility of the ICP throughout 2025, driven by supply conditions and geopolitical developments, continued to pose risks to inflation stability.

b. Crude Palm Oil Prices

At the beginning of 2025, crude palm oil (CPO) prices ranged between MYR 4,300 and MYR 4,600 per ton, reaching a peak of approximately MYR 4,672 per ton in February, supported by supply constraints in Indonesia. During the second quarter, prices corrected to around MYR 3,800–MYR 4,100 per ton, in line with the normalization of production and stable export flows. Prices strengthened again between July and August 2025, approaching MYR4,500 per ton. It is driven by robust demand, expectations of seasonal import demand from Asian markets, and potential supply disruptions. In the fourth quarter, however, higher inventories and changes in export strategies placed downward pressure on prices. As of December 24, 2025, CPO closed at approximately

CPO ditutup di harga sekitar MYR4.037 per ton, lebih rendah dibandingkan puncak awal tahun.

Dari sisi struktural, berdasarkan dinamika Indeks Harga Konsumen (IHK), komposisi tekanan inflasi tahun 2025 menunjukkan pergeseran sumber tekanan, dengan kelompok *volatile food* (VF) tercatat sebagai kontributor utama terhadap inflasi tahunan. Inflasi inti (*core inflation)* tetap relatif terjaga pada level 2,38% (YoY), didukung oleh konsistensi kebijakan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi, kapasitas produksi domestik yang memadai, *imported inflation* yang terkendali, serta percepatan digitalisasi.

Sementara itu, inflasi kelompok barang yang diatur oleh pemerintah (*administered prices*) menunjukkan dinamika fluktuatif sepanjang 2025. Kelompok ini mengalami deflasi tajam pada awal tahun sebelum kembali mencatatkan inflasi positif sebesar 1,93% (YoY) pada akhir periode. Pola tersebut mencerminkan penyesuaian kebijakan harga bersubsidi yang berdampak temporer terhadap dinamika harga energi dan listrik. Berbeda dengan dua kelompok tersebut, inflasi *volatile food* (VF) meningkat signifikan menjadi 6,21% (YoY) dibandingkan 0,12% (YoY) pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini mengindikasikan adanya tekanan dari sisi penawaran, termasuk gangguan pasokan, kenaikan biaya *input* produksi, serta dinamika permintaan domestik. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar-otoritas melalui forum TPIP–TPID serta inisiatif pengendalian inflasi di daerah menjadi krusial guna memitigasi risiko yang bersumber dari volatilitas harga pangan.

Secara keseluruhan, tren inflasi tahun 2025 tetap terkendali dalam target, tetapi rentannya kelompok *volatile* (terutama pangan) dan eksposur terhadap harga energi global menuntut kebijakan responsif dan koordinasi lintas sektor.

2. Nilai Tukar Rupiah

Sepanjang tahun 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah dibandingkan dengan tahun 2024, ketika rupiah mengalami fluktuasi yang signifikan dan ditutup di level Rp16.162 per dolar Amerika Serikat pada akhir Desember 2024. Memasuki awal Januari 2025, rupiah berada pada level yang relatif lebih lemah, yakni Rp16.236 per dolar Amerika Serikat, dan terus mengalami tekanan pada triwulan I tahun 2025 hingga mencapai titik terendah pada April 2025 di level Rp16.943, sebelum akhirnya ditutup di level Rp16.680 di akhir tahun 2025. Pergerakan ini mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal sepanjang 2025, seiring ketidakpastian ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, serta kenaikan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat.

Arus modal asing memainkan peran penting dalam dinamika rupiah. Pada tahun 2024, pergerakan arus modal bersifat fluktuatif antar-kuartal, dengan meningkatnya

MYR4,037 per ton, below its peak earlier in the year.

From a structural perspective, based on Consumer Price Index (CPI) developments, the composition of inflationary pressures in 2025 shifted, with the volatile food (VF) component emerging as the primary contributor to annual inflation. Core inflation remained relatively stable at 2.38% (YoY), supported by consistent interest rate policies that helped anchor inflation expectations, adequate domestic production capacity, contained imported inflation, and accelerated digitalization.

Meanwhile, inflation in the administered prices component fluctuated throughout 2025. The component recorded a sharp deflation at the beginning of the year before returning to positive territory, ending the year with inflation of 1.93% (YoY). This pattern reflected adjustments to government-administered subsidized prices, which temporarily affected energy and electricity prices. In contrast, volatile food (VF) inflation rose significantly to 6.21% (YoY) from 0.12% (YoY) in the previous year. The increase indicated supply-side pressures, including supply disruptions, higher production input costs, and changes in domestic demand. Accordingly, strengthening coordination among relevant authorities through the TPIP–TPID framework, together with regional inflation control initiatives, remained essential to mitigating risks arising from food price volatility.

Overall, inflation remained within the target range throughout 2025. However, the vulnerability of the volatile food component, particularly food prices, together with continued exposure to global energy price fluctuations, underscores the importance of responsive policies and strong cross-sector coordination.

2. Rupiah Exchange Rate

Throughout 2025, the rupiah exchange rate against the U.S. dollar fluctuated with a depreciating bias compared with 2024, when the rupiah experienced significant volatility before closing at IDR 16,162 per U.S. dollar at the end of December 2024. At the beginning of January 2025, the rupiah opened at a relatively weaker level of IDR 16,236 per U.S. dollar and remained under pressure throughout the first quarter, reaching its weakest level of IDR 16,943 in April before closing the year at IDR 16,680 per U.S. dollar. This movement reflected heightened external pressures throughout 2025 amid global economic uncertainty, evolving international trade dynamics, and stronger demand for the U.S. dollar.

Foreign capital flows played a significant role in shaping rupiah movements. In 2024, capital flows fluctuated across quarters. Higher capital outflows during the third

capital outflow pada triwulan III yang menekan nilai tukar, sementara lonjakan arus modal masuk pada triwulan II dan IV mendukung penguatan rupiah. Memasuki tahun 2025, pola berubah menjadi lebih satu arah dan didominasi oleh tekanan pada awal tahun. Pelemahan rupiah dari Rp16.236 per dolar Amerika Serikat pada awal Januari 2025 hingga mencapai Rp16.943 pada awal April 2025 menunjukkan *capital outflow* yang relatif kuat. Pada pertengahan tahun 2025, *capital inflow* mendorong penguatan rupiah hingga mencapai level Rp16.109 pada Agustus 2025. Kemudian, pada paruh kedua 2025, tekanan kembali meningkat dan rupiah melemah secara bertahap hingga ditutup di level Rp16.680 pada akhir Desember 2025. Hal ini menunjukkan bahwa arus modal asing sepanjang 2025 masih belum mampu menopang stabilitas nilai tukar rupiah secara berkelanjutan.

Perkembangan arus modal asing pada 2025 menunjukkan bahwa sikap hati-hati investor global terhadap aset negara berkembang masih berlanjut. Tekanan *capital outflow* pada awal tahun mendorong pelemahan rupiah, sementara masuknya modal pada pertengahan tahun sempat menopang penguatan nilai tukar meskipun tidak bertahan lama. Tekanan kembali muncul pada paruh kedua tahun, menunjukkan bahwa stabilitas rupiah masih sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Kondisi ini menegaskan tingginya ketergantungan terhadap arus modal asing, sehingga kebijakan moneter yang responsif tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

quarter exerted pressure on the rupiah, while stronger capital inflows in the second and fourth quarters supported its appreciation. In 2025, however, the pattern became more one-directional, with pressures concentrated in the early part of the year. The rupiah's depreciation from IDR 16,236 per U.S. dollar in early January to IDR 16,943 in early April reflected relatively strong capital outflows. Capital inflows during the middle of the year subsequently supported the rupiah, strengthening it to IDR 16,109 per U.S. dollar in August 2025. However, pressures resurfaced during the second half of the year, causing the rupiah to weaken gradually before closing at IDR 16,680 per U.S. dollar at the end of December. This indicates that foreign capital inflows during 2025 were insufficient to support sustained stability in the rupiah exchange rate.

Trends in foreign capital flows in 2025 indicate that global investors' cautious stance toward emerging-market assets continues. Pressure from capital outflows early in the year contributed to the rupiah's depreciation, while capital inflows midway through the year briefly supported the currency's appreciation, though this did not last long. Pressure resurfaced in the second half of the year, indicating that the rupiah's stability remains heavily influenced by global dynamics. Overall, these developments underscore Indonesia's continued reliance on foreign capital flows, highlighting the importance of maintaining responsive monetary policies to preserve macroeconomic stability.

3. Imbal Hasil SBN 10 Tahun

Sepanjang tahun 2025, imbal hasil (*yield*) SBN tenor 10 tahun Indonesia bergerak dalam tren menurun yang relatif terjaga. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2024 yang menunjukkan pergerakan lebih fluktuatif, di mana *yield* sempat menembus di atas 7,00% pada paruh pertama tahun 2024, turun mendekati 6,50% pada pertengahan tahun, dan kembali naik ke kisaran 7,00% di akhir tahun 2024.

Pada Januari 2025, imbal hasil SBN sempat mencapai 7,26%, yang merupakan level tertinggi di tahun tersebut. Setelah itu, *yield* terus turun secara bertahap, yaitu menjadi 6,90% di Maret, ke bawah 6,40% di Juni 2025, dan berlanjut ke kisaran 6,10%–6,20% di Desember 2025. Secara keseluruhan, kinerja obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun pada 2025 mencerminkan pola *one-way movement* dengan volatilitas yang relatif terkendali, dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan global.

Dari sisi domestik, penurunan *yield* terutama dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran moneter Bank Indonesia. Sepanjang 2025, suku bunga acuan diturunkan secara bertahap dari 5,75% menjadi 4,75% pada akhir tahun, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi. Penurunan suku bunga tersebut menurunkan ekspektasi suku bunga jangka panjang, sehingga mendorong kenaikan harga obligasi dan penurunan *yield*. Selain itu, dominasi investor domestik,

3. 10-Year Government Securities Yield

Throughout 2025, yields on Indonesia's 10-year government securities (SBN) remained on a broadly downward trend. This is in contrast to the movements observed in 2024, in which the 10-year yield briefly exceeded 7.00% in the first half of the year, declined to nearly 6.50% by mid-year, and increased to around 7.00% toward year-end.

In January 2025, the 10-year government securities yield reached 7.26%, its highest level of the year. Thereafter, yields declined steadily to 6.90% in March, fell below 6.40% in June, and eased further to around 6.10%–6.20% by December 2025. Overall, the movement in 10-year government securities yields during 2025 reflected a broadly one-way downward trend with relatively contained volatility, supported by both domestic and global (external) factors.

On the domestic front, the decline in yields was primarily driven by Bank Indonesia's monetary easing cycle. Throughout 2025, the policy rate was gradually reduced from 5.75% to 4.75% to support economic growth while maintaining inflation stability. Lower policy rates reduced long-term interest rate expectations, supporting higher bond prices and lower yields. In addition, the strong presence of domestic investors, including banks, insurance companies, and pension

termasuk perbankan, asuransi, dan dana pensiun turut menjaga stabilitas pasar dan meredam volatilitas saat terjadi tekanan eksternal. Dari sisi eksternal, penurunan *yield* obligasi pemerintah Amerika Serikat serta ekspektasi pelonggaran kebijakan oleh The Fed membantu mendorong arus modal ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini turut memperkuat tren penurunan *yield* domestik. Meskipun sentimen geopolitik dan ketidakpastian global masih mewarnai pasar keuangan, dampaknya terhadap pasar SBN sepanjang tahun cenderung bersifat sementara dan tidak memicu lonjakan *yield* yang ekstrem.

Secara keseluruhan, pergerakan *yield* SBN tenor 10 tahun sepanjang 2025 menunjukkan penurunan yang moderat dan berlangsung secara bertahap. Perkembangan sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa disiplin fiskal, koordinasi kebijakan yang solid, serta pendalaman pasar keuangan domestik berperan penting dalam meredam dampak dinamika global terhadap pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah.

funds—helped anchor market stability and cushion the impact of external shocks. Externally, declining U.S. Treasury yields and expectations of monetary policy easing by the Federal Reserve encouraged capital flows into emerging markets, including Indonesia. It reinforced the downward trend in domestic yields. Although geopolitical tensions and global uncertainty continued to influence financial markets, their impact on the government securities market remained temporary and did not trigger significant yield spikes.

Overall, the movement in 10-year SBN yields throughout 2025 showed a moderate and gradual decline. The developments throughout 2025 suggested that fiscal discipline, solid policy coordination, and the strengthening of the domestic financial market played a key role in mitigating the impact of global dynamics on government bond yield movements.

TINJAUAN MAKROEKONOMI YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

IFG Progress mengidentifikasi fenomena makroekonomi yang memengaruhi kinerja industri asuransi dan perusahaan di tahun 2025, yaitu penurunan konsumen kelas menengah yang berlanjut di tahun 2025, transfer keuangan daerah yang tertunda, dan tingkat kredit bermasalah atau *non-performing loans* (NPL) di segmen UMKM yang relatif tinggi.

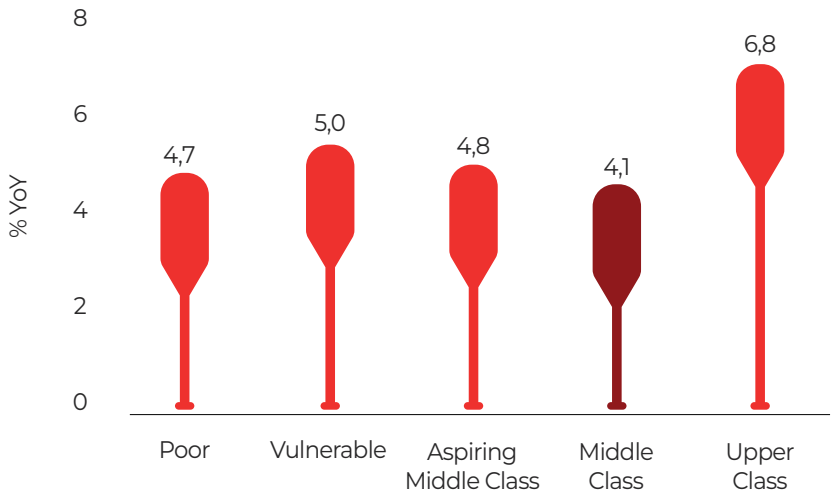
1. **Penurunan Konsumen Kelas Menengah yang Berlanjut**
   Penurunan kelas menengah Indonesia pada 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan makroekonomi secara agregat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan daya beli pada kelompok rumah tangga yang selama ini menjadi jangkar konsumsi domestik. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11% (*Year-on-Year*/YoY) dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai Rp83,7 juta. Di sisi lain, dinamika distribusi kesejahteraan antarkelompok justru memperlihatkan tekanan pada kelas menengah. Temuan ini penting karena kelas menengah biasanya menjadi penopang konsumsi yang lebih stabil, jangkar permintaan pada sektor jasa keuangan, serta pasar utama berbagai produk bernilai tambah.

MACROECONOMICS OVERVIEW AFFECTING COMPANY PERFORMANCE IN 2025

IFG Progress has identified macroeconomic trends that will affect the performance of the insurance industry and companies in 2025, namely the continued decline in the middle-class consumer base in 2025, delayed regional financial transfers, and a relatively high rate of non-performing loans (NPLs) in the MSME segment.

1. **Continued Decline in the Middle Class**
   The decline of Indonesia's middle class in 2025 indicates that aggregate macroeconomic growth has not yet fully translated into strengthened purchasing power among the household groups that have long served as the anchor of domestic consumption. According to Statistics Indonesia (BPS), the Indonesian economy is projected to grow by 5.11% (Year-on-Year/YoY) in 2025, with gross domestic product (GDP) per capita reaching IDR 83.7 million. On the other hand, the dynamics of wealth distribution among different groups actually reveal pressure on the middle class. This finding is significant because the middle class typically serves as a more stable pillar of consumption, an anchor for demand in the financial services sector, and the primary market for various value-added products.

Pertumbuhan Konsumsi Per Kapita Menurut Kelas, 2025
Per Capita Consumption Growth by Class, 2025

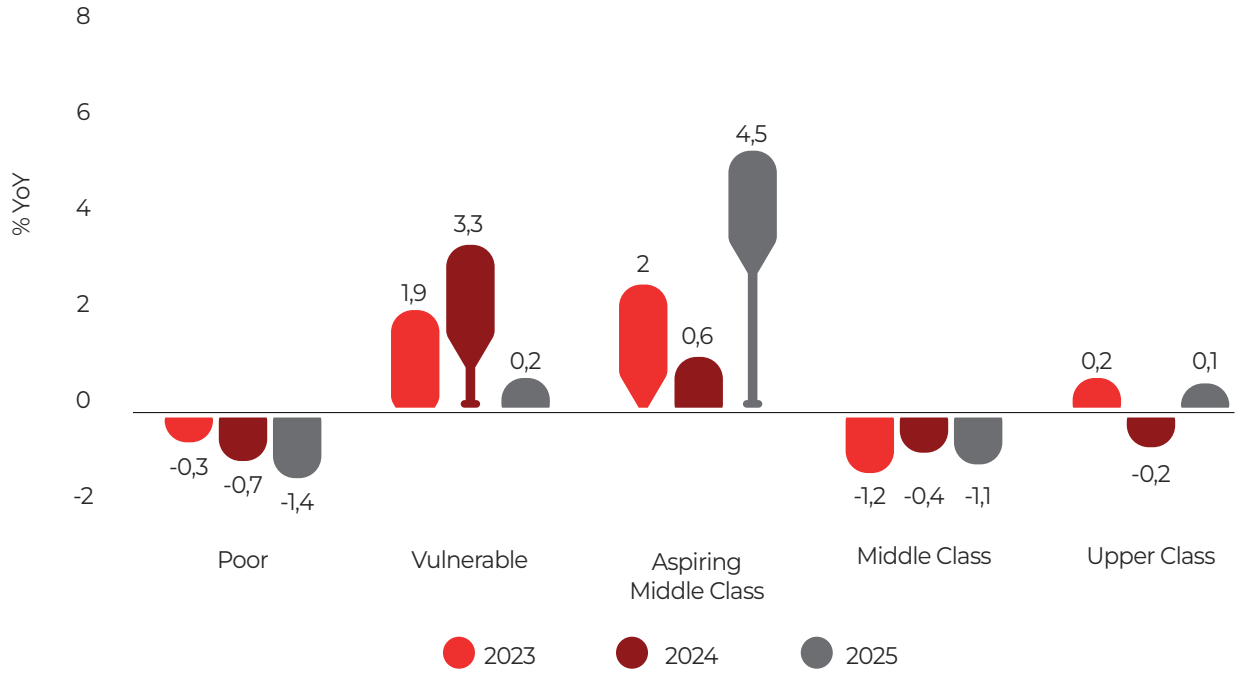


Sumber: SUSENAS BPS, Mandiri Institute, Analisis IFG Progress
Catatan: Klasifikasi kelas mengikuti definisi World Bank berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan relatif terhadap garis kemiskinan: Poor (<1x), Vulnerable (1,0 – 1,5x), Aspiring Middle Class (>1,5 – 3,5x), Middle Class (>3,5 – 17x), dan Upper Class (>17x)
Source: BPS National Socioeconomic Survey (SUSENAS), Statistics Indonesia, IFG Progress Analysis
Note: The classification of social classes follows the World Bank's definition based on monthly per capita expenditure relative to the poverty line: Poor (<1x), Vulnerable (1.0–1.5x), Aspiring Middle Class (>1.5–3.5x), Middle Class (>3.5–17x), and Upper Class (>17x)

Gambar diatas menunjukkan konsumsi per kapita kelas menengah hanya tumbuh 4,10% (YoY), terendah dibanding kelompok lain. Sebagai pembanding, kelas miskin tumbuh 4,70%, rentan 5,00%, calon kelas menengah (*aspiring middle class*) 4,80%, dan kelas atas 6,80%. Pola ini menekankan bahwa pertumbuhan konsumsi kelas menengah tertahan dan berada di bawah pertumbuhan konsumsi per kapita nasional (sekitar 4,60%). Terdapat implikasi struktural yang perlu dicermati, yaitu ketika konsumsi kelas menengah tumbuh paling lambat, maka kualitas pertumbuhan konsumsi nasional berisiko menjadi kurang merata. Sejumlah laporan juga menunjukkan konsumsi kelas menengah lebih banyak ditopang pengeluaran nonmakanan yang bersifat gaya hidup (*lifestyle-driven*), sementara penguatan kebutuhan dasar tidak sekuat tahun sebelumnya.

Figure above shows that per capita consumption among the middle class increased by only 4.10% (year-over-year), the lowest rate compared to other groups. By comparison, consumption among the poor increased by 4.70%, the vulnerable by 5.00%, the aspiring middle class by 4.80%, and the upper class by 6.80%. This pattern highlights that consumption growth among the middle class is stagnant and lags behind national per capita consumption growth (approximately 4.60%). There are structural implications that warrant attention: when middle-class consumption grows the slowest, the quality of national consumption growth risks becoming less equitable. Several reports also indicate that middle-class consumption is largely supported by lifestyle-driven non-food spending, while the growth in basic needs is not as strong as in the previous year.

Perubahan Jumlah Penduduk pada Setiap Kelas Ekonomi, 2023-2025
Changes in Population Size by Economic Class, 2023–2025

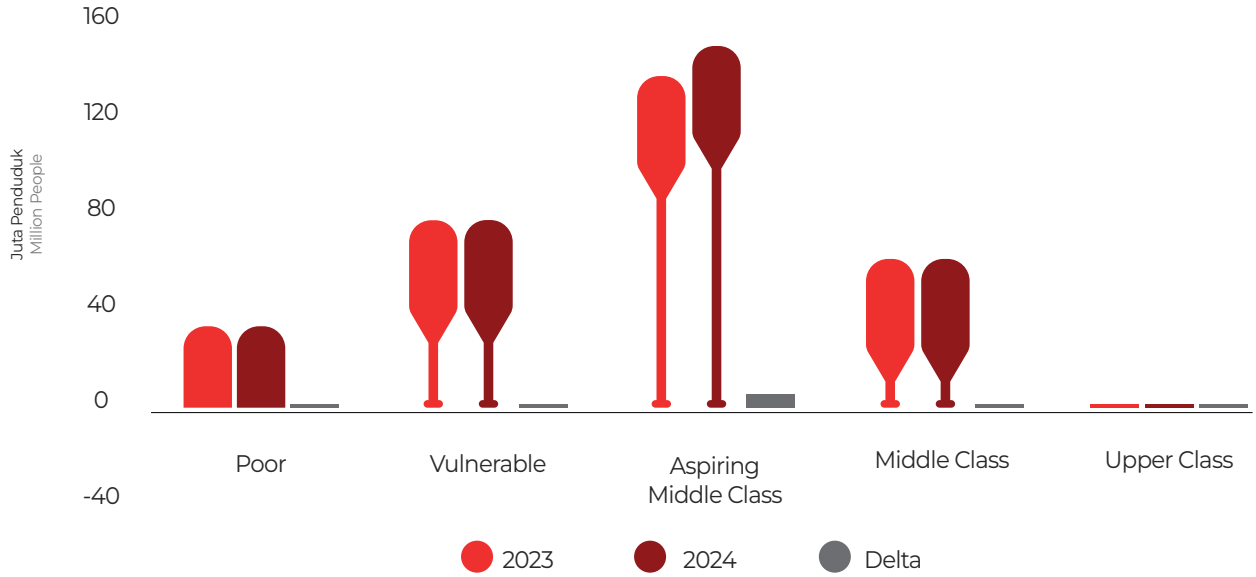


Sumber: SUSENAS BPS, Mandiri Institute, Analisis IFG Progress
Source: BPS National Socioeconomic Survey (SUSENAS), Statistics Indonesia, IFG Progress Analysis

Gambar diatas menunjukkan bahwa penurunan kelas menengah pada tahun 2025 bukan sekadar fluktuasi kecil, melainkan penurunan yang lebih dalam dibanding tahun 2024. Pada panel kelas menengah, batang tahun 2025 menunjukkan kontraksi sekitar 1,10 juta orang, lebih besar daripada penurunan di tahun 2024 yang sekitar 400.000 orang. Sebaliknya, panel *aspiring middle class* justru menunjukkan kenaikan kuat sekitar 4,50 juta orang pada tahun 2025. Hal tersebut menandakan perpindahan ke bawah (*downward mobility*) dari kelas menengah ke segmen calon kelas menengah. Dinamika antarkelompok pada gambar tersebut terlihat tidak linear dan menunjukkan kerentanan mobilitas sosial pascapandemi. Jika kelas menengah menyusut lebih cepat sementara kelompok rentan/*aspiring* membesar, maka basis konsumen yang mampu melakukan pengeluaran diskresioner secara berkelanjutan akan melemah. Dengan kata lain, tekanan pada kelas menengah di 2025 bukan hanya terkait daya beli melambat, tetapi juga tentang perubahan komposisi sosial-ekonomi yang lebih luas.

Figure above shows that the decline in the middle class in 2025 is not merely a minor fluctuation, but a more significant decline compared to 2024. In the middle-class panel, the bar for 2025 indicates a contraction of approximately 1.10 million people, which is greater than the decline in 2024 of about 400,000 people. In contrast, the "aspiring middle class" panel actually shows a strong increase of about 4.50 million people in 2025. This indicates downward mobility from the middle class to the aspiring middle class segment. The dynamics between these groups in that figure appear nonlinear and highlight the vulnerability of social mobility in the post-pandemic era. If the middle class shrinks more rapidly while the vulnerable/aspiring group expands, the consumer base capable of sustaining discretionary spending will weaken. In other words, the pressure on the middle class in 2025 is not only related to slowing purchasing power but also to broader changes in socioeconomic composition.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelas Pengeluaran, 2024 vs. 2025
Population by Expenditure Class, 2024 vs. 2025



Sumber: SUSENAS BPS, Mandiri Institute, Analisis IFG Progress
Source: BPS National Socioeconomic Survey (SUSENAS), Statistics Indonesia, IFG Progress Analysis

Gambar diatas memperlihatkan jumlah penduduk berdasarkan kelas pengeluaran ekonomi secara absolut dan lebih jelas. Jumlah penduduk kelas menengah turun dari sekitar 47,90 juta menjadi sekitar 46,70 juta orang, sementara *aspiring middle class* naik dari 137,50 juta menjadi 142,00 juta orang (perubahan sekitar +4,50 juta). Pada saat yang sama, kelompok miskin turun (25,2 juta ke 23,9 juta) dan kelas atas naik tipis (1,10 juta ke 1,20 juta), sehingga tekanan terutama terkonsentrasi pada segmen menengah. Secara makro, kondisi ini berarti pertumbuhan ekonomi 2025 yang tetap solid belum otomatis menghasilkan penguatan ketahanan kelas menengah (*middle-income resilience*). BPS memang mencatat konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan, tetapi komposisinya bisa berubah jika kelas menengah, sebagai penggerak konsumsi berkualitas, terus tertekan. Dalam jangka menengah, hal ini dapat menahan permintaan produk jasa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan finansial yang biasanya tumbuh seiring ekspansi kelas menengah.

Dengan melemahnya pertumbuhan konsumsi kelas menengah dan meningkatnya perpindahan ke segmen *aspiring middle class*, struktur permintaan rumah tangga terhadap produk keuangan berpotensi mengalami penyesuaian. Kondisi ini menjadi penting bagi industri asuransi karena kelas menengah selama ini merupakan salah satu basis utama permintaan produk proteksi ritel. Bagi industri asuransi Indonesia, penurunan kelas menengah pada tahun 2025 berimplikasi pada basis nasabah ritel yang paling prospektif berpotensi menyempit atau setidaknya menjadi lebih *price-sensitive*. Akibatnya, pertumbuhan premi, khususnya produk jiwa tradisional, kesehatan komersial, dan proteksi keluarga, dapat lebih bergantung pada segmentasi *aspiring middle class*

Figure above shows the population by economic expenditure class in absolute terms and in greater detail. The middle-class population declined from approximately 47.90 million to approximately 46.70 million people, while the aspiring middle class increased from 137.50 million to 142.00 million people (a change of approximately +4.50 million). At the same time, the poor decreased (from 25.2 million to 23.9 million) and the upper class rose slightly (from 1.10 million to 1.20 million), meaning that the pressure is primarily concentrated on the middle segment. From a macroeconomic perspective, this situation implies that solid economic growth in 2025 does not automatically lead to strengthened middle-income resilience. Meanwhile, the Statistics Indonesia (BPS) reported that household consumption remains the primary driver of growth, its composition could shift if the middle class, as the engine of quality consumption, continues to face pressure. In the medium term, this could curb demand for services, education, healthcare, and financial protection—sectors that typically grow alongside the expansion of the middle class.

With the weakening of middle-class consumption growth and the increasing shift toward the aspiring middle class segment, the structure of household demand for financial products is likely to experience adjustments. This situation is significant for the insurance industry because the middle class has long been one of the main drivers of demand for retail protection products. For the Indonesian insurance industry, the decline in the middle class by 2025 implies that the most promising retail customer base may shrink or, at the very least, become more price-sensitive. As a result, premium growth, particularly for traditional life insurance, commercial health insurance, and family protection products, may become more

dengan desain produk yang lebih terjangkau dan fleksibel. Selain itu, perusahaan asuransi perlu memperkuat strategi distribusi dan literasi agar perlindungan tetap relevan di tengah tekanan daya beli rumah tangga menengah.

reliant on the "aspiring middle class" segment, with product designs that are more affordable and flexible. In addition, insurance companies need to strengthen their distribution and financial literacy strategies to ensure that protection remains relevant amid pressure on the purchasing power of middle-class households.

2. Penundaan Realisasi Transfer Daerah

Pada 2025, penyaluran transfer ke daerah (TKD) kembali menjadi isu operasional fiskal yang penting, bukan hanya dari sisi nominal, tetapi juga dari sisi *timing*. Secara agregat, Kementerian Keuangan mencatat penyaluran TKD 2025 mencapai Rp849,0 triliun (APBN KiTa Q4 2025), menunjukkan skala dukungan pemerintah pusat tetap besar. Namun, di level pelaksanaan, berbagai kanal Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (DJPb/KPPN) menegaskan bahwa penyaluran di sejumlah wilayah belum optimal karena kendala persyaratan dan administrasi, penyesuaian regulasi/efisiensi belanja, hingga isu kapasitas pelaksanaan dan pengadaan. Artinya, "*delay*" yang dirasakan daerah sering kali berbentuk keterlambatan pencairan pada tahap tertentu, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik atau Dana Desa atau perlambatan penyerapan karena dokumen persyaratan tidak terpenuhi tepat waktu.

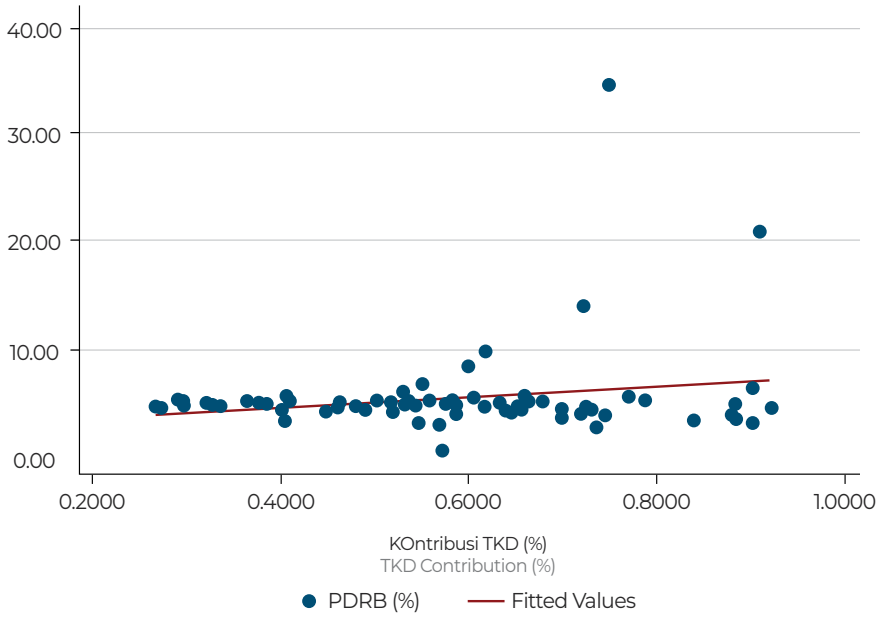
2. Delays in the Disbursement of Regional Transfers

In 2025, the disbursement of regional transfers (TKD) once again became a critical fiscal operational issue, not only in terms of the nominal amount but also in terms of timing. Aggregately, the Ministry of Finance reports that TKD disbursements for 2025 reached IDR 849.0 trillion (KiTa State Budget Q4 2025), indicating that the scale of central government support remains substantial. However, at the implementation level, various channels within the Directorate General of Treasury/State Treasury Service Offices (DJPb/KPPN) confirm that disbursements in several regions have not been optimal due to constraints related to eligibility requirements and administrative procedures, regulatory adjustments and spending efficiency measures, as well as issues regarding implementation capacity and procurement. This means that the "delays" experienced by local governments often take the form of late disbursements at certain stages, such as for the Physical Special Allocation Fund (DAK) or the Village Fund, or slow absorption due to required documents not being submitted on time.

Dari perspektif makro, *timing* TKD penting karena belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal dan belanja barang/jasa, memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah. Meski penyaluran TKD hingga November 2025 telah mencapai 91,5% dari pagu (sekitar Rp795,6 triliun), beberapa laporan menyoroti bahwa belanja pemerintah daerah tetap lesu, mengindikasikan friksi eksekusi/penyerapan di lapangan. Kondisi ini konsisten dengan narasi DJPb bahwa kendala administratif dan proses pengadaan dapat menahan realisasi belanja meskipun dana secara nominal tersedia.

From a macro perspective, the timing of TKD is critical because local government spending—particularly capital expenditures and spending on goods and services—has a multiplier effect on the local economy. Although TKD disbursements through November 2025 have reached 91.5% of the budget ceiling (approximately IDR 795.6 trillion), several reports highlight that local government spending remains subdued, suggesting continued execution and budget absorption challenges at the implementation level. This situation aligns with the DJPb's assessment that administrative hurdles and procurement processes can hinder spending even when funds are nominally available.

Scatterplot Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Transfer ke Daerah, 2024-2025
Scatterplot of Regional Economic Growth and Transfers to Regions, 2024–2025

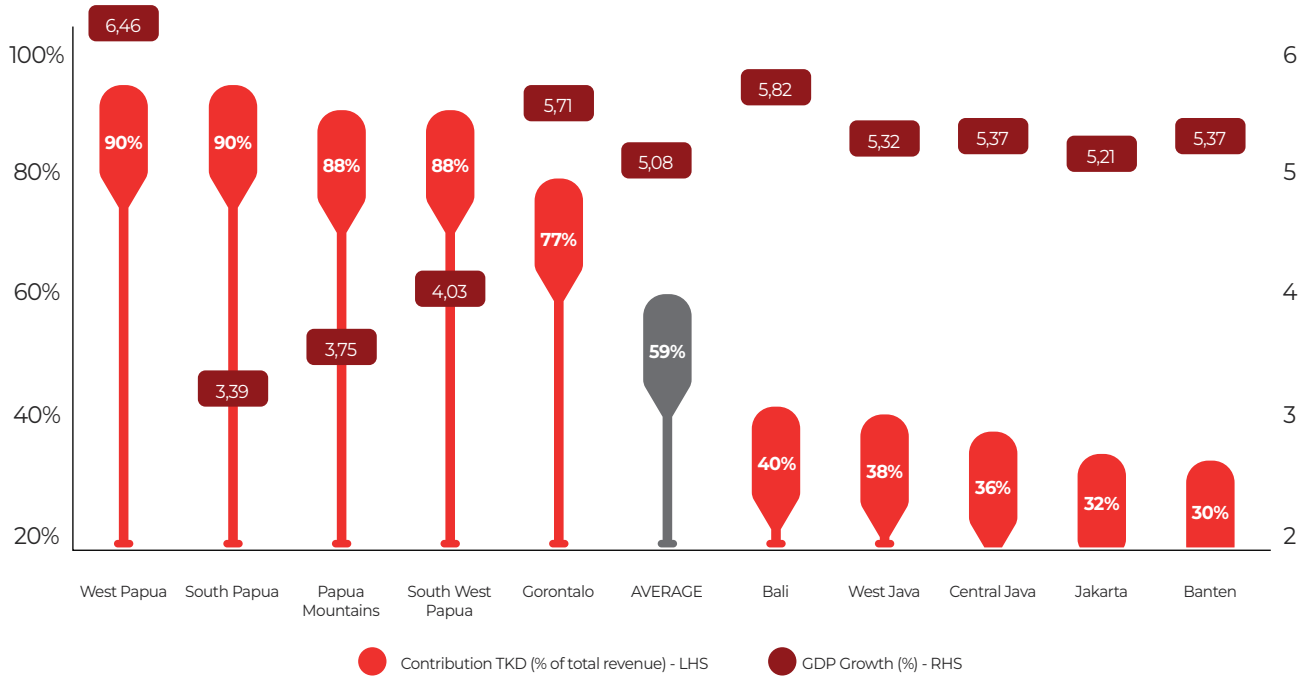


Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, CEIC, Analisis IFG Progress
Source: Ministry of Finance, Statistics Indonesia, CEIC, IFG Progress Analysis

Gambar diatas menampilkan TKD sebagai persentase dari total pendapatan pemerintah daerah vs pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Gambar ini memperlihatkan korelasi positif yang lemah, di mana garis *fitted values* sedikit menanjak tetapi sebaran titik sangat lebar. Ini selaras dengan realitas desain TKD sebagai instrumen pemerataan kapasitas fiskal. Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil cenderung lebih bergantung pada TKD sehingga hubungan statistik sederhana tidak otomatis menangkap dampak kausal TKD pada pertumbuhan. Dalam konteks 2025, ketika terdapat friksi penyaluran/persyaratan dan penyerapan, daerah yang sangat bergantung pada TKD menjadi lebih rentan mengalami pertumbuhan yang tidak setangguh rata-rata nasional yang sebesar 5,11%.

Figure above shows TKD as a percentage of total local government revenue versus regional gross domestic product (RGDP) growth. This figure reveals a weak positive correlation, where the line of fitted values slopes slightly upward but the scatter of data points is very wide. This is consistent with the design intent of TKD as an instrument for equalizing fiscal capacity. Regions with low local revenue (PAD) tend to be more dependent on TKD, so a simple statistical relationship does not automatically capture the causal impact of TKD on growth. Within the context of 2025, when there are distribution/eligibility and absorption frictions, regions that are highly dependent on TKD become more vulnerable to experiencing growth that is not as robust as the national average of 5.11%.

Scatterplot Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Transfer ke Daerah, 2024-2025
Scatterplot of Regional Economic Growth and Regional Transfer, 2024–2025



Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, CEIC, Analisis IFG Progress
Source: Ministry of Finance, Statistics Indonesia, CEIC, IFG Progress Analysis

Untuk melihat keterkaitan antara ketergantungan daerah terhadap TKD dan kinerja ekonomi regional, analisis berikut membandingkan kontribusi TKD terhadap total pendapatan daerah dengan pertumbuhan PDRB masing-masing provinsi. Gambar diatas (*top* 5 dan *bottom* 5 ketergantungan TKD) memperjelas heterogenitas tersebut. Kelompok dengan porsi TKD sangat tinggi, seperti beberapa provinsi di Papua dan Gorontalo, tetap mencatat pertumbuhan yang bervariasi, ada yang tinggi, ada yang moderat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB tetap sangat dipengaruhi struktur ekonomi lokal, basis komoditas, dinamika proyek, dan kapasitas eksekusi belanja. Di sisi lain, provinsi dengan ketergantungan TKD rendah, seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, relatif lebih "terlindungi" karena mesin pertumbuhan lebih ditopang aktivitas swasta dan PAD, sehingga guncangan *timing* TKD cenderung lebih kecil dampaknya terhadap pertumbuhan tahunan.

Ketidakteraturan aliran TKD dapat memperlemah momentum belanja daerah pada semester tertentu, sehingga daerah yang bergantung TKD berisiko mengalami pertumbuhan yang tertahan dibanding *benchmark* nasional. Penahanannya biasanya muncul melalui tiga kanal: (i) penundaan tender/proyek, (ii) tertahannya belanja barang/jasa dan belanja modal, serta (iii) *cashflow* pemerintah daerah yang lebih ketat sehingga belanja yang bersifat stimulus tertunda meskipun target tahunan tetap dikejar di akhir tahun anggaran.

To examine the relationship between regional dependence on Regional Transfers (TKD) and regional economic performance, the following analysis compares the contribution of TKD to total regional government revenue with the Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth of each province. Figure above (top 5 and bottom 5 in terms of TKD dependence) illustrates this heterogeneity. Provinces with a high reliance on TKD, including several provinces in Papua and Gorontalo, recorded varying rates of economic growth, ranging from moderate to relatively strong. This suggests that GRDP growth continues to be shaped by a combination of local economic structure, commodity composition, project dynamics, and the capacity to execute public spending. In contrast, provinces with relatively low dependence on TKD—such as Jakarta, Banten, West Java, Central Java, and Bali—were comparatively more resilient, as their economic growth was supported primarily by private sector activity and locally generated revenue (PAD). As a result, changes in the timing of TKD disbursement tended to have a more limited impact on their annual economic growth.

Irregularities in the timing of TKD disbursement may weaken the momentum of regional government spending during certain periods, leaving regions that rely heavily on TKD more vulnerable to slower economic growth than the national benchmark. Such delays typically affect regional economies through three main channels: (i) postponed procurement and infrastructure projects; (ii) delayed expenditure on goods, services, and capital spending; and (iii) tighter regional government cash flows, which postpone stimulus-related spending

Bagi industri asuransi, pola ini penting karena (1) penundaan proyek infrastruktur/pekerjaan konstruksi di daerah berpotensi menekan permintaan jangka pendek untuk lini *engineering*, *property*, *contractor's all risk*, dan *surety bond* terkait pengadaan/kontrak pemerintah daerah; (2) perlambatan aktivitas ekonomi daerah juga dapat menahan pertumbuhan premi ritel (kendaraan, kesehatan, mikro) di wilayah yang daya belinya sangat sensitif terhadap belanja pemerintah; dan (3) volatilitas kalender belanja meningkatkan kebutuhan manajemen risiko portofolio asuransi korporasi. Perusahaan perlu lebih adaptif pada pola "*front-loading vs back-loading*" proyek pemerintah daerah agar akuisisi premi dan klaim lebih terkendali.

even though annual spending targets are ultimately pursued toward the end of the fiscal year.
For the insurance industry, this trend is significant because (1) delays in infrastructure projects and construction work in regional areas could potentially suppress short-term demand for engineering, property, contractor's all-risk, and surety bond lines related to local government procurement and contracts; (2) a slowdown in regional economic activity may also curb the growth of retail premiums (auto, health, microinsurance) in regions where purchasing power is highly sensitive to government spending; and (3) volatility in the spending calendar increases the need for corporate insurance portfolio risk management. Companies need to be more adaptive to the "front-loading vs. back-loading" patterns of local government projects so that premium acquisition and claims can be better managed.

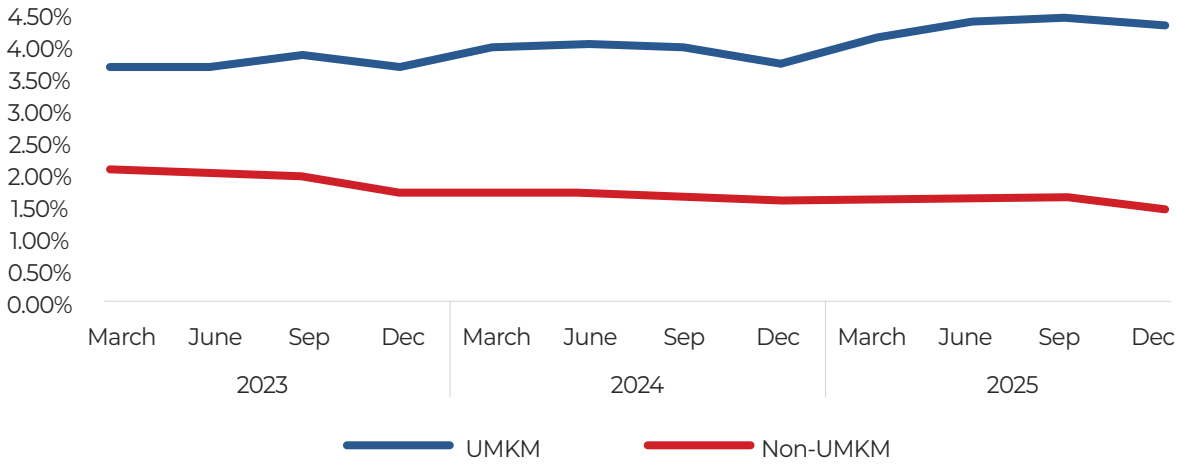
3. Kualitas Kredit Segmen UMKM

Pelemahan kualitas kredit UMKM dan perlambatan penyaluran kredit, khususnya di sektor perdagangan, menjadi sinyal penting bagi industri penjaminan dan asuransi kredit karena dapat memengaruhi profil risiko klaim serta strategi seleksi portofolio. Kualitas kredit UMKM pada tahun 2025 turun dibandingkan dengan tahun 2024, ditandai dengan peningkatan NPL, yaitu dari rata-rata 3,76% di tahun 2024 menjadi rata-rata 4,33% di tahun 2025. Penurunan kualitas kredit UMKM ini perlu menjadi perhatian khusus karena NPL non-UMKM pada periode sama justru menunjukkan perbaikan, yaitu dari rata-rata 1,75% menjadi 1,66%.

3. Credit Quality of the MSME Segment

The deterioration in MSME credit quality and the slowdown in lending growth, particularly in the trade sector, serve as important signals for the credit guarantee and credit insurance industries, as they can affect claim risk profiles and portfolio selection strategies. MSME credit quality in 2025 declined compared to 2024, as indicated by an increase in NPLs—from an average of 3.76% in 2024 to an average of 4.33% in 2025. This decline in MSME credit quality warrants special attention, as non-MSME NPLs during the same period showed improvement, declining from an average of 1.75% to 1.66%.

***Non-Performing Loans* (NPL) Berdasarkan Skala Usaha (UMKM dan non-UMKM)**
Non-Performing Loans (NPLs) by Business Size (MSMEs and Non-MSMEs)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Analisis IFG Progress
Source: Financial Services Authority (OJK), IFG Progress Analysis

Selain performa kredit UMKM yang kurang baik, terdapat pula tren perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM yang masih terjadi di tahun 2025 dan penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran, dengan porsi sebesar 45,00% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, penyaluran kredit UMKM mengalami perlambatan pertumbuhan sepanjang tahun 2025, melanjutkan tren penurunan yang telah terjadi sejak tahun 2024. Penyaluran kredit tahun 2025

In addition to the poor credit performance of MSMEs, there is also a trend of slowing growth in MSME lending that continues into 2025, and MSME lending remains focused on the wholesale and retail trade sector, accounting for 45.00% in 2025. Overall, MSME lending experienced a slowdown in growth throughout 2025, continuing the downward trend that began in 2024. Lending in 2025 recorded an average growth rate of 0.98% (YoY), a significant decline compared to the

mencatatkan rata-rata pertumbuhan 0,98% (YoY) dan angka ini menurun signifikan dibandingkan rata-rata pertumbuhan penyaluran kredit UMKM yang terjadi di tahun 2024, sebesar 5,60% (YoY).

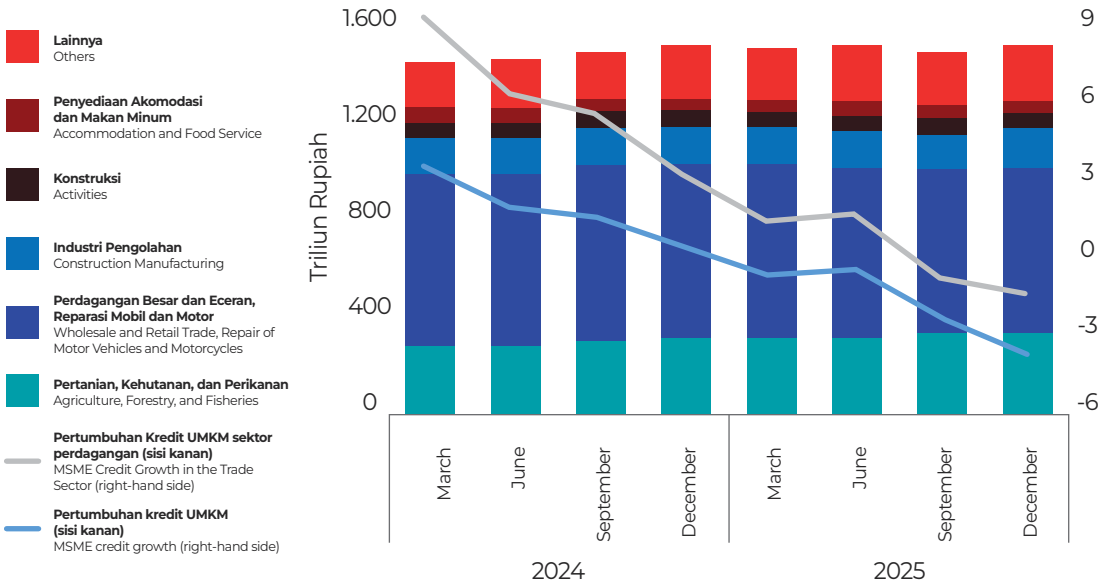
Berdasarkan data dari Statistik Perbankan OJK, kredit UMKM sempat terkontraksi sebesar 0,27% (YoY) pada triwulan IV tahun 2025.

average growth rate of MSME lending in 2024, which stood at 5.60% (YoY).

According to data from the OJK's Banking Statistics, MSME credit contracted by 0.27% (YoY) in the fourth quarter of 2025.

Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha dan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektor Perdagangan

MSME Lending by Industry and MSME Credit Growth in the Trade Sector



Keterangan: Grafik batang (penyaluran kredit UKM dalam miliar rupiah), grafik garis (pertumbuhan kredit sektor perdagangan dalam persentase)
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Analisis IFG Progress
Notes: Bar chart (MSE lending in billions of rupiah), line chart (growth in trade sector credit as a percentage)
Source: Financial Services Authority (OJK), IFG Progress Analysis

Seperti telah disebut sebelumnya, penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi 45,00% dari total kredit UMKM, namun penyaluran kreditnya memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata, pada tahun 2025, kredit UMKM sektor perdagangan besar dan eceran mengalami kontraksi 2,06% (YoY). Pada tahun 2024, meski juga mengalami perlambatan, kredit sektor ini masih bisa tumbuh 2,04%. Perlambatan pertumbuhan kredit sektor perdagangan tidak hanya terjadi di segmen UMKM. Secara keseluruhan, penyaluran kredit di sektor perdagangan melambat, dari tumbuh 7,80% (YoY) di tahun 2024 menjadi hanya tumbuh 2,81% (YoY) di tahun 2025. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlambatan kredit UMKM di sektor perdagangan tidak bersifat spesifik pada segmen UMKM, melainkan bagian dari perlambatan kredit di sektor perdagangan secara keseluruhan. Namun demikian, tekanan yang lebih dalam pada segmen UMKM menunjukkan adanya kerentanan yang bersifat struktural. Salah satu indikasinya adalah tren performa kredit UMKM secara keseluruhan lebih buruk, dengan NPL yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor non-UMKM.

As mentioned earlier, MSME lending remains focused on the wholesale and retail trade sector, accounting for 45.00% of total MSME credit; however, lending has deteriorated compared to the previous year. On average, in 2025, MSME credit in the wholesale and retail trade sector contracted by 2.06% (YoY). In 2024, although it also experienced a slowdown, credit in this sector still managed to grow by 2.04%. The slowdown in credit growth in the trade sector did not only occur in the MSME segment. Overall, lending in the trade sector slowed, from 7.80% year-over-year (YoY) growth in 2024 to just 2.81% YoY growth in 2025. Thus, it can be concluded that the slowdown in MSME credit in the trade sector is not specific to the MSME segment but rather part of the overall slowdown in credit within the trade sector. However, the greater pressure on the MSME segment indicates the presence of structural vulnerabilities. One indication of this is the trend of overall poorer MSME credit performance, with higher NPLs compared to the non-MSME sector.

TINJAUAN SEGMEN INDUSTRI
INDUSTRY SEGMENT OVERVIEW

1. Industri Asuransi Umum dan Reasuransi

a. Industri Asuransi Umum

Kinerja industri asuransi umum Indonesia sepanjang tahun 2025 mencerminkan fase pemulihan, terutama dari sisi operasional. Pertumbuhan premi dan klaim tercatat masing-masing sebesar 4,00% dan 4,03% secara tahunan (YoY), menunjukkan ekspansi yang moderat pada level *single digit*. Pertumbuhan premi industri asuransi umum didorong dari pertumbuhan premi lini bisnis properti dan asuransi kredit, sementara pertumbuhan klaim didorong dari lini bisnis asuransi kredit. Secara nominal, pergerakan premi dan klaim terlihat relatif stabil sepanjang tahun, namun dalam perspektif tren tahunan kinerjanya mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap produk asuransi umum belum sepenuhnya kembali ke fase akselerasi. Meskipun demikian, pertumbuhan premi yang tetap lebih tinggi dibandingkan klaim, memberikan sinyal positif terhadap perbaikan kualitas bisnis.

Perbaikan kualitas portofolio tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja teknis industri. Hasil *underwriting* berbalik dari posisi negatif Rp559,20 miliar pada tahun 2024 menjadi surplus sebesar Rp27,58 triliun pada tahun 2025. Transformasi ini menegaskan bahwa sumber keuntungan industri kembali ditopang oleh *core business*, bukan hanya oleh kinerja investasi. Sejalan dengan itu, industri juga berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp18,08 triliun setelah pada tahun sebelumnya mengalami kerugian sebesar Rp10,27 triliun. Di sisi lain, hasil investasi tetap menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan 13,49% (YoY), sehingga memberikan tambahan bantalan terhadap peningkatan laba secara keseluruhan.

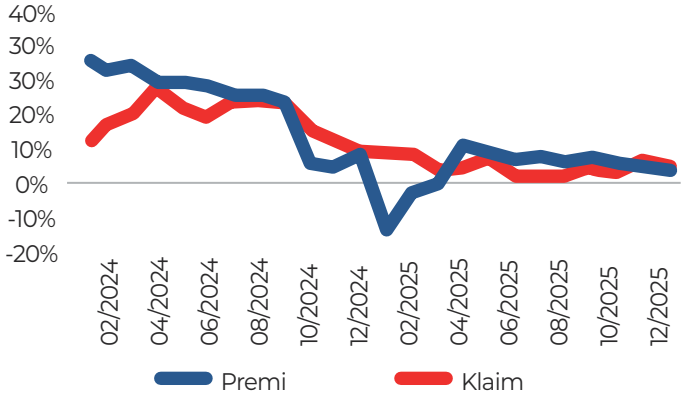
1. General Insurance and Reassurance Industry

a. General Insurance Industry

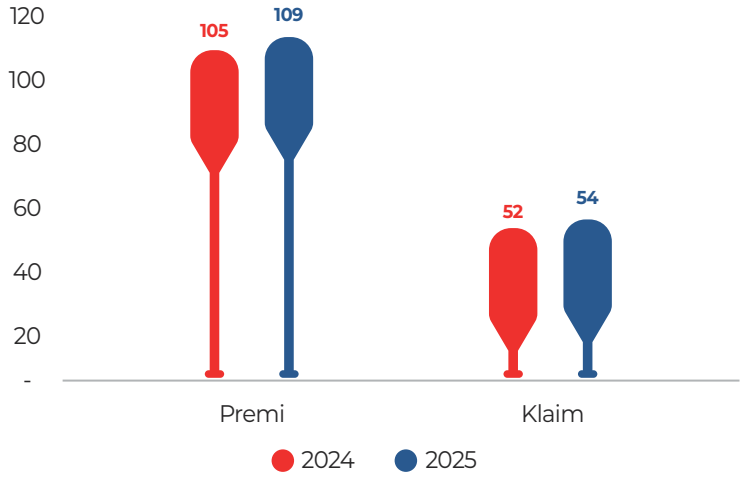
The performance of Indonesia's general insurance industry throughout 2025 reflected a phase of recovery, particularly from an operational perspective. Premium and claim growth was recorded at 4.00% and 4.03%, respectively, on a year-on-year (YoY) basis, indicating moderate expansion in the single-digit range. Premium growth in the general insurance industry was driven by growth in premiums from the property and credit insurance lines of business, while claims growth was driven by the credit insurance line of business. In nominal terms, the movement of premiums and claims appeared relatively stable throughout the year; however, from an annual trend perspective, performance slowed compared to 2024. This situation indicates that demand for general insurance products has not yet fully returned to a phase of acceleration. Nevertheless, the fact that premium growth remains higher than claims growth signals a positive trend toward improved business quality.

This improvement in portfolio quality has had a significant impact on the industry's technical performance. Underwriting results shifted from a deficit of IDR 559.20 billion in 2024 to a surplus of IDR 27.58 trillion in 2025. This transformation confirms that the industry's profit source is once again supported by its core business, not merely by investment performance. Similarly, the industry also managed to record a net profit of IDR 18.08 trillion after incurring a loss of IDR 10.27 trillion the previous year. On the other hand, investment returns continued to show positive performance with 13.49% year-over-year (YoY) growth, thereby providing additional support for the overall profit increase.
From a balance sheet perspective, the industry's total assets recorded a 7.44% increase (YoY), with

Pertumbuhan Premi dan Klaim Asuransi Umum (% YoY)
Growth in General Insurance Premiums and Claims (% YoY)

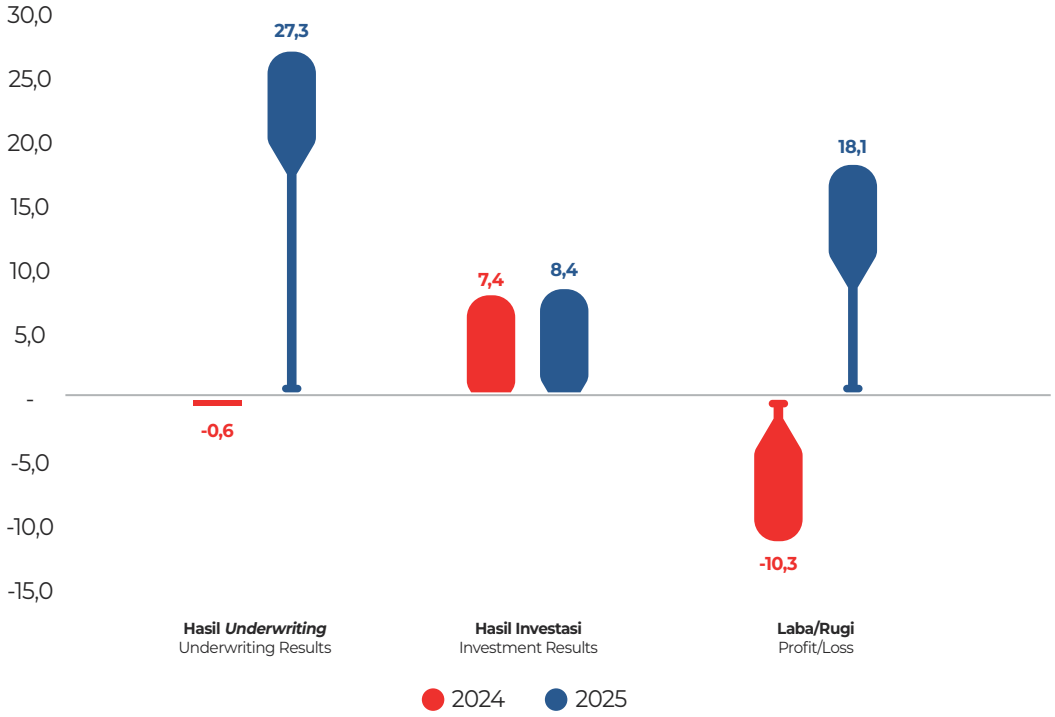


Perkembangan Premi dan Klaim Asuransi Umum (Rp triliun)
Trends in General Insurance Premiums and Claims (trillion rupiah)



Sumber: OJK
Source: OJK

Perkembangan Kinerja Industri Asuransi Umum (Rp triliun)
Performance Trends in the General Insurance Industry
(IDR trillion)

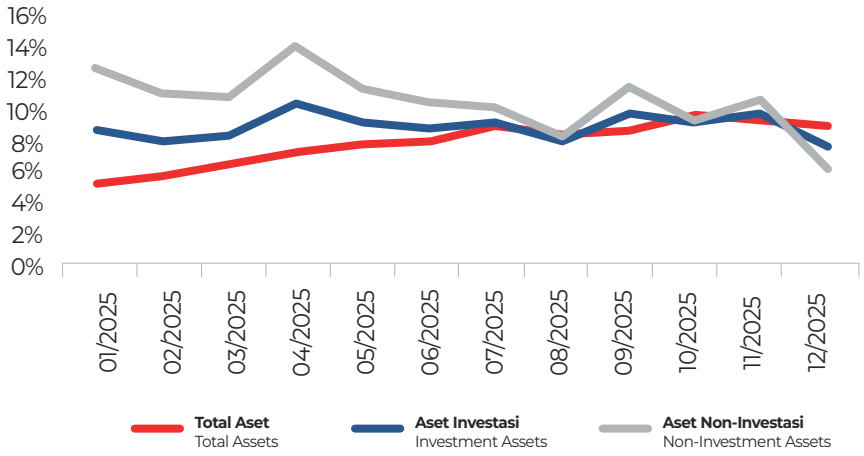


Sumber: OJK
Source: OJK

Dari sisi neraca, total aset industri tumbuh sebesar 7,44% (YoY), dengan aset investasi meningkat lebih tinggi, yakni 8,92% (YoY). Dinamika perkembangan total aset industri asuransi, aset investasi, serta aset noninvestasi sepanjang tahun 2025 dapat dicermati pada Gambar berikut:

investment assets rising at a higher rate of 8.92% (YoY). The dynamics of the growth in the insurance industry's total assets, investment assets, and non-investment assets throughout 2025 can be found in Figure 1.14 below:

Pertumbuhan Aset Industri Asuransi Umum Tahun 2025 (% YoY)
Growth of General Insurance Industry Assets in 2025 (% YoY)



Sumber: OJK
Source: OJK

Pertumbuhan tersebut mencerminkan akumulasi dana yang semakin kuat seiring dengan pemulihan kinerja laba dan pengelolaan portofolio investasi yang lebih optimal. Struktur aset yang semakin ditopang oleh instrumen investasi juga memperkuat kapasitas permodalan industri dalam mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan ketahanan terhadap volatilitas risiko ke depan.

Secara keseluruhan, kinerja industri asuransi umum Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang nyata, terutama dari sisi profitabilitas yang berhasil berbalik dari kondisi rugi pada tahun sebelumnya menjadi mencatatkan laba. Peningkatan hasil *underwriting* menjadi faktor utama yang mendorong pemulihan tersebut, didukung oleh kinerja investasi yang tetap tumbuh serta penguatan posisi aset industri. Perkembangan ini mencerminkan membaiknya kualitas pengelolaan risiko dan efektivitas operasional perusahaan asuransi.

Namun demikian, pertumbuhan premi yang masih berada pada level *single digit* menunjukkan bahwa ekspansi bisnis belum berlangsung secara kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan kinerja saat ini lebih didorong oleh perbaikan kualitas bisnis dibandingkan oleh peningkatan volume usaha, sehingga upaya untuk memperluas basis pasar dan mendorong pertumbuhan premi tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan kinerja industri dalam jangka menengah.

b. Industri Reasuransi

Kinerja industri reasuransi Indonesia di tahun 2025 menunjukkan perbaikan dari sisi profitabilitas meskipun terdapat tekanan pada pertumbuhan bisnisnya. Dari sisi *top line*, tren penerimaan premi terlihat melemah sepanjang tahun dan sempat terkontraksi pada triwulan I 2025, yang dipengaruhi

This growth reflects an increasingly robust accumulation of funds, driven by a recovery in profit performance and more optimal management of investment portfolios. An asset structure increasingly supported by investment instruments also strengthens the industry's capital capacity to support business expansion and enhance resilience against future risk volatility.

Overall, the performance of Indonesia's general insurance industry in 2025 showed a significant improvement, particularly in terms of profitability, which successfully turned around from a loss in the previous year to a profit. The increase in underwriting results was the main factor driving this recovery, supported by continued growth in investment performance and the strengthening of the industry's asset position. This development reflects improvements in the quality of risk management and the operational effectiveness of insurance companies.

However, premium growth that remains at single-digit levels indicates that business expansion has not yet gained strong momentum. This situation indicates that the current performance recovery is driven more by improvements in business quality than by increases in business volume; therefore, efforts to expand the market base and drive premium growth remain critical factors for the industry's sustainable performance in the medium term.

b. Reinsurance Industry

The performance of Indonesia's reinsurance industry in 2025 showed an improvement in profitability despite pressures on business growth. On the top-line front, the trend in premium income appears to have weakened throughout the year and even contracted in the first quarter of 2025, influenced

oleh penurunan kontribusi dari lini bisnis properti dan asuransi kesehatan. Kedua lini ini merupakan kontributor utama portofolio reasuransi sehingga penurunannya berdampak langsung terhadap kinerja premi secara agregat.

Secara tahunan, premi tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,53% (YoY)). Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya ekspansi bisnis reasuransi domestik, baik akibat peningkatan retensi perusahaan asuransi *cedant* maupun penyesuaian struktur portofolio risiko yang lebih selektif.

Perkembangan klaim menunjukkan pola yang sejalan dengan premi, yaitu cenderung melemah sepanjang tahun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan premi. Meskipun demikian, pada triwulan I terjadi lonjakan klaim yang berasal dari lini *liability*, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan. Setelah periode tersebut, tekanan klaim relatif mereda sehingga secara keseluruhan kinerja klaim tahunan hanya turun 1,85% (YoY).

Dinamika ini memberikan ruang bagi perbaikan kinerja teknis karena penurunan klaim berlangsung lebih terbatas dibandingkan kontraksi premi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap hasil *underwriting*.

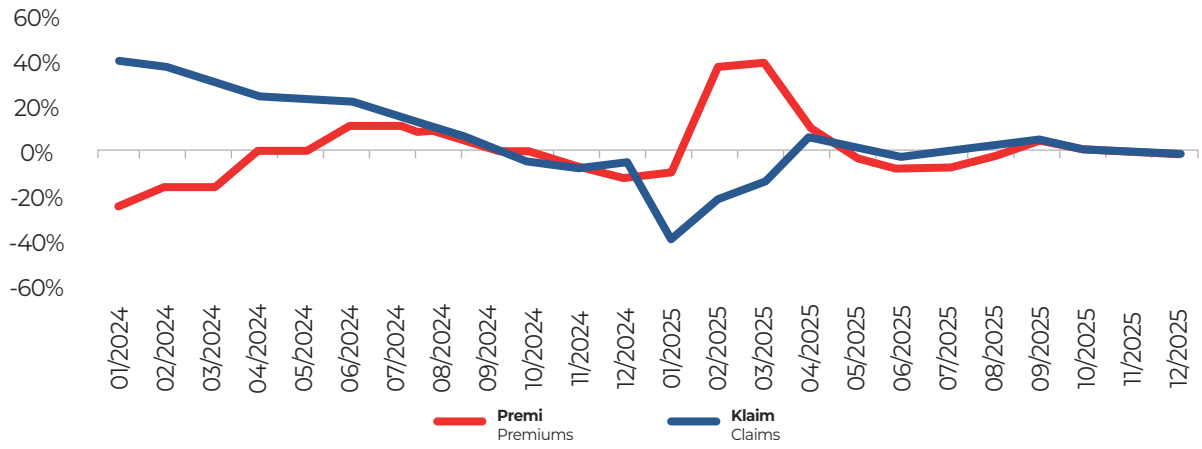
by a decline in contributions from the property and health insurance business lines. These two lines are the main contributors to the reinsurance portfolio; therefore, their decline has a direct impact on aggregate premium performance.

On an year-on-year basis, premiums contracted by 1.53%. This situation reflects the still-limited expansion of the domestic reinsurance business, resulting from both increased retention by cedant insurance companies and adjustments to a more selective risk portfolio structure.

Claims trends followed a pattern consistent with premiums, tending to weaken throughout the year with a lower growth rate compared to premiums. However, in the first quarter, there was a surge in claims stemming from the liability, credit insurance, and health insurance lines. After that period, claims pressure relatively subsided, so that overall annual claims performance declined by only 1.85% (YoY).

This dynamic creates room for improved technical performance, as the decline in claims was more limited than the contraction in premiums, which ultimately had a positive impact on underwriting results.

Pertumbuhan Premi dan Klaim Industri Reasuransi Tahun 2024 – 2025 (%, YoY)
Premium and Claims Growth in the Reinsurance Industry for 2024–2025 (%, YoY)



Sumber: OJK
Source: OJK

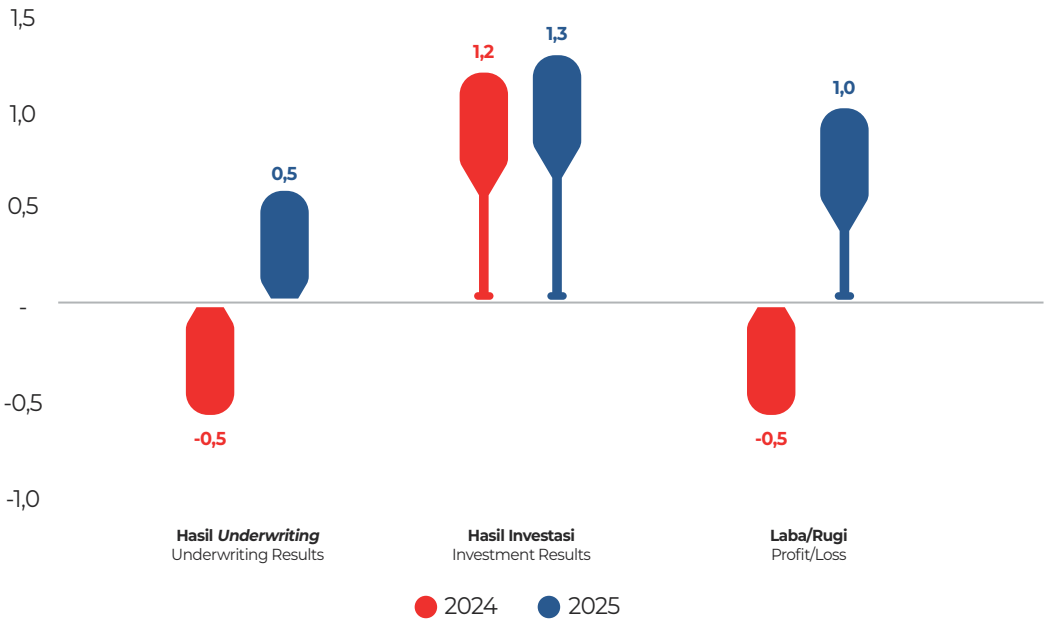
Perbaikan kualitas kinerja teknis tersebut menjadi faktor utama yang mendorong *turnaround* profitabilitas industri. Pada tahun 2025, industri reasuransi berhasil mencatatkan laba sebesar Rp1,00 triliun setelah pada tahun sebelumnya mengalami kerugian sekitar Rp515,02 miliar. Hasil *underwriting* berbalik dari posisi negatif Rp496,30 miliar menjadi surplus sebesar Rp521,11 miliar, mencerminkan efektivitas strategi penyesuaian tarif, penguatan seleksi risiko, serta pengelolaan retrosesi yang lebih optimal. Di sisi lain, kinerja investasi juga memberikan

This improvement in technical performance was the main factor driving the industry's profitability turnaround. In 2025, the reinsurance industry managed to record a profit of IDR 1.00 trillion after incurring a loss of approximately IDR 515.02 billion the previous year. Underwriting results reversed from a deficit of IDR 496.30 billion to a surplus of IDR 521.11 billion, reflecting the effectiveness of rate adjustment strategies, strengthened risk selection, and more optimal retrocession management. Meanwhile, investment performance also made

kontribusi yang positif dengan pertumbuhan hasil investasi sebesar 13,50% (YoY), sehingga memperkuat struktur laba dan meningkatkan ketahanan industri terhadap volatilitas kinerja teknis.

a positive contribution, with investment returns growing by 13.50% (YoY), thereby strengthening the profit structure and enhancing the industry's resilience against volatility in technical performance.

Perkembangan Kinerja Industri Reasuransi (Rp triliun)
Development of the Reinsurance Industry's Performance

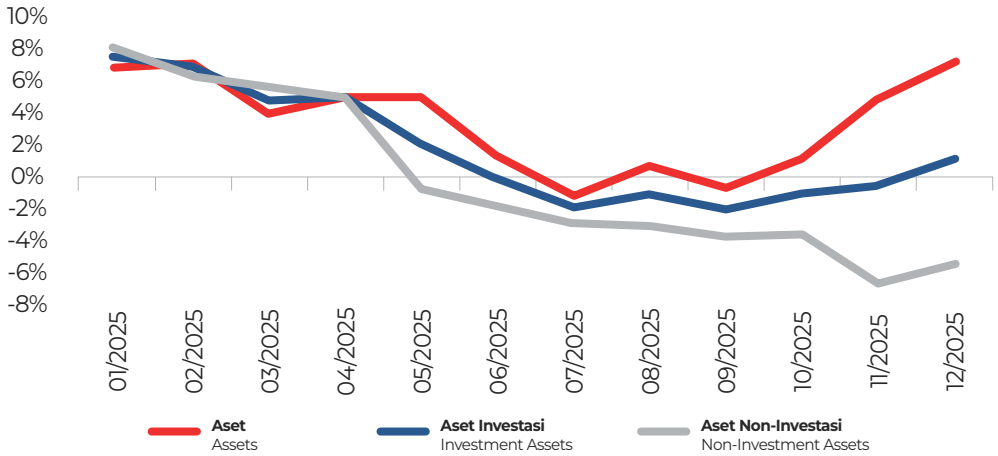


Sumber: OJK

Dari sisi neraca, total aset industri reasuransi tumbuh terbatas sebesar 1,18% (YoY). Meskipun pertumbuhan aset secara agregat relatif moderat, nilai investasi pada beberapa instrumen tercatat meningkat, khususnya pada saham yang tumbuh sebesar 20,76% (YoY) dan reksa dana sebesar 32,77% (YoY). Peningkatan ini mencerminkan upaya industri dalam mengoptimalkan *yield* investasi di tengah pertumbuhan premi yang terkontraksi.

From a balance sheet perspective, the reinsurance industry's total assets showed limited growth of 1.18% (YoY). Although aggregate asset growth was relatively moderate, the value of investments in certain instruments increased, particularly in stocks, which grew by 20.76% (YoY), and mutual funds, which grew by 32.77% (YoY). This increase reflects the industry's efforts to optimize investment yields amid contracting premium growth.

Pertumbuhan Aset Industri Reasuransi Tahun 2025 (% YoY)
Growth in Reinsurance Industry Assets
Year 2025 (% YoY)



Sumber: OJK
Source: OJK

Secara keseluruhan, kinerja industri reasuransi Indonesia pada tahun 2025 ditandai oleh pemulihan profitabilitas yang terutama didorong oleh perbaikan hasil *underwriting* dan kinerja investasi, sementara sisi pertumbuhan premi masih mengalami tekanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan laba lebih banyak berasal dari perbaikan kualitas bisnis dan efisiensi pengelolaan risiko dibandingkan ekspansi volume usaha.

Overall, the performance of Indonesia's reinsurance industry in 2025 was highlighted by a recovery in profitability, driven primarily by improvements in underwriting results and investment performance, while premium growth continued to face pressure. These conditions indicate that the increase in profits stemmed more from improvements in business quality and risk management efficiency than from expansion in business volume.

2. Industri Asuransi Jiwa

Industri asuransi jiwa menghadapi tekanan relatif moderat di tahun 2025. Pendapatan premi bruto turun 1,52% (YoY) menjadi Rp160,22 triliun, dipicu oleh penurunan premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI). Sebaliknya, premi produk tradisional masih mencatatkan pertumbuhan moderat, yang mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat menuju produk proteksi murni di tengah dinamika pasar keuangan.

Dari sisi komposisi premi, kontraksi premi industri asuransi jiwa didominasi oleh penurunan premi lanjutan sebesar 5,11% (YoY) menjadi Rp67,24 triliun serta premi tunggal yang terkontraksi tipis 0,13% (YoY). Di sisi lain, premi tahun pertama masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,22% (YoY) menjadi Rp27,77 triliun. Struktur ini menunjukkan bahwa tekanan premi lebih disebabkan oleh melemahnya keberlanjutan (persistensi) polis meskipun akuisisi bisnis baru (premi tahun pertama) masih tumbuh terbatas. Perlambatan premi juga sejalan dengan penurunan yang signifikan pada jumlah tenaga pemasar pada seluruh kanal distribusi, yang secara keseluruhan turun 15,44% (YoY).

Dari sisi klaim, industri asuransi jiwa mencatatkan penurunan yang lebih dalam, yakni 7,71% (YoY) menjadi Rp130,40 triliun pada 2025. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya klaim penebusan unit pada produk unit link atau PAYDI. Secara lebih terperinci, kontraksi terbesar berasal dari klaim *surrender* dan *partial withdrawal* pada klaim penebusan unit. Perkembangan ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif karena mencerminkan meningkatnya kecenderungan pemegang polis untuk mempertahankan polisnya hingga jatuh tempo, sehingga mendukung perbaikan tingkat persistensi dan kualitas portofolio industri. Penurunan klaim *surrender* dan *partial withdrawal* ini juga berimplikasi pada berkurangnya tekanan likuiditas jangka pendek serta memberikan ruang yang lebih stabil bagi pengelolaan aset–liabilitas atau *aset-liability management* (ALM). Sementara itu, klaim dari produk tradisional sedikit menunjukkan peningkatan yang didorong dari kenaikan pada klaim dari produk asuransi kesehatan.

Kinerja premi dan klaim asuransi dapat dilihat pada gambar berikut:

2. Life Insurance Industry

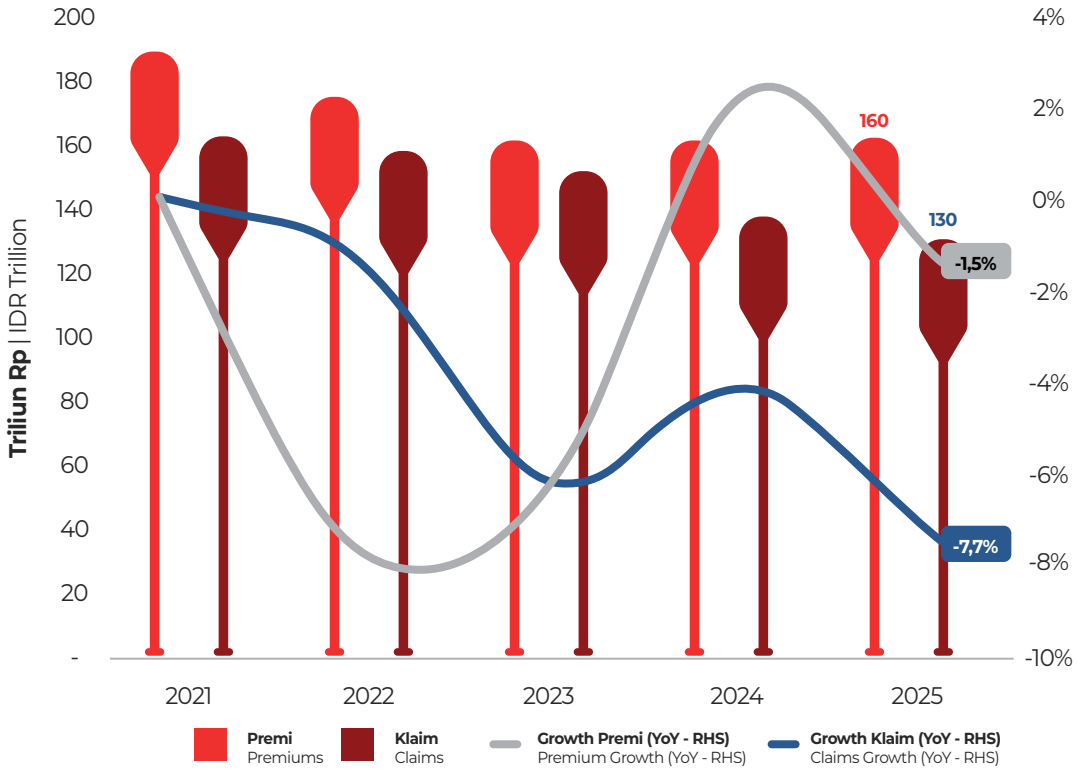
The life insurance industry experienced relatively moderate pressure in 2025. Gross premium income decreased by 1.52% (YoY) to IDR 160.22 trillion, prompted by a decline in premiums for investment-linked insurance products (PAYDI). In contrast, premiums for traditional products continued to record moderate growth, indicating a shift in public preference toward pure protection products amid financial market dynamics.

In terms of premium composition, the contraction in the life insurance industry's premiums was dominated by a 5.11% (YoY) decline in renewal premiums to IDR 67.24 trillion, as well as a slight 0.13% (YoY) contraction in single-premium policies. On the other hand, first-year premiums still recorded growth of 4.22% (YoY) to IDR 27.77 trillion. This structure indicates that the pressure on premiums is primarily due to weakening policy persistency, even though new business acquisition (first-year premiums) is still growing, though at a limited rate. The slowdown in premiums also aligns with a significant decline in the number of sales agents across all distribution channels, which fell by 15.44% (YoY) overall.

In terms of claims, the life insurance industry recorded a more significant decline of 7.71% (YoY) to IDR 130.40 trillion in 2025. This decline was primarily driven by a reduction in unit redemption claims for unit-linked products or PAYDI. More specifically, the largest contraction stemmed from surrender claims and partial withdrawals within unit redemption claims. This development can be interpreted as a positive signal because it reflects a growing tendency among policyholders to maintain their policies until maturity, thereby supporting improvements in the industry's persistency rates and portfolio quality. The decline in surrender claims and partial withdrawals also implies reduced short-term liquidity pressure and provides a more stable environment for asset-liability management (ALM). Meanwhile, claims from traditional products showed a slight increase, driven by a rise in claims from health insurance products.

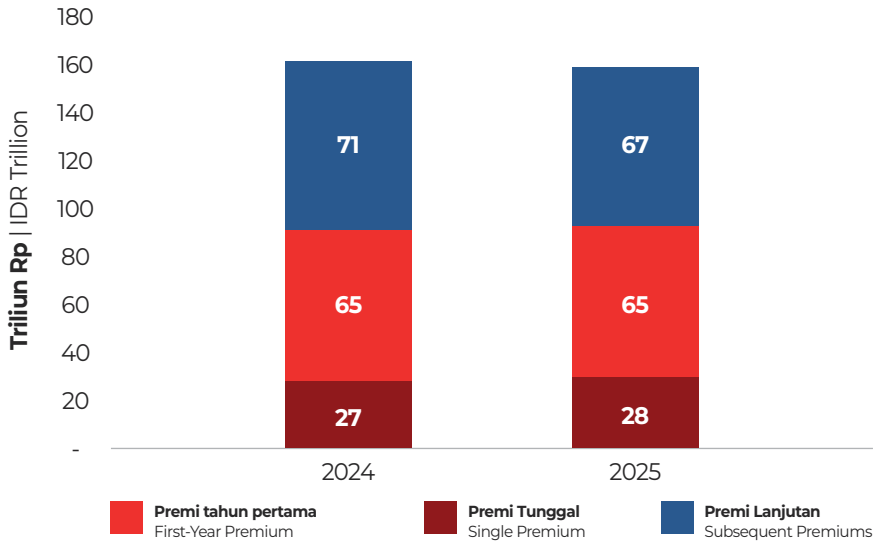
Insurance premium and claim performance is shown in the following figure:

Kinerja Premi dan Klaim Asuransi Jiwa
Life Insurance Premium and Claim Performance



Sumber: OJK
Source: OJK

Komposisi Premi Asuransi Jiwa
Composition of Life Insurance Premiums



Sumber: AAJI
Source: AAJI

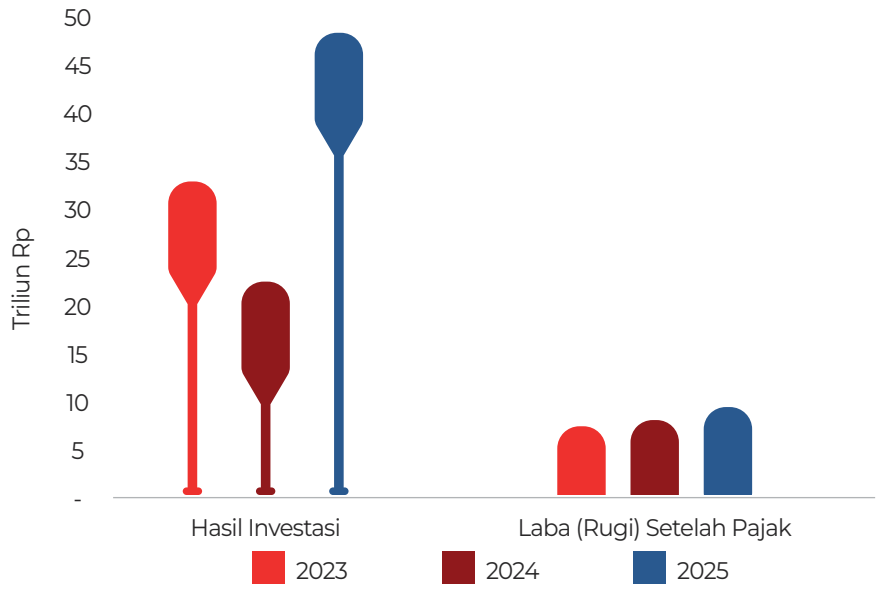
Meskipun pendapatan premi menunjukkan pelemahan, kinerja pendapatan industri asuransi jiwa pada 2025 masih terjaga karena terjadi peningkatan hasil investasi yang signifikan, yakni 111% (YoY). Dari sisi portofolio, alokasi investasi masih didominasi oleh obligasi sebesar 51% atau sebesar Rp287 triliun, diikuti saham sebesar 22% yaitu senilai Rp121 triliun, serta reksa dana sebesar 13% atau sekitar Rp70 triliun. Dominasi obligasi mencerminkan strategi

Although premium income showed a decline, the life insurance industry's revenue performance in 2025 remained stable due to a significant increase in investment returns of 111% (YoY). Regarding the investment portfolio, bonds still accounted for the largest share at 51%, or IDR 287 trillion, followed by stocks at 22%—amounting to IDR 121 trillion—and mutual funds at 13%, or approximately IDR 70 trillion. The dominance

pencocokan kewajiban (*asset–liability matching*) guna menjaga keselarasan durasi dan pola arus kas dengan liabilitas jangka panjang. Selain memberikan stabilitas arus kas dan kepastian imbal hasil, obligasi menjadi instrumen utama dalam menopang keseimbangan aset–liabilitas industri asuransi jiwa.

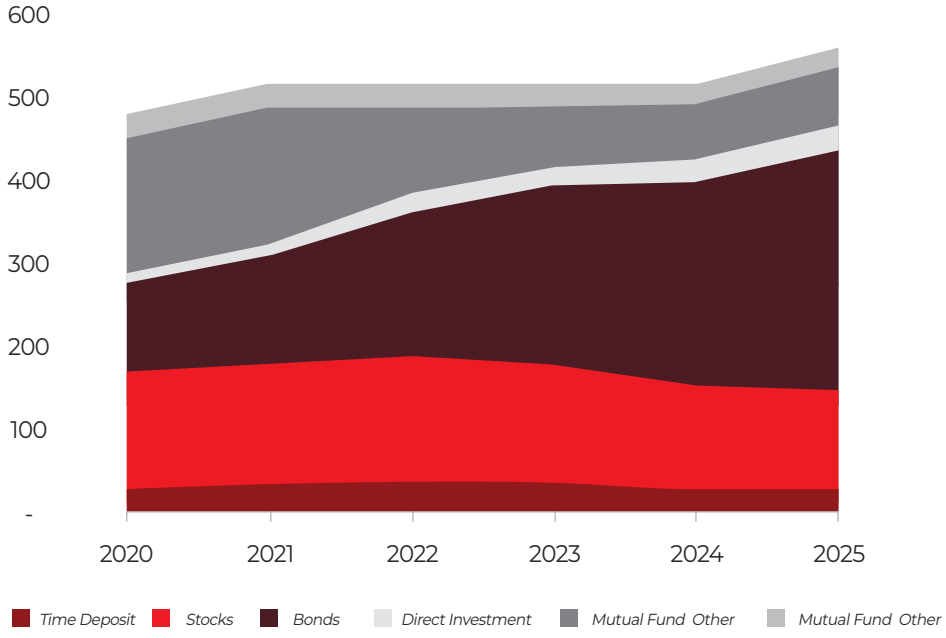
of bonds reflects an asset–liability matching strategy aimed at maintaining alignment between duration and cash flow patterns and long-term liabilities. In addition to providing cash flow stability and certainty of returns, bonds serve as the primary instrument in supporting the asset–liability balance of the life insurance industry.

Hasil Investasi dan Laba (Rugi) Asuransi Jiwa
Life Insurance Investment Returns and Profit (Loss)



Sumber: OJK

Alokasi Investasi Asuransi Jiwa
Life Insurance Investment Allocation



Sumber: OJK

Kombinasi antara meningkatnya hasil investasi dan menurunnya beban klaim menjadi faktor utama yang mendorong laba setelah pajak asuransi jiwa yang mencapai Rp10,02 triliun pada 2025, atau tumbuh 13,10% (YoY). Secara tren, dalam tiga tahun terakhir laba

The combination of rising investment returns and declining claims expenses is the main factor driving life insurance after-tax profits to reach IDR 10.02 trillion in 2025, representing a 13.10% (YoY) increase. Trends show that over the past three years, the life insurance

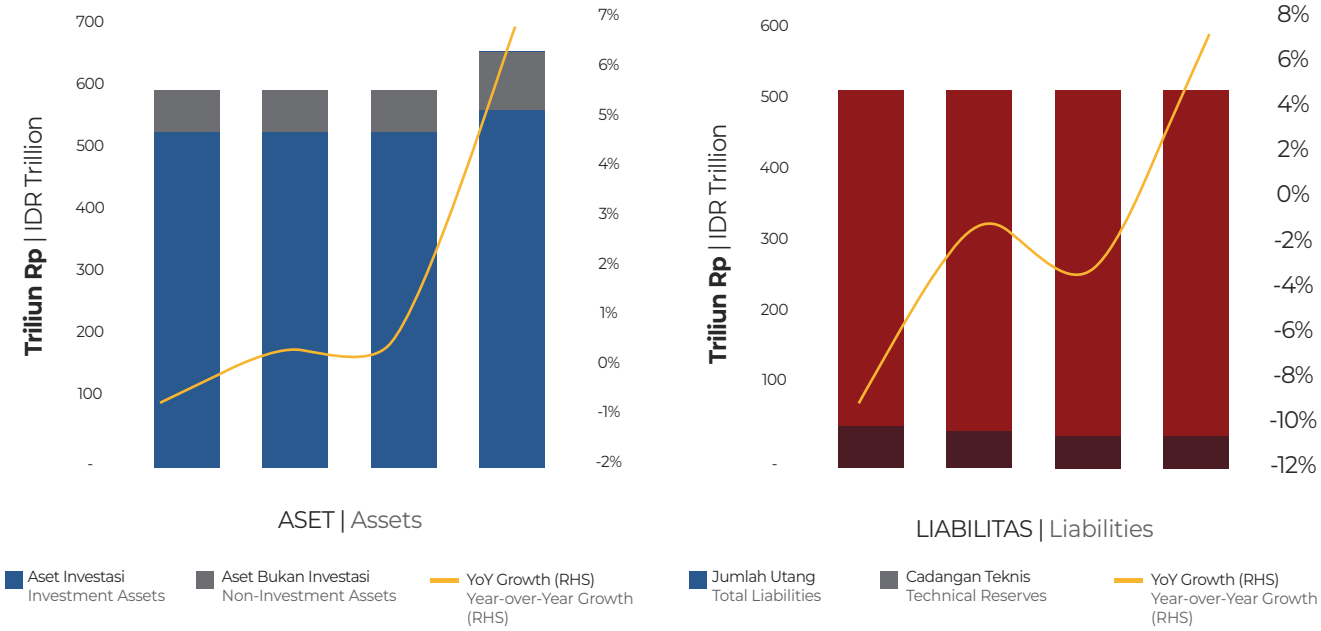
bersih setelah pajak industri asuransi jiwa menunjukkan perbaikan yang konsisten.

Dari sisi neraca, industri asuransi jiwa turut menunjukkan penguatan yang relatif moderat, dengan pertumbuhan aset sebesar 6,44% (YoY) menjadi Rp629,25 triliun pada 2025. Pada periode yang sama, liabilitas meningkat 6,26% (YoY) menjadi Rp482,64 triliun. Pertumbuhan aset yang sedikit lebih tinggi dibandingkan liabilitas mengindikasikan terjaganya posisi permodalan serta *buffer* solvabilitas industri

industry's net profit after tax has shown consistent improvement.

From a balance sheet perspective, the life insurance industry has also shown relatively moderate strengthening, with asset growth of 6.44% (YoY) to IDR 629.25 trillion in 2025. During the same period, liabilities increased by 6.26% (YoY) to IDR 482.64 trillion. The slightly higher growth in assets compared to liabilities indicates that the industry's capital position and solvency buffer remain sound.

Kinerja Aset dan Liabilitas Industri Asuransi Jiwa
Performance of Assets and Liabilities in the Life Insurance Industry



Sumber: OJK
Source: OJK

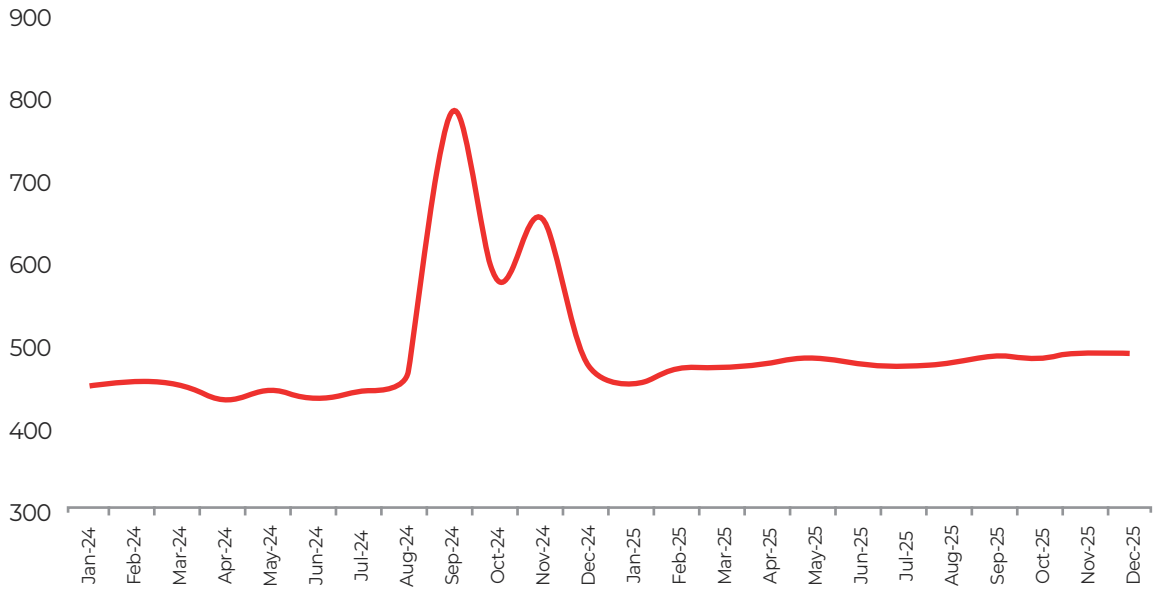
Peningkatan aset didorong oleh kenaikan aset investasi, khususnya pada alokasi obligasi, baik obligasi pemerintah maupun korporasi. Di sisi lain, pertumbuhan liabilitas dipengaruhi oleh meningkatnya cadangan teknis, yang mencakup cadangan premi, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan (CAPYBMP), serta cadangan klaim. Kenaikan cadangan teknis tersebut secara struktural mendorong kebutuhan penempatan dana pada instrumen berpendapatan tetap seperti obligasi.

Secara industri, tingkat kesehatan keuangan asuransi jiwa pada tahun 2025 sangat baik, tercermin dari rasio *risk based capital* (RBC) sebesar 490,72%. Angka ini jauh melampaui ketentuan minimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120,00%. Kondisi ini menunjukkan kuatnya kapasitas permodalan industri dalam menyerap risiko serta memenuhi kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis.

The increase in assets was driven by a rise in investment assets, particularly in bond allocations, including both government and corporate bonds. On the other hand, the growth in liabilities was influenced by an increase in technical reserves, which include premium reserves, unearned premium reserves (CAPYBMP), and claims reserves. This increase in technical reserves structurally drives the need to invest funds in fixed-income instruments such as bonds.

Industry-wide, the financial health of the life insurance sector in 2025 is excellent, as reflected by a risk-based capital (RBC) ratio of 490.72%. This figure far exceeds the minimum requirement set by the OJK of 120.00%. This condition demonstrates the industry's strong capital capacity to absorb risks and meet long-term obligations to policyholders.

Rasio Solvabilitas Industri Asuransi Jiwa
Solvency Ratio of the Life Insurance Industry



Sumber: OJK
Source: OJK

Dinamika industri asuransi Indonesia pada 2025 berada dalam penyesuaian struktural yang dipengaruhi oleh dinamika risiko, literasi pasar, dan arah kebijakan regulator. Dari sisi fundamental pasar, meskipun Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara umum, tingkat literasi (45,45%) dan inklusi (28,50%) perasuransian masih tetap relatif rendah, menunjukkan tantangan penetrasi dan masih lebarnya *protection gap* nasional. Di sisi regulasi, penundaan implementasi SEOJK 7/2025 serta rencana penyusunan POJK baru terkait penguatan ekosistem asuransi kesehatan mencerminkan upaya regulator untuk menghadirkan kerangka pengaturan yang lebih komprehensif, memperkuat tata kelola, dan menjaga keberlanjutan model bisnis industri. Sementara itu, dari perspektif risiko, banjir dan longsor di Sumatra pada akhir November 2025 berpotensi mendorong peningkatan klaim pada asuransi jiwa, kesehatan, serta lini properti dan kendaraan bermotor pada asuransi umum, termasuk potensi *surrender* atau *partial withdrawal* polis PAYDI untuk kebutuhan likuiditas pascabencana, yang berisiko menekan hasil *underwriting* (HWU), meningkatkan *loss ratio*, dan mendorong evaluasi strategi retensi risiko, reasuransi, serta penetapan premi, sehingga mempertegas urgensi penguatan manajemen risiko katastropik dan ketahanan industri secara keseluruhan.

The dynamics of Indonesia's insurance industry in 2025 are undergoing structural adjustments influenced by risk dynamics, market literacy, and the direction of regulatory policy. From a market fundamentals perspective, although the 2025 National Survey on Financial Literacy and Inclusion (SNLIK) recorded an overall increase in financial literacy and inclusion, the levels of insurance literacy (45.45%) and inclusion (28.50%) remain relatively low, indicating challenges in market penetration and a persistently wide national protection gap. On the regulatory level, the delay in implementing SEOJK 7/2025 and plans to draft a new POJK regarding the strengthening of the health insurance ecosystem reflect the regulator's efforts to establish a more comprehensive regulatory framework, strengthen governance, and ensure the sustainability of the industry's business model. Meanwhile, from a risk perspective, the floods and landslides in Sumatra in late November 2025 have the potential to drive an increase in claims for life and health insurance, as well as the property and motor vehicle lines in general insurance. This includes the potential for policy surrenders or partial withdrawals of PAYDI policies to meet post-disaster liquidity needs, which risks depressing underwriting results (HWU), increasing the loss ratio, and prompting a reassessment of risk retention strategies, reinsurance, and premium setting—thereby emphasizing the urgency of strengthening catastrophic risk management and the industry's overall resilience.

3. Industri Asuransi Wajib

Asuransi wajib merupakan salah satu sektor dalam industri asuransi di Indonesia yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk menjalankan program-program tertentu. Salah satu entitas anggota *holding* IFG yang bergerak di bidang

3. Compulsory Insurance Industry

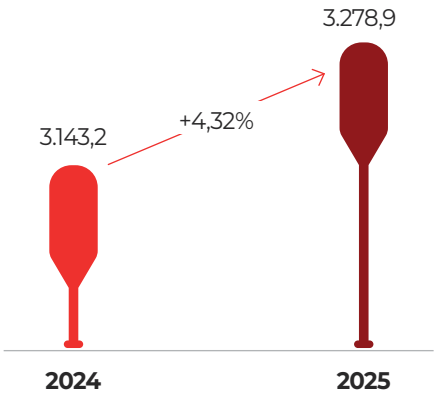
Compulsory insurance is a sector within the Indonesian insurance industry managed by government agencies or insurance companies designated to administer specific programs. One of the member entities of the IFG holding company that operates in the compulsory

asuransi wajib adalah Jasa Raharja. Jasa Raharja memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui dua program utama, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum (Iuran Wajib/IW) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan (Sumbangan Wajib/SW) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

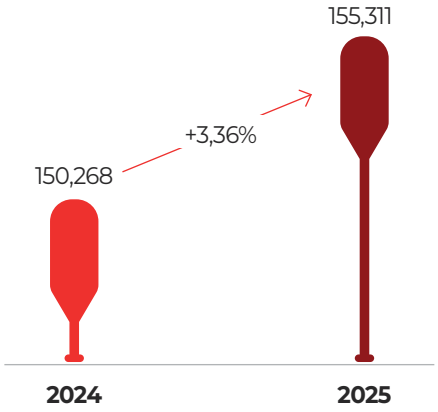
insurance sector is Jasa Raharja. Jasa Raharja plays a vital role in providing basic protection to the public through two main programs: passenger accident insurance for public transportation (Compulsory Premium/IW) , which is regulated by Law No. 33 of 1964 concerning the Mandatory Passenger Accident Insurance Fund, and road traffic accident insurance (Compulsory Contribution/SW), which is regulated by Law No. 34 of 1964 concerning the Mandatory Road Traffic Accident Insurance Fund.

Jumlah Santunan Jasa Raharja dan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Number of Compensation and Victims Receiving Compensation at Jasa Raharja

Jumlah Klaim | Total Claims
(Rp miliar) | (IDR billion)



Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Number of Road Traffic Accidents

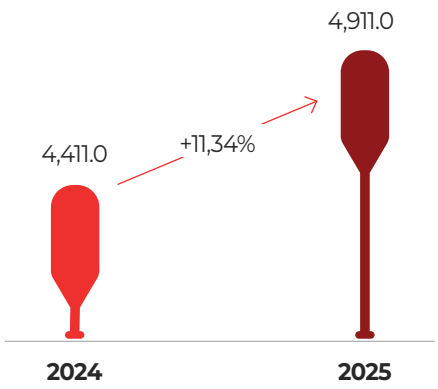


Sebagai bagian dari pilar keselamatan perjalanan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan, Jasa Raharja telah memberikan santunan sebesar Rp3,28 triliun di tahun 2025, meningkat 4,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,14 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas jalan yang meningkat 3,36%, yaitu dari 150.268 kecelakaan di tahun 2024 menjadi 155.311 kecelakaan di tahun 2025. Selain itu, jumlah korban kecelakaan juga meningkat, terutama korban luka-luka yang mencapai 220.412 korban atau meningkat 5,52% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 208.879 korban luka-luka.

As part of its road safety initiatives, particularly in providing assistance to accident victims, Jasa Raharja disbursed IDR 3.28 trillion in compensation in 2025, a 4.32% increase from the previous year's figure of IDR 3.14 trillion. This increase is in line with the 3.36% rise in the number of road traffic accidents, from 150,268 accidents in 2024 to 155,311 accidents in 2025. In addition, the number of accident victims also increased, particularly the number of injured victims, which reached 220,412—a 5.52% increase compared to the previous year's total of 208,879 injured victims.

Penerimaan SW di Jasa Raharja
Compulsory Contribution (SW) Revenue at Jasa Raharja

Sumbangan Wajib | Compulsory Contribution
(Rp miliar) | (IDR billion)

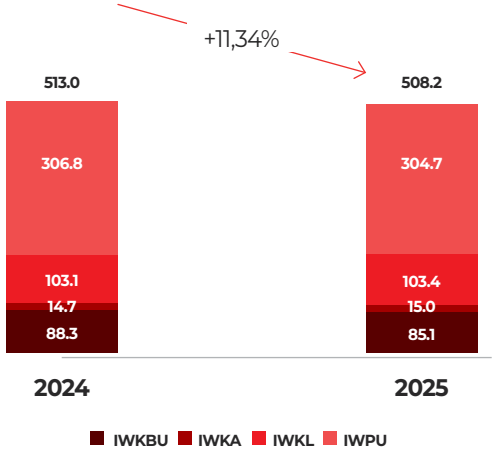


Di sisi lain, penerimaan SW pada tahun 2025 sebesar Rp4,91 triliun, meningkat 11,34% dari tahun 2024 sebesar Rp4,41 triliun. Pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 16 wilayah menjadi pendorong utama peningkatan *collection* premi ini. Selain berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan *collection*, program pemutihan PKB juga memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat secara lebih mudah dan transparan.

On the other hand, SW revenue in 2025 is projected at IDR 4.91 trillion, an increase of 11.34% from the 2024 figure of IDR 4.41 trillion. The implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) amnesty program in 16 regions was the main driver behind this increase in revenue collection. In addition to successfully achieving its goal of increasing revenue collection, the Motor Vehicle Tax (PKB) amnesty program also expanded the reach of services to the public in a more accessible and transparent manner.

Penerimaan IW di Jasa Raharja
Compulsory Premium (IW) Revenue at Jasa Raharja

Iuran Wajib | Compulsory Premiums
(Rp miliar) | (IDR billion)



Berbeda dengan penerimaan SW yang meningkat, penerimaan IW justru mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025. Penerimaan IW di tahun 2025 turun 0,92%, yaitu dari Rp513,0 miliar menjadi Rp508,2 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penerimaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) sebesar 3,7%, dari Rp88 miliar di 2024 menjadi Rp85 miliar. Adapun, penurunan penerimaan IWKBU terjadi karena Gojek dan kendaraan transportasi umum *online* lainnya berhenti melakukan pembayaran.

contrast to the increase in SW revenue, IW revenue actually experienced a slight decline in 2025. IW revenue in 2025 declined by 0.92%, from IDR 513.0 billion to IDR 508.2 billion. This decline was caused by a 3.7% drop in revenue from the Mandatory Fees for Public Motorized Vehicles (IWKBU), from IDR 88 billion in 2024 to IDR 85 billion. The decline in IWKBU revenue occurred because Gojek and other online public transportation services stopped making payments.

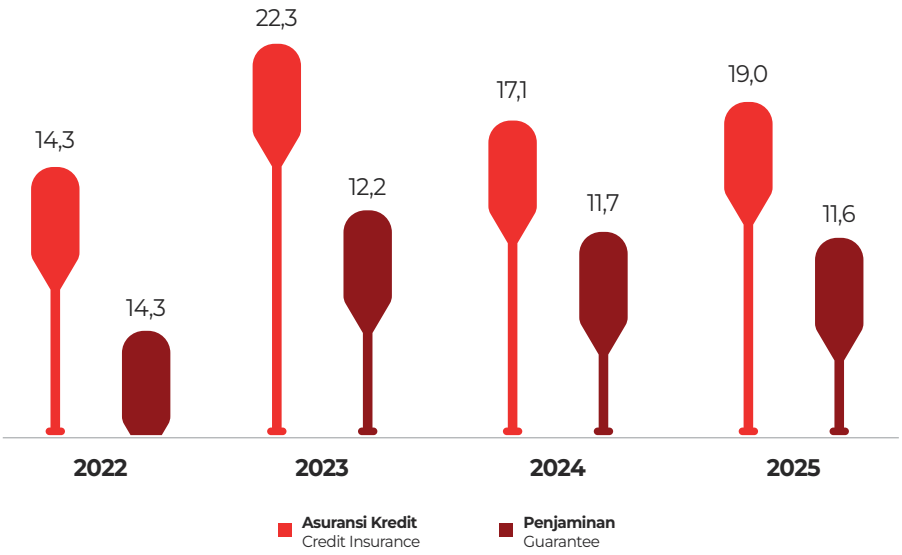
4. Industri Penjaminan dan Asuransi Kredit

Industri penjaminan mencatatkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp11,6 triliun di tahun 2025, turun 0,85% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp11,7 triliun. Namun, premi bruto industri asuransi kredit justru meningkat 11,21% di tahun 2025, mencapai Rp19 triliun.

4. Guarantee And Credit Insurance Industry

The credit insurance industry recorded credit insurance premiums of IDR 11.6 trillion in 2025, a decrease of 0.85% compared to 2024, when premiums reached IDR 11.7 trillion. However, gross premiums in the credit insurance industry actually increased by 11.21% in 2025, reaching IDR 19 trillion.

Premi Bruto Industri Asuransi Kredit dan Penjaminan (Rp triliun)
Gross Premiums of the Credit and Surety Insurance Industry (IDR Trillion)

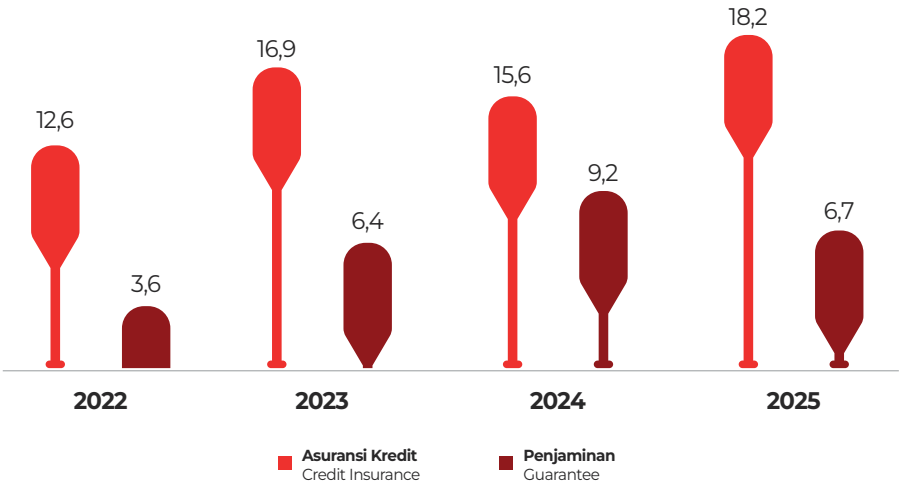


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK
Source: Indonesian Banking Statistics, OJK

Dari sisi klaim bruto, sepanjang tahun 2025, industri penjaminan juga mencatatkan penurunan sebesar 26,70%, yaitu dari Rp9,2 triliun di tahun 2024 menjadi Rp6,7 triliun. Sedangkan, di industri asuransi kredit, klaim bruto meningkat 16,51%, yaitu dari Rp15,6 triliun di tahun 2024 menjadi Rp18,2 triliun di tahun 2025. Secara keseluruhan, klaim bruto industri penjaminan dan asuransi kredit naik 15,37% per tahun dalam empat tahun terakhir (*compound annual growth rate*/CAGR 2022-2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun industri penjaminan mengalami penurunan klaim pada tahun 2025, tekanan risiko pada asuransi kredit masih perlu dicermati karena kenaikan klaim bruto dapat memengaruhi profitabilitas dan kebutuhan penguatan manajemen risiko portofolio.

In terms of gross claims, throughout 2025, the surety insurance industry also recorded a 26.70% decline, from IDR 9.2 trillion in 2024 to IDR 6.7 trillion. In the credit insurance industry, however, gross claims increased by 16.51%, from IDR 15.6 trillion in 2024 to IDR 18.2 trillion in 2025. Overall, gross claims in the surety and credit insurance industries rose by 15.37% annually over the past four years (compound annual growth rate/CAGR 2022–2025). This trend indicates that although the surety industry experienced a decline in claims in 2025, risk pressures in credit insurance still warrant close attention, as the rise in gross claims could impact profitability and necessitate strengthening of portfolio risk management.

Klaim Bruto Industri Penjaminan dan Asuransi Kredit
Gross Claims of Guarantee and Credit Insurance Industry



Sumber: AAUI dan OJK

5. Industri Pasar Modal dan Investasi

Di industri pasar modal, terdapat peningkatan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu dari Rp12,85 triliun di akhir tahun 2024 menjadi senilai Rp18,06 triliun di akhir tahun 2025. Peningkatan transaksi ini didorong oleh aksi jual/beli asing yang meningkat seiring dengan pemberlakuan tarif global serta sentimen di dalam pasar Indonesia. Sementara di pasar obligasi pemerintah, RNTH juga meningkat di tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024, yaitu dari Rp49,89 triliun menjadi Rp57,52 triliun. Begitu juga dengan RNTH obligasi korporasi, meningkat dari Rp2,48 triliun menjadi Rp4,38 triliun.

Sepanjang tahun 2025, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menunjukkan kinerja yang semakin solid dengan total penyaluran kumulatif mencapai Rp58,50 triliun, meningkat sebesar Rp12,19 triliun atau 26,33% dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp46,30 triliun. Peningkatan tersebut diikuti oleh pertumbuhan jumlah debitur menjadi 13,93 juta pelaku usaha ultra mikro, bertambah 2,17 juta debitur atau 18,47% secara tahunan. Dari sisi total akad, realisasinya mencapai 14,01 juta akad, mencerminkan ekspansi pembiayaan yang konsisten, baik dari sisi volume maupun nominal. Program UMi tetap menyasar segmen usaha ultra mikro yang belum terlayani oleh perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fokus pada pembiayaan sektor produktif dan peningkatan inklusi keuangan. Program ini telah menjangkau 510 wilayah di Indonesia dengan dukungan 114 lembaga penyalur, yang terdiri dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB), melalui skema langsung, tidak langsung, maupun *linkage*.

Di industri pengelolaan dana, total AUM reksa dana (termasuk kontrak pengelolaan dana/KPD) seluruh perusahaan manajer investasi di Indonesia per akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp1.041,18 triliun, meningkat sebesar 24,71% dibandingkan akhir tahun 2024. Peningkatan AUM terbesar terjadi di jenis pendapatan tetap dan pasar uang, secara berurutan masing-masing sebesar Rp101,85 triliun dan Rp54,60 triliun.

Adapun, di pasar perkantoran, tingkat hunian gedung *(occupancy rate)* perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,00%, tumbuh 1,00% dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan di luar segmen CBD, *occupancy rate* tercatat sebesar 70,00%. Grup IFG berkontribusi sebesar 36% *occupancy rate* pada Gedung Graha CIMB Niaga.

5. Capital Market and Investment Industry

In the capital markets sector, there was an increase in the Average Daily Transaction Value (RNTH) on the Indonesia Stock Exchange (IDX), rising from IDR 12.85 trillion at the end of 2024 to IDR 18.06 trillion at the end of 2025. This increase in trading volume was driven by rising foreign buying and selling activity in tandem with the implementation of global tariffs and sentiment within the Indonesian market. Meanwhile, in the government bond market, the RNTH also increased in 2025 compared to 2024, rising from IDR 49.89 trillion to IDR 57.52 trillion. Similarly, the RNTH for corporate bonds increased from IDR 2.48 trillion to IDR 4.38 trillion.

Throughout 2025, the Ultra-Micro (UMi) financing program managed by the Government Investment Center (PIP) demonstrated increasingly solid performance, with cumulative disbursements reaching IDR 58.50 trillion—an increase of IDR 12.19 trillion, or 26.33%, compared to the 2024 figure of IDR 46.30 trillion. This increase was accompanied by growth in the number of borrowers to 13.93 million ultra-micro business owners, an increase of 2.17 million borrowers, or 18.47%, year-over-year. In terms of total loan agreements, the number reached 14.01 million, reflecting consistent financing expansion in both volume and nominal value. The UMi Program continues to target the ultra-micro business segment not yet served by banks through the People's Business Credit (KUR) scheme, with a focus on financing productive sectors and enhancing financial inclusion. This program has reached 510 regions in Indonesia with the support of 114 disbursing institutions, consisting of non-bank financial institutions (LKBB), through direct, indirect, and linkage schemes.

In the asset management industry, the total AUM of mutual funds (including asset management contracts/KPD) for all investment management companies in Indonesia as of the end of 2025 stood at IDR 1,041.18 trillion, an increase of 24.71% compared to the end of 2024. The largest increases in AUM occurred in fixed-income and money market funds, amounting to IDR 101.85 trillion and IDR 54.60 trillion, respectively.

Meanwhile, in the office market, the occupancy rate for office buildings in Jakarta's Central Business District (CBD) in 2025 is projected to be 75.00%, an increase of 1.00% compared to 2024. Outside the CBD segment, the occupancy rate is projected to be 70.00%. The IFG Group contributed 36% to the occupancy rate at the Graha CIMB Niaga Building.

RENCANA STRATEGIS 2025
2025 STRATEGIC PLAN



Sebagai tahun awal dalam peta jalan transformasi tersebut, tahun 2025 merupakan fase penting yang akan menjadi bekal utama perusahaan selama lima tahun ke depan. Fokus kerja tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat fundamental bisnis perusahaan dengan menerapkan praktik bisnis yang mengacu pada *best practices,* peningkatan kapabilitas perusahaan, serta transformasi organisasi dan budaya untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja unggul *(high-performing organization).*

Sejalan dengan tema tersebut, IFG telah memetakan 20 program strategis utama, dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori utama, yang selaras dengan arah strategi perusahaan dan arahan pemegang saham Seri A sebagai berikut:

Proyek Korporasi terkait Optimasi Bisnis dan Operasional:

1. Pengoptimalan Program Penugasan Pemerintah;
2. Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan;
3. *Key Account Management* (KAM) dan Penguatan Kapasitas Bisnis Asuransi (*Joint Underwriting*, Reasuransi, dan *Risk Management Partner*);
4. Peningkatan dan Penguatan *Distribution Channel* (Digital, B2B2C, G2C);
5. Persiapan untuk masuk ke dalam Pasar MTPL;

As the first year of this transformation roadmap, the year 2025 represents an important phase that will serve as the company's primary foundation for the next five years. The focus of work in 2025 is aimed at strengthening the company's business fundamentals by implementing business practices aligned with best practices, enhancing the company's capabilities, and transforming the organization and its culture to create a high-performing organization.

In line with this theme, IFG has mapped out 20 key strategic programs, grouped into four main categories, which align with the company's strategic direction and the guidance of Series A shareholders as follows:

Corporate Projects Related to Business and Operational Optimization:

1. Optimization of Government Assignment Programs;
2. Development of the Guarantee Information System;
3. Key Account Management (KAM) and Strengthening of Insurance Business Capabilities (Joint Underwriting, Reinsurance, and Risk Management Partnerships);
4. Improvement and Strengthening of Distribution Channels (Digital, B2B2C, G2C);
5. Preparation for Entry into the MTPL Market;

6. Digitalisasi Proses Bisnis;
7. Perbaikan layanan Asuransi Kesehatan untuk meningkatkan *customer experience* dan menurunkan klaim rasio (seperti melalui *telemedicine*);
8. Optimalisasi/Konsolidasi Bisnis Syariah dan Penjaminan di Ekosistem IFG;
9. Restrukturisasi dan Penyehatan Bisnis Reasuransi; dan
10. Optimalisasi Bisnis Pasar Modal dan Investasi (CMI)

Proyek Korporasi terkait Kepatuhan:
1. Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Keuangan;
2. Implementasi dan Optimalisasi Penerapan PSAK 117;
3. Pengembangan dan Implementasi ERP; dan
4. Program *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Proyek Korporasi terkait Transformasi Organisasi:
1. *Purpose Activation and Culture Transformation*;
2. *Talent Management and Development*;
3. Tindak Lanjut Kajian Brand Arsitektur; dan
4. Implementasi *Parenting Governance*.

Proyek Korporasi terkait Sinergi antar anggota *Holding*:
1. Implementasi *Shared Services*; dan
2. Optimalisasi Aset dan Investasi secara terintegrasi.

INISIATIF STRATEGIS 2025

Sebagai kelanjutan dari rencana strategis 2025, Perusahaan menetapkan inisiatif strategis untuk tahun 2025 yang disusun secara sistematis. Masing-masing inisiatif strategis merepresentasikan fokus transformasi yang saling terintegrasi untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan daya saing, serta memastikan implementasi *best practices* secara konsisten di seluruh entitas dalam ekosistem IFG. Berikut penjabarannya:

1. *Culture Transformation*
   Inisiasi aktivasi purpose dan transformasi budaya untuk mendorong IFG menjadi perusahaan dengan budaya kinerja unggul.
2. *Customer Centricity*
   - Pemanfaatan One by IFG sebagai solusi *one-stop-shop* untuk menciptakan ekosistem terpadu dan efisien yang mendukung sinergi lintas afiliasi IFG serta mendukung pemenuhan kebutuhan pelanggan.
   - Pembentukan *comprehensive customer function* di tingkat *holding* untuk menanamkan nilai *customer-centricity* di IFG serta mendorong *customer outcomes*.
3. *Marketing Culture*
   Mengembangkan tim kuat yang dilengkapi dengan pola pikir pemasaran dan kapabilitas yang *robust* untuk memberikan proposisi IFG yang solid.
4. *Innovation Capabilities*
   Membentuk lingkungan yang menumbuhkan semangat dan pola pikir inovasi didukung model inovasi *customer-centric*, menghubungkan strategi inovasi ke strategi perusahaan dan transformasi budaya secara *seamless*.

6. Digitalization of Business Processes;
7. Improvement of Health Insurance Services to enhance the customer experience and reduce the claims ratio (e.g., through telemedicine);
8. Optimization/Consolidation of Sharia and Guarantee Businesses within the IFG Ecosystem;
9. Restructuring and Revitalization of Reinsurance Business; and
10. Optimization of the Capital Markets and Investment (CMI) Business

Corporate Projects Related to Compliance:
1. Improvement of Corporate Governance and Financial Management;
2. Implementation and Optimization of PSAK 117;
3. Development and Implementation of ERP; and
4. Environmental, Social, and Governance (ESG) Program.

Corporate Projects Related to Organizational Transformation:
1. Purpose Activation and Culture Transformation;
2. Talent Management and Development;
3. Follow-up on the Brand Architecture Study; and
4. Implementation of Parenting Governance.

Corporate Projects Related to Synergy Among Holding Company Members:
1. Implementation of Shared Services; and
2. Integrated Optimization of Assets and Investments.

2025 STRATEGIC INITIATIVES

As a continuation of the 2025 strategic plan, the Company has established systematically structured strategic initiatives for 2025. Each strategic initiative represents an integrated transformation focus aimed at strengthening business fundamentals, enhancing competitiveness, and ensuring the consistent implementation of best practices across all entities within the IFG ecosystem. The details are as follows:

1. Culture Transformation
   Initiating purpose activation and cultural transformation to drive IFG toward becoming a company with a culture of excellence in performance.
2. Customer Centricity
   - Leveraging "One by IFG" as a one-stop-shop solution to create an integrated and efficient ecosystem that supports synergy across IFG affiliates and helps meet customer needs.
   - Establishing a comprehensive customer function at the holding company level to instill customer-centric values within IFG and drive customer outcomes.
3. Marketing Culture
   Developing a strong team equipped with a marketing mindset and robust capabilities to deliver a solid IFG value proposition.
4. Innovation Capabilities
   Creating an environment that fosters a spirit and mindset of innovation, supported by a customer-centric innovation model, and seamlessly aligning innovation strategy with corporate strategy and cultural transformation.

5. *Optimize Corporate Holding Structure & Affiliate Portfolio*
   - Restrukturisasi portofolio Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi terkait dengan *roadmap* penjaminan OJK, kebutuhan modal, penambahan aset baru, dan pengurangan duplikasi.
   - Ekspansi dan konsolidasi afiliasi asuransi dalam ekosistem IFG dengan mengevaluasi keterlibatan BUMN asuransi lain dengan IFG.
   - Konsolidasi entitas Syariah (termasuk Penjaminan Syariah dan Asum Syariah) untuk meningkatkan profitabilitas, didukung oleh *feasibility study* dan *business planning* yang *prudent*.
6. *Technical Excellence in* UW*, Claims, Pricing, Reserving & Reinsurance*
   - Peningkatan *Technical Excellence* pada UW, *claim, pricing, reserving*, dan *reinsurance* dengan meningkatkan kapabilitas internal dan memanfaatkan dukungan eksternal.
   - Rasionalisasi bisnis reasuransi dan reguarantee, serta mendorong pertumbuhan bisnis melalui peningkatan kapasitas reasuransi dan koasuransi.
7. *Strengthen & Digitize Channel Play*
   - Pengoptimalan *channel agency* dengan model bisnis yang berorientasi pada peningkatan produktivitas.
   - Percepatan pertumbuhan *channel* korporat dan *worksite* dalam integrasi lintas produk asuransi umum, jiwa, dan kesehatan.
   - Pengembangan *competitive advantage partnership banca* baik dengan mitra eksisting maupun mitra potensial baru.
   - Penciptaan kapabilitas digital, termasuk rencana pengembangan sebagai pendukung *channel* bisnis lainnya.
   - Pengoptimalan penjualan di cabang.
8. *Strengthen* CMI *Core Capabilities*
   - Penguatan kapabilitas IB *advisory* yang meliputi aspek manajemen risiko.
   - Pengembangan kapabilitas subrogasi yang meliputi penagihan dan aspek legal.
   - Pengembangan kapabilitas *direct lending* UMKM.
9. *Reshape Industries*
   Dimulai dari industri prioritas dan reshaping industri dengan mendorong proposisi dan kapabilitas unggul.
10. *Building Synergy Engine*
    Penciptaan mekanisme sinergi *holding* untuk mendorong kolaborasi antar Anak Perusahaan mencakup fungsi organisasi, tata kelola, proses, KPI, hingga budaya sinergi.
11. *Establish Best-in-Class Health Protection*
    Pengembangan proposisi produk kesehatan yang best-*in-class*.
12. *Expand and Optimize Sharia Business*
    Akuisisi/pembentukan entitas reasuransi jiwa syariah.
13. Retail DNA in D2C and B2B2C
    Peningkatan *business insight* dan fondasi teknologi untuk menguasai model D2C, B2B2C, dan embedded insurance guna membuka potensi pasar ritel.

5. Optimize Corporate Holding Structure & Affiliate Portfolio
   - Restructuring the portfolio of subsidiaries and affiliated companies in line with the OJK's guarantee roadmap, capital requirements, the addition of new assets, and the reduction of duplication.
   - Expanding and consolidating insurance affiliates within the IFG ecosystem by evaluating the involvement of other state-owned insurance companies with IFG.
   - Consolidate Sharia entities (including Sharia Guarantee and Sharia Life Insurance) to improve profitability, supported by a feasibility study and prudent business planning.
6. Technical Excellence in Underwriting, Claims, Pricing, Reserving & Reinsurance
   - Enhancing technical excellence in underwriting, claims, pricing, reserving, and reinsurance by strengthening internal capabilities and leveraging external support.
   - Rationalizing the reinsurance and reguarantee businesses, and drive business growth by increasing reinsurance and co-insurance capacity.
7. Strengthening & Digitizing Channel Play
   - Optimizing the agency channel with a business model focused on increasing productivity.
   - Accelerating the growth of the corporate and worksite channels through cross-product integration of general, life, and health insurance.
   - Developing competitive advantages through banca partnerships with both existing and potential new partners.
   - Building digital capabilities, including development plans to support other business channels.
   - Optimizing sales at branch offices.
8. Strengthen CMI Core Capabilities
   - Strengthening investment banking (IB) advisory capabilities, including risk management aspects.
   - Developing subrogation capabilities, including collections and legal aspects.
   - Developing direct lending capabilities for MSMEs.
9. Reshape Industries
   Starting with priority industries and reshaping them by promoting superior propositions and capabilities.
10. Building Synergy Engine
    The creation of a holding company synergy mechanism to foster collaboration among subsidiaries encompasses organizational functions, governance, processes, KPIs, and a culture of synergy.
11. Establish Best-in-Class Health Protection
    Development of best-in-class health product propositions.
12. Expand and Optimize Sharia Business
    Acquisition/establishment of a sharia life reinsurance entity.
13. Retail DNA in D2C and B2B2C
    Enhancing business insights and technological foundations to master the D2C, B2B2C, and embedded insurance models in order to unlock the potential of the retail market.

14. *Early Mover into* MTPL
    Persiapan untuk memasuki dan memenangkan pasar MTPL.
15. *Grab Market* M&A *Opportunity*
    Pemanfaatan peluang M&A secara horizontal dan vertikal sepanjang *value chain* asuransi, termasuk potensi M&A untuk manajemen aset dan peluang bisnis lainnya.

16. *Innovative* CMI *Offerings*
    Pengembangan proposisi produk baru, termasuk *no-frills broker* dan solusi inovatif lainnya.
17. *Strengthen Financing Capabilities*
    Optimalisasi kapabilitas pembiayaan melalui strategi pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang.
18. *Reshape Investment Landscape*
    Optimalisasi fungsi keuangan sebagai *investor relations* dan penguatan sinergi Grup untuk meningkatkan pendapatan dari portofolio investasi Grup.
19. *Streamline Liquidity Management*
    Optimalisasi manajemen likuiditas melalui *notional pooling hybrid* dan penguatan tata kelola investasi adaptif sebagai kunci *agility*.
20. *Governance* & *Structure*
    Implementasi model *parenting governance* untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya *holding*, serta peningkatan kapabilitas ESG dan integrasi KPI guna memastikan keselarasan tujuan dan nilai lintas entitas.

21. *Centralisation and Shared Services*
    Penguatan model operasi IFG dengan memusatkan *core services* dan menyederhanakan *service delivery* guna meningkatkan efisiensi, termasuk sentralisasi fungsi *enablers* melalui model *shared services* dan penerapan *Centre of Excellence Hubs*.
22. *Risk Management*
    Review kapabilitas *risk* secara menyeluruh dengan penguatan operating model manajemen risiko.

23. *Performance & People*
    Penguatan *talent strategy*, termasuk pengembangan, *exit management*, serta kompetensi yang selaras dengan arah strategis IFG.
24. *Transform Finance Function* & *Establish* ICOR
    Penerapan praktik perencanaan bisnis terintegrasi dan *robust*, implementasi PSAK 117 dan *change management*, penguatan fungsi FP&A sebagai penggerak utama kinerja organisasi, serta integrasi MIS untuk mengkonsolidasikan seluruh sumber data keuangan dan standar akuntansi.

25. *Establish and Strengthen Digital Capabilities*
    Peningkatan *digital readiness* IFG dan Anak Perusahaan melalui akselerasi pengembangan proses, *tools*, dan infrastruktur digital.

14. Early Mover into MTPL
    Preparing to enter and succeed in the MTPL market.

15. Grab Market M&A Opportunity
    Capitalizing on horizontal and vertical M&A opportunities across the insurance value chain, including potential M&A for asset management and other business opportunities.
16. Innovative CMI Offerings
    Development of new product offerings, including no-frills brokers and other innovative solutions.
17. Strengthen Financing Capabilities
    Optimizing financing capabilities through short-term and/or long-term funding strategies.
18. Reshape Investment Landscape
    Optimizing the financial function in the area of investor relations and strengthening Group synergies to increase revenue from the Group's investment portfolio.
19. Streamline Liquidity Management
    Optimizing liquidity management through hybrid notional pooling and strengthening adaptive investment governance as the key to agility.
20. Governance & Structure
    Implementation of a parenting governance model to leverage the holding company's expertise and resources, as well as the enhancement of ESG capabilities and the integration of KPIs to ensure alignment of objectives and values across entities.
21. Centralisation and Shared Services
    Strengthening IFG's operating model by consolidating core services and streamlining service delivery to improve efficiency, including the centralization of enabler functions through a shared services model and the implementation of Centers of Excellence Hubs.
22. Risk Management
    Comprehensive review of risk capabilities through the strengthening of the risk management operating model.
23. Performance & People
    Strengthening of the talent strategy, including development, exit management, and competencies aligned with IFG's strategic direction.
24. Transform Finance Function & Establish ICOR
    Implementation of integrated and robust business planning practices, adoption of PSAK 117 and change management, strengthening the FP&A function as the primary driver of organizational performance, and integration of MIS to consolidate all financial data sources and accounting standards.
25. Establish and Strengthen Digital Capabilities
    Enhancing the digital readiness of IFG and its Subsidiaries through the accelerated development of digital processes, tools, and infrastructure.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT

STRATEGI PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

1. **Asuransi Umum dan Penjaminan**
   Pada tahun 2025, IFG menempati peringkat kedua di sektor industri asuransi umum dengan pangsa pasar sebesar 9,02%. Peringkat ini berada di bawah grup Sinarmas, yang unggul melalui lini bisnis asuransi kredit dan asuransi harta benda. IFG berkomitmen untuk memperkuat posisinya di industri asuransi umum melalui berbagai strategi, termasuk mempercepat pertumbuhan bisnis nonpenugasan pemerintah secara *profitable* dan *sustainable*, di antaranya dengan meningkatkan bisnis di segmen SME dan ritel melalui pengembangan kemitraan B2B2C, serta mengoptimalkan kapasitas produk asuransi umum di grup IFG sebagai bagian strategi *joint capacity* untuk meningkatkan kapasitas dan *bargaining power* grup IFG untuk meningkatkan pangsa pasar.

   IFG tetap mempertahankan posisinya sebagai *market leader* di sejumlah lini bisnis utama. Pada lini bisnis *suretyship*, Jasaraharja Putera menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 29,97%, diikuti oleh Askrindo dengan pangsa pasar sebesar 29,87%. Di sektor minyak dan gas, Jasindo mendominasi industri *onshore* dengan pangsa pasar sebesar 39,37%, serta menempati posisi kedua di industri *offshore* dengan pangsa pasar sebesar 35,20%.

   Pada lini bisnis asuransi kredit, Askrindo berada pada posisi kedua dengan pangsa pasar sebesar 17,29%, di bawah Simas Insurtech yang menguasai 40,88% pangsa pasar. Meskipun IFG berada di peringkat kedua pada lini ini dan tertinggal dari grup Sinarmas, pertumbuhan Sinarmas didorong oleh fokus pada segmen dan model bisnis tertentu yang berada di luar ruang lingkup lini bisnis strategis yang dapat dikembangkan oleh IFG, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan daya saing IFG secara fundamental.

   Berikut peringkat 10 besar industri asuransi umum berdasarkan penerimaan premi bruto pada tahun 2025:

MARKETING AND MARKET SHARE STRATEGIES

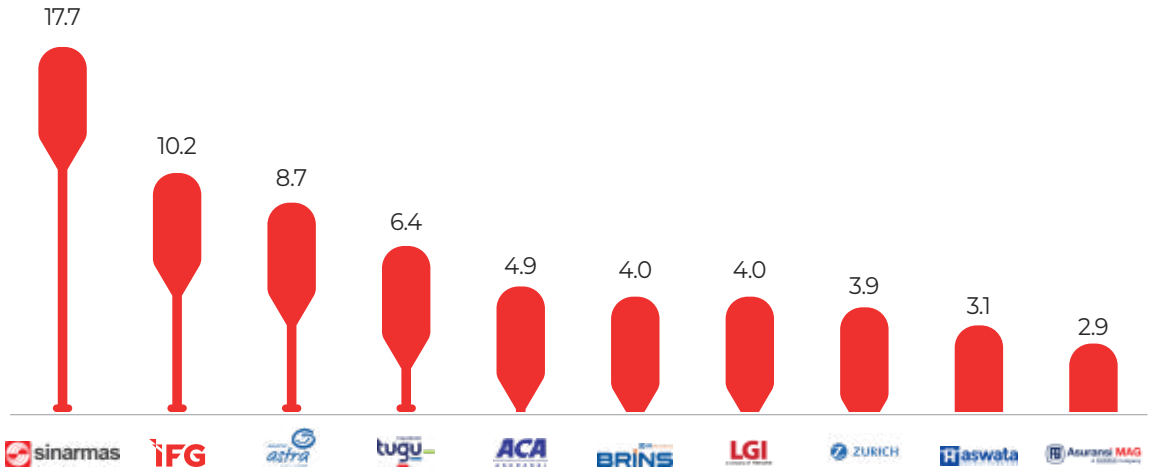
1. **General Insurance and Guarantee**
   In 2025, IFG ranked second in the general insurance industry with a market share of 9.02%. The ranking was just below the Sinarmas Group, which led the sector through its credit insurance and property insurance business lines. IFG is committed to strengthening its position in the general insurance industry through various strategies, including accelerating the profitable and sustainable growth of non-government-mandated business—such as by expanding operations in the SME and retail segments through the development of B2B2C partnerships—and optimizing the general insurance product capacity within the IFG Group as part of a joint capacity strategy to enhance the Group's capacity and bargaining power to increase its market share.

   IFG continues to maintain its position as the market leader in several key business lines. In the suretyship business line, Jasaraharja Putera is the market leader with a market share of 29.97%, followed by Askrindo with a market share of 29.87%. In the oil and gas sector, Jasindo dominates the onshore industry with a market share of 39.37% and is in second place in the offshore industry with a market share of 35.20%.

   In the credit insurance business line, Askrindo ranks second with a market share of 17.29%, behind Simas Insurtech, which holds a 40.88% market share. Although IFG ranked second in this segment and was behind the Sinarmas Group, Sinarmas's growth was driven by a focus on specific segments and business models that exceeded the scope of strategic business lines that IFG could develop; therefore, this does not fully reflect a fundamental decline in IFG's competitiveness.

   The following is the top 10 general insurance industry based on gross premium income in 2025:

Peringkat 10 Besar Perusahaan Asuransi Umum Tahun 2025
Top 10 General Insurance Companies in 2025



Sumber: AAUI
Source: AAUI

Catatan:
Grup Sinarmas terdiri dari Asuransi Sinarmas dan Sinarmas Insurtech;
Grup IFG terdiri dari Jasindo, Jasaraharja Putera, dan Askrindo.
Note:
The Sinarmas Group consists of Sinarmas Insurance and Sinarmas Insurtech;
The IFG Group consists of Jasindo, Jasaraharja Putera, and Askrindo.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), industri asuransi umum pada tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan premi sebesar 4,76% secara YoY, yaitu dari Rp107,68 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp112,81 triliun pada tahun 2025.

Walaupun secara industri terjadi peningkatan, IFG secara konsolidasi mengalami penurunan premi bruto sebesar 7,60% secara YoY, yakni dari Rp11,00 triliun menjadi Rp10,25 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penghentian bisnis asuransi kredit Kupra/Kupedes BRI sebagai dampak dari kinerja yang kurang baik. Dibandingkan tahun lalu, perolehan premi bruto asuransi kredit turun 33,00%, dari Rp4,95 triliun di tahun 2024 menjadi Rp3,32 triliun di tahun 2025. Meski demikian, asuransi kredit tetap menjadi penyumbang premi terbesar dibandingkan dengan lini bisnis lainnya.

Gambar di bawah memberikan gambaran perbandingan pendapatan premi bruto IFG dibandingkan dengan industri asuransi umum:

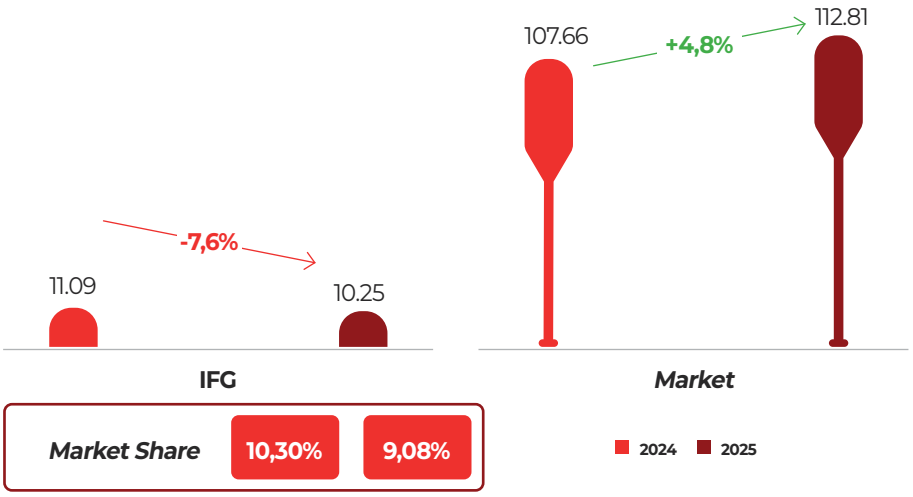
According to data from the Indonesian General Insurance Association (AAUI), the general insurance industry recorded a 4.76% YoY premium growth in 2025, rising from IDR 107.68 trillion in 2024 to IDR 112.81 trillion in 2025.

Although the industry as a whole saw an increase, IFG on a consolidated basis experienced a 7.60% year-on-year decline in gross premiums, from IDR 11.00 trillion to IDR 10.25 trillion. This decline was caused by the discontinuation of BRI's People's Rural Business Credit (Kupra) and Rural General Credit (Kupedes) credit insurance business due to poor performance. Compared to last year, gross premium income from credit insurance declined by 33.00%, from IDR 4.95 trillion in 2024 to IDR 3.32 trillion in 2025. Nevertheless, credit insurance remains the largest contributor to premiums compared to other business lines.

The figure below provides a comparison of IFG's gross premium income relative to the general insurance industry:

Perbandingan Premi Bruto IFG dan Industri
Comparison of IFG's Gross Premiums and the Industry

IFG vs Industri Asuransi Umum | IFG vs. the General Insurance Industry
(Rp triliun) | (IDR Trillion)

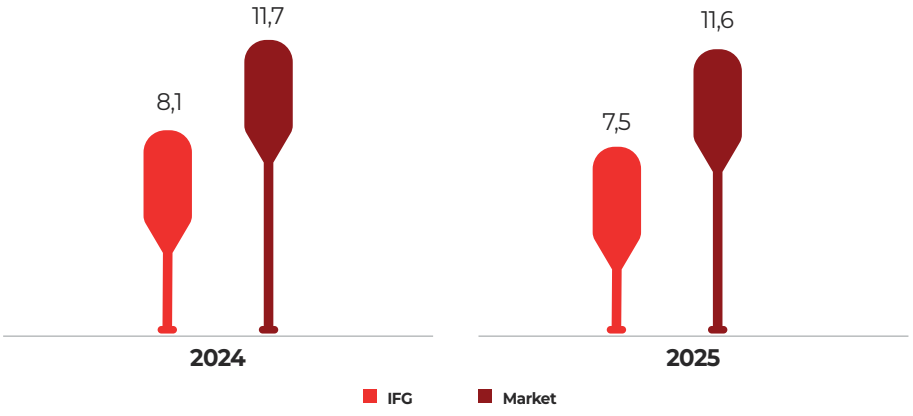


Sumber: AAUI dan IFG
Source: AAUI and IFG

Di bisnis penjaminan, walaupun mencatatkan penurunan imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar 7,59% secara YoY, dari Rp8,10 triliun menjadi 7,49 triliun, Jamkrindo tetap menjadi perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 64,42% di tahun 2025. Sebagai upaya memperkuat posisi di pasar, Jamkrindo terus berfokus pada peningkatan kompetensi dan kinerja, khususnya dalam pengembangan lini bisnis nonpenugasan pemerintah.

In the credit guarantee business, despite recording a 7.59% year-over-year (YoY) decline in guarantee service fees (IJP), from IDR 8.10 trillion to 7.49 trillion, Jamkrindo remains the largest credit guarantee company in Indonesia, with a market share of 64.42% in 2025. In an effort to strengthen its market position, Jamkrindo continues to focus on improving its capabilities and performance, particularly in the development of non-government-assigned business lines.

IFG vs Pasar Penjaminan (Rp triliun)
IFG vs. Guarantee Market (IDR Trillion)



Sumber: OJK
Source: OJK

Catatan: Perusahaan penjaminan IFG, yaitu Jamkrindo.
Note: IFG's credit guarantee company, Jamkrindo.

Ke depan, IFG berkomitmen untuk menerapkan pendekatan yang lebih selektif dan strategis dalam menentukan portofolio bisnis, dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha yang sehat, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi para *stakeholders*.

In the future, IFG is committed to adopting a more selective and strategic approach in determining its business portfolio, with a focus on developing businesses that are sound, sustainable, and capable of delivering added value to stakeholders.

2. Asuransi Jiwa

Sepanjang tahun 2025, industri asuransi menunjukkan penguatan yang stabil dengan jangkauan perlindungan yang semakin luas bagi masyarakat Indonesia. Total tertanggung industri asuransi jiwa mencapai 168,03 juta orang, tumbuh 8,66% secara tahunan. Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan jangka panjang. Pada segmen perorangan, jumlah tertanggung tumbuh 4,61% menjadi 22,58 juta orang sementara, pada segmen kumpulan, jumlah tertanggung mencapai 145,45 juta orang atau tumbuh 9,32%.

Meski demikian, pendapatan premi masih terkoreksi ringan 2,22% menjadi Rp181,27 triliun, dipengaruhi penurunan premi tunggal di tengah pemulihan daya beli masyarakat. Penurunan premi terjadi pada premi tunggal dan premi lanjutan masing-masing sebesar 2,69% dan 4,29%.

Sepanjang tahun 2025, industri membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp145,88 triliun kepada 9,58 juta penerima manfaat, menegaskan fungsi asuransi jiwa sebagai pelindung finansial bagi masyarakat. Nilai klaim tersebut turun 8,45% dibandingkan periode sebelumnya. Pada sektor kesehatan, pembayaran klaim naik 10,59% menjadi Rp26,74 triliun, diberikan kepada 4,32 juta orang.

Pada tahun 2025, akuisisi mayoritas saham Mandiri Inhealth oleh IFG Life menjadikan IFG Life sebagai perusahaan asuransi jiwa nomor 1 (satu) di Indonesia dengan perolehan *Annualized Premium Equivalent* (APE) sebesar Rp5,04 triliun. Pada urutan berikutnya, Allianz dan BRI Life dengan APE masing-masing sebesar Rp3,91 triliun dan Rp3,55 triliun. Peta kompetisi di industri asuransi jiwa dapat digambarkan berdasarkan 10 besar perolehan APE sebagai berikut:

2. Life Insurance

Throughout 2025, the insurance industry showed steady growth, providing increasingly broad coverage for the Indonesian public. The total number of policyholders in the life insurance industry reached 168.03 million people, growing 8.66% YoY. This increase signals that the public is becoming increasingly aware of the importance of long-term protection. In the individual segment, the number of policyholders grew by 4.61% to 22.58 million people, while in the group segment, the number of policyholders reached 145.45 million people, representing a 9.32% increase.

However, premium income still saw a slight decline of 2.22% to IDR 181.27 trillion, influenced by a decrease in single-premium policies amid the recovery of public purchasing power. The decline in premiums occurred in single premiums and renewal premiums, respectively by 2.69% and 4.29%.

Throughout 2025, the industry paid out claims and benefits totaling IDR 145.88 trillion to 9.58 million beneficiaries, reaffirming the role of life insurance as a financial safeguard for the public. The value of these claims decreased by 8.45% compared to the previous period. In the health sector, claim payments increased by 10.59% to IDR 26.74 trillion, distributed to 4.32 million people.

In 2025, IFG Life's acquisition of a majority stake in Mandiri Inhealth established IFG Life as the number one life insurance company in Indonesia, with an annualized premium equivalent (APE) of IDR 5.04 trillion. Following behind are Allianz and BRI Life, with APE of IDR 3.91 trillion and IDR 3.55 trillion, respectively. The competitive landscape in the life insurance industry is illustrated by the top 10 companies by APE as follows:

Peringkat Perusahaan Asuransi Jiwa Berdasarkan APE Tahun 2025
Ranking of Life Insurance Companies Based on 2025 APE

No.	Nama Perusahaan Company Name	APE Tahun 2025 (Rp Miliar) APE for 2025 (IDR billion)	No.	Nama Perusahaan Company Name	APE Tahun 2025 (Rp Miliar) APE for 2025 (IDR billion)
1.	IFG Life / mandiri inhealth	5.040	6.	Manulife	2.080
2.	Allianz	3.910	7.	AXA mandiri	2.065
3.	BRIlife	3.550	8.	BNI Life	1.464
4.	PRUDENTIAL	3.226	9.	MSIG	1.402
5.	AIA	2.473	10.	GENERALI	1.326

Sumber: AAJI | Source: AAJI

Sebagai pemimpin pasar, IFG Life terus melakukan perbaikan dan mengembangkan bisnis baru, baik secara organik maupun anorganik, agar dapat memperkuat posisinya di pasar dan menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri asuransi jiwa dan asuransi kesehatan di Indonesia. Saat ini, IFG Life telah menerima pengalihan portofolio eks-Jiwasraya yang berpotensi untuk dilakukan *monetizing* bersama Mandiri Inhealth sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan premi bisnis baru. IFG Life juga telah menyelesaikan penugasan pemerintah dalam rangka penyelamatan polis Jiwasraya. Sampai dengan tahun 2025, IFG Life telah menerima pengalihan polis Jiwasraya sebesar Rp38,08 triliun dan telah membayar manfaat asuransi sesuai ketentuan yang tertera dalam polis sebesar Rp23,17 triliun.

Melalui Divisi Bisnis Asuransi Jiwa, *holding* berperan dalam membantu perluasan pangsa pasar IFG Life melalui beberapa inisiatif berikut:

a. *Taskforce* perbaikan layanan asuransi kesehatan.
   Dalam rangka perbaikan proses bisnis dan layanan asuransi kesehatan, IFG membentuk *taskforce* yang terdiri dari perwakilan IFG, IFG Life, dan Inhealth berdasarkan SK Nomor 31 tahun 2024 tentang Pembentukan *Taskforce* Transformasi Perbaikan Layanan Asuransi Kesehatan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Hingga Desember 2025, telah dilakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:
   1) Perbaikan proses sosialisasi dan *customer onboarding* serta mendorong penggunaan *e-claim* untuk proses *reimbursement* yang lebih transparan.
   2) Telah dilakukan perbaikan terkait remunerasi Mandiri Inhealth.
   3) Telah dilakukan *workshop business process* Mandiri Inhealth.
   4) Telah dilakukan NDA *telemedicine*.
   5) Telah dilakukan reviu terkait produk IFG Life Medical Care.
   6) Telah dilakukan *co-insurance agreement* antara Inhealth dan AMFS.
b. Pengembangan bisnis baru melalui produk asuransi kesehatan individu dan potensi kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
   Hingga Desember 2025, telah dilakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:
   1) Tahap awal identifikasi dampak Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Asuransi Kesehatan terhadap keberlangsungan maupun inisiatif bisnis asuransi kesehatan.
   2) Implementasi opsi *top up individual managed care* pada grup IFG.
   3) Telah dilakukan diskusi pembahasan PKS BPJS Kesehatan yang sudah ada (*existing*).
   4) Telah dilakukan diskusi *revamp* produk *top up* BPJS Kesehatan.
c. Transformasi bisnis ritel IFG Life.
   Untuk meningkatkan pencapaian bisnis ritel IFG Life, diadakan *monitoring cadence agency* dan

As the market leader, IFG Life continues to improve and develop new businesses, both organically and inorganically, to strengthen its market position and compete in the increasingly intense competition within Indonesia's life and health insurance industries. Currently, IFG Life has received the transfer of the former Jiwasraya portfolio, which has the potential to be monetized in collaboration with Mandiri Inhealth, thereby driving an increase in new business premium income. IFG Life has also completed the government-assigned task related to the rescue of Jiwasraya policies. As of 2025, IFG Life has received the transfer of Jiwasraya policies totaling IDR 38.08 trillion and has paid out insurance benefits in accordance with the terms specified in the policies amounting to IDR 23.17 trillion.

Through the Life Insurance Business Division, the holding company plays a role in helping to expand IFG Life's market share through the following initiatives:

a. Health Insurance Service Improvement Task Force.
   To improve business processes and health insurance services, IFG formed a task force consisting of representatives from IFG, IFG Life, and Inhealth based on Decree No. 31 of 2024 concerning the Formation of the Task Force for the Transformation and Improvement of Health Insurance Services at PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. As of December 2025, the following initiatives have been implemented:
   1) Improvements to outreach and customer onboarding processes, as well as encouraging the use of e-claims for a more transparent reimbursement process.
   2) Improvements have been made regarding Mandiri Inhealth's compensation structure.
   3) A Mandiri Inhealth business process workshop has been conducted.
   4) A telemedicine NDA has been signed.
   5) A review of the IFG Life Medical Care product has been conducted.
   6) A co-insurance agreement between Inhealth and AMFS has been signed.
b. New business development through individual health insurance products and potential collaboration with BPJS Kesehatan.
   As of December 2025, the following initiatives have been implemented:
   1) Initial phase of identifying the impact of the Financial Services Authority's (OJK) Draft Circular on Health Insurance on the sustainability and business initiatives of the health insurance sector.
   2) Implementation of the individual managed care top-up option within the IFG Group.
   3) Discussions have been held regarding the existing BPJS Kesehatan cooperation agreement (PKS).
   4) Discussions have been held regarding the revamp of the BPJS Kesehatan top-up product.
c. Transformation of IFG Life's retail business.
   To improve the performance of IFG Life's retail business, weekly monitoring of agency and

bancassurance secara mingguan. Sampai dengan Desember 2025, terdapat progres atas inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh tim bisnis ritel, seperti:

1) *Agency*
   a) Perbaikan struktur remunerasi agen untuk mendorong rekrutmen agen-agen baru.
   b) Mengoptimalkan *database* nasabah Mantap dan Mantap Plus yang akan berakhir untuk dilakukan *re-selling* produk baru.
2) *Bancassurance*
   a) Peningkatan *leads* dengan melakukan penetrasi ke kantor cabang pembantu yang dilakukan oleh LPA.
   b) Penekanan isi perjanjian kerja sama *bancassurance* kepada BTN terkait target *market share* sebesar 80% yang sampai dengan Desember 2025 belum tercapai.
   c) Telah dilakukan *alignment* dengan BTN untuk program kerja *bancassurance* tahun 2026.
   d) Melakukan koordinasi terkait penerapan Surat Kuasa Debet Rekening (SKDR) secara *mandatory* untuk menjaga *persistency* pembayaran premi lanjutan oleh nasabah.

d. Transformasi Bisnis Korporasi IFG Life
Untuk meningkatkan pencapaian bisnis korporasi IFG Life, diadakan *cadence* korporasi dan DPLK setiap dua minggu. Sampai dengan Desember 2025, terdapat progres atas inisiatif-inisiatif yang dilakukan, seperti:
1) Korporasi
   a) Telah ditetapkan pengganti bunga JIBOR sebagai *reference rate* pada produk PHT.
   b) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait dengan pembayaran *top-up* premi produk PHT dari PT KAI.
   c) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Bank Mantap dan BPD Bali untuk perluasan pemasaran produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK).
2) DPLK
   a) Berkolaborasi dengan Divisi SDM IFG dalam rangka perluasan pasar DPLK IFG Life di lingkungan IFG.
   b) Telah dilakukan pengalihan DPLK Jiwasraya ke DPLK IFG Life dengan AUM Rp216,46 miliar.
   c) Penyusunan program pensiun yang akan ditawarkan kepada atlet Kemenpora.

3. Pasar Modal dan Investasi

a. Sekuritas

Equity brokerage merupakan salah satu lini bisnis utama di perusahaan sekuritas yang memiliki tingkat persaingan tinggi, sehingga perusahaan sekuritas yang memiliki *captive market*, seperti bank, memiliki *competitive advantage* yang kuat. Ketatnya persaingan ini kemudian menimbulkan tren penurunan komisi *equity brokerage* agar dapat bertahan.

bancassurance cadences is conducted. As of December 2025, progress has been made on initiatives conducted by the retail business team, such as:

1) Agency
   a) Improvements to the agent compensation structure to encourage the recruitment of new agents.
   b) Optimizing the database of Mantap and Mantap Plus customers whose policies are nearing expiration to facilitate the resale of new products.
2) Bancassurance
   a) Increasing leads by expanding into branch offices, carried out by the LPA.
   b) Emphasizing the terms of the bancassurance cooperation agreement with BTN regarding the 80% market share target, which has not yet been achieved as of December 2025.
   c) Alignment with BTN has been completed regarding the 2026 bancassurance work program.
   d) Coordinating the mandatory implementation of the Account Debit Authorization Letter (SKDR) to ensure the continuity of follow-up premium payments by customers.

d. IFG Life Corporate Business Transformation
To improve IFG Life's corporate business performance, corporate and DPLK meetings are held every two weeks. As of December 2025, progress has been made on the following initiatives:
1) Corporate
   a) JIBOR has been replaced as the reference rate for PHT products.
   b) A cooperation agreement regarding premium top-up payments for PHT products from PT KAI has been signed.
   c) Cooperation agreements have been signed with Bank Mantap and BPD Bali to expand the marketing of credit life insurance (AJK) products.
2) DPLK
   a) Collaborated with IFG's Human Capital Division to expand the market for IFG Life's Financial Institution Pension Fund (DPLK) within the IFG ecosystem.
   b) The Jiwasraya DPLK has been transferred to IFG Life's DPLK with AUM of IDR 216.46 billion.
   c) Development of a pension program to be offered to athletes under the Ministry of Youth and Sports.

3. Capital Markets and Investment

a. Securities

Equity brokerage is one of the main business lines at securities firms, and it is highly competitive; as a result, securities firms with a captive market, such as banks, have a strong competitive advantage. This intense competition has led to a trend of declining equity brokerage commissions as firms strive to remain competitive.

Di tengah ketatnya persaingan dan tren penurunan komisi tersebut, pada tahun 2025, terdapat peningkatan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu sebesar Rp18,06 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan RNTH pada tahun 2024 yang sebesar Rp12,85 triliun. Peningkatan transaksi ini didorong oleh aksi jual/beli asing seiring dengan pemberlakuan tarif global serta sentimen di dalam pasar Indonesia.

Amid this intense competition and the trend of declining commissions, in 2025, the average daily transaction value (RNTH) on the Indonesia Stock Exchange (IDX) increased to IDR 18.06 trillion. This figure represents a significant increase compared to the 2024 RNTH of IDR 12.85 trillion. This increase in trading volume was driven by foreign buying and selling activity in response to the implementation of global tariffs and market sentiment within Indonesia.

RNTH saham di Bursa Efek Indonesia (Rp triliun)
Average Daily Transaction Value (RNTH) for Stocks on the Indonesia Stock Exchange



Stockbit tampil sebagai perantara perdagangan efek saham dengan peningkatan nilai transaksi terbesar, yakni mencapai 413,98%. Adapun, Bahana Sekuritas berada di urutan ke-35.

Stockbit emerged as the securities brokerage with the largest increase in transaction value, reaching 413.98%. Meanwhile, Bahana Sekuritas ranked 35th.

Top 20 League Table Equity Brokerage
Top 20 League Table Equity Brokerage

Sekuritas Securities	**Desember 2024** December 2024			**Desember 2025** December 2025			%
	Rank	***Value* (Rp)**	***Market Share***	***Rank***	***Value* (Rp)**	***Market Share***	
Mandiri Sekuritas	2	538,299,765,297,453	8.84%	**1**	**843,713,203,680,959**	**9.89%**	56.74%
UBS Sekuritas Indonesia	1	691,464,374,106,496	11.35%	**2**	**749,225,799,415,239**	**8.79%**	8.35%
Stockbit Sekuritas Digital	17	115,699,100,026,290	1.90%	**3**	**594,666,297,652,697**	**6.97%**	413.98%
Maybank Sekuritas Indonesia	3	428,859,187,343,375	7.04%	**4**	**569,798,610,542,382**	**6.68%**	32.86%
Mirae Asset Sekuritas Indonesia	6	282,527,541,377,450	4.64%	**5**	**542,185,135,024,806**	**6.36%**	91.91%
CGS International Sekuritas Indonesia	4	378,270,926,901,693	6.21%	**6**	**509,971,489,217,254**	**5.98%**	34.82%
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia	5	371,705,504,390,784	6.10%	**7**	**357,460,336,910,298**	**4.19%**	-3.83%
Indo Premier Sekuritas	7	219,277,522,503,608	3.60%	**8**	**336,356,925,127,128**	**3.94%**	53.39%
Semesta Indovest Sekuritas	13	149,640,187,069,872	2.46%	**9**	**281,493,030,235,085**	**3.30%**	88.11%
KB Valbury Sekuritas	15	142,581,397,387,469	2.34%	**10**	**249,951,974,424,735**	**2.93%**	75.30%
Ajaib Sekuritas Asia	19	100,360,625,508,410	1.65%	**11**	**233,096,685,516,040**	**2.73%**	132.26%

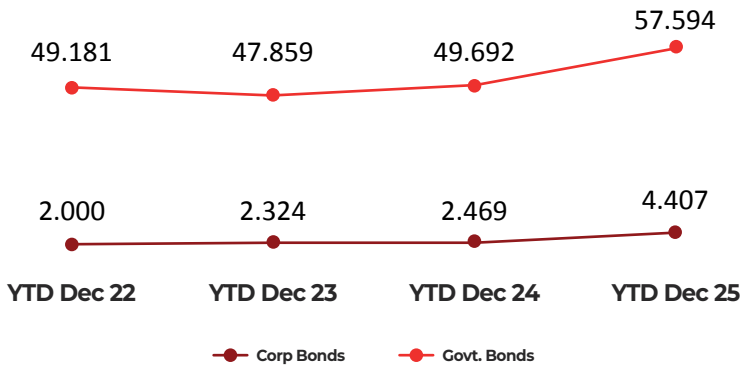
Top 20 League Table Equity Brokerage
Top 20 League Table Equity Brokerage

Sekuritas Securities	Desember 2024 December 2024			Desember 2025 December 2025			%
	Rank	*Value* (Rp)	*Market Share*	*Rank*	*Value* (Rp)	*Market Share*	
Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	10	180,885,947,436,973	2.97%	**12**	**227,892,031,123,173**	**2.67%**	25.99%
BCA Sekuritas	9	185,054,828,486,590	3.04%	**13**	**216,068,721,063,075**	**2.53%**	16.76%
BNI Sekuritas	12	159,878,755,273,760	2.62%	**14**	**163,948,148,356,453**	**1.92%**	2.55%
CLSA Sekuritas Indonesia	8	186,022,108,293,338	3.05%	**15**	**163,375,919,671,711**	**1.92%**	-12.17%
Sucor Sekuritas	18	100,532,063,048,236	1.65%	**16**	**150,847,441,458,874**	**1.77%**	50.05%
Sinarmas Sekuritas	20	97,373,484,652,808	1.60%	**17**	**145,772,090,468,668**	**1.71%**	49.70%
Macquarie Sekuritas Indonesia	11	166,098,120,801,426	2.73%	**18**	**145,270,425,456,064**	**1.70%**	-12.54%
BRI Danareksa Sekuritas	21	84,500,371,781,965	1.39%	**19**	**123,121,362,728,849**	**1.44%**	45.71%
Phillip Sekuritas Indonesia	23	63,721,882,380,053	1.05%	**20**	**116,564,814,743,233**	**1.37%**	82.93%
Bahana Sekuritas	32	40,029,843,442,102	0.66%	**35**	**37,150,761,680,271**	**0.44%**	-7.19%

Sementara itu, di pasar obligasi, RNTH obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi sama-sama menunjukkan peningkatan secara YoY, baik dari tekanan jual maupun beli dari investor. Peningkatan ini terjadi karena obligasi merupakan instrumen yang sensitif terhadap kondisi makroekonomi suatu negara dan kebijakan suku bunga bank sentral, dalam hal ini BI-Rate.

In the bond market, the RNTH for both government and corporate bonds showed year-on-year increases, driven by both selling and buying pressure from investors. This increase occurred because bonds are instruments that are sensitive to a country's macroeconomic conditions and central bank interest rate policies, specifically the BI Rate.

RNTH Obligasi di Bursa Efek Indonesia (Rp miliar)
RNTH Bonds on the Indonesia Stock Exchange



Untuk perantara perdagangan efek obligasi di BEI, *market share* terbesar di obligasi pemerintah dipegang oleh BRI Danareksa Sekuritas sedangkan obligasi korporasi dipegang oleh Binaartha Sekuritas. Adapun, Bahana Sekuritas mampu bertahan di posisi top 10 *league table* untuk obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi.

Among securities brokers trading bonds on the IDX, the largest market share in government bonds is held by BRI Danareksa Sekuritas, while the largest share in corporate bonds is held by Binaartha Sekuritas. Meanwhile, Bahana Sekuritas managed to remain in the top 10 of the league table for both government and corporate bonds.

Peringkat 10 Besar Perantara Perdagangan Efek Obligasi Pemerintah dan Korporasi
Top 10 Rankings of Securities Brokers for Government and Corporate Bonds

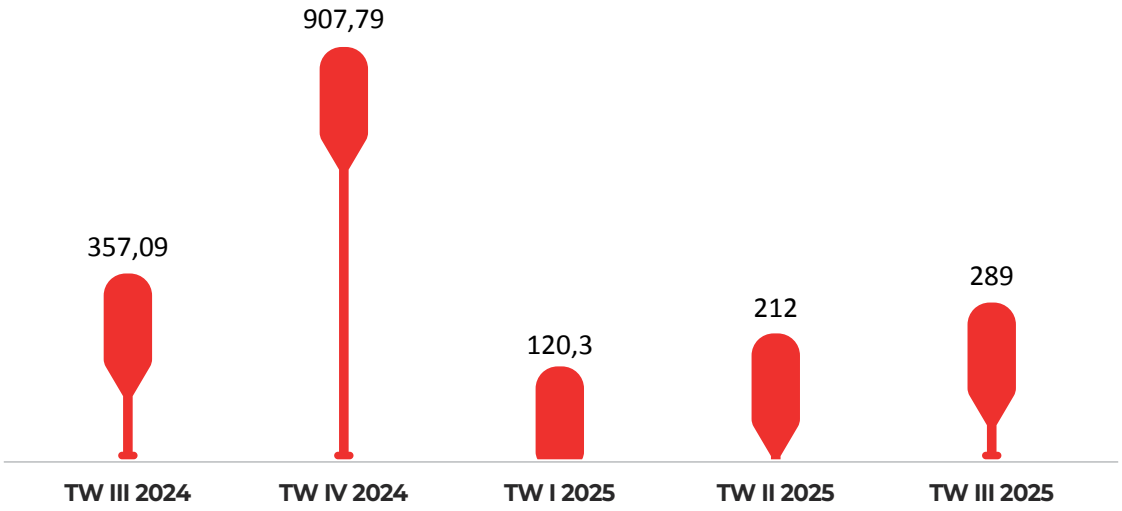
Sekuritas Securities	Peringkat Ranks	Obligasi Pemerintah Government bonds	
		Nilai (Rp juta) Value (IDR million)	Pangsa Pasar Market Share
BRI Danareksa Sekuritas	1	375.411	14,20%
PT Mega Capital Sekuritas	2	350.420	13,25%
Trimegah	3	332.350	12,57%
BNI Securities	4	312.945	11,84%
Mandiri Sekuritas	5	287.738	10,88%
Sucor Sekuritas	6	163.758	6,19%
UOB Sekuritas	7	99.212	3,75%
Mirae Asset Sekuritas	8	98.628	3,73%
Bahana Sekuritas	9	87.982	3,33%
CIMB Securities	10	83.151	3,14%

Sekuritas Securities	Peringkat Ranks	Obligasi Korporasi Corporate bonds	
		Nilai (Rp juta) Value (IDR million)	Pangsa Pasar Market Share
Sucor Sekuritas	2	125.958	12,01%
CIMB Securities	3	86.088	8,21%
BNI Sekuritas	4	73.854	7,04%
BRI Danareksa Sekuritas	5	72.762	6,94%
Bahana Sekuritas	6	47.752	4,55%
Trimegah	7	42.276	4,03%
Mandiri Sekuritas	8	33.697	3,21%
Sinarmas Sekuritas	9	27.376	2,61%
Indo Premier Securities	10	22.242	2,12%

Lini bisnis sekuritas berikutnya, yaitu *investment banking financial advisory*. Pada tahun 2025, lini bisnis ini berhasil menunjukkan pertumbuhan secara YoY, namun ekosistem BUMN sebagai *client base* terbesar BS masih mengambil posisi *wait and see* atau sehingga menunda realisasi mandat dari nasabah.

Another securities line of business is investment banking and financial advisory. In 2025, this line of business managed to show YoY growth; however, the state-owned enterprise (SOE) ecosystem, as the securities firm's largest client base, is still adopting a "wait-and-see" approach, thereby delaying the execution of client mandates.

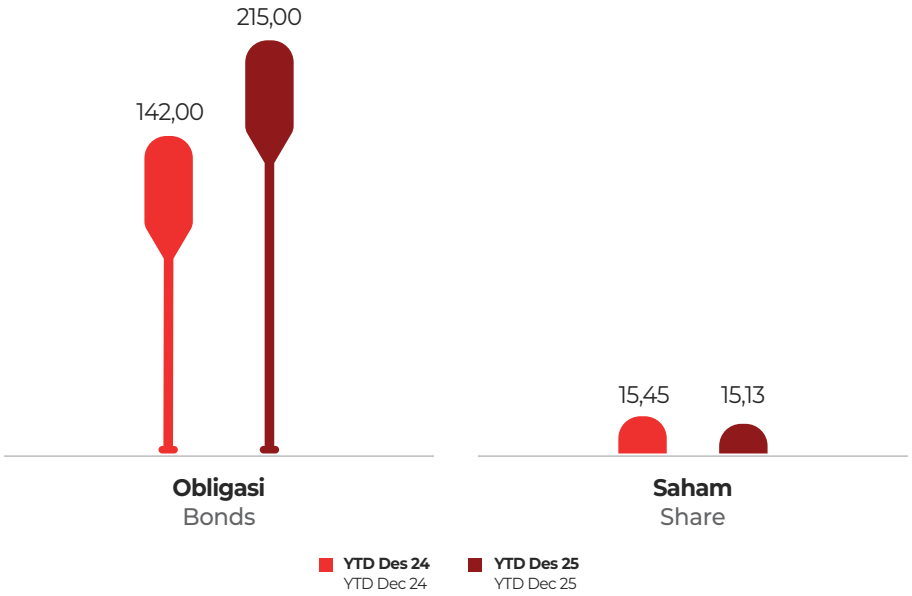
Total Pendapatan *Investment Banking Financial Advisory* Perusahaan Sekuritas BUMN YTD (Rp miliar)
YTD Total Revenue from Investment Banking and Financial Advisory Services of SOE Securities Firms (IDR billion)



Adapun, pasar *investment banking capital market* mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari total nilai penjaminan selama tahun 2025, sebagai berikut:

Meanwhile, the investment banking and capital markets sector began to show a fairly significant increase. This is evident from the total underwriting value throughout 2025, as follows:

Total Nilai Penjaminan Instrumen di Indonesia (Rp triliun)
Total Underwriting Value of Instruments in Indonesia (IDR trillion)



Sepanjang tahun 2025, BS hanya menjalankan mandat sebagai penjamin emisi obligasi dengan penguasaan pasar sebesar 2,91% sehingga menempati urutan ke-11 dalam liga penjamin emisi efek.

Throughout 2025, BS operated solely as a bond underwriter, with a market share of 2.91%, ranking 11th among securities underwriters.

Lima Besar Sekuritas Penjamin Emisi Efek per Tipe Instrumen Keuangan
Top Five Securities Underwriters by Type of Financial Instrument

	Obligasi Bonds			**Saham** Share	
Rank	**Sekuritas** Securities	**Pangsa Pasar** Market Share	**Rank**	**Sekuritas** Securities	**Pangsa Pasar** Market Share
1	Trimegah Sekuritas	17,64%	1	Trimegah Sekuritas	30,30%
2	Indo Premier Sekuritas	17,37%	2	Indo Premier Sekuritas	12,44%

Lima Besar Sekuritas Penjamin Emisi Efek per Tipe Instrumen Keuangan
Top Five Securities Underwriters by Type of Financial Instrument

	Obligasi Bonds			Saham Share	
Rank	**Sekuritas** Securities	**Pangsa Pasar** Market Share	**Rank**	**Sekuritas** Securities	**Pangsa Pasar** Market Share
3	Mandiri Sekuritas	16,99%	3	Sinarmas Sekuritas	10,27%
4	BRI Danareksa Sekuritas	12,81%	4	Mandiri Sekuritas	10,09%
5	BNI Sekuritas	11,79%	5	CIMB Sekuritas	6,75%
11	Bahana Sekuritas	2,91%	n/a	Bahana Sekuritas	0

b. Manajer Investasi

Total dana kelolaan atau *asset under management* (AUM) seluruh manajer investasi (MI) di Indonesia per akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp1.041,18 triliun, yang mencakup reksa dana dan kontrak pengelolaan dana (KPD). Angka ini meningkat 24,71% dibandingkan akhir Desember 2024. Peningkatan AUM terbesar bersumber dari produk reksa dana, terutama dari jenis pendapatan tetap dan pasar uang, masing-masing sebesar Rp101,85 triliun dan Rp54,60 triliun, secara berurutan. Pertumbuhan reksa dana pendapatan tetap tertinggi dibukukan oleh Trimegah Asset Management, yakni sebesar Rp17,33 triliun, disusul oleh Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI).

Pada akhir tahun 2025, BTIM berhasil menempati peringkat ke-2 (dua) dengan total dana kelolaan sebesar Rp95,92 triliun yang berarti tumbuh 29,51% secara YoY.

b. Investment Manage

Total assets under management (AUM) for all investment managers (IMs) in Indonesia as of the end of December 2025 amounted to IDR 1,041.18 trillion, which includes mutual funds and fund management contracts (KPD). This figure represents a 24.71% increase compared to the end of December 2024. The largest increase in AUM came from mutual fund products, particularly fixed-income and money market funds, amounting to IDR 101.85 trillion and IDR 54.60 trillion, respectively. Trimegah Asset Management recorded the highest growth in fixed-income mutual funds, amounting to IDR 17.33 trillion, followed by Manulife Asset Management Indonesia (MAMI).

At the end of 2025, BTIM ranked second with total assets under management of IDR 95.92 trillion, representing a year-on-year (YoY) growth of 29.51%.

Peringkat Manajer Investasi Berdasarkan Total Dana Kelolaan (Rp Miliar)
Ranking of Investment Managers by Total Assets Under Management (IDR billion)

Rank	**Top 10 *Fund Manager***	**2024**	**2025**		**AUM *Growth***
		AUM	**AUM**	**Pangsa Pasar**	
1	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	98.885	**124.337**	**11,94%**	25.452
2	PT Bahana TCW Investment Management	74.066	**95.920**	**9,21%**	21.854
3	PT Eastspring Investments Indonesia	59.413	**72.899**	**7,00%**	13.485
4	PT BRI Manajemen Investasi	50.090	**65.073**	**6,25%**	14.983
5	PT Sinarmas Asset Management	58.146	**63.176**	**6,07%**	5.030
6	PT Mandiri Manajemen Investasi	43.962	**62.882**	**6,04%**	18.920
7	PT Trimegah Asset Management	33.177	**59.116**	**5,68%**	25.939
8	PT Schroder Investment Management Indonesia	61.168	**53.216**	**5,11%**	(7.952)
9	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	45.039	**49.365**	**4,74%**	4.326
10	PT Sucorinvest Asset Management	23.471	**46.024**	**4,42%**	25.452
MI lain Other Investment Managers		**287.462**	349.173	33,54%	**61.711**
Total AUM Seluruh MI Total AUM of All Investment Managers		**834.879**	1.041.180	100,00%	**206.301**

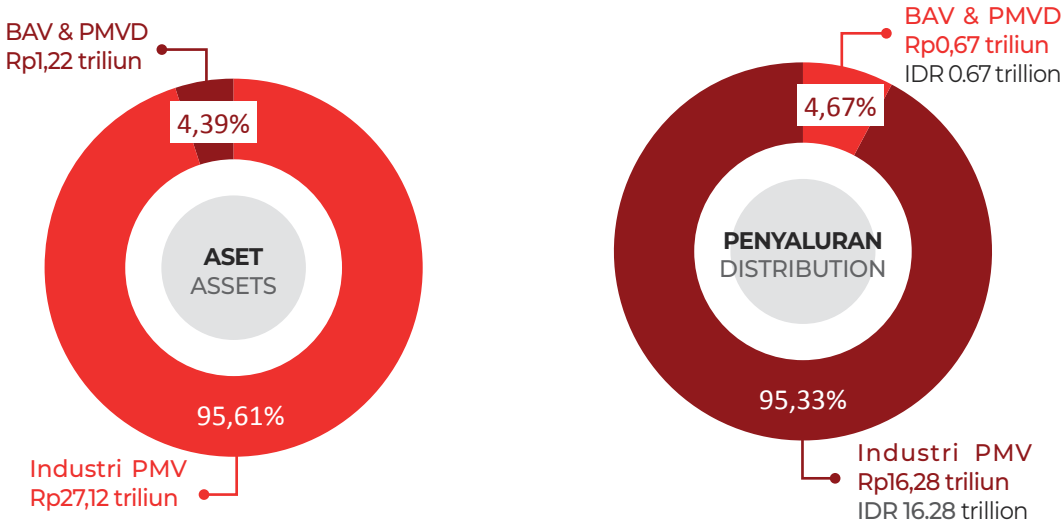
c. Modal Ventura

Pada tahun 2025, terdapat 48 perusahaan modal ventura (PMV) yang berizin dan diawasi OJK, terdiri dari 7 (tujuh) PMV syariah dan 41 PMV konvensional.

c. Venture Capital

As of 2025, there were 48 Venture Capital Firms (PMV) licensed and supervised by the OJK, consisting of 7 (seven) Sharia-compliant PMV and 41 conventional PMVs.

Proporsi Aset dan Penyaluran BAV & PMVD terhadap Industri Modal Ventura
Proportion of Assets and Disbursements by BAV and PMVD Relative to the Venture Capital Industry



Sumber: OJK, diolah
Source: OJK, processed

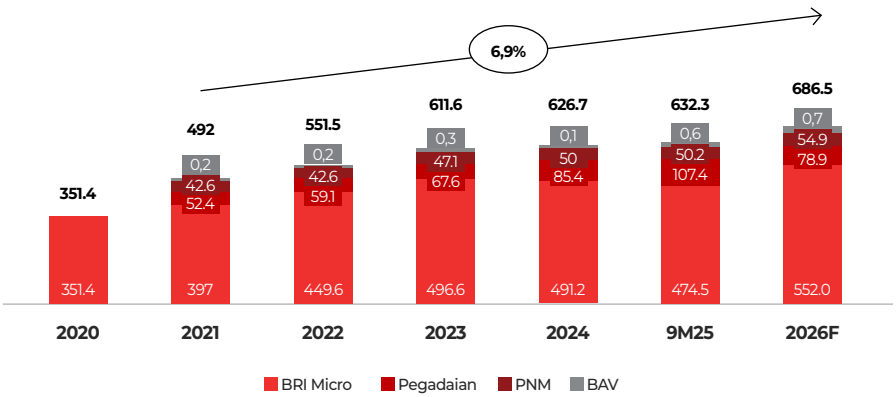
Sepanjang tahun 2025, industri modal ventura mencatatkan total aset sebesar Rp27,56 triliun, tumbuh 3,67% YoY. Adapun, penyaluran pembiayaan mencapai Rp15,97 triliun, naik 0,81% YoY, mengindikasikan pemulihan dari tekanan ekonomi global dan domestik.

Throughout 2025, the venture capital industry recorded total assets of IDR 27.56 trillion, a 3.67% YoY increase. Meanwhile, financing disbursements reached IDR 15.97 trillion, an increase of 0.81% YoY, indicating a recovery from global and domestic economic pressures.

Sebagai agen pembangunan dan pionir perusahaan modal ventura di Indonesia, BAV berperan aktif dalam pengembangan pembiayaan UMKM melalui 21 anak perusahaannya, yakni perusahaan modal ventura daerah (PMVD) yang tersebar di berbagai provinsi dan mayoritas berbentuk *venture debt corporation* (VDC). Kontribusi BAV dan afiliasinya signifikan dengan aset konsolidasi sebesar Rp1,22 triliun (4,43% dari total industri) dan penyaluran pembiayaan Rp710,310 miliar (4,45% dari total industri).

As a development agent and pioneer of venture capital firms in Indonesia, BAV plays an active role in developing financing for MSMEs through its 21 subsidiaries—regional venture capital companies (PMVDs) spread across various provinces, the majority of which are structured as venture debt corporations (VDCs). BAV and its affiliates made a significant contribution, with consolidated assets of IDR 1.22 trillion (4.43% of the industry total) and financing disbursements of IDR 710.310 billion (4.45% of the industry total).

Proyeksi pembiayaan UMi IDR Tn, 2020-2026F
UMi Financing Projections



Sumber: Financial Update Presentation Bank BRI 3Q 2025, diolah
Source: Bank BRI's Financial Update Presentation 3rd Quarter of 2025, processed

Di luar pembiayaan yang ada, BAV juga mendapatkan mandat untuk menyalurkan bisnis pembiayaan ultra mikro (UMi) dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Industri bisnis UMi diproyeksikan akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan atau *compound annual growth rate* (CAGR) sebesar 6,90% dari tahun 2020 hingga 2026. Adapun, nilai pembiayaan diperkirakan meningkat dari Rp351,40 triliun di tahun 2020 menjadi Rp686,50 triliun pada tahun 2026.

Kontribusi BAV dalam pembiayaan Umi secara konsisten meningkat meskipun tetap proporsional kecil dibanding entitas lain seperti BRI Micro, Pegadaian, dan PNM. Ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar bagi BAV dalam mengembangkan portofolio pembiayaan UMi ke depan, seiring dengan peran aktif dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha ultra mikro di Indonesia.

d. Building Management

Menurut riset Colliers, tingkat okupansi gedung di CBD Jakarta pada tahun 2025 mencapai sekitar 75,00%, dengan gedung Premium dan Grade A menunjukkan okupansi yang lebih tinggi, masing-masing sekitar 85,00% dan 80,00%. Tingkat okupansi ini relatif stabil sepanjang 2025 dengan rata-rata tarif sewa atau *rental rate* sekitar Rp215.000 per meter persegi per bulan.

Pertumbuhan *rental rate* diperkirakan akan mencapai sekitar 2%-3% per tahun pada periode 2025-2028. Tren kenaikan kembali diharapkan seiring dengan membaiknya kondisi pasar. Strategi utama pemilik gedung saat ini adalah menjaga tingkat okupansi dengan harga kompetitif dan insentif bagi penyewa.

e. Jasa Konsultasi Keuangan Lainnya

BKI didirikan untuk menjalankan usaha di bidang investasi dan jasa penasihat keuangan. Dengan pendirian IFG, teridentifikasi potensi pengelolaan subrogasi yang berasal dari aset subrogasi milik anggota *holding* IFG di bidang asuransi dan penjaminan sebesar lebih dari Rp20,00 triliun. Atas potensi ini, BKI dimandatkan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan aset subrogasi tersebut. Pada tahun 2025, BKI telah memperoleh mandat pengelolaan aset subrogasi sebesar Rp2,27 triliun dari Askrindo dan Jamkrindo.

In addition to its existing financing operations, BAV has also been mandated by the Government Investment Center (PIP) to administer ultra-micro financing (UMi) programs. The UMi business sector is projected to continue growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.90% from 2020 to 2026. Specifically, the value of financing is expected to increase from IDR 351.40 trillion in 2020 to IDR 686.50 trillion in 2026.

BAV's contribution to UMi financing has consistently increased, although it remains proportionally small compared to other entities such as BRI Micro, Pegadaian, and PNM. This indicates significant growth potential for BAV in expanding its UMi financing portfolio going forward, in line with its active role in supporting financial inclusion and the empowerment of ultra-micro businesses in Indonesia.

d. Building Management

According to Colliers' research, the occupancy rate of buildings in Jakarta's CBD in 2025 reached approximately 75.00%, with Premium and Grade A buildings showing higher occupancy rates of approximately 85.00% and 80.00%, respectively. These occupancy rates are expected to remain relatively stable throughout 2025, with an average rental rate of approximately IDR 215,000 per square meter per month.

Rental rate growth is projected to reach approximately 2%–3% per year during the 2025–2028 period. A resurgence in growth is anticipated as market conditions improve. The primary strategy of building owners at present is to maintain occupancy rates through competitive pricing and incentives for tenants.

e. Other Financial Consulting Services

BKI was established to conduct business in the investment and financial advisory services sectors. With the establishment of IFG, the potential for managing subrogation assets originating from IFG holding company members in the insurance and guarantee sectors was identified, totaling more than IDR 20.00 trillion. Given this potential, BKI was mandated to optimize the management of these subrogation assets. As of 2025, BKI has secured a mandate to manage subrogation assets totaling IDR 2.27 trillion from Askrindo and Jamkrindo.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Sampai dengan akhir tahun 2025, IFG belum memiliki segmen usaha yang memenuhi kriteria pelaporan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Penyesuaian 2015) yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelompokan segmen usaha Perusahaan dilakukan berdasarkan aktivitas bisnis yang dijalankan melalui 11 (sebelas) entitas anak, yaitu:
1. Asuransi Umum dan Penjaminan
2. Asuransi Jiwa
3. Pasar Modal dan Investasi

As of the end of 2025, IFG did not have any business segments that met the reporting criteria as stipulated in Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) 5 (2015 Amendments), which are applicable in Indonesia. In this regard, the Company's business segments are grouped based on the business activities performed through 11 (eleven) subsidiaries, namely:
1. General Insurance and Guarantee
2. Life Insurance
3. Capital Markets and Investment

ASURANSI UMUM DAN PENJAMINAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha pada segmen asuransi umum dan penjaminan, Perusahaan menugaskan 4 (empat) entitas anak yang terdiri atas 3 (tiga) Anggota *Holding* di bidang asuransi umum serta 1 (satu) Anggota *Holding* di bidang penjaminan.

Anggota Holding yang menjalankan usaha asuransi umum meliputi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja). Adapun kegiatan usaha di bidang penjaminan dilaksanakan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Penjelasan Segmen Usaha

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

Askrindo merupakan perusahaan asuransi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi umum dan asuransi kredit yang disalurkan melalui perbankan. Dalam operasionalnya, Askrindo mengelola 7 (tujuh) lini bisnis, meliputi KUR, asuransi kredit, asuransi umum, PEN, *suretyship*, reasuransi *incoming*, serta asuransi kredit perdagangan. Selain itu, Askrindo didukung oleh 2 (dua) entitas anak, yakni PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre) yang bergerak di bidang reasuransi, serta PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS) yang berfokus pada layanan penjaminan berbasis syariah.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

Jasindo merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi umum. Dalam operasionalnya, Jasindo mengelola 15 (lima belas) lini bisnis yang meliputi asuransi pengangkutan, kebakaran, rangka pesawat, rekayasa, rangka kapal, kendaraan bermotor, aneka, jaminan, energi *offshore*, energi *onshore*, satelit, tanggung gugat, kecelakaan diri, kesehatan, serta kredit.

GENERAL INSURANCE AND GUARANTEE

In conducting its business operations in the general insurance and surety insurance segments, the Company has designated 4 (four) subsidiaries, consisting of 3 (three) Holding Company members in the general insurance sector and 1 (one) Holding Company member in the surety insurance sector.

The Holding Company members engaged in general insurance include PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), and PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja). Business activities in the guarantee sector are conducted by PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Explanation of Business Segments

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

Askrindo is an insurance company that conducts business in the fields of general insurance and credit insurance distributed through banks. In its operations, Askrindo manages 7 (seven) lines of business, including KUR, credit insurance, general insurance, PEN, suretyship, incoming reinsurance, and trade credit insurance. In addition, Askrindo is supported by two subsidiaries: PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre), which operates in the reinsurance sector, and PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS), which focuses on Sharia-based guarantee services.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

Jasindo is a company engaged in the general insurance business. In its operations, Jasindo manages 15 (fifteen) lines of business, including cargo insurance, fire insurance, aircraft hull insurance, engineering insurance, marine hull insurance, motor vehicle insurance, miscellaneous insurance, surety insurance, offshore energy insurance, onshore energy insurance, satellite insurance, liability insurance, personal accident insurance, health insurance, and credit insurance.

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)

Jasa Raharja merupakan perusahaan yang menjalankan mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Jamkrindo merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit. Ruang lingkup usahanya meliputi penjaminan bagi UMKM dan koperasi, serta penjaminan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penugasan dari Pemerintah.

Strategi Segmen Usaha

Anggota *Holding* IFG yang menjalankan kegiatan usaha pada segmen asuransi umum dan penjaminan menetapkan sejumlah strategi utama di tahun 2025 sebagai langkah penguatan kinerja dan keberlanjutan usaha, antara lain:

1. **Askrindo**
   Strategi utama perusahaan tahun 2025 telah diselaraskan dengan strategi utama RJPP 2025-2029 sebagai berikut:

   a. *Secure Market Positioning and Increase Market Share.*

   b. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan *market share* Perusahaan melalui peningkatan *brand awareness, market presence*, loyalitas pelanggan, dan kepercayaan pelanggan dengan meningkatkan sinergi dengan ekosistem BUMN maupun membentuk jalur distribusi baru ke pelanggan non-BUMN.
   c. *Transform Core System and Accelerate Digitalization.*
   d. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi dan juga transformasi *core system* yang dimiliki oleh PT Askrindo untuk mendukung standardisasi pada seluruh proses bisnis, baik dari sisi *front-end customer facing* maupun *back-end.*
   e. *Reshape Organization Structure and Performance Management.*
   f. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada PT Askrindo dengan mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasional Perusahaan. Pengembangan ini juga didukung oleh pengukuran performa karyawan yang berkelanjutan berdasarkan KPI/target pencapaian yang dibentuk.
   g. *Optimize Product through Portfolio Recomposition.*
   h. Mengembangkan produk-produk non penugasan untuk meningkatkan *competitive advantage* PT Askrindo, termasuk kerja sama dan *bundling* produk dengan Perusahaan afiliasi dan memanfaatkan sinergi dalam memperluas jaringan distribusi PT Askrindo.
   i. *Nurture Human capital & foster competitive and collaborative culture.*
   j. Meningkatkan kompetensi karyawan yang berkelanjutan melalui training, sertifikasi, serta

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)

Jasa Raharja is a company that performs its mandate in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, namely Law No. 30 of 1964 on the Mandatory Passenger Accident Insurance Fund and Law No. 34 of 1964 on the Road Traffic Accident Fund.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Jamkrindo operates in credit guarantee services. Its scope of business includes providing guarantees for MSMEs and cooperatives, as well as guarantees provided in fulfillment of government mandates.

Strategy of Business Segments

IFG Holding subsidiaries operating in the general insurance and surety segments have established a number of key strategies for 2025 as steps to strengthen performance and ensure business sustainability, including:

1. **Askrindo**
   The Company's key strategies for 2025 have been aligned with the key strategies outlined in the 2025–2029 Long-Term Plan (RJPP), as follows:
   a. Secure Market Positioning and Increase Market Share
   b. This strategy aims to increase the Company's market share by enhancing brand awareness, market presence, customer loyalty, and customer trust through stronger synergies within the SOE ecosystem and the establishment of new distribution channels to reach non-SOE customers.
   c. Transform Core System and Accelerate Digitalization
   d. This strategy aims to accelerate digitalization and transform PT Askrindo's core systems to support standardization across all business processes, encompassing both customer-facing front-end processes and back-end operations.
   e. Reshape Organizational Structure and Performance Management
   f. This strategy aims to develop PT Askrindo's human capital by establishing an organizational structure aligned with the Company's business and operational needs. This development is also supported by continuous employee performance measurement based on established KPIs and achievement targets.

   g. Optimize Products through Portfolio Recomposition
   h. Develop non-assignment products to enhance PT Askrindo's competitive advantage, including through product collaboration and bundling with affiliated companies, while leveraging synergies to expand PT Askrindo's distribution network.
   i. Nurture Human Capital and Foster a Competitive and Collaborative Culture
   j. Continuously enhance employee competencies through training, certification, and other supporting

program pendukung lainnya serta memupuk budaya SDM yang kompetitif dan kolaboratif.

k. *Guard Operations and Investment Optimization.*

l. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Askrindo perlu untuk memastikan sistem operasional dan pengelolaan Perusahaan yang mengedepankan tata kelola Perusahaan yang baik, kepatuhan dan prinsip manajemen risiko dalam pengambilan keputusan yang tepat, mengidentifikasi, menganalisis, menilai, memitigasi, serta melakukan monitoring terhadap risiko yang ada di Perusahaan.

Inisiatif Strategis:

- Meningkatkan *partnership* dan *bancassurance* melalui ekspansi bisnis ke BUMN, Lembaga Pemerintah, Korporasi dan Swasta.

- PT Askrindo bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan sinergi bisnis melalui kerja sama dengan berbagai entitas, baik milik negara maupun swasta. Dengan inisiatif ini PT Askrindo berupaya meningkatkan penetrasi produk, memperluas basis pelanggan, dan memperkuat posisi di pasar asuransi dan layanan keuangan.
- Memperkuat *Brand Awareness* Askrindo sebagai *top choice* pada industri asuransi.
- PT Askrindo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengenalan, dan preferensi publik terhadap Askrindo sebagai perusahaan asuransi pilihan utama. Upaya ini mencakup berbagai strategi komunikasi, pemasaran, dan kampanye yang terintegrasi untuk memperluas jangkauan merek PT Askrindo di mata masyarakat dan target pasar. Dengan memperkuat *brand awareness*, PT Askrindo dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran pasar, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan pangsa pasar, daya saing, dan reputasi perusahaan sebagai pemimpin di industri asuransi.
- Inovasi layanan berbasis data untuk personalisasi produk asuransi sesuai kebutuhan pelanggan.

- Memanfaatkan teknologi dan analisis data dalam menciptakan layanan asuransi yang lebih relevan, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap pelanggan. Inovasi berbasis data mengacu pada penggunaan data untuk mengembangkan layanan baru atau meningkatkan layanan yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah menciptakan layanan yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara *real-time*, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar.
- Dengan memahami perilaku dan kebutuhan spesifik dari setiap pelanggan melalui data, perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih sesuai, baik dari segi harga, cakupan perlindungan, maupun layanan tambahan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas jangka panjang. Inisiatif ini akan memperkuat posisi perusahaan di industri

programs, while fostering a competitive and collaborative human capital culture.

k. Guard Operations and Optimize Investments

l. In conducting its operations, PT Askrindo must ensure that its operational and management systems prioritize good corporate governance, compliance, and risk management principles to support sound decision-making, including through the identification, analysis, assessment, mitigation, and monitoring of risks faced by the Company.

Strategic Initiatives:

- Enhance partnerships and bancassurance through business expansion into SOEs, Government Institutions, Corporations, and the Private Sector.
- PT Askrindo aims to expand its market reach and strengthen business synergies through partnerships with various state-owned and private-sector entities. Through this initiative, PT Askrindo seeks to increase product penetration, broaden its customer base, and strengthen its position in the insurance and financial services market.
- Strengthen Askrindo's Brand Awareness as a Top Choice in the Insurance Industry
- PT Askrindo aims to increase public awareness, recognition, and preference for Askrindo as a leading insurance provider. These efforts encompass various integrated communication, marketing, and campaign strategies to expand PT Askrindo's brand reach among the public and target markets. By strengthening brand awareness, PT Askrindo can enhance market trust and awareness, ultimately contributing to increased market share, competitiveness, and the Company's reputation as a leader in the insurance industry.
- Develop Data-Driven Service Innovations to Personalize Insurance Products Based on Customer Needs.
- PT Askrindo leverages technology and data analytics to create insurance services that are more relevant, targeted, and tailored to the unique needs of each customer. Data-driven innovation involves utilizing data to develop new services or improve existing ones, with the primary objective of creating services that are more responsive, efficient, and aligned with real-time customer needs, thereby delivering greater added value.

- By understanding individual customer behavior and specific needs through data, the Company can offer products that are better suited in terms of pricing, coverage, and additional services. This will enhance customer satisfaction and foster long-term loyalty. The initiative will strengthen the Company's position in the insurance industry by providing customers with

asuransi dengan memberikan solusi yang lebih spesifik dan relevan kepada pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

- Pembaruan *core system, underwriting decision engine*, serta penguatan *cyber security* untuk mendukung keberlanjutan Perusahaan dan Anak Perusahaan
- Inisiatif yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan sistem operasional perusahaan guna mendukung efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam menjalankan bisnis, baik di perusahaan induk maupun anak perusahaan. Dengan memperbarui *core system, underwriting decision engine* serta penguatan *cyber security*, PT Askrindo dapat memodernisasi infrastruktur teknologi perusahaan, meningkatkan proses pengambilan keputusan berbasis risiko, dan melindungi aset digital untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, baik di perusahaan induk maupun anak perusahaannya.
- Mengembangkan Struktur Organisasi yang sesuai dengan strategi dan kebutuhan bisnis PT Askrindo.
- PT Askrindo akan melakukan pengembangan struktural dan budaya kerja di dalam perusahaan, guna meningkatkan kinerja, adaptabilitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Dengan inisiatif ini, perusahaan akan menciptakan organisasi yang lebih adaptif, inovatif, dan efisien, serta menumbuhkan budaya kerja yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang.
- Mengembangkan KPI yang tepat sasaran serta sistem *performance management* secara *real time* yang didukung oleh *dashboard*.
- PT Askrindo dalam menciptakan struktur organisasi yang optimal, penting untuk memiliki pengukuran kinerja *Key Performance Indicators* atau KPI yang tepat sasaran. KPI yang tepat akan memastikan bahwa pertumbuhan performa karyawan dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat terhadap pengukuran kinerja, *tools* pendukung seperti *dashboard* untuk monitoring kinerja dan pencapaian secara korporat maupun individu, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan performa karyawan yang berkelanjutan. KPI yang tepat sasaran menjadi alat yang sangat efektif untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi bekerja menuju tujuan bersama dengan cara yang paling produktif dan efisien.
- Mengembangkan produk asuransi non penugasan yang terjangkau dan relevan bagi Masyarakat khususnya UMKM.
- PT Askrindo akan memperluas jangkauan asuransi kepada segmen pasar yang lebih luas,

more specific and relevant solutions, ultimately enhancing customer satisfaction and loyalty while supporting sustainable business growth.

- Upgrade the Core System and Underwriting Decision Engine and Strengthen Cybersecurity to Support the Sustainability of the Company and its Subsidiaries
- This initiative aims to strengthen the Company's technological infrastructure and operational systems to improve efficiency, accuracy, and security in conducting business at both the parent company and subsidiary levels. By upgrading its core system and underwriting decision engine and strengthening cybersecurity, PT Askrindo can modernize its technology infrastructure, improve risk-based decision-making processes, and protect digital assets to support sustainable growth across the Company and its subsidiaries.
- Develop an Organizational Structure Aligned with PT Askrindo's Strategy and Business Needs
- PT Askrindo will develop its organizational structure and workplace culture to improve performance and adaptability while creating a more innovative work environment oriented toward long-term objectives. Through this initiative, the Company will create a more adaptive, innovative, and efficient organization while fostering a workplace culture that supports productivity and long-term growth.
- Develop Targeted KPIs and a Real-Time Dashboard-Supported Performance Management System.
- In establishing an optimal organizational structure, PT Askrindo recognizes the importance of targeted Key Performance Indicators (KPIs). Appropriate KPIs ensure that employee performance improvement can be continuously monitored and enhanced. Supported by performance monitoring tools such as dashboards for tracking corporate and individual performance and achievements, an effective performance measurement approach can create a work environment that supports continuous employee performance improvement. Targeted KPIs serve as an effective tool to ensure that every individual within the organization works toward shared objectives in the most productive and efficient manner.
- Develop Affordable and Relevant Non-Assignment Insurance Products for the Public, Particularly MSMEs.
- PT Askrindo will expand insurance coverage to broader market segments, particularly low-

terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan produk asuransi non penugasan melibatkan pembuatan produk yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan risiko yang paling relevan bagi target pasar ini. Dengan inisiatif ini, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat posisi perusahaan sebagai pelopor dalam inovasi asuransi non penugasan yang relevan dan terjangkau serta memperluas cakupan pasar Askrindo di sektor komersial yang lebih luas.

- Mengembangkan produk asuransi digital yang terintegrasi dengan *platform* teknologi untuk menjangkau pasar lebih luas.
- PT Askrindo memanfaatkan teknologi digital guna menciptakan produk asuransi yang lebih mudah diakses, efisien, dan dapat menjangkau segmen pasar yang lebih besar. Dengan mengembangkan produk asuransi digital yang terintegrasi dengan *platform* teknologi, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Inisiatif ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan tren digital dan memenuhi permintaan pasar yang semakin berkembang menuju layanan berbasis teknologi.
- Pengembangan kompetensi *technical skill* dan *soft skill* yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan *core competencies* Perusahaan menggunakan metode *learning framework* 70:20:10.
- PT Askrindo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun nonteknis, dengan pendekatan yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan kompetensi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan *core competencies* perusahaan, yakni keterampilan inti yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Hal ini memastikan bahwa setiap pelatihan yang diberikan selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan.
- Dengan inisiatif ini, kualitas sumber daya manusia akan meningkat, tujuan bisnis tercapai, dan terciptanya lingkungan kerja yang lebih efektif dan kompetitif.

- Transformasi budaya agar memiliki etos kerja yang tinggi, integritas, daya saing, dan komitmen terhadap pelayanan pelanggan serta penguatan budaya AKHLAK.
- PT Askrindo akan berfokus pada transformasi budaya untuk menciptakan etos kerja yang tinggi, integritas, daya saing, serta komitmen kuat terhadap pelayanan pelanggan. Dengan penguatan budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten,

income communities and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The development of non-assignment insurance products involves creating simple, easily understood products tailored to the risks most relevant to these target markets. Through this initiative, the Company can address the protection needs of low-income communities and MSMEs while contributing to inclusive economic growth, strengthening its position as a pioneer in relevant and affordable non-assignment insurance innovation, and expanding Askrindo's presence in the broader commercial market.

- Develop Digital Insurance Products Integrated with Technology Platforms to Reach a Broader Market.
- PT Askrindo leverages digital technology to create insurance products that are more accessible and efficient and capable of reaching broader market segments. By developing digital insurance products integrated with technology platforms, the Company can expand its market reach, improve operational efficiency, and provide a better customer experience. This initiative enables the Company to adapt to digital trends and meet growing market demand for technology-based services.

- Develop Technical and Soft-Skill Competencies Aligned with Business Needs and the Company's Core Competencies Using the 70:20:10 Learning Framework
- PT Askrindo aims to comprehensively enhance employees' technical and non-technical capabilities through a structured approach aligned with the Company's needs. Competency development will be tailored to business requirements and the Company's core competencies, which constitute its competitive strengths. This ensures that all training provided is aligned with the Company's vision, mission, and strategy.

- Through this initiative, the Company seeks to improve the quality of its human capital, support the achievement of business objectives, and create a more effective and competitive work environment.
- Transform the Corporate Culture to Foster a Strong Work Ethic, Integrity, Competitiveness, and Commitment to Customer Service while Strengthening the AKHLAK Culture.
- PT Askrindo will focus on cultural transformation to foster a strong work ethic, integrity, competitiveness, and a strong commitment to customer service. By strengthening the AKHLAK

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai pilar utamanya, perusahaan berkomitmen untuk membangun fondasi yang berkelanjutan guna mencapai kinerja yang lebih baik dan keberlanjutan jangka panjang.

- Memastikan *operational excellence* Perusahaan dan Anak Perusahaan.
- PT Askrindo bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas operasional tertinggi dalam seluruh proses bisnis. *Operational excellence* adalah filosofi manajemen yang menekankan perbaikan berkelanjutan, pengurangan pemborosan, dan peningkatan nilai bagi pelanggan. Dengan memastikan *operational excellence* di seluruh perusahaan dan anak perusahaan, organisasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang.
- Pengoptimalan aset strategis dan pengelolaan aset investasi untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
- PT Askrindo bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari aset-aset utama perusahaan dan mengelola portofolio investasi secara optimal. Fokusnya adalah pada strategi yang memastikan aset tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan, sambil menjaga keseimbangan risiko dan pengembalian untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang proaktif dan berfokus pada jangka panjang, perusahaan akan memastikan stabilitas finansial dan pencapaian tujuan strategisnya.
- Memperkuat kerangka kerja tata kelola Perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan.
- Memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan standar tata kelola yang tinggi, mengelola risiko secara efektif, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan memperkuat kerangka kerja ini, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam seluruh operasionalnya. Selain itu, manajemen risiko yang solid akan melindungi perusahaan dari potensi ancaman, sementara kepatuhan yang ketat memastikan bahwa perusahaan tetap beroperasi dalam batas hukum, memperkuat reputasi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

2. Jasindo
   a. Strategi Bisnis Utama yang dijalankan oleh perusahaan dapat dijabarkan sebagaimana penjelasan di bawah ini:
      - Optimalisasi Eksekusi Bisnis pada Segmen Korporasi.
      - *Distribution Excellence.*

culture (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) as its key pillar, the Company is committed to establishing a sustainable foundation for improved performance and long-term sustainability.

- Ensure Operational Excellence across the Company and its Subsidiaries
- PT Askrindo aims to achieve the highest levels of operational efficiency and effectiveness across all business processes. Operational excellence is a management philosophy that emphasizes continuous improvement, waste reduction, and enhanced customer value. By ensuring operational excellence across the Company and its subsidiaries, the organization will not only improve operational efficiency and effectiveness but also create added value for customers and stakeholders. This initiative represents an important step in establishing a strong foundation for sustainable growth and long-term success.

- Optimize Strategic Assets and Manage Investment Assets to Support Sustainable Long-Term Growth.
- PT Askrindo aims to maximize the value of the Company's key assets and optimally manage its investment portfolio. The focus is on strategies that ensure these assets make a significant contribution to the Company's performance while maintaining an appropriate risk-return balance to support sustainable growth. Through a proactive and long-term approach, the Company seeks to maintain financial stability and achieve its strategic objectives.

- Strengthen the Corporate Governance, Risk Management, and Compliance Framework.
- This initiative aims to ensure that the Company operates according to high governance standards, effectively manages risks, and complies with applicable regulations. Strengthening this framework will enhance transparency, accountability, and integrity across the Company's operations. Furthermore, robust risk management will protect the Company against potential threats, while strong compliance will ensure that the Company continues to operate within applicable legal and regulatory requirements, thereby strengthening its reputation and long-term business sustainability.

2. Jasindo
   a. The Company's key business strategies are outlined as follows:
      - Optimize Business Execution in the Corporate Segment.
      - Distribution Excellence.

- Memastikan Profitabilitas pelaksanaan Penugasan dan Program Pemerintah.
- Meningkatkan Keunggulan Perusahaan pada Segmen Ritel melalui skema B2B2C, melalui:

  i) Pengembangan produk dan solusi yang relevan dengan kebutuhan *customer*;
  ii) Membangun kemitraan dan kerja sama strategis, kolaborasi dengan BUMN dan mitra lainnya seperti perbankan, *leasing* dan perusahaan *platform digital*:
    - Pendalaman terhadap Bisnis dan Organisasi Klien:
    - Analisa atas seluruh Ekosistem dari Klien; dan
    - Mengembangkan potensi bisnis.
  iii) Melakukan program pemasaran berbasis literasi;
  iv) Penguatan infrastruktur teknologi;
  v) Mengembangkan *customer care;*
  vi) Evaluasi dan Pengukuran Kinerja;
  vii) Memperkuat Keunggulan Operasional.

b. Strategi *Enablers*:
   - Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
   - Penguatan Infrastruktur IT, *Cybersecurity & IT Business Support.*
   - Implementasi PSAK 117.
   - Optimalisasi Kinerja Keuangan Perusahaan.
   - Meningkatkan Kapabilitas Talenta dan Menerapkan Budaya Perusahaan yang produktif.
   - Optimalisasi Kinerja Anak Perusahaan.

3. Jasa Raharja
   a. Upaya optimalisasi penyaluran santunan.
      - Penyempurnaan kategorisasi jenis cedera pada DC-FKMN-JR dan Unit Cost;
      - Peningkatan jumlah Rumah Sakit yang menggunakan FKMN;
      - Memasukkan proses verifikasi korban meninggal dunia secara tersistemasi;
      - *Leveraging new skills* melalui program pelatihan petugas *frontliners – cultivating networking* dan *partnerships*;
      - *Post payment analysis* keselamatan transportasi;
      - Membentuk komite antara Jasa Raharja, Korlantas, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi program pencegahan kecelakaan serta meningkatkan kolektibilitas Sumbangan Wajib.

   b. Upaya peningkatan tingkat kepatuhan dan penguatan data kendaraan.
      - Diplomasi kebijakan dalam penegasan penerapan Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pengenaan sanksi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (KB) atas KB yang tidak diregistrasi ulang dua (2) tahun sejak STNK mati;

- Ensure the Profitability of Government Assignments and Programs.
- Strengthen the Company's Competitive Advantage in the Retail Segment through a B2B2C Scheme by:

  i) Developing products and solutions relevant to customer needs;
  ii) Establishing strategic partnerships and collaborations with SOEs and other partners, including banks, leasing companies, and digital platform companies, through:
    - In-depth understanding of clients' businesses and organizations;
    - Analysis of clients' entire ecosystems; and
    - Development of business potential.
  iii) Implementing literacy-based marketing programs;
  iv) Strengthening technology infrastructure;
  v) Enhancing customer care;
  vi) Evaluating and measuring performance;
  vii) Strengthen Operational Excellence.

b. Strategic Enablers:
   - Strengthen Governance, Risk Management, and Compliance.
   - Strengthen IT Infrastructure, Cybersecurity, and IT Business Support.
   - Implement PSAK 117.
   - Optimize the Company's Financial Performance.
   - Enhance Talent Capabilities and Foster a Productive Corporate Culture.
   - Optimize Subsidiary Performance.

3. Jasa Raharja
   a. Efforts to Optimize Compensation Distribution
      - Refine the categorization of injury types in DC-FKMN-JR and Unit Cost;
      - Increase the number of hospitals using FKMN;
      - Integrate the verification process for deceased victims into the system;
      - Leverage new skills through training programs for frontline officers, with a focus on cultivating networking and partnerships;
      - Conduct post-payment analysis on transportation safety; and
      - Establish a committee comprising Jasa Raharja, Korlantas, and the Ministry of Finance to identify accident prevention programs and improve the collectability of Compulsory Contributions.

   b. Efforts to Improve Compliance Levels and Strengthen Vehicle Data.
      - Conduct policy advocacy to reinforce the implementation of Article 74 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, including sanctions in the form of the deletion of motor vehicle registration and identification for vehicles not re-registered within two years after the expiration of their Vehicle Registration Certificate (STNK);

- Memperbaiki kualitas dan keakuratan data yang diinput pada sistem Loket 1 SAMSAT melalui implementasi *Data Quality Management* (DQM)/ *Master Data Management* (MDM);
- Diplomasi kebijakan dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten terkait implementasi UU. No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama pada daerah dengan tingkat kolektibilitas SWDKLLJ yang rendah;

- Diplomasi kebijakan dengan mitra strategis JR untuk implementasi regulasi PKB dan SWDKLLJ menjadi persyaratan perizinan instansi Pemerintah dalam pembayaran PBB, persyaratan pengajuan kredit dilembaga keuangan bank dan non bank, dan persyaratan penggunaan fasilitas umum lainnya (tempat parkir dll);

- Kolaborasi dengan Korlantas terkait pelaksanaan program-program pendorong peningkatan tingkat kepatuhan PKB dan SWDKLLJ (optimalisasi SIGNAL, pengembangan *Radio Frequency Identification*/RFID, optimalisasi *Electronic Traffic Law Enforcement*/ETLE);
- Melakukan kajian penguatan metode pengutipan Iuran Wajib menggunakan sistem borongan atau kesiapan sistem *manifest* untuk IWKBU;

- Penguatan kolektibilitas data IW melalui metode pembayaran aplikasi JRku serta pengembangan potensi *link channel* pembayaran IW di luar JRku;

- *Leveraging new skills* melalui program pelatihan bagi pejabat *strategic executor – cultivating networking* dan *partnerships*;
- Pembentukan Tim *Big Data* dengan kapabilitas IT dan *data driven decision making*;
- *Leveraging new skill Big Data* dan *Data Science* untuk mendukung inisiasi pengembangan Tim *Big Data* meliputi 47 Algoritma *AI-Machine Learning, Data Analytic-Data Science, Data Security, Data Visualization*, API dan *Microservices*, *Data* dan *Analisis IoT* dan Sertifikasi *Cloud* dan *Big Data*;

- *Leveraging new skills* kompetensi dan integritas tim aktuaria perusahaan melalui penerapan *actuarial control cycle*;

- *Business innovation development program* berkolaborasi dengan universitas atau institusi inovasi swasta/*startup*;
- *Roadmap* penyehatan Dana Pensiun lanjutan :
  - » Relokasi aset secara bertahap sesuai kajian ALMA; dan
  - » Melakukan perubahan tingkat bunga secara bertahap.

- Improve the quality and accuracy of data entered into the SAMSAT Counter 1 system through the implementation of Data Quality Management (DQM)/Master Data Management (MDM);
- Conduct policy advocacy with municipal and regency governments regarding the implementation of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, particularly in regions with low the Road Traffic Accident Fund Compulsory Contribution (SWDKLLJ) collectability;
- Conduct policy advocacy with JR's strategic partners to make compliance with Motor Vehicle Tax (PKB) and SWDKLLJ regulations a requirement for government agency licensing, Land and Building Tax (PBB) payments, credit applications to bank and non-bank financial institutions, and access to other public facilities, including parking facilities;
- Collaborate with Korlantas on programs aimed at increasing PKB and SWDKLLJ compliance, including SIGNAL optimization, Radio Frequency Identification (RFID) development, and Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) optimization;

- Conduct a study to strengthen Compulsory Premiums collection methods using a lump-sum system or assess manifest system readiness for Public Motor Vehicles Compulsory Premiums (IWKBU);
- Strengthen Compulsory Premiums (IW) data collectability through payments using the JRku application and explore potential Compulsory Premiums payment channels outside JRku;
- Leverage new skills through training programs for strategic executor officers, with a focus on cultivating networking and partnerships;
- Establish a Big Data Team with IT and data-driven decision-making capabilities;
- Leverage new skills in Big Data and Data Science to support the establishment of the Big Data Team, covering 47 AI-Machine Learning algorithms, Data Analytics-Data Science, Data Security, Data Visualization, APIs and Microservices, IoT Data and Analytics, as well as Cloud and Big Data certifications;
- Leverage new skills to enhance the competencies and integrity of the Company's actuarial team through the implementation of the actuarial control cycle;
- Implement a business innovation development program in collaboration with universities or private innovation institutions/startups;
- Continue the Pension Fund recovery roadmap through:
  - Gradual asset reallocation based on the ALMA study; and
  - Gradual adjustments to interest rates.

c. Upaya pengembangan investasi.
   - Memastikan *growth* aset investasi sebagai dasar untuk mengembangkan pendapatan investasi; dan
   - Penguatan kapabilitas tim pengelola investasi maupun komite investasi terkait manajemen portofolio dan analisis keuangan seperti *vintage analysis, cost improvement* (*smart spending*) dan *rolling forecast*.

d. Menciptakan *circular shared value* dengan regulator untuk memperkuat payung hukum dan pengumpulan data.
   - Menyusun kajian perubahan tarif SW dan IW untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan;
   - Penguatan regulasi ex-gratia dan hak regres;
   - *Leveraging new skills* melalui program pelatihan tim bantuan/*advisor* Kepatuhan dan Hukum – *cultivating networking & partnerships*; dan
   - Pembentukan tim konsultasi legal dan compliance afiliasi yang memiliki tujuan yang sama sebagai wadah sharing dan pendampingan tambahan.

e. Mengembangkan *circular shared value* dengan IFG *Group* dan *Subsidiary*.
   - Sinergi dengan *subsidiary* dalam pemanfaatan aplikasi JRku serta data kendaraan bermotor untuk pengembangan produk tanggung jawab hukum kerusakan property (*Motor Third Party Liability*/ MTPL) sesuai dengan batasan kebijakan Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi;
   - Sinergi dalam pengembangan bisnis digital retail PT Jasaraharja Putera (JRP);
   - Kolaborasi dengan pihak eksternal (*expert*) atau pihak lainnya dalam pengelolaan/pemanfaatan aset properti milik perusahaan;
   - Pengawasan JRP sebagai *growth engine* berdasarkan performa produk, perusahaan dan *reserve* JRP;
   - Diplomasi kebijakan kepada seluruh karyawan anggota Holding IFG, BUMN dan Kementerian & Lembaga terkait penegakan kepatuhan PKB dan SWDKLLJ sebagai suplemen atas *credit scoring* bagi instansi - instansi tersebut;
   - Mendukung IFG *Holding* dalam pelaksanaan *shared service* untuk fungsi *support* Perusahaan;
   - *Collaboration Bootcamp Innovation Product Development* JR – JRP; dan
   - Penguatan kapabilitas tim digital marketing dan produk desain (*Task Force* JR-JRP) untuk mendukung implementasi produk digital retail.

f. Menciptakan *circular shared value* dengan media, masyarakat dan akademia, terhadap peran JR sebagai penyedia perlindungan dasar dan peningkatan keselamatan.

c. Investment Development Initiatives
   - Ensure growth in investment assets as a foundation for increasing investment income; and
   - Strengthen the capabilities of the investment management team and Investment Committee in portfolio management and financial analysis, including vintage analysis, cost improvement (smart spending), and rolling forecasts.

d. Create Circular Shared Value with Regulators to Strengthen the Legal Framework and Data Collection
   - Prepare a study on adjustments to Compulsory Contribution (SW) and Compulsory Premiums (IW) rates for submission to the Ministry of Finance;
   - Strengthen regulations governing ex gratia payments and rights of recourse;
   - Leverage new skills through training programs for the Compliance and Legal advisory team, with a focus on cultivating networking and partnerships; and
   - Establish a legal and compliance consultation team with affiliated entities sharing similar objectives as a forum for knowledge sharing and additional assistance.

e. Develop Circular Shared Value with IFG Group and Subsidiaries
   - Build synergies with subsidiaries in utilizing the JRku application and motor vehicle data to develop Motor Third Party Liability (MTPL) products, subject to the provisions of the Personal Data Protection Law;
   - Build synergies in developing PT Jasaraharja Putera's (JRP) digital retail business;
   - Collaborate with external parties (experts) or other parties in managing/utilizing the Company's property assets;
   - Monitor JRP as a growth engine based on JRP's product and corporate performance and reserves;
   - Conduct policy advocacy among employees of IFG Holding Members, SOEs, and relevant ministries and institutions to promote PKB and SWDKLLJ compliance as a supplementary component of credit scoring for such institutions;
   - Support IFG Holding in implementing shared services for the Company's support functions;
   - Conduct the JR–JRP Collaboration Bootcamp for Innovation Product Development; and
   - Strengthen the capabilities of the digital marketing and product design team (JR–JRP Task Force) to support the implementation of digital retail products.

f. Create Circular Shared Value with the Media, Communities, and Academia regarding JR's Role as a Provider of Basic Protection and in Improving Safety

- Intensifikasi upaya keselamatan transportasi melalui operasi gabungan dan sosialisasi peningkatan keselamatan dengan Korlantas, melalui kampanye 5 Faktor Utama Plus yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor risiko utama dalam berkendara, yaitu helm, sabuk keselamatan, mabuk, kecepatan berlebih (*speeding*), dan penggunaan telepon seluler;
- Bekerja sama dengan B-Corp dan mitra strategis bisnis lainnya untuk memberikan sertifikasi kepada UKM yang akan menjadi target lapangan pekerjaan bagi para korban kecelakaan yang kehilangan pekerjaan;
- Pengembangan CHILL (*Collaboration Hub Innovation Learning Lab*) dengan perguruan tinggi dan unit kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan solusi digital untuk peningkatan keselamatan lalu lintas;
- Pengembangan edukasi *legacy* dan peran JR dalam masyarakat serta manfaat SWDKLLJ melalui kerja sama dengan sekolah (SD–SMA) maupun perguruan tinggi, terutama di daerah yang memiliki kepatuhan PKB rendah;
- Memperluas kemitraan dengan *stakeholders* yang berpotensi untuk mendukung program keselamatan transportasi, seperti bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam Gerakan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) untuk menumbuhkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas bagi generasi muda;
- Bekerja sama dengan konsultan untuk melahirkan program keselamatan transportasi lainnya yang efektif;
- Mendukung Pemerintah Daerah dalam menjaga kualitas keamanan jalan raya (*road safety*);
- Integrasi LMS Jasa Raharja – *E-learning Hub Innovation Laboratory* kolaborasi bersama perguruan tinggi dan unit kegiatan mahasiswa (pengembangan modul tentang keberlanjutan dan inovasi hijau);
- Hackathon lingkungan untuk menjadi *project* lanjutan pada Laboratorium Inovasi baik ke Internal maupun eksternal (universitas, unit kegiatan mahasiswa, dll);
- *Leveraging* kapabilitas tim inovasi/*research development* dengan sertifikasi terkait seperti manajemen energi, teknologi energi terbarukan dan audit lingkungan;
- *Environmental, social, and governance* (ESG) *innovation awarding*; dan
- Pembentukan *task force* efisiensi dan *Green Office* Initiative serta sistem saran.

g. Pengembangan berkelanjutan sistem informasi sebagai enabler perusahaan.
   - Penguatan manajemen risiko TI terkait potensi ancaman informasi dan teknologi;
   - Penguatan dan evaluasi berkala *Business Continuity Management* (BCM);

- Intensify transportation safety initiatives through joint operations and safety awareness campaigns with Korlantas under the "5 Faktor Utama Plus" campaign, which aims to increase public awareness of key driving risk factors, namely helmet use, seat belt use, drunk driving, speeding, and mobile phone use;
- Collaborate with B Corp and other strategic business partners to provide certification to SMEs that may serve as employment opportunities for accident victims who have lost their jobs;
- Develop CHILL (Collaboration Hub Innovation Learning Lab) with universities and student organizations to develop digital solutions for improving traffic safety;
- Develop educational programs on JR's legacy and role in society and the benefits of SWDKLLJ through collaboration with schools (elementary to senior high school) and universities, particularly in regions with low PKB compliance;
- Expand partnerships with stakeholders that can potentially support transportation safety programs, including collaboration with the Ministry of Transportation through the Early-Age Traffic Awareness Movement (SALUD) to foster road safety awareness among younger generations;
- Collaborate with consultants to develop other effective transportation safety programs;
- Support Regional Governments in maintaining road safety;
- Integrate Jasa Raharja's LMS with the E-Learning Hub Innovation Laboratory in collaboration with universities and student organizations, including the development of sustainability and green innovation modules;
- Conduct environmental hackathons as follow-up projects under the Innovation Laboratory, involving both internal and external participants, including universities and student organizations;
- Enhance the capabilities of the innovation/research and development team through relevant certifications, including energy management, renewable energy technology, and environmental auditing;
- Conduct Environmental, Social, and Governance (ESG) Innovation Awards; and
- Establish an efficiency and Green Office Initiative task force and suggestion system.

g. Continuous Development of Information Systems as a Corporate Enabler
   - Strengthen IT risk management in relation to potential information and technology threats;
   - Strengthen and periodically evaluate Business Continuity Management (BCM);

- Digitalisasi proses bisnis internal secara berkelanjutan;
- Peningkatan kemampuan data *analytics* menggunakan *query data* dengan populasi penuh untuk pelacakan kinerja anomali;
- Integrasi data internal dan eksternal dalam sistem *Customer Value Management* (CVM) dan Customer Relationship Management (CRM) untuk menunjang proses manajemen risiko dan pengambilan keputusan;
- Penyempurnaan aplikasi *Financial Management System* (FMS) secara berkelanjutan dalam proses pelaporan posisi portofolio dan posisi hasil;
- Pengembangan ELIB (Perpustakaan Digital JR) sebagai dokumentasi dan arsip digital JR;
- Permodelan *hazard* dan cara bertindak penanganan titik rawan laka dengan pemanfaatan *machine learning* dan integrasi *Artificial Intelligence* (AI);
- Permodelan prediktif laka lantas dan diagnosa cedera korban laka lantas;
- Implementasi proses persuratan digital (*paperless*) dan sentralisasi proses persuratan satu pintu;
- Melakukan kajian penyesuaian struktur organisasi divisi internal audit sesuai dengan adanya pendetailan SPO internal audit;
- Perubahan struktur Biro Aktuaria menjadi Divisi Aktuaria;
- JR-IFG Digital Academy kolaborasi dengan universitas atau lembaga sertifikasi bidang digital;
- *Collaboration Bootcamp Innovation Product Development* JRJRP; dan
- Integrasi *Audit Management System* (AMS) dengan Anak Perusahaan.

h. Pengembangan kapabilitas SDM agar tanggap dan adaptif terhadap perubahan.
- *Agile Workforce* Lab (JR Foundry) yang terdiri dari tim lintas fungsi dalam menyusun *co-creation programs*;
- Peningkatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 ke LSP 2;
- Pengembangan *respectful workplace policy* untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif dan menghormati semua individu, baik kepada talenta JR maupun mitra strategis;
- Peningkatan tingkat maturitas budaya (ACHI/ AKHLAK Culture Health Index) JR;
- *Employee Resource Groups*; dan
- *Pipeline Leadership Development Program* (contoh: *Diversity and Inclusion Leadership Program, Empathetic Leadership Initiative*).

i. Penguatan implementasi *governance, risk and compliance* (GRC) perusahaan.
- Integrasi HRIS- Modul GRC;
- *Leveraging new skills* bagi organ pengelola

- Continuously digitalize internal business processes;
- Enhance data analytics capabilities using full-population data queries to identify performance anomalies;
- Integrate internal and external data into Customer Value Management (CVM) and Customer Relationship Management (CRM) systems to support risk management and decision-making processes;
- Continuously enhance the Financial Management System (FMS) application for portfolio position and results reporting;
- Develop ELIB (JR Digital Library) as JR's digital documentation and archive platform;
- Develop hazard models and response measures for accident-prone locations using machine learning and Artificial Intelligence (AI) integration;
- Develop predictive models for traffic accidents and diagnoses of injuries sustained by traffic accident victims;
- Implement digital (paperless) correspondence processes and centralize correspondence through a single channel;
- Conduct a study on adjustments to the organizational structure of the Internal Audit Division in line with more detailed Internal Audit SOPs;
- Upgrade the Actuarial Bureau into an Actuarial Division;
- Establish the JR–IFG Digital Academy in collaboration with universities or digital-sector certification institutions;
- Conduct the JR–JRP Collaboration Bootcamp for Innovation Product Development; and
- Integrate the Audit Management System (AMS) with the Subsidiary.

h. Develop Human Capital Capabilities to Respond and Adapt to Change
- Establish an Agile Workforce Lab (JR Foundry), comprising cross-functional teams tasked with developing co-creation programs;
- Upgrade the Professional Certification Institution (LSP) from LSP 1 to LSP 2;
- Develop a Respectful Workplace Policy to create a safe, inclusive, and respectful work environment for both JR talents and strategic partners;
- Improve JR's cultural maturity level as measured by the AKHLAK Culture Health Index (ACHI);
- Establish Employee Resource Groups; and
- Implement a Pipeline Leadership Development Program, such as the Diversity and Inclusion Leadership Program and Empathetic Leadership Initiative.

i. Strengthen the Company's Governance, Risk, and Compliance (GRC) Implementation
- Integrate the GRC module into HRIS;
- Leverage new skills among risk management

risiko kantor pusat dan cabang melalui program sertifikasi bidang *related* seperti CRM (*Certified Risk Manager*) dan PMI – RMP (*Project Management Institute – Risk Management Professional*);

- Program komunikasi risiko, kepatuhan dan hukum;

- Penguatan implementasi *governance, risk and compliance* (GRC) perusahaan;
- Implementasi PSAK 109 (tentang instrumen keuangan) dan 117 (tentang kontrak akuntansi) dimulai pada tahun 2025;
- Penguatan fungsi aktuaris dalam operasional perusahaan;
- Pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan *spin-off* unit usaha syariah di JRP dan kajian kecukupan modal JRP syariah *spin off* untuk mencapai KPPE 2;

- Penguatan budaya manajemen risiko bagi seluruh pegawai;
- Penguatan prudent *asset liability management* secara berkelanjutan;
- Penerapan *proactive compliance* untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan dan standar yang berlaku serta penyelarasan peraturan internal perusahaan dengan adanya dinamika dan/atau perubahan peraturan dari eksternal;
- Dukungan TI dalam implementasi UU PDP;

- Penguatan fungsi Kepatuhan dan Hukum dalam operasional perusahaan khususnya bidang TI;
- Memperbaharui Pedoman Manajemen Risiko perusahaan dengan menetapkan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban pelaksanaan Penilaian Indeks Kematangan Risiko;
- Menyusun standar dan prosedur terkait kontrol kualitas data, pelaporan kualitas data dan jalur eskalasi isu data;
- Menyusun prosedur kapasitas risiko yang menjadi dasar penetapan selera, toleransi dan limit risiko, serta mencakup berbagai jenis risiko yang relevan;
- Menyusun rencana darurat (*contingency plan*) termasuk rencana kontingensi kas/likuiditas yang memenuhi persyaratan Pemegang Saham;
- Penguatan kebijakan prosedur, dan standar kerahasiaan data yang ada sesuai dengan UU PDP;

- Menilai risk appetite manajemen dan pembuatan crisis *protocol* sesuai dengan *risk appetite* Manajemen;
- Pengembangan *roadmap* ESG sebagai panduan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional, serta melakukan *carbon accounting* dengan bantuan konsultan eksternal maupun *inhouse*;
- Optimalisasi *Lost Event Database*;
- Pelaksanaan Reviu *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR); dan
- Implementasi *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM).

personnel at the Head Office and branch offices through relevant certification programs, such as Certified Risk Manager (CRM) and Project Management Institute–Risk Management Professional (PMI-RMP);

- Implement risk, compliance, and legal communication programs;
- Strengthen the Company's Governance, Risk, and Compliance (GRC) implementation;
- Implement PSAK 109 on financial instruments and PSAK 117 on insurance contracts beginning in 2025;
- Strengthen the actuarial function in the Company's operations;
- Supervise compliance with the spin-off of JRP's sharia business unit and assess the capital adequacy of JRP's sharia spin-off to achieve KPPE 2;
- Strengthen the risk management culture among all employees;
- Continuously strengthen prudent Asset Liability Management;
- Implement proactive compliance to ensure adherence to applicable regulations and standards and align the Company's internal regulations with developments and/or changes in external regulations;
- Provide IT support for the implementation of the Personal Data Protection Law;
- Strengthen the Compliance and Legal functions in the Company's operations, particularly in the IT area;
- Update the Company's Risk Management Guidelines by establishing clear provisions regarding mandatory Risk Maturity Index assessments;
- Develop standards and procedures for data quality control, data quality reporting, and data issue escalation channels;
- Develop risk capacity procedures as the basis for determining risk appetite, tolerance, and limits, covering various relevant risk types;
- Develop contingency plans, including cash/liquidity contingency plans that meet Shareholder requirements;
- Strengthen existing data confidentiality policies, procedures, and standards in accordance with the Personal Data Protection Law;
- Assess management's risk appetite and develop a crisis protocol aligned with management's risk appetite;
- Develop an ESG roadmap to guide the Company's operations and conduct carbon accounting with the assistance of external consultants or in-house resources;

- Optimize the Loss Event Database;
- Conduct an Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) review; and
- Implement Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM).

j. Penyempurnaan standardisasi serta proses bisnis perusahaan secara berkelanjutan.
   - Pengembangan sistem digitalisasi Divisi Umum;
   - Peremajaan bangunan (interior maupun eksterior) Kantor Cabang sesuai dengan standar perusahaan;
   - Penyelarasan SPO terkait penggunaan loss event database untuk analisis potensi risiko pada kegiatan operasional perusahaan;
   - Penyelarasan SPO terkait sentralisasi pembayaran transaksi keuangan melalui Kantor Pusat JR;
   - Mengurangi jejak karbon melalui pengurangan perjalanan dinas dengan shifting online, penggunaan sumber energi terbarukan, penghematan energi, mengurangi pemakaian kertas dan mengedukasi karyawan akan pentingnya mengurangi jejak karbon;
   - Pengembangan berkelanjutan pedoman atau SPO bagi kegiatan investasi sesuai dengan periode sebelumnya;
   - Menelaah dan memperbarui SPO terkait bisnis proses pelayanan santunan dan program keselamatan; dan
   - Dukungan sistem atas perubahan struktur jabatan di Divisi Akuntansi.

4. Jamkrindo
   a. Implementasi pelaksanaan kolaborasi dengan mitra BUMN, BUMD, Swasta dan Lembaga Pemerintahan;
   b. Evaluasi terhadap proses bisnis eksisting dan identifikasi area prioritas yang dapat didigitalisasi;
   c. Implementasi program penguatan manajemen risiko;
   d. Implementasi rekrutmen dengan sistem yang berdasarkan kebutuhan strategi bisnis;
   e. Investasi dalam infrastruktur teknologi dan perangkat lunak terkait untuk mendukung operasional bisnis;
   f. Implementasi program pengembangan pengetahuan dan keahlian tim marketing internal dengan fokus pada *customer* (*customer centric*);
   g. Implementasi program penguatan manajemen risiko;
   h. Melakukan pengelolaan manajemen investasi berbasis LDI;
   i. Membangun sistem *sharing data* pelanggan;
   j. Membentuk tim TI dan digital PT Jamkrindo yang secara khusus mendukung pembangunan dan integrasi *shared services center* IFG Group;
   k. Penilaian *risk maturity index*;
   l. Restrukturisasi organisasi dengan penambahan unit baru yang bertanggung jawab dalam *data analytic*;
   m. Pembuatan desain marketing *plan* dan *tools* pendukung dengan fokus pada *customer* (*customer centric*);
   n. Penyempurnaan sistem dan SOP untuk proses bisnis subrogasi *online* dan terintegrasi dengan mitra;
   o. Membuat perencanaan strategi untuk *cross-selling* dan *upselling*;

j. Continuously Enhance the Standardization of the Company's Business Processes
   - Develop a digitalization system for the General Affairs Division;
   - Refurbish branch office buildings, both interiors and exteriors, in accordance with Company standards;
   - Align SOPs concerning the use of the Loss Event Database for analyzing potential risks in the Company's operations;
   - Align SOPs concerning the centralization of financial transaction payments through JR's Head Office;
   - Reduce the carbon footprint by reducing business travel through a shift to online activities, using renewable energy sources, conserving energy, reducing paper consumption, and educating employees on the importance of reducing their carbon footprint;
   - Continuously develop investment guidelines or SOPs in line with the previous period;
   - Review and update SOPs concerning business processes for compensation services and safety programs; and
   - Provide system support for changes to the position structure within the Accounting Division.

4. Jamkrindo
   a. Implement collaboration with SOE, Regional-Owned Enterprise (ROE), private-sector, and government institution partners;
   b. Evaluate existing business processes and identify priority areas for digitalization;
   c. Implement risk management strengthening programs;
   d. Implement a recruitment system aligned with strategic business needs;
   e. Invest in technology infrastructure and related software to support business operations;
   f. Implement competency development programs to enhance the knowledge and skills of the internal marketing team with a customer-centric focus;
   g. Implement risk management strengthening programs;
   h. Implement Liability-Driven Investment (LDI)-based investment management;
   i. Develop a customer data-sharing system;
   j. Establish a dedicated PT Jamkrindo IT and digital team to support the development and integration of the IFG Group Shared Services Center;
   k. Conduct a Risk Maturity Index assessment;
   l. Restructure the organization by establishing a new unit responsible for data analytics;
   m. Develop a marketing plan and supporting tools with a customer-centric focus;
   n. Enhance systems and SOPs for online subrogation business processes integrated with partners;
   o. Develop strategies for cross-selling and upselling;

p. Mendukung konsolidasi fungsi pendukung bisnis dalam *shared services center* IFG Group; dan

q. Program penguatan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan strategi bisnis.

p. Support the consolidation of business support functions within the IFG Group Shared Services Center; and

q. Implement competency strengthening programs to support strategic business needs.

PRODUKSI, PENDAPATAN, DAN PROFITABILITAS SEGMEN USAHA

PRODUCTION, REVENUE, AND PROFITABILITY OF BUSINESS SEGMENTS

1. Asuransi Umum dan Penjaminan

a. Produksi

1. General Insurance and Guarantee

a. Production

Pendapatan Jasa Asuransi, Imbal Jasa Penjaminan, dan Pendapatan Ujrah - Asuransi Umum dan Penjaminan (Rp juta)
Insurance Service Revenue, Guarantee Service Fees, and Ujrah Revenue - General Insurance

Produksi Production	**2025**	**2024**	**% Kenaikan** increase	**RKAP 2025**	**% Pencapaian** Achievement
(jutaan Rupiah) (IDR Million)	**a**	**b**	**d = (a - b)/b**	**c**	**e = a/c**
Pendapatan Jasa Asuransi Insurance Service Revenue					
1. Askrindo	**1,830,438**	3,277,096	-44.14%	**3,160,248**	57.92%
2. Jasa Raharja	**8,173,863**	7,486,508	9.18%	**6,350,503**	128.71%
3. Jasindo	**3,686,239**	3,602,666	2.32%	**5,187,848**	71.06%
A. Total Pendapatan Jasa Asuransi (1+2+3) Total Insurance Service Revenue (1+2+3)	13,690,540	**14,366,270**	**-4.70%**	**14,698,599**	**93.14%**
Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Guarantee Fee (IJP)					
4. Askrindo	**5,557,570**	5,698,237	-2.47%	**6,572,613**	84.56%
5. Jamkrindo	**7,486,755**	8,071,224	-7.24%	**8,529,823**	87.77%
B. Total IJP (4+5) Total Guarantee Fee (4+5)	13,044,325	**13,769,461**	**-5.27%**	15,102,436	**86.37%**
C. Total Produksi (A+B+C) Total Production (A+B+C)	26,734,866	**28,135,731**	**-4.98%**	29,801,035	**89.71%**

Catatan:
1. Pendapatan Jasa Asuransi Askrindo hanya merupakan Askrindo Induk (Non KUR).
2. Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Askrindo merupakan Askrindo Induk (KUR menggunakan PSAK 109) dan JPAS.
3. Produksi JRP saat ini masih menggunakan angka cut-off dan berpotensi mengalami perubahan ke depannya.

Note:
1. Askrindo's insurance service revenue refers only to Askrindo's Parent Company (Non-KUR).
2. Askrindo's guarantee service fees (IJP) refer to Askrindo's Parent Company (KUR uses PSAK 109) and JPAS.
3. JRP production currently still uses cut-off figures and is subject to change in the future.

Pada tahun 2025, total produksi anak perusahaan pada segmen Asuransi Umum dan Penjaminan mencapai Rp25,4 triliun atau menunjukkan peningkatan sebesar 3,65% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbaikan kinerja di Jasa Raharja di mana terdapat pemutihan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menyebabkan peningkatan penerimaan sumbangan wajib meningkat secara drastis. Di anak perusahaan lainnya, Askrindo

In 2025, total revenue from subsidiaries in the General Insurance and Guarantee segments reached IDR 25.4 trillion, representing a 3.65% increase compared to the same period the previous year.

This increase was primarily driven by improved performance at Jasa Raharja, where a tax amnesty program for motor vehicle taxes led to a dramatic rise in compulsory contribution revenue. In other subsidiaries, Askrindo experienced growth due to an increase in its general insurance business lines,

mengalami peningkatan dikarenakan terdapat peningkatan di lini bisnis asuransi umum terutama di *property*. Untuk Jasindo, pendapatan jasa asuransi meningkat dikarenakan adanya peningkatan di lini bisnis *PA and Health* dan juga *engineering*. Penurunan Imbal Jasa Penjaminan dikarenakan adanya penurunan IJP KUR pada Askrindo Induk sebesar 13,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan pada lini bisnis penjaminan tertentu yang berdampak langsung terhadap capaian pendapatan perusahaan. Di sisi lain, IJP Jamkrindo juga mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh turunnya IJP pada LoB Produktif sebesar 11%, sejalan dengan penghentian produk Kupra Kupedes, serta penurunan sebesar 5% pada LoB KUR.

particularly in property insurance. For Jasindo, insurance service revenue increased due to improvements in these lines of business such as Personal Accident (PA), Health, and engineering. The decline in Guarantee Service Fees was attributable to a 13.61% decrease in KUR Guarantee Service Fees (IJP KUR) at the Parent Company (Askrindo) compared to the previous year. This situation reflects pressure on certain guarantee lines of business, which directly impacted the company's revenue performance. Meanwhile, Jamkrindo's guarantee service fees also declined, influenced by an 11% decrease in fees for the Productive Line of Business (LoB), in line with the discontinuation of the Kupra/Kupedes products, as well as a 5% decrease in the KUR Line of Business (LoB).

b. Pendapatan

b. Revenue

Hasil Jasa Asuransi dan Hasil Kegiatan Penjaminan - Asuransi Umum dan Penjaminan (Rp juta)
Insurance Service Result and Guarantee Service Result – General Insurance and Guarantee (IDR million)

Pendapatan Revenue	**2025**	**2024**	**% Kenaikan** increase	**RKAP 2025**	**% Pencapaian** Achievement
(jutaan Rupiah) (IDR Million)	**a**	**b**	**d = (a - b)/b**	**c**	**e = a/c**
Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Results					
1. Askrindo	**360,915**	11,758	2969.53%	**389,426**	92.68%
2. Jasa Raharja	**1,946,926**	1,059,308	83.79%	**234,069**	831.68%
3. Jasindo	**361,888**	455,860	-20.61%	**560,230**	64.60%
A. Total Hasil Jasa Asuransi (1+2+3) Total Insurance Service Results (1+2+3)	2,669,729	**1,526,926**	**74.84%**	1,183,752	**225.53%**
Hasil Kegiatan Penjaminan Guarantee Service Result					
4. Askrindo	**2,253,013**	1,775,853	26.87%	**439,443**	512.70%
5. Jamkrindo	**1,836,121**	2,029,976	-9.55%	**1,081,178**	169.83%
B. Total Hasil Kegiatan Penjaminan (4+5) Total Guarantee Service Result (4+5)	4,089,134	**3,805,829**	**7.44%**	1,520,620	**268.91%**
6. Jasa Raharja	**- 69,700**	- 88,428	21.18%	**-**	
C.Pendapatan/(Beban) *Underwriting* Lain (6) Other Underwriting Income/(Expense) (6)	- 69,700	**- 88,428**	**-178.82%**	-	
D. Total Pendapatan (A+B+C)	6,689,163	**5,244,328**	**27.55%**	2,704,373	**247.35%**

Catatan:
Hasil Jasa Asuransi Askrindo hanya merupakan Askrindo Induk (Non KUR).
Hasil Kegiatan Penjaminan Askrindo merupakan Askrindo Induk (KUR menggunakan PSAK 109) dan JPAS.
Note:
Insurance Service Result for Askrindo only includes the Parent Company (excluding KUR).
Guarantee Service Result for Askrindo comprises the Parent Company (with KUR accounted for under PSAK 109) and JPAS.

Total pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp6,69 triliun, meningkat 27,55% YoY dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5,24 triliun, serta telah mencapai 247,35% dari RKAP 2025. Pertumbuhan ini terutama

Total revenue in 2025 amounted to IDR 6.69 trillion, representing a 27.55% YoY increase from IDR 5.24 trillion in 2024 and achieving 247.35% of the 2025 RKAP target. This growth was primarily driven

didukung oleh Hasil Kegiatan Penjaminan sebesar Rp4,09 triliun atau naik 7,44% YoY, dengan kontribusi terbesar dari Askrindo yang tumbuh 26,87% YoY menjadi Rp2,25 triliun. Peningkatan pada Askrindo terutama dipengaruhi oleh penurunan klaim KUR, sehingga berdampak positif terhadap hasil kegiatan penjaminan.

Dari sisi Hasil Jasa Asuransi, pendapatan mencapai Rp2,67 triliun, naik 74,84% YoY dan mencapai 225,53% dari RKAP 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh Askrindo yang tumbuh signifikan 2969,53% YoY menjadi Rp360,91 miliar, dilanjutkan dengan Jasa Raharja yang tumbuh signifikan 83,79% YoY menjadi Rp1,95 triliun, sejalan dengan adanya perbaikan pendapatan pada periode berjalan. Namun, terdapat tekanan pada beberapa entitas, antara lain Jasindo yang turun 20,61% YoY, serta Jamkrindo pada hasil kegiatan penjaminan yang turun 9,55% YoY akibat adanya pembentukan cadangan klaim.

by the Guarantee Service Result, which reached IDR 4.09 trillion, a 7.44% YoY increase, with the largest contribution coming from Askrindo, whose Guarantee Service Result increased 26.87% YoY to IDR 2.25 trillion. The increase at Askrindo was mainly attributable to a decline in KUR claims, which had a positive impact on the Guarantee Service Result.

On the Insurance Service Result side, revenue reached IDR 2.67 trillion, an increase of 74.84% YoY and equivalent to 225.53% of the 2025 RKAP target. This increase was primarily driven by Askrindo, whose Insurance Service Result grew significantly by 2,969.53% YoY to IDR 360.91 billion, followed by Jasa Raharja, whose Insurance Service Result increased 83.79% YoY to IDR 1.95 trillion, in line with improved revenue during the reporting period. However, several entities experienced pressure, including Jasindo, whose Insurance Service Result declined 20.61% YoY, and Jamkrindo, whose Guarantee Service Result decreased 9.55% YoY due to the recognition of additional claim reserves.

c. Profitabilitas

Berdasarkan PSAK 117, pada hasil *Audited* Tahun Buku 2025, anggota *holding* Asuransi Umum dan Penjaminan membukukan laba sebesar Rp5,51 triliun meningkat sebesar 31,13% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,32 triliun. Selain itu, realisasi tersebut mencapai 212,15% dari target RKAP 2025. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Laba bersih Askrindo tahun 2025 sebesar Rp1,69 triliun mencapai 327,75% dari RKAP 2025. Kinerja ini terutama didorong oleh hasil kegiatan penjaminan dan kontrak *stop loss* yang memberikan kontribusi sebesar Rp2,25 triliun. Pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi beban klaim penjaminan KUR yang hanya mencapai 60% dari target RKAP 2025, sehingga menghasilkan *margin underwriting* yang lebih tinggi dari yang direncanakan.

2) Laba bersih Jamkrindo 2025 sebesar Rp1,05 triliun mencapai 187,20% dari RKAP 2025. Kinerja ini terutama didorong oleh rendahnya beban *underwriting*, khususnya penurunan klaim KUR, serta perbaikan kualitas portofolio secara keseluruhan. Perbaikan kualitas portofolio yang tercermin dari penurunan beban klaim sebesar Rp1,1 triliun pada segmen non-KUR dan Rp1,3 triliun pada segmen KUR telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan. Namun demikian, penurunan IJP, khususnya pada bisnis non-KUR, serta peningkatan pembentukan cadangan sebagai langkah mitigasi risiko, termasuk risiko bencana, menyebabkan laba bersih tahun 2025 masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya.

c. Profitability

According to PSAK 117, based on the audited financial statements for fiscal year 2025, the General Insurance and Guarantee Holding recorded a net profit of IDR 5.51 trillion, representing a 31.13% YoY increase from IDR 4.32 trillion in the corresponding period of the previous year. In addition, this achievement reached 212.15% of the 2025 RKAP target. This performance was driven by the following factors:

1) Askrindo recorded a net profit of IDR 1.69 trillion in 2025, representing 327.75% of its 2025 RKAP target. This performance was primarily driven by the Guarantee Service Result and the stop-loss contract, which contributed IDR 2.25 trillion. The achievement was mainly attributable to KUR guarantee claim expenses reaching only 60% of the 2025 RKAP target, resulting in a higher underwriting margin than originally planned.

2) Jamkrindo recorded a net profit of IDR 1.05 trillion in 2025, equivalent to 187.20% of its 2025 RKAP target. This performance was mainly supported by lower underwriting expenses, particularly due to the decline in KUR claims, as well as improvements in overall portfolio quality. The enhanced portfolio quality, reflected in a reduction of claim expenses amounting to IDR 1.1 trillion in the non-KUR segment and IDR 1.3 trillion in the KUR segment, contributed positively to the Company's performance. Nevertheless, the decline in Guarantee Fees, particularly in the non-KUR business, together with higher reserve provisions as part of risk mitigation measures, including catastrophe risk, resulted in 2025 net profit remaining below the previous year's achievement.

3) Laba bersih Jasa Raharja tahun 2025 sebesar Rp2,30 triliun mencapai 175,68% dari RKAP 2025. Kinerja ini terutama didorong oleh realisasi pendapatan asuransi sebesar Rp8,17 triliun yang mencapai 128,71% dari RKAP 2025. Peningkatan pendapatan tersebut utamanya berasal dari kinerja entitas induk yang mengalami kenaikan Sumbangan Wajib (SW), seiring dengan pelaksanaan program pemutihan di beberapa wilayah. Selain itu, peningkatan laba bersih juga didukung oleh kenaikan hasil investasi, terutama akibat peningkatan keuntungan *mark-to-market* dibandingkan tahun 2024 dengan kontribusi sebesar Rp592 miliar terutama atas instrumen investasi reksadana.
4) Laba bersih Jasindo mencapai Rp460 miliar atau sebesar 221,56% dari target RKAP 2025, meningkat 4,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja tersebut didukung oleh efisiensi beban operasional serta perbaikan efektivitas proses penagihan piutang. Selain itu, pendapatan investasi mencapai Rp285,74 miliar atau 102,33% dari target RKAP 2025, terutama didorong oleh peningkatan keuntungan *mark-to-market* atas portofolio investasi.

Sebagai *holding*, IFG menjalankan fungsi strategis dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengoptimalkan kinerja seluruh anggota *holding* melalui koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi berkala. Fungsi ini mencakup penguatan sinergi antar perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), optimalisasi sumber daya, serta pengembangan strategi bisnis yang terintegrasi untuk memastikan pencapaian target jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Jasa Raharja recorded a net profit of IDR 2.30 trillion in 2025, representing 175.68% of its 2025 RKAP target. This performance was primarily driven by Insurance Revenue of IDR 8.17 trillion, equivalent to 128.71% of the 2025 RKAP target. The increase in revenue was mainly attributable to the Parent Company's higher Compulsory Contributions (SW), supported by the implementation of tax amnesty programs in several regions. Net profit was also supported by higher investment income, primarily due to increased mark-to-market gains compared with 2024, contributing IDR 592 billion, mainly from mutual fund investments.

4) Jasindo recorded a net profit of IDR460 billion, or 221.56% of its 2025 RKAP target, representing a 4.34% increase compared to the previous year. This performance was supported by improved operating expense efficiency and enhanced effectiveness in accounts receivable collection. In addition, investment income reached IDR 285.74 billion, or 102.33% of the 2025 RKAP target, primarily driven by higher mark-to-market gains on the investment portfolio.

As the holding company, IFG performs a strategic role in directing, overseeing, and optimizing the performance of all holding members through regular coordination, monitoring, and evaluation. This role encompasses strengthening intercompany synergies, implementing good corporate governance (GCG), optimizing resources, and developing integrated business strategies to ensure the achievement of both short-term and long-term objectives.

Profitabilitas Asuransi Umum dan Penjaminan
Profitability of General Insurance and Guarantee

Laba bersih Net Profit	***Audited* 2024**	***Audited* 2025**	**RKAP 2025**	**% Pencapaian** Achievement	**% Kenaikan** increase
(jutaan Rupiah) (IDR Million)	**a**	**b**	**c**	**d = b / c**	**e = (b-a)/a**
1. Askrindo	1.748.775	**1.694.808**	**517.100**	327,75%	-3,09%
2. Jamkrindo	1.161.494	**1.051.829**	**561.876**	187,20%	-9,44%
3. Jasa Raharja	963.737	**2.298.944**	**1.308.590**	175,68%	138,54%
4. Jasindo	441.104	**460.243**	**207.726**	221,56%	4,34%
Total Laba Bersih (1+2+3+4) Total Net Profit (1+2+3+4)	**4.315.110**	5.505.824	2.595.292	**212,15%**	**27,59%**

2. Asuransi Jiwa

a. Produksi

Pendapatan Asuransi Jiwa (Rp juta)
Life Insurance Revenue (IDR million)

Produksi Production	2025	2024	RKAP 2025	Kenaikan Increase	Pencapaian Achievement
	A	b	C	d = (a - b)/b	e = a/c
IFG Life	6.564.667	5.875.558	8.442.205	11,73%	77,76%
Total Produksi Total Production	6.564.667	**5.875.558**	8.442.205	**11,73%**	**77,76%**

Pada tahun 2025, bisnis asuransi jiwa mencatatkan pendapatan asuransi sebesar Rp6,56 triliun, atau mencapai 77,76% dibandingkan target RKAP 2025, dan naik 11,73% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian terbesar berasal dari pendapatan premi asuransi kesehatan Mandiri Inhealth. Adapun, dari IFG Life, pendapatan premi mayoritas masih berasal dari lini bisnis korporasi.

b. Pendapatan

Pada tahun 2025, hasil jasa asuransi dari bisnis asuransi jiwa sebesar Rp350,00 miliar, atau mencapai 73,86% dari target RKAP 2025, dan menurun sebesar 42,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan hasil jasa asuransi tersebut disebabkan oleh kenaikan beban jasa asuransi.

Hasil Jasa Asuransi – Asuransi Jiwa (Rp juta)
Insurance Service Result – Life Insurance (IDR million)

Pendapatan Total Revenue	2025	2024	RKAP 2025	Kenaikan Increase	Pencapaian Achievement
	A	B	C	d = (a - b)/b	e = a/c
IFG Life	350.001	608.802	473.883	-42,50%	73,86%
Total Produksi Total Production	350.001	**608.802**	473.883	**-42,50%**	**73,86%**

c. Profitabilitas

Berdasarkan PSAK 117, pada hasil *Audited* Tahun Buku 2025, anggota *holding* Asuransi Jiwa (IFG Life secara konsolidasi) membukukan laba bersih sebesar Rp482,24 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp183,48 miliar atau tumbuh 162,82% (YoY). Capaian tersebut juga melampaui target RKAP 2025 sebesar Rp76,51 miliar.

IFG Life Induk turut mencatatkan laba bersih sebesar Rp155,96 miliar, meningkat 228,47% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 9.539,79% dari target RKAP, peningkatan kinerja profitabilitas ini juga berasal dari pendapatan investasi yang mencapai 117% dari target RKAP dan didukung oleh realisasi *gain adhoc* (baik dari obligasi, saham maupun reksadana) yang mencapai Rp541 miliar, serta terdapat pendapatan

2. Life Insurance

a. Production

In 2025, the life insurance business recorded insurance revenue of IDR 6.56 trillion, representing 77.76% of the 2025 Annual Business Plan (RKAP) target and an increase of 11.73% compared to the same period the previous year. The largest contribution came from Mandiri Inhealth's health insurance premium revenue. Meanwhile, for IFG Life, the majority of premium revenue still came from the corporate line of business

b. Revenue

In 2025, the Insurance Service Result from the life insurance business amounted to IDR 350.00 billion, representing 73.86% of the 2025 RKAP target and declining by 42.50% compared to the corresponding period of the previous year. The decline in the Insurance Service Result was primarily attributable to an increase in insurance service expenses.

c. Profitability

Pursuant to PSAK 117, based on the audited financial statements for fiscal year 2025, the Life Insurance Holding (IFG Life on a consolidated basis) recorded a net profit of IDR 482.24 billion, representing a significant increase from IDR 183.48 billion in the previous year, or 162.82% YoY. This achievement also exceeded the 2025 RKAP target of IDR 76.51 billion.

The Parent Company (IFG Life) also recorded a net profit of IDR 155.96 billion, representing a 228.47% YoY increase compared to the previous year and achieving 9,539.79% of its 2025 RKAP target. The improvement in profitability was also supported by investment income, which reached 117% of the 2025 RKAP target, as well as the realization of ad hoc gains from bonds, equities, and mutual funds totaling IDR

(beban) lain lain bersih yang salah satunya termasuk pendapatan AJK *stop loss* sebesar Rp84 miliar.

Peningkatan kinerja juga didorong oleh membaiknya kinerja Asuransi Jiwa InHealth Indonesia yang membukukan laba bersih sebesar Rp313,91 miliar, meningkat 151% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 133% dari target RKAP 2025. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan hasil jasa asuransi yang berasal dari implementasi berbagai inisiatif perbaikan profitabilitas *underwriting*, antara lain melalui penguatan kecukupan cadangan serta penerapan seleksi risiko yang lebih baik dengan kebijakan *pricing* yang lebih memadai, khususnya pada produk asuransi kesehatan.

Sebagai *holding*, IFG terus menjalankan peran strategis dalam mendorong peningkatan kinerja IFG Life melalui penguatan *governance* dan pengawasan portofolio investasi, optimalisasi strategi pengelolaan aset dan liabilitas (*asset liability management*), serta penguatan sinergi dengan entitas dalam grup. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja profitabilitas, menjaga kualitas pendapatan, serta memitigasi volatilitas yang berasal dari faktor pasar dan *non-recurring income*.

541 billion. In addition, other net income (expenses) included AJK stop-loss income of IDR 84 billion.

Performance was further supported by the improved results of Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, which recorded a net profit of IDR 313.91 billion, an increase of 151% YoY from the previous year and achieving 133% of its 2025 RKAP target. This achievement was driven by an increase in the Insurance Service Result, attributable to the implementation of various underwriting profitability improvement initiatives, including strengthening reserve adequacy and enhancing risk selection through more appropriate pricing policies, particularly for health insurance products.

As the holding company, IFG continues to play a strategic role in driving IFG Life's performance by strengthening governance and investment portfolio oversight, optimizing asset-liability management (ALM) strategies, and enhancing synergies among entities within the Group. These initiatives are intended to ensure sustainable profitability, maintain the quality of earnings, and mitigate volatility arising from market factors and non-recurring income.

Profitabilitas Asuransi Jiwa
Profitability of Life Insurance

Laba bersih (jutaan Rupiah) Net Profit (IDR Million)	***Audited* 2024**	***Audited* 2025**	**RKAP 2025**	**% Pencapaian** Achievement	**% Kenaikan** increase
	a	**b**	**c**	**d = b / c**	**e = (b-a)/a**
IFG Life	183.484	**482.238**	**76.513**	630,27%	162,82%
Total Laba Bersih Total Net Profit	**183.484**	482.238	76.513	**630,27%**	**162,82%**

3. Pasar Modal dan Investasi

a. Produksi

Berdasarkan portofolio usahanya, Anggota *Holding* di segmen pasar modal dan investasi menawarkan produk dan/atau jasa yang disesuaikan dengan model bisnis masing-masing entitas. Berikut merupakan rincian produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Anggota *Holding* pasar modal dan investasi IFG:

3. Capital Markets and Investment

a. Production

Based on their business portfolios, Holding Company Members in the capital markets and investment segment offer products and/or services tailored to each entity's business model. The following is a list of the products and/or services provided by IFG's capital markets and investment Holding Company Members:

Produk dan/atau Jasa Yang Diberikan oleh Anggota *Holding* Pasar Modal dan Investasi
Products and/or Services Provided by Capital Markets and Investment Holding Company Members

Entitas Entities	**Produk/Jasa** Products/Services	
Bahana Sekuritas	· Penjamin Emisi Efek	· Underwriter
	· Jasa Penasihat Keuangan	· Financial Advisor Service
	· *Equity Brokerage*	· Equity Brokerage
	· *Fixed Income Brokerage*	· Fixed Income Brokerage
Bahana Artha Ventura	· Penyertaan Saham ke PMVD	· Equity Participation to Regional Venture Capital Company (PMVD)
	· Pembiayaan PMVJP	· Short-term Venture Capital Company (PMVJP) Financing
	· Penyertaan Saham	· Equity Participation
	· Pembiayaan Ultra Mikro	· Ultra Microfinance

Produk dan/atau Jasa Yang Diberikan oleh Anggota *Holding* Pasar Modal dan Investasi
Products and/or Services Provided by Capital Markets and Investment Holding Company Members

Entitas Entities	**Produk/Jasa** Products/Services	
Bahana TCW Investment Management	· Reksa dana Pendapatan Tetap · Reksa dana Saham · Reksa dana Pasar Uang · Reksa dana Campuran · Reksa dana Terproteksi · Reksa dana Index/ETF · Reksa dana Penyertaan Terbatas · KIK EBA · Pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD")	· Fixed Income Mutual Fund · Equity Mutual Fund · Money Market Mutual Fund · Balanced Mutual Fund · Protected Mutual Fund · Index/ETF mutual funds · Limited participation mutual fund · KIK EBA · Fund Management Contract ("KPD") Management
Bahana Kapital Investa	· Jasa Penasihat Keuangan · Jasa Pengelolaan Aset Subrogasi · Investasi pada Obligasi Konversi	· Financial Advisor Service · Subrogation Asset Management Services · Investment in Convertible Bonds
Grahaniaga Tatautama	· Pengelolaan Gedung · Pengelolaan Financial Club	· Building Management · Financial Club Management

b. Pendapatan

Dari sisi pendapatan usaha, secara agregat kinerja anggota *holding* pasar modal dan investasi mengalami kenaikan sebesar 3,52% dibandingkan tahun 2024, dari Rp655,77 miliar menjadi Rp678,83 miliar pada tahun 2025. Realisasi pendapatan usaha ini mencapai 72,47% dari target RKAP 2025. Kontribusi masing-masing anggota *holding* pasar modal dan investasi terhadap pendapatan operasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

b. Revenue

In terms of operating revenue, the aggregate performance of the capital market and investment holding company's members increased by 3.52% compared to 2024, rising from IDR 655.77 billion to IDR 678.83 billion in 2025. This realized operating revenue reached 72.47% of the 2025 Annual Work and Budget Plan (RKAP) target. The contribution of each capital market and investment holding company member to operating revenue is shown in the table below:

Pendapatan dan Pertumbuhan Usaha Anggota *Holding* Pasar Modal dan Investasi (Rp juta)
Operating Income and Business Growth of Capital Market and Investment Holding Members (IDR million)

Pendapatan usaha Operating Income	**2025 *Audited* A**	**2024 *Audited* B**	**RKAP 2025 C**	**% Kenaikan/ Penurunan d=(a-b)/b** Increase/ Decrease d=(a-b)/b	**% Pencapaian e=a/c** Achievement e=a/c
Bahana Sekuritas*)	**77.297**	91.922	168.668	-16%	46%
Bahana Artha Ventura	**115.289**	128.404	190.075	-10%	61%
Bahana TCW Investment Management	**283.799**	234.558	307.190	21%	92%
Bahana Kapital Investa	**12.681**	16.453	63.720	-23%	20%
Grahaniaga Tatautama	**189.771**	184.434	207.095	3%	92%
Total	678.837	**655.771**	**936.748**	**4%**	**72%**

*)Perincian pendapatan menggunakan laporan internal anggota holding menggunakan Net Revenue
*)Revenue details using the holding company's internal reports, based on Net Revenue

Fokus utama dari anggota *holding* bidang pasar modal dan investasi adalah meningkatkan perannya sebagai *strategic enabler*, baik di ekosistem IFG maupun ekosistem BUMN, terutama dalam optimalisasi kinerja aset investasi anggota *holding*, mendukung pengembangan bisnis, dan peningkatan *recovery* atas aset subrogasi.

The primary focus of the holding company's capital markets and investment subsidiaries is to enhance their role as strategic enablers, both within the IFG ecosystem and the state-owned enterprise (SOE) ecosystem, particularly in optimizing the performance of the holding company's investment assets, supporting business development, and improving recovery rates on subrogated assets.

Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja per anggota *holding* pasar modal dan investasi dari sisi pendapatan operasionalnya:

1) Bahana Sekuritas

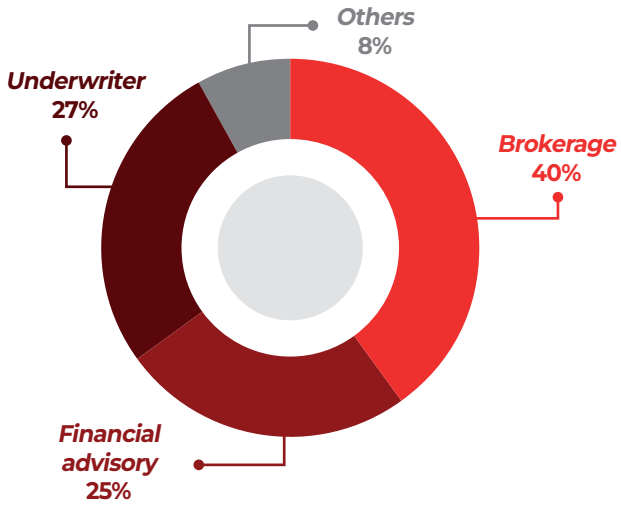
Produk dan/jasa yang disediakan oleh BS dapat dikelompokkan menjadi empat lini bisnis, yaitu bisnis *brokerage, financial advisory, underwriter*, dan bisnis lainnya. Proporsi pendapatan operasional neto BS pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The following is a further elaboration on the performance of each capital markets and investment subsidiary in terms of operating income:

1) Bahana Sekuritas

The products and/or services provided by BS are grouped into four business lines: brokerage, financial advisory, underwriting, and other businesses. The proportion of BS's net operating income in 2025 is as follows:

Proporsi Pendapatan Operasional Neto BS
Proportion of BS's net operating income



Dari lini bisnis *investment banking financial advisory*, BS membukukan pendapatan bersih senilai Rp77,30 miliar pada tahun 2025, turun 15,91% secara YoY. BS kesulitan mengembangkan pipeline serta mendapatkan BAST untuk melakukan billing project karena pergeseran timeline proyek-proyek nasabah yang kebanyakan berasal dari ekosistem BUMN.

From the investment banking and financial advisory business line, BS recorded net revenue of IDR 77.30 billion in 2025, declining 15.91% (YoY). BS encountered difficulties in developing its pipeline and securing BASTs to bill projects due to shifts in the timelines of client projects, most of which originated from the state-owned enterprise (SOE) ecosystem.

Dari lini bisnis *brokerage*, BS membukukan pendapatan sebesar Rp31,17 miliar pada tahun 2025, turun 4,74% dibandingkan tahun 2024. Beberapa faktor menjadi penyebab penurunan ini, yaitu penurunan pendapatan *equity brokerage* karena terbatasnya *client coverage* BS, perubahan strategi investasi saham di beberapa nasabah kunci BS di periode ini, serta dikeluarkannya BS dari daftar broker salah satu nasabah kuncinya.

From the brokerage business line, BS recorded revenue of IDR 31.17 billion in 2025, a decrease of 4.74% compared to 2024. Several factors contributed to this decline, including a decrease in equity brokerage revenue due to BS's limited client coverage, changes in stock investment strategies among several of BS's key clients during this period, and BS's removal from the broker list of one of its key clients.

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan, manajemen BS melakukan perekrutan posisi senior di lini bisnis *equity institution brokerage* untuk melengkapi *client coverage* BS. Proses perekrutan ini telah dilaksanakan pada triwulan III 2025.

In an effort to boost revenue, BS management recruited senior-level personnel in the equity institution brokerage business line to expand BS's client coverage. This recruitment process was carried out in the third quarter of 2025.

Adapun, lini bisnis *fixed income brokerage* di BS menunjukkan peningkatan akibat tren kenaikan pasar. Selain itu, kekosongan *sales* di lini bisnis

Meanwhile, BS's fixed-income brokerage business line showed growth due to an upward market trend. In addition, management filled

fixed income juga telah diisi oleh manajemen untuk meningkatkan kapabilitas tim *fixed income brokerage*.

Sementara untuk bisnis *underwriter* BS mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp21,11 miliar meningkat sebesar 65,46% dibandingkan tahun 2024 karena telah terealisasinya proyek *underwriting* obligasi di *pipeline*. Dampak positif ini juga dapat diatribusikan kepada sinergi tim *sales fixed income brokerage* yang telah semakin lengkap.

Di luar itu, pendapatan lainnya tercatat sebesar Rp5,86 miliar karena terdapat pendapatan bunga obligasi dari jasa *warehousing*, yakni salah satu inisiatif bisnis yang dilakukan oleh BS secara intensif di tahun 2025. Meskipun jasa *warehousing* ini menjanjikan, terdapat kendala kekuatan permodalan pada BS. Untuk memaksimalkan peluang bisnis jasa *warehousing*, BS membutuhkan tambahan modal atau pinjaman subordinasi di tahun mendatang.

sales vacancies in the fixed-income business line to enhance the capabilities of the fixed-income brokerage team.

Meanwhile, BS's underwriting business recorded net revenue of IDR 21.11 billion, an increase of 65.46% compared to 2024, due to the successful completion of bond underwriting projects in the pipeline. This positive impact can also be attributed to the synergy of the fixed-income brokerage sales team, which has become more comprehensive.

Furthermore, other revenue totaled IDR 5.86 billion, driven by bond interest income from warehousing services—one of the business initiatives BS pursued intensively in 2025. Although these warehousing services show promise, BS faces capital constraints. To maximize business opportunities in warehousing services, BS will require additional capital or subordinated loans in the coming year.

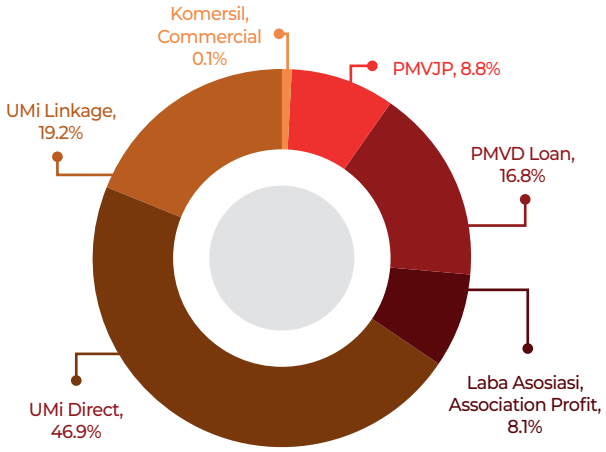
2) Bahana Artha Ventura

Proporsi pendapatan operasional neto BAV di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2) Bahana Artha Ventura

The proportion of BAV's net operating income in 2025 is as follows:

Proporsi Pendapatan Operasional Neto BAV
Proportion of BAV's net operating income



Pendapatan operasional konsolidasi BAV mencapai Rp115,28 miliar, turun 10,21% dari Rp128,40 miliar secara YoY. Penurunan ini dipicu oleh peralihan strategi pembiayaan UMi dari skema *linkage* ke model *direct lending* melalui mitra penyalur.

Pendapatan operasional entitas induk tercatat Rp27,34 miliar, dengan kontribusi utama dari UMi *direct lending* sebesar Rp12,82 miliar atau 46,89% yang mencerminkan fokus utama BAV pada *direct lending* sebagai pilar pertumbuhan baru. Seiring dengan perubahan model bisnis ini, porsi UMi *linkage* pun turun, yaitu menyumbang Rp5,26

BAV's consolidated operating income reached IDR 115.28 billion, a decrease of 10.21% from IDR 128.40 billion year-over-year. This decline was driven by the shift in UMi's financing strategy from a linkage scheme to a direct lending model through distribution partners.

The parent company's operating income was recorded at IDR 27.34 billion, with the main contribution coming from UMi direct lending at IDR 12.82 billion, or 46.89%, reflecting BAV's primary focus on direct lending as a new pillar of growth. In line with this business model shift, the share of UMi linkage also decreased, contributing

miliar atau 19,25%. Adapun, pinjaman kepada PMVD menyumbang Rp4,60 miliar atau 16,83%, diikuti oleh produk PMVJP sebesar Rp2,41 miliar atau 8,84%, serta laba asosiasi sebesar Rp2,22 miliar atau 8,11%. Sementara itu, pembiayaan komersial memberikan kontribusi paling kecil sebesar Rp21,52 juta atau 0,08%.

Komposisi ini mencerminkan transformasi BAV ke model bisnis yang lebih efisien dan tangguh, dengan fokus pada *direct lending* dan penguatan portofolio melalui PMVJP.

3) Bahana TCW Investment

Proporsi pendapatan operasional neto BTIM di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

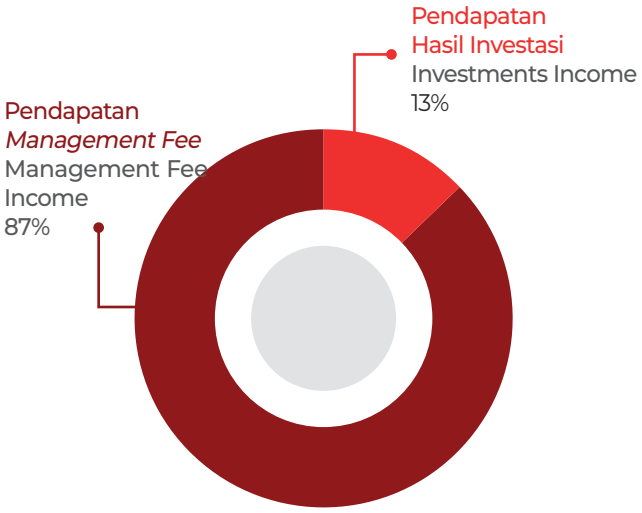
IDR 5.26 billion, or 19.25%. Meanwhile, loans to PMVD contributed IDR 4.60 billion, or 16.83%, followed by PMVJP products at IDR 2.41 billion, or 8.84%, and profit from associates at IDR 2.22 billion, or 8.11%. In contrast, commercial financing made the smallest contribution at IDR 21.52 million, or 0.08%.

This composition reflects BAV's transformation toward a more efficient and resilient business model, with a focus on direct lending and portfolio strengthening through PMVJP.

3) Bahana TCW Investment

The proportion of BTIM's net operating income in 2025 is as follows:

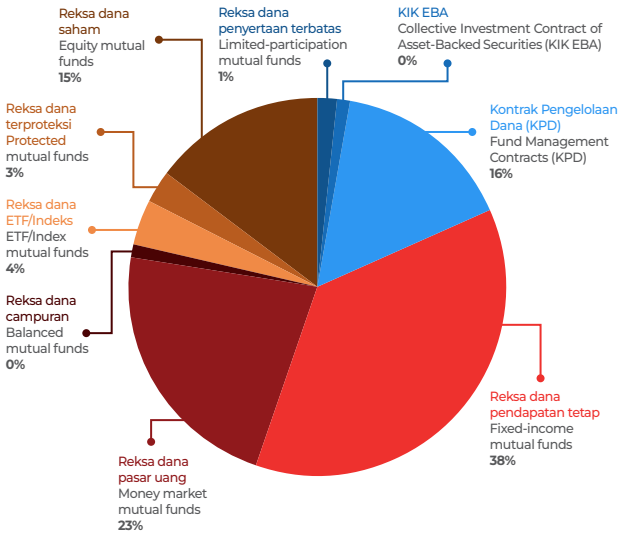
Proporsi Pendapatan Operasional Neto BTIM
Proportion of BTIM's net operating income



Pendapatan operasional neto BTIM bersumber dari hasil investasi 13% dan komisi pengelolaan dana atau *management fee* 87%. Adapun, secara lebih terperinci, komposisi pendapatan *management fee* (bruto) per masing-masing jenis reksa dana sebagai berikut:

BTIM's net operating income consists of 13% from investment returns and 87% from management fees. More specifically, the details of gross management fee revenue by mutual fund type is as follows:

Komposisi Pendapatan *Management Fee* (Bruto)
Composition of Gross Management Fee Revenue



Kontribusi pendapatan *management fee* terbesar berasal dari reksa dana pendapatan tetap (28,31%) dan reksa dana pasar uang (22,37%). Produk reksa dana pendapatan tetap dengan AUM terbesar adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap Makara Prima (Rp9,96 triliun) sementara produk reksa dana pasar uang dengan AUM terbesar adalah Reksa Dana Bahana Dana Likuid (Rp3,23 triliun). Proporsi AUM ini sejalan dengan perubahan strategi produk BTIM dalam mengembangkan kedua jenis produk tersebut. Reksa dana yang diterbitkan BTIM dijual kepada nasabah ritel dan institusi, baik melalui APERD, *website* BahanaLink, maupun melalui tim sales BTIM. Penjualan melalui APERD berdampak pada peningkatan beban pembagian *management fee* di BTIM, yaitu berupa imbalan kepada APERD yang berkisar 50%-90% dari *management fee* bruto yang diterima oleh BTIM.

Secara total, pendapatan *management fee* bruto BTIM tahun 2025 mencapai Rp396,49 miliar, meningkat 19,37% (YoY). Pendapatan *management fee* meningkat terutama dari reksa dana pendapatan tetap, seiring dengan tren kenaikan signifikan AUM produk reksa dana jenis ini.

The largest contributions to management fee revenue came from fixed-income mutual funds (28.31%) and money market mutual funds (22.37%). The fixed-income mutual fund with the largest AUM is the Makara Prima Fixed-Income Mutual Fund (IDR 9.96 trillion), while the money market mutual fund with the largest AUM is the Bahana Dana Likuid Mutual Fund (IDR 3.23 trillion). This AUM distribution aligns with changes in BTIM's product strategy to develop these two types of products. Mutual funds issued by BTIM are sold to retail and institutional clients, either through APERD, the BahanaLink website, or via BTIM's sales team. Sales through APERD have led to an increase in BTIM's management fee distribution expenses, which consist of commissions paid to APERD ranging from 50% to 90% of the gross management fees received by BTIM.

In total, BTIM's gross management fee revenue in 2025 reached IDR 396.49 billion, an increase of 19.37% (YoY). Management fee revenue increased primarily from fixed-income mutual funds, in line with the trend of a significant rise in the AUM of this type of mutual fund product.

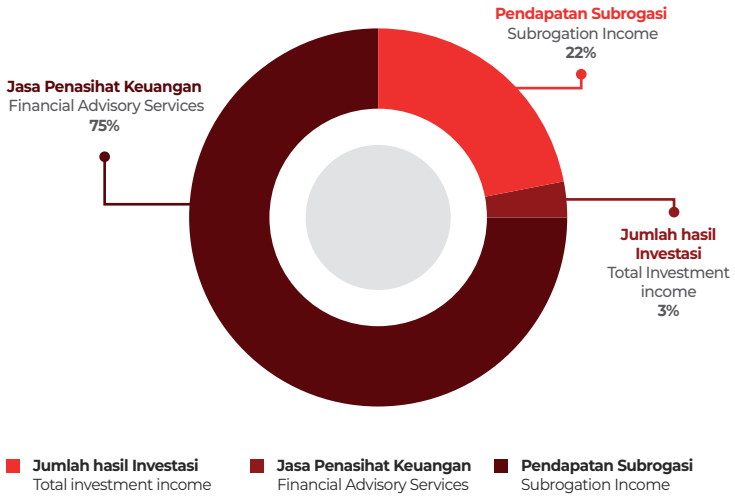
4) Bahana Kapital Investa

Proporsi pendapatan operasional neto Bahana Kapital Investa (BKI) pada Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4) Bahana Kapital Investa

The proportion of Bahana Kapital Investa (BKI)'s net operating income in December 2025 is as follows:

Proporsi Pendapatan Operasional Neto BKI
Proportion of BKI's net operating income



Pada tahun 2025, pendapatan operasional BKI tercatat sebesar Rp12,68 miliar atau setara 19,90% dari target RKAP YTD tahun 2025 sebesar Rp63,72 miliar. Pendapatan ini bersumber dari hasil investasi pada instrumen deposito dan reksa dana yang mencapai Rp0,13 miliar atau 19,38% dari target RKAP YTD tahun 2025 sebesar Rp0,68 miliar. Selain itu, pendapatan jasa penasihat keuangan menyumbang sebesar Rp9,69 miliar yang merepresentasikan 24,90% dari target RKAP YTD tahun 2025 sebesar Rp38,93 miliar. Adapun pendapatan dari subrogasi tercatat sebesar Rp2,85 miliar atau setara 13,48% dari target RKAP YTD tahun 2025 sebesar Rp21,18 miliar. Di sisi lain, pendapatan dari kerja sama investasi pada instrumen exchangeable bonds tidak dapat terealisasi. Hal ini sejalan dengan keputusan manajemen untuk menghentikan pencatatan pendapatan secara akrual atas capital gain dan kupon, sebagai tindak lanjut atas kondisi gagal bayar dari pihak obligor. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Direksi BKI dan ditetapkan melalui memo internal BKI tertanggal 27 Maret 2025.

In 2025, BKI's operating income stood at IDR 12.68 billion, equivalent to 19.90% of the 2025 YTD budget target of IDR 63.72 billion. This revenue came from investment returns on deposits and mutual funds, which totaled IDR 0.13 billion, or 19.38% of the 2025 YTD RKAP target of IDR 0.68 billion. In addition, revenue from financial advisory services contributed IDR 9.69 billion, representing 24.90% of the 2025 YTD RKAP target of IDR 38.93 billion. Revenue from subrogation was recorded at IDR 2.85 billion, equivalent to 13.48% of the 2025 YTD RKAP target of IDR 21.18 billion. On the other hand, revenue from investment partnerships in exchangeable bonds could not be realized. This is in line with management's decision to cease recognizing revenue on an accrual basis for capital gains and coupons, as a follow-up to the obligor's default. This decision was approved by BKI's Board of Directors and formalized via an internal BKI memo dated March 27, 2025.

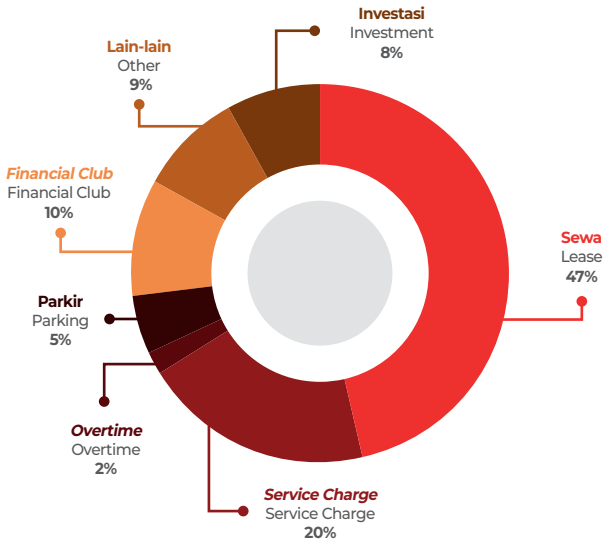
5) Grahaniaga Tatautama

Proporsi pendapatan operasional neto Grahaniaga Tatautama (GNT) pada YTD Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut:

5) Grahaniaga Tatautama

The proportion of Grahaniaga Tatautama (GNT)'s net operating income in YTD December 2025 is as follows:

Proporsi Pendapatan Operasional Neto GNTU
Proportion of GNTU's net operating income



Pendapatan pengelolaan gedung didapatkan dari pendapatan sewa, parkir dan pendapatan lainnya dari sewa atas gedung Graha CIMB Niaga Sudirman. Pada tahun 2025, *occupancy rate* gedung GNTU mencapai 97,88% dari total *rentable spaces* sehingga lini bisnis ini dapat menyumbang 89,28% dari total pendapatan GNTU. IFG dan Anggota *holding* menempati 35,27% dari *rentable spaces* di GNTU. Selain pendapatan pengelolaan gedung, GNTU mendapatkan pendapatan pengelolaan Financial Club yang dilakukan oleh anak perusahaan GNTU. Di luar gedung Graha CIMB Niaga Sudirman, GNTU mulai mengelola aset grup IFG, seperti Gedung Jamkrindo Pusat dan Jamkrindo Syariah yang memberikan tambahan pendapatan baru setiap bulan. Selain itu, GNTU berhasil merealisasikan pengembangan area ritel di kantor Jasa Raharja.

Building management income is derived from lease income, parking fees, and other income from the lease of the Graha CIMB Niaga Sudirman building. In 2025, the occupancy rate of GNTU's buildings reached 97.88% of total rentable space, enabling this business line to contribute 89.28% of GNTU's total revenue. IFG and its holding company affiliates occupy 35.27% of the rentable space at GNTU. In addition to building management income, GNTU generates revenue from the management of the Financial Club, which is operated by a GNTU subsidiary. In addition to the Graha CIMB Niaga Sudirman building, GNTU has begun managing IFG Group assets, such as the Jamkrindo Pusat and Jamkrindo Syariah buildings, which generate additional monthly revenue. Furthermore, GNTU has successfully developed a retail area at the Jasa Raharja office.

c. Profitabilitas

Berdasarkan hasil *Audited* Tahun Buku 2025, anggota *holding* Pasar Modal dan Investasi membukukan laba bersih sebesar Rp71,84 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp45,73 miliar atau tumbuh 57,09% YoY. Namun Realisasi tersebut juga masih di bawah target RKAP 2025 sebesar Rp174,47 miliar, dengan tingkat pencapaian mencapai 41,18%.

Pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

c. Profitability

Based on the audited results for Fiscal Year 2025, the Capital Market and Investment holding company recorded a net profit of IDR 71.84 billion, a significant increase compared to the same period the previous year of IDR 45.73 billion, representing 57.09% year-on-year growth. However, this realization still below the 2025 Budget Plan (RKAP) target of IDR 174.47 billion, with an achievement rate of 41.18%.

This performance was driven by the following factors:

1) Peningkatan laba bersih terutama didorong oleh kontribusi BTIM yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp78,40 miliar, tumbuh 86,51% YoY, dan mencapai 118,67% dari target RKAP 2025. Kinerja positif ini didukung oleh meningkatnya pendapatan *management fee* atas *Asset Under Management* (AUM) seiring bertumbuhnya AUM yang mencapai Rp95,9 triliun (30% YoY), khususnya dari pengelolaan Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

2) GNTU juga memberikan kontribusi signifikan dengan laba bersih sebesar Rp80,38 miliar, tumbuh 8,02% YoY, serta mencapai 107,38% dari target RKAP 2025. Capaian ini terutama ditopang oleh pendapatan sewa dan pengelolaan gedung serta restoran yang tetap stabil dengan tingkat okupansi yang tinggi yaitu sebesar 97,88%. Namun, masih ada sekitar 734,22 m^2 *space vacan*t seluas 734,22 m^2 yang berada di Lantai 10 dan Lantai 26 sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan tingkat okupansi. Selain itu, pendapatan operasional dari pengelolaan videotron belum terealisasi hingga akhir tahun 2025, sementara kawasan *new retail* baru mulai beroperasi pada Desember 2025 sehingga kontribusinya terhadap pendapatan tahun berjalan masih terbatas.
3) Di sisi lain, BAV membukukan rugi bersih sebesar Rp23,29 miliar, memburuk 11,02% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan kinerja terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan operasional sebesar Rp13,11 miliar dibandingkan tahun lalu dan masih berada di bawah target RKAP sebesar Rp74,79 miliar, seiring realisasi *outstanding* pembiayaan yang lebih rendah dari target. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peralihan strategi pembiayaan Ultra Mikro dari *skema linkage* ke model *direct lending* melalui mitra penyalur. Namun, kinerja mitra penyalur yang belum optimal menyebabkan kualitas portofolio belum membaik secara memadai, sehingga terdapat peningkatan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada tahun 2025 yang turut menekan profitabilitas.
4) Sementara itu, BS masih mencatatkan rugi bersih sebesar Rp40,97 miliar atau mengalami penurunan dari periode sebelumnya sebesar 25,84%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada *Net Operating Revenue* dari *Advisory* karena ditundanya sejumlah proyek di klaster klien utama BS (Perusahaan BUMN) akibat adanya perubahan struktur kepemilikan BUMN di 2025.

5) Rugi bersih BKI tercatat sebesar Rp22,67 miliar, mengalami perburukan 32,00% dibandingkan periode sebelumnya. Kinerja tersebut terutama tertekan oleh pembentukan *impairment* sebesar 100% atas investasi pada instrumen *exchangeable bonds* akibat gagal bayar *counterparty* berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai

1) The increase in net profit was primarily driven by BTIM's contribution, which recorded a net profit of IDR 78.40 billion—an 86.51% year-on-year increase—and reached 118.67% of the 2025 Annual Business Plan target. This positive performance was supported by higher management fee income from Assets Under Management (AUM), driven by AUM growth to IDR 95.9 trillion (30% YoY), particularly from the management of fixed-income mutual funds and discretionary fund management (DFM).
2) GNTU also made a significant contribution by recording a net profit of IDR 80.38 billion, representing an 8.02% YoY increase and achieving 107.38% of its 2025 RKAP target. This achievement was primarily supported by stable rental income and building and restaurant management revenue, with a high occupancy rate of 97.88%. However, approximately 734.22 m^2 of vacant space remained on the 10th and 26th floors, indicating further opportunities to improve occupancy levels. In addition, operating income from videotron management had not been realized by the end of 2025, while the new retail area only commenced operations in December 2025, limiting its contribution to revenue for the current year.
3) Meanwhile, BAV recorded a net loss of IDR 23.29 billion, deteriorating by 11.02% compared to the previous period. The decline in performance was primarily attributable to a IDR 13.11 billion decrease in operating income compared to the previous year, with revenue remaining IDR 74.79 billion below the 2025 RKAP target, in line with outstanding financing balances that is below the target. This condition was driven by the shift in the Ultra Micro financing strategy from a linkage scheme to a direct lending model through channeling partners. However, the suboptimal performance of the channeling partners prevented adequate improvement in portfolio quality, resulting in a higher provision for impairment losses (CKPN) in 2025, which further weighed on profitability.
4) Meanwhile, BS continued to record a net loss of IDR 40.97 billion, representing a 25.84% deterioration from the previous period. This was mainly due to a decline in net operating revenue from advisory services following the postponement of several projects within BS's key client cluster (SOEs) as a result of changes in the ownership structure of SOEs in 2025.

5) BKI recorded a net loss of IDR 22.67 billion, representing a 32.00% deterioration compared to the previous period. Performance was primarily affected by the recognition of a 100% impairment loss on investments in exchangeable bond instruments following a counterparty default, based on the valuation conducted by a Public

Publik (KJPP), yang diikuti dengan penghentian pengakuan pendapatan akrual atas instrumen tersebut. Di sisi lain, realisasi pendapatan dari bisnis subrogasi dan jasa *advisory* yang belum optimal turut memengaruhi pencapaian kinerja Perseroan.

6) Secara keseluruhan, kinerja Anak Perusahaan Pasar Modal dan Investasi tahun 2025 masih mencatatkan hasil yang positif secara agregat, meskipun masih terdapat beberapa entitas yang membukukan rugi bersih. Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan akan difokuskan pada peningkatan profitabilitas entitas yang belum optimal melalui penguatan sumber pendapatan, pengendalian biaya, optimalisasi sinergi, serta penyelarasan strategi dan struktur bisnis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan portofolio.

Appraisal Firm (KJPP). This was subsequently followed by the discontinuation of accrued income recognition on the related instruments. In addition, the less-than-optimal realization of revenue from the subrogation business and advisory services also affected the Company's overall performance.

6) Overall, the Capital Market and Investment Subsidiaries recorded positive aggregate performance in 2025, although several entities continued to report net losses. Accordingly, future improvement efforts will focus on enhancing the profitability of underperforming entities by strengthening revenue sources, controlling costs, optimizing synergies, and aligning business strategies and structures to improve the effectiveness of portfolio management.

Profitabilitas Pasar Modal dan Investasi
Capital Market and Investment Profitability

Laba Bersih (jutaan Rupiah) Net Profit (in million IDR)	***Audited* 2024**	***Audited* 2025**	**RKAP 2025**	**Pencapaian** Achievement **%**	**Kenaikan** increase **%**
	a	**b**	**c**	**d = b / c**	**e = (b-a)/a**
Bahana Sekuritas	(32.561)	**(40.975)**	**15.472**	-264,84%	-25,84%
Bahana Artha Ventura	(20.982)	**(23.294)**	**15.068**	-154,60%	-11,02%
Bahana TCW Investment Management	42.036	**78.402**	**66.069**	118,67%	86,51%
Bahana Kapital Investa	(17.171)	**(22.665)**	**3.016**	-751,41%	-32,00%
Grahaniaga Tatautama	74.411	**80.377**	**74.850**	107,38%	8,02%
Total Laba Bersih (1+2+3+4+5) Total Net Profit (1+2+3+4+5)	**45.733**	71.845	174.475	**41,18%**	**57,09%**

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Uraian dan analisis atas kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini disusun dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Indonesia Financial Group untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

The description and analysis of financial performance presented in this Annual Report are based on the consolidated financial statements of Indonesia Financial Group for the fiscal years ended December 31, 2024 and 2025, which were audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) and received an unmodified opinion that the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position, financial performance, and cash flows of the Group.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK), yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan–Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI), as well as applicable laws and regulations.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Aset
Assets

(dalam miliar Rupiah)
(In billion IDR)

URAIAN DESCRIPTION	2025	2024	YoY (Rp)	YoY (%)	RKAP 2025	Ach-%
ASET ASSETS						
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	**13.016**	15.229	(2.213)	-15%	**9.901**	131%
Investasi Investment	**78.173**	76.466	1.707	2%	**89.026**	88%
Piutang penjaminan, koasuransi, dan kontribusi syariah Guarantee, Coinsurance, and Sharia Contribution Receivables	**3.352**	3.919	(567)	-14%	**2.485**	135%
Piutang penjaminan ulang, koasuransi dan klaim syariah Reguarantee Receivables, Coinsurance Receivables, and Sharia Claims Receivables	**227**	243	(16)	-7%	**476**	48%
Piutang pembiayaan modal ventura Venture Capital Financing Receivables	**710**	869	(159)	-18%	**1.135**	63%
Piutang usaha dan lain-lain Trade and Other Receivables	**3.197**	3.341	(144)	-4%	**2.583**	124%
Aset kontrak asuransi Insurance Contract Assets	**57**	64	(7)	-11%	**3.524**	2%
Aset kontrak reasuransi Reinsurance Contract Assets	**10.140**	9.741	399	4%	**7.771**	130%

Aset
Assets

(dalam miliar Rupiah)
(In billion IDR)

URAIAN DESCRIPTION	2025	2024	YoY (Rp)	YoY (%)	RKAP 2025	Ach-%
ASET ASSETS						
Aset pengembalian dan reasuransi syariah Reimbursement Assets and Sharia Reinsurance	**1.117**	1.065	52	5%	**1.194**	94%
Properti investasi Investment Properties	**7.512**	4.968	2.544	51%	**4.398**	171%
Aset tetap dan aset hak guna Property and Right-of-Use Assets	**3.107**	3.347	(240)	-7%	**3.754**	83%
Aset lain-lain Other Assets	**10.536**	10.866	(330)	-3%	**13.188**	80%
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	131.144	**130.118**	**1.026**	**1%**	139.435	**94%**

Total aset IFG konsolidasian pada 31 Desember 2025 sebesar Rp131,14 triliun atau 94% dari RKAP 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar Rp1,03 triliun atau 1%. Peningkatan tersebut terutama dikontribusi oleh:

1. Peningkatan properti investasi terutama di IFG *Holding* dampak dari pengakuan properti investasi atas aset Citos sebesar Rp2,55 triliun yang merupakan reklasifikasi dari uang muka pembelian aset (dicatat sebagai aset lain-lain) dan pengakuan utang nonbank (dicatat sebagai utang lain-lain).

2. Disisi lain, terdapat penurunan kas dan setara kas sebesar Rp2,21 triliun *net-off* dengan peningkatan investasi sebesar Rp1,71 triliun yang mencerminkan bahwa pembayaran tahun berjalan tidak sepenuhnya dari pencairan portofolio Investasi, yang dipengaruhi oleh:
   - Perubahan penempatan investasi dari deposito yang kurang dari 3 bulan (dicatat sebagai kas dan setara kas) ke deposito diatas 3 bulan (dicatat sebagai investasi) yang terjadi di Askrindo dan Jamkrindo.
   - Di sisi lain, saldo investasi pada IFG Life mengalami penurunan sebagai akibat realisasi pembayaran klaim atas polis eks-Jiwasraya selama tahun berjalan, yang dibiayai melalui pencairan portofolio investasi.

Total consolidated assets of IFG as of December 31, 2025 amounted to IDR 131.14 trillion, representing 94% of the 2025 RKAP target. Compared to the previous year, total assets increased by IDR 1.03 trillion, or 1%. The increase was primarily attributable to the following:

1. An increase in investment properties, mainly at IFG Holding, resulting from the recognition of the Citos property as an investment property amounting to IDR 2.55 trillion, reclassified from advances for the acquisition of assets (previously recorded under other assets), along with the recognition of non-bank liabilities (recorded under other liabilities).
2. A decrease in cash and cash equivalents of IDR 2.21 trillion, offset by an increase in investments of IDR 1.71 trillion, indicating that payments made during the year were not financed entirely through the liquidation of the investment portfolio. This was primarily driven by:
   - The reallocation of investments from time deposits with maturities of less than three months (classified as cash and cash equivalents) to time deposits with maturities of more than three months (classified as investments) at Askrindo and Jamkrindo.

On the other hand, IFG Life's investment balance declined as a result of claim payments on former Jiwasraya policies during the year, which were funded through the liquidation of its investment portfolio.

Liabilitas
Liabilities

(dalam miliar Rupiah)
(in billion IDR)

URAIAN DESCRIPTION	2025	2024	YoY (Rp)	YoY (%)	RKAP 2025	Ach-%
LIABILITAS LIABILITIES						
Utang klaim penjaminan, koasuransi, dan klaim syariah Guarantee Claims Payables, Coinsurance Payables, and Sharia Claims Payables	**506**	1.121	(615)	-55%	**1.169**	43%
Utang premi penjaminan ulang, koasuransi dan kontribusi syariah Reguarantee Premium, Coinsurance, and Sharia Contribution Payables	**243**	250	(7)	-3%	**1.960**	12%
Pinjaman dari Pemerintah Government Loans	**788**	758	30	4%	**515**	153%
Liabilitas kontrak asuransi Insurance Contract Liabilities	**48.191**	50.258	(2.067)	-4%	**47.612**	101%
Liabilitas kontrak reasuransi Reinsurance Contract Liabilities	**25**	153	(128)	-84%	**9.573**	0%
Liabilitas kontrak jaminan keuangan dan kontrak asuransi syariah Financial Guarantee Contract and Sharia Insurance Contract Liabilities	**22.678**	26.029	(3.351)	-13%	**18.150**	125%
Utang bank Bank Loans	**971**	2.363	(1.392)	-59%	**1.065**	91%
Medium Term Notes	**967**	1.116	(149)	-13%	**3.565**	27%
Liabilitas imbalan kerja Employee Benefit Liabilities	**1.133**	1.287	(154)	-12%	**1.695**	67%
Utang lain-lain Other Payables	**15.048**	12.622	2.426	19%	**12.436**	121%
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	90.550	**95.957**	**(5.407)**	**-6%**	97.740	**93%**

Total liabilitas IFG konsolidasian pada 31 Desember 2025 sebesar Rp90,55 triliun atau 93% dari RKAP 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar Rp5,41 triliun atau 6%. Penurunan tersebut terutama dikontribusi oleh:

1. Penurunan liabilitas kontrak jaminan keuangan sebesar Rp2,82 triliun terutama dari portfolio KUR di Jamkrindo dan Askrindo yang disebabkan oleh penjaminan yang jatuh tempo lebih banyak dari penjaminan yang baru dampak dari penurunan produksi tahun berjalan.
2. Penurunan liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp2,07 triliun terutama di atas portofolio ex-Jiwasraya dampak dari pembayaran klaim pada tahun berjalan.
3. Penurunan utang bank sebesar Rp1,39 triliun di IFG *Holding* dampak dari pembayaran pokok selama tahun berjalan.
4. Disisi lain, terdapat peningkatan utang penyelesaian tanda minat aset Citos di IFG *Holding* sebesar Rp0,98 triliun (dimana hak atas aset Citos tersebut telah dicatat sebagai properti investasi).

Total consolidated liabilities of IFG as of December 31, 2025 amounted to IDR 90.55 trillion, representing 93% of the 2025 RKAP target. Compared to the previous year, total liabilities decreased by IDR 5.41 trillion, or 6%. The decrease was primarily attributable to the following:

1. A decrease in financial guarantee contract liabilities of IDR 2.82 trillion, primarily related to the KUR portfolio at Jamkrindo and Askrindo, as the volume of guarantees reaching maturity exceeded the volume of newly issued guarantees due to lower guarantee production for the year.
2. A decrease in insurance contract liabilities of IDR 2.07 trillion, mainly attributable to the former Jiwasraya portfolio as a result of claim payments made during the year.
3. A decrease in bank borrowings of IDR 1.39 trillion at IFG Holding, reflecting principal repayments made during the year.
4. On the other hand, liabilities related to the settlement of the expression of interest (EOI) for the Citos asset at IFG Holding increased by IDR 0.98 trillion, while the rights to the Citos asset have been recognized as investment property.

Ekuitas
Equity

(dalam miliar Rupiah)
(in billion IDR)

URAIAN DESCRIPTION	2025	2024	YoY (Rp)	YoY (%)	RKAP 2025	Ach-%
DANA TABARRU' & EKUITAS TABARRU' FUNDS & EQUITY						
Dana *Tabarru'* Tabarru' Fund	**(1.448)**	(1.762)	314	18%	**(312)**	464%
Total Ekuitas Total Equity	**42.042**	35.923	6.119	17%	**42.007**	100%
TOTAL LIABILITAS, DANA *TABARRU'* & EKUITAS TOTAL LIABILITIES, TABARRU' FUNDS & EQUITY	131.144	**130.118**	**1.026**	**1%**	139.435	**94%**

Catatan: Angka 12M24-R menggunakan basis laporan posisi keuangan yang telah disajikan kembali (restated) sesuai dengan penerapan PSAK 117: Kontrak Asuransi dan PSAK 109: Instrumen Keuangan.
Note: The 12M24-R figures are based on the restated statement of financial position following the adoption of PSAK 117: Insurance Contracts and PSAK 109: Financial Instrument.

Total ekuitas IFG konsolidasian pada 31 Desember 2025 sebesar Rp42,04 triliun atau 100% dari RKAP 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar Rp6,12 triliun atau 17%. Peningkatan tersebut terutama dikontribusi oleh:

1. Peningkatan saldo laba sebesar Rp5,51 triliun yang merupakan absorb laba tahun berjalan.
2. Peningkatan penghasilan komprehensif sebesar Rp0,71 triliun yang berasal dari peningkatan keuntungan atas aset keuangan *net-off* dengan kerugian keuangan atas kontrak asuransi dampak dari peningkatan suku bunga pada tahun berjalan.

Total consolidated equity of IFG as of December 31, 2025 amounted to IDR 42.04 trillion, representing 100% of the 2025 RKAP target. Compared to the previous year, total equity increased by IDR 6.12 trillion, or 17%. The increase was primarily attributable to the following:

1. An increase in retained earnings of IDR 5.51 trillion, reflecting the accumulation of profit for the current year.
2. An increase in other comprehensive income of IDR 0.71 trillion, primarily driven by higher gains on financial assets, offset by insurance finance losses on insurance contracts resulting from the increase in interest rates for the year.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam miliar Rupiah)
(in billion IDR)

URAIAN DESCRIPTION	2025	2024	YoY (Rp)	YoY (%)	RKAP 2025	Ach-%
Pendapatan asuransi Insurance Revenue	**19.609**	19.427	182	1%	**30.230**	65%
Bban jasa asuransi Insurance Service Expenses	**(14.441)**	(14.273)	(168)	-1%	**(26.179)**	55%
Pendapatan / (beban) kontrak reasuransi Income / (Expenses) from Reinsurance Contracts	**(2.307)**	(2.125)	(182)	-9%	**(2.462)**	94%
Hasil jasa asuransi Insurance Service Results	**2.861**	**3.029**	**(168)**	**-6%**	**1.589**	**180%**
Imbal jasa penjaminan dan pendapatan penjaminan syariah – bersih Guarantee Fee Income and Sharia Guarantee Income – Net	**11.639**	11.900	(261)	-2%	**7.216**	161%
Beban klaim penjaminan – bersih Net Guarantee Claims Expenses	**(9.254)**	(11.910)	2.656	22%	**(7.858)**	118%
Pendapatan subrogasi – bersih Subrogation Income- Net	**2.928**	3.394	(466)	-14%	**1.583**	185%
Beban akuisisi dan komisi – bersih Acquisition Cost and Commission Expenses - Net	**(164)**	(30)	(134)	-447%	**198**	-83%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam miliar Rupiah)
(in billion IDR)

URAIAN DESCRIPTION	2025	2024	YoY (Rp)	YoY (%)	RKAP 2025	Ach-%
Hasil kegiatan penjaminan Guarantee Service Result	**5.149**	**3.354**	**1.795**	**54%**	**1.139**	**452%**
Pendapatan/(beban) *underwriting* lain-lain Other Underwriting Income/(Expenses)	**(748)**	(207)	(541)	-261%	**182**	-411%
Hasil investasi – bersih Investment Income - Net	**6.836**	5.736	1.100	19%	**5.840**	117%
Pendapatan/(beban) keuangan dari kontrak asuransi dan reasuransi Insurance and Reinsurance Finance Income/(Expenses)	**(2.411)**	(2.707)	296	11%	**(2.582)**	93%
Pendapatan jasa keuangan Financial Services Income	**411**	438	(27)	-6%	**699**	59%
Pendapatan hasil pengelolaan gedung Building Management Income	**138**	116	22	19%	**211**	65%
Jumlah pendapatan usaha Total Operating Income	**12.236**	**9.759**	**2.477**	**25%**	**7.078**	**173%**
Beban manajemen dan karyawan Management and Employee Expenses	**(2.234)**	(2.175)	(59)	-3%	**(2.588)**	86%
Beban CKPN Provision for Impairment Losses	**(369)**	(774)	405	52%	**(255)**	145%
Beban penyusutan dan amortisasi Depreciation and Amortization Expenses	**(480)**	(304)	(176)	-58%	**(394)**	122%
Beban umum dan administrasi' General and Administrative Expenses	**(2.686)**	(2.684)	(2)	0%	**(2.039)**	132%
Laba/(rugi) usaha Operating Profit/(Loss)	**6.467**	**3.822**	**2.645**	**69%**	**1.802**	**359%**
Beban keuangan Finance Costs	**(313)**	(405)	92	23%	**(386)**	81%
Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih Other Income/(Expenses) – Net	**30**	234	(204)	-87%	**852**	4%
Laba/(rugi) sebelum pajak Profit/(Loss) Before Income Tax	**6.184**	**3.651**	**2.533**	**69%**	**2.268**	**273%**
Beban pajak penghasilan Income Tax Expenses	**(677)**	(41)	(636)	-1551%	**(956)**	71%
Laba/(rugi) tahun berjalan Profit/ (Loss) for the Year	**5.507**	**3.610**	**1.897**	**53%**	**1.312**	**420%**
Penghasilan komprehensif lainnya Other Comprehensive Income	**712**	(668)	1.380	207%	**-**	0%
Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive Income/ (Loss) for the Year	**6.219**	**2.942**	**3.277**	**111%**	**1.312**	**474%**

Catatan: Angka 12M24-R menggunakan basis laporan laba rugi yang telah disajikan kembali (restated) sesuai dengan penerapan PSAK 117: Kontrak Asuransi dan PSAK 109: Instrumen Keuangan.
Note: The 12M24-R figures are based on the restated statement of profit or loss following the adoption of PSAK 117: Insurance Contracts and PSAK 109: Financial Instrument.

Laba bersih tahun berjalan IFG konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp5,51 triliun atau 420% dari RKAP 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar Rp1,9 triliun atau 53%. Peningkatan tersebut terutama dikontribusi oleh:

1. Peningkatan kegiatan penjaminan sebesar Rp1,8 triliun (54% YoY) terutama dikontribusi oleh penurunan beban klaim atas portofolio KUR di Askrindo dan Jamkrindo.

IFG's consolidated net profit for the year ended December 31, 2025 amounted to IDR 5.51 trillion, representing 420% of the 2025 RKAP target. Compared to the previous year, net profit increased by IDR 1.9 trillion, or 53%. The increase was primarily attributable to the following:

1. An increase in guarantee service result of IDR 1.8 trillion (54% YoY), primarily attributable to lower claims expenses for the KUR portfolios at Askrindo and Jamkrindo.

2. Peningkatan hasil investasi sebesar Rp1,09 triliun (+19% YoY), mencerminkan optimalisasi portofolio investasi Grup IFG dan pendapatan dari portofolio obligasi, reksa dana, dan deposito, yang meliputi pendapatan bunga dan kupon, penerimaan dividen, serta kenaikan nilai wajar (*mark-to-market*) atas instrumen investasi keuangan selain deposito, yang turut ditopang oleh kondisi market yang kondusif di akhir tahun 2025.
3. Penurunan beban CKPN sebesar Rp0,41 triliun (52% YoY) terutama dikontribusi oleh penurunan CKPN atas piutang KUR di Jamkrindo dan Askrindo.
4. Disisi lain, hasil jasa asuransi mengalami sedikit penurunan sebesar Rp0,17 triliun (6% YoY) terutama dikontribusi oleh IFG Life dampak dari peningkatan beban klaim pada tahun berjalan. Namun, penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan hasil jasa asuransi dari Jasa Raharja dan Askrindo.
5. Selain itu, terdapat peningkatan beban pajak penghasilan sebesar Rp0,64 triliun (1551% YoY) seiring peningkatan laba sebelum pajak pada tahun berjalan.

2. An increase in investment income of IDR 1.09 trillion (19% YoY), reflecting the optimization of the IFG Group's investment portfolio and income generated from bond, mutual fund, and time deposit portfolios, including interest and coupon income, dividend income, and fair value gains (mark-to-market) on financial investment instruments other than time deposits, supported by conducive market conditions at the end of 2025.
3. A decrease in provision for impairment losses of IDR 0.41 trillion (52% YoY), primarily attributable to lower provisions for impairment losses on KUR receivables at Jamkrindo and Askrindo.
4. On the other hand, insurance service result declined slightly by IDR 0.17 trillion (6% YoY), mainly attributable to IFG Life as a result of higher claims expenses during the year. However, the decline was offset by an improvement in the insurance service result of Jasa Raharja and Askrindo.
5. In addition, income tax expense increased by IDR 0.64 trillion (1,551% YoY), in line with higher profit before income tax for the year.

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam miliar Rupiah)
(In billion IDR)

URAIAN DESCRIPTION	2025	2024	YoY (Rp)	YoY (%)	RKAP 2025	Ach-%
Arus kas dari aktivitas operasi Cash Flows from Operating Activities	**(5.078)**	(6.931)	1.853	27%	**(3.377)**	150%
Arus kas dari aktivitas investasi Cash Flows from Investing Activities	**4.427**	6.296	(1.869)	-30%	**71**	6235%
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash Flows from Financing Activities	**(1.577)**	1.341	(2.918)	-218%	**3.773**	-42%
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**(2.228)**	**706**	**(2.934)**	**-416%**	**467**	**-477%**
Dampak bersih perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas Net Effects of Changes in Exchange Rates on Cash and Cash Equivalents	**15**	-	15	0%	**-**	0%
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	15.229	**14.523**	**706**	**5%**	9.434	**161%**
Kas dan setara kas dari entitas anak yang didekonsolidasi Cash and Cash Equivalents from Deconsolidated Subsidiaries	**(1)**	-	(1)	0%	**-**	0%
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and Cash Equivalents at The End of the Year	13.016	**15.229**	**(2.213)**	**-15%**	9.901	**131%**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas keluar dari aktivitas operasi IFG konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp5,08 triliun (-27% YoY), terutama dipengaruhi oleh dampak dari penurunan pembayaran klaim *net-off* dengan penurunan penerimaan premi terutama atas portofolio KUR di Askrindo

Cash Flows from Operating Activities

Consolidated operating cash outflows of IFG for the year ended December 31, 2025 amounted to IDR 5.08 trillion (-27% YoY), primarily attributable to lower claim payments, offset by lower premium receipts, particularly from the KUR portfolios at Askrindo and Jamkrindo. In addition, the

dan Jamkrindo. Selain itu, arus kas negatif dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh arus kas keluar yang digunakan untuk pembayaran klaim polis Jiwasraya (dimana sumber pendanaannya berasal dari PMN, yang klasifikasinya tidak masuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasi).

Arus kas negatif dari aktivitas operasi selama tahun 2025 dan 2024 terutama dipengaruhi oleh karakteristik bisnis grup IFG, termasuk pelaksanaan program pemerintah serta perbedaan waktu antara penerimaan kas dan pembayaran kewajiban (*cash flow timing difference*), dan bukan mencerminkan penurunan kinerja operasional maupun kemampuan IFG dalam memenuhi kewajibannya. Dalam mendukung likuiditas, IFG memiliki portofolio aset investasi yang memadai dan dapat direalisasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim pada saat jatuh tempo. Selain itu, IFG secara berkelanjutan akan terus melakukan pemantauan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* ("ALM") guna mengoptimalkan manajemen likuiditas.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi arus kas negatif dari aktivitas operasi adalah penugasan kepada IFG melalui IFG Life dalam rangka pelaksanaan program penyelamatan dan restrukturisasi polis pemegang polis Jiwasraya. Sebagai bagian dari program tersebut, IFG Life secara berkelanjutan memenuhi kewajiban pembayaran manfaat polis sesuai dengan jadwal restrukturisasi yang telah disepakati. Sepanjang tahun 2025, IFG Life telah merealisasikan pembayaran manfaat polis sebesar Rp5,2 triliun. Pembayaran tersebut berasal dari kewajiban yang telah dicadangkan pada tahun-tahun sebelumnya serta didukung oleh dana PMN yang dialokasikan untuk mendukung program penyelamatan pemegang polis Jiwasraya. Dengan demikian, meskipun kewajiban tersebut telah diantisipasi melalui pembentukan cadangan dan dukungan pendanaan, realisasi pembayaran manfaat polis pada tahun berjalan tetap memberikan tekanan terhadap arus kas operasi dan menjadi salah satu penyebab arus kas operasi konsolidasian mencatatkan saldo negatif.

Selain itu, pada segmen usaha penjaminan, penghentian kerja sama penjaminan untuk produk Kupra dan Kupedes di Askrindo dan Jamkrindo sejak Januari 2025 turut memengaruhi arus kas operasional IFG. Sejak penghentian tersebut, tidak terdapat lagi penerimaan kas berupa IJP dari kontrak baru atas kedua produk tersebut. Namun demikian, IFG masih mengakui pendapatan dari kontrak-kontrak yang diterbitkan sebelum penghentian kerja sama sesuai dengan periode pertanggungan masing-masing yang berkisar antara tiga hingga lima tahun. Selama masa pertanggungan tersebut, pembayaran klaim tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan penjaminan. Risiko atas kewajiban klaim tersebut telah diantisipasi melalui pembentukan cadangan teknis pada periode-periode sebelumnya oleh Askrindo dan Jamkrindo. Di samping itu, portofolio penjaminan atas kedua produk tersebut juga didukung oleh mekanisme *stop loss* yang membatasi eksposur risiko sehingga tetap menjaga profitabilitas portofolio.

negative operating cash flow was primarily attributable to cash outflows for the payment of Jiwasraya policy claims, the funding for which was sourced from State Equity Participation (PMN), which is not classified as cash flows from operating activities.

The negative operating cash flows recorded in 2025 and 2024 were primarily attributable to the nature of IFG Group's business, including the implementation of government programs and differences in the timing of cash receipts and the settlement of obligations (cash flow timing differences), rather than reflecting a deterioration in operating performance or IFG's ability to meet its obligations. To support liquidity, IFG maintains an adequate portfolio of investment assets that can be liquidated to meet claim payment obligations as they become due. In addition, IFG continuously monitors and manages its Asset and Liability Management (ALM) framework to optimize liquidity management.

One of the primary factors contributing to the negative operating cash flow was the Government's assignment to IFG, through IFG Life, to implement the Jiwasraya policyholder rescue and restructuring program. As part of the program, IFG Life has continuously fulfilled its obligations to pay policy benefits in accordance with the agreed restructuring schedule. Throughout 2025, IFG Life disbursed IDR 5.2 trillion in policy benefits. These payments were funded by obligations that had been provided for in prior years and supported by State Equity Participation (PMN) allocated to finance the Jiwasraya policyholder rescue program. Accordingly, although these obligations had been anticipated through the recognition of technical reserves and funding support, the realization of policy benefit payments during the year continued to place pressure on operating cash flows and was one of the key factors contributing to the negative consolidated operating cash flow.

In addition, within the guarantee business segment, the termination of guarantee cooperation for the Kupra and Kupedes products at Askrindo and Jamkrindo effective January 2025 also affected IFG's operating cash flows. Following the termination, no further cash receipts in the form of guarantee service fees (IJP) were generated from new contracts for these two products. Nevertheless, IFG continues to recognize revenue from contracts issued prior to the termination of the cooperation over their respective coverage periods, ranging from three to five years. During the coverage period, claim payments continue to be made in accordance with the applicable guarantee terms. The risks associated with these claim obligations had been anticipated through the establishment of technical reserves in prior periods by Askrindo and Jamkrindo. In addition, the guarantee portfolios for both products are supported by a stop-loss mechanism that limits risk exposure, thereby maintaining the profitability of the portfolios.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas masuk dari aktivitas investasi IFG konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp4,43 triliun (-30% YoY). Penurunan arus kas masuk tersebut dampak dari penempatan investasi yang lebih besar daripada pencairan investasi di tahun berjalan, sejalan dengan strategi IFG untuk mendapatkan imbal hasil investasi yang lebih besar di tahun berjalan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan IFG konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1,58 triliun (-218% YoY). Arus kas negatif dari aktivitas pendanaan di tahun 2025 merupakan pembayaran utang bank beserta bunga. Sedangkan di tahun 2024 merupakan arus kas masuk dampak adanya penyertaan modal sebesar Rp3,56 triliun di tahun sebelumnya.

Cash Flows from Investing Activities

Consolidated cash inflows from IFG's investing activities for the year ended December 31, 2025, amounted to IDR 4.43 trillion (-30% YoY). The decline in investing cash inflows was primarily attributable to investment placements exceeding investment redemptions during the year, in line with IFG's strategy to generate higher investment returns.

Cash Flows from Financing Activities

Consolidated financing cash outflows of IFG for the year ended December 31, 2025 amounted to IDR 1.58 trillion (-218% YoY). The negative financing cash flow in 2025 was primarily attributable to repayments of bank loans and related interest. In contrast, financing activities generated a net cash inflow in 2024, primarily due to a capital injection of IDR 3.56 trillion received in the previous year.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY PAYABLES AND COLLECTABILITY LEVEL OF RECEIVABLES

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Sampai dengan 31 Desember 2025, IFG memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban keuangannya, sebagaimana tercermin dari indikator likuiditas berikut:

1. Rasio Likuiditas
   Pada tanggal 31 Desember 2025, rasio likuiditas IFG tercatat sebesar 228%. Hal ini tercermin dari aset lancar perusahaan yang sebesar Rp19,19 triliun dibandingkan liabilitas lancar sebesar Rp8,41 triliun. Tingkat likuiditas tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Posisi likuiditas yang kuat ini juga mencerminkan pengelolaan modal kerja yang memadai serta memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mendukung kebutuhan operasional dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo secara tepat waktu.

2. DSCR
   Rasio DSCR pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar 269,41% dengan *Cash Flow Available for Debt Service* ("CFADS") perusahaan sebesar Rp0,81 triliun dan *Cash Reserve* sebesar Rp2,16 triliun serta total kewajiban pembayaran pokok dan bunga hutang perusahaan tercatat sebesar Rp1,10 triliun. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam pembayaran kewajiban utang yang sangat baik.

Berdasarkan rasio tersebut, IFG menunjukkan posisi likuiditas yang solid, dengan rasio likuiditas sebesar 228% dan DSCR mencapai 269,41%. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang tersedia.

ABILITY TO PAY PAYABLES

As of December 31, 2025, IFG maintained a strong capacity to meet its financial obligations, as reflected in the following liquidity indicators:

1. Liquidity Ratio
   As of December 31, 2025, IFG's liquidity ratio stood at 228%. This was reflected in the Company's current assets of IDR 19.19 trillion, compared with current liabilities of IDR 8.41 trillion. The liquidity ratio indicates that the Company has a strong ability to meet its short-term obligations using its available current assets. This strong liquidity position also reflects sound working capital management and provides the Company with the flexibility to support its operational requirements while meeting its obligations as they become due.

2. DSCR
   As of December 31, 2025, IFG's Debt Service Coverage Ratio (DSCR) was 269.41%, supported by the Company's Cash Flow Available for Debt Service (CFADS) of IDR 0.81 trillion, cash reserves of IDR 2.16 trillion, and total principal and interest debt service obligations of IDR 1.10 trillion. This demonstrates the Company's strong capacity to meet its debt service obligations.

Based on these indicators, IFG maintained a solid liquidity position, with a liquidity ratio of 228% and a DSCR of 269,41%. These ratios indicate that the Company has a strong capacity to meet its short-term obligations using its available current assets.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA TAHUN 2025

REPORT ON THE USE OF STATE EQUITY PARTICIPATION FUNDS FOR THE YEAR 2025

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENYELAMATAN PEMEGANG POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan mandat penyelamatan polis Jiwasraya yang dijalankan oleh IFG, Pemerintah Indonesia memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total sebesar Rp26,56 triliun kepada IFG. Pemberian PMN tersebut direalisasikan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. PMN sebesar Rp20 triliun pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
2. PMN sebesar Rp3 triliun pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; dan
3. PMN sebesar Rp3,56 triliun pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Dana PMN yang diterima IFG telah sepenuhnya diteruskan kepada IFG Life. Hingga 31 Desember 2024, tambahan modal yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada IFG dan selanjutnya dialokasikan kepada IFG Life. Seluruh PMN digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha IFG dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi Indonesia, termasuk penyelesaian kewajiban polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi dan/atau dialihkan kepada IFG Life. Rekapitulasi penggunaan dan penempatan dana dimaksud adalah sebagai berikut:

Penugasan ini merupakan wujud komitmen negara dalam penyelamatan polis nasabah Jiwasraya, yang pelaksanaannya berhasil mencapai persetujuan restrukturisasi polis dari 99,9% pemegang polis. Intervensi modal ini tidak hanya krusial untuk memastikan kelancaran transfer polis Jiwasraya ke IFG Life dan menutup *equity gap* yang ada, tetapi juga terbukti mampu menjaga rasio kesehatan keuangan IFG, tercermin dalam *Risk-Based Capital* (RBC) dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) yang tetap solid, serta menunjukkan pencapaian signifikan hingga tahun 2025 dalam upaya penyehatan industri asuransi nasional secara keseluruhan.

REPORT ON THE USE OF STATE EQUITY PARTICIPATION FUNDS TO RESCUE POLICYHOLDERS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

As part of its support for IFG's mandate to implement the Jiwasraya policyholder rescue program, the Government of Indonesia provided State Equity Participation (PMN) totaling IDR 26.56 trillion to IFG. The PMN was disbursed in three phases:

1. PMN amounted to IDR 20 trillion in 2021, pursuant to Government Regulation No. 102 of 2021 concerning the Increase in the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
2. PMN amounted to IDR 3 trillion in 2023, pursuant to Government Regulation No. 60 of 2023 concerning the Increase in the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero); and
3. IDR 3.56 trillion in 2024, pursuant to Government Regulation No. 16 of 2024 concerning the Increase in the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

The PMN received by IFG has been fully channeled to IFG Life. As of December 31, 2024, the additional capital derived from the State Equity Participation (PMN) provided to IFG had been fully allocated to IFG Life. The entire PMN was utilized to strengthen IFG's capital structure and business capacity in support of the development of Indonesia's insurance industry, including the settlement of obligations arising from Jiwasraya policies that had been restructured and/or transferred to IFG Life. A summary of the utilization and allocation of the PMN is presented below:

This assignment reflects the Government's commitment to safeguarding Jiwasraya policyholders, with the restructuring program achieving approval from 99.9% of policyholders. The capital intervention was not only essential to ensuring the successful transfer of Jiwasraya policies to IFG Life and bridging the existing equity gap, but also contributed to maintaining IFG's financial soundness, as reflected in its solid Risk-Based Capital (RBC) and Investment Adequacy Ratio (RKI). Furthermore, it demonstrated significant progress through 2025 in supporting the overall restructuring of Indonesia's insurance industry.

IFG bersama dengan IFG Life telah berhasil menyelesaikan penugasan pemerintah dalam penyelamatan polis Jiwasraya. Berikut perkembangan pelaksanaan skema penyelamatan polis Jiwasraya:

1. Jiwasraya telah melakukan restrukturisasi polis, di mana 99,9% pemegang polis menyetujui restrukturisasi polis.
2. IFG menerima surat penugasan dari KBUMN untuk melakukan langkah penyelamatan polis Jiwasraya.
3. IFG menerima PMN sebesar Rp20 triliun tahun 2021, Rp3 triliun tahun 2023, dan Rp3,56 triliun pada 2024.
4. IFG melakukan *fundraising* sebesar Rp6,7 triliun pada tahun 2022 dan Rp1,46 triliun pada 2023 dengan jaminan (*underlying*) dividen anggota *holding* IFG.
5. IFG menyetorkan seluruh dana PMN dan hasil *fundraising* tersebut kepada IFG Life untuk menutup *equity gap* pengalihan portofolio (polis) dan aset dari Jiwasraya.
6. Pada tahun 2025, proses pengalihan liabilitas polis Jiwasraya secara berkala kepada IFG Life telah selesai, dengan *underlying* aset pengalihan dari Jiwasraya, PMN dan *fundraising*. Dengan demikian, PMN yang diterima telah digunakan secara optimal.

Selanjutnya, perkembangan kinerja PMN tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Progres Portofolio Transfer Polis Jiwasraya (Berdasarkan Total Liabilitas)

Sampai tahun 2025 IFG Life telah menerima pengalihan portofolio polis dengan total liabilitas polis yang telah diterima sebesar Rp38,08 triliun berdasarkan nilai buku terakhir sebelum pengalihan yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk tahun 2021 hingga tahun 2025, di mana total polis yang dialihkan sebesar 314.071 polis.

Realisasi Pengalihan Portofolio dari Jiwasraya
Realization of Portfolio Transfer from Jiwasraya

Lini Bisnis Per Produk Line of Business per Products	2021		2022		2023	
	Jumlah Polis Total Policy	Liabilitas* Liabilities*	Jumlah Polis Total Policy	Liabilitas* Liabilities*	Jumlah Polis Total Policy	Liabilitas* Liabilities*
Ritel Retail	**138.969**	**6.600.191**	**282**	**9.314**	**17.504**	**405.557**
JS Anuitas JS Annuity	4.375	953.335	-	-	360	34.934
JS Mantap JS Mantap (Manfaat Bertahap/ Gradual Benefits)	101.002	5.420.432	-	-	5.649	140.852
JS Tata Masa Depan	-	-	282	9.314	11.495	229.771
JL 3 (Unit Link)	20.571	171.044	-	-	-	-
JL 4 (Unit Link)	13.021	55.380	-	-	-	-
Bancassurance	**16.846**	**10.136.249**	**47**	**32.897**	**227**	**128.216**
JS Mantap Plus Plan A	723	353.868	25	12.817	70	29.105
JS Mantap Plus Plan B	7.293	3.962.128	12	10.667	75	35.918
JS Mantap Plus Plan C	8.830	5.820.253	10	9.413	82	63.193
Korporasi Corporate	**401**	**4.128.938**	**767**	**9.958.070**	**1.377**	**3.807.165**
JS Anuitas Prima JS Premier Annuity	128	3.148.251	13	2.817.387	2	161
JS PHT JS PHT (Old-Age Security)	273	980.687	754	7.140.684	1.021	3.216.422
Personal *Accident*	-	-	-	-	3	12
Asuransi Jiwa Kredit Credit Life Insurance	-	-	-	-	349	586.195
Asuransi Kematian Life Insurance	-	-	-	-	1	3.929
Ekawarsa Berkala Kumpulan Group Term Life Insurance	-	-	-	-	1	446
Jumlah Total	**156.216**	**20.865.378**	**1.096**	**10.000.281**	**19.108**	**4.340.938**

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Triwulan IV Tahun 2025.
Source: Report on the Utilization of Additional Capital by IFG Life Funded through State Equity Participation (PMN) to IFG for the Fourth Quarter of 2025

IFG, together with IFG Life, has successfully completed the Government's assignment to implement the Jiwasraya policyholder rescue program. The progress of the Jiwasraya policyholder rescue scheme is summarized as follows:

1. Jiwasraya completed its policy restructuring program, with 99.9% of policyholders agreeing to the restructuring.
2. IFG received an assignment letter from the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) to implement the Jiwasraya policyholder rescue program.
3. IFG received State Equity Participation (PMN) amounting to IDR 20 trillion in 2021, IDR 3 trillion in 2023, and IDR 3.56 trillion in 2024.
4. IFG raised IDR 6.7 trillion in 2022 and IDR 1.46 trillion in 2023, secured by dividends from IFG holding members as the underlying assets.
5. IFG contributed the entire PMN proceeds and fundraising proceeds into IFG Life to bridge the equity gap arising from the transfer of Jiwasraya's policy portfolio and assets.
6. In 2025, the phased transfer of Jiwasraya's policy liabilities to IFG Life was completed, supported by the transferred assets from Jiwasraya, PMN, and fundraising proceeds. Accordingly, the PMN received has been utilized optimally.

The performance of the PMN is presented below:

1. Progress of the Jiwasraya Policy Portfolio Transfer (Based on Total Policy Liabilities)

As of 2025, IFG Life had received the transfer of policy portfolios with total policy liabilities of IDR 38.08 trillion, based on the latest book value prior to the transfer as recorded in the Minutes of Handover (Berita Acara Serah Terima/BAST) for the period from 2021 to 2025. A total of 314,071 policies had been transferred.

Realisasi Pengalihan Portofolio dari Jiwasraya
Realization of Portfolio Transfer from Jiwasraya

2024		Januari 2025		Total	
Jumlah Polis Total Policy	**Liabilitas*** Liabilities*	**Jumlah Polis** Total Policy	**Liabilitas*** Liabilities*	**Jumlah Polis** Total Policy	**Liabilitas*** Liabilities*
134.292	**1.253.559**	**5**	**816**	**291.052**	**8.269.437**
682	39.976	**1**	**26**	**5.418**	**1.028.271**
87.428	320.123	**4**	**790**	**194.083**	**5.882.198**
46.076	892.485	-	-	**57.853**	**1.131.570**
-	-	-	-	**20.571**	**171.044**
106	975	-	-	**13.127**	**56.355**
209	**196.784**	**9**	**5.990**	**17.338**	**10.500.136**
133	62.314	-	-	**951**	**458.105**
74	133.917	**3**	**1.927**	**7.457**	**4.144.557**
2	553	**6**	**4.063**	**8.930**	**5.897.473**
3.124	**1.413.228**	**12**	**1.767**	**5.681**	**19.309.168**
-	-	**1**	**28**	**144**	**5.965.827**
2.311	529.771	**11**	**239**	**4.370**	**11.867.802**
1	2	-	-	**4**	**14**
812	883.431	-	**1.500**	**1.161**	**1.471.126**
-	-	-	-	**1**	**3.929**
-	24	-	-	**1**	**469**
137.625	**2.863.571**	**26**	**8.573**	**314.071**	**38.078.741**

2. RKI IFG Life

Berdasarkan Laporan Keuangan IFG Life Tahun 2025 (*audited*), realisasi RKI IFG Life mencapai 118,40% atau sebesar 105,21% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Ke depan, IFG Life berkomitmen mengelola aset-aset investasi dengan terus mengedepankan tata kelola yang baik dan menerapkan ALM secara *prudent* sehingga RKI terjaga sesuai indikator kesehatan keuangan yang berlaku.

2. IFG Life's Investment Adequacy Ratio (IAR)

Based on IFG Life's audited 2025 Financial Statements, IFG Life's Investment Adequacy Ratio (IAR) reached 118.40%, representing 105.21% of the target set for 2025. Going forward, IFG Life remains committed to managing its investment assets by continuously upholding good corporate governance and implementing prudent Asset-Liability Management (ALM) practices to ensure that its IAR remains in line with the applicable financial soundness requirements.

Target KPI RKI IFG Life dan Pencapaian Tahun 2025
IFG Life IAR KPI Target and Achievement in 2025

Target KPI Kajian PMN Rp3,56 triliun Assessment of the IDR 3.56 Trillion State Equity Participation (PMN)	**Realisasi Tahun 2025** 2025 Realization	**Tingkat Realisasi terhadap Target KPI** Achievement Against KPI Target KPI Target
>112,53%	**118,40%**	105,21%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Triwulan IV Tahun 2025.
Source: Report on the Utilization of Additional Capital by IFG Life Funded through State Equity Participation (PMN) to IFG for the Fourth Quarter of 2025

3. RBC IFG Life

Berdasarkan Laporan Keuangan IFG Life Tahun 2025 (*audited*), RBC IFG Life tercatat sebesar 202,95% atau belum mencapai target KPI tahun 2025. Penjualan aset properti, yang merupakan bagian dari optimalisasi aset properti, belum dapat terealisasi sebagaimana asumsi pada Kajian PMN Rp3,56 triliun. Kondisi ini membuat risiko pasar pada perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) lebih tinggi sehingga menyebabkan perhitungan RBC lebih rendah.

3. IFG Life's Risk-Based Capital (RBC)

Based on IFG Life's audited 2025 Financial Statements, IFG Life's Risk-Based Capital (RBC) stood at 202.95%, falling short of the 2025 KPI target. The sale of property assets, as part of the Company's property asset optimization initiative, was not realized as assumed in the Assessment of the IDR 3.56 Trillion State Equity Participation (PMN). As a result, market risk under the Risk-Based Minimum Capital (RBMC) calculation remained higher, leading to a lower RBC

Target KPI RBC IFG Life dan Pencapaian Tahun 2025
IFG Life RBC KPI Target and Achievement in 2025

Target KPI Kajian PMN Rp3,56 triliun Assessment of the IDR 3.56 Trillion State Equity Participation (PMN)	**Realisasi Tahun 2025** 2025 Realization	**Tingkat Realisasi terhadap Target KPI** Achievement Against KPI Target KPI Target
261,70%	**202,95%**	77,55%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Life Triwulan IV Tahun 2025.
Source: Report on the Utilization of Additional Capital by IFG Life Funded through State Equity Participation (PMN) to IFG Life for the Fourth Quarter of 2025

4. Expense Ratio IFG Life

Berdasarkan Laporan Keuangan IFG Life Tahun 2025 (*audited*), realisasi *expense ratio* IFG Life secara konsolidasi sebesar 14,93% atau mencapai 116,43% dari target yang ditetapkan pada Kajian PMN tahun 2025. Perbaikan *expense ratio* ini sejalan dengan peningkatan premi dan efisiensi biaya operasional perusahaan.

4. IFG Life's Expense Ratio

Based on IFG Life's audited 2025 Financial Statements, IFG Life's consolidated expense ratio was 14.93%, representing 116.43% of the target established in the 2025 PMN Assessment. The improvement in the expense ratio was driven by higher premium income and enhanced operational cost efficiency.

Target KPI *Expense Ratio* IFG Life Periode Tahun 2025
IFG Life Expense Ratio KPI Target in 2025

Target KPI Kajian PMN Rp3,56 triliun Assessment of the IDR 3.56 Trillion State Equity Participation (PMN)	**Realisasi Tahun 2025** Tahun 2025 2025 Realization	**Tingkat Realisasi terhadap Target KPI** Achievement Against KPI Target
17,38%	**14,93%**	116,43%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Life Triwulan IV Tahun 2025.
Source: Report on the Utilization of Additional Capital by IFG Life Funded through State Equity Participation (PMN) to IFG Life for the Fourth Quarter of 2025

5. YoI IFG Life

Berdasarkan Laporan Keuangan IFG Life Tahun 2025 (*audited*), YoI IFG Life secara konsolidasi (*year to date*) tercapai sebesar 7,85%. YoI dihasilkan dari perhitungan hasil investasi terhadap rata-rata aset investasi pada tahun 2025, yang terlihat pada tabel berikut:

5. IFG Life's Yield on Investment (YoI)

Based on IFG Life's audited 2025 Financial Statements, IFG Life's consolidated year-to-date (YTD) Yield on Investment (YoI) reached 7.85%. YoI is calculated by dividing investment income by the average investment assets for 2025, as presented in the following table:

Komposisi Aset Investasi dan Hasil Investasi Tahun 2025 (Rp juta)
Composition of Investment Assets and Investment Income in 2025 (Million IDR)

Hasil Investasi s.d Tahun 2025 (*Audited*) Investment Income through 2025 (Audited)	**Rata-Rata Komposisi Investasi s.d Tahun 2025 (*Audited*)** Average Investment Portfolio through 2025 (Audited)
2.304.335	**29.352.974**

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Triwulan IV Tahun 2025.

Adapun, dibandingkan dengan target KPI tahun 2025, pencapaian YoI tersebut lebih tinggi, yaitu 136,28% dari target sebesar 5,76%. Pencapaian ini antara lain didukung oleh realisasi *capital gain* yang bersifat *one-off*.

Compared with the 2025 KPI target, IFG Life's YoI exceeded the target, reaching 136.28% of the target value of 5.76%. This achievement was supported by the realization of a one-off capital gain.

Realisasi YoI IFG Life Tahun 2025
IFG Life YoI Realization in 2025

Target KPI **Kajian PMN Rp3,56 triliun** Assessment of the IDR 3.56 Trillion State Equity Participation (PMN)	**Realisasi Tahun 2025** Tahun 2025 2025 Realization	**Tingkat Realisasi terhadap Target KPI** Achievement Against KPI Target
5,76%	**7,85%**	136,28%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Modal IFG Life yang Bersumber dari PMN kepada IFG Life Triwulan IV Tahun 2025.
Source: Report on the Utilization of Additional Capital by IFG Life Funded through State Equity Participation (PMN) to IFG Life for the Fourth Quarter of 2025

6. Manfaat Dana PMN Rp20 triliun, Rp3 triliun dan Rp3,56 triliun

a. Manfaat bagi IFG dan IFG Life

1) IFG dan IFG Life mampu menjalankan penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 102 Tahun 2021, PP Nomor 60 Tahun 2023, dan PP Nomor 16 Tahun 2024.

2) Masyarakat akan diselamatkan dari dampak kerugian yang besar akibat hilangnya tabungan pendapatan masa depan pensiun, hilangnya proteksi perlindungan jiwa, dan dampak psikis akibat kerugian.

3) Penyelamatan pemegang polis Jiwasraya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi Indonesia. Lebih dari itu, jangkauan yang lebih luas akan membantu literasi finansial dan asuransi masyarakat.

4) Adapun jumlah polis Jiwasraya yang telah berhasil diselamatkan sampai dengan tahun 2025 adalah sejumlah 314.071 polis.

b. Manfaat Bagi Pemerintah dan Lembaga Lainnya

1) Memenuhi kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali Jiwasraya untuk ikut bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dialami Jiwasraya sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6. Benefits of the IDR 20 Trillion, IDR 3 Trillion, and IDR 3.56 Trillion State Equity Participation (PMN)

a. Benefits to IFG and IFG Life

1) IFG and IFG Life have successfully conducted the Government's mandate as stipulated under Government Regulation No. 102 of 2021, Government Regulation No. 60 of 2023, and Government Regulation No. 16 of 2024.

2) The initiative has protected the public from substantial financial losses arising from the loss of future retirement income, the loss of life insurance protection, and the psychological impacts associated with such losses.

3) The successful resolution of Jiwasraya's policyholder obligations has helped restore public confidence in Indonesia's insurance industry. Furthermore, its broader reach has contributed to improving public financial and insurance literacy.

4) As of 2025, a total of 314,071 Jiwasraya policies had been successfully transferred and safeguarded.

b. Benefits to the Government and Other Institutions

1) Fulfilled the Government's responsibility, as the controlling shareholder of Jiwasraya, to participate in resolving Jiwasraya's financial difficulties in accordance with Law No. 40 of 2014 on Insurance.

2) Memperluas jangkauan dan penyaluran produk dan layanan asuransi, termasuk daerah yang menjadi perhatian pemerintah.
3) Membantu mendorong peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4) Meningkatkan reputasi BUMN di sektor asuransi.

c. Manfaat Bagi Industri Asuransi Jiwa

1) Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi jiwa Indonesia, khususnya BUMN asuransi.
2) Menciptakan persaingan yang sehat di industri asuransi jiwa serta meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk.
3) Membantu akselerasi penyehatan asuransi jiwa di tingkat nasional.

d. Manfaat Bagi Masyarakat

1) Menyelamatkan masyarakat yang merupakan pemegang polis Jiwasraya dari dampak kerugian yang lebih besar akibat hilangnya tabungan atau pendapatan di masa depan atau masa pensiun, hilangnya proteksi atas perlindungan jiwa, dan dampak psikis akibat kerugian yang dialami.
2) Potensi manfaat yang akan didapatkan masyarakat terdiri dari: manfaat finansial, produktivitas pemegang polis, penghindaran dari gangguan mental, penghindaran dari nilai aset yang turun.
3) Menyediakan perlindungan masyarakat melalui akses kepada asuransi jiwa dan kesehatan.
4) Masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik melalui produk dan jasa asuransi yang terintegrasi.
5) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
6) Meningkatkan daya beli masyarakat akibat bertambahnya angkatan kerja yang diserap oleh IFG Life serta banyaknya pemegang polis yang diselamatkan melalui proses pengalihan polis kepada IFG Life.
7) Membantu perencanaan keuangan dan pengelolaan dana pensiun masyarakat.
8) Meningkatkan literasi masyarakat atas asuransi jiwa dan kesehatan.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PELAKSANAAN PENUGASAN PEMERINTAH UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat permodalan IFG melalui PMN sebesar Rp6 triliun yang didasarkan pada PP Nomor 72 Tahun 2020. Dana PMN efektif dicairkan pada 11 Februari 2021 dan kemudian disalurkan kepada PT Askrindo dan PT Jamkrindo, masing-masing sebesar Rp3 triliun. Penambahan modal ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan IFG beserta anggota *holding* guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tetapi secara

2) Expanded the reach and distribution of insurance products and services, including in regions prioritized by the Government.
3) Supported improvements in public financial literacy and financial inclusion.
4) Strengthened the reputation of Indonesia's state-owned insurance enterprises.

c. Benefits to the Life Insurance Industry

1) Restored public confidence in Indonesia's life insurance industry, particularly state-owned insurers.
2) Promoted healthy competition while enhancing service quality and product innovation.
3) Supported the acceleration of the national life insurance industry restructuring.

d. Benefits to the Public

1) Protected Jiwasraya policyholders from greater financial losses resulting from the loss of future savings or retirement income, the loss of life insurance protection, and the psychological impacts arising from such losses.
2) Generated potential benefits for the public, including financial benefits, improved policyholder productivity, reduced mental health risks, and mitigation of asset value deterioration.
3) Expanded public access to life and health insurance protection.
4) Delivered better services through integrated insurance products and services.
5) Created additional employment opportunities.
6) Enhanced public purchasing power through increased employment at IFG Life and the successful transfer of Jiwasraya policies to IFG Life.
7) Supported financial planning and retirement fund management.
8) Improved public literacy in life and health insurance.

REPORT ON THE UTILIZATION OF STATE EQUITY PARTICIPATION (PMN) FOR THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) AND NATIONAL ECONOMIC RECOVERY (PEN) PROGRAMS

The Government of Indonesia took a strategic step to strengthen IFG's capital through an IDR 6 trillion State Equity Participation (PMN) pursuant to Government Regulation No. 72 of 2020. The PMN funds were disbursed on February 11, 2021, and subsequently allocated equally to PT Askrindo and PT Jamkrindo, with each company receiving IDR 3 trillion. The capital injection was intended not only to strengthen the capital structure of IFG and its holding members in support of the National Economic Recovery

krusial juga meningkatkan kapasitas PT Askrindo dan PT Jamkrindo dalam menjalankan mandat pemberdayaan UMKM, terutama program KUR dan KMK PEN (Kredit Modal Kerja PEN). Suntikan dana strategis ini terbukti fundamental dalam mendukung berbagai capaian signifikan kedua entitas penjaminan tersebut. Hingga 31 Desember 2025, dukungan PMN ini telah berkontribusi signifikan terhadap kemampuan Askrindo dan Jamkrindo untuk, secara kumulatif sejak tahun 2007, menjangkau total lebih dari 71 juta unit UMKM. Apabila diperinci, Askrindo telah menjangkau 36.323.025 unit UMKM dan Jamkrindo sebanyak 35.265.779 unit UMKM. Lebih lanjut, upaya ini juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang masif, mencapai lebih dari 110 juta tenaga kerja, di mana Askrindo berkontribusi pada penyerapan 63.561.658 tenaga kerja dan Jamkrindo sebanyak 46.526.341 tenaga kerja. Lebih lanjut mengenai PMN ini diuraikan sebagai berikut:

1. Target vs Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2020 s.d. 2025

Askrindo dan Jamkrindo ditunjuk sebagai lembaga penjaminan KUR berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Adapun, target penyaluran KUR pemerintah pada tahun 2025 sebagaimana dimuat dalam Publikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/450/SET.M.EKON.3/12/2024 tanggal 24 Desember 2024, adalah sebesar Rp300 triliun.

Pada akhir tahun 2025, tercatat realisasi penyaluran KUR mencapai 104,21% dari target RKAP IFG dan 87,47% dari target pemerintah. Berikut perinciannya:

(PEN) Program, but also, more importantly, to enhance the capacity of PT Askrindo and PT Jamkrindo in carrying out their mandate to support MSMEs, particularly through the People's Business Credit (KUR) and PEN Working Capital Credit (KMK PEN) programs. This strategic capital injection has proven fundamental in supporting the significant achievements of both credit guarantee companies. As of December 31, 2025, the PMN had significantly enhanced the ability of Askrindo and Jamkrindo to collectively reach more than 71 million MSMEs since 2007. Specifically, Askrindo had served 36,323,025 MSMEs, while Jamkrindo had served 35,265,779 MSMEs. Furthermore, the initiative contributed to the creation of more than 110 million jobs, with Askrindo supporting 63,561,658 jobs and Jamkrindo contributing 46,526,341 jobs. Further details on the utilization of the PMN are presented below:

1. Target vs. Realization of KUR Disbursement (2020–2025) 2025

Askrindo and Jamkrindo were appointed as KUR guarantee institutions pursuant to the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 188 of 2015 concerning the Designation of People's Business Credit (KUR) and People's Business Credit Guarantee Companies. The Government's KUR disbursement target for 2025, as stipulated in Publication No. HM.4.6/450/SET.M.EKON.3/12/2024 issued by the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia on December 24, 2024, was IDR 300 trillion.

As of year-end 2025, KUR disbursement had reached 104.21% of IFG's RKAP target and 87.47% of the Government's target. The details are presented below:

Target vs Realisasi Penjaminan KUR IFG Tahun 2025 (Rp triliun)
2025 IFG KUR Guarantee Target vs. Realization (IDR trillion)

Target 2025 2025 Target		Realisasi TW IV	Persentase Pencapaian TW IV Q4 Achievement	
RKAP Work Plan & Budget	Pemerintah Government		RKAP Work Plan & Budget	Pemerintah Government
251,80	300	262,40	**104,21%**	**87,47%**

Sumber: Analisis IFG.
Source: IFG Analysis

Adapun realisasi IJP, klaim, subrogasi, dan rasio klaim selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The realization of guarantee fee income, claims, subrogation recoveries, and claims ratio for 2025 were as follows:

Realisasi IJK, Klaim, Subrogasi, dan Rasio Klaim Tahun 2025 (Rp juta)
2025 Realization of Guarantee Fee Income, Claims, Subrogation Recoveries, and Claims Ratio (IDR million)

Uraian Description		Realisasi s.d. TW IV 2025 Realization up to Fourth Quarter of 2025	IJP Guarantee Fee Income	Klaim Claims	Subrogasi Subrogation	Rasio Klaim (%)	NPG (%)
KUR	PT Askrindo	3.346.888	3.817.438	1.416.497	114,06	4,77
	PT Jamkrindo	5.118.880	3.198.863	1.164.467	62,49	3,09
PEN	PT Askrindo	-	66.887	47.064	-	-
	PT Jamkrindo	-	94.557	80.726	-	-

Sumber: Analisis IFG.
Source: IFG Analysis

2. Pencapaian *Gearing Ratio*

Mempertimbangkan pentingnya pengembangan UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional, maka diperlukan penguatan permodalan lembaga penjamin kredit untuk meningkatkan kepercayaan UMKM sehingga sektor UMKM mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Penguatan permodalan tersebut dilakukan melalui penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo melalui IFG sebagai induk perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi *gearing ratio* Askrindo sebesar 6,97 kali dan Jamkrindo sebesar 11,19 kali.

2. Achievement of Gearing Ratio

Recognizing the critical role of MSMEs as a key pillar of the national economy, strengthening the capital of credit guarantee institutions is essential to enhance MSME confidence and enable the sector to grow into larger, more sustainable businesses. This capital strengthening was carried out through additional Equity Participation (PMN) provided to Askrindo and Jamkrindo through IFG as the holding company. As of the end of 2025, Askrindo's gearing ratio stood at 6.97x, while Jamkrindo's gearing ratio reached 11.19x.

Pencapaian *Gearing Ratio*
Pencapaian Gearing Ratio

INDEX	FORMULA	Target KPI KPI Target	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization
Gearing Ratio Askrindo Askrindo's Gearing Ratio	*Outstanding* Penjaminan/Ekuitas Outstanding Guarantee/Equity	<20x	6,97x
Gearing Ratio Jamkrindo Jamkrindo's Gearing Ratio			11,19x

3. Manfaat Dana PMN Rp6 Triliun

a. Manfaat PMN Rp6 triliun bagi IFG, Askrindo, dan Jamkrindo

1) IFG Askrindo dan Jamkrindo mampu menjalankan penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan sebagaimana tercantum dalam Kajian Bersama PMN Rp6 triliun.
2) Sejak tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2025, penjaminan PT Askrindo dan PT Jamkrindo masing-masing telah menjangkau 36.323.025 dan 35.265.779 unit UMKM dan mampu menyerap masing-masing 63.561.658 dan 46.526.341 tenaga kerja
3) Dengan adanya penjaminan KUR dan KMK PEN oleh Askrindo kepada UMKM yang feasible but not bankable atau tidak mempunyai agunan tambahan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan perbankan, maka UMKM tersebut dapat mengakses kredit sehingga pengusaha UMKM dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4) Meningkatkan kapasitas Jamkrindo dan Askrindo dalam melakukan penjaminan KUR sehingga mencukupi untuk menjamin penyaluran KUR kepada UMKMK.

3. Benefits of the IDR 6 Trillion State Equity Participation (PMN)

a. Benefits of the IDR 6 Trillion PMN to IFG, Askrindo, and Jamkrindo

1) IFG, Askrindo, and Jamkrindo have successfully carried out the Government's mandate as stipulated in Government Regulation No. 72 of 2020 concerning the Increase in the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), as well as in the Joint Assessment of the IDR 6 Trillion PMN.
2) From 2007 through December 31, 2025, PT Askrindo and PT Jamkrindo had guaranteed financing for 36,323,025 MSMEs and 35,265,779 MSMEs, respectively, while supporting employment for 63,561,658 and 46,526,341 workers, respectively.
3) Through KUR and PEN Working Capital Credit (KMK PEN) guarantees provided by Askrindo to MSMEs that are financially feasible but not bankable, or that lack sufficient additional collateral in accordance with banking requirements, these enterprises have been able to access financing to operate and expand their businesses.
4) Enhance the capacity of Jamkrindo and Askrindo to provide KUR guarantees so that they are sufficient to ensure the disbursement of KUR to MSMEs.

5) Memperkuat struktur permodalan IFG, termasuk Askrindo dan Jamkrindo sehingga dapat berperan dalam penataan industri asuransi sesuai dengan tujuan pembentukan holding asuransi, penjaminan, dan investasi, yaitu memperkuat daya saing nasional antara lain melalui peningkatan permodalan, standar pelayanan, kompetensi SDM, dan jangkauan distribusi.

6) Dengan penambahan modal tersebut, Jamkrindo dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan dana sehingga dapat memperoleh hasil investasi. Selain itu, secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kepercayaan perbankan dan mitra usaha dalam menjalin kerja sama bisnis (*reciprocal business*).

b. Manfaat Bagi Masyarakat

1) Dengan pelaksanaan program penjaminan KUR dan KMK PEN oleh Jamkrindo dan Askrindo, diproyeksikan jumlah UMKM yang akan dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo semakin meningkat, baik dari sisi unit usaha yang dijamin (debitur) maupun penyerapan tenaga kerja.

2) Dengan adanya penjaminan KUR dan KMK PEN oleh Jamkrindo dan Askrindo kepada UMKM yang feasible *but not bankable*, UMKM tersebut dapat mengakses kredit sehingga pengusaha UMKM dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya.

5) It has also strengthened IFG's capital structure, including that of Askrindo and Jamkrindo, enabling the Group to contribute to the restructuring of Indonesia's insurance industry in line with the objectives of establishing the insurance, guarantee, and investment holding company, namely enhancing national competitiveness through stronger capitalization, higher service standards, improved human capital capabilities, and broader distribution networks.

6) The additional capital has enabled Jamkrindo to improve its financial performance through more effective fund management, resulting in higher investment returns. Furthermore, it has indirectly enhanced the confidence of banks and business partners in establishing reciprocal business relationships.

b. Benefits to the Public

1) Through the implementation of the KUR and PEN Working Capital Credit (KMK PEN) guarantee programs by Jamkrindo and Askrindo, the number of MSMEs guaranteed by both companies is expected to continue increasing, both in terms of the number of guaranteed business units (borrowers) and employment generation.

2) By providing KUR and KMK PEN guarantees to MSMEs that are financially feasible but not bankable, Jamkrindo and Askrindo enable these enterprises to access financing, allowing them to operate, expand, and grow their businesses.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Dalam rangka mempertahankan biaya dana pada tingkat yang efisien, Perusahaan menerapkan struktur permodalan yang bersumber dari kombinasi modal sendiri (ekuitas) dan utang (liabilitas). Komposisi tersebut dikelola secara konsisten agar tetap optimal guna mendukung pengembangan usaha Perusahaan.

Pada tahun 2025, struktur permodalan Perusahaan terdiri atas liabilitas sebesar 68,29% dan ekuitas sebesar 31,71%, menunjukkan perubahan dibandingkan dengan komposisi tahun 2024 yang sebesar 69,90% dan 27,61%. Adapun rincian struktur modal Perusahaan adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE OF THE COMPANY

To maintain an efficient cost of funding, the Company adopts a capital structure comprising a combination of equity and debt (liabilities). This capital mix is managed consistently to maintain an optimal balance that supports the Company's business growth.

In 2025, the Company's capital structure comprised 68.29% liabilities and 31.71% equity, representing a change from the 2024 composition of 69.90% and 27.61%, respectively. Details of the Company's capital structure are presented as follows:

Uraian Description	2025		2024		Pertumbuhan Growth	
	Nominal	Komposisi Composition (%)	Nominal	Komposisi Composition (%)	Nominal	Persentase (%)
Jumlah Aset Total Assets	**131.144**	**100%**	130.118	100%	1.026	0,79%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**90.550**	**69,05%**	90.957	69,90%	(407)	(0,45)%
Dana Tabarru' Tabarru' Fund	**(1.449)**	**(1,10)%**	(1,762)	(1,35)%	313	(17,76)%
Jumlah Ekuitas Total Equity	**42.042**	**32,06%**	35.923	27,61%	6.119	17,03%

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dalam rangka menjaga keseimbangan serta menyesuaikan struktur permodalan, *Holding* dan Anggota *Holding* dapat melakukan berbagai inisiatif, antara lain penyesuaian besaran dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, penerbitan saham atau obligasi baru, serta pelepasan aset untuk menurunkan liabilitas.

Sebagaimana praktik yang berlaku pada industri sejenis, Perusahaan bersama Anggota *Holding* melakukan pemantauan struktur modal melalui rasio utang terhadap modal. Rasio tersebut dihitung dengan membandingkan total liabilitas terhadap modal, yang mencakup seluruh komponen ekuitas. Selain itu, Perusahaan telah menetapkan struktur permodalan yang optimal guna memaksimalkan nilai Perusahaan secara keseluruhan.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

To maintain an appropriate capital structure and financial balance, the Holding Company and its Holding Members may undertake various initiatives, including adjusting the level of dividends distributed to shareholders, issuing new shares or bonds, and divesting assets to reduce liabilities.

Consistent with practices adopted across the industry, the Company and its Holding Members monitor their capital structure using the debt-to-equity ratio. This ratio is calculated by comparing total liabilities with total equity, which comprises all components of shareholders' equity. In addition, the Company has established an optimal capital structure aimed at maximizing overall corporate value.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION

Pengeluaran investasi barang modal (*capital expenditure*) merupakan alokasi biaya yang dilakukan Perusahaan untuk memperoleh aset maupun melakukan peningkatan atas aset yang telah dimiliki sehingga memberikan nilai tambah pada masa mendatang. Realisasi investasi barang modal menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan kegiatan usaha Perusahaan.

Capital expenditures (capex) refer to the allocation of funds by the Company to acquire assets or upgrade existing assets, thereby generating future value. The realization of capital expenditures is a key factor in supporting the development of the Company's business activities.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi investasi barang modal Perusahaan tercatat sebesar Rp467 miliar, menurun Rp36 miliar atau 8% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp503 miliar. Rincian realisasi investasi barang modal Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the Company's realized capital expenditure amounted to IDR 467 billion, a decrease of IDR 36 billion or 8% compared with IDR 503 billion in 2024. Details of the Company's realized capital expenditure are presented as follows:

(dalam miliar Rupiah)
(in billion IDR)

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Expenditure	**Nilai** Value
Tanah, bangunan, rumah dinas dan renovasi kantor Land, Building, Office House and Office Renovation	125
Software, program dan aset tidak berwujud Software, Programs and Intangible Assets	170
Komputer dan perangkatnya Computers and Devices	39
Perabot kantor, mesin, inventaris kantor dan perlengkapan lainnya Office Furniture, Machinery, Office Inventory and Other Equipments	118
Kendaraan Vehicles	15
Jumlah Total	**467**

Gambaran perbandingan nilai investasi barang modal Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

A comparison of the Company's capital expenditures over the past 2 (two) years is presented as follows:

(dalam miliar Rupiah)
(in billion IDR)

Uraian Description	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal	**Persentase** Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Capital Goods Investment Realization	**467**	503	(36)	-8%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND MATERIAL FACTS THAT OCCURRED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 hingga tanggal penerbitan laporan akuntan pada 19 Juni 2026 seperti berikut:

1. Perubahan struktur pemegang saham
   Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Nomor Akta 22 tanggal 4 Februari 2026, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0022163. AH.01.02, serta telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0099843 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0187072 yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2026 oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Material information and facts occurring after December 31, 2025 through the date of issuance of the auditor's report on June 19, 2026 are as follows:

1. Changes in Shareholder Structure
   Based on the Amendment to the Articles of Association under Deed No. 22 dated February 4, 2026, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which obtained approval pursuant to Decree of the Minister of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-0022163.AH.01.02, as well as the Letter of Acknowledgment of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0099843 and the Letter of Acknowledgment of Notification of Changes to Company Data No. AHU-AH.01.09-0187072, both issued on April 7, 2026 by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, the composition of the Company's shareholders became as follows:

2026

	Jumlah saham Number of shares	**Persentase kepemilikan** Percentage of ownership %	**Nilai** Amount	
PT Danantara Asset Management				
Saham Seri B Series B Shares	92,782,342	99%	92,782,342	Saham Seri B Series B Shares
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia				
Saham Seri A Dwiwarna Series A Dwiwarna Shares	937,195	1%	937,195	Saham Seri A Dwiwarna Series A Dwiwarna Shares
Total	**93,719,537**	**100%**	**93,719,537**	

2. Perubahan struktur Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 178 Tahun 2026 /SK.070/DI-DAM/DO/2026 tanggal 16 Maret 2026 dan No.188 Tahun 2026 /SK.074/DI-DAM/DO/2026 tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

2. Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Based on Shareholders' Resolutions No. 178 of 2026/SK.070/DI-DAM/DO/2026 dated March 16, 2026 and No. 188 of 2026/SK.074/DI-DAM/DO/2026 dated April 7, 2026 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), the composition of the Company's Board of Commissioners became as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**2026**
Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Ali Ghufron Mukti*)
Komisaris Commissioner	Sumiyati
Komisaris Commissioner	Nasrudin
Komisaris Commissioner	Hambra*)
Komisaris Commissioner	Setya Utama*)
Komisaris Commissioner	Undang Mugopal*)
Komisaris Commissioner	Faisal Amir Masduki*)

PERNYATAAN TENTANG PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN SECARA TERINTEGRASI

STATEMENT ON THE ISSUANCE OF INTEGRATED ANNUAL REPORT

Laporan Tahunan disusun secara terintegrasi dengan memuat uraian komprehensif mengenai kinerja historis Perusahaan. Gambaran tersebut antara lain tercermin dalam bab Ikhtisar Keuangan yang menyajikan data keuangan lima tahun terakhir dalam bentuk tabel, serta perbandingan kinerja keuangan dan operasional selama dua tahun terakhir yang ditampilkan dalam bentuk grafik.

Terkait risiko, peluang, dan prospek usaha ke depan, Perusahaan menyampaikan analisis yang didasarkan pada perkembangan makroekonomi global dan nasional, sekaligus menetapkan target kuantitatif untuk tahun berikutnya pada subbab Prospek Usaha. Penyajian informasi tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang memadai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan mengenai arah strategis Perusahaan serta pencapaian dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

This Annual Report has been prepared in an integrated manner, providing a comprehensive overview of the Company's historical performance. This overview is reflected, among other things, in the Financial Highlights section, which presents five years of financial data in tabular form, as well as comparative financial and operational performance over the past two years through graphical presentations.

With respect to future risks, opportunities, and business prospects, the Company provides an analysis based on developments in the global and domestic macroeconomic environment, while also establishing quantitative targets for the following year in the Business Outlook subsection. The presentation of this information is intended to provide shareholders and other stakeholders with a sufficient understanding of the Company's strategic direction and its achievements in creating sustainable value.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2025

Asumsi-Asumsi yang Digunakan dalam Perumusan Target Tahun 2025

Perusahaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 dengan memperhatikan sejumlah asumsi, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,1% pada tahun 2025.
2. Suku bunga SUN tenor 10 tahun diperkirakan mencapai 6,62% pada akhir tahun 2025.
3. Inflasi diproyeksikan sebesar 2,72% sepanjang tahun 2025.
4. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada Rp15.437 per USD pada tahun 2025.

ACHIEVEMENT TARGET IN 2025

Assumptions Used in Formulating the 2025 Target

The Company prepared its 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) based on a number of key assumptions, including the following:

1. Indonesia's economic growth is projected at 5.1% in 2025.
2. The yield on 10-year Indonesian Government Bonds (SUN) is projected to reach 6.62% by the end of 2025.
3. Inflation is projected at 2.72% for 2025.
4. The Indonesian rupiah exchange rate is projected at IDR 15,437 per USD in 2025.

Pencapaian Realisasi Tahun 2025 terhadap Target
Achievement of 2025 Realization against Target

(dalam juta Rupiah)
(In million IDR)

Uraian Description	**Realisasi 2025** 2025 Realization	**Target 2025** 2025 Target	**Pencapaian Realisasi terhadap Target (%)** Achievement of Realization compared to Target (%)
Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Results	**2.861**	**3.038**	94%
Hasil Kegiatan Penjaminan Guarantee Service Result	**5.150**	**3.354**	154%
Hasil Investasi Bersih Net Investment Income	**6.836**	**5.840**	117%
Hasil Keuangan Bersih Net Financial Result	**(2.411)**	**(2.582)**	93%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**6.184**	**2.269**	273%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	**5.507**	**1.312**	420%
Jumlah Aset Total Asset	131.144	139.435	**94%**
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	90.550	97.740	**93%**
Jumlah Ekuitas Total Liabilities	42.042	42.007	**100%**

PROYEKSI TAHUN 2026
2026 PROJECTIONS

PERBANDINGAN PROYEKSI TAHUN 2026 TERHADAP REALISASI TAHUN 2025

COMPARISON OF THE 2026 PROJECTIONS WITH THE 2025 REALIZATION

Uraian Description	**Realisasi 2025** 2025 Realization	**Proyeksi 2026** 2026 Projection	**Pencapaian Realisasi terhadap Proyeksi (%)** Achievement of Realization compared to Projection (%)
Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Result	**2.861**	**1.589**	180%
Hasil Kegiatan Penjaminan Guarantee Service Result	**5.150**	**1.139**	452%
Hasil Investasi Investment Income	**6.836**	**5.840**	117%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**6.184**	**2.269**	273%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit For The Year	**5.507**	**1.312**	420%
Jumlah Aset Total Assets	131.144	139.435	**94%**
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	90.550	97.740	**93%**
Jumlah Ekuitas Total Equity	42.042	42.007	**100%**

ASPEK PERPAJAKAN
TAXATION ASPECTS

Sebagai *holding* yang bergerak di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk senantiasa mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepatuhan di bidang perpajakan.

As a holding company engaged in insurance, guarantee, and investment, the Company is strongly committed to consistently complying with all applicable laws and regulations, including tax compliance.

Sampai dengan 31 Desember 2025, posisi pajak dibayar di muka dan utang pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the Company's prepaid taxes and tax liabilities were as follows:

(dalam juta Rupiah)
(In million IDR

No.	Jenis Pajak Type of Tax	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
1.	**Pajak Dibayar di Muka** Prepaid Taxes				
A.	Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	**289.468**	197.026	92.442	47%
B.	Pajak Lain-lain Other Taxes	**27.663**	23.471	4.192	18%
	Total Pajak Dibayar di Muka Total Prepaid Taxes	317.131	**220.497**	**96.634**	**44%**
2.	**Utang Pajak** Tax Payables				
A.	Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	**503.440**	135.210	368.230	273%
B.	Pajak Lain-lain Other Taxes	**149.013**	221.800	(72.787)	-33%
	Total Utang Pajak Total Tax Payables	652.453	**357.010**	**295.443**	**83%**

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)
INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan saham sebesar 100,00% oleh Pemerintah, IFG tidak menyelenggarakan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP). Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai pelaksanaan program tersebut oleh Perusahaan.

As a State-Owned Enterprise (SOE) owned entirely by the Government (100.00%), IFG does not operate an Employee Share Ownership Plan (ESOP) and/or a Management Share Ownership Plan (MSOP). Therefore, there is no information regarding the Company's implementation of such programs.

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMATION REGARDING THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

Sampai dengan 31 Desember 2025, IFG tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan saham 100,00% berada pada Pemerintah dan tidak pernah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di bursa efek mana pun.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk total perolehan dana, rencana serta rincian penggunaannya, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2025, IFG is registered as a State-Owned Enterprise (SOE) with 100.00% of its shares owned by the Government and has never conducted an Initial Public Offering (IPO) on any stock exchange.

Consequently, there is no information regarding the actual use of proceeds from a public offering—including the total amount raised, plans and details of their use, the balance of funds, or the date of the General Meeting of Shareholders' approval of changes in the use of funds—that can be disclosed in this Annual Report.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/ CAPITAL RESTRUCTURING

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat aksi Perusahaan terkait mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal yang bersifat material. Dengan demikian, informasi terkait hal tersebut tidak dapat disampaikan.

Pursuant to Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities, a transaction is classified as a Material Transaction if its value is equal to or exceeds 20% (twenty percent) of the Company's equity.

Throughout 2025, the Company did not undertake any material actions related to investments, expansions, divestitures, business combinations, acquisitions, and/ or debt/capital restructuring. Therefore, no information regarding such matters can be disclosed

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

Pengungkapan mengenai sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah disampaikan IFG sebagai bagian dari kebijakan akuntansi signifikan terkait hubungan afiliasi (Pihak Berelasi), sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2025.

Penjelasan mengenai saldo serta transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dimuat dalam Laporan Keuangan Audit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini, pada Catatan dari Laporan Tahunan ini, pada Catatan 44.

Disclosures regarding the nature of relationships and transactions with related parties have been provided by IFG as part of its significant accounting policies related to affiliate relationships (Related Parties), as set forth in the 2025 Consolidated Financial Statements.

An explanation of the balances and transactions with these related parties is included in the Audited Financial Statements, which form an integral part of this Annual Report, in Note 44.

DEFINISI PIHAK BERELASI

Pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anak; atau
   c. Merupakan personel manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (1);
   d. orang yang diidentifikasi, dalam butir (1) (a) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
3. Definisi pihak-pihak berelasi untuk Grup adalah sebagai berikut:
   a. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
   b. Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

DEFINITION OF RELATED PARTY

Related parties are persons or entities related to the reporting entity as follows:

1. A person or their immediate family member is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the Company and its subsidiaries;
   b. Has significant influence over the Company and its subsidiaries; or
   c. Represents key management personnel of the Company and its subsidiaries.
2. An entity is related to the reporting entity if it meets the following conditions:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent entity, subsidiaries and subsequent subsidiaries are related to other entities);
   b. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of a reporting entity or an entity related to a reporting entity;
   c. An entity controlled or jointly controlled by a person identified in item (1);
   d. the person identified in (1)(a) as having significant influence over the entity or a member of the key management of the entity (or a parent company of the entity).
3. The definition of related parties for the Group is as follows:
   a. Governments that have control, or joint control, or significant influence, over the reporting entity; and
   b. Other entities are related parties because they are controlled or jointly controlled, or significantly influenced by the same government as the reporting entity and the other entity.

Sebagai pemegang saham tunggal Perusahaan, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia memiliki seluruh kepemilikan saham. Dengan kondisi tersebut, entitas yang dikategorikan sebagai Pihak Berelasi bagi Perusahaan mencakup entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak usahanya. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi selaku manajemen kunci juga merupakan pihak berelasi bagi Perusahaan.

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI PIHAK BERELASI DAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi Perusahaan dengan pihak berelasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum, dan telah memenuhi ketentuan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Transaksi dengan Pihak Berelasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan pendapatan melalui masing-masing Anggota *Holding* dan dilakukan secara rutin, berulang, dan/atau berkesinambungan.

Direksi menyatakan bahwa setiap transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, termasuk penerapan prinsip kewajaran transaksi (*arm's-length principle*).

Transaksi antara Perusahaan dan BUMN diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Dalam hal ini, Direksi berperan untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai serta dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, termasuk pemenuhan prinsip kewajaran transaksi (*arm's-length principle*).

As the Company's sole shareholder, the Republic of Indonesia, through the Government of the Republic of Indonesia, holds all of the Company's shares. Given these circumstances, entities classified as Related Parties of the Company include those controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government, namely State-Owned Enterprises (SOEs) and their subsidiaries. In addition, the Board of Commissioners and the Board of Directors, as key management, are also related parties of the Company.

REASONS FOR RELATED PARTY TRANSACTIONS AND FAIRNESS OF TRANSACTIONS

All of the Company's transactions with related parties are conducted in accordance with the principle of prudence and in line with generally accepted business practices, and comply with the provisions of PSAK No. 224 regarding Disclosure of Related Parties. These transactions with Related Parties are part of business activities aimed at generating revenue through each Holding Company subsidiary and are conducted on a routine, recurring, and/or ongoing basis.

The Board of Directors states that every related-party transaction has undergone adequate procedures to ensure its execution is in accordance with generally accepted business practices, including the application of the arm's-length principle.

Transactions between the Company and state-owned enterprises are treated as transactions with related parties in accordance with PSAK No. 224 regarding Disclosure of Related Parties. In this regard, the Board of Directors is responsible for ensuring that related-party transactions have undergone adequate procedures and are conducted in accordance with generally accepted business practices, including compliance with the arm's-length principle

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT DALAM MELAKUKAN PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM ANTARA LAIN DILAKUKAN DENGAN MEMENUHI PRINSIP TRANSAKSI YANG WAJAR (*ARMS-LENGTH PRINCIPLE*)

Pelaksanaan transaksi Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi telah mengacu pada ketentuan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Kewajaran transaksi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku atas transaksi tersebut telah melalui proses reviu dan audit oleh auditor internal maupun auditor eksternal.

Adapun mekanisme penelaahan atas transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit, yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

PERNYATAAN TERKAIT PENDAPATAN USAHA YANG DIJALANKAN SECARA RUTIN, BERULANG, DAN/ ATAU BERKELANJUTAN

Sumber pendapatan usaha IFG berasal dari kegiatan operasional utama yang dilaksanakan secara rutin, berulang, dan berkesinambungan, sehingga mencerminkan stabilitas dan konsistensi model bisnis dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Keberlanjutan pendapatan tersebut menjadi indikator penting dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat.

Sebagai bagian dari strategi Perusahaan, IFG turut mengoptimalkan transaksi afiliasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna memperkuat sinergi antar Anggota *Holding* serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

THE ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE AUDIT COMMITTEE IN PERFORMING ADEQUATE PROCEDURES TO ENSURE THAT AFFILIATED TRANSACTIONS ARE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH GENERALLY ACCEPTED BUSINESS PRACTICES, BY COMPLYING WITH THE ARMS-LENGTH PRINCIPLE

The Company conducts transactions with related parties in accordance with PSAK No. 224 regarding Disclosure of Related Parties. The reasonableness of the transactions and compliance with applicable regulations governing such transactions have been reviewed and audited by both internal and external auditors.

The mechanism for reviewing material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with related parties is carried out through an audit process conducted by the Audit Committee, which is subsequently reported to the Board of Commissioners.

STATEMENT RELATED TO BUSINESS INCOME THAT IS ROUTINE, RECURRING, AND/OR SUSTAINABLE

IFG's sources of operating income stem from core operational activities conducted on a routine, recurring, and continuous basis, thereby reflecting the stability and consistency of its business model in supporting long-term growth. The sustainability of this revenue serves as a key indicator in maintaining sound financial performance.

As part of the Company's strategy, IFG also optimizes affiliate transactions conducted in accordance with the principles of good corporate governance to strengthen synergies among Holding Company members and enhance contributions to sustainable business growth.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

Sepanjang tahun 2025, terdapat peraturan perundang-undangan dan ketentuan baru yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan telah diberlakukan, antara lain:

Throughout 2025, new laws, regulations, and provisions that had a significant impact on the Company's business operations were or were enacted, including:

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
1.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2025 concerning Procedures for the Collection of Levies in the Financial Services Sector and Other Revenues	POJK Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tata cara pelaksanaan pungutan OJK kepada pelaku sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 41 Tahun 2024. Peraturan ini memberikan kepastian mengenai mekanisme penghitungan, pembayaran, verifikasi, penagihan, pengelolaan piutang, serta sanksi administratif atas pungutan dan penerimaan lainnya yang menjadi kewajiban lembaga jasa keuangan kepada OJK. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan penerimaan OJK sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku industri jasa keuangan. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 2 of 2025 regulates the procedures for the collection of OJK levies from financial services sector participants as a follow-up to Government Regulation Number 41 of 2024. This regulation provides certainty regarding the mechanisms for the calculation, payment, verification, collection, receivables management, and imposition of administrative sanctions in relation to levies and other revenues payable by financial services institutions to OJK. It aims to enhance the transparency, accountability, and effectiveness of OJK revenue management while strengthening compliance among financial services industry participants.	Atas POJK, IFG dan Anggota *Holding* (Perasuransian) perlu memastikan ketepatan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pungutan kepada OJK agar terhindar dari sanksi administratif. Under this POJK, IFG and its Holding Members in the insurance sector need to ensure the accuracy of the calculation, reporting, and payment of levies to OJK in order to avoid administrative sanctions.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises	UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan pembaruan terhadap regulasi BUMN yang bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing BUMN, serta mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Salah satu perubahan utama adalah penguatan peran Presiden dalam pengelolaan BUMN yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk mengelola investasi, aset, dan operasional BUMN secara lebih terintegrasi dan profesional. Selain itu, UU ini menegaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), efisiensi, keberlanjutan, serta optimalisasi nilai aset negara yang dipisahkan pada BUMN. UU ini mulai berlaku pada 24 Februari 2025. Law Number 1 of 2025 updates the regulatory framework governing SOEs with the aim of strengthening governance, enhancing the competitiveness of SOEs, and optimizing the management of state investments. One of the key changes is the strengthening of the President's role in SOE management, with certain authorities delegated to the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara Indonesia) to enable more integrated and professional management of SOE investments, assets, and operations. In addition, this Law emphasizes the implementation of Good Corporate Governance principles, efficiency, sustainability, and optimization of the value of separated state assets invested in SOEs. This Law came into effect on February 24, 2025.	Bagi IFG sebagai holding BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, perubahan ini berdampak pada penguatan tata kelola dan pengawasan sebagai bagian dari ekosistem BUMN. IFG perlu menyelaraskan strategi bisnis, tata kelola, dan pengelolaan investasi dengan arah kebijakan pemerintah melalui Danantara Indonesia. Selain itu, IFG dituntut untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, manajemen risiko, dan akuntabilitas agar mampu mendukung optimalisasi nilai perusahaan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, dampak utama UU ini bagi IFG lebih bersifat strategis dan tata kelola, yaitu mendorong peningkatan kinerja, sinergi antar-BUMN, serta pengelolaan investasi yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. For IFG, as an SOE holding company in the insurance, guarantee, and investment sectors, these changes strengthen governance and supervision within the SOE ecosystem. IFG needs to align its business strategies, governance, and investment management with government policies implemented through Danantara Indonesia. In addition, IFG is required to enhance operational efficiency, transparency, risk management, and accountability to support the optimization of corporate value and make a greater contribution to the national economy. Accordingly, the principal impact of this Law on IFG is strategic and governance-related, encouraging improved performance, greater synergy among SOEs, and more integrated investment management focused on long-term value creation.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2025 concerning the Organization and Governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency	PP Nomor 10 Tahun 2025 merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur organisasi, kewenangan, dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Peraturan ini menetapkan Danantara sebagai badan hukum milik Pemerintah Indonesia yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Presiden dalam pengelolaan BUMN. Struktur organisasi Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, yang bertugas mengelola investasi, aset, dividen, serta pembentukan *holding* investasi dan *holding* operasional BUMN secara profesional dan terintegrasi. Tujuan utama PP ini adalah menciptakan landasan hukum yang kuat bagi Danantara agar mampu mengoptimalkan nilai investasi negara, meningkatkan daya saing BUMN, menarik investasi, serta menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berstandar internasional. PP ini mulai berlaku pada 24 Februari 2025. Government Regulation Number 10 of 2025 is an implementing regulation of Law Number 1 of 2025 concerning SOEs that governs the organization, authority, and governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara Indonesia). This regulation establishes Danantara as a legal entity owned by the Government of Indonesia and delegates to it certain authorities of the President in the management of SOEs. Danantara's organizational structure consists of a Supervisory Board and an Executive Board, which are responsible for professionally and integratively managing investments, assets, dividends, as well as the establishment of SOE investment holdings and operational holdings. The primary objective of this Government Regulation is to provide a strong legal foundation for Danantara to optimize the value of state investments, enhance SOE competitiveness, attract investment, and implement transparent, accountable, and internationally benchmarked governance. This Government Regulation came into effect on February 24, 2025.	Bagi IFG sebagai *holding* BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, PP ini memperkuat arah pengelolaan perusahaan agar selaras dengan kebijakan Danantara sebagai pengelola investasi BUMN. IFG perlu meningkatkan sinergi dengan Danantara dalam pengelolaan aset, investasi, dan strategi bisnis, serta memastikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko, dan akuntabilitas sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, IFG berpotensi memperoleh peluang untuk memperkuat kolaborasi investasi dan optimalisasi portofolio dalam ekosistem BUMN, namun di sisi lain dituntut untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi kinerja, dan penciptaan nilai perusahaan agar sejalan dengan tujuan Danantara dalam mengoptimalkan nilai investasi negara. For IFG, as an SOE holding company in the insurance, guarantee, and investment sectors, this Government Regulation reinforces the direction of the Company's management to ensure alignment with Danantara's policies as the manager of SOE investments. IFG needs to strengthen its synergy with Danantara in asset management, investment, and business strategy, while ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG), risk management, and accountability in accordance with the prescribed standards. In addition, IFG may have opportunities to strengthen investment collaboration and portfolio optimization within the SOE ecosystem. At the same time, the Company is required to enhance operational efficiency, performance transparency, and corporate value creation in line with Danantara's objective of optimizing the value of state investments.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian *Holding* Operasional Government Regulation Number 15 of 2025 concerning the Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) for the Establishment of an Operational Holding Company	PP Nomor 15 Tahun 2025 mengatur penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) melalui pengalihan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik negara pada sejumlah BUMN. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN untuk membentuk *Holding* Operasional dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Dengan pengalihan tersebut, BKI berperan sebagai *holding* operasional yang mengelola kepemilikan saham negara pada BUMN, sementara negara tetap mempertahankan kendali strategis melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna. Tujuan utama PP ini adalah mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi negara, meningkatkan sinergi antar-BUMN, serta memperkuat tata kelola dan nilai perusahaan dalam ekosistem Danantara. PP ini mulai berlaku pada 21 Maret 2025. Government Regulation Number 15 of 2025 regulates the additional State Equity Participation (PMN) in PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) through the transfer of all Series B and/or Series C shares owned by the state in a number of SOEs. This measure forms part of the implementation of Law Number 1 of 2025 concerning SOEs for the establishment of an Operational Holding Company within the structure of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara Indonesia). Following the transfer, BKI serves as an operational holding company that manages the state's shareholdings in SOEs, while the state retains strategic control through its ownership of Series A Dwiwarna shares. The primary objective of this Government Regulation is to optimize the management of state assets and investments, enhance synergy among SOEs, and strengthen governance and corporate value within the Danantara ecosystem. This Government Regulation came into effect on March 21, 2025.	Atas PP ini mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola BUMN dalam ekosistem Danantara, termasuk IFG. Sebagai *holding* BUMN sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG perlu menyelaraskan strategi bisnis, tata kelola, dan pelaporan dengan arah kebijakan holding operasional yang dikelola melalui BKI. Regulasi ini juga mendorong peningkatan sinergi antar-BUMN, optimalisasi pengelolaan aset dan investasi, serta penguatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), transparansi, dan akuntabilitas. Dari sisi strategis, IFG berpotensi memperoleh peluang kolaborasi yang lebih luas dalam ekosistem Danantara, namun juga dituntut untuk meningkatkan efisiensi operasional, kinerja perusahaan, dan penciptaan nilai agar selaras dengan tujuan transformasi BUMN dan optimalisasi investasi negara. This Government Regulation results in changes to the ownership and governance structure of SOEs within the Danantara ecosystem, including IFG. As an SOE holding company in the insurance, guarantee, and investment sectors, IFG needs to align its business strategies, governance, and reporting with the policies of the operational holding company managed through BKI. This regulation also promotes greater synergy among SOEs, optimization of asset and investment management, and stronger implementation of Good Corporate Governance (GCG), transparency, and accountability. Strategically, IFG may gain broader opportunities for collaboration within the Danantara ecosystem, while also being required to enhance operational efficiency, corporate performance, and value creation in line with the objectives of SOE transformation and optimization of state investments.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Government Regulation Number 16 of 2025 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia in the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency	PP Nomor 16 Tahun 2025 mengatur penyertaan modal negara kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai bagian dari implementasi UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Penyertaan modal tersebut dilakukan melalui pengalihan 99% saham Seri B milik negara pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) kepada Danantara sebagai modal awal badan tersebut. Melalui pengaturan ini, Danantara memperoleh landasan permodalan untuk menjalankan fungsi sebagai pengelola investasi negara dan pengelola kepemilikan BUMN secara profesional, dengan tetap mempertahankan kendali strategis pemerintah melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna. PP ini mulai berlaku pada 21 Maret 2025. Government Regulation Number 16 of 2025 regulates State Equity Participation in the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara Indonesia) as part of the implementation of Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises. The State Equity Participation is carried out through the transfer of 99% of the state-owned Series B shares in PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) to Danantara as the agency's initial capital. Through this regulation, Danantara is provided with a capital foundation to perform its functions as the manager of state investments and state ownership in SOEs in a professional manner, while the Government retains strategic control through its ownership of Series A Dwiwarna shares. This Government Regulation came into effect on March 21, 2025.	Sehubungan dengan perubahan struktur pemegang saham dimana Pemegang Saham Seri B dipegang oleh BKI, maka ada perubahan Anggaran Dasar IFG, dimana perubahan komposisi ini termasuk mengubah jumlah saham Seri A menjadi 1% oleh BP BUMN. In connection with the change in the shareholder structure, whereby the Series B shares are held by BKI, IFG's Articles of Association were amended. This change in composition included a change in the number of Series A shares held by the SOE Management Agency (BP BUMN) to 1%.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
6.	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 Tahun 2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Circular Letter of the Minister of Manpower Number M/6/HK.04/V/2025 of 2025 concerning the Prohibition of Discrimination in the Workforce Recruitment Process	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 diterbitkan untuk memperkuat penerapan prinsip nondiskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia. Surat edaran ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan kerja yang sama dan pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam proses rekrutmen. Persyaratan usia hanya dapat ditetapkan apabila benar-benar diperlukan karena karakteristik atau tuntutan suatu jabatan, serta tidak menghilangkan atau mengurangi kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas, sehingga proses rekrutmen harus dilakukan secara objektif, adil, dan inklusif. Surat edaran ini juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada para pemangku kepentingan di wilayahnya. Circular Letter of the Minister of Manpower Number M/6/HK.04/V/2025 was issued to strengthen the implementation of the principle of non-discrimination in workforce recruitment processes in Indonesia. The Circular Letter emphasizes that every citizen is entitled to equal employment opportunities and that employers are prohibited from engaging in discrimination on any grounds during the recruitment process. Age requirements may only be imposed where genuinely necessary due to the characteristics or requirements of a particular position and must not eliminate or reduce a person's opportunity to obtain employment. These provisions also apply to persons with disabilities; therefore, recruitment processes must be conducted objectively, fairly, and inclusively. The Circular Letter also instructs regional governments to disseminate the policy to stakeholders within their respective jurisdictions.	Bagi IFG, surat edaran ini mendorong penguatan praktik Sumber Daya Manusia dan tata kelola rekrutmen agar lebih adil, transparan, dan berbasis kompetensi. IFG perlu memastikan bahwa kebijakan dan proses rekrutmen di seluruh entitas grup tidak memuat persyaratan yang bersifat diskriminatif, termasuk pembatasan usia yang tidak memiliki dasar objektif sesuai kebutuhan jabatan. Selain itu, IFG perlu melakukan peninjauan terhadap kebijakan rekrutmen, memperkuat komitmen terhadap keberagaman (*diversity*), kesetaraan (*equity*), dan inklusi (*inclusion*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Penerapan kebijakan ini juga berpotensi memperluas akses terhadap talenta yang lebih beragam, memperkuat citra perusahaan sebagai pemberi kerja yang inklusif, serta mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan sumber daya manusia. For IFG, this Circular Letter encourages the strengthening of human capital practices and recruitment governance to ensure that they are fairer, more transparent, and competency-based. IFG needs to ensure that recruitment policies and processes across all Group entities do not contain discriminatory requirements, including age restrictions without an objective basis related to the requirements of the position. In addition, IFG needs to review its recruitment policies, strengthen its commitment to diversity, equity, and inclusion, and enhance compliance with manpower regulations. The implementation of this policy also has the potential to broaden access to a more diverse talent pool, strengthen the Company's image as an inclusive employer, and support the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in human capital management.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing	PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sebagai penyempurnaan sekaligus pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini bertujuan menciptakan sistem perizinan berusaha yang lebih sederhana, transparan, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum melalui pendekatan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. Peraturan ini mengatur persyaratan dasar perizinan, Perizinan Berusaha (PB), Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), penyelenggaraan layanan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengawasan, evaluasi kebijakan, penyelesaian hambatan perizinan, serta pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan. PP ini mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Government Regulation Number 28 of 2025 regulates the implementation of Risk-Based Business Licensing (PBBR) as an enhancement to and replacement of Government Regulation Number 5 of 2021. This regulation aims to establish a simpler, more transparent, integrated business licensing system that provides greater legal certainty through an approach based on the risk level of business activities. The regulation governs basic licensing requirements, Business Licensing (PB), Business Licensing to Support Business Activities (PB UMKU), the provision of services through the Online Single Submission (OSS) system, supervision, policy evaluation, resolution of licensing obstacles, and the imposition of sanctions on business actors that fail to comply with the applicable requirements. This Government Regulation came into effect on June 5, 2025.	Bagi IFG, PP ini memperkuat kepastian hukum dan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha, khususnya bagi IFG dan Anggota *Holding* yang menjalankan kegiatan usaha atau mengembangkan lini bisnis yang memerlukan perizinan melalui sistem OSS. IFG perlu memastikan seluruh perizinan usaha, perizinan penunjang, dan perubahan kegiatan usaha telah sesuai dengan pendekatan berbasis risiko serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pengawasan yang ditetapkan pemerintah. Selain meningkatkan efisiensi proses administrasi perizinan, regulasi ini juga mendorong penguatan kepatuhan (*compliance*), pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*). Dengan sistem perizinan yang lebih terintegrasi, IFG diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan bisnis, investasi, dan transformasi usaha secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan risiko administratif dan regulasi. For IFG, this Government Regulation strengthens legal certainty and facilitates the business licensing process, particularly for IFG and its Holding Members that conduct business activities or develop business lines requiring licenses through the OSS system. IFG needs to ensure that all business licenses, supporting licenses, and changes in business activities comply with the risk-based approach and fulfill the reporting and supervisory obligations stipulated by the Government. In addition to improving the efficiency of licensing administration processes, this regulation also promotes stronger compliance, risk management, and Good Corporate Governance (GCG). With a more integrated licensing system, IFG is expected to support the acceleration of business development, investment, and business transformation more effectively, while minimizing administrative and regulatory risks.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
8.	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/ HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/ atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja Circular Letter of the Minister of Manpower Number M/5/HK.04.00/V/2025 concerning the Prohibition on the Retention of Diplomas and/or Personal Documents Belonging to Workers/Laborers by Employers	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/ HK.04.00/V/2025 diterbitkan untuk memperkuat perlindungan hak pekerja dengan melarang pemberi kerja mensyaratkan maupun menahan ijazah dan/ atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Dokumen yang dimaksud meliputi antara lain ijazah, sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan dokumen pribadi lainnya. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi pekerja untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Pengecualian hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, misalnya apabila ijazah atau sertifikat kompetensi diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis, dengan kewajiban pemberi kerja menjaga keamanan dokumen serta bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan. Surat edaran ini bertujuan mewujudkan hubungan industrial yang adil, melindungi hak dasar pekerja, dan mendorong praktik ketenagakerjaan yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). This Circular Letter prohibits employers from requiring and/or retaining workers'/laborers' diplomas and/or personal documents as a condition or guarantee of employment. Personal documents include, among others, diplomas, competency certificates, passports, birth certificates, marriage certificates, and other personal documents. Employers are also prohibited from preventing workers/laborers from obtaining better employment opportunities through the retention of such documents. An exception applies to diplomas and/ or competency certificates obtained through education and training financed by the employer under a written employment agreement. In such cases, the employer is responsible for safeguarding the documents concerned. This policy is intended to promote fair industrial relations, protect workers' rights, and strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG).	Bagi IFG, surat edaran ini mendorong penguatan tata kelola ketenagakerjaan dan praktik Sumber Daya Manusia di IFG dan Anggota *Holding*. IFG perlu memastikan bahwa kebijakan rekrutmen, perjanjian kerja, dan pengelolaan hubungan kerja tidak memuat ketentuan mengenai penahanan ijazah atau dokumen pribadi pekerja yang bertentangan dengan surat edaran tersebut. Selain melakukan peninjauan terhadap kebijakan internal, IFG juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada unit SDM dan manajemen agar seluruh proses ketenagakerjaan selaras dengan prinsip perlindungan hak pekerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan GCG. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan karyawan, meminimalkan risiko hukum dan perselisihan hubungan industrial, serta meningkatkan reputasi IFG sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi praktik ketenagakerjaan yang adil dan profesional. For IFG and its Holding Members, this Circular Letter affects employment governance and human capital management. Recruitment processes, employment agreements, and industrial relations practices must ensure that they do not contain provisions requiring the retention of workers'/laborers' diplomas or personal documents in violation of the applicable provisions. IFG also needs to conduct internal reviews and disseminate these provisions to the relevant units to ensure the protection of workers' rights, regulatory compliance, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG). Compliance with this policy can strengthen employee trust while mitigating legal, industrial relations, and reputational risks.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
9.	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis Regulation of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 4 of 2025 concerning Guidelines for the Utilization of Static Archives	Peraturan ANRI 4/2025 ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025. Peraturan ini sebagai upaya untuk memperkuat peran arsip statis agar tidak hanya sebagai dokumen yang disimpan, namun juga menjadi sumber informasi yang aktif dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi Lembaga Kearsipan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Arsip Statis, mulai dari penyusunan Naskah Sumber Arsip hingga penyelenggaraan Pameran Arsip Statis. Ringkasan peraturan ini didiseminasikan dalam rangka pemenuhan laporan hasil pemeriksaan langsung OJK, dimana Perusahaan wajib mendiseminasikan seluruh peraturan yang berlaku bagi *Holding* IFG. Regulation of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 4 of 2025 concerning Guidelines for the Utilization of Static Archives was stipulated on March 20, 2025, and came into effect on March 21, 2025. This regulation was issued to strengthen the utilization of static archives as an active source of information and provides guidelines for Archival Institutions in utilizing static archives, from the preparation of source manuscripts to the organization of static archive exhibitions. The summary of this regulation was disseminated as a follow-up to the OJK Direct Examination Report, which requires the Company to disseminate all regulations applicable to IFG Holding.	Peraturan ANRI 4/2025 tidak berdampak secara langsung terhadap IFG dan anggota *holding* mengingat peraturan ini ditujukan kepada Lembaga Kearsipan dalam pelaksanaan pemanfaatan Arsip Statis. Namun, karena IFG secara *voluntary* tunduk kepada peraturan ini dan menjadikan peraturan ini sebagai rujukan, maka IFG wajib untuk memenuhi substansi pengaturan mengenai pemanfaatan Arsip Statis dalam meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian arsip guna mendukung penguatan tata kelola kearsipan. This regulation does not directly apply to IFG, as it is specifically addressed to Archival Institutions. However, as IFG voluntarily subjects itself to and uses this regulation as a reference, the Company needs to comply with the substance of the provisions governing the utilization of static archives to improve archive management, utilization, and preservation, as well as strengthen archival governance.
10.	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number M/2/HK.04/ III/2025 concerning the Implementation of the Provision of Religious Holiday Allowances in 2025 for Workers/ Laborers in Companies	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/ HK.04.00/III/2025 diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat edaran ini menegaskan bahwa THR Keagamaan merupakan hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja, yang diberikan kepada pekerja/ buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus, baik yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). THR wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, serta tidak diperkenankan dibayarkan secara mencicil. Besaran THR diberikan sebesar 1 bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Selain itu, pemerintah menginstruksikan pembentukan Posko Satgas THR di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan layanan konsultasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR This Circular Letter regulates the rights and obligations relating to the provision of Religious Holiday Allowances (THR) in 2025. THR must be provided to workers/laborers who have worked continuously for at least one month, whether employed under a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) or an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT). THR must be paid in full no later than seven days before the relevant religious holiday and may not be paid in installments. Workers/laborers who have worked for 12 months or more are entitled to THR equivalent to one month's wages, while those who have worked for at least one month but less than 12 months are entitled to THR on a pro rata basis. The Circular Letter also provides for the establishment of THR Task Force Posts to facilitate consultations and handle complaints concerning the payment of THR.	Bagi IFG, surat edaran ini memperkuat kewajiban perusahaan dalam memastikan pembayaran THR dilakukan tepat waktu, sesuai ketentuan, dan secara penuh di seluruh entitas dalam grup. IFG perlu memastikan kebijakan remunerasi, penganggaran, dan proses administrasi penggajian telah mendukung pemenuhan kewajiban tersebut, termasuk bagi pekerja dengan status PKWT maupun PKWTT. Selain memperkuat kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, implementasi surat edaran ini juga mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), menjaga hubungan industrial yang harmonis, mengurangi risiko perselisihan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. For IFG and its Holding Members, this Circular Letter requires the timely and full payment of THR in accordance with the applicable provisions. This affects remuneration management, budgeting, and payroll administration across the Group. Compliance with the provisions on THR also supports the implementation of Good Corporate Governance (GCG), maintains harmonious industrial relations, reduces the risk of employment disputes, and strengthens employee welfare and trust.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 6 of 2025 concerning the Amendment to Government Regulation Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Security Program	PP Nomor 6 Tahun 2025 merupakan perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 yang bertujuan memperkuat perlindungan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perubahan utama dalam regulasi ini meliputi penyederhanaan persyaratan kepesertaan, penyesuaian syarat masa iur, perpanjangan batas waktu pengajuan klaim, penyederhanaan persyaratan bukti PHK, serta peningkatan manfaat uang tunai JKP menjadi 60% dari upah selama paling lama 6 bulan. Regulasi ini diterbitkan untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih optimal bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program JKP di tengah meningkatnya risiko PHK. PP ini mulai berlaku pada 7 Februari 2025. Government Regulation Number 6 of 2025 amends Government Regulation Number 37 of 2021 with the aim of strengthening protection for workers affected by layoffs through improvements to the Job Loss Security (JKP) Program. The key changes under this regulation include simplified participation requirements, adjustments to the required contribution period, an extension of the claim submission deadline, simplified requirements for proof of layoff, and an increase in JKP cash benefits to 60% of wages for a maximum period of six months. This regulation was issued to provide more optimal social protection for workers who lose their jobs while enhancing the effectiveness of the JKP Program amid the increasing risk of layoffs. This Government Regulation came into effect on February 7, 2025.	Bagi IFG, PP ini memperkuat kewajiban perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap penyelenggaraan Program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk ketepatan pendaftaran pekerja, pelaporan data ketenagakerjaan, dan pembayaran iuran sesuai ketentuan. Dari sisi Sumber Daya Manusia, IFG perlu menyesuaikan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan PHK agar selaras dengan perubahan regulasi, termasuk memberikan informasi yang memadai kepada pekerja mengenai hak atas manfaat JKP. Selain memperkuat kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, implementasi PP ini juga mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), mengurangi risiko perselisihan hubungan industrial, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak PHK. For IFG, this Government Regulation strengthens the Company's obligation to ensure compliance with the implementation of the JKP Program through BPJS Ketenagakerjaan, including the proper registration of workers, reporting of employment data, and payment of contributions in accordance with the applicable provisions. From a Human Capital perspective, IFG needs to adjust its policies and procedures related to layoffs to align with the regulatory changes, including providing adequate information to workers regarding their entitlement to JKP benefits. In addition to strengthening compliance with manpower regulations, the implementation of this Government Regulation also supports Good Corporate Governance (GCG), reduces the risk of industrial relations disputes, and enhances social protection for workers affected by layoffs.
12.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 2025 concerning the Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 15 of 2021 concerning Procedures for the Provision of Job Loss Security Benefits	Permenaker 2/2025 merupakan peraturan menteri ketenagakerjaan yang mengatur perubahan atas Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan ("Permenaker 3/2025") ditetapkan pada 25 Maret 2025, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2025. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021. Perubahan ini berfokus ke beberapa pasal, yakni Pasal 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 30, dan 31. Pasal-pasal tersebut mencakup tata cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 2025 is a regulation amending Regulation of the Minister of Manpower Number 15 of 2021 concerning Procedures for the Provision of Job Loss Security Benefits ("Regulation of the Minister of Manpower 3/2025"), stipulated on March 25, 2025, and effective as of February 7, 2025. Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2025 amends several provisions stipulated in Regulation of the Minister of Manpower Number 15 of 2021. These amendments focus on several articles, namely Articles 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 30, and 31. These articles cover procedures for the provision of Job Loss Security benefits.	• IFG sebagai pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 hari kerja sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. • Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 bulan kalender sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja. • As an employer, IFG is required to report changes in the data of participants affected by layoffs to BPJS Ketenagakerjaan by completing a form through the Manpower Information System no later than seven working days following the layoff. • JKP benefits may be claimed after a participant has paid contributions for at least 12 months within the 24-calendar-month period preceding the layoff or termination of the employment relationship.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
13.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Regulation of the Minister of Manpower Number 3 of 2025 concerning the Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 7 of 2021 concerning Procedures for Participant Registration and Contribution Recomposition under the Job Loss Security Program	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ("Permenaker 3/2025") ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2025, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2025. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021. Perubahan ini berfokus ke beberapa pasal, yakni pasal 2, 9, 11, 12, 13, 14 15, 16 dan 17. Pasal-pasal tersebut mulai dari tata cara peserta hingga tata cara pelaksanaan rekomposisi iuran. Regulation of the Minister of Manpower Number 3 of 2025 concerning the Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 7 of 2021 concerning Procedures for Participant Registration and Contribution Recomposition under the Job Loss Security Program ("Regulation of the Minister of Manpower 3/2025") was stipulated on March 25, 2025, and became effective on February 7, 2025. Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 3 of 2025 amends several provisions stipulated in Regulation of the Minister of Manpower Number 7 of 2021. These amendments focus on several articles, namely Articles 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. These articles cover matters ranging from participant registration procedures to procedures for the implementation of contribution recomposition.	• Wajib melaporkan data kepesertaan Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan secara daring atau luring paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dengan rincian data: a. jumlah dan rincian data Pekerja/ Buruh; dan b. Upah Pekerja/Buruh. • Wajib melakukan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai kode pembayaran bulanan Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). • The Company is required to report participant data under the Work Accident Security (JKK) Program to BPJS Ketenagakerjaan every month, either online or offline, no later than the 15th day of the following month, with details comprising: a. the number and details of workers/ laborers; and b. workers'/laborers' wages. • The Company is required to pay contributions to BPJS Ketenagakerjaan in accordance with the monthly payment code for participants in the Work Accident Security (JKK) Program.
14.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Regulation of the Minister of Manpower Number 1 of 2025 concerning the Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 5 of 2021 concerning Procedures for the Implementation of the Work Accident Security, Death Security, and Old-Age Security Programs	Permenaker 1/2025 ini mengubah dan/atau menyesuaikan beberapa ketentuan yang sebelum diatur pada Permenaker 5/2021 dan diundangkan dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan pelindungan terhadap peserta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terhadap kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan kecelakaan kerja dan dugaan penyakit akibat kerja, serta pelaporan dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Beberapa ketentuan perubahan yang diatur antara lain mengenai: a. perluasan cakupan kecelakaan kerja; b. keterlambatan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan c. hak baru untuk memberitahukan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Regulation of the Minister of Manpower Number 1 of 2025 amends and/or adjusts several provisions previously stipulated under Regulation of the Minister of Manpower Number 5 of 2021. The regulation was promulgated in consideration of the need to enhance participant protection by adjusting provisions concerning participation, the provision of benefits in cases of suspected work accidents and suspected occupational diseases, as well as reporting requirements in the implementation of the Work Accident Security and Death Security Programs. Several amended provisions include those concerning: a. expansion of the scope of work accidents; b. late reporting of work accidents and occupational diseases; and c. a new right to report work accidents and occupational diseases.	Permenaker ini mendorong penguatan kepatuhan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh entitas grup. IFG perlu memastikan ketepatan pendaftaran peserta, pembaruan data pekerja, pelaporan kecelakaan kerja, serta pemenuhan kewajiban administrasi kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan terbaru. Fungsi Sumber Daya Manusia di IFG perlu menyesuaikan prosedur internal agar proses penanganan kecelakaan kerja dan klaim manfaat dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Penerapan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pekerja, memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), meminimalkan risiko kepatuhan, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang lebih baik di lingkungan IFG. This Regulation of the Minister of Manpower encourages stronger compliance with the implementation of employment social security programs across all Group entities. IFG needs to ensure the proper registration of participants, updating of worker data, reporting of work accidents, and fulfillment of administrative obligations to BPJS Ketenagakerjaan in accordance with the latest provisions. IFG's Human Capital function needs to adjust its internal procedures to ensure that work accident cases and benefit claims can be handled promptly and appropriately. The implementation of this regulation is expected to enhance worker protection, strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG), minimize compliance risks, and support better industrial relations within IFG.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
15.	Surat Edaran KPK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Circular Letter of the Corruption Eradication Commission Number 12 of 2025 concerning Guidelines for the Implementation of the Duties, Functions, and Authorities of the Corruption Eradication Commission Following Law Number 1 of 2025	Sehubungan dengan berlakunya UU 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 tentang BUMN, segala pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPK adalah tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang terkait. Surat Edaran KPK ini diundangkan untuk menegaskan bawah KPK tetap memiliki kewenangan untuk mengusut tindak pidana korupsi di BUMN dan untuk memastikan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna. This Circular Letter emphasizes that the duties, functions, and authorities of the Corruption Eradication Commission (KPK) remain applicable following the enactment of Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. Accordingly, the KPK retains the authority to investigate corruption offenses within SOEs and to ensure the effective implementation of corruption prevention and eradication measures.	IFG sebagai *holding* BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, surat edaran ini menegaskan bahwa status IFG sebagai bagian dari ekosistem BUMN dan Danantara tidak mengurangi ruang lingkup pengawasan maupun kewenangan KPK dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, IFG perlu terus memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta program antikorupsi, termasuk pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat yang wajib lapor. Regulasi ini juga mendorong IFG untuk meningkatkan budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh entitas grup guna meminimalkan risiko hukum dan reputasi, sekaligus memastikan seluruh aktivitas bisnis tetap sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. For IFG, its status as an SOE and its position within the Danantara ecosystem do not diminish the KPK's supervisory authority. Therefore, IFG needs to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG), internal controls, risk management, compliance, and anti-corruption measures, including those related to gratification, conflicts of interest, and State Officials' Wealth Reports (LHKPN). Compliance with this Circular Letter strengthens integrity, transparency, and accountability within the Company while mitigating legal and reputational risks.
16.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Oleh Pemerintah Regulation of the Minister of Manpower Number 7 of 2025 concerning the Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 20 of 2022 concerning Guidelines for the Payment of Participant Contribution Funds for the Job Loss Security Program by the Government	Permenaker 7/2025 ini diundangkan untuk memperbarui dan menyempurnakan Permenaker 20/2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun ruang lingkup ketentuan yang mengalami perubahan adalah mengenai ketentuan umum, dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan, penerima dana iuran peserta, dan pembayaran dana iuran peserta. Regulation of the Minister of Manpower Number 7 of 2025 was promulgated to update and improve Regulation of the Minister of Manpower Number 20 of 2022 concerning Guidelines for the Payment of Participant Contribution Funds for the Job Loss Security Program by the Government. This amendment is intended to enhance the effectiveness and efficiency of the implementation of the social security program for workers affected by layoffs. The scope of the amended provisions covers general provisions, participant contribution funds for the Job Loss Security Program, recipients of participant contribution funds, and the payment of participant contribution funds.	Unit terdampak di IFG dapat melakukan reviu kembali terhadap peraturan internal yang relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam amandemen ini, dan mengkinikan peraturan tersebut apabila terdapat ketentuan yang tercantum dalam peraturan internal *existing* yang dinilai harus disesuaikan kembali. Affected units within IFG may review internal regulations relevant to the provisions stipulated in this amendment and update such regulations where existing internal provisions are deemed to require further alignment.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
17	SEOJK Nomor 18/ SEOJK.03/2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama PIKK Nonoperasional Financial Services Authority Circular Letter Number 18/ SEOJK.03/2025 concerning the Fit and Proper Assessment of Key Parties of Non-Operational Financial Conglomerate Holding Companies	SEOJK 18/2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional disusun dalam rangka menindaklanjuti penerbitan POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. SEOJK 18/2025 ini mengatur mengenai: a. Definisi pihak utama bagi PIKK Nonoperasional. b. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK Nonoperasional; c. Tata cara penyampaian informasi; dan d. Dokumen persyaratan administratif dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK Nonoperasional, serta contoh format surat pernyataan. e. SEOJK 18/2025 ini berlaku bagi PIKK Nonoperasional. SEOJK 18/2025 akan berdampak bagi IFG apabila telah memperoleh persetujuan perizinan PIKK Nonoperasional dari OJK. Financial Services Authority Circular Letter Number 18/ SEOJK.03/2025 concerning the Fit and Proper Assessment of Key Parties of Non-Operational Financial Conglomerate Holding Companies was issued as a follow-up to Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies. SEOJK 18/2025 regulates: a. the definition of Key Parties of Non-Operational Financial Conglomerate Holding Companies; b. the mechanisms and procedures for conducting Fit and Proper Assessments of Key Parties of Non-Operational Financial Conglomerate Holding Companies; c. procedures for the submission of information; and d. administrative requirement documents for the Fit and Proper Assessment of Key Parties of Non-Operational Financial Conglomerate Holding Companies, as well as sample formats of statements. e. SEOJK 18/2025 applies to Non-Operational Financial Conglomerate Holding Companies. It will have an impact on IFG once IFG has obtained OJK approval for its license as a Non-Operational Financial Conglomerate Holding Company.	IFG sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Nonoperasional, SEOJK ini memperkuat aspek tata kelola dan pengawasan terhadap proses pengangkatan pihak utama perusahaan. IFG perlu memastikan bahwa setiap calon Pemegang Saham Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan OJK sebelum menjalankan tugasnya. Selain itu, IFG perlu menyesuaikan kebijakan *Corporate Governance*, *Human Capital*, dan *Corporate Secretary* agar selaras dengan mekanisme *fit and proper test* yang baru, termasuk pemenuhan dokumen, proses nominasi, dan koordinasi dengan OJK. Implementasi SEOJK ini akan memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), meningkatkan kualitas kepemimpinan perusahaan, memperkuat pengelolaan risiko tata kelola, serta memastikan keberlangsungan pengelolaan konglomerasi keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan OJK. IFG menerima persetujuan sebagai PIKK Nonoperasional dari OJK pada tanggal 8 April 2026 melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-11/KS.1/2026. As a non-operational Financial Conglomerate Holding Company (PIKK), this OJK regulation strengthens governance and supervision of the process for appointing the company's key personnel. IFG must ensure that every candidate for Controlling Shareholder, member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Sharia Supervisory Board meets the requirements and obtains OJK approval before assuming their duties. In addition, IFG must align its Corporate Governance, Human Capital, and Corporate Secretary policies with the new "fit and proper" test mechanisms, including compliance with documentation requirements, the nomination process, and coordination with the OJK. The implementation of this OJK Regulation will strengthen the application of Good Corporate Governance (GCG), improve the quality of corporate leadership, enhance governance risk management, and ensure the sustainability of financial conglomerate management in accordance with standards set by the OJK. IFG received approval as a Non-Operational PIKK from the OJK on April 8, 2026, via a copy of OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-11/KS.1/2026.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
18	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai Regulation of the Minister of Finance Number 53 of 2025 concerning the Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 11 of 2025 concerning Other Values as the Tax Base and Certain Amounts of Value-Added Tax	PMK 53/2025 ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya tercantum di PMK 11/2025. PMK 53/2025 menegaskan bahwa mulai 1 Agustus 2025, perdagangan dan penambangan aset kripto tidak lagi dikenakan PPN, yang merupakan kemudahan penting bagi pelaku kripto di Indonesia. Adapun sektor lainnya seperti agen asuransi, pialang asuransi dan pembangunan sendiri, ketentuan PPN tetap mengikuti formula yang sudah berlaku. PMK 53/2025 amends several provisions previously set forth in PMK 11/2025. PMK 53/2025 stipulates that, effective August 1, 2025, the trading and mining of cryptocurrency assets will no longer be subject to VAT, which is a significant relief for the cryptocurrency industry in Indonesia. As for other sectors, such as insurance agents, insurance brokers, and self-construction, VAT provisions will continue to follow the existing formula.	Unit terdampak di IFG dapat melakukan reviu kembali terhadap peraturan internal yang relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam amandemen ini, dan mengkinikan peraturan tersebut apabila terdapat ketentuan yang tercantum dalam peraturan internal *existing* yang dinilai harus disesuaikan kembali. Affected units within IFG may review the relevant internal regulations and update such regulations where existing internal provisions are deemed to require further alignment

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
19	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Government Regulation Number 34 of 2025 concerning Procedures for the Management of Assets of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency	PP 34/2025 diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, yang merupakan amandemen ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. PP ini mengatur kewenangan Danantara dalam memberikan pinjaman, menerima pinjaman, mengagunkan, dan mengelola aset dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan. Government Regulation Number 34 of 2025 was issued as an implementing regulation of Law Number 1 of 2025, which constitutes the third amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. This Government Regulation governs Danantara's authority to provide loans, obtain loans, pledge assets, and manage assets in accordance with the principles of good governance, accountability, and transparency.	1. Secara berkala Danantara akan terus memantau performa investasinya termasuk investasi pada BUMN. Dengan adanya evaluasi berkala tersebut, BUMN akan terdorong untuk menjaga standar profesional dalam pemanfaatan modal dan aset. 2. Dengan adanya kewajiban pencadangan maka kebutuhan investasi danantara dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada PMN. Dampaknya ketentuan ini mengurangi ketergantungan BUMN terhadap APBN untuk penguatan modal. 3. Pencadangan dimaksud juga memberikan perlindungan tambahan dari pengelolaan risiko kepada BUMN sehingga dalam hal terjadi kerugian pada BUMN yang terdampak langsung adalah pencadangan Danantara, bukan keuangan negara. 4. Dengan opsi kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga, BUMN berpeluang mengoptimalkan aset melalui kolaborasi yang lebih strategis dan efisien. 1. Danantara will periodically monitor the performance of its investments, including investments in SOEs. Such periodic evaluations will encourage SOEs to maintain professional standards in the utilization of capital and assets. 2. With the reserve requirement, Danantara's investment needs can be met independently without relying on State Equity Participation (PMN). Accordingly, this provision reduces SOEs' dependence on the State Budget (APBN) for capital strengthening. 3. The establishment of reserves also provides additional risk protection, whereby losses arising from investment activities will affect Danantara's reserves rather than directly affecting state finances. 4. The opportunity to cooperate with third parties in asset management provides greater flexibility for the strategic and efficient optimization of assets.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
20	Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-1/ MBU/08/2025 tentang Pelaksanaan *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) di Lingkungan BUMN Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number SE-1/ MBU/08/2025 concerning the Implementation of Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) within State-Owned Enterprises	SE Menteri BUMN 1/2025 ini diundangkan dengan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan BUMN, anak perusahaan dan entitas terafiliasi dalam memenuhi ketentuan angkutan barang yang berkeselamatan sehingga kegiatan usaha BUMN terlaksana sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. SE Menteri BUMN 1/2025 juga diundangkan dalam rangka menunjang program pemerintah dalam menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan yang lebih cepat akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number SE-1/MBU/08/2025 was issued to enhance the compliance of SOEs, subsidiaries, and affiliated entities with provisions concerning safe freight transportation, thereby ensuring that SOE business activities are conducted in accordance with their intended purposes and do not conflict with laws and regulations or public order. The Circular Letter was also issued to support the Government's program to protect road infrastructure from accelerated deterioration caused by overloading and/or oversized vehicles.	• Dalam hal Perusahaan menggunakan kendaraan angkutan barang/ transportasi logistik, Perusahaan agar mematuhi ketentuan larangan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) sebagaimana diatur dalam SE Menteri BUMN 1/2025 ini. • Satuan Kerja yang Terdampak, yaitu Departemen Umum dan Departemen TJSL agar memperhatikan ketentuan SE Menteri BUMN 1/2025, khususnya bagi Departemen TJSL yang sering melaksanakan kegiatan sosial dan berpotensi melibatkan kendaraan angkutan barang untuk mengakomodir barang-barang keperluan pada kegiatan tersebut. • Where the Company uses freight vehicles/logistics transportation, the Company shall comply with the prohibition on Over Dimension Over Loading (ODOL) as stipulated in this Circular Letter. • The affected work units, namely the General Department and TJSL Department, shall take into account the provisions of this Circular Letter, particularly the TJSL Department, which frequently carries out social activities involving the use of freight vehicles.
21.	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai Dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ("Peraturan BPJS TK 1/2025") BPJS Ketenagakerjaan Regulation Number 1 of 2025 concerning the Amendment to BPJS Ketenagakerjaan Regulation Number 1 of 2022 concerning the Payment of Cash Benefits and Vocational Training Benefits under the Job Loss Security Program	Peraturan BPJS 1/2025 ini diundangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan, sehingga dilakukan penyesuaian pembayaran manfaat uang tunai dan manfaat pelatihan kerja. Perubahan terutama menyentuh aspek-aspek manfaat uang tunai dan pelatihan kerja untuk peserta JKP. Pokok-pokok perubahan antara lain mengenai besaran manfaat uang tunai JKP, batas atas upah yang dijadikan dasar, syarat iuran/kepesertaan dan lain-lain. BPJS Regulation No. 1 of 2025 was enacted to improve the effectiveness of the unemployment insurance program, resulting in adjustments to cash benefit payments and job training benefits. The changes primarily affect the cash benefits and job training aspects for JKP participants. Key changes include the amount of JKP cash benefits, the upper limit on the wage used as the basis for calculation, contribution and enrollment requirements, and other matters.	Unit terdampak agar dapat melakukan reviu kembali terhadap peraturan internal yang relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perubahan ini, dan mengkinikan peraturan tersebut apabila terdapat ketentuan yang tercantum dalam peraturan internal existing yang dinilai harus disesuaikan kembali. Affected units within IFG may review the relevant internal regulations and update such regulations where existing internal provisions are deemed to require further alignment.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
22	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Regulation of the Minister of Investment and Downstream Industry/Head of the Investment Coordinating Board Number 5 of 2025 concerning Guidelines and Procedures for the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Investment Facilities through the Online Single Submission System	Perka PBKPM 5/2025 memperkenalkan sejumlah pembaruan yang signifikan terkait pelaksanaan PBBR dan fasilitasi penanaman modal melalui sistem OSS. Kerangka baru ini telah memperluas struktur OSS secara keseluruhan melalui penambahan tiga subsistem baru (misalnya Fasilitas Penanaman Modal dan Kemitraan) dan juga memperpendek periode ketidakaktifan sebelum hak akses dinonaktifkan dari enam bulan menjadi hanya 90 hari. Selain itu, perizinan untuk usaha yang beroperasi di dalam gedung perdagangan atau jasa telah disederhanakan, sementara tenggat waktu pelaporan LKPM telah diperpanjang selama lima hari dari tenggat waktu pelaporan semula untuk semua skala usaha. Ringkasan membahas mengenai hal-hal berikut: 1. Sistem OSS: Subsistem Tambahan dan Hak Akses; 2. Masa Berlaku dan Fasilitasi PB Tanpa Persyaratan Dasar; dan 3. Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM"): Data Spesifik dan Perubahan Periode Pelaporan Regulation of the Minister of Investment and Downstream Industry/Head of the Investment Coordinating Board Number 5 of 2025 introduces significant changes to the implementation of Risk-Based Business Licensing (PBBR) and the provision of investment facilities through the Online Single Submission (OSS) system. The regulation introduces three new subsystems within OSS, including subsystems related to investment facilities and partnerships. It also shortens the inactivity period before OSS access rights are deactivated from six months to 90 days, simplifies licensing for business activities conducted in commercial and service buildings, and extends the deadline for submitting Investment Activity Reports (LKPM) by five days. In summary, the principal changes under this regulation concern: 1. additional subsystems and OSS access rights; 2. the validity and facilitation of Business Licensing without fulfillment of basic requirements; and 3. changes to specific data and reporting periods for Investment Activity Reports (LKPM).	Unit terdampak agar dapat melakukan reviu kembali terhadap peraturan internal yang relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam amandemen ini, dan mengkinikan peraturan tersebut apabila terdapat ketentuan yang tercantum dalam peraturan internal existing yang dinilai harus disesuaikan kembali. Affected units are requested to review their internal regulations in light of the provisions set forth in this amendment and to update such regulations if any provisions in their existing internal regulations are deemed to require revision.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
23	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises	UU 16/2025 merupakan perubahan keempat atas UU 19/2003 tentang BUMN. Dalam Undang-Undang ini, materi perubahan antara lain mencakup perubahan nomenklatur kelembagaan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN, pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, kepemilikan saham seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia dengan hak istimewa pada BUMN, larangan organ BUMN merangkap jabatan lain termasuk menteri dan wakil menteri, dan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu perubahan paling signifikan adalah perubahan nomenklatur dan tata kelola terhadap BUMN — misalnya penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) dan pembentukan Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pengaturan BUMN. Law Number 16 of 2025 introduces further amendments to the governance framework for State-Owned Enterprises (SOEs), including changes to the nomenclature of the government institution responsible for managing SOEs and the separation of regulatory/supervisory functions from operational functions. The Law also regulates state ownership of Series A Dwiwarna shares, which carry special rights; prohibits concurrent positions for SOE organs, including Ministers and Deputy Ministers; provides for audits by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK); and provides for the abolition of the Ministry of State-Owned Enterprises and the establishment of the SOE Management Agency (BP BUMN) as the regulatory body.	1. Perubahan Anggaran Dasar IFG yaitu: a. Peningkatan modal seri A di IFG (Negara saat ini hanya memiliki 1 lembar saham di IFG, sehingga perlu meningkatkan modalnya menjadi 1% saham). b. Penyesuaian kepemilikan saham IFG, karena *Holding* Operasional tidak lagi menjadi pemegang saham BUMN, dalam hal ini termasuk IFG. (Catatan: Saat ini, pemegang saham IFG masih berupa Menteri BUMN sebagai pemegang 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan *Holding* Operasional sebagai pemegang saham 99% saham seri B. Mengingat hal tersebut, sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan UU 16/2025, dengan pemegang saham berupa BP BUMN sebagai pemegang saham 1% Seri A dan BPI Danantara sebagai pemegang saham 99% Seri B.) c. Penyesuaian terhadap kewenangan penetapan pedoman/ kebijakan strategis yang tercantum dalam Anggaran Dasar IFG. Hal ini mengingat kewenangan penetapan pedoman dan kebijakan strategis beralih dari sebelumnya Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna menjadi ke BPI Danantara. (Catatan: Berdasarkan Anggaran Dasar IFG, penetapan pedoman/ kebijakan strategis masih merupakan kewenangan pemegang saham seri A Dwiwarna)

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises	UU 16/2025 merupakan perubahan keempat atas UU 19/2003 tentang BUMN. Dalam Undang-Undang ini, materi perubahan antara lain mencakup perubahan nomenklatur kelembagaan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN, pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, kepemilikan saham seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia dengan hak istimewa pada BUMN, larangan organ BUMN merangkap jabatan lain termasuk menteri dan wakil menteri, dan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu perubahan paling signifikan adalah perubahan nomenklatur dan tata kelola terhadap BUMN — misalnya penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) dan pembentukan Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pengaturan BUMN. Law Number 16 of 2025 introduces further amendments to the governance framework for State-Owned Enterprises (SOEs), including changes to the nomenclature of the government institution responsible for managing SOEs and the separation of regulatory/supervisory functions from operational functions. The Law also regulates state ownership of Series A Dwiwarna shares, which carry special rights; prohibits concurrent positions for SOE organs, including Ministers and Deputy Ministers; provides for audits by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK); and provides for the abolition of the Ministry of State-Owned Enterprises and the establishment of the SOE Management Agency (BP BUMN) as the regulatory body.	1. Amendments to IFG's Articles of Association, namely: a. An increase in Series A capital at IFG (the State currently holds only one share in IFG, so its stake needs to be increased to 1% of the shares). b. An adjustment to IFG's share ownership, as the Operational Holding Company is no longer a shareholder of state-owned enterprises, including IFG. (Note: Currently, IFG's shareholders consist of the Minister of State-Owned Enterprises, who holds one Series A Dwiwarna share, and the Operational Holding Company, which holds 99% of Series B shares. In this regard, the structure must be aligned with the provisions of Law No. 16 of 2025, with the shareholders being the State-Owned Enterprises Board (BP BUMN) as the holder of 1% of Series A shares and BPI Danantara as the holder of 99% of Series B shares.) c. Adjustments to the authority to establish strategic guidelines and policies as set forth in IFG's Articles of Association. This is because the authority to establish strategic guidelines and policies has shifted from the Minister of State-Owned Enterprises—who previously held Series A Dwiwarna shares—to BPI Danantara. (Note: According to IFG's Articles of Association, the establishment of strategic guidelines and policies remains the authority of the Series A Dwiwarna shareholder.)

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises	UU 16/2025 merupakan perubahan keempat atas UU 19/2003 tentang BUMN. Dalam Undang-Undang ini, materi perubahan antara lain mencakup perubahan nomenklatur kelembagaan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN, pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, kepemilikan saham seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia dengan hak istimewa pada BUMN, larangan organ BUMN merangkap jabatan lain termasuk menteri dan wakil menteri, dan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu perubahan paling signifikan adalah perubahan nomenklatur dan tata kelola terhadap BUMN — misalnya penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) dan pembentukan Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pengaturan BUMN. Law Number 16 of 2025 introduces further amendments to the governance framework for State-Owned Enterprises (SOEs), including changes to the nomenclature of the government institution responsible for managing SOEs and the separation of regulatory/supervisory functions from operational functions. The Law also regulates state ownership of Series A Dwiwarna shares, which carry special rights; prohibits concurrent positions for SOE organs, including Ministers and Deputy Ministers; provides for audits by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK); and provides for the abolition of the Ministry of State-Owned Enterprises and the establishment of the SOE Management Agency (BP BUMN) as the regulatory body.	2. Sehubungan dengan penghapusan Pasal 9G dan 87 UU 1/2025 yang sebelumnya menegaskan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN bukan penyelenggara negara, dapat disampaikan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan IFG adalah penyelenggara negara. (Catatan: Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran No. 122 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan KPK Pasca UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyebutkan bahwa Organ/Pengurus/Pejabat/ Pegawai pada Badan dan BUMN merupakan Penyelenggara Negara sepanjang memenuhi ruang lingkup Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Mengingat hal tersebut, kewajiban pelaporan harta kekayaan tetap harus dilakukan.) 3. Perlu reviu ketentuan peraturan internal IFG, agar sesuai dengan beberapa ketentuan terkait yang tercantum di UU 16/2025. 2. Regarding the repeal of Articles 9G and 87 of Law No. 1 of 2025, which previously stipulated that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Supervisory Board, and employees of state-owned enterprises are not public officials, it should be noted that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of IFG are public officials. (Note: This provision is consistent with the provisions set forth in Circular Letter No. 122 of 2025 regarding Guidelines for the Performance of Duties, Functions, and Authorities of the Corruption Eradication Commission (KPK) Following Law No. 1 of 2025 on the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, which states that Organs/Management/Officials/ Employees of Agencies and State-Owned Enterprises are public officials to the extent that they fall within the scope of public officials as referred to in Law No. 28 of 1999 on Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism State Organizer. Therefore, the obligation to report assets must still be fulfilled.) 3. IFG's internal regulations need to be reviewed to ensure they are in accordance with several relevant provisions set forth in Law No. 16 of 2025.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
24.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan Regulation of the Minister of Industry Number 35 of 2025 concerning Provisions and Procedures for the Certification of Domestic Component Level and Company Benefit	Permenperin 35/2025 ini diundangkan dengan mempertimbangkan salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dalam proses sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan perlu mengatur ketentuan dan tata cara sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan. Pada dasarnya, Permenperin 35/2025 memperkenalkan prosedur sertifikasi baru yang mencakup serangkaian proses terkait penerbitan sertifikat TKDN (untuk barang dan jasa industri) dan surat keterangan TKDN (untuk gabungan barang dan jasa). Proses-proses ini melibatkan perhitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau BMP. Kerangka regulasi yang diperbarui ini juga akan merevisi ketentuan TKDN untuk industri kecil serta menetapkan jenis sanksi administratif baru yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak patuh. Regulation of the Minister of Industry Number 35 of 2025 was promulgated, in part, to provide legal certainty in the certification process for the Domestic Component Level (TKDN) and Company Benefit Weight (BMP) by establishing provisions and procedures for the certification of TKDN and BMP values. In principle, Regulation of the Minister of Industry Number 35 of 2025 introduces new certification procedures covering a series of processes related to the issuance of TKDN certificates for industrial goods and services and TKDN statements for combinations of goods and services. These processes involve the calculation and verification of TKDN and/or BMP values. This updated regulatory framework also revises TKDN provisions for small industries and establishes new types of administrative sanctions that may be imposed on non-compliant business actors.	Unit terdampak agar dapat melakukan reviu kembali terhadap peraturan internal yang relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam amandemen ini, dan mengkinikan peraturan tersebut apabila terdapat ketentuan yang tercantum dalam peraturan internal *existing* yang dinilai harus disesuaikan kembali. Affected units may review internal regulations relevant to the provisions stipulated in this amendment and update such regulations where existing internal provisions are deemed to require further alignment.
25.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua Regulation of the Minister of Manpower Number 12 of 2025 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 35 of 2016 concerning Procedures, Requirements, and Types of Additional Service Benefits under the Old-Age Security Program	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025 diterbitkan sebagai perubahan kedua untuk menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat layanan tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua agar selaras dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan peserta. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenaker 35/2016 (yang sebelumnya juga telah diubah oleh Permenaker 17/2021), yaitu terutama pada: • Pasal 9 ayat (5) dan (6) • Pasal 11 ayat (4) dan (5) Perubahan ini terkait tata cara, persyaratan, dan jenis manfaat layanan tambahan seperti fasilitas pinjaman untuk perumahan yang diberikan kepada peserta JHT. Regulation of the Minister of Manpower Number 12 of 2025 was issued as the second amendment to adjust the provisions concerning the procedures, requirements, and types of additional service benefits under the Old-Age Security (JHT) Program in line with policy developments and participants' needs. This regulation amends several provisions of Regulation of the Minister of Manpower Number 35 of 2016, which had previously been amended by Regulation of the Minister of Manpower Number 17 of 2021, particularly: • Article 9 paragraphs (5) and (6); and • Article 11 paragraphs (4) and (5). These amendments relate to the procedures, requirements, and types of additional service benefits, such as housing loan facilities provided to JHT participants.	Peraturan ini tidak berdampak bagi IFG secara langsung. Namun, dapat dijadikan referensi untuk insan IFG yang akan menggunakan fasilitas pembiayaan perumahan sesuai dengan Permenaker 12/2025. This regulation has no direct impact on IFG. However, it may serve as a reference for IFG personnel who intend to use housing financing facilities in accordance with Regulation of the Minister of Manpower Number 12 of 2025.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
26.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2025 concerning Financial Reporting	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 mengatur kewajiban, tata cara, serta pengawasan pelaporan keuangan bagi entitas tertentu guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keseragaman pelaporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan wajib dilakukan oleh entitas yang ditetapkan dalam peraturan ini, termasuk badan usaha dan/atau entitas lain yang memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada instansi berwenang. Objek pelaporan mencakup laporan keuangan tahunan dan/atau laporan keuangan berkala sesuai karakteristik entitas. Tujuan utama PP 43/2025 adalah untuk menciptakan ekosistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi, akurat, dan transparan, serta mengintegrasikan penyampaian laporan secara tunggal (satu pintu). PP ini mengatur: 1. Ketentuan mengenai Laporan Keuangan (definisi, penyusunan, dan standar). 2. Pembentukan Komite Standar untuk merumuskan standar pelaporan keuangan. 3. Penyelenggaraan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau *financial reporting single window* sebagai sistem elektronik tunggal untuk penyampaian Laporan Keuangan. 4. Dukungan ekosistem Pelaporan Keuangan dan sanksi administratif. Government Regulation Number 43 of 2025 regulates the obligations, procedures, and supervision of financial reporting for certain entities to promote transparency, accountability, and uniformity in financial reporting in accordance with the applicable laws and regulations. Financial reporting is mandatory for entities specified under this regulation, including business entities and/or other entities that are required to submit financial statements to the relevant authorities. The reporting objects include annual financial statements and/or periodic financial statements according to the characteristics of each entity. The primary objective of Government Regulation Number 43 of 2025 is to establish a standardized, accurate, and transparent financial reporting ecosystem and to integrate the submission of financial statements through a single-window system. This Government Regulation regulates: 1. provisions concerning Financial Statements, including their definition, preparation, and applicable standards; 2. the establishment of a Standards Committee to formulate financial reporting standards; 3. the establishment of the Financial Reporting Shared Platform (PBPK), or financial reporting single window, as a single electronic system for the submission of Financial Statements; and 4. support for the Financial Reporting ecosystem and administrative sanctions	Berdasarkan PP 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, IFG termasuk dalam definisi Pelapor karena merupakan bagian dari pelaku usaha sektor keuangan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara transparan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Adapun penyampaian laporan tersebut dilakukan dengan mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait lainnya. Under Government Regulation Number 43 of 2025 concerning Financial Reporting, IFG falls within the definition of a Reporting Entity as it is a financial sector business actor required to prepare and submit financial statements transparently through the Financial Reporting Shared Platform (PBPK). The submission of such financial statements shall be carried out in accordance with the stages determined by the Minister of Finance following coordination with the Financial Services Authority (OJK) and other relevant authorities.

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
27.	Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Asuransi Kecelakaan Kerja dan Iuran Asuransi Jiwa bagi Peserta Bukan Penerima Upah Government Regulation Number 50 of 2025 concerning Adjustments to Work Accident Security and Death Security Contributions for Non-Wage Recipient Participants	PP ini mengatur mengenai kebijakan penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Langkah strategis tersebut diharapkan dapat memberikan pelindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian serta untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta BPU. This Government Regulation regulates the policy on adjustments to Work Accident Security (JKK) and Death Security (JKM) contributions for Non-Wage Recipient (BPU) Participants. The adjustment is intended to strengthen protection for Non-Wage Recipient Participants and ensure the sustainability of the Work Accident Security and Death Security Programs.	• Apabila dikemudian hari, IFG dan anggota *holding* memiliki mitra pekerja yang merupakan Peserta BPU, maka seluruh kewajiban yang ada dalam PP 50/2025 ini akan berlaku secara otomatis. • Apabila terjadi kelalaian administrasi, misalnya mitra tidak melakukan pembayaran iuran JKK/JKM tepat waktu, maka dapat menimbulkan risiko sengketa hukum maupun klaim reputasi terhadap perusahaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa perusahaan lalai dalam memastikan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial, sehingga dapat mengurangi kepercayaan regulator, mitra bisnis, maupun publik terhadap integritas perusahaan. • If, in the future, IFG and its Holding Members have worker partners who are categorized as Non-Wage Recipient (BPU) Participants, the obligations stipulated under this Government Regulation will automatically apply. • Administrative negligence, such as late payment of JKK and JKM contributions, may potentially give rise to legal disputes and reputational claims against the Company. Such negligence may also be perceived as a failure to comply with social security participation requirements, thereby potentially reducing the confidence of regulators, business partners, and the public in the Company's integrity.

No.	**Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan** Changes to Regulations/ Laws	**Penjelasan** Explanation	**Dampaknya terhadap Perusahaan** Their Impact on the Company
28.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Sanksi Administratif Berupa Denda di Bidang Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation Number 39 of 2025 concerning Procedures for the Collection of Administrative Sanctions in the Form of Fines in the Financial Services Sector	POJK ini memuat materi pokok diantaranya mengenai kewajiban pembayaran dan optimalisasi penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda (SABD), permohonan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, dan pengurusan piutang macet. This POJK covers key topics, including payment obligations and the optimization of collection efforts for Administrative Sanctions in the Form of Fines (SABD), appeals, refunds of overpayments, and the management of non-performing receivables.	• POJK 39/2025 berdampak terhadap IFG dan anggota *holding* IFG yang berstatus sebagai Lembaga Jasa Keuangan karena OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan bunga atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif, pencatatan data piutang dan rekam jejak dalam sistem informasi OJK, serta penerapan sanksi administratif tambahan dan/ atau tindakan tertentu. Hal tersebut berpotensi mempengaruhi penilaian KPI terkait aspek kepatuhan dan tata kelola serta berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. • Anggota *holding* IFG yang termasuk ke dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK) meliputi: • Sektor Perasuransian: a. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) b. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) c. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) • Sektor Penjaminan: a. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) b. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) • Sektor Pasar Modal: a. PT Bahana Sekuritas b. PT Bahana TCW Investment Management • Sektor Modal Ventura: a. PT Bahana Artha Ventura (BAV) • POJK 39/2025 affects IFG and IFG Holding Members that are classified as Financial Services Institutions, as OJK has the authority to impose interest on late payments of administrative sanctions, record receivables and track records in OJK's information system, and impose additional administrative sanctions and/or other measures. This may affect the compliance and governance performance indicators of IFG and its Holding Members, as well as the Company's performance. • The IFG Holding Members in the financial sector include: • Insurance: a. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) b. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) c. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo); • Guarantee: a. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) b. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo); • Capital Market: a. PT Bahana Sekuritas b. PT Bahana TCW Investment Management • Venture Capital: a. PT Bahana Artha Ventura (BAV).

No.	Perubahan Peraturan/ Perundang-Undangan Changes to Regulations/ Laws	Penjelasan Explanation	Dampaknya terhadap Perusahaan Their Impact on the Company
29.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing	Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021"), yang menetapkan kerangka regulasi utama untuk perizinan usaha berbasis risiko. Kerangka ini mencakup penentuan tingkat risiko dan skala usaha, serta persyaratan perizinan dasar, dan berbagai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam upaya menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berbasis risiko, sehingga memudahkan pendirian dan pengelolaan usaha, pemerintah kini menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 ("PP 28/2025"), yang berjudul sama dengan PP 5/2021 dan mulai berlaku sejak 5 Juni 2025. Pemberlakuan PP 28/2025 mencabut dan mengganti PP 5/2021. Namun, seluruh ketentuan yang mengatur persyaratan dasar, Perizinan Berusaha Umum ("PB") dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB UMKU") akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kerangka baru PP 28/2025. Pemberlakuan PP 28/2025 juga berarti bahwa Pemerintah Indonesia harus memperbarui sistem *Online Single Submission* ("OSS") dan Sistem Indonesia National *Single Window* ("SINSW"). Pemerintah juga berkomitmen untuk menerbitkan Peraturan Pelaksanaan yang relevan untuk kerangka baru tersebut paling lambat 5 Oktober 2025. Previously, Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing ("PP 5/2021") served as the principal regulatory framework for Risk-Based Business Licensing in Indonesia. The Government subsequently issued Government Regulation Number 28 of 2025 ("PP 28/2025"), bearing the same title as PP 5/2021, which came into effect on June 5, 2025. The enactment of PP 28/2025 revoked and replaced PP 5/2021. However, all provisions governing basic requirements, Business Licensing ("PB") and/or Business Licensing to Support Business Activities ("PB UMKU") remain applicable insofar as they do not conflict with the provisions stipulated under the new framework of PP 28/2025. The enactment of PP 28/2025 also requires the Government of Indonesia to update the Online Single Submission ("OSS") system and the Indonesia National Single Window ("SINSW") system. The Government has also committed to issuing the relevant implementing regulations for the new framework no later than October 5, 2025.	

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

Pada tahun 2025, Grup mengimplementasikan standar dan interpretasi baru maupun amandemen atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dilakukan sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam masing-masing standar.

In 2025, the Group implemented new standards and interpretations, as well as amendments to the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Indonesian Financial Accounting Standards (ISAK). The Group's accounting policies have been adjusted in accordance with the transition provisions stipulated in each standard.

Rincian perubahan kebijakan akuntansi beserta penjelasan dan dampaknya terhadap Perusahaan disajikan sebagai berikut :

Details of the changes in accounting policies, along with explanations and their impact on the Company, are presented as follows:

- Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian
  Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 117: Kontrak Asuransi bagi Anggota Holding IFG yang bergerak di bidang asuransi. Penerapan standar baru ini membawa perubahan yang signifikan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi dalam laporan keuangan konsolidasian IFG. Sehubungan dengan implementasi PSAK 117, informasi keuangan komparatif tahun 2024 yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 telah dilakukan penyajian kembali (*restatement*) sesuai dengan ketentuan transisi yang berlaku. Dengan demikian, angka tahun 2024 yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2025 berbeda dengan angka yang tercantum dalam laporan keuangan auditan tahun 2024 yang sebelumnya masih disusun berdasarkan PSAK 104. Perbedaan tersebut timbul sebagai konsekuensi dari perubahan pendekatan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran kontrak asuransi sebagaimana diatur dalam PSAK 117.

  Restatement of the Consolidated Financial Statements
  The year 2025 marked the first year of implementation of Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 117: Insurance Contracts by IFG Holding Members engaged in the insurance business. The implementation of this new standard resulted in significant changes to the recognition, measurement, presentation, and disclosure of insurance transactions in IFG's consolidated financial statements. In connection with the implementation of PSAK 117, the comparative financial information for 2024 presented in the 2025 consolidated financial statements was restated in accordance with the applicable transition requirements. Accordingly, the 2024 figures presented in the 2025 financial statements differ from those reported in the 2024 audited financial statements, which were previously prepared under PSAK 104. These differences arose as a consequence of changes in the accounting approach to the recognition and measurement of insurance contracts as stipulated under PSAK 117.

  Seiring dengan penerapan PSAK 117, IFG juga melakukan pengkajian ulang terhadap substansi risiko yang dialihkan (*risk transferred*) dalam kontrak-kontrak yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai kontrak asuransi, serta menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten di seluruh entitas dalam grup guna memastikan keandalan dan keterbandingan laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, beberapa kontrak liabilitas keuangan, termasuk kontrak Kredit Usaha Rakyat ("KUR") dan kontrak asuransi yang memiliki klausul *stop loss*, tidak lagi memenuhi definisi kontrak asuransi sebagaimana diatur dalam PSAK 117 dan oleh karenanya diklasifikasikan serta dicatat sesuai dengan ruang lingkup PSAK 109: Instrumen Keuangan. Perubahan klasifikasi tersebut mengakibatkan perubahan dalam metode pengakuan pendapatan, pengukuran liabilitas, valuasi instrumen keuangan, serta penyajian transaksi terkait pada laporan keuangan konsolidasian

  In conjunction with the implementation of PSAK 117, IFG also reassessed the substance of the risks transferred under contracts previously classified as insurance contracts and applied consistent accounting policies across all entities within the Group to ensure the reliability and comparability of the consolidated financial statements. Based on the results of this reassessment, certain financial liability contracts, including People's Business Credit ("KUR") contracts and insurance contracts containing stop-loss clauses, no longer met the definition of an insurance contract under PSAK 117 and were therefore classified and accounted for within the scope of PSAK 109: Financial Instruments. This reclassification resulted in changes to the methods of revenue recognition, liability measurement, financial instrument valuation, and the presentation of related transactions in IFG's consolidated financial statements. Accordingly, the restatement undertaken by IFG is

IFG. Oleh karena itu, penyajian kembali (*restatement*) yang dilakukan oleh IFG diharapkan mampu memastikan keterbandingan, konsistensi, dan relevansi informasi keuangan antarperiode sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih andal dan representatif bagi para pemangku kepentingan.

expected to ensure the comparability, consistency, and relevance of financial information across reporting periods, thereby enabling the financial statements to provide stakeholders with more reliable and representative information.

Dampak Penyajian Kembali 2024
Impact of the 2024 Restatement

(dalam jutaan Rupiah)
(in million IDR)

Keterangan Description	31 Desember 2024 Sebelum *Restatement* December 31, 2024 Before Restatement	Penyesuaian *Restatement* Restatement Adjustments	31 Desember 2024 Setelah *Restatement* December 31, 2024 After Restatement
Total Aset Total Assets	**132.384.364**	**(2.265.927)**	**130.118.437**
Total Liabilitas Total Liabilities	**95.307.789**	**649.439**	**95.957.228**
Dana Tabarru' Tabarru' Funds	(1.761.682)	-	(1.761.682)
Total Ekuitas Total Equity	**38.838.257**	**(2.915.366)**	**35.922.891**
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit For The Year	(387.375)	3.996.051	3.608.676

Dampak Penyajian Kembali 2023
Impact of the 2023 Restatement

(dalam jutaan Rupiah)
(in million IDR)

Keterangan Description	1 Januari 2024 Sebelum *Restatement* January 1, 2024 before Restatement	Penyesuaian *Restatement* Restatement Adjustments	1 Januari 2024 Setelah *Restatement* January 1, 2024 After Restatement
Total Aset Total Assets	**136.196.301**	**(2.475.208)**	**133.721.093**
Total Liabilitas Total Liabilities	**97.981.837**	**5.212.741**	**103.194.578**
Dana Tabarru' Tabarru' Funds	(1.786.614)	-	(1.786.614)
Total Ekuitas Total Equity	**40.001.078**	**(7.687.949)**	**32.313.129**

Penyesuaian sebagai akibat penyajian kembali (*restatement*) di atas terutama terjadi pada Anak Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Adapun dampak penyajian kembali terhadap laporan laba rugi masing-masing Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The adjustments resulting from the above restatement primarily relate to Subsidiaries engaged in the insurance business. The impact of the restatement on the statements of profit or loss of the respective Subsidiaries is presented as follows:

Dampak PSAK 117 dan PSAK 109 pada Laba Rugi 2024
Impact of PSAK 117 and PSAK 109 on 2024 Profit or Loss

(dalam jutaan Rupiah)
(in million IDR)

Keterangan Description	**Laba/(Rugi) 2024 PSAK 104** 2024 Profit/(Loss) – PSAK 104	**Penyesuaian *Restatement*** Restatement Adjustments	**Laba/(Rugi) 2024 PSAK 117 & PSAK 109** 2024 Profit/(Loss) – PSAK 117 & PSAK 109
Askrindo	(1.096.331)	2.845.104	1.748.773
IFG Life	(53.044)	236.452	183.408
Jasa Raharja	1.333.461	(369.722)	963.739
Jasindo	157.940	283.164	441.104
Eliminasi Konsolidasi	(1.576.180)	678.346	(897.834)

Askrindo

Laba bersih Askrindo meningkat sebesar Rp780 miliar dan Nasre meningkat sebesar Rp1,8 triliun, terutama disebabkan oleh penurunan beban klaim penjaminan. Kedua entitas ini telah menerapkan PSAK 109: Instrumen Keuangan untuk kontrak penjaminan KUR, dimana saldo awal cadangan ECL (*Expected Credit Loss*) pada kedua entitas diakui langsung ke ekuitas pada tanggal transisi, sehingga beban yang diakui pada laba rugi Tahun Buku 2024 hanya mencerminkan perubahan cadangan tahun berjalan. Pembentukan cadangan telah menggunakan model ECL dengan asumsi dan metodologi yang konsisten dengan penerapan di Jamkrindo selaku entitas penjaminan dalam satu grup yang juga memiliki portofolio sejenis.

IFG Life

Laba bersih IFG Life meningkat Rp101 miliar, terutama karena beban jasa asuransi pada PSAK 117 lebih rendah dibandingkan beban *underwriting* pada PSAK 104, meskipun beban jasa asuransi telah mencakup *attributable expenses*. Perbedaan tersebut terutama merupakan dampak perubahan metodologi pengukuran liabilitas kontrak asuransi pada saat transisi ke PSAK 117, di mana pendekatan *flooring* terhadap nilai tunai yang digunakan berdasarkan PSAK 104 tidak lagi diterapkan dan digantikan dengan pendekatan *best estimate liability* yang mencerminkan estimasi arus kas masa depan, disertai pengakuan *Risk Adjustment* dan *Contractual Service Margin* ("CSM") sesuai ketentuan PSAK 117.

Laba bersih InHealth meningkat Rp123 miliar, terutama karena penyesuaian IBNR yang dibebankan pada laba rugi tahun 2024 berdasarkan PSAK 104 telah diakui sebagai bagian dari saldo awal pada saat implementasi PSAK 117, sehingga tidak lagi membebani laba rugi tahun berjalan.

Askrindo

Askrindo's net profit increased by IDR 780 billion, while Nasre's net profit increased by IDR 1.8 trillion, primarily due to a decrease in guarantee claim expenses. Both entities have applied PSAK 109: Financial Instruments to KUR guarantee contracts, whereby the opening balances of the Expected Credit Loss (ECL) allowances of both entities were recognized directly in equity at the transition date. Accordingly, the expenses recognized in profit or loss for Fiscal Year 2024 only reflected changes in the allowances during the year. The allowances were determined using the ECL model, with assumptions and methodologies consistent with those applied by Jamkrindo, a guarantee entity within the same Group with a similar portfolio.

IFG Life

IFG Life's net profit increased by IDR 101 billion, primarily because insurance service expenses under PSAK 117 were lower than underwriting expenses under PSAK 104, despite the inclusion of attributable expenses in insurance service expenses. The difference primarily resulted from changes in the methodology used to measure insurance contract liabilities upon transition to PSAK 117. The flooring approach to cash values applied under PSAK 104 was no longer used and was replaced by a best estimate liability approach reflecting estimated future cash flows, together with the recognition of the Risk Adjustment and Contractual Service Margin ("CSM") in accordance with PSAK 117.

InHealth's net profit increased by IDR 123 billion, primarily because the IBNR adjustment charged to profit or loss in 2024 under PSAK 104 was recognized as part of the opening balance upon the implementation of PSAK 117 and, therefore, was no longer charged to profit or loss for the current year.

Jasa Raharja
Penurunan laba bersih Jasa Raharja terutama disebabkan oleh peningkatan Liabilitas atas Kejadian Klaim (LIC) pada Jasa Raharja Induk sekitar Rp220 miliar pada PSAK 117 dibandingkan cadangan klaim pada PSAK 104. Peningkatan tersebut mencerminkan penggunaan asumsi klaim yang lebih mencerminkan kondisi aktual portofolio berdasarkan kajian aktuarial, sebagai hasil dari penerapan pendekatan *best estimate liability* sesuai dengan ketentuan PSAK 117.

Jasindo
Laba bersih Jasindo meningkat Rp254 miliar, terutama didorong oleh hasil jasa asuransi berdasarkan PSAK 117 sebesar Rp361 miliar, lebih tinggi dibandingkan *net underwriting* berdasarkan PSAK 104 sebesar Rp100 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi pengakuan liabilitas kontrak asuransi yang lebih besar pada saldo awal transisi atas kontrak-kontrak yang diterbitkan sebelum tahun 2024, dimana CSM (yang terkandung dalam liabilitas) tersebut dilepaskan secara bertahap ke laba rugi seiring dengan pemberian jasa asuransi sepanjang Tahun Buku 2024.

Eliminasi Konsolidasi
Penurunan jurnal eliminasi *natural difference* sebesar Rp678 miliar pada laba rugi konsolidasian IFG terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 109 oleh Nasre untuk kontrak KUR, yang mengurangi selisih antara liabilitas reasuransi yang dicatatkan Nasre dan aset reasuransi yang dicatatkan oleh perusahaan *ceding*.

Jasa Raharja
The decrease in Jasa Raharja's net profit was primarily attributable to an increase of approximately IDR 220 billion in the Liability for Incurred Claims (LIC) of Jasa Raharja as the parent company under PSAK 117 compared with the claims reserve under PSAK 104. The increase reflected the use of claims assumptions that more accurately reflected the actual conditions of the portfolio based on actuarial studies, resulting from the application of the best estimate liability approach in accordance with PSAK 117.

Jasindo
Jasindo's net profit increased by IDR 254 billion, primarily driven by an insurance service result of IDR 361 billion under PSAK 117, compared with net underwriting of IDR 100 billion under PSAK 104. The increase was primarily attributable to the recognition of higher insurance contract liabilities in the opening balance upon transition for contracts issued prior to 2024, whereby the CSM included in such liabilities was gradually released to profit or loss as insurance services were provided throughout Fiscal Year 2024.

Consolidation Eliminations
The IDR 678 billion decrease in natural difference elimination entries in IFG's consolidated profit or loss was primarily attributable to Nasre's application of PSAK 109 to KUR contracts, which reduced the difference between the reinsurance liabilities recognized by Nasre and the reinsurance assets recognized by the ceding companies.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

Berdasarkan laporan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Nomor RTG-236/PEF-DIR/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026, tingkat kesehatan perusahaan IFG adalah sebagai berikut:

Based on the financial health assessment report mandated by Article 81 of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, conducted by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) under Report No. RTG-236/PEF-DIR/VI/2026 dated June 29, 2026, IFG's financial health ratings are as follows:

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Soundness Level

Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) Standalone Rating	**Peringkat Akhir (*Final Rating*)** Final Rating	**Tingkat Kesehatan** Health Rating
idA+(sa) **(Single A Plus; Standalone)** Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan. Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (*standalone rating*). **idA+(sa)** **(Single A Plus; Standalone)** An obligor with an idA rating has a strong ability compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability may be more easily affected by adverse changes in economic conditions compared to obligors with higher ratings. The plus sign (+) indicates that the assigned rating is relatively strong and above average for the relevant category. The (sa) notation indicates that the rating is a standalone rating.	**idAAA/Stable** **(Triple A; Stable Outlook)** Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior. **idAAA/Stable** **(Triple A; Stable Outlook)** An idAAA-rated issuer holds the highest rating assigned by PEFINDO. The issuer's ability to meet its long-term financial commitments, relative to other Indonesian issuers, is superior.	**Sangat Sehat** (Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Pasal 81) **Very Healthy** (In accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 81)

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Hingga 31 Desember 2025, Perusahaan tidak menghadapi faktor yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usahanya. Di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, IFG tetap menjaga kewaspadaan terhadap berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi kinerja usaha. Manajemen secara konsisten memantau perkembangan pada setiap segmen usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pendekatan selektif dalam penetapan kebijakan strategis, guna memastikan kualitas aset tetap terjaga dan tingkat profitabilitas dapat dipertahankan.

Sebagai wujud komitmen untuk mendorong pertumbuhan yang optimal, IFG terus melakukan penyempurnaan kebijakan strategis dengan menempatkan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko yang terukur sebagai prioritas utama. Perusahaan secara proaktif menetapkan profil risiko dan strategi mitigasi yang efektif untuk mengantisipasi potensi hambatan di masa mendatang, sehingga stabilitas serta keberlanjutan bisnis tetap terpelihara.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Manajemen menilai bahwa Perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa mendatang serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Pada tahun 2025, Manajemen tidak menemukan indikasi adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dalam melanjutkan kegiatan usahanya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang berpotensi berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, Manajemen menetapkan sejumlah parameter sebagai dasar pengukuran dan penilaian, antara lain:

MATTERS THAT POTENTIALLY HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

As of December 31, 2025, the Company does not face any factors that could potentially have a significant impact on the continuity of its business. Amid the uncertainties of the global economic landscape, IFG remains vigilant against various challenges that could potentially affect its business performance. Management consistently monitors developments in each business segment by applying the principle of prudence and a selective approach in setting strategic policies, to ensure that asset quality is maintained and profitability levels are sustained.

As a manifestation of its commitment to driving optimal growth, IFG continues to refine its strategic policies by prioritizing good corporate governance and the implementation of measured risk management. The company proactively establishes risk profiles and effective mitigation strategies to anticipate potential future obstacles, thereby maintaining business stability and sustainability.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS THAT SIGNIFICANTLY INFLUENCED BUSINESS CONTINUITY

Based on the evaluation conducted, Management believes that the Company has the ability to continue as a going concern and is supported by adequate resources to sustain its future operations. In 2025, Management did not identify any material uncertainties that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern.

To identify and evaluate factors that could have a significant impact on the Company's ability to continue as a going concern, Management established a number of assessment parameters, including the following:

1. Aspek keuangan
   a. Melakukan perbandingan antara saldo realisasi tahun 2025 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
   b. Menghitung kembali persentase fluktuasi yang dilaporkan Manajemen antara saldo aktual tahun 2025 dengan target tahun 2025 serta saldo aktual tahun 2024.
2. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan
   a. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja keuangan antara realisasi tahun 2025 dan target tahun 2025 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
   b. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja operasional antara realisasi tahun 2025 dan target tahun 2025 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
   c. Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja administrasi antara realisasi tahun 2025 dan target tahun 2025 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
   d. Melakukan perhitungan ulang serta membandingkan tingkat kesehatan Perusahaan antara realisasi tahun 2025 dan target tahun 2025 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Dalam rangka melakukan evaluasi atas keberlangsungan usaha, Manajemen mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain:

1. Kinerja Keuangan
2. Likuiditas
3. Solvabilitas
4. Masalah Internal
5. Perkara Hukum

1. Financial Aspects
   a. Comparing the 2025 actual results with the audited Financial Statements.
   b. Recalculating the percentage fluctuations reported by Management between the 2025 actual results and the 2025 targets, as well as the 2024 realization.

2. Assessment of the Company's Soundness Level
   a. Recalculating and comparing financial performance indicators between the 2025 realization and the 2025 targets based on the established criteria.
   b. Recalculating and comparing operational performance indicators between the 2025 realization and the 2025 targets based on the established criteria.
   c. Recalculating and comparing administrative performance indicators between the 2025 realization and the 2025 targets based on the established criteria.
   d. Recalculating and comparing the Company's overall soundness level between the 2025 realization and the 2025 targets based on the established criteria.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING THE ASSESSMENT

In order to evaluate the company's ability to continue as a going concern, management considers a number of factors, including:

1. Financial Performance
2. Liquidity
3. Solvency
4. Internal Issues
5. Legal Cases

PROSPEK USAHA TAHUN 2026
BUSINESS PROSPECT IN 2026

GAMBARAN UMUM KONDISI PEREKONOMIAN TAHUN 2026

Perekonomian Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam fase ekspansi, namun dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan asumsi awal penyusunan RKAP 2026. Dalam Buku RKAP 2026, asumsi dasar yang digunakan relatif konstruktif, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90%, inflasi 2,42%, nilai tukar Rp16.100 per dolar AS, yield SBN 10 tahun sebesar 6,00%, dan BI Rate sebesar 4,25%. Asumsi tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa stabilitas harga, tren pelonggaran suku bunga, serta normalisasi tekanan eksternal akan mendukung pemulihan konsumsi, investasi, dan pasar keuangan domestik sepanjang tahun 2026.

Perkembangan ekonomi terkini menunjukkan bahwa arah perekonomian masih cukup resilien, tetapi profil risikonya bergeser menjadi lebih berhati-hati. Dari sisi pertumbuhan, Indonesia masih dipandang memiliki ketahanan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN, terutama karena dampak harga minyak terhadap PDB Indonesia dinilai lebih kecil dibandingkan mayoritas negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diproyeksikan tetap lebih kuat dibandingkan Malaysia dan Thailand pada 2026–2027, sehingga secara fundamental daya tahan ekonomi domestik masih cukup solid. Namun demikian, risiko geopolitik global, khususnya yang berkaitan dengan harga energi dan sentimen *risk-off*, dapat menahan ruang akselerasi pertumbuhan dari *baseline* RKAP 2026.

Dibandingkan asumsi RKAP 2026 yang menempatkan pertumbuhan PDB pada 4,90%, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan masih berada di sekitar 5,0%. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko terhadap pertumbuhan belum sepenuhnya bersifat *downside* secara agregat. Akan tetapi, skenario ketegangan geopolitik menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak dan gangguan pasokan dapat menurunkan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,4% dalam skenario moderat, 1,1% dalam skenario pesimis, hingga 2,0% dalam skenario sangat pesimis. Dengan demikian, asumsi pertumbuhan RKAP 2026 masih cukup relevan sebagai *baseline*, tetapi perlu dilengkapi dengan sensitivitas terhadap harga energi, pelemahan daya beli, dan potensi penurunan margin dunia usaha.

Perbedaan yang lebih signifikan terlihat pada inflasi. RKAP 2026 menggunakan asumsi inflasi 2,42%, yang mencerminkan ekspektasi stabilitas harga dan normalisasi biaya energi. Namun, materi terbaru menunjukkan risiko inflasi yang lebih tinggi akibat kenaikan harga minyak, potensi kenaikan

OVERVIEW OF ECONOMIC CONDITIONS IN 2026

Indonesia's economy is expected to remain in an expansionary phase in 2026, although with a higher degree of uncertainty than initially assumed in the preparation of the 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The 2026 RKAP was prepared based on relatively constructive macroeconomic assumptions, including GDP growth of 4.90%, inflation of 2.42%, an exchange rate of IDR 16,100 per USD, a 10-year Indonesian Government Bond (SBN) yield of 6.00%, and a BI Rate of 4.25%. These assumptions reflected expectations that price stability, an easing interest rate environment, and the normalization of external pressures would support the recovery of domestic consumption, investment, and financial markets throughout 2026.

Recent economic developments indicate that Indonesia's economy remains relatively resilient; however, the overall risk profile has shifted toward greater caution. In terms of growth, Indonesia is still viewed as having relatively greater resilience compared to a number of ASEAN countries, primarily because the impact of oil prices on Indonesia's GDP is considered smaller than that on most other ASEAN countries. Indonesia's economic growth is also projected to remain stronger than that of Malaysia and Thailand in 2026–2027, indicating that the domestic economy's resilience remains fundamentally solid. However, global geopolitical risks, particularly those related to energy prices and risk-off sentiment, could limit the potential for growth acceleration beyond the baseline of the 2026 National Budget Plan.

Compared to the 2026 Annual Budget Plan (RKAP) assumption, which projects GDP growth at 4.90%, the latest developments indicate that the growth projection remains around 5.0%. This suggests that the risks to growth are not yet entirely downside on an aggregate basis. However, a scenario involving geopolitical tensions suggests that rising oil prices and supply disruptions could reduce Indonesia's GDP growth by 0.4% in a moderate scenario, 1.1% in a pessimistic scenario, and up to 2.0% in a very pessimistic scenario. Thus, the growth assumptions in the 2026 RKAP remain sufficiently relevant as a baseline, but need to be supplemented with sensitivity analyses regarding energy prices, weakening purchasing power, and potential declines in business margins.

More significant differences are evident in inflation. The 2026 RKAP uses an inflation assumption of 2.42%, reflecting expectations of price stability and the normalization of energy costs. However, the latest data indicate a higher risk of inflation due to rising oil prices, potential increases

harga BBM, peningkatan biaya transportasi dan logistik, serta *imported inflation* dari pelemahan nilai tukar. Dalam skenario geopolitik, inflasi dapat meningkat sekitar 0,5% pada skenario moderat, 1,1% pada skenario pesimis, dan 1,2% pada skenario sangat pesimis. Dengan demikian, asumsi inflasi RKAP 2026 cenderung lebih optimistis dibandingkan perkembangan risiko terkini, terutama apabila tekanan energi dan kurs berlangsung lebih lama.

Pada sisi nilai tukar, deviasi antara asumsi RKAP 2026 dan perkembangan pasar menjadi lebih jelas. *Draft* RKAP 2026 mengasumsikan nilai tukar sebesar Rp16.100 per dolar AS, sementara pada April 2026 rupiah telah bergerak pada kisaran Rp16.980–Rp17.098 per dolar AS. Dalam skenario tekanan geopolitik, nilai tukar bahkan dapat bergerak menuju Rp17.262 pada skenario moderat, Rp18.887 pada skenario pesimis, dan Rp20.608 pada skenario sangat pesimis. Dengan demikian, asumsi kurs RKAP 2026 tampak terlalu apresiatif dibandingkan kondisi aktual dan risiko *forward-looking*. Pelemahan rupiah ini perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan biaya impor, memperkuat *imported inflation*, dan menekan industri yang berorientasi pasar domestik.

Dari sisi suku bunga dan pasar obligasi, RKAP 2026 mengasumsikan BI Rate turun ke 4,25% dan yield SBN 10 tahun berada di sekitar 6,00%. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa ruang pelonggaran moneter menjadi lebih terbatas karena Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan mengelola risiko inflasi. Dalam materi *Small Group Meeting*, BI *Rate* diperkirakan dapat berada pada 4,5% dalam skenario moderat, meningkat menjadi 5,5% dalam skenario pesimis, dan 6,75% dalam skenario sangat pesimis. Sementara itu, *yield* SBN diperkirakan tetap tinggi pada kisaran 6,9%–7,3% apabila tekanan *risk-off* dan eksternal berlanjut. Artinya, asumsi RKAP terkait suku bunga dan *yield* juga perlu diperlakukan sebagai baseline optimistis, bukan sebagai satu-satunya acuan perencanaan.

Meskipun tekanan eksternal meningkat, posisi Indonesia tidak sepenuhnya rentan. *Yield spread* SBN 10 tahun terhadap US Treasury 10 tahun masih relatif tinggi dibandingkan beberapa negara Asia lain, sehingga daya tarik aset rupiah bagi investor asing tetap terjaga. Kondisi ini dapat membantu menahan tekanan *capital outflow*, terutama jika didukung oleh operasi moneter Bank Indonesia melalui instrumen seperti SRBI. Namun, ketahanan tersebut tetap bergantung pada stabilitas kurs, kredibilitas kebijakan fiskal-moneter, serta kemampuan pemerintah mengelola beban subsidi energi apabila harga minyak global meningkat secara tajam.

Bagi IFG, perkembangan makroekonomi 2026 perlu diterjemahkan langsung ke dalam proyeksi laporan keuangan. Tekanan nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan yield SBN berpotensi memengaruhi proyeksi aset, liabilitas, ekuitas, hasil investasi bersih, beban umum dan administrasi, arus kas, serta rasio-rasio usaha. Kenaikan yield dapat menekan

in fuel prices, higher transportation and logistics costs, and imported inflation resulting from exchange rate depreciation. In the geopolitical scenario, inflation could rise by approximately 0.5% in the moderate scenario, 1.1% in the pessimistic scenario, and 1.2% in the highly pessimistic scenario. Thus, the inflation assumptions in the 2026 RKAP tend to be more optimistic compared to current risk developments, especially if energy and exchange rate pressures persist for a longer period.

On the exchange rate front, the discrepancy between the 2026 RKAP assumptions and market developments has become more apparent. The draft 2026 Annual Budget Plan assumes an exchange rate of IDR 16,100 per U.S. dollar, while as of April 2026, the rupiah has been trading in the range of IDR 16,980–IDR 17,098 per U.S. dollar. Under a scenario of geopolitical pressure, the exchange rate could even reach IDR 17,262 in a moderate scenario, IDR 18,887 in a pessimistic scenario, and IDR 20,608 in a very pessimistic scenario. Thus, the exchange rate assumption in the 2026 RKAP appears overly optimistic compared to actual conditions and forward-looking risks. This weakening of the rupiah warrants attention as it could increase import costs, fuel imported inflation, and put pressure on industries oriented toward the domestic market.

Regarding interest rates and the bond market, the 2026 RKAP assumes the BI Rate will decline to 4.25% and the yield on 10-year SBNs will be around 6.00%. Recent developments indicate that room for monetary easing has become more limited, as Bank Indonesia needs to maintain exchange rate stability and manage inflation risks. In the Small Group Meeting materials, the BI Rate is projected to be 4.5% in the moderate scenario, rising to 5.5% in the pessimistic scenario, and 6.75% in the very pessimistic scenario. Meanwhile, SBN yields are projected to remain high in the range of 6.9%–7.3% if risk-off and external pressures persist. This means that the RKAP's assumptions regarding interest rates and yields should also be treated as an optimistic baseline, not as the sole basis for planning.

Although external pressures are increasing, Indonesia's position is not entirely vulnerable. The yield spread between 10-year SBNs and 10-year U.S. Treasuries remains relatively high compared to several other Asian countries, so the appeal of rupiah-denominated assets to foreign investors remains intact. This situation can help stem capital outflow pressures, especially if supported by Bank Indonesia's monetary operations through instruments such as SRBI. However, this resilience remains dependent on exchange rate stability, the credibility of fiscal and monetary policies, and the government's ability to manage the burden of energy subsidies should global oil prices rise sharply.

For IFG, macroeconomic developments in 2026 need to be directly translated into financial statement projections. Pressures on the exchange rate, inflation, interest rates, and SBN yields have the potential to affect projections for assets, liabilities, equity, net investment income, general and administrative expenses, cash flow, and business

valuasi portofolio surat berharga dalam jangka pendek, tetapi juga membuka peluang *reinvestment yield* yang lebih baik. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi, terutama inflasi energi dan medis, dapat meningkatkan beban klaim, biaya operasional, serta kebutuhan penyesuaian *pricing* pada lini asuransi.

ratios. Rising yields may put downward pressure on the valuation of the securities portfolio in the short term, but they also open up opportunities for better reinvestment yields. On the other hand, higher inflation, particularly in energy and healthcare, could increase the burden of claims, operating costs, and the need for pricing adjustments across insurance lines.

Secara sektoral, sektor jasa keuangan masih tumbuh, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Triwulan I 2026, sektor jasa keuangan tumbuh 4,68% YoY, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,61%. Selain itu, sektor asuransi dan dana pensiun secara historis konsisten tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional pasca-pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi makro Indonesia masih resilien, transmisi pertumbuhan terhadap industri keuangan non-bank, khususnya asuransi dan dana pensiun, belum optimal. Oleh karena itu, proyeksi kinerja IFG pada 2026 memperhitungkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi juga daya beli rumah tangga, persistensi premi, tekanan klaim, kondisi pasar modal, serta perubahan regulasi industri.

By sector, the financial services sector continues to grow, but not yet fully in line with the pace of national economic growth. In the first quarter of 2026, the financial services sector grew by 4.68% YoY, lower than the national GDP growth rate of 5.61%. Additionally, the insurance and pension fund sectors have historically and consistently grown at a rate below national economic growth in the post-pandemic period. This situation indicates that although Indonesia's macroeconomy remains resilient, the transmission of growth to the non-bank financial industry—particularly insurance and pension funds—has not been optimal. Therefore, IFG's 2026 performance projections take into account not only aggregate economic growth but also household purchasing power, premium persistence, claims pressure, capital market conditions, and changes in industry regulations.

Dengan mempertimbangkan perbandingan antara asumsi RKAP 2026 dan perkembangan terkini dalam, gambaran umum perekonomian 2026 dapat disimpulkan sebagai kondisi yang tetap ekspansif namun dengan ketidakpastian yang relatif lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi masih berada pada jalur positif dan relatif resilien secara regional, tetapi risiko inflasi, pelemahan nilai tukar, tertahannya pelonggaran suku bunga, serta peningkatan *yield* SBN menjadi faktor utama yang perlu dimasukkan ke dalam skenario sensitivitas. Oleh karena itu, proyeksi keuangan sebaiknya tidak hanya menggunakan baseline awal, tetapi juga dilengkapi dengan skenario konservatif yang mencerminkan kurs yang lebih lemah, inflasi yang lebih tinggi, *yield* SBN yang lebih tinggi, dan BI Rate yang lebih ketat dibandingkan asumsi awal.

By comparing the assumptions in the 2026 Annual Work Plan (RKAP) with recent developments, the overall economic outlook for 2026 can be summarized as remaining expansionary but with relatively higher uncertainty. Economic growth remains on a positive trajectory and is relatively resilient at the regional level; however, inflation risks, exchange rate depreciation, the delay in interest rate cuts, and rising SBN yields are key factors that must be incorporated into sensitivity scenarios. Therefore, financial projections should not rely solely on the initial baseline but should also include a conservative scenario reflecting a weaker exchange rate, higher inflation, higher SBN yields, and a tighter BI Rate compared to the initial assumptions.

SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN TERKAIT PROSPEK USAHA DI TAHUN 2026

Dalam upayanya mewujudkan aspirasi Melayani Sepenuh Hati Danantara, visi Perusahaan pada tahun 2030, serta sasaran utama grup IFG tahun 2030 untuk menjadi *Preferred Employer, Preferred Financial Partner*, dan *Valuable Business*, IFG menetapkan tema strategis tahun 2026 yaitu *Solidified Group Transformation*, yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") 2026-2030.

Tahun 2026 menjadi fase awal dari siklus RJPP 2026-2030 Perusahaan, dengan fokus untuk memperkokoh fondasi transformasi grup IFG. Melalui tema *Solidify Group Transformation*, IFG fokus pada penguatan sistem, tata kelola, dan fondasi organisasi guna menyiapkan diri untuk menjalani peran strategis sebagai *holding* asuransi terbesar di ekosistem Danantara dan menjadi pemimpin industri di masa mendatang. Selain itu, tahun 2026 juga akan menjadi momentum untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi agenda konsolidasi besar ekosistem Danantara serta peningkatan efisiensi lintas entitas.

Beberapa fokus utama pada tahun 2026 antara lain:

1. **Transformasi Bisnis dan Operasional**
   Melanjutkan upaya transformasi operasional dan bisnis secara menyeluruh, termasuk optimalisasi struktur *shared services*, penyelarasan dan perbaikan proses bisnis, serta peningkatan produktivitas melalui digitalisasi dan integrasi data.

2. **Ekspansi dan Konsolidasi Entitas Asuransi Ekosistem IFG**
   Optimalisasi penetrasi pasar serta efisiensi operasional melalui penataan struktur dan penajaman fokus bisnis entitas Asuransi dan Penjaminan di ekosistem IFG.

3. **Optimalisasi Sinergi dan Kolaborasi Lintas Afiliasi**

   Mendorong sinergi yang lebih terstruktur antar entitas IFG untuk memperkuat kapasitas bisnis, baik melalui mekanisme *joint capacity, cross-selling*, maupun pengembangan produk bersama.

4. **Transformasi Budaya dan Pengembangan Kapabilitas SDM**
   Transformasi budaya berorientasi kinerja (*high-performing culture*) dan *customercentricity* dengan *marketing & sales mindset*, serta peningkatan kapabilitas talenta khususnya *core-competence*.

COMPANY AND STRATEGIES RELATED TO BUSINESS PROSPECTS IN 2026

In pursuing the aspiration of Serving Danantara Wholeheartedly, the Company's 2030 vision, and the IFG Group's 2030 strategic objectives of becoming the Preferred Employer, Preferred Financial Partner, and a Valuable Business, IFG has established "Solidified Group Transformation" as its strategic theme for 2026, in alignment with the Company's 2026–2030 Long-Term Corporate Plan (RJPP).

The year 2026 marks the first phase of the Company's 2026–2030 RJPP, with a primary focus on strengthening the foundation of the IFG Group's transformation. Through the "Solidified Group Transformation" theme, IFG will focus on strengthening its systems, governance, and organizational foundations to prepare for its strategic role as the largest insurance holding company within the Danantara ecosystem and to position itself as an industry leader in the years ahead. In addition, 2026 will serve as a pivotal year in ensuring the Group's readiness for the broader consolidation agenda across the Danantara ecosystem while driving greater operational efficiency across entities.

The Company's key priorities for 2026 include:

1. **Business and Operational Transformation**
   Continuing the Company's comprehensive business and operational transformation initiatives, including optimizing the shared services structure, aligning and improving business processes, and enhancing productivity through digitalization and data integration.

2. **Expansion and Consolidation of Insurance Entities within the IFG Ecosystem**
   Optimizing market penetration and operational efficiency through the restructuring of insurance and guarantee entities and sharpening their business focus within the IFG ecosystem.

3. **Optimization of Synergies and Cross-Affiliate Collaboration**
   Promoting more structured collaboration among IFG entities to strengthen business capabilities through joint capacity initiatives, cross-selling, and the development of integrated products.

4. **Cultural Transformation and Human Capital Capability Development**
   Fostering a high-performing, customer-centric culture supported by a marketing and sales mindset, while strengthening talent capabilities, particularly in core competencies.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

06



Konsistensi IFG dalam mengimplementasikan GCG mencerminkan tekad perusahaan untuk terus bertransformasi dan menyempurnakan tata kelola dari internal perusahaan.

IFG's consistency in implementing GCG reflects the company's determination to continue transforming and improving its internal governance.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

KOMITMEN DAN KONSISTENSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi strategis yang tidak terpisahkan dari upaya membangun ekosistem persaingan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Menyadari hal tersebut, IFG melandasi seluruh arah penguatan tata kelola pada empat pilar utama yang dijalankan secara konsisten dan terencana. Penguatan ini dirancang bukan semata untuk mendorong peningkatan kinerja korporasi, melainkan juga untuk menghadirkan nilai yang bermakna bagi segenap pemangku kepentingan. Nilai dimaksud termanifestasi melalui sikap, perilaku, dan etos kerja yang berakar pada budaya organisasi IFG, sehingga setiap lini bisnis mampu menghasilkan layanan yang unggul, adaptif, dan efisien sejalan dengan tuntutan perkembangan industri.

Sejalan dengan dinamika lingkungan bisnis yang terus bergerak, kerangka tata kelola perusahaan IFG senantiasa diperkaya dan disesuaikan agar tetap relevan dan responsif. Hal tersebut tercermin dari penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang tidak hanya menopang etika kerja, tetapi juga memastikan setiap pengambilan keputusan dilandasi oleh prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian. Lebih jauh, penguatan tata kelola turut memperkokoh integritas pelaporan keuangan, mendorong pengelolaan risiko yang terukur, serta mempererat hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam bingkai etika yang kokoh. Seluruh Insan IFG menjunjung komitmen tersebut dengan kesungguhan penuh, dengan keyakinan bahwa tegaknya tata kelola yang baik akan menjadi katalis pertumbuhan berkelanjutan yang ditopang oleh keunggulan produk, kualitas proses bisnis, serta kepatuhan menyeluruh terhadap kode etik termasuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Konsistensi IFG dalam mengimplementasikan GCG mencerminkan tekad perusahaan untuk terus bertransformasi dan menyempurnakan tata kelola dari internal perusahaan. Prinsip serta kebijakan tata kelola dijadikan acuan utama oleh manajemen dan seluruh Insan IFG dalam setiap aspek penyelenggaraan bisnis sehari-hari. IFG berpegang teguh pada standar tata kelola perusahaan yang berlaku, sekaligus secara aktif memperkuat infrastruktur tata kelola melalui pemutakhiran sistem, prosedur, dan struktur organisasi. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memastikan bahwa mekanisme tata kelola tidak hanya tersedia secara formal, tetapi benar-benar berjalan secara efektif dalam menopang pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

COMMITMENT AND CONSISTENCY IN THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) serves as a strategic foundation that is integral to fostering a healthy and sustainable business ecosystem. Accordingly, IFG has anchored its governance enhancement efforts on four core pillars, which are implemented consistently and systematically. These efforts are designed not only to improve corporate performance but also to create meaningful value for all stakeholders. This value is reflected in the attitudes, behaviors, and work ethic embedded within IFG's corporate culture, enabling every business line to deliver superior, adaptive, and efficient services in line with the evolving demands of the industry.

In response to the continually evolving business landscape, IFG continuously refines and enhances its corporate governance framework to ensure it remains relevant and responsive. This is demonstrated through the strengthening of its monitoring and internal control systems, which not only reinforce ethical business conduct but also ensure that every decision is guided by the principles of accountability and prudence. Furthermore, these governance enhancements reinforce the integrity of financial reporting, promote disciplined risk management, and strengthen the Company's relationships with stakeholders within a robust ethical framework. All IFG People uphold this commitment with the utmost dedication, firmly believing that sound corporate governance serves as a catalyst for sustainable growth, supported by product excellence, high-quality business processes, as well as full compliance with the Code of Conduct, including responsibility for environmental sustainability.

IFG's consistent implementation of GCG reflects the Company's commitment to continuously transform and strengthen its governance practices from within. The Company's governance principles and policies serve as the primary reference for Management and all IFG People in every aspect of day-to-day business operations. IFG remains committed to complying with prevailing corporate governance standards while continuously strengthening its governance infrastructure through enhancements to its systems, procedures, and organizational structure. These initiatives are intended to ensure that governance mechanisms are not only formally established but also effectively implemented to support sustainable and responsible business growth.

Dengan landasan tersebut, penerapan GCG di IFG tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kepatuhan, tetapi juga menjadi mekanisme strategis untuk memperkuat pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Therefore, the implementation of GCG at IFG extends beyond regulatory compliance to serve as a strategic mechanism for strengthening decision-making, risk management, and long-term value creation.

GOVERNANCE FRAMEWORK

Kesungguhan IFG dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik tercermin secara struktural melalui *Governance Framework* yang menjadi landasan implementasi tata kelola di seluruh lini perusahaan. Kerangka ini dibangun di atas landasan regulasi yang kuat, yakni Pasal 5 ayat (3) UU BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata kelola (KNKG). Ketiga rujukan normatif tersebut menjadi pijakan utama IFG dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola diterapkan secara konsisten, menyeluruh, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

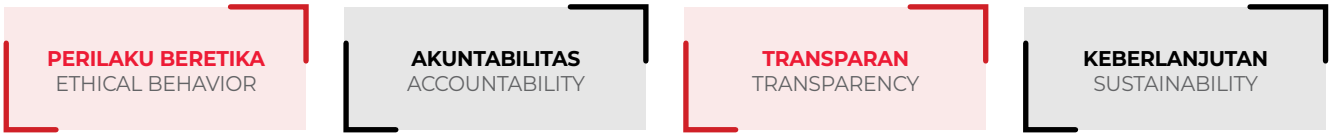
GOVERNANCE FRAMEWORK

IFG's commitment to implementing sound corporate governance is structurally reflected in its Governance Framework, which serves as the foundation for governance implementation across all areas of the Company. The Framework is built upon a robust regulatory foundation, including Article 5 paragraph (3) of the State-Owned Enterprises Law, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises, and the Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG). These three key references provide the primary basis for ensuring that governance principles are implemented consistently, comprehensively, and in accordance with prevailing regulations.

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari ekosistem korporasi nasional, IFG mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang berpijak pada empat pilar utama: Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan, sebagaimana tertuang dalam PUGKI 2021. Pembaruan kerangka ini merupakan penyempurnaan substantif atas prinsip dasar TARIF—Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan—yang sebelumnya menjadi acuan dalam PUGKI 2019. Pergeseran kerangka nilai ini mencerminkan respons terhadap perkembangan praktik tata kelola korporasi yang semakin menitikberatkan pada etika dan keberlanjutan sebagai elemen integral dalam pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab.

As part of Indonesia's corporate ecosystem, IFG adopts governance principles based on four core pillars: Ethical Behavior, Accountability, Transparency, and Sustainability, as set forth in the 2021 Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI). The updated framework represents a substantive enhancement of the previous TARIF principles—Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness—which served as the foundation of the 2019 PUGKI. This evolution in the governance framework reflects the growing emphasis of corporate governance practices on ethics and sustainability as integral elements of responsible corporate management.

Pilar Penerapan Governansi Korporat
Pillars of Corporate Governance



Pilar Pillar	**Prinsip Dasar** Basic principles
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Dalam menjalankan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In conducting its activities, the corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and trust consistently. The Corporation pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.

Pilar Pillar	Prinsip Dasar Basic principles
Akuntabilitas Accountability	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Corporation shall be accountable for its performance in a transparent and fair manner. Thus, the Corporation must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.
Transparansi Transparency	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information that the stakeholders can easily access and understand. The corporation takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also matters that are important for shareholders, creditors and other stakeholders in making decision.
Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Corporation complies with laws and regulations and is committed to carrying out responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is consistent with business interests and the sustainable development agenda.

Keempat pilar tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam prinsip-prinsip tata kelola yang mengatur peran organ perusahaan, proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, transparansi, serta perlindungan hak pemegang saham dan pemangku kepentingan. Di samping penerapan pilar-pilar tata kelola, IFG turut mengintegrasikan delapan prinsip tata kelola yang secara komprehensif mengatur hak-hak Pemegang Saham, pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan, serta ketentuan pokok dalam pengelolaan dan pengawasan korporasi di Indonesia. Kedelapan prinsip tersebut juga mencakup dimensi etika, manajemen risiko, dan transparansi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari praktik tata kelola yang bertanggung jawab. Untuk memudahkan pemahaman dan implementasinya, kedelapan prinsip dimaksud diorganisasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Kelompok prinsip pertama, kedua, dan ketiga adalah prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kelompok prinsip keempat, kelima, dan keenam adalah prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
3. Kelompok prinsip ketujuh dan kedelapan adalah prinsip yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Uraian mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan beserta implementasinya di lingkungan IFG dapat ditelaah secara lebih rinci melalui tabel berikut:

These four pillars are further translated into corporate governance principles that define the roles of the Company's governing bodies, decision-making processes, risk management, transparency, and the protection of shareholders' and stakeholders' rights. In addition to adopting these governance pillars, IFG has incorporated eight corporate governance principles that provide a comprehensive framework for safeguarding shareholders' rights, addressing stakeholders' interests, and establishing the fundamental provisions governing and supervising corporate management in Indonesia. These eight principles also encompass ethics, risk management, and transparency as integral elements of responsible corporate governance practices. To facilitate understanding and implementation, the eight principles are organized into three main categories:

1. The first, second, and third principles govern the management and supervisory functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. The fourth, fifth, and sixth principles govern the processes and outcomes of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. The seventh and eighth principles govern the providers of capital, who are the primary beneficiaries of sound corporate governance.

Further information on these corporate governance principles and their implementation at IFG is presented in the following table:

Prinsip Principles	**Definisi** Definition	**Penjelasan** Explanation
Prinsip 1 Principles 1		
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. The Board of Directors and Board of Commissioners conduct their roles and responsibilities independently to create sustainable value for the long-term best interests of the corporation and shareholders, by taking into account the interests of stakeholders.	Peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu, prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris. The roles and responsibilities of the Board of Directors in conducting corporate management and the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising corporate management by the Board of Directors. Furthermore, this Principle regulates the performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their respective members, the handling of conflicts of interest that occur to the Board of Directors and Board of Commissioners. This principle also regulates the competence development for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
Prinsip 2 Principles 2		
Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan Direksi dan Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are selected and appointed in such a way that the composition of the Board of Directors as the management organ and the composition of the Board of Commissioners as the supervisory organ are diverse. Each consists of Directors and Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience and expertise required to appropriately fulfill the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners. Remuneration is designed to effectively align the interests of Board of Directors and Board of Commissioners members with the long-term interests of the corporation and sustainable value creation.	Mengharuskan pemilihan dan penetapan Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel. Requires that the selection and appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners be conducted in such a way that the Board of Directors and the Board of Commissioners as management and supervisory organs, respectively, have a composition of members with the required knowledge, abilities and expertise in accordance with their respective roles. In addition, this Principle emphasizes the importance of remuneration policies to encourage members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to prioritize the long-term interests of the corporation based on the principle of sustainability, and requires the disclosure of remuneration policies and information received by the Board of Directors and Board of Commissioners in a transparent and accountable manner.

Prinsip Principles	**Definisi** Definition	**Penjelasan** Explanation
Prinsip 3 Principles 3		
Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Working Relationship between Board of Directors and Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and Board of Commissioners have a close, open, constructive, professional and trusting working relationship for the best interest of the corporation.	Menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya. Emphasizes the importance of a close, open, constructive, professional, trusting working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in achieving the best interests of the corporation. Principle 3 also regulates the need for the Board of Commissioners to access complete information and the importance of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understanding the implications of the ownership structure of the corporation on the implementation of their roles.
Prinsip 4 Principles 4		
Perilaku Etis Ethical Behavior	Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi. The Corporation is committed to acting ethically and responsibly, upholding the values and culture of the organization.	Korporasi perlu untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab. The Corporation need to make regular statements about the corporation's commitment not only to comply with applicable laws and regulations, but also the commitment to act ethically and responsibly.
Prinsip 5 Principles 5		
Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance	Korporasi menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja perusahaan dalam menjalankan bisnis secara berintegritas. The Corporation implements corporate governance practices that are integrated with the implementation of internal control and risk management systems, as well as an effective compliance management system in order to support the achievement of corporate goals, vision, mission, objectives, and performance targets in conducting business with integrity.	Direksi harus mengimplementasikan tata kelola, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible business*) sebagai warga perusahaan yang baik (*good corporate citizen*). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan tata kelola, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan perusahaan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi. The Board of Directors shall implement governance, internal control and risk management systems, and compliance management systems in an integrated manner as part of the strategies, management tools, and practices completed by the corporation in conducting business responsibly (responsible business) as a good corporate citizen. The Board of Commissioners monitors and provides advices on the effectiveness of the implementation of governance, internal control and risk management systems, and corporate compliance management systems implemented in an integrated manner by the Board of Directors.
Prinsip 6 Principles 6		
Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi. The Corporation makes accurate and timely disclosures regarding all material matters concerning the corporation.	Korporasi harus memiliki kerangka tata kelola yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan tata kelola perusahaan. The Corporation should have a governance framework that provides the assurance that accurate and timely disclosure of all material matters about the corporation, including financial condition and performance, ownership of the corporation, and corporate governance, can be achieved.

Prinsip Principles	**Definisi** Definition	**Penjelasan** Explanation
Prinsip 7 Principles 7		
Hak-hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak Pemegang Saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap Pemegang Saham. Semua Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. The Corporation protects and facilitates the exercise of Shareholders' rights and ensures fair treatment to shareholders. All shareholders have the opportunity to obtain effective redress for any violation of their rights.	Pemenuhan hak Pemegang Saham dan perlakuan adil bagi Pemegang Saham, bagaimana cara kerja sama aktif antara korporasi dengan Pemegang Saham dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak Pemegang Saham secara efektif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fulfillment of Shareholders' rights and fair treatment for Shareholders how active cooperation between the corporation and its shareholders is conducted and the effective exercise of some shareholder rights through the General Meeting of Shareholders (GMS).
Prinsip 8 Principles 8		
Hak-hak Pemangku Kepentingan Stakeholder Rights	Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial. The Corporation recognizes the rights of stakeholders set out in the prevailing laws and regulations or an agreement entered into by the corporation and encourages active cooperation with stakeholders in creating wealth, employment and financially sound business sustainability.	Peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi. The role of the Board of Directors and Board of Commissioners is to integrate sustainability aspects into the corporate business model, implement stakeholder engagement, and ensure the protection of stakeholders' rights. The Board of Commissioners monitors the integration of all aspects mentioned above by the Board of Directors.

Integrasi Tata Kelola dan Keberlanjutan dalam Perumusan Strategi Korporasi

IFG memperkuat peran tata kelola perusahaan sebagai kerangka strategis yang memastikan integrasi prinsip integritas dan keberlanjutan secara substantif dalam perumusan dan implementasi strategi jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan *governance* sebagai fungsi pengawasan, namun sebagai *enabler* utama dalam mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan dan peningkatan ketahanan usaha di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Penguatan tata kelola senantiasa difokuskan pada penyelarasan antara arah strategis Perusahaan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif memastikan bahwa setiap kebijakan strategis, rencana kerja, dan keputusan investasi mempertimbangkan aspek risiko, kepatuhan, serta dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha. Hal ini dilakukan melalui mekanisme penelaahan strategis secara berkala, penguatan fungsi komite di bawah Dewan Komisaris, serta optimalisasi peran organ pendukung Direksi dalam memastikan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam aspek integritas, IFG mengimplementasikan berbagai inisiatif yang terstruktur dan terukur, antara lain melalui penguatan kode etik Perusahaan, peningkatan efektivitas kebijakan anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi, serta pengembangan sistem *whistleblowing* yang andal dan terpercaya. Upaya ini didukung oleh internalisasi nilai-nilai

Integration of Governance and Sustainability into Corporate Strategy

IFG continues to strengthen the role of corporate governance as a strategic framework that ensures the meaningful integration of integrity and sustainability principles into the formulation and implementation of its long-term strategy. This approach positions governance not merely as a supervisory function, but as a key enabler of sustainable value creation and enhanced business resilience amid an increasingly complex and dynamic business environment.

Governance enhancement efforts remain focused on aligning the Company's strategic direction with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and Environmental, Social, and Governance (ESG). The Board of Commissioners and the Board of Directors actively ensure that every strategic policy, work plan, and investment decision takes into account risk, compliance, and the long-term implications toward business sustainability. This is achieved through regular strategic reviews, strengthening the functions of committees under the Board of Commissioners, as well as optimizing the role of the supporting organs of the Board of Directors to enhance the quality of decision-making.

To reinforce integrity, IFG has implemented a range of structured and measurable initiatives, including strengthening the Company's Code of Conduct, enhancing the effectiveness of its anti-corruption and gratification control policies, and further developing a reliable and trusted whistleblowing system. These efforts are supported

etika bisnis kepada seluruh insan Perusahaan melalui program sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, sehingga integritas tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi terimplementasi dalam perilaku dan budaya kerja sehari-hari.

by the ongoing internalization of business ethics across the Company through continuous dissemination and training programs, ensuring that integrity is not merely a guiding principle but is embedded in employees' daily conduct and workplace culture.

Sementara itu, dalam memastikan integrasi aspek keberlanjutan, IFG mengarusutamakan prinsip ESG ke dalam proses perencanaan strategis dan operasional. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan portofolio bisnis yang mempertimbangkan risiko dan peluang terkait isu lingkungan dan sosial, penerapan praktik investasi yang bertanggung jawab, serta penguatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Perusahaan juga terus mengembangkan indikator kinerja berbasis keberlanjutan yang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja, sehingga pencapaian aspek ESG dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan.

To integrate sustainability into its operations, IFG incorporates ESG principles into its strategic planning and operational processes. This commitment is reflected in the development of a business portfolio that considers environmental and social risks and opportunities, the implementation of responsible investment practices, and the enhancement of social and environmental responsibility programs aligned with the Sustainable Development Goals. In addition, the Company continues to develop sustainability-based performance indicators integrated into its performance management system, enabling ESG performance to be measured objectively and consistently.

Dari perspektif manajemen risiko, IFG menerapkan pendekatan *enterprise risk management* yang terintegrasi dengan proses perencanaan strategis, guna mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko secara proaktif. Penguatan fungsi manajemen risiko ini mencakup peningkatan kualitas *risk assessment* terhadap inisiatif strategis, pengembangan *early warning system*, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, Perusahaan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi volatilitas pasar, perubahan regulasi, serta tantangan global lainnya.

From a risk management perspective, IFG implements an Enterprise Risk Management (ERM) approach that is integrated with its strategic planning process to proactively identify, assess, and mitigate risks. These efforts include improving the quality of risk assessments for strategic initiatives, developing an early warning system, and leveraging information technology to support data-driven decision-making. As a result, the Company is more prepared to deal with market volatility, regulatory changes, and other global challenges.

Lebih lanjut, IFG juga mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui peningkatan kualitas pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan, serta penguatan sistem pengendalian internal yang mencakup seluruh lini bisnis. Sinergi antar entitas dalam *holding* turut diperkuat untuk memastikan konsistensi penerapan tata kelola dan keberlanjutan di seluruh grup usaha, sehingga tercipta harmonisasi kebijakan dan efektivitas implementasi di tingkat operasional.

Furthermore, IFG promotes transparency and accountability by enhancing the quality of information disclosure to stakeholders and strengthening its internal control system across all lines of business. Collaboration among entities within the Holding is also reinforced to ensure the consistent implementation of governance and sustainability practices throughout the Group, thereby promoting policy harmonization and operational effectiveness.

Melalui pendekatan tata kelola yang komprehensif dan implementatif tersebut, IFG mampu memastikan bahwa prinsip integritas dan keberlanjutan tidak hanya menjadi landasan konseptual, tetapi terintegrasi secara nyata dalam setiap aspek pengelolaan Perusahaan. Hal ini pada akhirnya memperkuat ketahanan usaha (*business resilience*), meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Through this comprehensive and practical governance approach, IFG ensures that the principles of integrity and sustainability are not merely conceptual foundations but are fully embedded throughout the Company's operations. Ultimately, this approach strengthens business resilience, enhances the Company's ability to adapt to change, and supports the creation of sustainable long-term value for shareholders and all stakeholders.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan tata kelola di lingkungan IFG senantiasa mengacu pada sejumlah ketentuan dan regulasi yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
12. Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada Badan Usaha Milik Negara;
13. Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
14. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara;

THE BASIS FOR IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of corporate governance throughout IFG is guided by applicable laws and regulations, including:

1. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as last amended by Law No. 16 of 2025;
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as last amended by Law No. 6 of 2023;
3. Government Regulation No. 18 of 1973 on the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company in the National Private Business Development Sector, as amended by Government Regulation No. 15 of 2020;
4. Government Regulation No. 20 of 2020 on Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
5. Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Risk Management;
6. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;
7. Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomerates, as revoked by Financial Services Authority Regulation No. 30 of 2024 on Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies;
8. Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.05/2022 on the Supervision of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
9. Financial Services Authority Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;
10. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises;
11. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
12. Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-306/MBU/11/2023 on Technical Guidelines for the Preparation of Key Performance Indicators for State-Owned Enterprises;
13. Copy of the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 on Technical Guidelines for the Assessment of the Risk Maturity Index within State-Owned Enterprises;
14. Decree of the Deputy for Finance and Risk Management No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 on Technical Guidelines for Risk Management Reporting by State-Owned Enterprises;

15. Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); dan
16. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Tata kelola (KNKG) Tahun 2021.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam kedudukannya sebagai *Holding* BUMN yang menaungi sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG menjunjung tinggi komitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara konsisten dan terstruktur. Penerapan tata kelola yang mencakup bidang keuangan, investasi, dan konsultasi manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menjadi acuan IFG dalam melaksanakan tata kelola pada industri asuransi, penjaminan dan investasi;
2. Meningkatkan reputasi dan mengoptimalkan nilai IFG agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan IFG;
3. Mendorong pengelolaan IFG secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ IFG;
4. Mendorong agar organ IFG dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial IFG terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar IFG;
5. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan IFG dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya IFG yang lebih baik;
6. Menciptakan dan meningkatkan iklim yang kondusif pada sektor keuangan nasional khususnya di bidang asuransi, penjaminan dan investasi serta mendorong terbentuknya identitas, karakter, dan motivasi karyawan untuk berperilaku dan bertindak sesuai tuntutan IFG serta dilandasi dengan moral dan nilai-nilai etika yang sehat; dan
7. Mematuhi aspek kepatuhan sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

15. Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 1 of 2023 on Good Corporate Governance Guidelines; and
16. The 2021 General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

OBJECTIVES OF IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE

As the State-Owned Enterprise holding company operating in the insurance, guarantee, and investment sectors, IFG remains committed to implementing corporate governance principles in a consistent and structured manner. The implementation of corporate governance across the Company's financial, investment, and management consulting activities is intended to achieve the following objectives:

1. To serve as a reference for IFG in implementing corporate governance across the insurance, guarantee, and investment industries;
2. To enhance IFG's reputation and optimize its corporate value, thereby strengthening its competitiveness at both the national and international levels and supporting its long-term sustainability in fulfilling its corporate purpose and objectives;
3. To promote professional, efficient, and effective management while strengthening the functions and independence of IFG's organs;
4. To ensure that IFG's organs make decisions and conduct their responsibilities based on high ethical standards, compliance with prevailing laws and regulations, and *an awareness of the Company's social and environmental responsibilities to stakeholders and preservation of the environment surrounding IFG;
5. To foster attitudes and behaviors that align with IFG's development and the evolving business environment, thereby cultivating a stronger corporate culture;
6. To create and promote a conducive environment within Indonesia's financial sector, particularly in the insurance, guarantee, and investment industries, while fostering employees' identity, character, and motivation to act in accordance with IFG's values and sound ethical principles; and
7. To maintain compliance with regulatory requirements as a financial services institution supervised by the Financial Services Authority (OJK).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Sepanjang tahun 2025, IFG telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan strategis yang diarahkan untuk memperkuat dan mendukung implementasi tata kelola perusahaan, di antaranya:

1. Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk mendukung penerapan tata kelola, yaitu di antaranya: (a) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), (b) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, (c) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, (d) Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), (e) Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN), (f) Pedoman Pengendalian Gratifikasi, (g) Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), (h) Pedoman Benturan Kepentingan, dan (i) Pedoman Penilaian *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Melakukan perubahan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai wujud implementasi atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Terintegrasi;
3. Melakukan pengajuan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
5. Menyelenggarakan RUPS tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menetapkan struktur organisasi;
7. Menyusun laporan tahunan dan laporan keberlanjutan;
8. mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merujuk pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi secara berkala; dan
11. Mengoptimalkan peran organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi.

Throughout 2025, IFG carried out a series of strategic initiatives to strengthen and support the implementation of corporate governance, including:

1. Implementing policies and procedures to support corporate governance, including: (a) Good Corporate Governance Guidelines, (b) Guidelines and Work Procedures for the Board of Directors, (c) Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners (d) Code of Conduct, (e) Compliance Guidelines for Submission of State Officials Wealth Reports (LHKPN), (f) Gratification Control Guidelines, (g) Whistleblowing System Guidelines, (h) Conflict of Interest Guidelines, and (i) Board of Commissioners' and Directors' Key Performance Indicator (KPI) Assessment Guidelines;
2. Revising the composition of the Integrated Governance Committee as part of the implementation of the Integrated Good Corporate Governance Guidelines;
3. Submitting an application to the Financial Services Authority (OJK) for designation as a Non-Operating Financial Conglomerate Holding Company;
4. Establishing the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
5. Holding the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in accordance with prevailing laws and regulations;
6. Establishing the Company's organizational structure;
7. Preparing the Annual Report and Sustainability Report;
8. Participating in the monitoring and evaluation of Public Information Disclosure conducted by the Central Information Commission of the Republic of Indonesia in accordance with Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure;
9. Conducting a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance;
10. Holding regular meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
11. Optimizing the roles of the supporting organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN TATA KELOLA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Sebagai bentuk nyata dari kesungguhan IFG dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola, Perusahaan telah menetapkan unit kerja di bawah Divisi Sekretaris Perusahaan yang secara khusus bertanggung jawab untuk memastikan implementasi tata kelola berjalan secara *prudent* dan berkesinambungan, melalui pelaksanaan serangkaian program kerja yang terencana dan bernilai strategis.

RESPONSIBILITY FOR CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a tangible demonstration of its commitment to upholding corporate governance principles, IFG has established a dedicated unit under the Corporate Secretary Division to monitor the prudent and sustainable implementation of corporate governance through a series of well-planned strategic work programs.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI TAHUN 2025

Berlandaskan pada pemahaman mendalam IFG akan peran krusial tata kelola dalam menjaga keberlangsungan korporasi, Perusahaan secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas praktik tata kelola sepanjang tahun 2025. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilaksanakan mencakup tiga aspek tata kelola yang saling berkaitan, yakni struktur, proses, dan hasil. Dalam kerangka tersebut, penilaian dilakukan terhadap paling sedikit delapan faktor pelaksanaan tata kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
8. Serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan tata kelola terintegrasi.

Hasil pelaksanaan penilaian GCG terintegrasi IFG diklasifikasikan berdasarkan sistem peringkat yang ditetapkan dalam SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015, yang membagi capaian penilaian ke dalam lima tingkatan, mulai dari Peringkat 1 hingga Peringkat 5. Dalam sistem peringkat dimaksud, nilai peringkat yang lebih rendah mencerminkan kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT IN 2025

Recognizing the critical role of corporate governance in ensuring long-term business sustainability, IFG remained committed to enhancing the quality of its governance practices throughout 2025. This commitment was demonstrated through the Company's self-assessment of its Good Corporate Governance (GCG) implementation, conducted in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.

The self-assessment covered three interrelated aspects of governance: governance structure, governance process, and governance outcomes.Within this framework, the assessment evaluated at least the following eight governance factors:

1. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;
2. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
3. Duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee;
4. Duties and responsibilities of the Integrated Compliance Unit;
5. Duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Unit;
6. Implementation of integrated risk management;
7. Development and implementation of the Integrated Governance Guidelines; and
8. Other relevant information relating to the implementation of integrated governance.

The results of IFG's Integrated GCG assessment were classified based on the rating system prescribed under SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015, which categorizes governance performance into five rating levels, ranging from Rating 1 to Rating 5. Under this rating system, a lower rating reflects a higher quality of Integrated Governance implementation.

Adapun capaian hasil penilaian GCG terintegrasi IFG untuk periode tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

The results of IFG's 2025 Integrated GCG assessment are presented below:

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025
Results of IFG's 2025 Integrated GCG Assessment

Peringkat Rating	**Definisi Peringkat** Definition of Rating
3 IFG *Stand Alone*	Mencerminkan IFG telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum **"Cukup Baik"**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari perusahaan. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh IFG dalam memenuhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ke depannya, IFG berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan guna memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Reflects that IFG, on a stand-alone basis, has implemented Integrated Governance that is generally **"Fair"**. This rating indicates an adequate level of compliance with Integrated Governance principles. Any weaknesses identified in the implementation are generally not significant and have been recognized by the Company, with corresponding improvement plans already in place. This achievement reflects IFG's continued commitment to implementing Good Corporate Governance to the best of its ability. Going forward, IFG remains committed to continuously improving and refining its governance practices to ensure more effective and sustainable corporate governance implementation.

Hasil penilaian tersebut menjadi masukan penting bagi Perusahaan dalam memperkuat struktur, mekanisme, dan infrastruktur tata kelola agar pelaksanaan fungsi pengurusan, pengawasan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan dapat berjalan lebih efektif.

The assessment results also provide valuable input for strengthening the Company's governance structure, mechanisms, and infrastructure, enabling its management, oversight, internal control, risk management, and compliance functions to operate more effectively.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUCTURE AND MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola IFG dibangun melalui pembentukan organ dan perangkat kelembagaan yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memenuhi kebutuhan internal dalam rangka peningkatan kualitas penerapan tata kelola dan penopang pertumbuhan bisnis perusahaan. Di sisi lain, mekanisme tata kelola perusahaan merangkum keseluruhan proses, norma, aturan, dan institusi yang secara kolektif membentuk dan memengaruhi arah pengelolaan perusahaan.

Aspek-aspek utama dalam struktur tata kelola perusahaan memainkan peran sentral dalam memperkokoh fungsi pengendalian dan pengelolaan korporasi, yang ditunjang oleh perangkat kebijakan yang selaras dengan tujuan implementasi prinsip-prinsip tata kelola. Pada tataran praktis, prinsip-prinsip tata kelola tersebut terwujud melalui mekanisme tata kelola yang didukung oleh struktur dan infrastruktur yang kokoh dan memadai. Melalui kerangka ini, penerapan tata kelola diharapkan mampu menghasilkan capaian yang sesuai dengan ekspektasi Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

Merujuk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, khususnya Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, dinyatakan bahwa Organ Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; dan
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

STRUCTURE OF CORPORATE ORGANS

IFG's governance structure is established through organs and institutional arrangements designed to ensure compliance with prevailing laws and regulations while addressing the Company's internal needs to strengthen corporate governance practices and support sustainable business growth. The corporate governance mechanism encompasses the processes, norms, regulations, and institutional arrangements that collectively shape and guide the Company's governance.

The key components of the governance structure play a central role in strengthening the Company's supervisory and management functions, supported by governance policies aligned with the objectives of Good Corporate Governance implementation. In practice, these governance principles are implemented through governance mechanisms supported by a robust and effective governance structure and infrastructure. Through this framework, the implementation of corporate governance is expected to deliver outcomes that meet the expectations of shareholders and other stakeholders.

Pursuant to Chapter I, General Provisions, Article 1 of the Limited Liability Company Law, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners, each of which has the following roles and responsibilities:

1. General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ vested with authority not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits prescribed by law and/or the Articles of Association.
2. Board of Directors is the organ fully authorized and responsible for managing the Company in accordance with its purposes and objectives, and for representing the Company both inside and outside the courts in accordance with the Articles of Association.
3. Board of Commissioners is the organ responsible for exercising general and/or specific supervisory in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang mempertemukan kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris selaku pengawas pengelolaan perusahaan, serta Direksi selaku pengelola operasional korporasi. Dewan Komisaris dan Direksi mengemban wewenang dan tanggung jawab yang terdefinisi secara jelas sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diharapkan memiliki keselarasan pandangan terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Sebagai *Holding* BUMN yang menaungi sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG berkeyakinan bahwa peningkatan nilai perusahaan yang dibangun di atas fondasi integritas akan menjadi penggerak penguatan kinerja sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, IFG menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, norma hukum, serta prinsip dan standar yang berlaku. Sebagai perwujudan nyata dari komitmen tersebut kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, IFG memastikan implementasi GCG ditopang oleh struktur tata kelola yang kokoh dan memadai, yang mencakup:

The GMS serves as the Company's highest decision-making forum, bringing together the interests of shareholders, the Board of Commissioners in its supervisory role, and the Board of Directors in its responsibility for managing the Company's operations. The Board of Commissioners and the Board of Directors carry out clearly defined authorities and responsibilities in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations, while maintaining a shared commitment to the Company's vision, mission, and core values.

As the State-Owned Enterprise holding company for Indonesia's insurance, guarantee, and investment sectors, IFG believes that enhancing corporate value on a foundation of integrity strengthens business performance while creating sustainable value for shareholders and all stakeholders. In line with this commitment, IFG continues to enhance its contribution to the national economy while upholding social values, legal norms, and applicable principles and standards. As a tangible demonstration of its commitment to shareholders and stakeholders, IFG ensures that the implementation of Good Corporate Governance is supported by a robust governance structure and adequate governance infrastructure, comprising the following:

Struktur Tata kelola
Governance Structure

Struktur Tata kelola Governance Structure	**Perangkat Lunak Struktur Tata kelola** Soft Structure Governance
• RUPS • Dewan Komisaris • Direksi • Organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi • GMS • Board of Commissioners • Board of Directors • Supporting organs of the Board of Commissioners and Board of Directors	• *Core Values* • IFG *Principle* (Piagam Korporasi, Pedoman Strategis dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi) • Pedoman • Kebijakan • Prosedur • Petunjuk Teknis • Sistem Manajemen/Sistem Pengendalian Internal • Core Values • IFG Principle (Corporate Charter, Strategic Guidelines and Integrated Governance Guidelines) • Guidelines • Policy • Procedure • Technical Guidelines • Management System/Internal Control System

PERANGKAT LUNAK STRUKTUR TATA KELOLA

Proses dan mekanisme tata kelola perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam membangun pola hubungan kerja yang efektif dan terstruktur di antara seluruh organ Perusahaan. Mekanisme dimaksud diformulasikan dalam perangkat lunak struktur tata kelola yang memuat berbagai regulasi, pedoman, dan kebijakan sebagai acuan dalam menetapkan tanggung jawab masing-masing organ tata kelola, mengatur koordinasi antarorgan, serta mengelola interaksi dengan pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

SOFT STRUCTURE GOVERNANCE

Corporate governance processes and mechanisms play a vital role in establishing effective and well-structured working relationships among the Company's organs. These mechanisms are formalized through the Soft Structure Governance, which comprises the regulations, guidelines, and policies that serve as the basis for defining the responsibilities of each organ, coordinating interactions among them, and managing relationships with both internal and external stakeholders.

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan berjalan secara optimal, IFG berkomitmen untuk terus menyempurnakan kelengkapan perangkat lunak struktur tata kelola secara berkelanjutan. Penyempurnaan tersebut sekaligus berfungsi sebagai respons adaptif terhadap pembaruan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga implementasi tata kelola perusahaan senantiasa relevan dan selaras dengan perkembangan kerangka hukum yang ada.

To ensure the effective implementation of corporate governance principles, IFG is committed to continuously enhancing and refining its Soft Structure Governance. These ongoing enhancements also enable the Company to respond proactively to changes in applicable laws and regulations, ensuring that its corporate governance practices remain relevant and aligned with the evolving legal and regulatory landscape.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RUPS merupakan organ perusahaan yang berada pada hierarki tertinggi dan memegang seluruh kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi, dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar perusahaan. Secara substansial, RUPS berfungsi sebagai wadah bagi Pemegang Saham untuk menetapkan arah strategis IFG ke depan, sekaligus menjadi forum pertanggungjawaban bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaporkan pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja kepada Pemegang Saham. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, para Pemegang Saham memiliki hak penuh untuk menyampaikan pandangan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis yang menentukan arah dan masa depan IFG.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the company's organ and holds all authority not delegated to the Board of Commissioners or the Board of Directors, within the limits set forth by the Limited Liability Companies Act and/or the company's Articles of Association. Essentially, the GMS serves as a forum for Shareholders to set IFG's future strategic direction, while also serving as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to report on the performance of their duties and achievements to the Shareholders. At every GMS, shareholders have the full right to express their views and actively participate in making strategic decisions that determine IFG's direction and future.

PEMEGANG SAHAM DAN INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR

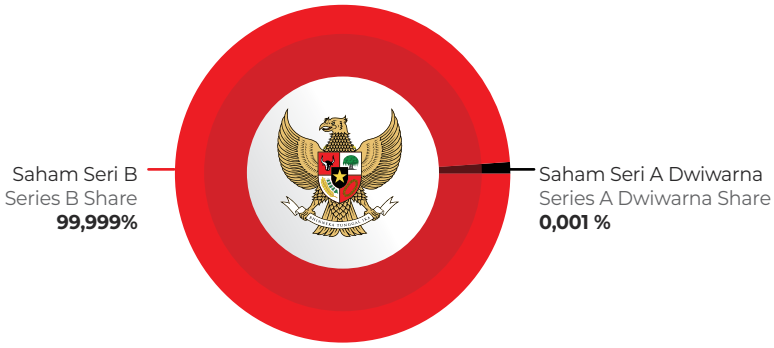
Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham dalam suatu perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai pemilik modal, Pemegang Saham mengemban hak dan tanggung jawab yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar perusahaan. Struktur kepemilikan saham IFG terdiri atas Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya yang merupakan pendiri perusahaan. Adapun komposisi Pemegang Saham IFG per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDERS AND INFORMATION ON MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS TO ULTIMATE OWNER ENTITY

A shareholder is an individual or legal entity that legally owns one or more shares in a company. In their capacity as capital owners, shareholders have rights and responsibilities governed by prevailing laws and regulations as well as the company's Articles of Association. IFG's shareholding structure consists of Major/Controlling Shareholders and other Shareholders who are the company's founders. The composition of IFG's Shareholders as of December 31, 2025, is as follows:

Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (share)	**Jenis** Type	**Persentase Kepemilikan** Ownership Percentage **(%)**
Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	1	Saham Seri A Dwiwarna Series A Dwiwarna Share	0,001
PT Danantara Asset Management	93.719.536	Saham Seri B Series B Share	99,999%

Komposisi Pemegang Saham IFG per 31 Desember 2025
Composition of the Company's Shareholders As of December 31, 2025



Hingga akhir tahun 2025, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama, pengendali, sekaligus pemilik akhir Perusahaan. Pengelolaan kepemilikan tersebut dilaksanakan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, BPI Danantara menjalankan fungsi pengelolaan BUMN melalui entitas anak, yaitu PT Danantara Asset Management (Danantara).

As of the end of 2025, the Government of the Republic of Indonesia served as the Company's major shareholder, controlling shareholder, and ultimate owner. Ownership was managed through the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara), as mandated under Law No. 16 of 2025. In carrying out this mandate, BPI Danantara exercises its State-Owned Enterprise management function through its subsidiary, PT Danantara Asset Management (Danantara).

JENIS-JENIS RUPS

Perusahaan senantiasa memastikan keterbukaan informasi yang relevan kepada Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam RUPS dilandasi oleh pertimbangan yang mengutamakan kepentingan perusahaan di atas segalanya. Dalam hal ini, RUPS tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris maupun Direksi, tanpa mengurangi hak RUPS untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik penyelenggaraannya, perusahaan mengenal beberapa jenis RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, yang masing-masing mencakup:

1. RUPS pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
2. RUPS pengesahan RKAP;
3. RUPS pengesahan laporan tahunan; dan
4. RUPS lainnya.

RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya merupakan forum dengan otoritas tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan, sekaligus menjadi wadah utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan kewenangannya dalam mengawasi jalannya manajemen Perusahaan. Di luar mekanisme RUPS, Pemegang Saham juga dimungkinkan untuk mengambil keputusan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler, yakni suatu bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan di luar forum RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki

TYPE OF GMS

The Company consistently ensures the disclosure of relevant information to Shareholders, provided that such disclosure does not conflict with the Company's interests or the provisions of applicable laws and regulations. Every decision made at a General Meeting of Shareholders is based on considerations that prioritize the company's interests above all else. In this regard, the General Meeting of Shareholders has no authority to interfere with the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners or the Board of Directors, without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to exercise its authority as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

In practice, the Company recognizes several types of GMS, namely the Annual GMS and Other GMS, which respectively include:

1. GMS to approve the Company's Long-Term Plan (RJPP);
2. GMS to approve the Annual Business Plan (RKAP);
3. GMS to approve the annual report; and
4. other GMS.

The Annual GMS and Other GMS serve as the forums with the highest authority within the company's governance structure, while also serving as the primary venue for Shareholders to exercise their rights and authority in supervising the Company's management. Beyond the GMS mechanism, Shareholders may also make decisions through the Circular Resolution mechanism, which is a form of decision-making conducted outside the GMS forum. Circular Resolutions have the same legal force as

kekuatan hukum yang setara dengan Keputusan RUPS, dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

WEWENANG RUPS

Dalam kedudukannya sebagai organ tertinggi perusahaan, RUPS mengemban sejumlah kewenangan, antara lain:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh Pemegang Saham;
2. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh Pemegang Saham;
3. Pengaturan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan dan mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap atau jabatan Anggota Direksi;
4. Memberikan persetujuan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha IFG dalam jangka panjang dan jangka pendek, meliputi:
   a. Pengesahan RJPP;
   b. Pengesahan RKAP;
   c. Pengesahan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan;
   d. Persetujuan usulan aksi korporasi yang disampaikan Direksi;
   e. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi; dan
   f. Termasuk hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.

HAK PEMEGANG SAHAM

Dalam kerangka tata kelola perusahaan, Perseroan menjamin terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham sebagaimana telah ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS;
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut IFG secara lengkap, tepat waktu, terukur, dan teratur;
3. Memperoleh pembagian laba dalam bentuk dividen;
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan;

GMS Resolutions, provided that all shareholders have given their written approval of the proposal to be decided, as stipulated in Article 91 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

AUTHORITIES OF GMS

As the company's highest organ, the General Meeting of Shareholders (GMS) holds a number of authorities, including:

1. The appointment and removal of members of the Board of Commissioners in accordance with policies or guidelines established by the shareholders;
2. The appointment and dismissal of members of the Board of Directors in accordance with policies or guidelines established by the shareholders;
3. Regulating concurrent positions that give rise to conflicts of interest, including the types of concurrent positions and the mechanism for resigning from concurrent positions or from a position as a member of the Board of Directors;
4. Granting the necessary approvals/decisions to safeguard IFG's business interests in the long and short term, including:
   a. Approval of the RJPP;
   b. Approval of the RKAP;
   c. Approval of the annual report, including the financial statements;
   d. Approval of corporate action proposals submitted by the Board of Directors;
   e. Evaluation of the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
   f. Matters stipulated in the company's Articles of Association

RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Within the framework of corporate governance, the Company ensures that the rights of Shareholders, as established by applicable laws and regulations, are fulfilled, including but not limited to:

1. Attend and vote at the General Meeting of Shareholders;
2. Receive material information (including the right to ask questions) from both the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding financial matters or other issues concerning IFG in a complete, timely, measurable, and regular manner;
3. Receive a share of profits in the form of dividends;
4. Convening a General Meeting of Shareholders in the event that the Board of Directors and/or the Board of Commissioners fails to hold an Annual General Meeting of Shareholders, and requesting the convening of an Extraordinary General Meeting of Shareholders at any time if deemed necessary, for example, if the company faces a significant decline in performance;

5. Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud; dan
6. Keputusan Pemegang Saham mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan secara fisik.

Risalah dan Bentuk Keputusan RUPS

Perseroan berkewajiban untuk mendokumentasikan setiap pelaksanaan RUPS dalam bentuk risalah resmi yang memuat secara lengkap seluruh substansi penyelenggaraan, meliputi waktu pelaksanaan, agenda yang dibahas, daftar peserta yang hadir, dinamika pembahasan yang berlangsung, serta resolusi yang dihasilkan, termasuk pencatatan atas adanya pendapat berbeda/*dissenting opinion* apabila terdapat dalam forum tersebut. Keabsahan risalah dimaksud mensyaratkan penandatanganan oleh pimpinan rapat serta sedikitnya 1 (satu) Pemegang Saham yang dikuasakan oleh dan dari kalangan peserta RUPS, kecuali bilamana risalah tersebut dituangkan dalam bentuk akta notaris. Perseroan memberikan jaminan kepada setiap Pemegang Saham untuk memperoleh salinan risalah RUPS sebagai bagian dari hak atas keterbukaan informasi. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dapat dilakukan melalui beberapa modalitas, antara lain:

1. Keputusan Pemegang Saham dan keputusan Menteri BUMN selaku pemilik modal dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai keputusan RUPS/Menteri BUMN; dan
2. Surat biasa disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2025: HASIL KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar IFG, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahun buku, yang pelaksanaannya mencakup dua agenda utama, yakni RUPS untuk penetapan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta RUPS Tahunan yang berfokus pada pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Sepanjang tahun buku 2025, IFG telah melaksanakan rangkaian RUPS Tahunan dengan keterangan penyelenggaraan sebagai berikut:

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 30 Januari 2025. Berikut disampaikan hasil Keputusan dan tindak lanjut RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025:

5. Shareholders may make decisions outside of a GMS, provided that all Shareholders with voting rights give their written consent by signing the relevant decision; and
6. Shareholder decisions have the same legally binding force as decisions made in person.

Minutes and form of GMS Resolutions

The Company is obligated to document every GMS in the form of official minutes that fully detail the entire proceedings, including the date and time of the meeting, the agenda items discussed, the list of attendees, the dynamics of the discussions, and the resolutions adopted, including a record of any dissenting opinions expressed during the meeting. The validity of such minutes requires the signatures of the meeting chairperson and at least 1 (one) shareholder authorized by and selected from among the GMS participants, unless the minutes are recorded in the form of a notarial deed. The Company guarantees that every shareholder will receive a copy of the GMS minutes as part of their right to information transparency. The decision-making mechanism at the GMS may be conducted through several methods, including:

1. Decisions by Shareholders and decisions by the Minister of State-Owned Enterprises as the owner of the capital may be made in the form of a decision letter or a regular letter, both of which are legally binding as decisions of the GMS or the Minister of State-Owned Enterprises; and
2. Regular letters are issued to provide decisions on proposals submitted by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

CONDUCT OF THE 2025 AGMS: RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP BY MANAGEMENT

Pursuant to Article 21 of IFG's Articles of Association, the Company is required to hold an Annual GMS for each fiscal year, the proceedings of which include two main agendas: a GMS to approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and an Annual GMS focused on the ratification of the Company's annual report and financial statements.

Throughout the 2025 fiscal year, IFG held a series of Annual General Meetings with the following details:

Annual General Meeting of Shareholders

1. The Annual General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the 2025 Work Plan and Budget, held on January 30, 2025. The following are the resolutions and follow-up actions from the GMS on the Ratification of the 2025 Work Plan and Budget:

No	Hasil Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025 Ratification of the 2025 Company's Work Plan and Budget (RKAP) as well as the 2025 Board of Commissioners' Work Plan and Budget	Telah ditindaklanjuti Followed-up
2.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2025 Approval of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2025	Telah ditindaklanjuti Followed-up
3.	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang Memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025 Determination of Annual Management Contract containing Key Performance Indicator (KPI) Targets for the Board of Directors Collegially and the Board of Commissioners in 2025	Telah ditindaklanjuti Followed-up

2. RUPS Tahunan tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada 30 Juni 2025. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2024:

2. Annual General Meeting of Shareholders regarding Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2024, held on June 30, 2025. The following are the resolutions and follow-up actions from the General Shareholders' Meeting regarding the approval of the Annual Report and the ratification of the 2024 Financial Statements:

No	Hasil Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Penyajian Kembali (*Restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan 2023, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Penyajian Kembali (*Restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan 2023, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024, Including the Restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Years 2022 and 2023, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratification of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024, including the Restatement of the Consolidated Financial Statements for Fiscal Years 2022 and 2023, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratification.	Telah ditindaklanjuti Followed-up
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024. Resolution on the Allocation of the Company's Net Income for Fiscal Year 2024.	Telah ditindaklanjuti Followed-up
3.	Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun Buku 2024, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2025. Determination of Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for Fiscal Year 2024, Salaries for the Board of Directors and Honoraria for the Board of Commissioners, along with Other Benefits and Allowances for 2025.	Telah ditindaklanjuti Followed-up
4.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Amendments to the Company's Articles of Association	Telah ditindaklanjuti Followed-up

RUPS Luar Biasa

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar IFG, penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa terikat jadwal tertentu, bilamana kondisi dan kebutuhan Perseroan menghendaki adanya pengambilan keputusan di luar mekanisme RUPS Tahunan. Dalam kurun waktu tahun buku 2025, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa dengan pokok-pokok agenda sebagai berikut:

Extraordinary General Meeting of Shareholders

As stipulated in Article 22 of IFG's Articles of Association, an Extraordinary General Meeting of Shareholders may be held at any time without being bound by a specific schedule, whenever the Company's circumstances and needs require decisions to be made outside the mechanism of the Annual General Meeting of Shareholders. During the 2025 fiscal year, the Company held a total of 3 (three) Extraordinary General Meetings of Shareholders with the following agenda items:

No	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Agenda
1.	22 Januari 2025 January 22, 2025	Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Dismissal of a Member of the Board of Directors of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
2.	10 Februari 2025 February 10, 2025	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
3.	22 Maret 2025 March 22, 2025	Persetujuan Pengalihan Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of the Transfer of Shares of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2024: HASIL KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 30 Januari 2024. Berikut disampaikan hasil Keputusan dan tindak lanjut RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024.

CONDUCT OF THE 2024 GMS: RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP BY MANAGEMENT

Annual General Meeting of Shareholders

1. The Annual General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the 2024 Work Plan and Budget, held on January 30, 2024. The following are the Resolutions and follow-up actions from the GMS on the Ratification of the 2024 Work Plan and Budget.

No	Hasil Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 Ratification of the 2024 Company's Work Plan and Budget (RKAP) as well as the 2024 Board of Commissioners' Work Plan and Budget	Telah ditindaklanjuti Followed-up
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024 Approval of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2024	Telah ditindaklanjuti Followed-up
3	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang Memuat Target *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024 Determination of Annual Management Contract containing Key Performance Indicator (KPI) Targets for the Board of Directors Collegially and the Board of Commissioners in 2024	Telah ditindaklanjuti Followed-up

2. RUPS Tahunan tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan secara sirkuler dan memperoleh keputusan RUPS melalui surat Menteri BUMN Nomor S-2/MBU/01/2025 tanggal 3 Januari 2025. Berikut disampaikan hasil keputusan dan tindak lanjut RUPS Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2023:

The Annual GMS approving the 2023 Annual Report and ratifying the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023, was conducted by way of a circular resolution and approved through the Resolution of the GMS as set forth in the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-2/MBU/01/2025 dated January 3, 2025. The following are the resolutions and follow-up actions from the General Shareholders' Meeting regarding the approval of the Annual Report and the ratification of the 2023 Financial Statements:

No	Hasil Keputusan Resolution	Tindak Lanjut Follow-Up
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Penyajian Kembali (*Restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, including the Restatement of the Consolidated Financial Statements for Fiscal Years 2021 and 2022, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of the Microfinance and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2023, as well as the Granting of Full Discharge and Release from Liability (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and to the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions Implemented during the 2023 Fiscal Year.	Telah ditindaklanjuti Followed-up
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023. Resolution on the Allocation of the Company's Net Income for Fiscal Year 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed-up
3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023. Determination of Salary/Honorarium and Facilities and Benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the Fiscal Year 2024, and Bonuses/Performance Incentive/Special Incentive for Board of Directors and Board of Commissioners of the Fiscal Year 2023.	Telah ditindaklanjuti Followed-up
4	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2024. Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Consolidated Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprises Funding Program (PUMK) and Non-PUMK for the Fiscal Year 2024.	Telah ditindaklanjuti Followed-up

RUPS Luar Biasa

Berdasarkan Anggaran Dasar IFG Pasal 22, RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan demi kepentingan perusahaan. Sepanjang tahun 2024, terdapat 5 (lima) RUPS Luar Biasa IFG dengan rincian agenda sebagai berikut:

Extraordinary General Meeting of Shareholders

Pursuant to Article 22 of IFG's Articles of Association, an Extraordinary General Meeting of Shareholders may be held at any time as needed in the best interests of the company. Throughout 2024, there were 5 (five) Extraordinary General Meetings of Shareholders of IFG, with the following agenda items:

No	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Agenda
1	3 Januari 2024 January 03, 2024	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Appointment of Members of the Board of Commissioners at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
2	3 April 2024 April 03, 2024	Persetujuan Penyertaan Modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG Approval of State Equity Participation of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG
3	3 April 2024 April 03, 2024	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of Amendments to the Articles of Association of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
4	5 April 2024 April 05, 2024	Persetujuan Pelepasan Penyertaan Modal Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of the Release of Share Equity Participation of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
5	5 April 2024 April 05, 2024	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Jiwa IFG oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of Addition of State Equity Participation to PT Asuransi Jiwa IFG by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan dilandasi oleh Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai kerangka acuan operasional yang telah ditandatangani secara bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 6 Juli 2023. Pedoman dimaksud disusun dengan mengacu pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa diperbarui secara berkala guna memastikan relevansinya terhadap perkembangan regulasi. Substansi pedoman tersebut mencakup keseluruhan aspek penerapan tata kelola perusahaan oleh Dewan Komisaris, mulai dari penjabaran peran dan fungsi kelembagaan, pembagian tugas antar anggota, pola hubungan kerja antara organ-organ Perseroan, mekanisme penyelenggaraan rapat, hingga tata cara pengambilan keputusan yang berlaku dalam lingkup Dewan Komisaris.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Terkait dengan pengaturan masa jabatan bagi anggota Dewan Komisaris, Perseroan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka:
   a. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
   b. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap Melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama; dan
   c. Kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.
3. Apabila karena sebab apa pun juga IFG tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka:
   a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan jabatan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan jabatan itu;

GUIDELINES AND WORK PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners implements its supervisory function based on the Board of Commissioners' Guideline and Work Procedures, which serves as its operational guideline and was jointly signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on July 6, 2023. These guidelines were developed in accordance with prevailing laws and regulations and is reviewed and updated periodically to ensure its continued relevance in line with regulatory developments. The guidelines comprehensively govern the implementation of corporate governance by the Board of Commissioners, including its institutional roles and responsibilities, the allocation of duties among members, working relationships among the Company's organs, meeting mechanisms, and the decision-making process applicable to the Board of Commissioners.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

With regard to the term of office for members of the Board of Commissioners, the Company has established the following provisions:

1. The term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years, and they may be reappointed for one (1) additional term.
2. If, for any reason, a position on the Board of Commissioners becomes vacant, then:
   a. The GMS must be convened no later than 30 (thirty) days after the vacancy occurs to fill the vacant position.
   b. If the vacancy arises due to the expiration of a member's term of office, the GMS may temporarily reappoint the outgoing member of the Board of Commissioners to continue serving with the same duties, authorities, and responsibilities.
   c. An acting member of the Board of Commissioners as referred to above shall be entitled to the same honorarium and benefits/facilities as a member of the Board of Commissioners, except for end-of-service benefits.
3. If, for any reason, IFG has no serving member of the Board of Commissioners, then:
   a. A GMS must be convened no later than 30 (thirty) days after the vacancy occurs to fill the vacant position.

b. Selama terdapat kekosongan jabatan Dewan Komisaris selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;
c. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap Melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan
d. Kepada pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota.

4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Proses penetapan anggota Dewan Komisaris mensyaratkan setiap calon untuk memenuhi serangkaian kriteria kelayakan yang meliputi:

1. Memenuhi persyaratan materiil yaitu:
   a. Integritas;
   b. Dedikasi;
   c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
   e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Memenuhi persyaratan formal yaitu:
   a. Orang perseorangan;
   b. Mampu Melaksanakan perbuatan hukum;
   c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan

   e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anggota *Holding*, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

b. If the vacancy occurs for reasons other than the expiration of a term of office, the GMS shall appoint one or more shareholders or other parties to temporarily perform the duties of the Board of Commissioners.
c. If the vacancy arises due to the expiration of a term of office, the GMS may temporarily reappoint the outgoing member of the Board of Commissioners to continue serving with the same duties, authorities, and responsibilities.

d. The acting member(s) of the Board of Commissioners referred to in points (b) and (c) shall be entitled to the same honorarium and benefits/facilities as members of the Board of Commissioners.

4. the position of a member of the Board of Commissioners ends when:
   a. He/she passed away;
   b. His/her term of office ended;
   c. Dismissed by resolution of the GMS; and
   d. No longer fulfill the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the articles of association and laws and regulations.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The appointment of members of the Board of Commissioners requires each candidate to satisfy the following eligibility criteria:

1. By fulfilling the following material requirements:
   a. Demonstrate integrity;
   b. Demonstrate dedication;
   c. Possess an understanding of corporate management issues related to at least one management function;

   d. Possess adequate knowledge of the business sector in which the candidate is nominated; and
   e. Be able to devote sufficient time to conduct the duties of a member of the Board of Commissioners.
2. Also, fulfilling these formal requirements, such as:
   a. Be an individual;
   b. Have legal capacity to perform legal acts;
   c. Have not been declared bankrupt within five (5) years prior to the appointment;
   d. Have not served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found responsible for causing a State-Owned Enterprise (SOE), Holding Member, and/or other business entity to be declared bankrupt within five (5) years prior to the appointment; and
   e. Have not been convicted of a criminal offense resulting in losses to the state, an SOE, a Holding Member, another business entity, and/or relating to the financial services sector within five (5) years prior to the appointment.

3. Memenuhi persyaratan lain antara lain yaitu:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
   c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anggota *Holding* yang bersangkutan;
   d. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris;
   f. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
   g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah Melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Pemenuhan persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh IFG.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan IFG sesuai dengan pembagian tugas dengan fokus area yang akan diberikan kepadanya (antara lain memiliki latar belakang profesi dan/atau pengalaman profesional dan/atau *subject matter expert* di bidang akuntansi, keuangan, investasi hukum, regulasi, kebijakan publik, teknologi informasi, manajemen risiko, operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan hal-hal lain yang dinilai perlu sesuai dengan bidang usaha IFG dan Anggota *Holding*.
6. Lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
7. Antara para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, dalam hal ini terjadi maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
8. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
9. Persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar IFG dan kebijakan yang ditetapkan oleh IFG termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

3. Other requirements include:
   a. Not an official of a political party and/or candidate member and/or member of the House of People's Representatives (DPR), Regional House of Representatives (DPD), Provincial Regional House of People's Representatives and District/ Municipal Regional House of People's Representatives;
   b. Not a candidate for regional head/deputy head and/or a regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
   c. Not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the SOE/Subsidiary concerned;
   d. Not serving as a Member of the Board of Commissioners of any SOE or the Board of Commissioners of the relevant Subsidiary for 2 (two) periods;
   e. Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited to be concurrent with the position of Member of the Board of Commissioners;
   f. Physically and mentally healthy, who is not currently suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a Member of the Board of Commissioners, as evidenced by a health certificate from a hospital; and
   g. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have done tax payment obligations for the last 2 (two) years.
4. Fulfillment of the formal requirements as referred to in number 2 (two) is evidenced by a statement letter signed by the prospective member of the Board of Commissioners and the letter is kept by IFG.
5. Having knowledge and/or expertise in the fields required by IFG in accordance with the division of duties with focus areas that will be assigned to him/her (such as, having a professional background and/or professional experience and/or subject matter expert in accounting, finance, investment law, regulation, public policy, information technology, risk management, operations, human resource management, and other matters deemed necessary in accordance with the business fields of IFG and Holding Members).
6. Passed the fit and proper test.
7. Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the third degree either in a direct line of descent or branching line of descent, including those arising out of marriage, in the event that this occurs, the GMS is authorized to dismiss one of them.
8. Do not have bad credit and/or bad financing.
9. Other requirements as determined by IFG's articles of association and policies set by IFG including the provisions of laws and regulations.
10. In addition to fulfilling the above provisions, Independent Commissioners must fulfill the following requirements:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan IFG dalam 6 (enam) bulan terakhir, terkecuali untuk pengangkatan alasan sebagai Komisaris Independen pada periode Berikutnya;
b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada IFG;
c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan IFG, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau pemegang saham utama IFG;
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan Kegiatan usaha IFG;
e. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris yang lain dan/atau Direksi;
f. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan afiliasi dengan IFG;
g. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan afiliasi dengan IFG.

11. Mantan Anggota Direksi IFG dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan, setelah tidak menjabat Anggota Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan Perusahaan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dimana Wahyu Setiawan mengundurkan diri sebagai Komisaris pada 8 Juli 2025. Lalu, terdapat 3 (tiga) anggota Komisaris telah berakhir masa jabatannya yaitu Hotbonar Sinaga sebagai Komisaris Independen pada 20 Oktober 2025, serta Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Utama/Independen, dan Masyita Crystallin sebagai Komisaris pada 30 Desember 2025. Seluruh perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris tersebut dikukuhkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 27 tanggal 27 April 2026 yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0250570 tanggal 30 April 2026. Adapun kronologi perubahan komposisi Dewan Komisaris disajikan pada tabel sebagai berikut:

a. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of IFG in the last 6 (six) months, except for the reason of appointment as Independent Commissioner in the next period;
b. Has no direct or indirect shareholding in IFG;
c. Has no affiliation with IFG, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of IFG;
d. Has no direct or indirect business relationship related to IFG's business activities;
e. Has no family relationship with other members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors;
f. Has no financial relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders or affiliation with IFG;
g. Has no management relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders or affiliation with IFG.

11. Former Members of the Board of Directors of IFG may become Members of the Board of Commissioners of the company, after not serving as Members of the Board of Directors of the Company for at least 1 (one) year, except with certain considerations decided by the Minister to maintain the continuity of the company's restructuring program, as long as there is no provision of other laws and regulations that prohibit it.

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, there were changes in the composition of the Board of Commissioners, with Wahyu Setiawan resigning from his position as Commissioner on July 8, 2025. Subsequently, the terms of office of 3 (three) members of the Board of Commissioners ended, namely Hotbonar Sinaga as Independent Commissioner on October 20, 2025, as well as Fauzi Ichsan as President Commissioner/Independent Commissioner and Masyita Crystallin as Commissioner on December 30, 2025. All changes in the composition of the Board of Commissioners were formalized pursuant to Deed of Statement of Resolutions of the Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 27 dated April 27, 2026, for which notification of the change in the Company's data was acknowledged pursuant to Letter of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.09-0250570 dated April 30, 2026. The chronology of changes in the composition of the Board of Commissioners is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Berakhir menjabat per 30 Desember 2025 dikarenakan berakhir masa jabatan No longer serving as of December 30, 2025, due to the end of the term of office
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	Berhenti menjabat per 30 Desember 2025 dikarenakan berakhir masa jabatan No longer serving as of December 30, 2025, due to the end of the term of office
Hotbonar Sinaga	Komisaris Commissioner	Berhenti menjabat per 20 Oktober 2025 dikarenakan berakhir masa jabatan No longer serving as of October 20, 2025, due to the end of the term of office
Wahyu Setiawan	Komisaris Commissioner	Berhenti menjabat per 8 Juli 2025 dikarenakan mengundurkan diri No longer serving as of July 8, 2025, due to resignation
Sumiyati	Komisaris Commissioner	Masih menjabat selama tahun buku (hingga RUPS Tahunan Tahun Buku 2025) Still serving during the fiscal year (until the Annual GMS for the 2025 Fiscal Year)
Nasrudin	Komisaris Commissioner	Masih menjabat selama tahun buku (hingga RUPS Tahunan Tahun Buku 2025) Still serving during the fiscal year (until the Annual GMS for the 2025 Fiscal Year)

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris hingga 31 Desember 2025 berjumlah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Accordingly, as of December 31, 2025, the Board of Commissioners consisted of 2 (two) members, both serving as Commissioners. The composition and basis for the appointment of the Commissioners are presented in the following table.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komisaris
Table of the Composition and Basis for Appointment of the Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Sumiyati	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 tanggal 31 Juli 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-254/MBU/07/2021 dated July 31, 2021.
Nasrudin	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Indonesia Financial Group No. SK-135/MBU/04/2021 dated April 29, 2021.

Informasi mengenai latar belakang dan rekam jejak seluruh anggota Dewan Komisaris dapat ditemukan secara lengkap pada bab Profil Perusahaan yang termuat dalam Laporan Tahunan ini.

Complete information regarding the background and track records of all members of the Board of Commissioners is available in the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka menjunjung tinggi prinsip transparansi terkait pengelolaan potensi benturan kepentingan di lingkungan IFG, berikut disajikan data kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2025 pada Perusahaan lain dengan porsi kepemilikan melebihi 5%, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In order to uphold the principle of transparency regarding the management of potential conflicts of interest within IFG, the following table presents data on the shareholdings of Board of Commissioners members as of December 31, 2025, in other companies where they have more than 5% share ownership, as listed below:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Table of Board of Commissioners Share Ownership

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Kepemilikan Saham** Share Ownership
	Perusahaan Lain (>5%) Other Companies (>5%)
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen)* Fauzi Ichsan (President Commissioner/Independent Commissioner)*	Nihil None
Masyita Crystallin (Komisaris)* Masyita Crystallin (Commissioner)*	
Nasrudin (Komisaris) Nasrudin (Commissioner)	
Sumiyati (Komisaris) Sumiyati (Commissioner)	
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)* Hotbonar Sinaga (Independent Commissioner)*	
Wahyu Setyawan (Komisaris)* Wahyu Setyawan (Commissioner)*	

*)sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal laporan ini diterbitkan.
*)No longer served as a member of the Board of Commissioners as of the date this report was published.

Mengingat IFG tidak tercatat di pasar modal dan tidak memiliki kebijakan kepemilikan saham bagi manajemen (*Management Stock Ownership Program*/MSOP), maka tidak terdapat satu pun anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan.

Since IFG is not listed on the capital market and does not have a Management Stock Ownership Program (MSOP), no member of the Board of Commissioners or the Board of Directors holds shares in the Company.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris telah diatur secara eksplisit oleh IFG melalui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan.
2. Dewan Komisaris pada perseroan lain selain IFG, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
3. Bagi Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perseroan selain IFG sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu), wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris IFG selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
    a. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:
    b. BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Provisions regarding concurrent positions for members of the Board of Commissioners have been explicitly regulated by IFG through the Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners, with the following details:

1. The Board of Commissioners may hold concurrent positions.
2. members of the Board of Commissioners at companies other than IFG, subject to the provisions of sector-specific laws and regulations.
3. Members of the Board of Commissioners who hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners at companies other than IFG, as referred to in point 1 (one), must maintain an attendance rate of at least 75% (seventy-five percent) at IFG Board of Commissioners meetings over the course of one year as a requirement for receiving performance bonuses or incentives.
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners of a state-owned enterprise (SOE), except by special assignment from the Minister.
    a. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:
    b. State-Owned Enterprises (SOEs), Regionally-Owned Enterprises (ROEs), or Privately-Owned Enterprises (POEs);

c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau; jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

5. Anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), anggota Dewan Komisaris lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.

7. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama IFG oleh anggota Dewan Komisaris setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada nomor 6, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 7, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian IFG yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Keterkaitan keanggotaan Dewan Komisaris IFG dalam kapasitas kepengurusan pada perusahaan lain selama periode tahun 2025 dapat dilihat dalam uraian berikut:

c. other positions as stipulated by laws and regulations, officials of political parties, and/or candidates for legislative office and/or candidates for regional head or deputy regional head; and/or other positions that may give rise to a conflict of interest

5. For members of the Board of Commissioners who hold concurrent positions as referred to in points 3 (three) and 4 (four), their term of office as members of the Board of Commissioners shall terminate by operation of law from the moment another member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders (GMS), or the Minister becomes aware of such concurrent positions.
6. Within a period of no later than 7 (seven) days from the date the concurrent positions referred to in points 3 (three) and 4 (four) are discovered, other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors must notify the General Meeting of Shareholders (GMS) or the Minister regarding such concurrent positions, so that the process for determining the termination may proceed.
7. Any legal acts performed for and on behalf of IFG by a member of the Board of Commissioners after the termination of their term as referred to in paragraph 6 are invalid and constitute the personal liability of the relevant member of the Board of Commissioners.
8. The provision referred to in paragraph 7 does not diminish the liability of the relevant member of the Board of Commissioners for losses incurred by IFG resulting from the error or negligence of said member in performing their duties; if the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, such liability applies jointly and severally to each member of the Board of Commissioners.

The involvement of IFG Board of Commissioners members in management capacities at other companies during the 2025 period is outlined below:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain** Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As the Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As the Member of the Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Position(s)
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen)* Fauzi Ichsan (President Commissioner/Independent Commissioner)*	√	x	x
Masyita Crystallin (Komisaris)* Masyita Crystallin (Commissioner)*	x	x	√
Nasrudin (Komisaris) Nasrudin (Commissioner)	x	x	x
Sumiyati (Komisaris) Sumiyati (Commissioner)	√	x	√

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain** Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As the Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As the Member of the Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Position(s)
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)* Hotbonar Sinaga (Independent Commissioner)*	x	x	x
Wahyu Setyawan (Komisaris)* Wahyu Setyawan (Commissioner)*	x	x	√

√ = terdapat hubungan | x = tidak terdapat hubungan
*)sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal laporan ini diterbitkan.
√ = yes | x = no
*)No longer served as a member of the Board of Commissioners as of the date this report was published.

Berikut disajikan data mengenai rangkap jabatan yang diemban oleh anggota Dewan Komisaris IFG pada perusahaan lain di luar Perusahaan:

The following data presents the concurrent positions held by members of the IFG Board of Commissioners at other companies outside the Company:

Nama Name	**Jabatan** Position
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen)* Fauzi Ichsan (President Commissioner/Independent Commissioner)*	1. Komisaris Independen PT Manulife Investment Management Indonesia 2. Komisaris Independen PT AKR Corporindo Tbk 3. Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk 4. Komisaris Independen PT Minamas Gemilang 1. Independent Commissioner at PT Manulife Investment Management Indonesia 2. Independent Commissioner at PT AKR Corporindo Tbk 3. Independent Commissioner at PT Unilever Indonesia Tbk 4. Independent commissioner of PT Minamas Gemilang
Masyita Crystallin (Komisaris)* Masyita Crystallin (Commissioner)*	1. Partner dan Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq 2. Co-chair Sherpa (Deputi) bersama Belanda 3. Dewan Pembina World Resource Institute 4. Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia 1. Partner dan Head of Sustainable Finance and Policy Asia Pacific, Systemiq 2. Co-chair Sherpa (Deputy) with the Netherlands 3. Board of Trustees, World Resource Institute 4. Board of Experts, Indonesian Employers Association
Nasrudin (Komisaris) Nasrudin (Commissioner)	-
Sumiyati (Komisaris) Sumiyati (Commissioner)	1. Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Anggota Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Sekretariat Negara 1. Member of the Government Accounting Standards Committee 2. Member of the State Secretariat Kemayoran Complex Management Center
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)* Hotbonar Sinaga (Independent Commissioner)*	-
Wahyu Setyawan (Komisaris)* Wahyu Setyawan (Commissioner)*	Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN Expert Staff for Strategic Policy Implementation at the Ministry of SOEs

*)sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal laporan ini diterbitkan.
*)No longer served as a member of the Board of Commissioners as of the date this report was published.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali menjalankan fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing secara independen dan saling menghormati, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Sebagai landasan pelaksanaan hal tersebut, IFG telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat pengaturan secara komprehensif mengenai tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, serta hak dari masing-masing organ Perusahaan.

AFFILIATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders carry out their respective duties, responsibilities, and authorities with mutual respect in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association. To serve as a basis for implementing these measures, IFG has established the Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which contain comprehensive provisions regarding the responsibilities, obligations, authorities, and rights of each of the Company's organ.

Dalam konteks hubungan antarorgan, Dewan Komisaris dan Direksi IFG tidak memiliki keterkaitan afiliasi dalam bentuk apa pun, baik yang bersifat finansial maupun ikatan kekeluargaan, baik di antara sesama anggota organ maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Gambaran menyeluruh mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali disajikan sebagai berikut:

In the context of inter-organ relationships, the Board of Commissioners and the Board of Directors of IFG have no affiliations of any kind, whether financial or familial, either among the members of these organs or with the Major/Controlling Shareholders. A comprehensive overview of the affiliations among members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholders is presented as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Hubungan Keluarga Dengan** Familial Relationship with			**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Relationship with		
	Dewan Komisaris Lainnya Other Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholders	**Dewan Komisaris Lainnya** Other Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholders
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen)* Fauzi Ichsan (President Commissioner/ Independent Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Masyita Crystallin (Komisaris)* Masyita Crystallin (Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Nasrudin (Komisaris) Nasrudin (Commissioner)	x	x	x	x	x	x
Sumiyati (Komisaris) Sumiyati (Commissioner)	x	x	x	x	x	x
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen)* Hotbonar Sinaga (Independent Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Wahyu Setyawan (Komisaris)* Wahyu Setyawan (Commissioner)*	x	x	x	x	x	x

√ = terdapat hubungan | x = tidak terdapat hubungan
*)sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal laporan ini diterbitkan.
√ = yes | x = no
*)No longer served as a member of the Board of Commissioners as of the date this report was published.

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang diuraikan sebagai berikut:

Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai IFG maupun usaha IFG yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-

DUTIES, OBLIGATIONS, AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To optimize the performance of its supervisory function and the provision of strategic guidance to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the duties, authorities, obligations, rights, and responsibilities outlined below:

Duties of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is assigned to supervise management policies, the course of management in general both regarding IFG and IFG's business conducted by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP, the provisions of the articles of association and Resolutions of the GMS, as

undangan, untuk kepentingan IFG dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

2. Dalam Melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus:

   a. Mematuhi Anggaran Dasar IFG dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
   b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan IFG dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG.

Wewenang Dewan Komisaris

Guna melaksanakan tanggung jawab pengawasan serta memberikan arahan strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris dilengkapi dengan sejumlah kewenangan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain, surat berharga dan memeriksa kekayaan IFG;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh IFG;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan IFG;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Menerima informasi dari Direksi secara teratur, tanpa penundaan, dan secara komprehensif tentang semua informasi yang relevan dengan IFG serta informasi lainnya jika diminta sewaktu-waktu;
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
8. Membentuk komite Dewan Komisaris di antaranya:

   a. Komite Audit;
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
   c. Komite Pemantau Risiko;
   d. Tata Kelola Terintegrasi dan/atau;
   e. Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan IFG;

Pengangkatan anggota komite pada angka 8 ini dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab komite Dewan Komisaris diatur dalam piagam masing-masing komite.

1. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban IFG (jika diperlukan);

well as applicable laws and regulations, for the benefit of IFG and in accordance with IFG's mission and objectives, and is not intended to benefit any specific party or group.

2. In performing their duties, the member of the Board of Commissioners must:
   a. Comply with IFG's articles of association and laws and regulations, as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness; and
   b. Be in good faith, prudent and responsible in conducting supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the benefit of IFG and in accordance with the purposes and objectives of IFG.

Authority of the Board of Commissioners

To exercise its supervisory responsibilities and provide strategic guidance to the Board of Directors, the Board of Commissioners is vested with a number of authorities, including the following:

1. Reviewing records, letters, and other documents, checking cash for verification purposes, etc., securities and check IFG's assets;
2. Entering the premises, buildings and offices used by IFG;
3. Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials on all issues concerning the management of IFG;
4. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings;
6. Receiving information from the Board of Directors regularly, without delay, and in a comprehensive manner on all information relevant to IFG as well as other information if requested at any time.
7. Appointing and dismissing the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;
8. Establishing committees of the Board of Commissioners including:
   a. Audit Committee;
   b. Nomination and Remuneration Committee;
   c. Risk Monitoring Committee;
   d. Integrated Governance Committee; and/or
   e. Other committees as deemed necessary with due regard to the capabilities of the IFG.

The appointment of committee members in number 8 is conducted by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners Meeting. The duties and responsibilities of the committees of the Board of Commissioners are regulated in the charter of each committee.

1. Utilizing experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of IFG (if needed);

2. Memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar IFG atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan IFG atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi IFG. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri;
3. Melakukan tindakan pengurusan IFG dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar IFG;
4. Menghadiri Rapat Direksi atau unit-unit di bawahnya dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
5. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala SKAI dan Sekretaris Perusahaan;
6. Menyetujui piagam audit internal (*internal audit charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SKAI;
7. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi berikut:
   a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka pendek;
   b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/ BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/ BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/ BTO), dan kerja sama lainnya dengan batasan nilai atau jangka waktu yang telah ditetapkan oleh RUPS;
   c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Dasar, dan pinjaman yang diberikan kepada Anggota *Holding* dengan ketentuan pinjaman kepada Anggota *Holding* dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
   d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
   e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
   f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
8. Memberikan tanggapan tertulis atas perbuatan Direksi berikut:
   a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan pinjaman jangka menengah/panjang;
   b. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perseroan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

2. Temporarily suspending a member of the Board of Directors at any time by stating the reasons if the member of the Board of Directors acts contrary to the provisions of IFG's articles of association or there are indications of taking actions that are detrimental to IFG or neglecting his/her obligations or there are urgent reasons for IFG. Such temporary suspension must be notified in writing to the person concerned along with the reasons that led to the action. Within 30 (thirty) days after the date of the temporary suspension, the Board of Commissioners is required to organize a GMS that will decide whether the member of the Board of Directors concerned will be permanently dismissed or restored to his/her position, where the person concerned is given the opportunity to attend and defend himself/herself;
3. Perform management actions of IFG in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of IFG's Articles of Association;
4. Attending meetings of the Board of Directors or its subordinate units and provide views on matters discussed;
5. Approving the appointment of the Head of Internal Audit and Corporate Secretary;
6. Approving the internal audit charter proposed by the Board of Directors by taking into account the proposal from the Internal Audit Unit;
7. Providing written approval for the following actions of the Board of Directors:
   a. Pledging fixed assets to draw down short-term loans;
   b. Establishing cooperation with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a limit on the value or period determined by the GMS;
   c. Receive or provide medium/long-term loans, except for loans (debt or receivables) arising from business activities as referred to in Article 3 of the Articles of Association, and loans given to Holding Members provided that loans to Holding Members are reported to the Board of Commissioners;
   d. Writing off bad debts and inventories of dead stock;
   e. disposing fixed assets with a typical economic life in the industry of more than 5 (five) years; and
   f. Establish an organizational structure of 1 (one) level below the Board of Directors;
8. Providing written responses to the following actions of the Board of Directors:
   a. pledging fixed assets for medium/long-term loans;
   b. Making capital investments and reduce the percentage of capital investment in other companies that must be approved by the Series A Dwiwarna Shareholders;

c. Mendirikan Anggota Holding dan/atau perusahaan patungan;
d. Melepaskan penyertaan modal pada Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan, kecuali kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan;
f. Mengikat IFG sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS:
h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan;
i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap IFG dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
j. Menetapkan blueprint organisasi IFG;
k. Menetapkan dan mengubah logo IFG;
l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
m. Membentuk kebijakan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan IFG yang dapat berdampak bagi IFG;
n. Pembebanan biaya IFG yang bersifat tetap dan rutin untuk kebijakan, organisasi, dan/ atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan IFG;
o. Pengusulan wakil IFG untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada IFG, dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
p. Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang;
q. Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh IFG; dan

9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, terdapat sejumlah kewajiban yang menjadi tanggung jawab Direksi, yaitu:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam Melaksanakan pengurusan IFG;
2. Meneliti dan menelaah RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP IFG mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;

c. Establishing Holding Members and/or joint ventures;
d. Releasing capital participation in Holding Members and/or joint venture companies, except for business activities as referred to in letter c;
e. Conducting merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution of Holding Members and/or joint ventures;
f. Binding IFG as guarantor (borg or avalist);
g. Entering into cooperation with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a value or period exceeding the stipulation of the GMS;
h. No further collection of bad debts that have been written off;
i. Disposing and writing off IFG's fixed assets with a typical economic life in the industry of more than 5 (five) years which must be approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna;
j. Establishing IFG's organizational blue print;
k. Establishing and changing the IFG logo;
l. Performing other actions and actions as referred to in letter h that have not been stipulated in the RKAP;
m. Formulating policies, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to IFG that may impact IFG;
n. Fixed and routine IFG expenses for policies, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to IFG;
o. Proposing IFG representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners at Holding Members and/or joint ventures that make significant contributions to IFG, and/or have strategic value as determined by the GMS;
p. Making long-term investments and financing;
q. Issuing bonds and other debt securities by IFG; and

9. Conduct other supervisory authority as long as it does not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

Obligations of the Board of Commissioners

As part of the Board of Directors' supervisory and advisory functions, there are a number of obligations for which the Board of Directors is responsible, namely:

1. Providing advice to the Board of Directors in performing the management of IFG;
2. Examining and reviewing the Long-Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors, and provide opinions and suggestions to the GMS on IFG's RJPP and RKAP regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP;

3. Mengikuti perkembangan kegiatan IFG, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting dan/atau strategis bagi pengurusan IFG, serta melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja IFG;
4. Memberikan persetujuan atas Pedoman Strategis, Kebijakan dan Prosedur IFG, serta memastikan pelaksanaan tanggung jawab Direksi atas penerapannya;
5. Memberikan persetujuan atas transaksi-transaksi material dengan limit-limit tertentu sesuai yang ditetapkan kebijakan IFG;
6. Memberikan persetujuan atas kelebihan penggunaan anggaran dan/atau penggunaan anggaran di luar rencana yang ditetapkan;
7. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala SKAI dan Sekretaris Perusahaan;
8. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
9. Meneliti, menelaah dan memberikan saran atas gejala menurunnya kinerja IFG kepada Direksi, untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja IFG, dan pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja IFG;
10. Menetapkan kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris;
11. Meneliti dan menelaah laporan berkala, laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan dan memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta. Memberikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS;
12. Memastikan pelaksanaan rapat/forum komunikasi secara regular berkenaan dengan evaluasi efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
14. Menandatangani kontrak manajemen tahunan yang memuat target kinerja Direksi secara kolegial, khusus kontrak manajemen tahunan memuat target kinerja Direksi secara individu ditandatangani oleh Komisaris Utama.

Hak Dewan Komisaris

Dalam Melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berhak atas hal-hal berikut:

1. Menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
2. Menerima penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha,

3. Following the development of IFG activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important and/or strategic for the management of IFG, and report immediately to the GMS if there are symptoms of a decline in IFG's performance;
4. Approving the Strategic Guidelines, Policies and Procedures of IFG, and ensure the implementation of the Board of Directors' responsibility for their implementation;
5. Approving material transactions with certain limits as determined by IFG policy;
6. Approving the excess use of budget and/or the use of budget outside the established plan;
7. Approving the appointment of the Head of Internal Audit and Corporate Secretary;
8. proposing a Public Accountant to the GMS;
9. Researching, reviewing and providing advice on symptoms of declining IFG performance to the Board of Directors, to fix problems that have an impact on the decline in IFG performance, and reporting to the GMS if there are symptoms of declining IFG performance;
10. Establishing a policy for measuring and assessing the performance of the Board of Commissioners, evaluating the performance achievements of the Board of Commissioners and outlined in the minutes of the Board of Commissioners meeting;
11. Examining and reviewing periodic reports, quarterly reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report and providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the annual report, if requested. Providing a report on the implementation of supervisory duties that have been carried out during the fiscal year to the GMS;
12. Ensuring the implementation of regular meetings/communication forums regarding the evaluation of the effectiveness of the implementation of governance, risk management and compliance;
13. Performing other obligations in the context of supervisory and advisory duties as long as they do not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions; and
14. Signing the annual management contract containing the performance targets of the Board of Directors collegially, specifically the annual management contract containing the performance targets of the Board of Directors individually signed by the President Commissioner

Rights of the Board of Commissioners

In performing its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners shall have the following rights:

1. Receive income in accordance with the provisions stipulated by the GMS with due observance of laws and regulations;
2. Receive income in the form of salary or honorarium, allowances, and facilities that are fixed by considering business scale factors, business complexity factors,

faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menerima tantiem/insentif kinerja/LTI yang bersifat variabel (merit rating) dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan;
4. Dalam hal perhitungan gaji atau honorarium menyebabkan gaji atau honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya maka gaji atau honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan gaji atau honorarium tahun sebelumnya; dan
5. Mendapatkan tantiem atas prestasi kerja setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila IFG memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja IFG walaupun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya. Pemberian tantiem diberikan apabila telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun yang bersangkutan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan peran pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi diwujudkan melalui pemenuhan tanggung jawab yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian IFG apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas kebijakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil kebijakan atau memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
4. Anggota Dewan Komisaris menjaga kepentingan IFG dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
5. Menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diangkat, yang paling kurang memuat:
   a. Landasan hukum;
   b. Deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;

inflation rates, conditions and financial capabilities of the company, and other relevant factors, and must not conflict with laws and regulations;

3. Receive bonus/performance incentive/LTI that is variable (merit rating) by considering performance factors and the company's financial capability, as well as other relevant factors;
4. In the event that the calculation of salary or honorarium causes the salary or honorarium to be lower than the previous year, the salary or honorarium used for the person concerned may be set equal to the salary or honorarium of the previous year; and
5. Receive Bonus for work performance every year, the amount of which is determined by the GMS if IFG earns a profit, or it will be given to the Board of Directors and Board of Commissioners if there is an improvement in IFG's performance even though it still experiencing losses in the relevant fiscal year or accumulated losses from the previous fiscal year. Bonuses is given if it has been budgeted and calculated as a cost in the RKAP for the year concerned.

Responsibility of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners performs its supervisory function and advisory role to the Board of Directors by fulfilling responsibilities that include the following:

1. Each member of the BOC shall be personally liable for the loss of IFG if he/she is guilty or negligent in the performance of his/her duties;
2. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners, the responsibility applies jointly and severally to each member of the Board of Commissioners;
3. Members of the Board of Commissioners shall not be liable for losses if he/she can prove:
   a. The loss is not due to his/her fault or negligence;
   b. Has supervised in good faith, responsibly and prudently for the benefit of and in accordance with the aims and objectives of IFG;
   c. Has no conflict of interest either directly or indirectly on supervisory policies that result in losses; and
   d. Has taken measures or provided advice to the Board of Directors to prevent the incurrence or continuation of such losses.
4. Members of the Board of Commissioners safeguard the interests of IFG with due regard to the interests of the Shareholders and are accountable to the GMS;
5. Prepare guidelines that bind each member of the Board of Commissioners no later than 60 (sixty) days after being appointed, which at least contains:
   a. Legal Foundation;
   b. Description of Duties, Responsibilities, and Authorities;

c. Nilai-nilai;
d. Waktu kerja;
e. Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat, dan Risalah Rapat; dan
f. Pelaporan dan pertanggungjawabannya;

6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

7. Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, termasuk kebijakan strategis;
8. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal , dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
9. Mengawasi pelaksanaan pemberian fasilitas, tunjangan, dan biaya operasional pada anggota Direksi perusahaan;

10. Melaksanakan pengawasan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam lingkup IFG yang mencakup:
    a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko (termasuk *risk appetite and risk tolerance* sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko);
    b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
    c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
    d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko, komite audit dan komite lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
    f. Memastikan fungsi internal audit bekerja secara independen dan efektif; dan
    g. Menerapkan strategi *anti-fraud* dan mengawasi pelaksanaannya;
11. Khusus dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal , Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
    a. Melakukan pengawasan bahwa Direksi telah menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien;
    b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
    c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit; dan
    d. Dewan Komisaris memastikan Direksi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan auditor internal , auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan Otoritas, dan/atau Lembaga negara lain yang berwenang terhadap IFG.

c. Values;
d. Working hours;
e. Meeting policies, including meeting attendance policies, and meeting minutes; and
f. Reporting and accountability;

6. The Board of Commissioners/Supervisory Board must oversee and ensure that the implementation of Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably;
7. Members of the Board of Commissioners shall direct, supervise, and evaluate the implementation of strategic policies, including strategic policies;
8. The Board of Commissioners and the Board of Directors must ensure that the External Auditor, internal auditors, and the Audit Committee, and other committees if any, have access to accounting records, supporting data, and information about SOEs, to the extent necessary to conduct their duties;
9. Supervise the implementation of the provision of facilities, allowances, and operational costs to the Company's Board of Directors;
10. Supervise the implementation of risk management and internal control within the scope of IFG which includes:
    a. Approving and evaluating the risk management policy (including risk appetite and risk tolerance as an integral part of the risk management policy);
    b. Evaluating the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management policies;
    c. evaluating and deciding on the Board of Directors' requests relating to transactions and risk limits that require the approval of the Board of Commissioners;
    d. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the risk management committee, audit committee and other committees in accordance with applicable regulations;
    e. Reviewing the effectiveness and efficiency of the internal control system at least once a year;
    f. Ensuring that the internal audit function works independently and effectively; and
    g. Implementing an anti-fraud strategy and monitoring its implementation;
11. Specifically in the implementation of supervision of the internal control system, the Board of Commissioners is also responsible for:
    a. Supervising that the Board of Directors has established and maintained an adequate, effective and efficient internal control system;
    b. Reviewing the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from the Internal Audit Work Unit at least once a year;
    c. Appointing an independent external quality controller to review the performance of the Internal Audit Unit, taking into account the recommendations of the audit committee; and
    d. The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors conducts follow-up on the findings of internal auditors, external auditors, the results of OJK and Authority supervision, and/or other authorized state institutions against IFG.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen

1. Mengoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
   a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi Satuan Pengawas Intern; dan
   b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi kesekretariatan.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Bisnis IFG sebagai berikut:
   a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis pasar modal dan investasi;
   b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi umum dan penjaminan;
   c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi jiwa;
   d. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *special liability management*;
   e. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *merger and acquisition* dan *partnership*; dan
   f. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait strategi digital dan pengembangan bisnis.
4. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Masyita Crystallin sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Bisnis IFG sebagai berikut:
   a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis pasar modal dan investasi;
   b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi umum dan penjaminan;
   c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait bisnis asuransi jiwa;
   d. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *special liability management*;
   e. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait *merger and acquisition* dan *partnership*; dan
   f. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait strategi digital dan pengembangan bisnis.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia IFG sebagai berikut:
   a. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait sumber daya manusia;
   b. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pembelajaran dan budaya perusahaan
   c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait hukum; dan
   d. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengadaan dan pengelolaan aset.

DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Fauzi Ichsan as President Commissioner/ Independent Commissioner

1. Coordinate the duties and functions of the Board of Commissioners.
2. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Main Directorate as follows:
   a. performing supervision and providing advice related to the function of the Internal Supervisory Unit; and
   b. performing supervision and providing advice related to secretarial functions
3. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Business Directorate as follows:
   a. supervising and advising on capital market and investment business;
   b. supervising and advising on the general insurance and guarantee business;
   c. supervising and advising on the life insurance business;
   d. supervising and advising on special liability management;
   e. supervising and advising on mergers and acquisitions and partnerships; and
   f. supervising and advising on digital strategy and business development.
4. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.

Masyita Crystallin as Commissioner

1. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Business Directorate as follows:
   a. supervising and advising on capital market and investment business;
   b. supervising and advising on the general insurance and guarantee business;
   c. supervising and advising on the life insurance business;
   d. supervising and advising on special liability management;
   e. supervising and advising on mergers and acquisitions and partnerships; and
   f. supervising and advising on digital strategy and business development.
2. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Human Capital Directorate as follows:
   a. supervising and advising on human resources/ human capital;
   b. supervising and advising on learning and corporate culture
   c. supervising and advising on law; and
   d. supervising and advising on procurement and asset management.

3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Sumiyati sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi Satuan Pengawas Internal; dan
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait fungsi kesekretariatan.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Keuangan IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait keuangan;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait akuntansi dan pelaporan; dan
   c. Pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen portofolio investasi dan Anggota *Holding*.
3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Nasrudin sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Wakil Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait perencanaan; dan
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait teknologi informasi.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Teknik IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aktuaria; dan
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait optimasi operasional asuransi.
3. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Hotbonar Sinaga sebagai Komisaris Independen

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Teknik IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aktuaria; dan
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait optimasi operasional asuransi.

3. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
4. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

Sumiyati as Commissioner

1. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Main Directorate as follows:
   a. Performing supervision and providing advice related to the function of the Internal Audit Unit; and
   b. Performing supervision and providing advice related to secretarial functions
2. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Finance Directorate as follows:
   a. Supervising and advising on finance;
   b. Supervising and advising on accounting and reporting; and
   c. Supervising and advising on the management of investment portfolios and Holding Members.
3. Carry out efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
4. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

Nasrudin as Commissioner

1. Perform supervisory duties and functions related to the functions of the Deputy IFG Main Directorate as follows:
   a. Supervising and advising on risk management, compliance, and policy;
   b. Supervising and advising on planning; and
   c. Supervising and providing advice related to information technology.
2. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Technical Directorate as follows:
   a. Carry out actuarial-related supervision and advice; and
   b. Supervising and advising on the optimization of insurance operations.
3. Perform efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
4. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

Hotbonar Sinaga as Independent Commissioner

1. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Technical Directorate as follows:
   a. Carry out actuarial-related supervision and advice; and
   b. Supervising and advising on the optimization of insurance operations.

2. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
3. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

Wahyu Setyawan sebagai Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Wakil Direktorat Utama IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait perencanaan; dan
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait teknologi informasi.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Sumber Daya Manusia IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait sumber daya manusia;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pembelajaran dan budaya perusahaan;
   c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait hukum; dan
   d. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengadaan dan pengelolaan aset.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berkaitan dengan fungsi Direktorat Keuangan IFG sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait keuangan;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terkait akuntansi dan pelaporan; dan
   c. Pengawasan dan pemberian nasihat terkait manajemen portofolio investasi dan anak perusahaan.
4. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.
5. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

PELAKSANAAN TUGAS, PERSETUJUAN, DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menunaikan fungsi pengelolaan dan pengawasan terhadap keberlangsungan operasional Perusahaan dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, serta rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal periode. Penunaian fungsi tersebut diselenggarakan melalui berbagai mekanisme kelembagaan, antara lain Rapat Dewan Komisaris, forum koordinasi bersama Direksi, serta rapat dan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan bersama komite-komite di bawah naungan Dewan Komisaris.

2. Perform efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
3. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

Wahyu Setyawan as Commissioner

1. Perform supervisory duties and functions related to the functions of the Deputy IFG Main Directorate as follows:
   a. Supervising and advising on risk management, compliance, and policy;
   b. Supervising and advising on planning; and
   c. Supervising and providing advice related to information technology.
2. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Human Capital Directorate as follows:
   a. Supervising and advising on human resources/ human capital;
   b. Supervising and advising on learning and corporate culture
   c. Supervising and advising on law; and
   d. Supervising and advising on procurement and asset management.
3. Carry out supervisory duties and functions related to the functions of the IFG Finance Directorate as follows:
   a. Supervising and advising on finance;
   b. Supervising and advising on accounting and reporting; and
   c. Supervising and advising on the management of investment portfolios and subsidiaries.
4. Perform efforts, activities and other work necessary for the interests of the company as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.
5. Report to the President Commissioner all efforts, work and activities.

IMPLEMENTATION OF DUTIES, APPROVALS, AND RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners implemented its supervisory responsibilities over the Company's operations in accordance with the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the work plan established at the beginning of the year. These responsibilities were exercised through various governance mechanisms, including meetings of the Board of Commissioners, coordination meetings with the Board of Directors, as well as meetings and evaluation activities conducted together with the committees under the Board of Commissioners.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris telah menyampaikan persetujuan, tanggapan, dan rekomendasi kepada Pemegang Saham maupun Direksi sebagai wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan dan peran konsultatif yang diembannya. Substansi persetujuan, tanggapan, dan rekomendasi dimaksud mencakup, hal-hal berikut:

1. Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyelesaian Tanda Minat Aset Tanah dan Bangunan Cilandak kepada Konsorsium Karya dengan Mekanisme Pengembalian Tanda Minat dalam Rangka Penyelesaian Transaksi.
2. Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
3. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Usulan Pengalihtugasan Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia.
4. Tanggapan atas Pengusulan Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris PT Bahana Sekuritas.
5. Tanggapan Dewan Komisaris terkait Pengajuan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.
6. Penilaian Direksi PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
7. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Usulan Calon Direksi PT Asuransi Jiwa IFG.
8. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pengkinian Rencana Jangka Panjang PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2025-2029.
9. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
10. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kinerja PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (*Unaudited*).
11. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Usulan Calon Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia.
12. Tanggapan atas Usulan Top 20% *Talent* BOD-1/ *Selected Talent* IFG Tahun 2025.
13. Penyampaian Top 20% *Talent* BOD-1/*Selected Talent* IFG Tahun 2025 dalam rangka *Updating Talent Pool*.
14. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Pemberian Limit Kewenangan Pengambilan Keputusan Pendayagunaan Aset Tanah dan Bangunan.
15. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penambahan dan Pelepasan Penyertaan Modal atas PT Bahana Mitra Investa.
16. Penunjukan Lembaga Pemeringkat Perusahaan Tahun Buku 2024.
17. Pelaksanaan Audit Forensik Terhadap PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Nasional Reasuransi Indonesia.

Furthermore, the Board of Commissioners provided approvals, comments, and recommendations to the Shareholders and the Board of Directors as part of the execution of its supervisory and advisory functions. These approvals, comments, and recommendations include the following:

1. Comments of the Board of Commissioners on the Settlement of the Expression of Interest for the Cilandak Land and Building Assets with the Karya Consortium through the Refund of the Expression of Interest Deposit as Part of the Transaction Settlement.
2. Comments of the Board of Commissioners on the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
3. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Proposed Reassignment of a Member of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia.
4. Comments on the Proposed Temporary Extension of the Term of Office of a Member of the Board of Commissioners of PT Bahana Sekuritas.
5. Comments of the Board of Commissioners regarding the Proposed Additional State Equity Participation into PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sourced from the 2025 State Budget.
6. Performance Evaluation of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
7. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Proposed Candidates for the Board of Directors of PT Asuransi Jiwa IFG.
8. Comments of the Board of Commissioners on the Proposed Update to the 2025–2029 Long-Term Plan of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
9. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Proposed Dismissal and Appointment of the Corporate Secretary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
10. Comments of the Board of Commissioners on the Performance Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) through the Fourth Quarter of 2024 (Unaudited).
11. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Proposed Candidates for the Board of Directors of PT Asuransi Jasa Indonesia.
12. Comments on the Proposed Top 20% BOD-1 Talent/ Selected Talent IFG 2025.
13. Submission of the Top 20% BOD-1 Talent/Selected Talent IFG 2025 for the Purpose of Updating the Talent Pool.
14. Comments of the Board of Commissioners on the Proposed Delegation of Decision-Making Authority Limits for the Utilization of Land and Building Assets.
15. Comments of the Board of Commissioners on the Proposed Increase and Divestment of Equity Investment in PT Bahana Mitra Investa.
16. Appointment of a Corporate Rating Agency for Fiscal Year 2024.
17. Implementation of a Forensic Audit of PT Asuransi Kredit Indonesia and PT Nasional Reasuransi Indonesia.

18. Saran Peningkatan Efektivitas Kegiatan Operasional di Lingkup PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

19. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Triwulan I tahun 2025 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
20. Pengadaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2025.

21. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024.

22. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024.
23. Usulan Agenda Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
24. Persetujuan Permintaan Proses Pengadaan KAP yang akan Melakukan Audit Umum Tahun Buku 2025.

25. Evaluasi KAP atas Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2024.

26. Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2025 dan Tantiem Kinerja Tahun 2024.

27. Tanggapan atas Usulan Pengalihtugasan Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia.

28. Tanggapan atas Usulan Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia.
29. Permohonan Arahan atas Usulan Pencairan Tantiem yang Ditangguhkan Tahap 1 bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas Tantiem Tahun Kinerja 2022.

30. Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia.

31. Tanggapan atas Pengajuan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang bersumber dari APBN Tahun 2026.
32. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Triwulan II tahun 2025 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
33. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Pelaksanaan Penugasan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Dalam Rangka Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) per 30 Juni 2025.
34. Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Umum Tahun 2025.
35. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Laporan Keuangan Tahun 2025.
36. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Perubahan Usulan Calon Anggota Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia.
37. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Usulan Calon Direksi PT Asuransi Jiwa IFG.

38. Pengisian Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Lingkup Indonesia Financial Group (IFG).

18. Recommendations to Improve the Effectiveness of Operational Activities within PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
19. Comments of the Board of Commissioners on the First Quarter 2025 Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
20. Procurement of Public Accounting Firm Services for 2025.
21. Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2024.
22. Comments of the Board of Commissioners on the 2024 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
23. Proposed Agenda Items for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
24. Approval of the Procurement Process Request for the Public Accounting Firm to Conduct the 2025 General Audit.
25. Evaluation of the Public Accounting Firm's Performance in Conducting the 2024 Audit.
26. Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for 2025 and Performance Bonuses for 2024.
27. Comments on the Proposed Reassignment of a Member of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia.
28. Comments on the Proposed Reassignment and Appointment of a Member of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia.
29. Request for Direction on the Proposed Disbursement of the First Phase of Deferred Performance Bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners in Respect of the 2022 Performance Year.
30. Comments on the Proposed Reappointment of a Member of the Board of Directors of PT Asuransi Kredit Indonesia.
31. Comments on the Proposed Additional State Equity Participation into PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sourced from the 2026 State Budget.
32. Comments of the Board of Commissioners on the Second Quarter 2025 Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
33. Comments of the Board of Commissioners on the Report on PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)'s Assignment in Support of the Financial Restructuring of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as of June 30, 2025.
34. Proposal for the Appointment of the Public Accounting Firm to Conduct the 2025 Statutory Audit.
35. Appointment of the Public Accounting Firm to Conduct the 2025 Financial Statement Audit.
36. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Revised Proposed Candidate for the Board of Directors of PT Asuransi Kredit Indonesia.
37. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Proposed Candidates for the Board of Directors of PT Asuransi Jiwa IFG.
38. Filling of Board of Directors and Board of Commissioners Positions within Indonesia Financial Group (IFG).

39. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Usulan Calon Direktur Utama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
40. Tanggapan Dewan Komisaris atas *Draft* Pertama Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
41. Penyampaian Tinjauan Dewan Komisaris atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT BPUI (Persero) Tahun 2025.
42. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Perubahan Usulan Calon Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia.
43. Persetujuan Atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
44. Tanggapan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) atas Usulan Usulan Pengangkatan Kembali Komisaris PT Bahana TCW Investment Management.
45. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Triwulan III tahun 2025 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
46. Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian *Quality Assurance Improvement Program* (QAIP) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Tahun 2025.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS BARU

IFG menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini dirancang untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai struktur organisasi, proses bisnis, serta dinamika operasional Perusahaan, dengan penekanan khusus pada aspek-aspek pengawasan yang menjadi lingkup tanggung jawab Dewan Komisaris, sehingga anggota yang baru menjabat dapat segera berintegrasi secara efektif dengan organ Perusahaan lainnya.

Pada tahun 2025, IFG tidak menyelenggarakan program orientasi dimaksud dikarenakan tidak terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris sepanjang periode berjalan. Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur oleh IFG melalui ketentuan kriteria dan prosedur sebagai berikut:

39. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Proposed Candidate for President Director of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
40. Comments of the Board of Commissioners on the First Draft of the Company's 2026 Work Plan and Budget (RKAP) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
41. Submission of the Board of Commissioners' Review of the Anti-Bribery Management System of PT BPUI (Persero) for 2025.
42. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Revised Proposed Candidate for the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia.
43. Approval of the Proposed Organizational Structure Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
44. Comments of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) on the Proposed Reappointment of a Commissioner of PT Bahana TCW Investment Management.
45. Comments of the Board of Commissioners on the Third Quarter 2025 Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
46. Procurement of Quality Assurance Improvement Program (QAIP) Consulting Services for PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in 2025.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

IFG conducts an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners. This program is designed to build a comprehensive understanding of the Company's organizational structure, business processes, and operational dynamics, with a special emphasis on the supervisory aspects that are the responsibility of the Board of Commissioners, so that newly appointed members can quickly and effectively integrate with the Company's other organs.

In 2025, IFG did not hold this orientation program because no new members were added to the Board of Commissioners during that period. Consequently, all existing members of the Board of Commissioners already possess sufficient understanding and readiness to perform their supervisory functions optimally.

CRITERIA AND PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The procedures for the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are regulated by IFG through the following criteria and procedures:

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan Keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
6. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan POJK yang berlaku.
7. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Adalah sebagai berikut:
   a. Tidak dapat Melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. Tidak Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau keuangan negara;
   d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan;
   e. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau keuangan negara;
   f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
   g. Mengundurkan diri.
3. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS/Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan perseroan.

Appointment of Members of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, and the GMS Resolution must be approved by the Seri A Dwiwarna Shareholders.
2. The appointment of members of the Board of Commissioners must fulfill the requirements set by technical agencies based on laws and regulations.
3. The appointment of members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors.
4. Members of the Board of Commissioners are appointed from candidates proposed by Seri A Dwiwarna Shareholders and the nomination is binding for the GMS.
5. Newly appointed members of the Board of Commissioners must obtain approval from the Financial Services Authority (OJK) before conducting their actions, duties, and functions as Members of the Board of Commissioners.
6. OJK conducts a fit and proper test for the Board of Commissioners in accordance with the applicable Financial Services Authority Regulation (POJK).
7. Before being appointed as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Commissioners must sign a statement letter resigning from other positions that are prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Commissioners as of the time he/she is appointed as a member of the Board of Commissioners.

Dismissal of Members of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on the Minister's decision/GMS Resolutions by stating the reasons.
2. The reasons for the dismissal of a member of the Board of Commissioners as referred to in number 1 (one) are as follows:
   a. Unable to perform his/her duties properly;
   b. Not implementing the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the articles of association;
   c. Involved in actions that harm the company and/or state finances;
   d. Conduct actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of the company's Board of Commissioners;
   e. Has been named as a suspect or defendant by the competent authority in actions that harm the company and/or state finances;
   f. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force; or
   g. Resigned.
3. In addition to the reasons for dismissal of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the GMS/Minister based on other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the interests and objectives of the company.

4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
5. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri ini disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diinformasikan mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
7. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan IFG dan dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
8. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib Melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menjalankan tugasnya, dengan memastikan bahwa tidak terdapat keterikatan terhadap pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan bagi Perusahaan. Kepentingan Perusahaan wajib dikedepankan di atas kepentingan pribadi, dan setiap bentuk konflik kepentingan dari pihak manapun harus dihindari, termasuk yang bersumber dari hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi maupun Dewan Komisaris, utamanya dalam konteks pengambilan keputusan bisnis dan pelaksanaan aksi korporasi. Ketentuan mengenai prinsip profesionalisme ini telah diatur secara tegas dan menjadi bagian integral dari *Board Manual* Perusahaan.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, IFG menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris yang ditujukan untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap dinamika dan kebutuhan Perseroan. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris selama tahun 2025 disajikan pada bagian berikut:

4. The plan to dismiss a member of the Board of Commissioners shall be notified to the member of the Board of Commissioners concerned verbally or in writing by the Shareholders.
5. The decision to dismiss a member of the Board of Commissioners for reasons as referred to in point 2 (two), is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself/herself.
6. In the event that the dismissal is implemented outside the GMS forum, the defense shall be submitted in writing to the shareholders within 14 (fourteen) days as of the time the member of the Board of Commissioners concerned is informed of the plan to dismiss the member of the Board of Commissioners.
7. Dismissal for reasons of involvement in actions that are detrimental to IFG and found guilty by a court decision that has permanent legal force, is a dishonorable dismissal.

8. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Commissioners concerned shall perform his/her duties accordingly.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners is obligated to consistently uphold the principle of independence in performing their duties, by ensuring that there are no ties to parties that could potentially create a conflict of interest for the Company. The Company's interests must take precedence over personal interests, and any form of conflict of interest from any party must be avoided, including those arising from family relationships with fellow members of the Board of Directors or the Board of Commissioners, particularly in the context of business decision-making and the implementation of corporate actions. Provisions regarding this principle of professionalism have been clearly stipulated and form an integral part of the Company's Board Manual.

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF COMMISSIONER

To strengthen the effectiveness of its oversight functions, IFG conducts various competency development programs for the Board of Commissioners, designed to broaden their perspectives and deepen their understanding of the Company's dynamics and needs. Information regarding the implementation of training and competency development activities for the Board of Commissioners during 2025 is presented in the following section:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Fauzi Ichsan	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	26 – 27 November 2025 November 26– 27, 2025	IFG Corporate University
Fauzi Ichsan	Non Pelatihan Non-Training	IIA *Conference* 2025	27 – 28 Agustus 2025 August 27 – 28, 2025	IIA Indonesia
Fauzi Ichsan	Pelatihan Training	Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management Workshop Braincamp 1: Thinking for Human	20 – 21 November 2025 November 20– 21, 2025	IFG Corporate University
Masyita Crystallin	Pelatihan Training		26 April, 2 – 3 Mei 2025 April 26, May 2-3, 2025	Wakeupcall.id
Masyita Crystallin	Non Pelatihan Non-Training	IIA *Conference* 2025	27 – 28 Agustus 2025 August 27 – 28, 2025	IIA Indonesia
Nasrudin	Pelatihan Training	*Workshop Fundamental of Risk Management*	14 – 15 Juli 2025 July 14 – 15, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Nasrudin	Non Pelatihan Non-Training	Konferensi Audit Internal 2025 Internal Audit Conference 2025	2 – 4 Juli 2025 July 2 – 4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Nasrudin	Non Pelatihan Non-Training	GRC *Summit* 2025	21 – 22 Agustus 2025 August 21 – 22, 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Nasrudin	Non Pelatihan Non-Training	IIA *Conference* 2025	27 – 28 Agustus 2025 August 27 – 28, 2025	IIA Indonesia
Nasrudin	Pelatihan Training	*Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management*	20 – 21 November 2025 November 20– 21, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Nasrudin	Non Pelatihan Non-Training	*Risk Beyond* 2025	4 – 5 Desember 2025 December 4 – 5, 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Nasrudin	Sertifikasi Certification	*Professional Recognition Program* (PRP) Qualified Internal Auditor	3 – 4 Oktober 2025 October 3 – 4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Nasrudin	Sertifikasi Certification	*Professional Recognition Program* (PRP) Qualified Government Internal Auditor	17 – 18 Oktober 2025 October 17 – 18, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Nasrudin	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	26 – 27 November 2025 November 26– 27, 2025	IFG Corporate University
Sumiyati	Konferensi dan Pelatihan Conference and Training	Konferensi Audit Internal 2025 Internal Audit Conference 2025	2 – 4 Juli 2025 July 2 – 4, 2025	YPIA
Sumiyati	Non Pelatihan Non-Training	GRC *Summit* 2025	21 – 22 Agustus 2025 August 21 – 22, 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Sumiyati	Non Pelatihan Non-Training	IIA *Conference* 2025	27 – 28 Agustus 2025 August 27 – 28, 2025	IIA Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Sumiyati	Pelatihan Training	*Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management*	20 – 21 November 2025 November 20– 21, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Sumiyati	Non Pelatihan Non-Training	*Risk Beyond* 2025	4 – 5 Desember 2025 December 4 – 5, 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Sumiyati	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	26 – 27 November 2025 November 26– 27, 2025	IFG Corporate University

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DAN ORGAN PENDUKUNG DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris memperoleh dukungan dari Sekretaris Dewan Komisaris serta berbagai Komite yang berperan sebagai perangkat penunjang. Evaluasi atas kinerja seluruh organ pendukung tersebut dilaksanakan secara terukur dengan mengacu pada realisasi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekretaris Dewan Komisaris dan masing-masing Komite. Uraian lebih lanjut mengenai mekanisme serta hasil penilaian kinerja organ pendukung Dewan Komisaris disajikan secara komprehensif pada bagian yang membahas Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite dalam bab Governansi Perusahaan ini.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES AND SUPPORTING ORGANS UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In executing its supervisory functions, the Board of Commissioners receives support from the Secretary to the Board of Commissioners and various committees that serve as supporting bodies. The performance of all these supporting organs is evaluated in a measurable manner, based on the achievement of targets set forth in the Annual Work Plan of the Secretary to the Board of Commissioners and each committee. Further details regarding the mechanisms and results of the performance evaluations of the Board of Commissioners' supporting organs are presented comprehensively in the section discussing the Secretary to the Board of Commissioners and the Committees in this Corporate Governance chapter


IFG
NKRI
HARGA MA

KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kepentingan, baik dalam bentuk keterkaitan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, pemegang saham pengendali, maupun entitas lain yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. Sejalan dengan prinsip governansi perusahaan yang baik, Komisaris Independen memiliki peran penting dalam memastikan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan Perusahaan berjalan secara efektif dan akuntabel.

Keberadaan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penunjukan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan yang objektif, independen, serta menjunjung tinggi prinsip *fairness* guna melindungi kepentingan Perusahaan. Dengan tidak adanya pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, Komisaris Independen dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk dalam memberikan pandangan dan pertimbangan yang independen dalam setiap forum rapat.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who have no conflict of interest arising from financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the controlling shareholder, or any other party that could impair their objectivity in performing their duties. In line with the principles of good corporate governance, Independent Commissioners play a vital role in ensuring that the Company's supervisory and monitoring functions are carried out effectively and accountably.

The appointment of Independent Commissioners is governed by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises. Independent Commissioners are appointed to promote objective and independent decision-making while upholding the principle of fairness in safeguarding the interests of the Company. Free from the influence of parties with vested interests, Independent Commissioners are able to perform their supervisory function effectively, including by providing independent views and considerations in meetings of the Board of Commissioners.

KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN TAHUN 2025

Pada tahun buku 2025, IFG memiliki 2 orang Komisaris Independen sebagai bagian dari komposisi Dewan Komisaris. Adapun nama-nama Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fauzi Ichsan, yang diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-400/MBU/12/2020 pada 30 Desember 2020 (masa jabatan berakhir pada tanggal 30 Desember 2025); dan
2. Hotbonar Sinaga, yang diangkat melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-337/MBU/10/2020 pada 20 Oktober 2020 (masa jabatan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2025).

Dari total 6 anggota Dewan Komisaris, porsi Komisaris Independen di IFG mencapai 33,3% dari keseluruhan komposisi. Persentase tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, yang mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari Komisaris Independen.

COMPOSITION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS IN 2025

During fiscal year 2025, IFG had two Independent Commissioners serving as members of the Board of Commissioners: The names of the Independent Commissioners are as follows:

1. Fauzi Ichsan, appointed pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020 (term of office expires on December 30, 2025); and
2. Hotbonar Sinaga, appointed pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020 (term of office expires on October 20, 2025).

Out of a total of six members of the Board of Commissioners, Independent Commissioners represented 33.3% of the Board's composition. This proportion complies with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023, which requires that at least 20% of the members of the Board of Commissioners be Independent Commissioners.

KRITERIA PENENTUAN DAN PEMENUHAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Penetapan kriteria independensi bagi anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar dalam proses pengangkatan Komisaris Independen, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi pada perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja kepada Pemerintah termasuk departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya; dan
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMN.

Dengan memperhatikan pemenuhan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, semua Komisaris Independen IFG dinyatakan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku berdasarkan ketentuan yang mengatur.

CRITERIA FOR DETERMINING AND FULFILLING THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

The independence criteria for members of the Board of Commissioners are established in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises. Based on these provisions, candidates for Independent Commissioner must satisfy the following requirements:

1. Not serve as a member of the Board of Directors of an affiliated company;
2. Not have been employed by the Government, including ministries, government agencies, or the military, during the preceding three (3) years;
3. Not have been employed by the relevant State-Owned Enterprise or its affiliates during the preceding three (3) years;
4. Not have any direct or indirect financial relationship with the relevant State-Owned Enterprise or with any company that provides products or services to the relevant State-Owned Enterprise and its affiliates; and
5. Be free from any interests or business activities that could impair or interfere with the ability of an Independent Commissioner appointed from outside the relevant State-Owned Enterprise to exercise independent judgment and act objectively within the Company.

Based on the fulfillment of all applicable requirements, all Independent Commissioners of IFG have been determined to satisfy the independence criteria prescribed under the applicable regulations.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ Perusahaan yang menjalankan fungsi pengurusan secara kolektif dengan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan Perusahaan. Selain itu, Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Perusahaan, baik dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS sebagai wujud akuntabilitas atas pengelolaan Perusahaan, sejalan dengan penerapan prinsip governansi perusahaan yang baik.

The Board of Directors is the Company's organ responsible for collectively managing the Company and assumes full responsibility for its management in pursuing the Company's objectives and best interests. The Board of Directors is also authorized to act for and on behalf of the Company, both inside and outside the courts, as stipulated in the Articles of Association. In carrying out its duties, the Board of Directors is accountable to the GMS for its performance as part of the Company's commitment to accountability and the implementation of good corporate governance.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi pada tanggal 6 Juli 2023. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Direksi, yang memuat ketentuan mengenai mekanisme kerja serta tahapan aktivitas yang disusun secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Penyusunannya mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham, serta praktik governansi perusahaan yang baik.

Sebagai pedoman operasional, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi senantiasa dilakukan peninjauan secara berkala guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. Dokumen ini mencakup pengaturan atas berbagai aspek sebagai berikut:

1. Peran Direksi dalam Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar perusahaan, serta prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
3. Keterbukaan informasi;
4. Kehadiran dalam rapat perusahaan;
5. Pengelolaan laporan perusahaan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Kegiatan Perusahaan, dan Laporan Tata Kelola Perusahaan; dan
6. Peranan Direksi dalam menyiapkan RKAP serta RJPP.

GUIDELINES AND WORK PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has adopted a Board of Directors' Guidelines and Work Procedures pursuant to the Joint Resolution of the Board of Commissioners and the Board of Directors dated July 6, 2023. The Charter serves as the primary reference for the Board of Directors in conducting its duties. It sets out the Board's working mechanisms and operational procedures in a structured, systematic, practical, and consistently applicable manner. It is developed in accordance with the principles of corporate law, the Company's Articles of Association, prevailing laws and regulations, shareholder directives, and good corporate governance practices.

As an operational guideline, the Board of Directors Guidelines and Work Procedures is reviewed periodically to ensure that it remains aligned with the Company's development and evolving business needs. This guidelines govern several aspects, such as:

1. The role of the Board of Directors in carrying out its duties in good faith;
2. Compliance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the principles of good corporate governance;
3. Information disclosure;
4. Attendance at Company meetings;
5. Preparation and management of the Company's reports, including the Annual Report, Company Activity Report, and Corporate Governance Report; and
6. The role of the Board of Directors in preparing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Corporate Plan (RJPP).

MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

1. Anggota Direksi yang ditetapkan sebelum uji kemampuan dan kepatutan, memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
2. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
4. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila.
   a. Meninggal dunia;
   b. Masa jabatannya berakhir;
   c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
   d. Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Dalam proses penunjukan anggota Direksi, setiap calon yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan materiil, yaitu:
   a. Keahlian;
   b. Integritas;
   c. Kepemimpinan;
   d. Pengalaman;
   e. Jujur;
   f. Perilaku yang baik; dan
   g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan formal, yaitu:
   a. Orang perseorangan;
   b. Mampu Melaksanakan perbuatan hukum;
   c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Memenuhi persyaratan lain yaitu:
   a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota dan/atau anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
   b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;

TERM OF OFFICE FOR BOARD OF DIRECTORS

1. Members of the Board of Directors appointed prior to the fit and proper test shall assume office with effect from the date of their appointment by the GMS or the Minister.
2. The term of office of a member of the Board of Directors is five (5) years and the member may be reappointed for one (1) additional term.
3. The GMS may dismiss any member of the Board of Directors at any time, provided that the reasons for such dismissal are stated.
4. the position of a member of the Board of Directors ends when:
   a. He/she passed away;
   b. His/her term of office ended;
   c. Dismissed by resolution of the GMS; and
   d. No longer satisfying the requirements to serve as a member of the Board of Directors under the Articles of Association and applicable laws and regulations, including restrictions on concurrent positions.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In the appointment of members of the Board of Directors, candidates must fulfill the requirements which include:

1. By fulfilling the following material requirements:
   a. Expertise;
   b. Demonstrate integrity;
   c. Leadership;
   d. Experience;
   e. Honestly;
   f. Good behavior; and
   g. High dedication to advance and develop the Company.
2. Also, fulfilling these formal requirements, such as:
   a. Be an individual;
   b. Have legal capacity to perform legal acts;
   c. Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment; and
   d. Never been a Member of the Board of Directors or Member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing an SOE, subsidiary and/or other business entity to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment.Have not been declared bankrupt within five (5) years prior to the appointment; and
3. Meet other requirements, namely:
   a. Not an official of a political party and/or candidate member and/or member of the House of People's Representatives (DPR), Regional House of Representatives (DPD), Provincial Regional House of People's Representatives and District/ Municipal Regional House of People's Representatives;
   b. Not a candidate for regional head/deputy head and/or a regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head.

c. Tidak menjabat sebagai Direksi pada IFG selama 2 (dua) periode berturut-turut;
d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anggota *Holding* dan/atau badan usaha lainnya;
e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
g. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh IFG.

c. Not serving as Directors of IFG for 2 (two) consecutive periods;
d. Not currently serving as an official at a ministry/ agency, member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board at another SOEs, member of the Board of Directors at another SOEs, member of the Board of Directors at a subsidiary and/or other business entity;
e. Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited to be concurrent with the position of member of the Board of Directors;
f. Have dedication and make full time available to perform their duties, which is stated in a statement from the person concerned;
g. Physically and mentally healthy, i.e. not suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a medical certificate from a hospital; and
h. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and tax payment obligations for the last 2 (two) years.

4. The fulfillment of the requirements as referred to in number 2 above, is evidenced by a statement letter signed by the prospective member of the Board of Directors and the letter is kept by IFG.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI

Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan Direksi Perusahaan. Hingga diterbitkannya laporan tahunan ini, jumlah anggota Direksi tercatat sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri atas 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, 1 (satu) Direktur SDM, 1 (satu) Direktur Teknik yang juga menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Bisnis, serta 1 (satu) Direktur Keuangan. Adapun rincian komposisi dan dasar pengangkatan Direksi Perusahaan disajikan pada tabel berikut.

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout the 2025 fiscal year, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors. As of the publication of this annual report, the Board of Directors consisted of 5 (five) members, comprising 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 1 (one) Director of Human Capital, 1 (one) Technical Director concurrently served as Acting Business Director, and 1 (one) Director of Finance. The details regarding the composition and basis for the appointment of the Company's Board of Directors are presented in the following table.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Term	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama President Director	4 Juni 2021 - RUPS 2026 June 04, 2021 - 2026 GMS	Ke-1 1st	• Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-186/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. • Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. • Appointed as Vice President Director based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-186/MBU/06/2021 dated June 04, 2021. • Appointed as President Director based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Term	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Haru Koesmahargyo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	21 Maret 2023 -RUPS 2028 March 21, 2023 - 2028 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-57/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023. Appointed as Vice President Director based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-57/MBU/03/2023 dated March 21, 2023.
Rizal Ariansyah*	Direktur SDM Director of Human Capital	11 Februari 2025 - RUPS Tahunan ke-5 February 11, 2025 -5th Annual GMS	Ke-2 2nd	• Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020. • Perubahan nomenklatur menjadi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-186/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. • Perubahan nomenklatur menjadi Direktur SDM berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. • Diangkat untuk periode ke-2 sebagai Direktur SDM berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-31/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025. • Appointed as Director of Finance based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020. • The change in nomenclature to Director of Finance, Risk Management, and General Affairs according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, acting as the IFG General Meeting of Shareholders, No. SK-186/MBU/06/2021, dated June 4, 2021. • The change in nomenclature to Director of Human Capital according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, acting as the IFG General Meeting of Shareholders, No. SK-216/MBU/09/2022, dated September 26, 2022. • Appointed to a second term as Director of Capital pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, acting as the General Meeting of Shareholders of IFG, No. SK-31/MBU/02/2025, dated February 10, 2025.
Rianto Ahmadi	Direktur Teknik Technical Director	20 September 2021 – RUPS Tahun 2026 September 20, 2021 - GMS 2026	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Teknik berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG Nomor SK-313/MBU/09/2021 tanggal 20 September 2021. Appointed as Technical Director in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, acting as the General Meeting of Shareholders of IFG, No. SK-313/MBU/09/2021, dated September 20, 2021.
Heru Handayanto	Direktur Keuangan Director of Finance	26 September 2022 - RUPS Tahun 2027 September 26, 2022 -GMS 2027	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG Nomor SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Appointed as Director of Finance based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG Number SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.

*) Pada tahun 2025 masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK yang telah disetujui di tahun 2026.
*) As of 2025, the OJK's Fit and Proper Test was still in progress; it is approved in 2026.

Informasi lengkap mengenai profil seluruh anggota Direksi disajikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Full information regarding the profiles of all members of the Board of Directors is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Setiap calon anggota Direksi diwajibkan untuk terlebih dahulu melalui dan dinyatakan lulus dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi. Mekanisme tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan; dan

2. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

FIT AND PROPER TEST OF THE BOARD OF DIRECTORS

Each candidate for the Board of Directors is required to first complete and pass a fit-and-proper test conducted by the Shareholders before being appointed as a member of the Board of Directors. This mechanism is further explained as follows:

1. The appointment of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders in accordance with the mechanisms and provisions of applicable laws and regulations and is performed through a fit and proper test; and
2. Candidates for the Board of Directors who have passed the fit and proper test are required to sign an Integrity Pact before their appointment as members of the Board of Directors is finalized.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, berikut disampaikan informasi mengenai kepemilikan saham Direksi pada perusahaan lain dengan porsi di atas 5%.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

As a demonstration of transparency in managing potential conflicts of interest within the Company, the following information is provided regarding the Board of Directors' shareholdings in other companies, with a percentage of ownership higher than 5%.

Direksi Board of Directors	**Kepemilikan Saham** Share Ownership
	Perusahaan Lain (>5%) Other Companies (>5%)
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) (President Director)	Nihil None
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) (Director of Human Capital)	
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) (Technical Director)	
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	

Hingga saat ini, IFG belum menetapkan kebijakan kepemilikan saham bagi manajemen (*Management Stock Ownership Program*/MSOP). Selain itu, mengingat saham IFG tidak diperdagangkan di pasar publik, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercatat sebagai pemegang saham Perseroan.

To date, IFG has not established a Management Stock Ownership Program (MSOP). Furthermore, since IFG's shares are not traded on a public market, no member of the Board of Commissioners or the Board of Directors is listed as a shareholder of the Company.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Berikut disajikan keterkaitan kepengurusan para anggota Direksi pada entitas lain sepanjang tahun buku 2025:

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The following table shows the management relationship between members of the Board of Directors and their positions at other entities during the 2025 fiscal year:

Direksi Board of Directors	**Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain** Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As the Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As the Member of the Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Position(s)
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) (President Director)	X	X	X
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	X	X	X
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) (Director of Human Capital)	X	X	X
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) (Technical Director)	√	X	X
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	√	X	X

√ = ada | x = tidak ada
√ = yes | x = no

Adapun keterangan mengenai perangkapan jabatan yang diemban oleh anggota Direksi pada perusahaan lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Information regarding the concurrent positions held by members of the Board of Directors at other companies is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) (President Director)	-
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	-
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) (Director of Human Capital)	-
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) (Technical Director)	• Komisaris PT Bahana Artha Ventura • Komisaris PT Asuransi Jiwa IFG • Commissioner of PT Bahana Artha Ventura • Commissioner of PT Asuransi Jiwa IFG
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	Komisaris PT Bahana Sekuritas Commissioner of PT Bahana Sekuritas

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Pengungkapan hubungan afiliasi Direksi mencakup ada atau tidaknya keterkaitan keluarga maupun keterkaitan finansial antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta hubungan dengan Perusahaan yang berpotensi memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.

Berikut disajikan pengungkapan hubungan afiliasi Direksi selama tahun buku 2025.

AFFILIATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Disclosure of the Board of Directors' affiliations includes whether or not there are family or financial relationships between members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, or shareholders, as well as relationships with the Company that could potentially affect their independence in decision-making.

The following is a disclosure of the Board of Directors' affiliations during the 2025 fiscal year.

Nama dan jabatan Name and Position	**Hubungan Keluarga Dengan** Family Relationship with			**Hubungan Keuangan Dengan**		
	Dewan Komisaris Lainnya Other Member(s) of the Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholder	**Dewan Komisaris Lainnya** Other Member(s) of the Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/ Controlling Shareholder
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) (President Director)	x	x	x	x	x	x
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	x	x	x	x	x	x
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) (Director of Human Capital)	x	x	x	x	x	x
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) (Technical Director)	x	x	x	x	x	x
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	x	x	x	x	x	x

√ = ada hubungan | x = tidak ada hubungan
√ = yes | x = no

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengurusan IFG, Direksi memiliki peran yang mencakup tugas, wewenang, kewajiban, hak, serta tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diuraikan berikut:

Tugas Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tindakan pengurusan Perusahaan yang ditujukan bagi kepentingan IFG, selaras dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, serta berwenang mewakili IFG baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam berbagai urusan dan peristiwa hukum, dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

DUTIES, AUTHORITIES, OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its management functions at IFG, the Board of Directors has a role that includes duties, authorities, obligations, rights, and responsibilities, which are implemented in accordance with applicable regulations, as outlined below:

Duties of the Board of Directors

The Board of Directors is responsible for managing the Company in the best interests of IFG and in accordance with its established purposes and objectives. The Board of Directors is also authorized to represent IFG both inside and outside the courts in all legal matters and proceedings, subject to the limitations set forth in applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan tersebut, Direksi memiliki sejumlah tugas yang antara lain meliputi:

1. Menetapkan visi, misi, budaya, dan strategi IFG;
2. Menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru dan menyelenggarakan program pelatihan/pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi secara berkelanjutan yang direalisasikan sesuai RKAP;
3. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai tata kelola perusahaan;
4. Menghindari terjadinya penyimpangan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada BUMN, Pedoman Umum Tata kelola perusahaan Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya;
5. Melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Melaksanakan kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN;
6. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai program pengendalian gratifikasi;
7. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG mengenai sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan *Whistleblowing System* (WBS);
8. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang pengembangan karier;
9. Memberikan respons terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan IFG, penghematan IFG, pendayagunaan aset dan manfaat lainnya dalam lingkup kewenangan Direksi dengan melakukan identifikasi hal-hal yang memberikan peluang bisnis dan mengambil keputusan (setuju atau tidak setuju) atas usulan tersebut;
10. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan arahan mengenai usulan peluang bisnis disertai dengan studi kelayakan yang memadai;
11. Melaksanakan program/kegiatan IFG sesuai dengan rencana RKAP dengan memperhatikan:
    a. Pengambilan keputusan untuk setiap program/kegiatan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar IFG atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar IFG; dan
    b. Setiap program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, kajian/studi kelayakan, analisis risiko serta menetapkan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.
12. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja IFG sesuai dengan aspirasi pemegang saham yang digunakan sebagai dasar penilaian kontrak manajemen yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan RKAP;

In executing its management function, the Board of Directors is responsible for:

1. Establishing IFG's vision, mission, corporate culture, and strategy;
2. Organizing orientation programs for newly appointed members of the Board of Directors and providing ongoing training and development programs to enhance their competencies, as stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
3. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's corporate governance policies;
4. Preventing deviations from the implementation of corporate governance principles in accordance with the SOE Corporate Governance Guidelines, the Indonesian Code of Good Corporate Governance, and other applicable standards and regulations;
5. Coordinating the administration and management of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) and implementing policies and standard operating procedures (SOPs) to ensure compliance with LHKPN reporting requirements;
6. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's gratuity control policy;
7. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's Whistleblowing System (WBS);
8. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's career development policy;
9. Evaluating proposed business opportunities that have the potential to increase IFG's revenue, generate cost savings, optimize asset utilization, or create other benefits within the authority of the Board of Directors by identifying viable opportunities and determining whether to approve or reject such proposals;
10. Submitting proposed business opportunities, together with adequate feasibility studies, to the Board of Commissioners for guidance;
11. Implementing the Company's programs and activities in accordance with the RKAP, while ensuring that:
    a. decisions relating to each program or activity are made through the appropriate approval mechanisms in accordance with the Articles of Association or the authorities delegated therein; and
    b. any program or activity involving significant investments or borrowings is supported by adequate decision-making based on sufficient information, feasibility studies, risk analysis, and appropriate risk mitigation measures.
12. Striving to achieve IFG's performance targets in line with shareholder aspirations, which serve as the basis for evaluating the Management Contract approved at the GMS approving the RKAP;

13. Menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP untuk jabatan struktural secara berjenjang sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan struktural dilengkapi dengan kontrak kinerja setiap unit/jabatan;
14. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja untuk unit/jabatan (struktural) di dalam organisasi secara berkala, tepat waktu dan berjenjang serta melakukan pembahasan dengan unit/jabatan yang tidak/belum mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan;
15. Melaksanakan penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan secara konsisten sesuai dengan indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan. Hasil penilaian kinerja dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan;
16. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem teknologi informasi;
17. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan;
18. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem pengadaan barang dan jasa IFG;
19. Mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian IFG;
20. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (triwulanan dan tahunan) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi;
21. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang manajemen risiko IFG;
22. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan IFG tentang sistem pengendalian internal IFG untuk mengamankan investasi dan aset IFG serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan;
23. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan SKAI dan auditor eksternal (KAP dan BPK) serta melakukan monitoring tingkat penyelesaian (*progress*) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SKAI dan auditor eksternal pada tahun yang bersangkutan. Hasil tindak lanjut disampaikan kepada Dewan Komisaris;
24. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap mekanisme dan fungsi yang:
    a. Mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan IFG dan seluruh kegiatan IFG sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar IFG; dan

13. Establishing cascading performance targets based on the RKAP for structural positions, taking into account the roles, responsibilities, and capacities of each organizational unit and position, supported by performance contracts for each unit and position;
14. Conducting periodic, timely, and tiered analyses and evaluations of the performance achievements of organizational units and structural positions, and discussing performance gaps with units or positions that fail to achieve their established targets;
15. Conducting employee performance appraisal consistently based on individual performance indicators and established targets, and utilizing the results to support employee development; Performance appraisal results are used for employee development;
16. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's information technology system policy;
17. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's product and service quality improvement policy;
18. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's procurement policy for goods and services;
19. Developing human capital, evaluating employee performance, providing appropriate remuneration, and fostering an effective work environment that supports the achievement of IFG's objectives;
20. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's accounting and financial reporting policy to ensure that quarterly and annual financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), thereby minimizing audit adjustments and audit findings relating to the recognition, measurement, recording, bookkeeping of transactions, and disclosure of accounting policies;
21. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's risk management policy;
22. Consistently implementing and periodically evaluating IFG's internal control system to safeguard the Company's investments and assets, while continuously assessing its effectiveness.
23. Following up on the findings of the Internal Audit Unit (SKAI) and external auditors (Public Accounting Firms (KAP) and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)), and monitoring the progress of corrective actions taken in response to recommendations issued by SKAI and external auditors during the relevant year. The results of such follow-up actions shall be reported to the Board of Commissioners;
24. Consistently implementing and periodically evaluating the mechanisms and functions that:
    a. Control and ensure that IFG's policies, decisions, and business activities comply with applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association; and

b. Memantau dan menjaga kepatuhan IFG terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh IFG dengan pihak ketiga.

25. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan IFG telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utama Direksi, jabatan Direksi di perusahaan lain, termasuk jumlah rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat Direksi maupun rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris) serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan;

26. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;

27. Melakukan TJSL serta memperhatikan kepentingan berbagai pihak (Pemangku Kepentingan), mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral, serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan IFG tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis, dinamis, dan saling menguntungkan dengan masyarakat;

28. Melakukan dan meningkatkan hubungan kerja/kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi IFG dan Pemangku Kepentingan berdasarkan pada kebijakan IFG;

29. Melakukan survei secara sistematis dan berkala untuk mengetahui:
    a. Tingkat kepuasan dan hasil indeks survei kepuasan pelanggan/konsumen; dan
    b. Tingkat kepuasan dan hasil indeks survei kepuasan karyawan.
30. Mewakili IFG baik di dalam maupun di luar pengadilan;
31. Melakukan perencanaan penugasan khusus dan melaporkan pelaksanaan penugasan khusus kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, Menteri dan pemberi penugasan khusus yang dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan GCG dan prinsip paradigma usaha (*business judgment rule*);
32. Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, Komite Audit dan Komite Dewan Komisaris, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai IFG sepanjang diperlukan untuk Melaksanakan tugasnya;
33. Melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelola IFG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi;
34. Melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa (yang berasal dari tim pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh OJK pada saat pemeriksaan berakhir yaitu membahas hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta menandatangani berita acara dengan muatan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut;

b. Monitor and ensure IFG's compliance with all agreements and commitments entered into with third parties;

25. Ensuring that the Company's Annual Report includes information on the identity of each member of the Board of Directors, their main position, directorships held in other companies, the number of meetings attended during the fiscal year (including meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners), as well as the salaries, facilities, and/or other benefits received from the Company; and
26. Complying with applicable laws and regulations and fulfilling the Company's contractual obligations to third parties.
27. Implementing the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program while taking into account the interests of all stakeholders. In conducting this responsibility, the Board of Directors is committed to fulfilling the Company's legal, social, moral, and ethical obligations to the surrounding communities, recognizing that IFG's success depends on maintaining harmonious, dynamic, and mutually beneficial relationships with society;
28. Establishing and strengthening working relationships and strategic partnerships that create added value for IFG and its stakeholders in accordance with the Company's policies;
29. Conducting systematic and periodic surveys to measure:
    a. Customer satisfaction levels and customer satisfaction index results; and
    b. Employee satisfaction levels and employee satisfaction index results;
30. Representing IFG both inside and outside the courts;
31. Planning and implementing special assignments and reporting their implementation to the Minister of Finance, the relevant Technical Minister, the Minister of State-Owned Enterprises, and the assigning authority, while adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the Business Judgment Rule;
32. Ensuring that external auditors, internal auditors, the Audit Committee, and other committees under the Board of Commissioners have access to accounting records, supporting data, and other information relating to IFG, as necessary for the performance of their duties;
33. Protecting and ensuring the security of personal data processed by IFG in accordance with applicable personal data protection laws and regulations; and

34. Meeting with the examination team appointed by the Financial Services Authority (OJK) at the conclusion of an examination to discuss the examination results, follow-up actions, and recommendations, and to sign the official examination report documenting the examination findings, recommendations, and agreed follow-up actions.

Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan Perseroan, Direksi IFG diberikan kewenangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan struktur/susunan organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sesuai dengan kebutuhan IFG dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua tingkat jabatan;
2. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan IFG;
3. Menetapkan dan mengatur mekanisme tertulis untuk menampung dan menyelesaikan keluhan-keluhan pemangku kepentingan secara tuntas;
4. Menetapkan dan mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan IFG (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu terdiri dari pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi dan pengambilan keputusan di luar Rapat Direksi;
5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili IFG di dalam dan di luar pengadilan;
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja IFG baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili IFG di dalam dan di luar pengadilan;
7. Menetapkan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Setelah penetapan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anggota *Holding* Direksi wajib melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
8. Mengangkat dan memberhentikan karyawan IFG berdasarkan peraturan IFG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Mengangkat dan memberhentikan pejabat IFG sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi, kecuali untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan maupun SKAI setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
10. Mengatur ketentuan tentang karyawan IFG termasuk penempatan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan, menyusun rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam IFG serta menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi karyawan IFG berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Dalam hal penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu RUPS;

Authorities of the Board of Directors

In executing its responsibility for managing the Company, the Board of Directors has following authorities:

1. Establishing an organizational structure designed to ensure the achievement of the Company's objectives and aligned with IFG's operational needs, supported by clearly defined duties and responsibilities for all organizational levels;
2. Establish policies that are deemed appropriate in the management of IFG;
3. Establishing and implementing formal mechanisms for receiving and resolving stakeholder complaints in a comprehensive manner;
4. Establishing and implementing decision-making mechanisms for corporate actions in accordance with applicable laws and regulations and in a timely manner, including decisions made through meetings of the Board of Directors and by written resolutions outside Board meetings;
5. Delegating the authority of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board or represent IFG both inside and outside the courts;
6. Delegating the authority of the Board of Directors to one or more IFG employees, acting individually or jointly, or to other parties, to represent IFG both inside and outside the courts;
7. Nominating candidates for the Boards of Directors and Boards of Commissioners of Holding Members in accordance with the guidelines established by the Minister of State-Owned Enterprises. Following such nominations, the Board of Directors shall report them to the Board of Commissioners;
8. Appointing and dismissing IFG employees in accordance with the Company's regulations and applicable laws and regulations;
9. Appointing and dismissing IFG officers up to the organizational level determined by the Board of Directors, except for the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit (SKAI), which require the prior approval of the Board of Commissioners;
10. Establishing policies governing IFG employees, including employee placement at all organizational levels based on job specifications, developing succession plans for all positions within IFG, and determining salaries, pensions or retirement benefits, and other employee compensation in accordance with applicable laws and regulations;
11. Obtaining prior approval from the GMS before determining salaries, pensions or retirement benefits, and other employee compensation that exceed the minimum requirements prescribed by applicable laws and regulations;

12. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan IFG, mengikat IFG dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan IFG, serta mewakili IFG di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar IFG dan/atau keputusan RUPS;
13. Menyampaikan usulan perubahan anggaran dasar IFG untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
14. Menetapkan kegiatan kerja sama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur dalam kebijakan terkait keuangan;
15. Menetapkan kebijakan keuangan yang secara periodik perlu ditinjau oleh Direksi misalnya *cash management*, *expenditure authority* dan *payment authority*;
16. Menyampaikan usulan tentang insentif kinerja kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS mengenai penetapan besaran dan jenis penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai;
17. Menetapkan kebijakan pada Anggota *Holding* termasuk Anggota Holding eks BUMN agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada IFG dalam bidang sebagai berikut:
    a. Bidang akuntansi dan keuangan;
    b. Bidang pengembangan dan investasi;
    c. Bidang aktuaria;
    d. Bidang operasional (termasuk pengadaan barang dan/atau jasa);
    e. Bidang pemasaran dan produk;
    f. Bidang informasi teknologi;
    g. Bidang sumber daya manusia;
    h. Bidang manajemen risiko dan pengawasan internal ;
    i. Bidang hukum; dan
    j. Bidang PKBL;
18. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan Anggaran Dasar dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut.

Kewajiban Direksi

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengelolaan Perseroan, Direksi IFG terikat pada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan IFG sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Mengikuti program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru yang diselenggarakan oleh IFG;
3. Mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan;

12. Performing all actions and other actions regarding the management and ownership of IFG assets, bind IFG with other parties and/or other parties with IFG, and represent IFG inside and outside the court on all things and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, IFG articles of association, and/or GMS;
13. Submitting proposals to amend the Articles of Association for approval by the GMS;
14. Approving cooperation arrangements or contracts involving contract values or the acquisition or utilization of assets exceeding the authority of a Director, as provided under the Company's financial policies;
15. Establishing financial policies that are subject to periodic review by the Board of Directors, including cash management, expenditure authority, and payment authority;
16. Submitting proposals regarding performance incentives to the Board of Commissioners for approval before presenting them to the GMS for approval of the amount and types of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Proposed performance incentives for the Board of Directors shall reflect the performance achieved;
17. Establishing policies applicable to Holding Members, including former SOE Holding Members, to ensure alignment with IFG's prevailing policies and regulations in the following areas:
    a. Accounting and finance;
    b. Business development and investment;
    c. Actuarial;
    d. Operations (including the procurement of goods and/or services);
    e. Marketing and products;
    f. Information technology;
    g. Human capital;
    h. Risk management and internal audit;
    i. Legal affairs; and
    j. Partnership and Community Development Program (PKBL);
18. Exercising, on behalf of the holder of the Series A Dwiwarna Share, the rights delegated by such shareholder in Holding Members that originated as former SOEs, in accordance with the respective Articles of Association and the Power of Attorney granted by the holder of the Series A Dwiwarna Share.

Obligations of the Board of Directors

In carrying out its responsibility for managing the Company, the Board of Directors is required to fulfill the following obligations:

1. To seek and ensure the implementation of IFG's business and activities in accordance with its purposes and objectives as well as business activities;
2. Participate in the orientation program organized by IFG for newly appointed members of the Board of Directors;
3. Participate in training programs to continuously enhance the competencies of members of the Board of Directors in accordance with organizational needs;

4. Menyiapkan susunan organisasi IFG lengkap dengan perincian dan tugasnya;
5. Menyiapkan RJPP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
   b. Posisi IFG saat ini;
   c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
   d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang;
   e. Kerja sama tingkat korporat yang strategis dan/atau berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun; dan
   f. Kebijakan penataan dan pengembangan Anggota *Holding* untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.
6. Menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJPP, yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan);
   b. Evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya;
   c. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan IFG, dan program kerja/kegiatan;
   d. Anggaran IFG yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
   e. Tingkat kinerja IFG;
   f. Proyeksi keuangan IFG dan Anggota *Holding*; dan
   g. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
7. Menyiapkan dan memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan RUPS pada waktunya mengenai RJPP, RKAP, dan perubahannya untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pengesahan RUPS;
8. Melaksanakan kewajiban kepada negara tepat waktu dalam hal pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan Rampung dan PBB) serta penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator;
9. Meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan melalui pencapaian target-target yang disepakati serta mampu meningkatkan kinerja IFG dari tahun-tahun sebelumnya;
10. Melaksanakan tanggung jawab sosial IFG untuk mendukung berkelanjutan operasi IFG dan untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan dan proses operasional dari IFG;
11. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan SAK dan berdasarkan prinsip pengendalian internal , terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

4. Prepare the organizational structure of the IFG, including detailed roles and duties;
5. Prepare the RJPP, which is a strategic plan containing the goals and objectives to be achieved over a period of 5 (five) years, and which must include at least the following:
   a. An evaluation of the implementation of the previous RJPP;
   b. IFG's current position;
   c. The assumptions underlying the preparation of the RJPP;
   d. The Company's mission, objectives, strategies, policies, and long-term work programs;
   e. Strategic corporate partnerships and/or cooperation agreements with a term exceeding five (5) years; and
   f. Policies governing the organization and development of Holding Members over the next five (5) years.
6. Prepare the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as the annual implementation of the RJPP, which shall include, at a minimum:
   a. Basic assumptions for preparing the RKAP (parameters used);
   b. An evaluation of the implementation of the previous RKAP;
   c. The Company's mission, business objectives, business strategies, policies, and work programs/activities;
   d. The Company's budget, broken down by each work program and activity;
   e. IFG's performance targets;
   f. Financial projections for IFG and its Holding Members; and
   g. Other matters requiring approval by the GMS.
7. Prepare and provide timely explanations to the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders regarding the RJPP, RKAP, and any amendments to obtain the approval of the Board of Commissioners and the ratification of the General Meeting of Shareholders;
8. Fulfill the Company's obligations to the State in a timely manner, including the payment of taxes (employee income tax, corporate income tax, periodic and annual VAT, and land and building tax) and the submission of required reports and documents to the relevant regulatory authorities;
9. Consistently enhance shareholder value by achieving agreed performance targets and continuously improving IFG's performance from year to year;
10. Implement IFG's social responsibility initiatives to support the sustainability of its operations and mitigate the adverse impacts of its products, services, and operational activities on the community;
11. Develop an accounting system in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and based on sound internal control principles, particularly with respect to management, recording, safeguarding, and oversight functions;

12. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap diminta oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham;
14. Menyampaikan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
15. Menyampaikan laporan perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
16. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan IFG dan dokumen IFG lainnya;
17. Menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS;
18. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi, serta menghadiri Rapat Gabungan baik yang diselenggarakan oleh Direksi maupun yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris;
19. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham;
20. Menyusun dan menetapkan blueprint organisasi IFG;
21. Memformulasikan dan menetapkan *risk appetite, risk tolerance* dan *risk limit*;
22. Memenuhi KPI yang telah disusun IFG dengan tujuan memastikan pencapaian sasaran strategis, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja, memastikan IFG beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, dan mengakselerasi pertumbuhan kinerja IFG;
23. Melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris dan pencapaian kinerja IFG berdasarkan target-target kolegial Direksi maupun pencapaian target kinerja masing-masing Direksi berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen;
24. Membuat dan menyampaikan Laporan Manajemen (triwulanan dan tahunan) dan Laporan Tahunan yang memuat informasi-informasi penting dan relevan secara tepat waktu dan disajikan dengan akurat, jelas, dan objektif serta dengan perlakuan, muatan, dan waktu yang sama kepada semua Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
25. Memenuhi permintaan data dan pengaksesan data dan dokumen perusahaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

12. Prepare financial statements in accordance with SAK and submit them to an independent Public Accounting Firm (KAP) for audit;
13. Submit periodic reports in the manner and within the timeframe prescribed by applicable regulations, as well as any other reports requested by the Board of Commissioners or the shareholders;
14. Submit the balance sheet and income statement approved by the GMS to the Minister responsible for law and human rights;
15. Report changes in the composition of shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners to the Minister responsible for law and human rights;
16. Prepare and maintain the Shareholders Register, Special Register, minutes of GMS meetings, minutes of meetings of the Board of Commissioners, minutes of meetings of the Board of Directors, the Annual Report, IFG's financial records, and other corporate documents;
17. Develop and propose the Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors for approval by the Board of Commissioners and the GMS;
18. Convene and attend meetings of the Board of Directors, as well as joint meetings held by either the Board of Directors or the Board of Commissioners;
19. Provide explanations on all matters inquired or requested by members of the Board of Commissioners and shareholders;
20. Develop and establish the IFG organizational blueprint;
21. Formulate and establish risk appetite, risk tolerance and risk limits.
22. Achieve the Key Performance Indicators (KPIs) established by IFG to ensure the attainment of strategic objectives, enhance the effectiveness of performance management, ensure that the Company operates within its established risk tolerance, and accelerate IFG's performance growth;
23. Report the implementation of the Board of Directors' performance management system to the Board of Commissioners, including the Company's performance achievements based on the collective performance targets of the Board of Directors as well as the individual performance achievements of each Director under their respective management contracts;
24. Prepare and submit the Management Report (quarterly and annual) and the Annual Report on a timely basis, ensuring that they contain material and relevant information presented accurately, clearly, and objectively, and that such information is provided to all shareholders and the Board of Commissioners in a fair and timely manner;
25. Fulfill requests from the holder of the Series A Dwiwarna Share for access to corporate data, information, and documents;

26. Meminta persetujuan RUPS untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan Anggaran Dasar Anggota *Holding* dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut, dalam hal:
    a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
    b. Perubahan Anggaran Dasar; dan
    c. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
27. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada Anggota *Holding* yang berasal dari eks BUMN berdasarkan anggaran dasar Anggota *Holding* dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna Anggota *Holding* tersebut;
28. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar IFG dan yang ditetapkan oleh RUPS;
29. Menyampaikan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP;
30. Menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
31. Menyampaikan laporan tingkat kesehatan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
32. Memastikan dilaksanakannya penilaian terhadap pelaksanaan dan penerapan GCG;
33. Menetapkan rencana strategis teknologi informasi; dan
34. Menandatangani kontrak manajemen tahunan yang memuat target kinerja Direksi secara kolegial. Khusus kontrak manajemen tahunan memuat target kinerja Direksi secara individu ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan.

Hak Direksi

Dalam menjalankan fungsi pengurusan IFG, Direksi juga memiliki sejumlah hak yang melekat pada pelaksanaan tugasnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
2. Menerima penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menerima tantiem/insentif kinerja/LTI yang bersifat variabel (*merit rating*) dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan;

26. Obtain prior approval from the GMS before exercising, on behalf of the holder of the Series A Dwiwarna Share, the rights delegated by such shareholder in Holding Members that originated as former SOEs, in accordance with the respective Articles of Association and the Power of Attorney granted by the holder of the Series A Dwiwarna Share, with respect to:
    a. The appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
    b. Amendments to the Articles of Association; and
    c. The nomination of candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
27. Report every exercise of rights performed on behalf of the holder of the Series A Dwiwarna Share in Holding Members that originated as former SOEs, in accordance with the respective Articles of Association and the Power of Attorney granted by the holder of the Series A Dwiwarna Share;
28. Perform such other duties as prescribed under IFG's Articles of Association and as determined by the GMS;
29. Submit the collective Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Directors to the GMS/the Minister for approval concurrently with the approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
30. Develop individual KPIs for each Director based on the collective KPIs of the Board of Directors and submit them to the Board of Commissioners for approval.
31. Submit the Company's soundness level report to the shareholders in accordance with applicable regulations;
32. Ensure that assessments of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) are conducted;
33. Establish the Company's information technology strategic plan; and
34. Sign the annual management contract containing the collective performance targets of the Board of Directors. Sign the annual management contract containing the individual performance targets applicable to the respective Director.

Rights of the Board of Directors

In fulfilling its management functions at IFG, the Board of Directors also has a number of rights associated with the performance of its duties, as outlined below:

1. Receive income in accordance with the provisions stipulated by the GMS with due observance of laws and regulations;
2. Receive income in the form of salary or honorarium, allowances, and facilities that are fixed by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the company, and other relevant factors, and must not conflict with laws and regulations;
3. Receive bonus/performance incentive/LTI that is variable (merit rating) by considering performance factors and the company's financial capability, as well as other relevant factors;

4. Dalam hal perhitungan gaji atau honorarium menyebabkan gaji atau honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya maka gaji atau honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan gaji atau honorarium tahun sebelumnya;
5. Bila IFG mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerja yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
6. Dalam hal IFG tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka IFG dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
7. Memperoleh cuti sesuai ketentuan IFG; dan
8. Menggunakan sarana dan tenaga profesional, kecuali ditentukan lain melalui kebijakan/peraturan, Direksi dapat mengangkat staf ahli berdasarkan kebijakan/peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab Direksi

Guna memastikan terselenggaranya pengelolaan Perseroan secara optimal, Direksi IFG memikul tanggung jawab yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan IFG kepada RUPS;
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha IFG yang menyebabkan kerugian bagi IFG, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
3. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan IFG;
4. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
5. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian IFG.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 mengenai Kebijakan Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Direksi ditetapkan sebagaimana diuraikan berikut:

1. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Utama yaitu:

4. In the event that the calculation of salary or honorarium causes the salary or honorarium to be lower than the previous year, the salary or honorarium used for the person concerned may be set equal to the salary or honorarium of the previous year;
5. In the event that IFG achieves a certain profit level, the Board of Directors may receive a performance bonus as compensation for outstanding performance, the amount of which is determined by the General Meeting of Shareholders;
6. In the event that IFG does not have net income but demonstrates improved performance as evidenced by the achievement of required targets, IFG may grant performance bonuses to members of the Board of Directors provided that such bonuses have been budgeted and accounted for as expenses;
7. Be entitled to leave in accordance with the Company's policies; and
8. Utilize professional resources and services. Unless otherwise provided under the applicable policies or regulations, the Board of Directors may appoint expert staffs in accordance with the prevailing policies and regulations.

Responsibilities of the Board of Directors

To ensure the effective management of the Company, the Board of Directors assumes the following responsibilities:

1. Being accountable to the GMS for the performance of its management duties;
2. Each member of the Board of Directors shall be personally and fully liable for any losses incurred by IFG as a result of his or her fault or negligence in carrying out the management of the Company, unless the relevant Director can demonstrate that such losses were not attributable to his or her fault or negligence;
3. Managing the Company in good faith and with due care in the best interests of IFG and in accordance with its purposes and objectives;
4. Ensuring that no direct or indirect conflict of interest exists in relation to any management action that results in losses to the Company; and
5. Taking appropriate measures to prevent the occurrence or continuation of losses incurred by IFG.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance to the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 15 of 2024 concerning the Organizational Structure Policy, the main duties, functions, and responsibilities of the Board of Directors are as follows.

1. The main duties, functions, and responsibilities of the President Director are as follows:

a. Sebagai pimpinan Perusahaan:
   i) Bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan, termasuk memberikan arahan penyusunan dan penetapan rancangan RJPP dan RKAP;
   ii) Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP dan RKAP yang telah disahkan oleh RUPS;
   iii) Mewakili Direksi dalam menandatangani surat/dokumen terkait pengurusan Perusahaan, tanpa mengurangi hak anggota Direksi lainnya untuk menandatangani surat/dokumen sesuai bidang dan tanggung jawabnya masing-masing atau yang telah diatur tersendiri dalam kebijakan Perusahaan;
   iv) Memimpin rapat Direksi dan mengoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/RUPS;
   v) Mewakili Direksi dalam menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala SKAI sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan dengan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris;
   vi) Mewakili Direksi dan perusahaan dalam memberikan informasi terkait segala sesuatu tentang Perusahaan kepada pemangku kepentingan;
   vii) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan WBS di IFG dibantu oleh unit kerja pengelola WBS;
   viii) Menandatangani laporan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara berkala; dan
   ix) Memberikan arahan dalam penyelesaian atas pelanggaran disiplin dan hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Sebagai pimpinan direktur bidang:
   i) Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* dalam bidang transformasi, riset, audit internal , dan sekretaris perusahaan;
   ii) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* pada bidang transformasi, riset, audit internal dan sekretaris Perusahaan;
   iii) Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang transformasi, riset, audit internal dan sekretaris perusahaan;

a. To act as a company leader:
   i) Serving as the leader of the Board of Directors in managing the Company, including providing direction for the preparation and formulation of the Company's Long-Term Corporate Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP);
   ii) Directing and supervising all corporate activities, including the planning, implementation, monitoring, and evaluation of the achievement of the RJPP and RKAP as approved by the GMS;
   iii) Representing the Board of Directors in signing correspondence and documents relating to the management of the Company, without prejudice to the authority of other Directors to sign correspondence or documents within their respective areas of responsibility or as otherwise provided under the Company's policies;
   iv) Chairing meetings of the Board of Directors and coordinating the Board of Directors in relation to meetings of the Board of Commissioners and the GMS;
   v) Representing the Board of Directors in appointing and dismissing the Head of the Corporate Secretary Division and the Head of the Internal Audit Unit (SKAI) in accordance with the Company's policies, subject to the prior written approval of the Board of Commissioners;
   vi) Representing the Board of Directors and the Company in providing information relating to the Company to stakeholders;
   vii) Responsible in the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at IFG, with the support of the unit responsible for administering the WBS;
   viii) Signing the periodic reports on the utilization of additional State Equity Participation (PMN); and
   ix) Providing direction in resolving disciplinary matters and industrial relations issues in accordance with applicable regulations.

b. To act as the Director in charge of:
   i) Providing direction, monitoring, and conducting periodic evaluations to align the work programs and policies of Holding Members in the areas of transformation, research, internal audit, and corporate secretary functions;
   ii) Providing direction for the preparation of the RKAP and RJPP of Holding Members in the areas of transformation, research, internal audit, and corporate secretary functions;
   iii) Supervising and periodically evaluating the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members, as approved by the GMS, in the areas of transformation, research, internal audit, and corporate secretary functions;

iv) Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang transformasi, riset, audit internal , dan sekretaris perusahaan;

v) Memberikan arahan dalam rangka mengembangkan kerangka audit internal untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan pemantauan, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi;

vi) Memastikan fungsi pelaksana audit internal memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugasnya, memperoleh sumber daya serta anggaran yang diperlukan, dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vii) Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi fungsi pelaksana audit internal;

viii) Menyelenggarakan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan

ix) Memastikan tersedianya unit kerja yang membidangi fungsi pelaksana audit internal di Anggota *Holding.*

2. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Wakil Direktur Utama:
Tugas pokok Wakil Direktur Utama adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Wakil Direktur Utama yang membidangi unit kerja teknologi informasi, manajemen risiko, kepatuhan & kebijakan, dan strategi perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:
   a. Melakukan pengurusan perusahaan dalam melaksanakan program kerja bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
   b. Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang strategi Perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
   c. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* pada bidang strategi Perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
   d. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang strategi Perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;
   e. Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan teknologi informasi;

iv) Providing direction in monitoring, controlling, and evaluating the achievement of the RJPP and RKAP of Holding Members based on business needs and strategic plans in the areas of transformation, research, internal audit, and corporate secretary functions;

v) Providing direction in developing the internal audit framework to identify, measure, monitor, and control all risks faced by the Company;

vi) Ensuring that the internal audit function has access to the information, resources, and budget necessary to perform its duties and operates in accordance with applicable laws and regulations;

vii) Ensuring that appropriate corrective actions are taken promptly in response to all findings and recommendations issued by the internal audit function;

viii) Supervising the implementation of the internal audit function in accordance with applicable laws and regulations. and

ix) Ensuring that Holding Members maintain an organizational unit responsible for the internal audit function.

2. Main duties, functions and responsibilities of the Vice President Director:
The main duties of the Vice President Director is to manage the Company by leading the Vice President Director Directorate, which oversees the information technology, risk management, compliance and policy, and corporate strategy functions. In conducting this main duty, the Vice President Director is responsible for the following functions:
   a. Managing the Company in implementing work programs relating to corporate strategy, risk management, and information technology;
   b. Providing direction, monitoring implementation, and conducting periodic evaluations to ensure the alignment of the work programs and policies of Holding Members in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;
   c. Providing direction in the preparation of the RKAP and RJPP of Holding Members in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;
   d. Supervising and periodically evaluating the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members, as approved by the GMS, in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;
   e. Providing direction in monitoring, controlling, and evaluating the achievement of the RJPP and RKAP of Holding Members based on business needs and strategic plans in the areas of corporate strategy, risk management, and information technology;

f. Memimpin dan memberikan arahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi atas rancangan RJPP dan *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan;
g. Memberikan arahan dan mengembangkan sistem dan teknologi informasi di perusahaan dan/atau Anggota *Holding* dan mengevaluasi program kerja serta kinerja Divisi Teknologi Informasi dan kegiatan lainnya sesuai bidang tanggung jawabnya pada perusahaan dan/atau Anggota *Holding*.
h. Menetapkan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai bidang pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;
i. Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi pengelolaan risiko;
j. Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada pihak eksternal;
l. Melakukan pengembangan organisasi terkait kegiatan manajemen risiko, dan teknologi informasi serta perencanaan strategis dan pemantauan kinerja di lingkungan Perusahaan dan Anggota *Holding*.
m. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
n. Memimpin, memberikan arahan dan mengawasi perencanaan, implementasi, dan penyusunan laporan ESG.

3. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Bisnis:
Tugas pokok Direktur Bisnis adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Bisnis yang membidangi unit kerja M&A dan *Partnership*, Strategi Digital dan Pengembangan Bisnis, Bisnis *Capital Market* & Investasi, Bisnis Asuransi Umum dan Penjaminan, Bisnis Asuransi Jiwa, *Special Liability Management*, dan *Quality Assurance*. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur Bisnis bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

a. Melakukan pengurusan perusahaan di bidang merger, akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital dan pengembangan bisnis, serta pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;

f. Leading and providing direction for the preparation, implementation, and evaluation of the Company's RJPP and Key Performance Indicators (KPIs);
g. Providing direction for the development of information systems and information technology within the Company and/or its Holding Members, and evaluating the work programs and performance of the Information Technology Division and other activities within the scope of responsibility;
h. Establishing, directing, supervising, and evaluating the management of the Company with respect to risk management in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS/Minister;
i. Conducting compliance monitoring and embedded supervision across all organizational units responsible for risk management;
j. Determining and implementing the necessary measures to ensure the Company's compliance with all applicable laws and regulations and to ensure that its business activities remain in conformity with laws and regulations;
k. Monitoring and ensuring the Company's compliance with all agreements and commitments entered into with external parties;

l. Developing the organizational capabilities relating to risk management, information technology, strategic planning, and performance monitoring across the Company and its Holding Members;
m. Coordinating and providing direction for the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG); and
n. Leading, directing, and overseeing the planning, implementation, and reporting of Environmental, Social, and Governance (ESG) initiatives.

3. Main duties, functions and responsibilities of the Business Director:
The main duty of the Business Director is to manage the Company by leading the Business Directorate, which supervises the Mergers & Acquisitions (M&A) and Partnership, Digital Strategy and Business Development, Capital Markets & Investment Business, General Insurance and Guarantee Business, Life Insurance Business, Special Liability Management, and Quality Assurance functions. In performing this main duty, the Business Director is responsible for the following functions:

a. Managing the Company's activities in the areas of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy and business development, and business line management, including the distribution channels of Holding Members engaged in the life insurance, general insurance and guarantee, and capital markets and investment businesses;

b. Memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis, dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
c. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management),* jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis, dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya kanal distribusi Anggota *Holding* pada bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
d. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
e. Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang merger dan akuisisi, kemitraan (*partnership*), pengelolaan polis khusus (*special liability management*), jaminan mutu (*quality assurance*), strategi digital, pengembangan bisnis dan pengelolaan lini bisnis termasuk di dalamnya bidang usaha asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan, serta pasar modal dan investasi;
f. Menetapkan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan strategi lini bisnis Anggota *Holding* dan kinerja lini bisnis Anggota *Holding:*
g. Memberikan arahan dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan lini bisnis, termasuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja lini bisnis Anggota *Holding* sesuai dengan target dan arahan dari Pemangku Kepentingan; dan

h. Mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi kerja sama bisnis, mitra, dan investor dalam rangka implementasi strategi bisnis Perusahaan dan melaksanakan tugas dari pemerintah.

4. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Keuangan:

b. Providing direction, monitoring implementation, and conducting periodic evaluations to ensure the alignment of the work programs and policies of Holding Members in the areas of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy, business development, and business line management, including the distribution channels of Holding Members engaged in the life insurance, general insurance and guarantee, and capital markets and investment businesses;
c. Providing direction in the preparation of the RKAP and RJPP of Holding Members in the areas of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy, business development, and business line management, including the distribution channels of Holding Members engaged in the life insurance, general insurance and guarantee, and capital markets and investment businesses;

d. Supervising and periodically evaluating the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members, as approved by the GMS, in the areas of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy, business development, and business line management, including the life insurance, general insurance and guarantee, and capital markets and investment businesses;
e. Providing direction in monitoring, controlling, and evaluating the achievement of the RJPP and RKAP of Holding Members based on business needs and strategic plans in the areas of mergers and acquisitions, partnerships, special liability management, quality assurance, digital strategy, business development, and business line management, including the life insurance, general insurance and guarantee, and capital markets and investment businesses;
f. Establishing, directing, supervising, controlling, and evaluating the strategic planning and business performance of the business lines of Holding Members;
g. Providing direction for and evaluating the planning and implementation of business line activities, including evaluating and monitoring the performance of the business lines of Holding Members against established targets and stakeholder expectations; and
h. Controlling and evaluating activities aimed at optimizing business cooperation with business partners and investors in support of the implementation of the Company's business strategy and the execution of government assignments.

4. Main duties, functions and responsibilities of the Director of Finance:

Tugas Pokok Direktur Keuangan adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Keuangan yang membidangi unit kerja Keuangan Perusahaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Manajemen Portofolio Investasi dan Anggota *Holding*. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

a. Melakukan pengurusan perusahaan di bidang keuangan meliputi penganggaran, *treasury*, akuntansi, perpajakan, pelaporan, pengelolaan aset instrumen investasi, pengelolaan portofolio investasi, dan *Management Information System* (MIS);
b. Memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* di bidang penganggaran, *treasury*, akuntansi, perpajakan, pelaporan, pengelolaan instrumen investasi termasuk tanah dan/atau bangunan, pengelolaan portofolio investasi, dan MIS;
c. Memimpin, memberikan arahan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan RKAP dalam lingkup keuangan secara konsolidasi perusahaan dan Anggota *Holding*.
d. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang keuangan perusahaan, akuntansi dan pelaporan, MIS, dan manajemen portofolio investasi;
e. Memimpin dan mengoordinasikan persiapan bahan/materi RUPS perusahaan terkait RKAP dan revisi RKAP perusahaan (jika ada);
f. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang keuangan perusahaan, akuntansi dan pelaporan, MIS, dan manajemen portofolio investasi;
g. Memberikan arahan penetapan strategi, kebijakan, pengaturan keuangan di Perusahaan;
h. Melakukan pemantauan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan dan/atau Anggota *Holding;*
i. Serta mempersiapkan penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan;
j. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimalisasi dana perusahaan melalui kegiatan penempatan dana pada bank dan/atau instrumen pasar uang lainnya termasuk kegiatan pengadministrasian untuk menjamin ketersediaan dana guna membiayai kegiatan operasional perusahaan;
k. Melakukan pemantauan dan evaluasi kecukupan permodalan perusahaan dan/atau Anggota *Holding* untuk menjalankan kegiatan usaha dan operasional perusahaan dan/atau Anggota *Holding;*
l. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan atau upaya-upaya untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga;

The main duty of the Director of Finance is to manage the Company by leading the Finance Directorate, which oversees the Corporate Finance, Accounting and Reporting, and Investment Portfolio Management and Holding Members functions. In conducting this main duty, the Director of Finance is responsible for the following functions:

a. Managing the Company's finance function, including budgeting, treasury, accounting, taxation, reporting, management of investment instruments, investment portfolio management, and the Management Information System (MIS);
b. Providing direction, monitoring implementation, and conducting periodic evaluations to ensure the alignment of the work programs and policies of Holding Members in the areas of budgeting, treasury, accounting, taxation, reporting, management of investment instruments (including land and/or buildings), investment portfolio management, and the MIS;
c. Leading, providing direction, overseeing, and evaluating the preparation of the consolidated RKAP covering the Company and its Holding Members from a financial perspective;
d. Providing direction in the preparation of the RKAP and RJPP of Holding Members in the areas of corporate finance, accounting and reporting, the MIS, and investment portfolio management;
e. Leading and coordinating the preparation of materials for the Company's GMS relating to the RKAP and revisions (if any);
f. Supervising and periodically evaluating the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members, as approved by the GMS, in the areas of corporate finance, accounting and reporting, the MIS, and investment portfolio management;
g. Providing direction in establishing the Company's financial strategies, policies, and financial management framework;
h. Monitoring the financial soundness of the Company and/or its Holding Members;
i. Preparing the financial soundness assessment of the Company;
j. Coordinating, supervising, and evaluating activities to optimize the Company's funds through placements with banks and/or other money market instruments, including the related administrative processes to ensure the availability of funds for operational activities;
k. Monitoring and evaluating the capital adequacy of the Company and/or its Holding Members to support their business operations;
l. Coordinating, supervising, and evaluating initiatives to obtain financing from third parties;

m. Memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh kreditur, termasuk pembayaran kepada kreditur atau pemegang surat utang;
n. Memberikan arahan pengelolaan, dan pemantauan dividen secara konsolidasi;
o. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penggunaan anggaran perusahaan (*fungsi controller*) serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembayaran dan penagihan ke pihak lain terkait kegiatan Perusahaan;
p. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan pengelolaan arus kas Perusahaan serta memonitor arus kas Anggota *Holding*;
q. Memastikan pelaksanaan pemenuhan aspek perpajakan terkait dengan kegiatan perusahaan dan Anggota *Holding*, termasuk memastikan kesesuaian pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
r. Memimpin, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi, mengoordinasikan pelaporan capaian kinerja keuangan perusahaan dan Anggota *Holding* dibandingkan dengan RKAP dan revisi RKAP (jika ada);
s. Mengoordinasikan, menganalisis dan mengevaluasi serta menyajikan laporan kinerja keuangan perusahaan dan Anggota *Holding* untuk disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya;
t. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang akuntansi;
u. Mengoordinasikan, memberikan arahan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan triwulan, semester, tahunan, dan laporan keuangan lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan dan Anggota *Holding* kepada pihak atau regulator sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara tepat waktu;
v. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas laporan realisasi penggunaan tambahan PMN;
w. Memberikan arahan dan melakukan evaluasi atas portofolio investasi di perusahaan dan/atau Anggota *Holding* termasuk ekosistem usaha Anggota *Holding* melalui Anggota *Holding*;
x. Memberikan arahan, melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi sinergi data yang valid dalam rangka menerapkan konsep *single source of truth data* dan berperan sebagai narahubung (*focal point*) data keuangan, kecuali data-data terkait remunerasi karyawan dan Direksi Perusahaan; dan

y. Memberikan arahan, mengawasi dan melakukan evaluasi atas pengembangan MIS.

m. Ensuring compliance with obligations imposed by creditors, including payments to creditors and debt security holders;
n. Providing direction for the consolidated management and monitoring of dividends;
o. Coordinating, supervising, and evaluating the utilization of the Company's budget (controller function), including payment and collection activities relating to the Company's operations;

p. Providing direction for and monitoring the Company's cash flow management, as well as monitoring the cash flows of Holding Members;
q. Ensuring compliance with tax obligations relating to the Company and its Holding Members, including ensuring that tax reporting complies with applicable regulations;

r. Leading, providing direction, evaluating, and coordinating the reporting of the financial performance of the Company and its Holding Members against the RKAP and revisions (if any)
s. Coordinating, analyzing, evaluating, and presenting the financial performance reports of the Company and its Holding Members for submission to the Board of Directors, the Board of Commissioners, shareholders, and other stakeholders;
t. Coordinating, evaluating, and approving accounting records, administrative documentation, and the preparation of corporate management reports relating to accounting;
u. Coordinating, providing direction, supervising, and evaluating the recording of financial transactions and the preparation of quarterly, semiannual, annual, and other financial reports required to be submitted by the Company and its Holding Members to regulators and other authorities in accordance with applicable accounting standards and within the prescribed timeframe;
v. Signing the statement of responsibility for the report on the utilization of additional State Equity Participation (PMN);
w. Providing direction for and evaluating investment portfolios of the Company and/or its Holding Members, including the business ecosystem of Holding Members through their subsidiaries;
x. Providing direction, monitoring implementation, and evaluating the integration of reliable data to support the implementation of the single source of truth concept, while serving as the focal point for financial data, except for data relating to employee and Board of Directors remuneration; and
y. Providing direction, supervising, and evaluating the development of the Management Information System (MIS).

5. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur SDM

   Tugas Pokok Direktur SDM adalah melakukan pengurusan Perusahaan dengan memimpin Direktorat SDM yang membidangi unit kerja Sumber Daya Manusia, Pembelajaran & Budaya Perusahaan, Hukum, dan Pengadaan & Pengelolaan Aset. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Direktur SDM bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

   a. Melakukan pengurusan perusahaan meliputi menetapkan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi strategi dan pelaksanaan pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, dukungan hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, manajemen perkantoran, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;

   b. Memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan evaluasi berkala dalam rangka penyelarasan program kerja dan kebijakan Anggota *Holding* meliputi pelaksanaan pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, dukungan hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, manajemen perkantoran, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
   c. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;
   d. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;

   e. Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang pengelolaan SDM, pembelajaran dan budaya perusahaan, hukum, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, kearsipan, dan tanggung jawab sosial lingkungan;

   f. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perencanaan dan pemenuhan karyawan, strategi dan perencanaan SDM, pengelolaan remunerasi, analisis data dan layanan, pengembangan karyawan, pengelolaan manajemen kinerja, hubungan industrial dan pengakhiran hubungan kerja serta pengelolaan manajemen talenta dan kegiatan lainnya sesuai bidang tanggung jawabnya pada perusahaan dan/atau Anggota *Holding;*
   g. Memimpin pelaksanaan dan menentukan penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran disiplin dan hubungan industrial di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Main duties, functions and responsibilities of the Director of Human Capital

   The main duty of the Director of Human Capital is to manage the Company by leading the Human Capital Directorate, which supervise the Human Capital, Learning and Corporate Culture, Legal, and Procurement and Asset Management functions. In carrying out this main duty, the Director of Human Capital is responsible for the following functions:

   a. Managing the Company's human capital function, including establishing, directing, supervising, and evaluating strategies and their implementation in the areas of human capital management, learning and corporate culture, legal support, procurement and fixed asset management, office administration, records management, and social and environmental responsibility;
   b. Providing direction, monitoring implementation, and conducting periodic evaluations to ensure the alignment of the work programs and policies of Holding Members in the areas of human capital management, learning and corporate culture, legal support, procurement and fixed asset management, office administration, records management, and social and environmental responsibility;
   c. Providing direction in the preparation of the RKAP and RJPP of Holding Members in the areas of human capital management, learning and corporate culture, legal affairs, procurement and fixed asset management, records management, and social and environmental responsibility;
   d. Supervising and periodically evaluating the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members, as approved by the GMS, in the areas of human capital management, learning and corporate culture, legal affairs, procurement and fixed asset management, records management, and social and environmental responsibility;
   e. Providing direction in monitoring, controlling, and evaluating the achievement of the RJPP and RKAP of Holding Members based on business needs and strategic plans in the areas of human capital management, learning and corporate culture, legal affairs, procurement and fixed asset management, records management, and social and environmental responsibility;
   f. Providing direction for and monitoring the planning and fulfillment of workforce requirements, human capital strategy and planning, remuneration management, Human Capital analytics and services, employee development, performance management, industrial relations and employment termination, talent management, and other activities within the scope of responsibility at the Company and/or its Holding Members;
   g. Leading the resolution of disciplinary and industrial relations cases in accordance with applicable regulations;

h. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
i. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan aktiva tetap di perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
j. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam lingkup perusahaan dan/atau Anggota *Holding;*
k. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap dukungan aspek hukum di perusahaan dan/atau Anggota *Holding*;
l. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan pemenuhan sarana/prasarana kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk memelihara dan mengadministrasikan aset-aset perusahaan yang dipergunakan untuk operasional rutin perusahaan; dan
m. Memberikan arahan, memonitor, mengevaluasi tata kelola kearsipan perusahaan dan Anggota *Holding*.

6. Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab utama Direktur Teknik

Tugas Pokok Direktur Teknik adalah melakukan pengurusan perusahaan dengan memimpin Direktorat Teknik yang membidangi unit kerja Aktuaria dan Optimasi Operasional Asuransi. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur Teknik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

a. Melakukan pengurusan perusahaan di bidang aktuaria meliputi pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, keunggulan operasional (*operational excellence*), dan tata kelola asuransi (*governance*);
b. Memberikan arahan, melakukan pengawasan dan mengevaluasi rencana program kerja serta melakukan aktivitas lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan keselarasan program kerja Anggota *Holding*, sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
c. Memberikan arahan dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
d. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja Perusahaan baik RKAP maupun RJPP Anggota *Holding* di bidang aktuaria dan pengembangan produk;
e. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP Anggota *Holding* yang telah disahkan oleh RUPS di bidang pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, dan *operational excellence*;
f. Memberikan arahan dalam mengendalikan, dan mengevaluasi pencapaian RJPP dan RKAP Anggota *Holding* berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis di bidang pengembangan produk, manajemen aset dan liabilitas, dan *operational excellence*;

h. Providing direction for and monitoring procurement activities of the Company and/or its Holding Members;
i. Providing direction for and monitoring the management of fixed assets of the Company and/or its Holding Members;
j. Providing direction for and monitoring social and environmental responsibility activities within the Company and/or its Holding Members;
k. Providing direction for and monitoring legal support activities within the Company and/or its Holding Members;
l. Providing direction for and monitoring the provision of workplace facilities and infrastructure to support the Company's operations, including the maintenance and administration of assets used in day-to-day operations; and
m. Providing direction, monitoring, and evaluating records management governance within the Company and its Holding Members.

6. Main duties, functions and responsibilities of the Technical Director

The main duty of the Technical Director is to manage the Company by leading the Technical Directorate, which supervises the Actuarial and Insurance Operations Optimization functions. In performing this main duty, the Technical Director is responsible for the following functions:

a. Managing the Company's actuarial function, including product development, asset and liability management, operational excellence, and insurance governance;
b. Providing direction, supervising implementation, and evaluating work programs, as well as conducting other activities necessary to ensure the alignment of the work programs of Holding Members within the areas of responsibility;
c. Providing direction in the preparation, monitoring, and evaluation of the achievement of the RJPP and RKAP based on business needs and strategic plans within the areas of responsibility;
d. Providing direction in the preparation of the RKAP and RJPP of Holding Members in the areas of actuarial services and product development;
e. Supervising and periodically evaluating the implementation of the RJPP and RKAP of Holding Members, as approved by the GMS, in the areas of product development, asset and liability management, and operational excellence;
f. Providing direction in monitoring, controlling, and evaluating the achievement of the RJPP and RKAP of Holding Members based on business needs and strategic plans in the areas of product development, asset and liability management, and operational excellence;

g. Menetapkan, mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan *product & pricing*, penilaian risiko terkait *product & pricing* dan penerapan disiplin *product & pricing* di Anggota *Holding*;
h. Memberikan arahan dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan aktuaria dan *underwriting*, serta pengawasan aktivitas fungsi aktuaria dan *underwriting* di Anggota *Holding*; dan
i. Memberikan arahan dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimasi operasional asuransi Anggota *Holding*;

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Pada tahun 2025, IFG tidak menyelenggarakan program orientasi bagi Direksi baru mengingat tidak terdapat perubahan maupun pergantian dalam susunan Direksi. Meskipun demikian, seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas, tanggung jawab, serta dinamika operasional Perusahaan, sehingga mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara efektif dan selaras dengan arah strategis Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan program orientasi tetap menjadi bagian penting dalam kerangka governansi Perusahaan, sebagaimana diuraikan berikut ini:
IFG mengimplementasikan kebijakan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru menjabat guna memastikan keselarasan pemahaman serta efektivitas dalam menjalankan peran di lingkungan Perusahaan. Mengacu pada ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, pelaksanaan program orientasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Program Pengenalan wajib diberikan kepada anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat di IFG.
2. Tanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengadakan Program Pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Dalam teknis pelaksanaannya, apabila Program Pengenalan Direksi dilaksanakan bersamaan dengan pengenalan Dewan Komisaris, maka Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang diterapkan IFG.
4. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas IFG, dan pengkajian dokumen serta program lainnya yang sesuai dengan kebutuhan IFG, termasuk namun tidak terbatas pada perkenalan dengan Pejabat Satu Level di bawah Direksi.
5. Materi presentasi yang diberikan pada Program Pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh IFG;

g. Establishing, supervising, and evaluating product and pricing strategies, product and pricing risk assessments, and the implementation of product and pricing discipline across Holding Members;
h. Providing direction for, supervising, and evaluating actuarial and underwriting activities, including oversight of the actuarial and underwriting functions of Holding Members; and
i. Providing direction for, supervising, and evaluating insurance operations optimization initiatives across Holding Members.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

In 2025, IFG did not conduct an orientation program for new Board members, as there were no changes or replacements in the Board's composition. Nevertheless, all incumbent Board members already possess a sufficient understanding of the Company's duties, responsibilities, and operational dynamics, enabling them to perform their management functions effectively and in alignment with the Company's strategic direction.

In this regard, the orientation program policy remains an important part of the Company's governance framework, as outlined below:
IFG implements an orientation program policy for newly appointed Board members to ensure a shared understanding and effectiveness in performing their roles within the Company. In accordance with the provisions of the Board of Directors' Guidelines and Rules of Procedure, the orientation program is conducted in accordance with the following arrangements:

1. An orientation program must be provided to Board members who are serving at IFG for the first time.
2. The responsibility for preparing and conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or whoever performs the functions of the Corporate Secretary.
3. In terms of technical implementation, if the Board of Directors' Orientation Program is conducted concurrently with the Board of Commissioners' orientation, the Corporate Secretary shall coordinate with the Secretary of the Board of Commissioners to prepare all necessary arrangements in accordance with IFG's established procedures.
4. The Orientation Program may take the form of presentations, meetings, or visits to IFG facilities, as well as the review of documents and other programs appropriate to IFG's needs, including but not limited to introductions to officers/officials one level below the Board of Directors.
5. The presentation materials provided during the Orientation Program include:
   a. IFG's implementation of the principles of good corporate governance;

b. Gambaran mengenai IFG berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal; dan
d. Penjelasan mengenai fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

6. Pertemuan perkenalan dengan Insan IFG dan Pemangku Kepentingan IFG, meliputi:
   a. Anggota Dewan Komisaris;
   b. Anggota Direksi;
   c. Sekretaris Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris;
   d. Pejabat IFG; dan
   e. Pemangku Kepentingan IFG.
7. Kunjungan ke unit kerja Kantor Pusat dan kantor Anggota *Holding* serta lokasi usaha/kegiatan IFG lainnya. Khusus untuk kunjungan ke kantor Anggota *Holding* dilaksanakan dengan ketentuan:

   a. Peserta pertemuan adalah Dewan Komisaris dan Direksi Anggota *Holding*.

   b. Presentasi Direksi Anggota *Holding* yang berkaitan dengan:
      i) Profil Anggota *Holding*;
      ii) RKAP Anggota *Holding*;

      iii) Evaluasi RKAP dan KPI; dan
      iv) Permasalahan dan solusi.
8. Pelaksanaan Program Pengenalan dapat melibatkan narasumber dari:
   a. Pemegang Saham;
   b. Regulator;
   c. Komisaris;
   d. Direksi;
   e. Pejabat IFG;
   f. Tenaga Ahli dari eksternal sesuai dengan materi yang dibutuhkan; dan
   g. Unsur Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Board Manual IFG menetapkan ketentuan mengenai persyaratan serta mekanisme yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Direksi, sebagaimana diuraikan berikut:

b. An overview of IFG regarding its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short- and long-term plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
c. Explanations regarding delegated authority, as well as internal and external audits; and
d. Explanations regarding the functions, duties, authority, rights, obligations, and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

6. Introductory meetings with IFG People and Stakeholders include:
   a. Board of Commissioners' Members;
   b. Board of Directors' Members;
   c. Secretary to the Board of Commissioners and the committees under the Board of Commissioners;
   d. IFG's Officials; and
   e. IFG's Stakeholders
7. Visits to work units at the Head Office and offices of Holding Company Members, as well as other IFG business locations and operations. Specifically, visits to the offices of Holding Company Members are conducted under the following conditions:
   a. Meeting participants are the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Holding Company Members.
   b. Presentations by the Holding Company Members' Boards of Directors regarding:
      i) Holding Company Members' profiles;
      ii) Holding Company Members' Annual Budget Plans (RKAP);
      iii) Evaluation of the RKAP and KPIs; and
      iv) Issues and solutions.
8. The Orientation Program may involve guest speakers from:
   a. Shareholders;
   b. Regulators;
   c. Board of Commissioners;
   d. Board of Directors;
   e. IFG's Officials
   f. External experts in fields relevant to the required subject matter; and
   g. Representatives from labor unions and business associations

CRITERIA AND PROCEDURES FOR THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The IFG's Board Manual sets out the requirements and procedures governing the appointment and dismissal of members of the Board of Directors, as described below:

Pengangkatan Anggota Direksi

1. Anggota Direksi diusulkan dan diangkat oleh RUPS.

2. Pengangkatan menjadi anggota Direksi dikukuhkan melalui Perjanjian Penunjukan (Kontrak Manajemen) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Menteri BUMN.
3. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
4. Penetapan seorang menjadi Direksi dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral.

5. Dalam hal penetapan anggota Direksi dilakukan sebelum uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral maka Direksi berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi terhitung sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan sektoral.
6. Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi.

7. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Anggota Direksi sesuai dengan POJK yang berlaku.

8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.
9. Calon anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi yaitu mencakup:

   a. Kandidat yang telah dinyatakan lulus UKK; atau

   b. Anggota Direksi BUMN yang diangkat kembali.

10. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, calon Direksi yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi IFG.

Pemberhentian Anggota Direksi

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG.

Appointment of Members of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors are nominated and appointed by the GMS.
2. The appointment of a member of the Board of Directors is formalized through a Letter of Appointment (Management Contract) signed by the appointee and the Minister of State-Owned Enterprises.
3. The GMS resolution concerning the appointment and dismissal of members of the Board of Directors also specifies the effective date of such appointment or dismissal. If the GMS resolution does not specify the effective date, the appointment or dismissal shall take effect upon the closing of the GMS.
4. An individual may be appointed as a member of the Board of Directors only after being declared to have passed the fit and proper test in accordance with applicable sectoral regulations.
5. If members of the Board of Directors are appointed prior to undergoing the fit and proper test in accordance with sectoral regulations, they are authorized to perform the duties and functions of Board members effective from the date they are declared to have passed the fit and proper test in accordance with sectoral regulations.
6. Members of the Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority (OJK) before exercising their authorities and performing their duties and functions as members of the Board of Directors.
7. The OJK conducts fit and proper assessments of members of the Board of Directors in accordance with the applicable OJK Regulations (POJK).
8. In the event that the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is made by Shareholders' resolution outside the GMS, the effective date of such appointment and dismissal shall be stated in such Shareholders' resolution. In the event that the resolution of the Shareholders outside the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect from the date of the Shareholders' resolution.
9. Prospective members of the Board of Directors are required to sign a Management Contract prior to their appointment as members of the Board of Directors. This requirement applies to:
   a. Candidates who have successfully passed the fit and proper test (UKK); or
   b. Incumbent members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises who are reappointed.
10. Prior to being appointed as a member of the Board of Directors, each candidate must sign a statement resigning from any position that may not be held concurrently with the position of member of the Board of Directors, with such resignation taking effect upon the individual's appointment as a member of the Board of Directors of IFG.

Dismissal of Members of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors may be dismissed by resolution of the GMS by stating the reasons and based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the IFG.

2. Keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
   a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. Tidak dapat Melaksanakan tugasnya dengan baik;
   c. tidak Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau negara;
   e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
   f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
   g. Mengundurkan diri.
4. Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan IFG;
5. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 3 huruf a, b, c, d, e dan angka 4 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
7. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
8. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan IFG dan/atau negara dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2025

Sampai dengan 31 Desember 2025, pelaksanaan tugas Direksi di luar kegiatan rutin dan teknis terdokumentasi melalui berbagai keputusan yang telah diterbitkan. Adapun rincian Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi antara lain meliputi:

2. The GMS resolution concerning the dismissal of members of the Board of Directors also specifies the effective date of such appointment or dismissal. If the GMS resolution does not specify the effective date, the appointment or dismissal shall take effect upon the closing of the GMS.
3. Members of the Board of Directors may be dismissed by the General Meeting of Shareholders at any time, stating the reasons, including:
   a. Failure to fulfill their obligations as agreed upon in the management contract;
   b. Unable to perform his/her duties properly;
   c. Failure to comply with the provisions of laws and regulations and/or the articles of association;
   d. Involve in acts that cause harm to the company and/or the state;
   e. Committing acts that violate the ethics and/or standards of conduct that should be upheld as a member of the Board of Directors;
   f. Being found guilty by a court decision that has become final and binding; and
   g. Resigned.
4. A member of the Board of Directors may be dismissed by the General Meeting of Shareholders based on other considerations deemed appropriate by the General Meeting of Shareholders in the best interests and for the purposes of IFG;
5. The decision to dismiss as referred to in paragraph 3, subparagraphs a, b, c, d, e, and paragraph 4 shall be made after the person concerned has been given the opportunity to defend themselves.
6. The Shareholders shall notify the relevant Board member, either verbally or in writing, of any plan to dismiss a Board member at any time.
7. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Directors concerned must carry out his/her duties accordingly.
8. Dismissal due to involvement in acts detrimental to IFG and/or the state, where the individual has been found guilty by a court ruling that has become final and binding, constitutes dishonorable dismissal.

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

As of December 31, 2025, the Board of Directors' performance of duties beyond routine and technical activities has been documented through various decisions/decrees that have been issued. Details of the Decrees related to the Board of Directors' performance of duties, including:

Keputusan Direksi Tahun 2025
Board of Directors' Decrees of 2025

No	Tanggal Date	Nomor Surat Letter Date	Perihal Subject
1	2/1/2025	Nomor 1 Tahun 2025 No. 1 of 2025	Perubahan Kedua Struktur Organisasi dan Pengurus Organisasi Srikandi Pada Indonesia Financial Group Second Amendment to the Organizational Structure and Executive Board of the Srikandi Organization at Indonesia Financial Group
2	7/1/2025	Nomor 2 Tahun 2025 No. 2 of 2025	Pedoman Strategis Operasional Asuransi dan Penjaminan Strategic Operational Guidelines for Insurance and Guarantees
3	10/1/2025	Nomor 3 Tahun 2025 No. 3 of 2025	Pembentukan *Task Force* Pengembangan dan Implementasi Sistem Investasi Terintegrasi Establishment of a Task Force for the Development and Implementation of an Integrated Investment System
4	7/2/2025	Nomor 4 Tahun 2025 No. 4 of 2025	Surat Keputusan Penetapan Pegawai Pelaksana Kegiatan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Decree on the Appointment of Personnel Responsible for Capital Market Broker Marketing Partner Activities
5	10/2/2025	Nomor 5 Tahun 2025 No. 5 of 2025	Surat Keputusan Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Mitra Pemasaran Pedagang Efek Decree on the Appointment of Officials Responsible for Capital Market Broker Marketing Partners
6	10/2/2025	Nomor 6 Tahun 2025 No. 6 of 2025	Penunjukan Pelaksana Harian Direktur SDM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Appointment of the Acting Director of Human Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
7	13/2/2025	Nomor 7 Tahun 2025 No. 7 of 2025	Pedoman Strategis Pengembangan Produk Asuransi dan Penjaminan Strategic Guideline for Insurance and Guarantee Product Development
8	21/2/2025	Nomor 8 Tahun 2025 No. 8 of 2025	Kebijakan *Employee Well Being* Employee Well-being Policy
9	21/2/2025	Nomor 9 Tahun 2025 No. 9 of 2025	Pedoman Strategis Akuntansi dan Pelaporan Strategic Guideline for Accounting and Reporting
10	21/2/2025	Nomor 10 Tahun 2025 No. 10 of 2025	Kebijakan Penerapan Strategi *Anti Fraud* Strategic Guideline for Accounting and Reporting
11	27/2/2025	Nomor 11 Tahun 2025 No. 11 of 2025	Pembentukan *Task Force* Digitalisasi Proses Bisnis Establishment of the Business Process Digitalization Task Force
12	27/2/2025	Nomor 12 Tahun 2025 No. 12 of 2025	Pedoman Strategis Kepatuhan Strategic Compliance Guideline
13	3/3/2025	Nomor 13 Tahun 2025 No. 13 of 2025	*Task Force* Pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan IFG IFG Financial Conglomerate Holding Company Establishment Task Force
14	5/3/2025	Nomor 14 Tahun 2025 No. 14 of 2025	Kebijakan Sistem Manajemen Mutu Quality Management System Policy
15	24/03/2025	Nomor 15 Tahun 2025 No. 15 of 2025	Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan, Jiwa dan Kecelakaan Tahun 2025 Establishment of the Ad Hoc Team for the Joint Procurement of Health, Life, and Accident Insurance Providers for 2025
16	26/3/2025	Nomor 16 Tahun 2025 No. 16 of 2025	Penugasan *Change Agent Holding* Dalam Implementasi *Culture Acceleration Program* Assignment of Holding Change Agents for the Implementation of the Culture Acceleration Program
17	26/3/2025	Nomor 17 Tahun 2025 No. 17 of 2025	Kebijakan *Business Continuity Management Plan* IFG Business Continuity Management Plan (BCMP) Policy
18	26/3/2025	Nomor 18 Tahun 2025 No. 18 of 2025	Pedoman Strategis Investasi Strategic Investment Guideline
19	24/4/2025	Nomor 19 Tahun 2025 No. 19 of 2025	Kebijakan Pengelolaan Penyertaan Modal Negara State Equity Participation Management Policy
20	5/5/2025	Nomor 20 Tahun 2025 No. 20 of 2025	Susunan Keanggotaan *Budget Hero* Di Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Composition of the Budget Hero Team of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
21	8/5/2025	Nomor 21 Tahun 2025 No. 21 of 2025	Prosedur Perhitungan Nilai Ambang Risiko Risk Threshold Calculation Procedure
22	15/5/2025	Nomor 22 Tahun 2025 No. 22 of 2025	Kebijakan Desain Organisasi dan Uraian Jabatan Organizational Design and Job Description Policy

Keputusan Direksi Tahun 2025
Board of Directors' Decrees of 2025

No	Tanggal Date	Nomor Surat Letter Date	Perihal Subject
23	22/5/2025	Nomor 23 Tahun 2025 No. 23 of 2025	Pembentukan *Task Force* Pelaksanaan Penyelesaian Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Cilandak Townsquare Establishment of the Task Force for the Resolution of Ownership and Management of Cilandak Town Square Assets
24	2/6/2025	Nomor 24 Tahun 2025 No. 24 of 2025	*Computer Incident Security Response Team* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Computer Incident Security Response Team (CSIRT) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
25	5/6/2025	Nomor 25 Tahun 2025 No. 25 of 2025	Pedoman Strategis Pengadaan Barang dan/atau Jasa Strategic Guideline for the Procurement of Goods and/or Services
26	18/6/2025	Nomor 26 Tahun 2025 No. 26 of 2025	Penetapan Struktur Organisasi [*Revoke*] Organizational Structure Determination [Revoked]
27	19/6/2025	Nomor 27 Tahun 2025 No. 27 of 2025	Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama Lisensi Microsoft 365 Establishment of the Ad Hoc Team for the Joint Procurement of Microsoft 365 Licenses
28	14/7/2025	Nomor 31 Tahun 2025 No. 31 of 2025	Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama *Manage Service Security Operation Center* Establishment of the Ad Hoc Team for the Joint Procurement of Manage Service Security Operation Center
29	15/7/2025	Nomor 32 Tahun 2025 No. 32 of 2025	Perubahan/Penyesuaian Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama Lisensi Microsoft 365 Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 27 of 2025 concerning the Establishment of the Ad Hoc Team for the Joint Procurement of Microsoft 365 Licenses
30	17/7/2025	Nomor 33 Tahun 2025 No. 33 of 2025	Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Umum Tahun 2025 Establishment of the Ad Hoc Team for the Joint Procurement of Public Accounting Firm Services for the 2025 Annual Audit
31	21/7/2025	Nomor 34 Tahun 2025 No. 34 of 2025	Pembentukan *Task Force* Pengajuan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2026 Establishment of the Task Force for the 2026 State Equity Participation Proposal
32	24/7/2025	Nomor 35 Tahun 2025 No. 35 of 2025	Pembentukan *Task Force* Implementasi *Enterprise Resource Planning* (Erp) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Establishment of the Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Task Force of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
33	29/7/2025	Nomor 36 Tahun 2025 No. 36 of 2025	Kebijakan *Underwriting*/Analisis Bisnis Underwriting/Business Analysis Policy
34	29/7/2025	Nomor 37 Tahun 2025 No. 37 of 2025	Kebijakan Klaim Claims Policy
35	7/8/2025	Nomor 38 Tahun 2025 No. 38 of 2025	Pedoman Strategis Aktuaria Strategic Actuarial Guideline
36	8/8/2025	Nomor 39 Tahun 2025 No. 39 of 2025	Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Information Security Management System Policy
37	8/8/2025	Nomor 40 Tahun 2025 No. 40 of 2025	Piagam Komite Investasi dan ALM Investment and Asset-Liability Management (ALM) Committee Charter
38	12/8/2025	Nomor 41 Tahun 2025 No. 41 of 2025	Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama *Manage Service Security Operation Center* Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 31 of 2025 concerning the Establishment of the Ad Hoc Team for the Joint Procurement of Manage Service Security Operation Center
39	28/8/2025	Nomor 42 Tahun 2025 No. 42 of 2025	Pembentukan *Taskforce* Optimalisasi Bisnis Asuransi Umum Syariah Pada Ekosistem Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Project Riyadh) Establishment of the Task Force for the Optimization of Sharia General Insurance Business within the Ecosystem of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (Project Riyadh)
40	9/9/2025	Nomor 43 Tahun 2025 No. 43 of 2025	Kebijakan Pengembangan Produk Asuransi dan Penjaminan Insurance and Guarantee Product Development Policy

Keputusan Direksi Tahun 2025
Board of Directors' Decrees of 2025

No	Tanggal Date	Nomor Surat Letter Date	Perihal Subject
41	10/9/2025	Nomor 44 Tahun 2025 No. 44 of 2025	Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama *Manage Service Security Operation Center* Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 41 of 2025 concerning the Establishment of the Ad Hoc Team for the Joint Procurement of Manage Service Security Operation Center
42	17/9/2025	Nomor 45 Tahun 2025 No. 45 of 2025	Penetapan Kewenangan Direksi yang dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Determination of the Authority of Members of the Board of Directors Undergoing the Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Services Institutions
43	17/9/2025	Nomor 46 Tahun 2025 No. 46 of 2025	Piagam Korporasi (*Corporate Charter*) Konglomerasi Keuangan Indonesia Financial Group Indonesia Financial Group Financial Conglomerate Corporate Charter
44	18/9/2025	Nomor 47 Tahun 2025 No. 47 of 2025	Pedoman Strategis Pemasaran Produk Strategic Guideline for Product Marketing
45	24/9/2025	Nomor 48 Tahun 2025 No. 48 of 2025	Kebijakan Pelayanan Nasabah Customer Service Policy
46	29/9/2025	Nomor 49 Tahun 2025 No. 49 of 2025	Pedoman Strategis *Asset & Liability Management* Strategic Guideline for Asset and Liability Management
47	8/10/2025	Nomor 50 Tahun 2025 No. 50 of 2025	Pembentukan *Task Force Project* Implementasi *Integrated Distribution Channel* dan *Shared Service Center* Establishment of the Integrated Distribution Channel and Shared Service Center Implementation Project Task Force
48	9/10/2025	Nomor 51 Tahun 2025 No. 51 of 2025	Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Personal Data Protection Policy
49	13/10/2025	Nomor 52 Tahun 2025 No. 52 of 2025	Pembentukan *Task Force Interco*/Hub Sebagai Pengganti *Task Force* Digitalisasi Proses Bisnis Establishment of the Interco/Hub Task Force as the Successor to the Business Process Digitalization Task Force
50	27/10/2025	Nomor 53 Tahun 2025 No. 53 of 2025	Pembentukan *Taskforce* Optimalisasi Bisnis Asuransi Umum Syariah Pada Ekosistem Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (*Project* Riyadh) Establishment of the Task Force for the Optimization of Sharia General Insurance Business within the Ecosystem of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (Project Riyadh)
51	31/10/2025	Nomor 54 Tahun 2025 No. 54 of 2025	Pembentukan Tim *Ad Hoc* Pengadaan Bersama Penyedia Seragam Kerja untuk Tahun 2025 di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Anak Perusahaan Establishment of the Ad Hoc Team for the Joint Procurement of Employee Uniform Suppliers for 2025 for PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries
52	31/10/2025	Nomor 55 Tahun 2025 No. 55 of 2025	Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Records Management Policy
53	5/11/2025	Nomor 56 Tahun 2025 No. 56 of 2025	Kebijakan Pengelolaan Operasional Kantor Office Operations Management Policy
54	10/11/2025	Nomor 57 Tahun 2025 No. 57 of 2025	Klasifikasi Arsip (KA), Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Records Classification (KA), Records Retention Schedule (JRA), and Dynamic Records Security Classification and Access System (SKKAAD) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
55	11/11/2025	Nomor 58 Tahun 2025 No. 58 of 2025	Pedoman Strategis Pengelolaan Konglomerasi IFG Strategic Guideline for IFG Conglomerate Management
56	11/11/2025	Nomor 59 Tahun 2025 No. 59 of 2025	Kebijakan Pengelolaan Konglomerasi IFG Strategic Guideline for IFG Conglomerate Management
57	13/11/2025	Nomor 60 Tahun 2025 No. 60 of 2025	Piagam Komite Pengelolaan Konglomerasi IFG IFG Conglomerate Management Committee Charter

Keputusan Direksi Tahun 2025
Board of Directors' Decrees of 2025

No	Tanggal Date	Nomor Surat Letter Date	Perihal Subject
58	13/11/2025	Nomor 61 Tahun 2025 No. 61 of 2025	Pembentukan *Task Force* Optimalisasi Bisnis Penjaminan Syariah Pada Ekosistem Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (*Project* Doha) Establishment of the Task Force for the Optimization of Sharia Guarantee Business within the Ecosystem of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (Project Doha)
59	24/11/2025	Nomor 62 Tahun 2025 No. 62 of 2025	Pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Establishment of the Information Security Management System (ISMS) Team
60	25/11/2025	Nomor 63 Tahun 2025 No. 63 of 2025	Kebijakan *Notional Pooling* Notional Pooling Policy
61	26/11/2025	Nomor 64 Tahun 2025 No. 64 of 2025	Piagam Komite *Product Committe Holding* PC/H Product Committee Holding (PC/H) Charter
62	2/12/2025	Nomor 65 Tahun 2025 No. 65 of 2025	Salinan Kebijakan Perencanaan Program Teknologi Informasi Information Technology Program Planning Policy
63	16/12/2025	Nomor 66 Tahun 2025 No. 66 of 2025	Kebijakan Akuntansi Umum General Accounting Policy
64	23/12/2025	Nomor 67 Tahun 2025 No. 67 of 2025	Kebijakan Manajemen Hukum Legal Management Policy
65	29/12/2025	Nomor 68 Tahun 2025 No. 68 of 2025	Kebijakan Keahliwarisan Knowledge Transfer Policy
66	29/12/2025	Nomor 69 Tahun 2025 No. 69 of 2025	Kebijakan Penanganan Perkara Knowledge Transfer Policy
67	30/12/2025	Nomor 70 Tahun 2025 No. 70 of 2025	Pedoman Strategis Pengelolaan Piutang Strategic Guideline for Receivables Management
68	30/12/2025	Nomor 71 Tahun 2025 No. 71 of 2025	Kebijakan Reasuransi/Penjaminan Ulang Reinsurance/Re-Guarantee Policy
69	30/12/2025	Nomor 72 Tahun 2025 No. 72 of 2025	Piagam Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Charter
70	30/12/2025	Nomor 73 Tahun 2025 No. 73 of 2025	Kebijakan Pengelolaan Kas Operasional Perusahaan Company Operational Cash Management Policy
71	30/12/2025	Nomor 74 Tahun 2025 No. 74 of 2025	Kebijakan Operasional Bidang Akuntansi Accounting Operations Policy
72	30/12/2025	Nomor 75 Tahun 2025 No. 75 of 2025	Kebijakan Pengelolaan Rapat Direksi Board of Directors Meeting Management Policy
73	31/12/2025	Nomor 76 Tahun 2025 No. 76 of 2025	Kebijakan Pengelolaan Program Komunikasi Pemasaran Marketing Communications Program Management Policy

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan Perusahaan, IFG menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi Direksi yang bertujuan untuk memperluas wawasan serta memperdalam pengetahuan, khususnya dalam aspek manajerial dan strategis. Adapun informasi mengenai pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi Direksi disajikan sebagai berikut:

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS

To enhance the Company's management capacity and capabilities, IFG conducts a competency development program for the Board of Directors aimed at broadening their perspectives and improving their knowledge, particularly in managerial and strategic aspects. Information regarding the implementation of the training and competency development program for the Board of Directors is presented as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tempat/Tanggal** Location/Date	**Penyelenggara** Organizer
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan Non-Training	HC *Strategic Forum*	10 Desember 2025 December 10, 2025	Indonesia Financial Group
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan Non-Training	SKAI *Talk*	22 Mei 2025 May 22, 2025	Indonesia Financial Group
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan Non-Training	*Advanced Technologies Implementation to Unlock Enterprise Productivity*	18 November 2025 November 18, 2025	Pertamina
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan Non-Training	Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisioner dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025 Year-End Dialogue Between Members of the Board of Commissioners and the Financial Services Industry for 2025	4 Desember 2025 December 4, 2025	OJK
Hexana Tri Sasongko	Non Pelatihan Non-Training	*Thought Leadership* IFG *Empowering Transformation: Lessons in Leadership, Discipline, Scale & Impact*	12 Desember 2025 December 12, 2025	Indonesia Financial Group
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan Non-Training	*Capita Selecta: Recovery Plan*/ Penanganan Masalah Bank Umum Capita Selecta: Recovery Plan/ Resolving Issues at Commercial Banks	22 September 2025 September 22, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan Non-Training	*HC Strategic Forum*	10 Desember 2025 December 10, 2025	Indonesia Financial Group
Haru Koesmahargyo		*Driving Sustainable Growth: Leading with Innovation and ESG Principles*	22 September 2025 September 22, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan Non-Training	*CPMA as Strategic Partner: Driving Organizational Performance*	23 Agustus 2025 August 23, 2025	Institut Akuntan Manajemen Indonesia Indonesian Institute of Management Accountants
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan Non-Training	Pengembangan Kebijakan Makroekonomi, Fiskal, dan Sektor Keuangan yang Tanggap Iklim di Indonesia Developing Climate-Resilient Macroeconomic, Fiscal, and Financial Sector Policies in Indonesia	11 November 2025 November 11, 2025	Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Indonesia International Islamic University (UIII)
Haru Koesmahargyo	Non Pelatihan Non-Training	*Insurance & Guarantee Sector Update: IFG's Strategic Role and Opportunities in Insurance Sector*	13 Agustus 2025 August 13, 2025	Verdhana Sekuritas Indonesia
Rianto Ahmadi	Non Pelatihan Non-Training	*8th Indonesian Actuaries Summit 2025*	24 – 26 Juli 2025 July 24–26, 2025	Persatuan Aktuaris Indonesia The Society of Actuaries of Indonesia
Rianto Ahmadi	Pelatihan Training	*Chief Business Development Officer*	13 Agustus – Desember 2025 August 13 – December 2025	Danantara
Rianto Ahmadi	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	6 – 9 Oktober 2025 October 6–9, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Rianto Ahmadi	Non Pelatihan Non-Training	*Risk Beyond 2025*	4 – 5 Desember 2025 December 4–5, 2025	*Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) Enterprise Risk Management Academy (ERMA)

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tempat/Tanggal** Location/Date	**Penyelenggara** Organizer
Rianto Ahmadi	Non Pelatihan Non-Training	*HC Strategic Forum*	10 Desember 2025 December 10, 2025	Indonesia Financial Group
Rizal Ariansyah	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	1 – 7 Juli 2025 July 1–7, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Rizal Ariansyah	Non Pelatihan Non-Training	*HC Strategic Forum*	10 Desember 2025 December 10, 2025	Indonesia Financial Group
Heru Handayanto	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	6 – 9 Oktober 2025 October 6–9, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Heru Handayanto	Pelatihan Training	*SAK for Executive*	11 – 12 Desember 2025 December 11–12, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants

INFORMASI TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGAN PENDUKUNG DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi memperoleh dukungan dari Komite Manajemen Risiko dan Komite Sumber Daya Manusia sebagai komite penunjang utama. Selain itu, Direksi juga didukung oleh organ pendukung lainnya, termasuk Sekretaris Perusahaan serta SKAI. Penilaian terhadap kinerja seluruh organ pendukung tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

INFORMATION ON THE PERFORMANCE EVALUATION OF SUPPORTING ORGANS UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its duties, the Board of Directors receives support from the Risk Management Committee and the Human Capital Committee as its primary supporting committees. In addition, the Board of Directors is also supported by other supporting organs, including the Corporate Secretary and SKAI. The performance of all these supporting organs is evaluated based on the extent to which they have achieved the targets set for the performance of their respective duties.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Sebagai organ utama Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Untuk memastikan optimalisasi peran tersebut, pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap kedua organ menjadi aspek yang krusial. Dalam posisinya sebagai *Holding* BUMN serta entitas utama dalam konglomerasi keuangan, IFG berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, IFG melaksanakan fungsi evaluasi dan pemantauan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola terintegrasi secara berkala. Proses penilaian ini mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Metodologi yang digunakan mencakup berbagai indikator, termasuk aspek yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi, melalui penilaian atas struktur, proses, serta implementasi tata kelola pada masing-masing indikator.

Berdasarkan hasil *self-assessment* atas penerapan tata kelola terintegrasi IFG untuk tahun 2025, Perseroan memperoleh peringkat 3 dengan kategori "CUKUP BAIK", yang menunjukkan bahwa:

1. Struktur tata kelola terintegrasi telah tersedia dan didukung oleh organ serta fungsi tata kelola yang memadai, meliputi Direktur Pembina dan Direktur Fungsional, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan Terintegrasi, serta Satuan Kerja Audit Internal.

2. Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah berjalan melalui harmonisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antara IFG dan anggota *holding*, termasuk penerapan *governance structure* berdasarkan *three lines model* serta pelaksanaan fungsi pembinaan dan harmonisasi kebijakan fungsional.

3. Fungsi pengawasan, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal telah dilaksanakan secara terintegrasi, antara lain melalui pemantauan profil dan mitigasi risiko, pelaporan manajemen risiko dan kepatuhan secara berkala, serta pemantauan pelaksanaan audit internal pada anggota *holding*.

4. Implementasi tata kelola terintegrasi didukung oleh sistem dan mekanisme pengendalian yang semakin terintegrasi, antara lain melalui pengembangan aplikasi i-ERM, *i-Compliance*, dan *i-Regulation* serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata kelola secara berkala.

As the Company's primary organs, the Board of Commissioners and the Board of Directors play a strategic role in driving growth while ensuring business sustainability. To ensure these roles are optimized, the performance evaluation of both organs is a crucial aspect. In its capacity as a state-owned holding company and the primary entity within a financial conglomerate, IFG is obligated to implement GCG principles comprehensively and consistently.

As part of this commitment, IFG performs evaluation and monitoring functions through a self-assessment mechanism regarding the implementation of integrated governance on a regular basis. This assessment process is based on Financial Services Authority Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates. The methodology used includes various indicators, such as aspects related to the Board of Commissioners and the Board of Directors, through an assessment of the structure, processes, and implementation of governance for each indicator.

Based on the results of the self-assessment of IFG's integrated governance implementation for 2025, the Company received a rating of 3 with a "FAIRLY GOOD" classification, indicating that:

1. The integrated governance structure has been established and is supported by adequate governance organs and functions, including the Supervisory Director and Functional Directors, the Integrated Governance Committee, the Integrated Risk Management and Compliance Unit, and the Internal Audit Unit.
2. Integrated governance has been implemented through policy harmonization and strengthened coordination between IFG and its Holding Members, including the implementation of a governance structure based on the Three Lines Model, as well as the implementation of supervisory functions and the harmonization of functional policies.
3. The monitoring, risk management, compliance, and internal audit functions have been implemented in an integrated manner, including through the monitoring of risk profiles and risk mitigation measures, periodic risk management and compliance reporting, and monitoring of internal audit implementation across the Holding Members.
4. The implementation of integrated governance is supported by increasingly integrated systems and control mechanisms, including through the development of the i-ERM, i-Compliance, and i-Regulation applications, as well as periodic governance monitoring and evaluation.

5. Masih terdapat area yang perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas tata kelola terintegrasi, antara lain penyelarasan metodologi manajemen risiko dan kepatuhan pada anggota *holding*, penguatan fungsi dan *positioning* Komite Tata Kelola Terintegrasi, peningkatan kompetensi dan budaya kepatuhan, serta peningkatan ketepatan waktu penyampaian data dari anggota *holding*.

5. Several areas still require further strengthening to enhance the effectiveness of integrated governance, including the alignment of risk management and compliance methodologies across the Holding Members, strengthening the role and positioning of the Integrated Governance Committee, enhancing compliance competencies and culture, and improving the timeliness of data submission by the Holding Members.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IFG melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui penerapan *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan bisnis IFG. Penilaian ini dilaksanakan secara berkala setiap tahun sebagai sarana untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedua organ tersebut. Capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan IFG, merupakan hasil dari sinergi dan kerja kolegial antara kedua organ utama tersebut.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara tahunan sebagai bagian dari evaluasi atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Proses ini tidak hanya mengacu pada Laporan Tugas Pengawasan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat pencapaian KPI yang mencerminkan kinerja kolegial seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun realisasi kinerja Dewan Komisaris pada tahun 2025 berdasarkan KPI disajikan sebagai berikut:

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

IFG evaluates the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors through the application of Key Performance Indicators (KPIs) designed with consideration for IFG's business characteristics and needs. This evaluation is conducted periodically each year as a means to assess the effectiveness of the execution of the duties and responsibilities of these two organs. The performance achievements of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which play a strategic role in driving IFG's growth, are the result of synergy and collegial collaboration between these two key organs.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted annually as part of the evaluation of the effectiveness of its supervisory functions. This process not only refers to the Supervisory Duty Report but also considers the level of KPI achievement, which reflects the collective performance of all members of the Board of Commissioners. The performance results of the Board of Commissioners in 2025 based on KPIs are presented as follows:

No.	Indikator Indicator [a]	Uraian Description [b]	*Output* Output [c]	Kuantitas Quantity [d]	Bobot Weight [e]	*Output* Output [d]	Bobot *Output* Output Weight [e]
A. Aspek Perencanaan A. Planning Aspects							
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2026 Developing the Board of Commissioners' Work Plan, Budget, and KPIs for 2026	Program Kerja Tahunan meliputi Kegiatan dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2026 The Annual Work Program includes the Board of Commissioners' Activities and Budget for 2026	Dokumen Documents	1	10	1	10
B. Aspek Pengawasan dan Nasihat B. Supervisory and Advisory Aspects							
	Memberikan Tanggapan/Rekomendasi kepada Pemegang Saham yaitu: Providing Feedback/Recommendations to Shareholders, namely:						
1	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)	Tahunan Annually	Surat Letter	1	5	1	5

No.		Indikator Indicator [a]	Uraian Description [b]	*Output* Output [c]	Kuantitas Quantity [d]	Bobot Weight [e]	*Output* Output [d]	Bobot *Output* Output Weight [e]
	b.	Kinerja Triwulan Quarterly Performance	Triwulan Quarterly	Surat Letter	3	5	3	5
	c.	Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Annually	Surat Letter	1	5	1	5
	d.	Pengusulan Eksternal Auditor/ KAP kepada Pemegang Saham Proposal of External Auditor/Public Accounting Firm to Shareholders	Tahunan Annually	Surat Letter	1	5	1	5
2		**Rapat Dewan Komisaris (minimal Rapat 1 kali dalam sebulan)*** Board of Commissioners Meeting (at least once a month)*						
	a.	Jumlah Rapat Number of Meetings	Bulanan Monthly	Jumlah Total	12	5	8	3,33
	b.	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Bulanan Monthly	%	100	10	81,25	8,125
	c.	Risalah Meeting Minutes	Bulanan Monthly	Risalah Meeting Minutes	12	5	12	5
3		**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (minimal Rapat 1 kali dalam sebulan)** Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors (at least once a month)						
	a.	Jumlah Rapat Number of Meetings	Bulanan Monthly	Jumlah Total	12	5	12	5
	b.	Kehadiran Rapat Monthly Meeting Attendance	Bulanan Monthly	%	100	10	81	8,1
	c.	Risalah Meeting Minutes	Bulanan Monthly	Risalah Meeting Minutes	12	5	12	5
4		Kunjungan Kerja ke Anak Perusahaan/Unit Usaha Work Visits to Subsidiaries/ Business Units	Setahun One year	Laporan Report	2	5	9	22,5
5		Pemberian persetujuan dan/atau tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Granting of approval and/ or written responses by the Board of Commissioners regarding the actions of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association	Setahun One year	Surat Letter	12	10	43	35,83
C. Aspek Pelaporan Reporting Aspects								
1		Menyampaikan Laporan Tahunan tentang Tugas Pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris. Submit an Annual Report on the Supervisory Duties and the implementation of the Board of Commissioners' KPIs.	Laporan tugas pengawasan tahun buku 2025 Audit Report for Fiscal Year 2025	Surat Letter	1	10	1	10

No.	Indikator Indicator [a]	Uraian Description [b]	*Output* Output [c]	Kuantitas Quantity [d]	Bobot Weight [e]	*Output* Output [d]	Bobot *Output* Output Weight [e]
D. Aspek Dinamis/Lain Dynamic/Other Aspects							
1	Peningkatan kompetensi melalui kegiatan seminar, *workshop* & studi banding. Improving competencies through seminars, workshops, and benchmarking activities.	Setahun Annually	Surat/ Laporan Letter/Report	2	5	2	5
Total					**100**		**137,8**

Penilaian Kinerja Direksi

Penetapan target KPI Direksi dilakukan melalui RUPS RKAP Tahun 2025. Pencapaian kinerja Direksi dinilai sebagai hasil kerja kolegial seluruh anggota dalam mengelola Perusahaan secara menyeluruh. Evaluasi kinerja Direksi dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui *Working Group Meeting* yang diselenggarakan setiap bulan. Proses penilaian ini mengacu pada capaian di berbagai aspek, meliputi kinerja keuangan, operasional, pelanggan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan sistem.

Performance Assessment of the Board of Directors

The Board of Directors' KPI targets are set through the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to approve the Annual Business Plan (RKAP). The Board of Directors' performance is assessed as the result of the collective efforts of all members in managing the Company as a whole. The Board of Directors' performance is evaluated periodically through joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as through monthly Working Group Meetings. This evaluation process focuses on achievements across various aspects, including financial performance, operations, customer relations, and human capital and systems management.

Pencapaian *Key Performance Indicator* Kolegial

Dalam melakukan penilaian kinerja kolegial, IFG melihat berdasarkan lima indikator utama, yaitu nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta. Lima indikator utama ini kemudian diturunkan ke dalam sub-indikator yang lebih spesifik.

Adapun, pencapaian indikator kinerja utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) kolegial IFG sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Collegial Key Performance Indicator Achievement

In assessing collegial performance, IFG considers five key indicators, namely economic and social value for Indonesia, business model innovation, technology leadership, increased investment, and talent development. These five key indicators are further translated into more specific sub-indicators.

IFG's achievement of its collegial Key Performance Indicators (KPIs) throughout 2025 is presented in the following table:

Pencapaian *Key Performance Indicators* Tahun 2025
2025 Key Performance Indicator Achievement

KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2025 2025 FY Target	Realisasi Realization	Nilai KPI KPI Score
I. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia I. Economic and Social Value for Indonesia						
Finansial Financial						
1 *Insurance Service Results* (Konsolidasi) Insurance Service Results (Consolidated)	Hasil Jasa Asuransi Insurance Service Results	Rp Miliar IDR Billion	7	1.589,31	2.861,20	7,70
2 *Return on Equity* (Konsolidasi) Return on Equity (Consolidated)	Laba Bersih Tahun Berjalan / *Average Total Equity* Net Profit for the Year / Average Total Equity	%	6	3,12	13,82	6,60
3 *CSM Increment*	*New Business CSM*	Rp Miliar IDR Billion	6	1.063,70	2.322,08	6,60

Pencapaian *Key Performance Indicators* Tahun 2025
2025 Key Performance Indicator Achievement

	KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2025 2025 FY Target	Realisasi Realization	Nilai KPI KPI Score
4	Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi yang Berlaku: Tingkat Minimum RBC, RKI, dan *Gearing Ratio* Produktif Improved Compliance with Applicable Regulations: Minimum Risk-Based Capital (RBC), Investment Adequacy Ratio (RKI), and Productive Gearing Ratio Requirements	*Weighted Average* dari pencapaian RBC, RKI, dan *Gearing Ratio* Weighted Average from the achievement of RBC, RKI, and Gearing Ratio	%	7	100,00	106,91	7,48
Operasional Operational							
5	*Expense Variance*	*((Non Attributeable Expenses + Attributeable Expense) – Expected Expenses) / Expected Expenses*	%	6	64,00	44,53	6,60
6	*%Onerous Contract*	Total LOB ICG Kontrak yang merugi (*Onerous*) / Total LOB Kontrak Keseluruhan Total ICG LOB Onerous Contracts / Total LOB Contracts	%	6	24,66	11,05	6,60
7	*Combined Ratio*	*Loss Ratio + Expense Ratio*	%	6	108,38	75,13	6,60
8	Penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahun 2024 Submission of the 2024 Audited Financial Statements	Tanggal rilis laporan keuangan konsolidasi Release date of the consolidated financial statements	Waktu Date	6	15 April 2025 April 15, 2025	30 April 2025 April 30, 2025	0
Sosial Social							
9	*Insurance | Non. Gov. vs Govt. Assignments Revenue Mix*	Total Pendapatan Asuransi dan Penjaminan diluar penugasan/Total Pendapatan Asuransi dan Penjaminan keseluruhan Total Insurance and Guarantee Revenue Excluding Mandated Business /Total Insurance and Guarantee Revenue	%	7	60,96	52,99	6,08
	Sub Total			**57**			**54,27**
II. Inovasi Model Bisnis II. Business Model Innovation							
10	Perbaikan/Penyelesaian Proses Bisnis Business Process Improvement/Optimization	*Roll-out* implementasi standar kebijakan klaim dan *underwriting* Rollout of the implementation of standard claims and underwriting policies	%	6	100,00	99,07	5,94
	Sub Total			**6**			**5,94**
III. Kepemimpinan Teknologi III. Technology Leadership							
11	*Increase in % STP Ratio in Key Process*	% Penyelesaian target STP Proses Utama % Achievement of Key Process STP Targets	%	7	100,00	91,67	6,42

Pencapaian *Key Performance Indicators* Tahun 2025
2025 Key Performance Indicator Achievement

	KPI	Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target FY 2025 2025 FY Target	Realisasi Realization	Nilai KPI KPI Score
12	Peningkatan penggunaan *shared service* di Ekosistem *Holding* Increased Use of Shared Services in the Holding Company Ecosystem	Pelaksanaan *Shared Service* di area IT Implementation of Shared Services in the IT Area	Jumlah Total	7	4	5	7,70
	Sub Total			**14**			**14,12**
IV. Peningkatan Investasi IV. Increased Investment							
13	*Investment Results*	*Weighted Average Investment Results* dan *YOI*	%	8	100,00	152,24	8,80
14	Pencapaian KPI PMN PMN KPI Achievements	% KPI PMN BPUI % of BPUI PMN KPI Achievement	%	7	100,00	94,27	6,60
	Sub Total			**15**			**15,40**
V. Pengembangan Talenta V. Talent Development							
15	*Human Capital Transformation*	% *Talent Diversity* dan *Employee Productivity* % Talent Diversity and Employee Productivity	%	8	100,00	110,85	8,80
	Sub Total			**8**			**8,80**
Total							**98,53**

Pada tahun 2025, pencapaian KPI IFG tercatat mencatat skor 98,53 terhadap target FY 2025. Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahun 2024 menyebabkan target tidak tercapai, akan tetapi performa kinerja yang melebihi target di beberapa aspek membantu pencapaian KPI Kolegial 2025. Selanjutnya detail penjelasan disampaikan sebagai berikut:

1. Seluruh KPI pada aspek finansial melampaui target, *Insurance Service Result* mencapai 180,03% dari target FY, ROE mencapai 442,95% dari target FY, CSM mencapai 218,30% dari target FY dan Peningkatan Kepatuhan mencapai 106,91% dari target FY.
2. Di aspek Operasional, untuk *Onerous Contract* dan *Combined Ratio* dapat terjaga dibawah *threshold maximum*.
3. Perspektif Kepemimpinan Teknologi mencatatkan pencapaian kinerja dengan rata-rata sebesar 100,85%, yang dikontribusikan implementasi *shared service* yang melebihi target, akan tetapi pencapaian *Increase in STP ratio* khususnya di BAV masih dibawah target jika dibandingkan dengan di Anak Perusahaan lainnya.
4. Perspektif Peningkatan Investasi mencatatkan kinerja di atas target. *Investment Results* dan *Yield on Investment* terealisasi Rp4,42 triliun dan 7,75%, atau tercapai 152,24% dari target FY.

Perspektif Pengembangan talenta terealisasi *on track*, indikator *Human Capital Transformation* yang terdiri dari *Talent Diversity* terealisasi 31,82% yang telah memenuhi target tahunan, sedangkan *Employee Productivity* mencapai Rp5,18 miliar per karyawan.

In 2025, IFG recorded a KPI score of 98.53 against the FY 2025 target. The delay in the submission of the 2024 Audited Financial Statements resulted in one of the targets not being achieved. Nevertheless, above-target performance across several areas supported the overall achievement of the 2025 Collegial KPIs. Further details are provided below:

1. All KPIs under the Financial Perspective exceeded their respective targets. Insurance Service Result reached 180.03% of the FY target, ROE reached 442.95% of the FY target, CSM reached 218.30% of the FY target, and Enhanced Compliance reached 106.91% of the FY target.
2. Under the Operational Perspective, the Onerous Contract and Combined Ratio indicators were maintained below their respective maximum thresholds.
3. The Technology Leadership Perspective recorded an average performance achievement of 100.85%, supported by the implementation of shared services, which exceeded the target. However, the achievement of the Increase in STP Ratio indicator, particularly at BAV, remained below the target compared with the other Subsidiaries.
4. The Increased Investment Perspective recorded above-target performance. Investment Results and Yield on Investment were realized at IDR 4.42 trillion and 7.75%, respectively, representing 152.24% of the FY target.

The Talent Development Perspective remained on track. Under the Human Capital Transformation indicator, Talent Diversity reached 31.82%, meeting the annual target, while Employee Productivity reached IDR 5.18 billion per employee.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari pendekatan strategis Perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih objektif, inklusif, dan efektif. Variasi latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing anggota diharapkan mampu memperkaya sudut pandang serta mengakomodasi berbagai kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik pada tingkat Dewan Komisaris maupun Direksi. Dengan demikian, keberagaman tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja operasional dan pengembangan bisnis Perusahaan, sekaligus memperkuat penerapan prinsip governansi perusahaan yang baik.

Secara kebijakan, pengaturan terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan secara tertulis dengan mengacu pada Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi kebijakan ini mempertimbangkan berbagai dimensi keberagaman, antara lain latar belakang pendidikan, kompetensi, pengalaman profesional, jenis kelamin, dan rentang usia. Adapun komposisi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi IFG per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the Company's strategic approach to improving the quality of decision-making to be more objective, inclusive, and effective. The diverse backgrounds of each member are expected to enrich perspectives and accommodate various interests in every decision-making process, both at the Board of Commissioners and Board of Directors levels. Thus, this diversity makes a positive contribution to the Company's operational performance and business development, while also strengthening the implementation of good corporate governance principles.

As a matter of policy, regulations regarding the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors are set forth in writing in accordance with the Articles of Association, shareholder directives, and applicable laws and regulations. The implementation of this policy takes into account various dimensions of diversity, including educational background, competencies, professional experience, gender, and age range. The diversity composition of IFG's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2025, is presented as follows:

Nama Name	**Kewarganegaraan** Nationality	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Keahlian** Expertise	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Sumiyati	Indonesia	S2 Financial Management Master's Degree in Financial Management	Finance	64 tahun 64 years old	Perempuan Female
Nasrudin	Indonesia	S3 Hukum Doctoral Degree in Law	Hukum Law	69 tahun 69 years old	Laki-laki Male
Direksi Board of Directors					
Hexana Tri Sasongko	Indonesia	S2 Business Administration Master's Degree in Business Administration	Bisnis Business	61 tahun 61 years old	Laki-laki Male
Haru Koesmahargyo	Indonesia	S2 Investment Banking Master's Degree in Investment Banking	Bisnis Business	59 tahun 59 years old	Laki-laki Male
Rizal Ariansyah	Indonesia	S2 Hukum Master's Degree in Law	Hukum Law	51 Tahun 51 years old	Laki-laki Male
Rianto Ahmadi	Indonesia	S3 Statistika Doctoral Degree in Statistics	Statistika Statistics	66 tahun 66 years old	Laki-laki Male
Heru Handayanto	Indonesia	S1 Akuntansi Bachelor's Degree in Accounting	Akuntansi Accounting		Laki-laki Male

REMUNERASI DAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dasar Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran dalam menyusun dan mengelola perencanaan suksesi Direksi sebagai upaya untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan proses regenerasi di masa mendatang. Kebijakan terkait pergantian dan suksesi Dewan Komisaris serta Direksi di Perusahaan disusun dengan mengacu pada sejumlah ketentuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Peraturan Menteri BUMN tersebut mengatur mekanisme pengelolaan *talent pool* dalam manajemen korporasi BUMN yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang kepemilikan akhir. Sementara itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 menetapkan bahwa setiap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris IFG wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK sebelum dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara resmi sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, IFG senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pemberian remunerasi tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa besaran gaji dan tunjangan Direksi ditentukan melalui keputusan RUPS, dengan kemungkinan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2). Sementara itu, Pasal 113 mengatur bahwa penetapan gaji, honorarium, serta tunjangan bagi Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

REMUNERATION AND NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Succession Policy Basis for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Nomination and Remuneration Committee plays a role in formulating and managing the succession planning for the Board of Directors as an effort to ensure continuity of leadership and the regeneration process in the future. Policies regarding the replacement and succession of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Company are formulated with reference to a number of key provisions, namely as follows:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Minister of State-Owned Enterprises' Regulation on the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises; and
3. Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.05/2022 on the Supervision of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

The Minister of State-Owned Enterprises Regulation governs the mechanism for managing the talent pool within the corporate management of state-owned enterprises, which is conducted by the Ministry of State-Owned Enterprises as the ultimate owner. Meanwhile, Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.05/2022 stipulates that every candidate for the Board of Directors and Board of Commissioners of IFG must first obtain approval from the OJK before they can officially conduct their duties, functions, and authorities as members of the Board of Directors or Board of Commissioners.

POLICY FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In conducting its operations, IFG consistently prioritizes the principle of prudence and compliance with laws and regulations in determining remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The provision of such remuneration serves as a form of appreciation for the performance achieved. This provision refers to Article 96 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which stipulates that the amount of salaries and allowances for the Board of Directors is determined by a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS), with the possibility of delegating authority to the Board of Commissioners as provided for in Article 96 paragraph (2). Meanwhile, Article 113 stipulates that the determination of salaries, honoraria, and allowances for the Board of Commissioners is conducted by the General Meeting of Shareholders.

Lebih lanjut, kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi di IFG ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Secara internal, IFG terus melakukan penyempurnaan sistem remunerasi dengan mengadopsi prinsip 3P, yaitu *Pay for Person, Pay for Position*, dan *Pay for Performance*. Prinsip ini diimplementasikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengusulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris. Struktur remunerasi yang diterapkan meliputi komponen *Fixed Pay, Variable Pay*, serta *Non-Cash Benefit*. Selain itu, IFG memastikan bahwa tingkat penghasilan karyawan telah berada di atas ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan penyusunan skala upah yang mempertimbangkan kondisi pasar serta kemampuan keuangan Perusahaan.

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IFG telah menetapkan mekanisme dan tata cara dalam proses pengusulan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS);
2. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan; dan
4. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anggota *Holding* dianggarkan sebagai biaya dalam RKAP Anggota *Holding*.

STRUKTUR DAN KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Furthermore, the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors at IFG is established based on a decision by the Shareholders, in accordance with Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Internally, IFG continues to refine its remuneration system by adopting the 3P principle: Pay for Person, Pay for Position, and Pay for Performance. This principle is implemented as stipulated in the Board of Directors' Decree of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 90 of 2022 regarding the Policy on Proposing the Determination of Income for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The remuneration structure applied includes Fixed Pay, Variable Pay, and Non-Cash Benefits. In addition, IFG ensures that the total income of current employees exceed the minimum wage set by the government, with a wage scale that takes into account market conditions and the Company's financial capacity.

PROCEDURE FOR PROPOSING AND DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

IFG has established mechanisms and procedures for the remuneration proposal process for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which include the following:

1. The income of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS);
2. The determination of income in the form of salary or honorarium, allowances and facilities of a fixed nature is done by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the company, and other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations;
3. The determination of income in the form of bonuses/performance incentives that are variable (merit rating) is conducted by considering performance factors and the financial capacity of the company, as well as other relevant factors; and
4. The income of the Board of Directors and Board of Commissioners of a subsidiary is budgeted as an expense in the Holding Members' Work Plan and Budget (RKAP).

STRUCTURE AND COMPONENTS OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration structure of the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Decree of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengusulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, komponen penghasilan bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penghasilan Direksi terdiri dari:
   a. Gaji/honorarium;
   b. Tunjangan; yang terdiri atas 1) Tunjangan Hari Raya, 2) Tunjangan Perumahan, dan 3) Asuransi Purna Jabatan;
   c. Fasilitas yang terdiri atas; 1) fasilitas kendaraan, 2) fasilitas kesehatan, dan 3) fasilitas bantuan hukum; serta; and
   d. Tantiem/insentif kinerja.
2. Penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:
   a. Gaji/honorarium;
   b. Tunjangan; yang terdiri atas 1) Tunjangan Hari Raya, 2) Tunjangan Transportasi, dan 3) Asuransi Purna Jabatan;
   c. Fasilitas yang terdiri atas; 1) fasilitas kesehatan dan 2) fasilitas bantuan hukum; serta
   d. Tantiem/insentif kinerja.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR SERTA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, IFG mengacu pada indikator kinerja manajemen yang telah digunakan dalam proses evaluasi kinerja kedua organ tersebut. Indikator tersebut tercantum dalam kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris, yang mencakup target RKAP, termasuk penetapan KPI beserta indikator, bobot penilaian, dan sasaran yang telah ditentukan. Selain itu, penetapan remunerasi juga mempertimbangkan dinamika pasar tenaga kerja di Indonesia serta kemampuan keuangan Perusahaan.

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi (Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara)

Number 90 of 2022 concerning the Policy for Proposing the Determination of Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. Based on the regulation, the income components of the Board of Commissioners and Directors are as follows:

1. The income of the Board of Directors consists of:
   a. Salary/honorarium;
   b. Allowances, consisting of 1) Holiday Allowance, 2) Housing Allowance, and 3) Retirement Insurance;
   c. Benefits, consisting of: 1) vehicle benefits, 2) health benefits, and 3) legal assistance benefits; and
   d. Bonuses/performance incentives.
2. The income of the Board of Commissioners consists of:
   a. Salary/honorarium;
   b. Allowances; consisting of 1) Holiday Allowance, 2) Transportation Allowance, and 3) Post-Employment Insurance;
   c. Benefits consisting of: 1) health benefits and 2) legal assistance benefits; and
   d. Bonuses/performance incentives.

DISCLOSURE OF INDICATORS AND DETERMINATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, IFG refers to the management performance indicators that have been used in the performance evaluation process for both organs. These indicators are set forth in the management contracts between the Board of Directors and the Board of Commissioners, which include targets from the Annual Work and Budget Plan (RKAP), including the established KPIs, their respective indicators, assessment weights, and targets. Additionally, the determination of remuneration also takes into account the dynamics of the Indonesian labor market as well as the Company's financial capacity.

Calculation of Remuneration Amount for Board of Commissioners and Board of Directors (In accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises)

Direktur Utama President Director	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham) 100% (determined using internal guidelines established by the Shareholders)
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Sebesar 90% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 90% of the President Director's Salary/Bonus/Performance Incentive
Direksi Lainnya Other Members of the Board of Directors	Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 85% of the President Director's Salary/Bonus/Performance Incentive
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 45% of the President Director's Salary/Bonus/Performance Incentive
Komisaris Lainnya Other Members of the Board of Commissioners	Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama 90% of the President Commissioners' Honorarium/Bonus/Performance Incentive

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Pemegang Saham menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi melalui Surat Kementerian BUMN mengenai Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Tahun 2023 dengan nomor SR-167/MBU/03/2024 tanggal 19 Maret 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, rincian nilai remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan struktur remunerasi yang berlaku disajikan sebagai berikut:

TOTAL REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, the Shareholders determined the remuneration amounts for the Board of Commissioners and the Board of Directors through a letter from the Ministry of State-Owned Enterprises regarding the Determination of the Compensation for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for the Year 2023, numbered SR-167/MBU/03/2024, dated March 19, 2024. Based on these provisions, the details of the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with the prevailing remuneration structure, are presented as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025
Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2025

Uraian Description	Jumlah (Rp juta) Total (IDR million)	
	2025	2024
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	22.463	30.978
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	47.821	69.442
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun per Tahun Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors by Year	70.284	100.420

Berdasarkan realisasi remunerasi tahun 2025, total remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mencapai Rp70.286 juta, menurun sebesar 30,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp100.420 juta. Penurunan tersebut terdiri atas remunerasi Dewan Komisaris turun dari Rp30.978 menjadi Rp22.465, serta remun direksi turun dari Rp69.442 menjadi Rp47.821.

Based on the 2025 remuneration realization, the total remuneration paid to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors amounted to IDR 70,286 million, a decrease of 30.01% compared with IDR 100,420 million in the previous year. The decrease reflected a decline in remuneration for the Board of Commissioners from IDR 30,978 million to IDR 22,465 million, as well as a decline in remuneration for the Board of Directors from IDR 69,442 million to IDR 47,821 million.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

IFG telah menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam Rapat Dewan Komisaris meliputi:

1. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi (Rapat Gabungan). Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.
2. Keputusan Rapat Gabungan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan bukan merupakan keputusan Dewan Komisaris yang terkait dengan operasional IFG.
3. Keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat dengan syarat keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris.
4. Keputusan yang menyangkut aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme rapat. Aspek strategis tersebut antara lain meliputi kegiatan strategis IFG yang harus mendapatkan persetujuan RUPS dan semua perbuatan Direksi yang harus dimintakan/mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
5. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus diungkap dalam Laporan Tahunan IFG.
6. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat.

Pelaksanaan Rapat

Penyelenggaraan rapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan IFG, atau tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Penyelenggaraan rapat juga dapat dilakukan melalui daring melalui telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta dapat berkomunikasi dan berinteraksi dalam Rapat Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

IFG has established provisions regarding the conduct of Board of Commissioners meetings, as set forth in the Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure. These provisions govern the following matters:

Basic Principles

The basic principles of Board of Commissioners meetings include:

1. Board of Commissioners meetings consist of Internal Board of Commissioners Meetings and Board of Commissioners Meetings attended by the Board of Directors (Joint Meetings). A Board of Commissioners meeting is a meeting attended by the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners.
2. Decisions made at Joint Meetings relate to the performance of supervisory duties and the provision of advice and do not constitute decisions of the Board of Commissioners regarding IFG's operations.
3. Binding decisions may also be made without holding a meeting, provided that such decisions are approved in writing and signed by all members of the Board of Commissioners.
4. Decisions concerning strategic aspects must be made through the meeting mechanism. These strategic aspects include, among others, IFG's strategic activities that require approval by the General Meeting of Shareholders (GMS) and all actions by the Board of Directors that must be requested or obtain written approval from the Board of Commissioners.
5. The number of meetings and the attendance of each member of the Board of Commissioners must be disclosed in IFG's Annual Report.
6. Minutes must be prepared for every Board of Commissioners meeting.

Meeting Implementation

Meetings shall be conducted in accordance with applicable regulations, which include, among other things, the following:

1. A Board of Commissioners' meeting is considered valid if held at IFG's registered office or at any other location within the territory of the Republic of Indonesia.
2. Meetings may also be held online via teleconference, video conference, or other electronic media that allow all participants to communicate and interact during the Board of Commissioners meeting.

3. Kehadiran dan keputusan anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara daring diperhitungkan dalam Rapat Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan masing-masing diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.
5. Panggilan rapat dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat dan bahan-bahan rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama.

7. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
8. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris.

9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
10. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan agenda dan jadwal rapat dengan mempertimbangkan permintaan dan masukan dari Dewan Komisaris.
11. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membantu dan mengatur penyelenggaraan rapat termasuk mempersiapkan materi rapat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
12. Sekretaris Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan IFG dalam persiapan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

13. Salah satu agenda dan bahan/materi adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya di dalam setiap rapat.

Kuorum Rapat dan Keabsahan Kehadiran

Pengaturan mengenai kuorum rapat serta keabsahan kehadiran peserta rapat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per-dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

3. The attendance and decisions of Board of Commissioners members attending the Board of Commissioners meeting online are counted toward the Board of Commissioners meeting.
4. Board of Commissioners meetings or Joint Meetings shall each be held at least once a month.

5. Meeting invitations shall be given in writing no later than 3 (three) days before the meeting is held, specifying the agenda, date, time, venue, and meeting materials.

6. Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings are chaired by the Chairperson of the Board of Commissioners.
7. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, which does not need to be proven to any party, the Board of Commissioners Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.
8. In the event that the President Commissioner does not make an appointment, the member of the Board of Commissioners who has served the longest as a member of the Board of Commissioners shall act as Chairperson of the Board of Commissioners Meeting.
9. In the event that the longest serving member of the Board of Commissioners is more than one person, the oldest member of the Board of Commissioners in age shall act as Chairperson of the meeting.
10. The Secretary of the Board of Commissioners is responsible for preparing meeting agendas and schedules by considering requests and inputs from the Board of Commissioners.
11. The Secretary of the Board of Commissioners is tasked with assisting and organizing meetings including preparing meeting materials for all members of the Board of Commissioners.
12. The Secretary of the Board of Commissioners coordinates with IFG's Corporate Secretary in the preparation of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings.
13. One of the agendas and materials is the results of the evaluation of the implementation of the decisions of the previous meeting in each meeting.

Meeting Quorum and Attendance Validity

Regulations regarding the meeting quorum and the validity of attendance are established as follows:

1. Meetings are valid and can make binding decisions, if attended or represented by more than ½ (one half) of the total number of members of the Board of Commissioners.
2. Meetings of the Board of Commissioners can be held if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.
3. A member of the Board of Commissioners may be represented in a meeting only by another member of the Board of Commissioners by virtue of a written proxy given specifically for that purpose.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam satu tahun.

6. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi, Pejabat dan Pegawai IFG atau undangan dari luar IFG.

7. Peserta tamu undangan rapat tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Proses pembahasan isu serta pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi maupun Rapat Gabungan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Semua keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

3. Semua keputusan rapat harus berdasarkan itikad baik, dan pertimbangan rasional, setelah melalui pembahasan yang mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen.
4. Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
5. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
6. Dalam pengambilan keputusan rapat, apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar IFG, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
7. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Dalam mata acara lain-lain, rapat tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua peserta rapat yang sah menyetujui penambahan mata acara.

9. Setiap peserta rapat berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk yang diwakilinya.

4. A member of the Board of Commissioners may only represent one other member of the Board of Commissioners.
5. Each member of the Board of Commissioners is required to attend at least 75% (seventy-five percent) of meetings in one year.
6. The Board of Commissioners may invite meetings of Directors, Officers and Employees of IFG or invitees from outside IFG.
7. Invited guest participants of the meeting do not have a vote in decision-making.

Discussion of Issues and Decision-Making

The process of discussing issues and making decisions at Board of Directors meetings and Joint Meetings is conducted in accordance with the applicable provisions, as follows:

1. All decisions of the Board of Commissioners are made during Board of Commissioners Meetings.
2. Decisions may also be made outside of Board of Commissioners meetings provided that all members of the Board of Commissioners agree on the manner and substance of the decision.
3. All meeting decisions must be based on good faith and rational consideration, following in-depth discussion of relevant matters, sufficient information, and free from conflicts of interest, and made independently.

4. All decisions at meetings are made by consensus.

5. If a decision based on consensus cannot be reached, the decision of the Board of Commissioners meeting shall be made by a vote based on a majority of more than ½ (one-half) of the valid votes cast at the relevant meeting.

6. In meeting decision-making, if the number of votes in favor and against is equal, the meeting's decision shall align with the opinion of the meeting chair, while still adhering to the provisions regarding accountability as stipulated in the IFG Articles of Association; however, regarding matters involving specific individuals, meeting decisions shall be made through a secret ballot.

7. In the event that there are more than 2 (two) alternatives proposed and the voting results have not yet yielded 1 (one) alternative with more than ½ (one-half) of the total votes cast, a runoff vote shall be held between the 2 (two) proposals that received the most votes so that one of the proposals receives more than ½ (one-half) of the total votes cast.
8. For "other business" items, the meeting shall not be authorized to make a decision unless all valid meeting participants approve the addition of the item to the agenda.
9. Each meeting participant is entitled to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote on behalf of the person they represent.

10. Jika terdapat peserta rapat yang mempunyai pendapat berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam Risalah Rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh *abstain*).
12. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
13. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam mencantumkan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
14. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap peserta rapat yang memiliki benturan kepentingan diharuskan tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan termasuk hak suara yang diwakilinya dan harus dicatat dalam Risalah Rapat.
15. Pimpinan rapat harus menyampaikan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
16. Setiap keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Penyelesaian Risalah Rapat

Ketentuan yang mengatur penyusunan dan isi Risalah Rapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.

2. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Risalah Rapat Gabungan wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Risalah Rapat disusun oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana tersebut pada nomor 2 dan 3, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dengan Risalah Rapat dan menjadi satu kesatuan dalam Risalah Rapat.
6. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat dan hal-hal yang diputuskan.
7. Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan sekurang-kurangnya:
   a. Acara, tempat, tanggal dan waktu dimulai dan berakhirnya rapat;
   b. Daftar nama dan tanda tangan kehadiran;

10. If any meeting participant has a differing opinion regarding a decision made, that opinion must be recorded in the Meeting Minutes as a dissenting opinion.

11. Every member of the Board of Commissioners present at the meeting or represented by a proxy must cast a vote (may not abstain).
12. A blank vote (abstention) is deemed to constitute approval of the meeting's decision.
13. Invalid votes are deemed nonexistent and are not counted when recording the total number of votes cast during the meeting.
14. To maintain independence and objectivity, any meeting participant who has a conflict of interest is required not to participate in voting for decision making including the voting rights he/she represents and must be recorded in the minutes of the meeting.
15. The chairperson must announce the conclusions and decisions at the end of each meeting.
16. Every meeting decision is binding on all members of the Board of Commissioners.

Finalization of the Meeting Minutes

The provisions governing the preparation and content of the Meeting Minutes include the following:

1. The results of the Board of Commissioners Meeting and Joint Meeting shall be set forth in the Minutes of Meeting.
2. Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners must be signed by the Chairperson of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present and submitted to all members of the Board of Commissioners.
3. Minutes of the Joint Meeting must be signed by the Chairperson of the Meeting and all members of the Board of Commissioners and Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Minutes of Meeting shall be prepared by the Secretary of the Board of Commissioners or other party appointed by the Board of Commissioners.
5. In the event that there are members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors who do not sign the results of the meeting as referred to in numbers 2 and 3, the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting and become an integral part of the Minutes of the Meeting.
6. If there are dissenting opinions occurring in the Meeting of the Board of Commissioners, the dissenting opinions shall be clearly stated in the Minutes of the Meeting along with the reasons for the dissenting opinions and the matters decided.
7. The Minutes of Meeting must describe the course of the meeting. For this reason, the Minutes of the Meeting must include at least:
   a. agenda, venue, date and time of the start and end of the meeting;
   b. attendance roster and signatures;

c. Alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
d. Permasalahan yang dibahas;
e. berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis termasuk yang mengemukakan pendapat;
f. Proses pengambilan keputusan;
g. Keputusan yang dihasilkan;
h. *Dissenting opinion*, jika ada;
i. Keputusan rapat sebelumnya; dan
j. Hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.

8. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membuat Risalah Rapat. Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris, Risalah Rapat dibuat oleh salah seorang dari antara peserta rapat yang hadir.

9. Risalah Rapat merupakan dokumen IFG yang penting sebagai bukti pengambilan keputusan. Oleh karena itu aspek legalitas dari Risalah Rapat diatur menurut ketentuan sebagai berikut:
   a. Risalah Rapat asli harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan peserta rapat yang hadir termasuk yang diwakili dan penulis Risalah Rapat;
   b. Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Dewan Komisaris yang tidak hadir (jika ada);
   c. setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai;
   d. Risalah Rapat asli dari setiap rapat harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh IFG serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris; dan
   e. Risalah Rapat asli dari setiap rapat dapat diakses oleh setiap anggota Dewan Komisaris.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala sebagai agenda rutin, dengan frekuensi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan, guna melakukan analisis serta evaluasi terhadap kinerja bulanan IFG. Rapat internal ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar anggota Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi terkait operasional perusahaan.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat internal. Informasi mengenai agenda rapat, risalah pertemuan, tingkat kehadiran, serta rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal sepanjang tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

c. reasons for the absence of members of the Board of Commissioners in the meeting;
d. issues discussed;
e. The various opinions contained in the meeting, especially in discussing strategic issues, include those who express opinions;
f. decision-making process;
g. the resulting decision;
h. dissenting opinion, if any;
i. decision of the previous meeting; and
j. evaluation results on the implementation of the decisions of the previous meeting.

8. The Secretary of the Board of Commissioners is in charge of preparing the Minutes of Meeting. In the event that the meeting is not attended by the Secretary of the Board of Commissioners, the Minutes of Meeting shall be made by one of the meeting participants present.

9. Minutes of Meeting is an important IFG document as evidence of decision making. Therefore, the legality aspect of the Minutes of Meeting is regulated according to the following provisions:
   a. The original Minutes of Meeting must be signed by the chairperson of the meeting and the meeting participants present including those represented and the author of the Minutes of Meeting;
   b. The Minutes of Meeting must be accompanied by a power of attorney granted specifically by the absent Board of Commissioners (if any);
   c. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive a copy of the Minutes of Meeting, even if he/she did not attend the meeting at the latest 7 (seven) days after the meeting is completed;
   d. The original Minutes of Meeting of each meeting shall be bound in an annual set and retained by the IFG and shall be available upon request by any Board Member; and
   e. The original Minutes of Meeting of each meeting are accessible to any member of the Board of Commissioners.

INTERNAL MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners meetings are held periodically as part of the regular agenda, at least once a month, to analyze and evaluate IFG's monthly performance. These internal meetings also serve as a means to strengthen coordination among Board of Commissioners members, thereby ensuring that supervisory functions are implemented more effectively, while also providing guidance and advice to the Board of Directors regarding the company's operations.

As of December 31, 2025, the Board of Commissioners had held 12 (twelve) internal meetings. Information regarding the meeting agenda, meeting minutes, attendance rates, and a Recapitulation of Board of Commissioners' attendance at internal meetings throughout 2025 is presented as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal
Recapitulation of Board of Commissioners' Attendance at Internal Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting												Jumlah Total Attendance	%
	11/2	12/3	14/4	19/6	23/6	10/7	1/8	4/8	20/8	9/9	9/10	30/10		
Fauzi Ichsan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	100
Hotbonar Sinaga*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n/a	0	0
Masyita Crystallin	√	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3	25
Nasrudin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	100
Sumiyati	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	100
Wahyu Setyawan**	√	√	x	√	√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	80
Rata-rata Average														**81,25**

*Sdr. Hotbonar Sinaga dalam kondisi sakit sepanjang Tahun 2025 dan berakhir masa jabatan pada 20 Oktober 2025.
**Sdr. Wahyu Setyawan selesai menjabat per 4 Juli 2025.
*Mr. Hotbonar Sinaga was on sick leave throughout 2025 and his term of office ended on October 20, 2025.
** Mr. Wahyu Setyawan's term of office ended on July 4, 2025.

Adapun materi dan topik yang dibahas dalam rapat internal Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

The matters and topics discussed in the Board of Commissioners' internal meetings included the following:

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	11 Februari 2025 February 11, 2025	• Pembahasan Penilaian Direksi PT BPUI (Persero) dalam rangka *Updating Talent Pool*; dan • Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) Tahun 2023. • Discussion of the Performance Evaluation of the Board of Directors of PT BPUI (Persero) in Connection with Updating the Talent Pool; and • Performance Evaluation of the Secretary of the Board of Commissioners and the Staff of the Secretary of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) for the Year 2023.
2	12 Maret 2025 March 12, 2025	• Pembahasan *Top* 20% *Talent* BOD-1/*Selected Talent* IFG Grup Tahun 2025. • Discussion of the Top 20% Talent of BOD-1/Selected Talent of the IFG Group for 2025.
3	14 April 2025 April 14, 2025	• Pembahasan Audit 2024. • Discussion of the 2024 Audit.
4	19 Juni 2025 June 19, 2025	• Persiapan Pelaksanaan RUPS Audit Laporan Keuangan Tahun 2024; dan • *Update* Progres Komite-Komite. • Preparations for the Annual General Meeting to Audit the 2024 Financial Statements; and • Progress Updates from the Committees.
5	23 Juni 2025 June 23, 2025	• Pembahasan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025 dan Tantiem Kinerja Tahun Buku 2024 • Discussion of Proposed Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025 and Performance Bonuses for Fiscal Year 2024
6	10 Juli 2025 July 10, 2025	• *Update* Progres Komite; dan • Pengadaan KAP. • Committee Progress Update; and • Selection of an Audit Firm.
7	1 Agustus 2025 August 1, 2025	• Koordinasi penyiapan tanggapan usulan Pengadaan PMN Tahun 2026; • Diskusi Tanggapan Malus; dan • *Update* Progres Kerja Komite. • Coordination on preparing a response to the proposed 2026 State Equity Participation (PMN); • Discussion on Malus's Response; and • Update on the Committee's Work Progress.
8	4 Agustus 2025 August 4, 2025	• Pembahasan Usulan PMN Tahun 2026 • Discussion of the 2026 PMN Proposal
9	20 Agustus 2025 August 20, 2025	• Pengisian Penilaian RMI Tahun 2025 atas Pelaksanaan Tahun 2024 oleh Dewan Komisaris; dan • Pembahasan tata kelola Organ Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) • Completion of the 2025 RMI Assessment on 2024 Performance by the Board of Commissioners; and • Discussion of the governance structure of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero)

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
10	9 September 2025 September 9, 2025	• Pembahasan Rencana Tanggapan Dewan Komisaris atas Pengalihan Aset Jiwasraya; dan • Pembahasan lain-lain. • Discussion of the Board of Commissioners' Proposed Response to the Transfer of Jiwasraya Assets; and • Discussion of other matters.
11	9 Oktober 2025 October 9, 2025	• Progres Kerja Komite; • Pembahasan Surat Nasre; • Pembahasan Pengisian Kekosongan Posisi Komisaris dan Direksi di IFG. • Committee Work Progress; • Discussion of Nasre's Letter; • Discussion on Filling Vacancies for Commissioners and Directors at IFG.
12	30 Oktober 2025 October 30, 2025	• Telaah Komite atas RKAP 2026; • Usulan RKA Dekom 2026; dan • Hal Lainnya • Committee Review of the 2026 Budget Plan; • Proposed 2026 Budget for the Board of Commissioners; and • Other Matters

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan melibatkan Direksi sebagai forum koordinasi untuk membahas laporan Perseroan Direksi, mengevaluasi kondisi dan prospek usaha Perusahaan, serta menyampaikan tanggapan, catatan, dan rekomendasi atas pengelolaan Perusahaan. Selain itu, Rapat Gabungan juga berfungsi sebagai sarana bagi Dewan Komisaris untuk menelaah Perseroan, kebijakan, serta tindak lanjut atas arahan yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya.

Rapat Gabungan merupakan agenda rutin yang dijadwalkan setiap bulan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) Kali Rapat Gabungan bersama Direksi. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi kinerja triwulanan serta pembahasan berbagai isu strategis yang memerlukan arahan, pertimbangan, konsultasi, dan/atau persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam hal tertentu, Dewan Komisaris juga dapat melibatkan Komite Audit untuk memberikan masukan, melakukan klarifikasi, maupun melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Setiap pelaksanaan Rapat Gabungan dengan Direksi didokumentasikan dalam Risalah Rapat yang memuat capaian kinerja triwulanan maupun agenda lain sebagaimana tercantum dalam undangan rapat. Hasil pembahasan dalam rapat tersebut juga dimanfaatkan sebagai bahan dalam pertemuan antara IFG dan Pemegang Saham. Adapun rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan disajikan sebagai berikut:

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners periodically holds Joint Meetings with the Board of Directors as a coordination forum to discuss the Company's reports, evaluate the Company's business conditions and prospects, and provide feedback, observations, and recommendations regarding the Company's management. Additionally, the Joint Meeting serves as a platform for the Board of Commissioners to review the Company, its policies, and follow-up on directives issued in previous meetings.

Joint Meetings are a routine agenda item scheduled monthly. Throughout 2025, the Board of Commissioners held 22 (twenty-two) Joint Meetings with the Board of Directors. These meetings focused on evaluating quarterly performance and discussing various strategic issues requiring guidance, consideration, consultation, and/or approval from the Board of Commissioners. In certain cases, the Board of Commissioners may also involve the Audit Committee to provide input, seek clarification, or conduct on-site inspections.

Each Joint Meeting with the Board of Directors is documented in Meeting Minutes that include quarterly performance results as well as other agenda items as listed in the meeting invitation. The results of the discussions during these meetings are also used as material for meetings between IFG and its Shareholders. The Recapitulation of Attendance for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Joint Meetings is presented as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direks Pada Rapat Gabungan
Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at Joint Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Gabungan Date of Joint Meeting										
	13/1	24/1	11/2	14/2	18/2	20/3	14/4	2/5	5/6	19/6	10/7
Dewan Komisaris Board of Commissioners											
Fauzi Ichsan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Hotbonar Sinaga*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Masyita Crystallin	√	x	√	√	√	√	√	x	X	x	x
Nasrudin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sumiyati	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Wahyu Setyawan**	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	n/a
Rata-rata Average											
Direksi Board of Directors											
Hexana Tri Sasongko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Haru Koesmahargyo	√	x	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Rizal Ariansyah	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√
Rianto Ahmadi	√	√	√	x	√	x	√	√	√	√	√
Heru Handayanto	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	√
Rata-rata Average											

Sdr. Hotbonar Sinaga dalam kondisi sakit sepanjang Tahun 2025 dan berakhir masa jabatan pada 20 Oktober 2025.
**Sdr. Wahyu Setyawan berhenti menjabat per 8 Juli 2025.
*Mr. Hotbonar Sinaga was on sick leave throughout 2025 and his term of office ended on October 20, 2025.
** Mr. Wahyu Setyawan's term of office ended on July 8, 2025.

Adapun agenda pembahasan pada rapat gabungan Adalah sebagai berikut:

The agenda for the joint meeting is as follows:

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	13 Januari 2025 January 13, 2025	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025. Company Work Plan and Budget for 2025.
2	24 Januari 2025 January 24, 2025	1. Permohonan Persetujuan Usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2025 (PMN TA 2025); dan 2. *Update* Isu pada Anggota *Holding*: a. Kesehatan Keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre); b. Implementasi Kebijakan Bantuan Selektif pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja; c. *Update* Status MTN Sritex PT Bahana TCW Investment Management; dan d. *Update* Audit Laporan Keuangan IFG dan Anggota *Holding* Tahun 2024. 1. Request for Approval of the Proposed State Equity Participation for Fiscal Year 2025 (PMN FY 2025); and 2. Update on Issues Regarding Holding Company Subsidiaries: a. Financial Health of PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre); b. Implementation of the Selective Assistance Policy at PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja; c. Update on the Status of Sritex MTNs Managed by PT Bahana TCW Investment Management; and d. Update on the Audit of IFG's and Holding Company Members' 2024 Financial Statements.
3	11 Februari 2025 February 11, 2025	*Update* Laporan Keuangan 2024 (*Unaudited*). Update on the 2024 Financial Statements (Unaudited).
4	14 Februari 2025 February 14, 2025	Taggapan Dewan Komisaris Mengenai Penyampaian RJPP 2025 – 2029. Board of Commissioners' Response Regarding the Submission of the 2025–2029 RJPP.
5	18 Februari 2025 February 18, 2025	Pemaparan Kinerja Keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Triwulan IV Tahun 2024. Presentation of the Financial Performance of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries for the Fourth Quarter of 2024.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direks Pada Rapat Gabungan
Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at Joint Meetings

	Tanggal Pelaksanaan Rapat Gabungan Date of Joint Meeting										Jumlah Total Attendance	%
	1/ 8	4/ 8	26/8	19/9	9/ 10	23/ 10	30/ 10	18/ 11	19/ 11	29/ 11	29/ 12		
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22	100
	x	x	x	x	x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0
	x	x	x	x	x	x	x	x	√	x	x	7	31
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22	100
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22	100
	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	90
													70
	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	X	20	90,9
	x	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20	90,9
	x	x	√	√	√	√	x	√	x	x	X	16	72,7
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20	90,9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	21	95,4
													86,16

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
6	20 Maret 2025 March 20, 2025	1. Permohonan Persetujuan Usulan Penetapan Limit Kewenangan Pengambilan Keputusan Pendayagunaan Aset Tanah dan Bangunan IFG; dan 2. *Update* Pembahasan Isu Audit Signifikan dan Dampak kepada Audit Tahun Buku 2024. 1. Request for Approval of the Proposed Setting of Decision-Making Authority Limits for the Utilization of IFG Land and Building Assets; and 2. Update on the Discussion of Significant Audit Issues and Their Impact on the Fiscal Year 2024 Audit.
7	14 April 2025 April 14, 2025	Finalisasi Audit Tahun Buku 2024. Finalization of the Fiscal Year 2024 Audit.
8	2 Mei 2025 May 2, 2025	Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris sehubungan dengan Aksi Korporasi dalam rangka Pembentukan Perusahaan Induk Investasi (*Holding* Investasi) melalui Penunjukan PT Bahana Mitra Investa. Request for the Board of Commissioners' Response Regarding Corporate Action for the Establishment of an Investment Holding Company through the Appointment of PT Bahana Mitra Investa.
9	5 Juni 2025 June 5, 2025	1. Pembahasan Malus dan *Clawback* atas Tantiem; dan 2. Pembahasan Rencana Direksi atas Audit Forensik. 1. Discussion of Malus and Clawback on Bonuses; and 2. Discussion of the Board of Directors' Plan for a Forensic Audit.
10	19 Juni 2025 June 19, 2025	Rapat Persiapan RUPS Laporan Keuangan Konsolidasian (*Audited*) IFG Tahun Buku 2024. Preparatory Meeting for the AGM on IFG's Consolidated Financial Statements (Audited) for Fiscal Year 2024.
11	10 Juli 2025 July 10, 2025	1. *Update* Pengadaan KAP Tahun 2025; 2. *Update* Kesiapan Penerapan ICOFR; dan 3. *Update* Penerapan PSAK 117. 1. Update on the Selection of an Public Auditing Firm for 2025; 2. Update on Readiness for ICOFR Implementation; and 3. Update on the Implementation of PSAK 117.

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
12	1 Agustus 2025 August 1, 2025	1. Pembahasan Usulan PMN Tahun 2026; dan 2. *Update* Progres Program Organ Dewan Komisaris. 1. Discussion of the 2026 State Equity Participation Proposal; and 2. Update on the Progress of the Board of Commissioners' Organizational Program.
13	4 Agustus 2025 August 4, 2025	Penyampaian Hasil Telaah Organ Dewan Komisaris atas Usulan PMN Tahun 2026. Presentation of the Board of Commissioners' Review Results on the 2026 State Equity Participation Proposal.
14	26 Agustus 2025 August 26, 2025	1. Persetujuan Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2025 PT BPUI (Persero); dan 2. Laporan Pelaksanaan Penugasan Jiwasraya. 1. Approval of PT BPUI (Persero)'s Second Quarter 2025 Management Report; and 2. Report on the Implementation of the Jiwasraya Assignment.
15	19 September 2025 September 19, 2025	1. *Update* Progres Pengadaan KAP 2025; dan 2. *Update* perkembangan Audit Forensik Askrindo. 1. Progress Update on the 2025 KAP Procurement; and 2. Update on the Progress of the Askrindo Forensic Audit.
16	9 Oktober 2025 October 9, 2025	Progres Penyusunan RKAP 2026. Progress on the Preparation of the 2026 Budget Plan.
17	23 Oktober 2025 October 23, 2025	Kinerja Penjaminan KUR. KUR Guarantee Performance.
18	30 Oktober 2025 October 30, 2025	Pembahasan Usulan *Draft* Pertama Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Discussion of the First Draft Proposal for the 2026 Work Plan and Budget of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
19	18 November 2025 November 18, 2025	Pembahasan Progres Audit IFG Tahun 2025. Discussion of the Progress of the 2025 IFG Audit.
20	19 November 2025 November 19, 2025	1. Paparan *Update* Usulan RKAP 2026; dan 2. *Update* Proses *Streamline*. 1. Presentation on Updates to the 2026 RKAP Proposal; and 2. Update on the Streamline Process.
21	28 November 2025 November 28, 2025	Laporan Triwulan III 2025. Third Quarter 2025 Report.
22	29 Desember 2025 December 29, 2025	Pembahasan RKAP 2026 (*4th Submission*). Discussion of the 2026 Budget Plan (4th Submission).

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi merupakan forum yang diselenggarakan oleh Direksi dan dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk berdasarkan kuasa. Pelaksanaan Rapat Direksi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir. Risalah Rapat berisi hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ *dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal yang diputuskan.
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

BOARD OF DIRECTORS MEETING

A Board of Directors Meeting is a forum convened by the Board of Directors and chaired by the President Director or a designated member of the Board of Directors acting under a power of attorney. The conduct of Board of Directors Meetings is governed by the provisions set forth in the Articles of Association, which include, among other things, the following:

1. All decisions of the Board of Directors are made at the Board of Directors Meeting.
2. Decisions may also be made outside the Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors agree on the manner and subject matter of the resolutions.
3. In every Meeting of the Board of Directors, Minutes of Meeting must be drawn up and signed by the Chairperson of the Meeting of the Board of Directors and all members of the Board of Directors present. The Minutes of Meeting shall contain the matters discussed (including the statement of dissenting opinion of the members of the Board of Directors, if any) and the matters decided.
4. The Board of Directors Meeting may be held at any time if:

a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
7. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
10. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir, dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
11. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
12. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
13. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
14. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
15. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan sebanyak 39 kali Rapat Direksi. Informasi mengenai agenda rapat, risalah pertemuan, tingkat kehadiran, serta rekapitulasi kehadiran anggota Direksi dalam rapat-rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

a. It is deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
b. Upon written request from one or more members of the Board of Commissioners; or
c. Upon a written request from one (1) or more shareholders who collectively represent one-tenth (1/10) or more of the total number of shares with voting rights.

5. Meetings of the Board of Directors are considered valid if held at the domicile of the company or at another place within the territory of the Republic of Indonesia.
6. The invitation to the Meeting of the Board of Directors shall be made in writing by a member of the Board of Directors who is entitled to represent the Company and shall be submitted no later than 3 (three) days before the meeting is held or within a shorter period if in an urgent situation, without taking into account the date of the invitation and the date of the meeting.
7. The meeting summons must include the agenda, date, time and place of the meeting.
8. Prior notice of a meeting is not required if all members of the Board of Directors are present at the meeting.
9. Meetings of the Board of Directors are valid and entitled to make binding decisions if attended by more than ½ (one-half) of the total number of members of the Board of Directors or their authorized representatives.
10. In other agenda items, the Board of Directors Meeting is not entitled to make decisions unless all members of the Board of Directors or their authorized representatives, are present, and agree to the addition of the meeting agenda.
11. All Board Meetings are chaired by the President Director.
12. All decisions in the Board of Directors Meeting are made by deliberation for consensus.
13. In the event that a decision cannot be made by deliberation to reach consensus, the decision shall be made by ordinary majority vote.
14. A blank vote (abstention) is deemed to approve the resolution of the meeting.
15. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting.

Throughout 2025, the Board of Directors held a total of 39 Board of Directors' Meetings. Information regarding the meeting agenda, meeting minutes, attendance rates, and a Recapitulation of Attendance at these meetings is presented as follows:

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
1	Selasa, 7 Januari 2025 Tuesday, January 7, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	• Konsultasi Tambahan Pencadangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Anak Perusahaan • Pemaparan Perkembangan Penyelesaian Portofolio Asuransi Kredit • Permohonan Persetujuan Konsep Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) IFG ke-5 • Additional Consultation on the People's Business Credit (KUR) Reserve at Subsidiaries • Presentation on Progress in Settling the Credit Insurance Portfolio • Request for Approval of the Concept for the IFG 5th Anniversary Celebration	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Kepala Divisi Aktuaria, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Human Capital, Technical Director, Acting Business Director, Director of Finance, Head of the Actuarial Division, and Acting Head of Corporate Secretary Division
2	Jumat, 10 Januari 2025 Friday, January 10, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 Request for Approval of the Company's 2025 Work Plan and Budget	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Human Capital, Technical Director, Acting Business Director, Acting Head of Corporate Secretary Division, Head of Corporate Finance Division
3	Jumat, 24 Januari 2025 Friday, January 24, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	Permohonan Persetujuan Usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2025 (PMN TA 2025) Request for Approval of the Proposed State Equity Participation for Fiscal Year 2025 (PMN FY 2025)	Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan President Director, Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of Corporate Secretary Division, Head of Corporate Finance Division
4	Selasa, 4 Februari 2025 Tuesday, February 04, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	• Permohonan Persetujuan RJPP IFG Konsolidasi 2025 – 2029 • Permohonan Persetujuan Konsep Brand Arsitektur IFG • Sinergitas Optimalisasi Properti untuk mewujudkan IFG One Building • Rencana Pengadaan Seragam Bersama IFG Group • Analisis Dampak Putusan MK No. 83/PUU/XXII/2024 Tanggal 03 Januari 2025 • Kajian Singkat atas Penarikan dan Penganggunan Dividen • *Update Parenting* Model IFG • Request for Approval of the Consolidated IFG RJPP 2025–2029 • Request for Approval of the IFG Brand Architecture Concept • Synergy in Property Optimization to Realize the IFG One Building • IFG Group Joint Uniform Procurement Plan • Impact Analysis of Constitutional Court Decision No. 83/PUU/XXII/2024 dated January 03, 2025 • A Brief Review of Dividend Withdrawals and Allocations • Update on the IFG Parenting Model	Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Departemen Office of The Board, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan, Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset, Kepala Divisi Hukum, SEVP Transformasi, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Audit Internal, Kepala Divisi Optimasi Operasional Asuransi, Kepala Divisi SDM President Director, Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Office of the Board, Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division, Head of the Procurement and Asset Management Division, Head of the Legal Division, SEVP of Transformation, Head of the Corporate Strategy Division, Head of the Internal Audit Division, Head of the Insurance Operations Optimization Division, Head of the Human Capital Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
5	Jumat, 14 Februari 2025 Friday, February 14, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	• Permohonan Persetujuan RJPP IFG Konsolidasi 2025 – 2029 • *Update* Pembahasan Tanggapan atas Temuan Audit Eksternal • *Update* terkait Digitalisasi Operasional Proses Bisnis • Request for Approval of the Consolidated IFG RJPP 2025–2029 • Update on the Discussion of Responses to External Audit Findings • Update on the Digitalization of Business Process Operations	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Optimasi Operasional Asuransi President Director, Vice President Director, Director of Human Capital, Technical Director, Acting Business Director, Director of Finance, Head of the Corporate Strategy Division, Head of the Internal Audit Division, Head of the Insurance Operations Optimization Division
6	Senin, 17 Februari 2025 Monday, February 17, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	*Update* Bahan Presentasi kepada Wakil Menteri BUMN Update on Presentation Materials for the Deputy Minister of State-Owned Enterprises	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi SDM dan SEVP Transformasi President Director, Vice President Director, Director of Human Capital, Technical Director, Acting Business Director, Director of Finance, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Strategy Division, Head of the Human Capital Division, and SEVP of Transformation
7	Selasa, 18 Februari 2025 Tuesday, February 18, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	*Update* Tindak Lanjut dari Hasil Audit Eksternal di Anak Perusahaan IFG Update on Follow-Up Actions Based on the Results of the External Audit at IFG's Subsidiaries	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal President Director, Vice President Director, Director of Human Capital, Technical Director, Acting Business Director, Director of Finance, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Internal Audit Division
			Pemaparan Kinerja Keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan TW IV Tahun 2024 Financial Performance Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries for the Fourth Quarter of 2024	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Divisi Bisnis Asuransi dan Penjaminan, Kepala Divisi Bisnis CMI, Kepala Divisi Bisnis Asuransi Jiwa, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, dan Kepala Divisi Keuangan Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Human Capital, Technical Director, Acting Business Director, Director of Finance, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Accounting and Reporting Division, Head of the Insurance and Guarantee Business Division, Head of the CMI Business Division, Head of the Life Insurance Business Division, Head of the Corporate Strategy Division, and Head of the Corporate Finance Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
8	Selasa, 25 Februari 2025 Tuesday, February 25, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	• Persetujuan *Finance Acceleration* Program • Persetujuan RencanA Pengembangan Bisnis Asuransi dan Penjaminan Syariah IFG Group • *Update* Kebijakan *Cut Loss* • Approval of the Finance Acceleration Program • Approval of the IFG Group's Sharia Insurance and Guarantee Business Development Plan • Update on the Stop-Loss Policy	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Departemen Office of The Board, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Office of the Board, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Corporate Strategy Division
9	Selasa, 4 Maret 2025 Tuesday, March 04, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	• *Update* Pengelolaan Aset • *Update* Laporan Penyelesaian Isu di Grup Perusahaan • Update on Assets Management • Update on the Report on the Resolution of Issues within the Corporate Group	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Hukum President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Legal Division
10	Jum'at, 7 Maret 2025 Friday, March 7, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	*Update* Pembahasan Audit Tahun Buku 2024 Update on the Audit Discussion for Fiscal Year 2024	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, dan Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of Corporate Secretary Division, and Head of Accounting and Reporting Division
11	Selasa, 11 Maret 2025 Tuesday, March 11, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	• Permohonan Persetujuan Usulan Penetapan *Limit* Kewenangan Pengambilan Keputusan Pendayagunaan Aset Tanah dan Bangunan IFG • Permohonan Persetujuan Perjanjian Penyelesaian Tanda Minat dan AJB Aset IFG • *Update* terkait Surat Utang IFG • *Update* Pembahasan Pencapaian KPI Divisi dan Perusahaan • Request for Approval of the Proposed Decision-Making Authority Limits for the Utilization of IFG's Land and Building Assets • Request for Approval of the Letter of Intent Settlement Agreement and Deed of Asset Transfer for IFG Assets • Update Regarding IFG Bonds • Update on the Discussion of Division and Company KPI Achievements	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset, Kepala Divisi M&A dan Partnership, Kepala Divisi Strategi Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Procurement and Asset Management Division, Head of the M&A and Partnership Division, Head of the Corporate Strategy Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
12	Senin, 14 April 2025 Monday, April 14, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	Finalisasi Audit Tahun Buku 2024 Finalization of the Audit for Fiscal Year 2024	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Accounting and Reporting Division
13	Selasa, 22 April 2025 Tuesday, April 22, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• Permohonan Persetujuan Usulan Tema, Desain, dan Konsep Foto Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan IFG Tahun 2024 • Permohonan Persetujuan untuk Penawaran Nilai Sewa Baru Aset IFG • Request for Approval of Proposed Themes, Designs, and Concepts for the Photos in the IFG 2024 Annual Report and Sustainability Report • Request for Approval of a New Rental Rate Proposal for IFG Assets	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi M&A dan Partnership President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division and Head of the M&A and Partnership Division
14	Selasa, 29 April 2025 Tuesday, April 29, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• Permohonan Persetujuan *Design Cover* dan Tema Laporan Tahunan IFG 2024 (Tindak Lanjut Rapat Direksi 22 April 2025) • *Update* dan Persetujuan Pembahasan Tindaklanjut atas Kajian *Shared Service Utilization* • *Update* Tindak Lanjut Aset IFG • *Update* Kondisi Aset Tanah dan Bangunan di IFG serta Opsi Pengelolaannya • Request for Approval of the Cover Design and Theme for the 2024 IFG Annual Report (Follow-up to the Board of Directors Meeting on April 22, 2025) • Update and Approval of the Follow-Up Discussion on the Shared Service Utilization Study • Update on IFG Asset Follow-Up • Update on the Status of Land and Building Assets at IFG and Options for Their Management	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi M&A dan Partnership, Kepala Divisi Strategi Digital dan Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the M&A and Partnership Division, Head of the Digital Strategy and Business Development Division, Head of the Finance Division, Head of the Procurement and Asset Management Division
15	Jum'at, 9 Mei 2025 Friday, May 9, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• *Update* Kondisi Perusahaan Reasuransi di Grup IFG • *Update* Progress Program Kerja RKAP 2025 IFG • Update on the Status of Reinsurance Companies in the IFG Group • Update on the Progress of the IFG 2025 RKAP Work Program	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Special Liability Management, Kepala Divisi Strategi Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Special Liability Management Division, Head of the Corporate Strategy Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
16	Selasa, 20 Mei 2025 Tuesday, May 20, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	· Persetujuan Penajaman Fokus Bisnis Asuransi Umum Syariah IFG Group · *Update Scoping* dan Implementasi ICOFR di Anak Perusahaan · Approval of the Refocusing of the IFG Group's Sharia General Insurance Business · Update on the Scope and Implementation of ICOFR at Subsidiaries	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of the Accounting and Reporting Division
17	Selasa, 27 Mei 2025 Tuesday, May 27, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	· Permohonan Persetujuan Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2025 · *Update* Rencana Revisi RKAP 2025 · Request for Approval of the First Quarter 2025 Management Report · Update on the Proposed Revision of the 2025 Annual Budget Plan	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Manajemen Portofolio Investasi dan Anak Perusahaan, Kepala Keuangan Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Investment Portfolio and Subsidiaries Management Division, Head of Corporate Finance
18	Selasa, 24 Juni 2025 Tuesday, June 24, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	· Pembahasan APS & Persiapan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan IFG Tahun Buku 2024 · *Update* Pembahasan Perlakuan Akuntansi di Grup Perusahaan IFG · Permohonan Persetujuan Proposal Pembelian Saham Minoritas di Perusahaan Terafiliasi · Permohonan Persetujuan untuk Melakukan Revisi RKAP 2025 dan Persetujuan APS Revisi RKAP 2025 · Discussion on Shareholders' Aspirations (APS) and Preparation for the GMS on the Approval of IFG's Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year · Update on the Discussion of Accounting Treatment within the IFG Group · Request for Approval of the Proposal to Acquire a Minority Shareholding in an Affiliated Company · Request for Approval to Revise the 2025 RKAP and Approval of the Shareholders' Aspirations (APS) for the Revised 2025 RKAP	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of the Corporate Finance Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
19	Kamis, 3 Juli 2025 Thursday, July 3, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• *Update* Usulan Tindak Lanjut atas *Restatement* dari Laporan Keuangan *Audited* • *Update* Daftar Inventarisasi usulan penyesuaian pada UU 33 Tahun 1965 • *Update* Kajian Penugasan KUR • Update on Proposed Follow-Up Actions Regarding the Restatement of the Audited Financial Statements • Update on the Inventory List of Proposed Amendments to Law No. 33 of 1965 • Update on the KUR Assignment Study	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Divisi Hukum President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Accounting and Reporting Division, Head of Legal Division
20	Selasa, 8 Juli 2025 Tuesday, July 8, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• Permohonan Persetujuan Usulan PMN TA 2026 • *Update* Solusi untuk Perhitungan PSAK 109 • Request for Approval of the Proposed State Equity Participation (PMN) for Fiscal Year 2026 • Update on the Solution for PSAK 109 Calculations	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Accounting and Reporting Division
21	Rabu, 23 Juli 2025 Wednesday, July 23, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	• Persetujuan Draf Perjanjian Pelepasan Tanda Minat & Draf Perjanjian Penyelesaian Tanda Minat • Persetujuan Izin Prinsip atas Rencana Perubahan *Shareholder Agreement* di Anak Perusahaan • PMO *Integrated Distribution Channel* (IDC) dan *Shared Service Center* • Persetujuan Prinsip untuk Aksi Korporasi Pembelian Saham dalam persiapan *Shared Service Center* • Persetujuan Pengadaan Konsultan dan KJPP • Persetujuan Terkait Aksi Korporasi • *Update* Pembahasan terkait PMN • *Update* Penghitungan Cadangan Teknis • Approval of the Draft Agreement for the Release of the Expression of Interest & Draft Agreement for the Settlement of the Expression of Interest • Approval in Principle for the Proposed Amendment to the Shareholders' Agreement of a Subsidiary • PMO for the Integrated Distribution Channel (IDC) and Shared Service Center • Approval in Principle for the Share Acquisition Corporate Action in Preparation for the Shared Service Center • Approval for the Procurement of Consultants and KJPP • Approval Related to Corporate Actions • Update on Discussions Related to PMN • Update on the Calculation of Technical Reserves	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi M&A dan Partnership, Kepala Divisi Capital Market dan Investasi, Divisi Strategi Digital dan Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Hukum President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of Corporate Secretary Division, Head of M&A and Partnership Division, Head of Capital Market and Investment Division, Digital Strategy and Business Development Division, Head of Corporate Finance Division, Head of Legal Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
22	Selasa, 29 Juli 2025 Tuesday, July 29, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• Implementasi Logo Danantara • Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penugasan IFG dalam Rangka Penyehatan Keuangan Jiwasraya • Implementation of the Danantara Logo • Progress Report on the Implementation of IFG's Assignment for the Financial Restructuring of Jiwasraya	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Bisnis Asuransi Jiwa President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of Corporate Secretary Division, Head of Life Insurance Business Division
23	Rabu, 6 Agustus 2025 Wednesday, August 06, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• *Update* Pengadaan KAP Audit Tahun Buku 2025 • *Update* Pembahasan Kajian Akuntansi atas Kontrak Asuransi Kredit (KUR) Terhadap Streamlining • *Update* Penyampaian *Progress* Program Kerja RKAP 2025-Q2 • *Update* Proses Pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) IFG • Update on the Procurement of the Public Accounting Firm for the 2025 Fiscal Year Audit • Update on Discussions of the Accounting Study on Credit Insurance Contracts (KUR) in Relation to Streamlining • Update on the Progress of the Q2 2025 RKAP Work Programs • Update on the Establishment Process of IFG's Financial Conglomerate Holding Company (PIKK)	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, , Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Accounting and Reporting Division, Head of Corporate Strategy Division
24	Selasa, 19 Agustus 2025 Tuesday, August 19, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	Kajian Penatausahaan & Penajaman Fokus Bisnis Penjaminan Syariah di Ekosistem IFG Study on the Management and Sharpening of the Sharia Guarantee Business Focus within the IFG Ecosystem	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi MPIAP President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of the MPIAP Division
25	Senin, 25 Agustus 2025 Monday, August 25, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	Persetujuan Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2025 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)'s Management Report for the Second Quarter of 2025	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Manajemen Portofolio Investasi dan Anak Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Investment Portfolio and Subsidiaries Management Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
26	Selasa, 2 September 2025 Tuesday, September 02, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• Persetujuan Arahan Pemegang Saham (APS) Seri B RKAP 2026 IFG • Persetujuan Implementasi IFG Parenting Model • Approval of the Series B Shareholders' Aspirations (APS) for IFG's 2026 RKAP • Approval of the Implementation of the IFG Parenting Model	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, SEVP Transformasi President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of Corporate Strategy Division, SEVP of Transformation
27	Kamis, 2 Oktober 2025 Thursday, October 2, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• *Update* Solusi Perhitungan PSAK 109 • *Update* Makroekonomi • Update on the Solution for PSAK 109 Calculations • Update on Macroeconomics	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan, SEVP IFG Progress President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Accounting and Reporting Division, SEVP of IFG Progress
28	Jumat, 10 Oktober 2025 Friday, October 10, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• Persetujuan Alokasi Anggaran *Streamlining* di RKAP 2026 dan Skema Pengadaan Konsultan • *Update Submission* Materi Pra-RJPP ke Danantara • Approval of the Streamlining Budget Allocation in the 2026 RKAP and the Consultant Procurement Scheme • Update on the Submission of Pre-RJPP Materials to Danantara	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of Corporate Secretary Division, Head of Corporate Strategy Division
29	Jumat, 24 Oktober 2025 Friday, October 24, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	• Persetujuan Usulan Beban *Holding* RKAP 2026 • *Update* Hasil Reviu terkait klaim perusahaan reasuransi • *Update* Pokok-Pokok Penting Terkait Perubahan UU BUMN • Approval of the Proposed Holding Expenses in the 2026 RKAP • Update on the Review Results Related to Reinsurance Company Claims • Update on Key Points Regarding the Amendments to the SOE Law	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Keuangan Perusahaan, Divisi Optimasi Operasional Asuransi, Kepala Divisi Hukum President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Insurance Operations Optimization Division, Head of the Legal Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
30	Selasa, 28 Oktober 2025 Tuesday, October 28, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	*Updated* Progres Terkait Upaya Penguatan Landasan Hukum atas Pelaksanaan Program Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Progress Update on Efforts to Strengthen the Legal Basis for the Implementation of the Road Traffic Accident Fund Program	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Hukum, Plt. Kepala Divisi Asuransi dan Penjaminan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of Corporate Secretary Division, Head of Legal Division, Acting Head of Insurance and Guarantee Division
31	Kamis, 30 Oktober 2025 Thursday, October 30, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor	Persetujuan Submission RKAP Konsolidasi 2026 Approval of the Submission of the 2026 Consolidated RKAP	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of Corporate Finance Division, Head of the Corporate Strategy Division
32	Kamis, 06 November 2025 Thursday, November 06, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	Permohonan Persetujuan Rapat Direksi atas Percepatan Penyelesaian Piutang KUR Request for Board of Directors' Meeting Approval for the Acceleration of KUR Receivables Settlement	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Divisi Special Liability Management President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Corporate Strategy Division, Head of the Legal Division, Head of the Accounting and Reporting Division, Head of the Special Liability Management Division
33	Rabu, 12 November 2025 Wednesday, November 12, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	*Update* Profil Keuangan dan Rencana Tindak Update on Financial Profile and Action Plan	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Special Liability Management, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan. President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of Special Liability Management Division, Head of the Accounting and Reporting Division.

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
34	Kamis, 13 November 2025 Thursday, November 13, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	*Update* Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Update on Discussions Regarding Amendments to the Articles of Association of State-Owned Enterprises Persetujuan Penandatanganan *Conditional Share Purchase Agreement Project* Riyadh Approval for the Signing of the Conditional Share Purchase Agreement for Project Riyadh	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi M&A dan Partnership, Direktur Bahana Sekuritas President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Legal Division, Head of the M&A and Partnership Division, Director of Bahana Sekuritas
35	Selasa, 18 November 2025 Tuesday, November 18, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	Persetujuan *3rd Submission* RKAP Konsolidasi 2026 Approval of the Third Submission of the 2026 Consolidated RKAP	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of Risk Management Division, Head of Compliance and Policies Division
36	Selasa, 25 November 2025 Tuesday, November 25, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	Persetujuan Laporan Manajemen TW3 2025 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Approval of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)'s Management Report for Q3 2025 Persetujuan Ajuan Placement Logo Danantara: Desain ID Card, Lanyard, dan Kartu Nama IFG Approval of the Proposed Danantara Logo Placement: IFG ID Cards, Lanyards, and Business Cards	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Manajemen Portofolio Investasi dan Anak Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Investment Portfolio and Subsidiaries Management Division
37	Selasa, 2 Desember 2025 Tuesday, December 02, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• Persetujuan untuk Melanjutkan Aksi Korporasi • *Update* Progres Pengelolaan Piutang di Anak Perusahaan • Approval to Proceed with the Corporate Action • Progress Update on Receivables Management at Subsidiaries	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Optimasi Operasional Asuransi President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of Insurance Operations Optimization Division

Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Minutes and Attendance of the Board of Directors at Board Meetings

No.	Tanggal Rapat Direksi Date of Board of Directors Meetings	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Participants
38	Selasa, 18 Desember 2025 Thursday, December 18, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	• *Update* Tindaklanjut atas Penerapan PSAK 109 di Anak Perusahaan • *Update* Dampak Bencana Alam di Sumatera terhadap IFG Group • Update on Follow-Up Actions Regarding the Implementation of PSAK 109 at Subsidiaries • Update on the Impact of Natural Disasters in Sumatra on the IFG Group	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Divisi Bisnis Asuransi Jiwa dan KepalaDivisi Bisnis Asuransi Umum & Penjaminan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of the Corporate Finance Division, Head of the Accounting and Reporting Division, Head of the Life Insurance Business Division, and Head of the General Insurance Business and Guarantee Division
39	Kamis, 24 Desember 2025 Wednesday, December 24, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang AKHLAK lt. 27 Zoom Video Conference Indonesia Financial Group Office AKHLAK Room 27th floor Zoom Video Conference	Keputusan *Final Submission* RKAP Konsolidasi 2026 Decision on the Final Submission of the 2026 Consolidated RKAP	Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Plh. Direktur SDM, Direktur Teknik dan Plt. Direktur Bisnis, Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Divisi Strategi Perusahaan President Director, Vice President Director, Director of Finance, and Acting Director of Human Capital, Technical Director, and Acting Business Director, Acting Head of the Corporate Secretary Division, Head of Corporate Finance Division, Head of the Corporate Strategy Division

Berikut ini disajikan rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam pelaksanaan Rapat Internal Direksi sepanjang tahun 2025.

The following is a Recapitulation of Attendance of the Board of Directors' attendance at Internal Board Meetings throughout 2025.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Recapitulation of Attendance at Board of Directors' Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage Attendance
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) (President Director)	39	37	94,87%
Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) (Vice President Director)	39	37	94,87%
Rizal Ariansyah (Direktur SDM) (Director of Human Capital)	39	37	94,87%
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) (Technical Director)	39	39	100%
Heru Handayanto (Direktur Keuangan) (Director of Finance	39	39	100%
Rata-rata Average			**96,92%**

RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI DI TAHUN 2026

Anggaran Dasar Perusahaan beserta *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi. Kedua dokumen tersebut mengatur bahwa rapat dapat diselenggarakan minimal satu kali dalam sebulan dan dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi serta efektivitas pengambilan keputusan, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dijadwalkan minimal sekali setiap bulan. Rapat Dewan Komisaris difokuskan pada pembahasan laporan kinerja bulanan manajemen, evaluasi pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, tindak lanjut arahan Dewan Komisaris, serta pembahasan isu-isu lain yang relevan dengan fungsi pengawasan.

Sementara itu, Rapat Direksi dijadwalkan setidaknya sekali setiap bulan. Agenda rapat mencakup pembahasan laporan bulanan dari masing-masing Direktorat, penetapan kebijakan strategis Perusahaan, evaluasi kinerja operasional, perumusan strategi, serta berbagai hal lain yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Direksi.

PLAN FOR BOARD MEETINGS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS IN 2026

The Company's Articles of Association, along with the Board Manuals for the Board of Commissioners and the Board of Directors, set forth provisions regarding the conduct of Board of Commissioners meetings and Board of Directors meetings. Both documents stipulate that meetings may be held at least once a month and may be convened at any time as needed.

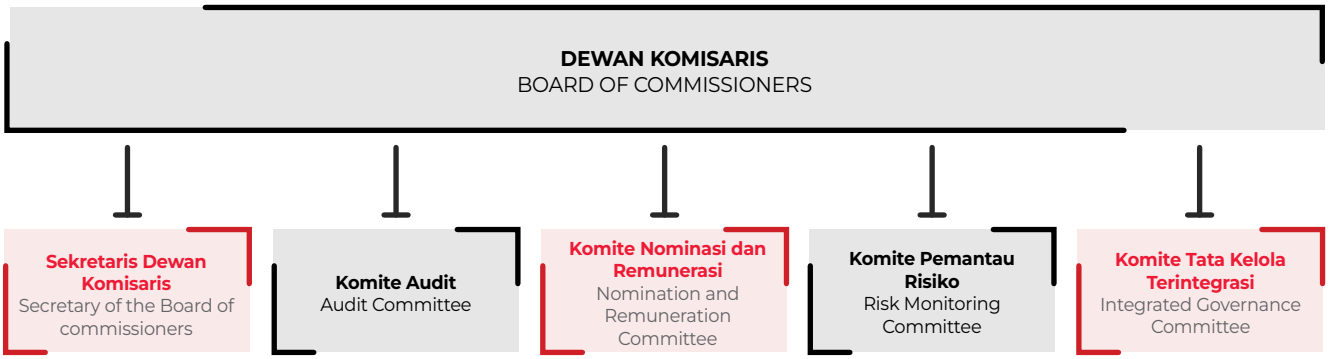
In an effort to improve coordination and the effectiveness of decision-making, Board of Commissioners meetings and joint meetings are scheduled at least once a month. Board of Commissioners meetings focus on discussing management's monthly performance reports, evaluating the implementation of previous meeting decisions, following up on the Board of Commissioners' directives, and discussing other issues relevant to the supervisory function.

Meanwhile, Board of Directors meetings are scheduled at least once a month. The meeting agenda includes discussion of monthly reports from each Directorate, the establishment of the Company's strategic policies, evaluation of operational performance, strategy formulation, as well as various other matters related to the duties and responsibilities of the Board of Directors.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh lima organ pendukung, yakni Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan organ pendukung tersebut berlandaskan pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, serta Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

In carrying out its oversight function over the Board of Directors' management of the Company, the Board of Commissioners is supported by five supporting organs, namely the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Integrated Governance Committee. The establishment of these supporting organs is based on the Company's Articles of Association, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprise Organs and Human Resources, as well as the Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 1 of 2023 concerning Guidelines for Good Corporate Governance.



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris berperan sebagai organ pendukung yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Organ ini dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan didampingi oleh staf yang melaksanakan berbagai kegiatan di lingkup Sekretariat Dewan Komisaris.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Periode 1 Januari – 30 November 2025
Pada tanggal 25 November 2024, Dewan Komisaris menunjuk Weny Maulatsih sebagai Sekretaris Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 19/SK-DEKOM/BPUI/XI/2024 tanggal 25 November 2024.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of the Board of Commissioners serves as a supporting body established to assist the Board of Commissioners in performing its duties and reports directly to the Board of Commissioners. This body is led by the Secretary of the Board of Commissioners and supported by staff who conduct various activities within the scope of the Board of Commissioners' Secretariat.

Secretary of the Board of Commissioners

Term: January 1 – November 30, 2025
On November 25, 2024, the Board of Commissioners appointed Weny Maulatsih as Secretary of the Board of Commissioners through Board of Commissioners Decree No. 19/SK-DEKOM/BPUI/XI/2024 dated November 25, 2024

Weny Maulatsih **Sekretaris Dewan Komisaris** Secretary of the Board of Commissioners	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 41 tahun Indonesian Citizen Age 41 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Pendidikan Education	· Magister Manajemen Bisnis Universitas Bina Nusantara · D4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) · D3 Perbendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) · Master's Degree in Business Management, Bina Nusantara University · D4 (Applied Bachelor's Degree) in Accounting, State College of Accounting (STAN) · D3 (Associate Degree) in State Treasury, State College of Accounting (STAN)
Pengalaman Kerja Work Experience	· Sekretaris Dewan Komisaris IFG (November 2024 – sekarang) · Koordinator Organisasi Kementerian BUMN (2022 – sekarang) · Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2022 – November 2024) · Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas (2021 – 2022) · Subkoordinator Layanan SDM Kementerian BUMN (2020 – 2022) · Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2019 – 2021) · Secretary to the Board of Commissioners, IFG (November 2024 – present) · Organizational Coordinator, Ministry of State-Owned Enterprises (2022 – present) · Secretary to the Board of Commissioners, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2022 – November 2024) · Secretary to the Board of Commissioners, PT Pelindo Terminal Petikemas (2021 – 2022) · Sub-Coordinator of Human Resources Services, Ministry of State-Owned Enterprises (2020 – 2022) · Secretary of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2019–2021)

Periode 1 – 31 Desember 2025

Pada tanggal 1 Desember 2025, Dewan Komisaris menunjuk Sdri. Anisa Damayati sebagai Sekretaris Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 11/SK-DEKOM/BPUI/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025.

Term: January 1 – December 31, 2025

On December 1, 2025, the Board of Commissioners appointed Ms. Anisa Damayati as Secretary of the Board of Commissioners through Board of Commissioners Decree No. 11/SK-DEKOM/BPUI/XII/2025 dated December 1, 2025.

Anisa Damayati **Sekretaris Dewan Komisaris** Secretary of the Board of Commissioners	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 37 tahun Indonesian Citizen Age 37 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Pendidikan Education	· Magister Human Resource and Knowledge Management Universitas Indonesia. · S1 Psikologi Universitas Persada Indonesia – YIA · Master's Degree in Human Resource and Knowledge Management, University of Indonesia. · Bachelor's Degree in Psychology from Universitas Persada Indonesia – YIA
Pengalaman Kerja Work Experience	· Sekretaris Dewan Komisaris IFG (1 Desember 2025 - sekarang) · Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Integrasi Aviasi Solusi (2024 – 2025) · Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Angkasa Pura Indonesia (2022 – 2024) · Sekretaris Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2022) · Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (2019 - 2021) · Secretary to the Board of Commissioners of IFG (December 1, 2025 – present) · Member of the Nomination and Remuneration Committee at PT Integrasi Aviasi Solusi (2024–2025) · Member of the Nomination and Remuneration Committee at PT Angkasa Pura Indonesia (2022–2024) · Secretary of the Board of Commissioners at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2022) · Secretary of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX (2019–2021)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yang mencakup antara lain:

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners is responsible for executing various activities that support the Board of Commissioners in performing its functions and duties, which include, among others:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris, antara lain berupa:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
   b. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
2. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
3. Melaksanakan dan memastikan penyimpanan dokumen kegiatan Dewan Komisaris dengan baik;
4. Menyusun rancangan berbagai laporan Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
6. Menyusun dan mengoordinasikan jadwal kegiatan Dewan Komisaris serta mempersiapkan sarana yang diperlukan; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya dari Dewan Komisaris.
8. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
   b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola IFG;
   c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan IFG yang dilakukan oleh Direksi; dan
   d. Mempersiapkan serta menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.
9. Membuat dan mendistribusikan Risalah Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
11. Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretaris Melaksanakan tugas lain yaitu:
    a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip governansi Perusahaan;
    b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta berkenaan dengan kegiatan IFG; dan
    c. Mengoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
12. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku termasuk informasi-informasi lainnya yang oleh IFG belum diungkapkan kepada publik.

1. Conducting secretarial administrative activities at within the Board of Commissioners, including:
   a. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners;
   b. Preparing the minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions of the Articles of Association.
2. Managing Board of Commissioners' documents, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents;
3. Implementing and ensuring the proper storage of documents related to the Board of Commissioners' activities;
4. Drafting various reports for the Board of Commissioners;
5. Drafting the Board of Commissioners' Work Plan and Budget;
6. Preparing and coordinating the Board of Commissioners' activity schedule and arranging the necessary resources; and
7. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners.
8. Providing data and information required by the Board of Commissioners and its committees regarding:
   a. Monitoring the follow-up on the Board of Commissioners' decisions, recommendations, and directives;
   b. Administrative materials regarding the Board of Directors' reports and activities in managing IFG;
   c. Administrative support and monitoring regarding matters requiring approval or recommendations from the Board of Commissioners in connection with the Board of Directors' management of IFG; and
   d. Preparing and organizing Board of Commissioners meetings and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, the Board of Directors, or other relevant parties, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners.
9. Preparing and distributing the minutes of Board of Commissioners meetings and Joint Board of Commissioners- s meetings to all members of the Board of Commissioners.
10. Serving as the liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.
11. The Secretary of the Board of Commissioners, as the head of the Secretariat, performs the following additional duties:
    a. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the Company's governance principles;
    b. Providing information required by the Board of Commissioners on a regular basis and/or as requested regarding IFG's activities; and
    c. Coordinating committee members, if necessary, to facilitate the duties of the Board of Commissioners.
12. Maintain the confidentiality of information in accordance with applicable regulations, including other information that IFG has not yet disclosed to the public.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mendukung Dewan Komisaris serta komite-komite di bawahnya. Berbagai aktivitas telah dilakukan sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut, antara lain:

Implementation Of The Secretary Of The Board Of Commissioners Duties In 2025

Throughout 2025, the Secretary of the Board of Commissioners has effectively implemented his or her roles and responsibilities in supporting the Board of Commissioners and its committees. Various activities have been conducted in fulfillment of these duties, including:

No	Aktivitas Utama Key Activities	Deskripsi Description	Bobot Weight %	Target	Realisasi Realization	%	Capaian KPI KPI Achievement
				(a)	(b)	(b/a)	
1	Koordinasi Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Coordination of Board of Commissioners Meetings	• Koordinasi kebutuhan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk: • bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris • Pengaturan jadwal rapat • Koordinasi dengan Manajemen dan Komite terkait untuk bahan rapat • Mempersiapkan undangan rapat, daftar hadir. • Coordinating the requirements for Board of Commissioners meetings, including: • Board of Commissioners meeting materials (briefing sheets) • Scheduling of meetings • Coordinating with management and relevant committees regarding meeting materials • Preparing meeting invitations and attendance lists.	20	29	58	200%	40
2	Penyiapan surat tanggapan Dewan Komisaris Preparation of the Board of Commissioners' response letter	Sekretaris Dewan Komisaris membantu penyiapan surat tanggapan yang perlu ditetapkan Dewan Komisaris The Secretary of the Board of Commissioners assists in preparing response letters that must be approved by the Board of Commissioners	20	100%	100%	100%	20
3	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Preparation of the Draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners	Sekretaris Dewan Komisaris menyiapkan bahan dan data yang relevan atas penyusunan RKA Dewan Komisaris The Secretary of the Board of Commissioners prepares relevant materials and data for the preparation of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget	20	1	1	100%	20
4	Penyusunan Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris Preparation of Draft Reports of the Board of Commissioners	Sekretaris Dewan Komisaris menyiapkan bahan dan data yang relevan atas penyusunan laporan Dewan Komisaris The Secretary of the Board of Commissioners prepares relevant materials and data for the preparation of the Board of Commissioners' reports	20	1	1	100%	20
5	Dukungan dalam mencapai KPI Dewan Komisaris Tahun 2025 Support for Achieving the Board of Commissioners' KPIs for 2025	Sekretaris Dewan Komisaris mengawasi perkembangan capaian KPI Dewan Komisaris pada tahun berjalan dan menginisasi program untuk mencapai target KPI The Secretary of the Board of Commissioners monitors progress toward the Board of Commissioners' KPIs for the current year and initiates programs to achieve KPI targets	10	100%	100%	100%	10

No	Aktivitas Utama Key Activities	Deskripsi Description	Bobot Weight %	Target	Realisasi Realization	%	Capaian KPI KPI Achievement
6	Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris Performing other duties assigned by the Board of Commissioners	Pembuatan dokumen bersifat *ad hoc* yang menjadi arahan Dewan Komisaris di Tahun 2024 serta pelaksanaan tugas *laisson officer* dengan *stakeholders* terkait. Preparing ad hoc documents as directed by the Board of Commissioners in 2024 and serving as a liaison officer with relevant stakeholders.	10	100%	100%	100%	10
TOTAL			**100**				**120**

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai organ pendukung untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan. Komite ini menjalankan tugasnya secara kolektif dan independen, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam pelaporannya, dengan tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Ruang lingkup pengawasan Komite Audit mencakup evaluasi informasi akuntansi dan laporan keuangan, penilaian efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit oleh auditor eksternal maupun internal, serta praktik aktuaria.

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

IFG menetapkan Piagam Komite Audit sebagai pedoman resmi bagi pelaksanaan tugas komite melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2023 tanggal 14 Februari 2023. Piagam ini berfungsi sebagai dokumen formal yang menyediakan arahan praktis bagi Komite Audit sekaligus menegaskan komitmen Dewan Komisaris dalam mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap operasional IFG. Implementasi Piagam ini wajib dijalankan oleh Komite Audit serta pihak-pihak terkait, guna mencapai tujuan Perusahaan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sambil berlandaskan prinsip-prinsip governansi yang baik.

Sebagai acuan operasional, Piagam Komite Audit menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, serta disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan koordinasi dan sinergi yang optimal dalam mendukung Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Ruang lingkup Piagam Komite Audit mencakup:
1. Kode etik Komite Audit;
2. Kewenangan Komite Audit;
3. Tugas Komite Audit;
4. Protokol komunikasi;
5. Rapat Komite Audit;
6. Rencana kerja Komite Audit;
7. Evaluasi kinerja Komite Audit;
8. Pelaporan Komite Audit; dan
9. Dokumentasi Komite Audit.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was established by the Board of Commissioners as a supporting body to strengthen the performance of supervisory functions. The Committee carries out its duties collectively and independently, both in the conduct of its activities and in its reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners. The scope of the Audit Committee's supervision includes the evaluation of accounting information and financial statements, the assessment of the effectiveness of internal control systems, the conduct of audits by both external and internal auditors, and actuarial practices.

Work Guidelines: Audit Committee Charter

IFG established the Audit Committee Charter as the official guideline for the committee's duties through Board of Commissioners' Decree No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2023 dated February 14, 2023. This Charter serves as a formal document that provides practical guidance for the Audit Committee while reaffirming the Board of Commissioners' commitment to ensuring effective supervisory of IFG's operations. Implementation of this Charter is mandatory for the Audit Committee and relevant parties to achieve the Company's objectives efficiently, effectively, and in accordance with applicable laws and regulations, while adhering to the principles of good corporate governance.

As an operational reference, the Audit Committee Charter serves as a guideline for carrying out the Audit Committee's duties and responsibilities and is disseminated to all relevant parties to ensure optimal coordination and synergy in supporting the Board of Commissioners in effectively performing its supervisory functions.

The scope of the Audit Committee Charter includes:
1. The Audit Committee's Code of Conduct;
2. The Audit Committee's Authority;
3. Duties of the Audit Committee;
4. Communication protocols;
5. Audit Committee Meeting;
6. Audit Committee work plan;
7. Audit Committee performance evaluation;
8. Audit Committee reporting; and
9. Audit Committee documentation

Kriteria Keanggotaan Komite Audit

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap IFG;
3. Mampu berkomunikasi dengan efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis perusahaan; dan
6. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit, jika diperlukan.

Masa Jabatan

Periode keanggotaan Komite Audit ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir; dan

3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Jumlah, Komposisi Dan Susunan Komite Audit Tahun 2025

Struktur Komite Audit IFG terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) Nomor 07/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Susunan dan komposisi Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Audit Committee Membership Criteria

The qualifications that must be met by Audit Committee members are as follows:

1. Possess good integrity and sufficient knowledge and work experience of at least 3 (three) years in the field of supervision/auditing;
2. Have no personal interests or affiliations that could have a negative impact on or create a conflict of interest with IFG;
3. Be able to communicate effectively;
4. Be able to dedicate sufficient time to fulfill their duties;

5. One member of the Audit Committee must have an independent background or expertise in accounting or finance, and one member of the Audit Committee must have an understanding of the company's industry or business; and
6. Other requirements set forth in the Audit Committee charter, if necessary

Term of Office

The term of office for Audit Committee members is determined as follows:

1. The term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time;
2. Members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners shall resign automatically as members of the Board of Commissioners at the end of their term of office; and
3. in the event that a member of the Board of Commissioners who serves as Chairperson of the Audit Committee stops serving as a member of the Board of Commissioners, then the Chairperson of the Audit Committee must be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.

Number, Composition, and Structure of The Audit Committee in 2025

The structure of the IFG Audit Committee consists of 1 (one) Chairperson and 4 (four) Members, as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) No. 07/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The structure and composition of the Audit Committee as of December 31, 2025, are as follows:

Komposisi dan Susunan Komite Audit
Composition and Structure of the Audit Committee

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term
Ketua Komite Audit (Komisaris) Chairperson of the Audit Committee (Commissioner)	Fauzi Ichsan*	Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI Nomor 07/SK-DEKOM/BPUI/IX/2021 tanggal 29 September 2021 Decree of the Board of Commissioners of PT BPUI No. 07/SK-DEKOM/BPUI/IX/2021 dated September 29, 2021	29 Septermber 2021 s.d 31 Desember 2025 September 29, 2021 to December 31, 2025	Ke- 1 1st
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Sumiyati	Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI Nomor 07/SK-DEKOM/BPUI/IX/2021 tanggal 29 September 2021 Decree of the Board of Commissioners of PT BPUI No. 07/SK-DEKOM/BPUI/IX/2021 dated September 29, 2021	29 Septermber 2021 s.d Sekarang September 29, 2021 to Present	Ke- 1 1st
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Masyita Crystallin*	Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI Nomor 07/SK-DEKOM/BPUI/IX/2021 tanggal 29 September 2021 Decree of the Board of Commissioners of PT BPUI No. 07/SK-DEKOM/BPUI/IX/2021 dated September 29, 2021	29 Septermber 2021 s.d 31 Desember 2025 September 29, 2021 to December 31, 2025	Ke- 1 1st
Anggota (Non Komisaris) Member (Non-Commissioner)	Ika Istakariana	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 5/SK-DEKOM/BPUI/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 5/SK-DEKOM/BPUI/V/2022 dated May 24, 2022	24 Mei 2022 s.d. 23 Mei 2025 May 24, 2022 to May 23, 2025	Ke-1 1st
Anggota (Non Komisaris) Member (Non-Commissioner)	Sartono	Keputusan Dewan Komisaris Nomo 1/SK-DEKOM/BPUI/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/III/2025 March 11, 2025	11 Maret 2025 s.d 31 Desember 2025 March 11, 2025 to December 31, 2025	Ke- 1 1st
Anggota (Non Komisaris) Member (Non-Commissioner)	Agus Yulianto	Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) Nomor 07/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Decree of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) No. 07/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 dated October 23, 2025	23 Oktober 2025 s.d Sekarang October 23, 2025 until Present	Ke-1 1st

*) Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris PT BPUI (Persero).
*) In accordance with the term of office as a Commissioner of PT BPUI (Persero).

Profil Komite Audit
Audit Committee Profile

Fauzi Ichsan
Ketua Komite Audit (Komisaris)
Chairperson of the Audit Committee (Commissioner)

Profil Ketua Komite Audit, Fauzi Ichsan telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Audit Committee member Sumiyati is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Sumiyati
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee (Commissioner)

Profil Anggota Komite Audit, Sumiyati telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Audit Committee member Sumiyati is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Masyita Crystallin
Anggota Komite Audit (Komisaris)
(Member of the Audit Committee (Commissioner)

Profil Anggota Komite Audit, Masyita Crystallin telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
profile of Audit Committee member Sumiyati is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Ika Istakariana
(Audit Committee Member (Non-Commissioner/Independent Party)
(Audit Committee Member (Non-Commissioner/Independent Party)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Kelahiran 7 September 1965 (Usia 60 tahun) Indonesian Citizen Born September 7, 1965 (Age 60 years old)
Domisili Domicile	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Akuntansi di Universitas Indonesia (2007) • Sarjana Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1994) • Master's Degree in Accounting from the University of Indonesia (2007) • Bachelor's Degree in Accounting from STIE YAI Jakarta (1994)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	• Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor • Certified Fraud Examiners • Certified Auditor • Certified Fraud Examiner
Pengalaman Kerja Work Experience	• Rikban Anggaran Wilayah 1.1 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan • Auditor Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan • Regional Budget Auditor for Region 1.1, Inspectorate General of the Ministry of Finance • Junior Expert Auditor, Inspectorate General of the Ministry of Finance
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Pelaksana Inspektur Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Acting Budget Inspector, Inspectorate General of the Ministry of Finance
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Sartono
Anggota Komite Audit (Non Komisaris/Pihak Independen)
(Member of the Audit Committee (Non-Commissioner/Independent Party)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Kelahiran 20 November 1977 (Usia 49 tahun) Indonesian Citizen Born November 20, 1977 (Age 49 years old)
Domisili Domicile	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• MSc in Banking and Finance Brunel University (2019) • Master in Accounting Universitas Padjajaran (2010) • Sarjana Akuntansi Universitas Mercu Buana (2001) • D3 Perpajakan PKN STAN (1999) • Msc in Banking and Finance, Brunel University (2019) • Master's Degree in Accounting, Padjadjaran University (2010) • Bachelor's Degree in Accounting, Mercu Buana University (2001) • Associate Degree in Taxation, PKN STAN (1999)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	• Qualified Internal Auditor (QIA) • Qualified Chief Risk Office (QCRO)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Advisor on Transformation PT Yodya Karya • Kepala Divisi Assurance – Internal Audit PT Mineral Industri Indonesia (Persero) • Chief Audit Executive PT Asuransi Jiwa IFG • Transformation Advisor at PT Yodya Karya • Head of the Assurance Division – Internal Audit at PT Mineral Industri Indonesia (Persero) • Chief Audit Executive at PT Asuransi Jiwa IFG
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Anggota Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk Member of the Audit Committee at PT AKR Corporindo Tbk
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Agus Yulianto **Anggota Komite Audit (Non Komisaris/Pihak Independen)** (Member of the Audit Committee (Non-Commissioner/Independent Party)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Kelahiran 24 Juli 1961 (Usia 64 tahun) Indonesian Citizen Born July 24, 1961 (Age 64 years old)
Domisili Domicile	Tangeran Selatan, Jawa Barat, Indonesia South Tangerang, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master of Accountancy Case Western Reserve University (1993) • D4 Akuntansi PKN STAN (1991) • Master of Accountancy, Case Western Reserve University (1993) • Diploma 4 in Accounting, PKN STAN (1991)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	• Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor • Certified Fraud Examiners • Certified Auditor • Certified Fraud Examiner
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Komite Audit Subholding PT Pertamina • Anggota Komite Audit PT Pertamina (Persero) • Anggota Komite Audit PT Telkom Indonesia Tbk • Member of the Audit Committee of PT Pertamina's Subholding • Member of the Audit Committee of PT Pertamina (Persero) • Member of the Audit Committee of PT Telkom Indonesia Tbk
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Anggota Komite Audit PT ABM Investama Member of the Audit Committee of PT ABM Investama
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Independensi Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sikap profesional serta independen, tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Audit, kriteria independensi Komite Audit diuraikan dalam tabel berikut:

Independence Of The Audit Committee

The Audit Committee performs its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party that conflicts with applicable laws and regulations. In accordance with the provisions of the Audit Committee Charter, the criteria for the Audit Committee's independence are outlined in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspects	**Fauzi Ichsan (Ketua)** (Chairperson)	**Sumiyati (Anggota)** (Member)	**Ika Istakariana (Anggota)** (Member)	**Sartono (Anggota)** (Member)	**Agus Yulianto (Anggota)** (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has a family relationship with Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	x	x	X	x	x
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Has a direct or indirect business relationship with the Company	x	x	X	x	x

Aspek Independensi Independence Aspects	**Fauzi Ichsan (Ketua)** (Chairperson)	**Sumiyati (Anggota)** (Member)	**Ika Istakariana (Anggota)** (Member)	**Sartono (Anggota)** (Member)	**Agus Yulianto (Anggota)** (Member)
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, nonaudit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	X	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	x	x	X	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peran serta kewajiban Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, dijabarkan sebagai berikut:

1. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien.
2. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi tentang penetapan auditor independen dan mengevaluasi kualifikasi, independensi, dan kinerjanya.
4. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
5. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi jika diperlukan.
6. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komite.
7. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya.

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat

Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala, yang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh dari total anggota, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Audit. Rapat ini dilaksanakan

Roles and Responsibilities of The Audit Committee

The roles and responsibilities of the Audit Committee, as stipulated in the Audit Committee Charter, are outlined as follows:

1. Ensuring that the Board of Directors establishes and maintains an adequate, effective, and efficient internal control system.
2. Reviewing the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from the Internal Control Unit at least once a year.
3. To provide opinions and recommendations regarding the appointment of an independent auditor and to evaluate the auditor's qualifications, independence, and performance.
4. Review audit reports and ensure that the Board of Directors promptly takes the necessary corrective actions to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws, and regulations, or other issues identified and reported by the Internal Audit Committee (SKAI).
5. Submit reports to the Board of Commissioners on the performance of its duties, accompanied by recommendations as necessary.
6. Prepare quarterly and annual reports to the Board of Commissioners, signed by the committee chairperson and members.
7. Provide recommendations regarding the improvement of the internal control system and its implementation.

Audit Committee Meetings

Meeting Policy

The Audit Committee holds regular meetings, which are valid if attended by at least half of the total members, in accordance with the provisions set forth in the Audit Committee Charter. These meetings are held based on

berdasarkan undangan atau agenda yang telah disepakati sebelumnya. Seluruh jalannya rapat didokumentasikan dalam bentuk notulen atau risalah yang mencakup waktu, tempat, agenda, daftar peserta hadir, pokok pembahasan, perbedaan pendapat bila ada, serta keputusan yang dihasilkan. Salinan notulen atau risalah tersebut disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Agenda dan Rekapitulasi Rapat

Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali rapat. Tabel berikut menyajikan agenda rapat, risalah pertemuan, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat partisipasi anggota Komite Audit dalam setiap rapat yang diselenggarakan.

invitations or a previously agreed-upon agenda. The entire proceedings of the meeting are documented in the form of minutes or a meeting report that includes the time, place, agenda, list of attendees, main topics of discussion, differences of opinion (if any), and the decisions reached. A copy of the minutes or meeting report is submitted to the Secretary of the Board of Commissioners to be subsequently reported to the Board of Commissioners.

Meeting Agenda and Recapitulation

During 2025, the Audit Committee held a total of 9 (nine) meetings. The following table presents the meeting agendas, meeting minutes, attendance lists, and a Recapitulation of Audit Committee members' Attendance in meetings.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda
26 Februari 2025 February 26, 2025	Graha CIMB Niaga	Temuan SKAI selama 2024 dan Tindak Lanjutnya SKAI Findings for 2024 and Follow-Up Actions
21 Maret 2025 March 21, 2025	Graha CIMB Niaga	Progress Audit Tahun 2024 Progress of the 2024 Audit
29 April 2025 April 29, 2025	Graha CIMB Niaga	Evaluasi KAP Tahun 2024 2024 KAP Evaluation
8 Mei 2025 May 8, 2025	Graha CIMB Niaga	Pembahasan Update Progress Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Divisi SKAI Periode Triwulan I Tahun 2025 Discussion on Progress Updates for the SKAI Division's Annual Work Plan and Budget (RKAT) of SKAI Division for the First Quarter of 2025
5 Juni 2025 June 5, 2025	Graha CIMB Niaga	· Evaluasi KAP Tahun 2024; dan · Pengadaan KAP Tahun 2025 · Evaluation of the 2024 KAP; and · Procurement of the 2025 KAP
10 Juli 2025 July 10, 2025	Graha CIMB Niaga	· Pengadaan KAP Tahun 2025; · Kinerja SKAI Triwulanan II 2025; · Progres Audit Eksternal oleh OJK dan BPKP; dan · Progres Permintaan Dekom mengenai Audit Forensik · 2025 KAP Procurement; · Second Quarter 2025 SKAI Performance; · Progress of External Audits by OJK and BPKP; and · Progress on the Board od Commissioners' Request for a Forensic Audit
29 Juli 2025 July 29, 2025	Graha CIMB Niaga	Pengadaan KAP Tahun 2025 Selection of a Public Accounting Firm for 2025
9 September 2025 September 9, 2025	Graha CIMB Niaga	· Progres Pengadaan KAP 2026; dan · Pembahasan RKAT dan RKAP SKAI Tahun 2026 · Progress on the 2026 KAP Procurement; and · Discussion of the 2026 SKAI Budget Plan and Work Plan
6 Oktober 2025 October 6, 2025	Graha CIMB Niaga	Pembahasan LHP BPK Discussion of the BPK Audit Report

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat
Recapitulation of Attendance of Audit Committee Attendance at Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting									Jumlah Total Attendance	%
	26/2	21/3	29/4	8/5	5/6	10/7	29/7	9/9	6/10		
Fauzi Ichsan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9	100
Sumiyati	√	√	√	√	√	x	x	√	√	7	77
Masyita Crystallin	√	x	√	x	x	x	x	x	x	2	22
Ika Istakariana*	√	√	√	√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	100

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat
Recapitulation of Attendance of Audit Committee Attendance at Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting									Jumlah Total Attendance	%
	26/2	21/3	29/4	8/5	5/6	10/7	29/7	9/9	6/10		
Sartono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9	100
Agus Yulianto**	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0
Rata-rata											**80**

*) Sdri. Ika Istakariana telah berakhir 23 Mei 2025.
**) Sdr Agus Yulianto belum menjabat dalam waktu pelaksanaan rapat.
*) Ms. Ika Istakariana's term of office ended on May 23, 2025.
**) Mr. Agus Yulianto had not yet begun his term of office at the time the meeting was held.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

IFG melibatkan Komite Audit dalam berbagai program pengembangan kompetensi untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kapasitas pengetahuan anggotanya. Rincian terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Audit disajikan sebagai berikut:

Audit Committee Competency Development

IFG involves the Audit Committee in various competency development programs to broaden the members' perspectives and enhance their knowledge. Details regarding the Audit Committee's training and competency development are presented as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Agus Yulianto	Pelatihan Training	Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management	20 – 21 November 2025 November 20–21, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Agus Yulianto	Non Pelatihan Non-Training	Risk Beyond 2025	4 – 5 Desember 2025 December 4–5, 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Agus Yulianto	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	26 – 27 November 2025 November 26–27, 2025	IFG Corporate University

Kebijakan Remunerasi Bagi Komite Audit

Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 terkait Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Secara internal, ketentuan mengenai penghasilan anggota Komite Audit diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris IFG dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan IFG;
2. Penghasilan anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung IFG dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut; dan
3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Remuneration Policy for The Audit Committee

The determination of remuneration amounts for Audit Committee members is based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organizational Structure and Human Resources of State-Owned Enterprises. Internally, provisions regarding the compensation of Audit Committee members are set forth in the IFG Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure, with the following provisions:

1. The compensation for Audit Committee members is determined by the Board of Commissioners, taking into account IFG's financial capacity;
2. The compensation for Audit Committee members consists of a honorarium not exceeding 20% (twenty percent) of the President Director's salary, with taxes borne by IFG, and members are not permitted to receive any other compensation besides this honorarium; and
3. Members of the Board of Commissioners who serve as chairperson or members of the Audit Committee do not receive additional compensation for that position other than their compensation as members of the Board of Commissioners.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

Komite Audit telah menyusun rencana pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Pedoman Kerja Komite Audit serta Program Kerja Komite Audit Tahun 2025. Pelaksanaan realisasi tugas Komite Audit sepanjang tahun 2025 mencakup:

1. Penelahaan terhadap pelaksanaan penunjukan Lembaga Pemeringkat Perusahaan Tahun Buku 2024
2. Penyampaian masukkan atas rencana penyiapan arahan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan Audit Forensik Terhadap PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Reasuransi Nasional Indonesia serta Saran Peningkatan Efektivitas Kegiatan Operasional di Lingkup PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
3. Telaah Komite Audit atas Konsep Laporan Kinerja PT BPUI (Persero) Triwulan I Tahun 2025.
4. Penyiapan dan penyampaian Laporan Evaluasi Kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2024.
5. Penelahaan Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Umum Tahun 2025.
6. Pemantauan dan koordinasi atas penyelesaian laporan keuangan audit Tahun 2024.
7. Pemantauan dan koordinasi penyelesaian temuan auditor dan pelaksanaan rekomendasi di lingkup PT BPUI (Persero).

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2026

Komite Audit telah menyusun Program Kerja Tahun 2026 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas laporan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pihak eksternal, di antaranya:
   a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan audit ekstern;
   b. Memastikan objektifitas dan independensi auditor internal dan auditor eksternal;
   c. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan BUMN yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/ atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
   d. Memastikan efektivitas SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan auditor eksternal;
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
2. Meninjau laporan audit dan bersama Dewan Komisaris memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
3. Mengevaluasi kinerja SKAI;

Brief Report on The Implementation of The Duties and Activities of The Audit Committee in 2025

The Audit Committee has formulated a plan for conducting its duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee Work Guidelines and the Audit Committee Work Program for 2025. The implementation of the Audit Committee's duties throughout 2025 included:

1. Review of the appointment of a credit rating agency for the 2024 fiscal year
2. Providing input on the plan to prepare the Board of Commissioners' directives regarding the conduct of a forensic audit of PT Asuransi Kredit Indonesia and PT Reasuransi Nasional Indonesia, as well as recommendations for improving the effectiveness of operational activities within the scope of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
3. The Audit Committee's review of the draft performance report of PT BPUI (Persero) for the first quarter of 2025.
4. Preparation and submission of the 2024 Performance Evaluation Report of the Public Accounting Firm (KAP).
5. Review of the Proposal to Appoint a Public Accounting Firm to Conduct the 2025 General Audit.
6. Monitoring and coordination of the completion of the audited financial statements for 2024.
7. Monitoring and coordinating the resolution of auditor findings and the implementation of recommendations within PT BPUI (Persero).

Audit Committee Work Plan for 2026

The Audit Committee has prepared the 2026 Work Program as an effort to improve the effectiveness of the performance of its functions and responsibilities, with the following details:

1. Reviewing reports to be issued by the Company to external parties, including:
   a. Monitoring and assessing the effectiveness of internal and external audits;
   b. Ensuring the objectivity and independence of internal and external auditors;
   c. Ensuring the credibility and objectivity of the SOE's financial statements to be issued to external parties and regulatory organs, including following up on complaints and/or notes of irregularities regarding the reports during the Audit Committee's review period;
   d. Ensuring the effectiveness of SKAI's communication with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and external auditors;
   e. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the SKAI's audit plan, scope, and budget.
2. Reviewing audit reports and, together with the Board of Commissioners, ensuring that the Board of Directors promptly takes the necessary corrective actions to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies and laws and regulations, or other issues identified and reported by SKAI;
3. Evaluate SKAI's performance;

4. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI dan penghargaan kinerja;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern di lingkup IFG;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern di lingkup IFG;
8. Melakukan penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
9. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal;
10. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
12. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh auditor eksternal;
13. Memastikan auditor eksternal tidak melakukan pekerjaan *non-assurance* kecuali mendapatkan persetujuan terlebih dahulu (*pre-concurrance*) dari Komite Audit; dan
14. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Nomor 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020 tanggal 20 April 2020 sebagai bagian dari implementasi praktik governansi di lingkungan Perusahaan. Pembentukan Komite ini mengacu pada POJK Pasal 51 Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian tanggal 23 Desember 2016, yang kemudian diubah melalui POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 27 Desember 2019, serta mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 dan Nomor 14/SEOJK.05/2019 mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite di Dewan Komisaris perusahaan asuransi dan reasuransi.

Komite Nominasi dan Remunerasi tersusun dari minimal 3 (tiga) anggota, termasuk seorang Ketua yang berasal dari Dewan Komisaris, serta anggota lainnya yang terdiri dari Komisaris Independen, pejabat eksekutif yang membawahi SDM, atau perwakilan pegawai Perusahaan.

4. Ensuring that SKAI upholds integrity in the performance of its duties;
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding SKAI's annual compensation and performance awards;
6. Monitor and evaluate the proper implementation of financial policies and internal audit procedures within the IFG;
7. Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness and accuracy of the financial reporting process and the alignment of internal audit policies within the scope of IFG;
8. Assessing the adequacy of internal controls and the integrated implementation of compliance functions;
9. Monitor and review the financial reporting process audited by external auditors;
10. Provide an independent opinion in the event of a disagreement between management and the external auditor regarding the services provided;
11. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an auditor based on independence, scope of engagement, and fees;
12. Evaluate the external auditor's performance of audit services on annual historical financial information;
13. Ensure that the external auditor does not perform non-assurance work unless prior approval (pre-concurrence) is obtained from the Audit Committee; and
14. Review compliance with laws and regulations related to the Company's activities.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee through Board of Commissioners Decree No. 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020 dated April 20, 2020, as part of the implementation of corporate governance practices within the Company. The establishment of the Committee refers to Article 51 of OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, dated December 23, 2016, as subsequently amended by OJK Regulation No. 73/POJK.05/2019 dated December 27, 2019. It also refers to OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.05/2014 and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 concerning the establishment, membership composition, and term of office of committees under the Board of Commissioners of insurance and reinsurance companies.

The Nomination and Remuneration Committee consists of at least three members, including a Chairperson from the Board of Commissioners. The remaining members comprise an Independent Commissioner, the executive officer responsible for human resources, or an employee representative of the Company.

Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi

IFG menetapkan piagam sebagai pedoman operasional bagi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/SK-DEKOM/BPUI/III/2024 tanggal 26 Maret 2024. Piagam ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas komite berjalan secara efektif, terstruktur, dapat dipercaya, dan independen. Selanjutnya, Perusahaan melakukan peninjauan berkala terhadap Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik dalam implementasi governansi.

Sebagai dokumen resmi, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan kedudukan, kewenangan, serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawab komite. Piagam ini juga mengatur batasan wewenang serta mekanisme hubungan kerja antara Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit terkait lainnya.

Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir; dan
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite Nominasi dan Remunerasi harus diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi Dan Remunerasi Tahun 2025

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) anggota, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) Nomor 10/SK-DEKOM/BPUI/XI/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Work Guidelines: Nomination and Remuneration Committee Charter

IFG established this charter as an operational guideline for the Nomination and Remuneration Committee through Board of Commissioners Decision No. 09/SK-DEKOM/BPUI/III/2024 dated March 26, 2024. This charter was drafted to ensure that the committee performs its duties effectively, in a structured, trustworthy, and independent manner. Furthermore, the Company conducts periodic reviews of the Charter of the Nomination and Remuneration Committee to ensure its alignment with the Company's needs, prevailing laws and regulations, and best practices in corporate governance.

As an official document, the Charter of the Nomination and Remuneration Committee defines the committee's status, authority, and the scope of its duties and responsibilities. This Charter also sets forth the limits of authority and the mechanisms governing the working relationship between the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other relevant units.

Term Of Office

The term of office for the Nomination and Remuneration Committee is set forth as follows:

1. The term of office for members of the Nomination and Compensation Committee who are not members of the Board of Commissioners shall be a maximum of 3 (three) years and may be extended once for a term of 2 (two) years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to remove them at any time;
2. Members of the Nomination and Remuneration Committee who are members of the Board of Commissioners shall automatically cease to serve upon the expiration of their term as members of the Board of Commissioners; and
3. In the event that a member of the Board of Commissioners serving as the chairperson of the Nomination and Remuneration Committee ceases to serve as a member of the Board of Commissioners, the chairperson of the Nomination and Remuneration Committee must be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.

Number, Composition, and Structure of The Nomination and Remuneration Committee in 2025

The Nomination and Remuneration Committee consists of 1 (one) chairperson and 3 (three) members, as stipulated in PT BPUI (Persero) Board of Commissioners' Decree No. 10/SK-DEKOM/BPUI/XI/2025 dated November 28, 2025, regarding the Appointment of Members and Changes to the Membership of the Nomination and Remuneration Committee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Adapun komposisi dan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The composition and structure of the Nomination and Remuneration Committee for 2025 are as follows:

Komposisi dan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition and Structure of the Nomination and Remuneration Committee

Jabatan Position	**Nama** Name	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan Term**
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Komisaris) Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee (Commissioner)	Sumiyati*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	19 September 2024 s.d Sekarang September 19, 2024 to Present	Ke I 1st
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Nasrudin	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	19 September 2024 s.d Sekarang September 19, 2024 to Present	Ke I 1st
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Masyita Crystallin**	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Decree of the Board of Commissioners No. 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 dated March 1, 2021	1 Maret 2021 s.d 31 Desember 2025 March 1, 2021 to December 31, 2025	Ke I 1st
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Wahyu Setyawan***	Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) Nomor 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 Tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) No. 15/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 September 19, 2024	19 September 2024 s.d 4 Juli 2025 September 19, 2024 to July 4, 2025	Ke I 1st
Anggota (Non Komisaris) Member (Non-Commissioner)	Irham Dilmy****	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 jo. 4/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 27 Februari 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 01/SK-DEKOM/BPUI/III/2021 dated March 1, 2021, in conjunction with 4/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 27, 2025	1 Maret 2021 s.d 16 Mei 2025 March 1, 2021 to May 16, 2025	Ke I 1st
Anggota (Non Komisaris) Member (Non-Commissioner)	Sabam Hutajulu	Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) Nomor 10/SK-DEKOM/BPUI/XI/2025 tanggal 28 November 2025 Decree of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) No. 10/SK-DEKOM/BPUI/XI/2025 dated November 28, 2025	28 November 2025 s.d sekarang November 28, 2025 to present	Ke II 2nd

Profil Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profile of The Nomination and Remuneration Committee

Sumiyati
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Komisaris)
Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee (Commissioner)

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Sumiyati telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Sumiyati, Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Nasrudin
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Komisaris)
Member of the Nominating and Compensation Committee (Commissioner)

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Nasrudin telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Nasrudin, a member of the Nomination and Remuneration Committee, is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Masyita Crystallin
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Komisaris)
Member of the Nominating and Compensation Committee (Commissioner)

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Masyita Crystallin telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Masyita Crystallin, Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee, is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Wahyu Setyawan
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Komisaris)
Member of the Nominating and Compensation Committee (Commissioner)

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Wahyu Setyawan telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Wahyu Setyawan, a member of the Nomination and Remuneration Committee, is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Irham Dilmy
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Non Komisaris/Pihak Independen)
Member of the Nomination and Remuneration Committee (Non-Commissioner/Independent Party)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 70 Tahun Indonesian Citizen Age: 70 years old
Domisili Domicile	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doctor in Business Administration, Universitas Indonesia • Master Business Administration, American University – Kogod School of Business • MA in International Relations dan BA in Political Science, Universitas Indonesia • Doctor in Business Administration, University of Indonesia • Master of Business Administration, American University – Kogod School of Business • MA in International Relations and BA in Political Science, University of Indonesia
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Certification of Competence, Human Resources Management Manager, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2019) Certification of Competence, Human Resources Management Manager, National Professional Certification Agency (2019)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Country Manager Indonesia - Pedersen & Partners • Commitee Member, Remuneration & HR Development, Board of Commissioners – LPS RI • Vice Chair & Commissioner - The Indonesian Civil Service Commission (ICSC) • Senior Advisor, Public Sector - Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) • Country Manager for Indonesia - Pedersen & Partners • Committee Member, Remuneration & HR Development, Board of Commissioners – LPS RI • Vice Chairperson and Commissioner – The Indonesian Civil Service Commission (ICSC) • Senior Advisor, Public Sector - Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Senior Advisor, Public Sector - Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) Senior Advisor, Public Sector - Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, nor with major and controlling shareholders either directly or indirectly.

Sabam Hutajulu **Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Non Komisaris)** Member of the Nomination and Remuneration Committee (Non-Commissioner)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 66 tahun Indonesian Citizen Age 66 years old
Domisili Domicile	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	· Doctor in Accountancy, Case Western Reserve University · Master of Accountancy, Case Western Reserve University · S1 Akuntansi Universitas Indonesia · Doctor of Accountancy, Case Western Reserve University · Master of Accountancy, Case Western Reserve University · Bachelor of Science in Accounting, University of Indonesia
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Certification of Competence, Human Resources Management Manager, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2019) Certification of Competence, Human Resources Management Manager, National Professional Certification Agency (2019)
Pengalaman Kerja Work Experience	· Head of Consultancy & Advisory ISEA-Indonesia Senior Executives Association · Chief Executive Officer PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri · Chief Executive Officer Jardine Llyod Thompson Indonesia · Chief Sercant, President Director PT Tugu Pratama Indonesia · Head of Consultancy & Advisory, ISEA-Indonesia Senior Executives Association · Chief Executive Officer, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri · Chief Executive Officer, Jardine Lloyd Thompson Indonesia · Chief Executive, President Director of PT Tugu Pratama Indonesia
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	· Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia · Dosen Global NXT University · Board Member Gerbati Foundation · Lecturer, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia · Lecturer at Global NXT University · Board Member, Gerbati Foundation
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan profesionalisme, bersifat independen, serta tanpa pengaruh dari pihak eksternal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, kriteria independensi komite dijabarkan sebagai berikut:

Independence of The Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee performs its roles and responsibilities with professionalism, independence, and free from external influence that conflicts with applicable laws and regulations. Based on the Nomination and Remuneration Committee Charter, the committee's independence criteria are outlined as follows:

Aspek Independensi Independence Aspects	**Sumiyati (Ketua)** (Chairperson)	**Nasrudin Anggota** (Member)	**Masyita Crystallin (Anggota)** (Member)	**Wahyu Setyawan (Anggota)** (Member)	**Irham Dilmy (Anggota)** (Member)	**Sabam Hutajulu (Anggota)** (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has a family relationship with Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	x	x	x	x	x	x

Aspek Independensi Independence Aspects	**Sumiyati (Ketua)** (Chairperson)	**Nasrudin Anggota** (Member)	**Masyita Crystallin (Anggota)** (Member)	**Wahyu Setyawan (Anggota)** (Member)	**Irham Dilmy (Anggota)** (Member)	**Sabam Hutajulu (Anggota)** (Member)
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Has a direct and indirect business relationship with the Company.	x	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, nonaudit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	x	x	x	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

Peran dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, peran serta tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi IFG dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi jika diperlukan;
2. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komite;
3. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi;
5. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
6. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris;

Roles and Responsibilities of The Nomination and Remuneration Committee

Based on the provisions set forth in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee, the roles and responsibilities of the IFG Nomination and Remuneration Committee are outlined as follows:

1. Submit reports to the Board of Commissioners on the performance of its duties, accompanied by recommendations as necessary;
2. Prepare quarterly and annual reports for the Board of Commissioners, signed by the Chairperson and committee members;
3. Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. Conduct evaluations of the proposed individual KPIs for members of the Board of Directors;
5. Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
6. Conduct an evaluation of employee compensation policies that require approval or feedback from the Board of Commissioners;

7. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anggota *Holding*, sebelum diajukan kepada RUPS; dan
8. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat secara berkala, dengan ketentuan bahwa rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal ½ (satu per dua) dari jumlah anggota komite, sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat dilaksanakan berdasarkan undangan atau agenda yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh rapat didokumentasikan dalam bentuk notulen atau risalah, yang memuat informasi mengenai waktu, tempat, agenda, peserta hadir, topik pembahasan, perbedaan pendapat (jika ada), serta keputusan yang dihasilkan. Salinan notulen atau risalah tersebut kemudian disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Dewan Komisaris.

Agenda dan Rekapitulasi Rapat

Sampai dengan 31 Desember 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat. Tabel berikut menyajikan rincian agenda rapat, tingkat kehadiran anggota, serta rekapitulasi partisipasi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam setiap pertemuan tersebut.

7. Evaluate candidates to be nominated as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Holding Company, prior to their submission to the General Meeting of Shareholders; and
8. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners, provided they do not conflict with applicable regulations.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

Meeting Policy

The Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings, provided that a meeting is considered valid if attended by at least ½ (one-half) of the committee members, in accordance with the provisions of the Nomination and Remuneration Committee Charter. Meetings are held based on invitations or a predetermined agenda. All meetings are documented in the form of minutes or a report, which include information regarding the time, location, agenda, attendees, topics discussed, differences of opinion (if any), and the decisions reached. A copy of the minutes or report is then submitted to the Secretary of the Board of Commissioners to be forwarded to the Board of Commissioners.

Meeting Agenda and Recapitulation

As of December 31, 2025, the Nomination and Remuneration Committee has held 7 (seven) meetings. The following table presents details of the meeting agendas, member attendance rates, and a Recapitulation of the Nomination and Remuneration Committee's attendance in each of these meetings.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meetings

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda
1	14 Januari 2025 January 14, 2025	Ruang AKHLAK Lantai 27 Gedung Graha CIMB Niaga AKHLAK Room 27th Floor, Graha CIMB Niaga Building	• Pembahasan Usulan Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris PT Bahana Sekuritas; dan • Pembahasan Usulan Pengalihtugasan Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia. • Discussion of the Proposal for a Temporary Extension of the Term of Office of Members of the Board of Commissioners of PT Bahana Sekuritas; and • Discussion of the Proposed Reassignment of a Member of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia.
2	10 Februari 2025 February 10, 2025	*Virtual Meeting (Zoom)*	Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atas Usulan Calon Direksi PT Asuransi Jiwa IFG Request for Feedback from the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) on the Proposed Candidates for the Board of Directors of PT Asuransi Jiwa IFG
3	8 Maret 2025 March 8, 2025	*Virtual Meeting (Zoom)*	Pembahasan Perubahan dan Usulan Anggota Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia Discussion on Changes and Proposed Members of the Board of Directors PT Asuransi Jasa Indonesia
4	15 Juli 2025 July 15, 2025	*Virtual Meeting (Zoom)*	Pembahasan Laporan Kemajuan Implementasi dan Hasil AKHLAK Culture Journey Tahun 2024 Discussion on the Progress Report on the Implementation and Results of the 2024 AKHLAK Culture Journey

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meetings

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda
5	22 Agustus 2025 August 22, 2025	*Virtual Meeting (Zoom)*	Undangan Rapat Pembahasan Usulan Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Invitation to a Meeting to Discuss the Proposed Transfer of Duties and Appointment of Board Members of PT Jaminan Kredit Indonesia
6	30 Oktober 2025 October 30, 2025	*Virtual Meeting (Zoom)*	• Pembahasan Usulan Calon Direktur Teknik PT Asuransi Kredit Indonesia; dan • Pembahasan Usulan Calon Direktur Operasional PT Asuransi Jiwa IFG. • Discussion of the Proposed Candidate for Technical Director of PT Asuransi Kredit Indonesia; and • Discussion of the Proposed Candidate for Director of Operations at PT Asuransi Jiwa IFG.
7	17 November 2025 November 17, 2025	Ruang Rapat Sumatra Lantai 28 Gedung Graha CIMB Niaga Sumatra Meeting Room, 28th Floor, Graha CIMB Niaga Building	Pembahasan usulan Calon Direktur Utama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Discussion of the proposed candidate for President Director of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat
Recapitulation of Attendance of Nomination and Remuneration Committee at Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting							Jumlah Total Attendance	%
	14/1	10/2	8/3	15/7	22/8	30/10	17/11		
Sumiyati	√	√	√	√	√	√	√	7	100
Nasrudin	√	√	√	√	√	√	√	7	100
Masyita Crystallin	√	√	√	x	x	√	x	9	100
Wahyu Setyawan*	√	x	√	n/a	n/a	n/a	n/a	2	66,67
Irham Dilmy***	√	√	√	n/a	n/a	n/a	n/a	3	100
Sabam Hutajulu***	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	0
Rata-rata Average									**93,34**

*) Sdr. Wahyu Setyawan mengundurkan diri pada 4 Juli 2025.
**) Sdr. Irham Dilmy mengundurkan diri pada 16 Mei 2025.
***) Sdr. Sabam Hutajulu mulai menjabat sejak 28 November 2025
*) Mr. Wahyu Setyawan resigned on July 4, 2025.
**) Mr. Irham Dilmy resigned on May 16, 2025.
***) Mr. Sabam Hutajulu began his term of office since November 28, 2025

Kebijakan Remunerasi Bagi Komite Nominasi dan Remunerasi

Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 terkait Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Di sisi lain, ketentuan mengenai penghasilan anggota komite secara internal diatur melalui Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris IFG, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan IFG; dan

Remuneration Policy for The Nomination and Remuneration Committee

The amount of remuneration for members of the Nomination and Remuneration Committee is determined in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises. Meanwhile, provisions regarding the remuneration of committee members are internally regulated through the IFG Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure, with the following details:

1. The compensation for members of the Nomination and Remuneration Committee is determined by the Board of Commissioners, taking into account IFG's financial capacity; and

2. Besaran honorarium anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung IFG dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

IFG secara konsisten mendukung penguatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui program pengembangan yang diarahkan untuk memperluas wawasan, memperkuat keahlian profesional, serta meningkatkan pemahaman terhadap dinamika industri. Pada tahun 2025, anggota Komite secara proaktif melaksanakan pengembangan kompetensi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan keahlian dan bidang industri yang relevan, guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite serta Program Kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2025 tercatat sebagai berikut:

1. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
2. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
3. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
4. Melakukan evaluasi terhadap rencana perpanjangan sementara masa jabatan anggota Direksi di anak perusahaan;
5. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; dan
6. Melakukan evaluasi atas Direksi *existing* sebagai *top talent* PT BPUI.

2. The amount of honoraria for members of the Nomination and Remuneration Committee is set at a maximum of 20% (twenty percent) of the President Director's salary, with taxes borne by IFG, and members are not permitted to receive any income other than such honoraria.

Competency Development of The Nomination and Remuneration Committee

IFG consistently supports the enhancement of the Nomination and Remuneration Committee's competencies through development programs aimed at broadening insights, strengthening professional expertise, and enhancing understanding of industry dynamics. In 2025, the Committee members proactively undertook independent competency development activities in line with their respective expertise needs and relevant industry fields to support the effective performance of the Committee's functions and responsibilities.

Brief Report on The Implementation of The Duties and Activities of The Nomination and Remuneration Committee in 2025

The Nomination and Remuneration Committee has conducted its roles and responsibilities in accordance with the Committee's Operating Guidelines and the previously established Work Program. The activities and achievements of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2025 are as follows:

1. Validating and calibrating the talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/ Supervisory Board (Selected Talent) to produce a list of talent to be nominated by the Board of Commissioners/ Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders/Minister (Nominated Talent);
2. Conducting evaluations of the company's representatives to be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, prior to submission to the General Meeting of Shareholders (GMS)/the Minister;
3. Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Evaluate plans for the temporary extension of the terms of office of members of the Board of Directors at subsidiaries;
5. Evaluate compensation policies for employees that require approval or feedback from the Board of Commissioners or the Supervisory Board; and
6. Evaluate the existing Board of Directors as top talent at PT BPUI.

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2026

Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi telah merancang rencana Program Kerja untuk tahun 2025, yang dirinci sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
2. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada pemegang saham (*Nominated Talent*);
3. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS;
4. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
5. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
6. Melakukan evaluasi atas Direksi *existing* sebagai *top talent* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
7. Melaksanakan tugas lainnya yang menjadi penugasan oleh Dewan Komisaris.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan menyeluruh terhadap manajemen risiko, penerapan prinsip governansi, kepatuhan, serta praktik etika Perusahaan. Komite ini menjalankan fungsinya secara kolektif dan independen, baik dalam pelaksanaan tugas maupun penyusunan laporan, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja: Piagam Komite Pemantau Risiko

IFG telah mengeluarkan Piagam Komite Pemantau Risiko sebagai pedoman operasional komite melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 12/SK-DEKOM/BPUI/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024. Piagam ini berfungsi sebagai acuan resmi bagi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Selain itu, IFG secara periodik meninjau Piagam ini untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik dalam penerapan governansi Perusahaan.

Piagam Komite Pemantau Risiko merupakan dokumen formal yang menetapkan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan lingkup tugas komite. Dokumen ini juga mengatur batasan serta mekanisme hubungan kerja antara Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris, manajemen Perusahaan, dan unit terkait lainnya.

Nomination and Remuneration Committee Work Plan in 2026

To strengthen the effectiveness of its operations, the Nomination and Remuneration Committee has developed a Work Plan for 2025, detailed as follows:

1. Evaluate the Talent Classification systems and procedures implemented by the Board of Directors;
2. Validate and calibrate the talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/ t Supervisory Board (Selected Talent), to produce a list of talent to be nominated by the Board of Commissioners to the shareholders (Nominated Talent);
3. Evaluate candidates to represent the company who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, prior to submission to the General Meeting of Shareholders;
4. Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
5. Evaluate compensation policies for employees that require approval or feedback from the Board of Commissioners or the Supervisory Board;
6. Evaluate the existing Board of Directors as top talent at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
7. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Commissioners as an organ tasked with conducting comprehensive supervisory of risk management, the implementation of governance principles, compliance, and the Company's ethical practices. This Committee performs its functions collectively and independently, both in carrying out its duties and in preparing reports, and is directly accountable to the Board of Commissioners.

Work Guidelines: Risk Monitoring Committee Charter

IFG has issued the Risk Monitoring Committee Charter as an operational guideline for the committee through Board of Commissioners Resolution No. 12/SK-DEKOM/BPUI/VI/2024 dated June 4, 2024. This Charter serves as the official reference for the Risk Monitoring Committee in carrying out its duties, authorities, and responsibilities. In addition, IFG periodically reviews this Charter to ensure that it remains consistent with the Company's needs, applicable laws and regulations, and best practices in corporate governance.

The Risk Monitoring Committee Charter is a formal document that defines the committee's status, authority, responsibilities, and scope of duties. This document also sets forth the boundaries and mechanisms governing the working relationships between the Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners, Company management, and other relevant units.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa kepengurusan Komite Pemantau Risiko ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

2. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir; dan

3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua komite berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, maka ketua komite harus diganti oleh Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Term of Office of The Risk Monitoring Committee

The term of office for the Risk Monitoring Committee is determined as follows:

1. The term of office for members of the Risk Monitoring Committee who are not members of the Board of Commissioners shall be a maximum of 3 (three) years and may be extended once for a term of 2 (two) years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to remove them at any time;
2. The term of office of a member of the Risk Monitoring Committee who is a member of the Board of Commissioners shall automatically terminate upon the expiration of his or her term as a member of the Board of Commissioners; and
3. In the event that a member of the Board of Commissioners serving as the committee Chairperson resigns from his or her position as a member of the Board of Commissioners, the committee Chairperson must be replaced by another Independent Commissioner within 30 (thirty) days at the latest.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Komite Pemantau Risiko memiliki struktur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 Tentang Pengangkatan Komite Pemantau Risiko PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Adapun susunan Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Number, Composition, and Structure of The Risk Monitoring Committee in 2025

The Risk Monitoring Committee consists of 1 (one) Chairperson and 5 (five) Members, as stipulated in the Resolution of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 Regarding the Appointment of the Risk Monitoring Committee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The composition of the Risk Monitoring Committee for the year 2025 is as follows:

Jabatan Position	**Nama** Name	**Dasar Pengangkatan** Basis for Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Term
Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris) Chairperson of the Risk Monitoring Committee (Commissioner)	Nasrudin	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 2/SK-Dekom/BPUI/IV/2021 Decree of the Board of Commissioners No. 2/SK-Dekom/BPUI/IV/2021	19 September 2024 s.d Sekarang September 19, 2024 to Present	Ke I 1st
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Hotbonar Sinaga*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 2/SK DEKOM/BPUI/IV/2021 tanggal 1 April 2021 jo Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 2/SK DEKOM/BPUI/IV/2021 dated April 1, 2021, in conjunction with Board of Commissioners' Decree No. 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	19 September 2024 s.d 20 Oktober 2025 September 19, 2024 to October 20, 2025	Ke I 1st
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Sumiyati	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	19 September 2024 s.d Sekarang September 19, 2024 to Present	Ke I 1st

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Wahyu Setyawan**	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024	19 September 2024 s.d 4 Juli 2025 September 19, 2024 to July 4, 2025	Ke I 1st
Anggota (Non Komisaris) Member (Commissioner)	Fajar Proboseno	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/SK-DEKOM/BPUI/ IV/2021 tanggal 1 April 2021 jo Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/SK DEKOM/BPUI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 dated April 1, 2021, as amended by Board of Commissioners' Resolution No. 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 dated May 3, 2024	1 Apil 2021 s.d Sekarang April 1, 2021 to Present	Ke II 2nd
Anggota (Non Komisaris) Member (Commissioner)	Gresika Bunga Sylvana	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 19 September 2024 jo. Keputusa Dewan Komisaris Nomor 05/SK-DEKOM/BPUI/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 16/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 19, 2024, in conjunction with Decree of the Board of Commissioners No. 05/SK-DEKOM/BPUI/V/2025 dated May 22, 2025	19 September 2024 s.d Sekarang September 19, 2024 to Present	Ke II 2nd

*) Sdr. Wahyu Setyawan mengundurkan diri pada 4 Juli 2025.
**) Sdr. Hotbonar Sinaga habis masa jabatan pada 20 Oktober 2025.
*) Mr. Wahyu Setyawan resigned on July 4, 2025.
**) Mr. Hotbonar Sinaga's term of office ended on October 20, 2025.

Profile Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Profile

Nasrudin
Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris)
Chairperson of the Risk Monitoring Committee (Commissioner)

Ketua Komite Pemantau Risiko, Nasrudin telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairperson of the Risk Monitoring Committee, Nasrudin, is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Hotbonar Sinaga
Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris)
Member of the Risk Monitoring Committee (Commissioner)

Anggota Komite Pemantau Risiko, Hotbonar Sinaga telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Risk Monitoring Committee Member Hotbonar Sinaga is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Sumiyati
Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris)
Member of the Risk Monitoring Committee (Commissioner)

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko, Sumiyati telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Risk Monitoring Committee Member Sumiyati is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Wahyu Setyawan
Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris)
Member of the Risk Monitoring Committee (Commissioner)

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko, Wahyu Setyawan telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Risk Monitoring Committee Member Wahyu Setyawan is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Fadjar Proboseno
Anggota Komite Pemantau Risiko (Non Komisaris/Pihak Independen)
Member of the Risk Monitoring Committee (Non-Commissioner/Independent Party)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Kelahiran 5 September 1971 (Usia 54 tahun) Indonesian Citizen Born September 5, 1971 (Age 54 years old)
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 tanggal 1 April 2021 jo Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/SKDEKOM/BPUI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 02/SK-DEKOM/BPUI/IV/2021 dated April 1, 2021, as amended by Decree of the Board of Commissioners No. 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 dated May 3, 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	· Lulusan Personal Computer Technician and Network System di Pennsylvania College of Technology, USA (1997), · Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (2002). · Graduate of the Personal Computer Technician and Network Systems program at Pennsylvania College of Technology, USA (1997), · Bachelor of Economics from Satya Wacana Christian University, Salatiga (2002).
Riwayat Pekerjaan Work History	· Konsultan Manajemen Risiko (untuk OJK, Bank Indonesia, BEI) · Kepala Manejemen Risiko Astra International (Holding) · Risk Management Consultant (for FSA, Bank Indonesia, and the Indonesia Stock Exchange) · Head of Risk Management at Astra International (Holding)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	· CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy) · ERMCP (Enterprise Risk Management Certified Professional), ERMA (Enterprise Risk Management Academy) · QRGP (Qualified Risk Governance Professional) BNSP - LSP MKS · (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera) · QCRO (Qualified Chief Risk Officer) BNSP - LSP MKS (Lembaga · Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera) · QRMP (Qualified Risk Management Professional) BNSP - LSP MKS · (Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera) · CRMP (Certified Risk Management Professional) BNSP – LSPMR · (Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko) · CCIA (Certified Chief Internal Audit) BNSP – LSP MKS (Lembaga · Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera) · CIAL (Certtified Internal Audit Leader) BNSP – LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera) · CCCO (Certified Chief Compliance Officer) BNSP – LSP · CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA (Enterprise Risk Management Academy) · ERMCP (Enterprise Risk Management Certified Professional), ERMA (Enterprise Risk Management Academy) · QRGP (Qualified Risk Governance Professional) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Body – Mitra Kalyana Sejahtera) · QCRO (Qualified Chief Risk Officer) BNSP - LSP MKS · (Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Body) · QRMP (Qualified Risk Management Professional) BNSP - LSP MKS (Professional Certification Body – Mitra Kalyana Sejahtera) · CRMP (Certified Risk Management Professional) BNSP – LSPMR (Risk Management Professional Certification Body) · CCIA (Certified Chief Internal Auditor) BNSP – LSP MKS · (Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification) · CIAL (Certified Internal Audit Leader) BNSP – LSP MKS (Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Body) · CCCO (Certified Chief Compliance Officer) BNSP – LSP
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with any members of the Board Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as major and controlling shareholders, whether direct or indirect.

Gresika Bunga Sylvana **Anggota Komite Pemantau Risiko (Non Komisaris/Pihak Independen)** Member of the Risk Monitoring Committee (Non-Commissioner/Independent Party)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Kelahiran 9 Oktober 1991 (Usia 34 tahun) Indonesian Citizen Born October 9, 1991 (Age 34 years old)
Domisili Domicile	Kota Bekasi, Indonesia Bekasi City, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 10/SK-DEKOM/BPUI/V/2024 dated May 3, 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 – Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia (Cumlaude) • S2 – Risk Management, The City University of New York, Amerika Serikat (Cumlaude) • Bachelor's Degree – Accounting, Gadjah Mada University, Indonesia (Summa Cum Laude) • Master's Degree – Risk Management, The City University of New York, United States (Cum Laude)
Riwayat Pekerjaan Work History	• Ketua Tim Audit/Audit Team Leader, Kementerian Keuangan • Memimpin audit/pengawasan BUMN, BLU, SMV, serta kebijakan fiskal, compliance, keuangan dan manajemen risiko (2023 s.d. saat ini) • Auditor, Kementerian Keuangan (2018-2023) • Menyusun berbagai Pedoman audit/pengawasan termasuk di antaranya Pedoman Audit Kinerja (Performance Audit), Risk Management Maturity Level, melakukan pengawasan terkait BUMN, BLU, SMV, serta kebijakan fiskal, compliance, keuangan dan manajemen risiko. • Pelaksana Keuangan, Inspektorat VII, Kementerian • Keuangan (2015-2018) • Business Planning & Commercial Analyst, PT Coca Cola Amatil Indonesia (2014-2015) • Monetary & Payment System Research Assistant, Bank Indonesia (2012-2013) • Audit Team Leader, Ministry of Finance • Led audits and supervisory of state-owned enterprises (SOEs), public service agencies (BLUs), and special mission vehicles (SMVs), as well as fiscal policy, compliance, finance, and risk management (2023–present) • Auditor, Ministry of Finance (2018–2023) • Developed various audit and supervisory guidelines, including the Performance Audit Guidelines, Risk Management Maturity Level, and conducted supervisory of state-owned enterprises (SOEs), public service agencies (BLUs), and Special Mission Vehicles (SMVs), as well as fiscal policy, compliance, finance, and risk management. • Financial Officer, Inspectorate VII, Ministry • Finance (2015–2018) • Business Planning & Commercial Analyst, PT Coca-Cola Amatil Indonesia (2014–2015) • Monetary & Payment System Research Assistant, Bank Indonesia (2012–2013)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	• Certified Risk Associate (CRA) - Risk Management Professional • Certification Qualified Healthcare Internal Auditor (QHIA)
Organisasi Profesi Concurrent Positions	• Deputy Chair of Professional Development Committee [2023 - sekarang] • Indonesian Internal Auditor Professional Institute (PAII) • Member [2021 - sekarang] • Indonesian Risk Management Professional Association • Member [2020 - sekarang] • The Institute of Internal Auditors Indonesia • Deputy Chair of the Professional Development Committee [2023–Present] • Member of the Indonesian Internal Auditor Professional Institute (PAII) [2021–Present] • Member, Indonesian Risk Management Professional Association [2020–Present] • The Institute of Internal Auditors Indonesia
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Audit Team Leader/Ketua Tim Audit, Kementerian Keuangan Audit Team Leader, Ministry of Finance
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling parties, either directly or indirectly

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, serta bebas dari intervensi pihak mana pun yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko, kriteria independensi komite ditetapkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Independence of The Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee performs its roles and responsibilities professionally and independently, and is free from interference by any party that is inconsistent with the provisions of laws and regulations. Referring to the Risk Monitoring Committee Charter, the criteria for the committee's independence are established to include the following:

Aspek Independensi Independence Aspects	**Nasrudin (Ketua)** (Chairperson)	**Hotbonar Sinaga (Anggota)** (Member)	**Sumiyati (Anggota)** (Member)	**Wahyu Setyawan (Anggota)** (Member)	**Fajar Proboseno (Anggota)** (Member)	**Gresika Bunga Sylvana (Anggota)** (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Has a family relationship with Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors Has direct and indirect business relationships with the Company	x	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, nonaudit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	x	x	x	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

Peran dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

IFG telah menetapkan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi atas penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan etika di lingkungan IFG dan Anggota *Holding*;
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala terutama apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;
3. Memastikan terlaksananya proses dan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan efektif di dalam IFG dan Anggota *Holding;*

Role and Responsibilities of The Risk Monitoring Committee

IFG has established the scope of duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee, which are outlined as follows:

1. To support the Board of Commissioners in supervising and evaluating the implementation of corporate governance, risk management, compliance, and ethics within IFG and its Holding Company members;
2. To periodically evaluate risk management policies, particularly when there are changes in factors that significantly affect business activities;
3. Ensuring the implementation of comprehensive and effective risk management processes and systems within IFG and its Holding Company Members;

4. Menerima informasi dan melakukan pengawasan terkait dengan:
   a. Selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
   b. Potensi, limit dan indikator pendorong risiko;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko IFG;
6. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi jika diperlukan; dan
7. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota komite.

4. Receiving information and exercising supervisory regarding:
   a. Risk appetite and risk tolerance;
   b. Potential, limits, and risk drivers;
5. Monitor and evaluate the appropriateness of the implementation of IFG's risk management policies and strategies;
6. Submitting reports to the Board of Commissioners on the performance of each task, accompanied by recommendations if necessary; and
7. Preparing quarterly and annual reports to the Board of Commissioners, signed by the Chairperson and members of the committee.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat. Adapun rincian pelaksanaan rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meetings

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee held 5 (five) meetings. The details of these meetings are presented as follows:

Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meetings

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda
1	9 Januari 2025 January 9, 2025	Ruang AKHLAK Lantai 27 Gedung CIMB Niaga AKHLAK Room, 27th Floor, CIMB Niaga Building	1. Risiko dan Kinerja bulanan; 2. Pemaparan Laporan Risiko kepada external (regulator) sebelum dilakukan submit; 3. Perencanaan Strategis BUMN Berbasis Risiko; dan 4. Penyelesaian Tanda Minat KK oleh IFG terkait Aset Citos. 1. Monthly Risk and Performance; 2. Presentation of the Risk Report to external parties (regulators) prior to submission; 3. Risk-Based Strategic Planning for State-Owned Enterprises; and 4. Finalization of the Letter of Interest (LOI) by IFG regarding Citos Assets.
2	5 Mei 2025 May 5, 2025	*Virtual Meeting (Zoom)*	1. Laporan Mitigasi Risiko Triwulan I Tahun 2025; dan 2. Rencana Penanganan Risiko Triwulan II Tahun 2025. 1. Risk Mitigation Report for the First Quarter of 2025; and 2. Risk Management Plan for the Second Quarter of 2025.
3	29 September 2025 September 29, 2025	*Virtual Meeting (Zoom)*	Pembahasan Hasil *Risk Maturity Index* (RMI) Indonesia Financial Group (IFG) Tahun 2024 Discussion of the 2024 Risk Maturity Index (RMI) Results for Indonesia Financial Group (IFG)
4	21 Oktober 2025 October 21, 2025	Ruang AKHLAK Lantai 27 Gedung CIMB Niaga AKHLAK Room, 27th Floor, CIMB Niaga Building	1. Laporan Manajemen Risiko Triwulan III 2025; 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan 3. Pembahasan KEP Strategi Risiko 2026. 1. Third Quarter 2025 Risk Management Report; 2. Anti-Bribery Management System; and 3. Discussion of the 2026 Risk Strategy Board Resolution.
5	15 Desember 2025 December 15, 2025	Ruang AKHLAK Lantai 27 Gedung CIMB Niaga AKHLAK Room, 27th Floor, CIMB Niaga Building	Pembahasan penanganan Risiko PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Triwulan III Tahun 2025 Discussion on Risk Management at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) for the Third Quarter of 2025

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat
Recapitulation of Attendance of the Risk Monitoring Committee at Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting					Jumlah Total Attendance	%
	9/1	5/5	29/9	21/10	15/12		
Nasrudin	√	√	√	√	√	100	100
Hotbonar Sinaga*	x	x	x	n/a	n/a	0	0

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat
Recapitulation of Attendance of the Risk Monitoring Committee at Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting					Jumlah Total Attendance	%
	9/1	5/5	29/9	21/10	15/12		
Sumiyati	√	√	√	√	√	100	100
Wahyu Setyawan**	√	x	n/a	n/a	n/a	1	50
Fajar Proboseno	√	√	√	√	√	100	100
Gresika Bunga Sylvana	√	√	√	√	√	100	100
Rata-rata Average							**75**

*) Sdr. Hotbonar Sinaga dalam kondisi sakit dan habis masa jabatan pada 20 Oktober 2025.
**) Sdr. Wahyu Setyawan mengundurkan diri pada 4 Juli 2025.
*) Mr. Hotbonar Sinaga was on sick leave and his term of office ended on October 20, 2025.
**) Mr. Wahyu Setyawan resigned on July 4, 2025.

Kebijakan Remunerasi Bagi Komite Pemantau Risiko

Penetapan besaran remunerasi bagi Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Sementara itu, ketentuan mengenai penghasilan anggota komite secara internal diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris IFG, di mana penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan IFG; dan
2. Besaran honorarium anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung IFG dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Remuneration Policy for The Risk Monitoring Committee

The determination of remuneration amounts for the Risk Monitoring Committee is based on Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organ and Human Resources of State-Owned Enterprises. Meanwhile, provisions regarding the remuneration of committee members are internally regulated in the IFG Board of Commissioners' Guidelines and Rules of Procedure, whereby the remuneration of members of the Risk Monitoring Committee and the Integrated Governance Committee is determined based on the following provisions:

1. The compensation for members of the Risk Monitoring Committee is determined by the Board of Commissioners, taking into account IFG's financial capacity; and
2. The honorarium for members of the Risk Monitoring Committee is set at a maximum of 20% (twenty percent) of the President Director's salary, with taxes borne by IFG, and members are not permitted to receive any income other than this honorarium.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

IFG secara aktif melibatkan Komite Pemantau Risiko dalam berbagai program pengembangan kompetensi sebagai upaya untuk memperluas wawasan serta meningkatkan pengetahuan anggotanya. Informasi mengenai pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi komite disajikan sebagai berikut:

Competency Development of The Risk Monitoring Committee

IFG actively involves the Risk Monitoring Committee in various competency development programs as an effort to broaden the horizons and enhance the knowledge of its members. Information regarding the implementation of training and competency enhancement for the committee is presented as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Educational and Training Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Fadjar Proboseno	Non Pelatihan Non-Training	IIA Conference 2025	27 - 28 Agustus 2025 August 27–28, 2025	IIA Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Educational and Training Material	**Tempat/Tanggal** Location/Date	**Penyelenggara** Organizer
Fadjar Proboseno	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	26 – 27 November 2025 November 26–27, 2025	IFG Corporate University
Fadjar Proboseno	Non Pelatihan Non-Training	Risk Beyond 2025	4 – 5 Desember 2025 December 4–5, 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Gresika Bunga Sylvana	Non Pelatihan Non-Training	IIA Conference 2025	27 - 28 Agustus 2025 August 27–28, 2025	IIA Indonesia
Gresika Bunga Sylvana	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	26 – 27 November 2025 November 26–27, 2025	IFG Corporate University
Gresika Bunga Sylvana	Sertifikasi Certification	Professional Recognition Program (PRP) Qualified Internal Auditor	3 – 4 Oktober 2025 October 3–4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Gresika Bunga Sylvana	Sertifikasi Certification	Professional Recognition Program (PRP) Qualified Government Internal Auditor	17 – 18 Oktober 2025 October 17–18, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Pedoman Kerja Komite serta Program Kerja yang telah ditetapkan. Adapun realisasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025 meliputi:

1. Melakukan pembahasan dan reviu atas laporan Profil Risiko dan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) Perusahaan;
2. Melakukan pembahasan dan reviu atas laporan *Risk Maturity Assessment* Perusahaan;
3. Aktif melakukan diskusi dengan Dewan Komisaris terkait risiko-risiko utama Perusahaan, usulan *corporate action*, usulan RKAP bebasis risiko, dll;
4. Menyusun Rencana Kerja Pemantau Risiko tahun 2026 dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2026

Secara garis besar, aktivitas Komite Pemantau Risiko dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan nonrutin. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan rencana kerja Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2026:

1. Menelaah dan memberikan masukan atas beberapa usulan *draft* kebijakan Manajemen Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko dan unit kerja terkait perihal Kebijakan Strategi Manajemen Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, *Risk Appetite Statement* (RAS) dan Matriks Peta Risiko, dan Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM);

Brief Report on The Implementation of The Duties and Activities of The Risk Monitoring Committee in 2025

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee has conducted its functions and responsibilities in accordance with the Committee's Work Guidelines and the established Work Program. The implementation of the Risk Monitoring Committee's duties during 2025 included:

1. Conducting discussions and reviews of the Company's Risk Profile and Risk Control Self-Assessment (RCSA) reports;
2. Conducting discussions and reviews of the Company's Risk Maturity Assessment report;
3. Actively engaging in discussions with the Board of Commissioners regarding the Company's key risks, proposed corporate actions, risk-based budget proposals, etc.;
4. Preparing the 2026 Risk Monitoring Work Plan and submitting it to the Board of Commissioners; and
5. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Work Plan of The Risk Monitoring Committee in 2026

In general, the Risk Monitoring Committee's activities are categorized into two types: routine and non-routine activities. In this regard, the following outlines the Risk Monitoring Committee's work plan for 2026:

1. Review and provide input on several proposed draft risk management policies in collaboration with the Risk Management Division and relevant business units regarding the Strategic Risk Management Policy, the Integrated Risk Management Policy, the Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Map Matrix, and the Business Continuity Management (BCM) Policy;

2. Menelaah dan memberikan masukan atas laporan Profil Risiko dan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) Perusahaan;
3. Menelaah dan memberikan masukan atas laporan *Risk Maturity Assessment* Perusahaan;
4. Melakukan pembahasan terkait hasil pengawasan implementasi Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Divisi terkait;
5. Aktif melakukan diskusi dengan Dewan Komisaris terkait risiko-risiko utama Perusahaan, usulan *corporate action*, usulan RKAP berbasis risiko, dll;
6. Melakukan pembahasan dan reviu kecukupan penilaian risiko atas beberapa usulan *draft* kebijakan perusahaan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai tindak lanjut atas penetapan IFG sebagai konglomerasi keuangan, IFG telah menyusun Pedoman GCG Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 2 Tahun 2023. Dalam implementasinya, IFG melakukan pemisahan fungsi antara Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang masing-masing berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris IFG menetapkan komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan melibatkan Komisaris Independen dari entitas *holding* yang tergabung dalam konglomerasi keuangan sebagai bagian dari keanggotaan komite. Melalui langkah ini, pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan secara lebih efektif dan komprehensif.

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan organ pendukung di bawah Dewan Komisaris yang menjalankan tugasnya secara kolektif dan independen, baik dalam pelaksanaan fungsi maupun dalam penyusunan laporan. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

IFG telah menetapkan Piagam sebagai pedoman operasional bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 17/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 tanggal 30 September 2024. Piagam ini disusun sebagai acuan bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya secara efektif. Selain itu, IFG secara berkala melakukan peninjauan terhadap Piagam tersebut guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik dalam penerapan governansi Perusahaan.

2. Review and provide input on the Company's Risk Profile and Risk Control Self-Assessment (RCSA) reports;
3. Review and provide input on the Company's Risk Maturity Assessment report;
4. Conduct discussions with the relevant divisions regarding the results of the supervisory of the implementation of the 2025 Risk Management plan;
5. Actively engage in discussions with the Board of Commissioners regarding the Company's key risks, proposed corporate actions, risk-based budget proposals, etc.;
6. Conducting discussions and reviews of the adequacy of risk assessments for several proposed draft company policies;
7. Conduct other tasks assigned by the Board of Commissioners.

INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Following IFG's designation as a financial conglomerate, the Company developed the Integrated Good Corporate Governance (GCG) Guidelines, which were established under Joint Decree No. 2 of 2023 of the Board of Commissioners and the Board of Directors. As part of their implementation, IFG separated the functions of the Risk Oversight Committee and the Integrated Governance Committee, both of which operate under the oversight of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners of IFG determined the composition of the Integrated Governance Committee by appointing Independent Commissioners from the holding company's member entities within the financial conglomerate to serve as committee members. This composition enables the Integrated Governance Committee to carry out its functions more effectively and comprehensively.

The Integrated Governance Committee is a supporting committee under the Board of Commissioners that performs its duties collectively and independently, both in carrying out its functions and in preparing its reports. The Committee is directly accountable to the Board of Commissioners, and its authority, duties, and responsibilities are governed by the applicable laws and regulations.

Work Guidelines for The Integrated Governance Committee

IFG has established a Charter as an operational guideline for the Integrated Governance Committee through Board of Commissioners Decree No. 17/SK-DEKOM/BPUI/IX/2024 dated September 30, 2024. This Charter is designed to serve as a reference for the Integrated Governance Committee in effectively carrying out its duties, authorities, and responsibilities. In addition, IFG periodically reviews the Charter to ensure its alignment with the Company's needs, applicable laws and regulations, and best practices in corporate governance.

Sebagai dokumen formal, Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi mengatur kedudukan, kewenangan, serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawab komite. Di samping itu, piagam ini juga menetapkan batasan wewenang serta mekanisme hubungan kerja antara Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan Dewan Komisaris, manajemen, dan unit terkait lainnya.

As a formal document, the Integrated Governance Committee Charter governs the committee's status, authority, and the scope of its duties and responsibilities. Furthermore, this charter also establishes the limits of authority and the mechanisms for working relationships between the Integrated Governance Committee and the Board of Commissioners, management, and other relevant units.

Struktur dan Keanggotaan

Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Seorang Komisaris Independen yang juga menjadi ketua pada salah satu komite pada IFG yang berada di bawah Dewan Komisaris, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk IFG dari Anggota *Holding* yang merupakan anggota konglomerasi keuangan sebagai anggota, di mana keanggotaan Komisaris Independen dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan;
3. Seorang pihak independen yang mempunyai kompetensi dalam membantu pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai anggota; dan
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat Anggota *Holding* yang merupakan anggota konglomerasi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha syariah, sebagai anggota.

Structure and Membership

The membership composition of the Integrated Governance Committee shall include, at a minimum:

1. An Independent Commissioner who also serves as Chairperson of one of the committees within IFG under the Board of Commissioners, serving as both Chairperson and member;
2. An Independent Commissioner representing and appointed by IFG from a Holding Company that is a member of the financial conglomerate, as a member, where the Independent Commissioner's membership may be either permanent or non-permanent, as needed;
3. An independent party with the expertise to assist in the execution of the Integrated Governance Committee's duties, serving as a member; and
4. A member of the Sharia Supervisory Board, if there is a Holding Company Member that is part of a financial conglomerate conducting sharia business activities, as a member.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki struktur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 8 (delapan) orang Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT BPUI (Persero) Nomor 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Adapun komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Number, Composition, and Structure of The Integrated Governance Committee In 2025

The Integrated Governance Committee has a structure consisting of 1 (one) Chairperson, 1 (one) Vice Chairperson, and 8 (eight) Members, as stipulated in the Decision of the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) No. 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 Regarding the Determination of Changes to the Composition of the Integrated Governance Committee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The composition of the Integrated Governance Committee in 2025 is as follows:

Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Composition and Structure of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

Jabatan Position	**Nama** Name	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Term
Ketua (Komisaris) Chairperson (Commissioner)	Fauzi Ichsan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	5 Februari 2024 s.d 31 Desember 2025 February 5, 2024 to December 31, 2025	Ke I 1st
Wakil Ketua (Decree of the Board of Commissioners) Vice Chairperson (Decree of the Board of Commissioners	Eko Suwandi	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	5 Februari 2024 s.d Sekarang February 5, 2024 to Present	Ke I 1st
Anggota (Komisaris) Member (Commissioner)	Hotbonar Sinaga*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	5 Februari 2024 s.d 20 Oktober 2025 February 5, 2024 to October 20, 2025	Ke I 1st

Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Composition and Structure of the Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term
Anggota (Decree of the Board of Commissioners) Member (Decree of the Board of Commissioners)	Hernita Alius	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	5 Februari 2024 s.d Sekarang February 5, 2024 to Present	Ke I 1st
Anggota (Decree of the Board of Commissioners) Member (Decree of the Board of Commissioners)	Heru Kreshna Reza	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	5 Februari 2024 s.d Sekarang February 5, 2024 to Present	Ke I 1st
Anggota (Decree of the Board of Commissioners) Member (Decree of the Board of Commissioners)	Yasril Rasyid**	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	5 Februari 2024 s.d 16 Februari 2025 February 5, 2024 to February 16, 2025	Ke I 1st
Anggota (Decree of the Board of Commissioners) Member (Decree of the Board of Commissioners)	Hari Gusrida	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	5 Februari 2024 s.d Sekarang February 5, 2024 to Present	Ke I 1st
Anggota (Decree of the Board of Commissioners) Member (Decree of the Board of Commissioners)	Aditya Mufti Ariffin	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 dated October 23, 2025	23 Oktober 2025 s.d Sekarang October 23, 2025 to Present	Ke I 1st
Anggota (Decree of the Board of Commissioners) Member (Decree of the Board of Commissioners)	Dasuki Amsir	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 dated October 23, 2025	23 Oktober 2025 s.d Sekarang October 23, 2025 to Present	Ke I 1st
Anggota (Decree of the Board of Commissioners) Member (Decree of the Board of Commissioners)	Hario Soeprobo	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 dated October 23, 2025	23 Oktober 2025 s.d Sekarang October 23, 2025 to Present	Ke I 1st
Anggota (Decree of the Board of Commissioners) Member (Decree of the Board of Commissioners)	Hafiz Arief	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 dated October 23, 2025	23 Oktober 2025 s.d Sekarang October 23, 2025 to Present	Ke I 1st
Anggota (Independen) Member (Independent)	Farid Azhar Nasution***	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Decree of the Board of Commissioners No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024	5 Februari 2024 s.d 8 Oktober 2025 February 5, 2024 to October 8, 2025	Ke I 1st
Anggota (Independen) Member (Independent)	Diwe Novara	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Decree of the Board of Commissioners No. 8/SK-DEKOM/BPUI/X/2025 dated October 23, 2025	23 Oktober 2025 s.d Sekarang October 23, 2025 to Present	Ke I 1st

*) Sdr. Hotbonar Sinaga berakhir masa jabatan pada 20 Oktober 2025.
**) Sdr. Yasril Rasyid meninggal dunia pada 16 Februari 2025.
***) Sdr. Farid Azhar Nasution mengundurkan diri pada 8 Oktober 2025.
*) Mr. Hotbonar Sinaga's term of office ended on October 20, 2025.
**) Mr. Yasril Rasyid passed away on February 16, 2025.
***) Mr. Farid Azhar Nasution resigned on October 8, 2025.

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profile of The Integrated Governance Committee

Fauzi Ichsan
Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komisaris)
Chairperson of the Integrated Governance Committee (Commissioner)

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Fauzi Ichsan telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Fauzi Ichsan, Chairperson of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Eko Suwandi
Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioners)
Vice Chairperson of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 62 tahun Indonesian citizen Age: 62 years old
Domisili Domicile	Bantul, D.I.Yogyakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doctorate Program in Business in Accounting, Queensland University Of Technology, (2005) • Master Science in Accounting, California State University, (1994) • Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (1987) • Doctoral Program in Business with a concentration in Accounting, Queensland University of Technology (2005) • Master of Science in Accounting, California State University, (1994) • Bachelor of Accounting, Gadjah Mada University, Yogyakarta, (1987)
Riwayat Pekerjaan Work History	• Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021) • Komisaris PT Bank BRI Syariah Tbk (2017-2021) • Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2016) • Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi di FEB UGM (2013) • Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM FEB UGM (2008) • Ketua Satuan Audit Internal di Universitas Gadjah Mada (2005) • Wakil Direktur pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi UGM (1995) • Commissioner, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021) • Board Member of PT Bank BRI Syariah Tbk (2017–2021) • Dean of the Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University (2016) • Associate Dean for Planning and Information Systems at the Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University (2013) • Associate Dean for Finance, Assets, and Human Resources at the Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University (2008) • Head of the Internal Audit Unit at Gadjah Mada University (2005) • Deputy Director of the Diploma III Program, Faculty of Economics, UGM (1995)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Qualified Risk Governance Professional
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris Independen PT Jasa Raharja Independent Commissioner at PT Jasa Raharja
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung Has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly

Hotbonar Sinaga
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komisaris)
Member of the Integrated Governance Committee (Commissioner)

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Hotbonar Sinaga telah disajikan pada bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of Hotbonar Sinaga, a member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, is presented in the Company Profile chapter under the Profiles of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Hernita Alius **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)** Members of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 66 tahun Indonesian Citizen Age 66 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	· (S2) Magister Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2006) · (S2) Magister Manajemen Universitas Bhayangkara (2004) · (S1) Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas · Krisnadwipayana (1986) · (DIII) Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1981) · Master of Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2006) · Master of Management, Bhayangkara University (2004) · Bachelor of Economics from the Faculty of Economics, Krisnadwipayana (1986) · Diploma from the State College of Accounting (1981)
Riwayat Pekerjaan Work History	· Kepala di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2016-2017) · Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012- 2016) · Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2009-2012) · Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (2006-2009) · Supervisor Inspektur Pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang (2000-2006). · Head of the Jakarta Cilandak Primary Tax Office (2016–2017) · Supervisor of Tax Inspectors at the Jakarta Pasar Minggu Primary Tax Office (2012–2016) · Supervisor of Tax Inspectors at the Jakarta Cilandak Primary Tax Office (2009–2012) · Supervisor of Tax Inspectors at the Tangerang Intermediate Tax Office (2006–2009) · Tax Inspector Supervisor at the Tangerang Tax Audit and Investigation Office (2000–2006).
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris Independen PT Jamkrindo Independent Commissioner of PT Jamkrindo
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling parties, either directly or indirectly.

Heru Kreshna Reza **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)** Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 65 tahun Indonesian Citizen Age 65 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	· S3) Doktoral pada jurusan Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor (2006) · (S2) Magister pada jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia (1996) · (S1) Sarjana pada jurusan Hukum Keperdataan di Universitas Islam Jakarta (1990) · (S1) Sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Niaga di Universitas 17 Agustus 1945 (1990) · Doctoral degree in Agricultural Industrial Technology from Bogor Agricultural University (2006) · Master's degree in Administrative Science from the University of Indonesia (1996) · Bachelor's Degree in Civil Law from Jakarta Islamic University (1990) · Bachelor's Degree in Business Administration from the University of 17 August 1945 (1990)

Heru Kreshna Reza
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)
Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)

Riwayat Pekerjaan Work History	• Auditor Utama Keuangan Negara VII, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2020) • Auditor Utama Keuangan Negara I, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2014-2020) • Auditor Utama Keuangan Negara IV, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2012-2014) • Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2011-2012) • Kepala Auditorat I.A, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2010-2012) • Kepala Auditorat I.B, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2007-2010) • Kepala Auditorat I.C, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2006-2007) • Kepala Sub Auditorat I.A.3, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004-2006) • Kepala Bidang Analev Pemeriksaan APBN-2, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004) • Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2001-2004) • Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal, • Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1997-2001) • Pemeriksa Muda, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1994-1997) • Penilik, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1987-1994) • Administrasi Umum, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (1986-1987) • Senior State Financial Auditor VII, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2020) • Senior State Financial Auditor I, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2014–2020) • Senior State Financial Auditor IV, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2012–2014) • Head of the East Java Regional Office, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2011–2012) • Head of Audit Division I.A, Board of Audit of the Republic of Indonesia (2010–2012) • Head of Audit Division I.B, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2007–2010) • Head of Audit Division I.C, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2006–2007) • Head of Sub-Audit Division I.A.3, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2004–2006) • Head of the APBN-2 Audit Analysis Division, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2004) • Head of the Executive Secretariat Division, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (2001–2004) • Head of the Public Relations Sub-Division, General Secretariat, • Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (1997–2001) • Junior Auditor, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (1994–1997) • Inspector, Board of Audit of the Republic of Indonesia (1987–1994) • General Administration, Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (1986–1987)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Ahli Tata Kelola Terintegrasi (ATKRT-BNSP)/(CGRP-GIRMA) Integrated Governance Expert (ATKRT-BNSP)/(CGRP-GIRMA)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris Independen PT Askrindo Independent Commissioner of PT Askrindo
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, nor with major or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Yasril Rasyid
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)
Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 67 tahun Indonesian Citizen Age 67 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 Board of Commissioners's Decree No. 1/SK-DEKOM/BPUI/II/2024 dated February 5, 2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1984) Bachelor of Industrial Engineering from the Bandung Institute of Technology (1984)

Yasril Rasyid **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)** Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)	
Riwayat Pekerjaan Work History	• Tim Penguji Fit and Proper Test bagi pihak utama OJK • (2020-sekarang) • Direktur Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (2019-2022) • Konsultan Manajemen Risiko dan Asuransi (Self Employed) • (2019-sekarang), beberapa penugasan yang pernah dilakukan antara lain Konsultan di Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan,Konsultan di ADB, Konsultan di Bank Dunia, dan lainnya • Presiden Direktur di PT Reasuransi Maipark Indonesia (2015-2018) • Presiden Direktur di PT Tugu Pratama Indonesia (2013-2015) • Member of the Fit and Proper Test Panel for key OJK officials (2020–present) • Director of the Indonesian Insurance Education Institute (2019–2022) • Risk Management and Insurance Consultant (Self-Employed) • (2019–present); past assignments include Consultant at the General Secretariat of the Ministry of Finance, Consultant at the Asian Development Bank (ADB), Consultant at the World Bank, and others • President Director at PT Reasuransi Maipark Indonesia (2015–2018) • President Director at PT Tugu Pratama Indonesia (2013–2015)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	AAIK, AMRP, CREL
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris Independen IFG Life Independent Commissioner of IFG Life
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling parties, either directly or indirectly.

Hari Gusrida **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)** Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 70 tahun Indonesian Citizen Age 70 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Akuntansi Ekonomi, Universitas Padjadjaran (2005) • Magister Manajemen, STIE IPWI (1998) • Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1981) • Doctoral Degree in Accounting and Economics, Padjadjaran University (2005) • Master's Degree in Management, STIE IPWI (1998) • Bachelor's Degree in Accounting, Padjadjaran University (1981)
Riwayat Pekerjaan Work History	• PT Bahana Artha Ventura sebagai Direktur Operasional dan Remedial, Komisaris PT Sarana Surakarta Ventura, Komisaris PT Sarana Jatim Ventura, Komisaris PT Sarana Sumbar Ventura, Komisaris PT Sarana Sulsel Ventura (2005-2007) • Kepala Divisi Administrasi Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000-2004) • PT Bahana Artha Ventura as Director of Operations and Remediation; Commissioner of PT Sarana Surakarta Ventura; Commissioner of PT Sarana Jatim Ventura; Commissioner of PT Sarana Sumbar Ventura; Commissioner of PT Sarana Sulsel Ventura (2005–2007) • Head of the Asset Administration Division at the Indonesian Bank Restructuring Agency (2000–2004)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Certified Public Accountant
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama PT Bahana Sekuritas Independent Commissioner concurrently serving as Acting President Commissioner of PT Bahana Sekuritas
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Aditya Mufti Ariffin
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)
Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 41 tahun Indonesian Citizen Age 41 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	· S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2007) · S2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2011) · Bachelor's Degree, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University (2007) · Master's Degree, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University (2011)
Riwayat Pekerjaan Work History	· Anggota DPR RI Fraksi PPP – Komisi III DPR RI (2009 – 2014) · Anggota DPR RI Fraksi PPP – Komisi III DPR RI (2014 – 2019) · Ketua Dewan Perwakilan Wlayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kalimantan Selatan (2016 – 2025) · Wali Kota Banjarbaru (2021–2025) · Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2025 – sekarang) · Member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), PPP Faction – Commission III (2009–2014) · Member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), PPP Faction – Commission III (2014–2019) · Chairman of the Regional Executive Board of the United Development Party (PPP), South Kalimantan Province (2016–2025) · Mayor of Banjarbaru (2021–2025) · Independent Commissioner of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2025–present)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 4 – LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Banking Risk Management Level 4 Qualification – LSP Risk Management Certification Body
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite di perusahaan lain. He does not hold any concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or a Committee at any other company.
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Dasuki Amsir
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)
Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 62 tahun Indonesian Citizen Age 62 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	· D3 Ekonomi Perusahaan - Universitas Krisnadwipayana (1985) · S1 Ekonomi Perusahaan - Universitas Krisnadwipayana (1986) · S2 Manajemen Bisnis, Konsentrasi Pemasaran - Universitas Gajah Mada (1996) · Diploma (D3) in Business Economics – Krisnadwipayana University (1985) · Bachelor's Degree in Business Economics – Krisnadwipayana University (1986) · Master's Degree in Business Management, Marketing Concentration – Gadjah Mada University (1996)
Riwayat Pekerjaan Work History	· Direktur Keuangan PTPN XII (2015-2016) · Direktur Utama PTPN IV (2016-2017) · Direktur Utama di PTPN III (Holding) (2017) · Managing Director Distribution Network PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2017-2019) · Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (2020-2024) · Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa IFG (2024-sekarang) · Finance Director of PTPN XII (2015–2016) · President Director of PTPN IV (2016–2017) · President Director of PTPN III (Holding) (2017) · Managing Director, Distribution Network, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2017–2019) · President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (2020–2024) · President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of PT Asuransi Jiwa IFG (2024–present)

Dasuki Amsir **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)** Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)	
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	• Certified Risk Executive Leader (CREL) • Risk Management Level 7
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite di perusahaan lain. He does not hold any concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or a Committee at any other company.
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Hario Soeprobo **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)** Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 67 tahun Indonesian Citizen Age 67 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	1978 – 1982 Universitas Indonesia, Sarjana Ekonomi Bachelor of Economics, University of Indonesia (1978–1982)
Riwayat Pekerjaan Work History	• 2022 – November Komisaris Utama PT Bahana TCW Investment Management • 2018 – November COO PT Medco Daya Abadi Lestari • 2018 – 2023 Komisaris PT Sequis Aset Manajemen • 2001-2018 CEO First State Investment Management • 1995–2001 Komisaris PT Bahana TCW Investment Management • President Commissioner of PT Bahana TCW Investment Management (2022–November) • COO of PT Medco Daya Abadi Lestari (2018–November) • Commissioner of PT Sequis Aset Manajemen (2018–2023) • CEO of First State Investment Management (2001–2018) • Commissioner of PT Bahana TCW Investment Management (1995–2001)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	-
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite di perusahaan lain. He does not hold any concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or a Committee at any other company.
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Hafiz Arief
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)
Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 66 tahun Indonesian Citizen Age 66 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	· S1 Akuntansi dari Universitas Jayabaya (1984) · S2 Business Administration (MBA) dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (1989) · Bachelor's Degree in Accounting from Jayabaya University (1984) · Master's Degree in Business Administration (MBA) from the Indonesian Institute of Management Development (1989) Executive Program : · Harvard University Kennedy School of Government – Boston, USA (Senior Manager in Government) (2007) · International Institute Management for Development (IMD)-Lausanne, Switzerland (Breakthrough for Senior Executive) (2004) · Harvard Bussiness School by Prof Michael E. Porter Boston,USA (Microeconomics of Competitiveness) (2003) · INSEAD – Paris, (AVIRA Top Management Program) (2003)
Riwayat Pekerjaan Work History	· Komisaris PT Karya Unggulan Anak Bangsa (2025 – saat ini) · PLT Komisaris Utama dan Komisaris Independen (2023 - saat ini) · Komisaris Independen PT Bahana Artha Ventura (2018 - saat ini) · Advisor to some SME and Corporations (2009 - saat ini), · President Commissioner PT Graha Niaga Tata Utama (2008-2009), · Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2006-2009), · Komisaris di PT Bahana Artha Ventura (2008-2009), · Komisaris PT Bahana Securities (2006-2009), · Komisaris PT Bahana Artha Ventura (2001 – 2004), · Komisaris PT Sarana Jatim Ventura (1996 – 2002), · Marketing Director PT. Bahana TCW Investment Management (2001), · Komisaris PT Sarana Sumbar Ventura (1995 – 2001), · Komisaris PT Sarana Bali Ventura (1995 – 2001), · President Director PT. Bahana Artha Ventura (1996 -2001), · Komisaris PT Sarana NTB Ventura (1995 – 1997), · Direktur PT Sarana Jatim Ventura (1994 – 1996), · Direktur PT Bahana Artha Ventura (1993-1996), · General Manager PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (1993), · Member of Team Support, Bank Summa Jakarta (1993), · Deputy General Manager Funding Division, Bank Summa (1992), · Branches Supervision Manager, Bank Summa (1992), · Budget Manager, Bank Summa (1990 – 1991), · Group Field Project, Citibank NA Jakarta (1989), · Accounting and Administration Manager, Anadrill Schlumberger Jakarta (1984-1989), · Accounting Staff , PT. Gillette Indonesia (1984-1985), · Junior Auditor, Public Accountant Ishak Nukman Jakarta (1982-1984) · Commissioner of PT Karya Unggulan Anak Bangsa (2025–present) · Acting President Commissioner and Independent Commissioner (2023–present) · Independent Commissioner of PT Bahana Artha Ventura (2018–present) · Advisor to several SMEs and corporations (2009–present) · President Commissioner of PT Graha Niaga Tata Utama (2008–2009) · Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2006–2009) · Commissioner of PT Bahana Artha Ventura (2008–2009) · Commissioner of PT Bahana Securities (2006–2009) · Commissioner of PT Bahana Artha Ventura (2001–2004) · Commissioner of PT Sarana Jatim Ventura (1996–2002) · Marketing Director of PT Bahana TCW Investment Management (2001) · Commissioner of PT Sarana Sumbar Ventura (1995–2001) · Commissioner of PT Sarana Bali Ventura (1995–2001) · President Director of PT Bahana Artha Ventura (1996–2001) · Commissioner of PT Sarana NTB Ventura (1995–1997) · Director of PT Sarana Jatim Ventura (1994–1996) · Director of PT Bahana Artha Ventura (1993–1996) · General Manager of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (1993) · Member of Team Support, Bank Summa Jakarta (1993) · Deputy General Manager, Funding Division, Bank Summa (1992) · Branches Supervision Manager, Bank Summa (1992) · Budget Manager, Bank Summa (1990–1991) · Group Field Project, Citibank N.A. Jakarta (1989) · Accounting and Administration Manager, Anadrill Schlumberger Jakarta (1984–1989) · Accounting Staff, PT Gillette Indonesia (1984–1985) · Junior Auditor, Public Accountant Ishak Nukman Jakarta (1982–1984)

Hafiz Arief **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Decree of the Board of Commissioner)** Member of the Integrated Governance Committee (Decree of the Board of Commissioners)	
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	• Certified Risk Executive Leader (CREL) • Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan • Certified Risk Executive Leader (CREL) • Banking Risk Management Competency Certification
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris PT Karya Unggulan Anak Bangsa (KUAB) Commissioner of PT Karya Unggulan Anak Bangsa (KUAB)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Farid Azhar Nasution **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Independen)** Member of the Integrated Governance Committee (Independent)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 55 tahun Indonesian Citizen Age 55 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana S-1, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1992) • Postgraduate Diploma jurusan Finance, Sekolah Bisnis Prasetya Mulya • Magister Manajemen Keuangan Syariah, Institut Pertanian Bogor (2016) • Bachelor's Degree (S-1), State College of Accounting (STAN) (1992) • Postgraduate Diploma in Finance, Prasetya Mulya Business School • Master's in Sharia Financial Management, Bogor Agricultural University (2016)
Riwayat Pekerjaan Work History	• Direktur Keuangan dan Investasi IFG Life (2021-2022) • Direktur Group Treasury Lembaga Penjamin Simpanan (2017-2020) • Direktur Group Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penjamin Simpanan (2021-2021) • Director of Finance and Investment at IFG Life (2021–2022) • Group Treasury Director at the Deposit Insurance Corporation (2017–2020) • Director of the Education and Training Center at the Deposit Insurance Corporation (2021–2021)
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Sertifikasi Wakil Manajer Investasi Certified Associate Investment Manager
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan Member of the Supervisory Board of the Deposit Insurance Corporation
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Diwe Novara **Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Independen)** Member of the Integrated Governance Committee (Independent)	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 49 tahun Indonesian Citizen Age 49 years old
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	· S2 Manajemen Universitas Mercu Buana (2017) · S1 Teknis Mesin Universitas Sriwijaya (1999) · Master's Degree in Management, Mercu Buana University (2017) · Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, Sriwijaya University (1999)
Riwayat Pekerjaan Work History	· Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia · Group Head Oil and Gas PT Asuransi Jasa Indonesia · Member of the Board of Directors, PT Asuransi Jasa Indonesia · Group Head of Oil and Gas at PT Asuransi Jasa Indonesia
Sertifikasi yang dimiliki Certifications	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I Level I Risk Management Certification
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris Utama PT Asuransi Tokio Marine Indonesia President Commissioner of PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung. Has no affiliations with members of the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors, nor with major shareholders or controlling shareholders, either directly or indirectly.

Independensi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional serta independen, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Piagam masing-masing komite, kriteria independensi ditetapkan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Independence of The Risk Monitoring and Integrated Governance Committees

The Risk Monitoring Committee and the Integrated Governance Committee conduct their functions and responsibilities professionally and independently, without any intervention from any party that is inconsistent with the provisions of laws and regulations. Referring to the charters of each committee, the independence criteria are established to cover the following matters:

Aspek Independensi Independence Aspects	**Fauzi Ichsan (Ketua)** (Chairperson)	**Eko Suwandi (Wakil Ketua)** (Deputy Chair)	**Hotbonar Sinaga (Anggota)** (Member)	**Hernita Alius (Anggota)** (Member)	**Heru Kreshna Reza (Anggota)** (Member)	**Yasril Rasyid (Anggota)** (Member)	**Hari Gusrida (Anggota)** (Member)	**Aditya Mufti Ariffin (Anggota)** (Member)	**Dasuki Amir (Anggota)** (Member)	**Hario Soeprobo (Anggota)** (Member)	**Hafiz Arief (Anggota)** (Member)	**Farid Azhar Nasution (Anggota)** (Member)	**Diwe Novara (Anggota)** (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has a family with Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Has a direct and indirect business relationship with the Company.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Aspek Independensi Independence Aspects	**Fauzi Ichsan (Ketua)** (Chairperson)	**Eko Suwandi (Wakil Ketua)** (Deputy Chair)	**Hotbonar Sinaga (Anggota)** (Member)	**Hernita Alius (Anggota)** (Member)	**Heru Kreshna Reza (Anggota)** (Member)	**Yasril Rasyid (Anggota)** (Member)	**Hari Gusrida (Anggota)** (Member)	**Aditya Mufti Ariffin (Anggota)** (Member)	**Dasuki Amir (Anggota)** (Member)	**Hario Soeprobo (Anggota)** (Member)	**Hafiz Arief (Anggota)** (Member)	**Farid Azhar Nasution (Anggota)** (Member)	**Diwe Novara (Anggota)** (Member)
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, nonaudit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

Peran dan Tanggung Jawab

Ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit mencakup:

1. Melakukan evaluasi pedoman tata kelola terintegrasi;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pedoman tata kelola terintegrasi IFG dan Anggota *Holding*;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian Dewan Komisaris memberikan arahannya kepada Direksi untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi;
5. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi melalui Direksi;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi tata kelola terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS/Menteri BUMN; dan
7. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

Roles and Responsibilities

The scope of duties, authority, and responsibilities of the Integrated Governance Committee shall include, at a minimum:

1. Conducting an evaluation of the integrated governance guidelines;
2. Monitoring and evaluating compliance with the integrated governance guidelines of IFG and its Holding Company Members;
3. Evaluating the implementation of integrated governance, at a minimum through an assessment of the adequacy of internal controls and the integrated performance of compliance functions;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners may subsequently provide guidance to the Board of Directors for the refinement of the integrated governance guidelines;
5. Communicating with business units regarding functions such as internal audit, legal and compliance, finance and risk management, human resources, and other necessary operational aspects of the business, to obtain information, clarifications, and request necessary reports in an integrated manner through the Board of Directors;
6. Monitoring and evaluating the implementation of other integrated governance functions in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders or the Minister of State-Owned Enterprises; and
7. Exercising authority, performing duties, and fulfilling other responsibilities related to their functions.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat

Pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan secara berkala minimum 1 (satu) kali setiap semester;
2. Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari 50% anggota;
3. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
4. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dan didokumentasikan secara baik; dan
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat. Adapun rincian pelaksanaan rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

Meeting of The Integrated Governance Committee

Meeting Policy

Meetings of the Integrated Governance Committee shall be conducted in accordance with the following provisions, among others:

1. Meetings are held periodically, at least once every semester;
2. Meetings may be held if attended by more than 50% of the members;
3. Meetings may be held via video conference;
4. The results of the meeting are recorded in the Meeting Minutes, which are signed by all members of the Integrated Governance Committee in attendance and properly documented; and
5. Any dissenting opinions expressed during the meeting are clearly stated in the Meeting Minutes along with the reasons for such opinions.

Meeting Agenda

Throughout 2025, the Integrated Governance Committee held 4 (four) meetings. The details of these meetings are presented as follows:

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Meetings

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda
1	13 Februari 2025 February 13, 2025	Ruang AKHLAK Lantai 3 Graha Askrindo AKHLAK Room, 3rd Floor Graha Askrindo	Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2024 Self-Assessment Report on the Implementation of Integrated Governance for the Second Semester of 2024
2	20 Juni 2025 June 20, 2025	Ruang AKHLAK 1&2 Lantai 6 Graha CIMB Niaga AKHLAK Rooms 1 & 2, 6th Floor Graha CIMB Niaga	• Progres Penyelesaian Laporan Keuangan Audit 2024 di Lingkup Indonesia Financial Group; dan • Pembahasan isu-isu terkini (apabila ada). • Progress on the Completion of the 2024 Audited Financial Statements within the Indonesia Financial Group; and • Discussion of current issues (if any).
3	13 Agustus 2025 August 13, 2025	Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia Head Office of PT Asuransi Jasa Indonesia	Pembahasan Hasil Penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Indonesia Financial Group (IFG) Periode Semester I 2025 Discussion of the Results of the Self-Assessment of the Implementation of the Indonesia Financial Group (IFG) Integrated Governance for the First Half of 2025
4	28 November 2025 November 28, 2025	Ruang Meeting Serbaguna Lt.10 Gedung Jamkrindo Multipurpose Meeting Room 10th Floor, Jamkrindo Building	Pembahasan Progres Audit Laporan Keuangan Indonesia Financial Group Tahun 2025 Discussion on the Progress of the Audit of the Indonesia Financial Group's 2025 Financial Statements

Rekapitulasi Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Rapat
Recapitulation of Attendance of the Integrated Governance Committee at Meetings

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting				Jumlah Total Attendance	%
	13/2	20/6	13/8	28/4		
Fauzi Ichsan	√	√	√	√	4	100
Eko Suwandi	√	√	√	√	4	100
Hotbonar Sinaga*	x	x	x	n.a	0	0
Hernita Alius	√	x	√	√	3	75
Heru Kreshna Reza	√	√	√	√	4	100
Yasril Rasyid**	√	n/a	n/a	n/a	1	100
Hari Gusrida	x	x	√	√	2	50
Aditya Mufti Ariffin****	n/a	n/a	n/a	√	1	100
Dasuki Amsir****	n/a	n/a	n/a	√	1	100
Hario Soeprobo****	n/a	n/a	n/a	√	1	100
Hafiz Arief****	n/a	n/a	n/a	√	1	100
Farid Azhar Nasution***	√	√	x	n.a	2	66,67
Diwe Novara****	n/a	n/a	n/a	√	1	100
Rata-rata Average						**90,97**

*) Sdr. Hotbonar Sinaga dalam kondisi sakit dan berakhir masa jabatan pada 20 Oktober 2025.
**) Sdr. Yasril Rasyid meninggal dunia pada 16 Februari 2025.
**) Sdr. Farid Azhar Nasution mengundurkan diri pada 8 Oktober 2025.
****) bergabung sejak 23 Oktober 2025.
*) Mr. Hotbonar Sinaga was on sick leave and his term of office ended on October 20, 2025.
**) Mr. Yasril Rasyid passed away on February 16, 2025.
**) Mr. Farid Azhar Nasution resigned on October 8, 2025.
****) Joined on October 23, 2025.

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perusahaan secara aktif melibatkan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam program pengembangan kompetensi sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan anggotanya. Informasi mengenai pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi komite disajikan sebagai berikut:

Competency Development of The Integrated Governance Committee

The Company actively involves the Integrated Governance Committee in competency development programs as part of its efforts to enhance the members' insight and knowledge. Information regarding the implementation of training and competency enhancement for the committee is presented as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Diwe Novara	Pelatihan Training	Enhancing Risk Culture and Governance Excellence for Top Level Management	20 – 21 November 2025 November 20–21, 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
Diwe Novara	Non Pelatihan Non-Training	Risk Beyond 2025	4 – 5 Desember 2025 December 4–5, 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Pedoman Kerja Komite serta Program Kerja yang telah ditetapkan. Adapun realisasi pelaksanaan tugas komite selama tahun 2025 meliputi:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Lingkup IFG secara periodik untuk dilaporkan kepada *stakeholder* terkait;
2. Memberikan masukan terhadap penjagaan tata kelola dalam rangka penyusunan laporan keuangan audit Tahun 2025; dan
3. Penyelesaian dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan akuntabilitas Komite TKT seperti pemenuhan perwakilan komisaris anggota konglomerasi keuangan.

Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2026

Secara umum, aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan nonrutin. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan rencana kerja Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2026:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Lingkup IFG secara periodik untuk dilaporkan kepada *stakeholder* terkait;
2. Pembahasan usulan Kajian Parenting Model IFG termasuk memberikan masukan penyempurnaan; dan
3. Pelakukan pengawasan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Lingkup IFG seperti penyelesaian Audit Laporan Keuangan Tahun 2025 dan implementasi ICOFR.

Brief Report on The Implementation of The Duties and Activities of The Integrated Governance Committee In 2025

Throughout 2025, the Integrated Governance Committee has carried out its functions and responsibilities in accordance with the Committee's Work Guidelines and the established Work Program. The implementation of the committee's tasks during 2025 included:

1. Conducting periodic evaluations of the implementation of Integrated Governance within the IFG to be reported to relevant stakeholders;
2. Providing input on governance matters in connection with the preparation of the audited financial statements for 2025; and
3. Finalizing documents related to the fulfillment of the Integrated Governance Committee's accountability, such as ensuring the representation of commissioners from financial conglomerate members.

Work Plan of The Integrated Governance Committee In 2026

In general, the activities of the Integrated Governance Committee are categorized into two types: routine and non-routine activities. In this regard, the following presents the work plan of the Risk Monitoring Committee and the Integrated Governance Committee for 2026:

1. Periodically evaluate the implementation of Integrated Governance within the IFG to report to relevant stakeholders;
2. Discuss proposals for the IFG Parenting Model Study, including providing input for improvements; and
3. Supervise the implementation of Integrated Governance within the IFG, such as the completion of the 2025 Financial Statement Audit and the implementation of ICOFR.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam menjalankan perannya, Direksi didukung oleh berbagai organ pendukung yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan bisnis, perencanaan strategis, serta pengawasan terhadap aspek operasional Perusahaan. Pembentukan organ-organ tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, serta Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi membentuk sejumlah organ pendukung, termasuk komite, Sekretaris Perusahaan, dan SKAI, guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi bisnis, perencanaan, serta pengendalian.

In conducting its role, the Board of Directors is supported by various supporting organs that function to facilitate the implementation of business activities, strategic planning, and oversight of the Company's operational aspects. The establishment of these organs is based on the Company's Articles of Association, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprise Organs and Human Resources, and the Board of Commissioners' Decree of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 1 of 2023 concerning Guidelines for Good Corporate Governance. Based on these provisions, the Board of Directors of established a number of supporting organs, including committees, the Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit (SKAI), to ensure the effective execution of business functions, planning, and control.

KOMITE TALENTA

Komite Talenta merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi IFG dengan peran untuk melakukan evaluasi, penilaian, penetapan, serta memberikan arahan strategis terkait pengelolaan talenta di lingkungan IFG. Proses pengelompokan talenta dilakukan melalui penetapan kategori yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja dan penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Departemen Manajemen Talenta pada Divisi Sumber Daya Manusia IFG. Adapun cakupan talenta IFG meliputi seluruh karyawan tetap di lingkungan IFG.

TALENT COMMITTEE

The Talent Committee is a committee established by the IFG Board of Directors with the role of conducting evaluations, assessments, and appointments, as well as providing strategic direction regarding talent management within IFG. The talent grouping process is conducted through the establishment of categories based on the results of performance measurements and competency assessments conducted by the Talent Management Department within IFG's Human Resources Division. The scope of IFG's talent includes all permanent employees within the IFG organization.

Struktur Keanggotaan Komite Talenta

IFG menetapkan Direktur Utama sebagai Ketua Komite Talenta, dengan anggota tetap yang terdiri atas Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko. Sementara itu, Direktur lainnya ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Komite Talenta. Susunan keanggotaan Komite Talenta tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 059/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021.

Structure of The Talent Committee Membership

IFG appoints the President Director as Chairperson of the Talent Committee, with permanent members consisting of the Directors in charge of Human Resources and Risk Management. Meanwhile, other Directors are appointed as non-permanent members of the Talent Committee. The composition of the Talent Committee is established pursuant to Board of Directors' Decree No. 059/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Talenta

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Talenta mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan arahan strategis terkait manajemen talenta di IFG dan Anggota *Holding*;
2. Menetapkan kebijakan dan program terkait manajemen talenta di IFG yang diusulkan oleh Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia;
3. Menetapkan *talent pool* untuk satu level di bawah Direksi (BOD-1) di IFG, untuk diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi;

Duties and Responsibilities of The Talent Committee

The scope of the Talent Committee's duties and responsibilities includes the following:

1. Providing strategic direction regarding talent management at IFG and its Holding Company subsidiaries;
2. Establishing policies and programs related to talent management at IFG as proposed by the Director in charge of Human Resources;
3. Establishing a talent pool for the level immediately below the Board of Directors (BOD-1) at IFG, to be proposed to the Nomination and Remuneration Committee;

4. Melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala atas talenta satu level di bawah Direksi (BOD-1) dan dua level di bawah Direksi (BOD-2) di IFG, serta satu level di bawah Direksi (BOD-1) Anggota *Holding*;
5. Menetapkan strategi mobilitas talenta untuk satu level di bawah Direksi (BOD-1) dan dua level di bawah Direksi (BOD-2) IFG, serta satu level di bawah Direksi (BOD-1) Anggota *Holding*;
6. Menetapkan nominasi atas Direksi dan Dewan Komisaris Anggota *Holding*; dan
7. Memberikan persetujuan atas hasil konsultasi nominasi Direksi dan Dewan Komisaris di Anggota *Holding*.

Rapat Komite Talenta

Rapat Komite Talenta dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Anggota Tetap Komite. Sepanjang tahun 2025, Komite Talenta telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat. Adapun rincian pelaksanaan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

4. Conducting periodic evaluations and assessments of talent one level below the Board of Directors (BOD-1) and two levels below the Board of Directors (BOD-2) at IFG, as well as one level below the Board of Directors (, BOD-1) of Holding Company Members;
5. Establish talent mobility strategies for personnel one level below the Board of Directors (BOD-1) and two levels below the Board of Directors (BOD-2) at IFG, as well as one level below the Board of Directors (BOD-1) of the Holding Company;
6. Establishing nominations for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Holding Company; and
7. Approve the results of consultations regarding nominations for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Holding Company's subsidiaries.

Talent Committee Meetings

Talent Committee meetings may be held if attended by at least 50% of the total number of Standing Committee Members. Throughout 2025, the Talent Committee held 5 (five) meetings. The details of these meetings are as follows:

Rapat Komite Talenta
Talent Committee Meetings

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda
1	28 Mei 2025 May 28, 2025	Graha CIMB Niaga, Lantai 27 Graha CIMB Niaga, 27th Floor	Persetujuan Pengisian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan Perusahaan dan Cucu Perusahaan Approval of Appointments to the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Sub-subsidiaries
2	17 Juli 2025 July 17, 2025	Graha CIMB Niaga, Lantai 27 Graha CIMB Niaga, 27th Floor	Persetujuan Pengisian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan Approval of Appointments to the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Sub-subsidiaries
3	15 Oktober 2025 October 15, 2025	Graha CIMB Niaga, Lantai 27 Graha CIMB Niaga, 27th Floor	Pengisian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan IFG Appointments to the Board of Directors and Board of Commissioners of IFG Subsidiaries
4	16 Oktober 2025 October 16, 2025	Graha CIMB Niaga, Lantai 27 Graha CIMB Niaga, 27th Floor	Persetujuan Pengisian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Approval of Appointments to the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries
5	07 November 2025 November 07, 2025	Graha CIMB Niaga, Lantai 27 (hybrid) Graha CIMB Niaga, 27th Floor (hybrid)	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IFG Group Changes to the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the IFG Group

Pelaksanaan Tugas Komite Talenta 2025

Komite Talenta telah merealisasikan program kerja serta menyusun laporan pelaksanaan dalam bentuk Laporan Komite Talenta Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 061/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021 tentang Komite Talenta. Adapun ruang lingkup pelaksanaan tugas tersebut mencakup:

1. Menetapkan *talent pool* untuk level BOD-1 di IFG yang selanjutnya keputusan Komite Talenta tersebut ditindaklanjuti untuk diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi IFG;

Implementation of Talent Committee Duties In 2025

The Talent Committee has implemented its work program and prepared an implementation report in the form of the 2025 Talent Committee Report, in accordance with the duties and responsibilities stipulated in the Board of Directors' Decree of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 061/SK- DIR/CORP/BPUI/XII/2021 regarding the Talent Committee. The scope of these duties includes:

1. Determine the talent pool for BOD-1 level at IFG, with the Talent Committee's decision subsequently followed up for submission to the IFG Nomination and Remuneration Committee;

2. Melaksanakan evaluasi dan penilaian secara berkala atas talenta BOD-1 dan BOD-2 di IFG, serta level BOD-1 di Anggota *Holding*;
3. Melaksanakan penetapan strategi mobilitas talenta untuk level BOD-1 dan BOD-2 di IFG, serta BOD-1 di Anggota *Holding*;
4. Penetapan nominasi atas calon Direksi dan Dewan Komisaris di Anggota Holding, yang selanjutnya keputusan Komite Talenta tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris IFG; dan
5. Memberikan persetujuan atas hasil konsultasi nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris di Anggota *Holding* IFG.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi dengan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan teknologi informasi di lingkungan IFG. Komite ini berperan dalam mendukung Direksi dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, serta pengelolaan teknologi informasi Perusahaan.

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, struktur organisasi Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri atas:

1. Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi merangkap sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi;
2. Wakil Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi merangkap sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi;
3. Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi merangkap sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi; dan
4. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.

Komposisi keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi mencakup:

1. Anggota Tetap dengan Hak Suara
   a. Direktur yang Membidangi Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko (sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi).
   b. SEVP yang membidangi fungsi Teknologi Informasi (sebagai Wakil Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi).
   c. Direktur yang Membidangi Fungsi Keuangan.
   d. Direktur yang Membidangi Fungsi Teknik.
   e. Direktur yang Membidangi Fungsi Bisnis.

2. Conduct periodic evaluations and assessments of BOD-1 and BOD-2 talents at IFG, as well as BOD-1 talents at Holding Members;
3. Determine talent mobility strategies for BOD-1 and BOD-2 levels at IFG, as well as BOD-1 level at Holding Members;
4. Determine the nominations of candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of Holding Members, with the Talent Committee's decision subsequently followed up by requesting written comments from the IFG Board of Commissioners; and
5. Approve the results of consultations on the nominations of candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of IFG Holding Members.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee is a committee established by the Board of Directors with the responsibility of providing recommendations to the Board regarding the management of information technology within IFG. This committee plays a role in supporting the Board in strategic decision-making processes related to the planning, development, and management of the Company's information technology.

Membership Structure of The Information Technology Steering Committee

Pursuant to Board of Directors Decree No. 37 of 2024 regarding the Charter of the Information Technology Steering Committee, the organizational structure of the Information Technology Steering Committee consists of:

1. The Chairperson of the Information Technology Steering Committee also serves as a member of the Information Technology Steering Committee;
2. The Vice Chairperson of the Information Technology Steering Committee also serves as a member of the Information Technology Steering Committee;
3. The Secretary of the Information Technology Steering Committee also serves as a member of the Information Technology Steering Committee; and
4. Members of the Information Technology Steering Committee, consisting of Permanent Members and Non-Permanent Members.

The membership composition of the Information Technology Steering Committee includes:

1. Permanent Members with Voting Rights
   a. The Director in charge of Information Technology and Risk Management (as Chairperson of the Information Technology Steering Committee).
   b. The SEVP in charge of the Information Technology function (as Vice Chairperson of the Information Technology Steering Committee).
   c. The Director in Charge of Finance.
   d. The Director in Charge of Technical Affairs.
   e. Director in Charge of Business.

2. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara
   a. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Teknologi Informasi (sebagai Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi).
   b. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
3. Anggota Tidak Tetap
   a. Direksi/SEVP/Kepala Divisi dan/atau Kepala Departemen dari masing-masing fungsi di IFG yang bukan Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan keselarasan rencana strategis teknologi informasi dengan RJPP;
2. Memastikan implementasi rencana strategis teknologi informasi yang dituangkan dalam RKAP;
3. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan teknologi informasi;
4. Melakukan perencanaan pengembangan teknologi informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha IFG;
5. Perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi;
6. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan proyek informasi yang disetujui;
7. Memastikan kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha IFG;
8. Memastikan efektivitas mitigasi risiko atas investasi IFG pada sektor teknologi informasi agar investasi IFG pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis IFG;
9. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
10. Mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
11. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi yang dimiliki IFG.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, komite menyelenggarakan rapat secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) Anggota Tetap yang mengikuti seluruh rangkaian agenda rapat. Setiap pelaksanaan rapat didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota komite, serta memuat keputusan yang telah disepakati bersama.

2. Permanent Members Without Voting Rights
   a. Division Head supervising the Information Technology function (as Secretary of the Information Technology Steering Committee).
   b. Division Head in charge of Risk Management.
3. Non-Permanent Members
   a. Directors/SEVPs/Division Heads and/or Department Heads from each function within IFG who are not Permanent Members of the Information Technology Steering Committee.

Duties and Responsibilities of The Information Technology Steering Committee

The scope of duties and responsibilities of the Information Technology Steering Committee includes the following:

1. Ensuring the alignment of the information technology strategic plan with the RJPP;
2. Ensuring the implementation of the information technology strategic plan as outlined in the RKAP;
3. Evaluating, directing, and monitoring the implementation of information technology operations;
4. Planning information technology development in line with IFG's business activities;
5. Formulating information technology policies and procedures;
6. Ensuring that the execution of information technology projects aligns with approved information technology projects;
7. Ensuring that information technology aligns with the needs of the management information system and IFG's business operations;
8. Ensuring the effectiveness of risk mitigation for IFG's investments in the information technology sector so that these investments contribute to the achievement of IFG's business objectives;
9. Monitoring information technology performance and efforts to improve information technology performance;
10. Resolving various information technology-related issues that cannot be effectively, efficiently, and timely resolved by user units and information technology providers; and
11. Ensuring the adequacy and allocation of IFG's information technology resources.

Information Technology Steering Committee Meeting

Pursuant to Board of Directors Decree No. 37 of 2024 regarding the Charter of the Information Technology Steering Committee, the committee holds regular meetings in accordance with the established provisions, namely at least 2 (two) times per year.

A meeting of the Information Technology Steering Committee is deemed to have a quorum if attended by more than 50% (fifty percent) of the Permanent Members who participate in the entire meeting agenda. Each meeting is documented in the form of Meeting Minutes signed by the Chairperson and all committee members, and containing the decisions that have been mutually agreed upon.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat. Adapun agenda rapat, risalah keputusan, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat-rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

Throughout 2025, the Information Technology Steering Committee held 2 (two) meetings. The meeting agendas, minutes of decisions, attendance lists, and a summary/ recapitulation of committee member attendance at these meetings are presented as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
Minutes and Attendance Records of the Information Technology Steering Committee Meetings

Tanggal Date	**Tempat** Location	**Agenda**	**Peserta** Attendees
15 Oktober 2025 October 15, 2025	Ruang AKHLAK lantai 27 AKHLAK Room, 27th Floor	• Tindak lanjut rekomendasi Komite TI Tahun 2024 • Pencapaian Program Kerja TI Tahun 2025 • Rekapitulasi Kinerja Bidang TI Seluruh Anak Perusahaan 2025 • IDC Shared Services • Status Implementasi ERP Fase III • Usulan Komite TI • Follow-up on the 2024 IT Committee Recommendations • Achievements of the 2025 IT Work Program • Summary of IT Performance Across All Subsidiaries for 2025 • IDC Shared Services • Status of ERP Phase III Implementation • IT Committee Proposals	• Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) • Heru Handayanto (Direktur Keuangan) • Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) • Joseph Georgino Godong (SEVP Teknologi Informasi) • Sariniatun (Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan) • A. Syafrie Zen (Kepala Divisi Teknologi Infomasi) • Bagus Satria A (Kepala Departemen Perencanaan dan Tata Kelola) • Heribertus Bagus (Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem) • Dwi Baskoro (Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola) • Arief Prabawa Putra (Executive Advisor Wakil Direktur Utama) • Jolly Tridoli Tobing (Executive Advisor Direktur Keuangan) • Haru Koesmahargyo (Vice President Director) • Heru Handayanto (Director of Finance) • Rianto Ahmadi (Technical Director) • Joseph Georgino Godong (Senior Executive Vice President of Information Technology) • Sariniatun (Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division) • A. Syafrie Zen (Head of the Information Technology Division) • Bagus Satria A (Head of the Planning and Governance Department) • Heribertus Bagus (Senior Officer for System Development Strategy) • Dwi Baskoro (Senior Officer for Planning and Governance) • Arief Prabawa Putra (Executive Advisor to the Vice President Director • Jolly Tridoli Tobing (Executive Advisor to the Director of Finance)
17 Desember 2025	Ruang AKHLAK lantai 27	• Tindak lanjut Temuan Audit OJK • Update Program Kerja Tahun 2025 • Usulan Komite Pengarah TI	• Haru Koesmahargyo (Wakil Direktur Utama) • Heru Handayanto (Direktur Keuangan) • Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) • Joseph Georgino Godong (SEVP Teknologi Informasi) • Sariniatun (Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan) • A. Syafrie Zen (Kepala Divisi Teknologi Infomasi) • Heribertus Bagus (Kepala Departemen Perencanaan dan Tata Kelola) • Deny D. Sabri (Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur) • Ari Faizal A (Kepala Departemen Strategi Pengembangan Sistem) • Lelya Novita K (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Dwi Baskoro (Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola) • Arief Prabawa Putra (Executive Advisor Wakil Direktur Utama) • Helen Rafika Napitupulu (Executive Advisor Direktur Bisnis)

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Minutes and Attendance Records of the Information Technology Steering Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda	Peserta Attendees
December 17, 2025	AKHLAK Room, 27th Floor	• Follow-up on OJK Audit Findings • Update on the 2025 Work Program • Proposals from the IT Steering Committee	• Haru Koesmahargyo (Vice President Director) • Heru Handayanto (Director of Finance) • Rianto Ahmadi (Technical Director) • Joseph Georgino Godong (Senior Executive Vice President of Information Technology) • Sariniatun (Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division) • A. Syafrie Zen (Head of the Information Technology Division) • Heribertus Bagus (Head of the Planning and Governance Department) • Deny D. Sabri (Head of the Operations & Infrastructure Department) • Ari Faizal A (Head of the System Development Strategy Department) • Lelya Novita K (Head of the Risk Management Department) • Dwi Baskoro (Senior Officer, Planning and Governance) • Arief Prabawa Putra (Executive Advisor to the Vice President Director) • Helen Rafika Napitupulu (Executive Advisor to the Business Director)

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi 2025

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah merealisasikan program kerja yang ditetapkan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas fungsi dan tanggung jawab yang diemban, sebagai berikut:

1. **Strategi dan Program TI**
   Melakukan pemantauan atas implementasi strategi dan program TI yang selaras dengan RSTI 2025–2029, termasuk implementasi ERP, digitalisasi proses bisnis, konsolidasi jaringan, *private cloud*, dan One by IFG.
2. **Tata Kelola dan Evaluasi TI**
   Melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan TI, tingkat kematangan TI, serta tindak lanjut hasil audit dan asesmen TI guna memastikan efektivitas tata kelola dan keberlanjutan layanan TI.
3. **Keamanan Siber**
   Memantau penguatan keamanan siber melalui asesmen berbasis NIST *Cybersecurity Framework*, asesmen COBIT 2019, serta tindak lanjut audit ISO 27001:2022 di lingkungan IFG Group.
4. **Transformasi Digital**
   Memantau pelaksanaan transformasi digital dan integrasi teknologi, termasuk peningkatan STP (*Straight Through Processing)* yang mencapai 91,67% serta konsolidasi *B2C front-end platform* melalui One by IFG yang mencapai 100% pada akhir 2025.
5. **Kapabilitas Digital**
   Memantau pengembangan kapabilitas digital SDM melalui program *Digital Talent* BUMN yang mencapai 1.555 peserta atau 135,08% dari target, serta penyusunan Kurikulum *Digital Capability* dan *gap closing plan* INDI 4.0

Implementation of The Information Technology Steering Committee Duties in 2025

The Information Technology Steering Committee has implemented the established work program and prepared a report on the performance of its duties as a form of accountability for the functions and responsibilities it has undertaken, as follows:

1. **IT Strategy and Programs**
   Monitoring the implementation of IT strategies and programs aligned with the 2025–2029 RSTI, including ERP implementation, business process digitalization, network consolidation, private cloud, and One by IFG.
2. **IT Governance and Evaluation**
   Evaluating the effectiveness of IT implementation, IT maturity levels, and follow-up actions on IT audit and assessment findings to ensure effective governance and the continuity of IT services.
3. **Cybersecurity**
   Monitoring cybersecurity enhancements through assessments based on the NIST Cybersecurity Framework, COBIT 2019 assessments, and follow-up actions on the ISO 27001:2022 audit across the IFG Group.
4. **Digital Transformation**
   Monitoring the implementation of digital transformation and technology integration, including improvements in Straight Through Processing (STP), which reached 91.67%, as well as the consolidation of the B2C front-end platform through One by IFG, which reached 100% by the end of 2025.
5. **Digital Capabilities**
   Monitoring the development of employees' digital capabilities through the SOE Digital Talent program, which reached 1,555 participants, or 135.08% of the target, as well as the development of the Digital Capability Curriculum and the INDI 4.0 gap-closing plan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi dengan tujuan memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan. Pembentukan komite ini dimaksudkan untuk mendukung Direksi dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan risiko di lingkungan IFG.

Dalam rangka memperkuat fungsi manajemen risiko, IFG telah melakukan berbagai inisiatif, salah satunya melalui penyempurnaan peran Komite Manajemen Risiko. Upaya tersebut mencakup perluasan struktur keanggotaan serta peningkatan kewenangan komite. Penyempurnaan ini juga diselaraskan dengan rencana penerbitan POJK terkait pengawasan IFG, mengingat peran IFG sebagai *Holding* sekaligus entitas utama dalam konglomerasi keuangan yang dituntut untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola secara terintegrasi.

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

1. Komite Manajemen Risiko Perseroan
   Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari Direksi Perusahaan, di antaranya Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko sebagai Ketua Komite, Direktur yang membawahi fungsi teknik sebagai Wakil Ketua Komite dan Direktur yang membawahi fungsi bisnis. Selain itu SEVP yang membawahi fungsi manajemen bisnis, dan Kepala Divisi yang membawahi fungsi hukum. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko adalah Kepala Divisi yang membawahi fungsi manajemen risiko. Terkait keanggotaan komite tersebut tercantum Surat Keputusan Direksi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Piagam dan Kerangka Acuan Kerja Komite Manajemen Risiko tanggal 29 Juni 2022.

2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
   Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari Direktur IFG yang membawahi fungsi manajemen risiko sebagai Ketua Komite, Direktur Bisnis IFG, Direktur Teknik IFG, Direktur Keuangan IFG dan Direktur Anggota *Holding* yang membidangi Manajemen Risiko sebagai anggota tetap. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko adalah Kepala Divisi IFG yang membawahi fungsi manajemen risiko. Terkait keanggotaan komite tersebut tercantum Surat Keputusan Direksi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Piagam dan Kerangka Acuan Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 14 Maret 2023.

IFG secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perseroan dan Terintegrasi, guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan yang berlaku serta struktur organisasi Perusahaan terkini.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is a committee established by the Board of Directors to ensure the implementation of effective risk management as part of corporate governance. The committee was formed to support the Board of Directors in strategic decision-making processes related to risk management within IFG.

To strengthen risk management functions, IFG has undertaken various initiatives, one of which involves enhancing the role of the Risk Management Committee. These efforts include expanding the committee's membership structure and increasing its authority. These enhancements are also aligned with plans to issue a POJK regarding the supervision of IFG, given IFG's role as both a holding company and the primary entity within a financial conglomerate that is required to implement integrated risk management and corporate governance.

Membership Structure of The Risk Management Committee

1. The Company's Risk Management Committee
   The Risk Management Committee consists of members of the Company's Board of Directors, including the Director supervising risk management functions as Committee Chairperson, the Director supervising technical functions as Vice Chairperson, and the Director supervising business functions. Additionally, it includes the Senior Executive Vice President (SEVP) supervising business management functions and the Division Head supervising legal functions. In this regard, the Head of the Division supervising the risk management function serves as the Secretary of the Risk Management Committee. The committee's membership is outlined in Board of Directors Decree No. 32 of 2022 regarding the Charter and Terms of Reference of the Risk Management Committee, dated June 29, 2022.
2. Integrated Risk Management Committee
   The membership of the Integrated Risk Management Committee consists of the IFG Director supervising the risk management function as Committee Chairperson, the IFG Business Director, the IFG Technical Director, the IFG Finance Director, and the Holding Company Director in charge of Risk Management as permanent members. In the case of the Integrated Risk Management Committee, the Head of the IFG Division supervising the risk management function serves as the Secretary of the Risk Management Committee. The committee's membership is outlined in Board of Directors Decree No. 23 of 2023 regarding the Charter and Terms of Reference of the Integrated Risk Management Committee, dated March 14, 2023.

IFG continuously evaluates the composition of the Company's Risk Management Committee and the Integrated Risk Management Committee to ensure their alignment with applicable regulatory developments and the Company's current organizational structure.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Direksi dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan IFG. Komite ini bersifat nonstruktural, dengan keanggotaan yang berasal dari unsur internal Perusahaan, serta dibentuk sebagai instrumen pengawasan aktif guna memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko.

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat. Adapun agenda dan Risalah Rapat, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran anggota dalam rapat-rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

Risk Management Committee Meetings

The Risk Management Committee holds meetings to support the Board of Directors in carrying out its duties and authorities regarding the implementation of risk management within IFG. This committee is a non-structural body, with members drawn from within the Company, and was established as an active supervisory mechanism to ensure the effective implementation of risk management.

Throughout 2025, the Risk Management Committee held 4 (four) meetings. The agendas and meeting minutes, attendance lists, and Recapitulation of Attendance at these meetings are presented as follows:

Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Minutes and Attendance Records of Risk Management Committee Meetings

Tanggal Date	**Tempat** Location	**Agenda**	**Peserta** Attendees
23 Juli 2025 July 23, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Akhlak Lantai 27 Indonesia Financial Group Office Akhlak Room, 27th Floor	• Pembahasan Hasil *Stress Testing* Tahun 2025 • Pembahasan Hasil *Internal Control Testing* Tahun 2025 • Discussion of the 2025 Stress Testing Results • Discussion of the 2025 Internal Control Testing Results	8 Orang terdiri dari Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan , dan Kebijakan, Kepala Departemen Manajemen Risiko, dan 3 Staf Departemen Manajemen Risiko 8 people consisting of the Vice President Director, the Director of Finance, the Head of the Legal Division, the Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division, the Head of the Risk Management Department, and 3 staff members from the Risk Management Department
11 Agustus 2025 August 11, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Wakil Direktur Utama dan Online (*Zoom Meeting*) Indonesia Financial Group Office Vice President Director's Office and Online (Zoom Meeting)	• Laporan Profil Risiko Terintegrasi periode Semester I 2025 (PSAK 104) • Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Semester I 2025 • Integrated Risk Profile Report for the First Semester of 2025 (PSAK 104) • Integrated Minimum Capital Adequacy Report for the First Semester of 2025	48 Orang terdiri dari Wakil Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Keuangan, 10 Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko pada Anak Perusahaan (Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, Jasa Raharja, IFG Life, BTIM, BS, BAV, BKI, GNTU), Kepala Divisi Menajememen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan, dan 34 Undangan lainnya. 48 people, consisting of the Vice President Director, the Technical Director, the Director of Finance, 10 Directors in charge of Risk Management functions at Subsidiaries (Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, Jasa Raharja, IFG Life, BTIM, BS, BAV, BKI, GNTU), the Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division, and 34 other invitees.
13 Oktober 2025 October 13, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Wakil Direktur Utama dan Online (*Zoom Meeting*) Indonesia Financial Group Office Vice President Director's Office and Online (Zoom Meeting)	Draft Kebijakan Strategi Risiko Tahun 2026 Draft 2026 Risk Strategy Policy	44 Orang terdiri dari Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan, 9 Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko pada Anak Perusahaan (Askrindo, Jasindo, Jasa Raharja, IFG Life, BTIM, BS, BAV, BKI, GNTU), Kepala Divisi Menajememen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan, dan 32 Undangan lainnya 44 people, consisting of the Vice President, the Director of Finance, 9 Directors in charge of Risk Management functions at subsidiaries (Askrindo, Jasindo, Jasa Raharja, IFG Life, BTIM, BS, BAV, BKI, GNTU), the Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division, and 32 other invitees.
21 Oktober 2025 October 21, 2025	Kantor Indonesia Financial Group Ruang Wakil Direktur Utama dan Online (*Zoom Meeting*) Indonesia Financial Group Office Vice President Director's Office and Online (Zoom Meeting)	Update Template Profil Risiko (Tindak Lanjut Sosialisasi DAM) Update to the Risk Profile Template (Follow-up to the DAM Awareness Campaign)	40 Orang terdiri dari Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan, 8 Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko pada Anak Perusahaan (Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, Jasa Raharja, BTIM, BS, BAV, GNTU), Kepala Divisi Menajememen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan, dan 29 Undangan lainnya. 40 people, consisting of the Vice President Director, the Director of Finance, 8 Directors in charge of Risk Management at Subsidiaries (Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, Jasa Raharja, BTIM, BS, BAV, GNTU), the Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division, and 29 other invitees.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko 2025

Komite Manajemen Risiko Perseroan dan Terintegrasi telah merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawabnya, antara lain mencakup:

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko (KMR) Perseroan
   a. Memberikan rekomendasi atas metodologi dan hasil *stress testing*;
   b. Memberikan rekomendasi atas metodologi dan hasil *Internal Control Testing* (ICT) yang dijalankan oleh Sub Unit Kerja Manajemen Risiko; dan
   c. Hal-hal lain terkait penerapan Manajemen Risiko yang memerlukan reviu dan rekomendasi dari KMRT.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko (KMR) Terintegrasi
   a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
   b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan; dan
   c. Hal-hal lain terkait penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dipandang perlu dan diputuskan oleh KMRT.

Implementation of The Risk Management Committee Duties in 2025

The Company's Integrated Risk Management Committee has implemented the established work program and prepared and submitted an implementation report as a form of accountability for its duties and responsibilities, including, among others:

1. Authorities and Responsibilities of the Company's Risk Management Committee (KMR)
   a. Providing recommendations on the methodology and results of stress testing;
   b. Providing recommendations on the methodology and results of Internal Control Testing (ICT) conducted by the Risk Management Sub-Unit; and
   c. Other matters related to the implementation of Risk Management that require review and recommendations from the Risk Management Committee.
2. Authorities and Responsibilities of the Integrated Risk Management Committee (KMR)
   a. Formulating the Integrated Risk Management Policy;
   b. Revising or enhancing the Integrated Risk Management Policy based on the results of implementation evaluations; and
   c. Other matters related to the implementation of Integrated Risk Management as deemed necessary and resolved by the Integrated Risk Management Committee.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Direksi membentuk Sekretaris Perusahaan sebagai unit kerja yang berfungsi menjalankan peran sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*). Unit ini diberi mandat oleh Direksi untuk mengelola kegiatan kesekretariatan serta mengoordinasikan komunikasi Perusahaan, baik internal maupun eksternal, dalam rangka mendukung kelancaran hubungan IFG dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, serta memastikan penyampaian komunikasi perusahaan berlangsung secara efektif dan transparan. Sekretaris Perusahaan juga mengelola hubungan kelembagaan dan investor dengan senantiasa berpedoman pada standar etika, prinsip tata kelola perusahaan, serta nilai-nilai yang dijunjung oleh Perusahaan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal IFG dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab serta melapor langsung kepada Direktur Utama.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Oktarina Dwidya Sistha yang diangkat sejak tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 295/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2022.

CORPORATE SECRETARY

The Board of Directors established the Corporate Secretary as a functional unit serving as a liaison officer. This unit is mandated by the Board to manage secretarial activities and coordinate the Company's communications—both internal and external—to support smooth relations between IFG and its stakeholders.

In addition, the Corporate Secretary is responsible for formulating policies, developing plans, and ensuring that corporate communications are conducted effectively and transparently. The Corporate Secretary also manages institutional and investor relations while consistently adhering to ethical standards, corporate governance principles, and the values upheld by the Company.

Parties Appointing and Dismissing The Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director through IFG's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners. In carrying out their duties and responsibilities, the Corporate Secretary is accountable to and reports directly to the President Director.

Corporate Secretary

The Head of the Corporate Secretary Division is Oktarina Dwidya Sistha, who was appointed on October 24, 2022, pursuant to Board of Directors' Decree No. 295/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2022.

Oktarina Dwidya Sistha **Sekretaris Perusahaan** **Menjabat sejak 24 Oktober 2022** Corporate Secretary Serving since October 24, 2022	
Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 44 tahun Indonesian citizen Age 44 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	· Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2019) · Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (2000) · Master's Degree in Law from the University of Indonesia (2019) · Bachelor's Degree in Law from the University of Indonesia (2000)
Pengalaman Kerja Work Experience	· Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Indonesia Financial Group (Oktober, 2022 – sekarang) · Vice President Complience, Indonesia Investment Authority (INA) (Juni, 2021 – Oktober, 2022) · Indonesia Financial Group (Desember, 2020 – Mei, 2021) · Lembaga Penjamin Simpanan (2006 – 2020) · Head of the Corporate Secretary Division, Indonesia Financial Group (October 2022 – present) · Vice President of Compliance, Indonesia Investment Authority (INA) (June 2021 – October 2022) · Indonesia Financial Group (December 2020 – May 2021) · Deposit Insurance Corporation (2006 – 2020)

Sehubungan dengan penugasan sebagai *talent secondment* di Kementerian BUMN, Oktarina Dwidya Sistha menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sampai dengan tanggal 16 Desember 2025. Selanjutnya, Perseroan telah menetapkan pejabat pengganti Sekretaris Perusahaan Denny Soelistyo Adji berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 311/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2024 tentang Pengangkatan Selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan di Direktorat Utama tanggal 16 Desember 2024.

In connection with her assignment on a talent secondment at the Ministry of State-Owned Enterprises, Oktarina Dwidya Sistha served as Corporate Secretary until December 16, 2025. Subsequently, the Company appointed Denny Soelistyo Adji as the acting Corporate Secretary pursuant to Decree of the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 311/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2024 concerning the Appointment as Acting Head of the Corporate Secretary Division under the President Directorate, dated December 16, 2024.

Denny Soelistyo Adji **Executive Advisor Direktur Utama merangkap Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan** **Menjabat sejak tanggal 16 Desember 2024** Executive Advisor to the President Director concurrently serving as Head of the Corporate Secretary Division Serving since December 16, 2024	
Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 64 tahun Indonesian citizen Age 64 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta
Pendidikan Education	· Sarjana S-2, Business Administration, Saint Louis University, Missouri, USA (1994-1996) · Sarjana S-1, Antropologi Sosial dan Budaya, Universitas Indonesia (1981-1986) · Master's Degree in Business Administration, Saint Louis University, Missouri, USA (1994–1996) · Bachelor's Degree in Social and Cultural Anthropology, University of Indonesia (1981–1986)
Pengalaman Kerja Work Experience	· Staff – Inspektur, BRI (Januari 1987-Desember 2017 · Sekretaris Perusahaan, Askrindo (Januari 2018-Juli 2023) · Staff–Inspector, BRI (January 1987–December 2017) · Corporate Secretary, Askrindo (January 2018–July 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 311/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2024 tentang Pengangkatan Selaku Pelaksana Tugas Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan di Direktorat Utama tanggal 16 Desember 2024 Decree of the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number 311/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2024 concerning the Appointment as Acting Head of the Corporate Secretary Division under the President Directorate, dated December 16, 2024.

Tugas Dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya kepatuhan administrasi pada setiap proses pengambilan keputusan perusahaan, menjalankan fungsi komunikasi korporat, serta bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Dengan peran tersebut, Sekretaris Perusahaan menjadi salah satu fungsi strategis dalam mendukung penerapan kebijakan tata kelola perusahaan.

Sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap prinsip transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, Perusahaan menunjuk Sekretaris Perusahaan yang bertugas mendukung Dewan Komisaris dan Direksi, serta memastikan pelaksanaan prosedur kerja dan koordinasi di antara kedua organ tersebut berjalan dengan baik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan sebagai penghubung Perusahaan dengan regulator dan berbagai lembaga terkait, menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Direksi, mengoordinasikan penyelenggaraan RUPS, serta mengelola administrasi dokumen Perusahaan, termasuk penyusunan dan pengarsipan Risalah Rapat.

Tugas Sekretaris Perusahaan

1. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta evaluasi atas kegiatan terkait komunikasi perusahaan, penerapan tata kelola korporasi, protokoler, dan tata usaha Direksi serta hubungan lembaga;
2. Melakukan penyelarasan, reviu, pemantauan dan evaluasi berkala atas program kerja dan kebijakan anak perusahaan pada bidang sekretaris perusahaan;
3. Memastikan penyusunan rencana kerja anak perusahaan baik RKAP maupun RJPP pada bidang sekretaris perusahaan agar selaras dengan arahan strategis perusahaan;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP anak perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang sekretaris perusahaan;
5. Melakukan pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP dan RKAP anak perusahaan berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang sekretaris perusahaan;
6. Mengoordinasikan divisi-divisi terkait di dalam perusahaan mengenai kegiatan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa anak perusahaan, baik sirkuler maupun fisik;
7. Memastikan ketaatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi perusahaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, GCG Terintegrasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

Duties and Responsibilities Of The Corporate Secretary

The Corporate Secretary plays a key role in ensuring administrative compliance in all corporate decision-making processes, managing corporate communications functions, and acting as a liaison officer between the Company and its stakeholders. Through these roles, the Corporate Secretary serves as a strategic function in supporting the implementation of corporate governance policies.

As a manifestation of the Company's commitment to the principle of transparency toward all stakeholders, the Company appoints a Corporate Secretary tasked with supporting the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as ensuring that work procedures and coordination between these two organs run smoothly. In addition, the Corporate Secretary also serves as the Company's liaison with regulators and various relevant agencies, prepares accountability reports for the Board of Directors, coordinates the organization of General Shareholders' Meetings, and manages the Company's document administration, including the preparation and archiving of meeting minutes.

Duties of the Corporate Secretary at

1. Responsible for the planning, implementation, supervision, reporting, and evaluation of activities related to corporate communications, the implementation of corporate governance, protocol, and the administration of the Board of Directors as well as institutional relations;
2. Conducts periodic alignment, review, monitoring, and evaluation of subsidiary work programs and policies in the area of corporate secretarial affairs;
3. Ensures that the preparation of subsidiary work plans—including both the Annual Work Plan (RKAP) and the Long-Term Business Plan (RJPP)—in the corporate secretariat area aligns with the company's strategic direction;
4. Conduct periodic monitoring and evaluation of the implementation of the RJPP and RKAP of subsidiaries that have been approved by the General Meeting of Shareholders in the area of corporate secretariat;
5. Monitor and evaluate the achievement of the RJPP and RKAP of subsidiaries based on needs and strategic plans within the corporate secretariat;
6. Coordinate with relevant divisions within the company regarding the subsidiaries' Annual General Shareholders' Meetings (AGMs) or Extraordinary General Shareholders' Meetings (EGSMs), whether conducted via circular or in person;
7. Ensure compliance with regulations regarding corporate disclosure requirements in line with the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG), Integrated GCG, and applicable laws and regulations; provide information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners on a periodic basis and/or upon request;

8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka pemenuhan GCG dan GCG Terintegrasi;
9. Menyusun dan memfasilitasi implementasi Pedoman GCG, Pedoman GCG Terintegrasi, Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya mengoordinasikan pelaksanaan asesmen dan evaluasi GCG;
10. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan penerapan GCG kepada regulator;
11. Menatausahakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan RUPS, termasuk RUPS Tahunan/Luar Biasa dan RUPS RKAP, baik sirkuler maupun fisik, serta berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya dalam mempersiapkan dan menyusun materi RUPS sesuai agenda dan kebutuhannya di Perusahaan;
12. Menyusun dan mengoordinasikan laporan triwulan, laporan tahunan, laporan perubahan anggaran dasar perusahaan, laporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, laporan keberlanjutan (*sustainability report*), dan laporan lainnya yang menjadi kewajiban korporasi serta menyampaikannya kepada regulator;
13. Merencanakan strategi, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembentukan citra dan komunikasi perusahaan untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham (*shareholders*) dengan tetap memperhatikan informasi rahasia perusahaan, termasuk menjadi juru bicara perusahaan;
14. Merencanakan strategi, melaksanakan dan mengevaluasi program *sponsorship, corporate branding* dan *corporate event*;
15. Melakukan pemetaan dan merencanakan strategi perusahaan dalam pengelolaan hubungan lembaga dengan pemangku kepentingan;
16. Menjadi penghubung (*liaison officer*) perusahaan untuk membina hubungan dengan pemangku kepentingan;
17. Membuat, menatausahakan dan mengelola korespondensi, dokumen atau arsip perusahaan, termasuk surat masuk dan surat keluar perusahaan, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah RUPS, dan dokumen perusahaan lainnya;
18. Memberikan penomoran dan salinan produk hukum berupa surat keputusan dan surat edaran yang berada pada kewenangan Direksi serta melakukan pengarsipan dokumen pedoman, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan;
19. Melakukan program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris pertama kalinya;
20. Mengelola tata usaha (*office of the board*) yang mencakup ketersediaan informasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan termasuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris Direksi, protokoler dan/atau *personal assistant*, termasuk *executive advisor* yang membantu tugas Direksi;

8. Conduct corporate activities to fulfill the requirements of GCG and Integrated GCG;
9. Drafting and facilitating the implementation of the GCG Guidelines, Integrated GCG Guidelines, and the Code of Conduct for the Board of Directors and Board of Commissioners, including coordinating the conduct of GCG assessments and evaluations;
10. Coordinate the preparation and submission of CG implementation reports to regulators;
11. Administer and coordinate the organization of General Shareholders' Meetings (GSMs), including Annual/ t General Shareholders' Meetings and General Shareholders' Meetings on the Annual Business Plan (RKAP), whether conducted via circular or in person, and coordinate with other relevant divisions in preparing and compiling GSM materials in accordance with the agenda and the Company's needs;
12. Drafting and coordinating quarterly reports, annual reports, reports on amendments to the company's articles of incorporation, reports on changes in members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, sustainability reports, and other reports required by corporate regulations, and submitting them to regulators;
13. Plan, implement, and evaluate corporate image-building and communication programs to be presented to stakeholders and shareholders, while ensuring the protection of confidential company information, including serving as the company's spokesperson;
14. Plan, implement, and evaluate sponsorship, corporate branding, and corporate event programs;
15. Mapping and planning corporate strategies for managing institutional relationships with stakeholders;
16. Serve as the company's liaison officer to foster relationships with stakeholders;
17. Prepare, organize, and manage corporate correspondence, documents, and records, including incoming and outgoing correspondence, the Shareholder Register, Special Lists, Minutes of Board of Directors Meetings, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of General Shareholders' Meetings, and other corporate documents;
18. Assign serial numbers to and make copies of legal documents such as decisions and circulars within the Board of Directors' authority, and archive established guidelines, policies, and procedures;
19. Conducting an introductory program for new members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
20. Managing the Board Office, which includes ensuring the availability of information to facilitate the smooth execution of the Board of Directors' and Board of Commissioners' activities within the company, including coordinating the duties of the Board Secretary, protocol staff, and/or personal assistants, as well as executive advisors who assist the Board of Directors;

21. Melakukan pemenuhan dan pemutakhiran atas setiap perizinan korporasi sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Melakukan koordinasi dengan Direktur Pembina Wilayah Operasional dan/atau anak perusahaan (jika ada) serta pengelolaan protokoler terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi sebagai Direktur Pembina Wilayah Operasional dan/atau anak perusahaan (jika ada); dan
23. Bertanggung jawab atas pengelolaan sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), termasuk di dalamnya mengoordinasikan kepada pihak terkait dalam pemenuhan data dan laporan yang dibutuhkan.

21. Ensure compliance with and update all corporate licenses in accordance with applicable regulations;
22. Coordinating with the Regional Operations Director and/or subsidiary directors (if any) and managing protocol matters related to the Board of Directors' duties as Regional Operations Directors and/or subsidiary directors (if any); and
23. Be responsible for managing the State Officials' Asset Disclosure Report (LHKPN) system, including coordinating with relevant parties to ensure the required data and reports are submitted.

Sekretaris Perusahaan berkewajiban untuk senantiasa memantau dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan Perusahaan memenuhi dan mematuhi seluruh ketentuan tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan secara berkala menyampaikan informasi kepada Direksi, serta memberikan laporan atau penjelasan kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

The Corporate Secretary is obligated to continuously monitor and keep abreast of developments in applicable laws and regulations, and to ensure that the Company meets and complies with all such provisions. In the performance of their duties, the Corporate Secretary periodically provides information to the Board of Directors and submits reports or explanations to the Board of Commissioners as necessary.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama, dengan didukung kewenangan yang memadai dalam menjalankan fungsinya. Adapun ruang lingkup pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Organizational Structure of The Corporate Secretary

The Corporate Secretary reports to the President Director or to a member of the Board of Directors designated by the President Director, and is granted sufficient authority to perform his or her duties. The scope of the Corporate Secretary's duties is as follows:



Program Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

Throughout 2025, the Corporate Secretary participated in various training and competency development programs. The details of these activities are as follows:

Nama Peserta Participant Name	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer
Sakkan Abram Rodotua	Legal for Non-Legal	24 – 25 April 2025 April 24–25, 2025	IFG Corporate University
Yoga Adha Gumilar	Legal for Non-Legal	24 – 25 April 2025 April 24–25, 2025	IFG Corporate University
Sella Silviany Putri	Building Image Professional	27 Mei 2025 May 27, 2025	IFG Corporate University
Dwi Ponco Kuncoro	Wawasan Kebangsaan Batch-5 National Awareness Batch 5	16 – 20 Juni 2025 June 16–20, 2025	IFG Corporate University
Sella Silviany Putri	Wawasan Kebangsaan Batch-5 National Awareness Batch 5	16 – 20 Juni 2025 June 16–20, 2025	IFG Corporate University
I Gede Suhendra	Wawasan Kebangsaan Batch-6 National Awareness Batch 6	7 – 11 Juli 2025 July 7–11, 2025	IFG Corporate University
Yoga Adha Gumilar	Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis dan Elektronik Technical Aspects of Dynamic and Electronic Records Management	14 – 16 Juli 2025 July 14–16, 2025	IFG Corporate University
Dwi Ponco Kuncoro	Manajemen Protokoler Profesional Professional Protocol Management	14 – 15 Mei 2025 May 14–15, 2025	Mahaka Institute
Astry Nurul Saputri	Manajemen Protokoler Profesional Professional Protocol Management	14 – 15 Mei 2025 May 14–15, 2025	Mahaka Institute
Riki Setiawan	Wawasan Kebangsaan Batch-7 National Awareness Batch 7	28 Juli – 1 Agustus 2025 July 28 – August 1, 2025	IFG Corporate University
Sakkan Abram Rodotua	Wawasan Kebangsaan Batch-7 National Awareness Batch 7	28 Juli – 1 Agustus 2025 July 28 – August 1, 2025	IFG Corporate University
Sara Gabrielle Lewerissa	Wawasan Kebangsaan Batch-7 National Awareness Batch 7	28 Juli – 1 Agustus 2025 July 28 – August 1, 2025	IFG Corporate University
Gisela	GCG Implementation	1 – 8 September 2025 September 1–8, 2025	IFG Corporate University
Annisa Fathia	Professional Executive Secretary	17 – 23 September 2025 September 17–23, 2025	IFG Corporate University
Anggraini Pradyaningtyas	Professional Executive Secretary	17 – 23 September 2025 September 17–23, 2025	IFG Corporate University
Gisela	Dasar Bisnis Asuransi dan Penjaminan Fundamentals of Insurance and Guarantee Business	2 – 3 Oktober 2025 October 2–3, 2025	IFG Corporate University
Ridwan Nur Arifin	Dasar Bisnis Asuransi dan Penjaminan Fundamentals of Insurance and Guarantee Business	2 – 3 Oktober 2025 October 2–3, 2025	IFG Corporate University
Ayi Fakhrotun Nisa	Dasar Bisnis Asuransi dan Penjaminan Fundamentals of Insurance and Guarantee Business	2 – 3 Oktober 2025 October 2–3, 2025	IFG Corporate University
Sarah Putri Derya	Dasar Bisnis Asuransi dan Penjaminan Fundamentals of Insurance and Guarantee Business	2 – 3 Oktober 2025 October 2–3, 2025	IFG Corporate University
Ridwan Nur Arifin	Audit for non Auditor	13 – 14 Oktober 2025 October 13–14, 2025	IFG Corporate University
Astry Nurul Saputri	Audit for non Auditor	13 – 14 Oktober 2025 October 13–14, 2025	IFG Corporate University
I Gede Suhendra Kertanugraha	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University

Nama Peserta Participant Name	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer
Nita Estasari	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Gisela	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Hadrianus Adityo Padmosaputro	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Sara Gabrielle Lewerissa	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Nabila Maisarah	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Sakkan Abram Rodotua	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Erlina Ratnawati	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Sarah Putri Derya	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Mohamad Indra Muluk Lubis	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Anggraini Pradyaningtyas	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Ridwan Nur Arifin	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Lourena Margaretha Olivia Lontoh	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Ulfhy Alvini	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Arnaldo Brayend Fanggi	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Astry Nurul Saputri	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Dwi Ponco Kuncoro	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University

Nama Peserta Participant Name	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer
Ayi Fakhrotun Nisa	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Riki Setiawan	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Sella Silviany Putri	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Yoga Adha Gumilar SH	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Denny Soelistyo Adji	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	22 September – 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Riki Setiawan	Sertifikasi Public Relations Public Relations Certification	30 September 2025 September 30, 2025	
Nita Estasari	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Gisela	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Hadrianus Adityo Padmosaputro	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Sara Gabrielle Lewerissa	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Nabila Maisarah	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Sakkan Abram	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Erlina Ratnawati	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Sarah Putri Derya	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Mohamad Indra Muluk Lubis	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Anggraini Pradyaningtyas	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Ridwan Nur Arifin	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Ulfhy Alvini	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Arnaldo Brayend Fanggi	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Astry Nurul Saputri	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Dwi Ponco Kuncoro	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Ayi Fakhrotun Nisa	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Riki Setiawan	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University

Nama Peserta Participant Name	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Sella Silviany Putri	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Yoga Adha Gumilar	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
Denny Soelistyo Adji	Persaingan Usaha Business Competition	6 – 17 Oktober 2025 October 6–17, 2025	IFG Corporate University
I Gede Suhendra Kertanugraha	Mini Prompt-A-Thon	4 Desember 2025 December 4, 2025	IFG Corporate University
Arnaldo Brayend Fanggi	Mini Prompt-A-Thon	4 Desember 2025 December 4, 2025	IFG Corporate University
Hadrianus Adityo Padmosaputro	ESG Implementation Batch 1	27 – 31 Oktober 2025 October 27–31, 2025	IFG Corporate University
Sakkan Abram Rodotua	ESG Implementation Batch 2	3 – 7 November 2025 November 3–7, 2025	IFG Corporate University
Ayi Fakhrotun Nisa	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Gisela	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Hadrianus Adityo Padmosaputro	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Lourena Margaretha Olivia Lontoh	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Marissa Devi Alexandra Pontoan	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Mohamad Indra Muluk Lubis	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Nita Estasari	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Sakkan Abram Rodotua	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Sara Gabrielle Lewerissa	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Sella Silviany Putri	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Yoga Adha Gumilar	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CFT and CPF	20 – 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Nita Estasari	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Gisela	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Hadrianus Adityo Padmosaputro	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Sara Gabrielle Lewerissa	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Nabila Maisarah	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University

Nama Peserta Participant Name	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer
Sakkan Abram Rodotua	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Erlina Ratnawati	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Anggraini Pradyaningtyas	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Ridwan Nur Arifin	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Lourena Margaretha Olivia Lontoh	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Arnaldo Brayend Fanggi	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Sella Silviany Putri	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021	3 – 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Hadrianus Adityo Padmosaputro	Workshop PSAK 117 PSAK 117 Workshop	16 Desember 2025 December 16, 2025	IFG Corporate University
Nabila Maisarah	Workshop PSAK 117 PSAK 117 Workshop	16 Desember 2025 December 16, 2025	IFG Corporate University
Hadrianus Adityo Padmosaputro	Penyusunan Peraturan PSAK 117 Workshop	30 Desember 2025 December 30, 2025	IFG Corporate University
Annisa Fathia	Customer Centricity Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Customer Centricity Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Sara Gabrielle Lewerissa	Customer Centricity Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Digital Marketing Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Annisa Fathia	Digital Marketing Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Sara Gabrielle Lewerissa	Digital Marketing Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Anggraini Pradyaningtyas	Digital Business Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Digital Business Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University

Nama Peserta Participant Name	**Nama Pelatihan** Training Name	**Tanggal Pelatihan** Training Date	**Penyelenggara** Organizer
Sara Gabrielle Lewerissa	Digital Business Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Anggraini Pradyaningtyas	Digital Innovation & Collaboration Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Marissa Devi Alexandra Pontoan	Digital Innovation & Collaboration Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Nabila Maisarah	Digital Innovation & Collaboration Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Sara Gabrielle Lewerissa	Digital Innovation & Collaboration Fundamental	10 November – 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2025

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan serta menyusun laporan pelaksanaan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan. Penyusunan laporan tersebut dilakukan dengan mengacu pada pembagian bidang dalam struktur organisasi Sekretaris Perusahaan.

Sementara itu pada tahun 2025 Perusahaan telah menetapkan program kerja utama seperti dalam tabel berikut:

Implementation of The Corporate Secretary Duties in 2025

In 2025, the Corporate Secretary implemented the established work program and prepared an implementation report in the form of the Corporate Secretary's Report. The report was prepared in accordance with the division of responsibilities within the Corporate Secretary's organizational structure.

Meanwhile, in 2025, the Company established the following key work programs, as shown in the table below:

No	**Program Kerja** Work Program	**Target 2025** 2025 Target	**Pencapaian** Achievements
1	Menurunkan Level Risiko Inheren sesuai Target Risiko Residual Reducing Inherent Risk Levels in Line with Residual Risk Targets	100%	• Realisasi R24 pada Q4 target residual adalah *Low to Moderate* dengan ketercapaian masih *Moderate*, sehingga risiko residual kurang dari target • Realisasi R21 pada Q4 target residual adalah *Low to Moderate* dengan ketercapaian *Low* sehingga risiko residual lebih baik dari target • For R24 in Q4, the residual risk target was Low to Moderate, while the actual achievement remained Moderate; therefore, the residual risk did not meet the target. • For R21 in Q4, the residual risk target was Low to Moderate, while the actual achievement was Low; therefore, the residual risk performed better than the target.
2	Peningkatan Skor Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Improving the Public Information Transparency Score by 2025	Tersedianya hasil skor Keterbukaan Informasi Publik sebesar 89,054 (Menuju informatif) dengan peningkatan 13,57 poin dari tahun 2025 The Public Information Disclosure score reached 89.054 (Moving Toward Informative), an increase of 13.57 points from 2025	Tersedianya hasil skor Keterbukaan Informasi Publik sebesar 89,054 (Menuju informatif) dengan peningkatan 13,57 poin dari tahun 2025 The Public Information Disclosure assessment recorded a score of 89.054 ("Towards Informative"), an increase of 13.57 points from 2025.
3	Peningkatan *Reputation Awareness* IFG Enhancing IFG's Reputation Awareness	*Brand Communication Reach Index* naik 5% dari hasil tahun 2024 The Brand Communication Reach Index rose 5% from the 2024 results	Tersedianya hasil *survey Brand Communication Reach Index* dengan skor peningkatan 19,84% The Brand Communication Reach Index survey recorded an improvement of 19.84%.

No	Program Kerja Work Program	Target 2025 2025 Target	Pencapaian Achievements
4	Pengembangan Revitalisasi *Brand* Arsitektur IFG *Holding* Developing and Revitalizing the IFG Holding Brand Architecture	Tersedianya fondasi identitas visual revitalisasi *brand* arsitektur IFG *Holding* The visual identity foundation for the revitalization of IFG Holding's brand architecture is available	Pada tahap penyelarasan & implementasi kajian *brand* arsitekur IFG yang akan diimplementasikan pada: 1. Rencana *rebrand* Mandiri Inhealth (menggunakan *brand* transisi) 2. Penyusunan kajian arsitektur brand terkait dengan konsilidasi perusahaan asuransi (Astagina) 3. Reviu terhadap *brand guidelines* IFG *holding* (yang disebabkan ada nya dinamika implementasi *brand*) 4. Adanya kebutuhan kajian & panduan implementasi "IFG *One Building*" implementation planned for the following: 1. The planned rebranding of Mandiri Inhealth using a transitional brand; 2. The preparation of a brand architecture study related to the consolidation of insurance companies (Astagina); 3. A review of the IFG Holding brand guidelines in response to developments in brand implementation; and 4. The development of a study and implementation guidelines for "IFG One Building."
5	Pengukuran Tingkat Kepuasan terhadap *Enhancement* Aplikasi Sistem Tata Kelola Naskah Dinas (*I-Flow*) Measuring Satisfaction Levels with Enhancements to the Official Document Management System (I-Flow)	Kategori "Cukup Puas" "Fairly Satisfactory" Category	Fitur *enhanchment Iflow* telah sepenuhnya di *deploy* dan survey kepuasan internal terhadap *enhancement* aplikasi sistem tata kelola naskah dinas (*I-Flow*) telah terlaksana dan dilaporkan kepada Direktur Utama pada Q4/2025. The I-Flow feature enhancements have been fully deployed, and an internal satisfaction survey on the enhancements to the official correspondence governance system (I-Flow) was completed and reported to the President Director in Q4 2025.
6	Penyusunan *Annual Report* dan *Sustainability Report* serta Laporan Manajemen *Audited* IFG Tahun 2024 Preparation of the 2024 IFG Annual Report, Sustainability Report, and Audited Management Report	*Annual Report* dan *Sustainability Report* serta Laporan Manajemen *Audited* IFG Tahun 2024 tersedia tepat waktu sesuai target IFG's 2024 Annual Report, Sustainability Report, and Audited Management Report were made available on time as targeted	1. Telah dilakukan pengumpulan data AR dan SR kepada unit kerja terkait sejak tanggal 17 Februari 2025, tanggal 14 April 2025, 24 Juli 2025. 2. Telah dilakukan finalisasi dan publikasi laporan AR dan SR pada tanggal 24 September 2025 3. *Draft* Final Laporan Manajemen *Audited* telah tersedia pada bulan Mei 2025 dan telah melakukan koordinasi publikasi laporan dengan Divisi AKP di bulan Juli 2025 1. AR and SR data were collected from the relevant work units on February 17, April 14, and July 24, 2025. 2. The AR and SR reports were finalized and published on September 24, 2025. 3. The final draft of the Audited Management Report was completed in May 2025, followed by coordination with the AKP Division regarding the publication of the report in July 2025.
7	*Survey Satisfaction Index*	(1) Nilai 3,00 (2) Nilai 4,00	1. Telah dilakukan penunjukan konsultan untuk pelaksanaan Survey Persepsi *Stakeholder* 2. Sampai dengan tanggal 20 Januari 2026, telah dilaksanakan *Survey* kepada a. 6 (enam) orang *stakeholder* eksternal b. *Stakeholder* internal (Direksi dan Perwakilan Divisi) 1. A consultant has been appointed to conduct the Stakeholder Perception Survey. 2. 2. As of January 20, 2026, the survey had been conducted among: a. 6 (six) external stakeholders; and b. Internal stakeholders (the Board of Directors and Division representatives).

UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian internal Perusahaan, khususnya dalam memastikan efektivitas pengendalian pada tingkat operasional. Pelaksanaan fungsi Audit Internal dilakukan oleh Unit Audit Internal sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal yang terintegrasi. Secara umum, unit ini bertugas mendukung manajemen dalam mencapai tujuan Perusahaan melalui evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan.

INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit is a critical component of the Company's internal control system, particularly in ensuring the effectiveness of controls at the operational level. The Internal Audit Unit performs its audit functions as part of an integrated internal control mechanism. In general, this unit is tasked with supporting management in achieving the Company's objectives by evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control system, risk management, and corporate governance.

Dalam menjalankan fungsinya, Unit Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consultative management*) secara independen dan objektif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola perusahaan, sekaligus memberikan rekomendasi yang konstruktif guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

In carrying out its functions, the Internal Audit Unit is responsible for conducting audit (assurance) and consultative management activities independently and objectively. These activities aim to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes, while providing constructive recommendations to drive continuous improvement.

Pejabat Unit Audit Internal

Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala SKAI. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 152/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021*, IFG menunjuk Yullyan Fuad sebagai Kepala SKAI.

Internal Audit Unit Officers

The Internal Audit Unit is led by the Head of SKAI. Based on Board of Directors Decree No. 152/SK-DIR/BPUI/SDM/X/2021 dated October 5, 2021*, IFG appointed Yullyan Fuad as Head of SKAI.

Yullyan Fuad
Kepala Divisi SKAI
Menjabat sejak 5 Oktober 2021
Head of the SKAI Division
Has served since October 5, 2021

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 48 tahun Indonesian citizen Age 48 years old
Domisili Domicile	Tangerang, Indonesia
Pendidikan Educational Background	• Master Akuntansi, Universitas Indonesia (2006) • Sarjana Akuntansi, Universitas Brawijaya (2001) • Diploma Akuntansi, STAN (1998) • Master's Degree in Accounting, University of Indonesia (2006) • Bachelor's Degree in Accounting, Brawijaya University (2001) • Diploma in Accounting, STAN (1998)
Sertifikasi Certifications	• Certified Internal Auditor (CIA) • Chartered Accountant (CA) • Certified Public Accountant (CPA) • Scrum Master Accredited Certification
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Divisi SKAI, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (Oktober 2021 - sekarang) • Chief Audit Executive, Meratus Group (2019 – 2021) • Audit Lead | Financial Controller, BP Indonesia (2013 – 2019) • Tax Section Head, Premier Oil (2012 – 2013) • Head of Audit, CNOOC (2010 – 2012) • Auditor | Investigator | Section Head, BPK - RI (1998 – 2010) • Head of the SKAI Division, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), (October 2021 – present) • Chief Audit Executive, Meratus Group (2019–2021) • Audit Lead | Financial Controller, BP Indonesia (2013 – 2019) • Head of the Tax Section, Premier Oil (2012–2013) • Head of Audit, CNOOC (2010–2012) • Auditor | Investigator | Section Head, BPK - RI (1998 – 2010)

*mengundurkan diri per tanggal 31 Desember 2025
*resigned as of December 31, 2025

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Unit Audit Internal bertugas mendukung pencapaian tujuan Perusahaan melalui penerapan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, sistem pengendalian, dan proses tata kelola. Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of The Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is tasked with supporting the achievement of the Company's objectives through the application of a systematic and structured approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, control systems, and governance processes. The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are as follows:

1. Membuat, melaksanakan, dan memonitor kebijakan dan program kerja terkait kegiatan pengawasan internal;
2. Membuat dan mengusulkan Piagam Audit Internal (PAI) kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta mengevaluasi PAI secara berkala;
3. Membuat Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko dan mencakup pengawasan pada IFG dan melakukan reviu atas PKAT Anggota *Holding*;
4. Menyusun, mereviu, dan/atau melakukan evaluasi Pedoman Strategis kegiatan Internal Audit yang akan diberlakukan di IFG dan Anggota *Holding*;
5. Melaksanakan pemeriksaan kinerja operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikannya sesuai PKAT untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan praktik tata kelola, termasuk pelaksanaan audit khusus sesuai permintaan Direktur Utama;
6. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
7. Melakukan evaluasi dan reviu atas praktik Tata Kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal;
8. Memberikan konsultasi terkait kegiatan usaha perusahaan yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam memperbaiki kegiatan operasional Perusahaan;
9. Sebagai pendamping auditor eksternal namun tidak terbatas kepada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
10. Mengajukan, mempersiapkan, membuat analisa dan membuat Internal Memo sehubungan dengan adanya permohonan dari Anggota *Holding* terkait kegiatan internal audit di Anggota Holding untuk dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama;
11. Melaporkan hasil aktivitas pekerjaan kepada Direktur Utama secara berkala;
12. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap karyawan-karyawan di dalam Divisi Satuan Pengawasan Internal; dan
13. Menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (*pending matters*) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Unit Audit Internal

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, yang penetapannya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris IFG.

Struktur Organisasi Unit Audit Internal

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi, struktur organisasi SKAI dipimpin oleh Kepala Divisi SKAI yang membawahi 3 (tiga) departemen, yaitu:

1. Develop, implement, and monitor policies and work programs related to internal supervisory activities;
2. Develop and propose the Internal Audit Charter (IAC) to the Board of Directors and the Board of Commissioners, and periodically evaluate the IAC;
3. Develop a risk-based Annual Audit Work Program (PKAT) that covers the supervisory at IFG and review the PKATs of Holding Company Members;
4. Drafting, reviewing, and/or evaluating the Strategic Guidelines for Internal Audit activities to be implemented at IFG and its Holding Company Members;
5. Conduct operational and financial performance audits, assess controls, management, and implementation, and provide recommendations for improvement in accordance with the PKAT to enhance internal control activities, risk management, and governance practices, including the conduct of special audits as requested by the President Director;
6. Monitor follow-up on the results of both internal and external audits;
7. Evaluate and review corporate governance, risk management, and internal control practices;
8. Provide consultation regarding the company's business activities related to corporate governance, risk management, and internal controls to improve the Company's operational activities;
9. To assist external auditors, including but not limited to audits by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP);
10. Submit, prepare, analyze, and draft internal memos in response to requests from Holding Company members regarding internal audit activities within those members, for follow-up by the President Director;
11. Reporting the results of work activities to the President Director on a regular basis;
12. Provide direct guidance and supervision to employees within the Internal Audit Division; and
13. Resolve all pending matters and follow up on audit findings.

Parties Appointing and Dismissing The Head of The Internal Audit Unit

The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, and such appointment or dismissal is formalized in a Decree issued by the Board of Directors and the Board of Commissioners of IFG.

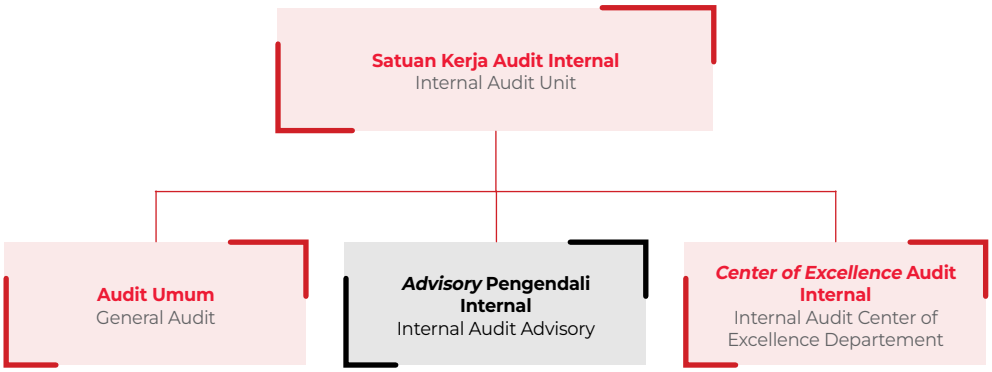
Organizational Structure of The Internal Audit Unit

Pursuant to Board of Directors Decree No. 15 of 2024 concerning Organizational Structure Policy, the SKAI organizational structure is led by the Head of the SKAI Division, who supervises 3 (three) departments, namely:

1. Departemen Audit;
2. Departemen *Advisory* Pengendalian Internal; dan
3. Departemen *Center of Excellence* Audit Internal.

1. Audit Department;
2. Internal Control Advisory Department; and
3. Internal Audit Center of Excellence Department.

Struktur Organisasi Unit Audit Internal



Jumlah personel pada Divisi SKAI per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Kepala Divisi SKAI;
2. Kepala Departemen sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Personel Auditor 6 (enam) orang;
4. Personel *Advisory* Pengendalian Internal 4 (empat) orang; dan
5. Personel *Center of Excellence* Audit Internal 3 (tiga) orang.

As of December 31, 2025, the SKAI Division had a total of 17 (seventeen) personnel, with the following composition:

1. Head of the SKAI Division;
2. 3 (three) Department Heads;
3. Auditors: 6 (six) people;
4. Internal Control Advisory personnel: 4 (four) people; and
5. 3 (three) Internal Audit Center of Excellence personnel.

Sertifikasi Profesi Unit Audit Internal

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas auditor internal, IFG menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara terstruktur dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui keikutsertaan auditor internal dalam berbagai program sertifikasi. Adapun daftar staf Unit Audit Internal yang telah mengikuti program sertifikasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Professional Certification for The Internal Audit Unit

To improve the quality and capabilities of internal auditors, IFG conducts structured and ongoing competency development programs. This effort is realized through the participation of internal auditors in various certification programs. The list of Internal Audit Unit staff who have participated in certification programs in 2025 is as follows:

Sertifikasi Profesi Professional Certification	**Jumlah Auditor** Number of Auditors
Chartered Accountant (CA)	8
Certified Internal Auditor (CIA)	4
Qualified Internal Auditor (QIA)	4
ASEAN Chartered Professional Accountant (CPA)	3
Certified Internal Audit Executive (CIAE)	3
Certified ISO 27001:2013 Lead Auditor - I27001LA	3
Certified Public Accountant (CPA)	3
Certified Fraud Examiner (CFE)	2
Certified Risk Government Professional (CRGP)	2
Certified Risk Management Professional (CRMP)	2
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	2
Associate CPA Australia	1
Certified Banking Risk Management (CBRM) - Manajemen Risiko Perbankan Level 3	1
Certified Forensic Auditor (CFrA)	1
Certified Fraud Risk Management Professional (FRMP)	1

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Number of Auditors
Certified Governance, Risk Management and Compliance Audit (GRCA)	1
Certified in Risk Management Assurance (CRMA)	1
Certified Information Systems Auditor (CISA)	1
Certified Life Insurance (CLI)	1
FLMI Level 1: Insurance Fundamental, LOMA	1
Certified Risk Management Officer (CRMO)	1
Certified Secure Computer User (CSCU)	1
Integrated Data Privacy Professional (IDPP)	1
IT Auditor	1
ITIL® Foundation v3	1
Offensive Security Certified Profesional	1
Oracle Database 11g Administrator Certified Associate	1
Project Management Professional (PMP)	1
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	1
Scrum Master Accredited Certification	1
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) Securities Underwriter Representative (WPEE)	1
Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Broker-Dealer Representative (WPPE)	1

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Internal Audit

Pada tahun 2025, IFG telah melibatkan Unit Audit Internal dalam berbagai program pengembangan kompetensi. Adapun rincian kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Training and Competency Development for Internal Audit

In 2025, IFG has involved the Internal Audit Unit in various competency development programs. The details of the competency development activities participated in by the Internal Audit Unit are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan/ Pendidikan Type of Training/ Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tanggal Pelaksanaan Date Implementation	Penyelenggara Organizer
Yullyan (Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal) (Head of the Internal Audit Unit Division)	Seminar	Konferensi Auditor Internal Internal Auditor Conference	02 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 2, 2025 – July 4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)
Wirawan Arief Nugroho (Pjs. Kepala Departemen Advisory Pengendalian Internal) (Acting Head of the Internal Control Advisory Department)	*Training* Sertifikasi Training Certification	Manajemen Risiko Level 4 Risk Management Level 4	27 November 2025 s.d. 28 November 2025 November 27, 2025 – November 28, 2025	LPPI/LSP Perbankan LPPI/LSP Banking
I Made Suandi Putra (Kepala Departemen Audit) (Head of the Audit Department)	*Workshop*	*Actuary for Non-Actuaries*	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
	Seminar	*Masterclass* Program Manajemen Risiko Risk Management Masterclass Program	03 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 3, 2025 – July 4, 2025	LSPMR Professional Certification Institute for Risk Management
	Seminar	*National Anti Fraud Conference*	25 Juni 2025 s.d. 26 Juni 2025 June 25, 2025 – June 26, 2025	Associate of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
	Workshop Workshop Workshop	*Legal Awareness Training for Non-Legal Officers*: Aspek Fundamental Hukum Bisnis Legal Awareness Training for Non-Legal Officers: Aspects of Fundamentals of Business Law	24 April 2025 s.d. 25 April 2025 April 24, 2025 – April 25, 2025	Sekolah Tinggi Hukum Jantera / IFG Corpu Jantera College of Law / IFG Corporate University
		Program Pelatihan *Change Management Mindset* Change Management Mindset Training Program	16 Oktober 2025 s.d. 17 Oktober 2025 October 16, 2025 – October 17, 2025	PBP-KPI Consultancy
		Actuary for Non-Actuaries	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
Deny Sjahbani (Kepala Departemen Center of Excellence Audit Internal) (Head of the Center of Excellence for Internal Audit)	*Training* Sertifikasi Training Certification	Manajemen Risiko Level 4 Risk Management Level 4	27 November 2025 s.d. 28 November 2025 November 27, 2025 – November 28, 2025	LPPI/LSP Perbankan LPPI/LSP Banking
	Seminar	Konferensi Auditor Internal Internal Auditor Conference	02 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 2, 2025 – July 4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)
	Workshop	*Legal Awareness Training for Non-Legal Officers*: Aspek Fundamental Hukum Bisnis Legal Awareness Training for Non-Legal Officers: Fundamental Aspects of Business Law	24 April 2025 s.d. 25 April 2025 April 24, 2025 – April 25, 2025	Sekolah Tinggi Hukum Jantera/IFG Corpu Jantera College of Law/ IFG Corporate University
	Workshop	*Scrum Master*	17 Maret 2025 s.d. 19 Maret 2025 April 24, 2025 – April 25, 2025	Rakamin Academy/IFG Corpu Rakamin Academy/IFG Corporate University
	Workshop	Program Pelatihan *Change Management Mindset* Change Management Mindset Training Program	16 Oktober 2025 s.d. 17 Oktober 2025 October 16, 2025 – October 17, 2025	PBP-KPI Consultancy
	Webinar	Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan Digital Transformation: Trends in Technological Innovation in the Financial Sector	23 Januari 2025 January 23, 2025	OJK Institute
	Webinar	Digitalisasi Perbankan Dari Dua Sudut Pandang Banking Digitalization from Two Perspectives	23 Juni 2025 June 23, 2025	OJK Institute
	Webinar	Memutus Mata Rantai Scam : Sinergi dan Strategi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Breaking the Scam Chain: Synergy and Consumer Protection Strategies in the Financial Sector	26 Juni 2025 June 26, 2025	OJK Institute
Bakhas Nasrani Diso (Senior Officer Advisory Pengendalian Internal) (Senior Internal Control Advisory Officer)	*Workshop*	*Actuary for Non-Actuaries*	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
	Seminar	*Masterclass* Program Manajemen Risiko Risk Management Masterclass Program	03 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 3, 2025 – July 4, 2025	LSPMR Professional Certification Institute for Risk Management
	Workshop	Pelatihan *Mini Prompt-a-thon: Enhancing Productivity and Customer Value through AI-Driven Prompting* Mini Prompt-a-thon Training: Enhancing Productivity and Customer Value s through AI-Driven Prompting	04 Desember 2025 December 4, 2025	PBP-Microsoft

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Hari Sundoro (Senior Officer Advisory Pengendalian Internal) (Senior Internal Control Advisory Officer)	Seminar	Konferensi Auditor Internal Internal Auditor Conference	02 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 2, 2025 – July 4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)
	Training Sertifikasi Training Certification	Pelatihan Sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE) Certified Fraud Examiner (CFE) Certification Training	03 November 2025 s.d. 07 November 2025 November 3, 2025 – November 7, 2025	Associate of Certified Fraud Examiners (ACFE)
	Training Sertifikasi Training Certification	Pelatihan *Certified Fraud Risk Management Professional* (FRMP) Certified Fraud Risk Management Professional (FRMP) Training	10 Maret 2025 s.d. 14 Maret 2025 March 10, 2025 – March 14, 2025	Pusdiklat BPKP BPKP Education and Training Center
	Workshop	*Legal Awareness Training for Non-Legal Officers*: Aspek Fundamental Hukum Bisnis Legal Awareness Training for Non-Legal Officers: Fundamental Aspects of Business Law	24 April 2025 s.d. 25 April 2025 April 24, 2025 – April 25, 2025	Sekolah Tinggi Hukum Jantera / IFG Corpu Jantera College of Law / IFG Corporate University
	Workshop	*Finance for Non Finance*	17 Juli 2025 July 17, 2025	LPPL
	Workshop	Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif bagi SPI BUMN tahun 2025 Thematic Investigative Anti-Corruption Training for State-Owned Enterprise Internal Audit Units in 2025	23 Juni 2025 s.d. 26 Juni 2025 June 23, 2025 – June 26, 2025	KPK & FKSPI Corruption Eradication Commission (KPK) & FKSPI
Laila Fajriani (Senior Officer Advisory Pengendalian Internal) (Senior Internal Control Advisory Officer)	*Workshop*	*Communication Skills For Auditors: Interviewing And Negotiating*	16 April 2025 s.d. 17 April 2025 April 16, 2025 – April 17, 2025	IIA Indonesia
	Workshop	*Actuary for Non-Actuaries*	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
	Workshop	*Workshop* PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117 Workshop: Insurance Contracts	17 Juli 2025 s.d. 18 Juli 2025 July 17, 2025 – July 18, 2025	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI)
	Seminar	IIA Conference	28 Agustus 2025 s.d. 29 Agustus 2025 August 28, 2025 – August 29, 2025	IIA Indonesia
Rizky Ananda Putra (Officer Advisory Pengendalian Internal) (Internal Control Advisory Officer)	*Workshop*	*Actuary for Non-Actuaries*	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
	Workshop	*Workshop* PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117 Workshop: Insurance Contracts	17 Juli 2025 s.d. 18 Juli 2025 July 17, 2025 – July 18, 2025	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI)
	Seminar	*National Anti Fraud Conference* National Anti-Fraud Conference	25 Juni 2025 s.d. 26 Juni 2025 June 25, 2025 - June 26, 2025	Associate of Certified Fraud Examiners (ACFE)
	Workshop	*Legal Awareness Training for Non-Legal Officers*: Aspek Fundamental Hukum Bisnis Legal Awareness Training for Non-Legal Officers: Fundamental Aspects of Business Law	24 April 2025 s.d. 25 April 2025 April 24, 2025 – April 25, 2025	Sekolah Tinggi Hukum Jantera / IFG Corpu Jantera College of Law / IFG Corporate University
	Workshop	*Finance for Non Finance* Finance for Non-Finance Professionals	10 Juli 2025 July 10, 2025	LPPL

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
	Workshop	Pelatihan *Awareness* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	28 Mei 2025 May 28, 2025	sustaIN
	Workshop	Pelatihan Internal Audit ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	01 Juli 2025 July 1, 2025	sustaIN
	Webinar	*Outlook* Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 Economic and Financial Outlook for 2025	20 Februari 2025 February 20, 2025	OJK Institute
	Webinar	Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia: Peran Strategis Bullion Bank Looking Ahead to the Future of Indonesia's Gold Market: The Strategic Role of Bullion Banks	17 April 2025 April 17, 2025	OJK Institute
	Webinar	*Webinar Fraudulent Financial Statement* Webinar on Fraudulent Financial Statements	26 April 2025 April 26, 2025	Universitas Padjajaran dan ACFE Padjadjaran University and ACFE
Darmo Saputro Wibowo (Senior Officer Audit) (Senior Audit Officer)	*Workshop*	*Empowering Data Driven Decisions: Data Analytics with Tableu Training*	21 April 2025 s.d. 23 April 2025 April 21, 2025 – April 23, 2025	Rakamin Academy / IFG Corpu Rakamin Academy / IFG Corporate University
	Workshop	Communication Skills For Auditors: Interviewing And Negotiating	16 April 2025 s.d. 17 April 2025 April 16, 2025 – April 17, 2025	IIA Indonesia
	Training Sertifikasi Training Certification	Pelatihan Sertifikasi *Certified Legal Auditor* (CLA) Certified Legal Auditor (CLA) Certification Training	09 Juli 2025 s.d. 12 Juli 2025 July 09, 2025 - July 12, 2025	Justitia Global Mandiri
	Workshop	Pelatihan Audit Kinerja Performance Audit Training	14 Mei 2025 s.d. 20 Mei 2025 May 14, 2025 – May 20, 2025	Pusdiklat BPKP BPKP Education and Training Center
	Training Sertifikasi Training Certification	Pelatihan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Lanjutan Advanced Qualified Internal Auditor (QIA) Certification Training	20 Oktober 2025 s.d. 25 Oktober 2025 October 20, 2025 – October 25, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)
	Seminar	*Masterclass* Program Manajemen Risiko Risk Management Masterclass	03 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 3, 2025 - July 4, 2025	LSPMR Professional Certification Institute for Risk Management
	Workshop	*Workshop Internal Control* COSO 2013 COSO 2013 Internal Control Workshop	08 Mei 2025 s.d. 09 Mei 2025 May 8, 2025 – May 9, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)
	Workshop	Pelatihan Strategi dan Implementasi Subrogasi *Level Intermediate* Intermediate-Level Training on Subrogation Strategy and Implementation	05 November 2025 s.d. 07 November 2025 November 5, 2025 – November 7, 2025	PBP-Jamkrindo

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Fajar Setianto (Senior Officer Audit) (Senior Audit Officer)	*Workshop*	*Empowering Data Driven Decisions: Data Analytics with Tableu Training*	21 April 2025 s.d. 23 April 2025 April 21, 2025 – April 23, 2025	Rakamin Academy / IFG Corpu Rakamin Academy / IFG Corporate University
	Workshop	*Actuary for Non-Actuaries*	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
	Workshop	Pelatihan PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117 Training: Insurance Contracts	18 September 2025 s.d. 19 September 2025 September 18, 2025 – September 19, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
	Seminar	*National Anti Fraud Conference* National Anti-Fraud Conference	25 Juni 2025 s.d. 26 Juni 2025 June 25, 2025 – June 26, 2025	Associate of Certified Fraud Examiners (ACFE)
	Workshop	Pelatihan Strategi dan Implementasi Subrogasi *Level Intermediate* Intermediate-Level Training on Subrogation Strategies and Implementation	05 November 2025 s.d. 07 November 2025 November 5, 2025 – November 7, 2025	PBP-Jamkrindo
	Webinar	Webinar *Fraudulent Financial Statement* Webinar on Fraudulent Financial Statements	26 April 2025 April 26, 2025	Universitas Padjajaran dan ACFE Padjadjaran University and ACFE
	Webinar	Ngobrol *Anti Fraud* "Kartini Melawan *Fraud*: Peran Perempuan dalam Membangun Integritas Bangsa" Anti-Fraud Discussion: "Kartini Fights Fraud: The Role of Women in Building National Integrity"	03 Mei 2025 May 3, 2025	Associate of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Jaka Tirtana Hanafiah (Senior Officer Audit) (Senior Audit Officer)	*Workshop*	*Empowering Data Driven Decisions: Data Analytics with Tableu Training*	21 April 2025 s.d. 23 April 2025 April 21, 2025 – April 23, 2025	Rakamin Academy / IFG Corpu Rakamin Academy / IFG Corporate University
	Workshop	*Legal Awareness Training for Non-Legal Officers*: Aspek Fundamental Hukum Bisnis Legal Awareness Training for Non-Legal Officers: Fundamental Aspects of Business Law	24 April 2025 s.d. 25 April 2025 April 24, 2025 – April 25, 2025	Sekolah Tinggi Hukum Jantera / IFG Corpu Jantera College of Law / IFG Corporate University
	Webinar	*2025 Indonesia Economic Outlook: Nourishing the Future Growth - Webinar*	21 Januari 2025 January 21, 2025	CPA Australia & Bank Mandiri
	Webinar	*Townhall Meeting: Risk in Focus* 2025	24 Januari 2025 January 24, 2025	IIA Indonesia
	Webinar	*Maximizing Resources Across Security, Risk & Audit*	09 Februari 2025 February 9, 2025	OCEG
	Webinar	*Sustainability over breakfast: Stories and Challenges of IFRS S1 and S2 Implementation*	13 Februari 2025 February 13, 2025	CPA Australia
	Webinar	*The Modern Slavery Compass: A Key Resource for Ethical Business Leadership*	25 Februari 2025 February 25, 2025	CPA Australia
	Webinar	*Social Health Insurance*	28 April 2025 April 28, 2025	World Bank Group-Open Learning Campus
	Webinar	Penerapan Akuntansi Entitas Investasi Application of Investment Entity Accounting	30 April 2025 April 30, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
	Workshop	Desain dan Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* Design and Implementation of Internal Control Over Financial Reporting	27 Mei 2025 s.d. 28 Mei 2025 May 27, 2025 – May 28, 2025	Pusat Studi Hukum dan Bisnis Indonesia & FKSPI Center for Indonesian Law and Business Studies & FKSPI
	Webinar	*IAI-IFAC-IDX "Future-Proofing Economics: The Strategic Role of Accountants in Turbulent Times"*	23 Mei 2025 May 23, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
	Webinar	*Overview* PSAK 118: Penyajian & Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Overview of PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements	02 Juli 2025 July 2, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
	Webinar	Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah Governance of Sharia Financial Institutions	20 Juli 2025 July 20, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
	Webinar	*Challenges & Impact on GMT Implementation in Indonesia*	06 Agustus 2025 August 6, 2025	CPA Australia
	Webinar	*The Next Gen Auditor: Building Trust in the Digital World*	14 Agustus 2025 August 14, 2025	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)
	Webinar	*Risk and Governance Summit* 2025	19 Agustus 2025 August 19, 2025	OJK Institute
	Training Sertifikasi Training Certification	Pelatihan *Associate Certified Public Accountant* Associate Certified Public Accountant Training	27 Oktober 2025 s.d. 30 Oktober 2025 October 27, 2025 – October 30, 2025	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)
	Webinar	*AI-Powered Finance Leadership: Turning Data into Strategic Advantage- Webinar*	23 Oktober 2025 October 23, 2025	CPA Australia
	Seminar	*IIA Conference*	28 Agustus 2025 s.d. 29 Agustus 2025 August 28, 2025 – August 29, 2025	IIA Indonesia
Lucky Parwitasari (Senior Officer Audit) (Senior Audit Officer)	*Workshop*	*Empowering Data Driven Decisions: Data Analytics with Tableu Training*	21 April 2025 s.d. 23 April 2025 April 21, 2025 – April 23, 2025	Rakamin Academy / IFG Corpu Rakamin Academy / IFG Corporate University
	Workshop	*Actuary for Non-Actuaries*	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
	Workshop	*Workshop* PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117 Workshop: Insurance Contracts	17 Juli 2025 s.d. 18 Juli 2025 July 17, 2025 – July 18, 2025	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)
	Workshop	*Legal Awareness Training for Non-Legal Officers*: Aspek Fundamental Hukum Bisnis Legal Awareness Training for Non-Legal Officers: Fundamental Aspects of Business Law	24 April 2025 s.d. 25 April 2025 April 24, 2025 - April 25, 2025	Sekolah Tinggi Hukum Jantera / IFG Corpu Jantera College of Law / IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
	Workshop	Pelatihan *Mini Prompt-a-thon: Enhancing Productivity and Customer Value through AI-Driven Prompting* Mini Prompt-a-thon Training: Enhancing Productivity and Customer Value through AI-Driven Prompting	04 Desember 2025 December 4, 2025	PBP-Microsoft
	Webinar	Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan Digital Transformation: Technology Innovation Trends in the Financial Sector	23 Januari 2025 January 23, 2025	OJK Institute
	Webinar	Peran GRC dalam meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas Sektor Keuangan The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability	25 Februari 2025 February 25, 2025	OJK Institute
	Webinar	Inovasi Produk Keuangan Islam: Peran Etika Halal dalam Memperluas Penetrasi Pasar Innovations in Islamic Financial Products: The Role of Halal Ethics in Expanding Market Penetration	13 Maret 2025 March 13, 2025	OJK Institute
	Webinar	*Insurance Revolution How AI is Transforming the Underwriting and Optimizing Business Processes*	24 April 2025 April 24, 2025	OJK Institute
	Webinar	Penerapan Akuntansi Entitas Investasi Application of Accounting for Investment Entities	30 April 2025 April 30, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
	Webinar	*Workshop* Digital Forensik di Sektor Jasa Keuangan Digital Forensics Workshop in the Financial Services Sector	28 April 2025 s.d. 30 April 2025 April 28, 2025 – April 30, 2025	OJK Institute
	Webinar	Peran Strategis Industri Jasa Keuangan dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah The Strategic Role of the Financial Services Industry in Driving Regional Economic Development	08 Mei 2025 May 8, 2025	OJK Institute
	Webinar	Efek Domino Tarif Trump: Ancaman atau Peluang bagi Ekonomi Indonesia The Domino Effect of Trump's Tariffs: A Threat or an Opportunity for the Indonesian Economy	15 Mei 2025 May 15, 2025	OJK Institute
	Workshop	Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif bagi SPI BUMN tahun 2025 Thematic Investigative Anti-Corruption Training for State-Owned Enterprise Internal Audit Units in 2025	23 Juni 2025 s.d. 26 Juni 2025 June 23, 2025 – June 26, 2025	KPK & FKSPI Corruption Eradication Commission (KPK) & FKSPI

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Handarudigdaya Jalanidhi Kuncaratrah (Officer Audit) (Audit Officer)	*Workshop*	*Empowering Data Driven Decisions: Data Analytics with Tableu Training*	21 April 2025 s.d. 23 April 2025 April 21, 2025 – April 23, 2025	Rakamin Academy / IFG Corpu Rakamin Academy / IFG Corporate University
	Workshop	*Communication Skills For Auditors: Interviewing And Negotiating*	16 April 2025 s.d. 17 April 2025 April 16, 2025 – April 17, 2025	IIA Indonesia
	Workshop	*Actuary for Non-Actuaries*	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
	Workshop	Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis dan Elektronik Technical Training on Dynamic and Electronic Records Management	14 Juli 2025 s.d. 15 Juli 2025 July 14, 2025 – July 15, 2025	ANRI
	Workshop	Pelatihan Penyusunan Regulasi Internal Perusahaan Training on the Development of Internal Company Regulations	30 Desember 2025 December 30, 2025	PBP-Mahaka Institute
Muhammad Rosyid Ridho Muttaqien (Officer Audit) (Audit Officer)	*Workshop*	Pelatihan Audit Kinerja Performance Audit Training	14 Mei 2025 s.d. 20 Mei 2025 May 14, 2025 – May 20, 2025	Pusdiklat BPKP BPKP Education and Training Center
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit National Seminar on Internal Audit	03 Desember 2025 s.d. 04 Desember 2025 December 3, 2025 – December 4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)
	Workshop	*Legal Awareness Training for Non-Legal Officers*: Aspek Fundamental Hukum Bisnis Legal Awareness Training for Non-Legal Officers: Fundamental Aspects of Business Law	24 April 2025 s.d. 25 April 2025 April 24, 2025 – April 25, 2025	Sekolah Tinggi Hukum Jantera / IFG Corpu Jantera College of Law / IFG Corporate University
	Workshop	*Training Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training	15 Juli 2025 s.d. 16 Juli 2025 July 15, 2025 – July 16, 2025	Robere & Associates
	Workshop	*Training* Internal Audit ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training	30 Juli 2025 s.d. 31 Juli 2025 July 30, 2025 – July 31, 2025	Robere & Associates
	Workshop	Pelatihan Penyusunan Regulasi Internal Perusahaan Training on the Development of Internal Company Regulations	30 Desember 2025 December 30, 2025	PBP-Mahaka Institute
	Webinar	Peran GRC dalam meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas Sektor Keuangan The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability	25 Februari 2025 February 25, 2025	OJK Institute
	Webinar	*Outlook* Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 Economic and Financial Outlook for 2025	20 Februari 2025 February 20, 2025	OJK Institute
	Webinar	Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia: Peran Strategis Bullion Bank Looking Ahead to the Future of Indonesia's Gold Market: The Strategic Role of Bullion Banks	17 April 2025 April 17, 2025	OJK Institute

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Aliya Anindhita Rachman (Staff Audit) (Audit Staff)	*Workshop*	Pelatihan PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117 Training: Insurance Contracts	18 September 2025 s.d. 19 September 2025 September 18, 2025 – September 19, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
	Workshop	*Internal Audit for New Auditors* Internal Audit for New Auditors	25 Agustus 2025 s.d. 26 Agustus 2025 August 25, 2025 – August 26, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)
	Workshop	Pelatihan Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis Training	22 September 2025 s.d. 23 September 2025 September 22, 2025 – September 23, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Fadian Dwiantara (Senior Officer Center of Excellence Audit Internal) (Senior Officer, Center of Excellence for Internal Audit)	*Workshop*	*Actuary for Non-Actuaries*	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corpu IFG Corporate University
	Training Sertifikasi Training Certification	Manajemen Risiko Level 4 Risk Management Level 4	27 November 2025 s.d. 28 November 2025 November 27, 2025 – November 28, 2025	LPPI/LSP Perbankan
	Seminar	Konferensi Auditor Internal Internal Auditor Conference	02 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 2, 2025 – July 4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Auditor Education Foundation (YPIA)
	Workshop	*Legal Awareness Training for Non-Legal Officers*: Aspek Fundamental Hukum Bisnis Internal Auditor Conference	24 April 2025 s.d. 25 April 2025 April 24, 2025 – April 25, 2025	Sekolah Tinggi Hukum Jantera / IFG Corpu Jantera College of Law / IFG Corporate University
	Workshop	*Finance for Non Finance*	17 Juli 2025 July 17, 2025	LPPL
	Webinar	*How to Achieve Peak Performance in 2025*	17 Januari 2025 January 17, 2025	OJK Institute
	Webinar	Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan Digital Transformation: Trends in Technological Innovation in the Financial Sector	23 Januari 2025 January 23, 2025	OJK Institute
	Webinar	Peran GRC dalam meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas Sektor Keuangan The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability	25 Februari 2025 February 25, 2025	OJK Institute
	Webinar	*Outlook* Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 Economic and Financial Outlook for 2025	20 Februari 2025 February 20, 2025	OJK Institute
	Webinar	Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia: Peran Strategis Bullion Bank Looking Ahead to the Future of Indonesia's Gold Market: The Strategic Role of Bullion Banks	17 April 2025 April 17, 2025	OJK Institute
Jihan Abigail (Staff Center of Excellence Audit Internal) (Staff, Center of Excellence for Internal Audit)	*Workshop*	*Communication Skills For Auditors: Interviewing And Negotiating*	16 April 2025 s.d. 17 April 2025 April 16, 2025 – April 17, 2025	IIA Indonesia
	Training Sertifikasi Training Certification	Pelatihan Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Certification Training	07 Juli 2025 s.d. 22 Juli 2025 July 7, 2025 – July 22, 2025	IIA Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
	Seminar	*Masterclass* Program Manajemen Risiko Risk Management Masterclass	03 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 3, 2025 – July 4, 2025	LSPMR Professional Certification Institute for Risk Management
	Workshop	*Finance for Non Finance* Finance for Non-Finance Professionals	10 Juli 2025 July 10, 2025	LPPL
	Workshop	Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis dan Elektronik Technical Training on Dynamic and Electronic Records Management	14 Juli 2025 s.d. 15 Juli 2025 July 14, 2025 – July 15, 2025	ANRI National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI)
	Workshop	Pelatihan *Awareness* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	28 Mei 2025 May 28, 2025	sustaIN
	Workshop	Pelatihan Internal Audit ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Awareness Training	01 Juli 2025 July 1, 2025	sustaIN
	Workshop	*Training Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness Training	15 Juli 2025 s.d. 16 Juli 2025 July 15, 2025 – July 16, 2025	Robere & Associates
	Webinar	*How to Achieve Peak Performance in 2025*	17 Januari 2025 January 17, 2025	OJK Institute
	Webinar	Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan Digital Transformation: Trends in Technological Innovation in the Financial Sector	23 Januari 2025 January 23, 2025	OJK Institute
Winda Anggraini (Staff Center of Excellence Audit Internal) (Staff, Center of Excellence for Internal Audit)	*Workshop*	*Communication Skills For Auditors: Interviewing And Negotiating*	16 April 2025 s.d. 17 April 2025 April 16, 2025 – April 17, 2025	IIA Indonesia
	Training Sertifikasi Training Certification	Pelatihan Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Certification Training	07 Juli 2025 s.d. 22 Juli 2025 July 7, 2025 – July 22, 2025	IIA Indonesia
	Seminar	*Masterclass* Program Manajemen Risiko Risk Management Masterclass Program	03 Juli 2025 s.d. 04 Juli 2025 July 3, 2025 – July 4, 2025	LSPMR Professional Certification Institute for Risk Management
	Webinar	Transformasi Digital: Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan Digital Transformation: Trends in Technological Innovation in the Financial Sector	23 Januari 2025 January 23, 2025	OJK Institute
	Webinar	Peran GRC dalam meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas Sektor Keuangan The Role of GRC in Enhancing Investor Confidence and Financial Sector Stability	25 Februari 2025 February 25, 2025	OJK Institute
	Webinar	*Outlook* Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 Economic and Financial Outlook for 2025	20 Februari 2025 February 20, 2025	OJK Institute

Rapat Unit Audit Internal

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal secara rutin menyelenggarakan rapat dengan fokus pada pelaksanaan audit (*assurance*) dan kegiatan konsultasi (*consultative management*) secara independen dan objektif. Rapat-rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola perusahaan, sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Internal Audit Unit Meetings

Throughout 2025, the Internal Audit Unit regularly held meetings with focusing on the independent and objective conduct of audits (assurance) and consultative management activities. These meetings aimed to evaluate the effectiveness of internal control systems, risk management, and corporate governance processes, while also formulating recommendations for necessary improvements.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal Tahun 2025

Pada tahun 2025, Unit Audit Internal menjalankan program kerja pengawasan, termasuk perencanaan, realisasi, serta dokumentasi temuan dan tindak lanjut dari hasil audit, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Brief Report on The Implementation of The Internal Audit Unit Duties in 2025

In 2025, the Internal Audit Unit conducted its supervisory work program, including planning, implementation, and documentation of findings and follow-up actions based on audit results, which is summarized as follows:

Departemen Audit
Audit Department

No	Program Kerja Work Program	RKAT 2025 2025 Work Plan	Realisasi Realization			
			TW I Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4
1	Pendampingan KAP Tahun 2025 KAP Assistance for 2025	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed	Sudah Selesai Completed
2	Pendampingan Auditor Eksternal External Auditor Assistance	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed	Sudah Selesai Completed
3	Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 Review of the 2025 Financial Statements	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress
4	Reviu Laporan PMN PMN Report Review	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
5	Reviu Kinerja Performance Review	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
6	Reviu Laporan Manajemen Management Report Review	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
7	Reviu P3DN P3DN Review	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress
8	Continuous Audit Biaya Continuous Cost Audit	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress
9	Monitoring Tindak Lanjut Dept. Audit Follow-Up Monitoring by the Audit Department	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
10	Audit Kinerja I Performance Audit I	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress
11	Audit Legal Legal Audit	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress
12	Audit Aktuaria Actuarial Audit	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress

Departemen Audit
Audit Department

No	Program Kerja Work Program	RKAT 2025 2025 Work Plan	Realisasi Realization			
			TW I Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4
13	Audit Kinerja II Performance Audit II	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress
14	Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress
15	Penilaian RMI RMI Assessment	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
16	Reviu Peringkat Komposit RMI RMI Composite Rating Review	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed	Sudah Selesai Completed
17	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Evaluation	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress
18	Penyusunan RKAT 2026 Dept. Audit Preparation of the 2026 RKAT for the Audit Department	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Complete
19	Reviu Implementasi IcoFR ICoFR Implementation Review	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress

Realisasi diisi dengan status: Belum Dilakukan, Sedang Berlangsung, Sudah Selesai
The "Realization" field is to be filled in with one of the following statuses: Not Started, In Progress, Completed

Departemen *Advisory* Pengendalian Internal
Internal Control Advisory Department

No	Program Kerja Work Program	RKAT 2025 2025 Work Plan	Realisasi Realization			
			TW I Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4
1	Evaluasi Digitalisasi Proses Bisnis Business Process Digitalization Evaluation	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress
2	*Whistleblowing System* (WBS)Terintegrasi Integrated Whistleblowing System (WBS)	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
3	Pendampingan KAP untuk Audit *Opening Balance Sheet* PSAK 117 KAP Assistance for the Opening Balance Sheet Audit under PSAK 117	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
4	Monitoring Tindak Lanjut Dept. Advisory Follow-up Monitoring by the Advisory Department	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
5	Evaluasi Data *Governance* Data Governance Evaluation	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress
6	Evaluasi Implementasi ERP Fase 2 Phase 2 ERP Implementation Evaluation	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress

Departemen *Advisory* Pengendalian Internal
Internal Control Advisory Department

No	Program Kerja Work Program	RKAT 2025 2025 Work Plan	Realisasi Realization			
			TW I Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4
7	Evaluasi *Vendor Management* Vendor Management Evaluation	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed	Sudah Selesai Completed
8	Evaluasi *Fraud Control Plan* (FCP)/Strategi *Anti-Fraud* Evaluation of the Fraud Control Plan (FCP) / Anti-Fraud Strategy	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
9	*Workshop* Tematik Thematic Workshop	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
10	*Advisory* Penyusunan RKAP Tahun 2026 Advisory on the Preparation of the 2026 Annual Budget Plan	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
11	Penyusunan RKAT 2026 Preparation of the 2026 RKAT	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed

Realisasi diisi dengan status: Belum Dilakukan, Sedang Berlangsung, Sudah Selesai
The "Realization" field is to be filled in with one of the following statuses: Not Started, In Progress, Completed

Departemen Center of Excellence Audit Internal
Internal Audit Center of Excellence Department

No	Program Kerja Work Program	RKAT 2025 2025 Work Plan	Realisasi Realization			
			TW I Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4
1	Penyusunan laporan SKAI Terintegrasi Preparation of the Integrated SKAI Report	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
2	Penyusunan laporan audit intern triwulanan untuk KBUMN dan SKAIT untuk OJK Preparation of quarterly internal audit reports for Ministry of SOEs and SKAIT for FSA	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
3	Penyusunan laporan triwulan SKAI Preparation of SKAI quarterly reports	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
4	Penyusunan laporan tahunan SKAI Preparation of SKAI's annual report	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Not Started	Sudah Selesai Not Started	Sudah Selesai Completed
5	Pelaksanaan monitoring tindak lanjut audit internal dan eksternal Implementation of follow-up monitoring of internal and external audits	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed

Departemen Center of Excellence Audit Internal
Internal Audit Center of Excellence Department

No	Program Kerja Work Program	RKAT 2025 2025 Work Plan	Realisasi Realization			
			TW I Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4
6	Pelaksanaan forum komunikasi SKAIT dengan anggota *holding* SKAIT Communication Forum with Holding Company Members	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
7	Pelaksanaan forum komunikasi dengan Direktur Utama/Komite Audit Communication forum with the President Director/ Audit Committee	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
8	Penyediaan infrastruktur pendukung penugasan Provision of infrastructure to support assignments	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
9	Monitoring dan evaluasi penggunaan *Audit Management System* (AMS) Monitoring and Evaluation of the Audit Management System (AMS)	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
10	Pelaksanaan *quality assurance* (penilaian *ongoing* monitoring) terhadap penugasan audit dan reviu Conducting quality assurance (ongoing monitoring assessment) for audit and review engagements	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress
11	Pekerjaan administrasi Administrative work	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
12	Menyusun Buku RKAT Terintegrasi 2025 Compiling the 2025 Integrated RKAT Book	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed	Sudah Selesai Completed	Sudah Selesai Completed
13	Peningkatan kompetensi auditor Auditor Competency Development	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
14	Revisi Kebijakan audit internal Revision of Internal Audit Policy	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sedang Berlangsung In Progress
15	Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan RKAP 2026 Departemen CoE Preparing the Annual Audit Work Plan (RKAT) and the 2026 CoE Department Budget Plan (RKAP)	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed
16	Menyusun RKAP 2026 konsolidasi Divisi Preparing the 2026 Consolidated Division Budget Plan	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress	Sudah Selesai Completed

Departemen Center of Excellence Audit Internal
Internal Audit Center of Excellence Department

No	Program Kerja Work Program	RKAT 2025 2025 Work Plan	Realisasi Realization			
			TW I Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4
17	Mengoordinasi penyelarasan RKAT 2026 antara *holding*, Anak dan Cucu Perusahaan Coordinating the alignment of the 2026 RKAT between the holding company, subsidiaries, and grand subsidiaries	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sudah Selesai Completed
18	Menyusun Buku RKAT 2026 SKAI IFG Compiling the 2026 SKAI IFG Budget Plan	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress
19	Penyusunan petunjuk teknis standardisasi format dokumentasi penugasan dan laporan SKAI Development of technical guidelines for standardizing the format of assignment documentation and SKAI reports	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started
20	Pelaksanaan *assessment* penilaian kapabilitas organisasi SKAI (*Self Assessment* IACM) Conducting the SKAI (IACM Self-Assessment) organizational capability assessment	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress
21	Pelaksanaan QAIP (BPKP) Implementation of QAIP (BPKP)	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Belum Dilakukan Not Started	Sedang Berlangsung In Progress

Realisasi diisi dengan status: Belum Dilakukan, Sedang Berlangsung, Sudah Selesai
The "Realization" field is to be filled in with one of the following statuses: Not Started, In Progress, Completed

Status Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi yang menjadi objek pemantauan Unit Audit Internal (SKAI) mencakup hasil temuan dari audit internal SKAI serta audit eksternal yang dilakukan oleh BPK RI, BPKP, KAP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Status implementasi rekomendasi beserta tindak lanjutnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Status of Recommendations and Follow-Up

Recommendations subject to monitoring by the Internal Audit Unit (SKAI) include findings from SKAI's internal audits as well as external audits conducted by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI), the Financial and Development Supervision Agency (BPKP), public accounting firms (KAP), and the Inspector General's Office of the Ministry of Finance (Itjen Kemenkeu). The status of recommendation implementation and follow-up as of December 31, 2025, is as follows:

Audit	**Total Rekomendasi** Total Recommendations	**Total Selesai** Total Completed				**Total Belum Jatuh Tempo** Total Not Yet Due		**Total *Outstanding*** Total Outstanding	
		Closed	**%**	**TDD**	**%**	**Jumlah** Total	**%**	**Jumlah** Total	**%**
BPK 2019 BPK Audit (2019)	34	33	97%	0	0%	0	0%	1	3%
BPK 2021 BPK Audit (2021)	11	8	73%	0	0%	0	0%	3	27%
BPK 2024 BPK Audit (2024)	141	0	0%	0	0%	0	0%	141	100%
KAP 2020 Public Accounting Firm Audit (2020)	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
KAP 2021 Public Accounting Firm Audit (2021)	7	6	86%	0	0%	0	0%	1	14%
KAP 2022 Public Accounting Firm Audit (2022)	5	4	80%	0	0%	0	0%	1	20%
KAP 2023 Public Accounting Firm Audit (2023)	15	7	47%	0	0%	0	0%	8	53%
KAP 2024 Public Accounting Firm Audit (2024)	7	0	0%	0	0%	7	100%	0	0%
BPKP 2023 BPKP Audit (2023)	59	7	12%	0	0%	0	0%	52	88%
BPKP 2024 BPKP Audit (2024)	98	35	36%	0	0%	63	64%	0	0%
Itjen Kemenkeu Inspectorate General of the Ministry of Finance	30	25	83%	0	0%	0	0%	5	17%
OJK Financial Services Authority (OJK)	55	0	0%	0	0%	50	91%	5	9%

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK
EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANTS

Pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilaksanakan melalui Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Akuntan Publik bertindak sebagai pihak eksternal yang memberikan opini mengenai kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2025 telah dijalankan oleh Akuntan Publik yang bersifat independen, memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi, serta bertindak secara objektif, sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, perjanjian kerja, dan lingkup audit yang telah ditetapkan.

Independent supervisory of the Company's financial aspects is performed through an External Audit conducted by a Public Accounting Firm (KAP). The Public Accountant acts as an external party that provides an opinion on the compliance of the Company's Financial Statements with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. The audit of the Company's Financial Statements for the 2025 fiscal year was conducted by an independent Public Accountant who possesses high competence and professionalism and acts objectively, in accordance with the Professional Standards for Public Accountants, the engagement agreement, and the established scope of the audit.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Proses pemilihan dan penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang bertanggung jawab memeriksa laporan keuangan Perusahaan dilakukan melalui RUPS Tahunan, dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Seleksi auditor ini dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan.

Perusahaan memastikan bahwa auditor eksternal yang ditunjuk bebas dari benturan kepentingan, sehingga independensi dan kualitas hasil audit dapat terjaga. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, sebagai bagian dari penerapan prinsip governansi yang baik di lingkungan Perusahaan.

MECHANISM FOR APPOINTING A PUBLIC ACCOUNTANT

The process of selecting and appointing a Public Accounting Firm as the external auditor responsible for auditing the Company's financial statements is conducted through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), taking into account input from the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection of the auditor is performed through the Company's applicable procurement procedures for goods and services.

The Company ensures that the appointed external auditor is free from conflicts of interest, so that the independence and quality of the audit results can be maintained. The appointment of a Public Accounting Firm is performed in accordance with the provisions of POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, as part of the implementation of good governance principles within the Company.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2025

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan suatu entitas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dibatasi paling lama selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada tahun 2025 IFG menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 658/DPA/BPUI/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025, yang telah memperoleh persetujuan PT Danantara Asset Management (Persero) melalui Surat Nomor SR.161/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 September 2025.

PUBLIC ACCOUNTANTS IN 2025

Pursuant to Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008, on Public Accounting Services, Article 3, Paragraph 1 states that the provision of audit services for an entity's financial statements by a Public Accounting Firm (KAP) is limited to a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years.

In line with these provisions, in 2025, IFG appointed Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) pursuant to Appointment Letter No. 658/DPA/BPUI/X/2025 dated October 8, 2025. The appointment was approved by PT Danantara Asset Management (Persero) through Letter No. SR.161/DI-DAM/DO/2025 dated September 30, 2025.

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) bertugas untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2025 beserta Anak Perusahaan IFG termasuk audit *opening balance* atas implementasi PSAK 117 dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2025.

Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM) was engaged to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, including those of IFG's Subsidiaries, as well as to conduct an audit of the opening balance in connection with the implementation of PSAK 117 and the Annual Report on the Implementation of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program for the 2025 Fiscal Year.

Akuntan Publik Tahun 2025
Public Accountant for 2025

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)** Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM)
Nomor Izin KAP Public Accounting Firm License Number	477/KM.1/2025
Akuntan Accountant	Dedy Sukrisnadi
Nomor Izin Akuntan Publik Public Accountant License Number	AP.0645
Tahun Audit Audit Year	2025
Periode Penugasan Assignment Period	10 Oktober 2025 – 24 April 2026 (*addendum* perpanjangan periode penugasan masih dalam proses) October 10, 2025 – April 24, 2026 (addendum extending the assignment period is still in process)
Jasa Services	Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2025 General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year
Jasa Lainnya Other Services	• Audit *Opening Balance* atas Implementasi PSAK 117 • Pengujian dan pelaporan atas kepatuhan IFG terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan PSA No. 62 • Audit umum atas Laporan Keuangan TJSL untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 • Audit of the Opening Balance upon the Implementation of PSAK 117 • Testing and reporting on IFG's compliance with applicable laws and regulations pursuant to PSA No. 62 • General Audit of the TJSL Financial Statements for the year ended December 31, 2025
Biaya Fees	• Audit Umum 2025 : Rp6.930.000.000 • Audit *Opening Balance* PSAK 117 : Rp23.281.509.261 Biaya di atas termasuk jasa profesi penunjang, out-of-pocket expenses tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% serta akan dipotong PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2% dan pajak-pajak lainnya (bila ada) sesuai ketentuan yang berlaku. • 2025 General Audit: IDR 6,930,000,000 • PSAK 117 Opening Balance Audit: IDR 23,281,509,261 The above fees include supporting professional services and out-of-pocket expenses, but exclude 11% Value Added Tax (VAT). The fees are subject to a 2% withholding tax under Article 23 of the Income Tax Law (PPh Article 23) on services and other taxes (if any), in accordance with applicable regulations.

AKUNTAN PUBLIK DAN BIAYA PERIODE 6 (ENAM) TAHUN TERAKHIR

Dalam rangka memastikan profesionalisme dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal setiap tahunnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya diperbolehkan melaksanakan audit selama maksimal enam tahun buku secara berturut-turut, sedangkan Akuntan Publik (*Partner*) dibatasi hingga tiga tahun buku berturut-turut.

PUBLIC ACCOUNTANTS AND FEES FOR THE LAST 6 (SIX) YEARS

To ensure professionalism and independence, the selection of an External Auditor is conducted annually in accordance with the provisions of Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008, concerning Public Accounting Services. This regulation stipulates that each Public Accounting Firm (KAP) is only permitted to conduct audits for a maximum of six consecutive fiscal years, while a Public Accountant (Partner) is limited to three consecutive fiscal years.

Berikut disajikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan yang bertugas, serta biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perusahaan selama 6 (enam) tahun terakhir, sebagai bagian dari penerapan praktik governansi yang baik.

The following is a list of Public Accounting Firms, the assigned accountants, and the costs incurred for auditing the Company's financial statements over the past 6 (six) years, as part of the implementation of good governance practices.

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Akuntan** Accountant	**Opini** Opinion	**Biaya (Rp)** Fee (IDR)
2025	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM)	Dedy Sukrisnadi	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	30.211.509.261*)
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM Indonesia)	Dedy Sukrisnadi	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	5.150.000.000
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.EC.,CPA	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	7.150.000.000
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.EC.,CPA	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	3.300.000.000
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.EC.,CPA	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	1.900.000.000
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.EC.,CPA	Wajar dalam semua hal yang material Fair in All Material Respects	2.547.000.000

*) Biaya jasa termasuk biaya Audit Opening Balance Implementasi PSAK 117
*) Service fees include the cost of the opening balance audit for the implementation of PSAK 117

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal yang kuat memegang peran krusial dalam melindungi investasi dan aset Perusahaan, mencakup pengendalian prosedural (*tangible*) maupun pengendalian substansi (*intangible*). Sistem ini dirancang untuk memantau serta memastikan seluruh kegiatan bisnis berjalan selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan ketika terdapat penyimpangan, sekaligus menjamin keandalan laporan dan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi operasional, serta keamanan aset perusahaan.

A robust Internal Control System plays a crucial role in protecting the Company's investments and assets, encompassing both procedural (tangible) and substantive (intangible) controls. This system is designed to monitor and ensure that all business activities align with established strategies. Additionally, the Internal Control System serves to provide recommendations for improvements when deviations occur, while also ensuring the reliability of reports and information, compliance with regulations, operational efficiency, and the security of the Company's assets.

Sebagai organ yang memimpin pengelolaan operasional Perusahaan, Direksi bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan penerapan sistem pengendalian internal serta manajemen risiko di seluruh lini dan aspek bisnis perusahaan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara.

As the organ leading the Company's operational management, the Board of Directors is responsible for ensuring the availability and implementation of the internal control system and risk management across all lines and aspects of the Company's business. The implementation of this internal control system is based on Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN COSO

Perusahaan mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pengendalian internal yang berlandaskan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Kerangka kerja terintegrasi ini dirancang untuk mendukung Perusahaan dalam membangun, memelihara, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengendalian internal, sekaligus mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan dalam lingkungan bisnis dan operasional.

Unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Aktivitas Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Kegiatan Pemonitoran.

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu rangkaian proses pengendalian yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Direksi dan jajaran manajemen, dengan tujuan memberikan tingkat keyakinan yang memadai atas pencapaian visi, misi, sasaran, dan target strategis Perusahaan.

ALIGNMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH THE COSO

The Company implements internal control policies and mechanisms based on the Internal Control Integrated Framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations (COSO). This integrated framework is designed to support the Company in establishing, maintaining, and improving the effectiveness and efficiency of internal controls, while also enabling it to adapt to the dynamics of change in the business and operational environment.

According to COSO, the elements of internal control consist of 5 (five) components, namely:
1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring Activities.

The Internal Control System is a series of control processes carried out on an ongoing basis by the Board of Directors and management, with the aim of providing a reasonable level of assurance regarding the achievement of the Company's vision, mission, objectives, and strategic targets.

HASIL REVIU EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

IFG secara berkelanjutan melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian yang diterapkan oleh manajemen di seluruh tingkatan organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen pengendalian internal beroperasi secara terpadu dan efektif. Selanjutnya, manajemen menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh SKAI. Evaluasi dari SKAI disampaikan kepada manajemen, yang kemudian bertanggung jawab untuk memastikan implementasi dan pemantauan tindak lanjut, sehingga sistem pengendalian internal tetap memadai dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis Perusahaan.

PERNYATAAN ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Hasil evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa sistem tersebut berfungsi secara optimal. Dewan Komisaris bersama Komite Audit, dalam koordinasi dengan Direksi, menegaskan bahwa penerapan pengendalian internal berada dalam kerangka risiko yang terkendali dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

INTEGRITAS PELAPORAN MELALUI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF

IFG menempatkan keandalan, konsistensi, dan kredibilitas pelaporan sebagai prioritas utama dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pimpinan Perusahaan, melalui peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi, memastikan bahwa seluruh proses penyusunan laporan keuangan, laporan tahunan, serta pengungkapan keberlanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengendalian internal yang komprehensif dan berbasis risiko. Perusahaan secara berkelanjutan menyempurnakan kerangka *internal control system* yang mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan laporan, hingga pengungkapan informasi kepada publik. Pengendalian ini didukung oleh kebijakan dan prosedur yang terstandardisasi, pemisahan fungsi yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan data keuangan maupun nonkeuangan.

RESULTS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS REVIEW

IFG continuously reviews the implementation of the control system applied by management at all levels of the organization. This activity aims to ensure that every element of internal control operates in an integrated and effective manner. Furthermore, management demonstrates a commitment to continuously improving the effectiveness of the internal control system, including following up on the results of monitoring conducted by SKAI. Evaluations from SKAI are submitted to management, which is then responsible for ensuring the implementation and monitoring of follow-up actions, so that the internal control system remains adequate in supporting the achievement of the Company's strategic objectives and goals.

STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The results of the evaluation of the effectiveness of the internal control system indicate that the system is functioning optimally. The Board of Commissioners, together with the Audit Committee and in coordination with the Board of Directors, confirms that the implementation of internal controls is within a framework of controlled risk and in accordance with established standards.

REPORTING INTEGRITY THROUGH EFFECTIVE SUPERVISORY AND CONTROLS

IFG prioritizes the reliability, consistency, and credibility of reporting as key elements of sound corporate governance practices. Company leadership, through the active involvement of the Board of Commissioners and the Board of Directors, ensures that all processes related to the preparation of financial statements, annual reports, and sustainability disclosures are conducted in an integrated, transparent, and accountable manner.

This approach is realized through the strengthening of a comprehensive, risk-based internal control system. The Company continuously refines its internal control framework, which covers all business processes—from transaction recording and report preparation to public disclosure of information. These controls are supported by standardized policies and procedures, adequate segregation of duties, and the use of information technology to enhance the accuracy, timeliness, and reliability of both financial and non-financial data.

Dalam rangka memastikan konsistensi dan kredibilitas pelaporan, IFG juga mengimplementasikan mekanisme *assurance* berlapis yang melibatkan fungsi audit internal, pengawasan oleh Komite Audit, serta pemeriksaan oleh auditor eksternal independen. Fungsi audit internal berperan dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan, sementara Komite Audit secara aktif melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan proses pelaporannya. Di sisi lain, keterlibatan auditor eksternal memberikan keyakinan independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam konteks pengungkapan keberlanjutan, Perusahaan memperkuat kualitas pelaporan melalui penerapan standar dan kerangka kerja *Environmental, Social, and Governance* (*ESG*) yang relevan, serta peningkatan kualitas data dan metodologi pengukuran kinerja keberlanjutan. Proses ini didukung oleh mekanisme verifikasi internal dan, secara bertahap, pengembangan *independent assurance* untuk memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disampaikan memiliki tingkat keandalan dan kredibilitas yang setara dengan pelaporan keuangan.

Pimpinan Perusahaan juga memastikan efektivitas fungsi pengawasan melalui penguatan peran Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, khususnya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, dalam melakukan monitoring atas integritas proses pelaporan. Rapat evaluasi dilakukan secara berkala untuk menelaah kualitas laporan, mengidentifikasi potensi risiko pelaporan, serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit. Selain itu, Direksi secara aktif memantau implementasi pengendalian internal dan mendorong budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.

Untuk meningkatkan transparansi, IFG terus memperkuat praktik keterbukaan informasi melalui penyampaian laporan yang tepat waktu, relevan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kinerja operasional, risiko, serta inisiatif keberlanjutan, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi dan prospek Perusahaan.

Melalui sinergi antara sistem pengendalian internal yang andal, mekanisme *assurance* yang efektif, serta pengawasan yang kuat, IFG memastikan bahwa seluruh proses pelaporan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kualitas pelaporan Perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Sejalan dengan penguatan sistem pengendalian internal, IFG juga menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dimitigasi secara tepat. Dengan demikian, pengendalian internal dan manajemen risiko menjadi dua pilar utama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis serta menjaga keberlanjutan usaha Perusahaan

To ensure the consistency and credibility of its reporting, IFG also implements a multi-layered assurance mechanism involving the internal audit function, oversight by the Audit Committee, and reviews by independent external auditors. The internal audit function evaluates the effectiveness of internal controls and compliance with policies, while the Audit Committee actively reviews the financial statements and the reporting process. Meanwhile, the involvement of external auditors provides independent assurance regarding the fair presentation of financial statements in accordance with applicable accounting standards.

Furthermore, in the context of sustainability disclosure, the Company enhances the quality of its reporting through the implementation of relevant Environmental, Social, and Governance (ESG) standards and frameworks, as well as by improving the quality of data and methodologies for measuring sustainability performance. This process is supported by internal verification mechanisms and, gradually, the development of independent assurance to ensure that the sustainability information disclosed has a level of reliability and credibility equivalent to that of financial reporting.

The Company's leadership also ensures the effectiveness of oversight functions by strengthening the role of the Board of Commissioners and its supporting organs—particularly the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee—in monitoring the integrity of the reporting process. Evaluation meetings are held periodically to review the quality of reports, identify potential reporting risks, and ensure follow-up on audit findings. In addition, the Board of Directors actively monitors the implementation of internal controls and promotes a culture of compliance throughout the organization.

To enhance transparency, IFG continues to strengthen its information disclosure practices by providing reports that are timely, relevant, and easily accessible to stakeholders. Information disclosure covers not only financial aspects but also operational performance, risks, and sustainability initiatives, thereby providing a comprehensive picture of the Company's condition and prospects.

Through the synergy between a reliable internal control system, effective assurance mechanisms, and robust oversight, IFG ensures that all reporting processes are carried out in accordance with the principles of integrity, transparency, and accountability. This approach not only enhances the quality of the Company's reporting but also builds stakeholder trust, which ultimately supports the creation of sustainable long-term value. In line with the strengthening of its internal control system, IFG also implements integrated risk management to ensure that all strategic, operational, financial, compliance, and reputational risks are properly identified, measured, monitored, and mitigated. Thus, internal control and risk management serve as the two main pillars in supporting the achievement of strategic objectives and maintaining the Company's business sustainability.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, IFG menyadari bahwa berbagai jenis risiko baik yang dapat dikontrol maupun yang berada di luar kendali Perusahaan memiliki potensi memengaruhi pencapaian kinerja dan hasil usaha. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi elemen krusial untuk mengelola risiko secara efektif, efisien, dan konsisten, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

In carrying out its operations, IFG recognizes that various types of risks—both those within and beyond the Company's control—have the potential to affect its performance and business results. Therefore, the implementation of comprehensive risk management is a crucial element for managing risks effectively, efficiently, and consistently, in line with the principles of good corporate governance

KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Manajemen risiko menjadi unsur yang melekat dalam seluruh proses bisnis, di mana setiap aktivitas dan keputusan membawa potensi risiko yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas Perusahaan. Dalam operasionalnya, IFG berkomitmen untuk mengelola risiko secara terstruktur, efektif, dan efisien demi menjamin keberlanjutan usaha. Pendekatan yang diterapkan mencakup pengelolaan risiko secara proaktif, prioritas pada risiko utama, serta pengawasan terhadap mekanisme pengendalian risiko. IFG terus memperkuat dan memelihara sistem manajemen risiko yang terintegrasi dalam kerangka tata kelola perusahaan, guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko di IFG didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik manajemen risiko yang diakui secara luas dan dapat diterapkan secara efisien. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, langkah-langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi dampak risiko, seperti melalui program asuransi yang relevan maupun penyusunan kontrak yang memberikan perlindungan hukum. Pendekatan ini memastikan risiko dapat dideteksi secara dini dan mitigasi dilakukan secara tepat, sehingga stabilitas dan kinerja perusahaan tetap terjaga.

COMPANY RISK MANAGEMENT POLICY

Risk management is an integral part of all business processes, as every activity and decision carries potential risks that can significantly impact the Company's stability. In its operations, IFG is committed to managing risks in a structured, effective, and efficient manner to ensure business sustainability. The approach adopted includes proactive risk management, prioritization of key risks, and oversight of risk control mechanisms. IFG continues to strengthen and maintain an integrated risk management system within the framework of corporate governance to support the achievement of established performance targets.

The implementation and development of risk management at IFG are based on the principles of good corporate governance as well as widely recognized risk management practices that can be efficiently applied. The company is responsible for identifying potential risks, whether arising from internal or external factors. Based on the results of this identification, mitigation measures are implemented to reduce the impact of risks, such as through relevant insurance programs or the drafting of contracts that provide legal protection. This approach ensures that risks can be detected early and mitigated appropriately, thereby maintaining the company's stability and performance.

PEJABAT MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SK-DIR/BPUI/SDM/IV/2020 tanggal 29 April 2020, IFG telah menunjuk 1 (satu) orang Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan.

RISK MANAGEMENT OFFICER

Pursuant to Board of Directors Decree No. 007/SK-DIR/BPUI/SDM/IV/2020 dated April 29, 2020, IFG has appointed 1 (one) Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division.

Sariniatun
Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan
Menjabat sejak 2 Oktober 2023
Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division
Has served since October 2, 2023

Data Pribadi Personal Data	Warga negara Indonesia Usia 55 tahun Indonesian citizen Age 55 years old
Domisili Domicile	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Educational Background	• S2 – Keuangan, Universitas Gadjah Mada • S1 – Matematika, Universitas Gadjah Mada • Master's Degree – Finance, Gadjah Mada University • Bachelor's Degree – Mathematics, Gadjah Mada University
Pengalaman Kerja Work Experience	• BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Direktur Analisis Portofolio (2021 – 2023) • PT Taspen (Persero), Kepala Divisi/Senior Advisor Manajemen Risiko & Financial Modeling (2019 – 2021) • PT Zurich Topas Life, Kepala Manajemen Risiko Operasional dan Enterprise (2016 – 2019) • PT Great Eastern Life, Kepala Divisi/Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan (2012 – 2015) • PT BNI Life, Kepala Divisi Manajemen Risiko (2009 – 2012) • PT BNI Life, Kepala Unit Bisnis Syariah (2010 – 2011) • PT BNI Securities, Kepala Divisi Manajemen Risiko (2005 – 2009) • PT Bank BNI, Manager, Hubungan Investor (2003 – 2005) • PT BNI Life, Fund Manager (2003 – 2003) • PT Bank BNI, Assistant Manager, Analis Keuangan Senior (1996 – 2003) • PT Astra International, Analis Keuangan (1995 – 1996) • BPJS Ketenagakerjaan, Deputy Director of Portfolio Analysis (2021–2023) • PT Taspen (Persero), Division Head/Senior Advisor for Risk Management & Financial Modeling (2019–2021) • PT Zurich Topas Life, Head of Operational and Enterprise Risk Management (2016–2019) • PT Great Eastern Life, Division Head/Director of Risk Management and Compliance (2012–2015) • PT BNI Life, Head of the Risk Management Division (2009–2012) • PT BNI Life, Head of the Sharia Business Unit (2010–2011) • PT BNI Securities, Head of the Risk Management Division (2005–2009) • PT Bank BNI, Manager, Investor Relations (2003–2005) • PT BNI Life, Fund Manager (2003–2003) • PT Bank BNI, Assistant Manager, Senior Financial Analyst (1996–2003) • PT Astra International, Financial Analyst (1995–1996)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola manajemen risiko memberikan masukan dan pertimbangan strategis bagi pengambilan keputusan, khususnya terkait pekerjaan atau proyek baru yang belum pernah dijalankan oleh Perusahaan, serta seluruh aktivitas yang berlangsung di berbagai unit kerja.

Adapun ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perusahaan, pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan perusahaan, serta pengelolaan manajemen risiko sebagai lini kedua dalam tata kelola risiko Perusahaan;
2. Melakukan penyelarasan, reviu, pemantauan dan evaluasi berkala atas program kerja dan kebijakan anak perusahaan pada bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
3. Memastikan penyusunan rencana kerja perusahaan baik RKAP maupun RJPP anak perusahaan pada bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan agar selaras dengan arahan strategis IFG;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In performing their duties, risk management personnel provide strategic input and considerations for decision-making, particularly regarding new work or projects that the Company has not previously undertaken, as well as all activities taking place across various business units.

The scope of duties and responsibilities of the Risk Management, Compliance, and Policy Division is outlined as follows

1. Responsible for synchronizing and harmonizing corporate policies, implementing and monitoring corporate compliance, and managing risk as the second line of defense in the Company's risk governance framework;
2. Conducting periodic alignment, review, monitoring, and evaluation of the work programs and policies of the Company's sub s in the areas of risk management, compliance, and policy;
3. Ensuring that the preparation of the company's work plans—including both the Annual Business Plan (RKAP) and the Long-Term Business Plan (RJPP) of subsidiaries—in the areas of risk management, compliance, and policy aligns with IFG's strategic direction;

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan RJPP dan RKAP anak perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS pada bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;

5. Melakukan pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP dan RKAP anak perusahaan berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis pada bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan kebijakan;
6. Menyusun, melakukan pemantauan, dan melakukan sosialisasi atas strategi manajemen risiko di perusahaan yang mencakup *risk capacity, risk tolerance, risk appetite*, dan *risk limit* dengan melibatkan *risk owner* yang selaras dengan arahan pemegang saham untuk disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko di perusahaan yang telah disetujui oleh Direksi;

8. Memantau profil risiko, peta risiko, realisasi perhitungan risiko *inheren* dan risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya baik secara individual perusahaan maupun secara terintegrasi yang melibatkan *risk owner* dan anak perusahaan, serta melaporkannya kepada Wakil Direktur Utama dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
9. Melakukan *stress testing* dan *internal control testing*;
10. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko di Perusahaan;
11. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko di perusahaan;
12. Memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau Komite Pemantau Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki di Perusahaan;
13. Menyusun dan menyampaikan laporan manajemen risiko Perusahaan kepada Wakil Direktur Utama dan Komite Pemantau Risiko secara berkala triwulan; Kebijakan;

14. Menyusun ketentuan terkait manajemen risiko Perusahaan termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
15. Memastikan dan melaksanakan program peningkatan budaya sadar risiko di Perusahaan;
16. Melakukan pemantauan risiko pada konglomerasi keuangan berdasarkan hasil penilaian profil risiko, uji ketahanan (*stress testing*), dan uji pengendalian internal (*internal control testing*);
17. Melaksanakan kaji ulang manajemen risiko di perusahaan untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, serta ketepatan ketentuan manajemen risiko dan penetapan limit risiko;

18. Mengkaji risiko dan kepatuhan terkait usulan produk baru, aksi korporasi, dan aktivitas lainnya yang bersifat strategis dan berdampak signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan;

4. Conducting periodic monitoring and evaluation of the implementation of subsidiaries' RJPP and RKAP, which have been approved by the General Meeting of Shareholders, in the areas of risk management, compliance, and policy;
5. Monitoring and evaluating the achievement of subsidiaries' RJPPs and RKAPs based on needs and strategic plans in the areas of risk management, compliance, and policy;
6. Developing, monitoring, and disseminating the company's risk management strategy—which includes risk capacity, risk tolerance, risk appetite, and risk limits—in collaboration with risk owners, in accordance with shareholder directives, for approval by the Board of Directors and the Board of Commissioners;
7. Monitoring the implementation of the company's risk management strategy as approved by the Board of Directors;
8. Monitoring the risk profile, risk map, the calculation of inherent and residual risks, and the implementation of risk treatments and associated costs—both on an individual company basis and in an integrated manner involving risk owners and subsidiaries—and report these to the Vice President Director and the Integrated Risk Management Committee;
9. Conducting stress testing and internal control testing;
10. Periodically reviewing the Company's risk management processes;
11. Evaluating the accuracy of models and the validity of data used to measure risk within the Company;
12. Providing recommendations to the first line of defense and/or the Risk Monitoring Committee in accordance with the Company's established authority;
13. Preparing and submitting the Company's risk management reports to the Vice President Director and the Risk Monitoring Committee on a quarterly basis; Policy
14. Developing provisions related to the Company's risk management, including developing procedures and tools for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks;
15. Ensuring and implementing programs to foster a risk-aware culture within the Company;
16. Monitoring risks within the financial conglomerate based on the results of risk profile assessments, stress testing, and internal control testing;

17. Conducting risk management reviews within the company to ensure the accuracy of risk assessment methodologies, the adequacy of the implementation of the risk management information system, and the appropriateness of risk management provisions and risk limit setting;
18. Assessing risks and compliance related to new product proposals, corporate actions, and other activities that are strategic in nature and have a significant impact on the financial conglomerate's risk exposure;

19. Melaksanakan dan melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi kepatuhan serta kepatuhan terintegrasi di perusahaan dan/atau anak perusahaan sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam peraturan mengenai konglomerasi keuangan;
20. Melakukan inisiatif guna mendukung terciptanya budaya kepatuhan di setiap unit kerja di Perusahaan ;
21. Membuat dan/atau melakukan reviu atas *checklist* kepatuhan;
22. Memastikan Direksi dan seluruh unit kerja di perusahaan mendapatkan informasi mengenai peraturan perundangan-undangan dan regulasi baru atau perubahannya yang relevan dengan usaha Perusahaan;
23. Melakukan pemantauan laporan berkala kepada regulator sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan regulasi yang berlaku;
24. Melakukan pendampingan, reviu, penyelarasan dan memberikan rekomendasi atas penyusunan pedoman, kebijakan, prosedur, dan petunjuk teknis di seluruh unit kerja Perusahaan;
25. Melakukan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu serta sistem manajemen anti penyuapan di perusahaan;
26. Memberikan dukungan kepada divisi pemilik pedoman strategis dalam melakukan implementasi pedoman strategis; dan
27. Menyusun, melakukan reviu, dan/atau melakukan evaluasi pedoman strategis kepatuhan dan pedoman strategis manajemen risiko yang berlaku di Perusahaan dan anak perusahaan.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN, DAN KEBIJAKAN

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan dilakukan oleh Direktur Utama, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN RISIKO

IFG secara konsisten menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh personel Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan dengan pendekatan sistematis dan berjenjang, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di divisi tersebut. Program ini mencakup partisipasi personel dalam berbagai kegiatan sertifikasi profesional. Berikut ini disajikan daftar staf Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan yang telah mengikuti program sertifikasi sepanjang tahun 2025:

19. Implementing and monitoring the execution of compliance functions and integrated compliance within the company and/or its subsidiaries in accordance with the obligations set forth in regulations regarding financial conglomerates;
20. Conducting initiatives to foster a culture of compliance in every work unit within the Company;
21. Developing and/or reviewing compliance checklists;
22. Ensuring that the Board of Directors and all work units within the Company receive information regarding new laws, regulations, or amendments relevant to the Company's business;
23. Monitoring periodic reporting to regulators in accordance with applicable laws and regulations;
24. Providing guidance, reviewing, aligning, and making recommendations on the development of guidelines, policies, procedures, and technical instructions across all the Company's business units;
25. Reviewing and evaluating the implementation of the quality management system and the anti-bribery management system within the company;
26. Providing support to the divisions responsible for strategic guidelines in implementing those guidelines; and
27. Drafting, reviewing, and/or evaluating the strategic compliance guidelines and strategic risk management guidelines applicable to the Company and its subsidiaries.

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING THE HEAD OF THE RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE, AND POLICY DIVISION

The appointment and dismissal of the Head of the Risk Management, Compliance, and Policy Division are performed by the President Director, with prior approval from the Board of Commissioners.

RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL CERTIFICATION

IFG consistently conducts competency development programs for all personnel in the Risk Management, Compliance, and Policy Division using a systematic and tiered approach, aimed at improving the quality and capacity of human resources within the division. This program includes staff participation in various professional certification activities. The following is a list of staff from the Risk Management, Compliance, and Policy Division who have participated in certification programs throughout 2025:

Sertifikasi Profesi Professional Certifications	**Jumlah** Total
PECB ISO 370001 Lead Auditor	1
Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 Level 4 Banking Risk Management Certification	1
Sertifikasi Certified Compliance Professional (CCP)	1
Certified in General Insurance	2
Certified in Life Insurance	6

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2025, IFG melibatkan Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Kebijakan dalam berbagai program pengembangan kompetensi. Rincian kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh divisi ini disajikan sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2025, IFG involved the Risk Management, Compliance, and Policy Division in various competency development programs. Details of the competency development activities participated in by this division are presented as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	18 - 19 Februari 2025 February 18–19, 2025	PMLI
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Problem Solving & Decision Making	14 - 15 April 2025 April 14–15, 2025	PPM Manajemen
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Local Content Level (TKDN)	16 - 17 Oktober 2025 October 16–17, 2025	IFG Corporate University
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Implementasi Business Continuity Management System (BCMS) sesuai dengan ISO 22301:2019 dan Iso 22313:2020 Implementation of the Business Continuity Management System (BCMS) in accordance with ISO 22301:2019 and ISO 22313:2020	24 - 25 Oktober 2025 October 24–25, 2025	BCM Indonesia
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Dasar Bisnis Capital Market dan Investasi Fundamentals of Capital Markets and Investment	3 - 4 November 2025 November 3–4, 2025	TICMI
Ahmad Iwan - Senior Officer Manajemen Risiko Ahmad Iwan - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Training Tableau Desktop Fundamental Tableau Desktop Fundamentals Training	15 Januari 2025 January 15, 2025	All Data International
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	18 - 19 Februari 2025 February 18–19, 2025	PMLI
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Non Pelatihan Non-Training	Masterclass Program XXIV: Mitigasi Risiko dalam transformasi Digital Masterclass Program XXIV: Risk Mitigation in Digital Transformation	3 - 4 Juli July 3–4	LSP Manajemen Risiko Risk Management LSP
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Presentation Skills	8 - 9 Oktober 2025 October 8–9, 2025	ThinkPlus
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Audit for Non-Auditor Audit for Non-Auditors	13 - 14 Oktober 2025 October 13–14, 2025	Pusdiklatwas BPKP BPKP Training and Education Center
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Implementasi Business Continuity Management System (BCMS) sesuai dengan ISO 22301:2019 dan Iso 22313:2020 Implementation of the Business Continuity Management System (BCMS) in accordance with ISO 22301:2019 and ISO 22313:2020	24 - 25 Oktober 2025 October 24–25, 2025	BCM Indonesia
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Aliyah Nafilah Fachrina - Staff Manajemen Risiko Aliyah Nafilah Fachrina - Risk Management Staff	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in Life Insurance Certification Training: Certified in Life Insurance	10 - 11 November 2025 November 10–11, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Problem Solving & Decision Making	14 - 15 April 2025 April 14–15, 2025	PPM Manajemen
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Finance for Non-Finance Batch 2 2025	17 Juli 2025 July 17, 2025	LPPI
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	29-30 September 2025 September 29–30, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Local Content Level (TKDN)	16 - 17 Oktober 2025 October 16–17, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in Life Insurance Certification Training: Certified in Life Insurance	10 - 11 November 2025 November 10–11, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Excellent Execution	19 - 20 November 2025 November 19–20, 2025	BWI
Andreas Haryo Pramono - Senior Officer Manajemen Risiko Andreas Haryo Pramono - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Promp-A-Thon	04 Desember 2025 December 4, 2025	Microsoft Indonesia
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	Legal for Non-Legal	24 - 25 April 2025 April 24–25, 2025	STH Jentera
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	Legal Drafting	18 - 19 Juni 2025 June 18–19, 2025	STH Jentera
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Non Pelatihan Non-Training	Masterclass Program XXIV: Mitigasi Risiko dalam transformasi Digital Masterclass Program XXIV: Risk Mitigation in Digital Transformation	3 - 4 Juli July 3–4	LSP Manajemen Risiko Risk Management LSP
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Awareness Training	15 - 16 Juli 2025 July 15–16, 2025	Robere & Associates
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Internal Auditor Training	30 - 31 Juli 2025 July 30–31, 2025	Robere & Associates
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts	22 - 23 September 2025 September 22–23, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in Life Insurance Certification Training: Certified in Life Insurance	10 - 11 November 2025 November 10–11, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Ardiansjah Arif - Senior Officer Kebijakan Ardiansjah Arif - Senior Policy Officer	Pelatihan Training	Communication and Negotiation Skills	13 - 14 November 2025 November 13–14, 2025	Talkinc.
Dhyantya Rarasrum – Senior Officer Kepatuhan Dhyantya Rarasrum – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Dhyantya Rarasrum – Senior Officer Kepatuhan Dhyantya Rarasrum – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	29-30 September 2025 September 29–30, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Dhyantya Rarasrum – Senior Officer Kepatuhan Dhyantya Rarasrum – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Dhyantya Rarasrum – Senior Officer Kepatuhan Dhyantya Rarasrum – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Audit for Non-Auditor Audit for Non-Auditors	13 - 14 Oktober 2025 October 13–14, 2025	Pusdiklatwas BPKP BPKP Training and Education Center
Dhyantya Rarasrum – Senior Officer Kepatuhan Dhyantya Rarasrum – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Dhyantya Rarasrum – Senior Officer Kepatuhan Dhyantya Rarasrum – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba – Compliance Officer	Pelatihan Training	Awareness Training SNI ISO 37000:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Awareness Training on SNI ISO 37000:2025 Anti-Bribery Management System (ABMS)	28 Mei 2025 May 28, 2025	Sustain
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Analytical Thinking Skills	4 - 5 Juni 2025 June 4–5, 2025	Freshminds

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	29-30 September 2025 September 29–30, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in General Insurance Certification Training: Certified in General Insurance	6 - 7 November 2025 November 6–7, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Digital Innovation & Collaboration Fundamental Fundamentals of Digital Innovation & Collaboration	10 November - 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Customer Centricity	10 November - 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Digital Business	10 November - 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Officer Kepatuhan Elsa Perdalinta Vitaloka Purba - Compliance Officer	Pelatihan Training	Digital Marketing	10 November - 5 Desember 2025 November 10 – December 5, 2025	IFG Corporate University
Ezra A Situmeang - Officer Kepatuhan Ezra A Situmeang - Compliance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Ezra A Situmeang - Officer Kepatuhan Ezra A Situmeang - Compliance Officer	Sertifikasi Certification	PECB ISO 370001 Lead Auditor	2 - 5 Juni 2025 June 2–5, 2025	SustaIN
Ezra A Situmeang - Officer Kepatuhan Ezra A Situmeang - Compliance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Ezra A Situmeang - Officer Kepatuhan Ezra A Situmeang - Compliance Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Ezra A Situmeang - Officer Kepatuhan Ezra A Situmeang - Compliance Officer	Pelatihan Training	Audit for Non-Auditor Audit for Non-Auditors	13 - 14 Oktober 2025 October 13–14, 2025	Pusdiklatwas BPKP BPKP Training and Education Center
Ezra A Situmeang - Officer Kepatuhan Ezra A Situmeang - Compliance Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Feni Amelia - Head of the Policy Department	Pelatihan Training	Advanced Writing Policy and Procedure (SOP) Advanced Policy and Procedure (SOP) Writing	4 - 5 Maret 2025 March 4–5, 2025	Value Consult
Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Feni Amelia - Head of the Policy Department	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Certified Compliance Professional (CCP) Certified Compliance Professional (CCP) Certification	16 - 19 Juni 2025 June 16–19, 2025	PPM Management
Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Feni Amelia - Head of the Policy Department	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22–October 3, 2025	IFG Corporate University
Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Feni Amelia - Head of the Policy Department	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Feni Amelia - Head of the Policy Department	Pelatihan Training	Audit for Non-Auditor Audit for Non-Auditors	13 - 14 Oktober 2025 October 13–14, 2025	Pusdiklatwas BPKP BPKP Training and Education Center
Feni Amelia - Kepala Departemen Kebijakan Feni Amelia - Head of the Policy Department	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Legal Drafting	18 - 19 Juni 2025 June 18–19, 2025	STH Jentera
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	AI Powered Business Intelligence for Smarter Decision Making and Growth AI-Powered Business Intelligence for Smarter Decision Making and Growth	25 - 26 Juni 2025 June 25–26, 2025	CRMS Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Awareness Training	15 - 16 Juli 2025 July 15–16, 2025	Robere & Associates
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Internal Auditor Training	30 - 31 Juli 2025 July 30–31, 2025	Robere & Associates
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22–October 3, 2025	IFG Corporate University
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	29-30 September 2025 September 29–30, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Implementasi Business Continuity Management System (BCMS) sesuai dengan ISO 22301:2019 dan Iso 22313:2020 Implementation of the Business Continuity Management System (BCMS) in accordance with ISO 22301:2019 and ISO 22313:2020	24 - 25 Oktober 2025 October 24–25, 2025	BCM Indonesia
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Dasar Bisnis Capital Market dan Investasi Fundamentals of Capital Markets and Investment	3 - 4 November 2025 November 3–4, 2025	TICMI
Fikri Haikal - Officer Manajemen Risiko Fikri Haikal - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Certified Anti Fraud Governance (CAFG) Certified Anti-Fraud Governance (CAFG)	2 -3 Juli 2025 July 2–3, 2025	GRC Management
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Finance for Non-Finance Batch 2 2025 Finance for Non-Finance Batch 2, 2025	17 Juli 2025 July 17, 2025	LPPI
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Manajemen Risiko dan Bisnis untuk Peserta Officer Development Program Risk and Business Management for Officer Development Program Participants	27 Agustus 2025 August 27, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	29-30 September 2025 September 29–30, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Business Continuity Management System	29 Desember 2025 December 29, 2025	BCM IND
Lea Gabriela Widjaja - Kepala Departemen Kepatuhan Lea Gabriela Widjaja - Head of the Compliance Department	Pelatihan Training	Penyusunan Peraturan Regulation Drafting	30 Desember 2025 December 30, 2025	Mahaka Institute
Lelya Novita Kusumawati - Kepala Departemen Manajemen Risiko Lelya Novita Kusumawati - Head of the Risk Management Department	Pelatihan Training	Actuary for Non-Actuary Actuary for Non-Actuaries	14 Maret 2025 March 14, 2025	IFG Corporate University
Lelya Novita Kusumawati - Kepala Departemen Manajemen Risiko Lelya Novita Kusumawati - Head of the Risk Management Department	Non Pelatihan Non-Training	Konferensi Audit Internal 2025 2025 Internal Audit Conference	2 - 3 Juli July 2–3	YPIA
Lelya Novita Kusumawati - Kepala Departemen Manajemen Risiko Lelya Novita Kusumawati - Head of the Risk Management Department	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Lelya Novita Kusumawati - Kepala Departemen Manajemen Risiko Lelya Novita Kusumawati - Head of the Risk Management Department	Pelatihan Training	Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	29-30 September 2025 September 29–30, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Lelya Novita Kusumawati - Kepala Departemen Manajemen Risiko Lelya Novita Kusumawati - Head of the Risk Management Department	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Lelya Novita Kusumawati - Kepala Departemen Manajemen Risiko Lelya Novita Kusumawati - Head of the Risk Management Department	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Lelya Novita Kusumawati - Kepala Departemen Manajemen Risiko Lelya Novita Kusumawati - Head of the Risk Management Department	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Lelya Novita Kusumawati - Kepala Departemen Manajemen Risiko Lelya Novita Kusumawati - Head of the Risk Management Department	Pelatihan Training	Business Continuity Management System	29 Desember 2025 December 29, 2025	BCM IND
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Stress Testing & Scenario Analysis	8, 11 Agustus 2025 August 8 and 11, 2025	GRC Training
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts	22 - 23 September 2025 September 22–23, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Dasar Bisnis Capital Market dan Investasi Fundamentals of Capital Markets and Investment	3 - 4 November 2025 November 3–4, 2025	TICMI
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in General Insurance Certification Training: Certified in General Insurance	6 - 7 November 2025 November 6–7, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Excellent Execution	19 - 20 November 2025 November 19–20, 2025	BWI
Muhammad Rafael Andika Putra - Staff Manajemen Risiko Muhammad Rafael Andika Putra - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Promp-A-Thon	04 Desember 2025 December 4, 2025	Microsoft Indonesia
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Advanced Writing Policy and Procedure (SOP) Advanced Policy and Procedure (SOP) Writing	4 - 5 Maret 2025 March 4–5, 2025	Value Consult
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Analytical Thinking Skills	4 - 5 Juni 2025 June 4–5, 2025	Freshminds
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Non Pelatihan Non-Training	Masterclass Program XXIV: Mitigasi Risiko dalam transformasi Digital Masterclass Program XXIV: Risk Mitigation in Digital Transformation	3 - 4 Juli July 3–4	LSP Manajemen Risiko Risk Management LSP
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Finance for Non-Finance Batch 1 2025	10 Juli 2025 July 10, 2025	LPPI
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Awareness Training	15 - 16 Juli 2025 July 15–16, 2025	Robere & Associates
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Internal Auditor Training Internal Auditor Training for Quality Management Systems	30 - 31 Juli 2025 July 30–31, 2025	Robere & Associates

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts	22 - 23 September 2025 September 22–23, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Mediana Puspitasari - Officer Manajemen Risiko Mediana Puspitasari - Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Training Tableau Desktop Fundamental Tableau Desktop Fundamentals Training	15 Januari 2025 January 15, 2025	All Data International
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Bravet Pajak A & B Bravet Tax A & B	27 Februari - 17 Juli 2025 February 27 – July 17, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia Indonesian Institute of Accountants
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Analytical Thinking Skills	4 - 5 Juni 2025 June 4–5, 2025	Freshminds
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Legal Drafting	18 - 19 Juni 2025 June 18–19, 2025	STH Jentera
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Quality Management System Awareness Training	15 - 16 Juli 2025 July 15–16, 2025	Robere & Associates
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Quality Management System Internal Auditor Training	30 - 31 Juli 2025 July 30–31, 2025	Robere & Associates
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22–October 3, 2025	IFG Corporate University
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Mega Nuriyah - Clerk Kebijakan Mega Nuriyah - Policy Clerk	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in Life Insurance Certification Training: Certified in Life Insurance	10 - 11 November 2025 November 10–11, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Nico Yohanes Sianipar - Senior Officer Manajemen Risiko Nico Yohanes Sianipar - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Climate Finance	30 Juli 2025 July 30, 2025	CFA
Nico Yohanes Sianipar - Senior Officer Manajemen Risiko Nico Yohanes Sianipar - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Nico Yohanes Sianipar - Senior Officer Manajemen Risiko Nico Yohanes Sianipar - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Business Continuity Management System	29 Desember 2025 December 29, 2025	BCM IND
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Sertifikasi Certification	Certified Anti Fraud Officer Certified Anti-Fraud Officer	26 - 28 Mei 2025 May 26–28, 2025	GRC Management
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Legal Drafting	18 - 19 Juni 2025 June 18–19, 2025	STH Jentera
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Awareness Training	15 - 16 Juli 2025 July 15–16, 2025	Robere & Associates
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Internal Auditor Training	30 - 31 Juli 2025 July 30–31, 2025	Robere & Associates
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22–October 3, 2025	IFG Corporate University
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in Life Insurance Certification Training: Certified in Life Insurance	10 - 11 November 2025 November 10–11, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Nuraemy Firdaus – Senior Staf Kepatuhan Nuraemy Firdaus – Senior Compliance Officer	Pelatihan Training	Excellent Execution	19 - 20 November 2025 November 19–20, 2025	BWI
Rahmat Septiawan Putra – Staf Manajemen Risiko Rahmat Septiawan Putra – Risk Management Staff	Pelatihan Training	Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	29-30 September 2025 September 29–30, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga – Senior Risk Analysis Officer	Pelatihan Training	Legal Drafting	18 - 19 Juni 2025 June 18–19, 2025	STH Jentera
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Awareness Training	15 - 16 Juli 2025 July 15–16, 2025	Robere & Associates
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer at	Pelatihan Training	Climate Finance	30 Juli 2025 July 30, 2025	CFA
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer	Pelatihan Training	Quality Management System Internal Auditor Training Internal Auditor Training for the Quality Management System	30 - 31 Juli 2025 July 30–31, 2025	Robere & Associates
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer	Pelatihan Training	PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts	22 - 23 September 2025 September 22–23, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University
Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Officer Analisis Risiko Revaz Mahandhika Jagatlaga - Senior Risk Analysis Officer	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in General Insurance Certification Training: Certified in General Insurance	6 - 7 November 2025 November 6–7, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Sariniatun – Kepala Divisi Sariniatun – Division Head	Non Pelatihan Non-Training	Penguatan Leadership Competency Strengthening Leadership Competency	17 Februari 2025 February 17, 2025	Inong Hunain
Sariniatun – Kepala Divisi Sariniatun – Division Head	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification	1-7 Juli 2025 July 1–7, 2025	LPPI
Sariniatun – Kepala Divisi Sariniatun – Division Head	Pelatihan Training	Manajemen Risiko dan Bisnis untuk Peserta Officer Development Program Risk Management and Business for Participants in the Officer Development Program	27 Agustus 2025 August 27, 2025	IFG Corporate University
Sariniatun – Kepala Divisi Sariniatun – Division Head	Non Pelatihan Non-Training	Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola BPD dan BPR Corruption Prevention and Governance Improvement at Regional Development Banks (BPD) and Rural Banks (BPR)	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Menkopolkam RI Indonesian Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs
Sariniatun – Kepala Divisi Sariniatun – Division Head	Non Pelatihan Non-Training	Kegiatan Anti Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Anti-Corruption and Governance Improvement Activities	8-Sep-25 September 8, 2025	Menkopolkam RI Indonesian Minister of Political, Legal, and Security Affairs
Sariniatun – Kepala Divisi Sariniatun – Division Head	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Sariniatun – Kepala Divisi Sariniatun – Division Head	Pelatihan Training	Risk Beyond 2025	4-5 Desember 2025 December 4–5, 2025	ERMA
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma – Risk Management Staff	Pelatihan Training	Training Tableau Desktop Fundamental Tableau Desktop Fundamentals Training	15 Januari 2025 January 15, 2025	All Data International
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Finance for Non-Finance Batch 2 2025	17 Juli 2025 July 17, 2025	LPPI

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Stress Testing & Scenario Analysis	8, 11 Agustus 2025 August 8 and 11, 2025	GRC Training
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma - Risk Management Staff	Pelatihan Training	PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts	22 - 23 September 2025 September 22–23, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma - Risk Management Staff	Pelatihan Training	Presentation Skills	8 - 9 Oktober 2025 October 8–9, 2025	ThinkPlus
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma - Risk Management Staff	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Syifa Kamilarahma - Staff Manajemen Risiko Syifa Kamilarahma - Risk Management Staff	Sertifikasi Certification	Pelatihan Sertifikasi Certified in Life Insurance Certification Training: Certified in Life Insurance	10 - 11 November 2025 November 10–11, 2025	Asosiasi Ahli Manajemen Indonesia Indonesian Management Experts Association
Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Tiana Azalia Satrio - Policy Staff	Pelatihan Training	PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts	22 - 23 September 2025 September 22–23, 2025	IAI Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI)
Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Tiana Azalia Satrio - Policy Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016)	22 September - 3 Oktober 2025 September 22 – October 3, 2025	IFG Corporate University
Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Tiana Azalia Satrio - Policy Staff	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition	6 Oktober 2025 - 17 Oktober 2025 October 6, 2025 – October 17, 2025	IFG Corporate University
Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Tiana Azalia Satrio - Policy Staff	Pelatihan Training	Audit for Non-Auditor Audit for Non-Auditors	13 - 14 Oktober 2025 October 13–14, 2025	Pusdiklatwas BPKP BPKP Training and Education Center
Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Tiana Azalia Satrio - Policy Staff	Pelatihan Training	APU, PPT dan PPPSPM AML, CFT, and CPF	20 - 31 Oktober 2025 October 20–31, 2025	IFG Corporate University
Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Tiana Azalia Satrio - Policy Staff	Pelatihan Training	Dasar Bisnis Capital Market dan Investasi Fundamentals of Capital Markets and Investment	3 - 4 November 2025 November 3–4, 2025	TICMI
Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Tiana Azalia Satrio - Policy Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)	3 - 14 November 2025 November 3–14, 2025	IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Tiana Azalia Satrio - Staff Kebijakan Tiana Azalia Satrio - Policy Staff	Pelatihan Training	Communication and Negotiation Skills	13 - 14 November 2025 November 13–14, 2025	Talkinc.
Windy Martha Lopha - Senior Officer Manajemen Risiko Windy Martha Lopha - Senior Risk Management Officer	Pelatihan Training	Problem Solving & Decision Making	14 - 15 April 2025 April 14–15, 2025	PPM Manajemen

PROFIL RISIKO TAHUN 2025 DAN MITIGASINYA

Selanjutnya, disajikan profil risiko beserta rata-rata penyelesaian langkah-langkah mitigasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025:

2025 RISK PROFILE AND MITIGATION

The following section presents the risk profiles along with the average completion rates of the mitigation measures implemented throughout 2025:

ID Risk	**Peristiwa Risiko** Risk Event	**Realisasi Risiko Residual** Residual Risk Realization	**Rata-Rata Penyelesaian Mitigasi** Average Mitigation Completion
R1	Rasio *profit* margin yang tidak optimal akibat ketergantungan dengan *broker* Suboptimal profit margin ratio due to dependence on brokers	*Low*	100%
R2	Kerugian bisnis reasuransi terkait kontrak reasuransi dan perhitungan cadangan teknis Reinsurance business losses related to reinsurance contracts and technical reserve calculations	*Low to Moderate*	80%
R3	Produk tidak menguntungkan (khususnya terkait tren penurunan profitabilitas bisnis penugasan) Unprofitable products (particularly related to the trend of declining profitability in the ceding business)	*Moderate*	98%
R4	Peningkatan klaim di luar ketentuan pada asuransi sosial Increase in Claims Exceeding Social Insurance Limits	*Low*	100%
R5	Piutang jatuh tempo tidak terbayar Overdue receivable	*Moderate to High*	100%
R6	Kekalahan persaingan usaha akibat pesatnya perkembangan digitalisasi Loss of competitive edge due to rapid digitalization	*Low to Moderate*	90%
R7	Pendapatan dari produk andalan menurun khususnya dari KUR Revenue from flagship products is declining, particularly from KUR	*Moderate*	100%
R8	*Partnership bancassurance* tidak memenuhi target Bancassurance partnership did not meet targets	*Low*	100%
R9	Pertumbuhan *Corporate Sales-Worksite* tidak terpenuhi Corporate Sales-Worksite growth targets were not met	*Low*	100%
R10	Ketergantungan pada pasar yang stagnan dalam pengembangan produk MTPL Reliance on a stagnant market for MTPL product development	*Low*	100%
R11	Penetrasi pasar baru untuk produk-produk inovatif tidak terpenuhi New market penetration for innovative products has not been achieved	*Moderate*	96%
R12	Bisnis properti dan CMI tidak memenuhi target The real estate and CMI businesses did not meet their targets	*Low*	82%
R13	Kegagalan menjalankan proyek strategis untuk memenuhi persyaratan regulasi (khususnya terkait *spinoff* syariah) Failure to execute strategic projects to meet regulatory requirements (particularly regarding Sharia spin-offs)	*Low to Moderate*	100%
R14	Model bisnis IFG yang tidak mampu mengikuti perubahan regulasi atau lanskap industri penjaminan IFG's business model is unable to keep pace with changes in regulations or the guarantee industry landscape	*Moderate*	100%

ID Risk	**Peristiwa Risiko** Risk Event	**Realisasi Risiko Residual** Residual Risk Realization	**Rata-Rata Penyelesaian Mitigasi** Average Mitigation Completion
R15	Tidak terselesaikannya pengalihan/penyelesaian aset ex-Jiwasraya sesuai target Failure to complete the transfer/settlement of former Jiwasraya assets as targeted	*High*	100%
R16	Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan audited dan tidak diperolehnya opini Kantor Akuntan Publik (KAP) wajar tanpa pengecualian (WTP) Delays in finalizing and submitting audited financial statements and failure to obtain an unqualified opinion (WTP) from a Public Accounting Firm (KAP)	*High*	82%
R17	Peningkatan klaim melebihi target khususnya didorong oleh faktor eksternal (seperti cuaca) yang semakin ekstrem An increase in claims exceeding the target, driven primarily by increasingly extreme external factors (such as weather)	*Low to Moderate*	99%
R18	Kegagalan operasional terkait proses bisnis di anak perusahaan (cabang) yang masih manual Operational failures related to business processes at subsidiaries (branches) that are still manual	*Moderate to High*	100%
R19	Rencana sinergi, *cross-selling*, tidak berjalan sesuai dengan rencana Synergy and cross-selling plans are not proceeding as planned	*Moderate to High*	85%
R20	Kegagalan penerapan budaya perusahaan – *customer centricity* Failure to implement a customer-centric corporate culture	*Moderate*	95%
R21	Lemahnya *branding* One by IFG Weak branding of One by IFG	*Low to Moderate*	98%
R22	Skor kepuasan pelanggan di bawah standar Customer satisfaction scores below standard	*Low to Moderate*	100%
R23	Kebocoran informasi kritikal IFG Leakage of critical IFG information	*Low to Moderate*	100%
R24	Pelanggaran terhadap prinsip tata kelola khususnya dengan semakin menguatnya perhatian regulator terhadap tata kelola terintegrasi Violations of governance principles, particularly given the growing regulatory focus on integrated governance	*High*	100%
R25	Munculnya tuntutan terhadap pihak IFG akibat pelanggaran kontrak, misrepresentasi atau *fraud* Claims against IFG arising from breach of contract, misrepresentation, or fraud	*Moderate to High*	99%
R26	Tidak optimalnya pengelolaan investasi Suboptimal investment management	*Low*	98%

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO OLEH DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi secara konsisten melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko IFG, yang didukung oleh Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi serta Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris. Evaluasi ini juga dilakukan melalui rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris, yang membutuhkan persetujuan kedua pihak terkait kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko. Sejalan dengan itu, pada tahun IFG telah menyusun mekanisme evaluasi efektivitas manajemen risiko sebagai berikut:

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM BY THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners and the Board of Directors consistently evaluate the effectiveness of IFG's risk management, supported by the Risk Management Committee under the Board of Directors and the Risk Monitoring Committee under the Board of Commissioners. This evaluation is also conducted through coordination meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners, which require the approval of both parties regarding risk management policies and implementation. In line with this, during the year, IFG has established the following mechanisms for evaluating the effectiveness of risk management:

1. Pengelolaan untuk setiap risiko utama yang dicantumkan dalam dokumen RKAP dan dipantau realisasi secara triwulanan yang dicantumkan dalam laporan manajemen triwulanan yang keseluruhan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pengelolaan untuk setiap risiko utama yang dicantumkan dalam dokumen RJPP yang disetujui Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Pencapaian peringkat komposit risiko triwulanan yang berasal dari indikator pencapaian kinerja dan kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan Salinan Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN yaitu SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.
4. Evaluasi kebijakan ambang batas kewenangan transaksi atas aksi korporasi IFG.
5. Pemenuhan implementasi atas pedoman strategis yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya untuk diturunkan ke Anggota *Holding*.
6. Penetapan *Financial Contingency Plan* (Rencana Darurat Keuangan).
7. Pelaksanaan *Risk Maturity Index* (RMI).
8. Pelaksanaan pelaporan *Loss Event Database* (LED).

PERNYATAAN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris IFG melaksanakan praktik bisnis yang sehat serta berupaya menciptakan nilai tambah sesuai ekspektasi para pemangku kepentingan melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis, terstruktur, dan menyeluruh. Sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko berskala perusahaan (*enterprise-wide*), IFG menetapkan *risk appetite*, yaitu tingkat dan jenis risiko yang siap diambil untuk mencapai target bisnis Perusahaan. *Risk appetite* ini menjadi landasan dalam perumusan strategi dan pencapaian tujuan bisnis. Untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan operasional dan keuangan, IFG telah menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat standar operasional dan prosedur yang jelas.

Sebagai elemen penting dalam kerangka manajemen risiko, Perusahaan berkomitmen mengelola risiko secara *prudent* dan efektif, sekaligus memperkuat budaya risiko di seluruh jenjang organisasi. Komitmen ini tercermin melalui kebijakan, sasaran, mandat, dan standar penerapan manajemen risiko yang konsisten. Dalam struktur organisasi, penerapan manajemen risiko mencakup perencanaan, sistem, struktur hubungan, akuntabilitas, sumber daya, proses, serta berbagai aktivitas pendukung yang memastikan pengelolaan risiko berjalan optimal.

1. Management of each major risk listed in the Annual Business Plan (RKAP) document, with progress monitored quarterly and reported in the quarterly management reports, which are collectively approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Management of each major risk listed in the RJPP document, which is approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. Achievement of the quarterly composite risk rating derived from performance achievement indicators and the quality of risk management implementation, based on a copy of the decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises, namely SK-7/DKU.MBU/10/2023 concerning Technical Guidelines for Reporting
4. Evaluation of the policy on transaction authority thresholds for IFG's corporate actions.
5. Ensuring the implementation of the strategic guidelines established in the previous year and communicating them to the Holding Company's subsidiaries.
6. Establishment of a Financial Contingency Plan.
7. Implementation of the Risk Maturity Index (RMI).
8. Implementation of the Loss Event Database (LED) reporting.

STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and Board of Commissioners of IFG adhere to sound business practices and strive to create value in line with stakeholder expectations through the implementation of a systematic, structured, and comprehensive risk management framework. As part of its enterprise-wide risk management approach, IFG defines its risk appetite—that is, the level and types of risk the Company is willing to assume to achieve its business objectives. This risk appetite serves as the foundation for formulating strategies and achieving business objectives. To minimize potential conflicts of interest in operational and financial management, IFG has developed Procurement Guidelines for Goods and Services that outline clear operational standards and procedures.

As a key element of the risk management framework, the Company is committed to managing risks prudently and effectively, while strengthening a risk culture at all levels of the organization. This commitment is reflected through consistent policies, objectives, mandates, and standards for implementing risk management. Within the organizational structure, the implementation of risk management encompasses planning, systems, organizational relationships, accountability, resources, processes, and various supporting activities that ensure optimal risk management.

PERKARA PENTING
IMPORTANT CASES

PERMASALAHAN HUKUM

Selain risiko-risiko utama yang dikelola melalui kerangka manajemen risiko Perusahaan, IFG juga melakukan pemantauan terhadap perkara hukum yang dapat memengaruhi aspek kepatuhan, reputasi, dan kesinambungan operasional. Oleh karena itu, pengungkapan perkara penting disajikan sebagai bagian dari transparansi Perusahaan dalam mengelola risiko hukum secara akuntabel. Secara umum, perkara hukum yang dihadapi IFG dan anggota holding pada tahun pelaporan didominasi oleh perkara perdata, antara lain terkait klaim asuransi, subrogasi, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perselisihan hubungan industrial, serta sengketa aset. Berdasarkan pengungkapan yang disampaikan, tidak terdapat perkara pidana pada tahun 2025 maupun 2024 dalam rekapitulasi perkara anggota holding. Perusahaan tetap melakukan pemantauan dan pendampingan hukum untuk memastikan potensi dampak terhadap operasional, keuangan, dan reputasi dapat dimitigasi secara memadai.

LEGAL ISSUES

In addition to the key risks managed through the Company's risk management framework, IFG also monitors legal cases that may affect compliance, reputation, and operational continuity. Therefore, the disclosure of significant legal cases is presented as part of the Company's transparency in managing legal risks in an accountable manner. In general, the legal cases faced by IFG and its holding company members during the reporting year were predominantly civil cases, including those related to insurance claims, subrogation, breach of contract, unlawful acts, labor disputes, and asset disputes. Based on the disclosures provided, there were no criminal cases in either 2025 or 2024 in the summary of cases involving the holding company's subsidiaries. The Company continues to monitor these matters and provide legal assistance to ensure that any potential impacts on operations, finances, and reputation can be adequately mitigated.

Permasalahan hukum yang dihadapi IFG selama 2 (dua) tahun terakhir diuraikan dalam tabel berikut:

The legal issues faced by IFG over the past 2 (two) years are outlined in the following table:

Permasalahan Hukum Legal Issues	**2025**		**2024**	
	Perdata Civil	**Pidana** Criminal	**Perdata** Civil	**Pidana** Criminal
Selesai dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Finalized and Legally Binding	**Nihil** None	**Nihil** None	1	Nihil None
Dalam Proses Penyelesaian Under Resolution	**Nihil** None	**Nihil** None	2	Nihil None
Jumlah Total	**Nihil** None	**Nihil** None	**3**	**Nihil** None

Rincian terkait permasalahan hukum yang dialami IFG sepanjang tahun 2024-2025 disajikan sebagai berikut:

Details regarding the legal issues faced by IFG during the 2024–2025 period are presented as follows:

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Anton Fadjar Alogo (Penggugat) • Askrindo (Tergugat) • IFG (Turut Tergugat) • Kementerian BUMN (Turut Tergugat II) • Anton Fadjar Alogo (Plaintiff) • Askrindo (Defendant) • IFG (Co-Defendant) • Ministry of State-Owned Enterprises (Co-Defendant II)	Gugatan perbuatan melawan hukum untuk melakukan pembayaran tantiem dan remunerasi sebagai hak penggugat yang merupakan mantan Direksi Askrindo. An unlawful act lawsuit seeking payment of bonuses and remuneration claimed by the plaintiff, a former member of the Board of Directors of Askrindo	Menang Won the case	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	Pokok Perkara Merits of Case	Putusan Pengadilan Verdict	Status Perkara Case Status
• Demak Tobing (Penggugat) • Menteri BUMN (Tergugat I) • OJK (Tergugat II) • Jiwasraya (Tergugat III) • Dr. Hendrisman Rahum (Tergugat IV) • DPR (Tergugat V) • PT BPUI (Persero) (Turut Tergugat I) • PT Asuransi Jiwa IFG (Turut Tergugat II) • Demak Tobing (Plaintiff) • Minister of State-Owned Enterprises (Defendant I) • FSA (Defendant II) • Jiwasraya (Defendant III) • Dr. Hendrisman Rahum (Defendant IV) • House of Representatives (Defendant V) • PT BPUI (Persero) (Co-Defendant I) • PT Asuransi Jiwa IFG (Co-Defendant II)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemegang polis Jiwasraya yang menolak untuk mengikuti program restrukturisasi ke IFG Life dan melakukan tuntutan pembayaran nilai manfaat polis. A lawsuit for an unlawful act filed by Jiwasraya policyholders who refused to participate in the restructuring program with IFG Life and demanded payment of policy benefits.	• Tingkat Pertama: Menang dengan eksepsi kewenangan absolut. Putusan tanggal 15 Juli 2025. • Tingkat banding: Menang dengan penguatan putusan peradilan tingkat pertama. Putusan Tanggal 9 September 2025. • First Instance: Won the case based on an objection to the court's absolute jurisdiction. Decision dated July 15, 2025. • Appeal level: Won the case, with the first-instance judgment upheld. Decision dated September 9, 2025.	Selesai Closed

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Permasalahan hukum sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas tidak berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan, mempertimbangkan bahwa perusahaan bukan merupakan tergugat utama dan tidak terdapat tuntutan yang berpotensi menimbulkan kewajiban finansial kepada IFG. Namun demikian, IFG telah melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memitigasi permasalahan hukum baik dengan melibatkan sumber daya internal maupun konsultan eksternal. Selain itu, atas permasalahan hukum Anggota Holding, IFG memberikan dukungan/asistensi hukum dengan memberikan kajian hukum, penyusunan strategi penanganan perkara, melakukan pendampingan atau negosiasi. Untuk mengawasi sekaligus mengantisipasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, IFG senantiasa melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan dari permasalahan hukum yang sedang berlangsung.

IMPACT OF LEGAL ISSUES ON THE COMPANY

The legal issues described in the table above do not have a significant impact on the company's operations, considering that the company is not the primary defendant and there are no claims that could potentially result in financial liabilities for IFG. Nevertheless, IFG has taken the necessary steps to mitigate these legal issues by engaging both internal resources and external consultants. In addition, regarding the legal issues faced by Holding Company members, IFG provides legal support and assistance by conducting legal reviews, formulating case management strategies, and providing guidance or conducting negotiations. To supervise and anticipate the necessary mitigation measures, IFG continuously monitors the developments of ongoing legal issues on a regular basis.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada tahun 2024-2025 disampaikan sebagai berikut:

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES FACED BY THE INCUMBENT BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The disclosure regarding legal issues currently faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors serving in 2024–2025 is as follows:

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• CV Kairos Global Marine (Penggugat I) • PT Haekal Inti Pratama (Penggugat II) • PT Hillkim Adisarna Indo (Penggugat III) • PT Lomy Harapan Sejahtera (Penggugat IV) • PT Nesitor (Penggugat V) • PT Sowohi Kentiti Jaya (Penggugat VI) • CRC (Tergugat I) • SKK Migas (Tergugat II) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Turut Tergugat) • CV Kairos Global Marine (Plaintiff I) • PT Haekal Inti Pratama (Plaintiff II) • PT Hillkim Adisarna Indo (Plaintiff III) • PT Lomy Harapan Sejahtera (Plaintiff IV) • PT Nesitor (Plaintiff V) • PT Sowohi Kentiti Jaya (Plaintiff VI) • CRC (Defendant I) • SKK Migas (Defendant II) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Co-Defendant)	Gugatan wanprestasi perkara kelalaian Camar Resources Canada Inc. (CRC) Atas pembayaran pekerjaan perbaikan yang telah dilakukan oleh para penggugat atas CPP milik CRC. Terdapat tuntutan agar uang pembayaran klaim untuk dilakukan sita jaminan berupa dana pencairan klaim kepada Jasindo. Breach of contract lawsuit regarding the negligence of Camar Resources Canada Inc. (CRC) concerning payment for repair work performed by the plaintiffs on CRC's CPP. There is a demand that the claim payment be subject to a security attachment in the form of claim disbursement funds to Jasindo.	Menang dengan pencabutan gugatan oleh para penggugat. Penetapan tanggal 11 November 2024 Won the case after the plaintiffs withdrew the lawsuit. Court Order dated November 11, 2024.	Selesai Closed
• Bernarto (Direktur Utama PT Asiadaya Abadi) (Penggugat) • PT PLN (Tergugat) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Tergugat I) • PT BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah & DIY (Turut Tergugat II) • PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cq Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kantor Cabang Kudus (Turut Tergugat III) • Bernarto (President Director of PT Asiadaya Abadi) (Plaintiff) • PT PLN (Defendant) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Defendant I) • PT BPJS Ketenagakerjaan Central Java & DIY Region (Co-Defendant II) • PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, acting through its Kudus Branch (Co-Defendant III)	Gugatan perbuatan melawan hukum atas adanya kerugian yang dialami Penggugat atas pelaksanaan pekerjaan untuk Tergugat. Keterlibatan Jasindo karena telah membayar klaim kepada *obligee* kepada Tergugat yang menimbulkan Hak Subrogasi Jasindo untuk mendapatkan kembali *recovery claim* dari principal yaitu PT Asiadaya Abadi. A lawsuit for an unlawful act regarding the losses suffered by the Plaintiff in connection with the performance of work for the Defendant. Jasindo's involvement stems from its payment of a claim to the obligee against the Defendant, which gave rise to Jasindo's right of subrogation to recover the claim from the principal, PT Asiadaya Abadi.	Menang dengan putusan tanggal 3 Maret 2025 yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima. Won the case, with the Plaintiff's principal claim declared inadmissible. Judgment dated March 3, 2025.	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• PT Nurfa Anugrah Raya (Pembanding) • PT Cipta Dimensi Baja Nusantara (Terbanding I) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Terbanding II) • PT Nurfa Anugrah Raya (Appellant) • PT Cipta Dimensi Baja Nusantara (Respondent I) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Respondent II)	Gugatan perbuatan melawan hukum pencairan klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diajukan oleh PT Cipta Dimensi Baja Nusantara selaku *obligee* kepada PT Jasindo atas proyek HMID *External Work* di Cikarang, di mana PT Nurfa Anugrah Raya selaku *principal* keberatan atas pencairan klaim tersebut karena tidak terselesaikannya pekerjaan disebabkan adanya penambahan biaya operasional yang tidak disetujui oleh *obligee*. Lawsuit for unlawful acts regarding the disbursement of claims for Advance Payment Guarantee and Performance Guarantee filed by PT Cipta Dimensi Baja Nusantara as the obligee against PT Jasindo regarding the HMID External Work project in Cikarang, in which PT Nurfa Anugrah Raya as the principal objected to the disbursement of the claims due to the non-completion of the work caused by additional operational costs that were not approved by the obligee.	• Tingkat pertama: menang dengan putusan tanggal 27 Maret 2024 • Tingkat banding: menang dengan menguatkan putusan tingkat pertama • First Instance: Won the case. Judgment dated March 27, 2024. • Appeal level: Won the case, with the first-instance judgment upheld	Selesai Closed
• Uzly Lailbarokah (Penggugat) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Tergugat) • PT BNI (Turut Tergugat) Tingkat kasasi: • PT Asuransi Jasa Indonesia (Pemohon Kasasi) • Uzly Lailbarokah (Termohon Kasasi) • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Turut Termohon Kasasi) • Uzly Lailbarokah (Plaintiff) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Defendant) • PT BNI (Co-Defendant) Cassation level: • PT Asuransi Jasa Indonesia (Appellant) • Uzly Lailbarokah (Respondent to the Petition for Cassation) • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Co-Respondent to the Petition for Cassation)	Gugatan diajukan selaku Ahli Waris dari Ida Royani (Tertanggung) atas penolakan klaim Asuransi Jiwa Kredit senilai Rp 230.000.000 atas dasar hasil investigasi PT Avrist Assurance (Assurandur) yang menemukan Tertanggung telah menderita kanker payudara sejak Tahun 2009 sehingga bertentangan dengan formulir SPK 255 yang diisi dan ditandatangani pada saat penutupan asuransi. The lawsuit was filed on behalf of the heirs of Ida Royani (the Insured) regarding the denial of a Credit Life Insurance claim in the amount of Rp 230,000,000 based on the findings of an investigation by PT Avrist Assurance (Assurandur), which determined that the Insured had been suffering from breast cancer since 2009, thereby contradicting Form SPK 255, which was completed and signed at the time the insurance policy was issued.	• Tingkat pertama: Kalah • Tingkat banding: kalah • Tingkat kasasi: kalah • First Instance Level: Lost the case • Appeal Level: Lost the case • Cassation level: Lost the case	Selesai Closed
• PT Boma Bisma Indra (Persero) (Termohon/ Debitur) • PT Sabatani Global Solusindo (Pemohon) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Kreditur) • PT Boma Bisma Indra (Persero) (Respondent/ Debtor) • PT Sabatani Global Solusindo (Petitioner) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Creditor)	Permohonan perkara kepailitan terkait hak subrogasi PT Jasindo terhadap debitur atas pembayaran klaim Jaminan LC/SKBDN, di mana PT Jasindo telah mengikuti proses PKPU dan mendaftarkan tagihan kepada debitur melalui Tim Pengurus PT BBI sebesar Rp8.451.322.522,- yang terdiri atas utang pokok dan denda. Petition for bankruptcy proceedings regarding PT Jasindo's right of subrogation against the debtor for payment of the LC/ SKBDN Guarantee claim, in which PT Jasindo had participated in the PKPU process and filed a claim against the debtor through the PT BBI Administration Team in the amount of IDR 8,451,322,522, consisting of principal debt and penalties.	Kalah Lost the case	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• PT Cardig Air (Termohon) • Agus Pruwanto (Pemohon PKPU) • Wahyu Anom Sudarsono (Pemohon PKPU) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Kreditur) • PT Cardig Air (Respondent) • Agus Pruwanto (PKPU Petitioner) • Wahyu Anom Sudarsono (PKPU Petitioner) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Creditor)	Permohonan tagihan *outstanding* premi dengan total sebesar 46.984,82 USD (empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh dua) kepada PT Cardig Air Request for payment of outstanding premium charges totaling USD 46,984.82 (fourty-six thousand nine hundred eighty-four point eighty-two) from PT Cardig Air	Kalah dengan putusan tanggal 19 Desember 2024 Lost the case. Decision dated December 19, 2024	Selesai Closed
• Danang Agung Prasetyo (Pemohon) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Kreditur Konkuren) • Danang Agung Prasetyo (Petitioner) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Concurrent Creditor)	Permohonan tagihan outstanding subrogasi beserta penalti sebesar Rp44.388.359.671 (empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Petition for subrogation of outstanding claims along with penalties totaling IDR 44,388,359,671 (forty-four billion three hundred eighty-eight million three hundred fifty-nine thousand six hundred seventy-one rupiah) against PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.	Menang Won the case	Selesai Closed
• PT Bank Perekonomian Rakyat Modern Express (Penggugat) • PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Tergugat I) • Kantor Cabang PT Askrindo Kota Palu (Tergugat II) • PT Bank Perekonomian Rakyat Modern Express (Plaintiff) • PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Defendant I) • PT Askrindo Palu Branch (Defendant II)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh BPR Modex terhadap PT Askrindo terkait penolakan klaim asuransi kredit konsumtif atas sejumlah debitur yang mengalami restrukturisasi kredit akibat bencana alam di wilayah Sulawesi Tengah. A lawsuit for an unlawful act filed by BPR Modex against PT Askrindo regarding the denial of consumer credit insurance claims for a number of borrowers who underwent loan restructuring due to a natural disaster in the Central Sulawesi region.	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
• Rudi Hartono Silitonga (Penggugat) • PT Bank Sumut (Tergugat) • PT Askrindo (Turut Tergugat) • Rudi Hartono Silitonga (Plaintiff) • PT Bank Sumut (Defendant) • PT Askrindo (Co-Defendant)	Gugatan terkait keberatan debitur atas pelaksanaan subrogasi dan upaya pelelangan agunan kredit setelah pembayaran klaim oleh PT Askrindo kepada PT Bank Sumut, di mana Tergugat berpendapat kewajiban kredit telah dibayarkan melalui klaim asuransi sehingga menolak pembayaran subrogasi dan keberatan atas pelelangan agunan. Lawsuit regarding the debtor's objection to the exercise of subrogation and the auction of loan collateral following the payment of a claim by PT Askrindo to PT Bank Sumut, in which the Defendants argued that the loan obligation had been paid through the insurance claim and therefore refused to pay the subrogation amount and objected to the auction of the collateral.	• Tingkat pertama: Menang dengan putusan tanggal 17 Mei 2022 yang menerima eksepsi Tergugat I dan II • Tingkat banding: Menang dengan putusan tanggal 6 Oktober 2022 • Tingkat kasasi: Menang dengan putusan tanggal 19 Maret 2024 • First Instance: Won the case, with the preliminary objections of Defendant I and Defendant II upheld. Decision dated May 17, 2022. • Appeal level: Won the case. Judgment dated October 6, 2022 • Cassation level: Won the case. Judgment dated March 19, 2024	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Andre Frans Wijaya (Penggugat) • PT BRI (Tergugat I) • PT Askrindo (Tergugat II) • Andre Frans Wijaya (Plaintiff) • PT BRI (Defendant I) • PT Askrindo (Defendant II)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh suami debitur (Penggugat) terhadap Bank BRI dan PT Askrindo KC Surabaya terkait pelaksanaan klaim asuransi kredit atas fasilitas kredit debitur yang telah masuk kolektibilitas 4, di mana PT Askrindo KC Surabaya telah membayarkan klaim sebesar Rp2 miliar kepada Bank BRI, namun debitur tetap diwajibkan membayar kewajiban kredit secara penuh. Lawsuit for unlawful acts filed by the debtor's husband (Plaintiff) against Bank BRI and PT Askrindo Surabaya Branch regarding the processing of a credit insurance claim for the debtor's credit facility that had been classified as Collectibility Category 4, in which PT Askrindo Surabaya Branch had paid a claim of Rp2 billion to Bank BRI, yet the debtor remained obligated to pay the full amount of the credit obligation.	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
• PT Bank Bukopin (Penggugat) • PT Askrindo (Tergugat) • PT Bank Bukopin (Plaintiff) • PT Askrindo (Defendant)	Gugatan wanprestasi atas penolakan pembayaran klaim KBG Jaminan Pelaksanaan oleh PT Askrindo dengan alasan bahwa wanprestasi yang dinyatakan melalui surat wanprestasi berada di luar jangka waktu pertanggungan KBG Breach of contract lawsuit regarding PT Askrindo's refusal to pay a KBG Performance Bond claim on the grounds that the breach of contract, as stated in the notice of default, occurred outside the KBG coverage period	• Tingkat pertama: Kalah dalam putusan tanggal 18 Desember 2024 • Tingkat kasasi: Kalah dalam putusan 4 Juni 2025 • Tingkat Kasasi: Menang dalam putusan tanggal 1 Desember 2025 • First Instance: Lost the case Decision dated December 18, 2024 • Appeal level: Lost the case. Decision dated June 4, 2025 • Cassation Level: Won the case. Decision dated December 1, 2025	Selesai Closed
• Bank KB Bukopin Syariah (Penggugat) • PT Askrindo (Tergugat) • PT Berkah Tiga Usaha (Turut Tergugat I) • PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Turut Tergugat II) • Bank KB Bukopin Syariah (Plaintiff) • PT Askrindo (Defendant) • PT Berkah Tiga Usaha (Co-Defendant I) • PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Co-Defendant II)	Gugatan wanprestasi atas penolakan pengajuan pembayaran klaim pencairan Bank Garansi yang diajukan Penggugat berdasarkan Kontrak Bank Garasi Breach of contract lawsuit regarding the rejection of the Plaintiff's request for payment of a bank guarantee claim filed pursuant to the Bank Guarantee Contract	-	
• CV Sugih Manis (Penggugat) • Direktur PT Brataco (Tergugat I) • Branch Manager PT Braco (Tergugat II) • PT Braga Trading (Tergugat III) • PT Askrindo KCU Jakarta Kemayoran (Tergugat IV) • CV Sugih Manis (Plaintiff) • Director of PT Brataco (Defendant I) • Branch Manager of PT Braco (Defendant II) • PT Braga Trading (Defendant III) • PT Askrindo KCU Jakarta Kemayoran (Defendant IV)	Gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa klaim asuransi kredit perdagangan (Askredag) atas transaksi pembelian *dextrose* sebagai bahan campuran gula merah, di mana Tergugat merasa dirugikan karena adanya pembelian secara *over limit* dan penjualan dengan harga di luar kesepakatan para pihak, sehingga Penggugat menolak pembayaran subrogasi atas klaim yang diajukan. Unlawful act lawsuit concerning a trade credit insurance claim dispute arising from the purchase of dextrose as a raw material for brown sugar production, in which the Defendant alleges that it suffered losses due to purchases exceeding the approved credit limit and sales at prices outside the parties' agreement, resulting in the Plaintiff's refusal to make the subrogation payment for the submitted claim.	• Tingkat pertama: Menang dalam putusan tanggal 19 November 2025 • Tingkat Banding: Menang dalam putusan tanggal 5 Februari 2026 • First Instance: • Won the case. Decision dated November 19, 2025 • Appeal level: Won the case. Decision dated February 5, 2026	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Faras Diba (Penggugat) • PT BTN (Tergugat I) • PT Askrindo (Tergugat II) • Notaris Purwanto (Turut Tergugat I) • Direktur PT Rico Cipta Mandiri (Turut Tergugat II) • Faras Diba (Plaintiff) • PT BTN (Defendant I) • PT Askrindo (Defendant II) • Notary Purwanto (Co-Defendant I) • Director of PT Rico Cipta Mandiri (Co-Defendant II)	Gugatan oleh Ahli Waris debitur atas penolakan klaim Asuransi Jiwa Kredit setelah debitur meninggal dunia. Lawsuit filed by the debtor's heirs regarding the denial of a credit life insurance claim following the debtor's death	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
• Erland Nopri Dkk (Penggugat) • PT Askrindo (Tergugat I) • BPD Jawa Tengah (Tergugat II) • Erland Nopri et al. (Plaintiffs) • PT Askrindo (Defendant I) • BPD Central Java (Defendant II)	Gugatan wanprestasi dengan maksud agar Tergugat melakukan pembayaran klaim untuk dihitung sebagai *boedel pailit* PT Abdi Mulia Berkah Breach of contract lawsuit seeking an order requiring the Defendants to pay a claim to be included in the bankruptcy estate of PT Abdi Mulia Berkah	• Tingkat pertama: kalah dalam putusan 21 Mei 2024 • Tingkat kasasi: menang dalam putusan 14 Agustus 2024 • Peninjauan kembali: menang • First Instance: Lost the case. Decision dated May 21, 2024 • Appeal: Won the case. Decision dated August 14, 2024 • Review: Won the case.	Selesai Closed
• PT Lautan Lestari (Penggugat) • PT Asuransi Artarindo (Tergugat I) • PT Asuransi Harta Aman (Tergugat II) • PT Jasa Raharja (Tergugat III) • PT Asuransi Kredit Indonesia (Tergugat IV) • PT Asuransi Multi Artha (Tergugat V) • PT Asuransi Tripakarta (Tergugat VI) • PT Asuransi Umum Mega (Tergugat VII) • PT Asuransi Dayin Mitra (Turut Tergugat I) • Riswan Brahmana Mandiri Survei (Turut Tergugat II) • PT Daidan Pialang Utama Asuransi Turut Tergugat III • Otoritas Jasa Keuangan Turut Tergugat IV • PT Lautan Lestari (Plaintiff) • PT Asuransi Artarindo (Defendant I) • PT Asuransi Harta Aman (Defendant II) • PT Jasa Raharja (Defendant III) • PT Asuransi Kredit Indonesia (Defendant IV) • PT Asuransi Multi Artha (Defendant V) • PT Tripakarta Insurance (Defendant VI) • PT Mega General Insurance (Defendant VII) • PT Asuransi Dayin Mitra (Co-Defendant I) • Riswan Brahmana Mandiri Survei (Co-Defendant II) • PT Daidan Pialang Utama Asuransi Co-Defendant III • Financial Services Authority Co-Defendant IV	Gugatan wanprestasi atas penolakan klaim asuransi *marine hull* yang ditolak oleh Para Tergugat Breach of contract lawsuit regarding the defendants' denial of a marine hull insurance claim	• Tingkat pertama: Menang • Tingkat banding: kalah • First Instance: Won the case • Appeal: Lost the case	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• PT Askrindo (Penggugat) • PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (Tergugat) • PT Askrindo (Plaintiff) • PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (Defendant)	Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT Askrindo terhadap PT AJRI terkait tidak dilakukannya pembayaran klaim asuransi atas risiko meninggal dunia, dengan alasan penolakan berupa daluwarsa pengajuan klaim, ketidaklengkapan dokumen, dan alasan administratif lainnya. A breach of contract lawsuit filed by PT Askrindo against PT AJRI regarding the failure to pay an insurance claim for death benefits, based on grounds of the statute of limitations for filing the claim, incomplete documentation, and other administrative reasons	• Tingkat pertama: kalah • Tingkat banding: kalah • First Instance: Lost the case • Appeal Level: Lost the case	Selesai Closed
• Merry (Penggugat) • PT Surveyor (Tergugat) • PT Asuransi Jiwa IFG (Turut Tergugat) • Merry (Plaintiff) • PT Surveyor (Defendant) • PT Asuransi Jiwa IFG (Co-Defendant)	Gugatan perselisihan hubungan industrial terkait pembayaran pesangon yang dianggap tidak sesuai dengan PKB serta tidak diperolehnya informasi mengenai kepesertaan dalam Polis Pendanaan Hari Tua yang telah direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life Lawsuit regarding an industrial relations dispute concerning severance pay deemed inconsistent with the Collective Bargaining Agreement (CBA), as well as the failure to receive information regarding participation in the Restructured Retirement Fund Policy that had been transferred to IFG Life	Menang dalam putusan 17 Februari 2025 yang menyatakan gugatan NO dan telah *inkracht* Won the case, with the claim declared inadmissible (NO). The Decision dated February 17, 2025 has become final and binding (Inkracht)	Selesai Closed
• Ishak Witono (Penggugat) • PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat) • Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Turut Tergugat) • Ishak Witono (Plaintiff) • PT Asuransi Jiwa IFG (Defendant) • Head of the Surabaya District Attorney's Office (Co-Defendant)	Gugatan perbuatan melawan hukum sebagai penyewa aset dari Tergugat atas dicabutnya hak untuk menempati dan memanfaatkan objek sengketa setelah terjadinya tunggakan biaya sewa oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 177.300.000 Lawsuit for an unlawful act filed by a tenant of the Defendant's property concerning the revocation of the right to occupy and use the disputed property following the Plaintiff's failure to pay rent to the Defendant in the amount of IDR 177,300,000.	Belum ada Pending	Berjalan dengan rencana tindak lanjut: Berkoordinasi dengan unit kerja SAM terkait dengan pengurusan serta administrasi sewa penyewa Aset Tanah dan Bangunan objek sengketa Berkoordinasi dan berdiskusi dengan *corporate lawyer*. Melakukan pengadaan jasa konsultan Melakukan identifikasi dan analisis terhadap dokumen terkait objek sengketa Ongoing with Follow-up Actions: 1. Coordination with the SAM work unit regarding the management and administration of the lease of the disputed land and building assets. 2. Coordination and consultation with the corporate lawyer. 3. Procurement of legal consulting services. 4. Identification and analysis of documents related to the disputed property.

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• PT Asuransi Jiwa IFG (Penggugat) • Imam Djoferi (Tergugat) • PT Asuransi Jiwa IFG (Plaintiff) • Imam Djoferi (Defendant)	Gugatan yang diajukan oleh IFG Life kepada penyewa aset Tanah dan Bangunan di Jl. Anjasmoro No. 37 Surabaya sebagai upaya penanganan dan penguasaan kembali aset IFG Life Lawsuit filed by IFG Life against the lessee of land and building assets at Jl. Anjasmoro No. 37, Surabaya, as an effort to resolve the matter and regain control of IFG Life's assets	• Tingkat pertama: kalah dalam putusan tanggal 18 Desember 2025 • Tingkat banding: kalah • Tingkat kasasi: Belum ada • First Instance: Lost the case. Decision dated December 18, 2025. • Appeal Level: The Company did not prevail • Cassation Level: Pending.	Berjalan dengan rencana tindak lanjut: Berkoordinasi dengan unit kerja dan pihak terkait Melakukan pengadaan jasa konsultan mengenai perkara Ongoing with Follow-up Actions: Coordinating with relevant departments and parties Procuring consulting services regarding the case
• Imam Djoefri (Penggugat) • PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat) • BPN Kotamadya Surabaya I (Turut Tergugat I) • Kepala Dinas Perumahan Surabaya (Turut Tergugat II) • Kasi Intel Kejari Surabaya (III) • Imam Djoefri (Plaintiff) • PT Asuransi Jiwa IFG (Defendant) • Surabaya I Municipal Land Agency (Co-Defendant I) • Head of the Surabaya Housing Department (Co-Defendant II) • Head of the Intelligence Section of the Surabaya District Attorney's Office (III)	Gugatan perbuatan melawan hukum dari penghuni aset IFG Life Jl. Anjasmoro No. 37 Surabaya Lawsuit for unlawful acts filed by the occupant of the IFG Life property at Jl. Anjasmoro No. 37, Surabaya	• Tingkat pertama: menang dalam putusan tanggal 11 Juni 2025 • Tingkat banding: menang dalam putusan tanggal 19 Agustus 2025 • Tingkat kasasi: Belum ada • First Instance: Won the case. Decision dated June 11, 2025 • Appeal level: Won the case. Decision dated August 19, 2025 • Cassation Level: pending	Berjalan dengan rencana tindak lanjut: Berkoordinasi dengan pihak terkait Melakukan pengadaan jasa konsultan hukum Ongoing with Follow-up Actions: Coordinating with relevant parties Procuring legal consulting services
• 1.Rusmalina (Penggugat I) • 2.Yoga Prayudi (Penggugat II) • Yuda Prawira Dinata (Penggugat III) • Muhammad Yusril Satria (Penggugat IV) • PT Bank Mandiri Cabang Palangkaraya (Tergugat) • PT Asuransi Jiwa IFG (Turut Tergugat) • Rusmalina (Plaintiff I) • Yoga Prayudi (Plaintiff II) • Yuda Prawira Dinata (Plaintiff III) • Muhammad Yusril Satria (Plaintiff IV) • PT Bank Mandiri, Palangkaraya Branch (Defendant) • PT Asuransi Jiwa IFG (Co-Defendant)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Ahli Waris Juju Junaedi, peserta Asuransi Kredit Bank Mandiri yang telah meninggal dunia dan hingga kini belum mendapatkan SHM asli atas rumah yang dijadikan jaminan KPR. Unlawful act lawsuit filed by the heirs of Juju Junaedi, a deceased Bank Mandiri Credit Insurance policyholder, concerning the failure to return the original Certificate of Ownership (SHM) for the house pledged as collateral for the mortgage loan.	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
• PT Bank Tabungan Negara (Tergugat I) • PT Asuransi Jiwasraya (Tergugat II) • PT Binasentra Purna (Tergugat III) • PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat IV) • PT Bank Tabungan Negara (Defendant I) • PT Jiwasraya Insurance (Defendant II) • PT Binasentra Purna (Defendant III) • PT Asuransi Jiwa IFG (Defendant IV)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Ahli Waris peserta asuransi kredit Bank BTN a.n. Setiadi Waluyanto yang telah meninggal dunia di mana meminta Bank BTN untuk melunasi sisa *outstanding* dan meminta agar jaminan berupa SHM dapat dikembalikan kepada ahli waris A lawsuit for an unlawful act filed by the heirs of Bank BTN credit insurance policyholder Setiadi Waluyanto, who has passed away, requesting that Bank BTN pay off the outstanding balance and return the collateral in the form of a Certificate of Ownership (SHM) to the heirs	Menang dengan penetapan gugatan dicabut pada tanggal 20 Februari 2025 Won the case. The lawsuit was dismissed on February 20, 2025	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Kong Min (Penggugat) • Bank Mandiri KCP Palembang (Tergugat I) • KPKNL Jambi (Tergugat II) • PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat III) • BPN Kota Jambi • Kong Min (Plaintiff) • Bank Mandiri Palembang Branch (Defendant I) • Jambi KPKNL (Defendant II) • PT Asuransi Jiwa IFG (Defendant III) • Jambi City Land Agency	Gugatan oleh ahli waris peserta asuransi kredit Bank Mandiri a.n. Chentia Untari yang telah meninggal dunia di mana Penggugat telah memenuhi berkas-berkas sebagaimana permintaan Tergugat I, namun rumah Chentia dipajang untuk dilelang jual tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari Tergugat I. Lawsuit filed by the heirs of Bank Mandiri credit insurance policyholder Chentia Untari, who had passed away, in which the Plaintiff had submitted all documents as requested by Defendant I, yet Chentia's house was put up for auction without prior confirmation from Defendant I	Menang dalam putusan tanggal 20 Agustus 2025 dengan gugatan NO. Won the case, with the claim declared inadmissible (NO). Decision dated August 20, 2025.	Selesai Closed
• Demak Tobing (Penggugat) • Menteri BUMN (Tergugat I) • OJK (Tergugat II) • Jiwasraya (Tergugat III) • Dr. Hendrisman Rahum (Tergugat IV) • DPR (Tergugat V) • PT BPUI (Persero) (Turut Tergugat I) • PT Asuransi Jiwa IFG (Turut Tergugat II) • Demak Tobing (Plaintiff) • Minister of State-Owned Enterprises (Defendant I) • OJK (Defendant II) • Jiwasraya (Defendant III) • Dr. Hendrisman Rahum (Defendant IV) • House of Representatives (Defendant V) • PT BPUI (Persero) (Co-Defendant I) • PT Asuransi Jiwa IFG (Co-Defendant II)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemegang polis Jiwasraya yang menolak untuk mengikuti program restrukturisasi ke IFG Life dan melakukan tuntutan pembayaran nilai manfaat polis. A lawsuit for an unlawful act filed by Jiwasraya policyholders who refused to participate in the restructuring program with IFG Life and demanded payment of policy benefits.	• Tingkat Pertama: Menang dalam putusan tanggal 15 Juli 2025 dengan eksepsi kewenangan absolut • Tingkat banding: Menang dalam putusan tanggal 2 September 2025 dengan penguatan putusan peradilan tingkat pertama • First-instance level: Won the case based on an objection to the court's absolute jurisdiction. Decision dated July 15, 2025. • Appeal level: Won the case, with the first-instance judgment upheld. Decision dated September 2, 2025.	Selesai Closed
• Fitri Yanti (Penggugat) • Bank Mandiri (Tergugat I) • PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat II) • Fitri Yanti (Plaintiff) • Bank Mandiri (Defendant I) • PT Asuransi Jiwa IFG (Defendant II)	Gugatan wanprestasi oleh ahli waris debitur Bank Mandiri a.n. Welly Gunawan yang telah meninggal dunia atas penolakan klaim dengan alasan telah kadaluarsa Breach of contract lawsuit filed by the heirs of Bank Mandiri debtor Welly Gunawan, who has passed away, regarding the rejection of a claim on the grounds that it had expired	• Tingkat pertama: kalah dalam putusan tanggal 20 Januari 2026 • Tingkat banding: kalah pada tanggal 10 Maret 2026 • Tingkat kasasi: Belum ada • First Instance: Lost the case. Decision dated dated January 20, 2026 • Appeal level: Lost the case. Decision dated March 10, 2026 • Cassation Level: Pending	Berjalan Ongoing

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Bahana TCW (Penggugat) • Iwan setiawan (Tergugat I) • Iwan Kurniawan Lukminto (Tergugat II) • Mira Crhistina Setiady (Terguat III) • Allan Moran Severino (Tergugat IV) • Megawati (Tergugat V) • Karunakaran Ramamoorthy (Turut Tergugat I) • Arief Halim (Turut Tergugat II) • Edy Prasetyo Salim (Turut Tergugat III) • Dr. Mohamad Nasir Tamara Tamimi (Turut Tergugat IV) • Bahana TCW (Plaintiff) • Iwan Setiawan (Defendant I) • Iwan Kurniawan Lukminto (Defendant II) • Mira Christina Setiady (Defendant III) • Allan Moran Severino (Defendant IV) • Megawati (Defendant V) • Karunakaran Ramamoorthy (Co-Defendant I) • Arief Halim (Co-Defendant II) • Edy Prasetyo Salim (Co-Defendant III) • Dr. Mohamad Nasir Tamara Tamimi (Co-Defendant IV)	Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap mantan direksi dan komisaris serta pemegang saham pengendali Sritex Lawsuit for unlawful acts against former directors and commissioners as well as controlling shareholders of Sritex	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
• PT Indo Bharat Rayon (Pemohon) • PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Termohon I) • PT Sinar Pantja Djaja (Termohon II) • PT Bitratex Industries (Termohon III) • PT Primayudha Mandirijaya (Termohon IV) BTIM sebagai kreditur • PT Indo Bharat Rayon (Plaintiff) • PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Respondent I) • PT Sinar Pantja Djaja (Respondent II) • PT Bitratex Industries (Respondent III) • PT Primayudha Mandirijaya (Respondent IV) BTIM as creditor	Perjanjian Perdamaian Sritex yang telah dihomologasi berdasarkan putusan No.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, dibatalkan berdasarkan putusan No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg The Sritex Settlement Agreement, which had been homologated pursuant to Decision No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg, was annulled pursuant to Decision No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• PT Roda Pasifik Mandiri (Pemohon) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Termohon I) • PT Asuransi Jasa Raharja Putera (Termohon II) • PT Asuransi Multi Artha Guna (Termohon III) • PT Asuransi Intra Asia (Termohon IV) • PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (Termohon V) • PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (Termohon VI) • PT Asuransi Bumida 1967 (Termohon VII) • PT Asuransi Bintang (Termohon VIII) • PT Roda Pasifik Mandiri (Petitioner) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Respondent I) • PT Asuransi Jasa Raharja Putera (Respondent II) • PT Asuransi Multi Artha Guna (Respondent III) • PT Asuransi Intra Asia (Respondent IV) • PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (Respondent V) • PT Sahabat Artha Proteksi Insurance (Respondent VI) • PT Bumida 1967 Insurance (Respondent VII) • PT Bintang Insurance (Respondent VIII)	Permohonan penyelesaian perkara di LAPS SJK atas perkara tuntutan klaim asuransi *Property All Risk* yang diajukan oleh Termohon I kepada Jasindo sebagai *leader* dan 7 panel asuransi lain sebagai *member* dengan dasar permohonan tuntutan klaim atas permasalahan klaim asuransi *Property All Risk*, namun pada saat pengajuan klaim, polis tersebut belum dibayarkan preminya sampai jangka waktu dalam *Warranty Payment Clause* selama 30 hari selesai dan Jasindo telah melakukan pembatalan polis Request for case resolution at LAPS SJK regarding a Property All Risk insurance claim filed by Respondent I against Jasindo as the leader and 7 other insurance panel members, based on a claim regarding issues with the Property All Risk insurance policy; however, at the time the claim was filed, the premium for the policy had not been paid until the 30-day period specified in the Warranty Payment Clause had elapsed, and Jasindo had canceled the policy	Kalah Lost the case	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
Tingkat pertama: • PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Penggugat) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Tergugat I) • PT Asuka Bahari Nusantara (Tergugat II) • PT Radita Hutama Internusa (Tergugat III) Tingkat Banding: • PT Asuransi Jasa Indonesia (Pembanding) • PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Terbanding I) • PT Asuka Bahari Nusantara (Terbanding II) Tingkat kasasi: • PT Asuransi Jasa Indonesia (Pemohon Kasasi) • PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Termohon Kasasi) • PT Asuka Bahari Nusantara (Turut Termohon Kasasi I) • PT Radita Hutama Internusa (Turut Termohon Kasasi II) First Instance: • PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Plaintiff) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Defendant I) • PT Asuka Bahari Nusantara (Defendant II) • PT Radita Hutama Internusa (Defendant III) Appeal level: • PT Asuransi Jasa Indonesia (Appellant) • PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Respondent I) • PT Asuka Bahari Nusantara (Respondent II) Cassation Level: • PT Asuransi Jasa Indonesia (Petitioner) • PT Maju Lancar Sentosa Abadi (Respondent in the Appeal) • PT Asuka Bahari Nusantara (Co-Respondent I) • PT Radita Hutama Internusa (Co-Respondent II in the Appeal)	Upaya Hukum Banding atas Putusan Perkara penolakan klaim asuransi marine hull polis nomor: 201.501.200.19.00012/000/000 atas insiden tertabraknya kapal *Tug Boat* Mitra Angerah yang menabrak *oil barge* dan *floating jetty* milik Pelindo II Talang Duku, Jambi, yang menghukum Jasindo sebagai Tergugat I dan PT Asuka Bahari Nusantara sebagai Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi. Appeal against the ruling on the rejection of a marine hull insurance claim under policy number: 201.501.200.19.00012/000/000 regarding the incident in which the tugboat Mitra Angerah collided with an oil barge and a floating jetty owned by Pelindo II in Talang Duku, Jambi, which ordered Jasindo as Defendant I and PT Asuka Bahari Nusantara as Defendant II to pay damages jointly and severally.	• Tingkat pertama: Kalah • Tingkat banding: - • Tingkat kasasi: belum ada • First Instance: Lost the case. • Appeal level: - • Cassation level: Pending	Berjalan Ongoing
• Ni Made Dwi Parwati (Penggugat) • PT BPR Suryajaya Ubud Cabang Negara (Tergugat I) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Tergugat II) • OJK Provinsi Bali (Turut Tergugat) • Ni Made Dwi Parwati (Plaintiff) • PT BPR Suryajaya Ubud, Negara Branch (Defendant I) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Defendant II) • OJK Bali Province (Intervenor)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh ahli waris Tertanggung a.n. I Komang Darma atas Polis Asuransi Jiwa Kredit karena Penggugat sebagai ahli waris merasa keberatan atas dilakukannya *endorsement* polis yang telah dilakukan oleh *Representative Office* Denpasar dengan PT BPR Suryajaya Ubud Cabang Negara. A lawsuit for unlawful acts filed by the heirs of the Insured, namely I Komang Darma, regarding a Credit Life Insurance Policy, as the Plaintiff, as the heir, objected to the policy endorsement carried out by the Denpasar Representative Office with PT BPR Suryajaya Ubud, Negara Branch.	Menang dalam putusan tanggal 6 Februari 2026 dengan eksepsi kompetensi relatif Won the case based on an objection to the court's relative jurisdiction. Decision dated February 6, 2026.	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• PT Citra Mandiri Sejati (Penggugat) • PT Bosowa Asuransi Pusat-Jakarta Cq PT Bosowa Asuransi Cabang Semarang Cq PT Bosowa Asuransi KP Surakarta (Tergugat I) • PT Asuransi Jasa Indonesia Pusat Jakarta Cq PT Asuransi Jasa Indonesia KP Surabaya (Tergugat II) • PT Mitra Jasa Pratama (Turut Tergugat) • PT Citra Mandiri Sejati (Plaintiff) • PT Bosowa Asuransi Pusat - Jakarta c/o PT Bosowa Asuransi Semarang Branch c/o PT Bosowa Asuransi KP Surakarta (Defendant I) • PT Asuransi Jasa Indonesia Headquarters , Jakarta, c/o PT Asuransi Jasa Indonesia KP Surabaya (Defendant II) • PT Mitra Jasa Pratama (Co-Defendant)	Gugatan wanprestasi terkait penolakan Klaim oleh PT Asuransi Bosowa (*Leader*) asuransi *marine cargo* dari Tertanggung PT Citra Mandiri Sejati Breach of contract lawsuit regarding the denial of a claim by PT Asuransi Bosowa (Leader), a marine cargo insurer, against the insured, PT Citra Mandiri Sejati	Menang dalam putusan tanggal 12 November 2025 Won the case. Decision dated November 12, 2025	Selesai Closed
• T Nurfa Anugerah Raya (Pemohon Kasasi) • PT Cipta Bangun Dimensi Nusantara (Termohon Kasasi I) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Termohon Kasasi II) • T Nurfa Anugerah Raya (Appellant) • PT Cipta Bangun Dimensi Nusantara (Respondent I in the Appeal) • PT Asuransi Jasa Indonesia (Respondent II in the Appeal)	Upaya hukum kasasi atas Putusan Nomor 585/PDT/2024/PT DKI yakni gugatan awal diajukan oleh PT Nurfa Anugrah Raya selaku *principal* sehubungan dengan dilakukan pencairan klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan urugan pemadatan aspal dan pemasangan saluran-proyek HMID External Work di Cikarang. *Principal* merasa keberatan atas pencairan klaim tersebut yang dilakukan oleh PT Cipta Dimensi Baja Nusantara (*obligee*) kepada Jasindo. Tidak terselesaikannya pekerjaan disebabkan karena terdapat penambahan biaya operasional dan *obligee* tidak berkenan untuk membayarkan penambahan biaya tersebut, sehingga sisa progres pekerjaan tidak dilaksanakan oleh *principal*. The cassation appeal against Judgment No. 585/PDT/2024/PT DKI concerns an initial lawsuit filed by PT Nurfa Anugerah Raya as the principal regarding the disbursement of claims for the Advance Payment Guarantee and Performance Guarantee for asphalt compaction and drainage installation work—the HMID External Work project in Cikarang. The principal objected to the payment of these claims made by PT Cipta Dimensi Baja Nusantara (the obligee) to Jasindo. The work remained uncompleted due to additional operational costs, and the obligee was unwilling to pay these additional costs; consequently, the principal did not carry out the remaining work.	Menang Won the case	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• PT Bahana Artha Ventura (Penggugat) • KSPPS BMT El Anugrah Sejahtera (Tergugat I) • Syuhi Fandy Chair/Ketua (Tergugat II) • Yusnita/Sekretaris (Tergugat III) • Sopian/Bendahara (Tergugat IV) • PT Bahana Artha Ventura (Plaintiff) • KSPPS BMT El Anugrah Sejahtera (Defendant I) • Syuhi Fandy Chair/ Chairperson (Defendant II) • Yusnita/Secretary (Defendant III) • Sopian/Treasurer (Defendant IV)	Gugatan wanprestasi atas kredit macet untuk fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BAV Breach of contract lawsuit regarding a non-performing loan for a financing facility provided by BAV	Kalah Lost the case	Selesai Closed
• PT. Esha Dwikarya (Penggugat 1) • PT. Multi Adiptama (Penggugat 2) • PT. Bahana Artha Ventura (Tergugat I) • KPKNL Denpasar (Tergugat II) • Pemerintah Republik Indonesia Cq. ATR/BPN RI Cq. ATR/BPN Provinsi Bali Cq. ATR/BPN Kabupaten Tabanan (Tergugat III) • PT. Esha Dwikarya (Plaintiff 1) • PT. Multi Adiptama (Plaintiff 2) • PT. Bahana Artha Ventura (Defendant I) • Denpasar KPKNL (Defendant II) • The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) of Bali Province, represented by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) of Tabanan Regency (Defendant III)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur dan pemilik agunan terhadap pihak pembiayaan terkait pelaksanaan lelang tanah dan bangunan akibat wanprestasi pembayaran pembiayaan, di mana Penggugat menilai Tergugat tidak melakukan upaya penyelesaian terbaik sebelum pelaksanaan lelang serta meminta penghentian proses lelang dan pengenaan biaya tambahan atas kewajiban pembiayaan. A lawsuit for unlawful acts filed by the debtor and the owner of the collateral against the financing party regarding the auction of land and buildings due to breach of contract on financing payments, in which the Plaintiffs argued that the Defendants did not make their best efforts to resolve the matter prior to the auction and requested the suspension of the auction process and the imposition of additional fees on the financing obligations.	Menang dengan diterimanya eksepsi Tergugat I dan III Won the case, with the preliminary objections of Defendant I and Defendant III granted.	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Azhari Lubis (Penggugat) • BRI (Tergugat I) • PT Bahana Sekuritas (Tergugat II) • Azhari Lubis (Plaintiff) • BRI (Defendant I) • PT Bahana Sekuritas (Defendant II)	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Azhari Lubis kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku emiten dan PT Bahana Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Transaksi IPO BRI) pada tahun 2003 terkait dengan program ESOP yang diberikan oleh BRI kepada para karyawannya di mana Saudara Azhari Lubis adalah salah satu karyawan penerima program *Employee Stock Allocation* di mana Penggugat merasa BS lalai melakukan transaksi atas sisa saham sebanyak 35.000 lembar dengan sengaja tanpa melibatkan dan persetujuan Penggugat. A lawsuit for an unlawful act filed by Azhari Lubis against PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the issuer and PT Bahana Sekuritas as the underwriter in the Initial Public Offering of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI IPO Transaction) in 2003, related to the ESOP program provided by BRI to its employees—in which Mr. Azhari Lubis was one of the employees receiving the Employee Stock Allocation program—where the Plaintiff alleges that BS negligently executed a transaction involving 35,000 remaining shares intentionally without involving or obtaining the Plaintiff's consent.	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
Hamdi Mahmud (Pelawan) • PT Bank Mandiri Tbk qq. Bank Mandiri Region II Jakarta/ Jakarta I Regional Retail Collection & Recovery Jakarta I qq. Business Banking Center Tangerang Terlawan I • Nurlaela Hairani Terlawan II • PT Duta Balai Lelang Terlawan III • Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Cq KPKNL Bogor Terlawan IV • PT Jaminan Kredit Indonesia (Terlawan V) • Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Cq. Kanwil Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Terlawan VI Hamdi Mahmud (Objector) • PT Bank Mandiri Tbk qq. Bank Mandiri Region II Jakarta/ Jakarta I Regional Retail Collection & Recovery Jakarta I qq. Business Banking Center Tangerang (Respondent I) • Nurlaela Hairani Respondent II • PT Duta Balai Lelang Respondent III • DJKN DKI Jakarta Regional Office c/o KPKNL Bogor Respondent IV • PT Jaminan Kredit Indonesia (Respondent V) • Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN, c/o West Java Provincial Office, c/o Head of the Depok City Land Office Respondent VI	Gugatan perbuatan melawan hukum atas merasa dirugikannya Penggugat bahwa terima tanah dan bangunan rumah yang dijadikan agunan dalam memperoleh fasilitas kredit di Bank Mandiri Business Banking Center Tangerang dilakukan pelelangan dan dijual dibawah harga pasar yaitu sebesar Rp647.000.000.000,-, dikarenakan Harga Pasar adalah sebesar Rp1.500.000.000 A lawsuit for an unlawful act based on the Plaintiff's claim of damages arising from the fact that the land and house used as collateral to obtain a loan facility at Bank Mandiri Business Banking Center in Tangerang were auctioned off and sold below market value—specifically, for IDR 647,000,000,000—whereas the market value was IDR 1,500,000,000	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Dhani Ardiansyah Sinaga, dkk (Para Penggugat) • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Perdagangan (Tergugat I) • PT Bank BRI (Persero) Tbk, Cabang Perdagangan (Tergugat II) • PT Jamkrindo Cabang Medan (Tergugat III) • Dhani Ardiansyah Sinaga, et al. (Plaintiffs) • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Trade Unit (Defendant I) • PT Bank BRI (Persero) Tbk, Perdagangan Branch (Defendant II) • PT Jamkrindo, Medan Branch (Defendant III)	Gugatan perbuatan melawan hukum atas penolakan klaim penjaminan BRIGUNA Risiko PHK Lawsuit for unlawful acts regarding the rejection of a BRIGUNA layoff risk guarantee claim	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
• PT Bina Artha Ventura (Penggugat) • PT Jamkrindo Kantor Pusat Jakarta (Tergugat I) • PT Jamkrindo Kantor Cabang Jakarta (Tergugat II) • PT Bina Artha Ventura (Plaintiff) • PT Jamkrindo Jakarta Headquarters (Defendant I) • PT Jamkrindo Jakarta Branch Office (Defendant II)	Gugatan wanprestasi yang diajukan kepada PT Jamkrindo dikarenakan permohonan klaim ditolak, tidak dapat disetujui dikarenakan membutuhkan konfirmasi dan kelengkapan dokumen dengan memperhatikan kesepakatan perdamaian atas penyelesaian seluruh pembayaran terhadap pengajuan klaim. Breach of contract lawsuit filed against PT Jamkrindo following the rejection of a claim application, which could not be approved because it required confirmation and supporting documents, taking into account the settlement agreement governing the resolution of all payments related to the submitted claim.	• Tingkat pertama: Menang dengan putusan tanggal 17 Desember 2025 yang menolak tuntutan Penggugat • Tingkat banding: menang dalam putusan tanggal 4 Maret 2026 yang menguatkan putusan tingkat pertama • First Instance: Won the case, with the Plaintiff's claim dismissed. Decision dated December 17, 2025. • Appeal level: Won the case, with the first-instance judgment upheld. Decision dated March 4, 2026	Selesai Closed
• Thobias Saureh (Penggugat) • Bank BTN Cabang Manado (Tergugat I) • Jamkrindo Cabang Manado (Tergugat II) • Thobias Saureh (Plaintiff) • Bank BTN Manado Branch (Defendant I) • Jamkrindo, Manado Branch (Defendant II)	Gugatan wanprestasi oleh orang tua debitur a.n. Noce Ronald Saureh terhadap PT Bank BTN Cabang Manado terkait permintaan pelunasan KPR setelah debitur meninggal dunia, meskipun Penggugat menganggap kewajiban kredit telah dijamin oleh Jamkrindo berdasarkan skema penjaminan kredit antara Bank BTN dan Jamkrindo. Breach of contract lawsuit filed by the parents of the debtor, Noce Ronald Saureh, against PT Bank BTN Manado Branch regarding a demand for repayment of a mortgage loan following the debtor's death, even though the Plaintiff argued that the loan obligation was guaranteed by Jamkrindo under the credit guarantee scheme between Bank BTN and Jamkrindo.	Menang dalam putusan tanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan gugatan gugatan tidak dapat diterima Won the case, with the claim declared inadmissible. Decision dated October 2, 2024.	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• PT Bank BJB (Penggugat) • PT Jamkrindo (Tergugat) • PT Karya Mulia Lestari Turut (Tergugat I) • PT Prabu Pendawa Motor (Turut Tergugat II) • PT Mitra Penjaminan Nusantara (Turut Tergugat III) • Notaris H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. Turut (Tergugat IV) • PT Bank BJB (Plaintiff) • PT Jamkrindo (Defendant) • PT Karya Mulia Lestari (Co-Defendant I) • PT Prabu Pendawa Motor (Co-Defendant II) • PT Mitra Penjaminan Nusantara (Co-Defendant III) • Notary H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. (Co-Defendant IV)	Gugatan wanprestasi kepada Jamkrindo atas penolakan klaim KBG atas nama PT Karya Mulia Lestari untuk Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp9.460.000.000,-. Pengajuan Klaim disebabkan PT Karya Mulia Lestari tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Prabu Pendawa Motor selaku penyedia kendaraan roda empat. Breach of contract lawsuit against Jamkrindo regarding the rejection of a KBG claim on behalf of PT Karya Mulia Lestari for a Performance Bond in the amount of IDR 9,460,000,000. The claim was filed because PT Karya Mulia Lestari failed to fulfill its payment obligations to PT Prabu Pendawa Motor as the provider of four-wheeled vehicles.	• Tingkat pertama: kalah dengan putusan 11 Februari 2025 yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian • Tingkat banding: kalah dengan putusan tanggal 16 April 2025 yang menguatkan putusan tingkat pertama • Tingkat kasasi: kalah dengan putusan tanggal 12 November 2025 yang menolak permohonan kasasi • First-instance level: Lost the case. The Decision dated February 11, 2025 partially granted the Plaintiff's claim. • Appeal level: Lost the case, with the first-instance judgment upheld. Decision dated April 16, 2025. • Cassation level: Lost the case, with the petition for cassation dismissed. Decision dated November 12, 2025.	Selesai Closed
• Gangsar Sumartono (Penggugat) • Bank BRI Cabang Purwokerto (Tergugat I) • KPKNL Purwokerto (Tergugat II) • Jefry (Tergugat III) • BPN/ATR Banyumas (Tergugat IV) • Jamkrindo Cabang Purwokerto(Turut Tergugat) • Gangsar Sumartono (Plaintiff) • Bank BRI Purwokerto Branch (Defendant I) • KPKNL Purwokerto (Defendant II) • Jefry (Defendant III) • BPN/ATR Banyumas (Defendant IV) • Jamkrindo Purwokerto Branch (Co-Defendant)	Gugatan perbuatan melawan hukum oleh debitur terhadap Bank BRI Cabang Purwokerto, KPKNL Purwokerto, dan pihak pembeli lelang terkait pelaksanaan lelang objek jaminan kredit yang dianggap merugikan karena nilai lelang dinilai jauh di bawah harga taksiran, dengan Jamkrindo turut ditarik sebagai Turut Tergugat karena dianggap seharusnya memberikan penjaminan atas fasilitas kredit Penggugat. Lawsuit for unlawful acts filed by the debtor against Bank BRI Purwokerto Branch, KPKNL Purwokerto, and —the auction purchaser— regarding the conduct of an auction of collateral for a loan, which was deemed detrimental because the auction value was assessed to be far below the appraised value; Jamkrindo was also named as a Co-Defendant because it was deemed to have been obligated to provide a guarantee for the Plaintiff's credit facility.	Menang dengan putusan tanggal 4 September 2024 dalam eksepsi kompetensi relatif Won the case based on an objection to the court's relative jurisdiction. Decision dated September 4, 2024.	Selesai Closed
• YLKAI (Penggugat) • Bank Jateng Cabang Demak (Tergugat I) • Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bank Jateng Demak (Tergugat II) • PT Jamkrindo Cabang Semarang (Tergugat III) • YLKAI (Plaintiff) • Bank Jateng Demak Branch (Defendant I) • Bank Jateng Demak Microfinance Institution (Defendant II) • PT Jamkrindo, Semarang Branch (Defendant III)	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perihal perlindungan konsumen ahli waris a.n. Alfiyah didasarkan gugatan *legal standing* perihal Subrogasi Jamkrindo atas dibayarnya klaim akibat debitur meninggal dunia pada BPD Jawa Tengah Cabang Demak terhadap agunan ahli waris an. Alfiyah. The lawsuit for unlawful acts regarding the consumer protection of the heirs of Alfiyah is based on a legal standing claim regarding Jamkrindo's subrogation rights arising from the payment of a claim due to the debtor's death at the Demak Branch of BPD Jawa Tengah against the collateral held by the heirs of Alfiyah.	• Tingkat pertama: menang dengan putusan tanggal 17 Desember 2024 • Tingkat banding: menang dengan putusan tanggal 11 Juni 2025 yang menyatakan gugatan pembanding semula penggugat tidak dapat diterima • First-instance level: Won the case. Decision dated December 17, 2024. • Appeal level: Won the case, with the Appellant's (formerly the Plaintiff's) claim declared inadmissible. Decision dated June 11, 2025.	

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Go Sisilia (Penggugat) • PT Bank NTT Cabang Maumere (Tergugat) • PT Jamkrindo Cabang Kupang (Turut Tergugat I) • Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (Turut Tergugat II) • Go Sisilia (Plaintiff) • PT Bank NTT, Maumere Branch (Defendant) • PT Jamkrindo, Kupang Branch (Co-Defendant I) • Sikka Regency Land Office (Co-Defendant II)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh istri Alm. Njo Harry Santoso selaku Direktur CV Cahaya Nusantara, terkait tindakan Bank NTT Cabang Maumere yang tetap melakukan penagihan atas fasilitas kredit modal kerja meskipun telah diserahkan agunan berupa tanah dengan SHM Nomor 314, 134, dan 313 kepada Bank NTT Cabang Maumere. A lawsuit for unlawful acts filed by the wife of the late Njo Harry Santoso, Director of CV Cahaya Nusantara, regarding the actions of Bank NTT Maumere Branch, which continued to collect on a working capital loan facility even though collateral in the form of land with SHM Numbers 314, 134, and 313 had been handed over to Bank NTT Maumere Branch.	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
• PT Maumere Jaya Raya (Penggugat) • Bank NTT Cabang Maumere (Tergugat) • PT Jamkrindo Cabang Kupang (Turut Tergugat I) • Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (Turut Tergugat II) • PT Maumere Jaya Raya (Plaintiff) • Bank NTT Maumere Branch (Defendant) • PT Jamkrindo, Kupang Branch (Co-Defendant I) • Sikka Regency Land Office (Co-Defendant II)	Gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan Bank NTT Cabang Maumere tetap melakukan penagihan kepada PT Maumere Jaya Raya atas pinjaman kredit modal kerja di Bank NTT Cabang Maumere, di mana atas pinjaman kredit modal kerja tersebut telah diserahkan agunan berupa tanah dengan nomor SHM 1548 dan 311 kepada Bank NTT Cabang Maumere. Unlawful act lawsuit arising from Bank NTT Maumere Branch's continued collection efforts against PT Maumere Jaya Raya in relation to a working capital loan granted by Bank NTT Maumere Branch, for which land under Certificates of Ownership (SHM) Nos. 1548 and 311 had been provided as collateral to Bank NTT Maumere Branch.	Belum ada Pending	Berjalan Ongoing
• Hendri Li Yuzong (Penggugat) • PT Central Sejahtera Indonesia (Tergugat I) • LPDB-KUMKM (Tergugat II) • Jamkrindo Kantor Cabang Khusus Jakarta (Tergugat III) • Hendri Li Yuzong (Plaintiff) • PT Central Sejahtera Indonesia (Defendant I) • LPDB-KUMKM (Defendant II) • Jamkrindo Jakarta Special Branch Office (Defendant III)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Hendri Li Yuzong dengan turut menarik PT Jamkrindo sebagai pihak dalam perkara, terkait tidak dilakukannya pembayaran klaim atas wanprestasi pembayaran utang PT Central Sejahtera Indonesia kepada LPDB-KUMKM. Unlawful act lawsuit filed by Hendri Li Yuzong, naming PT Jamkrindo as a party to the lawsuit, concerning the failure to pay a claim arising from PT Central Sejahtera Indonesia's breach of its debt repayment obligations to LPDB-KUMKM.	Menang dengan putusan tanggal 17 Desember 2025 yang mengabulkan eksepsi Tergugat III dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima Won the case, with Defendant III's preliminary objection granted and the claim declared inadmissible. Decision dated December 17, 2025.	Selesai Closed
• Tohiron (Penggugat) • Jamkrindo Cabang Tegal (Tergugat) • Tohiron (Plaintiff) • Jamkrindo Tegal Branch (Defendant)	Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh mantan karyawan PT Jamkrindo Cabang Tegal dikarenakan karyawan yang bersangkutan telah mangkir kerja atas Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT Jamkrindo Nomor:08/SK/SDM/X/2023 tentang Mutasi Karyawan. A lawsuit regarding a termination of employment dispute filed by a former employee of PT Jamkrindo Tegal Branch because the employee in question had been absent from work pursuant to the Decision of the Head of the Human Resources Division of PT Jamkrindo No. 08/SK/SDM/X/2023 regarding Employee Transfer.	Kalah dengan putusan tanggal 10 Maret 2025 Lost the case. Decision dated March 10, 2025.	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
Tingkat Pertama • PT Indosat Tbk (Penggugat) • PT BTN Cabang Bumi Serpong Damai (Tergugat) • CV Jaya Bersama Turut (Tergugat I) • PT Jamkrindo (Turut Tergugat II) • Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat III) Tingkat Banding • PT BTN Cabang Bumi Serpong Damai (Pembanding) • PT Indosat Tbk (Terbanding) • CV Jaya Bersama Turut (Terbanding I) • PT Jamkrindo (Turut Terbanding II) • OJK (Turut Terbanding III) First Instance • PT Indosat Tbk (Plaintiff) • PT BTN, Bumi Serpong Damai Branch (Defendant) • CV Jaya Bersama Intervenor (Defendant I) • PT Jamkrindo (Co-Defendant II) • Financial Services Authority (Co-Defendant III) Appeal level: • PT BTN, Bumi Serpong Damai Branch (Appellant) • PT Indosat Tbk (Respondent) • CV Jaya Bersama Intervenor (Respondent I) • PT Jamkrindo (Co-Respondent II) • OJK (Co-Respondent III)	Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Indosat kepada PT Bank Tabungan Negara didasarkan dengan tidak dibayarkannya klaim oleh PT Bank Tabungan Negara atas Perjanjian Kerja Sama Layanan antara Indosat dengan CV Jaya Bersama dimana CV Jaya Besama tidak dapat melakukan pelaksanaan pembayaran kepada PT Indosat, Tbk. The breach of contract lawsuit filed by Indosat against PT Bank Tabungan Negara is based on PT Bank Tabungan Negara's failure to pay a claim under the Service Cooperation Agreement between Indosat and CV Jaya Bersama, whereby CV Jaya Bersama was unable to make payments to PT Indosat Tbk.	• Tingkat pertama: kalah dengan putusan 13 November 2025 • Tingkat banding: menang dengan putusan tanggal 21 Januari 2026 yang menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima • Tingkat kasasi: belum ada • First-instance level: Lost the case. Decision dated November 13, 2025. • Appeal level: Won the case, with the Respondent's claim declared inadmissible. Decision dated January 21, 2026. • Cassation level: Pending	Berjalan Ongoing
• Syarif (Penggugat) • PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau (Tergugat I) • PT Aru Raharja (Tergugat II) • Syarif (Plaintiff) • PT Jasa Raharja, Riau Islands Branch (Defendant I) • PT Aru Raharja (Defendant II)	Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh mantan pekerja *outsourcing* PT Aru Raharja terhadap PT Jasa Raharja dan PT Aru Raharja terkait pemenuhan hak-hak pekerja setelah berakhirnya PKWT, khususnya mengenai uang pesangon dan uang lembur, di mana Penggugat menganggap dirinya sebagai pekerja PT Jasa Raharja karena pembayaran upah pada periode tertentu dilakukan melalui PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau. A lawsuit regarding a dispute over termination of employment filed by a former outsourced employee of PT Aru Raharja against PT Jasa Raharja and PT Aru Raharja concerning the fulfillment of employee rights following the expiration of a fixed-term employment contract (PKWT), specifically regarding severance pay and overtime pay, in which the Plaintiff considers himself an employee of PT Jasa Raharja because wage payments for a certain period were made through PT Jasa Raharja Riau Islands Branch.	Menang dengan putusan tanggal 22 Oktober 2024 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima Won the case, with the claim declared inadmissible. Decision dated October 22, 2024.	Selesai Closed

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Dian Fuji Astuti (Penggugat) • Liesye Isnayanti (Tergugat I) • Livira Isna Yuliarti (Tergugat II) • Wahana (Tergugat III) • Ketua KUD Karya Tani Kec. Paseh (Tergugat IV) • Didi Supendi (Tergugat V) • PT Jasa Raharja (Tergugat VI) • Kantor Kepala Desa Tangsi Mekar (Turut Tergugat I) • Kantor Kecamatan Paseh (Turut Tergugat II) • BPN Kabupaten Bandung (Turut Tergugat III) • Dian Fuji Astuti (Plaintiff) • Liesye Isnayanti (Defendant I) • Livira Isna Yuliarti (Defendant II) • Wahana (Defendant III) • Chairperson of the Karya Tani Farmers' Cooperative, Paseh Subdistrict (Defendant IV) • Didi Supendi (Defendant V) • PT Jasa Raharja (Defendant VI) • Office of the Village Head of Tangsi Mekar (Co-Defendant I) • Paseh Subdistrict Office (Co-Defendant II) • Bandung Regency Land Agency (Co-Defendant III)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terkait sengketa kepemilikan tanah yang dijadikan jaminan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) di PT Jasa Raharja, di mana Penggugat mendalilkan adanya pembuatan Akta Jual Beli baru tanpa persetujuannya yang kemudian digunakan sebagai jaminan pinjaman atas nama KUD Karya Tani Kecamatan Paseh, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas penguasaan objek sengketa oleh pihak lain. A lawsuit for unlawful acts was filed regarding a land ownership dispute involving land used as collateral for the Small Business and Cooperative Development Program (PUKK) at PT Jasa Raharja, in which the Plaintiff alleges that a new Deed of Sale was drawn up without his consent and subsequently used as loan collateral in the name of KUD Karya Tani, Paseh Subdistrict, thereby causing the Plaintiff to suffer damages due to another party's control over the disputed property.	• Tingkat pertama: menang dengan putusan tanggal 15 Agustus 2024 • Tingkat banding: menang • Tingkat kasasi: menang dengan putusan tanggal 1 Desember 2025 • First-instance level: Won the case. Decision dated August 15, 2024. • Appeal level: Won the case. • Cassation level: Won the case. Decision dated December 1, 2025	Selesai Closed
• Setiawan (Penggugat) • PT Semen Indonesia Distributor Pusat (Tergugat I) • PT Semen Indonesia Distributor Cabang Bogor (Tergugat II) • Pahrudin (Tergugat III) • RSUD Cibinong Bogor (Turut Tergugat I) • PT Jasa Raharja (Turut Tergugat II)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh orang tua korban kecelakaan lalu lintas terhadap pengemudi dan perusahaan pemilik kendaraan, karena dianggap tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian tanggung jawab atas kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya anak Penggugat.	Belum ada	Berjalan dengan rencana tindak lanjut: • Mengagendakan rapat internal Divisi Kepatuhan dan Hukum terkait penanganan perkara; • melakukan koordinasi dengan unit kerja dan kantor cabang terkait untuk mengumpulkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan; • menghadiri dan mewakili perusahaan pada setiap tahapan persidangan oleh beberapa orang pegawai yang menerima kuasa dari Direksi; • menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan pada setiap tahapan persidangan (jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan).

Pihak yang Berperkara Litigants	**Pokok Perkara** Merits of Case	**Putusan Pengadilan** Verdict	**Status Perkara** Case Status
• Setiawan (Plaintiff) • PT Semen Indonesia Central Distributor (Defendant I) • PT Semen Indonesia Bogor Branch Distributor (Defendant II) • Pahrudin (Defendant III) • Cibinong Bogor Regional General Hospital (Co-Defendant I) • PT Jasa Raharja (Co-Defendant II)	A lawsuit for an unlawful act filed by the parents of a traffic accident victim against the driver and the vehicle owner's company, on the grounds that they lacked good faith in resolving liability for the accident that caused the death of the Plaintiff's child.	Pending	Ongoing with follow-up action: • Scheduling internal meetings of the Compliance and Legal Division regarding the handling of the case. • Coordinating with the relevant work units and branch offices to gather the required information and supporting documents. • Attending court hearings and representing the Company at each stage of the proceedings through employees authorized by the Board of Directors. • Preparing and submitting the required documents at each stage of the proceedings (statement of defense, rejoinder, evidentiary documents, and concluding brief).
• Sabdo Lukito (Penggugat) • PT Jasa Raharja Cabang Tk.I Tasikmalaya (Tergugat) • Sabdo Lukito (Plaintiff) • PT Jasa Raharja, Tasikmalaya Class I Branch (Defendant)	Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh orang tua korban kecelakaan lalu lintas terhadap PT Jasa Raharja Cabang Tk.I Tasikmalaya terkait penolakan jaminan santunan atas kecelakaan tunggal akibat tertimpa pohon tumbang, di mana Penggugat berpendapat bahwa UU Nomor 34 Tahun 1964 tidak secara tegas mengecualikan kejadian tersebut dari lingkup jaminan Jasa Raharja. A lawsuit for an unlawful act filed by the parents of a traffic accident victim against PT Jasa Raharja, Tasikmalaya Branch I, regarding the denial of compensation coverage for a single-vehicle accident caused by a fallen tree, in which the Plaintiff argues that Law No. 34 of 1964 does not explicitly exclude such incidents from the scope of Jasa Raharja's coverage.	• Tingkat pertama: menang dengan putusan tanggal 30 Oktober 2025 • Tingkat banding: menang dengan putusan tanggal 12 Januari 2026 yang menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima • First-instance level: Won the case. Decision dated October 30, 2025. • Appeal level: Won the case, with the Plaintiff's claim in the principal action declared inadmissible. Decision dated January 12, 2026.	Selesai Closed

PENGUNGKAPAN

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANGGOTA *HOLDING*

IFG senantiasa menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, sepanjang tahun 2025, IFG tidak memperoleh sanksi administratif dari instansi atau otoritas yang berwenang.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES CURRENTLY FACED BY HOLDING COMPANY MEMBERS

IFG consistently conducts all of its operations in accordance with the laws and regulations in effect in Indonesia. Accordingly, throughout 2025, IFG did not receive any administrative sanctions from any competent agencies or authorities.

Kasus Hukum Anggota Holding IFG Tahun 2023-2025
Legal Cases Involving Holding Company Members IFG for 2023–2025

IFG Group	2025		2024	
	Perdata Civil	**Pidana** Criminal	**Perdata** Civil	**Pidana** Criminal
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)	**5**	**Nihil** None	4	Nihil None
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)	**13**	**Nihil** None	6	Nihil None
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	**11**	**Nihil** None	11	Nihil None
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)	**7**	**Nihil** None	11	Nihil None
PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)	**2**	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)	**Nihil** None	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	**1**	**Nihil** None	4	Nihil None
PT Bahana Sekuritas (BS)	**1**	**Nihil None**	4	Nihil None
PT Bahana Kapital Investama (BKI)	**Nihil** None	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
PT Bahana Mitra Investa (BMI)	**Nihil** None	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	**10**	**Nihil** None	5	Nihil None
Total	**50**	**Nihil** None	**45**	**Nihil** None

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

IFG senantiasa menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, sepanjang tahun 2025, IFG tidak memperoleh sanksi administratif dari instansi atau otoritas yang berwenang.

DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELEVANT AUTHORITIES

IFG consistently conducts all of its operational activities in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Accordingly, throughout 2025, IFG did not receive any administrative sanctions from any competent agencies or authorities.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Pengelolaan informasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Perusahaan untuk menciptakan nilai sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. IFG berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya transparansi, dengan menyediakan akses informasi secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Keterbukaan Informasi Publik menjadi sarana penting untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap kegiatan Perusahaan serta aspek-aspek yang terkait dengan kepentingan masyarakat, selaras dengan ketentuan internal mengenai pengelolaan informasi.

IFG terus berupaya menyajikan informasi yang lengkap, relevan, dan terkini, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap data yang termasuk kategori rahasia Perusahaan. Proses pengungkapan informasi dijalankan oleh pejabat atau unit kerja yang memiliki wewenang, tanggung jawab, dan fungsi sesuai ketentuan, yang dalam hal ini dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Information management forms part of the Company's efforts to create value while strengthening stakeholder trust. IFG is committed to implementing the principles of good corporate governance, particularly transparency, by providing comprehensive access to information for both internal and external stakeholders. Public Information Disclosure serves as an important means of enhancing public Supervisory of the Company's activities and matters related to the public interest, in accordance with the Company's internal policies on information management.

IFG continuously strives to provide complete, relevant, and up-to-date information while ensuring the protection of information classified as confidential. Information is disclosed by authorized officers or work units with the appropriate authority, responsibilities, and functions in accordance with applicable provisions. This function is managed by the Corporate Secretary.

KEBIJAKAN AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan tingkat transparansi, IFG menyediakan akses informasi melalui berbagai saluran komunikasi, antara lain laporan resmi, siaran pers, serta publikasi di media massa. Inisiatif ini selaras dengan prinsip kebebasan informasi publik yang diatur oleh pemerintah, sekaligus memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atas informasi terkini terkait kegiatan dan kinerja IFG.

Informasi mengenai IFG dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi www.ifg.id, yang disediakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Situs ini menyajikan berbagai informasi penting, termasuk profil Perusahaan, produk dan layanan, laporan kinerja keuangan, serta informasi korporasi lainnya.

Selain itu, IFG juga membuka jalur komunikasi langsung bagi pihak yang ingin memperoleh informasi dengan menghubungi kantor pusat IFG di alamat berikut:

COMPANY INFORMATION AND DATA ACCESS POLICY

To enhance transparency, IFG provides access to information through various communication channels, including official reports, press releases, and publications in the mass media. This initiative aligns with the principles of public information freedom established by the government, while also meeting stakeholders' needs for up-to-date information regarding IFG's activities and performance.

Information about IFG is publicly available on the official website www.ifg.id, which is provided in both Indonesian and English. This website features a variety of important information, including the Company's profile, products and services, financial performance reports, and other corporate information.

In addition, IFG also provides a direct communication channel for those wishing to obtain information by contacting IFG's headquarters at the following address:

Kantor Pusat IFG	**IFG Head Office**
Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 18	**Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor**
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58	**Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58**
RT.05/RW.003, Senayan, Kebayoran Baru	**RT.05/RW.003, Senayan, Kebayoran Baru**
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190	**South Jakarta, DKI Jakarta 12190**
Telp. +62 21 2505080	**Phone: +62 21 50890929**
Situs Web: www.ifg.id	**Website: www.ifg.id**

KORESPONDENSI DAN LAPORAN BERKALA

IFG secara konsisten menyusun dan menyampaikan informasi keuangan maupun nonkeuangan secara transparan kepada Pemegang Saham, para pemangku kepentingan, serta lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Informasi tersebut disampaikan secara tepat waktu, lengkap, akurat, mutakhir, menyeluruh, dan memadai, sejalan dengan prosedur, jenis, dan cakupan yang ditetapkan dalam regulasi terkait Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui laporan-laporan berikut:

1. Laporan Tahunan;
2. Laporan Keuangan; dan
3. Surat kepada Pemegang Saham.

CORRESPONDENCE AND PERIODIC REPORTS

IFG consistently compiles and discloses financial and non-financial information transparently to shareholders, stakeholders, and relevant institutions, in accordance with applicable regulations. This information is disclosed in a timely, complete, accurate, up-to-date, comprehensive, and adequate manner, in line with the procedures, types, and scope stipulated in regulations regarding Corporate Financial Transparency. This information is disclosed through the following reports:

1. Annual Report;
2. Financial Statements; and
3. Letter to Shareholders.

PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN PERUSAHAAN

Sampai dengan 31 Desember 2025, IFG telah menerbitkan total sebanyak 8.683 siaran pers di berbagai media massa, yang memuat informasi terkait kinerja Perusahaan dan aksi korporasi. Rincian penerbitan siaran pers tersebut adalah sebagai berikut:

COMPANY PUBLICATIONS AND PRESS RELEASES

As of December 31, 2025, IFG had published a total of 8,683 press releases in various media outlets, containing information regarding the Company's performance and corporate actions. The details of these press releases are as follows:

Rilis Media 2025
Media Releases 2025

Bulan Month	**Jumlah Publikasi** Number of Publications	**Tone**
Januari January	113	Positif: 95 Positive: 95
Februari February	170	Positif: 169 Positive: 169
Maret March	269	Positif: 230 Positive: 230
April April	217	Positif: 201 Positive: 201
Mei May	666	Positif: 655 Positive: 655
Juni June	808	Positif: 797 Positive: 797
Juli July	993	Positif: 945 Positive: 945
Agustus August	967	Positif: 963 Positive: 963
September September	952	Positif: 934 Positive: 934
Oktober October	1142	Positif: 1135 Positive: 1,135
November November	1166	Positif: 1157 Positive: 1,157
Desember December	1220	Positif: 1217 Positive: 1,217

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, IFG membentuk Tim Kepatuhan GCG yang bertugas menerima serta menindaklanjuti seluruh pengaduan terkait pelanggaran *Code of Conduct*. Selama periode 2023–2025, jumlah pelanggaran yang dikenakan sanksi relatif rendah, mencerminkan konsistensi dalam penerapan disiplin di lingkungan perusahaan. Pada tahun 2025, tercatat 2 kasus pelanggaran, yang terdiri dari satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi Surat Peringatan II.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran pada 2025 menurun dari dua kasus di 2024, yang terdiri dari satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi Surat Peringatan Pertama dan Terakhir. Sementara itu, di tahun 2023, di mana saat itu terdapat satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi pada kategori Tingkat III.

Keterbukaan informasi tidak hanya diwujudkan melalui publikasi eksternal, tetapi juga melalui penguatan budaya kepatuhan dan integritas di internal Perusahaan. Untuk memastikan bahwa prinsip transparansi berjalan seiring dengan perilaku etis, IFG memperkuat mekanisme kepatuhan GCG, penegakan kode etik, serta pengelolaan pengaduan pelanggaran.

As a manifestation of its commitment to implementing good corporate governance, IFG formed a GCG Compliance Team tasked with receiving and following up on all complaints related to violations of the Code of Conduct. During the 2023–2025 period, the number of violations subject to sanctions was relatively low, reflecting consistency in the enforcement of discipline within the company. In 2025, there were 2 recorded cases of violations, consisting of one First Written Warning and one Second Written Warning.

Compared to the previous year, the number of violations in 2025 decreased from two cases in 2024, which consisted of one First Written Warning and one Final Written Warning. Meanwhile, in 2023, there was one First Written Warning and one sanction in the Level III category.

Information disclosure is achieved not only through external publications, but also by strengthening a culture of compliance and integrity within the Company. To ensure that the principle of transparency aligns with ethical conduct, IFG is strengthening its corporate governance compliance mechanisms, enforcement of the code of conduct, and management of reports of violations.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

TEKNOLOGI SEBAGAI *ENABLER* TRANSFORMASI

Visi
Menjadi *strategic partner* untuk bisnis dalam mendukung visi IFG melalui penyediaan solusi teknologi yang adaptif mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan sumber daya optimal sesuai dengan kebutuhan bisnis

Misi
1. Memenuhi kebutuhan bisnis melalui standardisasi solusi teknologi melalui sentralisasi dan *shared service*;
2. Menyediakan layanan IT yang aman, berkualitas, efektif dan efisien;
3. Memimpin transformasi digital dengan menyediakan layanan dan solusi IT yang andal untuk mendorong pertumbuhan, perubahan yang lebih baik, dan keunggulan operasional.

Di tengah dinamika industri jasa keuangan yang semakin digital dan terintegrasi, Teknologi Informasi (TI) terus memainkan peran strategis sebagai *enabler* utama transformasi bisnis Perseroan. Sepanjang tahun 2025, Perseroan berfokus pada penguatan fondasi digital untuk mendukung peningkatan efisiensi, integrasi proses bisnis, penguatan tata kelola, serta pengembangan kapabilitas organisasi yang lebih *agile, resilient*, dan *future-ready*. Adapun beberapa inisiatif strategis Teknologi Informasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 antara lain meliputi:

1. Modernisasi *Platform Enterprise*
   Sebagai bagian dari transformasi *enterprise-wide*, Perseroan melanjutkan implementasi platform *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan pengembangan *core system* terintegrasi guna mendukung standardisasi proses bisnis, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta penguatan integrasi operasional antarentitas dalam grup. Inisiatif ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan *data-driven*.

2. Penguatan Infrastruktur dan *Cloud Transformation*
   Perseroan juga terus memperkuat infrastruktur dan kapabilitas *digital* melalui konsolidasi jaringan, implementasi *hybrid cloud*, serta pengembangan *centralized infrastructure management* untuk meningkatkan *reliability* layanan, fleksibilitas operasional, keamanan data, dan *business continuity capability* di seluruh lingkungan grup.
3. Pengembangan Ekosistem Digital Terintegrasi
   Dalam mendukung pengembangan ekosistem digital yang lebih terintegrasi dan *customer-centric*, Perseroan melanjutkan konsolidasi layanan digital grup melalui *platform One by* IFG. Inisiatif ini dilakukan untuk menghadirkan pengalaman layanan yang lebih *seamless* sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan *platform* digital di lingkungan grup.

TECHNOLOGY AS AN ENABLER OF TRANSFORMATION

Vision
To become a strategic business partner in supporting IFG's vision by delivering adaptive technology solutions that keep pace with changing times while optimizing resources in accordance with business needs.

Mission
1. Fulfill business needs by standardizing technology solutions through centralization and shared services.
2. Deliver secure, high-quality, effective, and efficient IT services.
3. Lead digital transformation by providing reliable IT services and solutions that drive growth, continuous improvement, and operational excellence.

Amid the increasingly digital and integrated financial services industry, Information Technology (IT) continues to play a strategic role as a key enabler of the Company's business transformation. Throughout 2025, the Company focused on strengthening its digital foundation to support greater operational efficiency, business process integration, enhanced governance, and the development of an agile, resilient, and future-ready organization. The key Information Technology initiatives implemented during 2025 included the following:

1. Enterprise Platform Modernization
   As part of its enterprise-wide transformation, the Company continued implementing its Enterprise Resource Planning (ERP) platform and developing integrated core systems to support standardized business processes, improve the quality of financial reporting, and strengthen operational integration across Group entities. These initiatives serve as a critical foundation for creating more effective, efficient, and data-driven business processes.
2. Infrastructure Strengthening and Cloud Transformation
   The Company continued enhancing its digital infrastructure and capabilities through network consolidation, hybrid cloud implementation, and the development of centralized infrastructure management to improve service reliability, operational flexibility, data security, and business continuity across the Group.

3. Integrated Digital Ecosystem Development
   To support a more integrated and customer-centric digital ecosystem, the Company continued consolidating the Group's digital services through the One by IFG platform. This initiative aims to deliver a more seamless customer experience while improving the efficiency of digital platform management across the Group.

PENCAPAIAN *ASSESSMENT* TATA KELOLA TI DAN KEAMANAN SIBER

Sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat tata kelola Teknologi Informasi (TI) dan ketahanan keamanan siber, IFG secara berkelanjutan melaksanakan *assessment* dan evaluasi tingkat maturitas tata kelola TI serta keamanan siber dengan mengacu pada *framework* dan praktik terbaik internasional. Kegiatan *assessment* ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan TI dan keamanan siber perusahaan berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan bisnis serta perkembangan risiko digital yang semakin dinamis.

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) di lingkungan IFG dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan dengan mengacu pada kerangka kerja COBIT 2019 sebagai pedoman utama pengelolaan tata kelola TI, serta didukung oleh standar keamanan informasi internasional ISO/IEC 27001:2022 dan NIST *Cybersecurity Framework* (CSF) 2.0 sebagai acuan penguatan ketahanan siber (*cyber resilience*). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif TI di IFG Group selaras dengan strategi bisnis korporasi, kebijakan pemerintah, serta praktik terbaik tata kelola dan keamanan informasi global.

Berikut pencapaian *assessment* tata kelola TI dan keamanan siber IFG pada tahun 2025:

1. *Assessment IT Maturity Level* (COBIT 2019)
   Pada tahun 2025, Perseroan melakukan *assessment* melalui konsultan untuk menilai tingkat kematangan pengelolaan TI. Hasil penilaian menunjukkan:
   a. Nilai Indeks *Maturity*: 3.67 (Level 3 – *Defined*)
   b. Sesuai target sebagaimana diatur dalam Kerangka Kerja Penilaian Penyelenggaraan TI BUMN (S-562/ MBU/ DSI/10/2024)
   c. Mencapai kapabilitas minimal Level 3 pada 24 proses TI prioritas Kementerian BUMN
   d. Nilai tersebut menggambarkan bahwa proses dan perilaku organisasi TI telah terdefinisikan, distandarkan, dan diterapkan secara konsisten, sehingga mampu meminimalkan potensi permasalahan dalam tata kelola TI.
2. *Surveillance* ISO 27001:2022
   Pada tahun 2025, IFG berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 27001 melalui pelaksanaan *surveillance audit* dan *certification maintenance* yang dilakukan secara berkala. Sertifikasi ini mencakup ruang lingkup Manajemen Jaringan (*Network Management*). Pencapaian ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga efektivitas implementasi kontrol keamanan informasi, meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi, serta memastikan perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi perusahaan. Pencapaian tersebut merupakan bukti pengakuan resmi atas efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang diimplementasikan di perusahaan

IT GOVERNANCE AND CYBERSECURITY ASSESSMENT RESULTS

As part of its commitment to strengthening Information Technology (IT) governance and cybersecurity resilience, IFG continuously conducts assessments and maturity evaluations of its IT governance and cybersecurity practices based on internationally recognized frameworks and best practices. These assessments are intended to ensure that the Company's IT governance and cybersecurity management remain effective, measurable, and aligned with evolving business requirements and digital risks.

IT governance across IFG is implemented through a structured, measurable, and sustainable approach based on the COBIT 2019 framework as the primary reference for IT governance, supported by ISO/IEC 27001:2022 and the NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 as benchmarks for strengthening cyber resilience. This approach ensures that IT initiatives throughout the IFG Group remain aligned with the Company's business strategy, government policies, and globally recognized best practices in IT governance and information security.

The Company's IT governance and cybersecurity assessment achievements in 2025 are as follows:

1. IT Maturity Assessment (COBIT 2019)
   In 2025, the Company engaged an independent consultant to assess the maturity of its IT governance practices. The assessment results showed:
   a. IT Maturity Index Score: 3.67 (Level 3 – Defined)
   b. Achieved the target established under the SOE IT Governance Assessment Framework (S-562/MBU/ DSI/10/2024).
   c. Reached at least Capability Level 3 across the 24 priority IT processes designated by the Ministry of State-Owned Enterprises.
   d. These results indicate that the Company's IT processes and governance practices have been formally defined, standardized, and consistently implemented, thereby minimizing potential governance risks.
2. ISO 27001:2022 Surveillance Audit
   In 2025, IFG successfully maintained its ISO 27001 certification through regular surveillance audits and certification maintenance activities. The certification covers the scope of Network Management. This achievement demonstrates the Company's commitment to maintaining effective information security controls, strengthening compliance with applicable standards and regulations, and safeguarding the confidentiality, integrity, and availability of corporate information. It also represents formal recognition of the effectiveness of the Company's Information Security Management System (ISMS).

3. Asesmen Keamanan Siber
   Berdasarkan hasil *assessment* keamanan siber tahun 2025 menggunakan *framework* NIST CSF, IFG memperoleh nilai *maturity* sebesar 2,89 dengan kategori *Repeatable*. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses dan pengendalian keamanan siber di lingkungan perusahaan telah diterapkan secara konsisten, terdokumentasi, serta dijalankan secara berulang pada berbagai proses operasional TI. Hasil ini juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kapabilitas keamanan siber secara berkelanjutan melalui penguatan *governance*, pengendalian keamanan, monitoring, serta pengelolaan risiko siber.

DISASTER RECOVERY

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, setiap BUMN diwajibkan memiliki rencana keberlangsungan layanan Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi IFG dalam memastikan kesiapan dan ketahanan layanan TI guna mendukung keberlangsungan operasional bisnis secara berkesinambungan.

Sebagai bagian dari implementasi tata kelola TI, IFG secara konsisten melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko TI untuk menjaga kesinambungan proses bisnis dan meminimalkan dampak gangguan operasional. Risiko terhadap keberlangsungan usaha dapat timbul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti bencana alam, gangguan infrastruktur, perubahan kondisi lingkungan, dinamika politik dan sosial, kegagalan sistem, hingga ancaman keamanan siber yang berpotensi mengganggu layanan dan operasional Perusahaan.

Penerapan DC dan DRC tersebut bertujuan untuk memastikan tersedianya mekanisme pemulihan layanan TI secara cepat dan efektif apabila terjadi gangguan, bencana, maupun kondisi darurat yang memengaruhi operasional pusat data utama. Selain itu, keberadaan DRC juga mendukung penerapan strategi *business continuity* guna menjaga ketersediaan aplikasi, data, dan layanan kritikal perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesiapan operasional dan efektivitas proses pemulihan, IFG secara berkala melaksanakan pengujian *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Plan (DRP)*. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur penanganan insiden, pemulihan sistem, koordinasi lintas fungsi, serta mekanisme komunikasi darurat dapat berjalan secara efektif pada saat terjadi gangguan operasional maupun kondisi krisis.

3. Cybersecurity Assessment
   Based on the 2025 cybersecurity assessment conducted using the NIST Cybersecurity Framework (CSF), IFG achieved a maturity score of 2.89, categorized as Repeatable. This result indicates that the Company's cybersecurity processes and controls have been consistently implemented, documented, and repeatedly applied across IT operations. The achievement also reflects the Company's ongoing commitment to strengthening cybersecurity capabilities through enhanced governance, security controls, monitoring, and cyber risk management.

DISASTER RECOVERY

In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, every SOE is required to maintain an Information Technology (IT) service continuity plan as part of good corporate governance implementation. This regulation serves as the foundation for IFG's efforts to ensure the readiness and resilience of its IT services in supporting sustainable business operations.

As part of its IT governance implementation, IFG consistently manages and mitigates IT risks to ensure business continuity and minimize the impact of operational disruptions. Risks to business continuity may arise from both internal and external factors, including natural disasters, infrastructure failures, environmental changes, political and social developments, system failures, and cybersecurity threats that may disrupt the Company's services and operations.

The implementation of the Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) is intended to ensure the rapid and effective recovery of IT services in the event of system disruptions, disasters, or emergencies affecting the primary data center. The DRC also supports the Company's business continuity strategy by maintaining the availability of critical applications, data, and services.

To reinforce operational readiness and the effectiveness of recovery processes, IFG regularly conducts Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) exercises. These activities are designed to verify the effectiveness of incident response procedures, system recovery processes, cross-functional coordination, and emergency communication mechanisms during operational disruptions or crisis situations.

Pada tahun 2025, pelaksanaan simulasi dan uji coba BCP dan DRP dilaksanakan di lokasi *Disaster Recovery Center* (DRC) Bogor dengan melibatkan seluruh fungsi kritikal (*Critical Business Function*) yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan proses bisnis Perusahaan. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pengujian proses failover sistem, pemulihan aplikasi dan data, validasi akses layanan, serta koordinasi operasional antar unit kerja untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi gangguan.

Melalui pelaksanaan BCP dan DRP secara berkala, IFG berharap dapat meningkatkan kesiapan organisasi, memperkuat ketahanan operasional, meminimalkan potensi *downtime* layanan TI, serta memastikan proses bisnis tetap berjalan secara efektif dalam berbagai kondisi darurat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan IFG dalam memperkuat tata kelola TI, meningkatkan keamanan informasi, serta mendukung transformasi digital yang andal, aman, dan berkelanjutan.

IT DISRUPTION & CYBER RESILIENCE

Di tengah meningkatnya kompleksitas risiko digital dan ketergantungan bisnis terhadap teknologi, Perseroan terus memperkuat kapabilitas pengelolaan insiden dan ketahanan siber sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan operasional dan integritas layanan. Risiko teknologi informasi tidak hanya mencakup gangguan layanan TI, tetapi juga potensi kelemahan keamanan, ancaman siber, serta risiko terhadap data dan infrastruktur kritikal perusahaan.

Untuk memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara efektif dan terukur, Perseroan menerapkan pendekatan *end-to-end incident management* yang mencakup identifikasi dan pelaporan insiden, analisis penyebab utama (*root cause analysis*), implementasi *corrective and preventive action*, serta monitoring tindak lanjut hingga penyelesaian secara menyeluruh.

Sejalan dengan komitmen Perseroan dalam memperkuat *digital resilience*, berbagai pengendalian keamanan terus ditingkatkan guna melindungi data sensitif, sistem kritikal, dan infrastruktur teknologi informasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan keandalan layanan, memperkuat *cyber resilience capability*, serta mendukung keberlangsungan bisnis secara berkelanjutan di tengah dinamika risiko digital yang terus berkembang.

PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan digitalisasi dan transformasi bisnis, Teknologi Informasi (TI) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas operasional dan pencapaian strategi perusahaan. IFG meyakini bahwa penerapan teknologi informasi yang optimal dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui proses bisnis yang lebih cepat, akurat, terintegrasi, dan efisien.

In 2025, BCP and DRP simulations were conducted at the Bogor Disaster Recovery Center (DRC), involving all Critical Business Functions responsible for maintaining business continuity. The exercises included failover testing, application and data recovery, service access validation, and cross-functional operational coordination to ensure organizational preparedness for potential disruptions.

Through regular BCP and DRP exercises, IFG aims to strengthen organizational preparedness, enhance operational resilience, minimize potential IT service downtime, and ensure business continuity under various emergency scenarios. These efforts also form part of the Company's ongoing commitment to strengthening IT governance, enhancing information security, and supporting a reliable, secure, and sustainable digital transformation.

IT DISRUPTION & CYBER RESILIENCE

As digital risks become increasingly complex and business operations grow more dependent on technology, the Company continues to strengthen its incident management capabilities and cyber resilience to safeguard operational continuity and service integrity. IT risks encompass not only service disruptions but also security vulnerabilities, cyber threats, and risks affecting the Company's critical data and technology infrastructure.

To ensure effective and measurable risk management, the Company applies an end-to-end incident management approach covering incident identification and reporting, root cause analysis, implementation of corrective and preventive actions, and continuous monitoring through to resolution.

Consistent with its commitment to strengthening digital resilience, the Company continues enhancing security controls to protect sensitive data, critical systems, and IT infrastructure. These efforts are intended to ensure service reliability, strengthen cyber resilience capabilities, and support sustainable business continuity amid the evolving digital risk landscape.

INFORMATION TECHNOLOGY EXPENDITURE

As digitalization and business transformation continue to accelerate, Information Technology (IT) has become a key driver of operational effectiveness and the achievement of the Company's strategic objectives. IFG believes that optimal utilization of information technology creates value by enabling faster, more accurate, integrated, and efficient business processes.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan dan pengembangan proses bisnis perusahaan, IFG secara berkelanjutan melakukan pembiayaan di bidang Teknologi Informasi yang saat ini telah menjadi kebutuhan strategis perusahaan. Pembiayaan tersebut mencakup pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, penguatan infrastruktur TI, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, peningkatan keamanan siber, pengembangan jaringan dan *data center*, serta implementasi berbagai inisiatif digital lainnya.

Pengelolaan pembiayaan TI dilakukan secara terencana dan terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, efektivitas operasional, pengelolaan risiko, serta optimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan. Setiap investasi TI juga dievaluasi untuk memastikan keselarasan dengan strategi perusahaan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi operasional dan pengembangan bisnis IFG.

Sepanjang tahun 2025, IFG telah merealisasikan pembiayaan Teknologi Informasi untuk mendukung peningkatan kapabilitas sistem, penguatan keamanan informasi, optimalisasi layanan TI, serta pengembangan infrastruktur digital perusahaan. Adapun realisasi pembiayaan TI tahun 2025 disajikan pada tabel/lampiran berikut :

To support the continuity and development of its business operations, IFG continues to invest in Information Technology as a strategic business necessity. These investments include application development and maintenance, IT infrastructure enhancement, hardware and software procurement, cybersecurity improvements, network and data center development, and the implementation of various digital initiatives.

IT investments are planned and managed systematically by considering business requirements, operational effectiveness, risk management, and the optimal use of corporate resources. Each IT investment is also evaluated to ensure alignment with the Company's strategy and its ability to deliver long-term value to IFG's operations and business development.

Throughout 2025, IFG continued to invest in Information Technology to strengthen system capabilities, enhance information security, optimize IT services, and further develop the Company's digital infrastructure. The Company's IT investments are presented in the table below.

Pembiayaan TI IT Investment	**Nilai Pembiayaan (Rp)** Amount (IDR)
CAPEX TI IT CAPEX	27.005.328.946
OPEX TI IT OPEX	43,277,649,746

ARAH STRATEGIS KE DEPAN

Berbagai inisiatif transformasi teknologi yang dijalankan sepanjang tahun 2025 menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital grup yang lebih terintegrasi, efisien, dan *resilient*. Ke depan, Perseroan akan terus melanjutkan transformasi teknologi secara bertahap dan terukur melalui penguatan integrasi platform, optimalisasi *shared services*, pengembangan kapabilitas data dan *analytics*, serta peningkatan *cybersecurity posture* guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

STRATEGIC DIRECTION FOR THE FUTURE

Various technology transformation initiatives implemented throughout 2025 serve as a critical foundation for building a more integrated, efficient, and resilient digital ecosystem for the Group. Moving forward, the Company will continue to pursue technological transformation in a phased and measured manner by strengthening platform integration, optimizing shared services, developing data and analytics capabilities, and enhancing cybersecurity posture to support sustainable business growth and the creation of long-term value for all stakeholders.

SERTIFIKASI PROFESI DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi Divisi Teknologi Informasi, IFG melaksanakan program pengembangan kompetensi secara terstruktur dan bertahap. Program ini mencakup partisipasi anggota Divisi dalam berbagai program sertifikasi yang relevan dengan bidangnya. Berikut disajikan daftar karyawan Divisi Teknologi Informasi yang telah mengikuti program sertifikasi tersebut:

PROFESSIONAL CERTIFICATION FOR THE INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION

To improve the quality and competence of the Information Technology Division, IFG implements a structured and phased competency development program. This program includes the participation of Division members in various certification programs relevant to their fields. The following is a list of Information Technology Division employees who have participated in these certification programs:

Sertifikasi Certification	**Jumlah Staff** Number of Staff
ITIL 4.0	2
COBIT 2019	2
Enterprise IT Architecture TOGAF	1

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2025, IFG melibatkan karyawan Divisi Teknologi Informasi dalam beragam program pengembangan kompetensi. Berikut disajikan informasi rinci terkait program pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Divisi Teknologi Informasi:

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT IN THE INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION

Throughout 2025, IFG engaged employees of the Information Technology Division in various competency development programs. The following is detailed information regarding the competency development programs that the Information Technology Division has participated in:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Subnanda Enriko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Subnanda Enriko - Senior Officer for System Development Strategy	Sertifikasi Certification	Sertifikasi COBIT 2019 COBIT 2019 Certification		IFG Corporate University
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri - Head of Operations & Infrastructure Department	Sertifikasi Certification	Sertifikasi COBIT 2019 COBIT 2019 Certification		IFG Corporate University
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri - Head of the Operations & Infrastructure Department	Pelatihan Training	Scrum Master		IFG Corporate University
Eko Adhi Wiyono – Staf Strategi Pengembangan Sistem Eko Adhi Wiyono – System Development Strategy Staff	Pelatihan Training	Scrum Master		IFG Corporate University
Edwin Penangsang - Officer Strategi Pengembangan Sistem Edwin Penangsang – System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	Scrum Master		IFG Corporate University
Aji Metabuana - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Aji Metabuana - Senior Planning and Governance Officer	Pelatihan Training	Scrum Master		IFG Corporate University
Elly Pardede – Sekretaris Divisi Elly Pardede – Division Secretary	Pelatihan Training	Scrum Master		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Harsa Pujiandi - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Harsa Pujiandi – Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	Scrum Master		IFG Corporate University
Ahmat Cholid - Staff Strategi Pengembangan Sistem Ahmat Cholid - System Development Strategy Staff	Pelatihan Training	Data Analytics with Tableau		IFG Corporate University
Subnanda Enriko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Subnanda Enriko - Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	Data Analytics with Tableau		IFG Corporate University
Dwi Baskoro - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Dwi Baskoro - Senior Officer for Planning and Governance	Pelatihan Training	Legal for Non-Legal Legal for Non-Legal Professionals		IFG Corporate University
Eko Adhi Wiyono – Staf Strategi Pengembangan Sistem Eko Adhi Wiyono – System Development Strategy Staff	Sertifikasi Certification	Sertifikasi ITIL V4 ITIL V4 Certification		IFG Corporate University
Edwin Penangsang - Officer Strategi Pengembangan Sistem Edwin Penangsang – System Development Strategy Officer	Sertifikasi Certification	Sertifikasi ITIL V4 ITIL V4 Certification		IFG Corporate University
Ailsa Fulvia - Staff Perencanaan dan Tata Kelola Ailsa Fulvia - Planning and Governance Staff	Pelatihan Training	Business Writing Skills		IFG Corporate University
Aji Metabuana - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Aji Metabuana - Senior Officer , Planning and Governance	Pelatihan Training	Business Writing Skills		IFG Corporate University
Elly Pardede – Sekretaris Divisi Elly Pardede – Division Secretary	Pelatihan Training	Business Writing Skills		IFG Corporate University
Eko Adhi Wiyono – Staf Strategi Pengembangan Sistem Eko Adhi Wiyono – System Development Strategy Staff	Pelatihan Training	Business Writing Skills		IFG Corporate University
Dwi Satrio - Staff Operasional dan Infrastruktur Dwi Satrio - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	Business Writing Skills		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Dwi Baskoro - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Dwi Baskoro - Senior Officer, Planning and Governance	Pelatihan Training	Business Writing Skills		IFG Corporate University
Elly Pardede – Sekretaris Divisi Elly Pardede – Division Secretary	Pelatihan Training	Building Image Professional Building a Professional Image		IFG Corporate University
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri – Head of the Operations & Infrastructure Department	Pelatihan Training	Wawasan Kebangsaan Batch-4 National Awareness Batch 4		IFG Corporate University
Sri Astuti - Clerk Perencanaan dan Tata Kelola Sri Astuti - Planning and Governance Clerk	Pelatihan Training	Finance for Non-Finance Batch 1		IFG Corporate University
Ailsa Fulvia - Staff Perencanaan dan Tata Kelola Ailsa Fulvia - Planning and Governance Staff	Pelatihan Training	Finance for Non-Finance Batch 2		IFG Corporate University
Subnanda Enriko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Subnanda Enriko - Senior Officer, System Development Strategy	Sertifikasi Certification	Sertifikasi IT Architecture (TOGAF) IT Architecture Certification (TOGAF)		IFG Corporate University
Wahyu Eko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Wahyu Eko - Senior Officer, System Development Strategy	Sertifikasi Certification	Sertifikasi IT Architecture (TOGAF) IT Architecture Certification (TOGAF)		IFG Corporate University
Eko Adhi Wiyono – Staf Strategi Pengembangan Sistem Eko Adhi Wiyono – Systems Development Strategy Staff	Pelatihan Training	Audit for non Auditor Audit for Non-Auditors		IFG Corporate University
Dwi Baskoro - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Dwi Baskoro – Senior Officer for Planning and Governance	Pelatihan Training	Audit for non Auditor Audit for Non-Auditors		IFG Corporate University
Ari Faizal Aliaini - Kepala Departemen Strategi Pengembangan Sistem Ari Faizal Aliaini - Head of the System Development Strategy Department	Pelatihan Training	Audit for non Auditor Audit for Non-Auditors		IFG Corporate University
Elly Pardede – Sekretaris Divisi Elly Pardede – Division Secretary	Pelatihan Training	Agile Practice Fundamental Fundamentals of Agile Practices		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Edwin Penangsang - Officer Strategi Pengembangan Sistem Edwin Penangsang – System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	Agile Practice Fundamental Fundamentals of Agile Practices		IFG Corporate University
Mochamad Fallkah Zaini - Clerk Operasional dan Infrastruktur Mochamad Fallkah Zaini - Operations and Infrastructure Clerk	Pelatihan Training	Agile Practice Fundamental Fundamentals of Agile Practices		IFG Corporate University
Dwi Satrio - Staff Operasional dan Infrastruktur Dwi Satrio - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	Agile Practice Fundamental Fundamentals of Agile Practices		IFG Corporate University
Dwi Satrio - Staff Operasional dan Infrastruktur Dwi Satrio - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Aji Metabuana - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Aji Metabuana - Senior Officer for Planning and Governance	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri - Head of Operations & Infrastructure Department	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Amadea Daniel Makes - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Amadea Daniel Makes - Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Subnanda Enriko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Subnanda Enriko - Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Ailsa Fulvia - Staff Perencanaan dan Tata Kelola Ailsa Fulvia - Planning and Governance Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Dwi Baskoro - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Dwi Baskoro - Senior Planning and Governance Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Joseph Georgino Godong - SEVP Teknologi Informasi Joseph Georgino Godong - Senior Executive Vice President of Information Technology	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Sri Astuti - Clerk Perencanaan dan Tata Kelola Sri Astuti - Planning and Governance Clerk	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Mochamad Fallkah Zaini - Clerk Operasional dan Infrastruktur Mochamad Fallkah Zaini - Operations and Infrastructure Clerk	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Bima Satriya Putra - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Bima Satriya Putra - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Supian Suri - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Supian Suri - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Harsa Pujiandi - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Harsa Pujiandi - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Ahmat Cholid - Staff Strategi Pengembangan Sistem Ahmat Cholid - System Development Strategy Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Dwi Satrio - Staff Operasional dan Infrastruktur Dwi Satrio - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Edwin Penangsang - Officer Strategi Pengembangan Sistem Edwin Penangsang - System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Wahyu Eko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Wahyu Eko - Senior System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System		IFG Corporate University
Aji Metabuana - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Aji Metabuana - Senior Officer for Planning and Governance	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri - Head of Operations & Infrastructure Department	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Amadea Daniel Makes - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Amadea Daniel Makes - Senior Strategy Officer, System Development	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Subnanda Enriko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Subnanda Enriko - Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Ailsa Fulvia - Staff Perencanaan dan Tata Kelola Ailsa Fulvia - Planning and Governance Staff	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Dwi Baskoro - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Dwi Baskoro - Senior Planning and Governance Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Joseph Georgino Godong - SEVP Teknologi Informasi Joseph Georgino Godong - Senior Executive Vice President of Information Technology	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Sri Astuti - Clerk Perencanaan dan Tata Kelola Sri Astuti - Planning and Governance Clerk	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Mochamad Fallkah Zaini - Clerk Operasional dan Infrastruktur Mochamad Fallkah Zaini - Operations and Infrastructure Clerk	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Bima Satriya Putra - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Bima Satriya Putra - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Harsa Pujiandi - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Harsa Pujiandi - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Ahmat Cholid - Staff Strategi Pengembangan Sistem Ahmat Cholid - System Development Strategy Staff	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Dwi Satrio - Staff Operasional dan Infrastruktur Dwi Satrio - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Edwin Penangsang - Officer Strategi Pengembangan Sistem Edwin Penangsang - System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Wahyu Eko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Wahyu Eko - Senior System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	Persaingan Usaha Business Competition		IFG Corporate University
Wildan Ramadhan Iskandar	Pelatihan Training	Creative Thinking Skills		IFG Corporate University
Dwi Satrio - Staff Operasional dan Infrastruktur Dwi Satrio - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	Creative Thinking Skills		IFG Corporate University
Mochamad Fallkah Zaini - Clerk Operasional dan Infrastruktur Mochamad Fallkah Zaini - Operations and Infrastructure Clerk	Pelatihan Training	Creative Thinking Skills		IFG Corporate University
Wahyu Eko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Wahyu Eko - Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	Creative Thinking Skills		IFG Corporate University
Sri Astuti - Clerk Perencanaan dan Tata Kelola Sri Astuti - Planning and Governance Clerk	Pelatihan Training	Creative Thinking Skills		IFG Corporate University
Edwin Penangsang - Officer Strategi Pengembangan Sistem Edwin Penangsang - System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	Mini Prompt-A-Thon		IFG Corporate University
Ahmat Cholid - Staff Strategi Pengembangan Sistem Ahmat Cholid - Staff, Strategy and System Development	Pelatihan Training	Mini Prompt-A-Thon		IFG Corporate University
Wildan Ramadhan Iskandar - Staff Operasional Dan Infrastruktur Wildan Ramadhan Iskandar - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	Mini Prompt-A-Thon		IFG Corporate University
Ahmat Cholid - Staff Strategi Pengembangan Sistem Ahmat Cholid - System Development Strategy Staff	Pelatihan Training	DevSecOps Foundation		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Bima Satriya Putra - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Bima Satriya Putra - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	DevSecOps Foundation		IFG Corporate University
Ahmat Cholid - Staff Strategi Pengembangan Sistem Ahmat Cholid - System Development Strategy Staff	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Bima Satriya Putra - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Bima Satriya Putra - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri - Head of the Operations & Infrastructure Department	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Dwi Baskoro - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Dwi Baskoro - Senior Officer for Planning and Governance	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Dwi Satrio - Staff Operasional dan Infrastruktur Dwi Satrio - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Edwin Penangsang - Officer Strategi Pengembangan Sistem Edwin Penangsang - System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Mochamad Fallkah Zaini - Clerk Operasional dan Infrastruktur Mochamad Fallkah Zaini - Operations and Infrastructure Clerk	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Subnanda Enriko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Subnanda Enriko - Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Supian Suri - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Supian Suri - Senior Officer for Operations and Infrastructure	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Wahyu Eko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Wahyu Eko - Senior Officer for System Development Strategy	Pelatihan Training	APU, PPT, dan PPPSPM AML, CTF, and CPF		IFG Corporate University
Wahyu Eko - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Wahyu Eko - Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)		IFG Corporate University
Mochamad Fallkah Zaini - Clerk Operasional dan Infrastruktur Mochamad Fallkah Zaini - Operations and Infrastructure Clerk	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)		IFG Corporate University
Bima Satriya Putra - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Bima Satriya Putra - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)		IFG Corporate University
Harsa Pujiandi - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Harsa Pujiandi - Senior Operations and Infrastructure Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)		IFG Corporate University
Dwi Satrio - Staff Operasional dan Infrastruktur Dwi Satrio - Operations and Infrastructure Staff	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)		IFG Corporate University
Edwin Penangsang - Officer Strategi Pengembangan Sistem Edwin Penangsang - System Development Strategy Officer	Pelatihan Training	Sistem Manajemen Kepatuhan (ISO 37301:2021) Compliance Management System (ISO 37301:2021)		IFG Corporate University
Dwi Baskoro - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Dwi Baskoro - Senior Planning and Governance Officer	Pelatihan Training	Business Continuity Management System		IFG Corporate University
Bima Satriya Putra - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Bima Satriya Putra - Senior Officer for Operations and Infrastructure	Pelatihan Training	Business Continuity Management System		IFG Corporate University
Dwi Baskoro - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Dwi Baskoro - Senior Planning and Governance Officer	Pelatihan Training	Penyusunan Peraturan Drafting Regulations		IFG Corporate University
Ailsa Fulvia - Staff Perencanaan dan Tata Kelola Ailsa Fulvia - Planning and Governance Staff	Pelatihan Training	Penyusunan Peraturan Regulation Drafting		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri - Head of Operations & Infrastructure Department	Pelatihan Training	Customer Centricity Fundamental Fundamentals of Customer Centricity		IFG Corporate University
Amadea Daniel Makes - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Amadea Daniel Makes - Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	Customer Centricity Fundamental Fundamentals of Customer Centricity		IFG Corporate University
Eko Adhi Wiyono – Staf Strategi Pengembangan Sistem Eko Adhi Wiyono – Systems Development Strategy Staff	Pelatihan Training	Customer Centricity Fundamental Fundamentals of Customer Centricity		IFG Corporate University
Eko Adhi Wiyono – Staf Strategi Pengembangan Sistem Eko Adhi Wiyono – Systems Development Strategy Staff	Pelatihan Training	Digital Marketing Fundamental Fundamentals of Digital Marketing		IFG Corporate University
Amadea Daniel Makes - Senior Officer Strategi Pengembangan Sistem Amadea Daniel Makes – Senior Officer, System Development Strategy	Pelatihan Training	Digital Business Fundamental Digital Business Fundamentals		IFG Corporate University
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri - Head of Operations & Infrastructure Department	Pelatihan Training	Digital Business Fundamental Digital Business Fundamentals		IFG Corporate University
Deny Dermawan Sabri - Kepala Departemen Operasional & Infrastruktur Deny Dermawan Sabri - Head of the Operations & Infrastructure Department	Pelatihan Training	Digital Innovation & Collaboration Fundamental Fundamentals of Digital Innovation & Collaboration		IFG Corporate University
Aji Metabuana - Senior Officer Perencanaan dan Tata Kelola Aji Metabuana - Senior Officer, Planning and Governance	Sertifikasi Certification	Certified General Insurance (CGI)		IFG Corporate University
Eko Adhi Wiyono – Staf Strategi Pengembangan Sistem Eko Adhi Wiyono – System Development Strategy Staff	Sertifikasi Certifications	Certified General Insurance (CGI)		IFG Corporate University
Bima Satriya Putra - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Bima Satriya Putra – Senior Officer, Operations and Infrastructure	Sertifikasi Certifications	Certified General Insurance (CGI)		IFG Corporate University

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pelatihan/ Pendidikan** Type of Training/ Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Content	**Tanggal Pelaksanaan** Date Implementation	**Penyelenggara** Organizer
Ailsa Fulvia - Staff Perencanaan dan Tata Kelola Ailsa Fulvia - Planning and Governance Staff	Sertifikasi Certifications	Certified Life Insurance (CLI)		IFG Corporate University
Elly Pardede – Sekretaris Divisi Elly Pardede – Division Secretary	Sertifikasi Certifications	Certified Life Insurance (CLI)		IFG Corporate University
Harsa Pujiandi - Senior Officer Operasional dan Infrastruktur Harsa Pujiandi – Senior Operations and Infrastructure Officer	Sertifikasi Certification	Certified Life Insurance (CLI)		IFG Corporate University

KODE ETIK PERUSAHAAN
COMPANY'S CODE OF CONDUCT

Kode Etik Perusahaan, atau *Code of Conduct* (COC), merupakan bagian integral dari implementasi tata kelola perusahaan yang mengatur ketentuan yang wajib dipatuhi serta larangan yang harus dihindari oleh seluruh Insan IFG dalam menjalankan prinsip etika bisnis dan etika profesional, baik dalam kegiatan operasional maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penerapannya, IFG senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu, *Code of Conduct* memberikan pedoman perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam menjalin interaksi dengan pemangku kepentingan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip governansi yang sehat dan beretika.

The Company's Code of Conduct (COC) is an integral part of corporate governance, setting forth the requirements that must be followed and the prohibitions that must be avoided by all IFG People in upholding the principles of business ethics and professional ethics, both in operational activities and in daily life.

In its implementation, IFG consistently complies with all laws and regulations relevant to the company's business activities. Additionally, the Code of Conduct provides behavioral guidelines for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees in their interactions with stakeholders, based on the principles of sound and ethical governance.

PRINSIP DASAR PENERAPAN KODE ETIK PERUSAHAAN

IFG menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan nilai dan mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkelanjutan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sejalan dengan hal tersebut, IFG berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara konsisten, salah satunya melalui penyusunan dan penerapan Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), nilai-nilai inti IFG ditetapkan dalam kerangka AKHLAK, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **AMANAH**
   Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. **KOMPETEN**
   Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

BASIC PRINCIPLES FOR IMPLEMENTING THE CORPORATE CODE OF CONDUCT

IFG recognizes that the implementation of corporate governance is a strategic tool for enhancing value and driving sustainable long-term business growth, not only for shareholders but also for all stakeholders. Accordingly, IFG is committed to consistently implementing the principles of corporate governance, one of which is through the development and implementation of the Code of Conduct.

Based on Board of Commissioners' and Board of Directors' Decree No. 1 of 2023 on Good Corporate Governance Guidelines, IFG's core values are defined within the AKHLAK framework, namely Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative), with the following elaborations:

1. **AMANAH (TRUSTWORTHY)**
   We uphold the trust given by fulfilling promises and commitments, being responsible for the tasks, decisions and actions taken and adhering to moral and ethical values.

2. **KOMPETEN (COMPETENT)**
   We continuously learn and develop our capabilities by enhancing our competencies to address ever-changing challenges, helping others learn and complete tasks to the highest standards.

3. **HARMONIS**
   Kami terus meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada apapun latar belakangnya serta selalu berkeinginan untuk menolong sesama dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. **LOYAL**
   Kami akan terus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara menjaga nama baik karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga menjunjung tinggi rasa patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika.

5. **ADAPTIF**
   Kami akan terus berinovasi dan juga dengan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif.

6. **KOLABORATIF**
   Kami terus membangun kerja sama yang sinergis dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) diberlakukan bagi seluruh pegawai IFG, mencakup karyawan dengan hubungan kerja langsung, baik tetap maupun kontrak, serta Direksi dan Dewan Komisaris. Komitmen terhadap penerapan kode etik tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI), sebagaimana disajikan pada lampiran berikut.

3. **HARMONIS (HARMONIOUS)**
   We continuously foster a sense of mutual care and respect for differences regardless of background, and are always eager to help one another and build a supportive work environment.

4. **LOYAL**
   We will remain dedicated and prioritize the interests of the nation and the state by upholding the good reputation of employees, leadership, state-owned enterprises, and the nation. We are willing to make sacrifices to achieve greater goals and uphold obedience to leadership as long as it does not conflict with the law or ethics.

5. **ADAPTIF (ADAPTIVE)**
   We will continue to innovate and enthusiastically drive or adapt to change by adjusting ourselves to become better, continuously improving by keeping up with technological developments, and acting proactively.

6. **KOLABORATIF (COLLABORATIVE)**
   We continue to build synergistic cooperation by providing opportunities for all parties to contribute, being open to collaboration to generate added value, and mobilizing the use of various resources for common goals.

IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT FOR ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Conduct applies to all IFG employees, including those with direct employment relationships—whether permanent or contract—as well as the Board of Directors and the Board of Commissioners. The commitment to implementing this Code of Conduct is set forth in the Statement of Compliance and Commitment to the Code of Conduct, as well as the PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) Fair Competition Compliance Policy, as attached below.



LAMPIRAN 1
Contoh Surat Pernyataan

PAKTA INTEGRITAS

SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN DAN KOMITMEN PADA
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) DAN
KEBIJAKAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (IFG)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Pegawai :
Unit Kerja :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:
1. Telah menerima dan membaca seluruhnya (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di IFG.
2. Akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab saya dengan menjaga standar kinerja tinggi secara bersih, transparan dan profesional untuk menjaga budaya, Etika Bisnis, etika kerja maupun etika persaingan usaha yang sehat untuk menjaga nama baik IFG.
3. Tidak akan melakukan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, penyuapan, korupsi dan kecurangan (*fraud*) dilingkungan IFG.
4. Berjanji akan mematuhi dengan sebaik-baiknya dan penuh kesadaran semua kebijakan yang menjadi standar etika dan perilaku yang tertuang dalam (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
5. Bersedia untuk menerima sanksi atas pelanggaran terhadap (i) Kode Etik dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan (ii) Kebijakan Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku di IFG sesuai peraturan yang berlaku di IFG dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Demikian Surat Pernyataan (Pakta Integritas) ini yang saya tandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan/ tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, (tanggal, bulan & tahun)
Yang membuat pernyataan,

(Nama dan Tanda tangan)

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

IFG melaksanakan program sosialisasi Pedoman Perilaku bagi seluruh karyawan baru. Setiap karyawan yang bergabung akan menerima salinan elektronik maupun cetak buku pedoman etika perilaku Perusahaan. Selanjutnya, mereka diwajibkan menandatangani lembar pernyataan yang menyatakan telah membaca, memahami, serta berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Perilaku. Lembar pernyataan ini kemudian dikumpulkan dan disimpan oleh Divisi Sumber Daya Manusia.

Selain itu, Pedoman Perilaku perusahaan juga memuat nilai-nilai inti terbaru IFG, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 42 Tahun 2020 mengenai Penetapan *Core Values* IFG, yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, pada tahun 2025 Perusahaan juga melakukan sosialisasi kode etik berupa:
1. Pedoman Perilaku nomor 1 tahun 2023 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Terintegrasi Nomor 2 Tahun 2023 yang dapat diakses melalui laman *website* i-regulation.ifg.id;
2. Pemberitahuan melalui surat elektronik/*Email* ;
3. Pengumuman melalui Group Komunikasi Daring Perusahaan via aplikasi Whatsapp;
4. Penandatangan Pakta Integritas oleh Seluruh Direksi dan Karyawan.

SOCIALIZATION AND DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCT

IFG organized a dissemination program on the Code of Conduct for all new employees. Every employee who joins the company will receive both an electronic and a printed copy of the Company's Code of Conduct. Furthermore, they are required to sign a declaration form stating that they have read, understood, and are committed to complying with all provisions set forth in the Code of Conduct. These declaration forms are then collected and retained by the Human Capital Division.

In addition, the Company's Code of Conduct also incorporates IFG's latest core values, as stipulated in Board of Directors' Decree No. 42 of 2020 regarding the Establishment of IFG's Core Values, which have been communicated to all employees as well as members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Furthermore, in 2025, the Company also disseminated the following codes of conduct:
1. Code of Conduct No. 1 of 2023 and the Integrated Good Corporate Governance Guidelines No. 2 of 2023, which can be accessed via the website i-regulation.ifg.id
2. Notifications via email
3. Announcements via the Company's Online Communication Group on WhatsApp
4. Signing of the Integrity Pact by all members of the Board of Directors and employees

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Apabila terdapat pegawai IFG yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, Perusahaan akan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berikut disajikan rincian tingkatan hukuman dan jenis sanksi yang diberlakukan di IFG.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE OF CONDUCT

If any IFG employee is found to have violated the Code of Conduct, the Company will impose sanctions in accordance with applicable regulations and provisions. The following details the levels of penalties and types of sanctions enforced at IFG.

Tingkat Pelanggaran Level of Violation	**Kewenangan Penetapan Sanksi** Authority to Impose Sanctions	**Jenis-jenis Sanksi** Types of Sanctions
I	Kepala Divisi dan Human Capital Head Division Heads and the Head of Human Capital	Surat Peringatan I First Written Warning
II	Direksi Perusahaan dan Human Capital Head The Company's Board of Directors and Head of Human Capital	Surat Peringatan II Second Warning Letter
III	Direksi Perusahaan dan Human Capital Head The Company's Board of Directors and Head of Human Capital	• Surat Peringatan III atau • Skorsing atau • Pemutusan Hubungan Kerja • Third Warning Letter or • Suspension or • Termination of Employment
Berat	Direksi Perusahaan dan Human Capital Head The Company's Board of Directors and Head of Human Capital	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

IFG membentuk Tim Kepatuhan GCG yang memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan penegakan Pedoman Perilaku. Berikut disajikan rincian sanksi yang telah diterapkan terkait penegakan *Code of Conduct* selama 3 (tiga) tahun terakhir.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

IFG has established a GCG Compliance Team responsible for receiving and following up on all complaints received. This initiative is an integral part of enforcing the Code of Conduct. The following details the sanctions that have been imposed in connection with the enforcement of the Code of Conduct over the past 3 (three) years.

Kategori Pelanggaran Violation Category	**Jenis Sanksi** Type of Sanction	**Jumlah Pelanggaran** Number of Violations		
		2025	**2024**	**2023**
Tingkat I Level I	Surat Peringatan I First Warning Letter	**1**	0	1
Tingkat II Level II	Surat Peringatan II First Warning Letter	**1**	0	0
Tingkat III Level III	Surat Peringatan III atau Skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja Third Warning Letter, Suspension, or Termination of Employment	**0**	0	1
	Surat Peringatan Pertama dan Terakhir First and Final Warning Letter	**0**	1	-
Berat Severe Violation	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment	**0**	1	0

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, IFG membentuk Tim Kepatuhan GCG yang bertugas menerima serta menindaklanjuti seluruh pengaduan terkait pelanggaran *Code of Conduct*. Selama periode 2023–2025, jumlah pelanggaran yang dikenakan sanksi relatif rendah, mencerminkan konsistensi dalam penerapan disiplin di lingkungan perusahaan. Pada tahun 2025, tercatat 2 kasus pelanggaran, yang terdiri dari satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi Surat Peringatan II.

As a manifestation of its commitment to implementing good corporate governance, IFG established a GCG Compliance Team tasked with receiving and following up on all complaints related to violations of the Code of Conduct. During the 2023–2025 period, the number of violations subject to sanctions was relatively low, reflecting consistency in the enforcement of discipline within the company. In 2025, there were 2 recorded cases of violations, consisting of one First Written Warning and one Second Written Warning.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran pada 2025 menurun dari dua kasus di 2024, yang terdiri dari satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi Surat Peringatan Pertama dan Terakhir. Sementara itu, di tahun 2023, di mana saat itu terdapat satu sanksi Surat Peringatan I dan satu sanksi pada kategori Tingkat III.

Compared to the previous year, the number of violations in 2025 decreased from two cases in 2024, which consisted of one First Written Warning and one Final Written Warning. Meanwhile, in 2023, there was one First Written Warning and one sanction in the Level III category.

PERAN TATA KELOLA DALAM MEMBANGUN BUDAYA PERUSAHAAN YANG BERINTEGRITAS

IFG memperkuat peran tata kelola perusahaan sebagai pendorong utama dalam membentuk dan menanamkan nilai integritas serta keberlanjutan yang tercermin secara nyata dalam budaya Perusahaan. Governansi tidak hanya berfungsi sebagai kerangka pengawasan dan kepatuhan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya organisasi yang berlandaskan etika, tanggung jawab, dan orientasi jangka panjang.

Pimpinan Perusahaan, melalui Dewan Komisaris dan Direksi, secara aktif memastikan bahwa nilai integritas dan keberlanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan strategis dan praktik bisnis. Nilai integritas diwujudkan melalui komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika yang berlaku. Sementara itu, nilai keberlanjutan diinternalisasikan melalui upaya untuk menyeimbangkan pencapaian kinerja ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, IFG mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam seluruh proses bisnis melalui penyelarasan kebijakan internal, prosedur operasional, dan sistem manajemen kinerja yang berbasis prinsip GCG dan *sustainability*. Setiap lini organisasi didorong untuk menerapkan nilai integritas dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, pengembangan produk dan layanan, serta dalam interaksi dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai budaya tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi menjadi landasan operasional yang konsisten.

Penguatan budaya Perusahaan juga dilakukan melalui program internalisasi yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi kode etik, pelatihan berbasis nilai, serta penguatan kepemimpinan yang menjadi teladan dalam penerapan integritas dan keberlanjutan. Selain itu, Perusahaan mengintegrasikan indikator perilaku berbasis nilai ke dalam sistem penilaian kinerja, sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara pencapaian target bisnis dengan implementasi nilai budaya Perusahaan.

Dari perspektif governansi, konsistensi penerapan nilai dan budaya dijaga melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Dewan Komisaris beserta komite-komite pendukung melakukan pemantauan atas implementasi budaya Perusahaan, sementara Direksi memastikan bahwa

THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE IN BUILDING A CORPORATE CULTURE OF INTEGRITY

IFG reinforces the role of corporate governance as the primary driver in shaping and instilling the values of integrity and sustainability, which are tangibly reflected in the Company's culture. Good Corporate Governance serves not only as a framework for supervisory and compliance but also as a strategic instrument in building an organizational culture grounded in ethics, responsibility, and a long-term orientation.

Company leadership, through the Board of Commissioners and the Board of Directors, actively ensures that the values of integrity and sustainability are an integral part of strategic policy direction and business practices. The value of integrity is embodied through a commitment to transparency, accountability, and compliance with applicable regulations and ethical standards. Meanwhile, the value of sustainability is internalized through efforts to balance economic performance with social and environmental responsibilities in a sustainable manner.

In practice, IFG integrates these values into all business processes by aligning its internal policies, operating procedures, and performance management system with the principles of GCG and sustainability. Every level of the organization is encouraged to uphold the values of integrity and sustainability in decision-making, risk management, product and service development, and stakeholder engagement. This approach ensures that the Company's cultural values serve not only as guiding principles but also as a consistent operational foundation.

The Company's culture is further strengthened through ongoing internalization programs, including the dissemination of the code of conduct, values-based training, and the development of leadership that serves as a role model in the application of integrity and sustainability. Additionally, the Company integrates values-based behavioral indicators into its performance appraisal system, ensuring a clear link between the achievement of business targets and the implementation of the Company's cultural values.

From a governance perspective, consistency in the application of values and culture is maintained through effective supervisory mechanisms. The Board of Commissioners, along with its supporting committees, monitors the implementation of the Company's culture,

kebijakan dan program yang ditetapkan dijalankan secara disiplin di seluruh unit kerja. Sistem pengendalian internal, fungsi audit internal, serta mekanisme *whistleblowing system* turut memperkuat pengawasan terhadap penerapan nilai integritas, sekaligus memastikan adanya tindak lanjut atas setiap potensi penyimpangan.

Lebih lanjut, IFG mendorong harmonisasi penerapan nilai dan budaya di seluruh entitas dalam *holding* melalui penguatan sinergi dan penyelarasan kebijakan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan standar implementasi yang konsisten di tingkat grup, sekaligus memperkuat identitas budaya Perusahaan sebagai satu kesatuan yang utuh.

Melalui pendekatan governansi yang terintegrasi dan implementatif tersebut, IFG memastikan bahwa nilai integritas dan keberlanjutan tidak hanya menjadi pernyataan komitmen, tetapi terwujud dalam perilaku organisasi dan praktik operasional sehari-hari. Konsistensi ini pada akhirnya memperkuat ketahanan Perusahaan, meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

while the Board of Directors ensures that established policies and programs are strictly enforced across all business units. The internal control system, the internal audit function, and the Whistleblowing System also strengthen supervision of the application of integrity values, while ensuring that any potential violations are followed up on.

Furthermore, IFG promotes the harmonization of the application of values and culture across all entities within the Holding Company by strengthening synergies and aligning policies. This step aims to create consistent implementation standards at the group level, while reinforcing the Company's cultural identity as a cohesive whole.

Through this integrated and action-oriented corporate governance approach, IFG ensures that the values of integrity and sustainability are not merely statements of commitment, but are embodied in the organization's behavior and daily operational practices. This consistency ultimately strengthens the Company's resilience, improves the quality of business management, and supports the creation of sustainable long-term value for all stakeholders.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, berikut disampaikan pengungkapan terkait jumlah penyimpangan internal yang terjadi serta langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan:

INTERNAL VIOLATIONS

As part of the implementation of the principle of transparency, the following is a disclosure regarding the number of internal violation that have occurred and the resolution measures that have been taken:

Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun Internal Violation in One Year	**Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh** Number of Cases Committed by					
	Dewan Komisaris/Direksi The Board of Commissioners/Board of Directors		**Pegawai Tetap** Permanent Employees		**Pegawai Tidak Tetap** Non-Permanent Employees	
	2025	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**
Telah Diselesaikan Completed	**0**	0	**2**	1	**0**	0
Dalam proses penyelesaian internal Under internal review	**0**	0	**0**	1	**0**	0
Belum diupayakan penyelesaiannya No Efforts Have Been Made to Resolve It	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been addressed through legal proceedings	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Jumlah Total	**0**	0	**0**	0	**0**	0

Selama tahun 2025, tercatat dua kasus penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai tetap yang telah diselesaikan. Tidak terdapat kasus yang melibatkan Dewan Komisaris/ Direksi maupun pegawai tidak tetap. Selain itu, tidak ada kasus yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum maupun yang belum diupayakan penyelesaiannya. Data ini juga menunjukkan tren yang serupa dengan tahun 2024, di mana tidak ada peningkatan jumlah kasus, dan keseluruhan pengendalian penyimpangan masih berada dalam lingkup internal organisasi.

Stabilnya jumlah kasus penyimpangan serta absennya pelanggaran yang melibatkan pihak manajerial atau pegawai tidak tetap mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan yang dijaga dengan baik di lingkungan perusahaan. Meski demikian, perusahaan tetap perlu menjaga kewaspadaan dan secara berkelanjutan memperkuat sistem pelaporan, pemantauan, serta penyelesaian penyimpangan guna memastikan terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

IFG berkomitmen untuk menghindari segala bentuk praktik gratifikasi, penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan. Seluruh pegawai IFG, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang adil, nilai sportivitas, profesionalisme, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

IFG berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan menghindari segala tindakan, perilaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, serta praktik KKN. IFG selalu mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan. Selain itu, IFG senantiasa mematuhi kebijakan antikorupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

During 2025, two cases of internal violation/ misconduct committed by permanent employees were recorded and resolved. There were no cases involving the Board of Commissioners/Board of Directors or temporary employees. Furthermore, there were no cases requiring resolution through legal proceedings or cases for which a resolution had not yet been sought. This data also reflects a trend similar to that of 2024, in which there was no increase in the number of cases, and overall control of misconduct remained within the organization's internal scope.

The stable number of misconduct cases and the absence of violations involving management or temporary employees reflect the effectiveness of the internal control system and a well-maintained culture of compliance within the company. Nevertheless, the Company must remain vigilant and continuously strengthen its systems for reporting, monitoring, and resolving violation/misconduct to ensure the establishment of corporate governance that is transparent, accountable, and of the highest integrity.

IFG is committed to preventing all forms of gratification, bribery, corruption, collusion, and nepotism (KKN) as part of its commitment to implementing the principles of good corporate governance. All IFG employees, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, consistently uphold fair competition, the values of sportsmanship, professionalism, and the principles of corporate governance.

IFG is committed to creating a healthy business environment by avoiding any actions, behaviors, or conduct that may give rise to conflicts of interest, as well as KKN practices. IFG always prioritizes the company's interests over personal, family, group, or factional interests. Furthermore, IFG consistently complies with anti-corruption policies as stipulated in Law No. 20 of 2001, which amends Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

IFG menegaskan komitmennya untuk menolak seluruh praktik korupsi sebagai bagian integral dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan. Seluruh pegawai IFG, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, secara konsisten menjunjung tinggi prinsip persaingan yang sehat, profesionalisme, sportivitas, serta nilai-nilai tata kelola yang baik.

Perusahaan juga berkomitmen menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan sehat dengan menghindari segala bentuk tindakan, perilaku, atau praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). IFG menempatkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan tertentu. Selanjutnya, IFG senantiasa mematuhi kebijakan anti-korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IFG reaffirms its commitment to rejecting all forms of corruption as an integral part of implementing corporate governance principles. All IFG employees, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, consistently uphold the principles of fair competition, professionalism, sportsmanship, and the values of good governance.

The Company is also committed to creating a clean and healthy business environment by avoiding any actions, behaviors, or practices that could potentially lead to conflicts of interest or acts of corruption, collusion, and nepotism (KKN). IFG prioritizes the Company's interests over those of individuals, families, groups, or specific factions. Furthermore, IFG consistently complies with the anti-corruption policy set forth in Law No. 20 of 2001, which amends Law No. 31 of 1999 Regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Komitmen anti-korupsi di lingkungan IFG ditegaskan melalui pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai, yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Selain itu, komitmen ini disebarluaskan dan disosialisasikan secara transparan kepada seluruh pihak internal maupun eksternal, dengan penyampaian informasi yang konsisten melalui berbagai saluran komunikasi tahunan.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/ AWARENESS CAMPAIGNS

IFG's commitment to anti-corruption is reinforced through the annual signing of an Integrity Pact by all employees. Additionally, this commitment is transparently communicated and disseminated to all internal and external stakeholders through consistent information sharing via various annual communication channels.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL POLICY

IFG secara konsisten menetapkan ketentuan terkait larangan penerimaan hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) yang tidak sah. Ketentuan ini mencakup seluruh bentuk penerimaan oleh pejabat maupun pegawai dari pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, yang bertujuan memengaruhi keputusan demi keuntungan pemberi.

Dari sisi hukum dan etika bisnis, IFG memandang praktik tersebut sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan secara aktif menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi. Sejalan dengan prinsip antikorupsi, IFG menegaskan larangan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai untuk memberikan, menawarkan, maupun menerima secara langsung maupun tidak langsung segala bentuk hadiah, imbalan, atau sumbangan (donasi) kepada klien atau pejabat pemerintah dengan maksud memengaruhi keputusan atau sebagai kompensasi atas suatu tindakan yang telah dilakukan.

Unit Pengendalian Gratifikasi

1. IFG membentuk atau menunjuk unit khusus untuk melaksanakan tugas-tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), berdasarkan Surat Keputusan Direksi IFG.
2. UPG melaksanakan tugas antara lain:
   a. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungan IFG;
   b. Menyampaikan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi;
   c. Melakukan pembaharuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan IFG dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Membuat jadwal sosialisasi secara berkala, melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas terkait dengan ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal IFG (terutama pada hari raya keagamaan);
   e. Melakukan pemetaan tempat maupun waktu rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
   f. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Insan IFG;
   g. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Insan IFG melaporkan penolakan gratifikasi;
   h. Meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah UPG menerima laporan dari Insan IFG;

IFG consistently enforces policies prohibiting the acceptance of unlawful gifts, gratuities, and donations. These policies apply to all forms of benefits received by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, officers, and employees from parties having a business interest in the Company, where such benefits are intended to influence decision-making for the benefit of the giver.

From both legal and business ethics perspectives, IFG considers such practices to constitute violations of applicable laws and regulations. Accordingly, the Company actively implements a gratification control mechanism. In line with its anti-corruption principles, IFG strictly prohibits members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees from directly or indirectly giving, offering, or accepting any form of gifts, gratuities, or donations to or from clients or government officials with the intention of influencing decisions or as compensation for actions that have been taken.

Gratification Control Unit

1. IFG establishes or appoints a special unit to perform the duties of the Gratification Control Unit (UPG), based on a Decree from the IFG's Board of Directors.
2. The UPG conducts the following duties, among others:
   a. Preparing regulations related to the implementation and control of gratification practices within IFG;
   b. Submitting proposals for the Gratification Control Guidelines to the Board of Directors;
   c. Updating the Gratification Control Guidelines in accordance with changes occurring within IFG and changes in applicable laws and regulations;
   d. Developing a schedule for periodic dissemination activities, conduct such dissemination, and provide clear information on gratification regulations to both internal and external parties of IFG (particularly during religious holidays);
   e. Identifying locations and periods that are vulnerable to the giving and receiving of gratification;
   f. Receiving, analyzing, and administering reports on the receipt of gratification submitted by IFG People;
   g. Receiving, analyzing, and processing reports on the refusal of gratification submitted by IFG People;
   h. Forwarding reports on gratification to the Corruption Eradication Commission (KPK) after they have been received by the Gratification Control Unit (UPG) from IFG People;

i. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
j. Melakukan koordinasi dan konsultasi baik lisan maupun tertulis dengan KPK terkait pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
k. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Direksi;
l. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi dan melaporkan kepada Direksi; dan
m. Melakukan pemeliharaan objek gratifikasi yang dilaporkan oleh Insan IFG sampai dengan adanya penetapan status objek gratifikasi tersebut dari KPK.

Media Pelaporan Gratifikasi

Pelapor Gratifikasi dapat menyampaikan laporan Gratifikasi melalui:

1. UPG IFG:
   a. *Email* UPG IFG
   b. Surat yang ditujukan kepada UPG
   c. Media lainnya yang disediakan IFG
2. Saluran WBS Terintegrasi IFG:
   a. *Email* WBS Integrasi IFG
   b. Surat yang ditujukan kepada IFG Integritas
   c. Melalui Situs WBS Integrasi
   d. Saluran Telepon Khusus WBS Integrasi
   e. Saluran Faksimili Khusus WBS Integrasi
   f. Saluran SMS dan WhatsApp WBS Integrasi
   g. Media lainnya yang disediakan IFG
3. Direktorat Gratifikasi KPK
   a. *Email*: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
   b. Alamat: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1. Jakarta Selatan 12920
   c. Aplikasi: www.gol.kpk.go.id

i. Periodically submit summaries of reports on the receipt and refusal of gratification to the KPK;
j. Coordinating and consulting with the KPK, both verbally and in writing, regarding the implementation of gratification controls.
k. Submitting the results of the management of reports on the acceptance and rejection of gratuities to the Board of Directors;
l. Monitor and evaluate gratification control efforts and report to the Board of Directors; and
m. Maintain records of gratuities reported by IFG People until the KPK determines the status of such gratuities.

Gratification Reporting Channels

Individuals reporting gratification may submit their reports through:

1. IFG UPG:
   a. IFG UPG email;
   b. A letter addressed to UPG; and
   c. Other channels provided by IFG
2. IFG Integrated WBS Channel:
   a. IFG Integrated WBS email;
   b. Letters addressed to IFG Integritas;
   c. Through the Integrated WBS website;
   d. The Integrated WBS dedicated telephone line;
   e. The Integrated WBS dedicated fax line;
   f. The Integrated WBS SMS and WhatsApp channels; and
   g. Other channels provided by IFG.
3. KPK Gratification Directorate
   a. Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
   b. Address: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, South Jakarta 12920
   c. Website/Apps: www.gol.kpk.go.id

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
POLICY ON THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan IFG dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, kompetisi yang sehat, transparansi, keadilan, kewajaran, dan akuntabilitas. Seluruh proses dijalankan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk mengurangi risiko benturan kepentingan dalam pengelolaan operasional dan keuangan, IFG menetapkan pedoman pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam standar operasional dan prosedur resmi. Pedoman ini disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 62 Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Selain itu, IFG memastikan bahwa proses pengadaan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan *(governance)*, menekankan keterbukaan, efisiensi biaya, persaingan sehat, dan keadilan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The procurement of facilities and infrastructure within the IFG is implemented through a goods and services procurement mechanism that emphasizes the principles of efficiency, effectiveness, fair competition, transparency, fairness, reasonableness, and accountability. The entire process is carried out in accordance with the provisions set forth in Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

To mitigate the risk of conflicts of interest in operational and financial management, IFG has established guidelines for the procurement of goods and services, which are set forth in official standard operating procedures. These guidelines were approved via Board of Directors' Decree No. 62 of 2022, dated October 12, 2022, regarding the Policy on the Procurement of Goods and/or Services. In addition, IFG ensures that the procurement process is in line with corporate governance principles, emphasizing transparency, cost efficiency, fair competition, and fairness, in accordance with applicable laws and regulations.

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

POLICY ON FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

IFG menetapkan kebijakan yang mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta seluruh pegawai yang mewakili Perusahaan dalam urusan pemerintahan dan politik untuk senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait keterlibatan Perusahaan di ranah publik. IFG menghormati hak setiap individu dalam menyalurkan aspirasi politik secara bebas dan sesuai pilihan pribadi, sehingga Perusahaan tidak menoleransi tindakan pemaksaan yang dapat membatasi kebebasan berpendapat atau berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Selain itu, IFG mengatur bahwa pegawai yang aktif dalam partai politik dan/atau mencalonkan diri dalam pemilihan umum wajib mengundurkan diri dari jabatannya di Perusahaan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan juga menegaskan larangan pemberian sumbangan kepada partai politik manapun, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik tersebut.

IFG has established a policy requiring the Board of Commissioners, the Board of Directors, management, and all employees representing the Company in government and political affairs to always comply with laws and regulations regarding the Company's involvement in the public sphere. IFG respects every individual's right to freely express political views in accordance with personal choice; therefore, the Company does not tolerate coercive actions that may restrict freedom of expression or participation in political activities.

Furthermore, IFG stipulates that employees who are active in political parties and/or run for office in general elections must resign from their positions at the Company, in accordance with applicable laws. The Company also strictly prohibits the making of contributions to any political party, in line with the laws and regulations governing such practices.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, IFG berkewajiban untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu regulasi penting yang berlandaskan prinsip pemberantasan korupsi dan pencegahan penyimpangan internal adalah kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN mencakup daftar lengkap harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan melalui formulir resmi sesuai ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaksanaan pelaporan LHKPN menjadi salah satu bentuk nyata komitmen IFG dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*governance*).

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan LHKPN, IFG mempertimbangkan berbagai landasan hukum dan peraturan yang menjadi acuan dalam penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum dan regulasi tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.
5. Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana disahkan oleh Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023.

As a State-Owned Enterprise (SOE) owned by the Government of Indonesia, IFG is obligated to consistently comply with all applicable laws and regulations. One of the key regulations, based on the principles of combating corruption and preventing internal misconduct, is the requirement to file the State Officials' Wealth Report (LHKPN)

The LHKPN includes a complete list of a public official's assets, submitted via an official form in accordance with the provisions of the Corruption Eradication Commission (KPK), as stipulated in KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 regarding Procedures for the Registration, Examination, and Publication of Asset Reports of Public Officials. The implementation of LHKPN reporting is a tangible demonstration of IFG's commitment to applying the principles of good corporate governance.

LEGAL BASIS AND REGULATIONS GOVERNING THE IMPLEMENTATION OF LHKPN WITHIN THE COMPANY

In implementing the LHKPN, IFG takes into account various legal bases and regulations that serve as guidelines for the implementation of the LHKPN within the Company. These legal bases and regulations include:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on a State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as last amended by Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2025.
4. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as last amended by Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023.
5. Compliance Guidelines for the Submission of State Officials' Wealth Report (LHKPN), as approved by Decision No. 1 of 2023 of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat struktural IFG dikategorikan sebagai penyelenggara negara yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sesuai regulasi ini, setiap penyelenggara negara wajib menghindari tindakan KKN yang dapat merugikan keuangan perusahaan maupun negara, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di lingkungan instansi pusat, penyelenggara negara diwajibkan menyusun dan melaporkan LHKPN setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret melalui sistem *online* di www.elhkpn.kpk.go.id.

Sementara itu, mekanisme penyampaian LHKPN di lingkungan IFG diatur secara internal melalui Pedoman Kepatuhan Penyampaian LHKPN, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pejabat IFG yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Direksi; dan
3. Pejabat dua tingkat di bawah Direksi sesuai struktur organisasi yang berlaku, termasuk Senior Executive Vice President (SEVP), kepala divisi dan/atau kepala departemen.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, jumlah Wajib Lapor di IFG tercatat sebanyak 78 orang, yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Kepala Divisi, dan Kepala Departemen. Seluruh Wajib Lapor tersebut telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN, sehingga IFG mencapai tingkat kepatuhan sebesar 100% sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan integritas.

As a State-Owned Enterprise, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and IFG's structural officials are categorized as public officials subject to the provisions of Law No. 28 of 1999 on Public Officials who are clean and free from practices of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). In accordance with this regulation, every public official is required to avoid acts of KKN that could harm the company's or the state's finances, whether for personal gain or for the benefit of others.

Referring to Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation No. 07 of 2016 on Procedures for Registration, Disclosure, and Verification of State Officials' Wealth Declaration, as well as KPK Leadership Circular Letter No. 10 of 2017 on Guidelines for Managing LHKPN within Central Government Agencies, state officials are required to prepare and submit their LHKPN annually by March 31 at the latest via the online system at www.elhkpn.kpk.go.id.

Meanwhile, the mechanism for submitting LHKPNs within IFG is regulated internally through the Guidelines for Compliance with LHKPN Submission, which were established by Board of Directors and Board of Commissioners Decree No. 1 of 2023. The IFG officials required to submit LHKPNs are as follows:

1. Members of the Board of Commissioners;
2. Members of the Board of Directors; and
3. Officials two levels below the Board of Directors in accordance with the applicable organizational structure, including Senior Executive Vice Presidents (SEVPs), division heads, and/or department heads.

TRANSPARENCY OF CORPORATE OFFICIALS' LHKPN FOR 2025

In 2025, the number of reporting-obligated individuals at IFG was recorded at 78, including members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, SEVPs, division heads, and department heads. All of these reporting-obligated individuals have fulfilled their obligation to submit LHKPNs, enabling IFG to achieve a 100% compliance rate as a manifestation of its commitment to transparency and integrity.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka memperkuat efektivitas penerapan GCG, manajemen IFG menegaskan komitmennya untuk mengelola perusahaan secara profesional dengan berlandaskan perilaku yang konsisten dengan *Code of Conduct*, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG. Sebagai bagian dari implementasi ini, Perusahaan telah membangun mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu instrumen pengawasan GCG. WBS dirancang untuk menampung pengaduan maupun pengungkapan yang terkait dengan tindakan melawan hukum atau perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik dan *Code of Conduct*.

Pengelolaan WBS dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan, anonimitas, dan independensi. Setiap pengaduan yang masuk dianalisis terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Pelaporan sebelum diteruskan ke pihak yang berwenang di IFG. Proses penanganan laporan WBS merujuk pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Kebijakan dan prosedur WBS memastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara rahasia, anonim, dan independen, sehingga seluruh pegawai IFG serta pihak terkait dapat berperan aktif dalam mengungkap pelanggaran di lingkungan Perusahaan. Setiap laporan yang diterima dikaji secara cermat, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh berdasarkan fakta yang teridentifikasi. Penentuan keputusan atas laporan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak tindakan, tingkat kesengajaan, serta motif yang mendasari tindakan tersebut.

To strengthen the effectiveness of GCG implementation, IFG management reaffirms its commitment to managing the company professionally, based on conduct consistent with the Code of Conduct, as a concrete effort to realize GCG principles. As part of this implementation, the Company has established a Whistleblowing System (WBS) as one of the GCG supervisory mechanisms. The WBS is designed to receive complaints or disclosures related to unlawful acts or conduct that violates the Code of Ethics and Code of Conduct.

The WBS is managed with a focus on the principles of confidentiality, anonymity, and independence. Every complaint received is first analyzed by the Reporting Management Team before being forwarded to the appropriate authorities at IFG. The WBS report handling process follows the Guidelines for the Violation Reporting System, which were approved via Board of Directors and Board of Commissioners Decree No. 1 of 2023 of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) regarding Guidelines for Good Corporate Governance.

WBS policies and procedures ensure that reporting can be conducted confidentially, anonymously, and independently, so that all IFG employees and relevant parties can play an active role in uncovering violations within the Company. Every report received is carefully reviewed, classified, and followed up with a thorough investigation based on the identified facts. Decisions regarding reports are made by considering the impact of the actions, the degree of intent, and the underlying motives for such actions.

RUANG LINGKUP *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Ruang lingkup pelaporan yang ditangani dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Kecurangan (*Fraud*) yaitu:
   a. Korupsi;
   b. Penyuapan;
   c. Pemerasan;
   d. Benturan kepentingan;
   e. Kecurangan;
   f. Gratifikasi;
   g. Pencurian;
   h. Kecurangan atas laporan keuangan.
2. Berkaitan dengan sumber daya manusia, pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin, Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan, serta peraturan lainnya akan diteruskan kepada fungsi terkait menggunakan mekanisme korespondensi resmi Perusahaan.

SCOPE OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

The scope of reports handled under the Violation Reporting System includes the following:

1. Matters Related to Fraud, namely:
   a. Corruption;
   b. Bribery;
   c. Extortion;
   d. Conflicts of interest;
   e. Fraud;
   f. Gratification;
   g. Theft; and
   h. Financial statement fraud.
2. With regard to human capital, violations of the law, disciplinary violations, Company Regulations, the Company's Code of Ethics and Conduct, and other regulations will be forwarded to the relevant functions using the Company's official correspondence mechanism.

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pedoman *Whistleblowing System* disebarluaskan kepada seluruh Insan IFG maupun pihak eksternal yang memiliki kepentingan. Proses sosialisasi ini dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab atas penerapan WBS. Kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan bertujuan untuk memperkuat pemahaman, membangun persepsi yang tepat, serta mendorong partisipasi aktif Insan IFG dalam melaporkan penyimpangan dan memanfaatkan WBS sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

MEKANISME *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Pelapor melakukan pelaporan melalui sarana yang disediakan IFG berupa:
   a. *Email*;
   b. Surat yang ditujukan kepada IFG Integritas;
   c. Situs WBS Integrasi;
   d. Saluran telepon khusus WBS Integrasi;
   e. Saluran faksimili khusus WBS Integrasi;
   f. SMS dan WhatsApp khusus WBS Integrasi; dan
   g. Media lainnya yang disediakan IFG.

   Seluruh saluran penyampaian laporan pelanggaran hanya dapat diakses oleh Tim WBS. Ketentuan dan detail mengenai sarana pelaporan akan dimuat pada kebijakan tersendiri.

2. Dalam pelaporan pelanggaran tersebut, Pelapor wajib memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pelapor wajib memberikan Indikasi Awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
   a. Pelanggaran yang Diadukan
   b. Pokok pelaporan yang ingin disampaikan dan dugaan jumlah kerugian jika dapat ditentukan, yang mana 1 (satu) pelaporan hanya untuk satu permasalahan saja, sehingga dapat fokus dalam penanganannya.
   c. Pihak yang Terlibat
   d. Pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk pihak terkait dan pihak yang turut serta, membantu, dan atau memerintahkan tindakan pelanggaran dan pihak mana yang diuntungkan atau dirugikan dari pelanggaran tersebut.
   e. Waktu Terjadinya Pelanggaran
   f. Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa bulan, tahun, dan/atau tanggal tertentu saat masalah sebut terjadi.
   g. Tempat Terjadinya Pelanggaran
   h. Lokasi masalah tersebut terjadi dengan spesifik menyebutkan nama tempat dan keterangan lainnya yang dapat membantu.
   i. Bagaimana Kejadiannya
   j. Deskripsi kronologis kejadian dari awal hingga akhir.
   k. Bukti-bukti Pelanggaran

DISSEMINATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System Guidelines are disseminated to all IFG personnel and external parties with a vested interest. This awareness-raising process is conducted by the work unit responsible for implementing the WBS. Ongoing awareness-raising activities aim to strengthen understanding, build the right perceptions, and encourage active participation by IFG personnel in reporting irregularities and utilizing the WBS in accordance with its functions and objectives.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISM

1. Whistleblower may submit reports through the channels provided by IFG, namely:
   a. Email;
   b. A letter addressed to IFG Integritas;
   c. Through the Integrated WBS website;
   d. The Integrated WBS dedicated telephone line;
   e. The Integrated WBS dedicated fax line;
   f. The Integrated WBS SMS and WhatsApp channels; and
   g. Other channels provided by IFG.

   All channels for reporting violations are accessible only to the WBS Team. The terms and details regarding the reporting channels will be set forth in a separate policy.

2. When reporting a violation, the Whistleblower must provide evidence, information, or clear indications of the reported violation. The Whistleblower must provide verifiable Preliminary Indications, including:
   a. The Alleged Violation
   b. The main subject of the report and the estimated amount of loss, if determinable; each report must address only one issue to ensure focused handling.
   c. Parties Involved
   d. The parties responsible for the incident, including related parties and those who participated in, assisted with, and/or ordered the violation, as well as the parties who benefited from or were harmed by the violation.
   e. Time of the Violation
   f. The timeframe of the incident, including the month, year, and/or specific date when the incident occurred.
   g. Location of the Violation
   h. The location where the incident occurred, specifically stating the name of the place and any other details that may be helpful.
   i. How It Happened
   j. A chronological description of the incident from start to finish.
   k. Evidence of the Violation

l. Dokumentasi terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilaporkan berupa foto ataupun dokumen lainnya yang terkait.

3. Tim WBS menerima pelaporan dan mengadministrasikan pelaporan baik yang diterima melalui Konsultan WBS maupun melalui media lainnya. Dalam melakukan administrasi pelaporan, Tim WBS membuat nomor pelaporan, tanggal penerimaan, media penyampaian, pihak Pelapor (jika diketahui), pihak Terlapor, deskripsi laporan, dan status laporan.
4. Tim WBS melakukan seleksi dan verifikasi laporan berupa kecukupan informasi dan kesesuaian pelaporan dengan ruang lingkup pelaporan. Bila bukti/informasi tidak cukup, maka Tim WBS berkoordinasi dengan Pelapor melalui konsultan WBS atau secara langsung untuk meminta informasi tambahan. Apabila sampai dengan 10 hari kerja, informasi tambahan tidak diterima maka laporan tersebut akan diarsipkan dan dapat diaktifkan kembali apabila data tambahan telah didapatkan
5. Tim WBS selanjutnya menyampaikan hasil laporan yang telah diverifikasi kepada Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor untuk memutuskan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

l. Documentation related to the reported violation, such as photos or other relevant documents.

3. The WBS Team receives and processes reports submitted through WBS Consultants or other channels. When processing reports, the WBS Team records the report number, date of receipt, submission channel, the Whistleblower (if known), the Reported party, the report description, and the report status.
4. The WBS Team screens and verifies reports to ensure the information is sufficient and that the report aligns with the reporting scope. If the evidence or information is insufficient, the WBS Team coordinates with the Whistleblower —either through the WBS Consultant or directly—to request additional information. If no additional information is received within 10 business days, the report will be archived and may be reactivated once the additional data has been obtained.
5. The WBS Team then submits the verified report findings to the Deciding Official in accordance with the criteria for the Reported Party to determine follow-up actions, subject to the following provisions:

Kriteria Pihak Terlapor Criteria for Reported Parties	**Pejabat Pemutus Tindak Lanjut** Deciding Official's Follow-up
Kepala Departemen/Setingkat Kepala Departemen ke Bawah Department Head/Equivalent to Department Head and Below	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Director in charge of compliance function
Kepala Divisi/SEVP atau setara Division Head/SEVP or equivalent	Direktur Utama President Director
Direksi Board of Directors	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners	Dewan Komisaris selain yang Terlapor Members of the Board of Commissioners other than the Reported Parties

6. Tim WBS meneruskan Pengaduan terkait anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.
7. Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor memutuskan Tim Investigasi dengan menerbitkan surat tugas Investigasi untuk melaksanakan Investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Investigasi dapat dilakukan oleh pihak internal atau dapat dilakukan oleh Investigator Independen (eksternal) dan/atau kombinasi keduanya sesuai dengan kebutuhan penanganan pelaporan pelanggaran.
8. Tim Investigasi selanjutnya melakukan Investigasi sesuai dengan bukti pelanggaran.
9. Setelah selesai pelaksanaan Investigasi, Tim Investigasi menyampaikan komponen laporan Investigasi berupa berita acara dan laporan hasil Investigasi. Laporan hasil Investigasi wajib disertai beberapa bukti pendukung, di mana laporannya mencakup hasil pelaksanaan, rekomendasi sanksi sesuai peraturan BPUI dan rekomendasi perbaikan. Seluruh komponen laporan Investigasi disampaikan kepada pejabat yang menugaskan Tim Investigasi.

6. The WBS team forwards complaints regarding members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the WBS manager at the Ministry of State-Owned Enterprises.
7. The Deciding Official, in accordance with the criteria of the Reported Party, appoints an Investigation Team by issuing an investigation assignment letter to conduct the investigation in accordance with applicable regulations. The Investigation Team may consist of internal personnel or may be comprised of Independent Investigators (external) and/or a combination of both, depending on the needs of handling the reported violation.
8. The Investigation Team then conducts the investigation based on the evidence of the violation.
9. Upon completion of the investigation, the Investigation Team submits the components of the investigation report, consisting of a minutes of proceedings and an investigation findings report. The investigation findings report must be accompanied by supporting evidence, and the report must include the results of the investigation, recommendations for sanctions in accordance with BPUI regulations, and recommendations for corrective actions. All components of the investigation report are submitted to the official who assigned the Investigation Team.

10. Pejabat Pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor yang menugaskan pelaksanaan Investigasi menerima komponen laporan Investigasi dan melaksanakan tinjauan. Selanjutnya Pejabat Pemutus tindak lanjut sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menetapkan sanksi untuk Terlapor jika Terlapor terbukti bersalah.
11. Pejabat pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menyampaikan informasi kepada Tim WBS terhadap laporan yang telah selesai.
12. Tim WBS menerima informasi pelaporan yang sudah selesai dan memperbarui status pelaporan

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

IFG menetapkan mekanisme perlindungan bagi pelapor untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan setiap pengaduan, dengan perincian sebagai berikut:

1. IFG menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, Pihak Terkait dan isi dari laporan, kecuali atas permintaan penegak hukum
2. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS dari segala tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, catatan yang merugikan Pelapor dan/atau Pihak Terkait, hingga tindakan fisik. Bagi yang membutuhkan perlindungan terhadap segala tindakan tersebut di atas, diharapkan dapat melaporkan ke Tim WBS.
3. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS selama Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS menjaga kerahasiaan pelaporan pelanggaran yang diadukan kepada pihak mana pun.
4. Dalam hal Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS adalah Insan IFG yang sebelumnya tidak mengungkapkan informasi data diri (anonim) dan menerima ancaman dari pihak di dalam IFG, maka Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Tim WBS.
5. Informasi pelaksanaan pemberian perlindungan, berupa kapan dan bagaimana serta institusi yang diserahkan untuk memberikan perlindungan akan disampaikan secara rahasia kepada Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS yang meminta untuk diberikan perlindungan kepada Tim WBS.

Perlindungan tersebut tidak berlaku bagi Pelapor atau Pihak Terkait yang terbukti menyampaikan laporan palsu atau bernuansa fitnah, maupun bagi Pelapor yang kemudian diketahui membocorkan isi laporannya kepada pihak lain.

MEDIA PELAPORAN DAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

WBS adalah mekanisme yang dirancang untuk mengelola pengaduan terkait tindakan Kecurangan (*Fraud*) maupun penyimpangan terhadap kebijakan, kode etik, prosedur, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Insan IFG

10. The Deciding Official follows up in accordance with the criteria established by the Reported Party who assigned the investigation, receives the containing the investigation report components, and conducts a review. Subsequently, the Deciding Official, in accordance with the criteria established by the Reported Party, imposes sanctions on the Reported Party if the Reported Party is found guilty.
11. The Deciding Official follows up in accordance with the criteria by having the Reported Party provide information to the WBS Team regarding the completed report.
12. The WBS Team receives the completed report and updates the report's status.

PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

IFG has established a whistleblower protection mechanism to ensure the security and confidentiality of every report, as detailed below:

1. IFG guarantees the confidentiality of the identity of the Whistleblower, Related Parties, and the content of the report, except upon request by law enforcement
2. IFG provides protection for the Whistleblower, Related Parties, the Investigation Team, and/or the WBS Team against all forms of pressure, delays in promotion, discrimination, dismissal, records that are detrimental to the Whistleblower and/or Related Parties, and even physical harm. Those who require protection against any of the aforementioned actions are encouraged to report to the WBS Team.
3. IFG provides protection for the Whistleblower, Related Parties, the Investigation Team, and/or the WBS Team as long as the Whistleblower, Related Parties, the Investigation Team, and/or the WBS Team maintain the confidentiality of the reported violation with respect to any party.
4. In the event that a Whistleblower, Related Party, Investigation Team, and/or WBS Team consists of an IFG employee who previously did not disclose personal identifying information (remained anonymous) and has received threats from parties within IFG, the Whistleblower, Related Party, Investigation Team, and/or WBS Team may submit a request for protection to the WBS Team.
5. Information regarding the implementation of protection—including when and how it will be provided, as well as the institution designated to provide it—will be communicated confidentially to the Whistleblower, the Related Party, the Investigation Team, and/or the WBS Team who have requested protection from the WBS Team.

Such protection does not apply to Whistleblowers or Related Parties who are proven to have submitted false or defamatory reports, nor to Whistleblowers who are later found to have disclosed the contents of their reports to other parties.

REPORTING CHANNELS AND MANAGEMENT OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

The WBS is a mechanism designed to manage complaints regarding acts of fraud or violations of policies, codes of conduct, procedures, or unlawful acts committed by IFG People that have the potential to harm the company. The

dan berpotensi merugikan perusahaan. Setiap pengaduan yang diterima melalui WBS dijamin kerahasiaannya dan berfungsi sebagai sarana untuk mengungkap pelanggaran di lingkungan IFG. Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran resmi yang telah disediakan, yaitu:

confidentiality of every report received through the WBS is guaranteed, and the system serves as a means to uncover violations within the IFG environment. Reports can be submitted through the official channels provided, namely:

E-mail	wbsifg@tipoffs.info
Dropbox	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027
Surat Mail	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027

Selain saluran resmi tersebut, pengaduan melalui WBS juga dapat disampaikan melalui media berikut:

In addition to these official channels, complaints via WBS can also be submitted through the following media:

Situs Website	https://idn.deloitte-halo.com/ifgintegritas/
Telepon Phone	+62 21 50886181
Faksimili Fax	+62 21 50886182, dengan form yang dapat diunduh pada link berikut: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjdUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx] +62 21 50886182, using the form available for download at the following link: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjdUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx]
E-mail	wbsifg@tipoffs.info
Surat Mail	IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027 dengan form yang dapat diunduh pada link berikut: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjdUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx] IFG Integritas P.O. Box 2781 JKP 10027 using the form available for download at the following link: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjdUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx]
SMS dan Whatsapp SMS and WhatsApp	+62 812 2356 2277

JUMLAH PENGADUAN MASUK DAN DIPROSES

NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED AND PROCESSED

	2025	2024
Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Number of complaints received and processed	**15**	18
Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti Number of complaints that have been followed up	**12**	18
Jumlah pengaduan yang belum diproses Number of complaints that have not yet been processed	**3**	0

TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN

Selama tahun 2025, IFG menerima dan memproses total 15 (lima belas) pengaduan. 12 (dua belas) pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti hingga tuntas dan 3 (tiga) pengaduan masih dalam proses ditindaklanjuti.

FOLLOW-UP ON COMPLAINT REPORTS

During 2025, IFG received and processed a total of 15 (fifteen) complaints. 12 (twelve) of these complaints have been fully resolved, and 3 (three) are still being processed.

TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

TRANSPARENCY IN BAD GOVERNANCE PRACTICES

No.	Keterangan Description	Praktik dalam Tahun Practices in the Year		
		2025	2024	2023
1	Aktivitas perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan. Insider trading activities involving directors/commissioners, management, and employees.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
2	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun. Non-compliance in disclosing tax compliance obligations, including a guilty verdict from the highest tax court regarding any tax-related matter.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
3	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. Inconsistencies in the presentation of the Annual Report and Financial s with applicable regulations and Indonesian Accounting Standards (SAK).	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
4	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material. Cases of non-compliance with laws, rules, and regulations related to significant or material related-party transactions.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan. There is no disclosure of operating segments in the Financial Statements.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
6	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan. Any legal violations related to labor/employment/consumer/bankruptcy/ commercial/competition, or environmental matters.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
7	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting. Sanctions from the regulator for failing to make an announcement within the specified timeframe regarding a material event.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None
8	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan. Evidence that the company has not complied with any listing rules or regulations over the past year, other than disclosure rules.	**Nihil** None	Nihil None	Nihil None

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED GOVERNANCE

Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan IFG, Perusahaan tidak hanya menerapkan tata kelola pada tingkat korporasi, tetapi juga memastikan terselenggaranya tata kelola terintegrasi pada seluruh LJK dalam konglomerasi. Dengan demikian, penguatan tata kelola IFG diarahkan untuk memastikan keselarasan struktur, proses, dan hasil tata kelola secara konsolidasi. Dalam upaya menjamin transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG, serta untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, beserta Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015, implementasi Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan IFG pada tahun 2025 meliputi beberapa aspek berikut:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2025;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan IFG;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan IFG posisi sampai dengan Desember 2024;
4. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan IFG;
5. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan IFG; dan
6. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan IFG.

As the Parent Company of the IFG Financial Conglomerate, the Company not only implements corporate governance at the corporate level but also ensures the implementation of integrated governance across all financial institutions within the conglomerate. Thus, efforts to strengthen IFG's governance are aimed at ensuring the alignment of governance structures, processes, and outcomes on a consolidated basis. In an effort to ensure transparency in the implementation of Integrated Corporate Governance within the IFG Financial Conglomerate, as well as to comply with the provisions set forth in Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, regarding the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomerates, as well as OJK Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015, the implementation of Integrated Governance within the IFG Financial Conglomerate in 2025 encompassed the following aspects:

1. Self-Assessment Report on the Implementation of Integrated Governance for the year 2025;
2. The structure of the IFG Financial Conglomerate;
3. Shareholding structure of the IFG Financial Conglomerate as of December 2025;
4. Management Structure of the IFG Financial Conglomerate;
5. Basic Principles of Integrated Governance of the IFG Financial Conglomerate; and
6. Intra-Group Transaction Policy of the IFG Financial Conglomerate

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN 2025

Sejalan dengan komitmen IFG dalam menegakkan pentingnya tata kelola perusahaan sebagai fondasi keberlanjutan usaha, sepanjang tahun 2025 IFG terus meningkatkan praktik governansi melalui pelaksanaan penilaian internal (*self-assessment*) terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Self-assessment mencakup evaluasi terhadap tiga aspek utama tata kelola, yaitu struktur, proses, dan hasil. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan minimal tujuh faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, yang meliputi:

SELF-ASSESSMENT REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE DURING 2025

In line with IFG's commitment to upholding the importance of corporate governance as the foundation of business sustainability, throughout 2025 IFG continued to improve its governance practices through the conduct of an internal self-assessment of the implementation of good corporate governance. This assessment was conducted in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 on the Application of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomerates, as well as OJK Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015 on the application of integrated corporate governance for financial conglomerates.

The self-assessment includes an evaluation of three main aspects of governance: structure, process, and results. The assessment is based on at least seven factors related to the implementation of governance, which include:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
8. Serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan tata kelola terintegrasi.

1. The performance of the Board of Directors' duties and responsibilities;
2. The performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
3. The duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee;
4. The duties and responsibilities of the Integrated Compliance Unit;
5. The duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Unit;
6. Implementation of integrated risk management; and
7. The development and implementation of the Integrated Governance Guidelines;
8. As well as taking into account other information related to the implementation of integrated corporate governance.

Hasil evaluasi terhadap implementasi GCG terintegrasi di IFG dilakukan dengan merujuk pada kriteria peringkat yang ditetapkan dalam ketentuan 15/SEOJK.03/2015. Peringkat penilaian tersebut terbagi menjadi lima kategori, yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Dalam sistem ini, peringkat yang lebih rendah mencerminkan tingkat penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih optimal dan efektif.

The evaluation of the implementation of integrated GCG at IFG is conducted by referring to the rating criteria set forth in Regulation 15/SEOJK.03/2015. The assessment ratings are divided into five categories: Rating 1, Rating 2, Rating 3, Rating 4, and Rating 5. In this system, a lower rating reflects a more optimal and effective level of integrated corporate governance implementation.

Hasil evaluasi implementasi GCG terintegrasi di IFG untuk periode tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

The results of the evaluation of the implementation of Integrated GCG at IFG for the 2025 period are presented as follows:

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025
Results of the 2025 IFG Integrated GCG Implementation Assessment

	Peringkat Rating	**Definisi Peringkat** Rating Definition
IFG *Stand Alone*	3	• Mencerminkan IFG dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum "Cukup Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Perusahaan. • Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh IFG dalam memenuhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ke depannya, IFG berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan guna memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. • Reflects that IFG, on a stand-alone basis, has implemented Integrated Governance that is generally "Fair". This rating indicates an adequate level of compliance with Integrated Governance principles. Any weaknesses identified in the implementation are generally not significant and have been recognized by the Company, with corresponding improvement plans already in place. • This achievement reflects IFG's continued commitment to implementing Good Corporate Governance to the best of its ability. Going forward, IFG remains committed to continuously improving and refining its governance practices to ensure more effective and sustainable corporate governance implementation.

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025
Results of the 2025 IFG Integrated GCG Implementation Assessment

Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition

Analisis
Analysis

Berdasarkan analisis penilaian sendiri terhadap struktur, proses, dan hasil tata kelola terintegrasi pada setiap faktor penilaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Struktur tata kelola terintegrasi IFG dinilai telah cukup dan memadai;
2. Proses tata kelola terintegrasi IFG dinilai telah efektif, didukung dengan struktur yang baik; dan
3. Hasil tata kelola terintegrasi dinilai telah baik, dihasilkan dari proses yang efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap.

Secara keseluruhan, penerapan tata kelola terintegrasi di IFG secara umum sudah berjalan dengan cukup baik, di mana:
1. Direksi IFG telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan dan risiko bisnis utama IFG. Direksi IFG juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
   a. melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan arahan Dewan Komisaris;
   b. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG; dan
   c. senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit.
   d. guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2. Dewan Komisaris IFG telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan bisnis dan risiko bisnis utama IFG. Dewan Komisaris IFG juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
   a. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi;
   b. menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala; dan
   c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
   d. guna memastikan keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
3. IFG telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang anggotanya terdiri atas Komisaris Independen IFG, Komisaris Independen Anggota Konglomerasi Keuangan IFG, dan pihak independen di luar perusahaan. Komite Tata Kelola Terintegrasi IFG senantiasa mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penyelenggaraan rapat secara berkala.
4. IFG telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi acuan bagi penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG;
5. IFG telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang bersifat independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.
6. IFG telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi. IFG telah memiliki struktur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi serta telah memenuhi ketentuan sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang antara lain mencakup penetapan limit risiko, pengkinian Pedoman Strategis Manajemen Risiko, mengesahkan Prosedur Pelaporan Daftar Risiko Utama Terintegrasi, dan mengesahkan Prosedur Pelaporan Profil Risiko Terintegrasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG, yaitu:
1. Secara operasional, terdapat 1 (satu) anggota Direksi IFG sedang dalam proses pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan POJK 13/2022.
2. Terdapat posisi lowong pada jabatan Komisaris Independen IFG sehingga belum memenuhi persyaratan jumlah komposisi komisaris independen berdasarkan POJK 30 Tahun 2024 dalam rangka proses pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).
3. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris IFG masih dalam proses pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dalam rangka proses pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan berdasarkan POJK 30/2024.
4. IFG telah memenuhi ketentuan sesuai POJK 17 tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK 13 Tahun 2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Namun, dengan adanya POJK 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan internal yang telah dimiliki.
5. IFG masih perlu memperkuat implementasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di seluruh anggota Konglomerasi Keuangan IFG mengingat hingga periode pelaporan ini, masih terdapat anggota yang sedang dalam proses menyelaraskan Pedoman Tata Kelola Perusahaannya dengan pedoman terintegrasi IFG.
6. IFG perlu meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk mendukung perbaikan kinerja perusahaan.

Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, namun secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan.

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025
Results of the 2025 IFG Integrated GCG Implementation Assessment

Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition

Based on a self-assessment of the structure, processes, and outcomes of integrated governance across each assessment factor with the following conclusions:
1. IFG's integrated governance structure is deemed sufficient and adequate;
2. IFG's integrated governance processes are assessed as effective, supported by a sound structure; and
3. the outcomes of integrated governance are assessed as good, resulting from effective processes and supported by a comprehensive structure.

Overall, the implementation of integrated governance at IFG is generally proceeding quite well, where:
1. IFG's Board of Directors has met the requirements for integrity, competence, and financial reputation; obtained approval of its fit and proper test from the OJK; and possesses sufficient knowledge of IFG's core business activities and risks. IFG's Board of Directors has also carried out its duties and responsibilities in implementing integrated governance in accordance with the established assessment indicators at , including by:
   a. refining the Integrated Governance Guidelines in accordance with the Board of Commissioners' directives;
   b. directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Integrated Governance Guidelines within the IFG Financial Conglomerate; and
   c. consistently following up on audit recommendations and findings to ensure sustainability and compliance with applicable regulations.
2. The IFG Board of Commissioners has met the requirements for integrity, competence, and financial reputation, obtained approval of its fit and proper test from the OJK, and possesses sufficient knowledge regarding IFG's business activities and key business risks. The IFG Board of Commissioners has also carried out its duties and responsibilities in implementing integrated governance in accordance with the established assessment indicators, including by:
   a. evaluating the Integrated Governance Guidelines and supervising the implementation of integrated governance;
   b. holding regular Board of Commissioners meetings; and
   c. supervising the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities to ensure sustainability and compliance with applicable regulations.
3. IFG has established an Integrated Governance Committee whose members consist of IFG's Independent Commissioners, Independent Commissioners from IFG's Financial Conglomerate, and independent parties outside the company. The IFG Integrated Governance Committee continuously evaluates the implementation of integrated governance through the holding of regular meetings.
4. IFG has established Integrated Governance Guidelines that serve as a reference for the implementation of integrated governance within the IFG Financial Conglomerate;
5. IFG has established an Integrated Compliance Unit and an Integrated Internal Audit Unit that are independent and separate from operational units.
6. IFG has implemented integrated risk management. IFG has an adequate structure to support the implementation of integrated risk management and has complied with the provisions of POJK No. 17/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, which includes the establishment of risk limits, updating the Strategic Risk Management Guidelines, approving the Reporting Procedures for the Integrated List of Key Risks, and approving the Reporting Procedures for the Integrated Risk Profile.

However, there are still several weaknesses in the implementation of integrated governance within the IFG Financial Conglomerate, namely:
1. Operationally, 1 (one) member of the IFG Board of Directors is currently in the process of fulfilling the OJK's fit and proper test requirements under POJK 13/2022.
2. There is a vacancy in the position of Independent Commissioner of IFG. Consequently, the Company has not yet fulfilled the requirement for the composition of Independent Commissioners as stipulated under POJK No. 30 of 2024 during the process of establishing the Financial Conglomerate Holding Company (PIKK).
3. All members of IFG's Board of Directors and Board of Commissioners are still in the process of undergoing the OJK's fit and proper test as part of the process to establish a Financial Conglomerate Holding Company in accordance with POJK 30/2024.
4. IFG has complied with the provisions of POJK 17 of 2014 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates and POJK 13 of 2022 on the Supervision of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. However, with the enactment of POJK 30 of 2024 on Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies, it is necessary to make further adjustments to existing internal regulations.
5. IFG still needs to strengthen the implementation of the Integrated Governance Guidelines across all members of the IFG Financial Conglomerate, given that as of this reporting period, there are still members in the process of aligning their Corporate Governance Guidelines with IFG's integrated guidelines.
6. IFG needs to improve the effectiveness of its risk management practices to support improvements in corporate performance.

Although there are still some weak points, in general, corrective action can be taken promptly to address them.

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025
Results of the 2025 IFG Integrated GCG Implementation Assessment

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
IFG Konsolidasi IFG Consolidated	2	Konglomerasi keuangan IFG dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat disesuaikan dengan tindakan normal dari Perusahaan. The IFG financial conglomerate is assessed to have implemented Integrated Governance that is generally "Good." This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Integrated Governance. If there are any weaknesses in the implementation of Integrated Governance, they are generally minor and can be addressed through the Company's normal operations.

Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG Terintegrasi IFG Tahun 2025
Results of the 2025 IFG Integrated GCG Implementation Assessment

Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition

Analisis
Analysis

Secara keseluruhan, penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG secara umum sudah berjalan dengan baik, di mana:

1. Direksi anggota Konglomerasi Keuangan IFG telah memiliki pengetahuan mengenai konglomerasi keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari perusahaan. Direksi juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
   a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan;
   b. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan; dan
   c. senantiasa menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit.
2. Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan IFG telah memiliki pengetahuan mengenai konglomerasi keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari perusahaan. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan tata kelola terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan, antara lain dengan:
   a. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi;
   b. menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala; dan
   c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Seluruh anggota Konglomerasi Keuangan IFG telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang bersifat independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.
4. Seluruh anggota Konglomerasi Keuangan IFG telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi serta telah memiliki struktur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi dan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko terintegrasi.
5. Konglomerasi Keuangan IFG telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri atas Komisaris Independen IFG, Komisaris Independen Anggota Konglomerasi Keuangan IFG, dan Pihak Independen di luar perusahaan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian dalam penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan IFG, yaitu:

1. Sampai dengan periode pelaporan ini, masih terdapat beberapa Pedoman Tata Kelola anggota Konglomerasi Keuangan IFG yang belum diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi IFG.
2. Pada IFG dan beberapa anggota Konglomerasi Keuangan IFG masih terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
3. Pada IFG dan beberapa anggota Konglomerasi Keuangan IFG masih terdapat posisi lowong pada jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.

Overall, the implementation of integrated governance within the IFG Financial Conglomerate has generally been successful, as evidenced by the following:

1. The Board of Directors of the IFG Financial Conglomerate has knowledge of financial conglomerates, including an understanding of the company's core business activities and key risks. The Board has also fulfilled its duties and responsibilities in implementing integrated corporate governance in accordance with the established assessment indicators, including by:
   a. directing, monitoring, and evaluating the implementation of corporate governance;
   b. evaluating and refining the Corporate Governance Guidelines; and
   c. consistently following up on audit recommendations and findings.
2. The Board of Commissioners of the IFG Financial Conglomerate possesses knowledge regarding financial conglomerates, including an understanding of the company's core business activities and key risks. The Board of Commissioners has also fulfilled its duties and responsibilities in implementing integrated corporate governance in accordance with the established assessment indicators, including by:
   a. evaluating the Corporate Governance Guidelines and supervising the implementation of integrated governance;
   b. holding regular Board of Commissioners meetings; and
   c. supervising the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities.
3. All members of the IFG Financial Conglomerate have established an Integrated Compliance Unit and an Integrated Internal Audit Unit that are independent and separate from operational units.
4. All members of the IFG Financial Conglomerate have implemented integrated risk management and have established adequate structures to support the implementation of integrated risk management, as well as policies and procedures for its implementation.
5. The IFG Financial Conglomerate has an Integrated Governance Committee consisting of IFG's Independent Commissioners, Independent Commissioners from IFG Financial Conglomerate members, and independent parties outside the company.

However, there are still several significant weaknesses that require attention in the implementation of integrated governance within the IFG Financial Conglomerate, namely:

1. As of this reporting period, there are still several Corporate Governance Guidelines of IFG Financial Conglomerate members that have not been aligned with the IFG Integrated Corporate Governance Guidelines.
2. At IFG and several members of the IFG Financial Conglomerate, there are still members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are currently undergoing the OJK's fit and proper test.
3. At IFG and several members of the IFG Financial Conglomerate, there are still vacant positions on the Board of Directors and Board of Commissioners.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

Merujuk pada Salinan Surat Keputusan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 77 Tahun 2023 tentang Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan IFG Group di tahun 2025, struktur konglomerasi keuangan IFG ditetapkan berdasarkan hubungan kepemilikan saham dan/atau pengendalian IFG, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas anggota konglomerasi keuangan. Penetapan struktur ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan struktur konglomerasi keuangan IFG:

STRUCTURE OF THE IFG FINANCIAL CONGLOMERATE

Referring to a copy of the Board of Directors' Decree of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 77 of 2023 regarding the IFG Group Financial Conglomerate Charter for the year 2025, the IFG financial conglomerate structure is established based on IFG's share ownership and/or control—whether direct or indirect—over the member entities of the financial conglomerate. This structure is established in accordance with applicable laws and regulations. The following is the structure of the IFG financial conglomerate:



STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

1. Struktur Kepemilikan Saham IFG

SHARE OWNERSHIP STRUCTURE OF THE IFG FINANCIAL CONGLOMERATE

1. Share Ownership Structure of IFG

Pemegang Saham Shareholder	**Persentase Saham** Share Percentage **(%)**
Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengaturan BUMN The Republic of Indonesia, represented by the State-Owned Enterprises Regulatory Agency	0,001%
PT Danantara Asset Management	99,999%
Total	**100%**

2. Struktur Kepemilikan Saham PT Jaminan Kredit Indonesia

2. Share Ownership Structure of PT Jaminan Kredit Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN The Republic of Indonesia, represented by the State-Owned Enterprises Regulatory Agency	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total		**100%**

3. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

3. Share Ownership Structure of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN The Republic of Indonesia, represented by the State-Owned Enterprises Regulatory Agency	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total		**100%**

4. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Kredit Indonesia

4. Share Ownership Structure of PT Asuransi Kredit Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN The Republic of Indonesia, represented by the State-Owned Enterprises Regulatory Agency	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total		**100%**

5. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jasa Indonesia

5. Share Ownership Structure of PT Asuransi Kredit Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	Negara Republik Indonesia cq. Kementerian BUMN The Republic of Indonesia, represented by the State-Owned Enterprises Regulatory Agency	0,01%
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
Total		**100%**

6. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana TCW Investment Management

6. Share Ownership Structure of PT Bahana TCW Investment Management

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	60%
2	TCW Capital Investment Company LLC	40%
Total		**100%**

7. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana Sekuritas

7. Share Ownership Structure of PT Bahana Sekuritas

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,2%
2	Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Employee Cooperative	0,8%
Total		**100%**

8. Struktur Kepemilikan Saham PT Bahana Artha Ventura

8. Share Ownership Structure of PT Bahana Artha Ventura

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	84,7%
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15,1%
3	Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Employee Cooperative	0,2%
Total		**100%**

9. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa IFG

9. Share Ownership Structure of PT Asuransi Jiwa IFG

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	99,99%
2	PT Bahana Kapital Investa	0,01%
Total		**100%**

10. Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

10. Share Ownership Structure of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholder	Persentase Saham Share Percentage (%)
1	PT Asuransi Jiwa IFG	80%
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20%
Total		**100%**

STRUKTUR KEPENGURUSAN KONGLOMERASI KEUANGAN IFG

MANAGEMENT STRUCTURE OF THE (IFG) FINANCIAL CONGLOMERATE

1. Indonesia Financial Group

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fauzi Ichsan ***)	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
2	Sumiyati *****)	Komisaris Commissioner
3	Masyita Crystallin ***)	Komisaris Commissioner
4	Nasrudin *****)	Komisaris Commissioner
5	Wahyu Setyawan ****)	Komisaris Commissioner
6	Hotbonar Sinaga ***)	Komisaris Independen Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hexana Tri Sasongko *****)	Direktur Utama President Director
2	Haru Koesmahargyo *****)	Wakil Direktur Utama Vice President Director
3	Rizal Ariansyah *) *****)	Direktur SDM Director of Human Capital
4	Rianto Ahmadi **) *****)	Direktur Teknik dan selaku Plt. Direktur Bisnis Technical Director concurrently as Acting Director Business
5	Heru Handayanto *****)	Direktur Keuangan Director of Finance

*) Pada tahun 2025 Sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) OJK berdasarkan POJK 13/2022 dan telah disetujui OJK di 2026
**) Sdr. Rianto Ahmadi ditetapkan sebagai Plt. Direktur Bisnis berdasarkan surat Dewan Komisaris nomor 57/DK-BPUI/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Bisnis Indonesia Financial Group.
***) Sdr. Hotbonar Sinaga telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2025. Sdr. Fauzi Ichsan dan Sdr. Maysita Crystallin telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 Desember 2025.
****) Sdr. Wahyu Setyawan telah mengundurkan diri sejak tanggal 8 Juli 2025.
*****) Pada tahun 2025, Sdr. Sumiyati, Sdr. Nasrudin, Sdr. Hexana Trisasongko, Sdr. Haru Koesmahargyo, Sdr. Rizal Ariansyah, dan Sdr. Rianto Ahmadi sedang dalam pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan OJK dalam rangka pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) berdasarkan POJK 30/2024.
*) In 2025, currently undergoing the OJK's fit and proper test in accordance with POJK 13/2022 and approved by the OJK in 2026
**) Mr. Rianto Ahmadi was appointed as Acting Business Director pursuant to Board of Commissioners letter No. 57/DK-BPUI/XII/2024 dated December 31, 2024, regarding the Appointment of the Acting Business Director of Indonesia Financial Group.
***) Mr. Hotbonar Sinaga's term of office ended on October 20, 2025. Mr. Fauzi Ichsan and Ms. Maysita Crystallin's terms of office ended on December 30, 2025.
****) Mr. Wahyu Setyawan resigned effective July 8, 2025.
*****) In 2025, Ms. Sumiyati, Mr. Nasrudin, Mr. Hexana Trisasongko, Mr. Haru Koesmahargyo, Mr. Rizal Ariansyah, and Mr. Rianto Ahmadi were in the process of fulfilling the OJK's fit and proper test requirements in connection with the formation of a Financial Conglomerate Holding Company (PIKK) pursuant to POJK 30/2024.

2. PT Jaminan Kredit Indonesia

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Krisna Wijaya	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent Commissioner
2	Desty Arlaini*)	Komisaris Commissioner
3	Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner
4	Angger P. Yuwono*)	Komisaris Commissioner
5	Hernita Alius*)	Komisaris Independen Independent Commissioner
6	M Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner
7	Dian Milani Hakim***)	Komisaris Independen Independent Commissioner
8	Muh. Aras***)	Komisaris Independen Independent Commissioner
9	Muslim Saleh***)	Komisaris Commissioner

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1 Juli 2025
**) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 12 Desember 2025
***) dalam proses Fit and Proper Test OJK
*) honorably dismissed on July 1, 2025
**) honorably dismissed on December 12, 2025
***) currently undergoing the OJK Fit and Proper Test

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Akhmad Purwakajaya*)	Direktur Utama President Director
2	Henry Panjaitan**)	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business
3	Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network
4	Achmad Ivan Sutrisna Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of Human Resources, General Affairs, and Risk Management
5	Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services
6	Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 24 Maret 2025
**) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 4 Agustus 2025
*) honorably dismissed on March 24, 2025
**) honorably dismissed on August 4, 2025

3. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hendro Sugiatno	Komisaris Utama President Commissioner
2	M Khoerur Roziqin	Komisaris Commissioner
3	Rimawan Pradiptyo*)	Komisaris Independen Independent Commissioner
4	Eko Suwardi	Komisaris Independen Independent Commissioner
5	Iwan Faidi	Komisaris Independen Independent Commissioner

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 18 November 2025
*) honorably dismissed on November 18, 2025

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Rivan Achmad Purwantono*)	Direktur Utama President Director
2	Muhammad Awaluddin**)	Direktur Utama President Director
3	Rubi Handojo	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs
4	Bayu Rafisukmawan	Direktur Keuangan Director of Finance
5	Dewi Aryani Suzana	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations
6	Ariyandi**)	Direktur Operasional Director of Operations
7	Harwan Mulidarmawan	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 7 Mei 2025
**) sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper test*) OJK
*) honorably dismissed on May 7, 2025
**) currently undergoing the OJK's Fit and Proper test

4. PT Asuransi Kredit Indonesia

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Widodo Ekatjahjana*)	Komisaris Utama President Commissioner
2	Encep Sudarwan	Komisaris Commissioner
3	Heru Kreshna Reza	Komisaris Independen Independent Commissioner
4	Renny Octanianus Rorong	Komisaris Independen Independent Commissioner
5	Viviet Savitri Putri	Komisaris Independen Independent Commissioner

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 03 November 2025
*) Term of office ended on November 3, 2025

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Fankar Umran	Direktur Utama President Director
2	Leonardo H. Gavaza	Direktur Keuangan Director of Finance
3	Budhi Novianto	Direktur Bisnis Business Director
4	Vicentius Wilianto*)	Direktur Teknik Technical Director
5	R. Mahelan Prabantarikso	Direktur Kepatuhan, SDM, dan MR Director of Compliance, Human Resources, and Risk Management

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Juli 2025
*) Term of office ended on July 16, 2025

5. PT Asuransi Jasa Indonesia

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Indah Anggoro Putri	Komisaris Commissioner
2	Dwi Pujiastuti Handayani	Komisaris Commissioner
3	M. Aditya Mufti Ariffin	Komisaris Independen Independent Commissioner
4	Amir Tohar	Komisaris Commissioner

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Andy Samuel	Direktur Utama President Director
2	Diwe Novara*)	Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
3	Syah Amondaris*)	Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business
4	Ocke Kurniandy	Direktur Operasional merangkap Direktur Keuangan dan Investasi Director of Operations and concurrently Director of Finance and Investment
5	Dewi Utari	Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Maret 2025
*) Term of office ended on March 13, 2025

6. PT Bahana TCW Investment Management

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hario Soeprobo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
2	Pantro Pander Silitonga*)	Komisaris Commissioner
3	Marc Irwin Stern	Komisaris Commissioner

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Desember 2025
*) Term of office ended on December 22, 2025

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Rukmi Proborini*)	Direktur Utama President Director
2	Doni Firdaus	Direktur Investasi Director of Investments
3	Danica Adhitama	Direktur Pemasaran Director of Marketing
4	Novi Imelda	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Director of Risk Management and Compliance

*) telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Desember 2025
*) Term of office ended on December 22, 2025

7. PT Bahana Sekuritas

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hari Gursida	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner concurrently as Acting President Commissioner
2	Heru Handayanto	Komisaris Commissioner

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Reza Benito Zahar	Direktur Utama President Director
2	Jolanda Veronica Sondak*)	Direktur Capital Market Director of Capital Markets
3	Tulus Nababan	Direktur Investment Banking Director of Investment Banking
4	Suryadi Adipranata	Direktur Operasional Director of Operations

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 11 April 2025
*) honorably dismissed on April 11, 2025

8. PT Bahana Artha Ventura

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hafiz Arief	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Independen Independent Commissioner concurrently as Acting Independent Commissioner
2	Rianto Ahmadi	Komisaris Commissioner

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Agus Wicaksono	Direktur Utama President Director
2	Noersari Handayani	Direktur Pembinaan Usaha Director of Business Development
3	Rukita	Direktur Keuangan dan Operasional Director of Finance and Operations

9. PT Asuransi Jiwa IFG

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Dasuki Amar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Independent Commissioner concurrently as Acting Independent Commissioner
2	Rianto Ahmadi	Komisaris Commissioner
3	Maliki Heru Santosa	Komisaris Commissioner
4	Yasril Rasyid*)	Komisaris Independen Independent Commissioner
5	Akhmad Gojali Harahap	Komisaris Independen Independent Commissioner

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 16 Februari 2025
*) honorably dismissed on February 16, 20

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Budi Tua Arifin Tampubolon	Direktur Utama President Director
2	Eli Wijanti	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management
3	Iskak Hendrawan*)	Direktur Operasional Director of Operations
4	Fabiola Noralita	Direktur Bisnis Individu Director of Individual Business
5	Bugi Riagandhy	Direktur Bisnis Korporasi Director of Corporate Business
6	Ryan Diastana Firman	Direktur Keuangan Director of Finance
7	Mufri Dharmawan	Direktur Investasi Director of Investments

*) mengundurkan diri pada tanggal 31 Juli 2025
*) Resigned on July 31, 2025

10. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Hernando*)	Komisaris Commissioner
2	Bambang Widianto	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	M D Abrory Djabbar	Komisaris Independen Independent Commissioner

*) mengundurkan diri pada tanggal 26 Juni 2025
*) Resigned on June 26, 2025

Direksi
Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Rahmat Syukri*)	Plt. Direktur Utama Acting President Director
2	Marihot H. Tambunan	Direktur Kepatuhan Director of Compliance
3	Jenni Wihartini	Direktur Operasional Director of Operations
4	Tisye Diah Retnojati	Direktur Pemasaran Director of Marketing

*) diberhentikan dengan hormat pada tanggal 30 Juni 2025
*) honorably dismissed on June 30, 2025

PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dengan kesadaran akan pentingnya penerapan GCG secara menyeluruh untuk menjamin kesinambungan usaha, IFG senantiasa menjalankan kegiatan bisnis secara sehat, didukung oleh struktur permodalan yang solid serta penerapan manajemen risiko yang efisien. Dalam pelaksanaannya, IFG secara konsisten menegakkan lima prinsip pokok GCG, yaitu:

11. Keterbukaan (*Transparency*)
    Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai IFG.

12. Akuntabilitas (*Responsibility*)
    Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perseroan dapat terlaksana secara efektif.

13. Pertanggungjawaban (*Responsiblity*)
    Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan IFG terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

14. Kemandirian (*Independency*)
    Kemandirian adalah keadaan IFG yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

15. Kewajaran (*Fairness*)
    Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan lima prinsip utama tersebut, IFG senantiasa berupaya mengoptimalkan penerapan GCG terintegrasi. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada pengembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan, tetapi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham (*shareholders*), pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta manajemen IFG secara menyeluruh.

Penerapan GCG terintegrasi di IFG berfungsi sebagai kerangka untuk mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar sejalan dengan harapan serta nilai-nilai inti (*core values*) yang dianut. Hal ini memastikan seluruh aktivitas operasional bisnis IFG senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, selaras dengan prinsip etika bisnis universal, serta mencerminkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan seluruh pegawai.

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE

Recognizing the importance of comprehensive GCG implementation to ensure business continuity, IFG consistently conducts its business activities in a sound manner, supported by a solid capital structure and efficient risk management practices. In its operations, IFG consistently upholds the five core principles of GCG, namely:

1. Transparency
   Transparency refers to openness in conducting the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information regarding IFG.

2. Accountability
   Accountability refers to the clarity of the functions, operations, and responsibilities of the company's governing bodies so that the company can be managed effectively.

3. Responsibility
   Responsibility is the alignment of IFG's management with applicable laws and regulations and sound corporate principles.

4. Independency
   Independency refers to the state in which IFG is managed professionally, free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is inconsistent with applicable laws and regulations and sound corporate principles.

5. Fairness
   Fairness refers to justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising from agreements and applicable laws and regulations.

Based on these five core principles, IFG continuously strives to optimize the implementation of integrated GCG. These efforts are not only directed toward the development and growth of the Company's business but also aim to protect the interests of shareholders, stakeholders, and IFG management as a whole.

The implementation of integrated GCG at IFG serves as a framework to guide and govern the Company in alignment with its expectations and core values. This ensures that all of IFG's business operations consistently comply with laws and regulations, align with universal business ethics principles, and reflect the values of integrity and professionalism upheld by management and all employees.

Implementasi GCG juga berperan dalam penetapan dan pencapaian tujuan strategis IFG, pengawasan serta evaluasi risiko bisnis, optimalisasi kinerja, dan pengembangan budaya kerja yang sehat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan menjadi elemen penting bagi keberlangsungan Perusahaan.

Penetapan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman penerapan GCG di IFG dan seluruh Anggota *Holding* menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menegakkan etika dan integritas dalam pengelolaan seluruh entitas. Kebijakan ini juga memungkinkan IFG untuk memastikan bahwa Anggota *Holding* menjalankan bisnis secara sehat dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The implementation of GCG also plays a role in setting and achieving IFG's strategic objectives, monitoring and evaluating business risks, optimizing performance, and fostering a healthy work culture. Therefore, an effective and sustainable understanding and implementation of GCG are critical to the Company's sustainability.

The issuance of Board of Commissioners' and Board of Directors' Decree No. 2 of 2023 as a guideline for implementing GCG at IFG and all its Holding Company Members demonstrates the Company's commitment to upholding ethics and integrity in the management of all entities. This policy also enables IFG to ensure that its Holding Company Members conduct business in a sound manner and comply with all applicable laws and regulations.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



07



Program TJSL menetapkan tiga prioritas utama, yaitu bidang Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK sebagaimana tercantum dalam RKA TJSL Tahun 2025.

The TJSL Program has established three main priorities: Education, the Environment, and SME Development, as outlined in the 2025 TJSL Budget Allocation Plan.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Peran IFG sebagai BUMN *Holding* di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi menempatkan Perusahaan pada posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tanggung jawab tersebut diimplementasikan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dirancang untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta penguatan hukum dan tata kelola Perusahaan.

Sejalan dengan mandat regulator, pelaksanaan TJSL IFG mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PER-1/2023"). Regulasi tersebut menegaskan bahwa program TJSL harus dilaksanakan secara terintegrasi, terarah, terukur, dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat optimal bagi Perusahaan sekaligus masyarakat.

Dengan kerangka tersebut, program TJSL IFG difokuskan pada kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan praktik tata kelola yang baik. Implementasi ini sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dan mempertegas peran IFG sebagai agen pembangunan nasional. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan, inisiatif TJSL diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memperkuat reputasi serta kinerja jangka panjang Perusahaan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 ("PER-1/2023") mengatur bahwa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu:

1. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Program PUMK) yang mencakup pembiayaan serta pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
2. Program bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan (Program Non PUMK).

The role of IFG as State-Owned Enterprise holding company in the insurance, guaranty, and investment sectors positions the Company strategically in supporting the sustainable development agenda in Indonesia. This responsibility is implemented through Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program which is designed to create sustaining added-value on economics, social, environment, legal enforcement and corporate governance aspect.

In accordance with the regulator's mandate, the implementation of IFG's TJSL refers to the provisions set by Ministry of State-Owned Enterprise (SOEs) through Minister of SOEs of Regulation number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignment and Corporate Social and Environmental Responsibility ("PER-1/2023"). It emphasizes that the TJSL Program must be implemented in an integrated, targeted, measured, and accountable manner for it to provide optimal benefit for both the Company and the public.

Under this framework, IFG's TJSL Program focuses on delivering tangible contribution on economic and social development, environment preservation, and strengthening of good governance practice. This implementation also supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and emphasizing IFG's role as an agent of national development. Through a comprehensive and sustainable approach, TJSL initiatives is expected to not only deliver positive impact for public and environment, but also enhance the Company's reputation and long-term performance.

The provisions of the Regulation from Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023 ("PER-1/2023") establishes that Corporate Social and Environmental Responsibility is implemented through two main schemes, namely:

1. Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program (PUMK Program) which includes financing and mentorship for Micro and Small Enterprises owners; and
2. Any other aid and/or activity, including coaching (Non-PUMK Program).

Berlandaskan pengaturan tersebut, implementasi Program TJSL baik dalam bentuk Program PUMK maupun Program Non-PUMK dirancang untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan terukur. Dengan demikian, IFG perlu merujuk pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pijakan strategis dalam perencanaan serta pelaksanaan Program TJSL, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Memberikan manfaat bagi Perusahaan dalam pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dengan prinsip terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya, serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta membantu masyarakat sekitar Perusahaan;
4. Mendukung misi strategis inisiatif Perusahaan.

Di samping itu, implementasi Program TJSL juga diarahkan untuk mendukung Akselerasi Asta Cita Pemerintahan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Pemerintah menetapkan 8 (delapan) tujuan strategis yang menjadi fokus pencapaian dalam periode tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Melalui pelaksanaan Program TJSL, IFG dan anggota holding diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan-tujuan mulia Pemerintah sebagaimana dirangkum dalam Asta Cita.

Based on these regulations, the implementation of TJSL Program both in a form of MSE Funding Program and Non-MSE Funding Program designed to generate a sustainable and measurable impact. Therefore, IFG need to refer from the established goals and targets as a strategic foundation in planning in implementing TJSL Program, that outlined as follow:

1. Providing benefits for the Company across economic, social, environment, legal, and corporate governance development;
2. Contributing to corporate value creation based on the principles of integration, focus, measurable impact, and accountability.
3. Fostering micro and small enterprise (MSEs) to become more resilient and independent, while assisting communities surrounding the Company;
4. Supporting the Company's strategic initiatives and missions.

In addition, the implementation of the TJSL Program is also geared toward supporting the acceleration of the "Asta Cita" (Eight Aspirations) of the Red and White Cabinet Government for the 2024–2029 period. The Government has established 8 (eight) strategic goals as the focus of achievement for this period, as follows:

1. Consolidating the Pancasila ideology, democracy, and human rights (HAM);
2. Consolidating the state defense and security system, and promoting national self-reliance through self-sufficiency in food, energy, water, creative economy, green economy, and blue economy;
3. Increasing quality employment opportunities, promoting entrepreneurship, developing creative industries, and continuing infrastructure development;
4. Strengthening the development of human resources, science, technology, education, health, sport achievements, and gender equality, while empowering women, youth, and persons with disabilities;
5. Continuing downstreaming and industrialization to increase domestic value-added;
6. Developing rural areas and grassroots communities to promote equitable economic development and eradicate poverty.
7. Strengthening political, legal, and bureaucratic reforms, while intensifying the prevention and eradication of corruption and drugs; and
8. Strengthening the alignment of harmonious living with the environment, nature, and culture, as well as fostering tolerance among religious communities to achieve a just and prosperous society.

Through the implementation of the TJSL Program, IFG and its holding company members are expected to make a tangible contribution to improving public welfare and promoting sustainable development in line with the Government's noble goals as outlined in the Asta Cita.

PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM TJSL DI PERUSAHAAN

PRINCIPLES AND LEGAL BASIS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE COMPANY

Pelaksanaan Program TJSL di lingkungan Perusahaan mengacu pada prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif TJSL tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga selaras dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta tata kelola yang baik.

Sebagai landasan implementasi, kegiatan TJSL berpedoman pada berbagai regulasi yang mencakup beragam tingkatan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri beserta ketentuan turunannya, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2026 tentang Baku Mutu Air Limbah Dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Pakan Ternak Dan Pakan Akuakultur;
8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan di Bidang Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi Energi;
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
10. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Strategis Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

The implementation of TJSL Program within the Company is guided by the principles of sustainability and compliance with all applicable laws and regulations. This is intended to ensure that every TJSL initiatives are not only provide tangible benefits for communities and the environment, but also aligns with a responsible business practice and good governance.

As the foundation of the implementation, TJSL activities are governed by regulations across various levels, ranging from Laws and Government Regulations to Ministerial Regulations along with their derivative regulations, including the following:

1. Law Number 16 of 2005 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises
2. Law Number 30 of 2007 concerning Energy;
3. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law;
4. Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management;
5. Decree of the Minister of the Environment No. 111 of 2003 on Guidelines Concerning the Requirements and Procedures for Licensing, as well as Guidelines for the Assessment of Wastewater Discharge into Water or Water Sources;
6. Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 5 of 2021 concerning Procedures for Issuing Technical Approvals and Letters of Operational Feasibility in Environmental Pollution Control;
7. Regulation of the Minister of Environment/ Environmental Management Agency No. 2 of 2026 concerning Wastewater Quality Standards and Wastewater Treatment Technology Standards for Businesses and/or Activities Related to Livestock Feed and Aquaculture Feed;
8. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 9 of 2018 concerning the Revocation of Regulations of the Minister of Energy and Mineral Resources Related to Activities in the Field of New and Renewable Energy and Energy Conservation;
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
10. Decree of the Board of Directors of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 51 of 2024 concerning Strategic Guidelines for Social and Environmental Responsibility Programs.

STRUKTUR ORGANISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

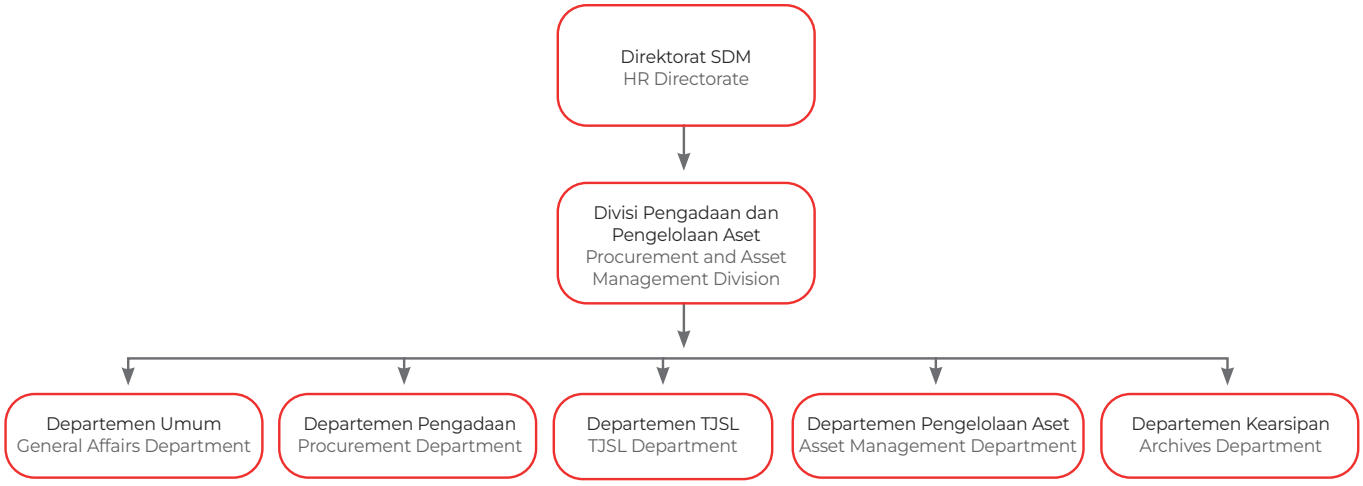
Pengelolaan dan pelaksanaan Program TJSL di lingkungan IFG dilaksanakan oleh Departemen TJSL yang ditetapkan sebagai unit utama yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, serta implementasi seluruh kegiatan TJSL Perusahaan. Penetapan ini memastikan bahwa program dijalankan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan strategis Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Struktur Organisasi, Departemen TJSL berada di bawah Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset serta termasuk dalam lingkup Direktorat SDM.

The management and the implementation of TJSL Program within IFG are carried out by TJSL Department which is designated as the primary unit responsible for the planning, coordination, and Implementation of all the Company's TJSL Activities. This designation ensures that the program is delivered with a targeted, measured, and aligned manner to the Company's strategic policies.

Based on the Board of Directors' Decree of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 15 of 2024 concerning the Organizational Structure Policy, the TJSL Department is under the Procurement and Asset Management Division and forms part of the Human Resource Directorate.

Struktur Organisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan per 31 Desember 2025
Organizational Structure of TJSL Department as of December 31, 2025



LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

THE SCOPE OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



Pelaksanaan tanggung jawab sosial IFG mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/3/2023 yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Program TJSL sekaligus penugasan khusus bagi BUMN. Regulasi tersebut menitikberatkan pada tiga bidang utama, yaitu pendidikan, lingkungan, dan pendanaan PUMK. Ketiga bidang tersebut selaras dengan empat pilar TJSL, yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga mendukung kebijakan Pemerintah dalam pencapaian TPB.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, IFG melakukan pemetaan pemangku kepentingan secara sistematis. Langkah ini dilakukan guna mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan, baik sebagai pihak yang terdampak maupun yang berkontribusi terhadap operasional Perusahaan. Melalui proses tersebut, setiap Program TJSL dapat dirancang dan dijalankan secara tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, pemangku kepentingan dikelompokkan menurut tingkat pengaruh dan dampaknya terhadap Perusahaan maupun lingkungan sekitar. Adapun klasifikasi pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak atas kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The implementation of IFG's TJSL is based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/3/2023 that serves as a guideline of the implementation of the TJSL Program as well as a special assignment for State-Owned Enterprises. The regulation is focused on three main areas, namely education, environment, and MSE (PUMK) funding. These three areas are align with the four pillar of TJSL, namely the social, environment, economic, and legal and governance. Therefore, its implementations are not only delivering tangible benefits for communities, but also supports the Government's policy in achieving SDGs.

To ensure the effectiveness of the program's implementation, IFG conducts systematic stakeholder mapping. This step is taken to identify parties that have a relevance, either as the impacted party or as contributors to the Company's operational. Through this process, every TJSL Program are able to be designed and executed in a targeted manner, delivering optimal benefits.

Based on the results of this identification, the stakeholders are categorized according to their level of influence and the impact it has on the Company or surrounding environment. The classification of stakeholders who influence or are affected by the Company's activities is as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholder	**Bentuk Pelibatan** Forms of Engagement	**Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan** Influence/impact from Company's Activity
Pemegang Saham Shareholder	· RUPS · Laporan Kinerja · General Meeting of Shareholders (GMS) · Performance Report	Peningkatan kinerja dan peningkatan nilai Perusahaan serta dukungan pada kepentingan pemegang saham Improving the Company's performance and value, as well as supporting shareholders' interests.
Karyawan Employees	· Perjanjian Kerja Bersama · Pendidikan dan Pelatihan · Collective Labor Agreement · Development and Training	· Terjaminnya kesejahteraan karyawan beserta keluarganya · Suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman · Jenjang karier dan penilaian kinerja yang adil dan transparan · Pemenuhan hak-hak karyawan · Meningkatkan efektivitas hubungan manajemen dan karyawan · Guaranteed welfare for employees and their families · A conducive, healthy, and safe working environment. · Fair and transparent career path and performance evaluation · Fulfillment of employee rights · Enhancing the effectiveness of management-employee relations
Pemerintah Government	· Kepatuhan terhadap Peraturan · Kesehatan Perusahaan · Compliance with Regulations · Corporate Health	Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan TJSL) The Company's economic contribution to The Government (Taxes and community economic improvements activity through TJSL initiatives)
Masyarakat Communities	Kegiatan TJSL TJSL Activity	· Meningkatkan perekonomian masyarakat seiring dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik fisik maupun nonfisik · Improving the community's economy along with sustainable community empowerment through the development of community welfare, both physical and non-physical.
Konsumen/Pelanggan Consumer/Customer	· Survei Kepuasan Pelanggan · Program *Engagement* Lainnya · Customer Satisfaction Survey · Other Engagement Program	Peningkatan fasilitas atas produk-produk Perusahaan yang dapat memberikan kenyamanan dan kualitas hidup lebih baik Enhancing the features of the Company's products to provide better comfort and quality of life.
Rekanan Partners	· Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama · Proses Operasional · Contracts and Cooperation Agreements · Operational Procedures	· Proses pengadaan yang adil dan transparan · Proses evaluasi yang objektif · Hubungan yang harmonis · Fair and transparent procurement process · Objective performance evaluations · Mutually Beneficial Relationship
Media Massa Mass Media	Siaran Pers/Keterbukaan Informasi Press Broadcast/Information Transparency	Memperoleh akses informasi yang akurat dan terkini Access to accurate and up-to-date information

REALISASI DANA DAN KEGIATAN TJSL 2025
FUND REALIZATION AND TJSL ACTIVITY OF 2025

REALISASI PENYALURAN PROGRAM TJSL TAHUN 2025

Sampai dengan akhir Desember 2025, Perusahaan telah merealisasikan penyaluran dana Program TJSL sebesar Rp38,46 miliar. Nilai tersebut mencapai 96,54% dari RKA Tahunan serta menunjukkan peningkatan sebesar 216,38% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program TJSL secara terencana dan tepat sasaran. Adapun rincian penyaluran dana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program TJSL Non-PUMK yang dijalankan oleh unit pelibatan dan pengembangan masyarakat/CID sebesar Rp14,01 miliar.
2. Program TJSL Non-PUMK yang dijalankan di luar unit pelibatan dan pengembangan masyarakat/Non CID sebesar Rp1,45 miliar.
3. Program TJSL PUMK sebesar Rp23,00 miliar yang disalurkan melalui kerja sama Program PUMK dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

FUND REALIZATION FOR THE 2025 TJSL PROGRAM DISBURSEMENT

As of the end of December 2025, the Company has disbursed TJSL Program amounting to IDR 38.46 billion. This figure reached 96,54% the value of Annual Work Plan and Budget and showed an increase in the amount of 216,38% compared to last year's realization. This achievement reflects the Company's commitment to optimize the implementation of TJSL Program in a planned and targeted manner. The details of the fund disbursement are as follows:

1. Non-MSE Funding TJSL Programs implemented by the community involvement and development (CID) unit amounted to IDR 14.01 billion.
2. Non-MSE Funding TJSL Programs implemented outside the community involvement and development unit (Non-CID) amounted to IDR 1.45 billion.
3. MSE Funding TJSL Programs amounted to IDR 23.00 billion, channeled through a cooperation program for MSEs with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel Realisasi Anggaran TJSL BUMN Tahun 2025
Table of 2025 SOE TJSL Budget Realization

Program	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan & Budget (IDR)	Real Tahun 2024 (Rp) 2024 Realization (IDR)	Real Tahun 2025 (Rp) 2025 Realization (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4:2)	(6)=(4:3)
TJSL CID Non-PUMK Non-MSE TJSL (CID) Program	15.500.000.000	14.328.559.554	14.008.443.590	90,38	97,77
TJSL Non-CID TJSL (Non-CID) Program	1.340.000.000	2.995.861.424	1.452.590.502	108,40	48,49
TJSL PUMK MSE TJSL (CID) Program	23.000.000.000	450.000.000	23.000.000.000	100,00	5111,11
Total Realisasi TJSL Total Realization TJSL	39.840.000.000	17.774.420.978	38.461.034.092	96,54	216,38

Realisasi Program TJSL BUMN Menurut Pilar Utama TJSL

Pencapaian Program TJSL BUMN tahun 2025 berdasarkan pilar utama TJSL adalah sebagai berikut:
1. Pilar sosial sebesar Rp8,32 miliar;
2. Pilar ekonomi sebesar Rp24,69 miliar;
3. Pilar lingkungan sebesar Rp4,31 miliar; dan
4. Pilar hukum dan tata kelola Rp1,14 miliar.

Penyaluran TJSL berdasarkan pilar utama TJSL dan TPB telah mencapai hasil sebagai berikut:

Realization of SOE TJSL Program According to the Main Pillars of TJSL

The achievements of the 2025 SOE TJSL Program based on the main pillars of TJSL are as follows:
1. Social pillar IDR 8,32 billion;
2. Economic pillar IDR 24,69 billion;
3. Environmental pillar IDR 4,31 billion; and
4. Law and governance pillar IDR 1,14 billion.

The distribution of TJSL based on the main pillars of TJSL and SDGs has achieved the following results:

Tabel Realisasi Anggaran TJSL BUMN Tahun 2025 (CID dan Non CID)
Table of Realization of SOE TJSL Budget in 2025 (CID and Non-CID)

No TPB	TPB SDGs	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Tahun 2025 (Rp) In 2025 (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
A	**PILAR SOSIAL** SOCIAL PILLAR	**8.005.000.000**	**8.316.795.353**	**103,90**
1	Tanpa Kemiskinan No Poverty	**2.000.000.000**	**2.043.630.558**	102,18
2	Tanpa Kelaparan Zero Hunger	**500.000.000**	**400.971.800**	80,19
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera Good Health and Well-Being	**800.000.000**	**1.249.535.415**	156,19
4	Pendidikan Berkualitas Quality Education	**4.705.000.000**	**4.622.657.580**	98,25
B	**PILAR EKONOMI** ECONOMIC PILLAR	**25.600.000.000**	**24.693.640.281**	**96,46**
8	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Decent Work & Economic Growth	**25.600.000.000**	**24.693.640.281**	96,46
C	**PILAR LINGKUNGAN** ENVIRONMENTAL PILLAR	**4.100.000.000**	**4.312.831.486**	**105,19**
6	Air bersih dan Sanitasi Layak Clean Water and Sanitation	**550.000.000**	**404.146.760**	73,48
11	Kota & Pemukiman yang berkelanjutan Sustainable Cities & Communities	**2.250.000.000**	**2.642.223.338**	117,43
15	Ekosistem Daratan Life on Land	**1.300.000.000**	**1.266.461.388**	97,42
D	**PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA** LAW AND GOVERNANCE PILLAR	**2.135.000.000**	**1.137.766.972**	**53,29**
16	Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Peace, Justice & Strong Institutions	**2.135.000.000**	**1.137.766.972**	53,29
Total		**39.840.000.000**	**38.461.034.092**	**96,54**

Berdasarkan empat pilar utama TJSL, realisasi tertinggi pada Tahun 2025 tercatat pada pilar ekonomi sebesar Rp24,69 miliar atau 96,46% dari RKA, serta pilar sosial Rp8,32 miliar atau 103,90% dari RKA 2025. Capaian tersebut menunjukkan fokus Perusahaan dalam memperkuat dampak sosial dan keberlanjutan lingkungan melalui program-program yang terarah.

Selain itu, realisasi Program TJSL juga diklasifikasikan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dari klasifikasi tersebut, kontribusi terbesar terdapat pada:

1. TPB 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi sebesar Rp24,69 miliar pada pilar ekonomi;
2. TPB 4 Pendidikan Berkualitas sebesar Rp4,62 miliar pada pilar sosial; dan
3. TPB 11 Kota & Pemukiman Berkelanjutan sebesar Rp2,64 miliar pada pilar lingkungan.

Sementara itu, realisasi pencapaian program TJSL hingga Desember 2025 khusus untuk anggaran CID yang dilaksanakan oleh unit TJSL adalah sebesar Rp37,01 miliar atau 96,13% dibandingkan RKA 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Based on the four main pillars of TJSL, the highest realization in 2025 was recorded in the economic pillar at IDR 24,69 billion or 96,46% of the Work Plan and Budget, and the social pillar at IDR 8,32 billion or 103,90% of the 2025 Work Plan and Budget. This achievement demonstrates the Company's focus on strengthening social impact and environmental sustainability through targeted programs.

In addition, the realization of the TJSL Program is also classified based on the Sustainable Development Goals (SDGs). Within this classification, the largest contributions are found in:

1. SDG 8: Decent Work & Economic Growth, amounting to IDR 24,69 billion under the economic pillar;
2. SDG 4: Quality Education, amounting to IDR 4,62 billion under the social pillar; and
3. SDG 11: Sustainable Cities & Communities, amounting to IDR 2,64 billion under the environmental pillar.

Meanwhile, the details of the realization of the TJSL program achievements until December 2025, specifically for the CID budget implemented by the TJSL unit, amounted to IDR 37,01 billion or 96,13% compared to the 2025 Work Plan and Budget, with the details as follows:

Tabel Realisasi Anggaran TJSL BUMN Tahun 2025 (CID Only)
Table of Realization of SOE TJSL Budget in 2025 (CID Only)

No TPB	**TPB** SDGs	**RKA 2025 (Rp)** 2025 Work Plan and Budget (IDR)	**Tahun 2025 (Rp)** In 2025 (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(4:3)**
A	**PILAR SOSIAL** SOCIAL PILLAR	**7.300.000.000**	**6.974.204.851**	**95,54**
1	Tanpa Kemiskinan No Poverty	**2.000.000.000**	**1.816.630.558**	90,83
2	Tanpa Kelaparan Zero Hunger	**500.000.000**	**400.971.800**	80,19
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera Good Health and Well-Being	**800.000.000**	**793.497.638**	99,19
4	Pendidikan Berkualitas Quality Education	**4.000.000.000**	**3.963.104.855**	99,08
B	**PILAR EKONOMI** ECONOMIC PILLAR	**25.600.000.000**	**24.693.640.281**	**96,46**
8	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Decent Work & Economic Growth	**25.600.000.000**	**24.693.640.281**	96,46
C	**PILAR LINGKUNGAN** ENVIRONMENTAL PILLAR	**4.100.000.000**	**4.312.831.486**	**105,19**
6	Air bersih dan Sanitasi Layak Clean Water and Sanitation	**550.000.000**	**404.146.760**	73,48
11	Kota & Pemukiman yang berkelanjutan Sustainable Cities & Communities	**2.250.000.000**	**2.642.223.338**	117,43

Tabel Realisasi Anggaran TJSL BUMN Tahun 2025 (CID Only)
Table of Realization of SOE TJSL Budget in 2025 (CID Only)

No TPB	TPB SDGs	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Tahun 2025 (Rp) In 2025 (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
15	Ekosistem Daratan Life on Land	1.300.000.000	1.266.461.388	97,42
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA LAW AND GOVERNANCE PILLAR	1.500.000.000	1.027.766.972	68,52
16	Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Peace, Justice & Strong Institutions	1.500.000.000	1.027.766.972	68,52
Total		38.500.000.000	37.008.443.590	96,13

Selain melalui unit TJSL, IFG juga melaksanakan berbagai program sosial kemasyarakatan yang dikelola di luar unit tersebut dan dikenal sebagai Program Non-CID. Inisiatif ini melengkapi pelaksanaan TJSL utama, sekaligus memperluas jangkauan kontribusi sosial Perusahaan kepada masyarakat.

Hingga Desember 2025, total realisasi dana untuk TJSL Non-CID mencapai Rp1,45 miliar atau sebesar 108,40% dari RKA Tahun 2025. Rincian penggunaan dana tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi TPB serta pilar utama TJSL sebagai berikut:

In addition to its TJSL unit, IFG also implements various community social programs managed outside the unit, known as Non-CID Programs. These initiatives complement the core TJSL implementation and expand the reach of the Company's social contributions to the community.

As of December 2025, total realization of funds for TJSL Non-CID reached IDR 1,45 billion, or 108,4 % of the 2025 Work Plan and Budget. Details of the use of these funds are presented based on the SDG classification and the main TJSL pillars as follows:

Tabel Realisasi Anggaran TJSL BUMN Tahun 2025 (Non CID Only)
Table of Realization of SOE TJSL Budget in 2025 (Non CID Only)

No TPB	TPB SDGs	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Tahun 2025 (Rp) In 2025 (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
A	PILAR SOSIAL SOCIAL PILLAR	705.000.000	1.342.590.502	190,44
1	Tanpa Kemiskinan No Poverty	-	227.000.000	-
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera Good Health and Well-Being	-	456.037.777	-
4	Pendidikan Berkualitas Quality Education	705.000.000	659.552.725	93,55
B	PILAR EKONOMI ECONOMIC PILLAR	-	-	-
C	PILAR LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PILLAR	-	-	-
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA LAW AND GOVERNANCE PILLAR	635.000.000	110.000.000	17,32
16	Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Peace, Justice & Strong Institutions	635.000.000	110.000.000	17,32
Total		1.340.000.000	1.452.590.502	108,40

PROGRAM UNGGULAN
FLAGSHIP PROGRAM



Mengacu pada RKA TJSL Tahun 2025 serta Aspirasi Pemegang Saham, IFG menyusun sejumlah inisiatif strategis dalam pelaksanaan TJSL Non-PUMK. Penyusunan program tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan antara rencana kerja, arah kebijakan Pemegang Saham, dan kebutuhan masyarakat.

Program-program tersebut dijalankan oleh unit TJSL/CID dengan menitikberatkan pada program prioritas serta penerapan konsep *Creating Shared Value* (CSV). Melalui pelaksanaan ini, Perusahaan berupaya menghadirkan nilai tambah yang tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis secara berimbang.

Referring to the 2025 TJSL Work Plan and Budget and Shareholder Aspirations, IFG has developed several strategic initiatives for the implementation of TJSL Non-MSEs. These programs are designed to ensure alignment between the work plan, Shareholder policy direction, and community needs.

These programs are implemented by the TJSL/CID unit, emphasizing priority programs and the application of the Creating Shared Value (CSV) concept. Through these initiatives, the Company strives to deliver added value that not only impacts the community but also supports sustainable and balanced business growth.

PROGRAM PRIORITAS

Program TJSL menetapkan tiga prioritas utama, yaitu bidang Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK sebagaimana tercantum dalam RKA TJSL Tahun 2025. Realisasi Program TJSL sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai Rp9,97 miliar atau sebesar 92,74% dari RKA Tahun 2025. Adapun rincian setiap program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas di Bidang Pendidikan
   Realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp3,96 miliar melalui Program Literasi Asuransi dan Keuangan dan/atau Beasiswa, Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Program Pengembangan Pemuda, Budaya dan Olahraga.

PRIORITY PROGRAMS

The TJSL program has three main priorities, namely the sectors of Education, Environment, and MSE Development which are stated in the 2025 Work Plan and Budget for TJSL Program. The realization of the TJSL Program until the end of 2025 reached IDR 9,97 billion or 92,74% of the 2025 Work Plan and Budget. The details of each priority program are as follows:

1. Priority Program in Education
   The 2025 budget realization reached IDR 3,96 billion through the Insurance and Financial Literacy Program and/or Scholarships, Educational Facilities and Infrastructure Assistance, and the Youth, Culture, and Sports Development Program.

Tabel Program Prioritas Pendidikan Tahun 2025
Table of Priority Programs for Education in 2025

No.	Program Program	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Real Tahun 2025 (Rp) 2025 Realization (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6)
1	Literasi Asuransi dan Keuangan Kepada Masyarakat Insurance and Financial Literacy for the Public	**1.000.000.000**	**869.347.289**	86,93	Program literasi keuangan kepada 1.198 orang termasuk mahasiswa, guru dan masyarakat umum A financial literacy program for 1,198 people, including college students, teachers, and the general public
2	Program Bantuan Tunjangan Pendidikan dan/atau Beasiswa Educational Assistance Program and/or Scholarships	**1.300.000.000**	**1.277.734.640**	98,29	Bantuan berupa dana Pendidikan dan bantuan beasiswa kepada masyarakat, antara lain: 143 orang penerima beasiswa dan tunjangan pendidikan Assistance in the form of educational funding and scholarships for the community, including: 143 scholarship recipients and educational grant recipients
3	Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Educational Facilities and Infrastructure Assistance Program	**1.500.000.000**	**1.619.924.526**	107,99	Bantuan kepada institusi-institusi pendidikan berupa sarana dan prasarana belajar dan mengajar, di antaranya: • Bantuan Renovasi Gedung (3 Sekolah) • Bantuan Pembangunan Ruang atau Fasilitas Belajar dan/atau taman baca (3 fasilitas) • Bantuan alat pendukung kegiatan belajar mengajar sebanyak 1000 unit Assistance to educational institutions in the form of learning and teaching facilities and infrastructure, including: • Building Renovation Assistance (3 Schools) • Assistance for the Construction of Learning Spaces or Facilities and/or reading corners (3 facilities) • Assistance in the form of 1,000 units of equipment to support teaching and learning activities
4	Program Pengembangan Pemuda, Budaya dan Olahraga Youth, Culture, and Sports Development Program	**200.000.000**	**196.098.400**	98,05	Kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan pemuda, budaya dan olahraga, kepada 30 anak/pemuda (*Youth Clinic*) Activities supporting youth development, culture, and sports for 30 children/youth (Youth Clinic)
Total Prioritas Pendidikan Total Priority Program In Education		**4.000.000.000**	**3.963.104.855**	**99,08**	

2. Program Prioritas di Bidang Lingkungan
Realisasi anggaran di tahun 2025 mencapai Rp4,31 miliar melalui program IFGreen (Konservasi alam dan Kampanye Lingkungan), Program Pengelolaan Sampah (termasuk Program Kolaborasi Likupang), Revitalisasi Prasarana dan Sarana Umum di wilayah pemukiman dan perkotaan dan Program Sarana Air Bersih.

2. Priority Programs in the Environmental Sector Budget realization in 2025 reached IDR 4,31 billion through the IFGreen (Nature Conservation and Environmental Campaign) program, the Waste Management Program (including the Likupang Collaboration Program), the Revitalization of Public Infrastructure and Facilities in residential and urban areas, and the Clean Water Facilities Program.

Tabel Program Prioritas Lingkungan Tahun 2025
Table of Environmental Priority Program in 2025

No	Program Program	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Real Tahun 2025 (Rp) 2025 Realization (IDR)	Capaian Achievement	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6)
1	IFGreen (Konservasi alam dan Kampanye Lingkungan) IFGreen (Nature Conservation and Environmental Campaign)	850.000.000	1.032.907.158	121,52	Program penanaman pohon di beberapa wilayah di Indonesia, berupa: • Penanaman Mangrove (1.500 pohon) • Penanaman Pohon Non-Mangrove (3.000 pohon) Tree planting initiatives in several regions across Indonesia, comprising: • 1,500 mangrove trees planted • 3,000 non-mangrove trees planted
2	Program Pengelolaan Sampah Waste Management Program	750.000.000	382.540.498	51,01	• Program Pembuatan *Paving Block* dari Sampah Plastik di Bogor • Sampah Organik terolah sebanyak 330.750 kg/bulan, Sampah Layak Daur Ulang terolah sebanyak 198.450 kg/bulan, dengan Sampah Residu sebanyak 120.300 kg/bulan • A plastic waste-to-paving block production program in Bogor • 330,750 kg of organic waste processed per month, 198,450 kg of recyclable waste processed per month, and 120,300 kg of residual waste generated per month
3	Revitalisasi Prasarana dan Sarana Umum di wilayah pemukiman dan perkotaan Revitalization of Public Infrastructure and Facilities in Residential and Urban Areas	2.000.000.000	2.473.747.071	123,69	• Renovasi 7 pra-sarana ibadah dan bantuan 21 unit sarana ibadah • Pemberangkatan 2.000 pemudik melalui program mudik bersama IFG • Perbaikan 2 jalan desa • Renovation of seven worship facilities and assistance for 21 worship facilities • Transportation for 2,000 homebound travelers through the IFG Mudik Bersama (Joint Homecoming) Program • Rehabilitation of two village roads
4	Program Sarana Air Bersih dan Energi Bersih Clean Water and Clean Energy Facilities Program	400.000.000	423.636.760	105,91	Program Kolaborasi TJSL bantuan 1 unit sarana air bersih di Batam A collaborative TJSL Program providing one clean water facility in Batam
Total Prioritas Lingkungan Total Priority Program in Environment		4.000.000.000	4.312.831.487	107,82	

3. Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK
Realisasi anggaran mencapai Rp1,69 miliar melalui Pelatihan/Pendidikan Kewirausahaan, Bantuan peralatan dan infrastruktur usaha/produksi UMKM, Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM khususnya Disabilitas dan Wanita.

3. Priority Programs in the MSE Development Sector
Budget realization reached IDR 1.69 billion through Entrepreneurship Training/Education, assistance with equipment and infrastructure for MSME businesses/production, and empowerment and guidance of MSMEs, particularly those with disabilities and women.

Tabel Program Prioritas Pengembangan UMK Tahun 2025
Table of MSE Development Priority Programs in 2025

No	Program Program	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Real Tahun 2025 (Rp) 2025 Realization (IDR)	Capaian Achievement	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6)
1	Pelatihan/Pendidikan Kewirausahaan Entrepreneurship Training/ Education	750.000.000	391.021.179	52,14	Peningkatan kapasitas kepada 305 UMKM Capacity-building programs for 305 MSMEs
2	Bantuan peralatan dan infrastruktur usaha/produksi UMKM Assistance with equipment and infrastructure for MSME businesses/production	1.000.000.000	650.844.550	65,08	Bantuan 1 rumah produksi keripik sawi di sumberejo, 1 rumah budidaya jamur, 5 kolam budidaya ikan, dan renovasi 1 *workshop* Labuan Bajo bisa Bantuan 35 unit sarana produksi Assistance for one mustard greens chip production house in Sumberejo, one mushroom cultivation facility, five fish farming ponds, and the renovation of one workshop in Labuan Bajo Provision of 35 production facilities
3	Pemberdayaan UMKM khususnya Disabilitas dan Wanita Empowerment and guidance of MSMEs, particularly those with disabilities and women.	1.000.000.000	651.774.552	65,18	• Notifikasi kepada 462 UMK binaan alihan Jiwasraya • Pembinaan terhadap 48 UMKM disabilitas, perempuan, dan umum • Notifications sent to 462 Fostered MSEs transferred from the former Jiwasraya fostered MSEs. • Capacity-building for 48 MSMEs run by people with disabilities, women, and the general public
Total Prioritas Pengembangan UMK Total MSE Development Priority Program		2.750.000.000	1.693.640.281	61,59	

PROGRAM CSV

Dalam rangka memperkuat kontribusi terhadap bisnis inti, IFG menetapkan 4 (empat) Program TJSL yang mengusung prinsip CSV bagi perusahaan dan merupakan program yang berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat timbal balik bagi Perusahaan dan masyarakat secara simultan. Program tersebut meliputi *IFG Goes to Campus*, *Korporatisasi UMKM*, *Kindness to Progress, dan Program Mudik Bersama IFG Group 2025*.

Untuk mendukung implementasi ketiga program tersebut, IFG menetapkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,00 miliar, dengan realisasi sebesar Rp3,96 miliar atau 99,08% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Adapun rincian program CSV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

CSV PROGRAM

To strengthen its contribution to its core business, IFG has established four sustainable TJSL programs, embracing the principles of Corporate Social Responsibility (CSV). These programs are designed to simultaneously provide mutual benefits for the company and the community. These programs include IFG Goes to Campus, MSME Corporatization, Kindness to Progress, and the IFG Group's Mudik Bersama (Joint Homecoming) Program in 2025.

To support the implementation of these three programs, IFG has allocated a 2025 budget of IDR 4,00 billion, with realization reaching IDR 3.96 billion, or 99,08% of the total allocated budget. The details of the 2025 CSV program are as follows:

Tabel Program *Creating Shared Value* Tahun 2025
Table of Creating Shared Value Program in 2025

No.	Nama Program Name of Program	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Tahun 2025 (Rp) In 2025 (IDR)	Capaian (%) Achievement	*Output* dan *Outcome* Output and Outcome
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)	(6)
1	IFG Goes To Campus	**700.000.000**	**634.439.639**	90,63	***Output***: IGTC 2025 bertema *Sustainable Finance* kepada 1.198 orang mahasiswa, guru dan masyarakat melalui tahapan kegiatan literasi sbb: · *Bootcamp* (Binus dan IPB) 124 orang · *Studium Generale* (IPB) 214 orang · *Financial Journey* (Binus dan IPB) 486 orang · *Finplay Summit* (Binus) 334 orang ***Outcome*:** · Evaluasi dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi keuangan peserta *bootcamp* dengan skor literasi keuangan mahasiswa BINUS meningkat rata-rata +33% dengan *effect size* sangat kuat (r = 0,89), sementara peserta IPB meningkat +44% dengan *effect size* (r = 0,992). · Selain peningkatan pengetahuan, analisis kualitatif menunjukkan perubahan perilaku awal, seperti mahasiswa mulai melakukan pencatatan keuangan, menyusun anggaran, menyiapkan dana darurat, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya proteksi dan investasi pada diri sendiri. · Penguatan *corporate branding*, penciptaan *talent pipeline* berkelanjutan, peningkatan reputasi dan kepercayaan publik, serta penguatan implementasi ESG perusahaan **Output:** IGTC 2025, themed "Sustainable Finance," reached 1,198 students, teachers, and members of the public through the following financial literacy activities: · Bootcamp (Binus and IPB): 124 participants · Studium Generale (IPB): 214 participants · Financial Journey (Binus and IPB): 486 participants · Finplay Summit (Binus): 334 participants **Outcome:** · A significant impact was observed on improving the financial literacy of bootcamp participants, with BINUS students' financial literacy scores increasing by an average of +33% with a very strong effect size (r = 0.89), while IPB participants' scores increased by +44% with an effect size of (r = 0.992). · In addition to increased knowledge, qualitative analysis revealed early behavioral changes, such as students beginning to track their finances, create budgets, set up emergency funds, and become more aware of the importance of self-protection and investment. · Strengthening corporate branding, creating a sustainable talent pipeline, enhancing reputation and public trust, and reinforcing the company's ESG implementation

Tabel Program *Creating Shared Value* Tahun 2025
Table of Creating Shared Value Program in 2025

No.	Nama Program Name of Program	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Tahun 2025 (Rp) In 2025 (IDR)	Capaian (%) Achievement	*Output* dan *Outcome* Output and Outcome
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)	(6)
2	Program Kindness To Progress Kindness To Progress Program	400.000.000	467.006.023	116,75	***Output*:** **Ngabab (Malang) 4 *social project*:** • GEMA NGABAB (Gerakan Meningkatkan Agrikultur, *Branding*, dan Bisnis Ngabab) • BANGKIT (Batik Ngabab Kreatif & Inovatif) • BERLIAN (Belajar Bijak Lindungi Anak dari Paparan Digital) • MEKAR DI NGABAB (Melek Literasi dan Edukasi *Parenting* di Desa Ngabab) • 85 penerima manfaat langsung dan 9.000 penerima manfaat tidak langsung • Kersamenak (Garut) *Inclusivity Batch*: • Permainan Edukatif dan Motorik & Penyuluhan PHBS • *Workshop Awareness Disability* • Penyuluhan *Stunting* dan Literasi Keuangan • Edukasi *Anti-Bullying* untuk Siswa SDN 1 Kersamenak 250 penerima manfaat. ***Outcome*:** • Membangun desa yang memiliki sebaran UMKM nasabah KUR dengan klaim tinggi, yang berpotensi pemberdayaan • Memberikan dukungan terhadap sektor lainnya demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa umumnya dan bisnis UMKM nasabah KUR secara khusus. • SROI: 2,18 • (Evaluasi 1 thn terhadap KtP di Lembang 2024) • Bagi masyarakat Desa Lembang, kegiatan seperti pemasangan penerangan jalan meningkatkan rasa aman, memperpanjang waktu produktivitas warga, serta memperkuat interaksi sosial antarwarga. • Bagi IFG, program ini menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai AKHLAK dan pengembangan *soft skills* insan IFG Group melalui pendekatan *experiential learning* yang menumbuhkan empati sosial dan semangat kolaborasi. **Output:** **Ngabab (Malang) 4 social projects:** • GEMA NGABAB (Movement to Improve Agriculture, Branding, and Business in Ngabab) • BANGKIT (Creative & Innovative Ngabab Batik) • BERLIAN (Learning to Wisely Protect Children from Digital Exposure) • MEKAR DI NGABAB (Literacy and Parenting Education in Ngabab Village) • 85 direct beneficiaries and 9,000 indirect beneficiaries • Kersamenak (Garut) Inclusivity Batch: • Educational and Motor Skills Games & Health and Hygiene Education • Disability Awareness Workshop • Stunting Prevention and Financial Literacy Workshops • Anti-Bullying Education for Students at SDN 1 Kersamenak (250 beneficiaries). **Outcome:** • Building a village with a high concentration of KUR-borrowing MSMEs with strong repayment records, which holds potential for empowerment • Providing support to other sectors to improve the quality of life for the village community in general and for KUR-borrowing MSMEs in particular. • SROI: 2.18 • (1-year evaluation of the KtP program in Lembang, 2024) • For the residents of Lembang Village, activities such as the installation of street lighting increase a sense of security, extend residents' productive hours, and strengthen social interactions among residents. • For IFG, this program serves as a vehicle for learning the AKHLAK values and developing the soft skills of IFG Group employees through an experiential learning approach that fosters social empathy and a spirit of collaboration.

Tabel Program *Creating Shared Value* Tahun 2025
Table of Creating Shared Value Program in 2025

No.	Nama Program Name of Program	RKA 2025 (Rp) 2025 Work Plan and Budget (IDR)	Tahun 2025 (Rp) In 2025 (IDR)	Capaian (%) Achievement	*Output* dan *Outcome* Output and Outcome
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)	(6)
3	Program Korporatisasi UMKM MSME Corporatization Program	1.400.000.000	1.362.495.549	97,32	***Output*:** · Program peningkatan kapasitas UMKM agar bisa tangguh dan mandiri kepada 215 UMKM. ***Outcome*:** · peningkatan kapasitas usaha, perbaikan tata kelola, kemampuan mengelola risiko usaha, serta kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan dan peluang pasar secara berkelanjutan. **Output:** · A capacity-building program for 215 MSMEs to help them become resilient and self-reliant. **Outcome:** · Enhanced business capacity, improved governance, improved ability to manage business risks, and increased readiness of MSMEs to access financing and market opportunities on a sustainable basis.
4	Mudik Bersama IFG Group 2025 Joint Homecoming program by IFG Group in 2025	1.500.000.000	1.499.248.534	99,95	***Output*:** Pelaksanaan program mudik bersama IFG dan 10 anak perusahaan di tahun 2025, menuju belasan kota di pulau Jawa dan Sumatera. Fasilitas yang diberikan IFG kepada 2000 orang pemudik: · Bus eksekutif termasuk bus disabilitas · Asuransi kecelakaan dari anak usaha IFG · Konsumsi, Obat-obatan · Edukasi tentang keselamatan dan pentingnya perlindungan asuransi ***Outcome*:** · Penurunan total kecelakaan dan fatalitas selama periode mudik lebaran tahun 2025 (30-32%) sesuai data nasional, pengenalan dan *experience One by* IFG dan produk asuransi PA anak usaha iFG kepada pemudik · Penguatan *corporate branding*, peningkatan reputasi dan kepercayaan publik, serta penguatan implementasi ESG perusahaan **Output:** Implementation of the Mudik Bersama (joint homecoming program) by IFG and its 10 subsidiaries in 2025, serving dozens of cities on the islands of Java and Sumatra. Facilities provided by IFG to 2,000 people: · Executive-class buses, including buses accessible to people with disabilities · Accident insurance from an IFG subsidiary · Food and beverages, medications · Education on safety and the importance of insurance coverage **Outcome:** · A reduction in the total number of traffic accidents and fatalities during the 2025 Eid homecoming period (30–32%), based on national data, as well as increased awareness of and engagement with One by IFG and the personal accident insurance products offered by IFG's subsidiaries among travellers. · Strengthening corporate branding, enhancing reputation and public trust, and reinforcing the company's ESG implementation
Total		**4.000.000.000**	**3.963.189.745**	**99,08**	

PROGRAM KOLABORASI TJSL

Terdapat 13 (tiga belas) Program TJSL Kolaborasi BUMN yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2025. Pelaksanaan program tersebut merupakan wujud sinergi antar-BUMN dalam memperluas dampak sosial serta meningkatkan efektivitas penyaluran manfaat kepada masyarakat. Rincian Program TJSL Kolaborasi BUMN dimaksud adalah sebagai berikut:

COLLABORATIVE TJSL PROGRAM

There are 13 (thirteen) Collaborative SOE TJSL Programs that have been implemented through December 31, 2025. The implementation of these programs reflects the synergy among SOEs in expanding their social impact and enhancing the effectiveness of delivering benefits to the community. The details of these Collaborative SOE TJSL Programs are as follows:

No	**Program** Program	**Kolaborator** Collaborator	***Output*** Output
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Mudik Bersama IFG Group 2025 IFG Group Joint Homecoming Program 2025	Seluruh anggota holding IFG Every member of IFG Holding	2.000 orang pemudik diberangkatkan secara gratis (*Group*), memperoleh perlindungan asuransi selama mudik dan edukasi terkait pentingnya asuransi bagi masyarakat. 2,000 participants were provided with free transportation, insurance during the program, as well as insights on the importance of insurance for the society.
2.	Program Rehabilitasi Kapel Santo Petrus di Klaten Santo Petrus Chapel Rehabilitation Program in Klaten	Jasa Raharja Jamkrindo Askrindo Jasindo	Rehabilitasi 1 (satu) unit Kapel Santo Petrus di Klaten yang mengalami kerusakan pada bagian atap dan struktur bangunan yang sudah lapuk. Rehabilitation of 1 (one) unit of Santo Petrus Chapel in Klaten that had damaged roof and deteriorated structures.
3.	Program Bike for Charity	Jasa Raharja Jamkrindo Askrindo Jasindo IFG Life	Program peningkatan kesehatan melalui kegiatan bersepeda (*fun bike*) dengan target peserta sebanyak 1.000 orang, pemberian santunan dan sembako Promoting Health through Cycling (fun bike) with expected participants targeting 1,000 participants, as well as handing social assistance.
4.	Kindness to Progress Vol 4 2025 di Desa Ngabab, Malang Kindness to Progress Vol 4 2025 in Desa Ngabab, Malang	Jamkrindo Askrindo	Pelaksanaan 4 proyek sosial pada bidang sosial (pencegahan *stunting*) dan ekonomi (pemberdayaan PKK, literasi digital, kampung batik, pengembangan produk turunan Gapoktan – *Snack Stick*) dan pengembangan TPST Desa Ngabab The implementation of 4 Social Projects in the social sector such as (stunting prevention) and economics (PKK empowerment, digital literacy, batik village, and development of Gapoktan derivative product – Snack Stick) and development of TPST in Desa Ngabab.
5.	Kindness to Progress Vol 5 2025 di Desa Kersamenak, Garut Kindness to Progress Vol 5 2025 in Desa Kersamenak, Garut	Jamkrindo Askrindo	Pelaksanaan 3 program utama, 1) Kader Posyandu melalui Pencegahan *Stunting*, Pelatihan Literasi Digital, bantuan laptop dan bantuan PMT, 2) Inklusif Berkarya melalui *Awareness* Disabilitas, PHBS, dan bantuan renovasi ULD, serta 3) Sekolah Ramah melalui edukasi *anti bullying* Implementation of three flagship programs: 1) Posyandu Cadre Development through stunting prevention, digital literacy training, laptop assistance, and supplementary feeding (PMT); 2) Inclusive Prosperity through disability awareness, Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) promotion, and the renovation of an Integrated Disability Service Unit (ULD); and 3) Child-Friendly Schools through anti-bullying education.
6.	Program bantuan beasiswa anak yatim Yayasan Kartika Asih Scholarship Aid Program for Orphanages at Yayasan Kartika Asih	Jasa Raharja Jamkrindo Askrindo Jasindo	Pemberian beasiswa pendidikan kepada 131 anak yatim. Scholarship awarding to 131 orphanages
7.	Pembangunan IPAL di Bantul Constructing IPAL (Wastewater Treatment Plan) in Bantul	Jasa Raharja Jamkrindo Askrindo Jasindo	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Bantul untuk mengatasi permasalahan limbah produksi batik Constructing Wastewater Installation in Bantul to overcome wastewater from batik production

No Program	Program Program	Kolaborator Collaborator	*Output* Output
(1)	(2)	(4)	(5)
8.	Relawan Bakti BUMN di Maros SOEs Social Volunteers in Maros	Jasa Raharja Jamkrindo Askrindo Jasindo	1. Pendidikan Relawan Mengajar, Bantuan sarana & prasarana pendukung untuk SD 221 Salenrang (buku bacaan dan alat tulis), Renovasi toilet SD 221 Salenrang, Pemberian Makanan Sehat Bergizi Gratis (SD & SMP di Wilayah Desa Salenrang, Bontoa, Maros) 2. Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Pengembangan UMK Pelatihan kepada UMKM lokal, Panen Padi Bersama Masyarakat Desa Rammang-rammang 4. Lingkungan Aksi Bersih Sungai Rammang – Rammang, Penanaman Pohon Produktif, Renovasi titian di seputar desa Ramang-Rammang dan pemasangan *signage* 1. Education Volunteer Teaching Program, provision of learning media aid for Elementary School 221 Salenrang (reading book and stationery), school's toilet renovation, the distribution of Free Nutritious Meal (Elementary School & Junior High School in Desa Salenrang, Bontoa, Maros) 2. Health Free medical check-up 3. The Development of Micro and Small Enterprises (MSE) Training local MSEs, Rice Harvesting with The Locals of Desa Rammang-Rammang. 4. Environment Sungai Rammang-Rammang Clean-up, Productive Tree Planting, Renovation of Pedestrian Walkways in Desa Rammang-Rammang and signage installation.
9.	Program IFG Goes to Campus 2025	Jasa Raharja Jamkrindo Askrindo Jasindo IFG Life	IGTC 2025 bertema *Sustainable Finance* kepada 1.198 orang mahasiswa, guru dan masyarakat melalui tahapan kegiatan literasi sbb: *Bootcamp* (Binus dan IPB) 124 orang, *Studium Generale* (IPB) 214 orang, *Financial Journey* (Binus dan IPB) 486 orang, *Finplay Summit* (Binus) 334 orang IGTC 2025 with the theme of Sustainable Finance resulting in 1,198 students, teachers, and citizens through the following promoting literacy activities: Bootcamp (Binus and IPB) 124 students, Studium Generale (IPB) 214 students, Financial Journey (Binus and IPB) 486 students, Finplay Summit (Binus) 334 students.
10.	Program TJSL Kolaborasi Renovasi dan Pembangunan Sarana Ibadah di Sumatra Barat TJSL Collaborative Efforts to Renovate and Develop Worship Facilities in West Sumatra.	Jasa Raharja Jamkrindo Askrindo Jasindo	Pelaksanaan Kolaborasi bantuan peningkatan area masjid baitul makmur dan pembangunan musholla surau gantiang TK Mudo di Sumatra Barat Implementation of a collaborative project to expand the Baitul Makmur Mosque and construct the Gantiang Surau at Mudo Kindergarten in West Sumatra
11.	Konservasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat di Raja Ampat Environmental Preservation and Community Empowerment in Raja Ampat.	Kolaborasi 15 BUMN Collaborating with 15 SOEs	Program Kolaborasi TJSL BUMN Konservasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kepulauan Raja Ampat Tahap II berupa terumbu karang, tanaman padang lamun, dan 2.000 bibit mangrove.di Kampung Mutus dan Kampung Manyaifun. Phase II of SOE TJSL Collaborative Program in Environmental Preservation and Community Empowerment in Raja Ampat such as coral reef, seagrass, and 2,000 mangrove seedlings in Kampung Mutus and Kampung Manyaifun.
12.	Program Kolaborasi TJSL Ata Modo TJSL Collaborative Program Ata Modo	Kolaborasi 30 BUMN Collaborating with 30 SOEs	Program kolaborasi di bidang (1) pendidikan : Bimtes CPNS untuk 300 Guru, Bimbel utk 63 siswa SD, dan Bantuan 235 paket alat Sekolah, (2) ekonomi: Mesin kopi untuk 1 BumDes dan Jaringan Komunikasi UMKM (3) lingkungan: Revitalisasi 1 unit sarana air bersih, penanaman 200 pohon produktif, dan rumah kelola sampah. Collaborative Program covering (1) Education: Civil Servant Candidate Test Preparation for 300 teachers, Tutoring for 63 elementary school students, provision of aid of 235 packets of stationery, (2) Economics: Coffee machine for 1 Village-owned Enterprise (VOE) and SME Networking Platform (3) Environment: Revitalization of 1 unit clean water system, planting of 200 productive trees, and waste management facility.

No	Program Program	Kolaborator Collaborator	*Output* Output
(1)	(2)	(4)	(5)
13.	Program Kolaborasi TJSL Likupang – Olah Sampah Likupang TJSL Collaborative Program Likupang – Likupang's Waste Management Program	Kolaborasi 28 BUMN Collaborating with 28 SOEs	Tahun 2025, secara keseluruhan memberikan manfaat langsung kepada 1.862 penerima manfaat, mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah dan ekonomi kreatif, berkurangnya timbunan sampah dan pencemaran lingkungan pesisir, meningkatnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, serta terbukanya peluang pendapatan baru melalui penguatan UMKM, ekonomi sirkular, dan sektor pariwisata lokal. Total manfaat yang dihasilkan selama periode program mencapai Rp12.756.564.136 dengan SROI 4,74 Overall, in 2025, we provided direct benefits through 1,862 beneficiaries, covering capacity improvement in waste management and creative economy, the reduction of waste accumulation and coastal pollution, change of community behaviour towards environment preservation, and new opportunities through SMEs empowerment, circular economy, and local tourism. With the total benefit reached IDR 12,756,564.136 with SROI of 4.74.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO & USAHA KECIL (PUMK)

Program PUMK dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Melalui pelaksanaannya, Program PUMK diharapkan dapat:

1. Memperluas kesempatan UMK dalam mengakses penyediaan kredit atau permodalan usaha;
2. Mendukung pengembangan UMK di Indonesia; dan
3. Memperkuat struktur keuangan UMK untuk memaksimalkan kontribusi UMK dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PUMK AUDIT TAHUN 2025

Laporan Posisi Keuangan

Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan Program PUMK menunjukkan kontribusi yang nyata dalam memperkuat kemandirian pelaku UMK. IFG menyalurkan dana PUMK kepada 41 mitra binaan yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, industri, pertanian hingga peternakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat melalui kerja sama dengan BRI. Dukungan yang diberikan tidak terbatas pada akses pembiayaan, tetapi juga mencakup pelatihan, pendampingan, serta penyediaan sarana usaha guna mendorong keberlangsungan dan pertumbuhan usaha kecil secara berkelanjutan melalui Program Pengembangan UMK.

Sejalan dengan penyaluran tersebut, sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah aset Program PUMK adalah sebesar Rp26,16 miliar atau mengalami peningkatan(+1,24% yoy) dibandingkan dengan angka audit tahun 2024.

Realisasi tersebut terdiri dari antara lain kas pada bank sebesar Rp486,74 juta, piutang kerja sama Program PUMK kepada mitra binaan - bersih sebesar Rp1,86 miliar, piutang kerja sama Program PUMK kepada BRI sebesar Rp23,82 miliar, serta piutang mitra binaan Jiwasraya dan piutang bermasalah dan yang telah dicadangkan sebanyak 100%.

MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSE) FUNDING PROGRAM

Micro and Small Enterprises Funding Program (PUMK/MSE Funding) is designed to improve the capacity and quality of Micro and Small Enterprise (MSE) to become resilient and independent entrepreneurs through the use of SOE's funding. Through the implementation, this program is expected to:

1. Improve the chance in accessing business funding or capital support;
2. Supporting the development of MSE in Indonesia; and
3. Strengthening MSE's financial framework to improve the contribution of MSE in Indonesia's economical growing.

AUDITED FINANCIAL REPORT OF MSE FUNDING IN 2025

Statement of Financial Position

In 2025, the implementation of MSE Funding Program demonstrated real contribution in strengthening MSE entrepreneurs. IFG distributed MSE Funding Program funds to 41 fostered partners running in business, service, industry, agriculture and livestocks in DKI Jakarta and West Java through partnership with BRI. The support given was not merely limited to funding access, but also covering training, fostering and facilitating them with business facilities in the hopes of encouraging sustainability and small business growth through MSE Development Program.

Following the distribution, as of December 31, 2025, the total assets of the MSE Funding Program reached IDR 26,16 billion or increasing (+1,24% year-on-year) compared to the 2024 audited figure.

These figures consist of, among other things, cash on hand totaling IDR 486.74 million, receivables from the MSE Funding Program to fostered partners—net amounting to IDR 1.86 billion, receivables from the MSE Funding Program to BRI worth IDR 23.82 billion, as well as receivables from Jiwasraya's fostered partners and outstanding receivables that have been fully provisioned.

Tabel Laporan Posisi Keuangan Program PUMK
Table Audited Financial Report Of MSE

(dalam Rupiah penuh) | (in full Rupiah)

Uraian Description	***Audited* 2024** **(Rp)** (IDR)	***Audited* 2025** **(Rp)** (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(3:2)**
Aset Assets			
Kas pada bank Cash in Bank	23.065.238.210	**486.739.449**	2,11
Piutang pinjaman mitra binaan - bersih Fostered Partners Receivables - net	17.720.924	-	0,00
Piutang pinjaman mitra binaan jiwasraya – bersih (Setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp7.897.534.819 pada 31 Des 2025 dan sebesar Rp7.909.817.902 pada 31 Des 2024) Jiwasraya's Fostered Partners Receivables - net (deducted by allowance of IDR 7,897,534,819 as of December 31, 2025 and IDR 7,909,817,902 as of December 31, 2024)	24.545.250	-	0,00
Piutang Kerjasama PUMK kepada mitra binaan – bersih (Setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp171.704.226 pada 31 Des 2025 dan sebesar Rp54.686.366 pada 31 Des 2024 Receivables from MSE Funding in Collaboration with fostered partners - net (Deducted by allowance amounting to IDR 171,704,226 as of December 31, 2025 and IDR 54,686,366 as of December 31, 2024)	1.376.214.458	**1.857.177.117**	134,95
Piutang Kerjasama PUMK kepada BRI Receivables from MSE Funding Program in collaboration with BRI.	1.356.888.665	**23.817.881.188**	1755,33
Piutang bermasalah (setelah dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp179.336.707 masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024) Outstanding Receivables (deducted by allowance amounting to IDR 179,336,707 as of December 31, 2025 and 2024)	-	-	0,00
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	**25.840.607.507**	**26.161.797.754**	**101,24**
LIABILITAS LIABILITIES			
Utang kepada lembaga pengelola dana Debt to fund management institutions	10.499.997	**10.499.997**	100,00
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	**10.499.997**	**10.499.997**	**100,00**
ASET NETO NET ASSETS			
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya Without Donor Restrictions	25.830.107.510	**26.151.297.757**	101,24
JUMLAH ASET NETO TOTAL NET ASSETS	**25.830.107.510**	**26.151.297.757**	**101,24**
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS	**25.840.607.507**	**26.161.797.754**	**101,24**

Sumber: Laporan Keuangan PUMK IFG Th 2025 *Audited*
Source: IFG's MSE Funding Audited Financial Statements for Fiscal Year 2025

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Pada laporan penghasilan komprehensif sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah pendapatan tercatat sebesar Rp512,96 juta yang menunjukkan penurunan yang signifikan (-99,35% yoy) dibandingkan dengan angka audit tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh aksi korporasi penugasan pengalihan Program PUMK Jiwasraya pada tahun 2024 yang ditandai dengan penerimaan pendapatan pengalihan dana tunai Program PUMK dari Jiwasraya oleh IFG sebesar 23,04 miliar di bulan Desember 2024. Pada tahun 2025, masih terdapat pendapatan pengalihan dana tunai PUMK dari Jiwasraya dengan jumlah kecil, sehingga terjadi perbedaan signifikan pada jumlah pendapatan dengan angka audit tahun 2024.

Dengan tercatatnya jumlah beban sebesar Rp191,77 juta, maka jumlah penghasilan komprehensif pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp321,19 juta atau turun sebesar -98,61% yoy dibandingkan dengan audit tahun 2024.

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

In the statement of comprehensive income as of December 31, 2025, total revenue was recorded at IDR 512.96 million, representing a significant decrease (-99.35% year-over-year) compared to the audited figures for 2024. This was influenced by the corporate action involving the transfer of the Jiwasraya PUMK Program in 2024, which was marked by IFG's receipt of 23.04 billion in cash from the MSE Funding Program transfer from Jiwasraya in December 2024. In 2025, there was still a small amount of MSE Funding Program cash transfer revenue from Jiwasraya, resulting in a significant difference in revenue compared to the 2024 audited figures.

With expenses recorded at IDR 191.77 million, comprehensive income as of December 31, 2025, amounted to IDR 321.19 million, a decrease of -98.61% year-over-year compared to the 2024 audit.

Tabel Penghasilan Komprehensif Program PUMK
Table of Comprehensive Income of MSE Funding Program

(dalam Rupiah penuh) | (in full Rupiah)

Uraian Description	***Audited* 2024 (Rp)** (IDR)	***Audited* 2025 (Rp)** (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(3:2)**
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA WITHOUT DONOR RESTRICTIONS			
PENDAPATAN REVENUE			
Pendapatan Jasa ADM Pinjaman Administrative Service Income	35.134.126	**64.501.366**	183,59
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	21.176.891	**433.033.124**	2044,84
Pendapatan Dana PUMK Pengalihan Jiwasraya Income from the transfer of MSE Funding Jiwasraya funds	23.041.137.827	**15.427.145**	0,07
Pendapatan Lain-lain Other Income	7.934.363.152	**-**	0,00
Jumlah Pendapatan Total Income	**31.031.811.996**	**512.961.635**	**1,65**
BEBAN EXPENSES			
Beban Administrasi dan Umum Administrative and general expenses	4.545.383	**87.036.611**	1914,84
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Mitra Binaan Jiwasraya Provision For Impairment Losses In Jiwasraya's Fostered Partners	7.909.817.902	**17.045.250**	0,22
Pemulihan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Mitra Binaan Jiwasraya Reversal of the allowance for impairment of receivables from Jiwasraya's fostered partner	-	**(29.328.333)**	0,00

Tabel Penghasilan Komprehensif Program PUMK
Table of Comprehensive Income of MSE Funding Program

(dalam Rupiah penuh) | (in full Rupiah)

Uraian Description	***Audited* 2024 (Rp)** (IDR)	***Audited* 2025 (Rp)** (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(3:2)**
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Kerja Sama PUMK kepada Mitra Binaan Provision For Impairment Losses for MSE Funding Program to Fostered Partners	54.686.366	**117.017.860**	213,98
Jumlah Beban Total Expenses	**7.969.049.651**	**191.771.388**	**2,41**
SURPLUS	**23.062.762.345**	**321.190.247**	**1,39**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME	**-**	**-**	**-**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME	**23.062.762.345**	**321.190.247**	**1,39**

Sumber: Laporan Keuangan PUMK IFG Th 2025 *Audited*
Source: IFG's MSE Funding Audited Financial Statements for Fiscal Year 2025

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Pada laporan perubahan aset neto sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat surplus sebesar Rp321,19 juta terhadap saldo awal tahun aset neto sebesar Rp25,83 miliar, sehingga saldo akhir tahun 2025 mencapai sebesar Rp26,15 miliar atau naik +1,24% yoy dibandingkan akhir tahun 2024. Secara terperinci dapat kami sampaikan pada tabel berikut:

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS

In the statement of changes in net assets as of December 31, 2025, there was a surplus amounting to IDR 321.19 millions compared with the initial balance of net assets amounting to IDR 25.83 billions, concluding that the final balance in 2025 reached IDR 26.15 billions or increased +1.24% year-on-year compared with the statement of end of 2024. Details are provided in the following table:

Tabel Laporan Perubahan Aset Neto
Table Statement of Changes in Net Assets

(dalam Rupiah penuh) | (in full Rupiah)

Uraian Description	***Audited* 2024 (Rp)** (IDR)	***Audited* 2025 (Rp)** (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(3:2)**
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA NET ASSETS WITHOUT DONOR RESTRICTIONS			
Saldo awal Beginning Balance	2.767.345.165	25.830.107.510	933,39
Surplus tahun berjalan Surplus for the year	23.062.762.345	321.190.247	1,39
Saldo Akhir Ending balance	25.830.107.510	26.151.297.757	101,24
Penghasilan komprehensif lain Other Comprehensive Income	-	-	-
JUMLAH ASET NETO TOTAL NET ASSETS	**25.830.107.510**	**26.151.297.757**	**101,24**

Sumber: Laporan Keuangan PUMK IFG Th 2025 *Audited*
Source: IFG's MSE Funding Audited Financial Statements for Fiscal Year 2025

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2025, kas neto digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp22,58 miliar sehingga menimbulkan penurunan neto kas pada bank yang signifikan dibandingkan dengan akhir tahun 2024 (-98,19% yoy). Penggunaan kas terbesar pada bank tersebut berupa penyaluran dana Program PUMK sebesar Rp23 miliar melalui kerja sama dengan BRI. Pada akhir periode, nilai kas pada bank adalah sebesar Rp486,74 juta yang akan menjadi saldo kas pada bank untuk awal tahun 2026.

STATEMENT OF CASHFLOW

In the Statement of Cash Flows for the year ended December 31, 2025, net cash used in operating activities amounted to IDR 22.58 billion, resulting in a significant decrease in cash in banks compared with the end of 2024 (-98.19% YoY). The largest cash outflow was related to the distribution of MSE Funding Program funds amounting to IDR 23 billion through a partnership with BRI. At the end of the period, cash in banks amounted to IDR 486.74 million, which will become the beginning cash balance for 2026.

Tabel Laporan Arus Kas Program PUMK
Table of Statement of Cashflow for MSE Funding Program

(dalam Rupiah penuh) | (in full Rupiah)

Uraian Description	***Audited* 2024 (Rp)** (IDR)	***Audited* 2025 (Rp)** (IDR)	**Capaian (%)** Achievement (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(3:2)**
AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES			
Pendapatan Pengalihan Dana PUMK Jiwasraya Income from the transfer of MSE Funding Jiwasraya funds	23.041.137.827	**15.427.145**	0,07
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman Principal Loan Repayments	400.783.880	**54.549.258**	13,61
Pendapatan Jasa Adm Pinjaman Administrative Service Income	351.611	**5.528.324**	1572,28
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	21.176.891	**433.033.124**	2044,84
Penyaluran PUMK Kerjasama BRI Distribution of MSE Funding Program Funds in Collaboration with BRI	(450.000.000)	**(23.000.000.000)**	5111,11
Beban Operasi Operating Expenses	(4.545.383)	**(87.036.611)**	1914,84
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI NET CASH RECEIVED (USED FOR) OPERATING ACTIVITIES	**23.008.904.826**	**(22.578.498.760)**	**(98,13)**
AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES	-	-	-
AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas pada Bank Net Increase (Decrease) in Cash at the Bank	23.008.904.826	**(22.578.498.760)**	(98,13)
Kas pada Bank pada Awal Tahun Cash at the Bank at the Beginning of the Year	56.333.384	**23.065.238.209**	40944,17
Kas pada Bank pada Akhir Tahun Cash at the Bank at the End of the Year	23.065.238.210	**486.739.449**	2,11

Sumber: Laporan Keuangan PUMK IFG Th 2025 *Audited*
Source: IFG's MSE Funding Audited Financial Statements for Fiscal Year 2025

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT



08



PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024

Daftar Isi | **Halaman/ *Page*** | ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2025 and 2024***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Informasi Tambahan		***Additional Information***
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	*Statements of Financial Position (Parent Entity)*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)*
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	*Statements of Changes in Equity (Parent Entity)*
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	*Statements of Cash Flows (Parent Entity)*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hexana Tri Sasongko
   Alamat Kantor : Gedung Graha CIMB Niaga Lt.18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Heru Handayanto
   Alamat Kantor : Gedung Graha CIMB Niaga Lt.18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)

We, the undersigned:

1. *Name* : Hexana Tri Sasongko
   Office Address : Gedung Graha CIMB Niaga Lt.18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
   Title : *President Director*

2. *Name* : Heru Handayanto
   Office Address : Gedung Graha CIMB Niaga Lt.18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190
   Title : *Finance Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries;*
2. *PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of the PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and*
4. *We are responsible for the internal control system of the PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries.*

The statement has been made truthfully.

Jakarta, 19 Juni/*June* 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of Board of Directors*



Hexana Tri Sasongko
Direktur Utama/*President Director*

Heru Handayanto
Direktur Keuangan/*Finance Director*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number*: 01137/2.1030/AU.1/09/0645-2/1/VI/2026

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Public Accountants established by IAPI, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No. 477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian atas Liabilitas Kontrak Asuransi dan Dampak Penerapan Pertama Kali PSAK 117 "Kontrak Asuransi" Termasuk Penerapan Pendekatan Nilai Wajar sebagai salah satu Metode Transisi

   Pada tanggal 1 Januari 2025, Grup menerapkan PSAK 117 "Kontrak Asuransi", yang menggantikan standar sebelumnya, PSAK 104. PSAK 117 menetapkan prinsip baru atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi.

   Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 117 pada tanggal transisi 1 Januari 2024 sebesar Rp7,68 triliun telah diakui dalam saldo awal ekuitas Grup pada tanggal 1 Januari 2024.

   Dalam proses penerapan awal standar ini, Grup menerapkan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan metode transisi yang tepat, termasuk pemilihan pendekatan nilai wajar ("FVA") sebagai salah satu metode transisi dalam penerapan PSAK 117 pertama kali. Penerapan pendekatan nilai wajar ("FVA") ini, menghasilkan pengakuan Marjin Jasa Kontraktual ("CSM") yang signifikan pada tanggal transisi. Selain berdampak terhadap saldo laba awal pada tanggal transisi, CSM yang terbentuk dari penerapan FVA juga akan memengaruhi laba rugi periode berjalan dan periode-periode berikutnya melalui pelepasan CSM selama masa pertanggungan kontrak terkait.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

1. *Valuation of Insurance Contract Liabilities and Impact of the First-time Application of PSAK 117 "Insurance Contracts", Including the Application of the Fair Value Approach as one of the Transition Methods*

   On 1 January 2025, the Group adopted PSAK 117 "Insurance Contracts", which replaces the previous standard, PSAK 104. PSAK 117 establishes new principles for the recognition, measurement, presentation, and disclosure of insurance contracts.

   The cumulative impact of the application of PSAK 117 at the transition date of 1 January 2024, amounting to Rp7,68 trillion, has been recognised in the opening balance of the Group's equity as at 1 January 2024.

   In the process of the initial application of this standard, the Group applied significant judgement in determining the appropriate transition method, including the selection of the fair value approach as one of the transition methods in the first-time application of PSAK 117. The application of this fair value approach ("FVA") resulted in the recognition of a significant Contractual Service Margin ("CSM") at the transition date. In addition to its impact on the opening retained earnings at the transition date, the CSM arising from the application of the FVA will also affect profit or loss for the current and subsequent periods through the release of CSM over the coverage period of the related contracts.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas kontrak asuransi Grup adalah sebesar Rp48.190.639 juta, yang merepresentasikan sekitar 53,22% dari total liabilitas Grup. Saldo tersebut merupakan komponen material dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup.

As disclosed in Note 24 to the consolidated financial statements, as of December 31, 2025, the Group's insurance contract liabilities amounted to Rp48,190,639 million, representing approximately 53.22% of the Group's total liabilities. This balance represents a material component of the Group's consolidated statement of financial position.

Penilaian Grup atas liabilitas kontrak asuransi ini melibatkan pertimbangan signifikan terkait ketidakpastian hasil masa depan, termasuk pengembangan metodologi dan asumsi aktuaria utama. Asumsi-asumsi ini diterapkan dalam perhitungan pemenuhan arus kas dan margin jasa kontraktual ("CSM").

Grup's assessment of these insurance contract liabilities involves significant judgement relating to the uncertainty of future outcomes, including the development of methodologies and key actuarial assumptions. These assumptions are applied in the calculation of fulfilment cash flows and the Contractual Service Margin ("CSM").

Arus kas pemenuhan mencakup semua arus kas masuk dan arus kas keluar yang langsung terkait dengan kontrak asuransi, ditentukan menggunakan asumsi pada tanggal penilaian, yang mengandung pertimbangan yang signifikan dalam estimasi arus kas yang diharapkan.

Fulfillment cash flows include all cash inflows and cash outflows, directly attributable to the insurance contract, are determined using assumptions as at the valuation date, and are subjected to significant judgment in the estimation of expected cash flows.

CSM merepresentasikan laba yang belum diakui oleh Perusahaan dan akan diakui seiring dengan penyediaan jasa berdasarkan kontrak asuransi. Amortisasi CSM merupakan komponen utama dari pendapatan asuransi berdasarkan PSAK 117, dan perhitungan unit pertanggungan yang menjadi dasar amortisasi CSM memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan. Perhitungan CSM adalah kompleks dan melibatkan asumsi yang mengandung subjektivitas dalam menentukan unit pertanggungan dan dalam pergerakan CSM.

CSM represents the unearned profit of the Company and will be recognised as services are provided under the insurance contracts. The amortisation of CSM is a key component of insurance revenue under PSAK 117, and the calculation of coverage units, which forms the basis for the amortisation of CSM, requires significant management judgement. The calculation of CSM is complex and involves assumptions that are subjective in determining coverage units and movements in CSM.

Oleh karena itu, kami mengidentifikasi penilaian atas liabilitas kontrak asuransi dan dampak penerapan pertama kali PSAK 117, termasuk penerapan FVA sebagai salah satu metode transisi, sebagai hal audit utama.

Accordingly, we identified the valuation of insurance contract liabilities and the impact of the first-time application of PSAK 117, including the application of the FVA as one of the transition methods, as a key audit matter.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons Hal Audit Utama ini:

We have performed the following audit procedures to address this Key Audit Matter:

- Memperoleh pemahaman atas proses yang diterapkan manajemen dalam penerapan PSAK 117, termasuk proses penentuan kebijakan akuntansi, ruang lingkup kontrak, pemilihan model pengukuran, penentuan pendekatan transisi, perhitungan saldo transisi, pengukuran liabilitas kontrak asuransi, serta penentuan dan pelepasan CSM;

- *Obtaining an understanding of the processes implemented by management in applying PSAK 117, including the determination of accounting policies, scope of contracts, selection of measurement models, determination of transition approach, calculation of transition balances, measurement of insurance contract liabilities, and determination and release of CSM;*

- Mengevaluasi kesesuaian kebijakan akuntansi, metodologi aktuaria, model pengukuran, dan pendekatan transisi yang digunakan manajemen dengan ketentuan PSAK 117, termasuk dasar penerapan FVA sebagai metode transisi;

- Mengevaluasi desain dan menguji efektivitas operasi pengendalian utama yang relevan atas proses penerapan PSAK 117 dan pengukuran liabilitas kontrak asuransi, termasuk pengendalian atas kelengkapan dan akurasi data, validasi input, reviu manajemen atas hasil model aktuaria, serta pengendalian atas perubahan metodologi dan model perhitungan;

- Menguji kelengkapan dan akurasi data yang digunakan dalam perhitungan liabilitas kontrak asuransi, saldo transisi, dengan melakukan pengujian berbasis sampel dan rekonsiliasi ke sistem sumber, laporan aktuaria, dokumen polis, dokumen klaim, data premi, dan dokumen pendukung lainnya;
- Dengan bantuan spesialis aktuaria kami, kami melakukan prosedur sebagai berikut:
  a. Mengevaluasi kewajaran metodologi aktuaria dan model pengukuran yang digunakan manajemen, termasuk penerapan *General Measurement Model* atau *Building Block Approach*, serta pendekatan transisi FVA yang relevan;
  b. Mengevaluasi kewajaran asumsi utama yang digunakan manajemen, termasuk asumsi klaim, pola pembayaran klaim, tingkat diskonto, *risk adjustment*, unit pertanggungan, estimasi arus kas masa depan, dan asumsi relevan lainnya, dengan membandingkannya terhadap pengalaman historis Grup, data pasar yang dapat diobservasi, karakteristik produk, dan ketentuan PSAK 117;

  c. Mengevaluasi kewajaran penentuan nilai wajar pada tanggal transisi dan perhitungan CSM awal yang timbul dari penerapan FVA, termasuk menilai keterkaitan antara nilai wajar, arus kas pemenuhan, *risk adjustment*, dan CSM yang diakui pada tanggal transisi;

- *Evaluating the appropriateness of the accounting policies, actuarial methodologies, measurement models, and transition approach applied by management against the requirements of PSAK 117, including the basis for applying the FVA as the transition method;*
- *Evaluating the design and testing the operating effectiveness of relevant key controls over the implementation of PSAK 117 and the measurement of insurance contract liabilities, including controls over completeness and accuracy of data, input validation, management's review of actuarial model outputs, and controls over changes in methodologies and calculation models;*
- *Testing the completeness and accuracy of data used in the calculation of insurance contract liabilities, transition balances, by performing sample-based testing and reconciling the data to source systems, actuarial reports, policy documents, claim documents, premium data, and other supporting documentation;*
- *With the assistance of our actuarial specialists, we performed the following procedures:*
  a. *Evaluating the reasonableness of the actuarial methodologies and measurement models used by management, including the application of the General Measurement Model or Building Block Approach, and the relevant FVA transition approach;*
  b. *Evaluating the reasonableness of key assumptions used by management, including claims assumptions, claims payment patterns, discount rates, risk adjustment, coverage units, estimates of future cash flows, and other relevant assumptions, by comparing them against the Group's historical experience, observable market data, product characteristics, and the requirements of PSAK 117;*
  c. *Evaluating the reasonableness of the fair value determined at the transition date and the initial CSM arising from the application of the FVA, including assessing the relationship between fair value, fulfilment cash flows, risk adjustment, and the CSM recognised at the transition date;*

d. Melakukan perhitungan ulang atas sampel kelompok kontrak asuransi untuk mengevaluasi akurasi perhitungan liabilitas kontrak asuransi, saldo transisi, CSM awal, pelepasan CSM, akresi bunga, penentuan unit pertanggungan, serta identifikasi kontrak yang merugi; dan
e. Menganalisis pergerakan liabilitas kontrak asuransi dan CSM selama tahun berjalan, termasuk membandingkan pergerakan tersebut terhadap ekspektasi auditor, pengalaman historis, perubahan asumsi manajemen, dan informasi pendukung lainnya.

- Mengevaluasi kecukupan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 117, metode transisi FVA, dampak terhadap saldo laba awal, liabilitas kontrak asuransi, saldo dan pergerakan CSM, pertimbangan signifikan, asumsi utama, sensitivitas, dan ketidakpastian estimasi sesuai dengan ketentuan PSAK 117.

2. Valuasi liabilitas kontrak jaminan keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas kontrak jaminan keuangan Grup adalah sebesar Rp17.656.177 juta, atau 19,50% dari jumlah liabilitas Grup.

Kami mengidentifikasi area ini sebagai hal audit utama karena liabilitas kontrak jaminan keuangan merupakan saldo yang signifikan dalam laporan keuangan dan pengukurannya melibatkan pertimbangan manajemen yang kompleks serta ketidakpastian estimasi yang signifikan. Liabilitas tersebut terutama terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan ditangguhkan dan cadangan klaim, yang penentuannya bergantung pada berbagai estimasi dan asumsi, termasuk pola pengakuan Imbal Jasa Penjaminan, estimasi klaim, tingkat gagal bayar, tingkat pemulihan, serta ekspektasi atas kejadian di masa mendatang. Perubahan atas asumsi-asumsi utama tersebut dapat berdampak material terhadap nilai liabilitas kontrak jaminan keuangan yang diakui dalam laporan keuangan. Dalam menyusun estimasi tersebut, manajemen melibatkan pakar aktuaria dan pakar pemodelan kredit.

d. Performing recalculations on a sample of groups of insurance contracts to evaluate the accuracy of the calculation of insurance contract liabilities, transition balances, initial CSM, CSM release, interest accretion, determination of coverage units, and identification of onerous contracts; and
e. Analysing the movements in insurance contract liabilities and CSM during the year, including comparing such movements against auditor expectations, historical experience, changes in management's assumptions, and other supporting information.

- *Evaluating the adequacy of presentation and disclosures in the consolidated financial statements relating to the adoption of PSAK 117, the FVA transition method, the impact on opening retained earnings, insurance contract liabilities, CSM balances and movements, significant judgments, key assumptions, sensitivities, and estimation uncertainty in accordance with the requirements of PSAK 117.*

2. *Valuation of liabilities for financial guarantee contracts*

As described in Note 25 to the consolidated financial statements, as of December 31, 2025, the Group's liabilities for financial guarantee contracts amounted to Rp17,656,177 million, or 19.50% of the Group's total liabilities.

We identified this area as a key audit matter because financial guarantee contract liabilities represent a significant balance in the financial statements and their measurement involves complex management judgment and significant estimation uncertainty. These liabilities primarily consist of deferred guarantee fee income and claim reserves, the determination of which depends on various estimates and assumptions, including the pattern of recognition of guarantee fee income, estimated claims, default rates, recovery rates, and expectations of future events. Changes in these key assumptions could have a material impact on the amount of financial guarantee contract liabilities recognized in the financial statements. In developing these estimates, management involved actuarial specialists and credit modelling specialists.

Terdapat ketidakpastian yang timbul dari berbagai asumsi-asumsi utama aktuaria yang digunakan, termasuk *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD"), dan *Exposure At Default* ("EAD"), dalam menentukan liabilitas kontrak jaminan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.ac (Pengakuan pendapatan dan beban atas liabilitas kontrak jaminan keuangan) atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami menilai kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar-pakar aktuaris dan pakar pemodelan kredit yang membantu manajemen untuk melakukan perhitungan atas liabilitas kontrak jaminan keuangan;
- Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan untuk menentukan liabilitas kontrak jaminan keuangan (perhitungan kuantitatif bruto dan neto) dengan bantuan pakar pemodelan kredit kami. Kami menguji PD, LGD, EAD, yang mencakup (i) membandingkan prakiraan makroekonomi Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi tersedia untuk umum tentang prospek makroekonomi Indonesia; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam model dengan data aktual yang tersedia di Grup;
- Kami menghitung ulang PD, LGD, dan liabilitas kontrak jaminan keuangan dengan bantuan spesialis kami; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan terkait nilai liabilitas kontrak jaminan keuangan dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

3. Eliminasi intra-grup atas aset reasuransi, aset pengembalian dan liabilitas kontrak asuransi

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.d (Informasi kebijakan akuntansi material - Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas), dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025, Grup melakukan eliminasi secara penuh atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas untuk seluruh transaksi, saldo dan keuntungan/kerugian yang belum terealisasi, yang material dan berasal dari transaksi antar Perusahaan di dalam Grup.

There is uncertainty arising from various key actuarial assumptions used, including the Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), and Exposure At Default ("EAD"), in determining the liabilities for financial guarantee contracts, as described in Notes 2.ac (Revenue and expense recognition of financial guarantee contract liabilities) to the consolidated financial statements.

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We assessed the competence, capabilities and objectivity of the actuarial experts and credit modelling experts who assisted management in the calculation of the liabilities for financial guarantee contracts;*
- *We obtained understanding and assessed the methodology and significant modelling assumptions used in determining the liabilities for financial guarantee contracts (the gross and net quantitative calculations) with assistance from our credit modelling expert. We tested the PD, LGD, EAD, which included (i) comparing forecasts of Indonesia macroeconomics with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used in the model with the Group's actual data;*
- *We recalculated the PD, LGD and liabilities for financial guarantee contracts with assistance from our specialists; and*
- *We assessed the adequacy of the disclosures related to the liabilities for financial guarantees contracts in the context of Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

3. *Intra-group elimination of reinsurance assets, reimbursement assets and insurance contract liabilities*

As described in Note 2.d (Material accounting policy information - Principles of consolidation and equity accounting), in preparing the consolidated financial statements as at 31 December 2025, the Group fully eliminates assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows for all material transactions, balances, and unrealised gains/losses arising from transactions between companies within the Group.

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 1 (Informasi Umum) atas laporan keuangan konsolidasian, Grup beroperasi di industri jasa keuangan, investasi, penjaminan keuangan, asuransi dan reasuransi. Melalui aktivitas Grup, terdapat transaksi-transaksi intra-grup di antara entitas-entitas asuransi, entitas penjaminan keuangan dan entitas reasuransi yang berkaitan pada aset reasuransi, aset pengembalian dan liabilitas kontrak asuransi yang harus dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Kami berfokus pada area ini karena eliminasi intra-grup atas aset reasuransi, aset pengembalian dan liabilitas kontrak asuransi merupakan area yang signifikan dalam audit kami terhadap laporan keuangan konsolidasian sebagaimana terdapat perhitungan yang kompleks untuk menilai peristiwa di masa depan yang melibatkan pertimbangan manajemen yang bergantung pada tingkat estimasi yang tinggi.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang proses Grup untuk mengeliminasi intra-grup aset kontrak reasuransi, liabilitas kontrak asuransi, aset penjaminan ulang, dan liabilitas kontrak jaminan keuangan termasuk metode alokasian liabilitas kontrak asuransi dan liabilitas jaminan keuangan;
- Kami melakukan pengujian transaksi-transaksi dan saldo-saldo intra-grup untuk menilai apakah transaksi-transaksi dan saldo-saldo tersebut telah dieliminasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup dan standar akuntansi yang berlaku;
- Kami menilai metodologi yang digunakan oleh manajemen dalam menghitung saldo eliminasi pada tingkat kontrak Asuransi dan kontrak Jaminan Keuangan untuk menentukan jumlah alokasian yang akan dieliminasi atas setiap lini bisnis ("LoB") produk Asuransi dan produk Jaminan Keuangan;
- Kami mendapatkan konfirmasi dan laporan rekonsiliasi dari masing-masing anak perusahaan dan menilai kelengkapan dari eliminasi transaksi-transaksi dan saldo-saldo intra-grup.

As described in Note 1 (General Information) of the consolidated financial statements, the Group operates in the financial services, investments, financial guarantees, insurance and reinsurance industries. Through the Group's activities, there are intra-group transactions amongst the insurance, financial guarantee entity and reinsurance entities relating to the reinsurance assets, reimbursement assets and insurance contract liabilities that are required to be eliminated in the consolidated financial statements.

We focused on this area as the elimination of intra-group reinsurance assets, reimbursement assets and insurance contract liabilities is a significant area to our audit of the consolidated financial statements as there are complex calculations to value future events that involve management judgement which are subject to a high degree of estimation.

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We obtained an understanding of the Group's process for eliminating intra-group reinsurance contract assets, insurance contract liabilities, reinsurance held assets, and financial guarantee contract liabilities, including the methodology used to allocate insurance contract liabilities and financial guarantee contract liabilities;*
- *We tested intra-group transactions and balances to assess whether such transactions and balances had been eliminated in accordance with the Group's accounting policies and the applicable accounting standards;*
- *We assessed the methodology applied by management in determining the elimination balances at the insurance contract and financial guarantee contract levels, including the allocation of the amounts to be eliminated to each line of business ("LoB") of insurance and financial guarantee products;*
- *We obtained confirmations and reconciliations report from each subsidiary in the Group to assess the completeness of the elimination of intra-group transactions and balances.*

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian atas Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, yang menjelaskan bahwa Grup telah menyajikan kembali informasi komparatif sehubungan dengan penerapan PSAK 109 "Instrumen Keuangan" atas produk Kredit Usaha Rakyat ("KUR"), yang sebelumnya diperlakukan berdasarkan PSAK 104 "Kontrak Asuransi". Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan tersebut, penerapan PSAK 109 atas produk KUR berdampak terhadap penyajian kembali angka komparatif. Oleh karena itu, angka komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023 telah disajikan kembali untuk mencerminkan juga dampak penerapan PSAK 109 atas produk KUR.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 4 to the accompanying consolidated financial statements, which explains that the Group has restated the comparative information in connection with the adoption of PSAK 109 "Financial Instruments" for Kredit Usaha Rakyat ("KUR") products, which were previously accounted for under PSAK 104 "Insurance Contracts". As described in the Note, the adoption of PSAK 109 for the KUR products resulted in the restatement of the comparative figures. Accordingly, the comparative figures for the year ended 31 December 2024 and the consolidated statement of financial position as at 1 January 2024/31 December 2023 have been restated to also reflect the impact of the adoption of PSAK 109 for the KUR products.

Our opinion is not modified in relation to this matter.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasi+an terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as of December 31, 2025 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2025 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Informasi Lain
Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan tahun 2025 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain tidak konsisten secara material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2025, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The 2025 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance on the conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the 2025 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by IAPI.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to

akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki niat untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu level keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal;

  Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk menrancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup;

  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Group's internal control;

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen;

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha;
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar; dan
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on Groups's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause Group to cease to continue as a going concern;*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation; and*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of Group's consolidated financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguard applied.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine such matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Dedy Sukrisnadi
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 19 Juni 2026/*June 19, 2026*

01137

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024 and January 1, 2024/December 31, 2023
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Des 2025/ *Dec 31, 2025* Rp	31 Des 2024*)/ *Dec 31, 2024*)* Rp	1 Jan 2024/ 31 Des 2023*)/ *Jan 1, 2024/ Dec 31, 2023*)* Rp	
ASET					***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	6	13,015,795	15,228,596	14,522,579	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	7	78,172,702	76,466,281	79,287,594	*Investments - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	8	3,245,583	3,784,043	5,228,806	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah		64,212	112,672	266,040	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang imbal jasa *kafalah*		42,692	21,795	24,047	*Kafalah fee receivable*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	9	2,347,074	2,479,426	2,841,447	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	10	21,278	54,024	74,441	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah		49,145	73,262	13,117	*Sharia insurance and reinsurance claim receivables*
Piutang penjaminan ulang syariah		156,151	115,853	134,090	*Sharia re-guarantee receivables*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	11	710,316	869,314	1,174,981	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih		850,155	861,933	834,227	*Investment income receivables - net*
Pajak dibayar di muka	12a	317,131	220,497	215,844	*Prepaid taxes*
Biaya akuisisi tangguhan		462,700	599,434	615,127	*Deferred acquisition costs*
Investasi pada entitas asosiasi	13	381,842	311,431	294,854	*Investment in Associate*
Aset kontrak asuransi	24	57,482	63,728	53,381	*Insurance contract assets*
Aset kontrak reasuransi	24	10,140,301	9,740,645	9,840,096	*Reinsurance contract assets*
Aset reasuransi syariah		249,704	167,196	155,525	*Sharia reinsurance assets*
Aset pengembalian	14	157,068	67,178	170,449	*Reimbursement assets*
Aset penjaminan ulang syariah		710,334	831,074	860,414	*Sharia re-guarantee assets*
Penjaminan ulang dibayar dimuka	15	102,649	129,113	182,482	*Prepaid re-guarantee*
Aset tetap - bersih	16	3,107,013	3,346,745	3,278,854	*Fixed assets - net*
Properti investasi - bersih	17	7,512,440	4,967,930	5,018,208	*Investment properties - net*
Aset pajak tangguhan	12d	5,482,883	5,343,574	5,015,442	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	18	3,786,928	4,262,693	3,619,048	*Other assets*
JUMLAH ASET		**131,143,578**	**130,118,437**	**133,721,093**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

**) As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

	Catatan/ *Notes*	31 Des 2025/ *Dec 31, 2025* Rp	31 Des 2024*)/ *Dec 31, 2024*) Rp	1 Jan 2024/ 31 Des 2023*)/ *Jan 1, 2024/ Dec 31, 2023*) Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Utang klaim penjaminan	19	445,953	1,061,931	684,912	*Guarantee claim payables*
Utang klaim asuransi dan reasuransi syariah		59,723	57,911	8,083	*Sharia insurance and reinsurance payables*
Utang klaim penjaminan syariah		261	1,655	6,662	*Sharia guarantee claim payables*
Utang penjaminan ulang	20	195,381	180,709	231,856	*Re-guarantee payables*
Utang kontribusi reasuransi dan retrosesi syariah		13,563	33,043	8,912	*Sharia reinsurance premium payables*
Utang premi penjaminan syariah		34,513	36,319	88,865	*Sharia guarantee premium payables*
Utang usaha dan utang lain-lain	21	11,091,471	9,255,786	8,961,321	*Accounts payable and other payables*
Akrual	22	2,156,375	1,747,893	1,887,075	*Accruals*
Utang restrukturisasi	23	642,753	682,256	711,324	*Restructuring debt*
Utang pajak	12b	652,453	357,010	844,123	*Taxes payable*
Liabilitas kontrak asuransi	24	48,190,639	50,258,032	54,703,340	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	24	24,567	153,338	3,672	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	25	17,656,177	20,480,150	22,001,238	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Liabilitas kontrak asuransi syariah		2,294,771	2,797,455	3,005,593	*Liabilities for sharia insurance contracts*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan syariah		2,727,524	2,751,470	2,451,960	*Liabilities for sharia financial guarantee contracts*
Pendapatan diterima di muka		142,227	139,238	157,654	*Unearned revenue*
Pendapatan komisi tangguhan		362,419	439,350	353,330	*Deferred commission income*
Pinjaman dari Pemerintah	26	787,954	757,542	1,004,269	*Government loans*
Utang bank	27	971,123	2,363,092	3,555,359	*Bank loans*
Medium Term Notes	28	966,782	1,116,162	1,065,416	*Medium Term Notes*
Liabilitas imbalan kerja	29	1,133,042	1,286,886	1,459,614	*Employee benefit liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**90,549,671**	**95,957,228**	**103,194,578**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA TABARRU'	43	**(1,447,744)**	**(1,761,682)**	**(1,786,614)**	***TABARRU' FUNDS***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

**) As restated, refer to Note 4*

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2025 and 2024 and January 1, 2024/December 31, 2023 (Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Des 2025/ *Dec 31, 2025* Rp	31 Des 2024*)/ *Dec 31, 2024*) Rp	1 Jan 2024/ 31 Des 2023*)/ *Jan 1, 2024/ Dec 31, 2023*) Rp	
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham					*Share capital*
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham					*Share capital - Nominal amount Rp 1,000,000 (full amount) at par per share*
Modal dasar: 240.000.000 lembar pada tahun 2025 dan 2024					*Authorised capital: 240,000,000 shares in year 2025 and 2024*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					*Issued and fully paid capital:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 93.719.536 saham per 31 Desember 2025					*1 share of Series A Dwiwarna - and 93,719,536 shares of Series B as at 31 December 2025*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 93.719.536 saham per 31 Desember 2024					*1 share of Series A Dwiwarna - and 93,719,536 shares of Series B as at 31 December 2024*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 90.163.536 saham per 1 Januari 2024	30	93,719,537	93,719,537	90,163,537	*1 share of Series A Dwiwarna - and 90,163,536 shares of Series B as at January, 01 2024*
Tambahan modal disetor	30	(61,941,256)	(61,894,608)	(59,887,919)	*Additional paid-in capital*
Cadangan keuangan asuransi		(523,263)	278,803	115,665	*Insurance finance reserve*
Akumulasi (kerugian)/ keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		1,138,768	(390,846)	483,520	*Accumulated (losses)/ gains on change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities*
Pengukuran kembali program imbalan pasti		(41,949)	(29,503)	(121,198)	*Remeasurement of defined benefit plan*
Komponen ekuitas lainnya		3,279	3,279	3,279	*Other equity components*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		2,704,908	2,704,908	2,614,908	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		5,748,205	387,017	(3,044,766)	*Unappropriated*
Ekuitas *merging entities*		--	--	808,017	*Equity of merging entities*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**40,808,229**	**34,778,587**	**31,135,043**	***Total equity attributable to the owners of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali		1,233,422	1,144,304	1,178,086	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**42,041,651**	**35,922,891**	**32,313,129**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA TABARRU', DAN EKUITAS		**131,143,578**	**130,118,437**	**133,721,093**	***TOTAL LIABILITIES, TABARRU' FUNDS, AND EQUITY***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

**) As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp	2024*) Rp	
HASIL JASA ASURANSI				***INSURANCE SERVICE RESULT***
Pendapatan asuransi	31	19,609,355	19,426,661	*Insurance revenue*
Beban jasa asuransi		(14,440,765)	(14,273,485)	*Insurance service expense*
Jumlah yang terpulihkan dari reasuradur		1,112,199	1,149,896	*Amounts recoverable from reinsurance for incurred claims*
Alokasi atas premi reasuransi yang dibayar		(3,419,585)	(3,274,833)	*Allocation of reinsurance premiums*
HASIL JASA ASURANSI		**2,861,204**	**3,028,239**	***INSURANCE SERVICE RESULT***
HASIL KEGIATAN PENJAMINAN				***GUARANTEE SERVICE RESULT***
Imbal jasa penjaminan	32	11,111,435	11,599,526	*Guarantee fee income*
Premi penjaminan ulang	32	(270,513)	(385,092)	*Re-guarantee premiums*
Beban klaim penjaminan - bruto	33	(9,826,754)	(13,249,289)	*Gross guarantee claim expenses*
Klaim penjaminan ulang	33	74,741	60,905	*Re-guarantee claims*
(Kenaikan) penurunan estimasi liabilitas klaim	33	498,344	1,278,557	*(Increase) decrease in estimated claim liabilities*
Pendapatan subrogasi - bersih	34	2,928,343	3,393,987	*Subrogation income - net*
Beban akuisisi dan komisi penjaminan - bersih	35	(163,786)	(29,925)	*Acquisition cost and guarantee commission expenses - net*
Pendapatan (beban) penjaminan syariah - bersih		798,297	685,202	*Income (expenses) from sharia guarantee - net*
HASIL KEGIATAN PENJAMINAN		**5,150,107**	**3,353,871**	***GUARANTEE SERVICE RESULT***
Beban *underwriting* lain-lain		(747,991)	(206,898)	*Other underwriting expense*
Hasil investasi - bersih	36	6,835,538	5,735,860	*Net investment income - net*
Hasil keuangan bersih				*Net financial result*
Beban keuangan bersih dari kontrak asuransi	37	(3,021,231)	(3,469,281)	*Net finance expense from insurance contract*
Pendapatan keuangan bersih dari kontrak reasuransi	37	610,617	762,021	*Net finance income from reinsurance contract*
Hasil keuangan bersih		**(2,410,614)**	**(2,707,260)**	***Net financial result***
Pendapatan jasa manajemen keuangan	38	410,583	438,122	*Financial management services income*
Pendapatan pengelolaan gedung	39	137,623	115,965	*Building management income*
Beban umum dan administrasi	40	(5,769,536)	(5,937,225)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	41	(312,537)	(405,191)	*Finance costs*
Pendapatan lain-lain - bersih	42	29,734	233,750	*Other income - net*
		(5,504,133)	(5,554,579)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**6,184,111**	**3,649,233**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	12c	(676,742)	(40,557)	*Income tax expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**5,507,369**	**3,608,676**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

**) As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp	2024*) Rp	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan		683,844	(625,796)	*Allowance for impairment losses of financial assets*
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak asuransi - penghasilan komprehensif lain		(857,199)	233,329	*Net finance income (expense) from insurance contract - other comprehensive income*
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak reasuransi - penghasilan komprehensif lain		50,318	(70,191)	*Net finance income (expense) from reinsurance contract - other comprehensive income*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak - akan direklasifikasikan ke laba rugi		847,711	(299,679)	*Unrealised gain (loss) on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		722	1,037	*Unrealised loss on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja, setelah pajak		(12,910)	93,279	*Remeasurement of post-employment benefits, net of tax*
Pendapatan (beban) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		**712,486**	**(668,021)**	***Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**6,219,855**	**2,940,655**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		5,361,188	3,521,783	*Owner of parent entity*
Kepentingan nonpengendali		146,181	86,893	*Non-controlling interest*
		5,507,369	**3,608,676**	
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		6,076,290	2,902,250	*Owner of parent entity*
Kepentingan nonpengendali		143,565	38,405	*Non-controlling interest*
		6,219,855	**2,940,655**	

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

**) As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
(PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Cadangan keuangan asuransi/ *Insurance finance reserve* Rp	Akumulasi (kerugian)/ keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan/ *Accumulated (losses)/ gains on change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities* Rp	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefit plan* Rp	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components* Rp	Ekuitas merging entities/ *Equity of merging entities* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah/ *Total* Rp	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests* Rp	Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
								Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp			
Saldo per 31 Desember 2023	**90,163,537**	**(59,815,120)**	**--**	**728,795**	**(121,198)**	**3,279**	**1,232,279**	**2,614,908**	**3,943,958**	**38,750,438**	**1,250,640**	**40,001,078**	***Balance as at December 31, 2023***
Dampak penyajian kembali penerapan PSAK 117: "Kontrak Asuransi" dan PSAK 109: "Instrumen Keuangan"	--	(72,799)	115,665	(245,275)	–	–	(424,262)	--	(6,988,724)	(7,615,395)	(72,554)	(7,687,949)	*"Business Combination of Entities ıt of SFAS 117: "Insurance Contracts" "Insurance Contract" ı"*
Saldo per 1 Januari 2024 *)	**90,163,537**	**(59,887,919)**	**115,665**	**483,520**	**(121,198)**	**3,279**	**808,017**	**2,614,908**	**(3,044,766)**	**31,135,043**	**1,178,086**	**32,313,129**	***Balance as at January 1, 2024*)***
Selisih aset dan liabilitas yang dialihkan kepada IFG Life	--	(1,148,973)	--	--	–	–	--	--	–	(1,148,973)	--	(1,148,973)	*Difference on transferred assets and liabilities to IFG Life*
Penyesuaian nilai kini utang restrukturisasi	--	(12,739)	--	--	–	–	--	--	–	(12,739)	--	(12,739)	*Adjustments to the present value of debt restructuring*
Akuisisi InHealth oleh IFG Life	--	(844,977)	--	--	–	–	--	--	–	(844,977)	--	(844,977)	*InHealth acquisition by IFG Life*
Divestasi entitas anak pada BAV	--	–	--	--	–	–	--	--	–	--	(15,092)	(15,092)	*Divestment of subsidiaries in BAV*
Penambahan saham	3,556,000	–	--	--	–	–	--	--	–	3,556,000	--	3,556,000	*Share issuance*
Dividen	--	–	--	--	–	–	--	--	–	--	(56,786)	(56,786)	*Dividend*
Cadangan umum	--	–	--	--	–	–	--	90,000	(90,000)	--	--	–	*General reserves*
Laba komprehensif tahun berjalan:													*Comprehensive loss for the year:*
Laba bersih tahun berjalan	--	–	--	--	–	–	--	--	3,521,783	3,521,783	86,893	3,608,676	*Net income for the year*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	--	–	--	(577,859)	–	–	--	--	–	(577,859)	(47,937)	(625,796)	*Allowance for impairment losses of financial assets*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	--	–	--	(296,507)	–	–	--	--	–	(296,507)	(2,135)	(298,642)	*Unrealised gains on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak asuransi	--	–	233,329	--	–	–	--	--	–	233,329	--	233,329	*Net finance income (expenses) from insurance contract*
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak reasuransi	--	–	(70,191)	--	–	–	--	--	–	(70,191)	--	(70,191)	*Net finance income (expenses) from reinsurance contract*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	--	–	--	--	91,695	–	--	--	–	91,695	1,584	93,279	*Remeasurement of post-employment benefits*
Pembalikan ekuitas merging entities	--	–	--	--	–	–	(808,017)	--	–	(808,017)	--	(808,017)	*Reversal of equity from merging entities*
Perubahan ekuitas lain entitas anak	--	–	--	--	–	–	--	--	–	--	(309)	(309)	*Other movement of equity of subsidiaries*
Saldo per 31 Desember 2024*)	**93,719,537**	**(61,894,608)**	**278,803**	**(390,846)**	**(29,503)**	**3,279**	**--**	**2,704,908**	**387,017**	**34,778,587**	**1,144,304**	**35,922,891**	***Balance as at December 31, 2024***
Selisih aset dan liabilitas yang dialihkan kepada IFG Life	--	(33,120)	--	--	–	–	--	--	–	(33,120)	--	(33,120)	*Difference on transferred assets and liabilities to IFG Life*
Penyesuaian nilai kini utang restrukturisasi	--	(13,528)	--	--	–	–	--	--	–	(13,528)	--	(13,528)	*Adjustments to the present value of debt restructuring*
Divestasi entitas anak pada BAV	--	–	--	--	–	–	--	--	–	--	(750)	(750)	*Divestment of subsidiaries in BAV*
Divestasi BMI	--	–	--	--	–	–	--	--	–	--	(33)	(33)	*Divestment of BMI*
Dividen	--	–	--	--	–	–	--	--	–	--	(54,988)	(54,988)	*Dividend*
Laba komprehensif tahun berjalan:													*Comprehensive loss for the year:*
Laba bersih tahun berjalan	--	–	--	--	–	–	--	--	5,361,188	5,361,188	146,181	5,507,369	*Net income for the year*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	--	–	--	683,836	–	–	--	--	–	683,836	8	683,844	*Allowance/ (reversal) of imparment losses*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	--	–	--	845,778	–	–	--	--	–	845,778	2,655	848,433	*Unrealised gains on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak asuransi	--	–	(850,861)	--	–	–	--	--	–	(850,861)	(6,338)	(857,199)	*Net finance income (expenses) from insurance contr*
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak reasuransi	--	–	48,795	--	–	–	--	--	–	48,795	1,523	50,318	*Net finance income (expenses) from reinsurance contract*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	--	–	--	--	(12,446)	–	--	--	–	(12,446)	(464)	(12,910)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Perubahan ekuitas lain entitas anak	--	–	--	--	–	–	--	--	--	--	1,324	1,324	*Other movement of equity of subsidiaries*
Saldo per 31 Desember 2025	**93,719,537**	**(61,941,256)**	**(523,263)**	**1,138,768**	**(41,949)**	**3,279**	**--**	**2,704,908**	**5,748,205**	**40,808,229**	**1,233,422**	**42,041,651**	***Balance as at December 31, 2025***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 4

**) As restated, refer to Note 4*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024*) Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas:			***Cash received:***
Penerimaan kas dari pendapatan premi asuransi	20,329,505	18,602,663	*Cash received from insurance premium income*
Penerimaan kas dari imbal jasa penjaminan	10,753,998	15,738,084	*Cash received from guarantee fee income*
Penerimaan kas dari subrogasi, klaim reasuransi, dan klaim retrosesi	4,032,893	4,079,963	*Cash received from subrogation, reinsurance claims, and retrocession claims*
Penerimaan kas dari klaim penjaminan ulang	78,273	46,147	*Cash received from reguarantee claims*
Penerimaan kas dari kegiatan manajer investasi, komisi perantara perdagangan efek, dan jasa penasihat keuangan	807,126	479,390	*Cash received from investment manager activities, brokerage commissions, and financial advisory services*
Penerimaan kas lainnya	5,433,870	4,081,199	*Cash received from others*
Pengeluaran kas:			***Cash disbursement:***
Pengeluaran kas untuk klaim	(32,372,481)	(36,669,012)	*Cash disbursement for claims*
Pengeluaran kas untuk komisi	(771,457)	(1,170,460)	*Cash disbursement for commissions*
Pengeluaran kas untuk premi reasuransi dan retrosesi	(3,864,946)	(4,339,052)	*Cash disbursement for reinsurance and retrocession premiums*
Pengeluaran kas untuk premi penjaminan ulang	25,058	(486,448)	*Cash disbursement for re-guarantee premiums*
Pengeluaran kas untuk pajak penghasilan badan	(677,099)	(982,221)	*Cash disbursement for corporate income tax*
Pengeluaran kas untuk beban umum dan *underwriting* lainnya	(4,727,631)	(3,603,168)	*Cash disbursement for general and other underwriting expenses*
Pengeluaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(543,452)	(148,728)	*Cash disbursement to supplier and other third parties*
Pengeluaran kas untuk lainnya	(3,581,249)	(2,559,843)	*Cash disbursement for others*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(5,077,592)**	**(6,931,486)**	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan aset tetap	6,282	6,677	*Sales of fixed assets*
Pembayaran uang muka Aset Cilandak	--	(94,800)	*Cilandak Asset advance payment*
Pembayaran atas pembelian Aset Cilandak	(200,000)	--	*Cilandak Asset Payment for the Purchase of*
Pembelian aset tetap dan properti investasi	(582,752)	(394,503)	*Acquisition of fixed assets and investment properties*
Pembayaran atas perolehan entitas anak	--	(1,939,000)	*Payment of acquitition of subsidiary*
Pelepasan investasi pada anak perusahaan	83	--	*Disposal of investment in subsidiary*
Penerimaan hasil investasi	7,875,871	5,491,975	*Investment income received*
Pencairan investasi	50,102,862	13,007,974	*Redemption of investments*
Penempatan investasi	(52,753,547)	(9,547,450)	*Placement of investments*
Pembayaran aktivitas investasi lainnya	(22,241)	(234,428)	*Payment of other investment activities*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	**4,426,558**	**6,296,445**	***Net cash flows provided by investing activities***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

	2025 Rp	2024*) Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang bank dan lembaga non-bank	182,792	122,126	*Proceeds from bank and non-bank institution loans*
Pembayaran utang bank dan lembaga non-bank	(1,569,779)	(1,654,849)	*Payment of bank and non-bank institution loans*
Pembayaran liabilitas sewa	(143,000)	(174,800)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran dividen	(54,988)	(56,786)	*Dividend payment*
Pelepasan *Medium Term Notes* ke Pihak Ketiga	--	50,000	*Disposal of Medium Term Notes to Third Party*
Pembayaran bunga utang bank	(140,540)	(255,662)	*Cash disbursement for interest of bank loan*
Pembayaran bunga *Medium Term Notes*	(94,500)	(94,500)	*Interest paid on Medium Term Notes*
Penerimaan dari penerbitan saham	--	3,556,000	*Proceeds from issuance of shares*
Pembayaran utang restrukturisasi	(90,661)	(86,347)	*Payment of restructuring debt*
Pembayaran pinjaman dari Pemerintah	(6,200)	(6,200)	*Payment of Government loans*
Aktivitas pendanaan lainnya	340,703	(58,128)	*Other financing activities*
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(1,576,173)**	**1,340,854**	***Net cash flows (used in) provided by financing activities***
Kenaikan/ (penurunan) bersih kas dan setara kas	**(2,227,207)**	**705,813**	***Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents***
Dampak bersih perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	15,339	204	*Net effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas pada awal tahun	**15,228,596**	**14,522,579**	***Cash and cash equivalents at the beginning of the year***
Kas dan setara kas dari entitas anak yang didekonsolidasi	(933)	--	*Cash and cash equivalents of deconsolidated subsidiary*
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**13,015,795**	**15,228,596**	***Cash and cash equivalents at the end of the year***

1. Umum

1.a. Pendirian dan informasi umum

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali, S.H., No. 11 tanggal 17 April 1973 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. YA.5/191/20 tertanggal 22 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973, Tambahan No. 508/1973.

Pada saat pendirian, Perseroan adalah lembaga keuangan sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan No. 444/KMK/017/1993 tertanggal 23 Maret 1993, yang memberi izin usaha lembaga pembiayaan kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan kartu kredit.

Dalam perkembangannya, maksud dan tujuan Perseroan telah mengalami perubahan dan terakhir sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Akta No. 07 tertanggal 6 April 2020, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H., M.kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0029706.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 April 2020, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0186829 tanggal 14 April 2020, yaitu sebagai perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas perusahaan *holding* termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain;
- Aktivitas kantor pusat;

1. General

1.a. Establishment and general information

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 11 dated April 17, 1973 of Mohamad Ali, S.H., which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. YA.5/191/20 dated May 22, 1973, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973, Supplement No. 508/1973.

On the establishment date, the Company was a financial institution as stipulated in the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, which was subsequently revoked by the Decree No. 444/KMK/017/1993 dated March 23, 1993, which gave the Company license to engage in leasing, factoring, and credit card activities.

The Company's aims and objectives have undergone changes and the latest changes is as stated in the Company's Articles of Association, in accordance with the Deed No. 07 dated April 6, 2020, made before Notary Ashoya Ratam S.H., M.kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0029706.AH.01.02.Year 2020 dated April 14, 2020, and has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Acceptance Letter of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0186829 dated April 14, 2020, namely as a holding company in finance and investment as well as management consulting for the benefit of companies or other parties including micro businesses, small and medium enterprises, and optimizing the use of Company resources based on the principles of good corporate governance.

In accordance with Articles 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are as follows:

- *Holding company activities including establishing or participating in other entities;*
- *Head office activities;*

- Investasi langsung maupun tidak langsung;
- Aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; dan
- Aktivitas konsultasi manajemen.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 24 tanggal 19 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0037613 tanggal 14 Januari 2026 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0038529 tanggal 15 Januari 2026 oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor terdaftar di Graha CIMB Niaga Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Entitas Induk Perseroan adalah PT. Danantara Asset Management (Persero).

- *Direct or indirect investments;*
- *Company/assets restructuring activities; and*
- *Management consulting activities.*

In addition to the main business activities as referred to above, the Company may carry out business activities in order to optimize the use of resources owned by the Company.

The Company's Articles of Association have been amended several times, with the latest change is as stated in the Company's Articles of Association, in accordance with Deed Amendment to Articles of Association No. 24 dated December 19, 2025, made in presence of Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which has obtained the Notification Acceptance Letter for Amendment of Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0037613 dated January 14, 2026 and the Notification Acceptance Letter for Amendment of Company Data Number AHU-AH.01.09-0038529 dated January 15, 2026, issued by the Minister of Law of the Republic of Indonesia.

The Company is domiciled in Indonesia with its registered office at Graha CIMB Niaga 18th floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

The Company's Parent Entity is PT Danantara Asset Management (Persero).

1.b. Struktur entitas anak

Perseroan memiliki pengendalian pada entitas anak sebagai berikut:

1.b. The structure of subsidiaries

The Company has control in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries *)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2025 %	2024 %	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Tanggal pendirian/ *Date of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2025 Rp	2024 Rp
Penyertaan langsung/ *Direct investments*						
PT Bahana Artha Ventura ("BAV")	84.75%	84.75%	Modal ventura/ *Venture capital*	11 Maret/ *March* 1991	1,227,223	1,281,497
PT Bahana Sekuritas ("BS")	99.20%	99.20%	Penjamin emisi dan perantara pedagang efek/ *Securities brokerage and underwriting*	26 Juli/ *July* 1989	783,864	856,326
PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU")	52.88%	52.88%	Kepemilikan, pengelolaan dan penyewaan gedung/ *Building ownership, maintance and rental*	22 Agustus/ *August* 1989	818,218	798,956

Entitas anak/ *Subsidiaries *)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2025 %	2024 %	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Tanggal pendirian/ *Date of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2025 Rp	2024 Rp
PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")	60.00%	60.00%	Pengelola portofolio investasi, manajemen investasi dan penasihat investasi/ *Portfolio investment management, investment management and investment advisor*	10 Oktober/ *October* 1991	591,264	502,509
PT Bahana Mitra Investa ("BMI") [1)]	0.00%	99.10%	Jasa keuangan dan non keuangan bidang investasi/ *Financial and non financial services in the Investment sector*	15 Mei/ *May* 1997	--	988
PT Bahana Kapital Investa ("BKI")	99.97%	99.97%	Jasa konsultasi manajemen dan investasi/ *Management consulting and investment service*	12 April/ *April* 1993	20,619	43,211
PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo")	99.99%	99.99%	Penjaminan kredit/ *Loan guarantee*	1 Juli/ *July* 1970	30,857,443	32,358,328
PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")	99.99%	99.99%	Asuransi kerugian/ *General insurance*	11 Januari/ *January* 1971	31,448,626	30,521,712
PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja")	99.99%	99.99%	Asuransi kerugian/ *General insurance*	1 Januari/ *January* 1961	20,625,830	18,477,716
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	99.99%	99.99%	Asuransi kerugian/ *General insurance*	2 Juni/ *June* 1973	14,590,585	13,883,601
PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")	99.99%	99.99%	Asuransi jiwa/ *Life insurance*	22 Oktober/ *October* 2020	32,857,981	35,011,004
Penyertaan tidak langsung/ *Indirect investments*						
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	99.93%	99.93%	Penjaminan syariah/ *Sharia guarantee*	24 September/ *September* 2014	2,461,175	2,408,935
PT Reasuransi Nasional Indonesia ("Nasre")	99.99%	99.99%	Reasuransi/ *Reinsurance*	22 Agustus/ *August* 1994	7,944,422	8,914,790
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	99.99%	99.99%	Penjaminan syariah/ *Sharia guarantee*	29 November/ *November* 2012	3,279,004	2,986,402
PT Askrindo Mitra Utama	97.92%	97.92%	Jasa keagenan/ *Agency service*	7 Oktober/ *October* 1997	8,544	11,419
PT Asuransi Jasaraharja Putera	93.80%	93.80%	Asuransi kerugian/ *General insurance*	27 November/ *November* 1993	5,529,200	4,565,120
PT Asuransi Jiwa Inhealth ("Inhealth")	80.00%	80.00%	Asuransi jiwa/ *Life insurance*	6 Oktober/ *October* 2008	3,602,459	3,599,234
PT Mitracipta Polasarana	88.30%	88.30%	Jasa penyediaan dan penyewaan gedung/ *Building management and rental service*	24 November/ *November* 1994	62,510	57,686
PT Mitrasraya Adhijasa	99.00%	99.00%	Pembangunan dan pengelolaan gedung komersial dan jasa penyewaan dan penjualan ruangan atau bangunan/ *Construction and management of commercial buildings and leasing and selling of rooms or buildings*	6 Februari/ *February* 1997	321,063	310,131
PT Asuransi Jasindo Syariah	96.50%	96.50%	Asuransi syariah/ *Sharia insurance*	27 Januari/ *January* 2016	632,339	603,899
Mitra PT Sarana Jatim Ventura ("SJTiV")	61.10%	61.10%	Modal ventura/ *Venture capital*	5 Oktober/ *October* 1994	70,394	68,706

Entitas anak/ *Subsidiaries *)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2025 %	2024 %	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Tanggal pendirian/ *Date of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2025 Rp	2024 Rp
Mitra PT Sarana Sumbar Ventura ("SSBV")	47.12%	47.12%	Modal ventura/ *Venture capital*	17 April/ Apr-95	61,897	67,993
Mitra PT Sarana Kalteng Ventura ("SKTaV")	45.42%	45.42%	Modal ventura/ *Venture capital*	8 Mei/ *May* 1997	78,741	82,116
Mitra PT Sarana Kaltim Ventura ("SKV")	58.53%	58.53%	Modal ventura/ *Venture capital*	15 Juni/ *June* 1995	104,627	103,264
Mitra PT Sarana Jakarta Ventura ("SJAV")	99.33%	99.33%	Modal ventura/ *Venture capital*	5 Februari/ *February* 1998	73,630	75,801
Mitra PT Sarana NTB Ventura ("SNTBV")	34.35%	34.35%	Modal ventura/ *Venture capital*	5 Desember/ *December* 1995	90,566	88,662
Mitra PT Sarana Kalsel Ventura ("SKSelV")	47.82%	47.82%	Modal ventura/ *Venture capital*	20 Juni/ *June* 1997	74,648	71,232
Mitra PT Sarana Lampung Ventura ("SLV")	53.35%	53.35%	Modal ventura/ *Venture capital*	27 Mei/ *May* 1995	39,897	42,313
Mitra PT Sarana Jateng Ventura ("SJTaV")	27.70%	27.70%	Modal ventura/ *Venture capital*	16 Oktober/ *October* 1994	45,191	51,451
Mitra PT Sarana Yogya Ventura ("SYV")	59.77%	59.77%	Modal ventura/ *Venture capital*	10 Oktober/ *October* 1994	49,875	49,322
Mitra PT Sarana Kalbar Ventura ("SKBar")	48.72%	48.72%	Modal ventura/ *Venture capital*	21 Juni/ *June* 1995	30,540	34,912
Mitra PT Sarana Surakarta Ventura ("SSV")	29.79%	29.79%	Modal ventura/ *Venture capital*	26 April/ April 1995	34,636	36,906
Mitra PT Sarana Jabar Ventura ("SJBV")	59.04%	59.04%	Modal ventura/ *Venture capital*	28 Oktober/ *October* 1994	20,780	22,881
Mitra PT Sarana Riau Ventura ("SRV")	40.75%	40.75%	Modal ventura/ *Venture capital*	23 Juli/ *July* 1996	4,103	10,537
Mitra PT Sarana Jambi Ventura ("SJV")	35.40%	35.40%	Modal ventura/ *Venture capital*	22 Mei/ *May* 1995	10,848	11,098
Mitra PT Sarana Sulsel Ventura ("SSSelV")	55.00%	55.00%	Modal ventura/ *Venture capital*	1 Desember/ *December* 1994	44,231	48,139
Mitra PT Sarana Bengkulu Ventura ("SBeV")	69.82%	69.82%	Modal ventura/ *Venture capital*	18 Oktober/ *October* 1997	3,112	3,625
Mitra PT Sarana Sulteng Ventura ("SSTengV")	49.74%	49.74%	Modal ventura/ *Venture capital*	25 Maret/ *March* 1997	10,130	10,768
Mitra PT Sarana Sultra Ventura ("SSTraV")[2]	0.00%	89.94%	Modal ventura/ *Venture capital*	30 Oktober/ *October* 1996	--	8,026
Mitra PT Sarana Sulut Ventura ("SSUtV")[3]	0.00%	41.47%	Modal ventura/ *Venture capital*	6 Oktober/ *October* 1995	--	8,565
Mitra PT Sarana Papua Ventura ("SPV")	40.90%	40.90%	Modal ventura/ *Venture capital*	11 April/ April 1996	1,866	1,978
PT Nusasarana Pradipta	70.00%	70.00%	Restoran dan ruang serbaguna/ *Restaurant and function hall*	20 Oktober/ *October* 1994	18,466	17,672

*) Entitas anak seluruhnya berdomisili di Indonesia
1) Tidak lagi dikonsolidasi sejak 18 Juni 2025
2) Pencabutan izin usaha per tanggal 10 Desember 2024
3) Pencabutan izin usaha per tanggal 17 Juni 2025

**) All subsidiaries are incorporated and domiciled in Indonesia*
1) The entity ceased to be consolidated effective 18 June 2025
2) The entity's business license was revoked on 10 December 2024
3) The entity's business license was revoked on 17 June 2025

1.c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1.c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Employees

As of December 31, 2025, and 2024 the composition of the Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows:

	2025	2024	
Dewan Komisaris:			***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Mohamad Fauzi M Ichsan[3)]	Mohamad Fauzi M Ichsan	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Masyita Crystallin[4)]	Masyita Crystallin	*Commissioner*
Komisaris	Nasrudin	Nasrudin	*Commissioner*
Komisaris	Sumiyati	Sumiyati	*Commissioner*
Komisaris	Wahyu Setiawan[5)]	Wahyu Setiawan[1)]	*Commissioner*
Komisaris Independen	Hotbonar Sinaga[6)]	Hotbonar Sinaga	*Independent Commissioner*
Direksi:			***Board of Directors:***
Direktur Utama	Hexana Tri Sasongko	Hexana Tri Sasongko	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Haru Koesmahargyo	Haru Koesmahargyo	*Vice President Director*
Direktur	Rizal Ariansyah	Rizal Ariansyah	*Director*
Direktur	Rianto Ahmadi	Rianto Ahmadi	*Director*
Direktur	Heru Handayanto	Heru Handayanto	*Director*
Direktur	-	Pantro Pander Silitonga[2)]	*Director*
Komite Audit:			***Audit Committee:***
Ketua	Mohamad Fauzi M Ichsan	Mohamad Fauzi M Ichsan	*Chairman*
Anggota	Ika Istakariana	Ika Istakariana	*Member*
Anggota	Masyita Crystallin	Masyita Crystallin	*Member*
Anggota	Sumiyati	Sumiyati	*Member*
Anggota	Sartono[7)]	-	*Member*

1) Efektif diangkat pada tanggal 3 Januari 2024
2) Efektif diberhentikan dengan hormat pada tanggal 17 Desember 2024
3) Efektif diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Desember 2025
4) Efektif diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Desember 2025
5) Mengundurkan diri pada Juli 2025
6) Efektif diberhentikan dengan hormat pada tanggal 20 November 2025
7) Efektif diangkat pada tanggal 11 Maret 2025

1) Effectively appointed on January 3, 2024
2) Effectively dismissed with honor on December 17, 2024
3) Effectively dismissed with honor on December 31, 2025
4) Effectively dismissed with honor on December 31, 2025
5) Resigned in July 2025
6) Effectively dismissed with honor on 20 November, 2025
7) Effectively appointed on March 11, 2025

Pada tanggal 31 Desember 2025 Perseroan memiliki 275 karyawan (2024: 304 karyawan) (tidak diaudit), sedangkan entitas anak memiliki 5.763 karyawan (2024: 5.672 karyawan) (tidak diaudit).

As of December 31, 2025, the Company employed 275 employees (2024: 304 employees) (unaudited), and subsidiaries employed 5,763 employees (2024: 5,672 employees) (unaudited).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material / *2. Material Accounting Policy Information*

Berikut ini adalah informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian:

Presented below are the material accounting policy information adopted in preparing the consolidated financial statements:

2.a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (”SAK”) Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

2.a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The Group’s consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard (“FAS”) which comprise the Statements and Intrepretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountant (“IIA”) and the Boards of Sharia Accounting Standards IIA.

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dengan asumsi kelangsungan usaha dan diukur berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan penilaian lain seperti dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun yang bersangkutan. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

The Group's consolidated financial statements have been prepared based on going concern assumption and measured under the historical cost convention except for certain accounts which are presented on the basis of other measurements, as stated in the respective accounting policies of the relevant accounts. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan kas pada bank mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

The consolidated statement of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into operating, investing, and financing activities. For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash in bank include cash on hand and cash in banks which are not restricted and placed as collateral for any borrowings.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Figures in the consolidated financial statements are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain ("PKL") disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

The items under Other Comprehensive Income ("OCI") are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and items not to be reclassified to profit or loss.

Kebijakan akuntansi signifikan telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

The accounting policies were consistently applied in the preparation of the consolidated financial statements to all years presented, unless otherwise stated.

2.b. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup.

2.b. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian FAS requires the use of certain critical accounting estimates and asumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode di mana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are material to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

2.c. Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

2.c. New accounting standard and amendment to standards which have been effective in the current year

Amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran;
- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Amendment and revised to standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability;*
- *PSAK 117: Insurance Contract; and*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information.*

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 109: Instrumen Keuangan
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 207: Laporan Arus Kas
- PSAK 216: Aset Tetap
- PSAK 219: Imbalan Kerja
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
- PSAK 238: Aset Takberwujud
- PSAK 240: Properti Investasi

Several PSAK were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 103: Business Combination*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures*
- *PSAK 109: Financial Instruments*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers*
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows*
- *PSAK 216: Fixed Assets*
- *PSAK 219: Employee Benefits*
- *PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures*
- *PSAK 232: Financial Instruments: Presentation*
- *PSAK 236: Impairment of Asset*
- *PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*
- *PSAK 238: Intangible Assets*
- *PSAK 240: Investment Property*

Pada tanggal 1 Januari 2025, Grup telah menerapkan PSAK 117: Kontrak Asuransi dan PSAK 109: Instrumen Keuangan, termasuk seluruh amendemen konsekuensial terhadap standar akuntansi keuangan lainnya yang relevan.

As of January 1, 2025, the Group adopted PSAK 117: Insurance Contracts and PSAK 109: Financial Instruments, including all consequential amendments to other relevant financial accounting standards.

Penerapan standar-standar tersebut mengakibatkan perubahan yang material terhadap kebijakan akuntansi Grup, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi dan reasuransi, serta klasifikasi, pengukuran, dan penurunan nilai instrumen keuangan.

The adoption of these standards resulted in material changes to the Group's accounting policies, particularly with respect to the recognition, measurement, presentation, and disclosure of insurance and reinsurance contracts, as well as the classification, measurement, and impairment of financial instruments.

Sehubungan dengan penerapan PSAK 117 dan PSAK 109 tersebut, Grup telah melakukan penyesuaian atas saldo awal pada tanggal penerapan awal dan menyajikan kembali (restatement) informasi komparatif yang relevan sesuai dengan ketentuan transisi yang berlaku. Informasi mengenai dampak penerapan PSAK 109 dan PSAK 117 diungkapkan dalam Catatan 4.

In connection with the adoption of PSAK 117 and PSAK 109, the Group adjusted its opening balances as of the date of initial application and restated the relevant comparative information in accordance with the applicable transition requirements. Information regarding the impact on the implementation of PSAK 109 and PSAK 117 are disclosed in Note 4.

Sebagai konsekuensinya, Grup menyajikan laporan posisi keuangan untuk tiga periode pelaporan, termasuk laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2024 sebagai awal periode komparatif.

Accordingly, the Group presents statements of financial position for three reporting periods, including the statement of financial position as of January 1, 2024 as the beginning of the comparative period.

Selain penerapan PSAK 117 dan PSAK 109 sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Catatan 35, penerapan standar baru, amendemen, dan interpretasi lainnya yang berlaku efektif pada periode berjalan tidak menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Other than the adoption of PSAK 117 and PSAK 109 as further described in Note 35, the adoption of the other new standards, amendments, and interpretations effective in the current period did not have a material impact on the Group's financial statements.

2.d. Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas

2.d. Principles of consolidation and equity accounting

Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas anak seperti yang disebutkan pada Catatan 1.b dimana Perseroan memiliki pegendalian.

Subsidiary

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries as mentioned in Note 1.b in which the Company has control.

Pengendalian diperoleh ketika Perseroan terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Secara

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiary. Specifically, the Company controls an subsidiary if, and only if, the

khusus, Perseroan mengendalikan entitas anak jika, dan hanya jika, Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas entitas anak, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi entitas induk kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas anak;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Company has all of the following:

- *power over the subsidiary, which is existing rights that give the parent current ability to direct the relevant activities of the subsidiary;*
- *exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the subsidiary; and*
- *the ability to use its power over the subsidiary to affect its returns*

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas entitas anak, tersebut:

- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
- hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara dan hak suara potensial Grup.

When the Group has less than a majority of the voting, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an subsidiary, including:

- *the contractual arrangement(s) with the other vote holders of the investee;*
- *rights arising from other contractual arrangements; and*
- *the Group's voting rights and potential voting rights.*

Grup menilai kembali apakah masih mengendalikan entitas anak jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

The Group reassesses whether it controls an subsidiary if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Group obtains control over the Subsidiary and ceases when the Group loses control of the Subsidiary.

Kepentingan Non Pengendali mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laba rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Grup.

Non-controlling Interests represents the portion of profit or loss and net assets of Subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Group, which are presented in profit or loss and under the equity section in the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the Group.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk Grup dan KNP, meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the Group and to the NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance.

Grup melakukan eliminasi secara penuh atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas untuk seluruh transaksi, saldo dan keuntungan/kerugian yang belum terealisasi, yang material dan berasal dari transaksi antar Perusahaan di dalam Grup telah dieliminasi. PSAK 212: Pajak Penghasilan telah diterapkan untuk perbedaan temporer sebagai akibat penghapusan laba dan rugi yang timbul dari transaksi dalam Grup.

The Group fully eliminates assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows for all material transactions, balances and unrealized gains/losses arising from transactions between companies within the Group. SFAS 212: Income Taxes has been applied to temporary differences arising from the elimination of profits and losses resulting from intercompany transactions within the Group.

Grup menghitung eliminasi menggunakan hasil rekonsiliasi dari masing-masing anak perusahaan dalam Grup dan menerapkan asumsi dan metodologi alokasi pada level kontrak asuransi untuk menentukan total alokasi yang harus dieliminasi setiap periode pelaporan.

The Group calculates the elimination using reconciliation result from each subsidiary in the Group and applies assumptions and allocation methodology at the insurance contract level to determine the total allocation that should be eliminated in each reporting period.

Jika terdapat transaksi antar Perusahaan di dalam Grup yang dicatat di masing-masing Perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi, asumsi dan/atau metodologi yang berbeda dan diterima oleh Grup, maka selisih yang timbul saat proses eliminasi, akan diakui pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

If intercompany transactions within the Group are recorded by each company using different accounting policies, assumptions, and/or methodologies accepted by the Group, any differences arising during the elimination process will be recognized in the Group's consolidated financial statements.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali bila dinyatakan lain.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by subsidiaries unless otherwise stated.

Pada laporan keuangan konsolidasian Grup, kebijakan akuntansi entitas anak disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Grup.

In the Group's consolidated financial statements, accounting policies of subsidiaries have been adjusted where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Grup:

Changes in Group's ownership interest in a Subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi konsolidasian; dan

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes any surplus or deficit in the consolidated profit or loss; and*
- *recognizes any surplus or deficit in the consolidated profit or loss; and*

- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.*

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investment in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas entitas asosiasi yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the associates after the date of acquisition. Distributions received from an associates reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the associate arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences.The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

(a) jika investasi menjadi entitas anak;
(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar;
(c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

(a) if the investment becomes a subsidiary;
(b) if the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value;
(c) when the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2g.

Dividends received or receivable from associates or are recognised as deduction of the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investment is tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2g.

2.e. Penjabaran mata uang asing

2.e. Foreign currency translation

Mata uang fungsional dan penyajian
Beberapa item yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Group.

Transaksi dan saldo
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kelompok kontrak asuransi dan reasuransi yang menghasilkan arus kas dalam mata uang asing, termasuk marjin jasa kontraktual, diperlakukan sebagai pos moneter.

Namun, selisih mata uang asing yang timbul dari penjabaran kelompok kontrak asuransi dan reasuransi sepanjang perbedaan mata uang asing terkait dengan perubahan nilai tercatat kelompok diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Jumlah yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lainnya adalah selisih antara total selisih mata uang asing dan jumlah yang termasuk dalam laba rugi. Jumlah yang dimasukkan dalam laba rugi adalah selisih antara pengukuran kelompok yang digunakan untuk menentukan pendapatan dan beban keuangan asuransi dalam laba rugi tahun berjalan dalam mata uang fungsional pada awal tahun, disesuaikan dengan bunga

Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing on the consolidated statement of financial position date.

Groups of insurance and reinsurance contracts that generate cash flows in a foreign currency, including the contractual service margin, are treated as monetary items.

However, foreign currency differences arising from the translation of groups of insurance and reinsurance contracts to the extent that the foreign currency differences relate to changes in the carrying amount of the groups are recognized in other comprehensive income. The amount included in other comprehensive income is the difference between the total foreign currency differences and the amount included in profit or loss. The amount included in profit or loss is the difference between the measurement of the group that is used to determine the insurance finance income and expenses in profit or loss in the year in the functional currency at the beginning of the

akresian dan pembayaran selama tahun berjalan, dan pengukuran yang sama dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs pada akhir tahun.

year, adjusted for accreted interest and payments during the year, and the same measurement in the foreign currency translated at the exchange rate at the end of the year.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign exchange transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the consolidated profit or loss.

Kurs nilai tukar yang digunakan oleh Grup untuk menjabaran mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

The exchange rates used by the Group to translate foreign currencies into Rupiah in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025 and 2024 are as follows (in full Rupiah):

	2025 Rp	2024 Rp	
Dolar Amerika Serikat (USD)	16,782	16,162	*United States Dollar (USD)*
Dolar Singapura (SGD)	13,069	11,919	*Singaporean Dollar (SGD)*
Euro (EUR)	19,753	16,851	*Euro (EUR)*
Yen Jepang (JPY)	10,759	10,236	*Japanese Yen (JPY)*
Poundsterling Inggris (GBP)	22,666	20,333	*Great Britain Poundsterling (GBP)*

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian, dan perubahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada laba komprehensif konsolidasian lainnya.

Changes in the fair value of monetary securities denominated in foreign currency classified as fair value to other comprehensive income are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in the consolidated profit or loss, and fair value through other comprehensive income are recognised in the consolidated other comprehensive income.

2.f. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 224 - "Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

2.f. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties in accordance with SFAS 224 - "Related Party Disclosures". This transaction is based on the terms agreed by both parties, where these requirements may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

i. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
   2. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
   3. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

ii. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
   2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (i);
   7. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (i) (1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan

A related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follows:

i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   1. Has control or joint control of the reporting entity;
   2. Has significant influence over the reporting entity; or
   3. Is member of the key management personnel of the reporting entity or parent of the reporting entity,

ii. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   1. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   2. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   3. Both entities are joint ventures of the same third party;
   4. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   5. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   6. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (i);
   7. A person identified in (i) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); and

8. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

8. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

A goverment affiliated entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government.

Pemerintah yang dimaksud oleh Grup sebagai pihak berelasi adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Milik Negara yang dimiliki langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Anak Perusahaan, namun tidak termasuk Perusahaan Milik Pemerintah Daerah. Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 44.

The Government referred to by the Group as a related party is the Government of the Republic of Indonesia and State-Owned Companies which are directly owned by the Government of Indonesia and the Subsidiaries, but do not include Local Government-Owned Companies. The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the Note 44.

2.g. Instrumen keuangan

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Grup berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut, serta berdasarkan dengan PSAK 109 “Instrumen Keuangan”:

2.g. Financial instruments

The following table presents the classification of the Group's financial instruments based on the characteristics of these financial instruments, as well as in accordance with SFAS 109 “Financial Instruments”:

Kategori yang diidentifikasikan pada PSAK 109/ ***Category as defined by SFAS 109***		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/** ***Classes (as determined by the Group)***	**Sub-golongan/** ***Sub-classes***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL")*	Investasi/ *Investments*	Obligasi/ *Bonds*
			Saham/ *Shares*
			Reksadana/ *Mutual funds*
			Efek beragun aset/ *Asset-backed securities*
			Dana investasi infrastruktur/ *Infrastructure investment fund*
			Investasi unit link/ *Unit-linked investment*
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets measured at amortised cost ("AC")*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*	
		Investasi/ *Investments*	Obligasi/ *Bonds*
			Deposito berjangka/ *Time deposits*
			Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ *Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*
		Piutang penjaminan ulang/ *Re-guarantee receivables*	
		Piutang pembiayaan modal ventura/ *Venture capital financing receivables*	
		Piutang hasil investasi/ *Investment income receivables*	
		Aset Lain-lain/ *Other assets*	Uang jaminan/ *Security deposits*
			Bank yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash in bank*
			Lainnya/ *Others*
	Aset keuangan pada nilai wajar diukur melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets measured at other comprehensive income ("FVOCI")*	Investasi/ *Investments*	Obligasi/ *Bonds*
			Saham/ *Shares*

Kategori yang diidentifikasikan pada PSAK 109/ *Category as defined by SFAS 109*		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/ *Classes (as determined by the Group)***	**Sub-golongan/ *Sub-classes***	
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities measured at amortised cost ("AC")*	Utang klaim penjaminan/ *Guarantee claim payables*		
		Utang penjaminan ulang/ *Re-guarantee payables*		
		Utang usaha dan utang lain-lain/ *Accounts payable and other payables*	Utang usaha/ *Accounts payable*	
			Liabilitas lain-lain/Other liabilities	Titipan premi dan imbal jasa penjaminan/ *Premium and guarantee fee income deposits*
				Pinjaman non-bank/ *Non-bank loans*
				Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*
				Uang jaminan/ *Cash collateral*
				Lainnya/ *Others*
		Akrual/ *Accruals*		
		Utang restrukturisasi/ *Restructuring debt*		
		Pinjaman dari Pemerintah/ *Government loans*		
		Utang bank/ *Bank loans*		
		Medium Term Notes ("MTN")/ *Medium Term Notes ("MTN")*		
		Liabilitas kontrak jaminan keuangan/ *Liabilities for financial guarantee contracts*		

i. Aset keuangan

Untuk menentukan kategori dan klasifikasi, Grup menilai seluruh aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, berdasarkan kombinasi dari model bisnis Grup dalam pengelolaan aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga (*solely payment of principal and interest* atau "SPPI") dari aset keuangan. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"); dan
- biaya perolehan diamortisasi ("AC").

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ("AC")

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang ("SPPI").

i. Financial assets

To determine categories and classifications, the Group assesses all financial assets, except equity and derivative instruments, based on a combination of Group's business model in managing the financial assets and the characteristics of contractual cash flow of the financial assets solely payment of principal and interest ("SPPI"). The Group classifies its financial assets in the following categories:

- *fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- *fair value through other comprehensive income ("FVOCI"); and*
- *amortised cost ("AC").*

Financial assets measured at amortised cost ("AC")

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:

- *the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and*
- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI").*

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).

Financial assets measured at amortised cost are initially recognised at fair value including transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses (if any).

Biaya transaksi mencakup seluruh imbalan dan provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Transaction cost includes all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian dan diakui sebagai "hasil investasi - bersih".

Interest income from financial assets measured at amortised cost is recorded in the consolidated profit or loss and is recognised as "investment income - net".

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai".

When an impairment occurs, an impairment loss is recognised as a deduction from the carrying value of financial assets and is recognised in the consolidated financial positions as "allowance for impairment losses".

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI")

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang ("SPPI").

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI")

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*
- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI").*

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

At initial recognition, financial instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at fair value where gains or losses on changes in fair value, gains or losses on foreign exchange, and impairment losses are recognised as other comprehensive income.

Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Dividend from equity instrument is recognised in profit or loss.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah/pengurang dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Expected credit losses are recognised as addition/deduction to other comprehensive income in the consolidated statement of financial statements (not reducing the carrying amount of financial assets in the consolidated financial statements). Interest income is calculated using the effective interest method.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (”FVTPL”)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVOCI.

Financial assets measured at fair value through profit or loss (“FVTPL”)
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat *(held for trading)* untuk diukur pada FVOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasikan ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in the form of derivatives and investments in equity instruments do not meet the criteria for measurement at amortized cost or FVOCI. Therefore, they are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument, which is not intended for trading, as FVOCI at the time of initial recognition. This designation results in gains or losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata
Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest
For the purposes of this assessment, ‘principal’ is defined as the fair value of the financial assets on initial recognition. ‘Interest’ is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount

terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Grup mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage;*
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Grup atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis
Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Grup. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Grup menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih *granular* (misalnya: sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada

outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Group considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Early redemption and extension terms;*
- *Terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Business model assessment
Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Group. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Group assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e., sub-portfolios or subbusiness lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and*

manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen.
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Grup dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Grup untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 109 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga, Grup mempertimbangkan persyaratan kontraktual instrumen, termasuk apakah aset keuangan memiliki persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management.
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Group reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Group did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

The selection of the operating model for SFAS 109 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Changes to the business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Group can reclassify all of its financial assets if and only if, its business model for managing those financial assets changes.

In assessing whether the contractual cash flows are solely payment of principal and interest, the Group considers the contractual terms of the instrument, including assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows. In making the assessment, the Group considers:

- peristiwa kontinjensi yang dapat merubah jumlah dan waktu dari arus kas kontraktual;
- fitur pengungkit (*leverage*);
- persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan;
- persyaratan yang membatasi klaim Grup atas arus kas dari aset tertentu; dan
- fitur yang memodifikasi nilai waktu uang dari imbalan (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Instrumen ekuitas yang memiliki arus kas kontraktual tidak memenuhi kriteria semata dari pembayaran pokok dan bunga. Oleh karena itu, seluruh aset keuangan ini akan diukur pada FVTPL kecuali opsi diukur pada FVOCI dipilih.

Jika Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

(a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar;

(b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;

(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyedikan pinjaman

- *contingent events that would change the amount and timing of contractual cash flows;*
- *leverage features;*
- *prepayment and extension terms;*
- *terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets; and*
- *features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Equity instruments which have contractual cash flows do not meet the solely payment of principal and interest criterion. Accordingly, all such financial assets are measured at FVTPL unless the FVOCI option is selected.

Where Group has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

ii. Financial liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

(a) Financial liabilties at fair value through profit ot loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value;

(b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies;

(c) Financial guarantee contract and commitments to provide a loan at a

dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

(i) jumlah penyisihan kerugian; dan

(ii) jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.

(d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

(a) Mengeleminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai *"accounting mismatch")* yang dapat timbul dari pengakuan aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau

(b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

iii. Pengakuan awal

Pengakuan Grup menggunakan akuntansi tanggal transaksi untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

iv. Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset

below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:

(i) the amount of the loss allowance; and

(ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of SFAS 115.

(d) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which SFAS 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with change recognised in profit or loss.

At initial recognition, the Group may irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profir or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

(a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

(b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and its perfomance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

iii. Initial recognition

The Group uses trade date accounting for regular contracts when recording financial assets transactions.

iv. Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred

keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Grup melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Group evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition).

Grup menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Grup menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan penerbit aset keuangan sehingga penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

The Group writes-off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Group determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of financial asset's issuer such that the financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

v. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

v. Off-setting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak bersifat kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

The legally enforceable rights must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

vi. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup

vi. Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at the date. The fair value of a liability reflects its

memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

nonperformance risk.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, badan pengawas, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid offer spread and there are few recent transactions.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar aktif dari sumber yang dapat dipercaya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk saham, nilai aset bersih untuk investasi *unit link* dan reksadana, tetapi tidak termasuk yang berasal dari Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI").

Fair value of financial instruments traded in active market is determined based on quoted market prices at the consolidated statement of financial position date from credible sources. This includes share prices from shares prices indexes at Indonesia Stock Exchange for shares price, net assets value for unit-linked investments and mutual funds, but does not include IBPA's (Indonesia Bond Pricing Agency) quoted price.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan estimasi arus kas terhadap aset bersih dari instrumen keuangan tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair value are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques,

arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan *input* yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

using available inputs at the dates of the consolidated statement of financial position.

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali nilai wajar dari instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa modifikasi atau *repackaging*) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

The best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price (the fair value of the consideration given or received), unless the fair value of that instrument is proved by comparison with other observable current market transactions for the same instrument (that is, without modification or repackaging) or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.

vii. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Grup mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Grup, kecuali untuk semua pembiayaan produktif segmentasi UKM BAV yang menggunakan model umum untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian ("KKE"), dengan menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian seumur hidup.

vii. Impairment of financial assets

The Group assesses at each reporting date whether the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Group applies the simplified method to measure expected credit losses against the Group's financial assets, except for all productive financing SME segmentation from BAV that uses general model to measure expected credit losses ("ECL"), using a lifetime expected loss allowance.

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian ("KKE") 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime* ECL). *Lifetime* ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan KKE 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

SFAS 109 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses ("ECL") or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

ECL diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *AC & FVOCI* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

ECL are recognised for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as AC & FVOCI and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognised for equity instruments designated at FVOCI.

2.h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta intensi dan penggunaannya bukan untuk tujuan investasi.

2.h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks current accounts and time deposits with maturity period three months or less at the time of placement that are not restricted and not placed as collateral and the intention and usage are not for investment purposes.

2.i. Investasi

Deposito wajib dan berjangka

Deposito wajib dan berjangka dicatat sebesar nilai nominal.

2.i. Investment

Statutory and time deposits

Statutory and time deposits are stated at nominal value.

Efek-efek

Efek-efek terdiri dari saham, obligasi, sukuk, *medium term notes*, reksadana, investasi *unit link,* efek beragun aset, dan dana investasi infrastruktur. Efek-efek diklasifikasikan atas dasar tujuan atau intensi dari manajemen Grup dalam mengelola investasi tersebut.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, dan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Lihat Catatan 2g untuk kebijakan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, dan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Marketable securities

Marketable securities consist of shares, bonds, sukuk, medium term notes, mutual funds, unit-linked investment, asset-backed securities, and infrastructure investment fund. Marketable securities are classified based on Group's management purpose or intention of maintaining such investments.

All marketable securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss, financial assets at amortised cost, and financial assets at other comprehensive income. Refer to Note 2g for the accounting policies of financial assets at fair value through profit or loss, financial assets at amortised cost, and financial assets at other comprehensive income.

Investasi pada sukuk

Investasi sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Grup berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Investments in sukuk

Investments in sukuk are classified based on business model defined by the Group in accordance with SFAS 410 on "Accounting for Sukuk" as follows:

1. *At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.*
2. *At fair value through profit or loss securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in the current year consolidated profit or loss.*

3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

3. At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in the current year consolidated other comprehensive income.

2.j. Piutang usaha dan piutang lain-lain – bersih

Piutang usaha dan piutang lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Piutang usaha terdiri atas: piutang jasa penasehat keuangan; piutang nasabah; piutang lembaga kliring dan penjaminan; piutang atas efek; piutang usaha pengelolaan dana; piutang sewa; piutang komisi penjaminan ulang, piutang klaim syariah; dan piutang imbal jasa kafalah.

Piutang lain terdiri atas: piutang pemulihan klaim; pinjaman bagi hasil; piutang koperasi; pinjaman yang diberikan kepada karyawan; dan lain-lain.

Piutang lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Grup menelaah penurunan piutang secara berkala. Lihat Catatan 2g untuk kebijakan akuntansi penurunan nilai aset keuangan.

2.j. Accounts receivable and other receivables – net

Accounts receivable and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Accounts receivable consists of: financial advisory service receivable; customer receivable; clearing and guarantee institution receivable; securities receivable; fund management service receivable; lease receivable; co-guarantee commission receivable; sharia claim receivable; and kafalah fee receivables.

Other receivables consist of: claim recovery receivables; profit sharing loan; receivables from cooperative; employee receivables; loans; and others.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group.

The Group review the impairment in receivables periodically. Refer to Note 2g for the accounting policies of financial assets impairment.

2.k. Piutang imbal jasa penjaminan – bersih

Piutang Imbal Jasa Penjaminan (“IJP”)/ Imbalan Jasa *Kafalah* (“IJK") Kredit Usaha Rakyat (“KUR”) dan Non-KUR diakui ketika terbitnya Sertifikat Penjaminan (“SP”)/Sertifikat Kafalah (“SK”) termasuk ulang tahun SP/SK khusus KUR skema subsidi IJP.

Piutang IJP/IJK terdiri dari Piutang Imbal Jasa Penjaminan KUR kepada Pemerintah dan Piutang Imbal Jasa Penjaminan (KUR skema subsidi bunga dan Non-KUR) kepada Penerima Jaminan (Bank dan Non-Bank).

2.k. Guarantee fee receivables – net

Guarantee fee/Kafalah Fee (”IJK”) Kredit Usaha Rakyat (”KUR”) and Non-KUR receivables are recognised when the Certificate of Guarantee (“SP”)/Certificate of Kafalah (“SK”) is issued including the anniversary of the SP/SK specifically for the KUR IJP subsidy scheme.

Receivables from IJP/IJK consist of Receivables for Return on Guarantee Services from KUR to the Government and Receivables for Guarantee Services (KUR with interest subsidy schemes and Non-KUR) to Beneficiaries (Banks and Non-Banks).

2.l. Piutang penjaminan ulang – bersih

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra penjaminan bersama dan mitra penjaminan ulang dicatat sebagai piutang jaminan bersama.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang pada saat mitra mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Grup dengan Mitra), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat diterbitkannya SOA *(Statement of Account)*, namun pembayaran belum dilakukan.

2.l. Re-guarantee receivables – net

Payment of claims to the sole recipient of a guarantee that partners co-guarantee and partners re-guarantee are recorded as a co-guarantee receivable in the settlement.

Receivables in the settlement are recognised as receivables in the completion of when partners accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the Agreement of Cooperation between the Group with partners), but payment has not been done.

Receivables in the settlement are recognised as a receivables co-guarantee at the time of the SOA (Statement of Account), but the payment has not been made.

2.m. Penjaminan ulang dibayar dimuka

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban *fee based income* bank pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan/*Kafalah*.

Berkaitan dengan mekanisme pembayaran IJP yang dilakukan secara tahunan khusus penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional (“PEN”), KUR skema subsidi IJP, KUR skema subsidi bunga maka pengukuran atas biaya reasuransi dibayar dimuka dan biaya *loss limit* dibayar dimuka juga berbanding lurus dengan pengakuan piutang IJP dan pendapatan IJP ditangguhkan.

2.m. Prepaid re-guarantee

Prepaid co-guarantee expense, re-guarantee expense, fee based income of banks implementing and agent commission expense are amortised proportionally to follow the pattern of revenue recognition Guarantee/ Kafalah Fee.

In regards with the annual IJP payment mechanism specifically for National Economic Recovery (“PEN”) guarantee program, IJP subsidy scheme KUR, interest subsidy scheme KUR, the measurement of prepaid reinsurance costs and prepaid loss limit fees is also directly proportional to the recognition of IJP receivables and deferred IJP income.

2.n. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

2.n. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Tanah tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Land is not depreciated. After initial recognition, the other fixed assets are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan	10 - 50	*Buildings*
Peralatan	4 - 5	*Equipment*
Kendaraan	4 - 5	*Vehicles*
Aset tetap lainnya	4 - 5	*Other fixed assets*

Aset Dalam Penyelesaian (“ADP”) merupakan akumulasi biaya konstruksi bangunan, biaya material, dan biaya lainnya dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Construction In Progress (“CIP”) is an accumulated costs of the construction of buildings, material costs and other costs are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun pelaporan.

The assets’ residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting year.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in the consolidated profit or loss when disposed and could not be classified as revenue.

2.o. Aset takberwujud

Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap

2.o. Intangible assets

Intangible assets are initially recognised at cost. The cost of acquisition of intangible assets consists of the purchase price, including import duties and taxes that can not be restituted on purchase, net of discounts and rebates and all the costs that are directly attributable to preparing the asset so it is ready for use. The Group also recognises intangible

untuk digunakan. Grup juga mengakui aset takberwujud yang berasal dari perjanjian pembangunan, pengoperasian dan pengalihan karena Grup memiliki hak untuk memperoleh bangunan, yang dibangun dan dikelola oleh pihak lain (“pengelola”), di atas tanah Grup pada akhir masa perjanjian.

asset arising from a build, operate, and transfer agreement as the Group receives the right to obtain a building, that was built and managed by other party (“operator”), on its land at the end of agreement period.

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, intangible assets are recorded at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Jumlah penyusutan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual). Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

Total depreciation of intangible assets with finite useful life are systematically allocated during their useful life. Amortisation begins when the asset is available for use, ie when the asset is at a location and in a condition to operate in the manner intended by management. Amortisation stopped at an earlier date between when the assets are classified as assets held for sale (or included in a loose group of assets classified as assets held for sale). The method of amortisation is used illustrates the expected pattern of consumption of the entity over the future economic benefits. If the pattern can not be determined reliably, the straight-line method is used.

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak komputer dan imbal hasil atas tanah Grup yang disewakan dalam skema bangun-kelola-serah (“BOT”) selama periode perjanjian BOT. Pada akhir masa perjanjian, Grup akan menerima fisik gedung yang dibangun di atas tanah tersebut sebagai kompensasi. Imbal hasil dicatat berdasarkan biaya pembangunan pengelola yang diakui secara bertahap menggunakan metode garis lurus sepanjang masa perjanjian BOT. Pada akhir perjanjian BOT, Grup akan mengakui aset bangunan pada Nilai wajar dan menghentikan pengakuan aset takberwujud dan pendapatan diterima di muka. Selisih yang timbul dari transaksi tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi tahun berjalan.

Intangible assets consist of computer software and compensation for the Group’s land that was leased under the build-operate-transfer (“BOT”) scheme during the BOT agreement period. At the end of the agreement, the Group will receive a building that was built on its land as compensation. The compensation is recorded based on operator’s construction cost that is recognised gradually using straight line method over the BOT agreement period. At the end of BOT agreement, the Group will recognise building at its fair value and derecognise intangible asset and unearned revenue. Difference arising from this transaction will be recognised as gain or loss in the current year profit or loss.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk perangkat lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada tahun berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent year.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari tiga tahun.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed three years.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Any gain or loss arising from derecognition (the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in the consolidated profit or loss when disposed and could not be classified as revenue.

2.p. Properti investasi

Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh Grup diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga mencakup properti yang sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan sebagai properti investasi di masa depan. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

2.p. Investment property

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the Group, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as investment property. Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan dan Prasarana serta perlengkapan gedung disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis masing-masing 20 tahun serta 15 tahun.

After initial recognition, Group chooses to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Land rights are not depreciated and are carried at costs. Building and Infrastructure also building equipments are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives 20 years and 15 years respectively.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Perubahan penggunaan terjadi ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan. Secara terpisah, perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan. Contoh bukti perubahan penggunaan mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Maintenance and repairment costs are charged to the consolidated profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalised.

The Group transfers property to, or from, investment property if, and only if, there is a change in use. A change in use occurs when a property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of a change in use. Separately, a change in management's intention to use a property does not represent evidence of a change in use. Examples of evidence of change of use include:

- *Commencement of owner-occupation, or owner-development, for the transfer from investment property to owner-occupied property;*
- *Commencement of development for sale, for a transfer from investment property to inventory;*
- *End of use by the owner, for the transfer from own-use property to investment property; and*
- *Inception of an operating lease to another party, for the transfer from inventory to investment property.*

An investment property is derecognised upon on disposal or when the investment property is no longer in use permanently and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in consolidated profit or loss and other comprehensive income in the period of the retirement or disposal.

2.q. Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan kemungkinan penyesuaian ke jumlah terpulihkan apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tersebut. Jumlah terpulihkan dihitung berdasarkan nilai pakai atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih tinggi.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Di lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui

2.q. Impairment of non-financial assets

The Group examines whether there is any indication of impairment of the non-financial assets on the consolidated statement of financial position date and the possible adjustments to the recoverable amount if there are circumstances that indicate such impairment. The recoverable amount calculated based on the value in use or fair value less cost to sell, whichever is higher.

Impairment loss is recognised if the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. On the other hand, a reversal of

apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan/ (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban/ (pendapatan) pada laba rugi tahun berjalan.

impairment is recognised when there is an indication that the impairment is no longer the case. Impairment/(recovery) on the value of the asset is recognised as an expense/ (income) in the current year profit or loss.

2.r. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok selain utang premi dan utang klaim. Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2.r. Accounts payable

Accounts payable is the obligation to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers other than premium payables and claim payables. Accounts payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

2.s. Liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain terdiri dari liabilitas kontrak asuransi syariah, liabilitas kontrak penjaminan syariah, titipan premi dari imbal jasa penjaminan, utang bunga, liabilitas sewa dan utang lainnya yang tidak terjadi dalam kegiatan usaha normal Grup.

2.s. Other liabilities

Other liabilities consist of sharia insurance contract liability, sharia guarantee contract liability, premium and guarantee fee deposits, interest payable, lease liabilities and other payables that do not occur in the Group's normal business course.

2.t. Utang klaim dan utang premi penjaminan kredit

Utang premi dan klaim meliputi utang kepada tertanggung/penjamin/penjamin ulang sebagai akibat transaksi penjaminan kredit dan *co-guarantee*.

2.t. Credit guarantee claim and premium payables

Premium and claim payables consist of payables to policyholders/guarantors/ co-insurers arising from credit guarantee and co-guarantee transactions.

2.u. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima dimuka berasal dari bisnis penjaminan kredit dan sewa gedung Grup.

Pendapatan diterima dimuka terkait penjaminan kredit merupakan pembayaran imbal jasa penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Grup yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang. Pendapatan diterima dimuka ini akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan diamortisasi ketika Sertifikat Penjaminan (SP) terbit sampai dengan akhir penjaminan. Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi imbal jasa penjaminan kredit diterima dimuka adalah sesuai jangka waktu.

Selain itu, Grup juga mencatatkan pendapatan sewa diterima dimuka yang berasal dari penerimaan pembayaran di depan untuk sewa gedung kepada Grup. Pendapatan diterima

2.u. Unearned revenue

Unearned revenue is derived from credit guarantee and building leases business of the Group.

Unearned revenue related to credit guarantee is a guarantee fee payment for current year and previous years from the guaranteed to the Group which will turn to be income in the coming years. This unearned revenue will be recognised as income during the remaining period of guarantee and amortised when the Certificate of Guarantee (SP) is issued until the end of the guarantee period. By considering the number of accelerated payment credits, management establish maximum time limit of the unearned credit guarantee fee allocation, that is due to time limit.

Other than that, the Group has also recognised unearned rental revenue which is received from an upfront payment of building leases to the Group. Unearned revenue is amortised

dimuka diamortisasi menjadi pendapatan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

using the straight-line method over the lease period.

2.v. Utang bank

Utang bank terdiri dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman bank jangka pendek jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan sedangkan pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Rincian utang bank, dapat dilihat pada Catatan 27.

2.v. Bank loans

Bank loans consist of short-term and long-term loans. Short-term bank loans will be due in less than 12 months after the end of the reporting period while the long-term bank loans will be due in more than 12 months after the end of the reporting period. Details of bank loans, could be seen at Note 27.

2.w. Liabilitas imbalan kerja

2.w. Employment benefit liabilities

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan pensiun

Entitas-entitas di dalam Grup menyediakan berbagai skema pensiun. Grup memiliki program imbalan pasti dan iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas yang terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Pension benefits

The entities under the Group provide various pension schemes. The Group has both defined benefit and defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban pensiun mencakup program imbalan pasti, fasilitas kesehatan pensiunan, medali emas,

In relation of defined benefit programs, the liability recognised in the consolidated statement of financial position is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. Pension obligation includes the pension plans, provided pension health

masa persiapan pensiun, program asuransi kesejahteraan karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"), Pendanaan Hari Tua ("PHT"), program santunan kematian dan program sumbangan pensiun. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

facilities, gold medals, retirement preparation period, employee welfare insurance program through financial institution pension fund ("DPLK"), provident fund ("PHT"), death compensation program and pension fund program. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini diakui sebagai beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Net interest expenses are calculated using discount rate for defined benefit programs and fair value of plan assets. This expense recognised as employee benefit expenses in the consolidated profit or loss.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial (termasuk penurunan nilai aset program) langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Remeasurement gains and loses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions (included the impairment of plan asset) are charged or credited to other comprehensive income in the period in which they arise.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amandemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai biaya jasa lalu.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in the consolidated profit or loss as past service costs.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran program pensiun karena diwajibkan, berdasarkan kontrak.

For defined benefit, the Group pays contributions to pension plans on a mandatory, based on contractual basis.

Imbalan pascakerja lainnya
Beberapa entitas di dalam Grup memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunnya. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakui secara akrual selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit.* Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

Other post-employment benefits
Certain companies under the Group provide post-retirement healthcare benefits to the retires. The entitlement to these benefits usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Imbalan jangka panjang lainnya diukur dengan menggunakan metode yang sama dengan imbalan pascakerja, kecuali untuk pengukuran kembali liabilitas diakui dalam laba rugi.

Other long-term employee benefits
Other long-term employee benefits measured using the same method as post-employment benefits, except for the remeasurement of the liability recognized in profit or loss.

Pesangon pemutusan kontrak kerja
Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara: (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 - Provisi dan kontijensi dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Termination benefits
Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 237 - Provisions and contigences and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

2.x. Pajak penghasilan
Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.x. Income tax
The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke otoritas pajak.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date. Management periodically evaluate the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Where appropriate, management establish provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas laporan posisi keuangan (*balance sheet liability method)* untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill*. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak dan pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Deferred income tax is provided in full, using the balance sheet liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss and at the time of the transaction, does not give rise to taxable temporary differences and the temporary differences are deductible in equal amounts.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasikan dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carryforward of unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences, unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi pada operasi asing ketika perseroan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan ada kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Deferred tax liabilities are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in foreign operations where the company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not reverse in the foreseeable future.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and

kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

2.y. Akuntansi transaksi syariah

Grup menggunakan akad kontrak asuransi syariah "*wakalah bil ujrah*". Premi yang dibayarkan pada asuransi Syariah diakui sebagai dana *tabarru*' dan tidak diakui sebagai pendapatan premi oleh Grup. Imbalan atau *ujrah* dalam mengelola produk-produk dari peserta diakui sebagai pendapatan oleh Grup selama periode kontrak asuransi.

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk syariah diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang diterima setelah dikurangi bagian imbalan (*ujrah*) untuk Grup dalam rangka mengelola pendapatan dari produk syariah.

Surplus yang dapat didistribusikan akan ditetapkan berdasarkan kecukupan kontribusi premi yang diterima dan hasil investasi yang terkait cukup untuk menutup beban atas pembayaran klaim dan pembentukan cadangan. Setiap kelebihan, setelah dikurangkan dengan porsi untuk membayar pinjaman kepada Grup atau *qardh*, jika ada, akan dibagikan kepada peserta, Grup, dan dana *tabarru*' sesuai dengan akad kontrak asuransi.

Ketika dana *tabarru*' tidak mencukupi untuk menutup klaim yang telah terjadi, Grup akan memberikan *qardh* (pinjaman tidak berbunga) untuk rnenyelesaikannya. Pada saat dana *tabarru*' memiliki surplus *underwriting*, maka *qardh* akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum Grup menyatakan pembagian surplus yang dapat didistribusikan.

2.y. Accounting for sharia transactions

The Group uses "wakalah bil ujrah" sharia insurance contract. Premiums paid on Sharia insurance are recognised as tabarru' fund and not recognised as premium income by the Group. Fees or ujrah in managing the product is recognised as income by the Group over the insurance contract period.

Funds received from customers for sharia products is recognised as liabilities in the consolidated statement of financial position for the amount received net of the portion representing the Group's fees (ujrah) in managing the Sharia product revenue.

The distributable surplus will be determined based on whether the premium contribution received and its related investment return are sufficient to cover for the expenses on claims paid and reserve set up. Any excess, after deducting the portion to repay the loan or qardh from the Group, if any, will be distributed to the policy holders, to the Group, and to the tabarru' fund in accordance with insurance contract.

When the tabarru' fund is insufficient to cover all claims incurred, the Group will settle under qardh (non-bearing interest loans). The qardh is to be repaid first when tabarru' fund have an underwriting surplus before the Group can declares the distributable surplus.

2.aa. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2.aa. Leases

The Group as lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan;
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Grup memiliki hak ini ketika memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- *The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset;*
- *The Group has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use;*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to change how and for what purpose the asset is used. In rare cases where the decision about how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
- *The Group has the right to operate the asset; and*
- *The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purposes it will be used throughout the period of use.*

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate nonlease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Lease liabilities are measured at the present value of any unpaid lease payments at the inception date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that interest rate cannot be determined, then using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses borrowing rate as the interest rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalanya diukur dengan menggunakan indeksi atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as part of fixed assets and other payables in the consolidated statement of financial position.

<u>Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah</u>
Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

<u>*Short-term leases and leases of low-value assets*</u>
The Group has elected not to recognise right-of- use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup

Lease modifications

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- *modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right-of- use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

The Group as lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for

mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

the major part of the economic life of the asset.

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presented a finance lease receivables in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on the straight-line basis over the lease term.

2.ab. Kontrak asuransi dan reasuransi

2.ab. *Insurance and reinsurance contracts*

Kontrak asuransi
Kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimana pada saat penerbitan polis perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis.

Insurance contract
Insurance contract is contract issued by insurance company which accepts significant insurance risk from the policyholder upon the issuance of the policy.

Grup mendefinisikan risiko asuransi yang signifikan sebagai kemungkinan membayar manfaat pada saat terjadinya suatu kejadian yang diasuransikan, yang setidaknya 10% lebih besar dari manfaat yang dibayarkan jika kejadian yang diasuransikan tidak terjadi.

Group defines significant insurance risk as the possibility of having to pay benefits on the occurrence of an insured event of at least 10% more than the benefits payable if the insured event did not occur.

Suatu kontrak mengalihkan risiko asuransi signifikan hanya jika terdapat skenario yang memiliki substansi komersial di mana penerbit memiliki kemungkinan merugi atas dasar nilai sekarang. Namun demikian, meskipun suatu kontrak kontrak reasuransi tidak menyebabkan penerbitnya terpapar kemungkinan kerugian yang signifikan, kontrak tersebut dianggap mengalihkan risiko asuransi yang signifikan walaupun kontrak tersebut mengalihkan kepada reasuradur keseluruhan risiko asuransi secara substansial terkait dengan bagian yang direasuransikan dari kontrak asuransi pendasar.

A contract transfers significant insurance risk only if there is a scenario that has commercial substance in which the issuer has a possibility of a loss on a present value basis. However, even if a reinsurance contract does not expose the issuer to the possibility of a significant loss, that contract is deemed to transfer significant insurance risk if it transfers to the reinsurer substantially all the insurance risk relating to the reinsured portions of the underlying insurance contracts.

Jika suatu kontrak asuransi tidak mengandung risiko asuransi yang signifikan, maka kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai kontrak investasi.

If the insurance contract does not contain significant insurance risk, the contract will be deemed as an investment contract.

Grup menerbitkan kontrak asuransi untuk produk asuransi tradisional dan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kedua jenis produk ini mempunyai risiko asuransi yang signifikan.

The Group issues insurance contracts for traditional insurance product and investment linked insurance product. Both of these products have significant insurance risk.

Kontrak asuransi diklasifikasikan sebagai kontrak dengan fitur partisipasi langsung atau kontrak tanpa fitur partisipasi langsung. Kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung adalah kontrak yang, pada tanggal permulaannya:

Insurance contracts are classified as direct participating contracts or contracts without direct participation features. Direct participating contracts are contracts for which, at inception:

i. persyaratan kontraktualnya menetapkan bahwa pemegang polis berpartisipasi dalam bagian dari gabungan item pendasar yang teridentifikasi dengan jelas;
ii. Grup mengekspektasikan akan membayar kepada pemegang polis jumlah yang setara dengan bagian yang substansial dari imbal hasil nilai wajar atas item pendasar; dan
iii. Grup mengekspektasikan proporsi yang substansial dari setiap perubahan dalam jumlah yang harus dibayarkan kepada pemegang polis bervariasi sesuai dengan perubahan dalam nilai wajar atas item pendasar.

i. the contractual terms specify that the policyholder participates in a share of a clearly identified pool of underlying items;
ii. the Group expects to pay to the policyholder an amount equal to a substantial share of the fair value returns on the underlying items; and
iii. the Group expects a substantial proportion of any change in the amounts to be paid to the policyholder to vary with the change in fair value of the underlying items.

Berdasarkan kriteria di atas, tidak ada kontrak partisipasi Grup yang memenuhi definisi kontrak partisipasi langsung.

Based on the criterias above, none of the Group's participating contracts has met the definition of direct participating contracts.

i. Pemisahan komponen dari kontrak asuransi dan reasuransi
   Pada saat insepsi, Grup memisahkan komponen-komponen berikut dari kontrak asuransi atau reasuransi dan mencatatnya seolah-olah merupakan instrumen keuangan yang berdiri sendiri:
   - derivatif melekat dalam kontrak yang karakteristik ekonomi dan risikonya tidak terkait erat dengan kontrak utama, dan yang persyaratannya tidak akan memenuhi definisi kontrak asuransi atau reasuransi sebagai instrumen yang berdiri sendiri;
   - Pemisahan komponen investasi: yaitu komponen investasi yang tidak terlalu terkait satu sama lain dengan komponen asuransi dan kontrak dengan persyaratan yang setara dijual, atau

i. Separating components from insurance and reinsurance contracts
   At inception, the Group separates the following components from an insurance or reinsurance contract and accounts for them as if they were stand-alone financial instruments:
   - *derivatives embedded in the contract whose economic characteristics and risks are not closely related to those of the host contract, and whose terms would not meet the definition of an insurance or reinsurance contract as a stand-alone instrument; and*
   - *Distinct investment components: i.e. investment components that are not highly inter-related with the insurance components and for which contracts with equivalent terms are sold, or could be*

dapat dijual, secara terpisah di pasar yang sama atau yurisdiksi yang sama.

Grup menilai tidak terdapat komponen derivatif melekat pada produk-produk Grup.

Setelah memisahkan setiap komponen instrumen keuangan, Grup memisahkan janji untuk menyediakan kepada pemegang polis barang atau jasa yang berbeda selain jasa kontrak asuransi dan investasi dan mencatatnya terpisah sebagai kontrak dengan pelanggan (yaitu bukan sebagai kontrak asuransi).

Barang atau jasa dapat dibedakan jika pemegang polis dapat memperoleh manfaat barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia bagi pemegang polis. Barang atau jasa tidak dapat dibedakan dan dicatat bersama dengan komponen asuransi jika arus kas dan risiko sehubungan dengan barang atau jasa tersebut sangat terkait dengan arus kas dan risiko sehubungan dengan komponen asuransi, dan Grup memberikan jasa yang signifikan dalam mengintegrasikan barang atau jasa dengan komponen asuransi.

ii. Pengelompokan dan pengakuan kontrak asuransi dan reasuransi

Kontrak asuransi
Untuk pengukuran, kontrak asuransi digabungkan ke dalam kelompok-kelompok kontrak.

Kelompok kontrak asuransi ditentukan dengan mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi, masing-masing terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama, dan membagi setiap portofolio menjadi kohor tahunan (yaitu menurut tahun penerbitan) dan setiap kohor tahunan menjadi tiga kelompok berdasarkan profitabilitas kontrak:
- kelompok kontrak yang merugi (onerous) pada saat pengakuan awal;
- kelompok kontrak yang pada saat pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk selanjutnya menjadi kontrak yang merugi; dan

sold, separately in the same market or the same jurisdiction.

The Group assesses that there are no embedded derivative components in the Group's products.

After separating any financial instrument components, the Group separates any promises to transfer to policyholders distinct goods or services other than insurance coverage and investment services and accounts for them as separate contracts with customers (i.e. not as insurance contracts).

A good or service is distinct if the policyholder can benefit from it either on its own or with other resources that are readily available to the policyholder. A good or service is not distinct and is accounted for together with the insurance component if the cash flows and risks associated with the good or service are highly inter-related with the cash flows and risks associated with the insurance component, and the Group provides a significant service of integrating the good or service with the insurance component.

ii. Aggregation and recognition of insurance and reinsurance contracts

Insurance contract
Insurance contracts are aggregated into groups for measurement purposes

Groups of insurance contracts are determined by identifying portfolios of insurance contracts, each comprising contracts subject to similar risks and managed together, and dividing each portfolio into annual cohorts (i.e. by year of issue) and each annual cohort into three groups based on the profitability of contracts:
- *any contracts that are onerous on initial recognition;*
- *any contracts that, on initial recognition, have no significant possibility of becoming onerous subsequently; and*

- kelompok kontrak tersisa dalam portofolio.

Kontrak dalam portofolio akan masuk ke dalam kelompok yang berbeda semata-mata karena hukum atau regulasi secara spesifik membatasi kemampuan praktis Grup untuk menetapkan harga atau tingkatan manfaat yang berbeda untuk pemegang polis dengan karakteristik yang berbeda dimasukkan ke dalam kelompok yang sama.

Kontrak asuransi yang diterbitkan Grup diakui pada saat mana yang paling awal dari:
- awal periode pertanggungan (yaitu periode di mana Grup memberikan layanan sehubungan dengan premi yang dibayarkan dalam batasan kontrak);
- tanggal ketika pembayaran pertama dari pemegang polis jatuh tempo atau, jika tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual, saat pembayaran diterima dari pemegang polis; dan
- ketika fakta dan keadaan menunjukkan bahwa kontrak adalah kontrak yang merugi.

Ketika kontrak diakui, kontrak tersebut ditambahkan ke kelompok kontrak yang ada atau, jika kontrak tersebut tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang ada, kontrak tersebut membentuk kelompok baru yang ditambahkan ke kontrak masa mendatang. Kelompok kontrak dibentuk pada pengakuan awal dan komposisinya tidak diubah setelah semua kontrak ditambahkan kedalam kelompok tersebut.

Kontrak reasuransi
Kelompok kontrak reasuransi ditentukan dengan mengidentifikasi portofolio kontrak reasuransi, masing-masing terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama, dan membagi setiap portofolio menjadi kelompok tahunan (yaitu berdasarkan tahun penerbitan).

- *any remaining contracts in the annual cohort.*

Contracts within a portfolio that would fall into different groups only because law or regulation specifically constrains the Group's practical ability to set a different price or level of benefits for policyholders with different characteristics are included in the same group.

An insurance contract issued by the Group is recognised from the earliest of:

- *the beginning of its coverage period (i.e. the period during which the Group provides services in respect of any premiums within the boundary of the contract);*
- *when the first payment from the policyholder becomes due or, if there is no contractual due date, when it is received from the policyholder; and*
- *when facts and circumstances indicate that the contract is onerous.*

When the contract is recognised, it is added to an existing group of contracts or, if the contract does not qualify for inclusion in an existing group, it forms a new group to which future contracts are added. Groups of contracts are established on initial recognition and their composition is not revised once all contracts have been added to the group.

Reinsurance contract
Groups of reinsurance contracts are determined by identifying portfolios of reinsurance contracts, each comprising contracts subject to similar risks and managed together, and dividing each portfolio into annual cohorts (i.e. by year of issue).

Sekelompok kontrak reasuransi diakui pada tanggal berikut:

- Kontrak reasuransi yang diinisiasi oleh Grup yang memberikan pertanggungan proporsional: Tanggal di mana kontrak asuransi pendasar diakui pertama kali. Kontrak reasuransi yang diprakarsai oleh Grup yang memberikan pertanggungan proporsional: Tanggal di mana kontrak asuransi pendasar diakui. Hal ini berlaku untuk kontrak reasuransi bagian kuota dan perjanjian surplus Grup.

- Kontrak reasuransi lain yang diinisiasi oleh Grup: Pengakuan tersebut akan menjadi tanggal yang lebih awal dari bukti yang menunjukkan persetujuan atas pengaturan atau tanggal dari kelompok kontrak asuransi pendasar yang merugi yang diakui.
- Kontrak reasuransi yang diperoleh: Tanggal akuisisi.

iii. Arus kas akuisisi asuransi
Arus kas akuisisi asuransi dialokasikan untuk kelompok kontrak asuransi menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan mempertimbangkan, dengan cara yang tidak bias, semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

Jika arus kas akuisisi asuransi dapat diatribusikan secara langsung ke dalam suatu kelompok kontrak (misalnya komisi yang tidak dapat dikembalikan yang dibayarkan pada penerbitan kontrak), maka arus kas tersebut dialokasikan ke dalam kelompok tersebut dan untuk kelompok yang akan mencakup pembaruan kontrak dalam kelompok tersebut. Alokasi untuk perpanjangan hanya berlaku untuk kontrak yang memiliki periode pertanggungan satu tahun. Grup mengharapkan untuk memulihkan sebagian dari arus kas akuisisi asuransi terkait melalui pembaruan kontrak ini. Alokasi untuk pembaruan didasarkan pada cara yang diharapkan Grup untuk memulihkan arus kas tersebut.

A group of reinsurance contracts is recognised on the following date:

- *Reinsurance contracts initiated by the Group that provide proportionate coverage: The date on which any underlying insurance contract is initially recognised. Reinsurance contracts initiated by the Group that provide proportionate coverage: The date on which any underlying insurance contract is initially recognized. This applies to the Group's quota share and surplus agreement reinsurance contracts.*
- *Other reinsurance contracts initiated by the Group: The recognition will be the earlier of date of evidence indicating agreement of the arrangement or the date of onerous group of underlying insurance contracts being recognized.*

- *Reinsurance contracts acquired: The date of acquisition.*

iii. Insurance acquisition cash flows
Insurance acquisition cash flows are allocated to groups of insurance contracts using a systematic and rational method and considering, in an unbiased way, all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort.

If insurance acquisition cash flows are directly attributable to a group of contracts (e.g. nonrefundable commissions paid on issuance of a contract), then they are allocated to that group and to the groups that will include renewals of those contracts. The allocation to renewals only applies to contracts that have a one-year coverage period. The Group expects to recover part of the related insurance acquisition cash flows through renewals of these contracts. The allocation to renewals is based on the manner in which the Group expects to recover those cash flows.

Jika arus kas akuisisi asuransi dapat diatribusikan secara langsung ke portofolio tetapi tidak pada kelompok kontrak, maka arus kas tersebut dialokasikan ke kelompok dalam portofolio dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional.

If insurance acquisition cash flows are directly attributable to a portfolio but not to a group of contracts, then they are allocated to groups in the portfolio using a systematic and rational method.

Arus kas akuisisi asuransi yang timbul sebelum pengakuan kelompok kontrak terkait diakui sebagai aset. Arus kas akuisisi asuransi timbul saat dibayarkan atau saat liabilitas diakui berdasarkan standar selain PSAK 117. Aset tersebut diakui untuk setiap kelompok kontrak yang arus kas akuisisi asuransinya dialokasikan. Aset tersebut dihentikan pengakuannya, seluruhnya atau sebagian, ketika arus kas akuisisi asuransi dimasukkan dalam pengukuran kelompok kontrak.

Insurance acquisition cash flows arising before the recognition of the related group of contracts are recognised as an asset. Insurance acquisition cash flows arise when they are paid or when a liability is required to be recognised under a standard other than SFAS 117. Such an asset is recognised for each group of contracts to which the insurance acquisition cash flows are allocated. The asset is derecognised, fully or partially, when the insurance acquisition cash flows are included in the measurement of the group of contracts.

Pada setiap periode pelaporan, Grup merevisi jumlah yang dialokasikan ke kelompok kontrak untuk mencerminkan setiap perubahan asumsi yang menentukan input pada metode alokasi yang digunakan. Jumlah yang dialokasikan ke kelompok kontrak tidak direvisi setelah semua kontrak ditambahkan ke kelompok tersebut.

At each reporting date, the Group revises the amounts allocated to groups to reflect any changes in assumptions that determine the inputs to the allocation method used. Amounts allocated to a group are not revised once all contracts have been added to the group.

Penilaian pemulihan

Pada setiap periode pelaporan, jika fakta dan keadaan menunjukkan bahwa aset untuk arus kas akuisisi asuransi mungkin mengalami penurunan nilai, maka Grup:

a. mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi arus kas masuk neto yang diharapkan untuk kelompok asuransi tersebut; dan
b. jika aset terkait dengan pembaruan yang diharapkan, mengakui kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi sejauh arus kas akuisisi asuransi diharapkan melebihi arus kas masuk bersih untuk pembaruan yang diharapkan dan kelebihan ini belum diakui sebagai kerugian penurunan nilai dengan menerapkan butir (a).

Recoverability assessment

At each reporting date, if facts and circumstances indicate that an asset for insurance acquisition cash flows may be impaired, then the Group:

a. recognises an impairment loss in profit or loss so that the carrying amount of the asset does not exceed the expected net cash inflow for the related group; and
b. if the asset relates to future renewals, recognises an impairment loss in profit or loss to the extent that it expects those insurance acquisition cash flows to exceed the net cash inflow for the expected renewals and this excess has not already been recognised as an impairment loss under (a).

Grup melakukan pembalikan kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan meningkatkan nilai tercatat aset sepanjang kondisi penurunan nilai telah membaik.

The Group reverses any impairment losses in profit or loss and increases the carrying amount of the asset to the extent that the impairment conditions have improved.

iv. Batasan kontrak
Pengukuran suatu kelompok kontrak mencakup seluruh arus kas masa depan yang tercakup dalam batasan setiap kontrak dalam kelompok tersebut, yang ditentukan sebagai berikut.

iv. Contract boundaries
The measurement of a group of contracts includes all of the future cash flows within the boundary of each contract in the group, determined as follows.

Kontrak asuransi
Arus kas berada dalam batasan dari kontrak asuransi jika arus kas tersebut timbul dari hak dan kewajiban substantif yang ada selama periode pelaporan dimana Grup dapat memaksa pemegang polis untuk membayar premi atau memiliki kewajiban substantif untuk menyediakan jasa (termasuk pertanggungan asuransi dan jasa investasi).

Insurance contract
Cash flows are within the contract boundary if they arise from substantive rights and obligations that exist during the reporting period in which the Group can compel the policyholder to pay premiums or has a substantive obligation to provide services (including insurance coverage and any investment services).

Kewajiban substantif untuk menyediakan jasa berakhir ketika:
- Grup memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko atas pemegang polis tertentu dan dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat yang secara penuh merefleksikan risiko yang dinilai ulang tersebut; atau
- Grup memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko atas portofolio yang mengandung kontrak dan dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat yang secara penuh merefleksikan risiko dari portofolio tersebut, dan penentuan harga premi sampai pada tanggal penilaian kembali risiko tidak memperhitungkan risiko yang terkait dengan periode setelah tanggal penilaian kembali.

A substantive obligation to provide services ends when:
- *the Group has the practical ability to reassess the risks of the particular policyholder and can set a price or level of benefits that fully reflects those reassessed risks; or*
- *the Group has the practical ability to reassess the risks of the portfolio that contains the contract and can set a price or level of benefits that fully reflects the risks of that portfolio, and the pricing of the premiums up to the reassessment date does not take into account risks that relate to periods after the reassessment date.*

Penilaian ulang risiko hanya mempertimbangkan risiko yang dialihkan dari pemegang polis kepada Grup, yang dapat mencakup risiko asuransi dan keuangan, tetapi tidak termasuk risiko lapse dan risiko beban.

The reassessment of risks considers only risks transferred from policyholders to the Group, which may include both insurance and financial risks, but exclude lapse and expense risks.

Kontrak reasuransi
Arus kas berada dalam batasan dari kontrak jika arus kas tersebut timbul dari hak dan kewajiban substantif yang ada selama periode pelaporan di mana Grup diharuskan

Reinsurance contract
Cash flows are within the contract boundary if they arise from substantive rights and obligations that exist during the reporting period in which the Group is compelled to

untuk membayar suatu nominal kepada reasuradur atau memiliki hak substantif untuk menerima jasa dari reasuradur.

Hak substantif untuk menerima jasa dari reasuradur berakhir ketika reasuradur:
- memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko yang dialihkan dan dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat yang secara penuh merefleksikan risiko yang dinilai kembali tersebut; atau
- memiliki hak substantif untuk mengakhiri pertanggungan.

Batasan kontrak dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan untuk memasukkan pengaruh perubahan keadaan terhadap hak dan kewajiban substantif Grup dan, oleh karena itu, dapat berubah dari waktu ke waktu.

v. Pengukuran - Kontrak tidak diukur dengan menggunakan *Premium Allocation Approach* (”PAA”)

Kontrak asuransi - Pengukuran awal
Pada pengakuan awal, Grup mengukur kelompok kontrak asuransi pada nilai total dari arus kas pemenuhan, yang meliputi estimasi arus kas masa depan, penyesuaian untuk merefleksikan nilai waktu uang dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan, dan penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan; dan marjin jasa kontraktual. Arus kas pemenuhan dari sekelompok kontrak asuransi tidak boleh mencerminkan risiko wanprestasi Grup.

Penyesuaian risiko untuk risiko nonkeuangan untuk sekelompok kontrak asuransi, yang ditentukan secara terpisah dari estimasi lain, adalah kompensasi yang dibutuhkan untuk menanggung ketidakpastian jumlah dan waktu arus kas yang timbul dari risiko nonkeuangan.

Marjin jasa kontraktual dari sekelompok kontrak asuransi mencerminkan laba yang belum diperoleh yang akan diakui oleh Grup karena menyediakan jasa berdasarkan kontrak asuransi tersebut. Pada pengakuan awal sekelompok kontrak asuransi, jika total arus kas pemenuhan, setiap arus kas yang timbul pada tanggal tersebut dan setiap

pay amounts to the reinsurer or has a substantive right to receive services from the reinsurer.

A substantive right to receive services from the reinsurer ends when the reinsurer:
- *has the practical ability to reassess the risks transferred to it and can set a price or level of benefits that fully reflects those reassessed risks; or*
- *has a substantive right to terminate the coverage.*

The contract boundary is reassessed at each reporting date to include the effect of changes in circumstances on the Group’s substantive rights and obligations and, therefore, may change over time.

v. Measurement - Contracts not measured under the Premium Allocation Approach (”PAA”)

Insurance contracts - Initial measurement
On initial recognition, the Group measures a group of insurance contracts as the total of the fulfilment cash flows, which comprise estimates of future cash flows, adjusted to reflect the time value of money and the associated financial risks, and a risk adjustment for non-financial risk; and the contractual service margin. The fulfilment cash flows of a group of insurance contracts do not reflect the Group’s non-performance risk.

The risk adjustment for non-financial risk for a group of insurance contracts, determined separately from the other estimates, is the compensation required for bearing uncertainty about the amount and timing of the cash flows that arises from non-financial risk.

The contractual service margin of a group of insurance contracts represents the unearned profit that the Group will recognise as it provides services under those contracts. On initial recognition of a group of insurance contracts, if the total of the fulfilment cash flows, any cash flows arising at that date and any amount arising

jumlah yang timbul dari penghentian pengakuan setiap aset atau liabilitas yang sebelumnya diakui untuk arus kas terkait dengan kelompok (termasuk aset untuk arus kas akuisisi asuransi) adalah arus masuk bersih, maka kelompok tersebut tidak merugi (*onerous*). Dalam hal ini, marjin jasa kontraktual diukur sebagai jumlah yang sama dan berlawanan dari arus masuk bersih, yang tidak menghasilkan pendapatan atau beban yang timbul pada pengakuan awal.

from the derecognition of any assets or liabilities previously recognised for cash flows related to the group (including assets for insurance acquisition cash flows) is a net inflow, then the group is not onerous. In this case, the contractual service margin is measured as the equal and opposite amount of the net inflow, which results in no income or expenses arising on initial recognition.

Jika keseluruhan menghasilkan arus keluar neto, maka kelompok tersebut merugi. Dalam hal ini, arus keluar neto diakui sebagai kerugian dalam laba rugi. Komponen kerugian dibuat untuk menentukan jumlah arus kas keluar neto, yang menentukan jumlah yang selanjutnya disajikan dalam laba rugi sebagai pembalik kerugian pada kontrak yang merugi dan dikecualikan dari penentuan pendapatan asuransi.

If the total is a net outflow, then the group is onerous. In this case, the net outflow is recognised as a loss in profit or loss. A loss component is created to depict the amount of the net cash outflow, which determines the amounts that are subsequently presented in profit or loss as reversals of losses on onerous contracts and are excluded from insurance revenue.

Jumlah tercatat atas sekelompok kontrak asuransi pada setiap periode pelaporan adalah jumlah liabilitas untuk sisa pertanggungan dan liabilitas untuk klaim yang terjadi. Liabilitas untuk sisa pertanggungan terdiri dari:

- arus kas pemenuhan yang berhubungan dengan jasa yang akan diberikan berdasarkan kontrak di periode mendatang; dan
- Marjin jasa kontraktual yang tersisa pada tanggal tersebut.

The carrying amount of a group of insurance contracts at each reporting date is the sum of the liability for remaining coverage and the liability for incurred claims. The liability for remaining coverage comprises:

- *the fulfilment cash flows that relate to services that will be provided under the contracts in future periods, and*
- *any remaining contractual service margin at that date.*

Liabilitas atas terjadinya klaim terdiri atas arus kas pemenuhan terkait klaim dan beban yang belum dibayar, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan.

The liability for incurred claims includes the fulfilment cash flows for incurred claims and expenses that have not yet been paid, including claims that have been incurred but not yet reported.

Arus kas pemenuhan kelompok kontrak asuransi diukur pada periode pelaporan dengan menggunakan estimasi arus kas masa depan terkini, tingkat diskonto saat ini dan estimasi saat ini dari penyesuaian risiko non-keuangan. Perubahan arus kas pemenuhan diakui sebagai berikut.

The fulfilment cash flows of groups of insurance contracts are measured at the reporting date using current estimates of future cash flows, current discount rates and current estimates of the risk adjustment for non-financial risk. Changes in fulfilment cash flows are recognised as follows.

Jenis Perubahan/ *Type of Change*	**Perlakuan Akuntansi/ *Accounting Treatment***
Perubahan terkait jasa yang akan datang/ *Changes related to future services*	Disesuaikan dengan marjin jasa kontraktual (atau diakui dalam hasil jasa asuransi di laba rugi jika grup merugi)/ *Effects of the time value of money, financial risk and changes therein on estimated future cash flows*
Perubahan yang terkait dengan jasa kini atau masa lalu/ *Changes related to current or past services*	Diakui dalam hasil jasa asuransi di laba rugi/ *Recognized in the insurance service result in profit or loss*
Pengaruh nilai waktu uang, risiko keuangan, dan perubahannya terhadap perkiraan arus kas masa depan/ *Effects of the time value of money, financial risk and changes therein on estimated future cash flows*	Diakui sebagai pendapatan atau beban keuangan asuransi/ *Recognized as insurance finance income or expenses*

Marjin jasa kontraktual setiap kelompok kontrak dihitung pada setiap periode pelaporan sebagai berikut

Kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung
Jumlah tercatat marjin jasa kontraktual pada setiap periode pelaporan adalah jumlah tercatat pada awal tahun tahun, disesuaikan untuk:

a. marjin jasa kontraktual dari setiap kontrak baru yang ditambahkan ke dalam kelompok pada tahun tersebut;
b. bunga akresian pada jumlah tercatat marjin jasa kontraktual selama periode berjalan, diukur dengan tingkat diskonto atas arus kas yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas item pendasar yang ditentukan pada pengakuan awal;
c. perubahan arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan jasa masa depan, kecuali jika:
    i. kenaikan arus kas pemenuhan melebihi jumlah tercatat marjin jasa kontraktual, dalam hal kelebihan tersebut diakui sebagai kerugian dalam laba rugi dan menimbulkan komponen kerugian;
    ii. marjin jasa kontraktual dari setiap kontrak baru yang ditambahkan ke dalam kelompok pada tahun tersebut;

The contractual service margin of each group of contracts is calculated at each reporting date as follows:

Insurance contracts without direct participation features
The carrying amount of the contractual service margin at each reporting date is the carrying amount at the start of the year, adjusted for:

a. the contractual service margin of any new contracts that are added to the group in the year;
b. interest accreted on the carrying amount of the contractual service margin during the year, measured at the discount rates on nominal cash flows that do not vary based on the returns on any underlying items determined on initial recognition;
c. changes in fulfilment cash flows that relate to future services, except to the extent that:
    i. any increases in the fulfilment cash flows exceed the carrying amount of the contractual service margin, in which case the excess is recognized as a loss in profit or loss and creates a loss component; or
    ii. marjin jasa kontraktual dari setiap kontrak baru yang ditambahkan ke dalam kelompok pada tahun tersebut;

d. dampak dari perbedaan nilai tukar mata uang terhadap marjin jasa kontraktual; dan
e. jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi karena jasa yang diberikan pada tahun tersebut.

Perubahan arus kas pemenuhan yang terkait dengan jasa masa depan terdiri dari:
a. penyesuaian pengalaman yang timbul dari premi yang diterima pada periode tersebut terkait dengan jasa masa depan dan arus kas terkait, diukur pada tingkat diskonto yang ditentukan pada pengakuan awal;
b. perubahan dalam estimasi nilai sekarang dari arus kas masa depan dalam liabilitas untuk sisa masa pertanggungan, diukur dengan tingkat diskonto yang ditentukan pada pengakuan awal, kecuali yang timbul dari dampak nilai waktu uang, risiko keuangan dan perubahannya;
c. Perbedaan antara:
   i. komponen investasi yang diperkirakan akan terutang pada periode tersebut, ditentukan sebagai pembayaran yang diharapkan pada awal tahun ditambah pendapatan atau beban keuangan asuransi yang terkait dengan pembayaran yang diharapkan tersebut sebelum menjadi terhutang;
   ii. jumlah aktual yang akan menjadi utang pada tahun tersebut;
d. selisih antara pinjaman kepada pemegang polis yang diharapkan dapat dilunasi dalam periode tersebut dan jumlah aktual yang dapat dilunasi pada periode tersebut;
e. perubahan dalam penyesuaian risiko non-keuangan yang terkait dengan jasa masa depan.

Perubahan arus kas diskresioner dianggap berkaitan dengan jasa masa depan dan karenanya menyesuaikan marjin jasa kontraktual.

Kontrak Partisipasi Langsung
Kontrak partisipasi langsung adalah kontrak dimana kewajiban Grup kepada pemegang polis merupakan jumlah setelah dikurangi:
- kewajiban untuk membayar pemegang polis sejumlah yang sama dengan nilai wajar barang yang mendasarinya; Dan

d. the effect of any currency exchange differences on the contractual service margin; and
e. the amount recognized as insurance revenue because of the services provided in the year.

Changes in fulfilment cash flows that relate to future services comprise:
a. experience adjustments arising from premiums received in the year that relate to future services and related cash flows, measured at the discount rates determined on initial recognition;

b. changes in estimates of the present value of future cash flows in the liability for remaining coverage, measured at the discount rates determined on initial recognition, except for those that arise from the effects of the time value of money, financial risk and changes therein;
c. differences between:
   i. any investment component expected to become payable in the year, determined as the payment expected at the start of the year plus any insurance finance income expenses related to that expected payment before it becomes payable; and
   ii. the actual amount that becomes payable in the year;
d. differences between any loan to a policyholder expected to become repayable in the year and the actual amount that becomes repayable in the year; and
e. changes in the risk adjustment for non-financial risk that relate to future services.

Changes in discretionary cash flows are regarded as relating to future services and accordingly adjust the contractual service margin.

Direct Participating Contract
Direct participating contracts are contracts under which the Group's obligation to the policyholder is the net of:
- *the obligation to pay the policyholder an amount equal to the fair value of the underlying items; and*

- imbalan variabel sebagai imbalan atas jasa masa depan yang diberikan dalam kontrak, yang merupakan jumlah bagian Grup atas nilai wajar item pendasar dikurangi arus kas pemenuhan yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil item pendasar. Grup menyediakan jasa investasi berdasarkan kontrak-kontrak ini dengan menjanjikan hasil investasi berdasarkan item-item yang mendasarinya, selain perlindungan asuransi.

Ketika mengukur sekelompok kontrak yang berpartisipasi langsung, Grup menyesuaikan arus kas pemenuhan untuk seluruh perubahan kewajiban membayar pemegang polis dengan jumlah yang sama dengan nilai wajar item yang mendasarinya. Perubahan ini tidak berhubungan dengan jasa masa depan dan diakui dalam laba rugi. Grup kemudian menyesuaikan setiap marjin jasa kontraktual untuk perubahan jumlah bagian Grup atas nilai wajar item yang mendasarinya, yang terkait dengan jasa di masa depan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Nilai tercatat marjin jasa kontraktual pada setiap tanggal pelaporan adalah nilai tercatat pada awal tahun, disesuaikan dengan:
- marjin jasa kontraktual dari setiap kontrak baru yang ditambahkan ke grup pada tahun tersebut
- perubahan jumlah bagian Grup atas nilai wajar item pendasar dan perubahan arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan jasa masa depan, kecuali sepanjang:

  a. Grup telah menerapkan opsi mitigasi risiko untuk mengecualikan perubahan dampak risiko keuangan terhadap jumlah *item* pendasar atau arus kas pemenuhan dari marjin jasa kontraktual;
  b. penurunan jumlah bagian Grup atas nilai wajar item pendasar, atau peningkatan arus kas pemenuhan yang terkait dengan jasa masa depan, melebihi nilai tercatat marjin jasa kontraktual sehingga menimbulkan kerugian dalam laba rugi (termasuk dalam beban jasa asuransi) dan menimbulkan komponen kerugian; atau

- *a variable fee in exchange for future services provided by the contracts, being the amount of the Group's share of the fair value of the underlying items less fulfilment cash flows that do not vary based on the returns on underlying items. The Group provides investment services under these contracts by promising an investment return based on underlying items, in addition to insurance coverage.*

When measuring a group of direct participating contracts, the Group adjusts the fulfilment cash flows for the whole of the changes in the obligation to pay policyholders an amount equal to the fair value of the underlying items. These changes do not relate to future services and are recognised in profit or loss. The Group then adjusts any contractual service margin for changes in the amount of the Group's share of the fair value of the underlying items, which relate to future services, as explained below.

The carrying amount of the contractual service margin at each reporting date is the carrying amount at the start of the year, adjusted for:
- *the contractual service margin of any new contracts that are added to the group in the year*
- *the change in the amount of the Group's share of the fair value of the underlying items and changes in fulfilment cash flows that relate to future services, except to the extent that:*
  a. the Group has applied the risk mitigation option to exclude from the contractual service margin changes in the effect of financial risk on the amount of its share of the underlying items or fulfilment cash flows;
  b. a decrease in the amount of the Group's share of the fair value of the underlying items, or an increase in the fulfilment cash flows that relate to future services, exceeds the carrying amount of the contractual service margin, giving rise to a loss in profit or loss (included in insurance service expenses) and creating a loss component; or

c. atas nilai wajar item yang mendasarinya, atau penurunan arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan jasa masa depan, dialokasikan ke komponen kerugian, membalikkan kerugian yang sebelumnya diakui dalam laba rugi (termasuk dalam biaya jasa asuransi);

- dampak perbedaan nilai tukar mata uang terhadap marjin jasa kontraktual; dan

- jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi karena jasa yang diberikan pada tahun tersebut.

Perubahan arus kas pemenuhan yang berhubungan dengan jasa masa depan mencakup perubahan yang berkaitan dengan jasa masa depan yang disebutkan di atas untuk kontrak tanpa fitur partisipasi langsung (diukur pada tingkat diskonto saat ini) dan perubahan pengaruh nilai waktu uang dan risiko keuangan yang tidak timbul dari item yang mendasarinya – mis. dampak jaminan finansial.

Kontrak reasuransi

Untuk mengukur sekelompok kontrak reasuransi, Grup menerapkan kebijakan akuntansi yang sama seperti yang diterapkan pada kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, termasuk dengan modifikasiannya.

Jumlah tercatat kelompok kontrak reasuransi pada setiap periode pelaporan adalah jumlah aset untuk sisa masa pertanggungan dan aset untuk klaim yang terjadi. Aset untuk sisa pertanggungan terdiri dari:

- arus kas pemenuhan yang terkait dengan jasa yang akan diterima berdasarkan kontrak di periode mendatang;
- sisa marjin jasa kontraktual pada tanggal tersebut.

Grup mengukur estimasi nilai sekarang arus kas masa depan menggunakan asumsi yang konsisten dengan asumsi yang digunakan untuk mengukur estimasi nilai kini arus kas masa depan untuk kontrak asuransi pendasar, dengan penyesuaian untuk setiap risiko wanprestasi oleh perusahaan reasuransi. Dampak dari risiko

c. an increase in the amount of the Group's share of the fair value of the underlying items, or a decrease in the fulfilment cash flows that relate to future services, is allocated to the loss component, reversing losses previously recognised in profit or loss (included in insurance service expenses);

- *the effect of any currency exchange differences on the contractual service margin; and*
- *the amount recognised as insurance revenue because of the services provided in the year.*

Changes in fulfilment cash flows that relate to future services include the changes relating to future services specified above for contracts without direct participation features (measured at current discount rates) and changes in the effect of the time value of money and financial risks that do not arise from underlying items – e.g. the effect of financial guarantees.

Reinsurance contract

To measure a group of reinsurance contracts, the Group applies the same accounting policies as are applied to insurance contracts without direct participation features, with the following modifications.

The carrying amount of a group of reinsurance contracts at each reporting date is the sum of the asset for remaining coverage and the asset for incurred claims. The asset for remaining coverage comprises:

- *the fulfilment cash flows that relate to services that will be received under the contracts in future periods; and*
- *any remaining contractual service margin at that date.*

The Group measures the estimates of the present value of future cash flows using assumptions that are consistent with those used to measure the estimates of the present value of future cash flows for the underlying insurance contracts, with an adjustment for any risk of non-performance by the reinsurer. The effect of the non-

wanprestasi reasuradur dinilai pada setiap periode pelaporan dan dampak dari perubahan risiko wanprestasi diakui dalam laba rugi.

Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan adalah jumlah risiko yang dialihkan oleh Grup kepada reasuradur.

Pada pengakuan awal, marjin jasa kontraktual dari kelompok kontrak reasuransi merupakan biaya neto atau keuntungan neto atas pembelian reasuransi. Hal tersebut diukur pada jumlah yang sama dan berlawanan dari total:
- arus kas pemenuhan
- jumlah yang timbul akibat penghentian pengakuan aset atau liabilitas yang sebelumnya diakui untuk arus kas terkait dengan kelompok;
- setiap arus kas yang timbul pada tanggal tersebut; dan
- setiap pendapatan yang diakui dalam laba rugi karena kontrak pendasar yang merugi yang diakui pada periode tersebut.

Namun, jika biaya neto atas pembelian pertanggungan reasuransi berkaitan dengan kejadian yang terjadi sebelum pembelian kelompok, maka Grup segera mengakui biaya tersebut dalam laporan laba rugi sebagai beban.

Jumlah tercatat marjin jasa kontraktual pada setiap periode pelaporan adalah jumlah tercatat pada awal periode pelaporan, disesuaikan dengan:
- marjin jasa kontraktual dari setiap kontrak baru yang ditambahkan ke kelompok pada periode tersebut;
- bunga akresian pada jumlah tercatat marjin jasa kontraktual selama periode berjalan, diukur dengan tingkat diskonto atas arus kas yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas item pendasar yang ditentukan pada pengakuan awal;
- penghasilan yang diakui dalam laba rugi periode pelaporan pada saat pengakuan awal kontrak-kontrak pendasar yang merugi;
- pembalikan komponen pemulihan kerugian sepanjang tidak ada perubahan dalam arus kas pemenuhan kelompok kontrak reasuransi;

performance risk of the reinsurer is assessed at each reporting date and the effect of changes in the non-performance risk is recognized in profit or loss.

The risk adjustment for non-financial risk is the amount of risk being transferred by the Group to the reinsurer.

On initial recognition, the contractual service margin of a group of reinsurance contracts represents a net cost or net gain on purchasing reinsurance. It is measured as the equal and opposite amount of the total of:
- *the fulfilment cash flows;*
- *any amount arising from the derecognition of any assets or liabilities previously recognized for cash flows related to the group;*
- *any cash flows arising at that date; and*
- *any income recognized in profit or loss because of onerous underlying contracts recognized at that date.*

However, if any net cost on purchasing reinsurance coverage relates to insured events that occurred before the purchase of the group, then the Group recognizes the cost immediately in profit or loss as an expense.

The carrying amount of the contractual service margin at each reporting date is the carrying amount at the start of the year, adjusted for:
- *the contractual service margin of any new contracts that are added to the group in the year;*
- *interest accreted on the carrying amount of the contractual service margin during the year, measured at the discount rates on nominal cash flows that do not vary based on the returns on any underlying items determined on initial recognition;*
- *income recognized in profit or loss in the year on initial recognition of onerous underlying contracts;*
- *reversals of a loss-recovery component to the extent that they are not changes in the fulfilment cash flows of the group of reinsurance contracts;*

- perubahan arus kas pemenuhan yang terkait dengan jasa masa depan, diukur dengan tingkat diskonto yang ditentukan pada pengakuan awal, kecuali perubahan tersebut dihasilkan dari perubahan arus kas pemenuhan dari kontrak pendasar yang merugi, dalam hal ini diakui dalam laba rugi dan membuat atau menyesuaikan komponen pemulihan kerugian;
- dampak dari perbedaan nilai tukar mata uang pada marjin jasa kontraktual; dan
- jumlah yang diakui dalam laba rugi karena jasa yang diterima pada periode tersebut.

- *changes in fulfilment cash flows that relate to future services, measured at the discount rates determined on initial recognition, unless they result from changes in fulfilment cash flows of onerous underlying contracts, in which case they are recognized in profit or loss and create or adjust a loss-recovery component;*
- *the effect of any currency exchange differences on contractual service margin; and*
- *the amount recognized in profit or loss because of the services received in the period.*

Reasuransi atas kontrak asuransi dasar yang merugi

Grup menyesuaikan marjin jasa kontraktual dari kelompok pemilik kontrak reasuransi dan sebagai akibatnya mengakui pendapatan ketika mengakui kerugian pada pengakuan awal kontrak asuransi pendasar yang merugi, jika kontrak reasuransi ditandatangani sebelum atau pada saat yang sama dengan kontrak yang merugi kontrak diakui. Penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual ditentukan dengan mengalikan:

- jumlah kerugian yang terkait dengan kontrak asuransi pendasar;
- persentase klaim atas kontrak asuransi pendasar yang diharapkan untuk pulih oleh Grup dari kontrak reasuransi.

Reinsurance of Onerous Underlying Insurance Contracts

The Group adjusts the contractual service margin of the group to which a reinsurance contract belongs and as a result recognizes income when it recognizes a loss on initial recognition of onerous underlying contracts, if the reinsurance contract is entered into before or at the same time as the onerous underlying contracts are recognized. The adjustment to the contractual service margin is determined by multiplying:

- *the amount of the loss that relates to the underlying contracts; and*
- *the percentage of claims on the underlying contracts that the Group expects to recover from the reinsurance contracts.*

Jika kontrak reasuransi hanya mencakup sebagian dari kontrak asuransi yang termasuk dalam kelompok kontrak yang merugi, maka Grup menggunakan metode alokasi yang sistematis dan rasional untuk menentukan bagian kerugian yang diakui atas kelompok kontrak yang merugi yang terkait dengan kontrak pendasar yang ditanggung oleh kelompok kontrak reasuransi.

If the reinsurance contract covers only some of the insurance contracts included in an onerous group of contracts, then the Group uses a systematic and rational method to determine the portion of losses recognized on the onerous group of contracts that relates to underlying contracts covered by the reinsurance contract.

Komponen pemulihan kerugian dibuat atau disesuaikan untuk kelompok kontrak reasuransi untuk menggambarkan penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual, yang menentukan jumlah yang disajikan dalam laba rugi sebagai pembalikan pemulihan kerugian atas

A loss-recovery component is created or adjusted for the group of reinsurance contracts to depict the adjustment to the contractual service margin, which determines the amounts that are subsequently presented in profit or loss as reversals of recoveries of losses from the

kontrak reasuransi dan dikecualikan dari alokasi premi reasuransi yang dibayarkan.

vi. Pengukuran - Kontrak diukur dengan menggunakan PAA
Grup menggunakan PAA untuk menyederhanakan pengukuran sekelompok kontrak ketika kriteria berikut dipenuhi pada insepsi:
- Pengukuran liabilitas untuk sisa pertanggungan berdasarkan PAA tidak akan berbeda secara material dari pengukuran berdasarkan *General Measurement Model* (”GMM”), atau
- Masa pertanggungan setiap kontrak dalam kelompok kontrak reasuransi yang dimiliki (termasuk pertanggungan asuransi atas semua premi dalam batas kontrak) adalah satu tahun atau kurang.

PAA dapat diterapkan untuk mengukur kontrak reasuransi yang dimiliki. Namun reasuradur sebenarnya masih diperbolehkan memilih GMM. Grup akan melakukan uji kelayakan jika bermaksud untuk menerapkan pendekatan pengukuran PAA untuk kontrak reasuransi yang dimiliki (kemungkinan hal ini dapat diterapkan untuk kontrak non-proporsional, yaitu reasuransi bencana).

Mengenai ambang batas “immaterialitas”, perbedaan maksimal 5% antara kewajiban sisa pertanggungan yang dihitung menggunakan model pengukuran PAA dan GMM akan dianggap sesuai.

Kontrak asuransi
Pada pengakuan awal setiap kelompok kontrak, jumlah tercatat liabilitas atas sisa masa pertanggungan diukur sebesar premi yang diterima pada pengakuan awal dikurangi arus kas akuisisi asuransi yang dialokasikan ke kelompok tersebut pada tanggal tersebut; kecuali perusahaan memilih untuk mengakui pembayaran tersebut sebagai beban dan disesuaikan dengan setiap jumlah yang timbul dari penghentian pengakuan arus kas akuisisi aset dan aset atau liabilitas lain yang sebelumnya diakui untuk arus kas yang terkait dengan kelompok kontrak (termasuk aset untuk arus kas akuisisi asuransi).

reinsurance contracts and are excluded from the allocation of reinsurance premiums paid.

vi. Measurement – Contracts measured under the PAA
The Group uses the PAA to simplify the measurement of groups of contracts when the following criteria are met at inception:

- *Measurement of liability for remaining coverage under PAA would not differ materially from measurement under General Measurement Model (”GMM”), or*
- *Coverage period of each contract in the group of reinsurance contracts held (including insurance coverage from all premiums within the contract boundary) is one year or less.*

PAA can be applied to measure reinsurance contracts held. However, reinsurer is actually still allowed to choose GMM instead. The Group will perform eligibility test if intends to apply PAA measurement approach for reinsurance contracts held (possibly this can be applicable for the non-proportional contracts, i.e. catastrophe reinsurance).

Regarding the “immateriality” threshold, maximum of 5% difference between the liability of remaining coverage calculated using PAA and GMM measurement models will be considered as appropriate.

Insurance contracts
On initial recognition of each group of contracts, the carrying amount of the liability for remaining coverage is measured at the premiums received on initial recognition minus any insurance acquisition cash flows allocated to the group at that date; unless the entity chooses to recognize the payments as an expense and adjusted for any amount arising from the derecognition of any asset for insurance acquisition cash flow and any other assets or liabilities previously recognized for cash flows related to the group of contracts (including assets for insurance acquisition cash flows).

Grup memiliki opsi untuk (atau tidak) memilih beban arus kas akuisisi asuransi saat terjadinya.

Selanjutnya, jumlah tercatat liabilitas untuk sisa masa pertanggungan ditambah dengan setiap premi yang diterima, amortisasi arus kas akuisisi asuransi yang diakui sebagai beban; kecuali Grup memilih untuk mengakui arus kas akuisisi asuransi sebagai beban dan setiap penyesuaian terhadap komponen pembiayaan dikurangi dengan jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi untuk jasa yang diberikan, setiap tambahan arus kas akuisisi asuransi dialokasikan setelah pengakuan awal; kecuali Grup memilih untuk mengakui pembayaran tersebut sebagai beban dan setiap komponen investasi dialihkan ke liabilitas atas terjadinya klaim.

Grup tidak diharuskan untuk menyesuaikan liabilitas untuk sisa pertanggungan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan jika pada pengakuan awal setiap kelompok kontrak perusahaan mengharapkan waktu antara setiap bagian jasa dan tanggal jatuh tempo premi tidak lebih dari satu tahun.

Jika sewaktu-waktu selama masa pertanggungan, fakta dan keadaan menunjukkan bahwa sekelompok kontrak asuransi merugi, maka perusahaan mengakui kerugian dalam laba rugi dan meningkatkan liabilitas sisa masa pertanggungan sepanjang estimasi kini atas arus kas pemenuhan yang terkait dengan sisa pertanggungan melebihi jumlah tercatat liabilitas untuk sisa pertanggungan. Arus kas pemenuhan didiskontokan (dengan kurs saat ini) jika liabilitas atas klaim yang terjadi juga didiskontokan.

Grup mengakui liabilitas atas kejadian klaim untuk sekelompok kontrak asuransi sebesar arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan kejadian klaim. Arus kas masa depan didiskontokan (dengan kurs saat ini) kecuali diharapkan akan dibayar dalam waktu satu tahun atau kurang sejak tanggal terjadinya klaim.

The Group has an option to (or not to) choose expense insurance acquisition cash flows when they are incurred.

Subsequently, the carrying amount of the liability for remaining coverage is increased by any premiums received, the amortization of insurance acquisition cash flows recognized as expenses; unless the Group chooses to recognize insurance acquisition cash flows as an expense and any adjustment to a financing component while decreased by the amount recognized as insurance revenue for services provided, any additional insurance acquisition cash flows allocated after initial recognition; unless the Group chooses to recognize the payment as an expense and any investment component transferred to the liability for incurred claims.

The Group is not required to adjust the liability for remaining coverage to reflect the time value of money and the effect of financial risk if at initial recognition of each group of contracts the Group expects that the time between providing each part of the services and the related premium due date is no more than a year.

If at any time during the coverage period, facts and circumstances indicate that a group of contracts is onerous, then the Group recognizes a loss in profit or loss and increases the liability for remaining coverage to the extent that the current estimates of the fulfilment cash flows that relate to remaining coverage exceed the carrying amount of the liability for remaining coverage. The fulfilment cash flows are discounted (at current rates) if the liability for incurred claims is also discounted.

The Group recognizes the liability for incurred claims of a group of insurance contracts at the amount of the fulfilment cash flows relating to incurred claims. The future cash flows are discounted (at current rates) unless they are expected to be paid in one year or less from the date the claims are incurred.

Kontrak Reasuransi
Grup menerapkan kebijakan akuntansi yang sama untuk mengukur kelompok kontrak reasuransi, diadaptasi bila perlu untuk mencerminkan fitur yang berbeda dari kontrak asuransi.

Jika komponen pemulihan kerugian dibuat untuk sekelompok kontrak reasuransi yang diukur berdasarkan PAA, maka Grup menyesuaikan jumlah tercatat aset untuk sisa pertanggungan, bukan menyesuaikan marjin jasa kontraktual.

Ringkasan pendekatan pengukuran

Kontrak asuransi:

Reinsurance Contracts
The Group applies the same accounting policies to measure a group of reinsurance contracts, adapted where necessary to reflect features that differ from those of insurance contracts.

If a loss-recovery component is created for a group of reinsurance contracts measured under the PAA, then the Group adjusts the carrying amount of the asset for remaining coverage instead of adjusting the contractual service margin.

Summary of measurement approach

Insurance contract:

Klasifikasiproduk/ ***Product Classification***	***Model pengukuran/ Measurement model***
Kontrak asuransi/ *Insurance contracts*	*General Measurement Model ("GMM")*
Kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung/ *Insurance contracts with direct particitpation fetures*	*Variable Fee Approach ("VFA")*

Kontrak reasuransi:

Reinsurance contract:

Kontrak yang diterbitkan/ ***Contracts Issued***	**Klasifikasiproduk/** ***Product Classification***	***Model pengukuran/ Measurement model***
Excess of loss	Kontrak reasuransi/ *Reinsurance contract held*	*General Measurement Model ("GMM")*
Proportional	Kontrak reasuransi/ *Reinsurance contract held*	*Premium Allocation Approach ("PAA")*

vii. Penghentian pengakuan dan modifikasi kontrak
Grup menghentikan pengakuan suatu kontrak ketika kontrak tersebut dihapuskan – yaitu ketika kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tersebut berakhir atau dihentikan atau dibatalkan. Grup juga menghentikan pengakuan kontrak jika syarat-syaratnya dimodifikasi dengan cara yang akan mengubah akuntansi kontrak secara signifikan seandainya syarat-syarat baru selalu ada, dalam hal ini kontrak baru berdasarkan syarat-syarat yang dimodifikasi diakui. Jika modifikasi kontrak tidak memenuhi penghentian pengakuan, maka Grup memperlakukan perubahan arus kas dari modifikasi tersebut sebagai perubahan estimasi arus kas pemenuhan.

vii. Derecognition and contract modification

The Group derecognizes a contract when it is extinguished – i.e. when the specified obligations in the contract expire or are discharged or cancelled. The Group also derecognizes a contract if its terms are modified in a way that would have changed the accounting for the contract significantly had the new terms always existed, in which case a new contract based on the modified terms is recognized. If a contract modification does not result in derecognition, then the Group treats the changes in cash flows caused by the modification as changes in estimates of fulfilment cash flows.

Pada penghentian pengakuan kontrak dari kelompok kontrak yang tidak diukur berdasarkan PAA:

- arus kas pemenuhan yang dialokasikan ke grup disesuaikan untuk mengeliminasi hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dihentikan pengakuannya;
- Marjin jasa kontraktual grup disesuaikan dengan perubahan arus kas pemenuhan, kecuali jika perubahan tersebut dialokasikan ke komponen kerugian; dan
- jumlah unit pertanggungan untuk sisa layanan yang diharapkan disesuaikan untuk mencerminkan unit pertanggungan yang dihentikan pengakuannya dari grup.

Jika suatu kontrak dihentikan pengakuannya karena dialihkan kepada pihak ketiga, maka marjin jasa kontraktual juga disesuaikan dengan premi yang dibebankan oleh pihak ketiga tersebut, kecuali jika grup tersebut merugi.

Jika suatu kontrak dihentikan pengakuannya karena persyaratannya dimodifikasi, maka marjin jasa kontraktual juga disesuaikan dengan premi yang akan dibebankan seandainya Grup mengadakan kontrak dengan persyaratan kontrak baru pada tanggal modifikasi, dikurangi premi tambahan yang dibebankan untuk modifikasi. Kontrak baru yang diakui diukur dengan asumsi bahwa, pada tanggal modifikasi, Grup menerima premi yang akan dibebankan dikurangi premi tambahan yang dibebankan untuk modifikasi.

viii. Penyajian

Portofolio kontrak asuransi yang merupakan aset dan liabilitas serta portofolio kontrak reasuransi yang merupakan aset dan liabilitas disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Setiap aset atau liabilitas yang diakui untuk arus kas yang timbul sebelum pengakuan kelompok kontrak terkait (termasuk aset untuk arus kas akuisisi asuransi) dimasukkan dalam jumlah tercatat portofolio kontrak terkait.

On derecognition of a contract from within a group of contracts not measured under the PAA:

- *the fulfilment cash flows allocated to the group are adjusted to eliminate those that relate to the rights and obligations derecognized;*
- *the contractual service margin of the group is adjusted for the change in the fulfilment cash flows, except where such changes are allocated to a loss component; and*
- *the number of coverage units for the expected remaining services is adjusted to reflect the coverage units derecognized from the group.*

If a contract is derecognized because it is transferred to a third party, then the contractual service margin is also adjusted for the premium charged by the third party, unless the group is onerous.

If a contract is derecognized because its terms are modified, then the contractual service margin is also adjusted for the premium that would have been charged had the Group entered into a contract with the new contract's terms at the date of modification, less any additional premium charged for the modification. The new contract recognized is measured assuming that, at the date of modification, the Group received the premium that it would have charged less any additional premium charged for the modification.

viii. Presentation

Portfolios of insurance contracts that are assets and those that are liabilities, and portfolios of reinsurance contracts that are assets and those that are liabilities, are presented separately in the statement of financial position. Any assets or liabilities recognized for cash flows arising before the recognition of the related group of contracts (including any assets for insurance acquisition cash flows) are included in the carrying amount of the related portfolios of contracts.

Grup memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi menjadi:

- hasil jasa asuransi, yang terdiri dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi; dan
- penghasilan atau beban keuangan asuransi.

Pendapatan dan beban dari kontrak reasuransi disajikan terpisah dari pendapatan dan beban dari kontrak asuransi. Grup dapat menyajikan pendapatan atau beban dari kelompok kontrak reasuransi milikan, secara terpisah dari penghasilan atau beban keuangan asuransi, sebagai satu jumlah; atau entitas dapat menyajikan secara terpisah jumlah yang dipulihkan dari reasuradur dan alokasi premi yang dibayarkan secara bersama-sama memberikan jumlah bersih yang setara dengan jumlah tunggal tersebut. Grup telah memilih untuk menyajikan secara terpisah jumlah yang dipulihkan dari reasuradur dan alokasi premi yang dibayarkan.

Grup tidak disyaratkan untuk memisahkan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan antara hasil jasa asuransi dan penghasilan atau beban keuangan asuransi, dimana mencakup seluruh perubahan penyesuaian risiko nonkeuangan sebagai bagian dari hasil jasa asuransi. Grup memilih untuk tidak memisahkan perubahan penyesuaian risiko untuk risiko nonkeuangan antara hasil jasa asuransi dan pendapatan atau beban keuangan asuransi.

Pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi tidak memasukkan komponen investasi dan diakui sebagai berikut.

Pendapatan Asuransi – Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA
Grup mengakui pendapatan asuransi pada saat memenuhi kewajiban pelaksanaannya – yaitu pada saat Grup menyediakan jasa berdasarkan kelompok kontrak asuransi. Untuk kontrak yang tidak diukur berdasarkan PAA, pendapatan asuransi yang berkaitan dengan jasa yang diberikan untuk setiap tahun merupakan total perubahan liabilitas untuk sisa

The Group disaggregates amounts recognized in the statement of profit or loss into:

- *insurance service result, comprising insurance revenue and insurance service expenses; and*
- *insurance finance income or expenses.*

Income and expenses from reinsurance contracts are presented separately from income and expenses from insurance contracts. Group may present the income or expenses from a group of reinsurance contracts held, other than insurance finance income or expenses, as a single amount; or the entity may present separately the amounts recovered from the reinsurer and an allocation of the premiums paid that together give a net amount equal to that single amount. The Group has elected to present separately the amounts recovered from the reinsurer and an allocation of the premiums paid.

The Group is not required to disaggregate the change in risk adjustment for non-financial risk between insurance service result and insurance finance income or expenses, where it shall include the entire change in the risk adjustment for non-financial risk as part of the insurance service result. The Group has elected not to disaggregate changes in the risk adjustment for non-financial risk between the insurance service result and insurance finance income or expenses.

Insurance revenue and insurance service expenses exclude any investment components and are recognised as follows.

Insurance Revenue – Contracts not measured under PAA
The Group recognizes insurance revenue as it satisfies its performance obligations – i.e. as it provides services under groups of insurance contracts. For contracts not measured under the PAA, the insurance revenue relating to services provided for each year represents the total of the changes in the liability for remaining coverage that relate to services for which

pertanggungan yang terkait dengan jasa yang diperkirakan akan diterima oleh Grup, dan terdiri dari hal-hal berikut:

- Pelepasan marjin jasa kontraktual, diukur berdasarkan unit cakupan yang disediakan;
- Perubahan dalam penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan yang terkait dengan jasa saat ini;
- Klaim dan beban jasa asuransi lainnya yang timbul dalam tahun berjalan, umumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan pada awal tahun. Ini termasuk jumlah yang timbul dari penghentian pengakuan aset untuk arus kas selain dari arus kas akuisisi asuransi pada tanggal pengakuan awal sekelompok kontrak, yang diakui sebagai pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi pada tanggal tersebut;
- Jumlah lain, termasuk penyesuaian pengalaman untuk penerimaan premi selain yang terkait dengan jasa masa depan.

Selain itu, Grup mengalokasikan porsi premi yang terkait dengan pemulihan arus kas akuisisi asuransi ke setiap periode secara sistematis berdasarkan berlalunya waktu. Grup mengakui jumlah yang dialokasikan, disesuaikan dengan pertambahan bunga pada tingkat diskonto yang ditentukan pada pengakuan awal kelompok kontrak terkait, sebagai pendapatan asuransi dan jumlah yang sama sebagai beban jasa asuransi.

Pelepasan Marjin Jasa Kontraktual

Jumlah marjin jasa kontraktual dari sekelompok kontrak asuransi yang diakui sebagai pendapatan asuransi pada setiap tahun ditentukan dengan mengidentifikasi unit pertanggungan dalam kelompok tersebut, mengalokasikan sisa marjin jasa kontraktual pada akhir tahun (sebelum alokasi) sama untuk setiap pertanggungan unit yang disediakan pada tahun tersebut dan diharapkan akan tersedia pada tahun-tahun mendatang, dan mengakui dalam laporan laba rugi jumlah marjin jasa kontraktual yang dialokasikan untuk unit pertanggungan yang disediakan pada tahun tersebut. Jumlah unit pertanggungan adalah jumlah layanan yang diberikan oleh kontrak dalam kelompok, ditentukan dengan

the Group expects to receive consideration, and comprises the following items:

- *A release of the contractual service margin, measured based on coverage units provided;*
- *Changes in the risk adjustment for non-financial risk relating to current services;*
- *Claims and other insurance service expenses incurred in the year, generally measured at the amounts expected at the beginning of the year. This includes amounts arising from the derecognition of any assets for cash flows other than insurance acquisition cash flows at the date of initial recognition of a group of contracts, which are recognized as insurance revenue and insurance service expenses at that date;*
- *Other amounts, including experience adjustments for premium receipts other than those that relate to future services.*

In addition, the Group allocates a portion of premiums that relate to recovering insurance acquisition cash flows to each period in a systematic way based on the passage of time. The Group recognizes the allocated amount, adjusted for interest accretion at the discount rates determine on initial recognition of the related group of contracts, as insurance revenue and an equal amount as insurance service expenses.

Release of Contractual Service Margin

The amount of the contractual service margin of a group of insurance contracts that is recognized as insurance revenue in each year is determined by identifying the coverage units in the group, allocating the contractual service margin remaining at the end of the year (before any allocation) equally to each coverage unit provided in the year and expected to be provided in future years, and recognising in profit or loss the amount of the contractual service margin allocated to coverage units provided in the year. The number of coverage units is the quantity of services provided by the contracts in the group, determined by considering for each contract the quantity of benefits provided and its expected

mempertimbangkan untuk setiap kontrak jumlah manfaat yang diberikan dan periode pertanggungan yang diharapkan. Unit pertanggungan yang ditinjau dan diperbarui pada setiap tanggal pelaporan.

coverage period. The coverage units are reviewed and updated at each reporting date.

Jasa yang disediakan oleh kontrak asuransi mencakup pertanggungan asuransi dan, untuk semua kontrak partisipasi langsung, jasa investasi untuk mengelola aset dasar atas nama pemegang polis. Selain itu, kontrak tanpa fitur partisipasi langsung juga dapat memberikan jasa investasi untuk menghasilkan pengembalian investasi bagi pemegang polis, tetapi hanya jika:

- komponen investasi ada atau pemegang polis memiliki hak untuk menarik suatu jumlah (misalnya hak pemegang polis untuk menerima nilai penyerahan atas pembatalan kontrak);
- komponen investasi atau jumlah penarikan diharapkan mencakup pengembalian investasi; dan
- Grup mengharapkan untuk melakukan aktivitas investasi untuk menghasilkan pengembalian investasi tersebut.

Services provided by insurance contracts include insurance coverage and, for all direct participating contracts, investment services for managing underlying items on behalf of policyholders. In addition, contracts without direct participation features may also provide investment services for generating an investment return for the policyholder, but only if:

- *an investment component exists or the policyholder has a right to withdraw an amount (e.g. the policyholder's right to receive a surrender value on cancellation of a contract);*
- *the investment component or withdrawal amount is expected to include an investment return; and*
- *the Group expects to perform investment activities to generate that investment return.*

Jangka waktu pertanggungan yang diharapkan mencerminkan ekspektasi akan kedaluwarsa dan pembatalan kontrak, serta kemungkinan kejadian yang diasuransikan terjadi sejauh hal itu akan mempengaruhi perkiraan periode pertanggungan. Periode layanan investasi berakhir selambat-lambatnya pada tanggal di mana semua jumlah terhutang kepada pemegang polis saat ini terkait dengan jasa tersebut telah dibayarkan.

The expected coverage period reflects expectations of lapses and cancellations of contracts, as well as the likelihood of insured events occurring to the extent that they would affect the expected coverage period. The period of investment services ends no later than the date on which all amounts due to current policyholders relating to those services have been paid.

Pendapatan Asuransi – Kontrak diukur berdasarkan PAA
Untuk kontrak yang diukur berdasarkan PAA, pendapatan asuransi untuk setiap periode adalah jumlah penerimaan premi yang diharapkan untuk penyediaan jasa pada periode tersebut.

Insurance Revenue – Contracts measured under PAA
For contracts measured under the PAA, the insurance revenue for each period is the amount of expected premium receipts for providing services in the period.

Komponen Kerugian
Untuk kontrak yang tidak diukur berdasarkan PAA, Grup menetapkan komponen kerugian dari liabilitas sisa pertanggungan untuk kelompok kontrak asuransi yang merugi. Komponen kerugian menentukan jumlah arus kas pemenuhan yang selanjutnya disajikan dalam laba rugi

Loss Components
For contracts not measured under the PAA, the Group establishes a loss component of the liability for remaining coverage for onerous groups of insurance contracts. The loss component determines the amounts of fulfilment cash flows that are subsequently presented in profit or loss as reversals of

sebagai pembalik kerugian atas kontrak yang merugi dan dikecualikan dari pendapatan asuransi ketika hal itu terjadi. Ketika arus kas pemenuhan terjadi, mereka dialokasikan antara komponen kerugian dan liabilitas untuk sisa pertanggungan tidak termasuk komponen kerugian secara sistematis.

Dasar sistematis ditentukan oleh proporsi komponen kerugian relatif terhadap total estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan ditambah penyesuaian risiko untuk risiko nonkeuangan pada setiap awal tahun (atau pada pengakuan awal jika sekelompok kontrak awalnya diakui pada tahun tersebut).

Perubahan arus kas pemenuhan terkait dengan jasa masa depan dan perubahan jumlah bagian Grup atas nilai wajar item pendasar untuk kontrak partisipasi langsung dialokasikan sepenuhnya ke komponen kerugian. Jika komponen kerugian dikurangi menjadi nol, maka setiap kelebihan dari jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian menciptakan marjin jasa kontraktual baru untuk kelompok kontrak.

Beban Jasa Asuransi

Beban jasa asuransi yang timbul dari kontrak asuransi diakui dalam laba rugi pada umumnya pada saat terjadinya. Mereka mengecualikan pembayaran komponen investasi dan terdiri dari item berikut.

- Klaim yang timbul (tidak termasuk komponen investasi) dan beban jasa asuransi lainnya:
- Amortisasi arus kas akuisisi asuransi;
- Perubahan yang terkait dengan jasa lalu, yaitu perubahan arus kas pemenuhan sehubungan dengan liabilitas atas kejadian klaim;
- Perubahan yang terkait dengan jasa masa depan, misalnya kerugian pada kelompok kontrak yang merugi dan pembalikan atas kerugian tersebut.

losses on onerous contracts and are excluded from insurance revenue when they occur. When the fulfilment cash flows are incurred, they are allocated between the loss component and the liability for remaining coverage excluding the loss component on a systematic basis.

The systematic basis is determined by the proportion of the loss component relative to the total estimate of the present value of the future cash outflows plus the risk adjustment for nonfinancial risk at the beginning of each year (or on initial recognition if a group of contracts is initially recognized in the year).

Changes in fulfilment cash flows relating to future services and changes in the amount of the Group's share of the fair value of the underlying items for direct participating contracts are allocated solely to the loss component. If the loss component is reduced to zero, then any excess over the amount allocated to the loss component creates a new contractual service margin for the group of contracts.

Insurance Service Expenses

Insurance service expenses arising from insurance contracts are recognized in profit or loss generally as they are incurred. They exclude repayments of investment components and comprise the following items.

- *Incurred claims (excluding investment components) and other insurance service expenses:*
- *Amortisation of insurance acquisition cash flows;*
- *Changes that relate to past service, i.e. changes in fulfilment cash flows relating to the liability for incurred claims;*
- *Changes that relate to future service, i.e. losses on onerous groups of contracts and reversals of such losses.*

Pendapatan (beban) bersih dari kontrak reasuransi

Pendapatan (beban) bersih dari kontrak reasuransi terdiri dari alokasi premi reasuransi yang dibayarkan dikurangi jumlah yang dipulihkan dari reasuransi. Pendapatan (beban) bersih dari kontrak reasuransi terdiri dari pendapatan premi reasuransi dan beban premi reasuransi.

Grup mengakui alokasi premi reasuransi yang dibayarkan pada laba rugi pada saat Grup menerima jasa berdasarkan kelompok kontrak reasuransi. Untuk kontrak yang tidak diukur berdasarkan PAA, alokasi premi reasuransi yang dibayarkan terkait dengan jasa yang diterima untuk setiap periode merupakan total perubahan aset untuk sisa pertanggungan yang terkait dengan jasa yang mana Grup diperkirakan untuk membayar imbalan.

Untuk kontrak yang diukur berdasarkan PAA, alokasi premi reasuransi yang dibayarkan untuk setiap periode adalah jumlah pembayaran premi yang diharapkan untuk menerima jasa pada periode tersebut.

Untuk sekelompok kontrak reasuransi yang mencakup kontrak dasar yang merugi, Grup menetapkan komponen pemulihan kerugian dari aset untuk sisa pertanggungan untuk menggambarkan pemulihan kerugian yang diakui:

- pada pengakuan kontrak dasar yang merugi, jika kontrak reasuransi yang mencakup kontrak tersebut dilakukan sebelum atau pada saat yang sama dengan kontrak tersebut diakui; dan
- untuk perubahan arus kas pemenuhan kelompok kontrak reasuransi terkait dengan jasa masa depan yang dihasilkan dari perubahan arus kas pemenuhan kontrak dasar yang merugi

Komponen pemulihan kerugian menentukan jumlah yang selanjutnya disajikan dalam laba rugi sebagai pembalik pemulihan kerugian dari kontrak reasuransi dan dikeluarkan dari alokasi premi reasuransi yang dibayarkan. Hal ini disesuaikan untuk mencerminkan perubahan dalam komponen kerugian dari kelompok kontrak pendasar yang merugi, tetapi tidak dapat melebihi porsi komponen kerugian dari kelompok

Net income (expenses) from reinsurance contracts

Net income (expenses) from reinsurance contracts comprise an allocation of reinsurance premiums paid less amounts recovered from reinsurers. Net income (expense) from reinsurance contracts comprise of reinsurance premium revenue and reinsurance premium expense.

The Group recognizes an allocation of reinsurance premiums paid in profit or loss as it receives services under groups of reinsurance contracts. For contracts not measured under the PAA, the allocation of reinsurance premiums paid relating to services received for each period represents the total of the changes in the asset for remaining coverage that relate to services for which the Group expects to pay consideration.

For contracts measured under the PAA, the allocation of reinsurance premiums paid for each period is the amount of expected premium payments for receiving services in the period.

For a group of reinsurance contracts covering onerous underlying contracts, the Group establishes a loss-recovery component of the asset for remaining coverage to depict the recovery of losses recognized:

- *on recognition of onerous underlying contracts, if the reinsurance contract covering those contracts is entered into before or at the same time as those contracts are recognized; and*
- *for changes in fulfilment cash flows of the group of reinsurance contracts relating to future services that result from changes in fulfilment cash flows of the onerous underlying contracts.*

The loss-recovery component determines the amounts that are subsequently presented in profit or loss as reversals of recoveries of losses from the reinsurance contracts and are excluded from the allocation of reinsurance premiums paid. It is adjusted to reflect changes in the loss component of the onerous group of underlying contracts, but it cannot exceed the portion of the loss component of the

kontrak pendasar yang merugi yang diperkirakan akan dipulihkan oleh Grup dari kontrak reasuransi.

Pendapatan dan Beban Keuangan Asuransi
Pendapatan dan beban keuangan asuransi terdiri dari perubahan nilai tercatat kelompok kontrak asuransi dan reasuransi yang timbul dari dampak nilai waktu uang, risiko keuangan dan perubahan di dalamnya, kecuali perubahan tersebut untuk kelompok kontrak partisipasi langsung yang dialokasikan pada komponen kerugian dan termasuk dalam beban jasa asuransi. Mereka termasuk perubahan dalam pengukuran kelompok kontrak yang disebabkan oleh perubahan nilai item yang mendasarinya (tidak termasuk penambahan dan penarikan).

Grup telah memilih untuk memisahkan pendapatan atau beban keuangan asuransi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Jumlah yang termasuk dalam laba rugi ditentukan oleh alokasi sistematis dari total pendapatan atau beban keuangan asuransi yang diharapkan selama durasi kelompok kontrak.

Jumlah yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lainnya diakumulasikan dalam cadangan pembiayaan asuransi. Jika Grup menghentikan pengakuan kontrak tanpa fitur partisipasi langsung sebagai akibat dari pengalihan kepada pihak ketiga atau modifikasi kontrak, maka sisa jumlah akumulasi penghasilan komprehensif lainnya untuk kontrak tersebut direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

ix. Transisi
Pada 1 Januari 2024, Grup menerapkan pendekatan berikut untuk mengidentifikasi dan mengukur kelompok kontrak asuransi pada saat transisi ke PSAK 117.

onerous group of underlying contracts that the Group expects to recover from the reinsurance contracts.

Insurance Finance Income and Expenses
Insurance finance income and expenses comprise changes in the carrying amounts of groups of insurance and reinsurance contracts arising from the effects of the time value of money, financial risk and changes therein, unless any such changes for groups of direct participating contracts are allocated to a loss component and included in insurance service expenses. They include changes in the measurement of groups of contracts caused by changes in the value of underlying items (excluding additions and withdrawals).

The Group has chosen to disaggregate insurance finance income or expenses between profit or loss and other comprehensive income. The amount included in profit or loss is determined by a systematic allocation of the expected total insurance finance income or expenses over the duration of the group of contracts.

Amounts presented in other comprehensive income are accumulated in the insurance finance reserve. If the Group derecognizes a contract without direct participation features as a result of a transfer to a third party or a contract modification, then any remaining amounts of accumulated other comprehensive income for the contract are reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

ix. Transition
At 1 January 2024, the Group applied the following approaches to identify and measure certain groups of insurance contracts on transition to SFAS 117.

Tahun terbit/ ***Year of Issuance***	***Pendekatan transisi/ Transition Approach***
2019 – 2023	*Full Retrospective Approach & Fair Value Approach (FVA)*
Sebelum 2014*/ Before 2014*	*Fair Value Approach (FVA)*

Untuk risiko jangka pendek dan jangka panjang, Grup menerapkan pendekatan retrospektif penuh atau pendekatan nilai wajar dalam PSAK 117 untuk mengidentifikasi, mengakui dan mengukur kelompok kontrak tertentu pada 1 Januari 2024, karena tidak praktis untuk menerapkan retrospektif penuh.

For the short-term and long-term risks, the Group applied the modified retrospective approach or the fair value approach in SFAS 117 to identify, recognise and measure certain groups of contracts at 1 January 2024, because it was impracticable to apply the full retrospective approach.

Untuk kelompok kontrak tertentu, Grup menerapkan pendekatan pendekatan nilai wajar dalam PSAK 117 untuk mengidentifikasi, mengakui dan mengukur kelompok kontrak tertentu pada tanggal 1 Januari 2024 karena tidak praktis untuk menerapkan pendekatan retrospektif penuh.

For certain groups of contracts, the Group applied the fair value approach in PSAK 117 to identify, recognise and measure certain groups of contracts at 1 January 2024 because it was impracticable to apply the full retrospective approach.

Grup menganggap pendekatan retrospektif penuh tidak praktis untuk kontrak di segmen ini dalam kondisi dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan karena informasi yang diperlukan belum dikumpulkan (atau belum dikumpulkan dengan rincian yang memadai) dan tidak tersedia karena migrasi sistem, persyaratan penyimpanan data, atau alasan lainnya.

The Group considered the full retrospective approach impracticable for contracts in these segments under any the effects of retrospective application were not determinable because the information required had not been collected (or had not been collected with sufficient granularity) and was unavailable because of system migrations, data retention requirements or other reasons.

Kontrak Asuransi dan Reasuransi – Pendekatan Nilai Wajar

Berdasarkan pendekatan nilai wajar, marjin jasa kontraktual (atau komponen kerugian) pada 1 Januari 2024 ditentukan sebagai selisih antara nilai wajar sekelompok kontrak pada tanggal tersebut dan arus kas pemenuhan pada tanggal tersebut.

Insurance and Reinsurance Contracts – Fair Value Approach

Under the fair value approach, the contractual service margin (or the loss component) at January 1, 2024 was determined as the difference between the fair value of a group of contracts at that date and the fulfilment cash flows at that date.

Untuk semua kontrak yang diukur dengan pendekatan nilai wajar, Grup menggunakan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia pada 1 Januari 2024 untuk menentukan:

- bagaimana mengidentifikasi kelompok kontrak;
- apakah suatu kontrak memenuhi definisi kontrak partisipasi langsung; dan
- bagaimana mengidentifikasi arus kas diskresian untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung.

For all contracts measured under the fair value approach, the Group used reasonable and supportable information available at January 1, 2024 to determine:

- *how to identify groups of contracts;*
- *whether a contract meets the definition of a direct participating contract; and*
- *how to identify discretionary cash flows for contracts without direct participation features.*

Beberapa kelompok kontrak yang diukur berdasarkan pendekatan nilai wajar berisi kontrak yang diterbitkan lebih dari satu tahun terpisah. Untuk kelompok ini, tingkat diskonto pada pengakuan awal ditentukan pada 1 Januari 2024, bukan pada tanggal pengakuan awal.

Some groups of contracts measured under the fair value approach contain contracts issued more than one year apart. For these groups, the discount rates on initial recognition were determined at January 1, 2024 instead of at the date of initial recognition.

Untuk semua kontrak yang diukur berdasarkan pendekatan nilai wajar, jumlah pendapatan atau beban keuangan asuransi yang diakumulasikan dalam cadangan pembiayaan asuransi pada tanggal 1 Januari 2024 ditentukan sebesar nol.

For all contracts measured under the fair value approach, the amount of insurance finance income or expenses accumulated in the insurance finance reserve at January 1, 2024 was determined to be zero.

Untuk kelompok kontrak reasuransi yang mencakup kontrak dasar yang merugikan, Grup menetapkan komponen pemulihan kerugian pada tanggal 1 Januari 2024. Grup menentukan komponen pemulihan kerugian dengan mengalikan:

- jumlah komponen kerugian yang terkait dengan kontrak pendasar pada tanggal 1 Januari 2024; dan
- persentase klaim atas kontrak pendasar yang diperkirakan akan dipulihkan oleh Grup dari kontrak reasuransi

For groups of reinsurance contracts covering onerous underlying contracts, the Group established a loss-recovery component at January 1, 2024. The Group determined the loss-recovery component by multiplying:

- *the amount of the loss component that relates to the underlying contracts at January 1, 2024; and*
- *the percentage of claims on the underlying contracts that the Group expected to recover from the reinsurance contracts.*

Arus Kas Akuisisi Asuransi – Pendekatan Nilai Wajar

Grup mengukur aset untuk arus kas akuisisi asuransi berdasarkan pendekatan nilai wajar sebesar jumlah yang sama dengan arus kas akuisisi asuransi yang akan terjadi pada 1 Januari 2024 untuk hak memperoleh:

- pemulihan arus kas akuisisi asuransi dari premi kontrak yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2024 tetapi belum diakui pada tanggal tersebut, dan pembaruan kontrak tersebut;
- perpanjangan kontrak yang diakui pada 1 Januari 2024; dan
- kontrak masa depan lainnya setelah 1 Januari 2024 tanpa membayar kembali arus kas akuisisi asuransi yang telah dibayarkan.

Insurance Acquisition Cash Flows – Fair Value Approach

The Group measured an asset for insurance acquisition cash flows under the fair value approach at an amount equal to the insurance acquisition cash flows that it would incur at January 1, 2024 for the rights to obtain:

- *recoveries of insurance acquisition cash flows from premiums of contracts issued before January 1, 2024 but not yet recognized at that date, and renewals of such contracts;*
- *renewals of contracts recognized at January 1, 2024; and*
- *other future contracts after January 1, 2024 without paying again insurance acquisition cash flows that it has already paid.*

Jumlah yang Ditentukan pada saat Transisi ke PSAK 117

Untuk kontrak asuransi yang tidak diukur berdasarkan PAA, analisis pendapatan asuransi untuk kontrak asuransi dan marjin jasa kontraktual dengan metode transisi disertakan dalam tabel berikut.

Amounts Determined on Transition to SFAS 117

For insurance contracts not measured under the PAA, an analysis of insurance revenue for insurance contracts and the contractual service margin by transition method is included in the following tables.

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*			
	Asuransi Umum/ *General Insurance*	Asuransi Jiwa/ *Life Insurance*	Jumlah / *Total*	
Jumlah yang ditentukan pada saat Transisi ke PSAK 117				***Amounts Determined on Transition to PSAK 117***
Kontrak asuransi				***Insurance contracts***
Pendapatan asuransi				***Insurance revenue***
Kontrak yang diukur berdasarkan pendekatan nilai wajar pada saat transisi	--	--	--	*New contracts and contracts measured under full retrospective approach at transition*
Kontrak baru dan kontrak yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi	(7,874,726)	(11,734,629)	(19,609,355)	*Contracts measured under fair value approach at transition*
	(7,874,726)	(11,734,629)	(19,609,355)	
Marjin Jasa Kontraktual				***Contractual Service Margin***
Kontrak yang diukur berdasarkan pendekatan nilai wajar pada saat transisi	7,079	180	7,259	*New contracts and contracts measured under full retrospective approach at transition*
Kontrak baru dan kontrak yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi	(1,372,268)	(2,242,153)	(3,614,421)	*Contracts measured under fair value approach at transition*
	(1,365,189)	(2,241,973)	(3,607,162)	
Kontrak reasuransi				***Reinsurance contracts***
Marjin Jasa Kontraktual				***Contractual Service Margin***
Kontrak yang diukur berdasarkan pendekatan nilai wajar pada saat transisi	142,906	28	142,934	*New contracts and contracts measured under full retrospective approach at transition*
Kontrak baru dan kontrak yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi	594,800	(10,250)	584,550	*Contracts measured under fair value approach at transition*
	737,706	(10,222)	727,484	

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Asuransi Umum/ *General Insurance*	**Asuransi Jiwa/** *Life Insurance*	**Jumlah /** *Total*	
Jumlah yang ditentukan pada saat Transisi ke PSAK 117				***Amounts Determined on Transition to PSAK 117***
Kontrak asuransi				***Insurance contracts***
Pendapatan asuransi				***Insurance revenue***
Kontrak yang diukur berdasarkan pendekatan nilai wajar pada saat transisi	(1,477,799)	(4,728,647)	(6,206,446)	*New contracts and contracts measured under full retrospective approach at transition*
Kontrak baru dan kontrak yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi	(6,154,317)	(7,065,898)	(13,220,215)	*Contracts measured under fair value approach at transition*
	(7,632,116)	(11,794,545)	(19,426,661)	
Marjin Jasa Kontraktual				***Contractual Service Margin***
Kontrak yang diukur berdasarkan pendekatan nilai wajar pada saat transisi	(370,437)	(1,654,315)	(2,024,752)	*New contracts and contracts measured under full retrospective approach at transition*
Kontrak baru dan kontrak yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi	(469,228)	(154,677)	(623,905)	*Contracts measured under fair value approach at transition*
	(839,665)	(1,808,992)	(2,648,657)	
Kontrak reasuransi				***Reinsurance contracts***
Marjin Jasa Kontraktual				***Contractual Service Margin***
Kontrak yang diukur berdasarkan pendekatan nilai wajar pada saat transisi	123,297	323	123,620	*New contracts and contracts measured under full retrospective approach at transition*
Kontrak baru dan kontrak yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi	420,744	83,540	504,284	*Contracts measured under fair value approach at transition*
	544,041	83,863	627,904	

2.ac. Pengakuan pendapatan dan beban atas liabilitas kontrak jaminan keuangan

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Imbal jasa penjaminan

Imbal jasa penjaminan bruto diakui sejak berlakunya sertifikat penjaminan, dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya.

2.ac. Revenue and expense recognition of financial guarantee contract liabilities

Financial guarantee contract is contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.

Guarantee fee income

Gross guarantee fee income is recognise upon inception of guarantee certificate, recorded as unearned revenue and amortised over the period of guarantee.

Beban klaim
Beban klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Beban klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi konsolidasian menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/ penurunan cadangan klaim.

Claim expenses
Claims expense consisted of settled claims, claims in process, including claims incurred but not yet reported and claim settlement expenses. Claims are recognised as expenses when the obligation to settle the claims is incurred. The portion of claims recovered from reinsurers are recorded and recognised as a deduction from claims expense in the same period when the claims expense is recognised. Subrogation rights are recognised as deduction from claims expense upon realisation.

Claim expenses in the consolidated statement of profit or loss represent gross claims, reguarantee claims and increase/decrease in claim reserves.

Pendapatan subrogasi
Pendapatan subrogasi diakui pada saat terjadi.

Subrogation income
Subrogation income is recognised when incurred.

Premi penjaminan ulang
Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Premi penjaminan ulang dibayar di muka dicatat sebagai penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang, kecuali produk penjaminan tertentu memperhatikan mekanisme pembayaran imbal jasa penjaminan secara tahunan.

Re-guarantee premiums
Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Re-guarantee premiums are recorded as prepaid re-guarantee asset and amortised over the period of re-guarantee, except for certain guarantee products that pay attention to the mechanism for paying guarantee fees on an annual basis.

Beban komisi - bersih
Beban komisi - bersih merupakan beban yang terjadi untuk mendapatkan imbal jasa penjaminan, seperti komisi yang dibayarkan kepada agen dan fee yang dibayarkan kepada bank. Beban ini ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya sertifikat penjaminan.

Commission expenses - net
Commission expenses - net represent expenses incurred to obtain guarantee fee income, such as commission paid to agencies and fee paid to banks. This expense is deferred and amortised over the period upon inception of guarantee certificate.

Liabilitas kontrak jaminan keuangan
Kontrak jaminan keuangan mensyaratkan Grup untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti penerima jaminan atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Cadangan klaim atas kontrak penjaminan keuangan merupakan estimasi klaim atas kontrak penjaminan keuangan yang akan menjadi tanggungan Grup, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan. Kontrak jaminan keuangan selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan; dan
ii. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui.

Grup disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa gagal bayar dengan debitur/terjamin sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin.

Beban usaha dan beban lain-lain diakui secara akrual basis.

Kerugian ekspektasian atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset pengembalian dan diukur secara sistematik sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara jumlah saldo kerugian ekspektasian - bruto dan jumlah saldo kerugian ekspektasian - bersih.

Jangka waktu periode estimasi cadangan klaim atas kontrak penjaminan adalah periode kontraktual maksimum dimana Grup memiliki kewajiban kontraktual kini untuk melakukan penjaminan.

Kenaikan/(penurunan) liabilitas kontrak penjaminan merupakan selisih liabilitas kontrak penjaminan periode berjalan dan periode sebelumnya.

Liabilities for financial guarantee contracts
Financial guarantee contracts require the Group to make certain payments to reimburse the recipient for losses incurred because certain debtors fail to make payments when due in accordance with the original terms or the modified terms of a debt instrument.

Claims reserve on financial guarantee contracts are estimated claims on financial guarantee contracts that will be borne by the Group, the amount of which is recognised and recorded at the report date. Financial guarantees are subsequently measured at the higher of:
i. the amount of the loss allowance determined; and
ii. the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised.

The Group is required to make payments only in the event of default with the debtor/guaranteed in accordance with the terms of the guaranteed instrument.

Operating and other expenses are recognised based on accrual basis.

Expected losses for risks that have been transferred to reguarantor are recognised as reimbursement assets and are measured systematically according to the pattern of claim reserve measurement based on the variance between the total expected loss - gross and the total expected loss - net.

The estimated period of the reserve for claims under the guarantee contract is the maximum contractual period during which the Group has a current contractual obligation to provide guarantees.

Increase/(decrease) in reserve guarantee contract liabilities represents the difference between the guarantee contract liabilities of current period and the previous period.

2.ad. Pendapatan manajemen jasa keuangan
Pendapatan jasa penasihat keuangan diakui secara akrual pada saat Grup telah menyerahkan dan memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian.

2.ad. Financial services management income
Revenue from financial services is recognised on accrual basis when the Group has delivered all significant risks and benefits to the customers in accordance with the underlying agreement.

2.ae. Pendapatan pengelolaan gedung

Pendapatan sewa dan jasa pengelolaan gedung diakui sesuai dengan periode sewa yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan.

2.ae. Building management income

Revenues from rental and service charge are recognised proportionally based on the respective rental term.

2.af. Beban usaha

Beban usaha dan beban lain-lain diakui secara akrual basis.

2.af. Operating expenses

Operating and other expenses are recognised based on accrual basis.

2.ag. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui dalam ekuitas dan disajikan dalam "tambahan modal disetor".

Dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal

2.ag. Business combination for entities under common control

Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of th entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other ownership instrument, then the transferred asset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction is a business combination of entities under common control in equity under additional paid in capital.

The difference between consideration transferred and carrying amount of each business combination for entities under common control transaction is recognised in equity and presented as "additional paid-in capital".

In applying pooling of interest method, each financial statements' item of combined entities, for the period of which common control business combination become effective and for the comparative period, are presented as if business combination had occurred from the beginning of the period for which the combined

periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Grup mencatat nilai wajar aset dan liabilitas yang dialihkan pada tanggal Grup memperoleh pengendalian atas aset dan liabilitas yang dialihkan.

Selisih yang timbul akibat pengukuran awal aset dan liabilitas yang diterima diakui sebagai bagian ekuitas dan dicatat pada akun tambahan modal disetor.

entities were under common control. Carrying amount of those financial statement items are carrying amount of combined entities in business combination for entities under common control.

The Group recognises fair value of transferred assets and liabilities on the date the Group obtains control of the transferred assets and liabilities.

The difference arising from the initial measurement of assets and liabilities received is recognised as part of equity and recorded in the additional paid-in capital account.

3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi yang Signifikan

3. Significant Account Judgements, Estimates, and Assumptions

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities Judgments affected in future periods.

Liabilitas imbalan kerja
Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria (lihat Catatan 29). Asumsi digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Employee benefit liabilities
The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions (refer to Note 29). The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based on current market conditions.

Aset pengembalian
Aset yang timbul dari kontrak penjaminan ulang sebagai pemulihan cadangan klaim dihitung dengan menggunakan pendekatan gross dan netting-off pemulihan klaim ekspektasian setelah dikurangi ekspektasi pemulihan aset. Pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti counterparty dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui di mana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal (lihat Catatan 14).

Reimbursement assets
Assets arising from re-guarantee contracts as recovery of reserves for claims are calculated using the gross and netting-off approach of the expected recovery of claims after deducting expected recovery of assets. The recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflecting the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Group may not received amounts due to it and these amounts can be reliably measured (refer to Note 14).

Penentuan nilai wajar atas instrumen keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dari beberapa teknik penilaian, termasuk model matematika, seperti teknik penilaian analisis arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Determining fair value of financial instruments
Where the fair value of financial assets recorded on the consolidated statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques, including mathematical models, such as discounted future cash flows analysis by using prevailing market rate.

Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup feedback model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

Liabilitas kontrak jaminan keuangan
Liabilitas kontrak jaminan keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan dibayarkan. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang kemampuan membayar pihak terjamin dan nilai realisasi bersih dari setiap subrogasi.

Liabilities for financial guarantee contracts
Liabilities for financial guarantee contract is evaluated individually and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be disbursed. In estimating these cash flows, management makes judgements about the guaranteed's payment ability and the net realisable value of any underlying subrogation.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan terjamin tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Nilai tercatat liabilitas kontrak jaminan keuangan yang disajikan pada Catatan 25.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

The accuracy of the allowances depends on how well the estimation of future cash flows for specific guaranteed allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The carrying amount of financial guarantee contract liabilities presented in Note 25.

Aset pajak tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai tidak lagi memungkinkan di mana penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Deferred tax assets

The Group reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised.

The Group's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward are based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period. This forecast is based on the Group's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Group will generate sufficient taxable income to allow part or all of the deferred tax assets to be utilised.

Aset dan liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi

Amortisasi Marjin Jasa Kontraktual

Marjin Jasa Kontraktual (*Contractual Service Margin/CSM*) merupakan komponen dari aset atau liabilitas untuk kelompok kontrak asuransi yang merepresentasikan laba yang belum diakui yang akan diakui oleh Grup seiring dengan penyediaan jasa asuransi di masa depan. Sejumlah CSM untuk suatu kelompok kontrak asuransi diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan asuransi pada setiap periode untuk mencerminkan jasa kontrak asuransi yang diberikan berdasarkan kelompok kontrak asuransi tersebut pada periode bersangkutan.

Insurance and reinsurance contracts assets and liabilities

Amortisation of the Contractual Service Margin

The Contractual Service Margin (CSM) is a component of the asset or liability for a group of insurance contracts that represents the unearned profit that the Group will recognise as it provides insurance contract services in the future. An amount of the CSM for a group of insurance contracts is recognised in profit or loss as insurance revenue in each period to reflect the insurance contract services provided under that group of insurance contracts in the relevant period.

Jumlah CSM yang diakui ditentukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi unit pertanggungan (*coverage units*) dalam kelompok kontrak;
- Mengalokasikan CSM pada akhir periode pelaporan (sebelum pengakuan jumlah apa pun dalam laba rugi untuk mencerminkan jasa kontrak asuransi yang diberikan pada periode tersebut) secara merata kepada setiap unit pertanggungan yang diberikan pada periode berjalan dan yang diharapkan akan diberikan di masa depan; dan
- Mengakui dalam laba rugi jumlah CSM yang dialokasikan kepada unit pertanggungan yang diberikan pada periode berjalan.

Jumlah unit pertanggungan dalam suatu kelompok merupakan kuantitas jasa kontrak asuransi yang diberikan oleh kontrak-kontrak dalam kelompok tersebut, yang ditentukan dengan mempertimbangkan kuantitas manfaat yang diberikan serta periode pertanggungan yang diharapkan. Total unit pertanggungan dari setiap kelompok kontrak asuransi dinilai kembali pada akhir setiap periode pelaporan untuk menyesuaikan dengan penurunan sisa pertanggungan akibat klaim yang dibayar, ekspektasi *lapse*, serta pembatalan kontrak yang terjadi dalam periode tersebut. Selanjutnya, unit pertanggungan tersebut dialokasikan berdasarkan rata-rata durasi tertimbang probabilitas dari setiap unit pertanggungan yang diberikan pada periode berjalan dan yang diharapkan akan diberikan di masa depan.

Untuk kontrak reasuransi yang diterbitkan, jumlah unit pertanggungan dalam suatu kelompok mencerminkan pola yang diharapkan dari penjaminan atas kontrak-kontrak yang mendasarinya, karena tingkat jasa yang diberikan bergantung pada jumlah kontrak yang mendasari yang masih berlaku. Kuantitas manfaat ditentukan sebagai kerugian maksimum yang mungkin terjadi (*maximum probable loss*). Sisa unit pertanggungan dinilai kembali pada akhir setiap periode pelaporan untuk mencerminkan pola jasa yang diharapkan serta ekspektasi *lapse* dan pembatalan kontrak. Sisa pertanggungan tersebut dialokasikan berdasarkan rata-rata durasi tertimbang probabilitas dari setiap unit pertanggungan yang diberikan pada periode berjalan dan yang diharapkan akan diberikan di masa depan.

The amount of CSM recognised is determined through the following steps:

- *Identifying the coverage units in the group of contracts;*
- *Allocating the CSM at the end of the reporting period (before recognising any amounts in profit or loss to reflect the insurance contract services provided in that period) on a systematic and rational basis to each coverage unit provided in the current period and expected to be provided in the future; and*
- *Recognising in profit or loss the amount of the CSM allocated to the coverage units provided in the current period.*

The number of coverage units in a group represents the quantity of insurance contract services provided by the contracts within that group, determined by considering both the quantity of benefits provided and the expected coverage period. The total coverage units for each group of insurance contracts are reassessed at the end of each reporting period to reflect reductions in remaining coverage resulting from claims paid, expected lapses, and contract cancellations occurring during the period. The coverage units are subsequently allocated based on the probability-weighted average duration of each coverage unit provided in the current period and those expected to be provided in the future.

For issued reinsurance contracts, the number of coverage units in a group reflects the expected pattern of coverage of the underlying contracts, as the level of services provided depends on the number of underlying contracts that remain in force. The quantity of benefits is determined as the maximum probable loss. The remaining coverage units are reassessed at the end of each reporting period to reflect the expected pattern of services as well as expected lapses and contract cancellations. The remaining coverage units are allocated based on the probability-weighted average duration of each coverage unit provided in the current period and those expected to be provided in the future.

Pengakuan awal sekelompok kontrak reasuransi pada CSM mewakili biaya bersih (*net cost*) atau keuntungan bersih (*net gain*) dari pembelian reasuransi. Untuk kontrak reasuransi yang dimiliki, amortisasi CSM dilakukan dengan cara yang serupa dengan kontrak reasuransi yang diterbitkan dan mencerminkan pola yang diharapkan dari penjaminan atas kontrak-kontrak yang mendasarinya, karena tingkat jasa yang diberikan bergantung pada jumlah kontrak yang mendasari yang masih berlaku.

The initial recognition of a group of reinsurance contracts on the CSM represents the net cost or net gain of purchasing reinsurance. For reinsurance contracts held, the amortization of the CSM is carried out similarly to issued reinsurance contracts and reflects the expected pattern of service provided over the underlying contracts, as the level of service provided depends on the number of underlying contracts still in force.

Probability-weighted atas proyeksi arus kas masa depan

Dalam mengestimasi arus kas masa depan, Grup mempertimbangkan ekspektasi terkini atas peristiwa di masa depan yang dapat mempengaruhi arus kas tersebut. Namun, ekspektasi atas perubahan peraturan perundang-undangan di masa depan yang dapat mengubah atau menghapus kewajiban kini atau menciptakan kewajiban baru berdasarkan kontrak yang ada tidak dipertimbangkan sampai dengan perubahan peraturan tersebut secara substantif telah ditetapkan.

Probability-weighted estimates of future cash flows

In estimating future cash flows, the Group incorporates its current expectations of future events that may affect those cash flows, based on conditions existing at the reporting date. However, expectations of future changes in laws or regulations that would amend or extinguish existing obligations, or give rise to new obligations under existing contracts, are excluded from the estimates until such changes are substantively enacted.

Arus kas yang berada dalam batas kontrak adalah arus kas yang berhubungan secara langsung dengan pemenuhan kontrak, termasuk arus kas yang jumlah atau waktu terjadinya berada dalam diskresi Grup. Arus kas tersebut mencakup pembayaran kepada (atau atas nama) pemegang polis, arus kas akuisisi asuransi, serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka pemenuhan kontrak.

Cash flows within the contract boundary comprise cash flows that arise from the substantive rights and obligations of the Group and are directly attributable to the fulfilment of the insurance contract, including cash flows for which the Group has discretion over the amount or timing. These cash flows include payments to, or on behalf of, policyholders, insurance acquisition cash flows, and other costs that are incurred in fulfilling the insurance contract.

Arus kas akuisisi asuransi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka pemenuhan kontrak mencakup biaya langsung serta alokasi biaya overhead tetap dan variabel.

Insurance acquisition cash flows and other costs incurred in fulfilling the contract include directly attributable costs, as well as a systematic and rational allocation of fixed and variable overhead costs.

Arus kas dialokasikan ke aktivitas akuisisi, aktivitas pemenuhan lainnya, dan aktivitas lainnya pada tingkat entitas lokal dengan menggunakan teknik penentuan biaya berbasis aktivitas *(activity-based costing)*. Arus kas yang dapat diatribusikan pada aktivitas akuisisi dan aktivitas pemenuhan lainnya dialokasikan ke kelompok kontrak dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional serta diterapkan secara konsisten untuk seluruh biaya yang memiliki karakteristik serupa.

Cash flows are allocated to acquisition activities, other fulfilment activities, and other activities at the local entity level using activity-based costing techniques. Cash flows that are attributable to acquisition activities and other fulfilment activities are allocated to groups of contracts using methods that are systematic and rational, and are applied consistently to all costs with similar characteristics. In general, the Group allocates insurance acquisition cash flows to groups of contracts based on

Secara umum, Grup mengalokasikan arus kas akuisisi asuransi ke kelompok kontrak berdasarkan premi dan jumlah kontrak bisnis baru untuk setiap kelompok, biaya penanganan klaim berdasarkan jumlah klaim yang terjadi untuk setiap kelompok, serta biaya pemeliharaan dan administrasi berdasarkan premi dan jumlah kontrak yang masih berlaku pada setiap kelompok.

premiums and the number of new business contracts for each group, claims handling costs based on the number of claims incurred for each group, and maintenance and administrative costs based on premiums and the number of in-force contracts for each group.

Tingkat Diskonto

Grup menetapkan tingkat diskonto untuk mengukur estimasi arus kas kontrak asuransi sesuai dengan prinsip PSAK 117, yaitu tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu dari uang, karakteristik arus kas dan liabilitas kontrak asuransi, serta konsistensi dengan informasi pasar yang dapat diobservasi pada tanggal pelaporan.

Dalam menentukan tingkat diskonto, Grup menerapkan pendekatan *bottom-up* untuk seluruh kontrak asuransi, karena sebagian besar kontrak yang dimiliki Grup melibatkan arus kas yang tidak bervariasi berdasarkan item yang mendasari, Grup menentukan tingkat diskonto menggunakan l*iquid risk-free yield curve*. Selanjutnya Grup tidak menambahkan tingkat bebas risiko *(illiquidity premium)* karena keseluruhan aset yang di investasikan merupakan aset yang *liquid*.

Tingkat diskonto yang digunakan meliputi komponen *yield of risk free rates* dari *Indonesian Bond Pricing Agency* (IBPA) yang sudah mewakili sesuai kebutuhan masing-masing durasi kontrak asuransi.

Discount rates

The Group establishes a discount rate to measure the estimated cash flows of insurance contracts in accordance with PSAK 117 principles, namely a discount rate that reflects the time value of money, the characteristics of cash flows and insurance contract liabilities, as well as consistency with market information that can be observed at the reporting date.

In determining the discount rate, the Group applies a bottom-up approach for all insurance contracts, because most of the contracts held by the Group involve cash flows that do not vary based on the underlying items. The Group determines the discount rate using a liquid risk-free yield curve. Furthermore, the Group does not add a premium for illiquidity because all of the invested assets are liquid.

The discount rate used includes the component of the yield of risk-free rates from the Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA), which has already been represented according to the needs of each insurance contract duration.

Penyesuaian Risiko untuk Risiko Non-Keuangan

Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan ditentukan untuk mencerminkan kompensasi yang dibutuhkan oleh Grup atas penanggungan risiko non-keuangan dan tingkat aversi risikonya. Penyesuaian risiko ini mencerminkan dampak manfaat diversifikasi antar berbagai lini bisnis, yang ditentukan dengan menggunakan metode *Value at Risk of the Aggregate Loss Distribution*. Perhitungan penyesuaian risiko dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan minimal 75% mengikuti SEOJK 27 tahun 2017.

Risk Adjustment for Non-Financial Risk

The Risk adjustments for non-financial risks are determined to reflect the compensation required by the Group for bearing non-financial risks and its level of risk aversion. These risk adjustments reflect the impact of diversification benefits across various lines of business, which are determined using the Value at Risk of the Aggregate Loss Distribution method. The calculation of risk adjustments is carried out using a minimum confidence level of 75% in accordance with SEOJK 27 of 2017.

Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik tingkat keyakinan (*confidence level technique*). Dalam menentukan penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan atas kontrak reasuransi, Grup menerapkan pendekatan yang sama dengan yang digunakan untuk kontrak asuransi yang mendasarinya atas arus kas yang dapat diatribusikan kepada reasuransi.

The risk adjustment for non-financial risk is determined using the confidence level technique. In determining the risk adjustment for non-financial risk for reinsurance contracts, the Group applies the same approach as that used for the underlying insurance contracts to the cash flows attributable to reinsurance.

Dengan menerapkan teknik tingkat keyakinan, Grup mengestimasi distribusi probabilitas dari nilai kini yang diharapkan atas arus kas masa depan dari kontrak pada setiap tanggal pelaporan, dan menghitung penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan sebagai selisih nilai pada tingkat keyakinan target di atas nilai kini yang diharapkan atas arus kas masa depan tersebut, dengan mempertimbangkan risiko terkait sepanjang seluruh periode masa depan.

By applying the confidence level technique, the Group estimates the probability distribution of the expected present value of future cash flows arising from the contracts at each reporting date, and determines the risk adjustment for non-financial risk as the excess of the value at the target confidence level over the expected present value of those future cash flows, taking into account the associated risks over the entire future period.

4. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian / *4. Restatement of Consolidation Financial Statements*

Manajemen menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian sebagai akibat penerapan standar akuntansi baru yang berdampak terhadap penyajian dan pengukuran akun-akun tertentu, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Management has restated the consolidated financial statements as a result of the adoption of new accounting standards that affected the presentation and measurement of certain accounts, as described below:

1. Penerapan PSAK 117-Kontrak Asuransi

   Grup telah menerapkan PSAK 117: Kontrak Asuransi yang berlaku efektifmulai 1 Januari 2025. Standar ini menggantikan PSAK 104 dan menetapkan persyaratan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi. Seiring dengan penerapan PSAK 117 ini, Grup juga melakukan pengkajian ulang terhadap substansi risiko yang dialihkan dalam kontrak-kontrak yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai kontrak asuransi, serta menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten di seluruh entitas dalam Grup. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, beberapa kontrak liabilitas keuangan, termasuk kontrak Kredit Usaha Rakyat ("KUR") dan kontrak yang memiliki klausul stop loss, tidak lagi memenuhi definisi kontrak asuransi sebagaimana diatur dalam PSAK 117 dan oleh karenanya diklasifikasikan serta dicatat sesuai dengan ruang lingkup PSAK 109: Instrumen Keuangan.

1. Implementation of SFAS 117: Insurance Contracts

   The Group adopted PSAK 117: Insurance Contracts, which became effective on January 1, 2025. This standard supersedes PSAK 104 and establishes the requirements for the recognition, measurement, presentation, and disclosure of insurance contracts. In conjunction with the adoption of PSAK 117, the Group reassessed the substance of the risk transferred under contracts that had previously been classified as insurance contracts and implemented consistent accounting policies across all entities within the Group. Based on the results of this reassessment, certain financial liability contracts, including Kredit Usaha Rakyat ("KUR") contracts and contracts containing stop-loss clauses, no longer meet the definition of an insurance contract under PSAK 117. Accordingly, these contracts are classified and accounted for within the scope of PSAK 109: Financial Instruments.

Entitas anak yang menerapkan PSAK 117 Kontrak Asuransi terdiri dari Askrindo, Jasa Raharja, Jasindo, dan IFG Life.

Grup menggunakan Pendekatan Nilai Wajar dan Retrospektif Penuh yang sesuai ketentuan transisi yang diizinkan dalam standar tersebut. Pendekatan Nilai Wajar diterapkan dalam menentukan liabilitas kontrak asuransi dan CSM pada tanggal transisi dengan menggunakan nilai wajar portofolio kontrak pada tanggal tersebut.

2. Reklasifikasi akun lainnya
Dalam penerapan ulang PSAK 117 angka komparatif untuk 1 Januari 2024 dan 31 Desember 2024, Grup menilai ulang agregasi laporan keuangan agar saldo dan transaksi yang tercantum dalam laporan keuangan lebih mencerminkan sifat transaksi. Selain itu, dengan adanya rencana konsolidasi ("*streamlining*") Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Penjaminan Syariah, Grup melakukan reklasifikasi akun untuk lebih dapat merepresentasikan agregasi akun Asuransi Umum dan Penjaminan Syariah.

Rekonsiliasi berikut ini merangkum dampak penerapan awal PSAK 117 terhadap akun-akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2024 Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2024.

Subsidiaries adopted SFAS 117: Insurance Contracts consist of Askrindo, Jasa Raharja, Jasindo, and IFG Life.

The Group applied the Fair Value and Full Retrospective Approach, which is permitted under the transitional provisions of the standard. Under Fair Value approach, the insurance contract liabilities and the Contractual Service Margin (CSM) at the transition date were determined based on the fair value of the underlying portfolio of insurance contracts at that date.

2. Other Account Reclassifications
During the adoption of SFAS 117 comparative figures for January 1, 2024 and December 31, 2024, the Group reassessed the financial statement's aggregation to ensure balances and transactions included in the financial statements way more reflected the nature of the transactions. Furthermore, in connection with the planned consolidation ("streamlining") of the Sharia General Insurance and Sharia Guarantee Companies, the Group reclassified several accounts to represented the aggregation of the Sharia General Insurance and Sharia Guarantee accounts.

The following reconciliations summarize the impact of the initial adoption of PSAK 117 on the Group's consolidated statement of financial position and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as at December 31, 2024 and January 1, 2024.

	Referensi/ *Reference*	31 Desember/ *December 31,* 2024			
		Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement* Rp	Penyesuaian penyajian kembali/ *Restatement adjustments* Rp	Setelah penyajian kembali/ *After restatement* Rp	
ASET					***ASSETS***
Investasi - bersih	1	76,337,663	128,618	76,466,281	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	1	1,084,342	1,395,084	2,479,426	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	1	5,279,734	(5,279,734)	--	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah	2	--	112,672	112,672	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang imbal jasa kafalah	2	--	21,795	21,795	*Kafalah fee receivable*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	1	1,803,735	1,980,308	3,784,043	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	1	2,816,637	(2,816,637)	--	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah	2	--	73,262	73,262	*Sharia reinsurance and retrocession claim receivables*
Piutang penjaminan ulang - bersih	1	47,478	6,546	54,024	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang syariah	1	--	115,853	115,853	*Sharia re-guarantee receivables - net*
Pajak dibayar dimuka		216,553	3,944	220,497	*Prepaid taxes*
Penyertaan langsung	2	362,880	(51,449)	311,431	*Direct participation*
Aset pajak tangguhan	1	5,595,752	(252,178)	5,343,574	*Sharia re-guarantee receivables - net*
Aset reasuransi	1	7,952,374	(7,952,374)	--	*Reinsurance assets*
Aset kontrak asuransi	1	--	63,728	63,728	*Insurance contract assets*
Aset kontrak reasuransi	1	--	9,740,645	9,740,645	*Reinsurance contract assets*
Aset reasuransi syariah	2	--	167,196	167,196	*Sharia reinsurance assets*
Aset penjaminan ulang syariah	2	--	831,074	831,074	*Sharia re-guarantee assets*
Aset pengembalian	1,2	--	67,178	67,178	*Reimbursement assets*
Aset retrosesi	1	819,032	(819,032)	--	*Retrocession assets*
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	1,2	86,038	513,396	599,434	*Deferred acquisition cost - net*
Aset lain-lain	1,2	4,578,515	(315,822)	4,262,693	*Other assets*
JUMLAH ASET		**106,980,733**	**(2,265,927)**	**104,714,806**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	1	2,113,132	(2,113,132)	--	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim asuransi dan reasuransi syariah	2	--	57,911	57,911	*Sharia insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim penjaminan	1	297,696	764,235	1,061,931	*Guarantee claim payables*
Utang klaim penjaminan syariah	2	--	1,655	1,655	*Sharia guarantee claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	1	1,737,009	(1,737,009)	--	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang kontribusi reasuransi dan retrosesi syariah	2	--	33,043	33,043	*Sharia reinsurance premium payables*
Utang premi penjaminan syariah	2	--	36,319	36,319	*Sharia re-guarantee premium payables*
Utang penjaminan ulang	1	86,617	94,092	180,709	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	1	8,186,539	1,069,247	9,255,786	*Accounts payable and other liabilities*
Liabilitas kontrak asuransi	1	510,966	(153,956)	357,010	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	1	59,406,746	(9,148,714)	50,258,032	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak asuransi syariah	2	--	153,338	2,797,455	*Sharia insurance contract liabilities*
Liabilitas kepada pemegang unit link	1	171,852	(171,852)	--	*Liabilities to unit-linked holders*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	1	14,939,747	5,540,403	20,480,150	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan syariah	2	--	2,751,470	2,751,470	*Liabilities for sharia financial guarantee contracts*
Pendapatan komisi tangguhan	2	--	439,350	439,350	*Deferred commission income*
Pinjaman dari Pemerintah	2	521,958	235,584	757,542	*Government loans*
JUMLAH LIABILITAS		**87,972,262**	**(2,148,016)**	**85,824,246**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Tambahan modal disetor	1	(62,006,445)	111,837	(61,894,608)	*Additional paid-in capital*
Cadangan keuangan asuransi	1	--	278,803	278,803	*Insurance finance reserve*
Akumulasi (kerugian)/ keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1	(119,835)	(271,011)	(390,846)	*Accumulated (losses)/ gains for change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities*
Saldo laba					*Retained earnings*
Belum ditentukan penggunaannya	1	3,331,178	(2,944,161)	387,017	*Unappropriated*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**(58,795,102)**	**(2,824,532)**	**(61,619,634)**	***Total equity attributable to the owners of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali		1,235,138	(90,834)	1,144,304	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**(57,559,964)**	**(2,915,366)**	**(60,475,330)**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA TABARRU', DAN EKUITAS		**30,412,298**	**(2,265,927)**	**28,146,371**	***TOTAL LIABILITIES, TABARRU' FUNDS, AND EQUITY***

	Referensi/ *Reference*	31 Desember/ *December 2024*	Penyajian Kembali dan Reklasifikasi/ *Restatement and Reclassification Adjustment*	31 Desember/ *December 2024*	
PENDAPATAN UNDERWRITING					***Underwriting income***
Pendapatan premi asuransi					***Insurance premium income***
Pendapatan premi asuransi bruto	1	23,699,755	(23,699,755)	--	*Gross insurance premium income*
Premi reasuransi dan retrosesi	1	(4,127,488)	4,127,488	--	*Reinsurance and retrocession premiums*
Penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	1	175,722	(175,722)	--	*Decreased in unearned premium reserves*
Pendapatan premi asuransi - bersih		19,747,989	(19,747,989)	--	***Insurance premium income - net***
HASIL JASA ASURANSI					***INSURANCE SERVICE RESULT***
Pendapatan asuransi	1	--	19,426,661	19,426,661	*Insurance revenue*
Beban jasa asuransi	1	--	(14,273,485)	(14,273,485)	*Insurance service expense*
Jumlah yang terpulihkan dari reasuradur	1	--	1,149,896	1,149,896	*Amounts recoverable from reinsurance for incurred claims*
Alokasi atas premi reasuransi yang dibayar	1	--	(3,274,833)	(3,274,833)	*Allocation of reinsurance premiums*
HASIL JASA ASURANSI		--	3,028,239	3,028,239	
Pendapatan penjaminan					***Guarantee income***
Imbal jasa penjaminan	1	7,733,031	3,866,495	11,599,526	*Guarantee fee income*
Premi penjaminan ulang	1	(405,506)	20,414	(385,092)	*Re-gurantee premiums*
Pendapatan penjaminan - bersih		7,327,525	3,886,909	11,214,434	***Guarantee income - net***
Beban akuisisi dan komisi penjaminan - bersih	2	--	(29,925)	(29,925)	*Net finance expense from insurance contract*
Pendapatan (beban) penjaminan syariah - bersih	2	--	685,202	685,202	*Net finance income from reinsurance contract*
Pendapatan underwriting lain-lain		1,221,673	(1,221,673)	--	***Other underwriting income***
PENDAPATAN UNDERWRITING - BERSIH		28,297,187	(13,399,237)	14,897,950	***UNDERWRITING INCOME - NET***
BEBAN *UNDERWRITING*					***UNDERWRITING EXPENSES***
Beban klaim asuransi					***Insurance claim expenses***
Beban klaim asuransi bruto	1	24,989,872	(24,989,872)	--	*Gross claim expenses*
Klaim reasuransi dan retrosesi	1	(3,225,322)	3,225,322	--	*Reinsurance and retrocession claims*
(Penurunan)/kenaikan liabilitas kepada pemegang unit link	1	(18,237)	18,237	--	*(Decrease)/increase in liabilities to unit-linked holders*
(Penurunan)/kenaikan estimasi liabilitas klaim	1	(2,361,684)	2,361,684	--	*(Decrease)/increase in estimated claim liabilities*
Beban klaim asuransi - bersih		19,384,629	(19,384,629)	--	***Insurance laim expenses - net***
Beban klaim penjaminan					***Guarantee claim expenses***
Beban klaim penjaminan bruto	1	8,827,602	4,421,687	13,249,289	*Gross guarantee claim expenses*
Klaim penjaminan ulang	1	(28,397)	(32,508)	(60,905)	*Re-guarantee claims*
Kenaikan estimasi liabilitas klaim	1	(348,485)	(930,072)	(1,278,557)	*Increase in estimated claim liabilities*
Beban klaim penjaminan - bersih		8,450,720	3,459,107	11,909,827	***Guarantee claim expenses - net***
Pendapatan subrogasi - bersih	1	(3,460,668)	66,681	(3,393,987)	***Subrogation income - net***
Beban akuisisi dan komisi asuransi - bersih	1	993,398	(993,398)	--	***Acquisition cost and insurance comission expenses - net***
Beban akuisisi dan komisi penjaminan - bersih	2	25,059	(25,059)	--	***Acquisition cost and guarantee comission expenses - net***
Beban underwriting lain-lain	1,2	1,136,313	(929,415)	206,898	***Other underwriting expenses***
BEBAN UNDERWRITING - BERSIH		26,529,451	(17,806,713)	8,722,738	***UNDERWRITING EXPENSES - NET***
HASIL UNDERWRITING - BERSIH		1,767,736	4,407,476	6,175,212	***UNDERWRITING RESULTS - NET***
Hasil investasi - bersih	1	5,499,844	236,016	5,735,860	***Investment income - net***
Hasil keuangan bersih					***Net financial result***
Beban keuangan bersih dari kontrak asuransi	1	--	(3,469,281)	(3,469,281)	*Net finance expense from insurance contract*
Pendapatan keuangan bersih dari kontrak reasuransi	1	--	762,021	762,021	*Net finance income from reinsurance contract*
Hasil keuangan bersih		--	(2,707,260)	(2,707,260)	***Net financial result***
Pendapatan jasa manajemen keuangan		438,122	--	438,122	*Financial management services income*
Pendapatan hasil pengelolaan gedung	2	139,997	(24,032)	115,965	*Building management income*
Beban umum dan administrasi	1,2	(9,096,885)	3,159,660	(5,937,225)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	2	(369,114)	(36,077)	(405,191)	*Finance costs*
Pendapatan lain-lain bersih	1,2	1,004,076	(770,326)	233,750	*Other (expense) income - net*
		(7,883,804)	2,329,225	(5,554,579)	
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(616,224)	4,265,457	3,649,233	***(LOSS) PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	1	228,849	(269,406)	(40,557)	*Income tax expenses*
(RUGI) LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**(387,375)**	**3,996,051**	**3,608,676**	***NET (LOSS) PROFIT FOR THE YEAR***

	Referensi/ *Reference*	31 Desember/ *December 2024*	Penyajian Kembali dan Reklasifikasi/ *Restatement and Reclassification Adjustment*	31 Desember/ *December 2024*	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:					***Items that will be reclassified to profit or loss:***
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(694,214)	(231,261)	(925,475)	*Unrealised loss on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak asuransi - OCI	1	--	233,329	233,329	*Net finance income (expense) from insurance contract - OCI*
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak reasuransi - OCI	1	--	(70,191)	(70,191)	*Net finance income (expense) from reinsurance contract - OCI*
Komponen ekuitas lainnya		--	--	--	*Other components of equity*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					***Items that will not be reclassified to profit or loss:***
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	1	(156,551)	157,588	1,037	*Unrealised loss on fair value through other comprehensive income marketable securities, net of tax*
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja, setelah pajak	1	93,853	(574)	93,279	*Remeasurement of post employment benefits, net of tax*
Beban komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		(756,912)	88,891	(668,021)	***Other comprehensive income/ expense for the year, net of tax***
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(1,144,287)**	**4,084,942**	**2,940,655**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:					***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		(444,697)	3,966,480	3,521,783	*Owner of parent entity*
Kepentingan nonpengendali		57,322	29,571	86,893	*Non-controlling interest*
		(387,375)	**3,996,051**	**3,608,676**	
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					***COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		(1,200,972)	4,103,227	2,902,255	*Owner of parent entity*
Kepentingan nonpengendali		56,685	(18,285)	38,400	*Non-controlling interest*
		(1,144,287)	**4,084,942**	**2,940,655**	

		1 Januari/ *January 1,* 2024			
	Referensi/ *Reference*	Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement* Rp	Penyesuaian penyajian kembali/ *Restatement adjustments* Rp	Setelah penyajian kembali/ *After restatement* Rp	
ASET					***ASSETS***
Investasi - bersih	1	78,977,062	310,532	79,287,594	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	1	749,996	2,091,451	2,841,447	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	1	6,170,255	(6,170,255)	--	*Insurance and reinsurance premium receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah	2	--	266,040	266,040	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang imbal jasa kafalah	2	--	24,047	24,047	*Kafalah fee receivable*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	1	2,728,574	2,500,232	5,228,806	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	1	2,677,657	(2,677,657)	--	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah	2	--	13,117	13,117	*Sharia reinsurance and retrocession claim receivables*
Piutang penjaminan ulang - bersih	1	55,948	18,493	74,441	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang syariah	2	--	134,090	134,090	*Sharia re-guarantee receivables - net*
Penyertaan langsung	2	564,010	(269,156)	294,854	*Direct participation*
Aset pajak tangguhan	1	4,842,295	173,147	5,015,442	*Sharia re-guarantee receivables - net*
Aset reasuransi	1	8,652,073	(8,652,073)	--	*Reinsurance assets*
Aset kontrak asuransi	1	--	53,381	53,381	*Insurance contract assets*
Aset kontrak reasuransi	1	--	9,840,096	9,840,096	*Reinsurance contract assets*
Aset reasuransi syariah	2	--	155,525	155,525	*Sharia reinsurance assets*
Aset penjaminan ulang syariah	2	--	860,414	860,414	*Sharia re-guarantee assets*
Aset pengembalian	1,2	--	170,449	170,449	*Reimbursement assets*
Aset retrosesi	1,2	1,164,474	(1,164,474)	--	*Retrocession assets*
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	1,2	100,628	514,499	615,127	*Deferred acquisition cost - net*
Aset lain-lain	1,2	4,286,154	(667,106)	3,619,048	*Other assets*
JUMLAH ASET		**110,969,126**	**(2,475,208)**	**108,493,918**	***TOTAL ASSETS***

	Referensi/ *Reference*	1 Januari/ *January 1,* 2024 Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement* Rp	Penyesuaian penyajian kembali/ *Restatement adjustments* Rp	Setelah penyajian kembali/ *After restatement* Rp	
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Utang klaim asuransi dan reasuransi	1	2,797,729	(2,797,729)	--	*Insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim asuransi dan reasuransi syariah	2	--	8,083	8,083	*Sharia insurance and reinsurance claim payables*
Utang klaim penjaminan	1	76,262	608,650	684,912	*Guarantee claim payables*
Utang klaim penjaminan syariah	2	--	6,662	6,662	*Sharia guarantee claim payables*
Utang premi reasuransi dan retrosesi	1	1,889,384	(1,889,384)	--	*Reinsurance and retrocession premium payables*
Utang kontribusi reasuransi dan retrosesi syariah	2	--	8,912	8,912	*Sharia reinsurance premium payables*
Utang premi penjaminan syariah	2	--	88,865	88,865	*Sharia re-guarantee premium payables*
Utang penjaminan ulang	1	23,927	207,929	231,856	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	1	7,523,707	1,434,355	8,961,321	*Accounts payable and other liabilities*
Liabilitas kontrak asuransi	1	60,096,525	(5,393,185)	54,703,340	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi		--	3,672	3,672	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak asuransi syariah	2	--	3,005,593	3,005,593	*Sharia insurance contract liabilities*
Liabilitas kepada pemegang unit link	1	189,144	(189,144)	--	*Liabilities to unit-linked holders*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	1	15,211,466	6,789,772	22,001,238	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan syariah	2	--	2,451,960	2,451,960	*Liabilities for sharia financial guarantee contracts*
Pendapatan komisi tangguhan	2	--	353,330	353,330	*Deferred commission income*
Pinjaman dari Pemerintah	2	493,128	537,963	1,004,269	*Government loans*
JUMLAH LIABILITAS		**88,301,272**	**5,236,304**	**93,537,576**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Tambahan modal disetor	1	(59,815,120)	(72,799)	(59,887,919)	*Additional paid-in capital*
Cadangan keuangan asuransi	1	--	115,665	115,665	*Insurance finance reserve*
Akumulasi (kerugian)/ keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1	728,795	(194,165)	483,520	*Accumulated (losses)/ gains for change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities*
Ekuitas merging entities	1	1,232,279	(424,262)	808,017	*Equity of merging entities*
Saldo laba Belum ditentukan penggunaannya	1	3,943,958	(6,988,724)	(3,044,766)	*Retained earnings Unappropriated*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**(53,910,088)**	**(7,615,395)**	**(61,525,483)**	***Total equity attributable to the owners of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali		1,250,640	(72,554)	1,178,086	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**(52,659,448)**	**7,687,949**	**(60,344,138)**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA TABARRU', DAN EKUITAS		**35,148,696**	**(2,475,208)**	**32,673,488**	***TOTAL LIABILITIES, TABARRU' FUNDS, AND EQUITY***

5. Transfer Portofolio dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

5. Transfer of Portfolio from PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), KBUMN melalui Surat No. S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 bersama Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020, telah memberikan persetujuan pengalihan aset dan liabilitas kepada entitas anak, IFG Life.

In relation with the implementation of the Financial Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), MSOE through Letter No. S-713/MBU/09/2020 dated September 11, 2020, together with the Financial Services Authority ("FSA") through Letter No. S- 449/NB.2/2020 dated October 22, 2020, have given approval for the transfer of assets and liabilities to subsidiary, IFG Life.

IFG Life dan Jiwasraya telah menandatangani Perjanjian Induk Pengalihan Portofolio (Aset dan Kewajiban) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG

IFG Life and Jiwasraya have signed the Master Agreement for the Transfer of Portfolio (Assets and Liabilities) of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to PT Asuransi Jiwa IFG

Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No.041/Perj/ BPUI/V/2021, No. 00048/ SJ/U/HCD/0521 dan No. 0014/ Perj./AJIFG/U/V/2021 pada tanggal 20 Mei 2021, yang mana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Pengalihan Portofolio Pertanggungan (Polis) yang Diikuti dengan Pengalihan Aset dan Kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 10 tanggal 15 Desember 2021.

in the Context of Resolving Problems with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 041/Perj/ BPUI/V/2021, No. 00048/ SJ/U/HCD/0521 and No. 0014/ Perj./AJIFG/U/V/2021 dated May 20, 2021, which has been amended and restated in the Deed of Amendment and Restatement of the Master Agreement for the Transfer of Portfolio of Insurance (Policy) Followed by the Transfer of Assets and Liabilities of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 10 dated December 15, 2021.

Dengan mempertimbangkan bahwa pengalihan aset dan liabilitas dari Jiwasraya kepada IFG Life juga harus memperhatikan tingkat kesehatan IFG Life sesuai ketentuan, maka proses pengalihan aset dan liabilitas dilakukan secara bertahap.

Taking into account that the transfer of assets and liabilities from Jiwasraya to IFG Life must also pay attention to the soundness of IFG Life in accordance with the provisions, the process of transferring assets and liabilities is carried out in batches.

Transaksi pengalihan ini diakui sesuai PSAK 338 “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali karena dilakukan dengan pihak berelasi dan merupakan bagian dari rencana Pemerintah Republik Indonesia, sebagai pemegang saham pengendali terakhir IFG Life, untuk menyelesaikan liabilitas kepada pemegang polis terdahulu PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

This transfer transaction is recognized under PSAK 338 “Business Combinations of Entities under Common Control” because it is conducted with a related party and is part of the plan of the Government of the Republic of Indonesia, as ultimate shareholder of IFG Life, to settle its liabilities to the former policyholders of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Oleh karena itu, selisih antara aset dan liabilitas yang diterima di setiap tahapan pengalihan dicatat pada “tambahan modal disetor”

Therefore, the difference between the assets and liabilities received at each stage of the transfer is recorded in “additional paid-in capital”.

Pengalihan aset dan liabilitas dari Jiwasraya kepada IFG Life selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Transfers of assets and liabilities from Jiwasraya to IFG Life in the current years are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	--	269,048	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	--	1,504,523	*Investment - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	--	35,435	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Penyertaan langsung	--	10	*Direct participation*
Aset tetap - bersih	--	54,081	*Fixed assets - net*
Properti investasi - bersih	--	22,205	*Investment properties - net*
Aset lain-lain	--	10	*Other assets*
	--	**1,885,312**	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	27,631	112	*Accounts payable and other liabilities*
Liabilitas kontrak asuransi	5,489	3,034,173	*Insurance contract liabilities*
	33,120	**3,034,285**	
Selisih yang diakui di tambahan modal disetor	**(33,120)**	**(1,148,973)**	*Difference recognized in additional paid in capital*

6. Kas dan Setara Kas - Bersih / *6. Cash and Cash Equivalents - Net*

	2025 Rp	2024 Rp	
Kas	4,091	5,104	*Cash on hand*
Kas di bank	5,279,374	2,893,954	*Cash in banks*
Kas pada bank - *unit link*	1,381	--	*Cash in banks - unit link*
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang	7,732,306	12,334,481	*Time deposits 3 months or less*
	13,017,152	15,233,539	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,357)	(4,943)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**13,015,795**	**15,228,596**	***Total***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kas dan setara kas.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible cash and cash equivalents.

Termasuk di dalam kas dan setara kas sebesar 2024 Rp269.048 adalah saldo kas dan setara kas yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the cash and cash equivalents amounting to 2024 Rp269,048 is the balance of the cash and cash equivalents transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

Kas dan setara kas berdasarkan mata uang dan pihak:

Cash and cash equivalents by currency and party:

	2025 Rp	2024 Rp	
Kas	**4,091**	**5,104**	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 44)	4,001,870	1,750,650	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	402,457	548,984	*Third parties*
Subtotal	**4,404,327**	**2,299,634**	***Subtotal***

	2025 Rp	2024 Rp	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Pihak berelasi (Catatan 44)	865,381	588,353	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	9,666	5,967	*Third parties*
Subtotal	875,047	594,320	***Subtotal***
	5,279,374	**2,893,954**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(664)	(488)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**5,278,710**	**2,893,466**	***Total***

	2025 Rp	2024 Rp	
Kas pada bank - *unit link*			***Cash in banks - unit link***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 44)	1,381	--	*Related parties (Note 44)*

	2025 Rp	2024 Rp	
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang			***Time deposits 3 months or less***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 44)	5,144,509	9,925,047	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	2,549,198	2,374,696	*Third parties*
Subtotal	**7,693,707**	**12,299,743**	***Subtotal***
Mata uang asing			***Foreign currency***
Pihak berelasi (Catatan 44)	21,817	34,738	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	16,782	--	*Third parties*
Subtotal	**38,599**	**34,738**	***Subtotal***
	7,732,306	12,334,481	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(693)	(4,455)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**7,731,613**	**12,330,026**	***Total***

Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas di bank dan deposito berjangka 3 bulan atau kurang adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates on cash in bank and time deposits 3 months or less are as follows:

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Kas di bank	0.00% - 6.00%	0.00% - 3.50%	*Cash in banks*
Deposito berjangka			*Time deposits*
3 bulan atau kurang	0.00% - 7.25%	2.00% - 7.50%	*3 months or less*
Mata uang asing			***Foreign currency***
Kas di bank	0.00% - 0.10%	0.00% - 0.15%	*Cash in banks*
Deposito berjangka			*Time deposits*
3 bulan atau kurang	0.00% - 5.00%	0.15% - 5.50%	*3 months or less*

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

7. Investasi - Bersih / *7. Investments - Net*

	2025 Rp	2024*) Rp	
Obligasi, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	58,925,703	58,063,767	*Bonds, and Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*
Reksadana	12,255,879	12,330,356	*Mutual funds*
Deposito berjangka	5,178,499	4,405,214	*Time deposits*
Saham	1,566,965	1,494,731	*Shares*
Investasi *unit link*	190,066	172,012	*Unit-linked investments*
Efek beragun aset	81,193	10,921	*Asset-backed securities*
Sukuk	--	--	*Sukuk*
Subtotal	**78,198,305**	**76,477,001**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(25,603)	(10,720)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**78,172,702**	**76,466,281**	***Total***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas investasi.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover the losses on impairment of investments.

a. Obligasi, sukuk, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia / *a. Bonds, sukuk, and Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities*

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya perolehan diamortisasi			***Amortised cost***
Obligasi pemerintah	9,669,173	9,707,444	*Government bonds*
Obligasi korporasi	2,737,308	2,528,711	*Corporate bonds*
Sukuk	2,684,295	3,389,920	*Sukuk*
	15,090,776	**15,626,075**	
Nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Obligasi pemerintah	249,002	294,272	*Government bonds*
Obligasi korporasi	1,973,657	1,761,474	*Corporate bonds*
Sukuk	62,483	--	*Sukuk*
	2,285,142	**2,055,746**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Obligasi pemerintah	33,019,665	35,664,436	*Government bonds*
Obligasi korporasi	5,803,375	2,278,753	*Corporate bonds*
Sukuk	2,726,745	2,438,757	*Sukuk*
	41,549,785	**40,381,946**	
Subtotal	**58,925,703**	**58,063,767**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18,191)	(3,207)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**58,907,512**	**58,060,560**	***Total***

Rincian investasi obligasi, sukuk, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia berdasarkan masing-masing counterparty adalah sebagai berikut:

The details of investments of bonds, sukuk, and Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities by counterparty are as follows:

	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat suku bunga/ *Interest rate*	Peringkat/ *Rating* 2025	Peringkat/ *Rating* 2024	Nilai tercatat/ Nilai wajar/ *Carrying value / Fair value* 2025	Nilai tercatat/ Nilai wajar/ *Carrying value / Fair value* 2024
Biaya diamortisasi/ *Amortised cost*						
Pihak berelasi/ *Related parties*					14,520,878	15,183,073
Pihak ketiga/ *Third parties*						
Obligasi Berkelanjutan III Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2021 Seri B	29-Dec-2026	6.95%	idA+	idA+	22,000	22,000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri A	9-Jun-2027	7.85%	idA	idA	50,000	50,000
Sukuk IPO Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 Seri A	17-Dec-2032	6.25%	idAA		1,001	--
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 Seri A	23-Sep-2028	6.50%	idAA		1,000	--
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 Seri B	23-Apr-2027	6.65%	idAAA	idAAA	100,000	100,000
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri B	6-Sep-2027	6.90%	idAAA		100,000	--
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	25-Apr-2026	6.40%	idAAA		76,000	--
Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2025 Seri A	22-Sep-2026	5.85%	idAAA		30,000	--
Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023	25-Oct-2031	6.95%	idAAA		38,000	--
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V	8-Mar-2026	6.50%	idAAA		37,000	--
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025 Seri A	4-Dec-2028	5.85%	idAA+		2,000	--
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 Seri A	8-Jul-2028	5.50%	idAA+		2,000	--
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2025 Seri A	18-Jul-2026	6.20%	idAAA		1,000	--
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	31-Oct-2026	5.50%	idAAA		1,000	--
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	24-Feb-2026	6.75%	idAAA		30,000	--
Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 Seri B	24-Jun-2030	7.85%	idA		50,000	--
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri B	8-Jul-2028	8.75%		idA	3,000	--
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahap 1 Tahun 2024 Seri C	7-Jan-2028	10.25%		idA+	3,176	--
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022	8-Jul-2025	6.25%		idAAA	--	10,000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri A	9-Jan-2025	7.40%		AAA	--	3,000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	4-Jul-2025	6.38%		AAA	--	3,000
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022	5-Jul-2025	7.00%		idAAA	--	5,000
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri A	16-Sep-2025	6.55%		idAAA	--	20,000
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	25-Mar-2025	5.60%		idAAA	--	12,000
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024	6-Sep-2027	6.90%		idAAA	--	100,000
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	24-Feb-2025	6.50%		idA+	--	30,000
Obligasi Berkelanjutan IV Protelindo Tahap I Tahun 2024 Seri A	19-Jul-2025	6.50%		idAAA	--	50,000
Pihak ketiga lainnya	25-Oct-2031	6.95%			22,721	38,002
Total Biaya diamortisasi/ *Total Amortised cost*					15,090,776	15,626,075
Nilai wajar melalui laba rugi/ ***Fair value through profit or loss***						
Pihak berelasi/ *Related parties*					1,423,369	1,439,244
Pihak ketiga/ *Third parties*						
Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulutgo Tahap I Tahun 2021	7-Sep-2026	7.80%	A(idn)	A(idn)	10,086	9,801
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 Seri C	23-Sep-2030	7.13%	idAA(sy)		4,989	--
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B	19-Nov-2028	5.65%	AAA(idn)		25,521	--
Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	29-Mar-2027	7.00%	idAA	idAA	25,418	24,686
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 Seri A	5-Jul-2029	7.25%	idAA	idAA	38,186	36,035
Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023	9-Jan-2029	8.25%	idAA	idAA	52,897	50,573
Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap III Tahun 2025 Seri D	6-Nov-2025	6.80%	idAAA		9,961	--
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri B	5-Jun-2027	8.50%	idAA		51,891	--
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	24-Oct-2159	17.25%	idAA	idAA	50,733	46,953
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 Seri A	18-Apr-2027	8.25%	idAA	idAA	20,639	20,224
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B	26-Nov-2027	8.13%	idAA	idAA	10,347	9,997
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 Seri B	9-Oct-2030	7.00%	idAA(sy)		79,152	--
Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Seri B	26-Nov-2029	7.10%	idAAA(cg)	idAAA(cg)	51,945	49,595
Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Seri A	26-Nov-2027	6.90%	idAAA(cg)	idAAA(cg)	20,344	19,827
Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2025	24-Apr-2028	7.60%	idAAA		26,065	--
Obligasi Terkait Keberlanjutan I SPINDO Tahun 2024 Seri B	9-Jul-2029	7.35%	idAAA	idAAA	76,359	80,712
Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B	19-Apr-2027	7.25%	AA(idn)		15,293	--
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap III Tahun 2025 Seri C	27-Mar-2030	7.00%	idAAA		36,245	--
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap IV Tahun 2025 Seri B	18-Jun-2030	7.20%	idAAA		25,993	--
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024	8-Oct-2029	7.25%	idAA	idAA	60,716	59,966
Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri B	20-Jun-2027	7.00%	idAA	idAA	59,197	57,051
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	11-Apr-2026	7.00%	AA(idn)	AA(idn)	32,173	31,786
Obligasi I Summit OTO Finance Tahun 2025 Seri C	25-Jun-2029	7.45%	idAAA		77,623	--
PT Priatman	31-Aug-2028	3.50%	Non Rated	Non Rated	--	17,525
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Seri C	6-Jun-2025	8.30%		AA	--	15,075
Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri D	23-Jul-2029	10.00%		idAAA	--	11,011
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A - KPD - PST	7-Apr-2025	6.75%		idAA	--	9,987
Obligasi Berkelanjutan I Jaccs MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B - KPD - PST	19-Apr-2027	7.25%		AA(idn)	--	14,851
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri B	5-Jun-2027	8.50%		idAA	--	50,847
Total Nilai wajar melalui laba rugi/ *Total Fair value through profit or loss*					2,285,142	2,055,746

	tempo/ *Maturity date*	bunga/ *Interest rate*	Peringkat/ *Rating* 2025	Peringkat/ *Rating* 2024	Nilai tercatat/ *Carrying value* Nilai wajar/ *Fair value* 2025	Nilai tercatat/ *Carrying value* Nilai wajar/ *Fair value* 2024	Akumulai perubahan nilai wajar *changes in fair value* 2025	Akumulai perubahan nilai wajar *changes in fair value* 2024
Total Fair value through profit or loss					2,285,142	2,055,746	--	--
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/								
Fair value through other comprehensive income								
Pihak berelasi/ *Related parties*					38,677,673	39,302,925	599,782	(780,279)
Pihak ketiga/ *Third parties*								
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri B	5-Jul-2029	8.60%	idA+, idAA	idA+	56,213	23,902	802	(1,100)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri A	5-Jul-2029	8.00%	idA+	idA+, idA+	50,686	75,091	687	(4,909)
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri B	12-Oct-2029	7.30%	idAA	AA	5,170	4,995	170	(5)
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Seri D	9-Jul-2026	9.20%	idAAA	AAA	12,330	12,344	181	(74)
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E	9-Nov-2027	9.00%	AAA , AAA(idn)	AAA	15,826	10,200	36	(171)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E	11-Sep-2027	9.00%	AAA		10,545	--	--	--
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 Seri C	23-Sep-2032	6.75%	idAA(sy), idAA(s		113,216	--	(271)	--
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 Seri A	17-Dec-2032	6.25%	idAA(sy)		42,957	--	--	--
Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 Seri B	23-Sep-2030	6.50%	idAA		11,015	--	15	--
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 Seri B	23-Sep-2030	6.50%	idAA(sy)		40,926	--	(64)	--
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 Seri A	17-Dec-2032	6.25%	idAA(sy)		10,013	--	23	--
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2023	8-Sep-2026	6.50%	AAA(idn)		10,075	--	76	--
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B	28-May-2028	7.00%	AAA(idn)		56,430	--	1,459	--
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap II Tahun 2025 Seri B	10-Sep-2032	6.70%	idAA		108,946	--	(18)	--
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri B	21-Jun-2027	7.15%	idAA-	idAA-	132,349	127,763	2,349	(2,237)
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri C	21-Jun-2029	7.40%	idAA-	idAA-	30,924	29,187	924	(813)
Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 Seri A	25-Jun-2032	7.75%	idAA-		31,206	--	1,206	--
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	11-Jul-2026	6.00%	AAA	AAA	25,124	24,552	125	(448)
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	24-Apr-2026	6.20%	idAAA		10,174	--	--	--
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	26-Nov-2029	8.63%	idAA		62,606	57,506	4,634	(466)
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B	26-Nov-2027	8.13%	idAA	idAA	88,982	69,410	2,497	(520)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Dian Swastatika Tahap IV Tahun 2025 Seri B	9-Oct-2030	6.88%	idAA(sy)		51,056	--	1,181	--
Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Seri B	26-Nov-2029	7.10%	idAAA(cg)	idAAA(cg)	60,256	57,531	2,256	(469)
Obligasi Terkait Keberlanjutan I SPINDO Tahun 2024 Seri B	9-Jul-2029	7.35%	idAAA(cg)		10,460	--	431	--
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 Seri B	4-Sep-2030	6.65%	idAA		29,970	--	(29)	--
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024	8-Oct-2029	7.25%	idAA		30,342	--	316	--
Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri B	20-Jun-2027	7.00%	AA+(idn)	idAA	66,342	63,937	1,342	(1,063)
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	11-Apr-2026	7.00%	AA+(idn)	AA(idn)	1,005	993	25	13
Obligasi I Summit OTO Finance Tahun 2025 Seri C	20-Dec-2158	14.90%	idAAA		38,713	--	1,732	--
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri B	11-Jul-2026	6.00%	AAA(idn)	AAA(idn)	50,247	49,153	247	(847)
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri C	11-Jul-2028	6.25%	AAA(idn)	AAA(idn)	25,338	24,155	338	(845)
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 Seri B	9-Jul-2027	7.10%	AA+(idn)		3,018	--	18	--
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2025 Seri B	4-Feb-2156	16.50%	irAA		91,964	--	3,049	--
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2025	21-Aug-2030	8.50%	irAA		20,794	--	795	--
Obligasi Terkait Keberlanjutan I Pollux Hotels Group Tahun 2025 Seri B	10-Dec-2030	6.25%	idAAA(cg)		90,000	--	2	--
Obligasi I Summit Oto Finance Tahun 2025 Seri B	25-Jun-2028	7.35%	idAAA		41,400	--	1,421	--
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap III Tahun 2025 Seri C	27-Mar-2030	7.00%			50,265	--	309	--
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap IV Tahun 2025 Seri A	18-Jun-2028	7.00%	idAAA		20,456	--	473	--
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap IV Tahun 2025 Seri B	18-Jun-2030	7.20%			51,900	--	1,946	--
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 Seri B	9-Oct-2030	6.88%			119,144	--	3,145	--
Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2025	24-Apr-2028	7.60%			30,678	--	679	--
Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri B	11-Aug-2026	7.00%	AA(idn)		12,109	--	118	--
Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap III Tahun 2025 Seri D	5-Nov-2035	6.80%			98,931	--	(31)	--
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 Seri B	10-Jun-2160	14.50%	AA+(idn)		330,868	--	11,846	--
Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 Seri B	8-Jul-2030	7.00%	AA+(idn)		14,427	--	440	--
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri A	28-May-2028	8.50%	A(idn)		6,213	--	222	--
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A	27-Aug-2026	7.50%	idA		199,479	--	(380)	--
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B	21-Jun-2027	10.50%	idA+	idA+	168,031	161,488	8,031	1,488
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	25-Aug-2026	10.25%	idA+		51,258	--	(317)	--
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	11-Jul-2026	10.25%	idA+		10,208	--	(104)	--
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Seri C	6-Jun-2025	8.30%		idAAA	--	5,025	--	(18)
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Seri D	9-May-2025	8.75%		idAAA	--	5,092	--	92
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018 Seri D	5-Mar-2025	8.20%		idAAA	--	5,021	--	21
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	7-Apr-2025	6.75%		idAA(sy)	--	12,984	--	(16)
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2023 Seri B	8-Sep-2026	6.50%		AAA(idn)	--	9,891	--	(109)
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2022	25-Mar-2025	6.50%		idAA-	--	24,950	--	(50)
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri A	1-Jul-2025	6.85%		idAA-	--	49,920	--	(80)
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	16-Dec-2025	10.50%		idA+	--	10,225	--	(135)
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri A	1-Jul-2025	8.00%		idA+	--	89,959	--	(41)
Pihak ketiga lainnya	11-Feb-2027	9.00%		idAAA	171,527	73,747	--	--
Total Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Total Fair value through other comprehensive income*					**41,549,785**	**40,381,946**	**654,114**	**(793,081)**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment loss*					(18,191)	(3,208)	--	--
Jumlah/ *Total*					**58,907,512**	**58,060,559**	**654,114**	**(793,081)**

Termasuk di dalam obligasi 2024 sebesar Rp942.153 adalah saldo obligasi yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the bonds 2024 amounting to Rp942,153 is the balance of the bonds transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, termasuk di dalam MTN sebesar Nihil dan Rp10.175 adalah saldo MTN yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

As at December 31, 2025 and 2024, included in the MTN amounting to Nil and Rp10,175 is the balance of the MTN from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 44 for details of related parties transactions and balances.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	3,208	2,424	*Beginning balance*
Penambahan	14,983	783	*Addition*
Saldo akhir	**18,191**	**3,207**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kerugian kredit ekspektasian atas investasi pada obligasi dan sukuk.

The Board of Directors believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the expected credit losses on investments in bonds and sukuk.

Mutasi akumulasi perubahan nilai wajar yang belum direalisasi atas Obligasi, Sukuk, dan MTN yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / ***Movement in the accumulated unrealized fair value changes on Bonds, Sukuk, and Medium-Term Notes measured at fair value through other comprehensive income***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	(793,081)	4,477	*Beginning balance*
Perubahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,445,353	(794,402)	*Changes in fair value through other comprehensive income*
Lainnya	1,842	(3,156)	*Others*
Saldo akhir	**654,114**	**(793,081)**	***Ending balance***

b. Reksadana / *b. Mutual funds*

Rincian investasi reksadana berdasarkan masing-masing counterparty adalah sebagai berikut:

The details of investments mutual funds by counterparty are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Pendapatan tetap	7,419,205	6,297,508	*Fixed income*
Pasar uang	2,079,467	1,950,452	*Money market*
Saham	1,003,280	1,641,518	*Shares*
Terproteksi	191,148	537,051	*Protected*
Campuran	515,728	380,520	*Mixed*
Penyertaan terbatas	248,491	622,789	*Limited participation*
	11,457,319	**11,429,838**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Terproteksi	613,248	719,656	*Protected*
Saham	145,066	136,325	*Shares*
Pasar uang	20,073	29,389	*Money market*
Penyertaan terbatas	20,173	15,148	*Limited participation*
	798,560	**900,518**	
Subtotal	**12,255,879**	**12,330,356**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,777)	(5,510)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**12,250,102**	**12,324,846**	***Total***

Berdasarkan rincian sebagai berikut: *The details are as follow:*

	2025			2024		
	Unit (dalam ribuan)/ ***Unit (in thousands)***	**Biaya perolehan/** ***Cost***	***Nilai aset bersih/ Net asset value***	**Unit (dalam ribuan)/** ***Unit (in thousands)***	**Biaya perolehan/** ***Cost***	***Nilai aset bersih/ Net asset value***
Nilai wajar melalui laba rugi/						
Fair value through profit or loss						
Pihak berelasi/ ***Related parties***						
Pendapatan Tetap Abadi 2	520,045	1,455,000	1,478,889	493,694	1,380,000	1,339,995
BNI-AM Pendapatan Tetap Manggala	1,160,924	1,250,000	1,325,071	1,093,355	1,175,000	1,194,702
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Kastara	632,028	755,000	792,658	632,028	755,000	753,137
Mandiri Obligasi Utama Sejahtera	651,369	675,000	704,034	391,741	400,000	400,551
Bahana Pendapatan Tetap Utama Kelas S	176,882	453,377	463,918	176,882	453,377	461,263
BNI-AM Dana Likuid Kelas I1	405,078	563,800	435,033	-	-	-
Reksadana PNM SBN 90	324,847	350,000	348,959	324,847	350,000	332,900
RD Bahana Revolving Fund	147,722	563,087	304,455	556,355	1,034,759	1,089,409
Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S	172,988	300,000	300,273	1,000	1,000	1,125
BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A	232,663	250,000	247,452	232,663	250,000	240,601
RDS Mandiri Pasar Uang Syariah (Kelas B)	156,365	205,700	206,054	-	-	-
BRI Seruni Pasar Uang III	104,634	190,000	193,640	130,018	224,000	228,464
Reksa Dana Treasure Saham Mantap	589,137	104,783	178,172	589,137	104,783	54,675
BNI AM Indeks IDX30	226,607	217,614	177,084	246,422	237,133	183,730
Reksa Dana Syariah Bri Seruni Pasar Uang Syariah	110,017	152,515	154,149	-	-	-
Danareksa BUMN Fund 2019 Properti 6	129,172	134,167	131,501	142,081	149,223	144,654
Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh	1,705,585	86,165	100,577	1,705,585	86,165	87,087
Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah	707,602	119,947	95,222	707,602	119,947	102,537
RD Indeks Pendapatan Tetap - IBPA 35	84,661	84,466	92,128	1	10,000	9,928
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	91,982	132,958	85,376	91,982	133,064	73,968
RDPU Bahana Likuid Syariah Kelas S	48,186	83,088	83,642	38,689	60,000	47,867
Ekuitas Danareksa Infrastruktur Trans Jawa	52,543	52,543	78,468	70,057	70,057	88,484
Pan Arcadia Dana Saham Syariah	543,111	198,876	76,173	543,111	198,876	53,253
Terproteksi Bahana Himaya Syariah 2	69,873	69,873	72,257	-	-	-
Pendapatan Tetap Utama Kelas I	77,830	75,000	71,993	25,000	25,000	23,154
ABF IBI Fund	530	25,000	64,389	-	-	-
Reksa Dana Pool Advista Kapital Optimal	975,186	168,541	56,075	975,186	168,541	77,521
Reksa Dana OSO Flores Equity Fund	410,952	64,837	52,748	410,952	64,837	62,112
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Manggala Kelas I1	49,276	50,000	51,691	-	-	-
Terproteksi Bahana Centrum Protected Fund 227	50,000	50,000	50,704	50,000	50,000	50,690
Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund	123,883	34,627	47,626	-	-	-
RD Bahana Himaya Likuid Syariah	40,472	45,500	46,604	10,074	10,500	11,048
RDS Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemi	25,719	41,246	42,627	-	-	-
Terproteksi Bahana Centrum Protected Fund 232	40,667	40,667	42,001	50,000	50,000	51,401
RD Bahana Liquid Plus	26,116	32,238	41,264	21,643	-	30,964
Pendapatan Tetap Utama Kelas S	15,494	40,000	40,637	34,853	90,000	90,682
ITB Harmoni BNI-AM	25,000	25,000	39,494	25,000	25,000	36,238
Bahana Progressive Protected Fund 220	25,000	25,000	26,181	-	-	-
PNM Venture Capital	25,000	25,000	25,380	25,000	25,000	25,400
REKSA DANA SYARIAH BAHANA PASAR UANG AMAN	21,737	25,000	25,031	-	-	-
RD Bahana Icons Syariah	16,010	15,191	24,453	16,010	15,191	15,641
BNI-AM Proteksi Flamboyan	20,000	20,000	22,762	-	-	-
BNI-AM Indeks IDX30	28,117	27,872	21,972	-	-	-
RDT Bahana Centrum Protected Fund 221	20,000	20,000	20,442	32,000	32,000	32,234
RDT Bahana Centrum Protected Fund 222	20,000	20,000	20,326	20,000	20,000	20,264
BRI Seruni Pasar Uang Syariah	14,406	20,000	20,185	15,000	20,000	20,023
RD Bahana Likuid Plus	12,640	17,436	19,027	46,455	39,637	42,282
Danareksa Mawar Komoditas 10	19,607	20,000	18,258	19,607	20,000	17,196
RD Bahana Prima Pendapatan Tetap	4,733	13,039	14,290	-	-	-
RD Bahana Trailblazer Fund	10,956	10,000	13,085	10,956	10,000	9,353
Treasure Fund Super Maxxi	803,350	83,011	12,972	803,350	83,011	6,712
RD Bahana Pendapatan Tetap Utama 2	1,868	10,500	12,955	1,868	10,500	11,701
RD Bahana Progressive Income Fund	6,057	10,000	12,811	6,057	10,000	11,518
RDS Bahana Global Healthcare Sharia USD Equity Fund	702	11,747	12,801	702	11,313	10,877
RD Bahana Sukuk Syariah	5,994	10,000	12,131	5,994	10,000	10,753
Reksa Dana Terproteksi Bahana Progressive Protected	15,000	15,000	12,112	10,000	10,000	10,000
BNI-AM Terproteksi Amanah II	13,000	13,000	12,030	-	-	-
RD Bahana USD Fixed Income Kleas I	640	10,740	11,791	640	10,344	10,678
RD Bahana Sinergi Pasar Uang Kelas I	10,000	10,000	11,129	10,000	10,000	10,569
RD Bahana Money Market Endowment Fund	10,000	10,000	11,023	10,000	10,000	10,481
RDS Bahana USD Nadhira Sukuk Kelas G	641	10,758	10,984	641	10,360	10,154
RD Indeks Bahana ETF Pefindo I Grade	16,300	9,906	10,954	-	-	-
BAHANA DANA EKUITAS ANDALAN KELAS G	1,962	10,000	10,705	69,926	359,469	305,678
RD Bahana Balance Flexi Yield Fund	10,000	10,000	10,662	-	-	-
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G	6,351	7,162	10,239	7,000	7,000	9,675
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi	7,830	10,000	10,035	-	-	-
BRI Balanced Regular Income Fund	9,295	10,000	9,885	-	-	-
RDPU BNI-AM Dana Lancar Syariah	4,947	8,000	9,177	17,315	28,000	8,766
BNI AM Amanah II	10,000	9,625	8,791	23,000	23,000	22,752
Danareksa Infrastruktur Trans Jawa	17,514	17,514	8,201	-	-	-
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas B	9,671	10,000	8,189	-	-	-
Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G	2,223	5,000	8,042	-	-	-
Bahana Protected Fund 211	12,000	12,000	7,710	-	-	-
BNI-AM Proteksi Rosella	7,000	7,000	7,173	-	-	-

	2025			2024		
	Unit (dalam ribuan)/ *Unit (in thousands)*	Biaya perolehan/ *Cost*	*Nilai aset bersih/ Net asset value*	Unit (dalam ribuan)/ *Unit (in thousands)*	Biaya perolehan/ *Cost*	*Nilai aset bersih/ Net asset value*
PNM Ekuitas Syariah	4,815	5,000	5,893	4,815	5,336	4,564
Reksa Dana BRI Mawar Komoditas 10	5,000	3,939	4,656	5,000	3,939	4,385
Mandiri Investa Atraktif Syariah	4,252	6,164	4,445	4,467	6,365	3,752
PNM Saham Agresif	5,051	3,634	4,120	5,051	4,098	3,634
Bahana Protected Fund 208	5,000	5,000	3,630	5,000	5,000	4,953
Treasure Saham Berkah Syariah	293,798	12,207	3,399	293,798	12,207	2,579
Terproteksi Bahana Himaya Syariah 3	2,000	2,085	2,096	-	-	-
RD Bahana Dana Likuid	703	1,300	1,374	703	1,300	1,313
Asanusa Jamkrindo Fund	-	-	-	190,272	247,497	202,740
Bahana Himaya Syariah 2	-	-	-	20,000	20,000	21,819
BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS S	-	-	-	18,810	30,000	31,029
BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI KELAS G	-	-	-	4,733	12,951	13,039
Bahana US Opportunity Sharia Equity USD	-	-	-	8	162	173
Balanced Regular Income Fund	-	-	-	9,295	10,000	9,612
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Manggala Kelas I1	-	-	-	49,276	50,000	50,926
BNI AM Proteksi Rosella	-	-	-	7,000	7,000	7,024
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi	-	-	-	4,040	5,000	5,011
BRI Gebyar Indonesia II	-	-	-	1,840	5,203	5,291
BRI Pendapatan Tetap Indonesia Sehat	-	-	-	5,256	8,519	8,716
Danareksa Pendapatan Prima Plus	-	-	-	8,089	15,000	14,544
Ganesha Abadi Kelas I	-	-	-	9,763	10,000	10,176
Mandiri Investa Dana Utama	-	-	-	135,091	244,000	247,486
Mandiri Pasar Uang Optima 2	-	-	-	511	653	697
Mandiri Pendapatan Tetap Obligasi Negara	-	-	-	96,235	100,000	97,091
Penyertaan Terbatas PNM Multisektoral X	-	-	-	150,000	150,000	152,066
PNM Perikanan Nusantara	5,000	5,000	-	-	-	-
PNM Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	894	1,000	1,039
RD ABF Indonesia Bond Index Fund	-	-	-	2,187	90,000	95,132
RD Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas I	-	-	-	100	100	116
RD Bahana Primavera 99 Kelas A	-	-	-	10	10	13
RD Bahana Primavera 99 Kelas G	-	-	-	10	10	12
RD Ganesha Abadi Kelas D	-	-	-	10	10	10
RD Ganesha Abadi Kelas I	-	-	-	100	100	104
RD MAKARA PRIMA	-	-	-	2,223	5,000	7,405
RDI Bahana ETF Bisnis-27	-	-	-	16,000	8,009	8,908
RDS Bahana MES Syariah Fund Kelas I	-	-	-	10	10	10
RDST Bahana Himaya Syariah 2	-	-	-	80,000	80,000	82,027
RDT PNM PERINUS	-	-	-	5,000	5,000	3,317
REKSA DANA BAHANA DANA EKUITAS ANDALAN KE	-	-	-	1,962	10,000	8,578
Reksa dana Bahana Himaya Syariah 3	-	-	-	2,000	2,000	2,060
REKSA DANA BAHANA QUANT STRATEGY	-	-	-	500	500	427
REKSA DANA BAHANA TRAILBLAZER FUND	-	-	-	5,000	5,000	1,359
REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESI/	-	-	-	9,671	10,000	8,533
Reksa Dana Millenium Dynamic Equity Fund	-	-	-	3,886	1,172	1,437
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus	-	-	-	793,965	1,030	-
Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II	-	-	-	475,893	96,428	20,321
Reksa Dana Pinnacle Dana Prima	-	-	-	1,825,387	213,024	75,259
REKSA DANA SERUNI PASAR UANG II	-	-	-	9,536	15,000	16,756
Reksa Dana Syariah Maybank Dana Ekuitas Syariah	-	-	-	507,006	158,585	137,308
Reksa dana Syariah Terproteksi PNM BUMN Seri 12	-	-	-	2,000	2,000	2,013
Reksa Dana Terproteksi Bahana Salama Syariah 6	-	-	-	1,000	1,000	1,026
Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi XX	-	-	-	380,000	311,484	12,316
REKSADANA TERPROTEKSI BAHANA PROGRESSIVE	-	-	-	25,000	25,000	25,396
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	2,927	42,119	1,869	2,927	40,588	7,024
	12,454,243	9,806,564	9,328,414	16,102,809	10,487,377	9,375,373
Pihak ketiga/ *Third parties*						
Pendapatan Prima Plus	384,852	710,000	731,805	311,380	575,000	559,851
Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II	80,499	300,000	301,375	66,712	250,000	237,598
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A	63,033	552,140	128,313	20,815	20,815	40,178
Manulife Proteksi Dana Utama V	105,000	105,000	106,385	105,000	105,000	106,310
Sucorinvest Money Market Fund	43,822	83,483	84,838	7,363	12,849	13,483
Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara	42,854	75,000	74,072	42,854	75,000	70,981
Insight Green (I-Green)	63,139	80,000	71,583	63,139	80,000	67,297
Ashmore Dana Obligasi Nusantara Kelas A	52,374	60,784	58,947	4,932	5,137	5,051
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1	37,992	50,000	55,057	19,654	25,000	25,637
BNP Paribas Obligasi Cemerlang	46,282	50,000	51,762	46,282	50,000	49,258
Sucorinvest Flexi Fund	4,981	30,000	38,356	4,981	30,000	29,177
Insight Terproteksi 5	34,497	34,497	37,095	34,497	34,497	36,732
Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds	60,000	24,387	34,270	60,000	24,387	30,543
Principal Islamic Equity Growth Syariah	24,659	45,000	33,890	24,659	45,000	28,486
Panin Gebyar Indonesia II	9,640	20,000	30,409	9,640	20,000	27,389
Syailendra Pendapatan Tetap Premium Kelas A	15,405	25,000	30,077	-	-	-
Panin Dana Unggulan	2,954	25,000	29,661	2,954	25,000	25,452
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A	9,036	26,763	28,838	7,435	21,547	21,763
Manulife Obligasi Unggulan Kelas A	11,864	25,167	25,509	1,912	5,312	5,167
Panin Dana Pendapatan Utama	16,235	20,000	23,521	16,235	20,000	21,569
Allianz Fixed Income Fund 2	12,440	15,000	21,660	-	-	-
Principal Indo Domestic Equity Fund	19,224	20,000	15,042	19,224	20,000	13,988
Sucorinvest Bond Fund	8,643	10,000	14,818	8,643	10,000	13,115
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara Kelas A	13,657	15,000	14,473	50,253	55,137	52,202
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A	4,799	10,000	13,464	-	-	-
Avrist Dana Terproteksi Spirit 13	10,000	10,000	10,392	10,000	10,000	10,204
Simas Syariah Unggulan	12,298	12,976	9,953	12,298	14,000	7,489
Sucorinvest Sharia Equity Fund	4,414	7,270	9,800	4,414	7,398	7,270
SAM Syariah Berimbang	4,974	10,000	7,731	4,974	10,000	7,153
Panin Dana Maksima	66	5,000	6,450	66	5,000	5,612
Trimegah Dana Tetap Syariah	3,755	5,658	5,689	3,755	5,195	5,211
Syailendra Sukuk Andalan	2,702	3,350	3,367	2,702	3	3,120
SAM Sharia Equity Fund	3,683	5,000	3,355	3,683	5,000	2,892
Manulife Saham SMC Plus	5,008	5,000	3,310	5,008	5,000	3,081
Allianz Alpha Sector Rotation Kelas A	2,121	3,137	3,221	2,121	3,292	3,137
XIJI	4,000	2,756	2,760	4,000	2,881	2,234
Batavia Dana Kas Syariah Kelas B	2,376	2,507	2,517	-	-	-
Reksa dana Syariah Terproteksi Avrist Sukuk Berkah 7	2,000	2,082	2,095	2,000	2,000	2,042
Syailendra Sharia Fixed Income Fund Kelas A	1,735	2,000	2,004	-	-	-

	2025			2024		
	Unit (dalam ribuan)/ *Unit (in thousands)*	Biaya perolehan/ *Cost*	*Nilai aset bersih/ Net asset value*	Unit (dalam ribuan)/ *Unit (in thousands)*	Biaya perolehan/ *Cost*	*Nilai aset bersih/ Net asset value*
ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA	-	-	-	13,657	15,000	13,987
Avrist Dana Terproteksi Sukuk Berkah Syariah 2	-	-	-	2,888	3,000	3,130
Avrist Prime Income Fund	-	-	-	7,484	7,739	7,842
Avrist Sukuk Income Fund	-	-	-	12,535	13,000	13,056
BNP Paribas Prima II Kelas RK 1	-	-	-	745	2,234	2,286
HPAM Ultima Money Market	-	-	-	26,916	-	43,331
Jasa Capital Saham Progresif	-	-	-	181,420	17,287	11,193
Panin Dana Likuid Syariah	-	-	-	615	702	800
RD HPAM Flexi Plus	-	-	-	4,562	10,000	8,776
Reksa Dana GAP Equity Focus Fund	-	-	-	464,392	147,200	179,257
Reksa Dana MCM Equity Sektoral	-	-	-	327,010	-	-
Reksa Dana Oso Moluccas Equity Fund	-	-	-	123,883	34,627	36,189
Reksa dana Syariah Terproteksi Sucorinvest Syariah Te	-	-	-	1,000	1,000	1,000
RHB Fixed Income Fund 2	-	-	-	12,440	15,000	19,488
Syailendra Dana Kas	-	-	-	5,414	-	9,114
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND	-	-	-	4,799	10,000	12,279
Syailendra Pendapatan Tetap Premium	-	-	-	15,405	25,000	27,834
TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SPIRIT 15	-	-	-	10,000	10,000	10,191
TERPROTEKSI CIPTA PROTEKSI XXII	-	-	-	20,000	20,000	20,108
Trim Kas 2 Kelas A	-	-	-	22,477	-	42,613
Trimegah kas syariah	-	-	-	32,784	3,000	46,732
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	993	5,390	1,041	1,377	4,410	4,587
	1,228,006	2,494,347	2,128,905	2,275,388	1,918,649	2,054,465
Subjumlah/ *Subtotal*	13,682,249	12,300,911	11,457,319	18,378,197	12,406,026	11,429,838

	2025				2024			
	Unit (dalam ribuan)/ *Unit (in thousands)*	Biaya perolehan/ *Cost*	*Nilai aset bersih/ Net asset value*	Akumulasi perubahan nilai wajar belum direalisasi/ *Accumulated unrealized gain/loss changes in fair value*	Unit (dalam ribuan)/ *Unit (in thousands)*	Biaya perolehan/ *Cost*	*Nilai aset bersih/ Net asset value*	Akumulasi perubahan nilai wajar belum direalisasi/ *Accumulated unrealized gain/loss changes in fair value*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/								
Fair value through other comprehensive income								
Pihak berelasi/ *Related parties*								
Bahana E Optima Protected Fund 124	100,000	100,000	105,116	(5,116)	100,000	100,000	104,573	(4,573)
Terproteksi Mandiri Seri 80	100,000	100,000	104,305	(4,305)	100,000	100,000	104,260	(4,260)
BNIAM Proteksi Umbara	100,000	100,000	103,871	(3,871)	100,000	100,000	103,311	(3,311)
BAHANA PROGRESSIVE PROTECTED FUND 200	50,000	50,000	53,497	(3,497)	50,000	50,000	52,796	(2,796)
Bahana Progressive Protected Fund 220	50,000	50,000	52,363	(2,363)	50,000	50,000	50,791	(791)
BNI-AM Proteksi Squamosa	50,000	50,000	52,360	(2,360)	50,000	50,000	50,610	(610)
BRI Terproteksi 38	50,000	50,000	51,572	(1,572)	50,000	50,000	51,465	(1,465)
BRI Terproteksi 36	50,000	50,000	51,128	(1,128)	50,000	50,000	51,427	(1,427)
BNP Paribas Pesona	1,187	35,000	30,404	4,596	-	-	-	--
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas B	28,824	30,000	24,407	5,593	-	-	-	--
BRI Mawar Fokus 10	16,522	30,000	23,092	6,908	-	-	-	--
Mandiri Investa Equity Movement	15,067	25,000	21,540	3,460	15,067	25,000	20,190	4,810
BRI Seruni Pasar Uang Syariah	14,329	20,000	20,073	(73)	-	-	-	--
BNP Paribas Infrastruktur Plus	4,561	15,000	12,942	2,058	-	-	-	--
Mandiri Investa Atraktif Kelas A	3,078	15,000	12,573	2,427	-	-	-	--
BRI Syariah Saham	13,838	15,000	12,141	2,859	-	-	-	--
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII	10,000	10,000	10,140	(140)	10,000	10,000	10,139	(139)
BNI-AM Proteksi Redwood	50,000	8,121	8,653	(532)	50,000	8,121	8,653	(532)
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII	5,000	5,000	5,022	(22)	-	-	-	--
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI	5,000	5,000	5,011	(11)	-	-	-	--
BNP Paribas IDX30 Kelas IK1	4,714	5,000	4,666	334	-	-	-	--
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor	3,015	5,000	3,300	1,699	3,015	5,000	3,038	1,962
Bahana Centrum Protected Fund 185	-	-	-	--	50,000	50,000	51,272	(1,272)
Mandiri Investa Atraktif	-	-	-	--	3,078	15,000	11,669	3,331
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV	-	-	-	--	5,000	5,000	5,009	(9)
RDSPU BAHANA LIKUID SYARIAH KELAS S	-	-	-	--	9,000	15,000	15,328	(328)
RDST BAHANA SALAMA SYARIAH 6	-	-	-	--	10,000	10,000	10,260	(260)
RDT Bahana Protected Fund 209	-	-	-	--	49,250	49,250	49,853	(603)
Reksadana BNP Paribas IDX30	-	-	-	--	4,714	5,000	4,301	699
Reksadana BNP Paribas Infrastruktur Plus	-	-	-	--	4,561	15,000	12,730	2,270
Reksadana BNP Paribas Pesona	-	-	-	--	1,187	35,000	29,902	5,098
Reksadana Danareksa Mawar Fokus 10	-	-	-	--	16,522	30,000	19,031	10,969
Reksadana Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened I	-	-	-	--	28,824	30,000	25,431	4,569
Reksadana Danareksa Syariah Saham	-	-	-	--	13,838	15,000	10,032	4,968
Syariah Bahana Likuid Kelas S	-	-	-	--	8,524	14,000	14,062	(60)
	725,135	773,121	768,176	4,944	832,580	886,371	870,133	16,240
Pihak ketiga/ *Third parties*								
RDST MANULIFE SYARIAH PROTEKSI UTAMA I	10,000	10,000	10,075	- 75	10,000	10,000	10,045	(45)
RDST AVRIST SUKUK BERKAH 6	5,000	5,000	5,192	- 192	5,000	5,000	5,114	(114)
Trimegah Terproteksi Syariah 5	5,000	5,000	5,118	- 118	-	-	-	--
Syailendra Capital Protected Fund Syariah 4	5,000	5,000	5,098	- 98	5,000	5,000	5,051	(51)
Sucorinvest Syariah Proteksi 2	4,878	4,876	4,901	- 25	5,000	5,000	4,998	2
RDST CAPITAL SHARIA OPTIMAL PROTECTED FUNI	-	-	-	-	5,000	5,000	5,177	(177)
	29,878	29,876	30,384	(508)	30,000	30,000	30,385	(385)
Subjumlah/ *Subtotal*	755,013	802,997	798,560	4,436	862,580	916,371	900,518	15,855
Jumlah/ *Total*	14,437,262	13,103,908	12,255,879	4,436	19,240,777	13,322,397	12,330,356	15,855

Termasuk di dalam reksadana pada tahun 2024 sebesar Rp562.370 adalah saldo reksadana yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in mutual funds as at 2024 amounting to Rp562,370 is the balance of mutual funds transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as disclosed in Note 5.

Mutasi akumulasi perubahan nilai wajar yang belum direalisasi / ***Changes in unrealized gain/loss fair value***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	15,855	4,423	*Beginning balance*
Keuntungan/kerugian perubahan nilai wajar OCI yang belum direalisasi	(11,419)	11,432	*Gain/loss on unrealized fair value OCI*
Saldo Akhir	**4,436**	**15,855**	***Ending balance***

c. Deposito berjangka / *c. Time deposits*

	2025 Rp	2024 Rp	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 44)	3,334,323	2,954,963	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	1,435,308	1,175,582	*Third parties*
	4,769,631	**4,130,545**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak berelasi (Catatan 44)	151,038	64,628	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	257,830	210,041	*Third parties*
	408,868	**274,669**	
Subtotal	**5,178,499**	**4,405,214**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,635)	(2,003)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**5,176,864**	**4,403,211**	***Total***

Lihat Catatan 44 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 44 for details of related parties transactions and balances.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	2,003	(515)	*Beginning balance*
(Pengurangan)/penambahan	(368)	2,518	*(Deduction)/addition*
Saldo akhir	**1,635**	**2,003**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya deposito berjangka.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible time deposits.

d. Saham / *d. Shares*

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Perusahaan milik negara	366,288	361,389	*State owned enterprises*
Perusahaan milik swasta	139,423	131,816	*Private owned enterprises*
	505,711	**493,205**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Fair value through other comprehensive income*
Perusahaan milik negara	610,198	554,361	*State owned enterprises*
Perusahaan milik swasta	451,056	447,165	*Private owned enterprises*
Subtotal	**1,061,254**	**1,001,526**	***Subtotal***
Jumlah	**1,566,965**	**1,494,731**	***Total***

Rincian kepemilikan saham berdasarkan kepemilikan saham sebagai berikut:

The details of share investment by each are as follows:

	2025		
	Jumlah lembar/ *Total shares*	Biaya perolehan/ *Cost*	Nilai wajar/ *Fair value*
Nilai wajar melalui laba rugi/			
Fair value through profit and loss			
Pihak berelasi/ *Related parties*			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	67,291,649	321,303	246,287
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7,614,110	32,525	33,274
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,200,197	27,182	21,421
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	7,000,000	11,480	9,695
PT Bursa Efek Indonesia	1	7,500	7,500
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3,075,000	7,966	6,857
PT Sarana Maluku Ventura	6,237	6,237	6,237
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,683,748	6,588	5,503
PT PP Presisi Tbk	28,955,600	10,565	5,009
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1,274,835	3,969	4,436
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1,124,380	5,652	3,834
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	75	3,750	3,750
PT Taspen Properti Indonesia	587,187	3,514	3,514
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	34,893,000	13,958	2,861
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	2,076,000	3,996	2,419
PT Wijaya Karya Beton Tbk	15,451,981	1,190	1,561
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	12,039,574	22,968	2,130
	190,273,574	490,343	366,288
Pihak ketiga/ *Third parties*			
PT Bank Central Asia Tbk	9,387,598	79,602	75,805
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6,332,200	47,821	42,901
PT United Tractors Tbk	233,707	7,419	6,894
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	500,000	5,706	4,100
PT Reasuransi Maipark Indonesia	6,102	3,734	3,734
PT Darma Henwa Tbk	2,750,000	138	1,843
PT BW Plantation Tbk	7,750,026	2,359	1,108
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	20,608,571	5,413	3,038
	47,568,204	152,192	139,423
Sub Total	237,841,778	642,535	505,711

	2025			
	Jumlah lembar/ *Total shares*	Biaya perolehan/ *Cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	Akumulasi perubahan nilai wajar belum direalisasi/ *Accumulated unrealized gain/loss changes in fair value*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/				
Fair value through other comprehensive income				
Pihak berelasi/ *Related parties*				
PT Semen Baturaja Tbk	115,046	3,202	115,046	111,844
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	48,658,300	265,094	92,925	(172,169)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	211,447,400	81,154	75,698	(5,456)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	161,497,823,000	74,820	60,589	(14,231)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	12,947,400	88,617	44,131	(44,486)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29,521,500	74,156	34,667	(39,489)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	7,300,000	31,698	25,404	(6,294)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7,483,700	118,977	19,745	(99,232)
PT Bukit Asam Tbk	8,000,000	30,465	18,420	(12,045)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	52,494,800	47,900	17,953	(29,947)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,700,000	10,944	13,770	2,826
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,800,000	13,275	12,236	(1,039)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	10,388,000	19,997	12,102	(7,895)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5,000,000	2,550	11,150	8,600
PT Aneka Tambang Tbk	3,500,000	3,194	10,990	7,796
PT PP Presisi Tbk	23,608,623	11,295	12,682	1,387
PT PP Properti Tbk	5,884	5,884	5,884	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,500,700	5,894	5,478	(416)
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	34,761,100	10,138	2,418	(7,720)
PT Taspen Properti Indonesia	587,187	1,572	2,149	577
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	49,964,175	10,393	1,887	(8,506)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3,500,000	11,418	1,449	(9,969)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	16,932,800	47,692	1,293	(46,399)
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	34,711,348	317,927	12,132	(305,798)
	162,065,750,964	1,288,256	610,198	(678,061)
Pihak ketiga/ *Third parties*				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	266,991	447,748	266,991	(180,757)
PT Astra International Tbk	12,038,500	97,477	80,598	(16,879)
PT Unilever Indonesia Tbk	14,775,800	124,267	38,417	(85,850)
PT Asuransi Allianz Utama	17,027	14,123	14,123	--
PT United Tractors Tbk	415,000	13,265	12,243	(1,022)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1,300,000	10,173	8,808	(1,365)
PT Bank Central Asia Tbk	800,000	4,927	6,460	1,533
PT AKR Corporindo Tbk	5,000,000	5,973	6,300	327
PT Inti Agri Resources Tbk	3,202	22	3,202	3,180
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2,500,000	4,672	2,260	(2,412)
PT H M Sampoerna Tbk	2,900,000	12,207	2,103	(10,104)
PT SMR Utama Tbk.	1,213	1,213	1,213	--
PT Bakrie Telecom Tbk.	1,159	316,770	1,159	(315,611)
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	166,814,923	98,632	7,179	(91,452)
Jumlah/ *Total*	206,833,815	1,151,469	451,056	(700,412)

	2024		
	Jumlah lembar/ *Total shares*	Biaya perolehan/ *Cost*	Nilai wajar/ *Fair value*
Nilai wajar melalui laba rugi/			
Fair value through profit and loss			
Pihak berelasi/ Related parties			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,030,297	13,321	285,973
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	400,018	2,645	19,380
PT Sarana Maluku Ventura	6,237	6,237	6,237
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,683,748	6,605	5,339
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	7,000,000	11,480	4,935
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1,124,380	5,652	4,869
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1,400,259	4,586	3,795
PT Taspen Properti Indonesia	587,187	3,514	3,514
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1,550,065	2,479	2,465
PT Aneka Tambang Tbk	1,498,589	2,843	2,285
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	500,068	2,200	2,175
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	2,076,000	3,996	2,138
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	34,893,000	13,958	1,710
PT PP Presisi Tbk	28,955,600	10,565	1,593
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	500,000	1,385	1,365
PT Wijaya Karya Beton Tbk	15,451,981	9,887	1,190
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	11,728,292	26,281	12,426
	115,385,721	127,634	361,389
Pihak ketiga/ *Third parties*			
PT Bank Central Asia Tbk	200,002	1,993	35,798
PT United Tractors Tbk	233,727	7,420	6,258
PT Reasuransi Maipark Indonesia	6,102	3,734	3,734
PT Astra International Tbk	750,034	4,179	3,675
Konsorsium Asuransi Risiko Khusus	7,752,400	1,282	1,723
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	16,649,195	8,263	80,628
	25,591,460	26,871	131,816
Jumlah/ *Total*	140,977,181	154,505	493,205

	2024			
	Jumlah lembar/ *Total shares*	Biaya perolehan/ *Cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	Akumulasi perubahan nilai wajar belum direalisasi/ *Accumulated unrealized gain/loss changes in fair value*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ ***Fair value through other comprehensive income***				
Pihak berelasi/ *Related parties*				
PT Semen Baturaja Tbk	784,084,300	316,770	122,749	(194,021)
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	48,658,300	265,094	77,367	(187,727)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	211,447,400	81,154	56,245	(24,909)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	12,947,400	88,618	56,062	(32,556)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	624,238,620	80,185	35,885	(44,300)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29,521,500	74,156	33,634	(40,522)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7,483,700	118,977	24,621	(94,356)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	7,300,000	31,698	19,783	(11,915)
PT Bukit Asam Tbk	6,000,000	24,483	16,440	(8,043)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,700,000	10,944	15,390	4,446
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5,000,000	2,550	13,650	11,100
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,800,000	13,275	12,180	(1,095)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	10,388,000	19,997	10,700	(9,297)
PT PP Presisi Tbk	139,517,800	30,306	10,379	(19,927)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,500,700	5,894	6,123	229
PT PP Properti Tbk	4,861,299,370	247,926	5,538	(242,388)
PT Aneka Tambang Tbk	3,500,000	3,194	5,320	2,126
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	52,494,800	47,909	5,302	(42,607)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	18,972,000	49,996	4,545	(45,451)
PT Fintek Karya Nusantara	1	2,395	2,395	--
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	34,761,100	10,138	2,210	(7,928)
PT Taspen Properti Indonesia	587,187	1,572	2,149	577
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3,500,000	11,418	1,169	(10,249)
PT Sarana Sumut Ventura	1	3,079	1,083	(1,996)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	20,000,000	9,373	1,027	(8,346)
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	9,899,508,806	52,932	12,415	(40,516)
	16,788,210,985	1,604,033	554,361	(1,049,671)
Pihak ketiga/ *Third parties*				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	331,665,400	447,748	301,816	(145,932)
PT Astra International Tbk	12,038,500	97,477	58,965	(38,512)
PT Unilever Indonesia Tbk	14,775,800	124,265	27,836	(96,429)
PT Asuransi Allianz Utama	17,027	14,123	14,123	--
PT United Tractors Tbk	415,000	13,265	10,686	(2,579)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1,300,000	10,173	10,010	(163)
PT Bank Central Asia Tbk	800,000	4,927	7,740	2,813
PT AKR Corporindo Tbk	5,000,000	5,973	5,575	(398)
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2,500,000	4,672	2,363	(2,309)
PT Kreasi Anak Indonesia	1	2,500	1,997	(503)
PT H M Sampoerna Tbk	2,900,000	12,207	1,842	(10,365)
Lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	166,814,923	98,632	4,212	(94,417)
	538,226,651	835,962	447,165	(388,794)
Jumlah/ *Total*	17,467,414,817	2,594,500	1,494,731	(1,438,465)

Pada tahun 2025, beberapa investasi saham entitas anak, IFG Life, yang tidak memenuhi kriteria pasar aktif dihitung menggunakan input level 2 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan, melalui laporan yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2026. Sementara pada tahun 2024 dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan, melalui laporan yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2025.

In 2025, some of investment in shares, of the subsidiary, IFG Life, that do not meet the criteria for an active market are calculated using level 2 input by Public Appraisal Service Office (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan, through a report published on June 8, 2026. Whilst in 2024, are calculated by Public Appraisal Service Office (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan, through a report published on May 25, 2025.

Mutasi investasi saham yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Movements share investments measured at fair value through other comprehensive income

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	(1,438,465)	(1,362,513)	*Beginning balance*
Keuntungan (kerugian) perunahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang belum direalisasi	1,438,465	(75,952)	*Unrealized gain (loss) on changes in fair value through other comprehensive income*
Saldo akhir	**--**	**(1,438,465)**	***Ending balance***

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

e. Investasi *unit link*

e. Unit-linked investment

	2025 Rp	2024 Rp	
Berdasarkan klasifikasi			*Based on Classification*
Nilai wajar melalui laba rugi	190,066	172,012	*Fair value through profit or loss*
	190,066	**172,012**	

Investasi reksadana *unit link*

Unit-linked mutual funds investment

	Rp	Rp	
Berdasarkan instrumen			***Based on instruments***
Nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Pendapatan tetap	22,979	15,877	*Fixed income*
Saham	104,033	103,031	*Shares*
Penyertaan terbatas	6,249	5,351	*Limited participation*
Campuran	56,805	47,753	*Mixed*
	190,066	**172,012**	

Berdasarkan rincian sebagai berikut: *The details are as follow:*

	2025			2024		
	Unit (dalam ribuan)/ *Unit (in thousands)*	Biaya perolehan/ *Cost*	*Nilai aset bersih/ Net asset value*	Unit (dalam ribuan)/ *Unit (in thousands)*	Biaya perolehan/ *Cost*	*Nilai aset bersih/ Net asset value*
Nilai wajar melalui laba rugi/						
Fair value through profit or loss						
Pihak ketiga/ *Third parties*						
IFG Link Ekuitas	92,920	104,033	104,033	96,492	103,031	103,031
IFG Link Berimbang	46,537	56,805	56,805	42,591	47,752	47,752
IFG Link Pendapatan Tetap	18,779	22,979	22,979	14,204	15,877	15,877
IFG Link Pasar Uang	5,609	6,249	6,249	4,978	5,351	5,352
Jumlah/ *Total*	163,845	190,066	190,066	158,265	172,011	172,012

f. Efek beragun aset / *f. Asset-backed securities*

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya diamortisasi	70,000	--	*Amortised cost*
Nilai wajar melalui laba rugi	--	628	*Fair value through profit or loss*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	11,193	10,293	*Fair value through other comprehensive income*
Jumlah	**81,193**	**10,921**	***Total***

	2025			2024		
	Peringkat/ *Rating*	Nilai tercatat/ *Carrying value* Nilai wajar/ *Fair value*	Akumulai perubahan nilai wajar belum direalisasi/ *Unrealized accumulated changes in fair value*	Peringkat/ *Rating*	Nilai tercatat/ *Carrying value* Nilai wajar/ *Fair value*	Akumulai perubahan nilai wajar belum direalisasi/ *Unrealized accumulated changes in fair value*
Biaya diamortisasi/ Amortised cost						
Pihak berelasi/ *Related parties*						
BRI Manajemen Investasi	AAA	70,000	--	--	--	--
Subjumlah/ *Subtotal*		70,000	--		--	--
Nilai wajar melalui laba rugi/						
Fair value through profit and loss						
Pihak berelasi/ *Related parties*						
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)		--	--	idAAA	628	--
Subjumlah/ *Subtotal*		--	--		628	--
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/						
Fair value through other comprehensive income						
Pihak berelasi/ *Related parties*						
KIK EBA Mandiri GIAA	idAA+	11,193	(3,021)	idAA+	10,293	(4,712)
Subjumlah/ *Subtotal*		11,193	(3,021)		10,293	(4,712)
Jumlah/ *Total*		**81,193**	**(3,021)**		**10,921**	**(4,712)**

Mutasi efek beragun aset yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Movements asset-backed securities measured at fair value through other comprehensive income

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	(4,712)	(6,102)	*Beginning balance*
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi	1,691	1,390	*Gain/loss on unrealized fair value OCI*
Saldo akhir	**(3,021)**	**(4,712)**	***Ending balance***

8. Piutang Imbal Jasa Penjaminan – Bersih / *8. Guarantee Fee Receivables – Net*

	2025 Rp	2024*) Rp	
Pihak berelasi (Catatan 44)	3,810,107	6,778,037	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	4,058,095	1,306,960	*Third parties*
	7,868,202	**8,084,997**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,622,619)	(4,300,954)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**3,245,583**	**3,784,043**	***Total***

Berdasarkan jenis penjaminan: / *Based on the type of guarantee:*

	2025 Rp	2024 Rp	
Kredit	7,866,110	8,084,019	*Credit*
Suretyship	2,092	978	*Suretyship*
	7,868,202	**8,084,997**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,622,619)	(4,300,954)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**3,245,583**	**3,784,043**	***Total***

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi. / *Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	4,300,954	3,959,259	*Beginning balance*
Penambahan	321,665	341,695	*Addition*
Saldo akhir	**4,622,619**	**4,300,954**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang imbal jasa penjaminan.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible guarantee fee receivables.

9. Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain – Bersih / *9. Accounts Receivable and Other Receivables – Net*

	2025 Rp	2024 Rp	
Piutang usaha	865,738	850,254	*Accounts receivable*
Piutang lain-lain	1,815,698	1,959,823	*Other receivables*
Subtotal	**2,681,436**	**2,810,077**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(334,362)	(330,651)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**2,347,074**	**2,479,426**	***Total***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha dan piutang lain-lain.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts receivable and other receivables.

a. Piutang usaha – bersih / *a. Accounts receivable – net*

	2025 Rp	2024 Rp	
Berdasarkan pihak			***By Parties***
Pihak berelasi (Catatan 44)	189,005	46,235	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	676,733	804,019	*Third parties*
Subtotal	**865,738**	**850,254**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(120,295)	(122,822)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**745,443**	**727,432**	***Total***

Piutang usaha menurut jenis terdiri dari: / *Account receivables by type of:*

	2025 Rp	2024 Rp	
Piutang nasabah	399,369	500,785	*Customer receivables*
Piutang sewa	142,355	143,410	*Lease receivables*
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	105,480	26,890	*Clearing and guarantee institution receivables*
Piutang jasa penasehat keuangan	71,395	57,404	*Financial advisory service receivables*
Piutang usaha pengelolaan dana	53,817	34,912	*Fund management service receivables*
Piutang atas efek	51,622	65,739	*Securities receivables*
Piutang komisi penjaminan ulang	41,700	21,114	*Co-guarantee commission receivables*
Subtotal	**865,738**	**850,254**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(120,295)	(122,822)	*Allowance for impairment losses*
Total	**745,443**	**727,432**	***Total***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	122,822	119,286	*Beginning balance*
Penambahan	3,670	6,657	*Addition*
Pemulihan	(6,197)	(3,121)	*Recoveries*
Saldo akhir	**120,295**	**122,822**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible account receivables.

b. Piutang lain-lain – bersih / *b. Other receivables – net*

	2025 Rp	2024 Rp	
Berdasarkan pihak			***By Parties***
Pihak berelasi (Catatan 44)	490,664	483,917	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	1,325,034	1,475,906	*Third parties*
Subtotal	**1,815,698**	**1,959,823**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(214,067)	(207,829)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**1,601,631**	**1,751,994**	***Total***

Piutang lain-lain menurut jenis terdiri dari: / *Other receivables by type of:*

	2025 Rp	2024 Rp	
Piutang premi kontrak *stop loss* -bersih	261,718	305,812	*Premium receivables for stop loss contract - net*
Pinjaman bagi hasil	17,095	17,110	*Profit sharing loan*
Piutang koperasi	10,050	9,829	*Receivables from cooperatives*
Pinjaman yang diberikan kepada karyawan	7,355	6,157	*Employee receivables*
Piutang pemulihan klaim	887	--	*Claim recovery receivables*
Lainnya	1,518,593	1,620,915	*Others*
Subtotal	**1,815,698**	**1,959,823**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(214,067)	(207,829)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**1,601,631**	**1,751,994**	***Total***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	207,829	170,470	*Beginning balance*
Penambahan	7,372	34,209	*Addition*
Penghapusan	(133)	3,150	*Write-off*
Pemulihan	(1,001)	--	*Recoveries*
Saldo akhir	**214,067**	**207,829**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible other receivables.

10. Piutang Penjaminan Ulang – Bersih / *10. Re-Guarantee Receivables – Net*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 44)	10,203	48,768	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	361,893	282,919	*Third parties*
Subtotal	**372,096**	**331,687**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(350,818)	(277,663)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**21,278**	**54,024**	***Total***

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai / ***Changes in allowance for impairment losses***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	277,663	253,801	*Beginning balance*
Penambahan	73,155	23,862	*Addition*
Saldo akhir	**350,818**	**277,663**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang penjaminan ulang.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible re-guarantee receivables.

11. Piutang Pembiayaan Modal Ventura – Bersih / *11. Venture Capital Financing Receivables – Net*

Pembiayaan modal ventura berasal dari kegiatan dalam bentuk kerja sama dengan pola bagi hasil. Grup menyediakan dana untuk keperluan usaha perusahaan mitra usaha. Pola pembiayaan ini mengatur besarnya persentase keuntungan setiap bulan atau periode bagi Grup.

Venture capital financing represents activities in the form of joint cooperation arrangements with a profit sharing. The Group provides funds for operational use of the partner companies. This financing scheme defines a certain percentage of profit for each month or period attributable to the Group.

a. Berdasarkan pihak / *a. By parties*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak ketiga	886,868	1,029,473	*Third parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176,552)	(160,159)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**710,316**	**869,314**	***Total***

b. Berdasarkan umur / ***b. By aging***

	2025 Rp	2024 Rp	
Belum jatuh tempo	677,389	776,750	*Not yet due*
Jatuh tempo selama 1 - 30 hari	81,967	102,568	*Due for 1 to 30 days*
Jatuh tempo selama 31 - 90 hari	2,186	8,935	*Due for 31 to 90 days*
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	125,326	141,220	*Due for over 90 days*
Subtotal	**886,868**	**1,029,473**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176,552)	(160,159)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**710,316**	**869,314**	***Total***

c. Berdasarkan kolektibilitas / ***c. By collectability***

	2025 Rp	2024 Rp	
Lancar	677,389	776,750	*Current*
Dalam perhatian khusus	81,967	102,568	*Special mention*
Kurang lancar	2,186	8,935	*Substandard*
Diragukan	5,768	5,996	*Doubtful*
Macet	119,558	135,224	*Loss*
Subtotal	**886,868**	**1,029,473**	***Subtotal***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(176,552)	(160,159)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**710,316**	**869,314**	***Total***

d. Analisa saldo dan jumlah cadangan kerugian pernurunan nilai adalah sebagai berikut: / ***d. Analysis of total balance and allowance for impairment losses are as follows:***

	2025 Rp	2024 Rp	
Penilaian secara kolektif	41,601	69,736	*Collective assessments*
Penilaian secara individual	134,951	90,423	*Individual assessments*
Jumlah	**176,552**	**160,159**	***Total***

Mutasi Cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Changes in allowance for impairment losses are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal	160,159	153,572	*Beginning balance*
Dampak dekonsolidasi			*Effects of the Deconsolidation of*
PT Sarana Bali Ventura	--	658	*PT Sarana Bali Ventura*
PT Sarana Sultra Ventura	(3,483)	--	*PT Sarana Sultra Ventura*
PT Sarana Sulut Ventura	(3,254)	--	*PT Sarana Sulut Ventura*
Penambahan	32,033	31,775	*Addition*
Pemulihan	(6,573)	(19,804)	*Recoveries*
Penghapusan	(2,330)	(6,042)	*Write-off*
Saldo akhir	**176,552**	**160,159**	***Ending balance***

Direksi berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang penjaminan ulang.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible re-guarantee receivables.

12. Perpajakan / *12. Taxation*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	2025 Rp	2024 Rp	
Entitas anak			***Subsidiaries***
Kelebihan pembayaran pajak			*Claims for tax refund*
Tahun 2025	1,485	--	*Year 2025*
Tahun 2024	67,090	67,191	*Year 2024*
Tahun 2023	--	51,797	*Year 2023*
Tahun 2022	5,445	5,445	*Year 2022*
Pasal 25	61,494	72,593	*Article 25*
Lainnya	153,954	--	*Others*
Jumlah	**289,468**	**197,026**	***Total***
Pajak lain-lain:			***Other taxes:***
Perseroan			***The Company***
Pasal 21	--	209	*Article 21*
Pasal 23	--	76	*Article 23*
Jumlah	**--**	**285**	***Total***
Entitas anak			***Subsidiaries***
Pajak Pertambahan Nilai	10,138	17,137	*Value-Added Tax*
Pasal 21	5,898	807	*Article 21*
Pasal 23	10,906	4,881	*Article 23*
Pasal 4(2)	47	--	*Article 4(2)*
Pajak lain-lain	674	361	*Other taxes*
	27,663	**23,186**	
Jumlah	**317,131**	**220,497**	***Total***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan pelaporan keuangan dan dapat berubah pada saat Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended December 31, 2025 is an estimate made for financial reporting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return.

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00002/406/21/093/24 pada tanggal 24 Januari 2024 atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp59.240 atas kelebihan pembayaran pada SPT Pembetulan 2021 sejumlah Rp61.180. Kelebihan bayar pajak tahun 2021 tersebut telah diperhitungkan dengan sisa utang pajak atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak 2021 total sebesar Rp10.177. Askrindo telah menerima pembayaran atas pengembalian sisa SKPLB sebesar Rp49.063 pada 16 Februari 2024.

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") received Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00002/406/21/093/24 dated January 24, 2024 on corporate income tax for 2021 fiscal year amounting to Rp59,240 on overpayment of 2021 Income Tax Return amounted to Rp61,180. The tax overpayment for 2021 fiscal year had been netted-off with remaining taxes payable from tax collection letter of value added tax and underpayment tax assessment letter of income tax Articles 21, Article 23 and Value Added Tax for period 2021 totaling Rp10,177. Askrindo had received payment for the remaining refund of SKPLB amounted to Rp49,063 on February 16, 2024.

Pada bulan Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelesaikan pemeriksaan pajak Nasre untuk tahun pajak 2021 dan menerbitkan Surat Keputusan Pemeriksaan Pajak yaitu kurang bayar pasal 21, 23, dan 26 sebesar Rp2.852 serta lebih bayar untuk Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp16.422 atas kelebihan pembayaran pada SPT tahun 2021 sebesar Rp16.441. Pada tanggal 1 Februari 2024, Nasre telah menerima pengembalian atas pajak yang dinyatakan lebih bayar sebesar Rp16.422. Nasre mencatat kurang bayar pajak pasal 21, 23 dan 26 sebesar Rp2.852 sebagai beban lain-lain pada tahun 2024.

On January 2024, the Directorate General of Tax ("DGT") have completed tax examination of Nasre for fiscal years 2021 and issued the Decision Letter of Tax Audit, which resulted in tax underpayment article 21, 23, and 26 and overpayment for Corporate Income Taxes with a total value of Rp2,852 underpayment and Rp16,422 overpayment of the overpayment of income tax return 2021 amounting to Rp16,441. On February 1, 2024, Nasre received a tax refund which was declared to be overpaid amounting to Rp16,422. Nasre recorded tax underpayment articles 21, 23, and 26 amounting to Rp2,852 as other expenses in 2024.

Pada bulan April 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelesaikan pemeriksaan pajak PT Reasuransi Nasional Indonesia ("Nasre") untuk tahun pajak 2022 dan menerbitkan Surat Keputusan Pemeriksaan Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah sebesar Rp7.999. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Nasre masih belum menerima atas pengembalian pajak tersebut.

On April 2024, the Directorate General of Tax (DGT) completed tax examination of PT Reasuransi Nasional Indonesia ("Nasre") for fiscal year 2022 and issued the Tax Examination Letter for overpayment of Corporate Income Tax amounted to Rp7,999. As of the date financial statements, Nasre has not received the tax refund yet.

Tahun 2024

Pada tanggal 28 November 2025 PT Bahana Sekuritas menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan tahun 2024 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp2.029. Perusahaan menerima pengembalian restitusi dari SKPLB tersebut sebesar Rp2.029 pada tanggal 15 Januari 2026.

Fiscal year 2024

On November 28, 2025, PT Bahana Sekuritas received a Tax Overpayment Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar or SKPLB) for Corporate Income Tax for fiscal year 2024, indicating an overpayment amounting to Rp2.029. The Company received the tax refund related to the SKPLB amounting to Rp2.029 on 15 January 2026.

Tahun 2023

Pada tanggal 20 Desember 2024 PT Bahana Sekuritas menerima SKPLB PPh Badan tahun 2023 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp2.803. PT Bahana Sekuritas menerima pengembalian restitusi dari SKPLB tersebut sebesar Rp2.803 pada tanggal 23 Januari 2025.

Fiscal year 2023

On December 20, 2024, PT Bahana Sekuritas received a Tax Overpayment Assessment Letter for Corporate Income Tax for fiscal year 2023, indicating an overpayment amounting to Rp2.803. PT Bahana Sekuritas received a tax refund related to the SKPLB amounting to Rp2.803 on 23 January 2025.

Pada tanggal 19 Desember 2024, PT Bahana Sekuritas menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Desember 2023 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp7.256. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2025, PT Bahana Sekuritas menerima pengembalian restitusi dari SKPLB PPN tersebut sebesar Rp7.183 pada tanggal 21 Januari 2025, setelah dikurangi kompensasi utang pajak lainnya sebesar Rp73.

On December 19, 2024, PT Bahana Sekuritas received a Value Added Tax (VAT) Overpayment Assessment Letter (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar or SKPLB) for the December 2023 tax period, indicating an overpayment amounting to Rp7.256. Subsequently, on January 14, 2025, PT Bahana Sekuritas received the related VAT refund amounting to Rp7.183 on January 21, 2025, after offsetting other tax liabilities amounting to Rp73.

Pada tanggal 12 November 2025, PT Jamkrindo menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pelayanan Pajak atas pemeriksaan pajak tahun pajak 2023, yang meliputi berbagai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp36.187 yang terdiri dari pajak penghasilan badan sebesar Rp12.364 dan Pajak penghasilan lainnya (PPh 21, 22, 23 dan 4(2)) sebesar Rp23.823.

On November 12, 2025, PT Jamkrindo received several Tax Underpayment Assessment Letters (SKPKB) from the Tax Service Office regarding the tax audit for the 2023 tax year, which include various Income Taxes (PPh) totaling Rp36.187, consisting of corporate income tax of Rp12.364 and other income taxes (PPh 21, 22, 23, and 4(2)) totaling Rp23.823.

PT Jamkrindo telah melakukan pembayaran atas seluruh ketetapan pajak tersebut pada tanggal 29 April 2025, dan mencatat sebagai beban pada tahun berjalan.

PT Jamkrindo has made the payment for all of the tax assessments on April 29, 2025, and recorded it as an expense for the current year.

Selain itu, selama tahun 2025, PT Jamkrindo juga memperoleh Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda pelaporan PPN yang dibebaskan dan tidak dipungut dari jasa penjaminan sebesar Rp83.640. Atas STP tersebut PT Jamkrindo belum melakukan pembayaran dan telah mengajukan keberatan atas semua STP tersebut pada tahun 2025. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, belum ada keputusan hasil dari keberatan tersebut.

In addition, during 2025, PT Jamkrindo received Tax Collection Letters (STP) related to penalties for Value Added Tax (VAT) reporting on exempted and non-collected VAT from guarantee services amounting to Rp83.640. PT Jamkrindo has not made any payment on these STP and has filed objections against all such STP in 2025. As of the date of completion of the financial statements, no decision has been received on the outcome of these objections.

Pada 1 April 2024, PT Jamsyar menerima Surat Tagihan Pajak (“STP”) denda atas Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk tahun fiskal 2023 sebesar Rp252. Pada 16 April 2025, entitas anak menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) PPh badan untuk tahun fiskal 2023 sebesar Rp48.757. Pada 8 Mei 2025, entitas anak menerima Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (“SKPKPP”) No. KEP-00211/KP-CT/KKP.0617/2025 yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat memutuskan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan memperhitungkan utang pajak sebesar Rp242 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kurang Bayar Pajak (“SKPKB”). Pada 23 Mei 2025, PT Jamsyar telah menerima pengembalian lebih bayar pajak sebesar Rp48.515 atas PPh 25/29 Badan Masa/Tahun Pajak Januari – Desember 2023 kepada entitas anak.

On April 1, 2024, PT Jamsyar received a Tax Collection Letter (“STP”) related to administrative penalties on Corporate Income Tax for the fiscal year 2023 amounting to Rp252. On April 16, 2025, the Subsidiary received a Tax Overpayment Assessment Letter (“SKPLB”) for Corporate Income Tax for the fiscal year 2023 amounting to Rp48.757. On May 8, 2025, the Subsidiary received a Tax Overpayment Refund Decision Letter (“SKPKPP”) No. KEP-00211/KP CT/KKP.0617/2025 issued by the Madya Dua Tax Office of Central Jakarta, which approved the refund of the tax overpayment and offset it against tax payable amounting to Rp242, as stated in the attachment of the Tax Underpayment Assessment Letter (“SKPKB”). On May 23, 2025, PT Jamsyar received the net tax refund amounting to Rp48.515 for Corporate Income Tax Article 25/29 for the fiscal year January to December 2023 to the Subsidiary.

Pada tanggal 10 Juli 2024, DJP menerbitkan SP2 (Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan) No.S-234/RIKSIS/KPP.1904/2024 atas Lebih Bayar SPT PPh Badan 2023 sebesar Rp11.827. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, PT IFG Life masih dalam proses Pemeriksaan Pajak.

On July 10, 2024, the DJP issued SP2 (Field Examination Notification) No. S-234/RIKSIS/KPP.1904/2024 regarding the Overpayment of Corporate Income Tax Return (SPT PPh Badan) for 2023 amounting to Rp11.827. Up to the date of financial statements issuance, PT IFG Life is currently under tax examination.

Pada tanggal 20 Mei 2025, PT IFG Life telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No.000026/406/23/093/25 dari DJP yang menyatakan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2023 yang dapat dikembalikan adalah sebesar Rp10.606.

On May 20, 2025, PT IFG Life has also received Notice of Tax Underpayment Assessment ("SKPKB") No. 00026/406/23/093/25, from DGT which stated the tax overpayment for Corporate Income Tax for fiscal year 2023 amounting to Rp10.606.

PT IFG Life telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp10.535 pada tanggal 9 Juli 2025, nilai tersebut merupakan SKPLB di perhitungkan dengan utang pajak atas Surat Tagihan Pajak ("STP") Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp71 berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak No.KEP-00092/KP-CT/KPP.19.04/2025.

PT IFG Life received a tax refund amounting to Rp10.535 on July 9, 2025. The amount represents the Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) netted against tax payable arising from a Value Added Tax ("VAT") Tax Collection Letter ("STP") amounting to Rp71, based on the Tax Overpayment Refund Decision Letter No. KEP-00092/KP CT/KPP.19.04/2025.

Pada tanggal 13 Agustus 2025 PT IFG Life telah telah mengajukan keberatan kepada DJP melalui Surat Keberatan Pajak Penghasilan Badan No. 4229/AJII/V/PKK/0825 Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Maret 2023 No. 4218/AJII/V/PKK/0825 masa Mei 2023 No. 4223/AJII/V/PKK/0825 dan Pajak masa September 2023 No. 4227/AJII/V/PKK/0825 masing-masing sebesar Rp3.173, Rp180, Rp605, dan Rp122.

On August 13, 2025, PT IFG Life filed objections with the Directorate General of Taxes (DGT) through a Corporate Income Tax Objection Letter No. 4229/AJII/V/PKK/0825, a Withholding Income Tax Article 26 Objection Letter No. 4218/AJII/V/PKK/0825 for the March 2023 tax period, a Withholding Income Tax Article 26 Objection Letter No. 4223/AJII/V/PKK/0825 for the May 2023 tax period, and a Tax Objection Letter No. 4227/AJII/V/PKK/0825 for the September 2023 tax period, amounting to Rp3.173, Rp180, Rp605, and Rp122, respectively.

Tahun Pajak 2020

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan atas Data dan/atau Keterangan Nomor BA-57/P2DK//KPP.190405/2025 tanggal 21 Maret 2025, terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT Jamkrindo sebagai berikut:

- PPh Pasal 25/29 sebesar Rp24.417;
- PPh Pasal 21, 22, 23, dan Pasal 4 ayat (2) dengan total sebesar Rp305; dan
- PPN sebesar Rp70.

Fiscal year 2020

Based on the Minutes of Implementation of Request for Data and/or Information Number BA-57/P2DK//KPP.190405/2025 dated March 21, 2025, the following tax obligations must be fulfilled by PT Jamkrindo:

- *PPh Article 25/29 amounting to Rp24,417;*
- *PPh Articles 21, 22, 23, and Article 4(2) with a total amount of Rp305; and*
- *VAT amounting to Rp70.*

PT Jamkrindo telah melakukan pembayaran atas kewajiban pajak tersebut pada tanggal 29 April 2025, dan membukukan sebagai beban pajak pada tahun berjalan.

PT Jamkrindo has made the payment for the tax obligation on April 29, 2025, and recognized it as a tax expense for the current year.

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pajak penghasilan badan:			***Corporate income tax:***
Perseroan			***The Company***
Pasal 25	--	15	*Article 25*
Pasal 29			*Article 29*
Tahun 2025	10,118	--	*Year 2025*
Tahun 2024	--	3,261	*Year 2024*
	10,118	**3,276**	
Entitas anak			***Subsidiaries***
Pasal 25	3,684	2,805	*Article 25*
Tahun 2025	489,638	--	*Year 2025*
Tahun 2024	--	129,129	*Year 2024*
Subtotal	**493,322**	**131,934**	***Subtotal***
Jumlah	**503,440**	**135,210**	***Total***
Pajak lain-lain:			***Other taxes:***
Perseroan			***The Company***
Pasal 21	14,441	3,125	*Article 21*
Pasal 22	9	16	*Article 22*
Pasal 23	698	1,286	*Article 23*
Pajak Pertambahan Nilai	4,040	5,379	*Value-Added Tax*
Pasal 4(2)	278	70	*Article 4(2)*
	19,466	**9,876**	
Entitas anak			***Subsidiaries***
Pasal 21	23,762	44,583	*Article 21*
Pasal 22	53	35	*Article 22*
Pasal 23	12,600	9,940	*Article 23*
Pasal 26	93	121	*Article 26*
Pajak Pertambahan Nilai	36,172	37,035	*Value-Added Tax*
Pasal 4(2)	34,976	38,213	*Article 4(2)*
Pajak Penghasilan Daerah - PB 1	19,435	49,898	*Local Government Tax - PB 1*
Pajak lain-lain	2,456	32,099	*Other taxes*
Subtotal	**129,547**	**211,924**	***Subtotal***
Jumlah	**652,453**	**357,010**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	2025 Rp	2024 Rp	
Perseroan			***The Company***
Kini	10,795	3,952	*Current*
Tangguhan	--	--	*Deferred*
	10,795	**3,952**	
Entitas anak			***Subsidiaries***
Kini	881,439	379,690	*Current*
Tangguhan	(215,492)	(343,085)	*Deferred*
	665,947	**36,605**	
Jumlah	**676,742**	**40,557**	***Total***

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expenses and the theoretical tax amount on the profit before income tax is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Laba sebelum pajak penghasilan - penghasilan konsolidasian	6,184,111	3,649,233	*Consolidated profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(6,725,856)	(4,574,585)	*Profit before income tax - subsidiaries*
Penyesuaian untuk eliminasi	1,816,004	1,946,297	*Adjustment for elimination*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	**1,274,259**	**1,020,945**	***Profit before income tax - The Company***
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	280,337	224,608	*Taxes calculated at the applicable tax rate*
Dampak perubahan tarif pajak			***Impact on changes in tax rate***
Dampak PSAK 109			***Impact on SFAS 109***
Perbedaan tetap:			***Permanent differences:***
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(523,186)	(517,934)	*Income subject to final tax and non-taxable income*
Beban yang tidak diperkenankan	241,889	294,243	*Non-deductible expenses*
Penyesuian atas beban pajak tahun lalu	--	--	*Adjustments to prior year's income tax expense*
Penyesuian atas cadangan aset pajak tangguhan	11,755	3,035	*Adjustments for allowance of deferred tax assets*
Beban pajak penghasilan Perseroan	**10,795**	**3,952**	*Company income tax expense*
Beban pajak penghasilan			*Income tax expenses*
Perseroan	10,795	3,952	*The Company*
Entitas anak	665,947	36,605	*Subsidiaries*
	676,742	**40,557**	

Pajak penghasilan badan dihitung untuk masing-masing entitas sebagai bagian yang terpisah secara hukum.

The corporate income tax is calculated for each entity as a separate legal entity.

Taksiran laba kena pajak Perseroan, dan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Company's estimated taxable income, and income taxes for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	6,184,111	3,649,233	*Consolidated profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(6,725,856)	(4,574,585)	*Profit before income tax - subsidiaries*
Penyesuaian untuk eliminasi	1,816,004	1,946,297	*Adjustment for elimination*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	**1,274,259**	**1,020,945**	***Profit before income tax - The Company***
Perbedaan waktu:			***Timing differences:***
Penyusutan	3,485	7,581	*Depreciation*
Cadangan kerugian penurunan nilai	10,970	(12,517)	*Allowance for impairment losses*
Liabilitas imbalan kerja	7,948	(10,039)	*Employee benefit liabilities*
Sewa	31,027	28,770	*Leases*
	53,430	**13,795**	
Perbedaan tetap:			***Permanent differences:***
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(2,378,118)	(2,354,247)	*Income subject to final tax and non-taxable income*
Beban yang tidak diperkenankan	1,099,497	1,337,470	*Non-deductible expenses*
	(1,278,621)	**(1,016,777)**	
Laba kena pajak	**49,068**	**17,963**	***Taxable income***
Perseroan:			***The Company:***
Beban pajak penghasilan - kini	10,795	3,952	*Income tax expenses - current*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			*Less prepaid income taxes:*
Pasal 23	(585)	(510)	*Article 23*
Pasal 25	(92)	(181)	*Article 25*
Kekurangan pembayaran pajak	**10,118**	**3,261**	***Corporate income tax payable***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended December 31, 2025 is an estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Tax Return.

d. Aset pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets*

	2025				
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss* Rp	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/ *(charged) to other comprehensive income* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Perseroan					***The Company***
Penyusutan dan amortisasi	2,413	767	--	3,180	*Depreciation and amortisation*
Cadangan kerugian penurunan nilai	845	2,414	--	3,259	*Allowance for impairment losses*
Liabilitas imbalan kerja	9,165	1,749	(2,300)	8,614	*Employee benefit liabilites*
Sewa	8,444	6,826	--	15,270	*Leases*
	20,867	**11,756**	**(2,300)**	**30,323**	
Cadangan aset pajak tangguhan	(20,867)	(11,756)	2,300	(30,323)	*Deferred tax assets allowance*
	--	--	--	--	
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Penyusutan dan amortisasi	422,002	32,213	--	454,215	*Depreciation and amortisation*
Liabilitas imbalan kerja	156,241	(35,316)	(19,672)	101,253	*Employee benefit liabilites*
Akrual	186,492	55,487	(1,401)	240,578	*Accruals*
Kontribusi yang belum menjadi hak	335,616	(264,922)	--	70,694	*Unearned contributions*
Kontribusi ujrah yang belum menjadi hak	27,106	(3,380)	--	23,726	*Unearned ujrah contributions*
Estimasi liabilitas klaim - syariat	164,919	21,635	--	186,554	*Estimated claims*
Cadangan kerugian penurunan nilai	1,337,837	9,575	130	1,347,542	*Allowance for impairment losses*
Provisi atas kerugian klaim	1,200,963	139,172	--	1,340,135	*Provision for claim loss*
Sewa	17,246	4,703	--	21,949	*Leases*
Keuntungan belum direalisasikan atas nilai wajar efek	(86,373)	1,501	(49,607)	(134,479)	*Unrealised gain on fair value of marketable securities*
Akumulasi rugi fiskal	1,436,869	208,831	--	1,645,700	*Accumulated fiscal loss*
Penilaian liabilitas keuangan	12,876	415	--	13,291	*Financial liabilities valuation*
Kontrak asuransi dan reasuransi	928,125	64,732	--	992,857	*Insurance and reinsurance contract*
	6,139,919	**234,646**	**(70,550)**	**6,304,015**	
Cadangan aset pajak tangguhan	(796,345)	(19,154)	(5,633)	(821,132)	*Deferred tax assets allowance*
	5,343,574	**215,492**	**(76,183)**	**5,482,883**	
Konsolidasi					***Consolidation***
Penyusutan dan amortisasi	424,415	32,980	--	457,395	*Depreciation and amortisation*
Liabilitas imbalan kerja	165,406	(33,567)	(21,972)	109,867	*Employee benefit liabilites*
Akrual	186,492	55,487	(1,401)	240,578	*Accruals*
Kontribusi yang belum menjadi hak	335,616	(264,922)	--	70,694	*Unearned contributions*
Kontribusi ujrah yang belum menjadi hak	27,106	(3,380)	--	23,726	*Unearned ujrah contributions*
Estimasi liabilitas klaim - syariat	164,919	21,635	--	186,554	*Estimated claims*
Cadangan kerugian penurunan nilai	1,338,682	11,989	130	1,350,801	*Allowance for impairment losses*
Provisi atas kerugian klaim	1,200,963	139,172	--	1,340,135	*Provision for claim loss*
Sewa	25,690	11,529	--	37,219	*Leases*
Keuntungan belum direalisasikan atas nilai wajar efek	(86,373)	1,501	(49,607)	(134,479)	*Unrealised gain on fair value of marketable securities*
Akumulasi rugi fiskal	1,436,869	208,831	--	1,645,700	*Accumulated fiscal loss*
Penilaian liabilitas keuangan	12,876	415	--	13,291	*Financial liabilities valuation*
Kontrak asuransi dan reasuransi	928,125	64,732	--	992,857	*Insurance and reinsurance contract*
	6,160,786	**246,402**	**(72,850)**	**6,334,338**	
Cadangan aset pajak tangguhan	(817,212)	(30,910)	(3,333)	(851,455)	*Deferred tax assets allowance*
	5,343,574	**215,492**	**(76,183)**	**5,482,883**	

	2024					
	1 Januari/ *January 1,* Rp	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss* Rp**	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/ *(charged) to other comprehensive income* Rp**	**Dampak PSAK 109 dan PSAK 117/ *Impact of SFAS 109 and SFAS 117* Rp**	**31 Desember/ *December 31,* Rp**	
Perseroan						***The Company***
Penyusutan dan amortisasi	745	1,668	--	--	2,413	*Depreciation and amortisation*
Cadangan kerugian penurunan nilai	3,599	(2,754)	--	--	845	*Allowance for impairment losses*
Liabilitas imbalan kerja	11,428	(2,209)	(54)	--	9,165	*Employee benefit liabilites*
Sewa	2,115	6,329	--	--	8,444	*Leases*
	17,887	**3,034**	**(54)**	**--**	**20,867**	
Cadangan aset pajak tangguhan	(17,887)	(3,034)	54	--	(20,867)	*Deferred tax assets allowance*
	--	--	--	--	--	
Entitas Anak						***Subsidiaries***
Penyusutan dan amortisasi	360,570	61,432	--	--	422,002	*Depreciation and amortisation*
Liabilitas imbalan kerja	177,215	(10,706)	(9,518)	(750)	156,241	*Employee benefit liabilites*
Akrual	129,112	57,380	--	--	186,492	*Accruals*
Kontribusi yang belum menjadi hak	336,980	(1,364)	--	--	335,616	*Unearned contributions*
Kontribusi ujrah yang belum menjadi hak	45,518	(18,412)	--	--	27,106	*Unearned ujrah contributions*
Estimasi liabilitas klaim - syarial	65,931	98,988	--	--	164,919	*Estimated claims*
Cadangan kerugian penurunan nilai	1,720,115	64,712	(162)	(446,828)	1,337,837	*Allowance for impairment losses*
Provisi atas kerugian klaim	1,404,468	(203,505)	--	--	1,200,963	*Provision for claim loss*
Sewa	10,577	6,669	--	--	17,246	*Leases*
Keuntungan belum direalisasikan atas nilai wajar efek	(32,756)	139	5,274	(59,030)	(86,373)	*Unrealised gain on fair value of marketable securities*
Akumulasi rugi fiskal	837,109	599,760	--	--	1,436,869	*Accumulated fiscal loss*
Penilaian liabilitas keuangan	4,997	7,879	--	--	12,876	*Financial liabilities valuation*
Kontrak asuransi dan reasuransi	328,104	(99,393)	--	699,414	928,125	*Insurance and reinsurance contract*
	5,387,940	**563,579**	**(4,406)**	**192,806**	**6,139,919**	
Cadangan aset pajak tangguhan	(575,851)	(220,494)	--	--	(796,345)	*Deferred tax assets allowance*
	4,812,089	**343,085**	**(4,406)**	**192,806**	**5,343,574**	
Konsolidasi						***Consolidation***
Penyusutan dan amortisasi	361,315	63,100	--	--	424,415	*Depreciation and amortisation*
Liabilitas imbalan kerja	188,643	(12,915)	(9,572)	(750)	165,406	*Employee benefit liabilites*
Akrual	129,112	57,380	--	--	186,492	*Accruals*
Kontribusi yang belum menjadi hak	336,980	(1,364)	--	--	335,616	*Unearned contributions*
Kontribusi ujrah yang belum menjadi hak	45,518	(18,412)	--	--	27,106	*Unearned ujrah contributions*
Estimasi liabilitas klaim - syarial	65,931	98,988	--	--	164,919	*Estimated claims*
Cadangan kerugian penurunan nilai	1,723,714	61,958	(162)	(446,828)	1,338,682	*Allowance for impairment losses*
Provisi atas kerugian klaim	1,404,468	(203,505)	--	--	1,200,963	*Provision for claim loss*
Sewa	12,692	12,998	--	--	25,690	*Leases*
Keuntungan belum direalisasikan atas nilai wajar efek	(32,756)	139	5,274	(59,030)	(86,373)	*Unrealised gain on fair value of marketable securities*
Akumulasi rugi fiskal	837,109	599,760	--	--	1,436,869	*Accumulated fiscal loss*
Penilaian liabilitas keuangan	4,997	7,879	--	--	12,876	*Financial liabilities valuation*
Kontrak asuransi dan reasuransi	328,104	(99,393)	--	699,414	928,125	*Insurance and reinsurance contract*
	5,405,827	**566,613**	**(4,460)**	**192,806**	**6,160,786**	
Cadangan aset pajak tangguhan	(593,738)	(223,528)	54	--	(817,212)	*Deferred tax assets allowance*
	4,812,089	**343,085**	**(4,406)**	**192,806**	**5,343,574**	

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

e. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

13. Investasi pada Entitas Asosiasi / *13. Investment in Associate*

Nama perusahaan	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	2025 Rp	2024 Rp	*Name of company*
Metode ekuitas					*Equity method*
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Asuransi kerugian/ *General insurance*	20.00	381,842	311,431	*PT Asuransi Tokio Marine Indonesia*
			381,842	**311,431**	

Mutasi investasi pada entitas asosiasi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in investments in associate during the year were as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	311,431	294,850	*Beginning balance*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	61,691	59,334	*Share of profit of associate*
Dividen	--	(38,854)	*Dividend*
Cadangan pembiayaan asuransiu	115	--	*Insurance finance reserve*
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak	10,331	(4,205)	*Share of other comprehensive income of associate, net of tax*
Pengukuiran kembali atas program imbalan pasti	(1,726)	306	*Remeasurement of defined benefit plan*
Saldo Akhir	**381,842**	**311,431**	***Ending Balance***

Berikut disajikan ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following is a summary of the financial information of the associate as of December 31, 2025 and 2024:

	2025 Rp	2024 Rp	
Total aset	4,291,788	4,422,019	*Total assets*
Total liabilitas	2,382,548	2,839,154	*Total liabilities*
Total ekuitas	1,909,204	1,582,865	*Total income of the year*
Laba bersih	308,448	296,676	*Net income*
Penghasilan komprehensif	326,339	277,191	*Comprehensive income*

14. Aset Pengembalian / *14. Reimbursement Assets*

	2025 Rp	2024 Rp	
Kredit	157,068	67,178	*Credit*
Jumlah	**157,068**	**67,178**	***Total***

15. Penjaminan Ulang Dibayar Dimuka / *15. Prepaid Re-Guarantee*

	2025 Rp	2024 Rp	
Kredit	102,541	128,911	*Credit*
Suretyship	108	202	*Suretyship*
Jumlah	**102,649**	**129,113**	***Total***

16. Aset Tetap – Bersih / *16. Fixed Assets – Net*

	2025						
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Dekonsolidasi/ *Deconsolidation* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya perolehan:							***Acquisition cost:***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Tanah	1,353,838	--	(5)	23,908	(80)	1,377,661	*Land*
Bangunan	2,150,510	85,998	(800)	(25,524)	(844)	2,209,340	*Buildings*
Kendaraan	191,904	10,875	(22,646)	448	(1,006)	179,575	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan	1,165,471	153,731	(13,590)	(8,025)	(642)	1,296,945	*Machines and Equipment*
Aset tetap lainnya	153,943	454	(2,791)	--	--	151,606	*Other fixed asset*
Aset dalam penyelesaian	213,693	101,967	(43,609)	(75,115)	--	196,936	*Construction in progress*
Sub jumlah	**5,229,359**	**353,025**	**(83,441)**	**(84,308)**	**(2,572)**	**5,412,063**	*Sub total*
Aset hak-guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	350,990	122,894	(241,667)	--	--	232,217	*Buildings*
Kendaraan	295,403	54,796	(45,596)	496	--	305,099	*Vehicles*
Peralatan	3,683	396	(229)	--	--	3,850	*Equipment*
Sub jumlah	**650,076**	**178,086**	**(287,492)**	**496**	**--**	**541,166**	*Sub total*
Jumlah	**5,879,435**	**531,111**	**(370,933)**	**(83,812)**	**(2,572)**	**5,953,229**	*Total*
Akumulasi penyusutan:							***Accumulated depreciation:***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Bangunan	(988,835)	(171,874)	10,258	--	469	(1,149,982)	*Buildings*
Kendaraan	(176,974)	(11,253)	22,626	--	938	(164,663)	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan	(844,256)	(181,758)	15,255	--	624	(1,010,135)	*Machines and Equipment*
Aset tetap lainnya	(115,301)	(3,016)	137	--	--	(118,180)	*Other fixed asset*
Sub jumlah	**(2,125,366)**	**(367,901)**	**48,276**	**--**	**2,031**	**(2,442,960)**	*Sub total*
Aset hak-guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	(233,483)	(131,320)	172,126	--	--	(192,677)	*Buildings*
Kendaraan	(172,527)	(82,990)	47,381	--	--	(208,136)	*Vehicles*
Peralatan	(1,154)	(2,273)	1,144	--	--	(2,283)	*Equipment*
Sub jumlah	**(407,164)**	**(216,583)**	**220,651**	**--**	**--**	**(403,096)**	*Sub total*
Jumlah	**(2,532,530)**	**(584,484)**	**268,927**	**--**	**2,031**	**(2,846,056)**	*Total*
Penurunan nilai tanah	(160)	--	--	--	--	(160)	*Impairment of land*
Penurunan nilai aset dalam penyelesaian	--	--	--	--	--	--	*Impairment of construction in progress*
Nilai buku - bersih	**3,346,745**					**3,107,013**	***Book value - net***

	2024						
	1 Januari/ *January 1,* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Dekonsolidasi/ *Deconsolidation* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya perolehan:							***Acquisition cost:***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Tanah	1,308,641	210,532	(164,323)	--	(1,012)	1,353,838	*Land*
Bangunan	2,037,200	171,164	(62,651)	5,718	(921)	2,150,510	*Buildings*
Kendaraan	194,548	10,267	(12,094)	--	(817)	191,904	*Vehicles*
Peralatan	1,104,013	118,568	(70,911)	14,402	(601)	1,165,471	*Mechines and Equipment*
Aset tetap lainnya	176,782	8,847	(33,302)	1,616	--	153,943	*Other fixed assets*
Aset dalam penyelesaian	182,799	113,732	(33,481)	(49,357)	--	213,693	*Construction in progress*
Sub jumlah	**5,003,983**	**633,110**	**(376,762)**	**(27,621)**	**(3,351)**	**5,229,359**	*Sub total*
Aset hak-guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	309,414	99,033	(57,457)	--	--	350,990	*Buildings*
Kendaraan	259,582	69,763	(33,942)	--	--	295,403	*Vehicles*
Peralatan	6,033	329	(2,931)	252	--	3,683	*Equipment*
Sub jumlah	**575,029**	**169,125**	**(94,330)**	**252**	**--**	**650,076**	*Sub total*
Jumlah	**5,579,012**	**802,235**	**(471,092)**	**(27,369)**	**(3,351)**	**5,879,435**	*Total*
Akumulasi penyusutan:							***Accumulated depreciation:***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Bangunan	(886,016)	(104,483)	955	--	709	(988,835)	*Buildings*
Kendaraan	(183,710)	(5,948)	11,959	--	725	(176,974)	*Vehicles*
Mesin dan Peralatan	(812,760)	(102,495)	70,445	--	554	(844,256)	*Mechines and Equipment*
Aset tetap lainnya	(94,065)	(21,303)	67		--	(115,301)	*Other fixed asset*
Sub jumlah	**(1,976,551)**	**(234,229)**	**83,426**	**--**	**1,988**	**(2,125,366)**	*Sub total*
Aset hak-guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	(188,987)	(116,902)	72,406	--	--	(233,483)	*Buildings*
Kendaraan	(131,745)	(74,877)	34,095	--	--	(172,527)	*Vehicles*
Peralatan	(2,715)	(1,370)	2,931	--	--	(1,154)	*Equipment*
Sub jumlah	**(323,447)**	**(193,149)**	**109,432**	**--**	**--**	**(407,164)**	*Sub total*
Jumlah	**(2,299,998)**	**(427,378)**	**192,858**	**--**	**1,988**	**(2,532,530)**	*Total*
Penurunan nilai	(160)	--	--	--	--	(160)	*Impairment*
Penurunan nilai aset dalam penyelesaian	--	--	--	--	--	--	*Impairment of construction in progress*
Nilai buku - bersih	**3,278,854**					**3,346,745**	***Book value - net***

Beban penyusutan aset tetap diakui pada beban umum dan administrasi.

Depreciation expense of fixed assets is recognized in general and administrative expenses.

Direksi berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh Grup selain yang tersaji pada tabel di atas.

The Directors believe that there is no indication of impairment of fixed assets owned by the Group other than as presented above.

Pada tahun 2025 dan 2024, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.504.428 dan Rp4.099.348 (tidak diaudit). Direksi berkeyakinan bahwa pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap.

In 2025 and 2024, fixed assets, except land, have been insured with sum insured of Rp2,504,428 and Rp4,099,348, respectively (unaudited). The Directors believe that the sum insured is adequate to cover possible losses on fixed assets.

Termasuk di dalam penambahan aset tetap pada tahun 2025 adalah saldo aset tetap yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Nihil (2024: Rp54.081), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5. Atas aset tetap yang telah dialihkan, terdapat Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") yang dikapitalisasi sebesar Nihil (2024: Rp2.704) dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") yang dikapitalisasi sebesar Nihil (2024: Rp5.949).

Included in the additions of fixed assets in 2024 is the balance of the fixed assets transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) amounting to Nil (2024: Rp54,081), as described in Note 5. Upon the fixed assets that has been transferred, there are capitalized Land and Building Title Transfer Fee ("BPHTB") amounting to Nil (2024: Rp2,704) and Value-added Tax ("VAT") amounting to Nil (2024: Rp5,949).

17. Properti Investasi – Bersih / *17. Investment Properties – Net*

	2025					
	1 Januari/ *January 1,* Rp	*Penambahan/ Additions* Rp	*Pengurangan/ Deductions* Rp	*Reklasifikasi/ Reclassification* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya perolehan:						*Acquisition cost:*
Tanah	4,011,460	2,194,161	--	35,649	6,241,270	*Land*
Bangunan dan prasarana	1,096,218	364,867	(7,597)	16,222	1,469,710	*Building and infrastructure*
Perlengkapan gedung	97,012	--	--	38,345	135,357	*Building equipment*
Jumlah	**5,204,690**	**2,559,028**	**(7,597)**	**90,216**	**7,846,337**	*Total*
Akumulasi penyusutan:						*Accumulated depreciation:*
Bangunan dan prasarana	(183,756)	(54,075)	(578)	(10,569)	(248,978)	*Building and infrastructure*
Perlengkapan gedung	(53,004)	(11,775)	--	(20,140)	(84,919)	*Building equipment*
Jumlah	**(236,760)**	**(65,850)**	**(578)**	**(30,709)**	**(333,897)**	*Total*
Nilai buku - bersih	**4,967,930**				**7,512,440**	***Book value - net***

	2024					
	1 Januari/ *January 1,* Rp	*Penambahan/ Additions* Rp	*Pengurangan/ Deductions* Rp	*Reklasifikasi/ Reclassification* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp	
Biaya perolehan:						*Acquisition cost:*
Tanah	4,005,193	16,455	(10,188)	--	4,011,460	*Land*
Bangunan dan prasarana	1,099,507	7,761	(11,050)	--	1,096,218	*Building and infrastructure*
Perlengkapan gedung	93,357	3,655	--	--	97,012	*Building equipment*
Jumlah	**5,198,057**	**27,871**	**(21,238)**	**--**	**5,204,690**	*Total*
Akumulasi penyusutan:						*Accumulated depreciation:*
Bangunan dan prasarana	(133,053)	(51,393)	690	--	(183,756)	*Building and infrastructure*
Perlengkapan gedung	(46,796)	(6,208)	--	--	(53,004)	*Building equipment*
Jumlah	**(179,849)**	**(57,601)**	**690**	**--**	**(236,760)**	*Total*
Nilai buku - bersih	**5,018,208**				**4,967,930**	***Book value - net***

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan pembelian aset properti investasi berupa Aset Citos yang berlokasi di Cilandak Barat. Transaksi pembelian tersebut telah dilaksanakan melalui penandatanganan Akta Jual Beli ("AJB") yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") dengan rincian Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") sebagai berikut :

- SHGB No. 01671/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 11/2025 tanggal 25 September 2025
- SHGB No. 01672/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 12/2025 tanggal 25 September 2025
- SHGB No. 01587/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 13/2025 tanggal 25 September 2025
- SHGB No. 02455/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 14/2025 tanggal 25 September 2025
- SHGB No. 02456/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 15/2025 tanggal 25 September 2025
- SHGB No. 02457/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 16/2025 tanggal 25 September 2025
- SHGB No. 01613/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 17/2025 tanggal 25 September 2025

In 2025, the Company acquired investment property assets in the form of the Citos Asset located in Cilandak Barat. The acquisition was executed through the signing of Deeds of Sale and Purchase ("AJB") prepared by the Land Deed Official ("PPAT"), with the following certificate details:

- *SHGB No. 01671/Cilandak Barat based on AJB No. 11/2025 dated 25 September 2025*
- *SHGB No. 01672/Cilandak Barat based on AJB No. 12/2025 dated 25 September 2025*
- *SHGB No. 01587/Cilandak Barat based on AJB No. 13/2025 dated 25 September 2025*
- *SHGB No. 02455/Cilandak Barat based on AJB No. 14/2025 dated 25 September 2025*
- *SHGB No. 02456/Cilandak Barat based on AJB No. 15/2025 dated 25 September 2025*
- *SHGB No. 02457/Cilandak Barat based on AJB No. 16/2025 dated 25 September 2025*
- *SHGB No. 01613/Cilandak Barat based on AJB No. 17/2025 dated 25 September 2025*

- SHGB No. 02120/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 18/2025 tanggal 25 September 2025
- SHGB No. 01603/Cilandak Barat berdasarkan AJB No. 19/2025 tanggal 25 September 2025

Sehubungan dengan akuisisi properti investasi tersebut, Perseroan memiliki kewajiban kepada Konsorsium Karya atas pengembalian tanda minat senilai Rp1.400.000 berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Tanda Minat No. 167 tanggal 31 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., antara Entitas dengan anggota Konsorsium Karya yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero).

Termasuk di dalam penambahan properti investasi pada tahun 2025 adalah saldo properti investasi yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Nihil (2024: Rp22.205), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5. Atas properti investasi yang telah dialihkan, terdapat BPHTB yang dikapitalisasi tahun 2024 sebesar Rp1.110 dan PPN yang dikapitalisasi tahun 2024 sebesar Rp2.442.

- *SHGB No. 02120/Cilandak Barat based on AJB No. 18/2025 dated 25 September 2025*
- *SHGB No. 01603/Cilandak Barat based on AJB No. 19/2025 dated 25 September 2025*

In connection with the acquisition of the aforementioned investment property, the Company has an obligation to the Karya Consortium for the settlement of interest amounting to Rp1,400,000, based on Deed of Settlement of Interest No. 167 dated 31 July 2025, executed before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., between the Entity and the members of the Karya Consortium, namely PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, and PT Hutama Karya (Persero).

Included in the additions of investment properties in 2025 is the balance of the investment properties from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) amounting to Nil (2024: Rp22,205), as described in Note 5. Upon the investment properties that has been transferred, there are capitalized BPHTB in 2024 amounting to Rp1,114 and VAT in 2024 amounting to Rp2,442.

18. Aset Lain–Lain / *18. Other Assets*

	2025 Rp	2024*) Rp	
Bank yang dibatasi penggunaannya - bersih	1,935,121	1,571,196	*Restricted cash in bank - net*
Aset takberwujud - bersih	727,561	609,681	*Intangible assets - net*
Beban dibayar dimuka	145,225	137,789	*Prepaid expenses*
Aset reasuransi-*stop loss*	51,144	47,933	*Re-insurance assets - stop loss*
Uang muka lain-lain	46,171	20,786	*Other advances*
Uang jaminan	30,956	29,328	*Security deposits*
Cadangan ujrah	81	74	*Ujrah reserves*
Uang muka pembelian Aset Cilandak	--	794,800	*Advance for purchase of Cilandak asset*
Lainnya	850,669	1,051,106	*Others*
Jumlah	**3,786,928**	**4,262,693**	***Total***

Uang muka pembelian Aset Cilandak sebesar Rp794.800 telah direklasifikasi menjadi properti investasi (Catatan 17).

Advance for purchase of Cilandak asset amounting to Rp794,800 has been realized into invesment properties (Note 14).

Pada tahun 2025, Grup mereklasifikasi uang muka pembelian Aset Cilandak menjadi properti investasi setelah aset yang bersangkutan memenuhi kriteria pengakuan sebagai properti investasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

During 2025, the Group reclassified the advance for the acquisition of the Cilandak Property to investment properties after the asset met the recognition criteria for investment properties in accordance with the Group's accounting policies.

Termasuk di dalam penambahan aset takberwujud pada tahun 2025 adalah saldo aset takberwujud yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Nihil (2024: Rp10), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in the additions of intangible assets is the balance of the intangible assets transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero) amounting to Nihil in 2025 (2024: Rp10), as described in Note 5.

19. Utang Klaim Penjaminan / *19. Guarantee Claim Payables*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 44)	220,234	297,696	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	225,719	764,235	*Third parties*
Jumlah	**445,953**	**1,061,931**	***Total***

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

20. Utang Penjaminan Ulang / *20. Re-Guarantee Payables*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 44)	259	3,196	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	195,122	177,513	*Third parties*
Jumlah	**195,381**	**180,709**	***Total***

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

21. Utang Usaha dan Utang Lain-lain / *21. Accounts Payable and Other Payables*

	2025 Rp	2024 Rp	
Utang usaha	604,183	663,546	*Account payables*
Utang lain-lain	10,487,288	8,592,240	*Other payables*
Jumlah	**11,091,471**	**9,255,786**	***Total***

a. Utang usaha / *a. Account payables*

	2025 Rp	2024 Rp	
Utang nasabah	491,291	523,430	*Customers payables*
Utang komisi	46,178	91,303	*Commissions payables*
Utang *fee* terkait penjaminan kredit	7,841	10,699	*Guarantee commissions payables*
Utang atas efek	1,382	6,215	*Securities payables*
Utang koperasi bahana	117	269	*Payable from Koperasi bahana*
Utang usaha lain-lain	57,374	31,630	*Other payables*
Jumlah	**604,183**	**663,546**	***Total***

Berdasarkan pihak / *By parties*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 44)	13,509	4,752	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	590,674	658,794	*Third parties*
Jumlah	**604,183**	**663,546**	***Total***

b. Utang lain-lain / *b. Other payables*

	2025 Rp	2024 Rp	
Liabilitas kontrak asuransi-*stop loss*	1,514,810	2,370,295	*Insurance liabilities stop loss contract*
Liabilitas atas pembelian aset Cilandak Town Square	984,209	--	*Liability related to acquisition of Cilandak Town Square*
Utang klaim *stop loss*	951,323	414,235	*Claim liabilities stop loss contract*
Titipan premi dan imbal jasa penjaminan	502,868	515,240	*Premium and guarantee fee income deposits*
Liabilitas sewa	142,371	179,315	*Lease liabilities*
Uang jaminan	21,247	37,882	*Cash collateral*
Utang lainnya	6,370,460	5,075,273	*Other payables*
Jumlah	**10,487,288**	**8,592,240**	***Total***

Berdasarkan pihak / *By parties*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 44)	1,116,382	1,132,741	*Related parties (Note 44)*
Pihak ketiga	9,370,906	7,459,499	*Third parties*
Jumlah	**10,487,288**	**8,592,240**	***Total***

Termasuk di dalam utang usaha dan liabilitas lain-lain tahun 2024 sebesar Rp112 adalah saldo utang usaha dan liabilitas lain-lain yang dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 5.

Included in trade payable and other liabilities as of 2024 amounting to Rp112 is the balance of the accounts payable and other liabilities transferred from PT Asuransi Jiwasraya (Persero), as described in Note 5.

22. Akrual / *22. Accruals*

	2025 Rp	2024 Rp	
Beban karyawan	658,764	861,379	*Employee expenses*
Beban umum dan administrasi	537,896	491,736	*General and administrative expenses*
Beban penelitian dan pengembangan	146,848	62,364	*Research and development expenses*
Beban pemasaran	23,627	59,778	*Marketing expenses*
Beban kantor	14,721	19,682	*Office expenses*
Imbal jasa profesional	579	192,381	*Professional fees*
Beban operasional	--	35,342	*Operating expenses*
Lainnya	773,940	25,231	*Others*
Jumlah	**2,156,375**	**1,747,893**	***Total***

23. Utang Restrukturisasi / *23. Restructuring Debt*

	2025 Rp	2024 Rp	
Utang restrukturisasi klaim	614,581	652,678	*Claims restructuring payable*
Utang restrukturisasi komisi	28,172	29,578	*Commissions restructuring payable*
Jumlah	**642,753**	**682,256**	***Total***

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan atas utang restrukturisasi adalah sebagai berikut:

Reconciliation from financing activities of restructuring debt are as follows:

	2025			
	Utang klaim/ *claim payable* Rp	Utang komisi/ *commissions payables* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Saldo awal	652,678	29,578	682,256	*Beginning balance*
Penambahan	13,480	--	13,480	*Addition*
Penyesuaian	(13,060)	--	(13,060)	*Adjustment*
Pembayaran	(87,023)	(3,638)	(90,661)	*Payment*
Amortisasi	48,504	2,234	50,738	*Amortisation*
Saldo akhir	**614,579**	**28,174**	**642,753**	***Ending balance***

	2024			
	Utang klaim/ *claim payable* Rp	Utang komisi/ *commissions payables* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Saldo awal	680,457	30,867	711,324	*Beginning balance*
Penambahan	22,510	--	22,510	*Addition*
Penyesuaian	(18,566)	--	(18,566)	*Adjustment*
Pembayaran	(82,713)	(3,634)	(86,347)	*Payment*
Amortisasi	50,990	2,345	53,335	*Amortisation*
Saldo akhir	**652,678**	**29,578**	**682,256**	***Ending balance***

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

Entitas anak, PT Asuransi Jasa Indonesia (”Jasindo”), telah bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) sejak tahun 2017, di mana Bank Mandiri merupakan salah satu mitra terbesar untuk penutupan asuransi kredit. Sampai dengan saat ini, terdapat kewajiban Jasindo atas klaim dan komisi kepada Bank Mandiri. Sebagai salah satu upaya perbaikan untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada periode mendatang, Jasindo melakukan restrukturisasi kewajiban klaim dan komisi dengan Bank Mandiri (Catatan 21).

The subsidiary, PT Asuransi Jasa Indonesia (”Jasindo”), has been cooperating with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) since 2017, whereas Bank Mandiri is one of the largest partners for credit insurance coverage. Up until now, there are Jasindo’s obligations for claims and commissions to Bank Mandiri. As one of the corrective efforts to avoid greater losses in the future period, Jasindo restructured claims and commission obligations with Bank Mandiri (Note 21).

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Tunggakan Kewajiban Jasindo No. PKS.036/ AJI/VIII/2022 dan No. JRB.DSG/BAC.1032/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022 serta Addendum Pertama No. ADD.PKS.017/AJI/VIII/ 2022 dan No. JRB.DSG. BAC.1432/ 2022 tanggal 29 November 2022 (”Perjanjian”) antara Jasindo dengan Bank Mandiri, Bank Mandiri telah menyetujui penjadwalan kembali atas kewajiban klaim, *future claims*, serta *fee-based income* untuk diangsur selama 15 tahun tanpa bunga efektif sejak 29 November 2022.

Based on Jasindo’s Liability Arrear Settlement Agreement No. PKS.036/AJI/VIII/2022 and No. JRB.DSG/BAC.1032/2022 dated August 10, 2022 and First Addendum No. ADD.PKS.017/AJI/VIII/ 2022 and No. JRB.DSG.BAC.1432/2022 dated November 29, 2022 (“Agreement”) between Jasindo and Bank Mandiri, Bank Mandiri has agreed to restructuring obligations of claims, future claims, and fee-based income for 15 years in installments without interest effective from November 29, 2022.

Menindaklanjuti Perjanjian Penyelesaian Tunggakan Kewajiban Jasindo, Jasindo dan Bank Mandiri telah melakukan rekonsiliasi selama tahun 2023 yang tertuang pada Berita Acara Rekonsiliasi *Future Claim Batch* II-V serta terdapat perubahan dan pernyataan kembali atas jumlah nilai klaim 2022.

Following up the Jasindo Arrear Settlement Agreement, Jasindo and Bank Mandiri have carried out a reconciliation during 2023 as stated in the Minutes of Future Claim Reconciliation Batch II-V and there are amendment and restatement of 2022 claim amounts.

Sesuai dengan PSAK 109, skema restrukturisasi ini merupakan modifikasi *substantial terms*, sehingga Jasindo mengakui penghapusan dari liabilitas keuangan yang dimiliki dan mengakui liabilitas keuangan yang baru.

In accordance with SFAS 109, this restructuring scheme is a substantial modification of terms, hence Jasindo recognised extinguishment of the existing financial liabilities and recognition of the new financial liabilities.

Perbedaan atas liabilitas keuangan yang baru dan liabilitas keuangan yang dihapuskan terkait restrukturisasi ini akan dicatat sebagai beban yang belum diamortisasi atas utang dan tambahan modal disetor (Catatan 37b) serta secara bulanan akan diamortisasi dalam laporan laba rugi onsolidasian.

The difference between the new financial liabilities and the extinguished financial liabilities related to this restructuring will be recorded as an unamortised expense from debt and additional paid-in capital (Note 37b) and will be amortised monthly in the consolidated statement of profit or loss.

24. Kontrak Asuransi dan Reasuransi / *24. Insurance and Reinsurance Contract*

Aset dan liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi / *Insurance and reinsurance contract assets and liabilities*

	2025			
	Umum/ *General*	Jiwa/ *Life*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas kontrak asuransi				***Insurance contracts liabilities***
Kontrak diukur berdasarkan PAA				***Contracts measured under PAA***
Saldo kontrak asuransi	(99,280)	(7)	(99,287)	*Insurance contracts balance*
Aset arus kas akuisisi	--	--	--	*Assets for insurance acquisition cash flows*
	(99,280)	(7)	(99,287)	
Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA				***Contracts not measured under PAA***
Saldo kontrak asuransi	(19,265,549)	(28,825,803)	(48,091,352)	*Insurance contracts balance*
Aset arus kas akuisisi	--	--	--	*Assets for insurance acquisition cash flows*
	(19,265,549)	(28,825,803)	(48,091,352)	
	(19,364,829)	(28,825,810)	(48,190,639)	
Aset kontrak asuransi				***Insurance contracts assets***
Kontrak diukur berdasarkan PAA				***Contracts measured under PAA***
Saldo kontrak asuransi	--	--	--	*Insurance contracts balance*
Aset arus kas akuisisi	--	--	--	*Assets for insurance acquisition cash flows*
	--	--	--	
Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA				***Contracts not measured under PAA***
Saldo kontrak asuransi	37,061	20,421	57,482	*Insurance contracts balance*
Aset arus kas akuisisi	--	--	--	*Assets for insurance acquisition cash flows*
	37,061	20,421	57,482	
	37,061	20,421	57,482	
Kontrak reasuransi				***Reinsurance Contracts***
Aset kontrak reasuransi				***Reinsurance contracts assets***
Kontrak diukur berdasarkan PAA	51,404	39	51,443	*Contracts measured under PAA*
Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA	9,907,861	180,997	10,088,858	*Contracts not measured under PAA*
	9,959,265	181,036	10,140,301	
Liabilitas kontrak reasuransi				***Reinsurance contracts liabilities***
Kontrak diukur berdasarkan PAA	--	--	--	*Contracts measured under PAA*
Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA	(5,202)	(19,365)	(24,567)	*Contracts not measured under PAA*
	(5,202)	(19,365)	(24,567)	

	2024			
	Umum/ *General*	**Jiwa/ *Life***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas kontrak asuransi				***Insurance contracts liabilities***
Kontrak diukur berdasarkan PAA				***Contracts measured under PAA***
Saldo kontrak asuransi	(227,866)	(580)	(228,446)	*Insurance contracts balance*
Aset arus kas akuisisi	--	--	--	*Assets for insurance acquisition cash flows*
	(227,866)	(580)	(228,446)	
Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA				***Contracts not measured under PAA***
Saldo kontrak asuransi	(19,532,842)	(30,496,744)	(50,029,586)	*Insurance contracts balance*
Aset arus kas akuisisi	--	--	--	*Assets for insurance acquisition cash flows*
	(19,532,842)	(30,496,744)	(50,029,586)	
	(19,760,708)	(30,497,324)	(50,258,032)	
Aset kontrak asuransi				***Insurance contracts assets***
Kontrak diukur berdasarkan PAA				***Contracts measured under PAA***
Saldo kontrak asuransi	--	--	--	*Insurance contracts balance*
Aset arus kas akuisisi	--	--	--	*Assets for insurance acquisition cash flows*
	--	--	--	
Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA				***Contracts not measured under PAA***
Saldo kontrak asuransi	39,418	24,310	63,728	*Insurance contracts balance*
Aset arus kas akuisisi	--	--	--	*Assets for insurance acquisition cash flows*
	39,418	24,310	63,728	
	39,418	24,310	63,728	
Kontrak reasuransi				***Reinsurance Contracts***
Aset kontrak reasuransi				***Reinsurance contracts assets***
Kontrak diukur berdasarkan PAA	95,017	48	95,065	*Contracts measured under PAA*
Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA	9,560,778	84,802	9,645,580	*Contracts not measured under PAA*
	9,655,795	84,850	9,740,645	
Liabilities kontrak reasuransi				***Reinsurance contracts liabilities***
Kontrak diukur berdasarkan PAA	--	--	--	*Contracts measured under PAA*
Kontrak tidak diukur berdasarkan PAA	(13,908)	(139,430)	(153,338)	*Contracts not measured under PAA*
	(13,908)	(139,430)	(153,338)	

Rekonsiliasi berikut menunjukkan jumlah tercatat neto kontrak asuransi dan reasuransi di setiap perubahan segmen sepanjang tahun sebagai akibat dari arus kas dan jumlah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

The following reconciliations show how the net carrying amounts of insurance and reinsurance contracts in each segment changed during the year as a result of cash flows and amounts recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

i. Analisis berdasarkan sisa pertanggungan dan klaim yang terjadi untuk kontrak Asuransi

i. Analysis by remaining coverage and incurred claims for insurance contracts

2025

	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan/ *Liabilities for remaining coverage*		Liabilitas atas kejadian klaim/ *Liabilities for incurred claims*				
				Kontrak diukur dengan PAA/ *Contracts measured under PAA*			
	Mengecualikan komponen kerugian/ *Excluding loss components*	Komponen kerugian/ *Loss components*	Kontrak tidak diukur dengan PAA/ *Contracts not measured under PAA*	Estimasi nilai dari arus kas pemenuhan/ *Estimates of present value of fullfillment cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non keuangan/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal aset kontrak asuransi	102,851	(37,480)	(1,620)	(21)	(2)	63,728	*Beginning balance insurance contract assets*
Saldo awal liabilitas kontrak asuransi	(32,650,346)	(1,855,208)	(15,533,347)	(197,789)	(21,342)	(50,258,032)	*Beginning balance insurance contract liabilities*
Saldo awal bersih pada tanggal 1 Januari 2025	**(32,547,495)**	**(1,892,688)**	**(15,534,967)**	**(197,810)**	**(21,344)**	**(50,194,304)**	***Net beginning balance as of 1 January 2025***
Perubahan pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya							***Changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan asuransi							***Insurance revenue***
Kontrak dengan pendekatan transisi retrospektif modifikasian	--	--	--	--	--	--	*Contracts under the modified retrospective transition approach*
Kontrak dengan pendekatan transisi nilai wajar	--	--	--	--	--	--	*Contracts under the fair value transition approach*
Kontrak lainnya	19,609,355	--	--	--	--	19,609,355	*Other contracts*
	19,609,355	**--**	**--**	**--**	**--**	**19,609,355**	
Beban jasa asuransi							***Insurance service expenses***
Kejadian klaim dan beban jasa asuransi lainnya	--	4,573,813	(16,772,803)	121,336	(1,978)	(12,079,632)	*Incurred claims and other insurance service expenses*
Amortisasi arus kas akuisisi asuransi	(1,493,800)	--	--	--	--	(1,493,800)	*Amortisation of insurance acquisition cash flows*
Kerugian dan pembalikan kerugian atas kontrak yang merugi	225,325	(4,565,567)	--	--	--	(4,340,242)	*Losses and reversals of losses on onerous contracts*
Penyesuaian liabilitas atas kejadian klaim	203,255	--	3,367,303	(113,612)	15,964	3,472,910	*Adjustments to liabilities for incurred claims*
	(1,065,220)	**8,246**	**(13,405,500)**	**7,724**	**13,986**	**(14,440,764)**	
Komponen investasi dan pengembalian premi	4,661,383	--	(4,661,383)	--	--	--	*Investment components and premium refunds*
Penghasilan jasa asuransi	**23,205,518**	**8,246**	**(18,066,883)**	**7,724**	**13,986**	**5,168,591**	***Insurance service result***
Penghasilan (beban) keuangan asuransi bersih	(2,798,486)	98,253	(455,508)	(6,733)	(717)	(3,163,191)	*Net finance income (expenses) from insurance contracts*
Dampak pergerakan perubahan nilai tukar	(153,637)	(27,952)	(530,163)	(3,148)	(339)	(715,239)	*Effect of movements in exchange rates*
Jumlah perubahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	**20,253,395**	**78,547**	**(19,052,554)**	**(2,157)**	**12,930**	**1,290,161**	***Total changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Arus Kas							***Cash flows***
Premi yang diterima	(20,243,585)	--	--	--	--	(20,243,585)	*Premiums received*
Kejadian klaim dan biaya jasa asuransi lainnya yang telah dibayarkan, termasuk komponen investasi	--	--	19,474,714	108,764	3	19,583,481	*Claims and other insurance service expenses paid, including investment components*
Arus kas akuisisi asuransi	1,462,374	--	--	--	--	1,462,374	*Insurance acquisition cash flows*
Entity share	(38,213)	6,929	--	--	--	(31,284)	*Entity share*
Jumlah arus kas	**(18,819,424)**	**6,929**	**19,474,714**	**108,764**	**3**	**770,986**	***Total cash flows***
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	**(31,113,524)**	**(1,807,212)**	**(15,112,807)**	**(91,203)**	**(8,411)**	**(48,133,157)**	***Net ending balance as of 31 December 2025***
Saldo akhir aset kontrak asuransi	117,759	(49,288)	(10,989)	-	-	57,482	*Insurance contract assets*
Saldo akhir liabilitas kontrak asuransi	(31,231,283)	(1,757,924)	(15,101,818)	(91,203)	(8,411)	(48,190,639)	*Insurance contract liabilities*
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	**(31,113,524)**	**(1,807,212)**	**(15,112,807)**	**(91,203)**	**(8,411)**	**(48,133,157)**	***Net ending balance as of 31 December 2025***

	2024						
	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan/ *Liabilities for remaining coverage*		Liabilitas atas kejadian klaim/ *Liabilities for incurred claims*				
				Kontrak diukur dengan PAA/ *Contracts measured under PAA*			
	Mengecualikan komponen kerugian/ *Excluding loss components*	Komponen kerugian/ *Loss components*	Kontrak tidak diukur dengan PAA/ *Contracts not measured under PAA*	Estimasi nilai dari arus kas pemenuhan/ *Estimates of present value of fullfillment cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non keuangan/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal							*Beginning balance*
aset kontrak asuransi	63,727	--	(9,985)	(334)	(27)	53,381	*insurance contract assets*
Saldo awal							*Beginning balance*
liabilitas kontrak asuransi	(35,761,981)	(1,193,445)	(17,129,024)	(572,900)	(45,990)	(54,703,340)	*insurance contract liabilities*
Saldo awal bersih pada tanggal 1 Januari 2024	(35,698,254)	(1,193,445)	(17,139,009)	(573,234)	(46,017)	(54,649,959)	***Net beginning balance as of January 1, 2024***
Perubahan pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya							***Changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan asuransi							***Insurance revenue***
Kontrak dengan pendekatan							*Contracts under the modified*
transisi retrospektif modifikasian	--	--	--	--	--	--	*retrospective transition approach*
Kontrak dengan pendekatan							*Contracts under the fair value*
transisi nilai wajar	5,144,125	--	--	--	--	5,144,125	*transition approach*
Kontrak lainnya	14,282,536	--	--	--	--	14,282,536	*Other contracts*
	19,426,661	--	--	--	--	19,426,661	
Beban jasa asuransi							***Insurance service expenses***
Kejadian klaim dan							*Incurred claims and*
beban jasa asuransi lainnya	--	2,970,321	(15,733,597)	254,779	(7,941)	(12,516,438)	*other insurance service expenses*
Amortisasi arus kas							*Amortisation of insurance*
akuisisi asuransi	(1,402,894)	--	--	--	--	(1,402,894)	*acquisition cash flows*
Kerugian dan pembalikan kerugian							*Losses and reversals of losses*
atas kontrak yang merugi	4,374	(2,862,986)	--	--	--	(2,858,612)	*on onerous contracts*
Penyesuaian liabilitas							*Adjustments to liabilities*
atas kejadian klaim	--	--	2,464,975	(66,634)	106,119	2,504,460	*for incurred claims*
	(1,398,520)	107,335	(13,268,622)	188,145	98,178	(14,273,484)	
Komponen investasi dan							*Investment components and*
pengembalian premi	4,920,025	--	(4,920,025)	--	--	--	*premium refunds*
Penghasilan jasa asuransi	**22,948,166**	**107,335**	**(18,188,647)**	**188,145**	**98,178**	**5,153,177**	***Insurance service result***
Penghasilan (beban)							*Net finance income (expenses)*
keuangan asuransi bersih	(2,007,646)	(79,602)	(780,255)	37,622	(73,435)	(2,903,316)	*from insurance contracts*
Dampak pergerakan							*Effect of movements*
perubahan nilai tukar	(28,130)	(726,976)	496,627	(74,087)	(70)	(332,636)	*in exchange rates*
Jumlah perubahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	20,912,390	(699,243)	(18,472,275)	151,680	24,673	1,917,225	***Total changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Arus Kas							***Cash flows***
Premi yang diterima	(19,804,683)	--	--	--	--	(19,804,683)	*Premiums received*
Kejadian klaim dan biaya jasa asuransi lainnya yang telah dibayarkan, termasuk komponen investasi	361,098	--	20,076,317	223,744	--	20,661,159	*Claims and other insurance service expenses paid, including investment components*
Arus kas akuisisi asuransi	1,698,747	--	--	--	--	1,698,747	*Insurance acquisition cash flows*
Entity share	(16,794)	--	--	--	--	(16,794)	*Entity share*
Jumlah arus kas	(17,761,632)	--	20,076,317	223,744	--	2,538,429	***Total cash flows***
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2024	(32,547,496)	(1,892,688)	(15,534,967)	(197,810)	(21,344)	(50,194,305)	***Net ending balance as of December 31, 2024***
Saldo akhir aset kontrak asuransi	102,851	(37,480)	(1,621)	(21)	(2)	63,727	*Insurance contract assets*
Saldo akhir liabilitas kontrak asuransi	(32,650,347)	(1,855,208)	(15,533,346)	(197,789)	(21,342)	(50,258,032)	*Insurance contract liabilities*
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2024	(32,547,496)	(1,892,688)	(15,534,967)	(197,810)	(21,344)	(50,194,305)	***Net ending balance as of December 31, 2024***

ii. Analisis berdasarkan pengukuran komponen kontrak tidak diukur menggunakan PAA untuk kontrak asuransi

ii. Analysis by measurement component contracts not measured under the PAA for insurance contracts

	2025						
			Marjin Jasa Kontraktual/*Contractual Service Magin*				
	Estimasi nilai kini dari arus kas masa depan/ *Estimates of present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non finansial/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Kontrak diukur menggunakan pendekatan nilai wajar/ *Contracts under Fair value transition approach*	Kontrak lainnya/ Other *contracts*	Subjumlah/ *Subtotal*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal aset kontrak asuransi	72,759	(10,481)	1,108	342	1,450	63,728	*Beginning balance insurance contract assets*
Saldo awal liabilitas kontrak asuransi	(44,099,605)	(3,279,874)	(1,715,150)	(934,957)	(2,650,107)	(50,029,586)	*Beginning balance insurancecontract liabilities*
Saldo awal bersih pada tanggal 1 Januari 2025	**(44,026,846)**	**(3,290,355)**	**(1,714,042)**	**(934,615)**	**(2,648,657)**	**(49,965,858)**	***Net beginning balance as of 1 January 2025***
Perubahan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya:							***Changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Perubahan terkait jasa kini:							***Changes that relate to current services***
Jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui untuk pengalihan jasa	--	--	1,714,049	1,832,980	3,547,029	3,547,029	*Contractual service margin recognized for services provided*
Perubahan penyesuaian risiko untuk risiko non keuangan	--	1,786,092	--	--	--	1,786,092	*Change in risk adjustment for non-financial risk for risk expired*
Penyesuaian pengalaman	2,978,218	(1,252,708)	--	--	--	1,725,510	*Experience adjustments*
	2,978,218	**533,384**	**1,714,049**	**1,832,980**	**3,547,029**	**7,058,631**	
Perubahan terkait jasa masa depan:							***Changes that relate to future services***
Kontrak dengan pengakuan awal pada periode berjalan	2,177,785	(1,638,848)	--	(2,216,140)	(2,216,140)	(1,677,203)	*Contracts initially recognized in the period*
Perubahan dalam estimasi yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual	490,578	54,447	--	(545,025)	(545,025)	-	*Changes in estimates that adjust the contractual service margin*
Perubahan dalam estimasi yang menghasilkan kerugian dan pembalikan atas kerugian pada kontrak mendasar yang merugi	(34,037)	(194,417)	--	(1,448,353)	(1,448,353)	(1,676,807)	*Changes in estimates that result in losses and reversals of losses on onerous contracts*
	2,634,326	**(1,778,818)**	**--**	**(4,209,518)**	**(4,209,518)**	**(3,354,010)**	
Perubahan terkait jasa lalu:							***Changes that relate to past services***
Penyesuaian berkaitan dengan liabilitas atas sisa pertanggungan	1,702,919	--	--	--	--	1,702,919	*Adjustment relating to liabilities remaining coverage*
Perubahan arus kas pemenuhan sehubungan dengan kejadian klaim	(124,433)	1,564,352	--	--	--	1,439,919	*Changes in fulfilment cash flows relating to incurred claims*
Penyesuaian pengalaman	98,337	--	--	--	--	98,337	*Experience adjustments*
	1,676,823	**1,564,352**	**--**	**--**	**--**	**3,241,175**	
Penghasilan jasa asuransi	7,289,367	318,918	1,714,049	(2,376,538)	(662,489)	6,945,796	***Insurance service result***
Penghasilan (beban) keuangan asuransi	(3,347,445)	(239,699)	--	(263,873)	(263,873)	(3,851,017)	*insurance contracts*
Dampak pergerakan perubahan nilai tukar	(224,610)	(49,336)	(7)	(32,136)	(32,143)	(306,089)	*Effect of movements in exchange rates*
Jumlah perubahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	**3,717,312**	**29,883**	**1,714,042**	**(2,672,547)**	**(958,505)**	**2,788,690**	***Total changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Arus Kas							***Cash flows***
Premi yang diterima	(21,095,998)	--	--	--	--	(21,095,998)	***Premiums received***
Kejadian klaim dan biaya jasa asuransi lainnya yang telah dibayarkan, termasuk komponen investasi	16,205,517	--	--	--	--	16,205,517	*Claims and other insurance service expenses paid, including investment components*
Arus kas akuisisi asuransi	1,473,502	--	--	--	--	1,473,502	*Insurance acquisition cash flows*
Entity share	(2,257)	--	--	--	--	(2,257)	*Entity Share*
Administrasi dan beban lainnya	2,562,534	--	--	--	--	2,562,534	*Administration and Other Costs*
Jumlah arus kas	**(856,702)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**(856,702)**	***Total cash flows***
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	**(41,166,236)**	**(3,260,472)**	**--**	**(3,607,162)**	**(3,607,162)**	**(48,033,870)**	***Net ending balance as of 31 2025***
Saldo akhir aset kontrak asuransi	186,104	(13,183)	--	(115,439)	(115,439)	57,482	*Insurance contract assets*
Saldo akhir liabilitas kontrak asuransi	(41,352,340)	(3,247,289)	--	(3,491,723)	(3,491,723)	(48,091,352)	*Insurance contract liabilities*
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	**(41,166,236)**	**(3,260,472)**	**--**	**(3,607,162)**	**(3,607,162)**	**(48,033,870)**	***Net ending balance as of 31 December 2025***

	2024						
			Marjin Jasa Kontraktual/*Contractual Service Magin*				
	Estimasi nilai kini dari arus kas masa depan/ *Estimates of present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non finansial/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Kontrak diukur menggunakan pendekatan nilai wajar/ *Contracts under Fair value transition approach*	Kontrak lainnya/ Other *contracts*	Subjumlah/ *Subtotal*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal aset kontrak asuransi	-	-	-	-	-	-	*Beginning balance insurance contract assets*
Saldo awal liabilitas kontrak asuransi	(46,939,770)	(3,624,565)	(1,914,842)	(383,269)	(2,298,111)	(52,862,446)	*Beginning balance insurance contract liabilities*
Saldo awal bersih pada tanggal 1 Januari 2024	**(46,939,770)**	**(3,624,565)**	**(1,914,842)**	**(383,269)**	**(2,298,111)**	**(52,862,446)**	***Net beginning balance as of 1 January 2024***
Perubahan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya:							***Changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Perubahan terkait jasa kini:							***Changes that relate to current services***
Jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui untuk pengalihan jasa	--	--	843,507	1,697,707	2,541,214	2,541,214	*Contractual service margin recognized for services provided*
Perubahan penyesuaian risiko untuk risiko non keuangan	--	1,764,028	--	--	--	1,764,028	*Change in risk adjustment for non-financial risk for risk expired*
Penyesuaian pengalaman	3,742,952	(1,285,613)	--	--	--	2,457,339	*Experience adjustments*
	3,742,952	**478,415**	**843,507**	**1,697,707**	**2,541,214**	**6,762,581**	
Perubahan terkait jasa masa depan:							***Changes that relate to future services***
Kontrak dengan pengakuan awal pada periode berjalan	(629,311)	(1,510,703)	(4)	327,892	327,888	(1,812,126)	*Contracts initially recognized in the period*
Perubahan dalam estimasi yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual	(334,134)	339,196	(154,650)	149,588	(5,062)	-	*Changes in estimates that adjust the contractual service margin*
Perubahan dalam estimasi yang menghasilkan kerugian dan pembalikan atas kerugian pada kontrak mendasar yang merugi	125,367	(332,848)	(370,215)	(463,187)	(833,402)	(1,040,883)	*Changes in estimates that result in losses and reversals of losses on onerous contracts*
	(838,078)	**(1,504,355)**	**(524,869)**	**14,293**	**(510,576)**	**(2,853,009)**	
Perubahan terkait jasa lalu:							***Changes that relate to past services***
Penyesuaian berkaitan dengan liabilitas atas sisa pertanggungan	1,171,120	--	--	--	--	1,171,120	*Adjustment relating to liabilities remaining coverage*
Perubahan arus kas pemenuhan sehubungan dengan kejadian klaim	(1,421,466)	1,627,654	--	--	--	206,188	*Changes in fulfilment cash flows relating to incurred claims*
Penyesuaian pengalaman	138,753	--	--	--	--	138,753	*Experience adjustments*
	(111,593)	**1,627,654**	--	--	--	**1,516,061**	
Penghasilan jasa asuransi	2,793,281	601,714	318,638	1,712,000	2,030,638	5,425,633	***Insurance service result***
Penghasilan (beban) keuangan asuransi	(2,630,303)	(210,891)	(116,582)	(100,629)	(217,211)	(3,058,405)	*Net finance income (expenses) from insurance contracts*
Dampak pergerakan perubahan nilai tukar	(261,875)	(56,613)	(1,256)	(12,132)	(13,388)	(331,876)	*Effect of movements in exchange rates*
Jumlah perubahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	**(98,897)**	**334,210**	**200,800**	**1,599,239**	**1,800,039**	**2,035,352**	***Total changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Arus Kas							***Cash flows***
Premi yang diterima	(17,414,901)	--	--	(2,150,898)	(2,150,898)	(19,565,799)	***Premiums received***
Kejadian klaim dan biaya jasa asuransi lainnya yang telah dibayarkan, termasuk komponen investasi	16,345,169	--	--	313	313	16,345,482	*Claims and other insurance service expenses paid, including investment components*
Arus kas akuisisi asuransi	1,680,611	--	--	--	--	1,680,611	*Insurance acquisition cash flows*
Entity share	(16,794)	--	--	--	--	(16,794)	*Entity Share*
Administrasi dan beban lainnya	2,417,736	--	--	--	--	2,417,736	*Administration and Other Costs*
Jumlah arus kas	3,011,821	--	--	(2,150,585)	(2,150,585)	861,236	***Total cash flows***
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2024	**(44,026,846)**	**(3,290,355)**	**(1,714,042)**	**(934,615)**	**(2,648,657)**	**(49,965,858)**	***Net ending balance as of 31 2024***
Saldo akhir aset kontrak asuransi	72,759	(10,481)	1,108	342	1,450	63,728	*Insurance contract assets*
Saldo akhir liabilitas kontrak asuransi	(44,099,605)	(3,279,874)	(1,715,150)	(934,957)	(2,650,107)	(50,029,586)	*Insurance contract liabilities*
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2024	**(44,026,846)**	**(3,290,355)**	**(1,714,042)**	**(934,615)**	**(2,648,657)**	**(49,965,858)**	***Net ending balance as of 31 December 2024***

iii. Analisis berdasarkan sisa pertanggungan dan klaim yang terjadi untuk kontrak reasuransi

iii. Analysis by remaining coverage and incurred claims for reinsurance contracts

	2025						
	Aset atas sisa masa pertanggungan/ *Assets for remaining coverage*		Aset atas kejadian klaim/ *Assets for incurred claims*				
				Kontrak diukur dengan PAA/ *Contracts measured under PAA*			
	Mengecualikan komponen pemulihan kerugian/ *Excluding loss-recovery components*	Komponen pemulihan kerugian/ *Loss-recovery components*	Kontrak tidak diukur dengan PAA/ *Contracts not measured under PAA*	Estimasi nilai dari arus kas pemenuhan/ *Estimates of present value of fullfillment cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non keuangan/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal aset kontrak reasuransi	441,083	104,782	9,087,285	94,118	13,377	9,740,645	*Beginning balance reinsurance contract assets*
Saldo awal liabilitas kontrak reasuransi	(228,196)	(237)	75,095	-	-	(153,338)	*Beginning balance reinsurance contract liabilities*
Saldo awal bersih pada tanggal 1 Januari 2025	**212,887**	**104,545**	**9,162,380**	**94,118**	**13,377**	**9,587,307**	***Net beginning balance as of 1 January 2025***
Perubahan pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya							***Changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Alokasi dari premi reasuransi yang dibayarkan	(3,419,585)	-	-	-	-	(3,419,585)	*Allocations of reinsurance premium paid*
Jumlah dipulihkan dari reasuradur:							***Amounts recoverable from reinsurers:***
Pemulihan atas kejadian klaim dan beban jasa asuransi lainnya	61,746	(359,324)	2,363,658	967	428	2,067,475	*Recoveries of incurred claims and other insurance expenses*
Pemulihan dan pembalikan atas kerugian pada kontrak merugi	(184,288)	340,035	-	-	-	155,747	*Recoveries and reversals of recoveries of losses on onerous underlying contracts*
Beban akuisisi	63,198	-	-	-	-	63,198	*Acquisition Expenses*
Lainnya	-	-	-	-	-	-	*Other*
Perubahan dalam estimasi yang tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual	-	-	-	-	-	-	*Changes in estimates that do not adjust the contractual service margin*
Penyesuaian pada aset atas kejadian klaim	-	-	(1,342,370)	(40,699)	(10,309)	(1,393,378)	*Adjustments to assets for incurred claims*
Komponen investasi dan pengembalian premi	-	-	-	-	-	-	*Investment components and premium refunds*
Dampak perubahan risiko non kinerja dari penerbit kontrak reasuransi milikan	87,245	-	128,511	3,401	-	219,157	*Effect of changes in non-performance risk of reinsurers*
Penghasilan (beban) neto kontrak reasuransi	**(3,391,684)**	**(19,289)**	**1,149,799**	**(36,331)**	**(9,881)**	**(2,307,386)**	***Net income (expenses) from reinsurance contracts***
Penghasilan (beban) keuangan bersih dari kontrak reasuransi	101,997	-	348,336	5,578	(830)	455,081	*Net finance income (expenses) from reinsurer contracts*
Dampak perubahan risiko gagal bayar reasuradur	34,844	1,840	168,830	307	33	205,854	*Effect of changes in non-performance risk of reinsurers*
Jumlah perubahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	**(3,254,843)**	**(17,449)**	**1,666,965**	**(30,446)**	**(10,678)**	**(1,646,451)**	***Total changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Arus Kas							***Cash flows***
Premi yang dibayarkan	4,152,341	-	519	-	-	4,152,860	*Premiums received*
Jumlah yang diterima	(149,147)	-	(1,824,553)	(4,282)	-	(1,977,982)	*Amounts received*
Jumlah arus kas	**4,003,194**	**-**	**(1,824,034)**	**(4,282)**	**-**	**2,174,878**	***Total cash flows***
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	**961,238**	**87,096**	**9,005,311**	**59,390**	**2,699**	**10,115,734**	***Net ending balance as of 31 December 2025***
Saldo akhir aset kontrak reasuransi	1,000,033	91,600	8,986,579	59,390	2,699	10,140,301	*Reinsurance contract assets*
Saldo akhir liabilitas kontrak reasuransi	(38,795)	(4,504)	18,732	-	-	(24,567)	*Reinsurance contract liabilities*
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	**961,238**	**87,096**	**9,005,311**	**59,390**	**2,699**	**10,115,734**	***Net ending balance as of 31 December 2025***

	2024						
	Aset atas sisa masa pertanggungan/ *Assets for remaining coverage*		Aset atas kejadian klaim/ *Assets for incurred claims*				
				Kontrak diukur dengan PAA/ *Contracts measured under PAA*			
	Mengecualikan komponen pemulihan kerugian/ Excluding *loss-recovery components*	Komponen pemulihan kerugian/ Loss-recovery *components*	Kontrak tidak diukur dengan PAA/ Contracts not *measured under PAA*	Estimasi nilai dari arus kas pemenuhan/ Estimates of present *value of fullfillment cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non keuangan/ Risk adjustment *for non-financial risk*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal aset kontrak reasuransi	360,586	64,720	9,206,222	179,535	29,033	9,840,096	*Beginning balance reinsurance contract assets*
Saldo awal liabilitas kontrak reasuransi	(9,302)	-	5,506	107	17	(3,672)	*Beginning balance reinsurance contract liabilities*
Saldo awal bersih pada tanggal 1 Januari 2024	**351,284**	**64,720**	**9,211,728**	**179,642**	**29,050**	**9,836,424**	***Net beginning balance as of 1 January 2024***
Perubahan pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya							***Changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Alokasi dari premi reasuransi yang dibayarkan	(3,274,833)	-	-	-	-	(3,274,833)	*Allocations of reinsurance premium paid*
Jumlah dipulihkan dari reasuradur:							***Amounts recoverable from reinsurers:***
Pemulihan atas kejadian klaim dan beban jasa asuransi lainnya	65,670	(448,780)	1,763,578	(51,827)	1,755	1,330,396	*Recoveries of incurred claims and other insurance expenses*
Pemulihan dan pembalikan atas kerugian pada kontrak merugi	-	487,763	-	-	-	487,763	*Recoveries and reversals of recoveries of losses on onerous underlying contracts*
Beban akuisisi	61,504	-	-	-	-	61,504	*Acquisition Expenses*
Lainnya	-	-	-	-	-	-	*Other*
Perubahan dalam estimasi yang tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual	-	-	-	-	-	-	*Changes in estimates that do not adjust the contractual service margin*
Penyesuaian pada aset atas kejadian klaim	-	-	(812,324)	(24,801)	(19,163)	(856,288)	*Adjustments to assets for incurred claims*
Komponen investasi dan pengembalian premi	-	-	-	-	-	-	*Investment components and premium refunds*
Dampak perubahan risiko non kinerja dari penerbit kontrak reasuransi milikan	54,126	-	71,902	493	-	126,521	*Effect of changes in non-performance risk of reinsurers*
Penghasilan (beban) neto kontrak reasuransi	**(3,093,533)**	**38,983**	**1,023,156**	**(76,135)**	**(17,408)**	**(2,124,937)**	***Net income (expenses) from reinsurance contracts***
Penghasilan (beban) keuangan bersih dari kontrak reasuransi	2,107	-	391,676	28,787	1,709	424,279	*Net finance income (expenses) from reinsurer contracts*
Dampak perubahan risiko gagal bayar reasuradur	16,685	842	249,809	189	26	267,551	*Effect of changes in non-performance risk of reinsurers*
Jumlah perubahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	**(3,074,741)**	**39,825**	**1,664,641**	**(47,159)**	**(15,673)**	**(1,433,107)**	***Total changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Arus Kas							***Cash flows***
Premi yang dibayarkan	3,003,281	-	365	-	-	3,003,646	*Premiums received*
Jumlah yang diterima	(66,937)	-	(1,714,354)	(38,365)	-	(1,819,656)	*Amounts received*
Jumlah arus kas	2,936,344	-	(1,713,989)	(38,365)	-	1,183,990	***Total cash flows***
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2024	**212,887**	**104,545**	**9,162,380**	**94,118**	**13,377**	**9,587,307**	***Net ending balance as of 31 December 2024***
Saldo akhir aset kontrak reasuransi	441,083	104,782	9,087,285	94,118	13,377	9,740,645	*Reinsurance contract assets*
Saldo akhir liabilitas kontrak reasuransi	(228,196)	(237)	75,095	-	-	(153,338)	*Reinsurance contract liabilities*
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2024	**212,887**	**104,545**	**9,162,380**	**94,118**	**13,377**	**9,587,307**	***Net ending balance as of 31 December 2024***

iv. Analisis berdasarkan sisa pertanggungan dan klaim yang terjadi untuk kontrak reasuransi

iv. Analysis by remaining coverage and incurred claims for reinsurance contracts

	2025						
	Marjin jasa kontraktual/*Contractual Service Margin*						
	Estimasi nilai kini dari arus kas masa depan/ *Estimates of present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non finansial/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Kontrak diukur menggunakan pendekatan nilai wajar/ *Contracts under Fair value transition approach*	Kontrak lainnya/ Other *contracts*	Subjumlah/ *Subtotal*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal aset kontrak reasuransi	7,760,790	1,310,877	129,537	444,376	573,913	9,645,580	*Beginning balance reinsurance contract assets*
Saldo awal liabilitas kontrak reasuransi	(217,424)	10,095	(5,918)	59,909	53,991	(153,338)	*Beginning balance reinsurance contract liabilities*
Saldo awal bersih pada tanggal 1 Januari 2025	**7,543,366**	**1,320,972**	**123,619**	**504,285**	**627,904**	**9,492,242**	***Net beginning balance as of 1 January 2025***
Perubahan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya:							***Changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Perubahan terkait jasa kini:							***Changes that relate to current services***
Jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui untuk pengalihan jasa	-	-	(123,802)	(307,962)	(431,764)	(431,764)	*Contractual service margin recognized for services provided*
Perubahan penyesuaian risiko untuk risiko non keuangan	-	(411,975)	-	-	-	(411,975)	*Change in risk adjustment for non-financial risk for risk expired*
Penyesuaian pengalaman	(832,141)	394,819	-	-	-	(437,322)	*Experience adjustments*
	(832,141)	(17,156)	(123,802)	(307,962)	(431,764)	(1,281,061)	
Perubahan terkait jasa masa depan:							***Changes that relate to future services***
Kontrak dengan pengakuan awal pada periode berjalan	(46,787)	176,041	-	(38,789)	(38,789)	90,465	*Contracts initially recognized in the period*
Perubahan dalam pemulihan kerugian atas kontrak dasar yang merugi yang menyebabkan penyesuaian marjin jasa kontraktual	(644,853)	268,949	-	375,904	375,904	-	*Changes in recoveries of losses on onerous underlying contracts that adjust*
Perubahan dalam estimasi yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual	-	-	-	-	-	-	*Changes in estimates that adjust the contractual service margin*
Perubahan dalam estimasi yang menghasilkan kerugian dan pembalikan atas kerugian pada kontrak mendasar yang merugi	(133,949)	-	-	156,689	156,689	22,740	*Changes in estimates that result in losses and reversals of losses on onerous contracts*
	(825,589)	444,990	-	493,804	493,804	113,205	
Perubahan terkait jasa lalu:							***Changes that relate to past services***
Penyesuaian aset atas kejadian klaim	(781,453)	(566,027)	-	-	-	(1,347,480)	*Adjustment to assets for incurred claim*
Perubahan pengalaman	(328)	-	-	-	-	(328)	*Experience adjustments*
Penyesuaian aset atas sisa masa pertanggungan	69,569	-	-	-	-	69,569	- *remaining coverage*
Dampak perubahan risiko non kinerja dari penerbit kontrak reasuransi milikan	357,593	-	-	-	-	357,593	***Effect of changes in non-performance risk of reinsurers***
Beban neto atas kontrak reasuransi	(2,012,349)	(138,193)	(123,802)	185,842	62,040	(2,088,502)	***Net expenses from reinsurance contracts***
Penghasilan (beban) keuangan dari kontrak reasuransi	433,845	83,725	-	20,725	20,725	538,295	*Net finance income (expenses) from insurance contracts*
Dampak pergerakan perubahan nilai tukar	184,571	37,056	183	16,632	16,815	238,442	*Effect of movements in exchange rates*
Jumlah perubahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	**(1,393,933)**	**(17,412)**	**(123,619)**	**223,199**	**99,580**	**(1,311,765)**	***Total changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Arus Kas							***Cash flows***
Premi yang dibayarkan	3,849,874	-	-	-	-	3,849,874	*Premiums paid*
Jumlah yang diterima	(1,972,646)	-	-	-	-	(1,972,646)	*Amount received*
Jumlah arus kas	**1,877,228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,877,228**	***Total cash flows***
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	**8,026,661**	**1,303,560**	**-**	**727,484**	**727,484**	**10,057,705**	***Net ending balance as of 31 2025***
Saldo akhir aset kontrak reasuransi	8,042,366	1,300,108	-	739,798	739,798	10,082,272	*Reinsurance contract assets*
Saldo akhir liabilitas kontrak reasuransi	(15,705)	3,452	-	(12,314)	(12,314)	(24,567)	*Reinsurance contract liabilities*
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	**8,026,661**	**1,303,560**	**-**	**727,484**	**727,484**	**10,057,705**	***Net ending balance as of 31 December 2025***

	2024						
	Marjin jasa kontraktual/*Contractual Service Margin*						
	Estimasi nilai kini dari arus kas masa depan/ *Estimates of present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non finansial/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Kontrak diukur menggunakan pendekatan nilai wajar/ *Contracts under Fair value transition approach*	Kontrak lainnya/ Other *contracts*	Subjumlah/ *Subtotal*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal aset kontrak reasuransi	7,639,487	1,508,131	86,327	-	86,327	9,233,945	*Beginning balance reinsurance contract assets*
Saldo awal liabilitas kontrak reasuransi	-	-	-	-	-	-	*Beginning balance reinsurance contract liabilities*
Saldo awal bersih pada tanggal 1 Januari 2025	7,639,487	1,508,131	86,327	-	86,327	9,233,945	***Net beginning balance as of 1 January 2025***
Perubahan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya:							***Changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Perubahan terkait jasa kini:							***Changes that relate to current services***
Jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui untuk pengalihan jasa	-	-	(446,367)	(520,922)	(967,289)	(967,289)	*Contractual service margin recognized for services provided*
Perubahan penyesuaian risiko untuk risiko non keuangan	-	(387,973)	-	-	-	(387,973)	*Change in risk adjustment for non-financial risk for risk expired*
Penyesuaian pengalaman	(1,210,223)	391,219	-	-	-	(819,004)	*Experience adjustments*
	(1,210,223)	3,246	(446,367)	(520,922)	(967,289)	(2,174,266)	
Perubahan terkait jasa masa depan:							***Changes that relate to future services***
Kontrak dengan pengakuan awal pada periode berjalan	(184,552)	116,969	593	152,723	153,316	85,733	*Contracts initially recognized in the period*
Perubahan dalam pemulihan kerugian atas kontrak dasar yang mergui yang menyebabkan penyesuaian marjin jasa kontraktual	-	-	-	-	-	-	*Changes in recoveries of losses on onerous underlying contracts that adjust*
Perubahan dalam estimasi yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual	(1,268,424)	159,051	348,924	760,449			*Changes in estimates that adjust the contractual service margin*
Perubahan dalam estimasi yang menghasilkan kerugian dan pembalikan atas kerugian pada kontrak mendasar yang merugi	-	-	130,335	110,859	241,194	241,194	*the contractual service margin Changes in estimates that result in losses and reversals of losses on onerous contracts*
	(1,452,976)	276,020	479,852	1,024,031	1,503,883	326,927	
Perubahan terkait jasa lalu:							***Changes that relate to past services***
Penyesuaian aset atas kejadian klaim	(233,042)	(585,050)	-	-	-	(818,092)	*Adjustment to assets for incurred claim*
Perubahan pengalaman	(2)	-	-	-	-	(2)	*Experience adjustments*
Penyesuaian aset atas sisa masa pertanggungan	-	-	-	-	-	-	*Adjustment relating to assets remaining coverage*
Dampak perubahan risiko non kinerja dari penerbit kontrak reasuransi milikan	219,494	-	-	-	-	219,494	***Effect of changes in non-performance risk of reinsurers***
Beban neto atas kontrak reasuransi	(2,676,749)	(305,784)	33,485	503,109	536,594	(2,445,939)	***Net expenses from reinsurance contracts***
Penghasilan (beban) keuangan dari kontrak reasuransi	338,428	73,738	1,740	(959)	781	412,947	*Net finance income (expenses) from insurance contracts*
Dampak pergerakan perubahan nilai tukar	211,418	44,887	2,067	2,135	4,202	260,507	*Effect of movements in exchange rates*
Jumlah perubahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	(2,126,903)	(187,159)	37,292	504,285	541,577	(1,772,485)	***Total changes in the statement of profit or loss and other comprehensive income***
Arus Kas							***Cash flows***
Premi yang dibayarkan	3,935,443	-	-	-	-	3,935,443	***Premiums paid***
Jumlah yang diterima	(1,904,661)	-	-	-	-	(1,904,661)	*Amount received*
Jumlah arus kas	2,030,782	-	-	-	-	2,030,782	***Total cash flows***
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	7,543,366	1,320,972	123,619	504,285	627,904	9,492,242	***Net ending balance as of 31 2025***
Saldo akhir aset kontrak reasuransi	7,760,790	1,310,877	129,537	444,376	573,913	9,645,580	*Insurance contract assets*
Saldo akhir liabilitas kontrak reasuransi	(217,424)	10,095	(5,918)	59,909	53,991	(153,338)	*Insurance contract liabilities*
Saldo akhir bersih pada tanggal 31 Desember 2025	7,543,366	1,320,972	123,619	504,285	627,904	9,492,242	***Net ending balance as of 31 December 2025***

25. Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan / *25. Liabilities For Financial Guarantee Contracts*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pendapatan penjaminan kredit diterima dimuka	9,067,735	11,664,582	*Deferred credit guarantee income*
Estimasi klaim	8,588,442	8,815,568	*Estimated claims*
Jumlah	**17,656,177**	**20,480,150**	***Total***

a. Pendapatan penjaminan kredit diterima dimuka / *a. Deferred credit guarantee income*

	2025 Rp	2024 Rp	
Kredit	9,025,106	11,631,141	*Credit*
Suretyship	42,629	33,441	*Suretyship*
Jumlah	**9,067,735**	**11,664,582**	***Total***

b. Estimasi klaim / ***b. Estimated claims***

	2025 Rp	2024 Rp	
Kredit	8,587,101	8,811,665	*Credit*
Suretyship	1,341	3,903	*Suretyship*
Jumlah	**8,588,442**	**8,815,568**	***Total***

26. Pinjaman Dari Pemerintah / *26. Government Loans*

	2025 Rp	2024 Rp	
Rekonsiliasi saldo pinjaman dari Pemerintah adalah sebagai berikut:			***The reconciliation of Government loans balance is as follows:***
Saldo awal	757,542	1,007,156	*Beginning balance*
Amortisasi	36,981	32,143	*Amortisation*
Pembayaran	(170,569)	(333,174)	*Payment*
Penambahan	164,000	51,417	*Additions*
Saldo akhir	**787,954**	**757,542**	***Ending balance***

Tabel berikut ini merupakan penyajian atas rekonsiliasi saldo pinjaman dari Pemerintah pada tangal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table is a presentation of the reconciliation of government loan balances as of December 31, 2025 and 2024:

	2025 Rp	2024 Rp	
Utang rekening dana investasi	1,123,927	1,129,296	*Investment fund account loan*
Utang penerusan pinjaman	38,188	38,188	*Loan proceeds payable*
Biaya yang belum diamortisasi	(396,089)	(431,584)	*Unamortized cost*
	766,026	735,900	
Utang Subordinasi lain-lain	21,928	21,642	*Other subordinated loans*
Total Pinjaman dari Pemerintah	**787,954**	**757,542**	***Total Government loans***

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

a. Utang rekening dana investasi ("RDI")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perseroan dengan No. RDI/327/DP3/1997 untuk pinjaman subordinasi RDI tanggal 16 Desember 1997 disepakati bahwa Perseroan mendapat pinjaman subordinasi dalam rangka stabilisasi pasar modal dan pasar uang sejumlah maksimum Rp250.000. Atas pinjaman ini dikenakan beban administrasi sebesar 20% per tahun, beban komitmen sebesar 0,25%, denda pokok 4% per tahun dari yang tertunggak, dan denda biaya administrasi sebesar 24% per tahun dari yang tertunggak. Jangka waktu pinjaman adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut. Pada saat jatuh tempo Perseroan gagal melunasi pinjaman RDI tersebut.

a. Investment fund account payable ("RDI")

Based on Loan Agreement No. RDI/327/DP3/1997 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company, in relation to a subordinated loan RDI dated December 16, 1997, it has been agreed that the Company will obtain a subordinated loan in relation with the stabilization of the capital and money markets for a maximum amount of Rp250,000. This loan is charged with administration fee of 20% per annum, commitment fee of 0.25%, principal penalty of 4% per annum from the outstanding balance, and penalty on the administration fee of 24% per annum from the outstanding balance. The loan period is 3 (three) years from the signing date of the loan agreement. At due date the Company defaulted on the RDI loan.

Perseroan mengajukan gugatan hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 889/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 6 September 2005 kepada Saudara Sudjiono Timan, mantan Direktur Utama Perseroan pada saat itu dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, masing-masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman RDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp250.000. Pada tanggal 18 Oktober 2005, Majelis Hakim memberikan putusan provisi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh provisi Perseroan; dan
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman No. RDI/ 327/DP3/1997 tertanggal 16 Desember 1997 antara Perseroan yang diwakili oleh Saudara Sudjiono Timan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dana sebesar Rp250.000 untuk sementara tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum atas perkara ini.

The Company filed a civil case in South Jakarta State Court with register No. 889/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel dated September 6, 2005 against Mr. Sudjiono Timan, the former President Director of the Company and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia as the Defendant and Auxiliary Defendant, respectively, in relation with the fund utilization of the RDI loan with principal amount of Rp250,000. On October 18, 2005, the Court of Justice made decision provision as follows:

1. *Accept and grant all the Company's provision; and*
2. *Announce that the Loan Agreement No. RDI/327/DP3/1997 dated December 16, 1997 between the Company as represented by Mr. Sudjiono Timan and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia for the fund amounting to Rp250,000 in the time being could not be executed until there is a binding legal decision on this case.*

Pada 17 Februari 2006, Perseroan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan No. 889/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. Pencabutan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Februari 2006.

On February 16, 2006, the Company filed a letter for revocation of the case No. 889/Pdt.G/2005 PN.Jak.Sel. The South Jakarta State Court accepted the revocation on February 21, 2006.

Pada tahun 2007, Perseroan mengajukan restrukturisasi utang ini. Pada tanggal 14 Mei 2007, Perseroan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi No. 38/PB.4.13/PTBPUI/ 0507, terkait restrukturisasi pinjaman RDI. Sejak 31 Desember 2006, selama proses restrukturisasi berlangsung, Perseroan tidak dikenakan bunga pinjaman.

In 2007, the Company requested restructuring for this loan. On May 14, 2007, the Company and the Department of Finance of the Republic of Indonesia, signed the Official Report of Reconciliation No. 38/PB.4.13/PTBPUI/0507, regarding to the RDI loan restructurisation. Started from December 31, 2006, during the restructuring process, the Company has not been charged of any interest loan.

Pada tanggal 2 Februari 2012, Perseroan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa objek hasil rampasan aset Sudjiono Timan telah dilaksanakan lelang dengan nilai sebesar Rp55.717. Perseroan juga mengajukan revisi permohonan restrukturisasi RDI dengan skema sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara ("PMN") atas utang pokok RDI senilai Rp250.000; dan
2. Penjadwalan kembali utang bunga RDI sebesar Rp950.652, dilakukan cicilan sampai dengan tahun 2026.

On February 2, 2012, the Company sent a letter to the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of Republic of Indonesia stating that the assets confiscated from Sudjiono Timan has been auctioned of in the amount of Rp55,717. The Company also proposed a revision on request for RDI restructuring with the following scheme:

1. *State Capital Investment ("PMN") on RDI principal amounting to Rp250,000; and*
2. *Rescheduling of RDI interest payable amounting to Rp950,652, to be installed until year 2026.*

Pada tanggal 5 November 2012, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menyetujui permohonan restrukturisasi RDI yang diajukan Perseroan dan kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Perubahan (Amendemen) atas Perjanjian RDI pada tanggal 28 Desember 2012. Namun demikian, pelaksanaan restrukturisasi masih menunggu adanya Peraturan Pemerintah mengingat pola restrukturisasi utang RDI adalah melalui PMN.

On November 5, 2012, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia has approved the Company proposed restructuring of the RDI and both parties have signed an Amendment on the RDI Agreement on December 28, 2012. However, the implementation of the restructuring is still waiting for Government Regulation considering debt restructuring scheme of RDI is through the PMN.

Pada tanggal 21 Januari 2013, Menteri BUMN melalui surat No. S-28/MBU/2013 meminta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar dapat dialokasikan sebesar Rp250.000 sebagai tambahan PMN di Perseroan.

On January 21, 2013, the Minister of SOE through letter No. S-28/MBU/2013 has asked the Minister of Finance c.q. Directorate General of Treasury to allocate the outstanding principal of Rp250,000 as additional PMN to the Company.

Berdasarkan Surat Tagihan No. S-7142/PB/ 2014 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia meminta Perseroan untuk melakukan pembayaran tunggakan bunga dan denda sebesar Rp30.000 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 16 Desember 2014.

Based on the Collection Letter No. S-7142 /PB/ 2014 issued on October 28, 2014, by the Directorate General of Treasury Ministry of Finance Republic of Indonesia has asked the Company to make payments on outstanding interest and penalties amounting to Rp30,000 which should be due on December 16, 2014.

Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perseroan menyampaikan pandangan terkait Surat Tagihan No. S-7142/PB/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bahwa Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas kewajiban RDI tahun 2012, 2013, 2014 sampai dengan 2018 dengan mempertimbangkan beberapa dokumen sebagai berikut:

- Surat Menteri Keuangan No.S-92/MK.6/2010 tanggal 13 April 2010;
- Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No.434K/3 Desember 2004 berupa uang tunai sebesar Rp55.717;
- Surat direksi BPUI No.013/HS/BPUI/II/2012 tanggal 2 Februari 2012;
- Surat No. S-352/PB.4/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang menyatakan perhitungan pembayaran utang belum dapat dilakukan atau belum mengurangi saldo utang BPUI;
- Persetujuan Menteri Keuangan atas proses restrukturisasi berdasarkan surat No.S-792/MK.05/2012 tanggal 5 November 2012 dimana kewajiban pokok sebesar Rp250.000 akan dijadikan PMN dan kewajiban lainnya sebesar Rp950.652 akan

On October 30, 2014, the Company has expressed their view to the related Collection Letter No. S-7142/ PB/2014 dated October 28, 2014 noting that the Company has no obligation to make payments on the outstanding RDI loan in 2012, 2013, 2014 through to 2018 with consideration to several documents as follows:

- *Letter of the Minister of Finance No. S-92 /MK.6/2010 dated April 13, 2010;*
- *Implementation of the Supreme Court ruling No. 434K/December 3, 2004 in the form of cash of Rp55,717;*
- *Letter of directors BPUI No. 013/HS/BPUI/II/2012 dated February 2, 2012;*
- *Letter No. S-352/PB.4/2012 dated February 29, 2012, which states the calculation of debt payments can not be done yet or not reducing debt balances of BPUI yet;*
- *Approval of the Minister of Finance on the restructuring process by letter No. S-792/MK.05/2012 dated November 5, 2012 in which the principal obligation of Rp250,000 will be converted as PMN and other liabilities amounting to Rp950,652*

diangsur selama 20 tahun (2007 sampai dengan 2026) termasuk masa tenggang 5 tahun (2007 sampai dengan 2011).

Pada tanggal 3 Desember 2014, Perseroan menyampaikan surat No. 58/DSW/BPUI/XII/2014 kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi RI tentang penyelesaian kewajiban tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan total sebesar Rp55.717 selambat-lambatnya pada akhir tahun 2017, dengan cara melakukan penjualan aset seluas 2.008 m2 yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 23 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.

Selanjutnya, Pemerintah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2015, menyampaikan perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 yang di antaranya mengalokasikan pembiayaan anggaran dana investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada beberapa BUMN termasuk BPUI yaitu menyetujui adanya penambahan modal sebesar Rp250.000. Kemudian melalui surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-924/ MK.06/ 2015 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 20 November 2015 dengan mengacu kepada Undang-Undang No.3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Negara kepada beberapa BUMN, Presiden diminta untuk memberikan persetujuan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 133 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dengan nilai penambahan sebesar Rp250.000 yang berasal dari konversi pokok pinjaman rekening dana investasi, Perseroan sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai proses restrukturisasi utang RDI tersebut.

Utang bunga rekening dana investasi ("RDI")
Utang bunga RDI merupakan utang Perseroan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam hubungannya dengan utang subordinasi dan saldonya terdiri dari denda utang pokok dan beban administrasi akibat Perseroan lalai untuk melunasi pinjaman RDI ini pada saat jatuh tempo.

which will be installed for 20 years (2007 until 2026) including a grace period of 5 years (2007 until 2011).

On December 3, 2014, the Company submit a letter No. 58/DSW/BPUI/XII/2014 to Director of Investment Management System RI regarding the repayment period of liabilities within 2012 to 2017 amounting to Rp55,717 at the latest by the end of 2017, by selling the asset of 2,008 m2, which is located on Jalan Teuku Cik Ditiro No. 23 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.

Furthermore, the Government through Act No.3 Year 2015 has submitted amendments to the Act No.27 Year 2014 regarding Funding Under State Budget year 2015 which among others allocate the budget for Government Investment in the form of PMN to SOEs including BPUI which approved the capital increase amounting to Rp250,000. Later, through the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-924/MK.06/2015 addressed to the President of the Republic of Indonesia on November 20, 2015, by referring to Act No.3 Year 2015 regarding the State Capital investment to several SOEs, the President was asked to approve the draft of Government Regulation.

Based on the Government Regulation No. 133 Year 2015, dated December 28, 2015, regarding the Addition of State Capital Investment of the Republic of Indonesia into the capital shares of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), amounting to Rp250,000 which were converted from investment fund account loan, the Company has already received approval from Government of the Republic of Indonesia regarding the restructuring process of the RDI payable.

Investment fund account ("RDI") interest Payable
The interest payable on RDI is the Company's debt payable to the Government of the Republic of Indonesia in relation to the subordinated loans and the balance consists of principal penalties and administration fees charged to the Company for its failure to repay the related loans on the due date.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021, Pemerintah telah menyetujui penjadwalan kembali atas piutang bunga RDI No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Perubahan No. AMA-206/RDI-327/DSMI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Berdasarkan perjanjian perubahan tersebut, kewajiban non pokok pinjaman Perseroan sebesar Rp941.900 dijadwalkan kembali dengan jangka waktu yang akan pelunasan selama 20 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun (tahun 2021-2022).

Based on the Decree of the Ministry of Finance No. S-110/MK.5/2021 dated November 29, 2021, the Government has agreed to restructure the interest receivables from RDI No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 which was then stated in the Amendment Agreement No. AMA-206/RDI-327/DSMI/2022 dated June 30, 2022. Based on the amendment agreement, the Company's non-principal loan obligations of Rp941,900 are rescheduled with a repayment period of 20 years including a grace period of 2 years (2021-2022).

b. Utang penerusan pinjaman

Utang tersebut berupa pinjaman yang berasal dari dana *Export-Import* Bank of Japan ("JEXIM") (kini operasinya diambil alih oleh Japan Bank for International Cooperation) melalui Pemerintah Republik Indonesia dengan pagu kredit sebesar JPY21.000.000.000 (nilai penuh) yang hasilnya kemudian diteruskan oleh Perseroan kepada BAV. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,50% per tahun. Jatuh tempo pembayaran pertama cicilan pokok adalah pada bulan Februari 2000 sebesar 1/22 dari jumlah terutang pada tanggal 31 Desember 1999. Jatuh tempo pembayaran terakhir adalah tanggal 15 Juli 2010.

Utang ini disajikan sebagai utang penerusan pinjaman sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. S-1158/KMK.17/1997, tanggal 15 Desember 1997.

Pada tanggal 15 Februari 2007, BAV telah membayar bunga terutang atas pinjaman dana JEXIM setelah restrukturisasi sebesar Rp3.904 kepada PT Bank DKI.

Pada tanggal 13 Juni 2008, Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit No. AMA-322/SLA-919/DP3/2008. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5,50% per tahun yang wajib dibayar setiap enam bulan dengan beban komitmen atas pagu kredit yang belum dicairkan sebesar 0,15% per tahun. Pokok pinjaman wajib dibayar setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahun. Pembayaran pertama dilakukan pada 15 Februari 2009. Jatuh tempo pembayaran kembali adalah pada tanggal 15 Agustus 2021.

b. Loan proceeds payable

The loan was obtained from Export-Import Bank of Japan ("JEXIM") (now its operations is taken over by Japan Bank for International Cooperation) through the Government of the Republic of Indonesia that involves a loan facility amounting to JPY21,000,000,000 (full amount) of which proceeds were channeled by the Company to BAV. The loan proceeds payable is subjected to interest rate at 6.50% per annum. The first installment of this subordinated loan was due in February 2000 amounted to 1/22 of the outstanding loan as of December 31, 1999. The final repayment date was due on 15 July 15, 2010.

This loan is presented as a subsidiary loan in accordance with a letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia c.q. Directorate General of Financial Institutions No. S-1158/KMK.17/1997 dated December 15, 1997.

On February 15, 2007, BAV has paid the interest payable of JEXIM loan after the restructuring amounting to Rp3,904 to PT Bank DKI.

On June 13, 2008, the Company and the Government of the Republic of Indonesia entered into a Loan Renewal and Amendment Agreement Deed No. AMA-322/SLA-919/DP3/2008. The loan is subjected to interest rate at 5.50% per annum, which is required to be paid semi annually with commitment fees over the unused facility of 0.15% per annum. The loan principal has to be paid on February 15th and August 15th every year. The first installment was on February 15, 2009. The due date for the repayment was on August 15, 2021.

Pada tahun 2014, BAV telah membayar pinjamannya sebesar Rp17.868.

In 2014, BAV has paid the loan amounting to Rp17,868.

Pada tanggal 17 Februari 2014, Perseroan telah mengajukan permohonan penjadwalan kembali pinjaman ini kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Permohonan penjadwalan ulang ini kemudian diajukan kembali oleh pihak manajemen Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2014. Selain mengajukan permohonan restrukturisasi, manajemen juga mengajukan permohonan agar dapat dilakukan penghentian perhitungan kewajiban pokok dan kewajiban bunga atau denda pada tanggal *cut off date* yang disepakati bersama.

On February 17, 2014, the Company has applied for loan rescheduling to the Director General of Treasury Ministry of Finance Republic of Indonesia. The rescheduling petition was then resubmitted by the Company's management on August 19, 2014. In addition to applying for restructuring, management also filed a petition to freeze the principal obligation and interest or penalties calculation based on the mutually agreed cutoff date that.

Melalui Surat Perusahaan No. 014/DSW/ BPUI/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditujukan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai permohonan penjadwalan kembali (restrukturisasi kedua) pinjaman dengan SLA-919/DP3/1996, Perseroan mengajukan skema sebagai berikut:

i. Penjadwalan kembali jangka waktu perjanjian pinjaman selama 20 tahun terhitung sejak posisi *cut-off* 31 Desember 2013, sehingga akan jatuh tempo pada tahun 2033;
ii. Grace period atas pokok pinjaman selama 10 tahun sehingga pembayaran pokok dimulai pada Februari 2024 sampai dengan Agustus 2033;
iii. Perubahan tingkat suku bunga yang semula sebesar 5,50% per tahun menjadi 1,00% per tahun.

Through the Company's Letter No. 014/DSW/ BPUI/III/2015 dated March 10, 2015, which addressed to the Director of Investment Management System of Directorate General of Treasury Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding the request for rescheduling (second rescheduling) loan with SLA-919/DP3/1996, the Company proposed the following scheme:

i. Rescheduling term of the loan agreement for 20 years, starting from the position of the cut-off December 31, 2013, which will mature in 2033;

ii. Grace period on principal for 10 years, therefore the principal repayment will begin in February 2024 until August 2033;

iii. Changes in interest rate which originally at 5.50% per annum to 1.00% per annum.

Atau berupa konversi utang menjadi PMN dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku kreditur.

Or in the form of debt conversion into PMN and/or other schemes established by the Ministry of Finance as the creditor.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai proses restrukturisasi utang penerusan pinjaman tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dengan nilai penambahan sebesar Rp268.017 yang berasal dari konversi *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) pada Perseroan.

The Company has obtained approval from the Government of the Republic of Indonesia regarding the process of debt restructuring based on Government Regulation Republic Indonesia No. 67/2020 dated November 20, 2020 regarding the addition of State Capital Investment of the Republic of Indonesia into the capital shares of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, amounting to Rp268,017 originated from the conversion of the Company's Subsidiary Loan Agreement (SLA).

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021, Pemerintah telah menyetujui penjadwalan kembali atas utang penerusan pinjaman ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 yang kemudian dituangkan dalam. Perjanjian Perubahan No. AMA-207/SLA-919/DSMI/2022 tanggal 30 Juni 2022. Berdasarkan perjanjian perubahan tersebut, kewajiban non pokok atas pinjaman Perseroan sebesar Rp40.588 dijadwalkan kembali dengan jangka waktu pelunasan selama 20 tahun, termasuk masa tenggang selama 2 tahun (tahun 2021-2022).

Based on the Decree of the Ministry of Finance No. S-110/MK.5/2021 dated November 29, 2021, the Government has agreed to restructure the two-step loan ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 which was then stated in the Amendment Agreement No. AMA-207/SLA-919/DSMI/2022 dated June 30, 2022. Based on the amendment agreement, the non-principal obligation for the Company's loan of Rp40,588 was rescheduled with a repayment period of 20 years, including a grace period of 2 years (2021-2022).

Sesuai dengan PSAK 109 "Instrumen keuangan", skema restrukturisasi ini merupakan modifikasi *substantial terms,* sehingga Grup mengakui penghapusan dari liabilitas keuangan yang dimiliki dan pengakuan atas liabilitas keuangan yang baru.

In accordance with SFAS 109 "Financial instruments", this restructuring scheme is a substantial modification of terms, hence, the Group recognised extinguishment of the existing financial liabilities and recognition of the new financial liabilities.

Perbedaan atas liabilitas keuangan yang baru dan liabilitas keuangan yang dihapuskan terkait restrukturisasi ini sebesar Rp547.157 dicatat sebagai biaya yang belum diamortisasi atas utang dan tambahan modal disetor (Catatan 37), serta secara bulanan akan diamortisasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

The difference between the new financial liabilities and the extinguished financial liabilities due to restructuring scheme amounting to Rp547,157, was recorded as an unamortised cost of debt and additional paid-in capital (Note 37) and will be amortised monthly in the consolidated statement of profit or loss.

27. Utang Bank / *27. Bank Loans*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak berelasi	743,617	2,066,555	*Related parties*
Pihak ketiga	227,506	296,537	*Third parties*
	971,123	**2,363,092**	

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

Informasi yang signifikan terkait dengan utang bank pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Significant information related to bank loans as of December 31, 2025, is as follows:

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)						
Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia	Fasilitas Tranche B / *Tranche B Facility*	1,455,977 (Fasilitas I/ *Facillity I*)	874,022	Maksimal sampai dengan Desember 2026/ *maximum up to December 2026*	*Margin (1.25%)* + *JIBOR*	Akta Jaminan Gadai Rekening Penampungan dan Akta Jaminan Gadai Operasional/ *Pledge Collateral Deed for Escrow Account and Operational Pledge Collateral Deed*
PT Bahana Artha Ventura						
PT Bank Ina Perdana Tbk	Kredit tetap/ *Fixed loan*	50,000	47,041	36 bulan/*months* sejak pencairan kredit selesai pada Desember 2027/ *since the disbursement of the loan is completed in December 2027*	9.50%	Fidusia piutang lancar 125%/*Fiducia 125% of performing from plafond* (Catatan 8/*Note 8*)
PT Sarana NTB Ventura						
PT Bank Central Asia Tbk	*Time Loan Revolving*	6,000	3,500	12 bulan/ *months* 17 Juli/*July* 2024 - 20 Juli/ *July 2026*	10.75%	Bangunan kantor/ *Office building* (Catatan 16/*Note 16*)
PT Sarana Kalsel Ventura						
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Kredit modal kerja/*Revolving credit -*	20,000 (Fasilitas II/ *Facillity II*)	203	56 bulan/ *months* Oktober/ Oktober 2021 - Oktober/ *October* 2026	12.00%	a. Agunan Pokok Berupa hak tagih dari seluruh pembiayaan investasi bagi hasil pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang sumber dana pembiayaan berasal dari Bank Kalsel (diluar fasilitas kredit existing dari perbankan dan Lembaga Keuangan yang ada tercatat pada neraca) dengan kolektabilits lancar dengan nilai tagih minimal outstanding kredit yang diberikan oleh Bank Kalsel/ a *Principal Collateral In the form of rights to collect all profi-sharing investment financing for Partners (PPU) whose sources of financing funds come from Bank Kalsel (excluding existing credit facilities from the banks and financial instutions that are listed on the balance sheet) with current collectibility and a minimum outstanding credit value that are provided by Bank Kalsel* (Catatan *51*/ *Notes 51*)

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
						b. Agunan Tambahan Berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya (kantor operasional perusahaan) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 13 tanggal 14 September 1992 (berakhir haknya tanggal 9 Oktober 2021) saat ini tercatat atas nama Perseroan Terbatas Sarana Kalsel Ventura berkedudukan di Jalan Pramuka No. 4 RT. 07 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan *b. Additional Collateral* *In the form of 1 (one) plot of land and building on it (company operational office) in accordance with the Building Use Rights Certificate (SHGB) No. 13 dated 14 September 1992 (rights ended on 9 October 2021) currently registered in the name of the PT. Sarana Kalsel Ventura who is based in Banjarmasin which is located at Jalan Pramuka No. 04 RT. 07 Pemurus Outer Village, East Banjarmasin District, Banjarmasin City, South Kalimantan Province* (Catatan 16/*Note 16*)
	Kredit modal kerja/*Revolving credit* - Pinjaman rekening koran/*Overdraft loan*	20,000 (Fasilitas III/ *Facillity III*)	6,609	56 bulan/ *months* Februari/ Maret 2024 - Oktober/ *March* 2029	11.00%	Berupa piutang pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang sumber dana pembiayaan berasal dari Bank Kalsel, piutang pembiayaan diikat secara fiducia dengan nominal sebesar 125% dari plafond kredit/ Represents financing *receivables from Business Partner Companies (PPU) , for which the financing funds are sourced from Bank Kalses. The financing receivables are secured by fiduciary collateral amounting to 125% of the credit facilitiy limit.*
	Kredit modal kerja/*Revolving credit* - Pinjaman rekening koran/*Overdraft loan*	20,000 (Fasilitas IV/ Facillity IV)	11,619	56 bulan/ *months* Februari/ Maret 2024 - Oktober/ *March* 2029	11.00%	Berupa piutang pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang sumber dana pembiayaan berasal dari Bank Kalsel, piutang pembiayaan diikat secara fiducia dengan nominal sebesar 125% dari plafond kredit/ Represents financing *receivables from Business Partner Companies (PPU) , for which the financing funds are sourced from Bank Kalses. The financing receivables are secured by fiduciary collateral amounting to 125% of the credit facilitiy limit.*
PT Sarana Sulsel Ventura						
PT Bank Sulselbar	Penyaluran Dana Pembiayaan Usaha Produktif dan UMKM kepada Calon Pasangan Usaha (CPU)/Pasangan Usaha (PU)/*Disbursement of Financing for Productive Business and SMEs to Prospective Business Partner (CPU)/Business Partner (PU)*	10,000	4,796	36 bulan/ *months* 30 Oktober/ *October* 2023 - 30 Oktober/ *October* 2026	10.00%	a. Fidusia atas piutang dengan kondisi lancar/ *Fiduciary over receivables in good standing* b. SHGB Nomor 20646 atas sebidang tanah seluas 103 m2 yang tertulis atas nama PT Sarana Sulsel Ventura/ *SHGB Number 20646 for a plot of land measuring 103 m2 registered under the name of PT Sarana Sulsel Ventura* (Catatan 8 dan 16/*Notes 8 and16*)

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
PT Sarana Kalteng Ventura						
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	13,500	9,962	36 bulan/ *months* 31 Juli/*July* 2023 - 31 Juli/ *July 2026*	10.00%	1. Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4047 an PT Sarana Kalteng Ventura/ *Land and Buildings: Right to Build Certificate (Hak Guna Bangunan - HGB) No. 4047 in the name of PT Sarana Kalteng Ventura* 2. Hak tagih atas piutang usaha : Berupa piutang pembiayaan perusahaan Pasangan Usaha PPU atau Pasangan Usaha/ *Right to claim on business receivables: In the form of company financing receivableson Business Partner PPU or Business Partner*
	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	40		36 bulan/ *months* 17 Januari/ *January* 2023 - 17 Januari/ *January* 2026	10.00%	Agunan pokok/ *Principal Collateral:* Piutang hasil usaha tambahan modal kerja di bidang Usaha Modal Ventura/ *Receivables from additional working capital for the Venture Capital* Agunan tambahan/ *Additional Collateral*
	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	16,000		36 bulan/ *months* 10 September/ *September* 2024 - 10 September/ *September* 2027	10.00%	Piutang pemberian kredit PT Sarana Kalteng Ventura/ *Receivables from credit provided to PT Sarana Kalteng Ventura* (Catatan 8 dan 16/*Notes 8 and 16*)
PT Sarana Kalbar Ventura						
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas kredit investasi/*Investment credit facility* Fasilitas kredit lokal (rekening koran)/*Local credit facility (current account)*	1,900	1,621	60 bulan/ *months* 19 Desember/ *December* 2023 - 19 Desember/ *December* 2028 (Kredit Investasi), 19 Desember/ *December* 2023 - 19 Desember/ December 2028 (Kredit Lokal)	7.23%	Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2027/Parit Tokaya/ *Land with Building Hak Guna Bangunan Number 2027/Parit Tokaya* (Catatan 8/*Note 8*)
PT Sarana Sumbar Ventura						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*Refinancing*	2,000	1,750	24 bulan/ *months* 10 September / *September* 2025 - 10 September/ *September* 2027	11,5%	Tanah SHGB No. 8621 dan Bangunan IMB No. 0224/P-0-051/IMB/KS/LT.2/PU.07/2012 Land with leasehold title *(SHGB) No. 8621 and Building with Building Permit (IMB) No. 0224/P-0-051/IMB/KS/LT.2/PU.07/2012* (Catatan 8/*Note 8*)

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
PT Sarana Kaltim Ventura						
PT Bank KB Bukopin Syariah	Musyarakah/ Musyarakah *Financing*	2,500	2,500	24 bulan/ *months* 22 Desember/ *December 2025 - 22 December 2027*	21.91% dari pendapatan untuk nasabah/ *of the income for the customer* 78.09% dari pendapatan untuk Bank/ *of the income for the Bank*	1. Mengembalikan seluruh jumlah dana/modal yang disediakan oleh bank berikut bagian keuntungan yang menjadi pendapatan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada repayment schedule yang dilekatkan pada dan karenanya yang menyangkut nasabah maupun usahanya/*To return the entire amount of funds/capital provided by the bank, along with the proportion of the profit that constitutes the bank's income, in accordance with the ratio at the time of maturity as stipulated in the repayment schedule attached, and consequently affecting both the customer and their business.*
PT Bank KB Bukopin Syariah	Musyarakah/ Musyarakah *Financing*					2. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening nasabah di bank/*To make payments for all third-party bills through the customer's account at the bank.* 3. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban pinjaman terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan bank berdasarkan akad/ *To release all the customer's assets from any loan obligation to other parties, except for guarantees in favor of the bank based on agreement.* 4. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas seluruh data/modal secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri/ *To manage and maintain the books of all data/capital honestly and correctly with good faith in separate accounting records.*

Kreditur/ *Lender*	Fasilitas/ *Facility*	Jumlah fasilitas/ *Total facility*	Saldo sisa pokok pinjaman/ *Outstanding principal loan balance*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Guarantee*
						5. Menyerahkan kepada bank perhitungan usaha yang difasilitasi pembiayaan musyarakahnya/ *To submit to the bank the business calculations facilitated by its musyarakah financing.* 6. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau setidak-tidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan persetujuan bank/ *To run the business in accordance with the provisions or, at the very last, not deviating or contradicting the principles of sharia as per bank's agreement.*
PT Sarana Yogya Ventura						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	KMK untuk Jasa Dunia Usaha & Jasa Sosial/ *Working Capital Loan for Business and Social Service*	3,735	3,500	12 bulan/ *months* 31 October/ *October* 2024 - 31 October/ *October* 2025	4.05%	Deposito BRI atas nama Sarana Yogya Ventura dengan total nominal 3.735.000.000/ *BRI deposits under the name Sarana Yogya Ventura with a total nominal amount Rp3,735,000,000* (Catatan 51/*Note 51*)
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	Non UMKM/ Rekening Koran/ Komersial/ *Non UMKM/ Current Account/ Commercial*	14,000	4,000	24 bulan/ *months* 20 Maret/ *March* 2024 - 20 Maret/ *March* 2026	10.00%	Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00192/ Kotabaru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-08-1997 segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut tanpa kecuali sedikitpun juga/ *A plot of yard land with Building Use Rights Certificate Number 00192/ Kotabaru, as described in the Measurement Letter dated 28-08-1997, including everything planted and built on the land without any exceptions.* (Catatan 16/*Note 16*)

Seluruh pinjaman yang diperoleh diperuntukkan untuk mendanai modal kerja Grup.

All borrowings are intended to finance the working capital of the Group.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman bank.

At each reporting date, the Group has complied with all covenants of its bank loans.

28. *Medium Term Notes* (MTN) / *28. Medium Term Notes (MTN)*

	2025 Rp	2024 Rp	
MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2022	950,000	1,100,000	*MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2022*
MTN Lainnya	16,782	16,162	*Other MTN*
	966,782	**1,116,162**	

Berdasarkan pihak / *By parties*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak berelasi	550,000	750,000	*Related parties*
Pihak ketiga	416,782	366,162	*Third parties*
	966,782	**1,116,162**	

Rekonsiliasi atas penempatan MTN adalah sebagai berikut: / *The reconciliation of MTN placement is as follows:*

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	1,116,162	1,065,416	*Beginning balance*
Dampak perubahan nilai tukar mata uang asing	620	746	*Effect of changes in foreign exchanges rate*
Pelepasan ke pihak ketiga	--	50,000	*Dispose to third party*
Pembelian kembali oleh entitas anak	(150,000)	--	*Repurchase by a subsidiary*
Saldo akhir	**966,782**	**1,116,162**	**Ending balance**

Medium Term Notes I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2022 / *Medium Term Notes I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) year 2022*

Pada tanggal 26 Oktober 2022, dalam rangka pelunasan fasilitas *bridging loan* berdasarkan Akta Perjanjian Sindikasi No. 8 tanggal 20 Desember 2021, Grup menerbitkan *Medium Term Notes* yang diberi nama *Medium Term Notes* I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2022 ("MTN") dengan pokok sebesar Rp2.000.000 dengan jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal penerbitan dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun. Bunga MTN akan dibayarkan oleh Perseroan setiap tiga bulan. Pokok MTN wajib dilunasi Perseroan pada tanggal 2 November 2027. Perseroan menerima pencairan atas penerbitan MTN pada tanggal 2 November 2022.

On October 26, 2022, to repay the bridging loan facility based on Syndicated Notarial Deed Agreement No. 8 dated on December 20, 2021, the Group issued Medium Term Notes named Medium Term Notes I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) year 2022 ("MTN") with principal amount of Rp2,000,000, with a period of five years starting from the date of issuance and with a fixed interest rate of 9% per annum. The MTN interest will be paid by the Company every three months. The MTN principal must be repaid by the Company on November 2, 2027. The Company received proceeds from the issuance of the MTN on November 2, 2022.

Pada tahun 2025, terdapat MTN yang dibeli kembali oleh IFG Life dari pihak ketiga sebesar Rp150,000.

In 2025, there were MTN purchased by IFG Life from a third party amounting to Rp150,000.

Di tahun 2024, MTN yang dimiliki oleh Nasre sebesar Rp50.000 dilepas kepada pihak ketiga.

In 2024, MTN owned by Nasre amounted to Rp50,000 have been disposed to a third party.

29. Liabilitas Imbalan Kerja / *29. Employee Benefit Liabilities*

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: / *The employee benefit liabilities consist of:*

	2025 Rp	2024 Rp	
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	882,269	879,599	*Pension and other post-employment benefits*
Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan	--	203,001	*Pension health facilities benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	250,773	204,286	*Other long-term employee benefits*
	1,133,042	**1,286,886**	

Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Steven & Mourits ("S&M") dan KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*", sedangkan untuk entitas anak, liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung oleh aktuaris independen KKA Riana dan Rekan (sebelumnya bernama PT Padma Radya Aktuaria), KKA Steven & Mourits (sebelumnya bernama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, dan KKA I Gde Eka Sarmaja, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

The Company's employee benefit liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Steven & Mourits ("S&M") and KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan using the "Projected Unit Credit" method, whilst for subsidiaries, the liability for employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 are calculated by an independent actuary, KKA Riana dan Rekan (formerly known as PT Padma Radya Aktuaria), KKA Steven & Mourits (formerly known as PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, and KKA I Gde Eka Sarmaja, using the "Projected Unit Credit" method.

Berdasarkan laporan aktuaris independen untuk Perseroan dan entitas anak, asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

Based on the independent actuary report for the Company and subsidiaries, the actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2025	2024	
Usia pensiun normal	55-56 tahun/ *years*	55-56 tahun/ *years*	*Normal retirement age*
Tingkat kenaikan gaji	4.00%-8.50%	4.00%-8.50%	*Salary incremental rate*
Tingkat diskonto	5.96%-7.06%	6.88% - 7.25%	*Discount rate*
Tingkat inflasi biaya kesehatan	0.00%-11.00%	0.00%-11.00%	*Health cost inflation rate*
Tingkat inflasi emas	7% - 8%	7% - 8%	*Gold inflation rate*
Tingkat imbal hasil	6.00% - 6.20%	4.39% - 6.20%	*Yield rate*
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat tetap	1,00% - 10,00% dari tingkat kematian/ *1.00% - 10.00% of mortality rate*	1,00% - 10,00% dari tingkat kematian/ *1.00% - 10.00% of mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	1.00%-1.00%	1.00%-1.00%	*Resignation rate*
Tingkat pengembalian investasi DPLK	0.00%-6.00%	0.00%-4.39%	*Return on investment of DPLK*

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset program Grup dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa IFG, Dana Pensiun Jasa Raharja, Dana Pensiun Jasindo, Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI ("DPLK BRI"), dan PT BNI Life Insurance.

As of December 31, 2025, the Group's plan assets are managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa IFG, Dana Pensiun Jasa Raharja, Dana Pensiun Jasindo, Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI ("DPLK BRI"), and PT BNI Life Insurance.

Pada akhir tahun 2022, perjanjian kerjasama dengan AJB Bumiputera sebagai penyelenggara Program Masa Pensiun (MP) dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) telah berakhir dan Perusahaan tidak melanjutkan program serta kerjasama tersebut. Sampai dengan berakhirnya periode kerjasama pada 30 September 2022 dan sampai dengan periode pelaporan laporan keuangan 31 Desember 2024, belum ada pengembalian dana iuran dari AJB Bumiputera kepada Perusahaan. Sejak Oktober 2023, Perusahaan mendaftarkan seluruh pegawainya yang sebelumnya terdaftar pada program pensiun AJB Bumiputera pindah ke program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI) dengan menggunakan skema iuran yang sama dengan iuran kepada Bumiputera. Atas perubahan bentuk program tersebut, Perusahaan telah menginformasikan kepada seluruh pegawai terdaftar mengenai dampak atas perubahan program yang diputuskan oleh Perusahaan. Keputusan untuk melakukan perubahan ini menjadi suatu kepastian kepada seluruh pegawai terdaftar atas program pensiunnya di kemudian hari. Atas perubahan program tersebut, Perusahaan melakukan penyesuaian pada biaya jasa lalu.

At the end of 2022, the cooperation agreement with AJB Bumiputera as the organiser of Masa Pensiun (MP) Program and Tunjangan Hari Tua (THT) Program has ended and the Company will not continue the cooperation. Until the end of the cooperation agreement as at September 30, 2022 and until the date of financial statements as of December 31 2024, there has been no contributions refund from AJB Bumiputera to the Company. Since October 2023, the Company registered all the employee which previously registered in the pension program of AJB Bumiputera moving to the pension program managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI) using the same contribution scheme with the contribution to Bumiputera. Due to the change in the form of the program, the Company has informed all the registered employee regarding the impact of the program changes which decided by the Company. The decision to make this changes is a guarantee to all the registered employee on their pension program in the future. Due to the program changes, the Company made adjustments to past service costs.

a. Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

a. Pension and other post-employment benefits

The pension and other post-employment benefits recognised in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai kini kewajiban	2,749,247	2,613,089	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset program	(1,866,978)	(1,733,490)	*Fair value of plan assets*
	882,269	**879,599**	

Mutasi imbalan pensiun dan pascakerja lainnya bersih adalah sebagai berikut:

The movement of net pension and other postemployment benefits is as follows:

	2025			
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation* Rp	**Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets* Rp**	**Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya/ *Pension and other post-employment benefit liabilities* Rp**	
Saldo awal	2,613,089	(1,733,490)	879,599	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	124,701	--	124,701	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(15,792)	(5,915)	(21,707)	*Past service cost*
Beban/ (penghasilan) bunga	206,563	(178,870)	27,693	*Interest expense/ (income)*
Pengukuran kembali:				*Remeasurement:*
- Perubahan asumsi demografi	(4,496)	--	(4,496)	*Change in - demographic assumption*
- Perubahan asumsi keuangan	127,536	--	127,536	*Change in financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(134,824)	--	(134,824)	*Experience adjustment - on obligation*
Mutasi transder in/out kewajiban	1,258		1,258	*Liability transfer in/out mutation*
Iuran yang dibayar	--	(106,549)	(106,549)	*Contribution paid*
Imbalan yang dibayar	(168,788)	116,255	(52,533)	*Benefit paid*
	2,749,247	**(1,908,569)**	**840,678**	
Dampak atas penerapan batas atas aset	--	41,591	41,591	*Impact on the application of asset ceiling*
Saldo akhir	**2,749,247**	**(1,866,978)**	**882,269**	***Ending balance***

	2024			
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation* Rp	**Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets* Rp**	**Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya/ *Pension and other post-employment benefit liabilities* Rp**	
Saldo awal	2,565,592	(1,634,713)	930,879	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	147,147	--	147,147	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(13,742)	--	(13,742)	*Past service cost*
Beban/ (penghasilan) bunga	188,608	--	188,608	*Interest expense/ (income)*
Pengukuran kembali:				*Remeasurement:*
- Imbal hasil atas aset program	--	(107,719)	(107,719)	*Return on plan assets - Change in -*
- Perubahan asumsi demografi	(8,273)	--	(8,273)	*demographic assumption*
- Perubahan asumsi keuangan	(79,631)	--	(79,631)	*Change in financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(25,601)	--	(25,601)	*Experience adjustment - on obligation*
Iuran yang dibayar	--	(106,345)	(106,345)	*Contribution paid*
Imbalan yang dibayar	(161,011)	115,025	(45,986)	*Benefit paid*
	2,613,089	**(1,733,752)**	**879,337**	
Dampak atas penerapan batas atas aset	--	262	262	*Impact on the application of asset ceiling*
Saldo akhir	**2,613,089**	**(1,733,490)**	**879,599**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated profit or loss are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya jasa kini	124,701	147,147	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(21,707)	(13,742)	*Past service cost*
Beban bunga	27,693	60,142	*Interest expense*
	130,687	**193,547**	

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated other comprehensive income are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Imbal hasil atas aset program	41,591	21,009	*Return on plan assets*
Perubahan asumsi demografi	(4,496)	(8,273)	*Change in demographic assumption*
Perubahan asumsi keuangan	127,536	(79,631)	*Change in financial assumption*
Penyesuaian pengalaman kewajiban	(134,824)	(25,601)	*Experience adjustment on obligation*
	29,807	**(92,496)**	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 13,96 tahun (2024: 11,39 tahun).

The weighted average duration of the pension and other post-employment benefit liabilities as of December 31, 2025, is 13.96 years (2024: 11.39 years).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun dan pascakerja lainnya yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension and other post-employment benefit is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Dalam 1 tahun	156,565	167,254	*Within 1 year*
Antara 1 sampai 5 tahun	589,484	598,428	*Between 1 and 5 years*
Antara 5 sampai 10 tahun	1,310,752	458,037	*Between 5 and 10 years*
Lebih dari 10 tahun	15,753,569	9,254,816	*More than 10 years*
	17,810,370	**10,478,535**	

Sensitivitas liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the pension and other post-retirement benefits liabilities to changes in the key actuarial assumptions is as follows:

	2025			
		Dampak perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasti/ *Impact on changes of present value of defined benefits liabilities*		
Asumsi aktuaria	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption* Rp**	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption* Rp**	***Actuarial assumption***
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(632,464)	807,930	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	818,076	(729,686)	*Salary incremental rate*

2024				
		Dampak perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasti/ *Impact on changes of present value of defined benefits liabilities*		
Asumsi aktuaria	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption* Rp**	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption* Rp**	***Actuarial assumption***
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(89,930)	267,293	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	100,427	(179,795)	*Salary incremental rate*

b. Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan

Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

b. Pension health facilities benefits

The pension health facilities benefits recognised in the consolidated statement of financial position is as follows:

2025 Rp	**2024 Rp**	
--	209,756	*Present value of obligation*
--	(6,755)	*Fair value of plan assets*
--	**203,001**	

Mutasi imbalan fasilitas kesehatan pensiunan bersih adalah sebagai berikut:

The movement of net pension health facilities benefits is as follows:

2025				
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation* Rp	**Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets* Rp**	**Liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan/ *Pension health facilities benefit liabilities* Rp**	
Saldo awal	209,756	(6,755)	203,001	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	7,305	--	7,305	*Current service cost*
Biaya/ (pendapatan) jasa lalu	(223,175)	--	(223,175)	*Past service cost*
Beban/ (pendapatan) bunga	6,387	(515)	5,872	*Interest expense/ (income)*
Pengukuran kembali:				*Remeasurement:*
- Perubahan asumsi demografi	2,626	--	2,626	*Change in demographic - assumption*
- Pengukuran kembali imbal hasil aset program	--	160	160	*Remeasurement of the - return on plan assets*
Imbalan yang dibayar	(2,899)	2,773	(126)	*Benefit paid*
	--	**(4,337)**	**(4,337)**	
Dampak atas penerapan batas atas aset	--	4,337	4,337	*Impact on the application of asset ceiling*
Saldo akhir	**--**	**--**	**--**	***Ending balance***

	2024			
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation* **Rp**	**Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*** **Rp**	**Liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan/ *Pension health facilities benefit liabilities*** **Rp**	
Saldo awal	320,522	(13,190)	307,332	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	19,040	--	19,040	*Current service cost*
Biaya/ (pendapatan) jasa lalu	(108,356)	--	(108,356)	*Past service cost*
Beban/ (pendapatan) bunga	15,038	(1,016)	14,022	*Interest expense/ (income)*
Pengukuran kembali:				*Remeasurement:*
- Perubahan asumsi demografi	(387)	--	(387)	*Change in demographic - assumption*
- Perubahan asumsi keuangan	(28,181)	--	(28,181)	*Change in - financial assumption*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	--	--	--	*Experience adjustment - on obligation*
- Pengukuran kembali imbal hasil aset program	--	275	275	*Remeasurement of the - return on plan assets*
Imbalan yang dibayar	(7,920)	6,535	(1,385)	*Benefit paid*
	209,756	**(7,396)**	**202,360**	
Dampak atas penerapan batas atas aset	--	641	641	*Impact on the application of asset ceiling*
Saldo akhir	**209,756**	**(6,755)**	**203,001**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated profit or loss are as follows:

	2025 **Rp**	**2024** **Rp**	
Biaya jasa kini	7,305	19,040	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(223,175)	(108,356)	*Past service cost*
Beban bunga	6,020	14,022	*Interest expense*
	(209,850)	**(75,294)**	

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated other comprehensive income are as follows:

	2025 **Rp**	**2024** **Rp**	
Imbal hasil aset program	4,498	275	*Return on plan assets*
Perubahan asumsi demografi	2,626	(387)	*Change in demographic assumption*
Perubahan asumsi keuangan	--	(5,081)	*Change in financial assumption*
Penyesuaian pengalaman kewajiban	160	(23,100)	*Experience adjustment on obligation*
	7,284	**(28,293)**	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 10,43 tahun (2024: 38,47 tahun).

The weighted average duration of the pension health facilities benefits liability as of December 31, 2025 is 10.43 years (2024: 38.47 years).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan fasilitas kesehatan pensiunan yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension health facilities benefits is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Dalam 1 tahun	--	5,043	*Within 1 year*
Antara 1 sampai 5 tahun	--	11,689	*Between 1 and 5 years*
Antara 5 sampai 10 tahun	--	14,672	*Between 5 and 10 years*
Lebih dari 10 tahun	--	446,718	*More than 10 years*
	--	**478,122**	

Sensitivitas liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the pension health facilities benefit liabilities to changes in the key actuarial assumptions is as follows:

Asumsi aktuaria	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Dampak perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasti/ *Impact on changes of present value of defined benefits liabilities*		*Actuarial assumption*
		Kenaikan/ *Increase* Rp	Penurunan/ *Decrease* Rp	
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(632,464)	807,930	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	818,076	(729,686)	*Salary growth rate*

2024

Asumsi aktuaria	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Dampak perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasti/ *Impact on changes of present value of defined benefits liabilities*		*Actuarial assumption*
		Kenaikan/ *Increase* Rp	Penurunan/ *Decrease* Rp	
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(89,930)	267,293	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	100,427	(179,795)	*Salary growth rate*

c. Imbalan jangka panjang lainnya

Mutasi imbalan jangka panjang lainnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

c. Other long-term employee benefits

The movement of other long-term employee benefits in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	204,286	221,403	*Beginning balance*
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	68,779	21,136	*Amount charged to profit or loss*
Imbalan yang dibayar	(22,292)	(38,253)	*Benefit paid*
Saldo akhir	**250,773**	**204,286**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated profit or loss are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya jasa kini	35,348	34,746	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	17,588	(4,141)	*Past service cost*
Beban bunga	14,622	12,042	*Interest expense*
Pengukuran kembali yang diakui selama tahun berjalan	1,221	(21,511)	*Remeasurement recognised during the year*
	68,779	**21,136**	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 10,43 tahun (2024: 6,03 – 18,71 tahun).

The weighted average duration of the other long-term employee benefits liability as of December 31, 2025, is 10.43 years (2024: 6.03 – 18.71 years).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefits liabilities is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Dalam 1 tahun	39,325	52,815	*Within 1 year*
Antara 1 sampai 5 tahun	135,412	154,403	*Between 1 and 5 years*
Antara 5 sampai 10 tahun	271,140	172,354	*Between 5 and 10 years*
Lebih dari 10 tahun	355,438	1,217,869	*More than 10 years*
	801,315	**1,597,440**	

30. Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor / *30. Share Capital and Additional Paid-In Capital*

a. Modal saham / *a. Share capital*

Modal saham Perseroan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's share capital as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2025			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Nilai/ *Amount* Rp	
PT Danantara Asset Management (Persero)				**PT Danantara Asset Management (Persero)**
Saham Seri B	93,719,536	99.999999%	93,719,536	*Series B share*
Pemerintah Republik Indonesia				***Government of the Republic of Indonesia***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.000001%	1	*Series A Dwiwarna share*
	93,719,537	**100.000000%**	**93,719,537**	

	2024			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Nilai/ *Amount* Rp	
Pemerintah Republik Indonesia				***Government of the Republic of Indonesia***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.000001%	1	*Series A Dwiwarna Share*
Saham Seri B	93,719,536	99.999999%	93,719,536	*Series B Share*
	93,719,537	**100.000000%**	**93,719,537**	

Pada bulan Maret 2025, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2025 (”PP No. 15/2025”) yang merupakan peraturan pelaksana atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara. PP No. 15/2025 mengatur penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management (Persero) (sebelumnya PT Biro Klasifikasi Indonesia) dalam rangka pendirian Holding Operasional dengan mengalihkan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada Badan Usaha Milik Negara, termasuk sebanyak 93.719.536 lembar saham Seri B pada Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp1 per lembar saham dengan nilai total Rp93.719.536.

In March 2025, the Government issued Government Regulation No. 15 of 2025 (“PP No. 15/2025”), which serves as the implementing regulation of Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2023 on State-Owned Enterprises. PP No. 15/2025 regulates the additional state capital participation in the share capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management (Persero) (previously PT Biro Klasifikasi Indonesia) as part of the establishment of an Operational Holding by transferring all Series B and/or Series C shares owned by the Republic of Indonesia in State-Owned Enterprises, including 93,719,536 Series B shares in the Company with a nominal value of Rp1 per share, amounting to a total value of Rp93,719,536.

b. Tambahan modal disetor / ***b. Additional paid-in capital***

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal	(61,894,608)	(59,887,919)	*Beginning balance*
Transfer portofolio dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	(33,120)	(1,148,973)	*Transfer of portfolio from PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
Nilai kini utang restrukturisasi	(13,528)	(12,739)	*of debt restructing*
Akuisisi Inhealth oleh IFG Life	--	(844,977)	*Inhealth acquisition by IFG Life*
Saldo awal	**(61,941,256)**	**(61,894,608)**	***Ending balance***

Transfer portofolio dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG, pada tahun 2024 menerima pengalihan liabilitas sebesar Rp3.218.921 dan aset-aset sebesar Rp1.885.312 yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari rencana penyelamatan polis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan (“RPK”) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Transfer of portfolio from PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
The subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, in 2024 received the transfer of liabilities amounting to Rp3,218,921 and assets amounting to Rp1,885,312 owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as part of the policy rescue plan contained in the Financial Restructuring Plan (“RPK”) of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG, pada tahun 2023 menerima pengalihan liabilitas sebesar Rp4.353.139 dan aset-aset sebesar Rp875.322 yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari rencana penyelamatan polis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

The subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, in 2023 received the transfer of liabilities amounting to Rp4,354,139 and assets amounting to Rp875,322 owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as part of the policy rescue plan contained in the Financial Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG, pada tahun 2022 menerima pengalihan liabilitas pertanggungan asuransi sebesar Rp10.152.689 dan aset-aset sebesar Rp5.198.315 yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari rencana penyelamatan polis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

The subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, in 2022 received the transfer of insurance liabilities portfolio amounting to Rp10,152,689 and assets amounting to Rp5,198,315 owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as part of the policy rescue plan contained in the Financial Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Entitas anak, PT Asuransi Jiwa IFG, pada tahun 2021 menerima pengalihan liabilitas pertanggungan asuransi sebesar Rp20.912.510 dan aset-aset finansial sebesar Rp1.487.104 yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari rencana penyelamatan polis yang tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan ("RPK") PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

The subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, received the transfer of insurance liabilities portfolio amounting to Rp20,912,510 and financial assets amounting to Rp1,487,104 owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as part of the policy rescue plan contained in the Financial Restructuring Plan ("RPK") of PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Akumulasi selisih antara aset dan liabilitas yang dialihkan yang diakui sebagai tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Accumulated difference between assets and liabilities transferred which recognised as additional paid-in capital are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	(285,142)	(285,142)	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	(4,206,581)	(4,206,581)	*Investments - net*
Piutang hasil investasi - bersih	(1,038)	(1,038)	*Investment income receivables - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	(35,435)	(35,435)	*Reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Penyertaan langsung	(138,265)	(138,265)	*Direct investment*
Properti investasi - bersih	(3,939,302)	(3,939,302)	*Investment properties - net*
Aset tetap - bersih	(810,909)	(810,909)	*Fixed assets - net*
Aset lain-lain	(29,381)	(29,381)	*Other assets*
	(9,446,053)	**(9,446,053)**	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas kontrak asuransi	38,643,636	38,638,147	*Insurance contract liabilities*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	27,742	112	*Account payables and other payables*
	38,671,378	**38,638,259**	
Selisih yang diakui di tambahan modal disetor	**29,225,325**	**29,192,206**	*Differences recognized in additional paid in capital*

Nilai kini pinjaman dari Pemerintah
Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021, Pemerintah telah menyetujui penjadwalan kembali atas utang bunga Rekening Dana Investasi ("RDI") No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 dan atas utang penerusan pinjaman ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 yang akan diangsur selama 20 tahun (2021 sampai dengan 2040) termasuk masa tenggang 2 tahun (2021 sampai dengan 2022) (Catatan 30).

Sesuai dengan PSAK 109, skema restrukturisasi ini merupakan modifikasi *substantial terms,* sehingga Grup mengakui penghapusan dari liabilitas keuangan yang dimiliki dan pengakuan atas liabilitas keuangan yang baru.

Perbedaan atas liabilitas keuangan yang baru dan liabilitas keuangan yang dihapuskan terkait restrukturisasi ini sebesar Rp547.157 dicatat sebagai beban yang belum diamortisasi atas utang dan tambahan modal disetor, serta secara bulanan akan diamortisasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Utang restrukturisasi PT Asuransi Jasa Indonesia
Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Tunggakan Kewajiban Jasindo No. PKS.036/ AJI/VIII/2022 dan No. JRB.DSG/BAC.1032/ 2022 tanggal 10 Agustus 2022 serta Addendum Pertama No. ADD.PKS.017/AJI/VIII/ 2022 dan No. JRB.DSG.BAC.1432/2022 tanggal 29 November 2022 ("Perjanjian") antara Jasindo dengan Bank Mandiri, Bank Mandiri telah menyetujui penjadwalan kembali atas kewajiban klaim, *future claims*, serta *fee-based income* untuk diangsur selama 15 tahun tanpa bunga efektif sejak 29 November 2022.

Sesuai dengan PSAK 109, skema restrukturisasi ini merupakan modifikasi *substantial terms*, sehingga Jasindo mengakui penghapusan dari liabilitas keuangan yang dimiliki dan mengakui liabilitas keuangan yang baru.

Present value of Government loans
Based on the Decision Letter of Ministry of Finance No. S-110/MK.5/2021 dated November 29, 2021, the Government has agreed to restructure interest payable on Investment Fund Account ("RDI") No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 and subsidiary loan ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 which will be installed for 20 years (2021 until 2040) including a grace period of 2 years (2021 until 2022) (Note 30).

In accordance with SFAS 109, this restructuring scheme is a substantial modification of terms, hence, the Group recognised extinguishment of the existing financial liabilities and recognition of the new financial liabilities.

The difference between the new financial liabilities and the extinguished financial liabilities due to restructuring scheme amounting to Rp547,157 was recorded as an unamortised expense of debt and additional paid-in capital and will be amortised monthly in the consolidated statement of profit or loss.

Restructuring debt of PT Asuransi Jasa Indonesia
Based on Jasindo's Liability Arrear Settlement Agreement No. PKS.036/AJI/VIII/2022 and No. JRB.DSG/BAC.1032/2022 dated August 10, 2022 and First Addendum No. ADD.PKS.017/ AJI/VIII/2022 and No. JRB.DSG.BAC.1432/ 2022 dated November 29, 2022 ("Agreement") between Jasindo and Bank Mandiri, Bank Mandiri has agreed to restructuring obligations of claims, future claims, and fee-based income for 15 years in installments without interest effective from November 29, 2022.

In accordance with SFAS 109, this restructuring scheme is a substantial modification of terms, hence, Jasindo recognised extinguishment of the existing financial liabilities and recognition of the new financial liabilities.

Perbedaan atas liabilitas keuangan yang baru dan liabilitas keuangan yang dihapuskan terkait restrukturisasi ini akan dicatat sebagai beban yang belum diamortisasi dari utang dan tambahan modal disetor, serta secara bulanan akan diamortisasi dalam laba rugi.

The differences between new financial liabilities and the extinguished financial liabilities due to restructuring scheme will be recorded as an unamortised expense of debt and additional paid-in capital, and will be amortised monthly in the profit or loss.

	2025		
	Utang klaim/ *Claim payables* Rp	**Utang komisi/ *Commissions payables* Rp**	
Nilai nominal sebelum restrukturisasi	1,161,936	54,317	*Nominal value before restructuring*
Nilai wajar setelah restrukturisasi	(715,250)	(32,173)	*Fair value after restructuring*
Tambahan modal disetor	**446,686**	**22,144**	***Additional paid-in capital***

	2024		
	Utang klaim/ *Claim payables* Rp	**Utang komisi/ *Commissions payables* Rp**	
Nilai nominal sebelum restrukturisasi	1,173,228	54,316	*Nominal value before restructuring*
Nilai wajar setelah restrukturisasi	(713,014)	(32,172)	*Fair value after restructuring*
Tambahan modal disetor	**460,214**	**22,144**	***Additional paid-in capital***

Kombinasi Bisnis IFG Life

Pada tanggal 11 Juni 2024, entitas anak PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") menandatangani akta jual beli saham dengan Perseroan, untuk membeli 100.000 saham yang mewakili 10% saham PT Asuransi Jiwa Inhealth, Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa sebesar Rp217.000. IFG Life telah membayar transaksi tersebut pada tanggal yang sama.

Pada tanggal 26 Juni 2024, IFG Life menandatangani: (1) akta jual beli saham dengan PT Kimia Farma Tbk, untuk membeli 100.000 lembar saham yang mewakili 10% saham PT Asuransi Jiwa Inhealth, dan (2) akta pengambilalihan saham dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk mengambilalih 600.000 lembar saham yang mewakili 60% kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa Inhealth. IFG Life telah membayar kedua transaksi dengan nilai total Rp1.939.000 pada tanggal yang sama. Atas hal ini, IFG Life secara resmi mengakuisisi 80% saham PT Asuransi Jiwa Inhealth, dengan tanggal efektif akuisisi 26 Juni 2024 dan dengan nilai akuisisi total Rp2.156.000.

IFG Life Business Combination

On June 11, 2024, the subsidiary PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") IFG Life signed sales and purchase agreement with the Company, to acquire 100,000 ownership shares, representing 10% shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth, the entity which engaged in insurance business, including health and personal accident insurance amounting to Rp217,000. IFG Life has paid the transaction on the same date with the date of agreement.

On June 26, 2024, IFG Life signed: (1) sales and purchase agreement with PT Kimia Farma Tbk, to acquire 100,000 shares, representing 10% shares ownership of PT Asuransi Jiwa Inhealth, and (2) acquisition shares agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, to acquire 600,000 shares which represent 60% ownership shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth. IFG Life has paid both transactions amounting to Rp1,939,000 on the same date with the date of agreements. With the above conditions, IFG Life has officially acquired 80% shares of PT Asuransi Jiwa Inhealth, with the acquisition effective date on June 26, 2024 and with total acquisition cost amounting to Rp2,156,000.

Transaksi di atas diakui sebagai kombinasi bisnis entitas sepengendali dan dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan.

This transaction recognized as business combination of entity under common control and recorded using pooling interest method.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, nilai-nilai aset dan liabilitas yang diperoleh diakui pada jumlah tercatat. Selisih antara jumlah tercatat aset dan liabilitas bersih dengan nilai pembelian saham atau penyetoran modal dicatat sebagai selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.

In applying the pooling of interest method, the values of assets and liabilities acquired were recorded at their carrying amount. The difference between the carrying amount of net assets and liabilities and the purchase price of shares or paid-up capital were recorded as the difference in value of restructuring transactions among entities under common control and presented as part of additional paid-in capital.

Aset bersih yang diterima dan nilai akuisisi pada tanggal efektif kombinasi bisnis sesuai kepemilikan adalah sebagai berikut:

The net assets received according to IFG Life's ownership and the acquisition price as of the effective date of the business combination are as follows:

	Rp	
Nilai tercatat aset bersih yang diperoleh	1,311,023	*Nominal value before restructuring*
Nilai imbalan yang dialihkan	2,156,000	*Fair value after restructuring*
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	**(844,977)**	***Additional paid-in capital***

31. Pendapatan Asuransi / *31. Insurance Revenue*

a. Pendapatan asuransi / *a. Insurance revenue*

	2025			
	Umum/ *General*	Jiwa/ *Life*	Jumlah/ *Total*	
Kontrak yang tidak diukur berdasarkan PAA				***Contracts not measured under PAA***
Jumlah terkait dengan perubahan kewajiban untuk sisa pertanggungan:				*Amounts relating to changes in liabilities for remaining coverage*
Perkiraan biaya klaim dan biaya jasa asuransi lainnya tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian	4,766,386	7,102,694	11,869,080	*Expected incurred claims and other insurance service expense excluding any amounts allocated to the loss adjustment*
Perubahan penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan untuk risiko kadaluarsa tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian	379,937	566,169	946,106	*Changes in risk adjustment for non-financial risk for risk expired excluding any amounts allocated to the loss component*
Marjin jasa kontraktual (CSM) diakui untuk layanan yang diberikan	1,383,648	2,061,861	3,445,509	*Contractual service margin recognized for the service provided*
Lain-lain	711,164	1,059,751	1,770,915	*Others*
Pemulihan arus kas akuisisi asuransi	603,266	898,965	1,502,231	*Recovery of insurance acquisition cash flows*
Kontrak yang diukur berdasarkan PAA	30,325	45,189	75,514	***Contracts measured under PAA***
Jumlah	**7,874,726**	**11,734,629**	**19,609,355**	***Total***

	2024			
	Umum/ *General*	**Jiwa/ *Life***	**Jumlah/ *Total***	
Kontrak yang tidak diukur berdasarkan PAA				***Contracts not measured under PAA***
Jumlah terkait dengan perubahan kewajiban untuk sisa pertanggungan:				*Amounts relating to changes in liabilities for remaining coverage*
Perkiraan biaya klaim dan biaya jasa asuransi lainnya tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian	5,018,941	7,756,187	12,775,128	*Expected incurred claims and other insurance service expense excluding any amounts allocated to the loss adjustment*
Perubahan penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan untuk risiko kadaluarsa tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian	447,467	691,509	1,138,976	*Changes in risk adjustment for non-financial risk for risk expired excluding any amounts allocated to the loss component*
Marjin jasa kontraktual (CSM) diakui untuk layanan yang diberikan	996,241	1,539,574	2,535,815	*Contractual service margin recognized for the service provided*
Lain-lain	596,631	922,024	1,518,655	*Others*
Pemulihan arus kas akuisisi asuransi	545,533	843,058	1,388,591	*Recovery of insurance acquisition cash flows*
Kontrak yang diukur berdasarkan PAA	27,303	42,193	69,496	***Contracts measured under PAA***
Jumlah	**7,632,116**	**11,794,545**	**19,426,661**	***Total***

b. Pengakuan yang diharapkan untuk marjin jasa kontraktual

Tabel berikut menjelaskan kapan Grup memperkirakan untuk mengakui sisa marjin jasa kontraktual dalam laba rugi setelah tanggal pelaporan untuk kontrak yang tidak diukur berdasarkan PAA.

b. Expected recognition fo the contractual service margin

The following table sets out when the Group expects to recognise the remaining contractual service margin in profit or loss after the reporting date for contracts not measured under the PAA.

	2025			
	Umum/ *General*	**Jiwa/ *Life***	**Jumlah/ *Total***	
Jumlah tahun sampai diharapkan untuk diakui				***Number of years until expected to be recognized***
Kontrak asuransi				***Insurance contract***
Kurang dari 5 tahun	(528,129)	(1,025,202)	(1,553,331)	*Less than five year*
5-10 tahun	(176,947)	(343,489)	(520,436)	*5-10 years*
10-15 tahun	(112,331)	(218,055)	(330,386)	*10-15 years*
15-20 tahun	(88,429)	(171,659)	(260,088)	*15-20 years*
Lebih dari 20 tahun	(320,592)	(622,329)	(942,921)	*More than 20 years*
Jumlah	**(1,226,428)**	**(2,380,734)**	**(3,607,162)**	***Total***
Kontrak reasuransi				***Reinsurance contract***
Kurang dari 5 tahun	285,194	28,079	313,273	*Less than one year*
5-10 tahun	95,553	9,408	104,961	*1-2 years*
10-15 tahun	60,660	5,972	66,632	*2-3 years*
15-20 tahun	47,752	4,701	52,453	*3-4 years*
Lebih dari 20 tahun	173,121	17,044	190,165	*4-5 years*
Jumlah	**662,280**	**65,204**	**727,484**	***Total***

	2024			
	Umum/ *General*	Jiwa/ *Life*	Jumlah/ *Total*	
Jumlah tahun sampai diharapkan untuk diakui				***Number of years until expected to be recognized***
Kontrak asuransi				***Insurance contract***
Kurang dari 5 tahun	(560,148)	(516,055)	(1,076,203)	*Less than five year*
5-10 tahun	(117,929)	(227,815)	(345,744)	*5-10 years*
10-15 tahun	(53,258)	(145,013)	(198,271)	*10-15 years*
15-20 tahun	(37,449)	(109,196)	(146,645)	*15-20 years*
Lebih dari 20 tahun	(228,522)	(653,272)	(881,794)	*More than 20 years*
Jumlah	**(997,306)**	**(1,651,351)**	**(2,648,657)**	***Total***
Kontrak reasuransi				***Reinsurance contract***
Kurang dari 5 tahun	318,134	19,215	337,349	*Less than one year*
5-10 tahun	66,977	8,483	75,460	*1-2 years*
10-15 tahun	30,248	5,400	35,648	*2-3 years*
15-20 tahun	21,269	4,066	25,335	*3-4 years*
Lebih dari 20 tahun	129,788	24,325	154,113	*4-5 years*
Jumlah	**566,416**	**61,489**	**627,905**	***Total***

32. Imbal Jasa Penjaminan / *32. Guarantee Fee Income*

	2025			
	Imbal jasa penjaminan/ *Guarantee fee income* **Rp**	**Premi penjaminan ulang/ *Re-guarantee premiums*** **Rp**	**Pendapatan penjaminan - bersih/ *Guarantee income - net*** **Rp**	
Kredit	11,012,486	(263,962)	10,748,524	*Credit*
Suretyship	98,949	(6,551)	92,398	*Suretyship*
	11,111,435	**(270,513)**	**10,840,922**	

	2024			
	Imbal jasa penjaminan/ *Guarantee fee income* **Rp**	**Premi penjaminan ulang/ *Re-guarantee premiums*** **Rp**	**Pendapatan penjaminan - bersih/ *Guarantee income - net*** **Rp**	
Kredit	11,493,523	(378,275)	11,115,248	*Credit*
Suretyship	106,003	(6,817)	99,186	*Suretyship*
	11,599,526	**(385,092)**	**11,214,434**	

33. Beban Klaim Penjaminan – Bruto / *33. Gross Guarantee Claim Expenses*

	2025				
	Beban klaim penjaminan bruto/ *Gross guarantee claim expenses* **Rp**	**Klaim penjaminan ulang/ *Reguarantee claims*** **Rp**	**Penurunan estimasi liabilitas klaim/ *Decrease estimated claim liabilities*** **Rp**	**Beban klaim penjaminan - bersih/ *Guarantee claim expenses - net*** **Rp**	
Kredit	9,811,876	(74,471)	(494,936)	9,242,469	*Credit*
Suretyship	14,878	(270)	(3,408)	11,200	*Suretyship*
	9,826,754	**(74,741)**	**(498,344)**	**9,253,669**	

	2024				
	Beban klaim penjaminan bruto/ *Gross guarantee claim expenses* **Rp**	**Klaim penjaminan ulang/ *Reguarantee claims*** **Rp**	**Penurunan estimasi liabilitas klaim/ *Decrease estimated claim liabilities*** **Rp**	**Beban klaim penjaminan - bersih/ *Guarantee claim expenses - net*** **Rp**	
Kredit	13,012,103	(60,723)	(1,172,976)	11,778,404	*Credit*
Suretyship	237,186	(182)	(105,581)	131,423	*Suretyship*
	13,249,289	**(60,905)**	**(1,278,557)**	**11,909,827**	

34. Pendapatan Subrogasi – Bersih / *34. Subrogation Income – Net*

	2025 **Rp**	**2024** **Rp**	
Kredit	2,917,038	3,354,894	*Credit*
Suretyship	11,305	39,093	*Suretyship*
	2,928,343	**3,393,987**	

35. Beban Akuisisi dan Komisi Penjaminan – Bersih / *35. Acquisition Cost and Guarantee Commission Expenses – Net*

	2025			
	Beban Akuisisi dan Komisi Penjaminan/ *Acquisition cost and guarantee commission expenses* **Rp**	**Pendapatan Komisi/ *Commission income*** **Rp**	**Beban Akuisisi dan Komisi - Bersih/ *Acquisition cost and guarantee commission expenses - Net*** **Rp**	
Kredit	411,962	(67,044)	344,918	*Credit*
Suretyship	543	(181,675)	(181,132)	*Suretyship*
	412,505	**(248,719)**	**163,786**	

	2024			
	Beban Akuisisi dan Komisi Penjaminan / *Acquisition cost and guarantee commission expenses* **Rp**	**Pendapatan Komisi / *Commission income*** **Rp**	**Beban Akuisisi dan Komisi - Bersih / *Acquisition cost and guarantee commission expenses - Net*** **Rp**	
Kredit	370,716	(188,782)	181,934	*Credit*
Suretyship	535	(152,544)	(152,009)	*Suretyship*
	371,251	**(341,326)**	**29,925**	

36. Hasil Investasi – Bersih / *36. Investment Income – Net*

	2025 Rp	2024 Rp	
Obligasi, sukuk dan Medium *Term Notes*	4,131,441	3,647,556	*Bonds, sukuk and Medium Term Notes*
Reksadana	1,278,570	573,276	*Mutual funds*
Deposito berjangka	894,062	1,159,995	*Time deposits*
Saham	443,709	77,480	*Shares*
Efek beragun aset	172	128	*Asset-backed securities*
Lainnya	87,584	277,425	*Others*
Jumlah	**6,835,538**	**5,735,860**	***Total***

37. Pendapatan (Beban) Keuangan / *37. Finance Income (Expenses)*

	2025 Umum/ *General*	2025 Jiwa/ *Life*	2025 Jumlah/ *Total*	
Pendapatan (Beban) Keuangan Bersih dari Kontrak Asuransi				***Net Finance Income (Expense) from Insurance Contracts***
Bunga bertambah	(845,563)	(1,458,489)	(2,304,052)	*Interest accreted*
Pengaruh perubahan suku bunga dan asumsi keuangan lainnya	-	83	83	*Effect of changes in interest rates and other financial assumptions*
Kerugian selisih kurs bersih	(310,713)	(406,549)	(717,262)	*Net foreign exchange loss*
Diakui dalam laba rugi	**(1,156,276)**	**(1,864,955)**	**(3,021,231)**	***Recognized in profit or loss***
Pengaruh perubahan suku bunga dan asumsi keuangan lainnya	(296,561)	(562,661)	(859,222)	*Effect of changes in interest rates and other financial assumptions*
Kerugian selisih kurs bersih	2,020	3	2,023	*Net foreign exchange loss*
Diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya	**(294,541)**	**(562,658)**	**(857,199)**	***Recognized in other comprehensive income***

	2024 Umum/ *General*	2024 Jiwa/ *Life*	2024 Jumlah/ *Total*	
Pendapatan (Beban) Keuangan Bersih dari Kontrak Asuransi				***Net Finance Income (Expense) from Insurance Contracts***
Bunga bertambah	(1,272,054)	(1,864,031)	(3,136,085)	*Interest accreted*
Pengaruh perubahan suku bunga dan asumsi keuangan lainnya	-	4,239	4,239	*Effect of changes in interest rates and other financial assumptions*
Kerugian selisih kurs bersih	(337,027)	(408)	(337,435)	*Net foreign exchange loss*
Diakui dalam laba rugi	**(1,609,081)**	**(1,860,200)**	**(3,469,281)**	***Recognized in profit or loss***
Pengaruh perubahan suku bunga dan asumsi keuangan lainnya	22,058	206,472	228,530	*Effect of changes in interest rates and other financial assumptions*
Kerugian selisih kurs bersih	4,797	2	4,799	*Net foreign exchange loss*
Diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya	**26,855**	**206,474**	**233,329**	***Recognized in other comprehensive income***

	2025 Umum/ *General*	2025 Jiwa/ *Life*	2025 Jumlah/ *Total*	
Pendapatan (Beban) Keuangan Reasuransi				***Reinsurance Finance Income (Expense)***
Bunga bertambah	369,411	16,397	385,808	*Interest accreted*
Lainnya	225,043	(234)	224,809	*Others*
Diakui dalam laba rugi	**594,454**	**16,163**	**610,617**	***Recognized in profit or loss***
Bunga bertambah	-	-	-	*Interest accreted*
Lainnya	49,752	566	50,318	*Others*
Diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya	**49,752**	**566**	**50,318**	***Recognized in other comprehensive income***

	2024			
	Umum/ *General*	Jiwa/ *Life*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan (Beban) Keuangan Reasuransi				***Reinsurance Finance Income (Expense)***
Bunga bertambah	503,205	(5,400)	497,805	*Interest accreted*
Lainnya	264,225	(9)	264,216	*Others*
Diakui dalam laba rugi	**767,430**	**(5,409)**	**762,021**	***Recognized in profit or loss***
Bunga bertambah	-	-	-	*Interest accreted*
Lainnya	(71,016)	825	(70,191)	*Others*
Diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya	**(71,016)**	**825**	**(70,191)**	***Recognized in other comprehensive income***

38. Pendapatan Jasa Manajemen Keuangan / *38. Financial Management Services Income*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pendapatan pengelolaan dana	207,107	216,859	*Fund management services income*
Pendapatan kegiatan modal ventura	115,290	128,404	*Venture capital services income*
Pendapatan kegiatan sekuritas	55,616	25,856	*Securities services income*
Pendapatan jasa penasehat keuangan	30,272	63,795	*Financial advisory services income*
Pendapatan jasa investasi	--	423	*Investment services income*
Pendapatan hasil kegiatan keuangan lainnya	2,298	2,785	*Other financial services income*
Jumlah	**410,583**	**438,122**	***Total***

39. Pendapatan Pengelolaan Gedung / *39. Building Management Income*

	2025 Rp	2024 Rp	
Sewa bangunan	78,401	63,464	*Building rental*
Jasa pengelolaan gedung	22,706	22,746	*Building management service*
Parkir	5,749	5,617	*Parking*
Rektifikasi gedung	3,397	776	*Building rectification*
Lembur	2,250	3,723	*Overtime*
Lainnya	25,120	19,639	*Others*
	137,623	**115,965**	

40. Beban Umum dan Administrasi / *40. General and Administrative Expenses*

	2025 Rp	2024 Rp	
Beban karyawan	2,234,307	2,175,173	*Employee expense*
Beban pemasaran	543,775	549,636	*Marketing expense*
Beban pajak lainnya	497,371	531,101	*Other tax expenses*
Beban penyusutan dan amortisasi	480,144	303,675	*Depreciation and amortisation*
Beban kantor	426,822	334,979	*Office expense*
Imbal jasa profesional	409,416	467,068	*Professional fee*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	369,014	774,078	*Allowance for impairment losses*
Beban pemeliharaan aset tetap	118,647	111,066	*Fixed assets maintenance expense*
Beban sewa kantor	101,476	249,054	*Office rental expense*
Beban penelitian dan pengembangan	92,490	96,451	*Research and development expense*
Beban pengelolaan data, gedung, dana dan investasi	59,103	33,022	*Data, building, fund, and investment management expense*
Beban utilitas	48,323	46,508	*Utility expense*
Beban bunga dan provisi bank	4,708	8,273	*Interest and bank provision expense*
Lainnya	383,940	257,141	*Others*
	5,769,536	**5,937,225**	

41. Beban Keuangan / *41. Finance Costs*

	2025 Rp	2024 Rp	
Bunga pinjaman bank	154,079	274,293	*Bank loans interest*
Bunga MTN	93,129	95,580	*MTN interest*
Bunga pinjaman pemerintah	36,982	35,030	*Government loans interest*
Beban keuangan lainnya	28,347	288	*Other finance costs*
	312,537	**405,191**	

Tabel di bawah ini menyajikan beban keuangan berdasarkan pihak:

The table below presents financial expenses by parties:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pihak berelasi	243,971	335,911	*Related parties*
Pihak ketiga	68,566	69,280	*Third parties*
	312,537	**405,191**	

Lihat Catatan 44 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 44 for the details of related parties balances and transactions.

42. Pendapatan Lain-Lain – Bersih / *42. Other Income – Net*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pendapatan bunga jasa giro	62,748	54,649	*Current account interest income*
Amortisasi pinjaman dari Pemerintah dan utang restrukturisasi	47,389	43,669	*Amortisation of government loans and restructuring debt*
Bunga piutang	2,418	2,383	*Interest on receivables*
Laba pelepasan aset tetap - bersih	(352)	(3,089)	*Gains on disposal of fixed asset - net*
Jasa Giro dan Deposito	(3,238)	10,292	*Current and deposit services*
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs - bersih	(31,870)	(30,940)	*(Losses)/gains on foreign exchange - net*
Kontrak asuransi stop loss	(149,272)	(30,596)	*Insurance stop loss contract*
Administrasi sertifikasi/kartu dana	--	50,297	*Administration of certificates/ fund cards*
Lainnya	101,911	137,085	*Others*
	29,734	**233,750**	

43. Dana *Tabarru'* / *43. Tabarru' Fund*

Detail informasi berkaitan dengan dana *tabarru'* pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The detailed information relating to the tabarru' fund as of December 31, 2025, and 2024 is as follows:

a. Laporan posisi keuangan / *a. Statement of financial position*

	2025 Rp	2024 Rp	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	7,294	19,851	*Cash and cash equivalent - net*
Deposito berjangka	104,222	148,501	*Time deposits*
Efek-efek	401,391	509,435	*Marketable securities*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah - bersih	76,155	135,689	*Sharia insurance and reinsurance contribution receivable - net*
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi syariah - bersih	53,698	78,949	*Sharia reinsurance and retrocession claim receivables - net*
Piutang hasil investasi	2,936	6,932	*Investment income receivables*
Aset reasuransi	257,411	170,815	*Reinsurance assets*
Aset retrosesi	50,698	47,795	*Retrocession assets*
Piutang lain-lain	678	312,260	*Other receivables*
Aset lain-lain	--	64,274	*Other assets*
Jumlah aset	**954,483**	**1,494,536**	***Total assets***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang klaim	60,943	113,423	*Claim payables*
Utang retrosesi	30,821	32,805	*Retrocession payables*
Utang lain-lain	167,013	491,353	*Other payables*
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	1,626,022	1,974,872	*Unearned contribution provisions*
Utang komisi	113	--	*Comission payables*
Estimasi liabilitas klaim	716,442	643,774	*Estimated claim liabilities*
Jumlah liabilitas	**2,601,354**	**3,256,227**	***Total liabilities***
DANA PESERTA			***PARTICIPANT FUND***
Dana *tabarru'*	(1,447,744)	(1,761,682)	*Tabarru' fund*
Jumlah liabilitas			***Total liabilities***

b. Defisit dana *tabarru'* / *b. Tabarru' fund deficit*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pendapatan			***Revenue***
Pendapatan kontribusi			***Contribution income***
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi *ujrah*	585,503	963,515	*Income from insurance operational management ujrah*
Ujrah pengelola	(122,605)	(166,276)	*Operator ujrah*
Kontribusi retrosesi	(102,150)	(199,197)	*Retrocession contribution*
(Penurunan)/ kenaikan penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	477,983	271,453	*Increase in unearned contribution provisions*
Jumlah pendapatan	**838,731**	**869,495**	***Total revenue***
Beban			***Expenses***
Klaim reasuransi bruto	731,531	942,378	*Gross reinsurance claims*
Klaim retrosesi	(89,873)	(216,155)	*Retrocession claims*
(Penurunan)/kenaikan estimasi liabilitas klaim	(119,635)	136,202	*(Decrease)/increase in estimated claim liabilities*
Jumlah beban	**522,023**	**862,425**	***Total expenses***

Pendapatan/(beban) lain-lain			***Other income/ (expenses)***
Pendapatan investasi - bersih	34,606	36,011	*Investment income - net*
(Beban)/pendapatan lain-lain	(29,799)	(4,965)	*Other (expenses)/income*
Jumlah (beban)/pendapatan lain-lain	**4,807**	**31,046**	***Total other (expense)/ income***
Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghaslilan komprehensif lain	(7,577)	652	*Unrealised gains/ (losses) on fair value through other comprehensive income marketable securities*
Bagian/ (utang) perserta atas surplus *underwriting*	--	--	*Part/ (payables) of surplus underwriting*
Surplus/ (defisit) yang tersedia untuk dana *tabarru'*	**313,938**	**38,768**	***Surplus/ (deficit) available for dana tabarru'***
Dana *tabarru'* pada awal tahun	**(1,761,682)**	**(1,800,450)**	***Tabarru' fund at the beginning of the year***
Dana *tabarru'* pada akhir tahun	**(1,447,744)**	**(1,761,682)**	***Tabarru' fund at the end of the year***

Pada tahun 2025 dan 2024, terdapat saldo negatif dana *tabarru'* yang disebabkan oleh kinerja tahun berjalan, PT Reasuransi Nasional Indonesia. Selain hal tersebut, klaim yang dibayarkan di tahun berjalan meningkat signifikan, sehingga mengakibatkan hasil *underwriting* menurun.

In 2025 and 2024, there was a negative balance of tabarru' fund caused by current years PT Reasuransi Nasional Indonesia's performance. In addition, claims paid in the current year increased significantly, resulting in a decrease in underwriting results.

Langkah-langkah strategis dilakukan manajemen dalam menanggulangi saldo negatif dana *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi melalui perbaikan syarat dan kondisi (S&K), peningkatan tarif premi, penambahan atau pengurangan klausul bisnis;
- Melakukan pengembalian dana *(refund)* kontribusi atas resiko yang belum dijalankan *(inforce)* atas bisnis jangka panjang yang memberikan hasil negatif;
- Peningkatan pengelolaan aset dan liabilitas dengan melakukan inisiatif strategis dalam manajemen aset dan liabilitas; dan
- Perbaikan pengelolaan atas piutang kontribusi sehingga dana yang diterima dapat diinvestasikan kembali.

The strategic actions taken by management to solve the negative balance of Tabarru' funds are as follows:

- *Conduct restructuring through the improvement of terms and conditions (T&C), increase on premium rates, additional or exclusion of business clauses;*
- *Refund contributions for risks that have not been carried out (inforce) on long-term businesses that have negative results;*
- *Improve asset and liability by undertaking strategic initiatives in asset and liability management; and*
- *Improve management of contribution receivables so that funds received can be reinvested.*

Sebagai tambahan, dana *tabarru'* memiliki rasio likuiditas yang menunjukkan liabilitas lancar melebihi aset lancar. Namun, PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai operator Unit Syariah dapat memberikan fasilitas pinjaman *(Qardh)* untuk memenuhi liabilitas dana *tabarru'* sesuai dengan kemampuan.

In addition, the tabarru' fund has a liquidity ratio that shows the current liabilities exceeding the current assets. However, PT Reasuransi Nasional Indonesia as the Sharia Unit's operator could provide loan facilities (Qardh) to fulfill the tabarru' fund's liabilities in accordance with its ability.

Walaupun dana *tabarru'* mengalami defisit, PT Reasuransi Nasional Indonesia tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari peserta kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas pengelola.

Despite tabarru' fund experience a deficit, PT Reasuransi Nasional Indonesia is not obligated to return the initial amount of funds from participants unless due to negligence or default of the managing entity.

44. Saldo dan Transaksi Dengan Pihak Pihak Berelasi

44. Balances and Transactions With Related Parties

a. Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Grup. Grup memiliki obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, piutang imbal jasa penjaminan, utang premi reasuransi dan retrosesi, utang penjaminan ulang, pinjaman dari Pemerintah, dan hasil investasi.

a. The Government of the Republic of Indonesia

The Government of the Republic of Indonesia is the Group's shareholder. The Group owns bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia, guarantee fee receivables, reinsurance and retrocession premium payables, re-guarantee payables, Government loans, and investment income.

b. Badan Usaha Milik Negara dan Entitas Anak

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara. Grup memiliki penempatan rekening giro, deposito, investasi, piutang imbal jasa penjaminan, piutang klaim reasuransi dan retrosesi, piutang penjaminan ulang, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, utang premi reasuransi dan retrosesi, utang penjaminan ulang, utang bank, utang restrukturasi, dan pendapatan hasil investasi pada entitas-entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki transaksi signifikan dengan Grup. Entitas-entitas tersebut adalah Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (sebelumnya bernama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama), PT Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk), PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara

b. State-Owned Enterprises and Subsidiaries

The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of State-Owned Enterprises. The Group has placement in current account, deposits, investments, guarantee fee receivables, reinsurance and retrocession claim receivables, re-guarantee receivables, insurance and reinsurance claim payables, guarantee claim payables, reinsurance and retrocession premium payables, re-guarantee payables, bank loans, restructuring debt, and investment income with entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia, which have significant transactions with The Group. These entities are Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN), Ministry of Agriculture Republic Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Perisai Listrik Nasional, PT Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Raya Indonesia Tbk (formerly known as PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and its sharia unit,

(Persero) Tbk dan unit syariahnya, PT Berdikari, PT Berdikari Insurance, PT Bio Farma (Persero), PT BNI Asset Management, PT BNI Life Insurance, BRI Asuransi Indonesia dan unit syariahnya, PT Bukit Asam Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Danareksa (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Jayawijaya Dirgantara Airlines, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Cepat Indonesia China, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Mandiri Tunas Finance, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pindad, PT PLN Indonesia Power, PT PP (Persero) Tbk, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Semen Baturaja Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. PT Taspen (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Telkom Satelit Indonesia, PT Timah (Persero) Tbk, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PNM Investment Management, Pusat Investasi Pemerintah.

PT Berdikari, PT Berdikari Insurance, PT Bio Farma (Persero), PT BNI Asset Management, PT BNI Life Insurance, PT BRI Asuransi Indonesia and its sharia unit, PT Bukit Asam Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Danareksa (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Jayawijaya Dirgantara Airlines, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Cepat Indonesia China, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Mandiri Tunas Finance, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pindad, PT PLN Indonesia Power, PT PP (Persero) Tbk, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Semen Baturaja Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Taspen (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Telkom Satelit Indonesia, PT Timah (Persero) Tbk, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PNM Investment Management, Pusat Investasi Pemerintah.

c. Manajemen kunci
Manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Key management
Key management are Board of Commissioners and Directors.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant balances and transactions with related parties are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Aset:			***Assets:***
Kas di bank			***Cash in bank***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Mandiri Taspen	1,331,526	948	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,204,571	209,378	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	984,891	474,436	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	201,897	165,503	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	179,177	833,998	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Nasional	73,830	7,443	*PT Bank Syariah Nasional*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	25,578	58,854	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	330	90	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
Bank Mandiri Europe Limited	41	--	*Bank Mandiri Europe Limited*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (Eximbank)	29	--	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (Eximbank)*
	4,001,870	**1,750,650**	
Mata uang asing			***Foreign currency***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	473,792	506,755	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	295,940	--	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	68,403	16,664	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27,072	42,054	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	174	--	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	18,695	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	4,185	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	865,381	**588,353**	
Kas di bank	**4,867,251**	**2,339,003**	***Cash in bank***
Kas pada bank - *unit link*			***Cash in banks - unit links***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,259	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	117	--	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5	--	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	1,381	**--**	
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang			***Time deposits 3 months or less***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,000,303	3,975,650	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	696,270	1,231,334	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Nasional	513,444	604,574	*PT Bank Syariah Nasional*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	448,500	2,434,896	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	233,367	1,264,143	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	165,625	265,450	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	52,000	148,000	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	35,000	1,000	*PT Bank Mandiri Taspen*
	5,144,509	**9,925,047**	
Mata uang asing			***Foreign currency***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,817	34,738	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang	**5,166,326**	**9,959,785**	***Time deposits 3 months or less***
Piutang penjaminan ulang			***Re-guarantee receivables***
PT BRI Asuransi Indonesia	5,521	6,355	*PT BRI Asuransi Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	4,682	42,413	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
	10,203	**48,768**	

	2025 Rp	2024 Rp	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,533,962	727,041	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,326,041	374,868	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	182,230	373,560	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	152,000	949,644	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Nasional	111,400	29,500	*PT Bank Syariah Nasional*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	28,690	500,350	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Deposito berjangka	**3,334,323**	**2,954,963**	***Time deposits***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	83,910	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	67,128	64,628	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	151,038	**64,628**	
Deposito berjangka	**3,485,361**	**3,019,591**	***Time deposits***
Obligasi, sukuk, dan *Medium Term Notes*			***Bonds, sukuk, and Medium Term Notes***
Biaya diperoleh diamortisasi			***Amortized cost***
Pemerintah Republik Indonesia	12,445,913	12,028,092	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	384,500	494,500	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	285,000	215,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Pegadaian	261,241	135,600	*PT Pegadaian*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	152,000	47,000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Angkasa Pura I	125,392	125,520	*PT Angkasa Pura I*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	114,398	140,997	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Bank Mandiri Taspen	112,000	20,000	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	107,865	107,865	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75,000	88,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	71,000	170,000	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Perusahaan Pengelola Aset	65,000	105,000	*PT Perusahaan Pengelola Aset*
PT Permodalan Nasional Madani	57,000	87,000	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Danareksa (Persero)	57,000	57,000	*PT Danareksa (Persero)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	53,000	100,000	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	50,000	95,000	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	50,000	50,000	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Perum Perumnas	25,000	25,000	*Perum Perumnas*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	11,238	11,278	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,574	6,979	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Pihak berelasi lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	16,757	1,073,242	*Other related parties (each under IDR 1 billion)*
	14,520,878	**15,183,073**	
Nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	660,386	600,000	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
Pemerintah Republik Indonesia	249,002	294,272	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	159,363	166,422	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	113,682	108,251	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Mandiri Tunas Finance	97,999	94,366	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	37,070	--	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	37,331	36,026	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT HK Realtindo	25,855	25,375	*PT HK Realtindo*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	19,915	--	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Angkasa Pura I	10,566	10,205	*PT Angkasa Pura I*
PT Angkasa Pura II	9,177	9,213	*PT Angkasa Pura II*
PT Permodalan Nasional Madani	3,023	42,429	*PT Permodalan Nasional Madani*
Pihak berelasi lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	--	52,685	*Other related parties (each under IDR 1 billion)*
	1,423,369	**1,439,244**	

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Pemerintah Republik Indonesia	35,215,474	37,795,785	*Pemerintah Republik Indonesia*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	301,972	332,502	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	230,450	--	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani	194,616	176,615	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	189,174	209,134	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	148,137	150,344	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	120,014	105,712	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	110,080	243,116	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50,740	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Pegadaian	50,353	--	*PT Pegadaian*
PT Angkasa Pura II	46,118	46,217	*PT Angkasa Pura II*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	30,525	29,590	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20,396	--	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	13,775	--	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	11,861	15,192	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT BRI Multifinance Indonesia	10,055	9,832	*PT BRI Multifinance Indonesia*
PT Mandiri Tunas Finance	10,045	19,692	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Danareksa (Persero)	7,091	7,005	*PT Danareksa (Persero)*
Pihak berelasi lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1,916,797	162,189	*Other related parties (each under IDR 1 billion)*
	38,677,673	**39,302,925**	
Total Obligasi, sukuk, dan Medium Term Notes (MTN)	**54,621,920**	**55,925,242**	***Total Obligasi, sukuk, dan Medium Term Notes (MTN)***
Saham			***Conventional Shares***
Nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	246,287	285,973	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	33,274	2,175	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,421	19,380	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	9,695	4,935	*PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk*
PT Bursa Efek Indonesia	7,500	7,500	*PT Bursa Efek Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	6,857	1,365	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Sarana Maluku Ventura	6,240	6,237	*PT Sarana Maluku Ventura*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5,503	5,339	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT PP Presisi Tbk	5,009	1,593	*PT PP Presisi Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4,436	3,795	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3,834	4,869	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	3,750	3,750	*PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
PT Taspen Properti Indonesia	3,514	3,514	*PT Taspen Properti Indonesia*
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	2,861	1,710	*PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	2,419	2,138	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Wijaya Karya Beton Tbk	1,561	1,190	*PT Wijaya Karya Beton Tbk*
Pihak berelasi lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	2,127	5,926	*Other related parties (each under IDR 1 billion)*
	366,288	361,389	

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
PT Semen Baturaja Tbk	115,049	122,749	*PT Semen Baturaja Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	92,925	77,367	*PT Perusahaan Gas Negara Tbk*
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	75,698	56,245	*PT Jasa Armada Indonesia Tbk*
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	60,589	35,885	*PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	44,131	56,062	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	34,667	33,634	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	25,404	19,783	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	19,745	24,621	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bukit Asam Tbk	18,420	16,440	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	17,953	5,302	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13,770	15,390	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,236	12,180	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	12,102	10,700	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	11,150	13,650	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Aneka Tambang Tbk	10,990	5,320	*PT Aneka Tambang Tbk*
PT PP Presisi Tbk	8,623	10,379	*PT PP Presisi Tbk*
PT PP Properti Tbk	5,884	5,538	*PT PP Properti Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,478	6,123	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Sarana Sultra Ventura	4,480	--	*PT Sarana Sultra Ventura*
PT Pembangunan Perumahan Presisi	4,059	--	*PT Pembangunan Peruhamahan Presisi*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	2,418	2,210	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Fintek Karya Nusantara	2,395	2,395	*PT Fintek Karya Nusantara*
PT Taspen Properti Indonesia	2,149	2,149	*PT Taspen Properti Indonesia*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1,887	1,027	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1,449	1,169	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,293	4,545	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Sarana Sumut Ventura	1,030	1,083	*PT Sarana Sumut Ventura*
Pihak berelasi lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	4,224	12,415	*Other related parties (each under IDR 1 billion)*
	610,198	554,361	
Total Saham	**976,486**	**915,750**	***Total Shares***
Reksadana			***Mutual funds***
Nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Pendapatan Tetap Abadi 2	1,478,889	1,339,995	*Pendapatan Tetap Abadi 2*
BNI-AM Pendapatan Tetap Manggala	1,325,071	1,194,702	*BNI-AM Pendapatan Tetap Manggala*
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Kastara	792,658	753,137	*BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Kastara*
Mandiri Obligasi Utama Sejahtera	704,034	400,551	*Mandiri Obligasi Utama Sejahtera*
Bahana Pendapatan Tetap Utama Kelas S	463,918	461,263	*Bahana Pendapatan Tetap Utama Kelas S*
BNI-AM Dana Likuid Kelas I1	435,033	--	*BNI-AM Dana Likuid Kelas I1*
Reksadana PNM SBN 90	348959	332900	*Reksadana PNM SBN 90*
RD Bahana Revolving Fund	304,456	1,089,409	*RD Bahana Revolving Fund*
Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S	300,273	1,125	*Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S*
BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A	247,452	240,601	*BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A*
RDS Mandiri Pasar Uang Syariah (Kelas B)	206,054	--	*RDS Mandiri Pasar Uang Syariah (Kelas B)*
BRI Seruni Pasar Uang III	193,640	228,464	*BRI Seruni Pasar Uang III*
Reksa Dana Treasure Saham Mantap	178,172	54,675	*Reksa Dana Treasure Saham Mantap*
BNI AM Indeks IDX30	177,084	183,730	*BNI AM Indeks IDX30*
Reksa Dana Syariah Bri Seruni Pasar Uang Syariah	154,149	--	*Reksa Dana Syariah Bri Seruni Pasar Uang Syariah*
Danareksa BUMN Fund 2019 Properti 6	131,501	144,654	*Danareksa BUMN Fund 2019 Properti 6*
Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh	100,577	87,087	*Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh*
Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah	95,222	102,537	*Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah*
RD Indeks Pendapatan Tetap - IBPA 35	92,128	9,928	*RD Indeks Pendapatan Tetap - IBPA 35*
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	85,376	73,968	*Mandiri Investa Ekuitas Dinamis*
RDPU Bahana Likuid Syariah Kelas S	83,642	47,867	*RDPU Bahana Likuid Syariah Kelas S*
Ekuitas Danareksa Infrastruktur Trans Jawa	78,468	88,484	*Ekuitas Danareksa Infrastruktur Trans Jawa*
Pan Arcadia Dana Saham Syariah	76,173	53,253	*Pan Arcadia Dana Saham Syariah*
Terproteksi Bahana Himaya Syariah 2	72,257	--	*Terproteksi Bahana Himaya Syariah 2*
Pendapatan Tetap Utama Kelas I	71,993	23,154	*Pendapatan Tetap Utama Kelas I*
ABF IBI Fund	64,389	--	*ABF IBI Fund*
Reksa Dana Pool Advista Kapital Optimal	56,075	77,521	*Reksa Dana Pool Advista Kapital Optimal*

	2025 Rp	2024 Rp	
Reksa Dana OSO Flores Equity Fund	52,748	62,112	*Reksa Dana OSO Flores Equity Fund*
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Manggala Kelas I1	51,691	--	*BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Manggala Kelas I1*
Terproteksi Bahana Centrum Protected Fund 227	50,704	50,690	*Terproteksi Bahana Centrum Protected Fund 227*
Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund	47,626	--	*Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund*
RD Bahana Himaya Likuid Syariah	46,604	11,048	*RD Bahana Himaya Likuid Syariah*
RDS Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang	42,627	--	*RDS Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang*
Terproteksi Bahana Centrum Protected Fund 232	42,001	51,401	*Terproteksi Bahana Centrum Protected Fund 232*
RD Bahana Liquid Plus	41,264	30,964	*RD Bahana Liquid Plus*
Pendapatan Tetap Utama Kelas S	40,637	90,682	*Pendapatan Tetap Utama Kelas S*
ITB Harmoni BNI-AM	39,494	36,238	*ITB Harmoni BNI-AM*
Bahana Progressive Protected Fund 220	26,181	--	*Bahana Progressive Protected Fund 220*
PNM Venture Capital	25,380	25,400	*PNM Venture Capital*
REKSA DANA SYARIAH BAHANA PASAR UANG AMANAH ABADI SYARIAH	25,031	--	*REKSA DANA SYARIAH BAHANA PASAR UANG AMANAH ABADI SYARIAH*
RD Bahana Icons Syariah	24,453	15,641	*RD Bahana Icons Syariah*
BNI-AM Proteksi Flamboyan	22,762	--	*BNI-AM Proteksi Flamboyan*
BNI-AM Indeks IDX30	21,972	--	*BNI-AM Indeks IDX30*
RDT Bahana Centrum Protected Fund 221	20,442	32,234	*RDT Bahana Centrum Protected Fund 221*
RDT Bahana Centrum Protected Fund 222	20,326	20,264	*RDT Bahana Centrum Protected Fund 222*
BRI Seruni Pasar Uang Syariah	20,185	20,023	*BRI Seruni Pasar Uang Syariah*
RD Bahana Likuid Plus	19,027	42,282	*RD Bahana Likuid Plus*
Danareksa Mawar Komoditas 10	18,258	17,196	*Danareksa Mawar Komoditas 10*
RD Bahana Prima Pendapatan Tetap	14,290	--	*RD Bahana Prima Pendapatan Tetap*
RD Bahana Trailblazer Fund	13,085	9,353	*RD Bahana Trailblazer Fund*
Treasure Fund Super Maxxi	12,972	6,712	*Treasure Fund Super Maxxi*
RD Bahana Pendapatan Tetap Utama 2	12,955	11,701	*RD Bahana Pendapatan Tetap Utama 2*
RD Bahana Progressive Income Fund	12,811	11,518	*RD Bahana Progressive Income Fund*
RDS Bahana Global Healthcare Sharia USD Equity Fund	12,801	10,877	*RDS Bahana Global Healthcare Sharia USD Equity Fund*
RD Bahana Sukuk Syariah	12,131	10,753	*RD Bahana Sukuk Syariah*
Reksa Dana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 199	12,112	10,000	*Reksa Dana Terproteksi Bahana Progressive Protected Fund 199*
BNI-AM Terproteksi Amanah II	12,030	--	*BNI-AM Terproteksi Amanah II*
RD Bahana USD Fixed Income Kleas I	11,791	10,678	*RD Bahana USD Fixed Income Kleas I*
RD Bahana Sinergi Pasar Uang Kelas I	11,129	10,569	*RD Bahana Sinergi Pasar Uang Kelas I*
RD Bahana Money Market Endowment Fund	11,023	10,481	*RD Bahana Money Market Endowment Fund*
RDS Bahana USD Nadhira Sukuk Kelas G	10,984	10,154	*RDS Bahana USD Nadhira Sukuk Kelas G*
RD Indeks Bahana ETF Pefindo I Grade	10,954	--	*RD Indeks Bahana ETF Pefindo I Grade*
BAHANA DANA EKUITAS ANDALAN KELAS G	10,705	305,678	*BAHANA DANA EKUITAS ANDALAN KELAS G*
RD Bahana Balance Flexi Yield Fund	10,662	--	*RD Bahana Balance Flexi Yield Fund*
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G	10,239	9,675	*Bahana Mes Syariah Fund Kelas G*
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi	10,035	--	*BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi*
BRI Balanced Regular Income Fund	9,885	--	*BRI Balanced Regular Income Fund*
RDPU BNI-AM Dana Lancar Syariah	9,177	8,766	*RDPU BNI-AM Dana Lancar Syariah*
BNI AM Amanah II	8,791	22,752	*BNI AM Amanah II*
Danareksa Infrastruktur Trans Jawa	8,201	--	*Danareksa Infrastruktur Trans Jawa*
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas B	8,189	--	*BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas B*
Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G	8,042	--	*Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G*
Bahana Protected Fund 211	7,710	--	*Bahana Protected Fund 211*
BNI-AM Proteksi Rosella	7,173	--	*BNI-AM Proteksi Rosella*
PNM Ekuitas Syariah	5,893	4,564	*PNM Ekuitas Syariah*
Reksa Dana BRI Mawar Komoditas 10	4,656	4,385	*Reksa Dana BRI Mawar Komoditas 10*
Mandiri Investa Atraktif Syariah	4,445	3,752	*Mandiri Investa Atraktif Syariah*
PNM Saham Agresif	4,120	3,634	*PNM Saham Agresif*
Bahana Protected Fund 208	3,630	4,953	*Bahana Protected Fund 208*
Treasure Saham Berkah Syariah	3,399	2,579	*Treasure Saham Berkah Syariah*
Terproteksi Bahana Himaya Syariah 3	2,096	--	*Terproteksi Bahana Himaya Syariah 3*
RD Bahana Dana Likuid	1,374	1,313	*RD Bahana Dana Likuid*
Pihak berelasi lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1,868	1,395,346	*Other related parties (each under IDR 1 billion)*
	9,328,414	9,375,373	

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Bahana E Optima Protected Fund 124	105,113	104,573	*Bahana E Optima Protected Fund 124*
Terproteksi Mandiri Seri 80	104,307	104,261	*Terproteksi Mandiri Seri 80*
BNIAM Proteksi Umbara	103,871	103,311	*BNIAM Proteksi Umbara*
BAHANA PROGRESSIVE PROTECTED FUND 200	53,497	52,796	*BAHANA PROGRESSIVE PROTECTED FUND 200*
Bahana Progressive Protected Fund 220	52,363	50,791	*Bahana Progressive Protected Fund 220*
BNI-AM Proteksi Squamosa	52,360	50,610	*BNI-AM Proteksi Squamosa*
BRI Terproteksi 38	51,572	51,465	*BRI Terproteksi 38*
BRI Terproteksi 36	51,128	51,427	*BRI Terproteksi 36*
BNP Paribas Pesona	30,404	--	*BNP Paribas Pesona*
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas B	24,407	--	*BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas B*
BRI Mawar Fokus 10	23,092	--	*BRI Mawar Fokus 10*
Mandiri Investa Equity Movement	21,540	20,190	*Mandiri Investa Equity Movement*
BRI Seruni Pasar Uang Syariah	20,073	--	*BRI Seruni Pasar Uang Syariah*
BNP Paribas Infrastruktur Plus	12,942	--	*BNP Paribas Infrastruktur Plus*
Mandiri Investa Atraktif Kelas A	12,573	--	*Mandiri Investa Atraktif Kelas A*
BRI Syariah Saham	12,141	--	*BRI Syariah Saham*
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII	10,140	10,139	*RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII*
BNI-AM Proteksi Redwood	8,653	8,653	*BNI-AM Proteksi Redwood*
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII	5,022	--	*RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVIII*
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI	5,011	--	*RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI*
BNP Paribas IDX30 Kelas IK1	4,666	--	*BNP Paribas IDX30 Kelas IK1*
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor	3,301	3,038	*Mandiri Investa Equity Dynamo Factor*
Pihak berelasi lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	--	258,879	*Other related parties (each under IDR 1 billion)*
	768,176	870,133	
Total Reksadana	**10,096,590**	**10,245,506**	***Total Mutual Funds***
Investasi Efek Beragun Aset			***Asset-Backed Securities Investments***
Biaya diperoleh diamortisasi			***Amortized cost***
BRI Manajemen Investasi	70,000	--	*BRI Manajemen Investasi*
	70,000	**--**	
Nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	--	628	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
	--	**628**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
KIK EBA Mandiri GIAA	11,193	10,293	*KIK EBA Mandiri GIAA*
	11,193	**10,293**	
Total Efek beragun aset	**81,193**	**10,921**	***Total Asset-backed securities***
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih			***Guarantee fee receivables - net***
Pemerintah Republik Indonesia	1,573,373	1,528,734	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,185,825	2,294,682	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	818,047	2,210,628	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	215,931	676,958	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	16,242	55,593	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	689	1,588	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	9,854	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	3,810,107	**6,778,037**	

	2025 Rp	2024 Rp	
Piutang usaha			***Account receivable***
Pemerintah Republik Indonesia	126,137	--	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Angkasa Pura I	14,125	--	*PT Angkasa Pura I*
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	11,973	11,973	*PT Dok dan Perkapalan Air Kantung*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5,641	5,741	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5,008	--	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bukit Asam Prima	3,115	3,460	*PT Bukit Asam Prima*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2,800	--	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2,696	5,346	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,459	--	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	1,640	5,841	*Perum Percetakan Uang Republik Indonesia*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,238	1,327	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Realty	1,238	1,327	*PT Wijaya Karya Realty*
Pihak berelasi lainnya			*Other related parties*
(masing-masing dibawah Rp1 miliar)	10,935	11,220	*(each under IDR 1 billion)*
	189,005	**46,235**	
Jumlah aset dengan pihak berelasi	**83,305,823**	**89,288,838**	***Total assets with related parties***
Persentase terhadap jumlah aset	**63.52%**	**68.62%**	***Percentage of total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Utang klaim penjaminan			***Guarantee claim payables***
PT Bank Rakyat Indonesia			*PT Bank Rakyat Indonesia*
(Persero) Tbk	148,606	285,540	*(Persero) Tbk*
(Persero) Tbk	42,376	10,116	*(Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29,122	1,677	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara			*PT Bank Tabungan Negara*
(Persero) Tbk	--	363	*(Persero) Tbk*
Lainnya	130	--	*Others*
	220,234	**297,696**	
Utang penjaminan ulang			***Re-guarantee payables***
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	259	196	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT BRI Asuransi Indonesia	--	3,000	*PT BRI Asuransi Indonesia*
	259	**3,000**	
Utang restrukturisasi			***Restructuring debt***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	642,753	682,256	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman dari pemerintah			***Government loans***
Pemerintah Republik Indonesia	787,954	757,542	*The Government of the Republic of Indonesia*
Medium Term Notes			***Medium Term Notes***
PT ASABRI (Persero)	250,000	250,000	*PT ASABRI (Persero)*
PT Taspen (Persero)	200,000	200,000	*PT Taspen (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara			*PT Bank Tabungan Negara*
(Persero) Tbk	50,000	50,000	*(Persero) Tbk*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	50,000	50,000	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia			*PT Bank Rakyat Indonesia*
(Persero) Tbk	--	200,000	*(Persero) Tbk*
	550,000	**750,000**	

	2025 Rp	2024 Rp	
Utang bank			***Bank loans***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	217,859	631,870	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	216,108	630,955	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	216,106	338,750	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	93,544	464,980	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	743,617	**2,066,555**	
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	**2,944,817**	**4,557,049**	***Total liabilities with related parties***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**3.25%**	**4.75%**	***Percentage of total liabilities***
Utang usaha			***Account payables***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	151	142	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,615	175	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10,653	4,396	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Mandiri Sekuritas	61	--	*PT Mandiri Sekuritas*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,011	39	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Pihak berelasi lainnya (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	18	--	*Others related parties (each Rp1 billion)*
	13,509	**4,752**	
Utang lain-lain			***Other payables***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	913,210	728,953	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	95,717	74,166	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	55,940	22,107	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	39,723	30,779	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani	6,650	5,152	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,752	3,682	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	351	272	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
Pt Bank Raya Indonesia Tbk	39	30	*Pt Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Berdikari	--	611	*PT Berdikari*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	--	109,239	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT BRI Asuransi Indonesia	--	68,124	*PT BRI Asuransi Indonesia*
PT Asuransi Asei Indonesia	--	89,626	*PT Asuransi Asei Indonesia*
	1,116,382	**1,132,741**	
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	**4,074,708**	**5,694,542**	***Total liabilities with related parties***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**4.50%**	**5.93%**	***Percentage of total liabilities***

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp131.549 (2024: Rp100.420).

Total compensation paid to the Group's Board of Commissioners and Directors for the year ended December 31, 2025 are amounted to Rp131,549 (2024: Rp100,420).

45. Manajemen Risiko Keuangan / *45. Financial Risk Management*

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai mata uang dan risiko tingkat bunga), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, manajemen permodalan, dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan.

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), liquidity risk, credit risk, operational risk, capital management, and fair value of financial assets and liabilities.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko, tingkat pengembalian, dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup. Grup mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

The Group's aim is to achieve an appropriate balance between risk, rate of return, and minimize potential adverse effects on the Group's financial performance. The Group defines risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors.

Grup tidak terekspos risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas pada investasi pemegang *unit link*, dikarenakan semua risiko ditanggung langsung oleh masing-masing pemegang polis.

There are no market risk, credit risk, and liquidity risk exposed to the Group for policyholders' investments in unit-linked contracts, since all the risks are directly borne by each policyholder.

a. Risiko pasar

a. Market risk

Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup menghadapi eksposur risiko pasar, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar. Risiko pasar berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk suku bunga, mata uang, dan ekuitas, yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum, dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga, nilai tukar, dan produk ekuitas.

Foreign exchange risk

The Group takes on exposure to market risks which is the risk that the fair value of future cash flows of financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk arises from open positions in interest rate, currency, and equity products, all of which are exposed to the general and specific market movements and changes in the level of volatility or market rates or prices such as interest rates, foreign exchange rates, and equity products.

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar.

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

Grup menghadapi eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang pada posisi keuangan dan arus kas. Direksi memonitor secara berkala risiko ini.

The Group takes on exposure to the effects of fluctuation in the prevailing foreign exchange rates on its financial position and cash flows. The Directors monitor this risk periodically.

Tabel berikut mengikhtisarkan aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing (disajikan dalam jumlah yang setara dengan jutaan Rupiah).

The following table summarises the Group's financial assets and liabilities that are exposed to foreign exchange risk (presented as millions of Rupiah equivalents).

	2025		
	Dolar AS/ *USD*	**Lain-lain/ *Others***	
Aset			***Assets***
Kas dan setara kas - bersih	400,119	325,321	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	475,553	--	*Investments - net*
Piutang hasil investasi - bersih	1,244	--	*Investment income receivables - net*
Aset lain-lain	3,693	--	*Other assets*
	880,609	**325,321**	
Liabilitas			***Liabilities***
Utang usaha dan utang lain-lain	(268,545)	(293,885)	*Accounts payable and other payables*
Medium Term Notes	(16,782)	--	*Medium Term Notes*
	(285,327)	**(293,885)**	
Aset bersih	**1,165,936**	**619,206**	***Net assets***

	2024		
	Dolar AS/ *USD*	**Lain-lain/ *Others***	
Aset			***Assets***
Kas dan setara kas - bersih	644,228	1,997	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	686,354	--	*Investments - net*
Piutang hasil investasi - bersih	6,956	--	*Investment income receivables - net*
Aset kontrak reasuransi	422,773	34,794	*Reinsurance contract assets*
Aset lain-lain	3,557	--	*Other assets*
	1,763,868	**36,791**	
Liabilitas			***Liabilities***
Utang usaha dan utang lain-lain	(23,363)	(5,849)	*Accounts payable and other payables*
Medium Term Notes	(16,162)	--	*Medium Term Notes*
Liabilitas kontrak asuransi	821,187	60,759	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	(6,118)	--	*Reinsurance contract liabilities*
	775,544	**54,910**	
Aset bersih	**988,324**	**(18,119)**	***Net assets***

Sensitivitas Grup terhadap mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan informasi yang mengikhtisarkan aset keuangan dan liabilitas keuangan Perseroan dalam mata uang asing yang ditranslasikan ke dalam mata uang asing utama Perseroan, yaitu Dolar AS. Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba sebelum pajak Perseroan atas perubahan nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The Group's sensitivity on foreign currencies is determined using the information that summarises the Company's financial assets and liabilities in foreign exchange rate which translated into the Company's main foreign currency, which is U.S. Dollar. The table below shows the sensitivity of the Company income before tax to movement of foreign exchange rates on December 31, 2025, and 2024:

	Pengaruh pada laba rugi/ *Impact on profit or loss*		
	Peningkatan/ *Increase by* 1%	**Penurunan/ *Decrease by* 1%**	
31 Desember 2025	17,851	(17,851)	*December 31, 2025*

	Pengaruh pada laba rugi/ *Impact on profit or loss*		
	Peningkatan/ *Increase by* 1%	Penurunan/ *Decrease by* 1%	
31 Desember 2024	9,702	(9,702)	*December 31, 2024*

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai wajar tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan konsolidasian yang menghadapi risiko tingkat suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table shows the consolidated financial assets and liabilities which are exposed to interest rate risk as of December 31, 2025, and 2024:

	2025				
	Bunga variabel/ *Floating rate* Rp	Bunga tetap/ *Fixed rate* Rp	Tidak dikenakan bunga/ *No interest rate charges* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas - bersih	3,961,156	2,820,841	6,233,798	13,015,795	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	27,705,158	5,127,505	45,340,039	78,172,702	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	534,235	14,171	1,798,668	2,347,074	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	--	--	3,245,583	3,245,583	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah	--	--	64,042	64,042	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang imbal jasa kafalah	--	--	42,692	42,692	*Kafalah fee receivable*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah	--	--	49,145	49,145	*Sharia insurance and reinsurance claim receivables*
Piutang penjaminan ulang syariah	--	--	156,151	156,151	*Sharia re-guarantee receivables*
Aset pengembalian	--	--	157,068	157,068	*Reimbursement assets*
Piutang penjaminan ulang - bersih	--	--	21,278	21,278	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	430,342	279,974	--	710,316	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	281,896	3,429	564,830	850,155	*Investment income receivables – net*
Aset lain- lain	26,815	474,838	2,412,165	2,913,818	*Other assets*
	32,939,602	**8,720,758**	**60,085,459**	**101,745,819**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang klaim penjaminan	--	--	445,953	445,953	*Guarantee claim payables*
Utang klaim asuransi dan reasuransi syariah	--	--	59,723	59,723	*Sharia insurance and reinsurance payables*
Utang klaim penjaminan syariah	--	--	261	261	*Sharia guarantee claim payables*
Utang kontribusi reasuransi dan retrosesi syariah	--	--	13,563	13,563	*Sharia reinsurance premium payables*
Utang premi penjaminan syariah	--	--	34,513	34,513	*Sharia guarantee premium payables*
Utang penjaminan ulang	--	--	195,381	195,381	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	1,833,279	1,075,931	8,182,260	11,091,470	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	77,703	42,914	2,035,758	2,156,375	*Accruals*
Utang restrukturisasi	--	--	642,753	642,753	*Restructuring debt*
Pinjaman dari Pemerintah	--	787,954	--	787,954	*Government loans*
Utang bank	54,488	916,635	--	971,123	*Bank loans*
Medium Term Notes	--	966,782	--	966,782	*Medium Term Notes*
	1,965,470	**3,790,216**	**11,610,165**	**17,365,851**	

	2024				
	Bunga variabel/ *Floating rate* Rp	Bunga tetap/ *Fixed rate* Rp	Tidak dikenakan bunga/ *No interest rate charges* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas - bersih	990,451	9,252,873	4,985,272	15,228,596	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	1,839,343	31,254,493	43,372,445	76,466,281	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	461,445	22,040	1,995,941	2,479,426	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	--	--	3,784,043	3,784,043	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah	--	--	112,672	112,672	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang imbal jasa kafalah	--	--	21,795	21,795	*Kafalah fee receivable*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah	--	--	73,262	73,262	*Sharia insurance and reinsurance claim receivables*
Piutang penjaminan ulang syariah	--	--	115,853	115,853	*Sharia re-guarantee receivables*
Aset pengembalian	--	--	67,178	67,178	*Reimbursement assets*
Piutang penjaminan ulang - bersih	--	--	54,024	54,024	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	--	869,314	--	869,314	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	438	399	861,096	861,933	*Investment income receivables – net*
Aset lain- lain	4,749	162,440	3,347,886	3,515,075	*Other assets*
	3,296,426	**41,561,559**	**58,791,467**	**103,649,452**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang klaim penjaminan	--	--	1,061,931	1,061,931	*Guarantee claim payables*
Utang klaim asuransi dan reasuransi syariah	--	--	57,911	57,911	*Sharia insurance and reinsurance payables*
Utang klaim penjaminan syariah	--	--	1,655	1,655	*Sharia guarantee claim payables*
Utang kontribusi reasuransi dan retrosesi syariah	--	--	33,043	33,043	*Sharia reinsurance premium payables*
Utang premi penjaminan syariah	--	--	36,319	36,319	*Sharia guarantee premium payables*
Utang penjaminan ulang	--	--	180,709	180,709	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	491,318	141,858	8,622,613	9,255,789	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	32,380	39,845	1,675,668	1,747,893	*Accruals*
Utang restrukturisasi	--	--	682,256	682,256	*Restructuring debt*
Pinjaman dari Pemerintah	--	757,542	--	757,542	*Government loans*
Utang bank	--	2,363,092	--	2,363,092	*Bank loans*
Medium Term Notes	--	1,116,162	--	1,116,162	*Medium Term Notes*
	523,698	**4,418,499**	**12,352,105**	**17,294,302**	

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul dari ketidakmampuan Grup dalam memenuhi kewajiban yang bersifat kontraktual yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun Grup memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka Grup dikatakan tidak likuid.

Profil jatuh tempo ini didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Selain itu, jika terdapat kebutuhan akan likuiditas, efek-efek dan aset lancar dapat dijual. Kebijakan Grup sehubungan dengan *maturity gap* antara aset dan liabilitas moneter adalah menetapkan *gap limit* yang disesuaikan dengan kemampuan Grup untuk memperoleh likuiditas.

Tabel berikut menyajikan arus kas kontraktual atas liabilitas keuangan Grup berdasarkan sisa periode sampai tanggal jatuh tempo sesuai kontrak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

b. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk of inability of the Group in paying its contractual obligation in cash. Although the Group has sufficient assets to pay its liabilities, but when the assets cannot be converted into cash immediately, then the Group is illiquid.

This maturity profile is based on the remaining period to the contractual maturity date. In addition, if the Group encounters liquidity needs, marketable securities and current assets could be liquidated. The Group's policy with regards to the maturity gap between the monetary assets and liabilities is to determine a gap limit which is adjusted to the Group's ability to obtain immediate liquidity.

The following table shows cash flows on the Group's financial liabilities based on the remaining period to the contractual maturity date as of December 31, 2025 and 2024.

	2025				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year Rp	**Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year** Rp	**Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity** Rp	**Nilai tercatat/ Carrying value** Rp	
Utang klaim penjaminan	114,950	282,030	48,973	445,953	*Guarantee claim payables*
Utang klaim asuransi dan reasuransi syariah	29,580	30,143	--	59,723	*Sharia insurance and reinsurance payables*
Utang klaim penjaminan syariah	214	--	47	261	*Sharia guarantee claim payables*
Utang kontribusi reasuransi dan retrosesi syariah	--	13,563	--	13,563	*Sharia reinsurance premium payables*
Utang premi penjaminan syariah	20,313	--	14,200	34,513	*Sharia guarantee premium payables*
Utang restrukturisasi	--	--	--	--	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan syariah	--	1,839,896	887,628	2,727,524	*Liabilities for sharia financial guarantee contracts*
Utang penjaminan ulang	--	35,713	159,668	195,381	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	3,594,493	4,629,383	1,352,785	9,576,661	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	694,033	545,247	917,095	2,156,375	*Accruals*
Utang restrukturisasi	--	642,753	--	642,753	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	--	5,822,035	11,834,142	17,656,177	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pinjaman dari Pemerintah	--	787,954	--	787,954	*Government loans*
Utang bank	57,932	913,191	--	971,123	*Bank loans*
Medium Term Notes	--	966,782	--	966,782	*Medium Term Notes*
	4,511,515	**16,508,690**	**15,214,538**	**36,234,743**	

	2024				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year Rp	**Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year** Rp	**Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity** Rp	**Nilai tercatat/ Carrying value** Rp	
Utang klaim penjaminan	--	830,308	231,623	1,061,931	*Guarantee claim payables*
Utang klaim asuransi dan reasuransi syariah	11	57,900	--	57,911	*Sharia insurance and reinsurance payables*
Utang klaim penjaminan syariah	125	--	1,530	1,655	*Sharia guarantee claim payables*
Utang kontribusi reasuransi dan retrosesi syariah	--	32,757	286	33,043	*Sharia reinsurance premium payables*
Utang premi penjaminan syariah	24,669	--	11,650	36,319	*Sharia guarantee premium payables*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan syariah	--	1,724,084	1,027,386	2,751,470	*Liabilities for sharia financial guarantee contracts*
Utang penjaminan ulang	--	15,711	164,998	180,709	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	2,802,425	2,198,796	1,884,270	6,885,491	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	820,946	426,055	500,892	1,747,893	*Accruals*
Utang restrukturisasi	--	682,256	--	682,256	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	--	6,879,257	13,600,893	20,480,150	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pinjaman dari Pemerintah	147,221	610,321	--	757,542	*Government loans*
Utang bank	1,424,097	938,995	--	2,363,092	*Bank loans*
Medium Term Notes	8,947	1,107,215	--	1,116,162	*Medium Term Notes*
	5,228,441	**15,503,655**	**17,423,528**	**38,155,624**	

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pihak lawan Grup gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Grup. Grup juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksadana.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko terbesar bagi Grup sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Manajemen dan pengendalian atas risiko kredit dipusatkan pada tim manajemen risiko kredit yang bertanggung

c. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial losses, should any of the Group's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Group. The Group is also exposed to other credit risks arising from investments in debt securities and mutual funds.

Credit risk is the one of the largest risks for the Group's business, therefore management carefully manages its exposure to credit risk. The credit risk management and control are centralised in a credit risk management team which reports to the Directors. The assessment

jawab kepada Direksi. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian, dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi.

of credit risk of a portfolio of assets entails estimations as to the likelihood of defaults occurring of the associated loss ratios, and of default correlations between counterparties.

Cadangan kerugian penurunan nilai diakui berdasarkan model kerugian kredit ekspektasian, yang mencerminkan estimasi kerugian kredit atas aset keuangan sejak pengakuan awal, dengan mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

An impairment allowance is recognized based on the expected credit loss model, which reflects the estimated credit losses on financial assets since initial recognition, taking into account reasonable and supportable information available without undue cost or effort.

Konsentrasi risiko instrumen keuangan dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk aset keuangan

Concentration of risks of financial instruments with credit risk exposure

The following table shows the Group's maximum exposure to credit risk of financial assets:

	2025 Rp	2024 Rp	
Kas dan setara kas	13,011,704	15,223,492	*Cash and cash equivalents*
Investasi - bersih	64,165,568	62,474,691	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	2,347,074	2,479,426	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah	64,212	112,672	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah	49,145	73,262	*Sharia insurance and reinsurance claim receivable*
Piutang imbal jasa kafalah	42,692	21,795	*Kafalah fee receivable*
Piutang penjaminan ulang syariah	156,151	115,853	*Sharia re-guarantee receivables*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	3,245,583	3,784,043	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	21,278	54,024	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	710,316	869,314	*Venture capital financing receivables - net*
Penyertaan langsung	381,842	311,431	*Direct Participation*
Piutang hasil investasi - bersih	841,488	852,463	*Investment income receivables - net*
Asuransi komtrak asuransi	57,482	63,728	*Insurance contract assets*
Aset kontrak reasuransi	10,140,301	9,740,645	*Co-insurance contract assets*
Aset pengembalian	157,068	67,178	*Reguarantee assets*
Aset penjaminan ulang syariah	710,334	831,074	*Sharia reguarantee assets*
Aset lain-lain	2,913,818	3,515,074	*Other assets*
	99,016,056	**100,590,165**	

Konsentrasi risiko aset kontrak asuransi dan reasuransi dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk asset kontrak asuransi dan reasuransi

Concentration of risks of insurance and reinsurance contract assets with credit risk exposure

The following tables presenting maximum exposure amount of credit risk on insurance and reinsurance contract assets:

	Eksposur maksimum terhadap risiko kredit/ *Maximum exposure to credit risk*		
	2025	**2024**	
Aset kontrak asuransi	57,482	63,728	*Insurance contract assets*
Aset kontrak reasuransi	10,140,301	9,740,645	*Reinsurance contract assets*
	10,197,783	9,804,373	

Kualitas kredit dari aset keuangan
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

Credit quality of financial assets
As of December 31, 2025 and 2024 credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows:

	2025				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* **Rp**	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*** **Rp**	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*** **Rp**	**Jumlah/ *Total*** **Rp**	
Kas dan setara kas	7,276,891	3,373,013	2,363,158	13,013,062	*Cash and cash equivalents*
Investasi - bersih	48,628,312	12,290,819	3,266,263	64,185,394	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	1,956,602	383,380	350,276	-- 2,690,258	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah	43,505	17,556	15,899	-- 76,960	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah	49,145	--	--	-- 49,145	*Sharia insurance and reinsurance claim receivable*
Piutang imbal jasa kafalah	40,777	1,915	2,694	45,386	*Kafalah fee receivable*
Piutang penjaminan ulang syariah	102,146	55,257	12,668	170,071	*Sharia re-guarantee receivables*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	--	3,617,787	4,250,415	7,868,202	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	224,013	6,590	141,493	372,096	*Re-guarantee receivables - net*
Penyertaan langsung	371,725	10,117	--	381,842	
Aset kontrak asuransi	57,402	80	--	57,482	
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	444,699	--	442,169	-- 886,868	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	439,552	142,152	282,495	864,199	*Investment income receivables - net*
Aset pengembalian	130,951	26,117		157,068	*Reguarantee assets*
Aset penjaminan ulang syariah	216,336	493,998		710,334	*Sharia reguarantee assets*
Piutang kontrak reasuransi	8,926,286	1,214,015	--	10,140,301	*Reinsurance contract assets*
Piutang koasuransi - bersih	--	--	--	--	*Co-insurance contract assets*
Aset lain-lain	2,759,667	143,372	513,232	3,416,271	*Other assets*
	71,668,009	**21,776,168**	**11,640,762**	**105,084,939**	
Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan nilai				(6,068,883)	*Less: Allowance for impairment losses*
				99,016,056	

	2024				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* Rp	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired* Rp**	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* Rp**	**Jumlah/ *Total* Rp**	
Kas dan setara kas	15,084,535	833	143,066	15,228,434	*Cash and cash equivalents*
Investasi - bersih	60,583,950	34,520	1,861,433	62,479,903	*Investments - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	2,318,305	128,647	369,293	2,816,245	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah	115,587	--	24,960	140,547	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah	73,262	--	--	73,262	*Sharia insurance and reinsurance claim receivable*
Piutang imbal jasa kafalah	21,795	--	4,357	26,152	*Kafalah fee receivable*
Piutang penjaminan ulang syariah	117,290	517	32,428	150,235	*Sharia re-guarantee receivables*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2,507,619	1,647,931	3,929,447	8,084,997	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	183,818	2,747	145,122	331,687	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	795,187	74,127	160,159	1,029,473	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	665,637	182,803	26,453	874,893	*Investment income receivables - net*
Piutang Subordinasi	--	--	658	658	*Subordinated loan receivables*
Penyertaan langsung	311,431	--	--	311,431	*Direct participation*
Aset kontrak asuransi	63,728	--	--	63,728	*Insurance contract assets*
Aset kontrak reasuransi	9,722,435	18,210	--	9,740,645	*Reinsurance contract assets*
Aset pengembalian	24,540	42,638	--	67,178	*Reguarantee assets*
Aset penjaminan ulang syariah	681,463	149,611	--	831,074	*Sharia reguarantee assets*
Aset lain-lain	892,584	778,529	2,369,462	4,040,575	*Other assets*
	94,163,166	**3,061,113**	**9,066,838**	**106,291,117**	
Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan nilai				(5,700,952)	*Less: Allowance for impairment losses*
				100,590,165	

d. Manajemen permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

d. Capital management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

e. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Semua aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset dan liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatatnya merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. Nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang diukur melalui laporan laba rugi adalah sama dengan nilai tercatatnya.

i. Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas terkait;

e. Fair value of financial assets and liabilities

All financial assets and liabilities classified as financial assets and liabilities measured at amortised cost have a short-term maturity, therefore the carrying amount is a reasonable approximate of fair value. The fair value of financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss is the same with the carrying value.

i. Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for associated assets or liabilities;

ii. Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

iii. Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*unobservable inputs*).

ii. Level 2
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and

iii. Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Instrumen yang diukur pada nilai wajar
Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Financial instruments measured at fair value
The following table shows the Group's financial assets and liabilities measured at fair value as of December 31, 2025, and 2024:

	2025					
	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	**Tingkat 1/ *Level 1* Rp**	**Tingkat 2/ *Level 2* Rp**	**Tingkat 3/ *Level 3* Rp**	**Nilai wajar/ *Fair value* Rp**	
Investasi	58,219,912	31,082,511	24,550,551	2,586,850	58,219,912	*Investments*
Penyertaan langsung	(41,399,486)	--	--	(41,399,486)	(41,399,486)	*Direct participation*
Aset lain-lain	466,231	466,531	--	(300)	466,231	*Other assets*
	17,286,657	**31,549,042**	**24,550,551**	**(38,812,936)**	**17,286,657**	

	2024					
	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	**Tingkat 1/ *Level 1* Rp**	**Tingkat 2/ *Level 2* Rp**	**Tingkat 3/ *Level 3* Rp**	**Nilai wajar/ *Fair value* Rp**	
Investasi	53,106,982	11,556,062	41,547,067	3,853	53,106,982	*Investments*
Penyertaan langsung	(35,511,186)	--	--	(35,511,186)	(35,511,186)	*Direct participation*
Aset lain-lain	238	--	--	238	238	*Other assets*
	17,596,034	**11,556,062**	**41,547,067**	**(35,507,095)**	**17,596,034**	

Instrumen yang tidak diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan Grup yang tidak diukur dengan nilai wajar pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Financial instruments not measured at fair value
The following table presents the carrying amounts and fair value of the Group's financial assets and liabilities that are not measured at fair value on the statement of financial position as at 31 December 2025 and 2024:

	2025					
	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	**Tingkat 1/ *Level 1* Rp**	**Tingkat 2/ *Level 2* Rp**	**Tingkat 3/ *Level 3* Rp**	**Nilai wajar/ *Fair value* Rp**	
Aset keuangan						***Financial assets***
Kas dan setara kas - bersih	13,015,795	10,860,604	1,020,731	1,134,460	13,015,795	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	19,952,790	4,206,018	14,473,985	1,272,787	19,952,790	*Investment - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	3,245,583	1,634,159	--	1,611,424	3,245,583	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	2,347,074	901,470	88,266	1,322,351	2,312,087	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang koasuransi - bersih	--	--	--	42,712	42,712	*Coinsurance premium receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	21,278	555,420	--	(534,142)	21,278	*Re-guarante receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	710,316	655,510	43,042	11,764	710,316	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang kontribusi asuransi dan reasuransi syariah	64,212	--	228	56,259	56,487	*Sharia insurance and reinsurance premium receivables*
Piutang klaim asuransi dan reasuransi syariah	49,145	--	--	49,145	49,145	*Sharia insurance and reinsurance claim receivable*
Piutang imbal jasa kafalah	42,692	40,777	--	1,915	42,692	*Kafalah fee receivable*
Piutang penjaminan ulang syariah	156,151	112,246	--	43,905	156,151	*Sharia re-guarantee receivables*
Piutang hasil investasi - bersih	850,155	279,347	63,605	507,203	850,155	*Investment income receivables - net*
Penyertaan langsung	41,781,328	--	--	41,781,328	41,781,328	*Direct participation*
Aset kontrak asuransi	--	--	--	--	--	*Insurance contract assets*
Aset kontrak reasuransi	--	--	--	--	--	*Reinsurance contract assets*
Aset pengembalian	157,068	992,072	--	(835,004)	157,068	
Aset penjaminan ulang syariah	710,334	283,340	--	426,994	710,334	
Aset lain-lain	2,447,587	1,514,462	24,231	908,894	2,447,587	*Other assets*
	85,551,508	**22,035,425**	**15,714,088**	**47,801,995**	**85,551,508**	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang klaim penjaminan	445,953	101,210	--	344,743	445,953	*Guarantee claim payables*
Utang penjaminan ulang	195,381	868,443	--	(673,062)	195,381	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan utang lain-lain	9,576,661	1,707,576	1,376,772	6,492,313	9,576,661	*Accounts payable and other payables*
Utang klaim asuransi dan reasuransi syariah	59,723	--	--	59,723	59,723	*Sharia claim payables*
Utang kontribusi reasuransi dan retrosesi syariah	13,563	--	--	13,563	13,563	*Sharia reinsurance premium payables*
Utang klaim penjaminan syariah	261	47	--	214	261	*Sharia guarantee claim payables*
Utang premi penjaminan syariah	34,513	23,297	--	11,216	34,513	*Sharia guarantee premium payables*
Akrual	2,156,375	616,048	38,763	1,501,564	2,156,375	*Accruals*
Utang restrukturisasi	642,753	--	--	642,753	642,753	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	17,656,177	12,723,577	--	4,932,600	17,656,177	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan syariah	2,727,524	887,628	--	1,839,896	2,727,524	*Liabilities for sharia financial guarantee contracts*
Pinjaman dari Pemerintah	787,954	--	--	787,954	787,954	*Government loans*
Utang bank	971,123	--	--	971,123	971,123	*Bank loans*
Medium Term Notes	966,782	--	--	966,782	966,782	*Medium Term Notes*
	36,234,743	**16,927,826**	**1,415,535**	**17,891,382**	**36,234,743**	

	2024					
	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp	Tingkat 1/ *Level 1* Rp	Tingkat 2/ *Level 2* Rp	Tingkat 3/ *Level 3* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	
Aset keuangan						***Financial assets***
Kas dan setara kas - bersih	15,228,596	15,228,596	--	--	15,228,596	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	76,466,281	33,082,169	43,360,460	23,652	76,466,281	*Investment - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	3,784,043	1,980,308	--	1,803,735	3,784,043	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	2,444,444	1,360,102	--	1,084,342	2,444,444	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	54,024	--	--	54,024	54,024	*Re-guarante receivables - net*
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	869,314	550,944	265,252	53,118	869,314	*Venture capital financing receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	861,933	--	--	862,381	862,381	*Investment income receivables - net*
Penyertaan langsung	311,431	264,629	--	46,802	311,431	*Direct Participation*
Aset kontrak asuransi	63,728	--	--	63,728	63,728	*Insurance contract assets*
Aset kontrak reasuransi	9,740,645	--	--	9,740,645	9,740,645	*Reinsurance contract assets*
Aset lain-lain	4,262,693	4,306,453	--	--	4,306,453	*Other assets*
	114,087,132	**56,773,201**	**43,625,712**	**13,732,427**	**114,131,340**	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
utang klaim penjaminan	1,061,931	--	--	1,061,931	1,061,931	*Guarantee claim payables*
Utang penjaminan ulang	180,709	--	--	180,709	180,709	*Re-guarantee payables*
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	9,255,786	--	--	9,243,721	9,243,721	*Account payable and other liabilites*
Akrual	1,747,893	--	--	1,759,958	1,759,958	*Accruals*
Utang restrukturisasi	682,256			682,256	682,256	*Restructuring debt*
Liabilitas kontrak asuransi	50,258,032	--	--	50,258,032	50,258,032	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	153,338	--	--	153,338	153,338	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	20,480,150	--	--	20,480,150	20,480,150	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pinjaman dari pemerintah	757,542	--	--	757,542	757,542	*Government loans*
Utang bank	2,363,092	--	--	2,363,092	2,363,092	*Bank loans*
Medium Term Notes	1,116,162	--	--	1,116,162	1,116,162	*Medium Term Notes*
	88,056,891	**--**	**--**	**88,056,891**	**88,056,891**	

46. Risiko Asuransi dan Penjaminan Keuangan

Grup bertanggung jawab untuk mengelola secara tepat dalam menghadapi perubahan dalam siklus asuransi dan penjaminan terhadap lingkungan politik dan ekonomi dimana Grup beroperasi.

Rincian risiko asuransi

Risiko utama yang dihadapi Grup terkait dengan kontrak asuransi adalah perbedaan antara jumlah klaim yang terjadi, manfaat yang dibayarkan dan waktu terjadinya klaim dengan yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, tingkat keparahan (*severity*) dari klaim, manfaat aktual yang dibayarkan, dan perkembangan lanjutan dari klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk memenuhi semua liabilitas tersebut.

Risiko *underwriting* terdiri dari risiko asuransi, risiko perilaku pemegang polis, dan risiko biaya.

46. Insurance and Financial Guarantee Risks

The Group is responsible for managing appropriately in response to changes in insurance cycles to the political and economic environments in which the Group operates.

Details of insurance risk

The key risk that the Group faces in relation to insurance contracts is the difference between the incurred claim amount, benefits paid and timing of claims from the estimation. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid, and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure reserves booked is adequate to cover all of those liabilities.

Underwriting risk comprises insurance risk, policyholder behavior risk and expense risk.

- Risiko asuransi: risiko yang dialihkan dari pemegang polis kepada Grup, selain risiko keuangan. Risiko asuransi timbul dari ketidakpastian yang melekat tentang terjadinya, jumlah atau waktu klaim.
- Risiko perilaku pemegang polis: risiko bahwa pemegang polis akan membatalkan kontrak (yaitu risiko kehilangan atau persistensi), menambah atau mengurangi premi, menarik simpanan atau membatalkan kontrak lebih awal atau lebih lambat dari yang diharapkan.
- Risiko biaya: risiko kenaikan tak terduga dalam biaya administrasi yang terkait dengan pelayanan kontrak (daripada biaya yang terkait dengan peristiwa yang diasuransikan).

- *Insurance risk: the risk transferred from the policyholder to the Group, other than financial risk. Insurance risk arises from the inherent uncertainty about the occurrence, amount or timing of claims.*
- *Policyholder behavior risk: the risk that a policyholder will cancel a contract (i.e. lapse or persistency risk), increase or reduce premiums, withdraw deposits or annuitise a contract earlier or later than expected.*
- *Expense risk: the risk of unexpected increases in the administrative costs associated with the servicing of a contract (rather than in the costs associated with insured events).*

Asumsi utama
Asumsi utama yang menjadi dasar dalam perhitungan cadangan estimasi klaim adalah pembentukan klaim masa depan Grup akan memiliki pola yang sama dengan pembentukan klaim yang terjadi di masa lalu. Termasuk asumsi dari tingkat diskonto, rasio kerugian, mortalitas, tingkat pembatalan polis, dan asumsi biaya untuk setiap tahun kejadian.

Main assumptions
The main assumption in calculating the estimated claim reserves is the Group's future claims development will follow similar pattern with the historical claims incurred. This includes assumptions on discount rate, loss ratio, mortality, lapse rate, and expense assumptions for each accident year.

Justifikasi kualitatif tambahan digunakan untuk memperkirakan tingkat di mana tren masa lampau tidak akan terulang lagi di masa depan, misalnya: kejadian khusus yang hanya terjadi sekali, perubahan yang terjadi di pasar seperti sikap masyarakat terhadap klaim, kondisi ekonomi maupun faktor internal seperti campuran portofolio, syarat dan ketentuan polis, dan prosedur penanganan klaim.

Additional qualitative judgments are used to estimate the extent to which the historical trends may not apply for the future, for example: specific one-off event, changes in market factors such as public attitude towards insurance claims, economic conditions, as well as internal factors such as portfolio mix, policy terms and conditions, and claims handling procedures.

Justifikasi lebih lanjut digunakan untuk menghitung tingkat dimana faktor eksternal seperti keputusan peradilan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi estimasi besaran klaim. Kondisi utama yang mempengaruhi keandalan dari asumsi yang digunakan adalah rasio kerugian, dan perbedaan tingkat bunga.

Further justification is required to assess the extent to which external factors such as judicial decisions and government regulations affect the claim estimates. Other key conditions affecting the reliability of assumption used are loss ratio and changed in interest rates.

<u>Pemenuhan arus kas</u>
Arus kas pemenuhan terdiri dari:
a. perkiraan arus kas masa depan
b. penyesuaian untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan yang berkaitan dengan arus kas masa depan, sepanjang risiko keuangan tersebut tidak termasuk dalam estimasi arus kas masa

<u>*Fulfilment cash flows*</u>
Fulfilment cash flows comprise:
a. estimates of future cash flows
b. an adjustment to reflect the time value of money and the financial risks related to future cash flows, to the extent that the financial risks are not included in the estimates of future cash flows; and

depan; dan
c. penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan

c. a risk adjustment for non-financial risk.

Tujuan Grup dalam memperkirakan arus kas masa depan adalah untuk menentukan nilai yang diharapkan dari serangkaian skenario yang mencerminkan keseluruhan kemungkinan hasil. Arus kas dari masing-masing skenario didiskontokan dan ditimbang berdasarkan estimasi kemungkinan hasil tersebut untuk memperoleh nilai kini yang diharapkan. Jika terdapat saling ketergantungan yang signifikan antara arus kas yang bervariasi berdasarkan perubahan variabel pasar dan arus kas lainnya, maka Grup menggunakan teknik pemodelan stokastik untuk memperkirakan nilai kini yang diharapkan. Pemodelan stokastik melibatkan proyeksi arus kas masa depan berdasarkan sejumlah besar kemungkinan skenario ekonomi untuk variabel pasar seperti suku bunga dan pengembalian ekuitas.

The Group's objective in estimating future cash flows is to determine the expected value of a range of scenarios that reflects the full range of possible outcomes. The cash flows from each scenario are discounted and weighted by the estimated probability of that outcome to derive an expected present value. If there are significant interdependencies between cash flows that vary based on changes in market variables and other cash flows, then the Group uses stochastic modelling techniques to estimate the expected present value. Stochastic modelling involves projecting future cash flows under a large number of possible economic scenarios for market variables such as interest rates and equity returns.

Perkiraan arus kas masa depan
Dalam memperkirakan arus kas masa depan, Grup menggabungkan, dengan cara yang tidak bias, seluruh informasi yang masuk akal dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan. Informasi ini mencakup data historis internal dan eksternal tentang klaim dan pengalaman lainnya, yang diperbarui untuk mencerminkan ekspektasi terkini mengenai kejadian di masa depan.

Estimates of future cash flows
In estimating future cash flows, the Group incorporates, in an unbiased way, all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date. This information includes both internal and external historical data about claims and other experience, updated to reflect current expectations of future events.

Estimasi arus kas masa depan mencerminkan pandangan Grup terhadap kondisi terkini pada tanggal pelaporan, sepanjang estimasi variabel pasar relevan konsisten dengan harga pasar yang dapat diobservasi.

The estimates of future cash flows reflect the Group's view of current conditions at the reporting date, as long as the estimates of any relevant market variables are consistent with observable market prices.

Ketika memperkirakan arus kas masa depan, Grup memperhitungkan ekspektasi terkini mengenai peristiwa masa depan yang mungkin mempengaruhi arus kas tersebut. Namun, ekspektasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan di masa depan yang akan mengubah atau melepaskan kewajiban yang ada saat ini atau menimbulkan kewajiban baru berdasarkan kontrak yang ada tidak diperhitungkan sampai perubahan peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan secara substantif. Grup memperoleh asumsi inflasi biaya dari selisih antara imbal hasil obligasi pemerintah nominal dan yang terkait dengan inflasi.

When estimating future cash flows, the Group takes into account current expectations of future events that might affect those cash flows. However, expectations of future changes in legislation that would change or discharge a present obligation or create new obligations under existing contracts are not taken into account until the change in legislation is substantively enacted. The Group derives cost inflation assumptions from the difference between the yields on nominal and inflation-linked government bonds.

Arus kas dalam batas kontrak berhubungan langsung dengan pemenuhan kontrak, termasuk arus kas yang Grup mempunyai diskresi mengenai jumlah dan waktunya. Hal ini mencakup pembayaran kepada (atau atas nama) pemegang polis, arus kas perolehan asuransi, dan biaya lain yang timbul dalam pemenuhan kontrak.

Cash flows within the boundary of a contract relate directly to the fulfilment of the contract, including those for which the Group has discretion over the amount or timing. These include payments to (or on behalf of) policyholders, insurance acquisition cash flows and other costs that are incurred in fulfilling contracts.

Arus kas akuisisi asuransi timbul dari aktivitas penjualan, penjaminan, dan permulaan sekelompok kontrak yang dapat diatribusikan secara langsung ke portofolio kontrak yang termasuk dalam kelompok tersebut. Biaya-biaya lain yang timbul dalam pemenuhan kontrak antara lain:

Insurance acquisition cash flows arise from the activities of selling, underwriting and starting a group of contracts that are directly attributable to the portfolio of contracts to which the group belongs. Other costs that are incurred in fulfilling the contracts include:

a. biaya penanganan klaim, pemeliharaan dan administrasi;
b. komisi berulang yang harus dibayar atas piutang premi angsuran dalam batas kontrak;
c. biaya yang akan dikeluarkan Grup dalam menyediakan jasa investasi;
d. biaya yang akan dikeluarkan Grup dalam melakukan aktivitas investasi sepanjang Grup melaksanakan aktivitas tersebut untuk meningkatkan manfaat perlindungan asuransi bagi pemegang polis dengan menghasilkan hasil investasi yang akan diperoleh manfaatnya bagi pemegang polis jika peristiwa yang diasuransikan terjadi; dan
e. pajak penghasilan dan biaya-biaya lain yang secara khusus dibebankan kepada pemegang polis berdasarkan ketentuan kontrak

a. claims handling, maintenance and administration costs;
b. recurring commissions payable on instalment premiums receivable within the contract boundary;
c. costs that the Group will incur in providing investment services;
d. costs that the Group will incur in performing investment activities to the extent that the Group performs them to enhance benefits from insurance coverage for policyholders by generating an investment return from which policyholders will benefit if an insured event occurs; and
e. income tax and other costs specifically chargeable to the policyholders under the terms of the contracts

Arus kas akuisisi asuransi dan biaya lain yang timbul dalam pemenuhan kontrak terdiri dari biaya langsung dan alokasi biaya overhead tetap dan variabel.

Insurance acquisition cash flows and other costs that are incurred in fulfilling contracts comprise both direct costs and an allocation of fixed and variable overheads.

Arus kas diatribusikan ke aktivitas akuisisi, aktivitas pemenuhan lainnya, dan aktivitas lain di tingkat entitas lokal dengan menggunakan teknik penetapan biaya berbasis aktivitas. Arus kas yang diatribusikan pada aktivitas akuisisi dan pemenuhan lainnya dialokasikan pada kelompok kontrak dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional serta diterapkan secara konsisten pada seluruh biaya yang memiliki karakteristik serupa. Grup pada umumnya mengalokasikan arus kas akuisisi asuransi ke kelompok kontrak berdasarkan total premi masing-masing kelompok, biaya penanganan klaim

Cash flows are attributed to acquisition activities, other fulfilment activities and other activities at local entity level using activity-based costing techniques. Cash flows attributable to acquisition and other fulfilment activities are allocated to groups of contracts using methods that are systematic and rational and are consistently applied to all costs that have similar characteristics. The Group generally allocates insurance acquisition cash flows to groups of contracts based on the total premiums for each group, claims handling costs based on the number of claims for each group, and maintenance and administration

berdasarkan jumlah klaim untuk setiap kelompok, dan biaya pemeliharaan dan administrasi berdasarkan jumlah kontrak yang berlaku dalam masing-masing kelompok. Kelompok. Biaya-biaya lainnya diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

costs based on the number of in-force contracts within each group. Other costs are recognised in profit or loss as they are incurred.

Batasan kontrak
Penilaian batasan kontrak, yang menentukan arus kas masa depan yang dimasukkan dalam pengukuran suatu kontrak, memerlukan pertimbangan dan pertimbangan atas hak dan kewajiban substantif Grup berdasarkan kontrak.

Contract boundaries
The assessment of the contract boundary, which defines which future cash flows are included in the measurement of a contract, requires judgement and consideration of the Group's substantive rights and obligations under the contract.

Risiko hidup, tabungan hidup, dan kontrak yang berpartisipasi
Asumsi mengenai mortalitas/umur panjang, kesakitan dan perilaku pemegang polis yang digunakan dalam memperkirakan arus kas masa depan dikembangkan berdasarkan jenis produk di tingkat entitas lokal, yang mencerminkan pengalaman terkini dan profil pemegang polis dalam kelompok kontrak asuransi.

Life risk, life savings, and participating contracts
Assumptions about mortality/longevity, morbidity and policyholder behaviour that are used in estimating future cash flows are developed by product type at local entity level, reflecting recent experience and the profiles of policyholders within a group of insurance contracts.

Asumsi mortalitas/umur panjang dan morbiditas umumnya dikembangkan dengan menggunakan gabungan data mortalitas nasional, tren industri, dan pengalaman terkini dari entitas lokal. Pengalaman dipantau melalui studi rutin, yang hasilnya tercermin dalam penetapan harga produk baru dan pengukuran kontrak yang ada.

Mortality/longevity and morbidity assumptions are generally developed using a blend of national mortality data, industry trends and the local entity's recent experience. Experience is monitored through regular studies, the results of which are reflected both in the pricing of new products and in the measurement of existing contracts.

Perilaku pemegang polis merupakan asumsi utama dalam pengukuran tabungan jiwa dan partisipasi kontrak asuransi. Setiap jenis perilaku pemegang polis diperkirakan berdasarkan jenis produk, berdasarkan tren pengalaman terkini.

Policyholder behaviour is a key assumption in the measurement of life savings and participating insurance contracts. Each type of policyholder behaviour is estimated by product type, based on trends in recent experience.

Kontrak non-jiwa
Grup memperkirakan biaya akhir penyelesaian klaim yang telah terjadi namun belum dibayar pada tanggal pelaporan serta nilai sisa dan perkiraan pemulihan lainnya dengan menelaah masing-masing klaim yang dilaporkan dan membuat penyisihan atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Biaya akhir penyelesaian klaim diperkirakan dengan menggunakan serangkaian teknik pencadangan kerugian – misalnya. Metode tangga rantai dan metode Bornhuetter-

Non-life contracts
The Group estimates the ultimate cost of settling claims incurred but unpaid at the reporting date and the value of salvage and other expected recoveries by reviewing individual claims reported and making allowance for claims incurred but not yet reported. The ultimate cost of settling claims is estimated using a range of loss reserving techniques – e.g. the chain-ladder and Bornhuetter- Ferguson methods. These techniques assume that the Group's own

Ferguson. Teknik-teknik ini mengasumsikan bahwa pengalaman klaim Grup merupakan indikasi pola pengembangan klaim di masa depan dan juga biaya klaim akhir. Biaya akhir penyelesaian klaim diperkirakan secara terpisah untuk setiap wilayah geografis dan bidang usaha, kecuali klaim dalam jumlah besar, yang dinilai secara terpisah dari klaim lainnya.

claims experience is indicative of future claims development patterns and therefore ultimate claims cost. The ultimate cost of settling claims is estimated separately for each geographic area and line of business, except for large claims, which are assessed separately from other claims.

Asumsi yang digunakan, termasuk rasio kerugian dan inflasi klaim di masa depan, secara implisit berasal dari data historis perkembangan klaim yang menjadi dasar proyeksi, meskipun pertimbangan diterapkan untuk menilai sejauh mana tren masa lalu mungkin tidak berlaku di masa depan dan tren masa depan tidak berlaku. Diperkirakan akan muncul.

The assumptions used, including loss ratios and future claims inflation, are implicitly derived from the historical claims development data on which the projections are based, although judgement is applied to assess the extent to which past trends might not apply in the future and future trends are expected to emerge.

Tingkat diskonto
Seluruh arus kas didiskontokan menggunakan kurva imbal hasil bebas risiko yang disesuaikan untuk mencerminkan karakteristik arus kas dan likuiditas kontrak asuransi. Grup umumnya menentukan suku bunga bebas risiko menggunakan kurva imbal hasil swap harga menengah (mid-price swap) untuk bank dengan peringkat AA (disesuaikan dengan risiko kredit bank). Kurva imbal hasil diinterpolasi antara titik data pasar terakhir yang tersedia dan kurs forward akhir, yang mencerminkan suku bunga ril jangka panjang dan inflasi.

Discount rates
All cash flows are discounted using risk-free yield curves adjusted to reflect the characteristics of the cash flows and the liquidity of the insurance contracts. The Group generally determines the risk-free rates using the observed mid-price swap yield curves for AA-rated banks (adjusted for the bank's credit risk). The yield curve is interpolated between the last available market data point and an ultimate forward rate, which reflects long-term real interest rate and inflation expectations.

Penyesuaian risiko untuk risiko non finansial
Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan ditentukan untuk mencerminkan kompensasi yang diperlukan oleh masing-masing entitas penerbit untuk menanggung risiko non-keuangan, secara terpisah untuk kontrak non-kehidupan dan kontrak lainnya, dan dialokasikan ke dalam kelompok kontrak berdasarkan analisis terhadap risiko non-keuangan. Profil risiko kelompok. Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan mencerminkan manfaat diversifikasi dari kontrak yang diterbitkan oleh entitas, dengan cara yang konsisten dengan kompensasi yang disyaratkan dan mencerminkan tingkat penghindaran risiko, dan dampak manfaat diversifikasi ditentukan dengan menggunakan teknik matriks korelasi.

Risk adjustment for non-financial risk
Risk adjustments for non-financial risk are determined to reflect the compensation that the individual issuing entity would require for bearing non-financial risk, separately for the non-life and other contracts, and are allocated to groups of contracts based on an analysis of the risk profiles of the groups. Risk adjustments for non-financial risk reflect the diversification benefits from contracts issued by the entity, in a way that is consistent with the compensation that it would require and that reflects its degree of risk aversion, and the effects of the diversification benefits are determined using a correlation matrix technique.

Penyesuaian risiko non-keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

The risk adjustments for non-financial risk are determined using the following techniques:

- kontrak non-jiwa, jiwa, dan partisipasi: teknik tingkat kepercayaan.

Untuk menentukan penyesuaian risiko non-keuangan pada kontrak reasuransi, Grup menerapkan teknik ini baik bruto maupun neto reasuransi dan memperoleh jumlah risiko yang dialihkan kepada reasuradur sebagai selisih antara kedua hasil tersebut.

Dengan menerapkan teknik tingkat kepercayaan, Grup mengestimasi distribusi probabilitas nilai kini yang diharapkan dari arus kas masa depan yang berasal dari kontrak asuransi pada setiap tanggal pelaporan dan menghitung penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan sebagai selisih lebih dari nilai risiko pada poin 75 persentil (tingkat kepercayaan target) terhadap nilai kini yang diharapkan dari arus kas masa depan.

Marjin jasa kontraktual

Penentuan unit cakupan
Margin jasa kontraktual suatu kelompok kontrak diakui dalam laba rugi untuk mencerminkan jasa yang diberikan pada setiap tahun berdasarkan jumlah unit pertanggungan yang diberikan pada tahun tersebut, yang ditentukan dengan mempertimbangkan kuantitas imbalan yang diberikan dan jumlah manfaat yang diberikan pada setiap kontrak. Perkiraan periode pertanggungan. Unit cakupan ditinjau dan diperbarui pada setiap tanggal pelaporan.

Nilai wajar kontrak asuransi
Grup mengukur nilai wajar kontrak asuransi sebagai jumlah dari:
- nilai kini dari arus kas bersih yang diharapkan dihasilkan oleh kontrak, ditentukan dengan menggunakan teknik arus kas yang didiskontokan; dan
- margin tambahan, ditentukan dengan menggunakan teknik tingkat kepercayaan.

Arus kas yang dipertimbangkan dalam pengukuran nilai wajar konsisten dengan arus kas yang berada dalam batasan kontrak. Oleh karena itu, arus kas yang terkait dengan perkiraan pembaruan kontrak asuransi di masa depan tidak dipertimbangkan dalam menentukan nilai wajar kontrak tersebut jika kontrak tersebut berada di luar batas kontrak.

- *Non-life, life, and participating contracts: a confidence level technique.*

To determine the risk adjustments for non-financial risk for reinsurance contracts, the Group applies these techniques both gross and net of reinsurance and derives the amount of risk being transferred to the reinsurer as the difference between the two results.

Applying a confidence level technique, the Group estimates the probability distribution of the expected present value of the future cash flows from insurance contracts at each reporting date and calculates the risk adjustment for non-financial risk as the excess of the value at risk at the 75th percentile (the target confidence level) over the expected present value of the future cash flows.

Contractual service margin

Determination of coverage units
The contractual service margin of a group of contracts is recognised in profit or loss to reflect services provided in each year based on the number of coverage units provided in the year, which is determined by considering for each contract the quantity of the benefits provided and its expected coverage period. The coverage units are reviewed and updated at each reporting date.

Fair value of insurance contracts
The Group has measured the fair value of insurance contracts as the sum of:
- *the present value of the net cash flows expected to be generated by the contracts, determined using a discounted cash flow technique; and*
- *an additional margin, determined using a confidence level technique.*

The cash flows considered in the fair value measurement are consistent with those that were within the contract boundary. Therefore, the cash flows related to expected future renewals of insurance contracts are not considered in determining the fair value of those contracts if they are outside the contract boundary

Pendekatan Grup dalam mengukur nilai wajar berbeda dengan persyaratan PSAK 117 untuk mengukur arus kas pemenuhan dalam beberapa hal. Perbedaan ini menimbulkan marjin jasa kontraktual pada tanggal akuisisi atau transisi. Khususnya, dalam mengukur nilai wajar Grup:

a. mempertimbangkan arus kas yang termasuk dalam pengukuran arus kas pemenuhan namun menyesuaikannya untuk mencerminkan perspektif pelaku pasar. Misalnya, arus kas pengeluaran ditingkatkan untuk menutupi biaya overhead umum pada tingkat yang wajar yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada pemenuhan kontrak asuransi namun diperkirakan akan ditanggung oleh pelaku pasar yang memperoleh kontrak tersebut;
b. menggunakan tingkat diskonto yang diterapkan dalam mengukur arus kas pemenuhan namun menaikkan tingkat diskonto untuk mencerminkan dampak risiko non-kinerja Grup; dan
c. mencakup margin yang terdiri dari premi risiko untuk mencerminkan apa yang diminta oleh pelaku pasar sebagai kompensasi atas ketidakpastian yang melekat dalam arus kas dan margin keuntungan untuk mencerminkan apa yang diperlukan oleh pelaku pasar untuk memikul kewajiban untuk membayar kontrak asuransi. Dalam menentukan premi risiko, Grup memperhitungkan risiko tertentu yang tidak tercermin dalam arus kas pemenuhan namun akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar – misalnya. Risiko operasional umum.

The Group's approach to measuring fair value differs from the SFAS 117 requirements for measuring fulfilment cash flows in certain respects. These differences gave rise to a contractual service margin at the date of acquisition or transition. In particular, in measuring fair value the Group:

a. considers the cash flows included in the measurement of fulfilment cash flows but adjusts them to reflect the perspective of market participants. For example, expense cash flows are increased to cover a reasonable level of general overheads that are not directly attributable to fulfilling the insurance contracts but that a market participant acquiring the contracts would expect to bear;

b. uses the discount rates applied in measuring fulfilment cash flows but increases the rates to reflect the effect of the Group's non-performance risk; and

c. includes a margin comprising a risk premium to reflect what market participants would demand as compensation for the uncertainty inherent in the cash flows and a profit margin to reflect what market participants would require to assume the obligations to service the insurance contracts. In determining the risk premium, the Group allows for certain risks that were not reflected in the fulfilment cash flows but would be considered by market participants – e.g. general operational risk.

Perubahan variabel risiko *underwriting* utamanya mempengaruhi marjin jasa kontraktual, laba rugi dan ekuitas sebagai berikut. Dampak terhadap laba rugi dan ekuitas disajikan setelah dikurangi pajak penghasilan terkait.

Changes in underwriting risk variables mainly affect the contractual service margin, profit or loss and equity as follows. The effects on profit or loss and equity are presented net of the related income tax.

Marjin jasa kontraktual/ *Contractual service margin*	Perubahan arus kas pemenuhan yang tidak berkaitan dengan komponen kerugian, selain yang diakui sebagai pendapatan atau beban keuangan asuransi/ *Changes in fulfilment cash flows not relating to any loss components, other than those recognized as insurance finance income or expenses.*
Laba rugi/*Profit or Loss*	Perubahan arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan komponen kerugian/ *Changes in fulfilment cash flows relating to loss components.*

	Perubahan arus kas pemenuhan yang diakui sebagai pendapatan atau beban keuangan asuransi pada laba rugi/ *Changes in fulfilment cash flows that are recognized as insurance finance income or expenses in profit or loss.*
Ekuitas/*Equity*	Perubahan arus kas pemenuhan yang diakui sebagai pendapatan atau beban keuangan asuransi di penghasilan komprehensif lainnya/ *Changes in fulfilment cash flows that are recognized as insurance finance income or expenses in other comprehensive income.* Efek pada laba rugi/ *The effect on profit or loss.*

Liabilitas klaim sangat sensitif terhadap asumsi utama yang digunakan. Hingga saat ini adalah hal yang tidak mungkin untuk dapat menentukan tingkat sensitivitas dari beberapa asumsi seperti perubahan perundangan atau ketidakpastian dalam proses estimasi. Analisis berikut dibuat untuk menunjukkan pengaruh terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian apabila asumsi utama diubah dengan semua asumsi lain dianggap tetap. Korelasi antara asumsi-asumsi yang ada dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan liabilitas klaim.
Estimasi klaim memiliki sensitivitas terhadap perubahan asumsi yang digunakan seperti *expected loss ratio*, *first incurred development factor,* dan *claim handling expenses.*

Claim liabilities are very sensitive to the key assumptions used. It is not possible to quantify the sensitivity of certain assumptions such as regulation change or uncertainty in the estimation process. The following analysis is made to show the impact on the consolidated statement of financial positions if the main assumptions were changed while all the other assumptions remain unchanged. The correlation between those assumptions can give significant impact in calculating the claim liability.

Estimated claims are sensitive to the key assumptions used such as initial expected loss ratio, first incurred development factor, and claim handling expenses.

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan jumlah yang tersedia untuk menutup semua manfaat yang dijamin berdasarkan kondisi pada polis asuransi yang masih berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

The liability for future policy benefits is the amount available to cover all benefits guaranteed under the conditions of an insurance policy that is still valid at the statement of financial position date.

Asumsi-asumsi yang dipakai untuk menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dengan valuasi premi bruto ("GPV") adalah berdasarkan asumsi estimasi terbaik yang meliputi asumsi tingkat mortalita, morbidita, *lapses*, biaya dan tingkat inflasi, di mana asumsi yang digunakan merupakan hasil experience study yang relevan dengan asumsi estimasi terbaik Perusahaan.

The assumptions used to calculate the liability for future policy benefits with the Gross Premium Valuation ("GPV") are based on the best estimation assumptions which include assumptions on mortality, morbidity, lapses, costs and inflation rates where the assumptions used are the results of experience studies that are relevant to the Company's best estimate assumption.

Analisa sensitivitas
Tabel berikut menyajikan sensitivitas dari nilai liabilitas kontrak asuransi terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam estimasi liabilitas kontrak asuransi. Korelasi asumsi akan memiliki dampak yang signifikan dalam

Sensitivity analysis
The following tables present the sensitivity of the value of insurance contract liabilities to the movements in the assumptions used in the estimation of insurance contract liabilities. The correlation of assumptions will have a

menentukan cadangan teknis. Tabel ini juga menunjukkan dampak terhadap cadangan teknis akibat dari perubahan asumsi aktuaria.

significant effect in determining the ultimate technical reserves. This table also indicates the impact on the technical reserve due to the changes in the actuarial assumptions.

	PT Asuransi Jiwa IFG			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Penurunan tingkat suku bunga	- 100 bps	490,367	490,367	*Decrease in interest rates*
Kenaikan tingkat mortalita	+ 10%	37,541	37,541	*Increase in mortality rates*
Penurunan tingkat mortalita	- 10%	(32,260)	(32,260)	*Decrease in mortality rates*

	PT Jasa Raharja			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Faktor UPR SW/ *UPR SW Factor*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+1	44,136	44,136	*Gross liability*
	-1	(44,136)	(44,136)	
Liabilitas neto	+1	44,427	44,427	*Net liability*
	-1	(43,535)	(43,535)	

	PT Asuransi Jasaraharja Putera			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	48,592	48,592	*Gross liability*
	-5	(46,629)	(46,629)	
Liabilitas neto	+5	17,898	17,898	*Net liability*
	-5	(17,703)	(17,703)	

	PT Asuransi Jasa Indonesia			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	129,189	129,189	*Gross liability*
	-5	(131,988)	(131,988)	
Liabilitas neto	+5	57,605	57,605	*Net liability*
	-5	(60,383)	(60,383)	

	PT Asuransi Kredit Indonesia			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	265,519	265,519	*Gross liability*
	-5	(272,690)	(272,690)	
Liabilitas neto	+5	265,519	265,519	*Net liability*
	-5	(272,690)	(272,690)	

	PT Asuransi Kredit Indonesia			
	Dampak atas cadangan premi/ *Impact on premium reserve*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas bruto	+5	3,592	3,592	*Gross liability*
	-5	(3,592)	(3,592)	
Liabilitas neto	+5	3,592	3,592	*Net liability*
	-5	(3,592)	(3,592)	

	PT Reasuransi Nasional Indonesia			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Tingkat diskonto/ *Discount rate*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas neto	+1	(148,228)	(148,228)	*Net liability*
	-1	170,108	170,108	

	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Rasio kerugian/ *Loss ratio*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:				*Impact increase/(decrease) on:*
Liabilitas neto	+1	3,459	3,459	*Net liability*
	-1	(3,459)	(3,459)	

	PT Asuransi Jiwa IFG			
	Dampak atas liabilitas klaim/ *Impact on claim liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**2025 Rp**	**2024 Rp**	
Penurunan tingkat suku bunga	- 100 bps	490,367	490,367	*Decrease in interest rates*
Kenaikan tingkat mortalita	+ 10%	37,541	37,541	*Increase in mortality rates*
Penurunan tingkat mortalita	- 10%	(32,260)	(32,260)	*Decrease in mortality rates*

Reasuransi

Profil bisnis dan risiko dari pertanggungan Grup cukup beragam dan cenderung memiliki tingkat risiko dan nilai pertanggungan yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan dukungan reasuransi yang cukup dan aman untuk memproteksi portofolio bisnis Grup. Dukungan reasuransi diperoleh melalui kontrak reasuransi *treaty* dengan reasuransi dalam negeri maupun luar negeri, baik untuk *treaty* proporsional maupun non proporsional disesuaikan dengan karakter bisnis masing-masing lini usaha.

Program reasuransi *treaty* berpedoman pada kepentingan terbaik Grup, peraturan perundangan-undangan serta regulasi dari pemerintah antara lain ketentuan terbaru dari OJK No.14/POJK.05/2015 dan Surat Edaran No. S.31/SEOJK.05/2015 yang mengatur mengenai "Optimalisasi Kapasitas Dalam Negeri" (batas retensi sendiri, besar dukungan reasuransi).

Grup tidak tergantung pada satu reasuradur ataupun satu kontrak reasuransi tertentu secara signifikan.

Reinsurance

The business and risk profile of the Group is quite diverse and tend to have higher risk and sum insured, therefore sufficient and secure reinsurance backup is needed to protect the Group's business portfolio. The reinsurance back up is obtained through treaty reinsurance with domestic and overseas reinsurers, proportional and nonproportional treaty specific to the character of each line of business.

Treaty reinsurance programs are based on the best benefits of the Group, laws and other government regulations, such as the latest regulation from FSA No. 14/POJK.05/2015 and Circular Letter No. S.31/SEOJK.05/2015 regarding "Optimising of the Local Capacity" (limit of own retention amount of reinsurance back up).

The Group is not dependent on single reinsurance company or reinsurance contract.

Tabel perkembangan klaim

Tabel berikut menyajikan estimasi klaim yang terjadi, termasuk klaim yang dilaporkan dan IBNR untuk setiap tahun kejadian pada tanggal 31 Desember 2024:

Claim development table

The following table shows the estimates of incurred claims, including both claims reported and IBNR for each accident year as of December 31, 2024:

Setiap tabel menunjukkan bagaimana estimasi Grup mengenai total klaim untuk setiap tahun kecelakaan berkembang dari waktu ke waktu dan merekonsiliasi klaim kumulatif dengan jumlah yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Each table shows how the Group's estimates of total claims for each accident year have developed over time and reconciles the cumulative claims to the amount included in the statement of financial position.

PT Jasa Raharja

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	2,061,259	2,241,553	2,251,004	2,251,970	2,252,373	2,252,373
2021	2,218,030	2,410,070	2,415,504	2,416,482	--	2,416,482
2022	2,744,807	2,963,062	2,968,396	--	--	2,963,062
2023	2,855,271	3,085,143	--	--	--	2,855,271
2024	2,865,961	--	--	--	--	2,865,961

PT Asuransi Jasaraharja Putera

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	287,558	436,467	447,104	463,104	478,211	478,211
2021	286,791	579,975	611,190	643,374	--	643,374
2022	195,916	420,593	445,266	--	--	445,266
2023	250,477	387,020	--	--	--	387,020
2024	171,607	--	--	--	--	171,607

PT Asuransi Jasa Indonesia

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	1,228,417	1,924,517	2,736,588	2,841,311	3,208,718	3,208,718
2021	1,052,767	2,431,646	2,957,473	3,530,966	--	3,530,966
2022	727,493	1,413,335	1,715,902	--	--	1,715,902
2023	642,069	1,235,671	--	--	--	1,235,671
2024	656,761	--	--	--	--	656,761

PT Asuransi Kredit Indonesia

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	2,128,834	2,902,516	3,015,856	3,105,618	3,122,351	3,122,351
2021	2,602,984	3,960,988	4,107,357	4,192,516	--	4,192,516
2022	3,141,229	4,290,256	4,506,205	--	--	4,506,205
2023	4,240,333	5,607,645	--	--	--	5,607,645
2024	4,650,945	--	--	--	--	4,650,945

PT Reasuransi Nasional Indonesia (Treaty)

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2019	--	--	--	--	--	--
2020	130,698	341,210	90,035	--	--	561,943
2021	141,332	602,803	--	--	--	744,135
2022	118,923	316,136	--	--	--	435,059
2023	29,207	--	--	--	--	29,207
2024	13,871	--	--	--	--	13,871

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	PT Reasuransi Nasional Indonesia (Treaty kredit dan jiwa/*Treaty credit & life*)					
	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	734,833	952,156	151,426	155,285	111,562	2,105,262
2021	1,345,063	995,194	561,933	63,647	--	2,965,837
2022	1,573,479	791,596	175,980	--	--	2,541,055
2023	1,151,785	644,992	--	--	--	1,796,777
2024	1,616,430	--	--	--	--	1,616,430

Akumulasi klaim dibayar/ *Cumulative claim paid*	PT Reasuransi Nasional Indonesia (Fakultatif/*Facultative*)					
	Perkembangan tahun ke-/ *Development year*					
Tahun kejadian/ *Year of accident*	1 Rp	2 Rp	3 Rp	4 Rp	5 Rp	Telah dibayar/ *Paid to date* Rp
2020	227,098	755,067	550,563	191,367	75,056	1,799,151
2021	171,676	615,818	388,527	152,331	--	1,328,352
2022	187,088	504,469	494,924	--	--	1,186,481
2023	196,774	264,527	--	--	--	461,301
2024	236,128	--	--	--	--	236,128

Risiko penjaminan keuangan
Risiko utama yang dihadapi Grup dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default risk* dan tingkat *nonperforming financing* (NPF) kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara klaim aktual, pembayaran manfaat dan tanggal klaim dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, besarnya nilai klaim, nilai klaim yang dibayarkan, dan perkembangan klaim jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menutupi kewajiban tersebut.

Financial guarantee risk
The principal risk the Group faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's nonperforming financing (NPF), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual claims, benefit payments and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi *underwriting*, serta pengaturan program penjaminan ulang.

The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation offixed underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.

Operasional Grup didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Grup melakukan proses identifikasi dan seleksi risiko dalam menjamin kredit dengan eksposure risiko yang besar.

The Group's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Group to underwrite and accept large guarantee accounts.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka

To minimise the risk of the guarantee, in the

pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment,* dan *Personality* dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*) yang harus diperhatikan. *Item* yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P dan 5C. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4Ps, are Prospect, Productivity, Payment, and Personality and 5C (Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral). The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for each aspect of the 4Ps and 5Cs. Quantitative prediction is done with a scoring system. Based on the score determined the risk prediction of each guaranteed or a group of guaranteed, or a new product.

Furthermore, to make a decision whether a guarantee application can be approved or not, a committee meeting will be carried out. In accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (risk taker unit) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (risk financing unit). With a decision making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.

Proses bisnis penjaminan ulang yang dilakukan terkoordinasi oleh Kantor Pusat dilakukan sebagai bentuk *transfer risk*. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan beban penjaminan ulang. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Grup harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu dan yang dimasukkan melalui proses reviu keuangan yang ketat agar mendapat persetujuan dari

Centrally coordinated re-guarantee management facilitates appropriate risk transfer and efficient and cost-effective use of external re-guarantee markets. Reinsurers utilised by the Group must fulfill certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, reguarantee is placed with a select Company

senior manajemen akibatnya penjaminan ulang hanya ditempatkan dengan kelompok terpilih hanya dari Grup yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pembayaran klaim yang konsisten dan sesuai juga harus dipastikan. Selain kontrol internal, unit operasional Grup dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit Grup yang secara teratur melakukan audit operasional.

of only the most financially secured and experienced companies in the reguarantee industry. Consistent approach to reserving practices and the settlement of claims are also ensured. In addition to these internal controls, the Group's operating units and functional areas are subject to review by the corporate audit team that regularly carries out operational audits.

Eksposur Grup terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portofolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

The Group's exposure to a concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.

Analisa eksposur

Pada tahun 2025 dan 2024, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Grup diklasifikasikan berdasarkan lini usaha sebagai berikut:

Exposure analysis

In 2025 and 2024, the Group's guarantee risks classified based on line of businesses are as follows:

	2025				
	Beban klaim penjaminan bruto/ *Gross guarantee claim expenses* **Rp**	**Klaim penjaminan ulang/ *Re-guarantee claims*** **Rp**	**Penurunan estimasi liabilitas klaim/ *Decrease estimated claim liablities*** **Rp**	**Beban penjaminan - bersih/ *Guarantee claim expenses - net*** **Rp**	
Kredit	8,574,251	(187,013)	(287,379)	8,099,859	*Credit*
Suretyship	253,351	158,616	(61,106)	350,861	*Suretyship*
	8,827,602	**(28,397)**	**(348,485)**	**8,450,720**	

	2024				
	Beban klaim penjaminan bruto/ *Gross guarantee claim expenses* **Rp**	**Klaim penjaminan ulang/ *Re-guarantee claims*** **Rp**	**Penurunan estimasi liabilitas klaim/ *Decrease estimated claim liablities*** **Rp**	**Beban penjaminan - bersih/ *Guarantee claim expenses - net*** **Rp**	
Kredit	8,574,251	(187,013)	(287,379)	8,099,859	*Credit*
Suretyship	253,351	158,616	(61,106)	350,861	*Suretyship*
	8,827,602	**(28,397)**	**(348,485)**	**8,450,720**	

47. Kontinjensi dan Perikatan / *47. Contingencies and Agreements*

Perseroan

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Tanda Minat No. 167 tanggal 31 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. antara Perseroan dengan anggota Konsorsium Karya. Perseroan memiliki kewajiban kepada Konsorsium Karya atas pengembalian tanda minat senilai Rp1.400.000, pembayaran kewajiban dilakukan secara bertahap kepada masing-masing anggota konsorsium dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran pertama yang terdiri atas : (i)

Company

In accordance with Deed of Settlement of Interest No. 167 dated July 31, 2025, before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., between the Company and the members of the Karya Consortium. The Company has an obligation to the Karya Consortium to repay the deposit in the amount of Rp1,400,000; payment of this obligation will be made in installments to each consortium member, with the following details:

- *First payment, consisting of: (i) the first*

tahap pertama sebesar Rp5.000 kepada masing-masing anggota konsorsium atau total sebesar Rp25.000 yang dibayarkan pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Penyelesaian Tanda Minat tersebut; (ii) tahap kedua sebesar Rp35.000 kepada masing-masing anggota konsorsium karya atau total sebesar Rp175.000 yang dibayarkan pada tanggal 30 November 2025;

- Pembayaran selanjutnya sebesar Rp40.000 per tahun kepada masing-masing anggota konsorsium pada setiap tanggal 30 November untuk periode tahun 2026 hingga 2031.

stage of Rp5,000 to each consortium member (totaling Rp25,000), paid at the signing of the Deed of Settlement of Interest; and (ii) the second stage of Rp35,000 to each consortium member (totaling Rp175,000), paid on 30 November 2025;

- *Subsequent payments of Rp40,000 per year to each consortium member on every 30 November for the period from 2026 to 2031.*

Sampai dengan 31 Desember 2025, Entitas telah melakukan pembayaran pertama tahap pertama dan tahap kedua dengan total sebesar Rp200.000, sehingga sisa kewajiban yang masih terutang kepada Konsorsium Karya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.200.000, yang akan dilunasi sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati. Kewajiban kepada konsorsium karya dicatat pada akun utang usaha dan utang lain-lain.

As of 31 December 2025, the Company has made the first payment covering the first and second stages totaling Rp200,000. Accordingly, the remaining obligation to the Karya Consortium as of 31 December 2025 amounted to Rp1,200,000, which will be settled in accordance with the agreed payment schedule. The obligation to the Karya Consortium are recorded in accounts payable and other payable.

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")
Jasindo memiliki ketidaksepakatan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sehubungan dengan penagihan piutang oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejumlah USD 6.562.788. Sampai saat ini, hal ini masih dalam pemeriksaan.

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")
Jasindo has a dispute with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, in respect of receivable claimed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk amounted to USD 6,562,788. Up until now, this matter is still in investigation.

Jasindo tidak mengakui dan tidak mencatat liabilitas kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, karena Jasindo tidak memiliki dokumen pendukung transaksi yang memadai untuk menyatakan bahwa kewajiban tersebut *valid*.

Jasindo did not recognise nor record a liability to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the consolidated financial statements as of December 31, 2024, because Jasindo does not have adequate transaction supporting documents to declare that the obligations are valid.

PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")
BTIM mengadakan kerjasama dengan bank-bank kustodian yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Standard Chartered Bank – Cabang Jakarta, Citibank N.A., - Cabang Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank

PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")
BTIM entered into agreements with custodian banks i.e., PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Standard Chartered Bank – Jakarta Branch, Citibank N.A., - Indonesia Branch, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank

Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan Deutsche Bank AG – Cabang Jakarta sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif reksadana, dimana BTIM bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola kekayaan reksadana dan memperoleh jasa pengelolaan maksimum sebesar 5% per tahun dari Nilai Aset Bersih reksadana terkait.

CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, and Deutsche Bank AG – Jakarta Branch related to mutual funds Collective Investment Contract, whereby BTIM acts as investment manager that manages mutual fund's assets and earns management fee at maximum of 5% per annum of Net Asset Value of relevant mutual fund.

BTIM melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank maupun non-bank untuk meningkatkan penjualan reksadana sebagai agen penjual dengan imbalan jasa. BTIM membayarkan biaya komisi agen penjual reksadana dengan tarif sebesar maksimum 0,25% - 85,00% dari *management fee* yang diterima BTIM dari reksadana (*sharing fee*).

BTIM entered into agreements with banks and nonbanks to increase sales of mutual funds as sales agent by paying sharing fee. BTIM pays a selling fee for agents to sell mutual funds at the maximum rate of 0.25% - 85.00% from management fee received by BTIM from mutual funds (sharing fee).

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")
Sampai dengan audit laporan keuangan berakhir, masih terdapat pemeriksaan lainnya atas suatu proses bisnis di Askrindo, yang dilakukan oleh regulator atau pemeriksa eksternal lainnya. Namun demikian, Askrindo belum dapat menentukan secara pasti apakah hasil pemeriksaan yang masih berlangsung tersebut dapat berakibat pada adanya proses hukum, penambahan keuntungan/kerugian, tuntutan/ganti rugi dari Pihak Ketiga ataupun hal lainnya yang menyebabkan adanya kerugian keuangan maupun non Keuangan terhadap Askrindo. Sehingga sampai dengan tanggal Laporan Keuangan konsolidasian ini, dampak dari hasil pemeriksaan tersebut belum dapat diperkirakan.

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")
As of the audit conclusion of the financial statements, there are ongoing examinations of certain business process within Askrindo conducted by regulators or other external auditors. However, Askrindo is not yet able to definitively ascertain whether the ongoing examination results may lead to legal proceedings, changes in profit or loss, claims or compensations from third parties, or any other circumstances that could result in financial or non-financial losses to Askrindo. Therefore, as of the date of this consolidated financial report, the impact of these examination results cannot be estimated.

48. Standar Akuntansi Baru

48. New Prospective Accounting Standards

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk 1 Januari 2026 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107

Amendments, revised and annual improvements to standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2026, with early adoption are as follows:

- *Amendments SFAS 109 and SFAS 107*

tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Penyesuaian Tahunan PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; dan
- Revisi PSAK 338: Kombinasi Bisnis Perusahaan Sepengendali tentang Ruang Lingkup dan Penerapan Metode Penyatuan Kepemilikan.

Standar baru, revisi dan amandemen serta interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:
- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- PSAK 119 : Perusahaan Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Amandemen PSAK 119: Perusahaan Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Revisi PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah;
- ISAK 403: Komponen Laporan Keuangan Perusahaan Syariah Yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Perusahaan Privat dan SAK Indonesia Untuk Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah;
- PSAK 413: Penurunan Nilai; dan
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Perusahaan yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Perusahaan Privat (SAK EP).

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

regarding Classification and Measurement of Financial Instruments;
- *Annual Improvements on SFAS 107, SFAS 109, SFAS 110; and SFAS 210; and*
- *Revised SFAS 338: Business Combination of Company Under Common Control regarding The Scope and Application of the Method of Pooling of Interest.*

New, revised and amendment of standards and interpretation of standard which are effective for periods beginning on or after January 1, 2027, with early adoption permitted, are as follows:
- *SFAS 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements;*
- *SFAS 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Amendment SFAS 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Revised SFAS 401: Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements;*
- *ISAK 403: Components of Financial Reports of Sharia Entities That Apply Indonesian SAK for Private Entities and Indonesian SAK for Micro, Small, and Medium Entities;*
- *SFAS 413: Impairment; and*
- *SFAS 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Implementing Indonesian SAK for Private Entities (SAK EP).*

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation of those new standard and amendments to standards.

49. Peristiwa-peristiwa Setelah Periode Pelaporan

49. Events After Reporting Period

a. Perubahan struktur pemegang saham
Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Nomor Akta 22 tanggal 4 Februari 2026, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0022163.AH.01.02, serta telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0099843 dan Surat

a. Changes in ownership structure
Based on the Deed of Amendment to Articles of Association No. 22 dated February 4, 2026, made in presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia dated 7 April 2026 No. AHU-0022163.AH.01.02, and has also obtained the Notification Acceptance Letter for Amendment of Articles of Association No.

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0187072 yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2026 oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

AHU-AH.01.03-0099843 and the Notification Acceptance Letter for Change in Company Data No. AHU-AH.01.09-0187072, both issued on 7 April 2026 by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, the composition of the Company's share capital is as follows:

	2026			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* %	Nilai/ Amount RP	
PT Danantara Asset Management				***PT Danantara Asset Management***
Saham Seri B	92,782,342	99%	92,782,342	*Saham Seri B*
Pemerintah Republik Indonesia				***Pemerintah Republik Indonesia***
Saham Seri A Dwiwarna	937,195	1%	937,195	*Saham Seri A Dwiwarna*
	93,719,537	**100%**	**93,719,537**	

b. Perubahan susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 178 Tahun 2026 /SK.070/DI-DAM/DO/2026 tanggal 16 Maret 2026 dan No.188 Tahun 2026 /SK.074/DI-DAM/DO/2026 tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

b. Changes in Board of Commissioners composition

Based on Decision of the Company's Shareholders No. 178 Year 2026 /SK.070/DI-DAM/DO/2026 dated 16 March 2026 and No. 188 Year 2026 /SK.074/DI-DAM/DO/2026 dated 7 April 2026 regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

	2026	
Dewan Komisaris		***Board of Commisioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ali Ghufron Mukti*)	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Sumiyati	*Commissioner*
Komisaris	Nasrudin	*Commissioner*
Komisaris	Hambra*)	*Commissioner*
Komisaris	Setya Utama*)	*Commissioner*
Komisaris	Undang Mugopal*)	*Commissioner*
Komisaris	Faisal Amir Masduki*)	*Commissioner*

*) Dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan

)In the process of thoe Financial Services Authority's Fit and Proper Test

50. Informasi Tambahan Arus Kas / *50. Supplemental Cash Flows Information*

Rekonsiliasi Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan non-kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Reconciliation of Liabilities from Financing Activity

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes for period ending December 31, 2025 and 2024, with the following details:

	1 Januari/ *January 1, 2025* Rp	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows* Rp	Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes* Rp	31 Desember/ *December 31, 2025* Rp	
Utang bank	2,363,092	(1,391,969)	--	971,123	*Bank loans*
Pinjaman non-bank	268,493	164,515	(159,534)	273,474	*Non-bank loans*
Liabilitas sewa	205,452	(143,000)	79,919	142,371	*Lease liabilities*
Medium Term Notes	1,116,162	(150,000)	620	966,782	*Medium Term Notes*
Utang restrukturisasi	682,256	(90,661)	51,158	642,753	*Restructuring debt*
Pinjaman dari Pemerintah	521,958	(6,200)	36,982	552,740	*Government loans*
Jumlah	**5,157,413**	**(1,617,315)**	**9,145**	**3,549,243**	***Total***

	1 Januari/ *January 1, 2024* Rp	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows* Rp	Perubahan transaksi non kas/ *Non-cash changes* Rp	31 Desember/ *December 31, 2024* Rp	
Utang bank	3,555,359	(1,192,267)	--	2,363,092	*Bank loans*
Pinjaman non-bank	608,949	(340,456)	--	268,493	*Non-bank loans*
Liabilitas sewa	205,452	(174,800)	148,663	179,315	*Lease liabilities*
Medium Term Notes	1,065,416	50,000	746	1,116,162	*Medium Term Notes*
Utang restrukturisasi	711,324	(86,347)	57,279	682,256	*Restructuring debt*
Pinjaman dari Pemerintah	493,128	(6,200)	35,030	521,958	*Government loans*
Jumlah	**6,639,628**	**(1,750,070)**	**241,718**	**5,131,276**	***Total***

51. Informasi Keuangan Tambahan / *51. Supplementary Financial Information*

Kontribusi pajak

Informasi keuangan tambahan menyajikan informasi terkait kontribusi Grup kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-32/DKU.MBU/08/2024. Berikut adalah rincian kontribusi pajak sepanjang tahun 2025 (tidak diaudit) dan 2024:

Tax contribution

The supplementary financial information presents information related to the Group's contribution to the Government of Indonesia as reuired by the Circular Letter of Ministry of State-owned Enterprises of The Republic of Indonesia No.S-32/DKU.MBU/08/2024. Below are details of tax contribution during 2025 (unaudited) and 2024:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pajak penghasilan	1,277,091	1,341,036	*Income tax*
Pajak pertambahan nilai	299,263	414,312	*Value-added tax*
Pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya	29,219	46,652	*Land and building tax and other taxes*
	1,605,573	**1,802,000**	

52. Informasi Keuangan Tersendiri Perseroan / *52. The Company's Separate Financial Statements*

Informasi keuangan Perseroan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which consists of a statement of financial position as of December 31, 2025, as well as statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the year ended on that date, and a summary of accounting policies. Significant and other explanatory information (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information") which is presented as additional information to the

tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

consolidated financial statements, is resented for additonal analysis purposes and is not part of the consolidated financial statements required under Indonesian Financial Accounting Standards.

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

Parent Entity's Financial Information is the responsibility of management and is generated from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

53. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan / *53. Management Responsibility on the Financial Statements*

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 19 Juni 2026.

The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries were completed and authorised for the issuance by the Directors on June 19, 2026.

Lampiran I | ***Attachment I***

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
ASET			***ASSETS***
Kas dan setara kas - bersih	1,324,117	139,249	*Cash and cash equivalents - net*
Investasi - bersih	402,327	1,887,480	*Investments - net*
Piutang subordinasi - bersih	241,196	249,342	*Subordinated loan receivables - net*
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	57,059	60,577	*Accounts receivable and other receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	1,157	4,376	*Investment income receivables - net*
Pajak dibayar dimuka	--	285	*Prepaid taxes*
Investasi pada entitas asosisasi	70,020,779	70,020,890	*Investment in Associate*
Aset tetap - bersih	104,117	90,677	*Fixed assets - net*
Properti investasi	2,545,755	--	*Investment properties - net*
Aset lain-lain	615,662	1,955,203	*Other assets*
JUMLAH ASET	**75,312,169**	**74,408,079**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang usaha dan liabilitas lain-lain	1,124,454	120,787	*Accounts payable and other liabilities*
Akrual	296,274	345,518	*Accruals*
Utang pajak	29,584	13,153	*Taxes payable*
Pinjaman dari Pemerintah	552,740	521,958	*Government loans*
Utang bank	874,023	2,243,600	*Bank loans*
Medium Term Notes	2,016,782	2,016,162	*Medium Term Notes*
Liabilitas imbalan kerja	39,159	41,664	*Employee benefit liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**4,933,016**	**5,302,842**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham			*Share capital*
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham			*Share capital - Nominal amount Rp 1,000,000 (full amount) at par per share*
Modal dasar: 240.000.000 lembar pada tahun 2025 dan 2024			*Authorised capital: 240,000,000 shares in year 2025 and 2024*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			*Issued and fully paid capital:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 93.719.536 saham per 31 Desember 2025			*1 share of Series A Dwiwarna - and 93,719,536 shares of Series B as at 31 December 2025*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 93.719.536 saham per 31 Desember 2024	93,719,537	93,719,537	*1 share of Series A Dwiwarna - and 93,719,536 shares of Series B as at 31 December 2024*
Tambahan modal disetor	(32,451,620)	(32,451,620)	*Additional paid-in capital*
Akumulasi keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	29,000	29,000	*Accumulated gain for change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	19,732	9,280	*Remeasurement of defined benefit plan*
Saldo laba			*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	5,215	5,215	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	9,057,289	7,793,825	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**70,379,153**	**69,105,237**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**75,312,169**	**74,408,079**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Lampiran II | ***Attachment II***

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA PARENT ENTITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
Hasil investasi - bersih	2,121,811	2,328,021	*Investment income - net*
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	**2,121,811**	**2,328,021**	***TOTAL OPERATING INCOME***
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban umum dan administrasi	(796,303)	(900,124)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	(381,714)	(469,871)	*Finance costs*
JUMLAH BEBAN USAHA	**(1,178,017)**	**(1,369,995)**	***TOTAL OPERATING EXPENSES***
Pendapatan lain-lain - bersih	330,465	62,919	*Other income - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**1,274,259**	**1,020,945**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	(10,795)	(3,952)	*Income tax expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**1,263,464**	**1,016,993**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain			***Other comprehensive income***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	12,000	*Unrealised gain on fair value through other comprehensive income marketable securities*
Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak	10,452	244	*Remeasurement of defined benefit plan net of tax*
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	**10,452**	**12,244**	***Other comprehensive income for the year, net of tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1,273,916**	**1,029,237**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Lampiran III | ***Attachment III***

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
(PERSERO) ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions Rupiah,
unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Akumulasi keuntungan perubahan nilai wajar atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Accumulated gain for change in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities* Rp	Pengukuran kembali imbalan pascakerja/ *Remeasurement of post-employment benefits* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp		
Transaksi dengan pemilik:								*Transaction with owners:*
Penerbitan saham	3,556,000	--	--	--	--	--	3,556,000	*Share issuance*
Laba komprehensif tahun berjalan:								*Comprehensive income for the year:*
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	1,016,993	1,016,993	*Net profit for the year*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	--	12,000	--	--	--	12,000	*Unrealised gains on fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	--	--	--	244	--	--	244	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo per 31 Desember 2024	**93,719,537**	**(32,451,620)**	**29,000**	**9,280**	**5,215**	**7,793,825**	**69,105,237**	***Balance as at 31 December 2024***
Transaksi dengan pemilik:								*Transaction with owners:*
Penerbitan saham	--	--	--	--	--	--	--	*Share issuance*
Laba komprehensif tahun berjalan:								*Comprehensive income for the year:*
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	--	1,263,464	1,263,464	*Net profit for the year*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--	*Unrealised gains on fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	--	--	--	10,452	--	--	10,452	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo per 31 Desember 2025	**93,719,537**	**(32,451,620)**	**29,000**	**19,732**	**5,215**	**9,057,289**	**70,379,153**	***Balance as at 31 December 2025***

Lampiran IV | ***Attachment IV***

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA PARENT ENTITY
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024 (Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas:			***Cash received:***
Penerimaan kas dari kegiatan manajer investasi, komisi perantara perdagangan efek, dan jasa penasihat keuangan	--	238	*Cash received from investment manager activities, brokerage comissions, and financial advisory services*
Penerimaan kas lainnya	3,819	9,993	*Cash received from others*
Pengeluaran kas:			***Cash disbursement:***
Pengeluaran kas untuk pajak penghasilan badan	(3,686)	(2,458)	*Cash disbursement for corporate income tax*
Pengeluaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(343,938)	(387,036)	*Cash disbursement to supplier and other third parties*
Pengeluaran kas lainnya	(530,395)	(415,622)	*Cash disbursement for others*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(874,200)**	**(794,885)**	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pencairan investasi	2,656,319	2,028,044	*Redemption of investments*
Penempatan investasi	(975,202)	(2,136,776)	*Placement of investments*
Penerimaan hasil investasi	95,287	115,634	*Investment income received*
Pembelian aset tetap dan properti investasi	(375,619)	(45,559)	*Acquisition of fixed assets and investment properties*
Pembayaran uang muka pembelian Aset Cilandak	--	(94,800)	*Payment of down payment for purchasing Aset Cilandak*
Divestasi/(investasi) pada anak perusahaan	83	(3,773,000)	*Divestment/(investment) in subsidiary*
Penjualan saham	--	217,000	*Sale of shares*
Penerimaan dividen dari entitas anak	2,041,414	2,781,903	*Dividend received from subsidiaries*
Penerimaan bunga dari pinjaman subordinasi	2,367	2,376	*Proceeds from interest paid on subordinated loan*
Pengeluaran untuk aktivitas investasi lainnya	97	(234,403)	*Payment for other investment activities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**3,444,746**	**(1,139,581)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran utang bank	(1,369,577)	(1,212,472)	*Payment of bank loans*
Pembayaran bunga utang bank	(140,540)	(255,662)	*Interest paid on bank loans*
Pembayaran pinjaman dari Pemerintah	(6,200)	(6,200)	*Payment of Government loans*
Pembayaran bunga *Medium Term Notes*	(180,000)	(180,000)	*Interest paid on Medium Term Notes*
Penerimaan dari penerbitan saham	--	3,556,000	*Proceeds from issuance of shares*
Pembayaran liabilitas sewa	(30,063)	(23,736)	*Payment of lease liabilities*
Aktivitas pendanaan lainnya	340,702	(43,694)	*Other financing activities*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(1,385,678)**	**1,834,236**	***Net cash flows provided from financing activities***
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	**1,184,868**	**(100,230)**	***Net (decrease)/ increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	**139,249**	**239,479**	***Cash and cash equivalents at beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**1,324,117**	**139,249**	***Cash and cash equivalents at end of the year***

2025
Annual Report
Laporan Tahunan

ADVANCING BEST PRACTICES TO FOSTER SYNERGY IN THE INSURANCE AND GUARANTEE ECOSYSTEM

Memperkokoh Praktik Terbaik untuk Mendorong
Sinergi Ekosistem Asuransi dan Penjaminan

Indonesia Financial Group

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

(021) 50890929
info@ifg.id